



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Prosiding
Seminar Nasional Lustrum Ke-2
Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada
“Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)”

Yogyakarta, 8 Oktober 2016

Edisi Revisi

Penyunting
Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, M.S.
Subejo, S.P., M.Sc., PhD
Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih
Dr. Ir. Roso Wicaksono, M.S
Dr. Ir. Rahima Kaliky, M.Si.

SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2017



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Prosiding

Seminar Nasional Lustrum Ke-2

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

“Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”

Edisi Revisi Cetakan 2017

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Seminar Nasional Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Prosiding Seminar Nasional Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada “Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” Yogyakarta, 8 Oktober 2016/Penyunting Sunarru....(et al),--. Yogyakarta, Sekolah Pascasarja Universitas Gadjah Mada, 2016

957 hlm: 17 x 25 x 5 cm

ISBN 978-602-8683-15-9

Editor Pelaksana

Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc

Titis Puspita Dewi, S.Sos

Eka Nurjanah, SP., M.Sc

Mesalia Kriska, SP., M.Sc

Desain dan Tata letak

Miftah Faridl W., S.I.Kom

Mukti Ahmad Nurcahya, SP

Diterbitkan oleh :

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta

Tlp: (0274) 533975, 564239



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas karuniaNya Prosiding Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dapat diterbitkan. Seminar dengan tema “Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2016 di Auditorium Sekolah Pascasarjana UGM. Seminar ini diselenggarakan sebagai media sosialisasi hasil penelitian dan pertukaran gagasan akademik serta pengalaman praksis di bidang penyuluhan dan komunikasi pembangunan.

Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pun dijadikan sebagai media tukar-menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah mengenai penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung sumberdaya manusia, serta pembangunan masyarakat perdesaan dalam menghadapi persaingan global di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai hasil penelitian dan pengalaman praksis mengenai penyuluhan dan komunikasi pembangunan dari berbagai instansi dan universitas terkait bidang pembangunan.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengembangan penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Akhir kata kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada seluruh rangkaian Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Universitas Gadjah Mada, diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Yogyakarta, Oktober 2016

Panitia



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

KATA PENGANTAR EDISI REVISI

Prosiding Seminar Nasional Lustrum Ke-2 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada “Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” telah diterbitkan di akhir tahun 2016. Kami menyadari terdapat beberapa kekurangan pada prosiding tersebut dan kami merasa perlu untuk dilengkapi. Pada terbitan awal prosiding belum memuat beberapa informasi penting yakni materi pemakalah utama, rumusan seminar nasional, rangkuman diskusi, dan daftar peserta seminar, serta beberapa makalah penunjang yang belum tersunting secara maksimal.

Oleh karena itu, kami merasa perlu menerbitkan Prosiding Seminar Nasional kembali dalam edisi revisi dengan melengkapi informasi tersebut dan perbaikan makalah penunjang. Semoga Edisi Revisi Prosiding Seminar Nasional ini memberi manfaat optimal bagi penggunaannya.

Yogyakarta, 27 April 2017

Panitia



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

LAPORAN PANITIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang terhormat: Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Bapak Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev.

Yang kami hormati:

1. Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili
2. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika; Ibu. Ir. Woro Indah Widiastuty, M.T.
3. Wakil Direktur Bidang Akademik, Pengembangan, dan Kerjasama, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada; Prof. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D
4. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian kementerian Pertanian; Drs. Gunawan Yuliyanto, M.M., M.Si
5. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian; Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag
6. Kepala BPTP Yogyakarta; Dr. Joko Pramono
7. Ketua STTP Yogyakarta
8. Ketua KAGAMA Bidang organisasi; Ir. Anton Mart Iriyanto, M.S
9. Ketua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariyadi, M.S
10. Bapak, ibu tamu undangan, peserta seminar, dan hadirin yang kami hormati dan muliakan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, dan selamat sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar nasional dalam rangka Lustrum kedua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dalam keadaan sehat walafiat.

Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan. Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi pendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat kemandirian dan daya saing. Dunia sudah tidak lagi ada sekat antar negara, termasuk Indonesia di tengah negara-negara ASEAN, dimana ada kebebasan yang luas keluar masuk barang dan jasa berupa produk-produk hasil pertanian, industri, teknologi, dan tenaga kerja serta investasi. Kebebasan tersebut bisa menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kita belum menyiapkan diri dengan baik di dalam era dunia tanpa sekat ini. Momentum hadirnya MEA perlu ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing dengan kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Untuk itulah dalam rangka Lustrum ke-2, **Sepuluh Tahun Mengabdikan untuk Negeri**, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang telah meraih akreditasi A untuk program S2 dan S3, dan telah melahirkan 33 doktor dan 88 Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, menyelenggarakan seminar



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

nasional dengan mengangkat tema “**Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**”.

Dalam Seminar Nasional ini Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Kementerian Pertanian akan menyajikan materi tentang “Strategi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Mendukung Daya Saing Pertanian di Era MEA” selanjutnya Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memaparkan materi tentang “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia di Era MEA” kemudian, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah akan memaparkan “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Persaingan Global di Era MEA”.

Selain itu, dalam seminar nasional ini juga akan dipaparkan 130 makalah penunjang terseleksi yang akan disajikan oleh para peneliti, dosen, dan penyuluh, dari 22 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Keluaran Seminar nasional ini berupa Rumusan Seminar dan Prosiding Seminar Nasional.

Hadirin yang kami Hormati, penyelenggaran seminar nasional ini juga didukung oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPTP Yogyakarta, Badan Litbang Pertanian, Kedaulatan Rakyat (KR) Grup, RRI Yogyakarta, OJK Yogyakarta, PLN Yogyakarta, dan JNE Yogyakarta.

Di tengah-tengah seminar Nasional ini, akan dilaksanakan juga pelantikan kepengurusan KAGAMA PKP oleh KAGAMA Pusat berdasar Surat Keputusan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Nomor: 044/KPTS/PP-KAGAMA/IX/2016, tentang Susunan Pengurus KAGAMA Komunitas Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Sekolah Pasca Sarjana Masa Bakti 2016-2021.

Tiba waktunya nanti, kami mohon dengan hormat kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Pengembangan, dan Kerjasama, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada **Prof. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D** berkenan memberi sambutan, sekaligus membuka dengan resmi acara seminar nasional ini.

Kepada para pemakalah penunjang, kami mengucapkan selamat berseminar mencurahkan pemikiran konstruktif di bidang masing-masing sebagai bagian dari kontribusi pemikiran untuk mengisi pembangunan bangsa dan negara tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan menuntun setiap derap langkah kita dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara tercinta Reubublik Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ketua Panitia

Dr. Ir. Rahima Kaliky, M.Si.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Salam Sejahtera,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segenap jajaran pengelola, staf dosen, serta mahasiswa dan alumni Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP) Sekolah Pascasarjana UGM telah dapat merayakan Dies Natalis yang kedua (2006 hingga 2016) dengan penuh suka cita kebersamaan dan kekeluargaan. Pada usia yang ke-10 tahun, Program Studi PKP telah berhasil mencetak 33 Doktor dan 88 *Master of Science* Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan yang saat ini tersebar di seluruh nusantara dan luar negeri. Dalam semangat pengabdian “Mengabdikan untuk Negeri”, perjuangan para pengelola dan staf, dosen dan karyawan, mahasiswa dan alumni, telah mengangkat Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan pada derajat akreditasi yang tertinggi, Program Studi S2 dan S3 memiliki akreditasi A pada BAN-PT Dikti.

Dalam rangka Dies Natalis lustrum kedua tersebut juga telah diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” dengan menghadirkan pembicara kunci Gubernur Jawa Tengah (yang mewakili), Kepala Badan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI, dan Staf Kementerian Menkominfo RI. Seminar nasional diikuti oleh mahasiswa dan alumni serta Dosen Pascasarjana PKP UGM, serta masyarakat umum yang berprofesi sebagai dosen, peneliti, birokrat, penyuluh, komunikator pembangunan, dan sebagainya.

Prosiding ini merupakan kumpulan tulisan para peserta seminar yang berasal dari berbagai penjuru tanah air dan bahkan dari luar negeri. Melalui prosiding ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan akademik dari sisi penyuluhan dan komunikasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang sedang mengalami era persaingan dan kompetisi global era MEA. Bahkan lebih dari itu, kumpulan tulisan peserta seminar ini dapat menjadi inspirasi ataupun dasar dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Akhir kata, semoga Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana UGM dapat lebih meningkatkan kualitas dan semakin besar kontribusinya dalam rangka pembangunan bangsa, atas dukungan segenap mahasiswa dan alumni serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 8 Oktober 2016

Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi
Ketua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

RUMUSAN HASIL SEMINAR NASIONAL STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dalam rangka Lustrum II (2006-2016) Program Studi S2/S3 Penyuluhan
dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Auditorium SPS UGM Yogyakarta, 8 Oktober 2016

a. **Posisi Strategis dan Peran Penting Penyuluhan Pembangunan**

Penyuluhan pembangunan memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah SDM aparatur sebagai penggerak pembangunan yaitu petugas penyuluh pembangunan. Penyuluh pembangunan sebagai salah satu profesi harus dapat menjalankan tugasnya dalam bentuk program dan aktivitas dengan cara yang profesional sehingga mampu menghasilkan *output*, *outcome*, dan *impact* yang jelas serta terukur.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluh pembangunan secara berkelanjutan perlu didukung oleh supervisi penyuluh spesialis. Sistem rekrutmen penyuluh pembangunan juga perlu dilakukan dengan pola yang standar, jelas, dan akuntabel. Standarisasi kapasitas penyuluh pembangunan melalui sertifikasi profesi penyuluh juga menjadi strategi yang tepat untuk dikembangkan pada berbagai bidang penyuluhan pembangunan.

Penyuluh pembangunan sebagai pilar kebangkitan bangsa melalui pendidikan non-formal semestinya menjadi komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku pembangunan. Penyuluhan menjadi investasi bagi kemakmuran dan martabat penyuluhan berfungsi menempatkan manusia sebagai aset utama kehidupan berbangsa yang cerdas, bermartabat, dan berkemakmuran

b. **Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan**

Kelembagaan penyuluhan sebagai tulang punggung implementasi dan pengelolaan penyuluhan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM pelaku pembangunan memiliki peran dan nilai strategis baik di tingkat pusat maupun daerah. Status dan posisi kelembagaan penyuluhan pada berbagai level birokrasi perlu didesain dengan tepat sehingga dapat menjadi mesin penggerak penyuluhan pembangunan yang efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna.

Dalam konteks pembangunan pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan merupakan ujung tombak yang strategis karena dapat menjadi *homebase stakeholder* pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan lingkungan.

c. **Partnership Penyuluhan Pembangunan**

Sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan, kemitraan (*partnership*) implementasi penyuluhan pembangunan akan semakin dibutuhkan



pada masa mendatang sebagai wujud kontribusi dan partisipasi nyata dari masing-masing *stakeholder* utama penyuluhan (pemerintah, swasta, dan swadaya/masyarakat)

Partnership penyuluhan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dapat dibangun pada berbagai level baik di tingkat internasional, nasional, maupun daerah. Peran penyuluh publik (penyuluh pemerintah) tetap strategis sebagai aktor pembangunan yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik termasuk menjadi mediator ketika terjadi konflik kepentingan antara penyedia penyuluhan di luar pemerintah (swasta dan swadaya).

Penyuluhan pembangunan mengalami tantangan yang semakin kompleks, salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technologies* (ICTs) dalam bidang penyuluhan yang secara luas dikenal sebagai "*cyber extension*". Pengembangan TIK di Indonesia sangat potensial dengan pertimbangan: jumlah petugas penyuluh terbatas, teknologi informasi berkembang pesat, literasi masyarakat terhadap media semakin baik dan kondisi wilayah kepulauan yang tersebar, serta kapasitas jangkauan yang luas. Selain prospektif, pengembangan TIK di Indonesia pun menghadapi kendala antara lain: infrastruktur TIK, kapasitas SDM, jangkauan elektrifikasi dan telekomunikasi, ketersediaan materi, pembiayaan dan lain sebagainya.

d. Pergeseran Paradigma Komunikasi Pembangunan

Pemaknaan komunikasi pembangunan dalam proses pembangunan telah mengalami pergeseran dari pemaknaan sebagai proses transfer informasi menjadi proses pertukaran pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui proses dialog dan pemanfaatan media untuk mendorong terjadinya tindakan kolektif menuju perubahan berkelanjutan (*sustain changes*) sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Substansi komunikasi pembangunan mencakup beberapa aspek: (1) saling bertukar informasi tentang pemecahan masalah, (2) melibatkan antar generasi dalam mobilitas dan empati, (3) meningkatkan aspirasi pihak terlibat, (4) mengajarkan keterampilan baru, dan (5) merangsang tumbuhnya partisipasi lokal.

Dua pendekatan dasar komunikasi pembangunan: (1) monologis dan (2) dialogis. Dalam perkembangan beberapa dekade terakhir muncul cara pandang baru atas konseptualisasi dan praktik komunikasi pembangunan dengan pendekatan "*multitrack communication*" yang merupakan kombinasi atas cakupan, karakteristik dan kekuatan dua perspektif komunikasi ke dalam model yang lebih homogen dan terintegrasi. Dalam pendekatan komunikasi yang bersifat monologis atau pendekatan difusi, tujuan komunikasi adalah perubahan pada level kesadaran, pengetahuan, sikap, dan tujuan akhir adalah perilaku atau praktik pada kelompok atau orang yang spesifik.

Dalam pendekatan komunikasi yang bersifat dialogis, cakupan utama terkait dengan pelibatan *stakeholders* dalam menilai kemungkinan resiko, mengidentifikasi peluang, mencegah problem, dan mengidentifikasi dan konfirmasi terhadap perubahan yang diinginkan. *Multitrack communication*



approach memerlukan “komunikasi berbasis dialog pada tahap awal atau inisiatif” pada berbagai tujuan dan sektor pembangunan yang akan diintervensi. Setelah tahap awal, selanjutnya pendekatan dengan *multitrack* menggunakan beragam pendekatan yang sesuai dengan situasi. Variasi teknik yang dapat dikembangkan antara lain mencakup: diseminasi informasi, pemasaran sosial, lobi, *edu-tainment*, mobilisasi komunitas, dll.

e. Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Era MEA

Strategi komunikasi pembangunan yang mencakup semua lapisan mulai dari level individu, komunitas, birokrasi pemerintahan hingga level nasional dan internasional dapat dirancang melalui beberapa strategi antara lain: (1) *Behavioral Change Communication* (BCC), (2) *social mobilization* dan (3) *advocacy*.

Strategi komunikasi yang efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks implementasi MEA, partisipasi penuh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan sangat penting untuk mendukung kapasitas dan daya saing sektor pembangunan dan daya saing bangsa.

Komunikasi pembangunan yang efektif dapat mendorong peningkatan partisipasi *stakeholders* mulai dari partisipasi pasif, partisipasi konsultatif, partisipasi kolaboratif sampai dengan partisipasi yang mampu memberdayakan (*empowered participation*) yang memberikan ruang pada *stakeholders* untuk memiliki kontrol atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang tersedia di lingkungan masyarakat setempat.

Karakteristik, akses sumberdaya dan kapasitas masyarakat cukup beragam, oleh karena itu, pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam model pembagian peran antara pemerintah dengan masyarakat akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada kondisi awal, partisipasi masyarakat minimal dan dominasi dari pemerintah sedangkan pada tahap pematangan, partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam pembangunan akan lebih dominan, sementara pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator berbagai program pembangunan.***

Perumus,

Subejo, SP., M.Sc., Ph.D.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDISI REVISI	iv
LAPORAN PANITIA	v
SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	vii
RUMUSAN HASIL SEMINAR NASIONAL	viii
MAKALAH UTAMA	1
MAKALAH PENUNJANG	9
Tema 1	
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mendukung Kemandirian dan Daya Saing di Era MEA.....	9
PEMBINAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN KELUARGA DI PROVINSI ACEH Nazariah dan Basri AB.....	10
PROYEKSI DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN RADIO REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM KONSTELASI MEA Gontom C. Kifli	18
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PETANI TERNAK MELALUI PENDAMPINGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA SAPI POTONG Rika Jayanti Malik dan Eko Kardiyanto	28
PERSEPSI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN TERHADAP PROGRAM UPAYA KHUSUS PADI JAGUNG DAN KEDELAI Ade Intan Christian, Subejo, Dyah Woro Untari.....	37
ANALISIS TINGKAT PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI PTT PADI PADA KAWASAN DAN NON KAWASAN PENGEMBANGAN PADI Siti Sehat Tan dan Rita Indrasti.....	46
PERAN PENDAMPING PROGRAM DALAM MENENTUKAN KUALITAS KREDIT BANTUAN MODAL BLM-PUAP DI JAWA TENGAH Wahyudi Hariyanto dan Parti Khosiyah.....	58
TINGKAT PENGETAHUAN WANITA TANI MENGENAI MENU GIZI SEIMBANG KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Kelompok Wanita Tani) Dina Lesmana dan Alfa Raudah.....	68
PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI PADA SEKTOR PERIKANAN INDONESIA Praptono Guno Adi	85
PENGUASAAN TEKNOLOGI PETANI DALAM USAHATANI KAKAO DAN KAMBING DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TTP) NGLANGGERAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL Ari Widyastuti dan Gunawan.....	95



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

EKSISTENSI	PENYULUH	AGAMA
DALAM MEMBANGUN HARMONISASI KEBERAGAMAAN (Studi Kasus Penyuluh Agama Kota Bogor)		
Hasan Sazali.....		105
PERAN PENYULUH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KELOMPOK TANI MANGGA GEDONG GINCU		
Rani Andriani Budi Kusumo, Anne Charina, Dika Supyandi		113
PROFIL SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Rahima Kaliky		121
PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MANGGA GEDONG GINCU DALAM MENGHADAPI MEA		
Anne Charina, Rani Andriani Budi Kusumo, Dika Supyandi		132
KAJIAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN PADA ERA MEA DI WILAYAH PENGEMBANGAN KOPI RAKYAT KECAMATAN SILO, JEMBER, JAWATIMUR		
Teguh Hari Santosa dan Oktarina		139
ANALISIS PENERAPAN KOMPONEN TEKNOLOGI PADA LAHAN RAWA PASANG SURUT DI KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN		
Siti Sehat Tan dan Lintje Hutahean.....		146
PENTINGNYA MEREK BAGI PRODUK PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYASAING KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA		
Adil Fadillah, Komalawati.....		156
EFEKTIFITAS PENYULUHAN DALAM Mendukung PERTANIAN ORGANIK DI KELOMPOK TERNAK GENDONGAN KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO		
Bekti Nur Utami , Deha Purwoko.....		164
PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PERBAIKAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM MENGHADAPI MEA		
Cut R. Adawiyah, S. Rusdiana, dan U. Adiati		173
PERAN PETANI DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI SEBAGAI REALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN		
Cut R. Adawiyah dan S. Rusdiana		182
PEMAHAMAN PETANI TERHADAP PENGENDALIAN HAMA TIKUS TERPADU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Subagiyo dan Arlyna Budi Pustika		196
ANALISA DAYA SAING DAN PELUANG EKSPORT WORTEL DI KELOMPOK TANI KATATA, PANGALENGAN, BANDUNG, JAWA BARAT		
Muhammad Arief Budiman		209
KAJIAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PETANI DI JAWA TENGAH		
Sapja Anantanyu, Suwanto, Sutarto, Arip Wijianto		215



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERAN KELEMBAGAAN KELOMPOK DALAM Mendukung PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG.....	
Sri Budhi Lestari.....	223
TANTANGAN PERKEBUNAN KARET UNTUK Mengatasi KELANGKAAN TENAGA PENYADAP DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	
Akhmad Rouf, Mudita Oktorina Nugrahani, Yoga Bagus Setya Aji.....	230
DIVERSIFIKASI EKONOMI MASYARAKAT PETANI BERBASIS POTENSI BIOFARMAKA DI KABUPATEN KLATEN DI ERA MEA	
Sri Marwanti dan Pardono	238
PENYULUHAN ERA MODERN MELALUI SDMC	
Septi Wulandari, Martina Sri Lestari, Yuliantoro Baliadi	246
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBERDAYAAN USAHA SAPI PERAH RAKYAT DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SUSU	
Mukson, M. Handayani dan H. Setiyawan	255
PERAN KELOMPOK DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PETANI APEL (Studi Kasus Petani Apel di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)	
Acep Hariri, Sunarru Samsi Hariadi, Roso Witjaksono	264
POLA TANAM UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN PERTANIAN DI DAERAH RAWA LEBAK SUMATERA SELATAN	
Waluyo	272
KESIAPAN PETANI DAN PERAN PENYULUH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR	
Wahyu Windari, Andi Warnaen, dan Nurlaili	280
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN PADA UKM PANGAN LOKAL : KAJIAN PUSTAKA	
Muhammad Fajri.....	288
KERAGAAN IMPLEMENTASI PENYULUHAN INOVASI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI, JAGUNG DAN KEDELAI DI LAMPUNG	
Slameto	296
KETAHANAN SOSIAL EKONOMI SEBAGAI JAWABAN KREATIF TERHADAP KUALITAS SOSIAL KELOMPOK TANI DALAM MENGHADAPI MEA	
Hikmah Nur Annisa	309
PROSPEK PENGEMBANGAN AYAM KUB Mendukung KEMANDIRIAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN	
Budi Setyono.....	317
PERSEPSI KWT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG Mempengaruhi TINGKAT ADOPSI MODEL-KRPL SERTA KEERATAN HUBUNGANNYA	
Wiendarti I Werdhany ¹ , Murwati ¹ , Kurnianita ¹ , Adhi Surya Perdana ²	325



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRATEGI PEMBINAAN BUDIDAYA PETANI PADI SAWAH SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE MELALUI KEKUATAN MODAL SOSIAL MENGHADAPI ERA MEA Yolanda Holle dan Amestina Matualage.....	334
PENERAPAN SISTEM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI Shinta Anggreany dan Ardhiyan Saputra.....	342
PERUBAHAN PERILAKU PETANI DALAM PENERAPAN “SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION” DI DESA SITU ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR Elih Juhdi Muslihat, Yul Harry Bahar dan Lindon Berry Pangwalahew	349
STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DENGAN PEMASARAN SOSIAL (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Suryatmajan Kota Yogyakarta) Nurasih Shamadiyah dan Rahima Kaliky	357
MODEL PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI DI UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER Devi Arieni, dan Tanti Kustiari.....	365
KEEFEKTIFAN METODE DEMPLOT PADA SOSIALISASI TEKNOLOGI BUDIDAYA KENTANG RAMAH LINGKUNGAN DI DESA TLAHAB KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG Sherly Sisca Piay dan Nur Fitriana	373
AKSESIBILITAS PETANI TERHADAP INFORMASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TIKUS TERPADU MELALUI MEDIA KELOMPOK Sylvatra Puspita Sari, Subejo, dan Roso Witjaksono.....	381
PERAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI MELALUI ADOPSI INOVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN PRAMBANAN Diah Fitria Widhiningsih, Sunarru Samsi Hariadi, dan Roso Witjaksono	388
RESPONS PETANI KEDELAI HITAM <i>MALLIKA</i> TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN PT. UNILEVER DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO Ria Widyaningrum, Dyah Woro Untari, dan Subejo	396
STRATEGI PEMBERDAYAAN SANTRI PESANTREN KAHUDUL ULUM PENAJUNG DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN Ratna Widiyati.....	406
RESPONS PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN TERHADAP PROGRAM UPAYA KHUSUS PADI JAGUNG DAN KEDELAI DI KABUPATEN SLEMAN Ani Dwi Wimatsari, Subejo, Roso Witjaksono.....	412



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PAPUA	
Detia Tri Yunandar	420
RELASI AGAMA DAN PETANI DI DESA KURIPAN KABUPATEN WONOSOBO	
Najmu Tsaqib Akhda	428
UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING SAPI POTONG MELALUI BIOINDUSTRI INTEGRASI PADI-SAPI DI KABUPATEN BANTUL	
Kurnianita Triwidyastuti, Erna Winarti dan Ari Widyastuti	435
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH KEDELAI MELALUI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PEDESAAN	
Chanifah, J. Triastono dan R. K. Jatuningtyas.....	444
TEMA 2	
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era MEA	455
REGULASI PENYULUHAN PERTANIAN, TITIK KRITIS DAN IMPLEMENTASINYA DI KALIMANTAN BARAT	
Gontom C. Kifli	456
KOMPLEKSITAS <i>NEW MEDIA</i> DALAM BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETTAWA (PE) DI KABUPATEN PURWOREJO	
Tatag Handaka, Hermin Indah Wahyuni, Endang Sulastri, Paulus Wiryono	469
KOMUNIKASI STRATEGIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN LAHAN GAMBUT	
Arifudin.....	477
PENGUATAN KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DALAM PENGGUNAAN PESTISIDA NABATI DI KABUPATEN KOLAKA	
M. Najib Husain	487
ANALISIS DETERMINASI ADOPSI E-COMMERCE DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN ALAS KAKI DI CIOMAS KABUPATEN BOGOR	
Sulistiono dan Mumuh Mulyana.....	496
STRATEGI PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK USAHA MANDIRI DI KOTA KENDARI	
Jumrana	504
MODEL KOMUNIKASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
Cut Alma Nuraflah	514
PERSEPSI DAN PREFERENSI PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI JAJAR LEGOWO DI KABUPATEN PEKALONGAN	
Endah Nurwahyuni, Selvia Dewi Anomsari, Setyo Budiyo	523



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

ADOPSI PETANI TERHADAP TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI DI KABUPATEN PEKALONGAN Endah Nurwahyuni, Selvia Dewi Anomsari, Setyo Budiyanto	534
PERAN PENYULUH SEBAYA DALAM MEMBENTUK PERILAKU PREVENTIF KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KABUPATEN BANYUMAS Agoeng Noegroho, Sunarru Samsi Hariadi, Paulus Wiryono Priatamtama.....	546
TINGKAT PERILAKU PETANI KEDELAI MELALUI PENDEKATAN PTT DI KAMPUNG SANGGARIA DISTRIK ARSO I KABUPATEN KEEROM Septi Wulandari, Sri Rahayu D. Sihombing, Syafruddin Kadir, Sitti Raodah Garuda	555
KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN (Studi Kasus Diseminasi Budidaya Kentang Ramah Lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung) Nur Fitriana, Sherly Sisca Piay.....	568
TINJAUAN EMIK DINAMIKA PERTANIAN DI ERA OTONOMI DI KABUPATEN MUNA BARAT La Mani, Dwiningtyas Padmaningrum	574
<i>RURAL SOCIETY DEVELOPMENT STRATEGY CONFRONT GLOBAL COMPETITION IN THE ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Ben Ibratama.....	593
PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN BENCANA KEKERINGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BINANGA LUMBUE KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN Ayu Adriyani, Despry Nur Annisa Ahmad.....	602
PERBANDINGAN KONTRIBUSI SURAT KABAR LOKAL DENGAN NASIONAL DALAM PEMBERITAAN PERTANIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Paksi Mei Penggalih, Subejo, dan Harsoyo.....	610
KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM MENGGAGAS TIGA DESA UMKM DI KABUPATEN CIREBON Nurul Chamidah, M.I.Kom, Resti Titis Purbasari, Agung Sulistio.....	617
KOMUNIKASI TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PRIMA DI PUSKESMAS Ida Wiendijarti.....	631
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DARI PESATNYA PERKEMBANGAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN MELALUI PERDA NO 18 TAHUN 2012 Clara Shinta Paskasari.....	637
PENGUATAN MODAL SOSIAL PETANI MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA BAWANG MERAH DI LAHAN PASIR PANTAI KABUPATEN BANTUL Roso Witjaksono, Supriyati.....	647



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tema 3

Pembangunan Masyarakat Perdesaan dalam Menghadapi Persaingan Global di Era MEA.....	659
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KORBAN KEKERASAN DI PONOROGO	
Muhamad Fajar Pramono	660
KEMANDIRIAN EKONOMI SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DI DESA REJODADI KECAMATAN CIMANGGU CILACAP	
S. Bakti Istiyanto, Nuryanti.....	669
PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM MENGIKUTI KETENTUAN ADAT PERTANIAN DI ACEH	
Andrian WiraSyah Putra, Sunarru Samsi Hariadi, Subejo.	680
PERAN SEKTOR PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI ERA GLOBAL	
Toti Rahayu.....	694
STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI MUDA KOPI WIRAUSAHA DI KABUPATEN SIMALUNGUN	
Titik Sumarti, Rokhani, dan Sriwulan Ferindian ³	705
MEMBANGUN KEBERDAYAAN PEMULUNG BERBASIS ASET DI ERA PASAR BEBAS (MEA)	
Tri Prasetijowati dan Ita Kusuma Mahendrawati	716
MENUJU PERGESERAN PARADIGMA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA	
Subejo.....	731
STRATEGI KOMUNIKASI BERBASIS SUMBERDAYA KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PROGRAM SIMANTRI DI BALI	
I Dewa Putu Oka Suardi	745
PENGARUH MEDIA KOMIK TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG MANFAAT TELUR DI KELURAHAN NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG	
Sriroso Satmoko dan Siwi Gayatri.....	759
CONTRACT FARMING SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN PETANI KECIL DI ERA MEA	
Komalawati.....	769
CERTIFICATION STRATEGIES SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA DESA DALAM MENGHADAPI MEA	
Sutiyono.....	778
STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENGHADAPI ERA MEA	
S. Djuni Prihatin	787



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REVITALISASI PERAN KELUARGA DALAM PENANAMAN NILAI NASIONALISME DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA): TINJAUAN TERHADAP HASIL-HASIL PENELITIAN Agus Ganjar Runtiko.....	794
PETANI SAWIT DI HADAPAN MEA DAN STRATEGI KEBUDAYAAN: STUDI LEVEL MIKRO PADA PETANI PLASMA DI KECAMATAN LONG IKIS, KALIMANTAN TIMUR Sukpti Wartiharjono	802
ANALISIS EFEKTIVITAS TEKNIK INTERVENSI PENGEMBANGAN PEREMPUAN PELAKU USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Suminah dan Sapja Anantanyu.....	812
PARTISIPASI RUMAH TANGGA DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI M. Zulkarnain. Y, Subejo, Slamet Hartono.....	822
IDENTIFIKASI POTENSI ASET RUMAH TANGGA MISKIN BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PENDEKATAN <i>SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK</i> Dini Yuniarti, Lestari Sukarniati, Arif Rahman Hakim.....	830
MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI RUMAHTANGGA DI KABUPATEN KARANGASEM BALI Ni Wayan Sri Astiti, Dwi Putra Darmawan, Dewa Gede Raka Sarjana	838
RESTORASI PARADIGMA KUD : “PENDEKATAN TEORI ORGANISASI DALAM MEREKUT PELUANG MEA” Ahmad Tarmizi Yusa, Hendry Andry dan Andri Kurniawan	848
PENINGKATAN KETERAMPILAN WANITA PESISIR DALAM MENGHADAPI MEA DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO Istiko Agus Wicaksono, S.P., M.Sc., Isna Windani, S.P., M.Sc., dan Arta	857
POSISI SOSIAL DAN ARAH TRANSFORMASI MASYARAKAT MARITIM (Studi Kasus pada Komunitas Masyarakat Maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan) Eymal B. Demmallino, M. Saleh S. Ali, Abd. Qadir Gassing, Munsil Lampe, La Nalepo dan Sri Rezki Eskawaty Rosmala.....	863
PENYULUHAN DAN LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) PADA PETANI Muksin.....	874
PROGRAM <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PERUSAHAAN PT PERTAMINA TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK REWULU DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA ARGOMULYO KABUPATEN BANTUL Christine Sri Widiputranti, Ir. M.P.	884
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR	



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

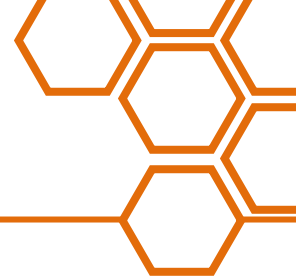
Kadhung Prayoga	894
PERSPEKTIF PETANI PADA GAYA BERTANI RAMAH LINGKUNGAN (Studi Kasus di Gapoktan WP, Kabupaten Bandung Barat)	
Adi Nugraha, Yayat Sukayat, Rani Andriani	902
MEWUJUDKAN INDUSTRIALISASI PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI BERBASIS KOMODITI JAGUNG UNTUK MENGHADAPI ERA MEA BAGI PETANI DI NTT	
Leta Rafael Levis, Keppi Sukesu, Sugiyanto, dan Yayuk Yuliati	909
RANGKUMAN DISKUSI	919
DISKUSI KELOMPOK	926
DAFTAR PESERTA	932



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



MAKALAH UTAMA



Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Persaingan Global Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Indonesia memiliki keanekaragaman yang berpotensi dalam pembangunan bangsa dan negara. Luas perairan Indonesia 5.9 juta km² dengan jumlah pulau 17.499 membuat Indonesia memiliki kekhasan baik dari segi sumber daya alam, sosial, maupun budaya. Tidak jarang apabila masyarakat luar Indonesia kemudian tertarik berkunjung bahkan berinvestasi di negara yang kaya ini.

Cakupan luas Indonesia yang hampir sama dengan Amerika Serikat (USA) memang masih berbanding terbalik dengan kualitas serta kemajuan yang dimilikinya. Amerika Serikat dengan dasar demokrasi yang sama seperti Indonesia telah lebih lama menjadi negara adikuasa dan merajai perdagangan sejumlah komoditi. Meskipun demikian, Indonesia masih lebih unggul beberapa hal termasuk ekspor komoditi khas seperti pala, tembakau, kina, dan lainnya yang hanya mampu tumbuh di wilayah Indonesia. Keduanya kemudian menjadi negara yang bersimbiosis mutualisme dalam hal perdagangan.

Negara yang juga merupakan jalur lintas perdagangan internasional seperti Indonesia tentu memberikan keuntungan tersendiri. Tidak hanya menjadi jalur namun transaksi perdagangan pun terjadi di Indonesia. Dengan lalu lintas perdagangan yang perlu melewati Indonesia terlebih dahulu untuk sampai ke belahan bumi manapun, menjadikan Indonesia unggul dan cepat menyerap dinamika perkembangan global.

Posisi strategis, keuntungan sumber daya, dan kekhasan Indonesia tidak berseiringan dengan pembangunan manusia maupun ekonomi negara. Data menunjukkan apabila jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 250 juta jiwa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,50 % atau setara 7,02 juta jiwa dan kemiskinan sebesar 10,86 % atau setara 28,01 juta jiwa. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan oleh semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai tolak ukur kualitas masyarakat suatu negara pun masih berkisar antara kondisi rendah, sedang, hingga tinggi. Jumlah IPM di wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) didominasi kategori rendah. Cakupan luas Indonesia dengan keanekaragaman yang ada kerap kali menjadi masalah yang sulit dipecahkan namun hal tersebut dapat dikurangi salah satunya dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas IPM yang rendah akan membantu perkembangan dan kemajuan bangsa terlebih dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Penduduk perlu disiapkan untuk hal tersebut sehingga tidak lagi menjadi “buruh” di



negara sendiri karena desakan kemajuan dari negara-negara Asia Tenggara yang memasuki Indonesia.

Sekilas MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi masyarakat ASEAN (Asia Tenggara) dimana ada perdagangan bebas di antara anggota-anggota Negara ASEAN yang telah disepakati bersama negara-negara ASEAN dan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif. Kesepakatan yang dimulai sejak tahun 2015 dan diterapkan di awal tahun 2016 membawa perubahan yang cukup signifikan bagi Indonesia. Terlebih beberapa masalah yang sebelumnya disampaikan belum mampu diselesaikan secara penuh.

Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 antara lain:

1. Pasar tunggal dan basis produksi bersama yang di dalamnya terdapat bebas arus barang, jasa, tenaga terampil, investasi, dan arus modal, adanya sektor prioritas integrasi, serta perdagangan pangan, pertanian, dan hasil hutan.
2. Kawasan berdaya saing tinggi, terdiri atas: kebijakan persaingan, perlindungan konsumen dan HAKI, pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, perpajakan, dan *e-commerce*.
3. Kawasan dengan pembangunan setara, terdiri atas: pengembangan UKM dan mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara ASEAN.
4. Integrasi dengan perekonomian global, terdiri atas: pendekatan koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal dan partisipasi yang semakin intens dalam jaringan rantai pasok global.

Penerapan MEA yang dianggap sebagai tantangan sekaligus ujian bagi Indonesia diharapkan tidak menjadi masalah besar yang menghambat. Salah satu provinsi yang sudah siap dalam menghadapi MEA dengan terobosan pemberdayaan masyarakatnya adalah Provinsi Jawa Tengah.

Strategi Pemberdayaan Studi Kasus Jawa Tengah

Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah turut andil dalam kancah persaingan MEA ini. Segi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sudah meningkat dari 5,4 % menjadi 5,75 % di tahun 2015-2016 menunjukkan kesiapan terhadap persaingan ini. Selain itu, angka kemiskinan di bulan September 2015 menurun dari angka 13,32 % menjadi 13,27 % pada Maret 2016. Tingkat pengangguran terbuka pun menurun dari 4,99 % (Agustus 2015) menjadi 4,20 % (Februari 2016) serta tingkat inflasi dari 2,73 % (tahun 2015) menjadi 2,71 % (tahun 2016).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan produksi atau lapangan usaha, industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,6%, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,8%; perdagangan besar eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,6%. Berdasarkan pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,7%, diikuti PMTB sebesar 1,5%. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada Semester I-2016 mencapai 406,54 juta USD atau Rp 5,49 Triliun sedangkan realisasi Penanaman Modal



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 6,86 Triliun. Secara total, realisasi PMA dan PMDN pada Semester I-2016 sebesar Rp 12,35 Triliun atau mencapai 45% dari target tahun 2016 sebesar Rp 27,55 Triliun.

Provinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan beberapa perubahan, peningkatan, dan pertumbuhan di beberapa bidang tentu menerapkan strategi, di antaranya:

1. Pengembangan produk unggulan Jawa Tengah yang berbasis OVOP (*One Village One Product*) melalui penguatan dari sisi produksi dan pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan input, proses dan output (Instruksi Gubernur no. 518/23546 Tahun 2011).
2. Pengembangan daya saing investasi dengan fokus pada pengembangan regionalisasi potensi investasi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan dan kecepatan pemberian perizinan dan insentif investasi.
3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Desa Mandiri Energi, Desa Wisata dll sebagai perwujudan Desa Berdikari.

Selain strategi-strategi tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga menjadi basis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan jumlah 7,9 juta usaha (4,2 juta di sektor pertanian dan 3,7 juta di sektor non pertanian). Pemberian dukungan pun dilakukan melalui insentif investasi dimana terdapat pembebasan pajak, pengurangan pajak, dan fasilitasi bea impor yang telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, percepatan realisasi pembangunan masyarakat juga dilakukan melalui SE Gubernur Jateng, No. 570/0007642 tanggal 20 April 2016 yang terdiri atas:

1. Evaluasi dan peninjauan atas Peraturan Daerah tentang Tata Ruang guna menjadi daya tarik investor.
2. Penyiapan wilayah (zona) industri terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya yang akan digunakan menjadi kawasan industri.
3. Melakukan penyederhanaan peraturan, prosedur dan proses perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kab./Kota.
4. Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Badan Penanaman Daerah dan PTSP sesuai ketentuan Perpres No. 97/2014 tentang Penyelenggaraan PTSP.
5. Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi sesuai pasar kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran.
6. Sesuai SOTK agar kelembagaan yang menangani PM dan perizinan satu pintu dibentuk dalam wadah satu Dinas guna efektivitas pelayanan investasi.
7. Mendorong pembentukan Tim Terpadu pengendalian dan pengawasan investasi guna kelancaran realisasi investasi di daerah.

Beberapa saran untuk menghadapi persaingan di era MEA ini, bagi seluruh pihak yang terlibat, antara lain:

1. Pemerintah pusat dan daerah dengan membentuk kerangka kebijakan nasional yang mendorong daya saing global khususnya meningkatkan daya saing pekerja dan produk serta mendorong inovasi (R&D) termasuk



kebijakan perpajakan serta pembuatan kebijakan daerah yang harmonis-inovatif-pro iklim usaha.

2. Dunia usaha nasional melalui penguatan strategi penguasaan domestik dan ekspansi wilayah bisnis di ASEAN, inovasi, menguasai peraturan-peraturan domestik negara ASEAN, UMKM, peningkatan kapasitas dan kualitas produk-jasa serta memanfaatkan TI-modal-SDM-bahan baku.
3. Kalangan pekerja dengan melakukan perubahan budaya kerja, mempertajam kompetensi, melakukan spesialisasi keahlian, inovasi, dan mendorong produktivitas serta penguasaan bahasa sekaligus memahami MRA dan ASEAN MNP *Agreement* beserta komitmennya dari semua negara anggota ASEAN. ASEAN perlu dianggap sebagai pasar kerja potensial & basis pengembangan karir.
4. Dunia akademik melalui sistem menghasilkan manusia Indonesia optimis-kreatif-dinamis-berdaya saing serta pengembangan tenaga vokasi handal-berkemampuan internasional.

Secara umum, strategi menghadapi MEA yang disarankan berikutnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Diperlukan identifikasi semua pelaku usaha beserta peta daya saing, sertifikasi dan standar produk yang dimiliki. Upaya ini diperlukan untuk mendapatkan posisi awal daya saing produk dan pelaku usaha sehingga *treatment* yang diperlukan para pelaku usaha tersebut dapat dirumuskan.
2. Sosialisasi berbagai jenis standar produk barang dan jasa yang sudah disepakati beserta cakupan, prasyarat & mekanisme mendapatkan standar, serta konsekuensi-konsekuensi yang terkait dengan standar tersebut. Pemahaman terkait standar-standar yang berlaku di ASEAN diperlukan para pelaku usaha untuk memasuki pasar ASEAN maupun pasar ASEAN dengan mitra utamanya.
3. Perlu pemetaan terkait hambatan-hambatan ekspor produk barang, jasa dan tenaga terampil, baik ke daerah lain maupun negara-negara ASEAN & negara lainnya. Pemetaan ini diperlukan agar ada solusi yang dilakukan dan diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
4. Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi pengusaha dan pelaku usaha, badan standarisasi, dunia perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan kalangan terkait lainnya dalam menghadapi arus perdagangan bebas.
5. Perlunya advokasi/kampanye yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait dengan isu “Aku Cinta Produk Indonesia”. Advokasi dan kampanye ini penting sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat, mengingat kehadiran produk impor yang masif dan semakin mendominasi pasar dalam negeri.
6. Perlunya publikasi melalui internet, media cetak, radio, televisi & media lainnya terkait berbagai kesepakatan, standar, cakupan & berbagai informasi lain yang tercakup di dalam kesepakatan MEA.



Strategi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Mendukung Daya Saing Pertanian

Pending Dadih Permana

(Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian)

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Kementerian Pertanian)

Sektor Pertanian dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlangsung sejak tahun 2015 hingga saat ini. Terdapat beberapa komponen yang membentuk MEA, antara lain:

1. Pasar dan Basis Produksi Tunggal
 - a. Aliran bebas: barang, jasa, investasi, modal, tenaga kerja terampil
 - b. *Priority Integration Sectors*
 - c. Pangan, pertanian, dan kehutanan.
2. Berdaya Saing Tinggi
 - a. Kebijakan persaingan
 - b. Perlindungan konsumen
 - c. Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Pengembangan infrastruktur
 - e. Perpajakan
 - f. *E-commerce*
3. Pembangunan Ekonomi yang Merata
 - a. Pengembangan usaha kecil dan menengah
 - b. *Initiative for ASEAN Integration*
4. Terintegrasi dengan Ekonomi Global
 - a. Pengembangan kerjasama ekonomi dengan mitra eksternal
 - b. Terintegrasi ke dalam rantai produksi global.

Pelaksanaan MEA di seluruh negara Asia Tenggara memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif MEA adalah perluasan pasar bagi produk Indonesia, membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga terampil Indonesia dengan strategi pengelolaan, pengiriman, dan penempatan tenaga kerja yang terencana sedangkan dampak negatifnya berupa banjirnya produk dan jasa luar negeri/ASEAN ke Indonesia, banjirnya tenaga kerja terampil luar negeri/ASEAN ke Indonesia bersaing dengan tenaga lokal, serta imigrasi tenaga kerja terampil berkualitas tinggi dari Indonesia ke negara-negara ASEAN atau luar negeri (*brain drain*).

Keragaan dan Permasalahan Penyuluhan Pertanian

Perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada semua sektor termasuk pertanian di Indonesia. Permasalahan penyuluhan pertanian dapat dipetakan salah satunya melalui keragaan SDM Pertanian. Piramida tenaga kerja sektor pertanian tahun 2013 berdasarkan kelompok umur menunjukkan jumlah petani berusia di atas 60 tahun sebanyak 4,8 juta jiwa,



dengan rata-rata umur petani sekitar 48 tahun. Permasalahan berikutnya adalah kurangnya akses terhadap sumber daya produktif yang terdiri atas:

1. Akses sumber daya modal seperti RTUP yang mengajukan kredit bank kurang dari 10 %, pemanfaatan kredit dari bank sangat minim, dan sebagian besar menggunakan modal sendiri.
2. Akses terhadap kelembagaan petani seperti 1/3 RTUP saja yang menjadi anggota kelompok tani, penyuluhan pertanian hanya pernah diikuti oleh sebagian kecil RTUP, dan kurang dari 5 % RTUP yang memanfaatkan fasilitas koperasi.

Permasalahan lain terjadi akibat terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan atau permodalan, rendahnya kualitas dalam mengelola usahatani secara efisien, kurang terjalannya kerjasama dengan pelaku agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani atau belum memiliki kekuatan hukum, serta terbatasnya akses petani terhadap IPTEK dan informasi.

Strategi yang Dilakukan

Strategi penyuluhan dan pengembangan SDM mendukung daya saing pertanian di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berupa:

1. Gerakan pemberdayaan petani terpadu (GP2T) dengan membentuk kelembagaan petani, ketenagaan, dan kelembagaan dari pemerintah pusat hingga ke petani di tingkat rumah tangga desa sekaligus menciptakan sinergi dan penguatan kelembagaan ekonomi petani serta pengembangan penyuluh swadaya dan swasta. Strategi pelaksanaan:
 - a) Penguatan keterampilan manajemen produksi berbasis kawasan (*best practices*, GAP ramah lingkungan), melalui pelatihan yang tematik kepada penyuluh.
 - b) Memperkuat kolaborasi penyuluhan-penelitian dalam transfer teknologi dengan membangun aliansi strategis dan pendekatan bersama dengan sektor swasta untuk membangun jejaring usaha, akses kepada pasar, usaha kemitraan, serta produk pertanian berkualitas yang dibutuhkan pasar.
 - c) Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dalam upaya memperkuat koperasi pertanian, peningkatan akses pasar, dan membangun mekanisme jaringan yang menghubungkan koperasi pertanian untuk kepentingan petani dan daya saing produk yang dihasilkan.
 - d) Peningkatan peran penyuluh pertanian swadaya dan swasta dalam sinergi sistem kerja penyuluhan untuk program pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan secara luas, pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dan inisiasi kelembagaan ekonomi petani (penyuluh sebagai profesi).
 - e) Mengembangkan pusat pelatihan petani swadaya dengan memberdayakan dan memfasilitasi petani dan pelaku agribisnis sukses pada sentra sentra pertanian;
 - f) Mengembangkan dan memperkuat penggunaan IT dan multimedia sebagai infrastruktur penyuluhan.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. Regenerasi pertanian memiliki tujuan mewujudkan sumber daya insani pertanian yang kompeten dan berkarakter di bidang pertanian. Sasaran regenerasi, antara lain memuat: 1) sasaran utama: anak petani, pemuda desa-kota, peserta didik, alumni sekolah menengah kejuruan pertanian, alumni perguruan tinggi pertanian, serta pelaku usaha pertanian muda, serta 2) sasaran antara: penyiapan aparatur pertanian (dosen, widyaiswara, guru pertanian, penyuluh pertanian, tenaga teknis pertanian).

Proses regenerasi pertanian ini bertujuan untuk pembentuk kondisi yang diinginkan melalui jalur pendidikan, profesionalisme, pembangunan jaringan, dan agar tercapainya kesejahteraan.

3. Standarisasi dan sertifikasi profesi sektor pertanian yang tertuang dalam capaian standardisasi dan sertifikasi sektor pertanian, terdiri atas:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2015 tentang Pemberlakuan 31 SKKNI Sektor Pertanian.
- 2) Terbentuknya 16 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau calon LSP Sektor Pertanian; 31 Tempat Uji Kompetensi (TUK), dan 10 Lembaga Diklat Profesi (LDP).
- 3) Tersedianya 309 tenaga asesor kompetensi dan 30 asesor lisensi.
- 4) Tersedianya perangkat sertifikasi.
- 5) Tersertifikasinya sebanyak 6488 orang dari 18 profesi.

Strandarisasi dan sertifikasi tersebut didukung oleh akselerasi sertifikasi kompetensi sektor pertanian yang terdiri atas:

1. Pengembangan dan penerapan SKKNI / KKNi sektor pertanian.
2. Penumbuhan dan pengembangan LSP dan penguatan LDP sektor pertanian.
3. Menstimulasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor pertanian.
4. Mendorong pengembangan standar kompetensi dan program pelatihan/pendidikan berbasis kompetensi pada sektor pertanian.
5. Mendorong perjanjian dan pelaksanaan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) sektor pertanian di lingkup ASEAN.

Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian membutuhkan perubahan *mindset* dari semua *stakeholder* (pemerintah dan dunia usaha) dalam menghadapi tantangan yang timbul dari AEC. Komitmen yang dibangun oleh 10 negara ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk meningkatkan perekonomian kawasan, meningkatkan daya saing perdagangan dan investasi kawasan ASEAN di pasar global, menawarkan peluang peningkatan perekonomian Indonesia, tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



MAKALAH PENUNJANG

Tema 1 **Penyuluhan dan Pengembangan** **Sumber Daya Manusia Mendukung** **Kemandirian dan Daya Saing** **di Era MEA**



PEMBINAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN KELUARGA DI PROVINSI ACEH

Nazariah dan Basri AB

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh

Jalan P. Nyak Makam No. 27 Banda Aceh

nyak_raja@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan wanita di Aceh sangat dijunjung tinggi, akibat konflik, tsunami dan karena kaum pria mencari kerja ke kota telah menempatkan wanita sebagai kepala keluarga. Akan tetapi sebagaimana wanita tani di daerah lain, wanita tani Aceh juga menghadapi masalah yang sama, yaitu; tingkat hidup yang rendah dan jumlah keluarga yang relatif besar, tingkat pendidikan dan kesempatan belajar kurang, pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas dan tertinggal dalam usaha tani, kurangnya sikap positif terhadap kemajuan baik karena adat, agama, maupun kebiasaan hidup. Salah satu cara yang digunakan untuk mengubah paradigma tersebut adalah dengan pendekatan kelompok. Melalui kelompok wanita tani (KWT) memungkinkan anggotanya saling memberi dan menerima informasi. Pembinaan KWT dilakukan oleh BPTP dan ACIAR dengan tujuan agar KWT memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya, serta meningkatkan status sosial dan ekonomi para anggotanya. Aktivitas pembinaan mencakup; bantuan modal usaha kelompok, peningkatan capacity building (kunjungan antar KWT, Forum komunikasi, Pelatihan teknis dan pelatihan pasca panen). Pembinaan yang dilakukan menunjukkan peningkatan taraf hidup anggota KWT dilihat dari aspek social, ekonomi dan kesehatan.

Kata kunci: KWT, Aceh, ACIAR

PENDAHULUAN

Di Provinsi Aceh keberadaan wanita sangat dijunjung tinggi. Akibat konflik, tsunami, dan karena pria mencari kerja ke kota telah menempatkan wanita sebagai kepala keluarga. Tetapi sebagaimana wanita tani di daerah lain, wanita tani di Aceh juga menghadapi masalah yang sama, yaitu tingkat hidup yang rendah dan jumlah keluarga yang relatif besar, tingkat pendidikan dan kesempatan belajar kurang, pengetahuan dan keterampilan yang sangat terbatas dan tertinggal dalam usaha tani, kurangnya sikap positif terhadap kemajuan baik karena adat, agama, maupun kebiasaan hidup.



Salah satu cara yang digunakan untuk mengubah dan memperbaiki tingkat pemikiran, tingkat kerja dan tingkat kesejahteraan wanita tani adalah dengan pendekatan kelompok. Melalui pendekatan kelompok, para wanita tani diajak, dibimbing serta diarahkan, yang diwujudkan dalam usaha peningkatan peranan anggota untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang tentunya lebih produktif atas dasar kerjasama (Sajogyo, 1994).

Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah sebuah organisasi wanita tani, merupakan wadah berkumpulnya para wanita tani yang memungkinkan para anggotanya saling memberi dan menerima informasi. KWT diharapkan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga khususnya meningkatkan status sosial dan ekonomi bagi para anggotanya. Dalam kelompok wanita tani setiap anggota akan berintegrasi, bekerjasama, dan mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Departemen Pertanian, 1977).

Untuk meningkatkan produktivitas KWT yang sudah terbentuk, perlu dilakukan pembinaan yang merupakan suatu usaha untuk memberikan pengarahan dan bimbingan guna mencapai tujuan tertentu. Pembinaan menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Pembinaan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan subjek dengan tindakan pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan (Poerwadaminta, 2003).

Berdasarkan hal tersebut, BPTP Aceh dan ACIAR melaksanakan pembinaan terhadap kelompok wanita tani (KWT) di Provinsi Aceh sejak tahun 2009 yang tersebar pada empat Kabupaten, yaitu: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Barat. Kecuali di Pidie Jaya, semua KWT-KWT tersebut berjalan dan dibina oleh PPL pendamping setempat selain dibina langsung oleh BPTP Aceh.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga wanita tani khususnya, serta meningkatkan status sosial dan ekonomi para anggotanya.



Prosedur

Kegiatan pembinaan dilakukan sejak tahun 2009 di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, dan Bireuen. Melibatkan PPL setempat sebagai pembimbing lapangan serta berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. Aktivitas pembinaan mencakup bantuan modal usaha kelompok, peningkatan capacity building (kunjungan antar KWT, Forum komunikasi, Pelatihan teknis dan pelatihan pasca panen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT)

KWT merupakan kelompok wanita tani yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga dan wanita tani dengan kisaran umur antara 20–65 tahun. Setiap kelompok mempunyai anggota 10–50 orang. Kegiatan usahatani dilaksanakan di bawah bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Terbentuknya sebuah KWT dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, antara lain: (1) keinginan ibu-ibu untuk mempunyai suatu wadah seperti halnya kelompok tani, (2) saran dari PPL, (3) melihat keberhasilan KWT lain, (4) karena adanya bantuan modal usaha/saprodi, (5) keinginan untuk memenuhi kebutuhan sayuran sendiri, (6) keinginan menambah pendapatan keluarga.

BPTP Aceh dan ACIAR melaksanakan pembinaan terhadap kelompok wanita tani (KWT) di Propinsi Aceh sejak tahun 2009. KWT yang dibina tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Barat.

B. Ragam Aktivitas Pembinaan

Bantuan modal usaha kelompok

Untuk menggerakkan kelompok, pembinaan dilakukan dengan memberikan modal awal kepada KWT yang akan dibina. Pemberian modal berupa uang tunai dilakukan melalui PPL pendamping desa. Umumnya modal ini dipergunakan untuk mengolah tanah pertama dan pembelian sarana produksi yang mereka butuhkan. Penggunaan modal awal dilakukan bersama-sama antara PPL dan anggota KWT.



Peningkatan Kapasitas Anggota KWT (Capacity Building)

Kunjungan Antar KWT

Untuk meningkatkan kapasitas anggota KWT yang dibina salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kunjungan antar KWT. Tujuan kegiatan ini antara lain saling belajar, tukar menukar informasi, berbagi pengalaman dan meningkatkan motivasi. Kegiatan kunjungan juga diharapkan terbentuknya jaringan antar kelompok wanita tani yang telah dibina khususnya dan wanita tani diluar kelompok yang sudah ada umumnya. Kunjungan antar KWT dilakukan antar kabupaten dan juga dalam kabupaten masing-masing KWT.

Forum Komunikasi KWT

Forum Komunikasi Wanita Tani ini bertujuan: (1) memberi kesempatan bagi anggota KWT dan PPL untuk berbagi pengalaman, belajar dan saling tukar menukar informasi antara satu dengan yang lain, (2) memberikan pelatihan bagi anggota KWT untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, (3) menggali potensi kemitraan, (4) membangun dukungan untuk pembentukan jaringan wanita tani, dan (5) mempromosikan keberhasilan dan memetik pelajaran dari kegiatan KWT.

Pelatihan Teknis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wanita tani agar dapat lebih produktif dalam sistem budidaya usahatani yang mereka laksanakan, diperlukan pelatihan teknis yang menyangkut masalah tanah dan tanaman. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan usahatani, kesuburan tanah/lahan usahatani, penerapan teknologi usahatani yang mengikuti cara budidaya yang baik (Good Agricultural Practices). Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pelatihan pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati.

Pelatihan Pasca Panen

Keahlian penanganan pasca panen yang tepat sangat dibutuhkan oleh anggota KWT. Kebutuhan pelatihan ini bukan hanya untuk menambah nilai ekonomi pada usahatani yang mereka hasilkan, akan tetapi juga menghindari kehilangan zat gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga karena



penanganan pasca panen yang salah khususnya dalam pengolahan hasil, seperti cara mengolah dan memasak sayuran yang tepat. Beberapa hal yang ingin dicapai oleh KWT sehubungan dengan penanganan pasca panen adalah (1) meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan, (2) diversifikasi pangan untuk pemenuhan gizi keluarga dan meningkatkan peluang usaha berbasis sumberdaya lokal.

Dampak Pembinaan Terhadap Kelompok Wanita Tani

Aspek Sosial

Pembinaan yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang sangat positif terhadap anggota KWT. Sejak bergabung dengan KWT umumnya wanita tani menyatakan bisa bercocok tanam lebih baik, ikut dalam forum-forum pertemuan yang diselenggarakan sehingga sangat bermanfaat untuk mereka, dimana ada yang menyatakan selama ini belum pernah mengikuti pertemuan walau tingkat desa sekalipun. Setelah mendapat pembinaan mereka berani tampil ke depan, berani mengemukakan pendapat apabila ada sesuatu hal yang dibicarakan baik dalam diskusi kelompok sendiri maupun forum-forum lainnya. Hal ini sangat kontradiktif dengan sebelumnya, dimana wanita tani tidak berani bicara apalagi memberikan ide atau pendapat.

Beberapa manfaat yang dirasakan oleh anggota KWT adalah (1) terjalinnya silaturahmi antar anggota sendiri maupun anggota KWT lain, (2) bisa bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, (3) mengatasi permasalahan bersama/diskusi, (4) mengisi waktu kosong dengan kegiatan bermanfaat/bercocok tanam sayuran, (5) mengenal orang lain di luar kelompok, (6) tahu memanfaatkan lahan/pekarangan kosong dengan tanaman, (7) ajang hiburan untuk masalah pribadi/keluarga, (8) mendapatkan hal-hal baru/inovasi yang selama ini tidak mereka ketahui, (9) meningkatkan gairah/semangat dalam bekerja, (10) meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dan (10) berbagi pengalaman/transfer ilmu dan pengalaman.

Selain hal tersebut di atas, dampak pembinaan yang dilakukan oleh BPTP-ACIAR terhadap KWT adalah (1) mendapatkan bantuan/program dari Pemerintah Daerah, (2) mendapatkan bantuan alat mesin pertanian baik dari



perusahaan maupun Dinas/Instansi terkait lainnya, (3) mendapatkan bantuan sarana/alat pengolahan pangan lokal, (4) mampu memproduksi benih beberapa jenis tanaman sayuran yang sering di budidayakan seperti; bayam, sawi, seledri dan selada, (4) berkembangnya usaha simpan pinjam kelompok, dan (5) desa menjadi terkenal.

Aspek Produksi dan Ekonomi

KWT mulai melaksanakan aktivitas usahatani pada lahan kelompok dengan mempergunakan modal awal yang dialokasikan oleh BPTP-ACIAR melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Dalam praktek bercocok tanam, tidak ada KWT yang mengkhususkan pada satu jenis tanaman saja, akan tetapi mereka mengusahakan berbagai jenis tanaman sayuran yang ditanam secara bergiliran berdasarkan prediksi permintaan pasar dan waktu tanam sepanjang tahun. Beberapa jenis sayuran yang dibudidayakan adalah bayam, kangkung, seledri, terong, timun, kacang panjang, slada, cabai merah dan tomat. Namun beberapa KWT juga menanam jagung dan kacang tanah.

Tidak ada penanganan pasca panen khusus untuk semua produksi yang dihasilkan. Sepuluh persen produksi yang didapatkan untuk konsumsi sendiri dan 90% lainnya di jual. Pendapatan yang diterima dari usahatani kelompok lebih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar, anggota KWT bercocok tanam sayuran sendiri dengan dibantu keluarga. Untuk lebih jelas biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh anggota KWT pada setiap jenis tanaman yang diusahakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis tanaman, biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh anggota KWT setiap musim tanam

Jenis Sayuran	Biaya rata-rata (Rp)	Harga Jual rata-rata (Rp)	Keuntungan (Rp)	Keterangan (Rp)
Kangkung	70,000	240,000	170,000	
Bayam	50,000	192,000	142,000	1x 10m/ bedeng = 3 bedengan
Sawi	100,000	240,000	140,000	
Seledri	150,000	480,000	330,000	
Slada sendok	100,000	500,000	400,000	
Slada biasa	100,000	240,000	140,000	



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kacang tanah	300,000	500,000	200,000	Luas lahan
Jagung	500,000	1,500,000	1,000,000	1500 m
Timun	350,000	1,000,000	650,000	

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Umumnya anggota kelompok tidak beraktivitas maksimal pada saat musim turun ke sawah. Hanya beberapa orang anggota saja yang melaksanakan aktivitas bercocok tanam sayuran pada lahan sendiri. Pendapatan anggota KWT secara berkelompok antara Rp. 100.000,00 s.d Rp.1.000.000,00 per tahun. Sedangkan anggota yang juga menanam sendiri memperoleh pendapatan antara Rp. 200.000,00 s.d Rp. 300.000,00 per bulan. Minimnya pendapatan dalam kelompok tidak menjadi masalah bagi anggota karena kelompok merupakan tempat untuk belajar bersama. Bahkan permasalahan yang mereka dapatkan pada usahatani sendiri menjadi bahan diskusi dalam kelompok dengan bimbingan PPL terutama yang menyangkut teknis penanganan tanaman yang mereka budidayakan.

Meskipun cuma 10% hasil produksi untuk konsumsi sendiri, akan tetapi memberikan kontribusi yang besar terhadap pengeluaran rumah tangga petani. Umumnya mereka memanfaatkan hasil produksi 10% tersebut bukan sekaligus saat panen besar, tetapi berdasarkan kebutuhan sayur keluarga. Seminggu menjelang panen sudah diambil untuk konsumsi sendiri sampai tiga kali. Selain bercocok tanam tanaman sayuran utama untuk dijual, KWT juga memanfaatkan lahan-lahan pinggir untuk ditanami dengan beberapa jenis tanaman sayuran dengan tujuan khusus konsumsi, seperti kacang panjang, terung, ubi kayu. Rata-rata anggota KWT bisa menghemat uang untuk membeli sayuran sebesar Rp. 120.000,00 per bulan dengan asumsi Rp. 4.000,00 pengeluaran per hari. Minimnya penghematan biaya untuk membeli sayuran konsumsi keluarga hasil produksi sendiri terbatas. Hal ini disebabkan mereka merasa bosan makan sayuran yang ditanam sendiri, untuk variasi membeli sayuran lain seperti wortel, kentang, kol, dan buncis, yang tidak bisa tumbuh di lahan mereka.

Selain bercocok tanam sayur-sayuran, KWT juga membuka usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota. Mereka dapat memperoleh pinjaman dengan cepat tanpa ada administrasi yang



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

sulit selama uang kas tersedia dan cukup untuk dipinjamkan. Besarnya uang yang bisa dipinjamkan kepada anggota setiap KWT bervariasi, antara Rp 200.000,00–500.000,00 dengan pembayaran bunga 10% dari jumlah yang dipinjamkan dalam batas waktu 1-6 bulan.

Aspek Kesehatan

Meningkatnya budaya makan sayuran dalam keluarga. Sayuran menjadi salah satu menu utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sayuran yang diproduksi sendiri umumnya meminimalkan pemakaian bahan kimia, bahkan tidak memakai sama sekali.

Kendala Yang Dihadapi

Meskipun dampak yang didapatkan begitu besar namun KWT yang masih aktif bukan tidak mendapat kendala dalam melaksanakan aktivitasnya. Kendala terbesar yang mereka hadapi adalah masalah iklim, hama penyakit dan harga. Iklim ekstrim baik kemarau panjang maupun curah hujan yang tinggi merupakan ancaman utama dalam budidaya sayuran. Demikian juga dengan serangan hama dan penyakit terutama pada saat musim hujan dan harga yang rendah pada saat panen besar.

PENUTUP

Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dilaksanakan oleh BPTP Aceh-ACIAR memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kapasitas wanita tani di Provinsi Aceh dari aspek sosial, ekonomi/produksi dan kesehatan, guna mendukung ketahanan pangan keluarga khususnya dan pembangunan pertanian umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sajogyo, P. 1994. *Peranan wanita dalam perkembangan ekonomi*. Obor. Jakarta.
- Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1977. *Pedoman Pembinaan Kelompok Wanita Tani*. Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan. Jakarta.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PROYEKSI DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN RADIO REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM KONSTELASI MEA

Gontom C. Kifli

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
keevle354@yahoo.com

ABSTRAK

Pada era tahun 1980 hingga 1990-an, pola penyuluhan pertanian mendapat dukungan penuh melalui media massa yang bersifat konvergen dan intensif menyampaikan informasi kepada audiens, termasuk petani di dalamnya. Radio Republik Indonesia (RRI) saat itu menjadi salahsatu media komunikasi yang berperan penting di dalam mendukung pembangunan pertanian nasional, namun sejalan gejolak kondisi politik nasional pada tahun 1998 dan berkembang pesatnya media televisi, jumlah pendengar RRI mengalami penurunan secara umum di berbagai daerah. Tujuan dari kajian yang dilakukan adalah 1) menggambarkan dan menjelaskan kondisi umum RRI dalam konteks penyuluhan pertanian saat ini, 2) merancang strategi dalam memberdayakan kiprah RRI secara maksimal dalam pembangunan pertanian dalam konstelasi MEA. Metode kajian yang dilakukan adalah analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa RRI saat ini memiliki potensi aset dan SDM yang tinggi dengan 62 stasiun penyiaran dan 7.600 orang pegawai. Beberapa strategi pengembangan yang dapat ditempuh RRI, khususnya Program 1, adalah mengintensifkan penelitian atau kajian mengenai aspek penyiaran radio untuk meningkatkan daya saing dalam konstelasi MEA, strategi lainnya adalah mengintensifkan sosialisasi mengenai keberadaan dan program RRI Program 1 kepada pendengarnya di wilayah pedesaan dan strategi terakhir adalah menambah jam siar dari acara-acara siaran pedesaan pada siang dan sore hari.

Kata kunci: RRI, Pembangunan Pertanian, Aset dan SDM, Strategi pengembangan dan pedesaan.

PROJECTION AND STRATEGY FOR EMPOWERMENT OF RADIO REPUBLIK INDONESIA IN AGRICULTURE DEVELOPMENT IN MEA CONSTELLATION

ABSTRACT

The agriculture extension system have supported by many mass media in the year of 1980 to 1990. Many media inform to audience, especially farmers in converging and intensively. RRI had been important media which played role in agriculture development in that time, but nevertheless the political condition in year of 1998 and the fast growing of TV media made listener of RRI had declined include farmers in rural. It was regrettable when many asset and human resources have not utilized maximally. It is interesting condition to do of research or study. The objectives of study are 1) to describe and to explain recently condition of RRI in the context of agriculture development and MEA, 2) to design of strategy for empowerment of RRI in agriculture development in



MEA constellation. The Method of study has used by descriptive statistical analysis with quantitative approach. Some results of the study are RRI have great potential in asset and human resources with 62 radio stations and 7.600 persons. Some strategies which can do to develop RRI are to more increase research intensively than now, to more socialize of RRI existence and program, to develop partnership with many institutions and to do some researches or studies and to add airwaves hours of rural or farming program and to invite of qualified speakers of farming radio program.

Keywords: *RRI, Agriculture development, Asset and Human resources, Strategy for development and rural.*

PENDAHULUAN

Radio Republik Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang seiring dengan masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, kemudian turut mengisi masa awal kemerdekaan di era orde lama, yang dilanjutkan dengan kiprahnya di masa orde baru sebagai salahsatu media komunikasi yang menjadi andalan pemerintah saat itu dalam menggemakan gerak pembangunan. Era reformasi bergulir, RRI mengalami dinamikanya hingga saat ini menjadi satu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dengan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Bab III pasal 14 ayat 2 dengan fungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Istilah RRI yang digunakan selanjutnya dalam tulisan ini, yang dimaksud adalah LPP RRI.

RRI pada masa orde baru, sejalan dengan masa revolusi hijau, menjadi salah satu media komunikasi yang mendominasi di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk kelompok masyarakat petani, salahsatunya ditunjukkan jam siar yang intensif memiliki jam siar sebanyak lebih dari 100 jam per minggu yang disiarkan oleh satu stasiun RRI saat itu (Depari dan McAndrews, 1985). Peran RRI saat itu diduga kuat turut memberikan kontribusi di dalam keberhasilan Indonesia dalam capaian swasembada beras pada tahun 1984. Fenomena berikutnya, seiring dengan perjalanan waktu, media komunikasi pada awal tahun 1990-an ditandai dengan munculnya beberapa statsiun televisi swasta yang secara perlahan menggeser pola akses masyarakat media komunikasi dari radio ke televisi dengan



keunggulan kecepatan informasi dan visualnya. Penetrasi informasi yang diakses oleh petani, menjadi semakin rendah dengan kondisi tersebut.

Kondisi berikutnya yang menggembirakan adalah dengan lahirnya UU RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan perkembangan penyuluhan pertanian setelahnya mengalami perkembangan yang terus membaik, seperti perekrutan penyuluh pertanian yang baru secara bertahap. RRI yang memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan-nya memiliki potensi tinggi dalam mendorong aktivitas penyuluhan pertanian melalui beberapa kegiatan dan program-program siarannya, sehingga kondisi tersebut menjadi menarik untuk dilakukan kajian dalam upaya mencari cara yang tepat guna memberdayakan RRI secara maksimal.

Uraian pada pendahuluan menunjukkan adanya permasalahan dalam eksistensi RRI saat ini, maka permasalahan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah gambaran kondisi umum RRI saat ini dalam konteks pembangunan penyuluhan pertanian? dan (2) Bagaimanakah desain strategi dalam memberdayakan kiprah RRI secara maksimal dalam pembangunan pertanian dalam konstelasi MEA saat ini? Upaya untuk memusatkan hasil penulisan makalah ini, maka dirumuskan tujuan dari kajian ini adalah (1) Menggambarkan dan menjelaskan kondisi umum RRI saat ini dalam konteks pembangunan penyuluhan pertanian, serta (2) Merancang strategi dalam memberdayakan kiprah RRI secara maksimal dalam pembangunan pertanian dalam konstelasi MEA.

METODE PENELITIAN

Kajian atau studi yang dilakukan, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengambilan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan RRI dan penyuluhan pertanian nasional. Data tersebut kemudian diolah, ditransformasi dan diterjemahkan, serta dibahas untuk mendapatkan kesimpulan dan saran atau rekomendasi akhir.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi umum media radio dan RRI saat ini

Media radio masih banyak diakses oleh masyarakat, Pramiyanti dkk (2014) mengungkapkan bahwa kelompok remaja di Kabupaten Bandung sebanyak 15%-nya sering mendengarkan siaran radio melalui media telepon seluler. Media televisi masih menjadi andalan utama bagi para remaja tersebut dalam mengakses informasi dan hiburan, yaitu sebanyak 56,66%, sedangkan sisanya sebesar 43,34% mengaksesnya melalui telepon seluler. Laila (2012) mengungkapkan bahwa radio swasta menjadi andalan masyarakat di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah radio, terutama dalam mendapatkan informasi layanan masyarakat seperti layanan PLN, PDAM, izin usaha dan informasi catatan sipil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum masih memerlukan informasi lokal daerahnya melalui radio, namun RRI belum menjadi acuan utama dalam akses informasi tersebut, sedangkan RRI merupakan media radio yang diandalkan pemerintah dalam mempublikasikan informasi dan aktivitas-aktivitasnya.

Hal yang sedikit berbeda terjadi dari hasil penelitian Ding (2016) yang mengungkapkan bahwa program acara Selamat Pagi Kaltim dari siaran Programa 1 RRI Samarinda telah cukup baik dalam menampung aspirasi dari masyarakat Kota Samarinda dan sekitarnya, Senada dengan hasil penelitian tersebut, Nur dan Pamungkas (2014) mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa Programa 1 RRI Jayapura masih memiliki pendengar setia, khususnya untuk acara pagi hari dengan kelompok umur kriteria tua, yaitu 45-54 tahun.

Suparman (2011) mengungkapkan dari hasil penelitiannya di 5 kota besar Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar, bahwa sebagian besar pekerjaan dari pendengar RRI Programa 1 adalah wiraswasta, sedangkan Programa 2 adalah mahasiswa dan pelajar. Selain itu RRI masih termasuk ke dalam 5 besar media yang menjadi sumber informasi dan hiburan dari seluruh stasiun radio yang ada di 5 kota besar tersebut. Fahrianoor dkk (2012) mengungkapkan dari hasil penelitiannya di kota Banjarmasin, bahwa dari 5 stasiun radio swasta di Kota Banjarmasin, muatan lokal dari acara kelima stasiun



tersebut dianggap masih minim atau kecil yaitu rata-rata mencapai 13,7% jam siaran dari seluruh jam siaran.

Harianti dkk (2014) mengungkapkan mengenai pelayanan publik di RRI Yogyakarta secara umum termasuk ke dalam pelayanan yang baik. Satmoko dkk (2007) mengungkapkan bahwa format Majalah Udara dalam Siaran Pedesaan di RRI Semarang yang terdiri dari beberapa sub-format, efektif di dalam menyampaikan informasi kepada para pendengarnya, termasuk para petani. Sanga dkk (2013) mengungkapkan bahwa program siaran radio bagi petani di Tanzania dalam acara Suara Radio Petani (FVR), yang dipadukan dengan kecepatan respon pendengar melalui internet, telah berhasil memperkenalkan teknologi pertanian baru kepada masyarakat petaninya. Bentley dkk (2007) mengungkapkan bahwa media radio penyuluhan di Bolivia dapat secara serentak mencakup banyak petani dalam menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian dibandingkan pertemuan kelompok atau sekolah lapang, namun efektivitas penguasaan informasi dan teknis teknologi tersebut kurang efektif dibandingkan dengan pertemuan kelompok dan sekolah lapang. Fachry dan Pertamasari (2011) mengungkapkan bahwa media radio kurang efektif di dalam menyadarkan masyarakat nelayan dalam pemeliharaan batu karang di Pangkep Sulawesi Selatan. Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media radio saat ini dengan segala keunggulan dan kelemahannya masih memiliki pangsa pengguna atau peminatnya sendiri, termasuk kelompok para petani di pedesaan. Namun demikian, radio tidak menjadi media pilihan utama masyarakat secara umum dibandingkan media lainnya seperti televisi atau telepon seluler dalam mendapatkan informasi dan sejenisnya.

RRI hingga tahun 2016, tercatat memiliki 62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri. RRI memiliki 61 programa-1, 61 programa-2, 61 programa-3, 14 programa-4 dan 7 studio produksi, sehingga secara kuantitas RRI setara dengan 205 stasiun radio saat ini. Sumberdaya Manusia (SDM) di lingkup RRI seluruh Indonesia berjumlah 6.800 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

sebanyak 4.400 dan Pegawai Bukan PNS (PBPNS) atau honorer sebanyak 2.400 orang (<http://rri.co.id>). Wiratmaja (2015) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran RRI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2014 mencapai Rp 808.588.687.336,00.

Programa 1 dan Programa 2 umumnya memiliki unit produksi, ruang siaran dan program tersendiri. Program siaran mengenai penyuluhan pertanian umumnya termasuk ke dalam programa 1, sehingga di dalam tulisan ini, pembahasan yang dimaksud mengenai program yang meliputi aspek penyuluhan pertanian, adalah siaran Programa 1 RRI. RRI (2011) mencatat bahwa pada beberapa tahun terakhir, wilayah perbatasan menjadi salahsatu target sasaran RRI dalam meningkatkan pelayanannya, yang salahsatu upayanya adalah dengan mendirikan sedikitnya 14 stasiun di wilayah perbatasan.

Tabel 1. Beberapa unit Programa siaran di RRI

Unit Siaran	Visi Program	Format Programa
Programa 1	Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat	Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan
Programa 2	Pusat Siaran Kreativitas Anak Muda	Musik dan Informasi
Programa 3	Pusat Jaringan Berita Nasional dan Kantor Berita Radio Nasional	News and Talk
Programa 4	Pusat Kebudayaan Indonesia	Saluran Budaya, Pembangun Karakter Bangsa

Sumber: RRI, 2013

Programa 1 merupakan programa yang dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat lokal (Tabel 2). Melalui siaran pemberdayaan, publik didorong agar mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi (RRI, 2013). Acara Siaran Pedesaan yang terdapat pada Programa 1 RRI tersebut memiliki durasi siaran selama 60 menit, yang dapat terdiri dari dua sub-program acara seperti Kiprah Desa dan Siaran Pedesaan. Waktu siaran dari program cara Siaran Pedesaan tersebut memiliki alokasi pada waktu malam hari antara jam 19.00 hingga 20.00 WIB.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 2. Profil Pendengar dan Program Acara RRI Programa 1

Profil	Uraian	Keterangan
Visi program	Pusat Siaran Pemberdayaan Masyarakat	
Profil program	Informasi, Pendidikan, Budaya dan Hiburan	
Sebutan untuk pendengar	"Pendengar"	
<i>Pronomina persona</i> orang ke-dua	"Anda"	Nara sumber
Waktu Siaran	19 jam	05.00-24.00 WIB
Gender	Pria 50%, Wanita 50%	
Pendengar utama	Berumur 25 - 49 tahun	
	Pendidikan minimal SD	
Klasifikasi siaran	Informasi dan berita : 35% Pendidikan dan Kebudayaan : 20% Iklan dan Pelayanan Masy : 15% Hiburan dan musik : 30%	
Program acara	Jelang fajar : 04.30 - 06.00 WIB Pro Aspirasi : 06.00 - 13.00 WIB Music box oldies: 14.00 - 15.00 WIB Gender touch : 15.00 - 16.00 WIB Personal Show : 16.00 - 17.00 WIB Zona petang : 17.00 - 18.00 WIB Siaran Pedesaan : 19.00 - 20.00 WIB Zona Edukasi : 20.00 - 21.00 WIB Music Box : 22.00 - 23.30 WIB Renungan : 23.50 - 24.00 WIB	1) Program acara adalah secara umum, dapat terdiri dari beberapa sub-program acara. 2) Waktu jeda 3 X 60 menit digunakan untuk siaran langsung relay berita nasional.

Sumber: RRI, 2013

Sasaran pendengar dari Programa 1 apabila diamati masih bersifat umum, belum sepenuhnya tertuju kepada kelompok masyarakat di pedesaan, dengan melihat jam khusus program Siaran Pedesaan yang hanya mendapatkan jam siar selama 60 menit. Jangkauan RRI (RRI, 2015), termasuk di dalamnya adalah programa 1, pada tahun 2010 telah menjangkau atau meliputi 60% wilayah NKRI, sedangkan data terakhir pada tahun 2015, RRI mengklaim siarannya telah menjangkau 80% dari wilayah NKRI.

Strategi pemberdayaan RRI

Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh RRI dalam memberdayakan dirinya, khususnya dalam memberdayakan pada aspek pembangunan pertanian, yaitu *strategi pertama* adalah pemberdayaan RRI dalam tatanan makro dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan penelitian, kajian atau studi ilmiah yang berhubungan langsung dengan kinerja RRI sendiri, termasuk dalam bidang



penyuluhan dan pembangunan pertanian di daerah pedesaan. *Strategi pemberdayaan yang ke-dua* adalah pemberdayaan RRI dalam tatanan meso (menengah) di tingkat daerah atau stasiun daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi, ekspos atau publikasi RRI kepada kelompok masyarakat sasaran. Kondisi tersebut dilakukan untuk mengingatkan kembali (mengingat ulang) ingatan masyarakat akan keberadaan RRI di masa lalu dan masa kini, selain itu juga memperkenalkan kepada generasi baru yang belum mengenal atau dekat dengan keberadaan RRI, khususnya generasi tua dan generasi muda petani di pedesaan, sehingga kelompok masyarakat tersebut memiliki ketertarikan dan keterikatan kepada program-program siaran RRI, khususnya dalam aspek pembangunan pertanian, khususnya penyuluhan pertanian.

Strategi Pemberdayaan yang ke-tiga adalah pemberdayaan RRI pada tatanan mikro, dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas program secara proporsional. Upaya yang dilakukan dapat menambah waktu atau jam program siaran yang menyangkut program pertanian dan aktivitas pertanian, seperti membuat program siaran pedesaan yang telah ada pada waktu pagi hari, siang hari atau sore hari. Kuantitas jam siaran pedesaan saat ini dirasakan masih sedikit (60 menit).

PENUTUP

Beberapa kesimpulan dan sekaligus saran atau rekomendasi sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penulisan adalah sebagai berikut: RRI memiliki stasiun radio yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan negara, selain itu RRI memiliki aset berupa sarana, prasarana, fasilitas, perlengkapan dan sumberdaya manusia yang cukup lengkap dan mumpuni. RRI masih menjadi salahsatu media rujukan atau acuan bagi pendengar radio dalam mengakses berita dan informasi lainnya, walaupun tidak menjadi media utama yang diakses.

Strategi pemberdayaan yang dilakukan RRI, khususnya Programa 1, dapat dilakukan dengan tiga strategi, yaitu pada tatanan makro (strategi pertama), meso (strategi ke-dua) dan mikro (strategi ke-tiga). Pertama, dengan



mengintensifkan penelitian atau kajian ilmiah mengenai berbagai aspek penyiaran radio. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dengan media lainnya, terutama dalam konstelasi MEA. Penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama dengan mitra RRI, sehingga sumber pembiayaan penelitian dapat ditanggung bersama dengan mitra. Strategi kedua adalah dengan mengintensifkan sosialisasi mengenai keberadaan RRI beserta program-program siarannya. Strategi ketiga adalah dengan menambah jam siaran dari program-program siaran pedesaan pada siang hari dan sore hari, sehingga petani, penyuluh dan warga pedesaan lainnya dapat secara intensif mengakses informasi-informasi mengenai usahatani dan bidang pertanian lainnya, serta mengundang nara sumber yang berkompeten untuk mengisi program siaran pedesaan tersebut, seperti penyuluh, tokoh petani, peneliti dan pengajar/dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bentley, J.E., O. Barea, S. Priou, H. Equisse and G. Thiele. 2007. Comparing Farmer Field Schools, Community Workshops, and Radio: Teaching Bolivian Farmers about Bacterial Wilt of Potato, *Journal of International Agricultural and Extension Education*, Volume 13 Number 3. University of Florida, USA
- Depari E. dan McAndrews, E. 1985. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Ding, A. 2016. Efektivitas Program Siaran Opini Publik "Selamat Pagi Kaltim" Program 1 RRI Samarinda. *e-Journal Ilmu Komunikasi*. Volume 4 No.3. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman. Samarinda
- Fachry, M.E dan A. Pertamasari. 2011. Analisis Efektifitas Metode Penyuluhan Pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Agribisnis* Volume X Nomor 3. Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin, Makassar
- Fahrianoor, S. Astuty dan Sarwani. 2012. Identifikasi Program Muatan Budaya Lokal dan Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pada Radio Lokal di Banjarmasin. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Volume 16 No.2. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin. Banjarmasin
- Harianti, N., T. Alhabsy dan Soekarto. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Publik di Kantor Radio Republik Indonesia Malang. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2, Nomor 1. FISIPOL Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Laila. 2012. Peranan Siaran Radio dalam Penyebaran Informasi Publik. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Volume 16 No.2. Balai



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin. Banjarmasin
- Nur, T.H.N dan T. Pamungkas. 2014. Pandangan dan Harapan Khalayak Terhadap RRI Jayapura: Sebuah Riset Audiens. Jurnal KomuniTi, Vol VI, No.1 Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Pramiyanti, A., L.P. Putri, I.P. dan R. Nureni. 2014. Motif Remaja Dalam Menggunakan Media Baru (Studi Pada Remaja Di Daerah Sub-Urban Kota Bandung). Jurnal KomuniTi, Vol VI, No.2 Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- RRI. 2011. Potret Studio Produksi. Direktorat Program dan Produksi LPP RRI Jakarta
- RRI. 2013. Company Profile. LPP RRI, Jakarta
- RRI. 2013. Pidato Direktur Utama RRI pada Hari Radio ke-68. Radio Republik Indonesia, Jakarta
- RRI. 2014. Nasional: SKP dan RB disosialisasikan, Direksi RRI Targetkan Angkasawan Setara dengan Broadcaster Dunia. <http://rri.co.id> Tanggal unggah 5 Mei 2014. Tanggal akses 11 Agustus 2016
- RRI. 2015. Penyampaian Direktur Utama LPP RRI. Raker Tengah Tahun. Dewan Pengawas RRI. Jakarta
- RRI. 2016. Home: Profil Radio Republik Indonesia. <http://rri.co.id> tanggal akses 11 Agustus 2016.
- Sanga, C., V. J. Kalungwizi, and C. P. Msuya. 2013. Building an agricultural extension services system supported by ICTs in Tanzania: Progress made, Challenges remain. International Journal of Education and Development



EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN PETANI TERNAK MELALUI PENDAMPINGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA SAPI POTONG DI KABUPATEN TANGERANG

Rika Jayanti Malik dan Eko Kardiyo

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten

Jl. Ciptayasa Km. 01 Ciruas, Serang, Banten 42182

Tlp: (0254) 281055 Fax: (0254) 282507 Email: rikabptpbanten@yahoo.com

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan proses berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian individu/kelompok. Tujuan kegiatan yaitu untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan petani ternak melalui pendampingan teknologi budidaya sapi potong. Pendampingan dilaksanakan di Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Pebruari-November 2014. Ruang lingkup pendampingan yaitu pelatihan dan temu lapang tentang teknologi budidaya sapi potong, dan display pemberian pakan tambahan untuk pejantan umur 1-2 tahun. Metode pengumpulan data menggunakan survey dengan teknik wawancara, diskusi dan recording bobot badan ternak. Alat pengambilan data menggunakan kuisioner terstruktur. Analisis perubahan pengetahuan petani ternak sapi potong diuji menggunakan uji Wilcoxon, perubahan pertambahan bobot badan harian (pbbh) sapi potong dianalisis secara diskriptif (sebelum dan sesudah), dan respon peserta temu lapang dianalisis secara diskriptif. Hasil yang diperoleh meliputi: (1) peningkatan pengetahuan petani ternak (61,44%), (2) peningkatan pbbh sapi potong (41,58%), dan (3) respon peserta temu lapang terhadap teknologi yang ditampilkan menunjukkan kategori puas. Pemberdayaan petani ternak sapi potong efektif melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas, pendampingan, budidaya sapi

ABSTRACT

Empowerment is a continuous process undertaken to realize the capacity and independence of the individual/group. The purpose of this activity is to determine the effectiveness of farmer empowerment through accompaniment cattle farming technology. Assistance was realized in the village Cileles of the District Tigaraksa Tangerang District on February until November 2014. The scope of the assistance that is training and field days on cattle farming technology, and showing supplementary feeding for bulls that aged between 1-2 years. Data was collected through survey methods by interviewing, discussion and recording animal body weight. Data retrieval tool using a structured questionnaire. Analysis of changes in farmers knowledge of cattle tested using the Wilcoxon test, body weight daily (pbbh) cattle were tested using descriptive analyze (before and after), and field days participants' responses were analyzed descriptively. The results obtained include: (1) increasing knowledge of livestock farmers (61.44%), (2) improvement of beef cattle pbbh (41,58%), and 3) field days participants response to cattle farming technology showing satisfied category. Empowerment of cattle farmers effectively through intensive mentoring and ongoing.

Keywords : effectiveness , assistance , cattle farming



PENDAHULUAN

Pencapaian swasembada daging dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat utuh dan halal merupakan salah satu sasaran yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014. Berdasarkan Press Release Konfrensi Pers Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan (2012), kebutuhan daging sapi dan kerbau untuk konsumsi dan industri sebanyak 484.000 ton. Ketersediaan daging dari sapi lokal 399.000 ton (82,5%), sehingga kekurangannya 85.000 (17,5%) dipenuhi dari impor. Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan produksi daging dalam negeri melalui program swasembada daging sapi/kerbau (PSDSK).

Lokasi pelaksanaan PSDSK, dikelompokkan menjadi dua yaitu 20 provinsi prioritas dan 13 provinsi pendukung. Provinsi Banten merupakan urutan ke-4 penyumbang populasi kerbau secara nasional. Posisi ini menjadikan Banten sebagai provinsi pendukung swasembada daging sapi/kerbau sejak tahun 2011. BPS Banten (2013), populasi kerbau di Banten sebanyak 124.108 ekor. Sebaran ternak kerbau terbesar di tiga lokasi yaitu: (1) Kabupaten Lebak 44.771 ekor (36,07%), (2) Kabupaten Serang 30.857 ekor (24,86%), dan (3) Kabupaten Pandeglang 29.106 ekor (23,45%). Sedangkan populasi sapi potong sebanyak 55.424 ekor dan sentranya (78,07%) berada di Kabupaten Tangerang (43.270 ekor).

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banten mendukung program Kementerian Pertanian melalui pelaksanaan pendampingan program swasembada daging sapi/kerbau (PSDSK) di Provinsi Banten. Pendampingan program dilaksanakan sejak tahun 2011-2014 di Kabupaten Lebak, Serang Pandeglang, dan Tangerang. Objek pendampingan adalah peternak dengan tujuan program yaitu meningkatkan produksi ternak. Konsep pemberdayaan diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya peternak.

Berdasarkan UU No 19 Th 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan



sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan petani ternak melalui pendampingan teknologi budidaya sapi potong di Kabupaten Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan PSDSK di Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada Februari-November 2014. Sampel penelitian (responden) merupakan sasaran pendampingan yaitu anggota kelompok Bina Karya (20 orang). Kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) introduksi teknologi budidaya sapi potong melalui pelatihan pada 18 Juni 2014, (2) aplikasi teknologi pakan melalui pemberian pakan tambahan kepada sapi potong selama 4 bulan (Mei-Agustus 2014), dan (3) temu lapang pada 18 November 2014.

Penelitian menggunakan metode kualitatif survey dengan teknik wawancara, dan diskusi dengan petani ternak dan pencatatan (*recording*) mengenai status ternak. Alat pengambilan data menggunakan kuisisioner terstruktur. Data yang diambil meliputi: (1) tingkat pengetahuan petani ternak sebelum dan setelah pelatihan teknologi budidaya sapi potong, (2) bobot badan ternak yang diukur setiap bulan sekali, (3) respon peserta terhadap teknologi yang ditampilkan dan pelaksanaan temu lapang.

Manurut Satori (2009) bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan kondisi peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan instrumen pengambilan data yang digunakan memuat pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Hasil wawancara akan memudahkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Data tentang peningkatan pengetahuan petani ternak tentang teknologi budidaya sapi potong diuji menggunakan uji Wilcoxon. Data tentang



pertambahan bobot badan harian ternak dianalisis secara diskriptif yaitu membandingkan bobot awal dan bobot akhir ternak. Sedangkan respon petani ternak sapi potong terhadap teknologi yang ditampilkan dianalisis secara deskriptif. Indikator pemberdayaan yang efektif dalam tulisan ini meliputi: (1) perubahan perilaku peternak, (2) peningkatan produksi ternak, dan (3) respon peternak menunjukkan puas terhadap pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Wilayah dan Responden

Kelompok Bina Karya terletak di Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data yang tercantum dalam Profil Desa (2012), luas wilayah Desa Cileles 578,32 ha dengan mayoritas penggunaannya adalah tanah sawah 348,56 ha (60,3%). Jumlah penduduk 7.117 orang terdiri dari laki-laki 3.411 orang (47,93%) dan perempuan 3.706 orang (52,07%). Mata pencaharian penduduk mayoritas laki-laki bekerja sebagai petani dan buruh tani (869 orang), sedangkan perempuan sebagai karyawan perusahaan swasta sebanyak 730 orang.

Kelompok Bina Karya terbentuk tahun 2010 dengan anggota berjumlah 20 orang (laki-laki) mayoritas sebagai petani. Kisaran umur 21-70 tahun dengan pendidikan mulai tidak sekolah hingga lulus perguruan tinggi. Keberagaman umur dan latar belakang pendidikan tentunya menjadi peluang bagi kelompok Bina Karya mandiri dan maju. Pendidikan baik formal maupun informal merupakan sarana belajar untuk meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya akan menanamkan pengertian sikap dan mempengaruhi kemampuan petani untuk dapat bertindak yang lebih rasional sehingga semakin tinggi penerimaannya terhadap suatu inovasi (Suharyanto, dkk. 2006).

Sistem pemeliharaan sapi potong secara intensif dalam kandang koloni. Kisaran kepemilikan ternak 1-6 ekor/KK. Pakan yang diberikan berupa rumput lapang dan jerami padi (tersedia setelah panen). Sistem perkawinan menggunakan campuran inseminasi buatan (IB) dan alam. Berdasarkan laporan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pendampingan PSDSK di Provinsi Banten, Malik dkk (2014) melaporkan bahwa keberhasilan IB di kelompok Bina Karya mencapai 58,33%.

Tingkat Pengetahuan Responden

BPTP Banten berupaya meningkatkan petani ternak melalui pelatihan. Pelaksanaan pelatihan mempertimbangkan karakteristik individu petani ternak meliputi umur, pendidikan dan kepemilikan ternak (Tabel 1). Pelatihan merupakan metode alih inovasi yang komunikasinya secara langsung. Petani dan sumber informasi dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman tentang berbagai aspek berkaitan dengan teknologi (Paryono dkk, 2004). Sedangkan tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan peserta agar mampu megadopsi teknologi dan mendiseminasikan teknologi yang diajarkan (Wulanjari dkk, 2009a).

Tabel 1. Data umur, pendidikan, dan kepemilikan ternak peserta pelatihan.

Karakteristik	Jumlah Peserta (Orang)	Prosentase (%)
Kategori Umur		
Muda (20-36 th)	7	35
Dewasa (37-53 th)	10	50
Tua (54-70 th)	3	15
Jumlah	20	100
Kategori Pendidikan		
Rendah (SD/ sederajat)	14	70
Sedang (SLTP/ sederajat)	4	20
Tinggi (SLTA/ sederajat)	2	10
Jumlah	20	100
Kategori Kepemilikan Ternak		
Sedikit (1-2 ekor)	11	55
Sedang (3-4 ekor)	5	25
Banyak (5-6) ekor	4	20
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Pada Tabel 1 diketahui bahwa usia termuda 20 tahun dan tertua 70 tahun. Mayoritas umur peserta pelatihan kategori dewasa (50%), sehingga harapannya usia produktif mampu mewujudkan proses diseminasi yang efektif. Idealnya usia seseorang berkaitan erat dengan kemampuan fisik/panca indera dalam menerima dan menerapkan materi. Kapasitas belajar seseorang akan meningkat



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

sampai dengan usia dewasa dan mulai menurun dengan bertambahnya usia (Slameto, dkk. 2014).

Tabel 1 menginformasikan mayoritas pendidikan peserta pelatihan kategori rendah (SD/Sederajat) sebesar 70% (14 orang). Tingkat pendidikan formal berhubungan dengan tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap ilmu yang diperoleh. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan bobot kurikulum yang ditempuh dalam pendidikan formal memungkinkan seseorang lebih tinggi tingkat pengetahuannya. Sehingga idealnya semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula kemampuan menerima dan menelaah informasi yang diterimanya (Sulistiyono L dkk, 2008).

Kepemilikan ternak anggota kelompok Bina Karya (Tabel 1) didominasi kategori sedikit 1-2 ekor/KK (55%). Rata-rata kepemilikan ternak 2,9 ekor/KK. Sejalan dengan penelitian Wulajari, dkk (2009b) bahwa rata-rata kepemilikan ternak petani di Kabupaten Temanggung sebesar 2,93 ekor/orang. Peserta pelatihan yang memelihara ternak semakin termotivasi untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh ilmu. Karena setelah pulang pelatihan peserta dapat mempraktikkan langsung pada ternak mereka.

Parameter tingkat pengetahuan peserta pelatihan yaitu nilai yang diperoleh dari hasil sebelum (*pre test*) dan setelah (*post pest*) pelatihan. Selisih nilai menunjukkan ada tidaknya peningkatan pengetahuan peserta pelatihan. Komponen yang dinilai dalam teknologi budidaya sapi potong meliputi ciri-ciri bibit yang baik, sistem reproduksi, manajemen perkawinan, sistem pemeliharaan dan pakan. Adapun nilai *pre test*, *post test* dan selisih nilai peserta pelatihan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Pres Test dan Post Test dan Peserta Pelatihan Teknologi Budidaya Sapi Potong

Jumlah Peserta (orang)	Rata-rata nilai Pre test	Rata-rata nilai post test	Selisih
20	10,45	27,10	16,65
Peningkatan pengetahuan (%)			61,44

Sumber: Data Primer Diolah, 2014



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Anggota kelompok Bina Karya 100% mengalami peningkatan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan (Tabel 2) sebesar 61,44%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan memiliki kontribusi positif terhadap perubahan pengetahuan peserta. Peningkatan pengetahuan peserta pelatihan selanjutnya dianalisis dengan uji Wilcoxon untuk mengetahui signifikan tidaknya peningkatan pengetahuan tersebut (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttest – Pretest	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	20 ^b	10.50	210.00
	Ties	0 ^c		
	Total	20		

a. Posttest < Pretest

b. Posttest > Pretest

c. Posttest = Pretest

Test Statistics^b

	Posttest – Pretest
Z	-3.926 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
a. Based on negative ranks.	
b. Wilcoxon Signed Ranks Test	

Hasil uji statistik menggunakan Wilcoxon menerangkan bahwa keseluruhan peserta pelatihan 20 orang memiliki nilai *post test* lebih tinggi dibanding *pres test* (20^b). Nilai Z kurang dari Asymp. Sig. (2-tailed) (-3,96 < 0.000) menunjukkan terdapat peningkatan pengetahuan peserta pelatihan yang nyata setelah mengikuti pelatihan.

Peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti pelatihan menjadi salah satu indikator pelatihan yang efektif. Pelatihan yang efektif merupakan salah satu metode pemberdayaan petani ternak. Berawal dari peningkatan pengetahuan diharapkan mampu membangkitkan motivasi untuk menerapkan teknologi sehingga usaha ternak menjadi lebih maju. Sama halnya dengan komoditas yang lain, Kuntarningsih Apri dan Joko Mariyono (2016) menyatakan



bahwa pelatihan berperan dalam peningkatan sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap peningkatan produksi tanaman.

Introduksi Teknologi Pakan Ternak

Introduksi teknologi pakan ternak di Desa Cileles melalui aplikasi pemberian pakan tambahan pada ternak. Ternak yang digunakan yaitu sapi potong pajantan (16 ekor) dengan kisaran umur 1-2 tahun. Data awal yang diambil yaitu bobot badan ternak yang dijadikan acuan untuk menghitung kebutuhan pakan tambahan harian. Setiap ternak memiliki bobot badan yang berbeda-beda sehingga kebutuhan pakan berbeda. Pakan tambahan yang diberikan kisaran 3-4% dari bobot badan (bahan kering). Data pertambahan bobot badan harian (pbbh) ternak ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pertambahan Bobot Badan Sapi Potong di Desa Cileles

Keterangan	N (Ekor)	Rata-Rata BB awal (Kg)	Rata-Rata BB Akhir (Kg)	Rata-Rata PBBH (g/hr)	Peningkatan PBBH (%)
P1	5	133,42	184,998	560,63	48,18
P2	5	158,62	195,5	401,89	28
P3	5	138,302	190,074	562,74	48,37
P0	1	134,56	161,29	290,54	0
Total rata-rata peningkatan pbbh (%)					41,58

Keterangan: P1 : Konsentrat + Comin Block; P2 : Ampas Tahu + Comin Block; P3: Comin Block; P0 : Kontrol (Hijauan)

Pada Tabel 4 diketahui bahwa pemberian pakan tambahan sesuai kebutuhan gizi memberikan pbbh yang signifikan (41,58%). Aplikasi pemberian pakan tambahan merupakan upaya meningkatkan motivasi petani ternak agar memperhatikan kebutuhan gizi ternak. Pakan yang cukup dengan gizi seimbang lebih memudahkan petani ternak dalam memelihara terutama untuk pola penggemukan (4 bulan). Selanjutnya Hendrik, dkk (2004), menyatakan bahwa pemberian Starbio dan Bioplus dalam pakan sapi memberikan respon positif terhadap kecepatan pertambahan bobot badan sapi potong dan meningkatkan pendapatan bagi petani. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar PBBH yang diperoleh maka pendapatan peternak akan semakin besar dan usahanya menjadi ekonomis.



Respon Temu Lapang

Peserta temu lapang berjumlah 80 orang, terdiri atas tim pendamping (peneliti/penyuluh) BPTP Banten, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang dan petani ternak sapi potong lingkup Desa Cileles. Teknologi yang ditampilkan dan dievaluasi meliputi: teknologi pengolahan limbah, teknologi pakan ternak, teknologi perbibitan. Setelah pelaksanaan temu lapang, peserta diarahkan untuk mengisi lembar penilaian terhadap teknologi yang ditampilkan. Kategori penilaian teknologi terbagi menjadi: (1) tidak puas dengan nilai < 6 , (2) cukup puas dengan nilai 7-11, dan (3) puas dengan nilai > 12 . Hasil penilaian peserta temu lapang dengan nilai rata-rata sebesar 12,72 (puas).

PENUTUP

Pemberdayaan petani ternak melalui pendampingan teknologi budidaya sapi potong Kabupaten Tangerang efektif dengan indikator: peningkatan pengetahuan petani ternak yang nyata setelah mengikuti pelatihan, peningkatan pbbh sapi potong yang signifikan setelah mendapatkan pakan tambahan, dan peserta temu lapang merasa puas terhadap teknologi yang ditampilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Banten Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Dirjen PKH dan Keswan. 2012. *Press Release Konfreksi Pers Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tentang Supply Dan Demand Daging Sapi/Kerbau Sampai Dengan Desember 2012*. Jakarta.
- Satori D., Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Wulanjari M. Eti, Trie Joko Paryono, Nasriati. 2009a. *Kajian Peningkatan Pengetahuan Petani melalui Pelatihan Pengembangan Agribisnis Peternakan*. Dalam: Masganti, Suprpto, Akhmad Prabowo, Yulia Pujiharti, Robet Asnawi, Alvi Yani, penyunting. Open House BPTP Lampung. Prosiding Seminar Inovasi Teknologi Peningkatan Produksi Pertanian Spesifik Lokasi. Bogor.



PERSEPSI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN TERHADAP PROGRAM UPAYA KHUSUS PADI JAGUNG DAN KEDELAI DI KABUPATEN SLEMAN

Ade Intan Christian, Subejo², Dyah Woro Untari³

Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana, UGM

²Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

adeintanch@yahoo.com

ABSTRAK

Upaya peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui UPSUS PAJALE. Kegiatan UPSUS PAJALE melibatkan penyuluh pertanian, Babinsa, dan Mahasiswa pendamping. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi penyuluh pertanian lapangan terhadap program UPSUS PAJALE dan mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi penyuluh pertanian lapangan terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui survey. Pemilihan responden digunakan metode sensus dan diambil seluruh penyuluh Tanaman Pangan Hortikultura (PNS dan THL-TBPP) di delapan UPT BP3K yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dengan jumlah 66 orang. Analisis yang digunakan dalam pengujian data adalah tes proporsi dan regresi linier berganda. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% penyuluh pertanian memiliki persepsi yang baik terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman. Sedangkan, persepsi penyuluh pertanian dipengaruhi secara signifikan oleh empat faktor yaitu pengalaman, pengetahuan, pengharapan, dan manfaat.

Kata kunci: Persepsi, Penyuluh Pertanian Lapangan, UPSUS PAJALE, Sleman

PENDAHULUAN

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA (BIPA UMM, 2014). Upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menyusun dan melaksanakan program Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai. Swasembada tiga komoditas strategis tersebut ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2017. Target produksi yang akan dicapai pada tahun 2015 disajikan pada Tabel 1. Angka target peningkatan



produksi pada tiga komoditas pangan tersebut termasuk sangat tinggi, sehingga diperlukan serangkaian upaya khusus untuk mencapainya. Kementerian Pertanian telah merancang dan menetapkan Upaya Khusus Padi, Jagung, dan Kedelai (UPSUS PAJALE) secara nasional.

Tabel 1. Target Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2015

No	Komoditas	Produksi (juta ton)	Peningkatan (%)
1	Padi	73,4	2,21
2	Jagung	20,3	5,57
3	Kedelai	1,2	26,47

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2015

Selama ini, petani sebagai pelaku utama budidaya pertanian didampingi oleh penyuluh pertanian dalam usaha untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, sejak dua dasawarsa terakhir sistem kelembagaan dan sistem tata kerja penyuluhan pertanian mengalami pola perubahan yang tidak jelas, situasi tersebut tentu berdampak terhadap peran penyuluhan di Indonesia (Subejo, 2013).

Setiap penyuluh akan memberikan makna kepada stimulus dengan cara yang bermacam-macam terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Menurut Narso (2012) persepsi bersifat individual sehingga meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berpikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu. Keadaan tersebut dapat terjadi pada penyuluh pertanian.

Persepsi ialah tentang bagaimana individu memahami informasi yang mereka terima atau mendaftar menggunakan indera mereka. (Brehm *et al*, 1999). Menurut Umstot (1999) persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yakni obyek, individu, dan situasi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor situasi atau konteks dimana proses persepsi itu berlangsung, baik situasi fisik-alam maupun nonfisik atau suasana. Beberapa faktor yang termasuk faktor situasi ini antara lain: faktor ekologis, waktu, suasana (*setting*), teknologi, dan lingkungan sosial (Riyanto, 2008). Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain pendidikan dan dengan pengalaman masa lalu (Démuth, 2013).



Secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu yang meliputi obyek dan faktor situasi. Faktor internal yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dalam diri individu. Faktor internal persepsi meliputi motif, minat, harapan, sikap, pengetahuan, pengalaman (Siagian, 1996).

Penelitian ini untuk mengetahui tingkat persepsi penyuluh pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Persepsi penting untuk diteliti dikarenakan perilaku penyuluh sangat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu obyek, sehingga cara penyuluh mempersepsikan UPSUS PAJALE akan berdampak pada implementasi kegiatan ketika penyuluh melaksanakan tugas pendampingan dan pengawalan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang yang kemudian dibahas secara faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antara fenomena yang diteliti.

Lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Sleman dikarenakan Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah pelaksanaan program swasembada pangan tahun 2015- 2017 melalui UPSUS PAJALE. Berdasarkan data BPS DIY (2014) Kabupaten Sleman memberikan andil 43,50% total produksi padi, 10,45% total produksi jagung, serta 1,96% total produksi kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluh pertanian TPH, baik penyuluh THL-TBPP maupun penyuluh PNS yang ikut terlibat di dalam program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman. Penyuluh pertanian



tersebut berada dalam 8 UPT BP3K. UPT BP3K Wilayah I, II, III, IV, V, VI, VII, DAN VIII. Berdasarkan masing-masing UPT, diambil seluruh populasi penyuluh TPH yakni 66 orang penyuluh.

Penyimpulan hipotesis apakah diterima atau ditolak dilakukan melalui analisis terhadap data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan membuat tabulasi dari data yang telah terkumpul. Setelah itu dilakukan analisis dengan menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan hipotesis.

Pengujian Hipotesis Pertama

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui tingkat persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman dengan menggunakan uji proporsi sebagai berikut:

Hipotesis yang digunakan:

H_0 : $P \leq 50\%$

H_a : $P > 50\%$

Dengan pengertian:

H_0 : Diduga kurang dari atau sama dengan 50% penyuluh pertanian memiliki persepsi yang baik terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE.

H_a : Diduga lebih dari 50% penyuluh pertanian memiliki persepsi yang baik terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE.

Statistik pengujian dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Z_{hitung} = \frac{\left(\frac{x}{n}\right) - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(x - P_0)}{n}}}$$

Keterangan:

x : jumlah penyuluh pertanian yang memiliki persepsi baik

n : jumlah keseluruhan penyuluh pertanian yang digunakan sebagai responden

P_0 : 50%

Tingkat signifikansi 0,1 (10%), $n=66$



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kriteria pengujian

Zhitung < Z tabel: Ho diterima, Ha tidak diterima

Zhitung > Z tabel: Ho tidak diterima, Ha diterima

Pengujian hipotesis kedua

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penyuluh pertanian terhadap penyuluh pertanian memiliki persepsi yang baik terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE dilakukan analisis linear berganda.

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = A + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + b_9X_9$$

Keterangan:

Y: Persepsi penyuluh pertanian

A: nilai konstanta

b_1, b_9 koefisien regresi

X_1 : umur

X_2 : pendidikan

X_3 : pengalaman

X_4 : pengetahuan

X_5 : kebiasaan

X_6 : sikap

X_7 : pengharapan

X_8 : lingkungan

X_9 : manfaat

Hipotesis yang digunakan

$$H_0 = X_1 = X_2 = X_3 = X_4 = X_5 = X_6 = X_7 = X_8 = X_9$$

$$H_a = X_1 \neq X_2 \neq X_3 \neq X_4 \neq X_5 \neq X_6 \neq X_7 \neq X_8 \neq X_9$$

Dengan pengertian:

H_0 : Diduga tidak ada pengaruh antara umur, pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, sikap, ekspektasi, lingkungan dan manfaat dengan persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman



Ha : Diduga ada pengaruh antara umur, pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, sikap, ekspektasi, lingkungan dan manfaat dengan persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Penyuluh Pertanian terhadap Program UPSUS PAJALE

Penyuluh pertanian memiliki persepsi baik terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE. Persepsi penyuluh pertanian masuk kategori baik yakni 98,48%. Penyuluh pertanian di Kabupaten Sleman menunjukkan mereka memiliki persepsi dalam kategori baik terhadap pelaksanaan UPSUS PAJALE. Persepsi penyuluh pertanian yang mencapai kategori baik menunjukkan mereka memandang positif pelaksanaan UPSUS PAJALE. Hasil uji proporsi menunjukkan nilai Ztabel sebesar -1,281 dan Zhitung sebesar 0,694, Zhitung lebih besar daripada Ztabel sehingga H_0 tidak diterima dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan lebih dari 50%

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penyuluh Pertanian Lapangan terhadap Program UPSUS PAJALE

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan UPSUS PAJALE dapat diketahui melalui uji regresi linear berganda dengan metode *Backward* menggunakan IBM SPSS Statistics 19. Pada model terakhir yakni model 6 menampilkan empat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penyuluh Pertanian Model 6

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T Hitung	Sig
Pengalaman	0,029	1,914	0,060*
Pengetahuan	0,052	1,931	0,058*
Pengharapan	0,537	5,849	0,000*
Manfaat	0,082	1,828	0,072*
Konstanta	6,471		
R square	0,543		



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T Hitung	Sig
Adjusted square	0,513		
Fhitung	18,126		
Ftabel	3,789		

Keterangan: *signifikan pada taraf 10%

Sumber: Analisis Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui variabel yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi penyuluh pertanian adalah pengalaman (X3), pengetahuan (X4), pengharapan (X7), dan manfaat (X9). Nilai signifikansi variabel pengalaman 0,06, variabel pengetahuan 0,058, variabel pengharapan 0,000, variabel manfaat 0,072. Nilai signifikansi variabel pengalaman, pengetahuan, pengharapan, dan manfaat lebih kecil daripada taraf signifikansi $\alpha=0,1$, hal tersebut menjelaskan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh secara nyata pada persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program swasembada pangan melalui UPSUS PAJALE. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6,471 + 0,029 X3 + 0,052 X4 + 0,537 X7 + 0,082 X9$$

Keterangan:

Y = Persepsi penyuluh pertanian

X3 = Pengalaman

X4 = Pengetahuan

X7 = Pengharapan

X9 = Manfaat

Penjelasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penyuluh pertanian adalah sebagai berikut:

Pengalaman (X3)

Variabel pengalaman berpengaruh (+) pada persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel pengalaman dengan persepsi penyuluh pertanian adalah searah. Semakin banyak pengalaman penyuluh pertanian maka semakin baik pula persepsi penyuluh pertanian.



Pengetahuan (X4)

Variabel pengetahuan berpengaruh (+) pada persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel pengetahuan dengan persepsi penyuluh pertanian adalah searah. Semakin tinggi pengetahuan penyuluh pertanian maka semakin baik pula persepsi penyuluh pertanian lapangan terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman.

Pengharapan (X7)

Variabel pengharapan berpengaruh (+) pada persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel pengharapan dengan persepsi penyuluh pertanian adalah searah. Semakin tinggi pengharapan penyuluh pertanian maka semakin baik pula persepsi penyuluh pertanian.

Manfaat (X9)

Variabel manfaat berpengaruh (+) pada persepsi penyuluh pertanian terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan arah hubungan antara variabel manfaat dengan persepsi penyuluh pertanian adalah searah. Semakin tinggi manfaat UPSUS PAJALE maka semakin baik pula persepsi penyuluh pertanian lapangan terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman.

PENUTUP

Sesuai dengan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui sebanyak lebih dari 50% penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Sleman memiliki persepsi yang baik terhadap program UPSUS PAJALE. Faktor yang berpengaruh signifikan secara positif pada persepsi penyuluh pertanian lapangan terhadap pelaksanaan program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman adalah pengalaman, pengetahuan, pengharapan, dan manfaat.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. 2014. *Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014*. BPS DIY, Yogyakarta.
- BIPA UMM. 2014. *Jokowi-JK Andalkan Nawa Cita, Sembilan Agenda Prioritas untuk Indonesia*. http://bipa.umm.ac.id/arsip/id-berita_nasional_umm_3900.pdf. Diakses pada tanggal 26 November 2015.
- Brehm, S. S., S. M. Kassin and S. Fein. 1999. *Social Psychology*. MA: Houghton Mifflin Company, Boston.
- Démuth, A. 2013. *Perception Theories*. Faculty of Philosophy and Arts. Tranava University, Trnava.
- Kementerian Pertanian RI. 2015. *Modul Pemberdayaan Pengawalan Mahasiswa dalam Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2015*. Kementerian Pertanian RI, Jakarta.
- Narso. 2012. *Persepsi Penyuluh Pertanian Lapang Tentang Perannya dalam Penyuluhan Pertanian Padi di Provinsi Banten*. Institut Pertanian Bogor. Disertasi Doktor.
- Permentan Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang membidangi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.
- Riyanto S. 2010. *Persepsi dan komunikasi dalam: Hubeis AVS, editor. Dasar-dasar komunikasi*. 2010. Sains KPM IPB Pr, Bogor.
- Siagian, S.P. 1996. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Subejo. 2013. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Umstot, D.D. 1999. *Understanding Organizational Behaviour*. West Publising Company, New York.



ANALISIS TINGKAT PENERAPAN INOVASI TEKNOLOGI PTT PADI PADA KAWASAN DAN NON KAWASAN PENGEMBANGAN PADI DI KECAMATAN TABIR, KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

Siti Sehat Tan dan Rita Indrasti

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Jalan Tentara Pelajar No 10, Cimanggu - Bogor

E-mail: sititan2010@gmail.com

ABSTRAK

Pendampingan kawasan padi, jagung dan kedelai (Pajale) yang dilakukan oleh peneliti BPTP dan didukung oleh peneliti UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, diharapkan dapat mempercepat adopsi inovasi teknologi oleh petani dalam usaha peningkatan produksi dan produktivitas Pajale, khususnya padi di wilayah jambi. Penelitian dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner yang telah disiapkan yang meliputi beberapa variabel; (1) Pengetahuan dan penerapan petani terhadap komponen teknologi pada pendekatan PTT padi, dan (2) Respon dan apresiasi petani terhadap PTT padi. Indikator kelayakan dianalisis berdasarkan ratio penerimaan (revenue) atas biaya (cost) atau R/C Rasio (Soekartawi, 2006). Hasil analisis menunjukkan Adopsi inovasi teknologi PTT padi masih bervariasi dan tidak signifikan pada komponen tertentu yaitu pemberian pupuk organik dan sistem tanam jarak legowo. Hasil analisis efisiensi usahatani cukup menguntungkan, dengan nilai R/C Ratio 2,5, yang artinya bahwa usahatani padi di wilayah lahan tadah hujan di desa Dusun Baru menguntungkan dan layak dikembangkan karena memiliki R/C ratio di atas 1 (satu).

Kata kunci : Tingkat penerapan, GPPTT padi, kawasan dan non kawasan

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan pangan nasionalnya, Indonesia selain memproduksi sendiri juga mengimpor dari berbagai negara. Pada tahun 2012 misalnya, Indonesia masih mengimpor beras sebanyak 1,95 juta ton dan juga berbagai jenis bahan pangan lainnya¹. Ketidakmampuan Pemerintah Indonesia dan masyarakat menyediakan bahan pangannya, telah menjadi masalah yang serius dan tentu saja menjadi lebih serius di waktu yang akan datang. Usaha pemerintah dengan berbagai program dalam meningkatkan produktivitas padi di berbagai daerah memberikan hasil yang menggembirakan, di tahun 2016 stok

¹Menurut Aliansi Desa Sejahtera (2012), pada Tahun 2012, Indonesia juga mengimpor Jagung 2 juta ton, Kedelai 1,9 juta ton, Daging Sapi setara 900.000 ekor, gula 3 juta ton, dan teh 11 juta dolar USA



beras nasional dalam negeri mencapai 2,2 juta ton. Jika rata-rata konsumsi nasional hanya 232 ton per bulan, maka stok tersebut mencukupi untuk 7 bulan kedepan.²

Perbaikan yang mulai nampak di tahun 2016, menunjukkan ketahanan pangan Indonesia kini berada di peringkat ke-71 dari 113 negara yang diobservasi. Indonesai masih tetap berada di katagori rendah, namun meningkat secara signifikan dari peringkat 76 di tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah melalui pendampingan dan pengawalan GPPTT oleh peneliti di berbagai BPTP didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian. Snodgrass, Wallace dan Hanafie dalam (Rifai, 2012) mendefenisikan kebijakan pertanian sebagai suatu usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik secara bertahap, berkelanjutan melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan. Dalam konteks kekinian, pendampingan dan pengawalan GPPTT padi adalah terciptanya sinergi pendampingan yang lebih baik dan teradopsinya komponen teknologi PTT.

Pemerintah telah menetapkan kabupaten Merangin di Provinsi Jambi sebagai kawasan pengembangan komoditas padi, Luas pertanaman padi di Provinsi Jambi mencapai 180.221 hektar, tersebar di 11 kabupaten/kota. Daerah yang terluas pertanaman padi dan merupakan daerah sentra produksi padi di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Kerinci dengan luas masing-masing 32.616 ha, 31.284 ha dan 28.252 ha. Produktivitas komoditas ini masih rendah yaitu 44,24 ku/ha (BPS Prov. Jambi, 2014).

Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh pengelolaan komoditas belum terpadu dan dari aspek teknis dan non-teknis pada suatu kawasan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/ Permentan / OT.140/8/2012 tentang kawasan pengembangan pertanian yang komprehensif, dan memberikan tugas kepada instansi di lingkup Kementerian Pertanian untuk melaksanakan dan mendukung empat sukses

² Menteri Pertanian (2016)



Kementan. Empat sukses yang pertama adalah peningkatan swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, gula, daging sapi, jagung dan kedelai). Dengan demikian, pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauhmana dampak pendampingan dan penerapan inovasi teknologi PTT padi terhadap peningkatan produktivitas

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan kajian lapang dilakukan pada bulan Agustus 2015 di Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Lokasi dipilih secara sengaja (purposive), didasarkan pada argumentasi bahwa lokasi pengkajian merupakan kawasan pengembangan komoditas padi dan merupakan lokasi GPPTT. Responden adalah petani padi dalam kawasan pengembangan dan non kawasan. Responden ditentukan secara sengaja (purposive), dengan Jumlah responden sebanyak 30 orang³.

Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, terutama yang terkait dengan pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan panduan pertanyaan kunci dalam kuesioner, mencakup:

- a. Pengetahuan dan penerapan petani terhadap komponen teknologi pada pendekatan PTT padi
- b. Respon dan apresiasi petani terhadap PTT padi
- c. Struktur pembiayaan usahatani

Data-data yang terkumpul diedit dengan metode tabulasi dan dianalisis secara deskriptif

Pendapatan usahatani dianalisis berdasarkan penerimaan dengan pembiayaan usahatani. Indikator kelayakan dianalisis berdasarkan ratio penerimaan (*revenue*) atas biaya (*cost*) atau R/C Rasio (Soekartiwi, 2006).

$$Pd = TR - TC$$

³ Dihitung berdasarkan Rumus Slovin



Di mana

Pd : Pendapatan usahatani padi,

TR : Total penerimaan usahatani padi, dan

TC: Total biaya usahatani padi

Sedangkan efisiensi usahatani padi dihitung dengan rumus:

Efisiensi= R/C

Dimana

R : total penerimaan usahatani padi dan

C : total biaya usahatani padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi Di Provinsi Jambi

Produksi padi di Provinsi Jambi pada tahun 2015, diperkirakan meningkat 122.228 ton gabah kering giling, yakni meningkat dari tahun 2014 sebesar 664.721 ton menjadi 786.948 pada tahun 2015. Sedangkan menurut angka ramalan BPS, produksi padi diperkirakan meningkat menjadi 786.948 ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 122.228 ton atau sebesar 18,39 persen dibandingkan 2014 (BPS Jambi, 2015). Peningkatan produksi pada tahun 2015 diperkirakan menyumbang produksi nasional sebesar 1,04 persen. Kenaikan produksi padi terjadi disebabkan adanya peningkatan produktivitas sebesar 2,17 kuintal atau sebesar 5 persen.

Peningkatan produktivitas di daerah Jambi pada umumnya dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat setempat. Menurut pengalaman dari peneliti BPTP, budaya masyarakat yang senang berbagi memberikan dampak terhadap produktivitas komoditas pertanian. Kasus yang dijumpai disalah satu lokasi PTT, apabila mendapat bantuan penuh hanya untuk 1 LL atau kepada 25 orang (25 Ha), sedangkan kelompok tersebut berjumlah 50 orang maka bantuan tersebut akan dibagi kepada 50 orang, dengan demikian rekomendasi teknologi tidak lagi sepenuhnya diterapkan.



Kabupaten Merangin merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Jambi. Secara umum areal potensial untuk padi ladang dan padi sawah sekitar 32.616 hektare. Kabupaten Merangin pada tahun 2015 mendapatkan sasaran UPSUS padi seluas lebih kurang 23.589 ha, dengan sasaran luas panen seluas 22.645 ha. Sasaran produktivitas 43.79 kwintal perhektar dan sasaran produksi 99.155 ton.

Salah satu Desa atau Dusun di Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir yaitu Dusun Baru merupakan bagian dari sentra produksi padi, dengan luas lahan Basah 1.727 ha (18,20 persen) dan lahan kering 7.773 (81,80 persen). Luas tanam padi sawah 780 hektar, luas panen 750 hektar, dengan rata-rata produksi 3.750 ton. Padi gogo, luas tanam 85 hektar, luas panen 80 hektar, dengan rata-rata produksi 160 ton.

Perbandingan Tingkat Penerapan Teknologi GP-PTT Padi

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa pengetahuan petani terhadap semua komponen teknologi, baik petani dalam kawasan maupun diluar kawasan memiliki persentase yang berimbang, demikian halnya dalam penerapan inovasi teknologi tersebut. Perbedaan yang cukup signifikan hanya pada penerapan sistem tanam jajar legowo dan pemupukan berimbang. Mundy 2000; Rogers 2003 menjelaskan beberapa tahapan dalam proses adopsi adalah: (1) tahap kesadaran, (2) tahap perhatian, (3) tahap percobaan, (4) tahap adopsi dan tahap konfirmasi (Mundy 2000; Rogers 2003). Dalam kajian ini, sebagian besar petani telah sampai pada tahap percobaan dan tahap adopsi.

Sementara hasil kajian Sudaratmaja *et al.* (2009) menunjukkan bahwa perilaku petani menuju pelaksanaan IP Padi 400 (inovasi baru) ditentukan oleh wawasan petani, motivasi mencapai keberhasilan, keaktifan petani mencari inovasi dan intensitas penyuluhan. Sementara Basuno (2003) mengatakan bahwa dalam proses adopsi inovasi teknologi, motivasi petani adalah salah satu variable yang sangat menentukan. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluh secara intensif telah terbukti berdampak positif terhadap kemajuan usahatani.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 1. Jenis Teknologi yang diterapkan Peserta GP-PTT Padi dan Non GP-PTT

No	Komponen teknologi	Peserta GP-PTT			Non GP-PTT		
		Jumlah Responden	Mengetahui (%)	Menerapkan (%)	Jumlah Responden	Mengetahui (%)	Menerapkan (%)
1	Penggunaan VUB	4	100	100	26	100	100
2	Benih bermutu dan sehat	4	100	60	26	100	57
3	Pemberian bahan organik	4	100	30	26	100	19
4	Pengaturan populasi tanaman jajar Legowo	4	100	50	26	100	25
5	Pemupukan Berimbang/ berdasarkan kebutuhan	4	100	80	26	100	15
6	Pengendalian OPT sesuai PHT	4	100	80	26	100	11,5
7	Pengolahan tanah yang baik	4	100	100	26	100	100
8	Umur bibit muda (<21hari)	4	100	100	26	100	100
9	Tanam bibit 1-3 batang per rumpun	4	100	80	26	100	78
10	Pengairan efektif dan efisien (intermiten)	4	100	0	26	100	0
11	Penyiangan dengan gasrok/landak	4	100	100	26	100	35
12	Penanganan panen dan pasapanen tepat waktu	4	100	100	26	100	100

Sumber data: Data Primer diolah, 2014



Beberapa komponen teknologi yang sulit diterapkan, seperti sistem tanam jajar legowo dan pemberian pupuk terutama pupuk organik, disebabkan oleh belum terbiasanya petani melakukannya sehingga merasa lambat dan menambah biaya serta kemampuan finansial rumah tangga petani yang berbeda. Kendala lainnya adalah masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani menggunakan PUTS. Utama et al (2007) mengatakan, petani di daerah perdesaan merasakan ada resiko untuk mengadopsi teknologi baru yang dinamakan sebagai resiko teknologi sehingga petani lambat mengadopsi teknologi tersebut.

Walaupun tidak semua komponen teknologi diterapkan sekaligus, menurut Abdulrahman, *et al* (2013) terdapat komponen teknologi yang merupakan keharusan (compulsory) untuk budidaya padi sawah yaitu penggunaan (1) benih bermutu, (2) varietas unggul sesuai lokasi, (3) sistem tanam yang tepat, (4) pupuk yang efisien, dan PHT sesuai. Petani yang sudah melakukan sistem tanam jajar legowo mengakui bahwa dengan penerapan legowo tanaman kurang diserang tikus, pemeliharaan tanaman (memupuk, menyiang dan penyemprotan hama penyakit) lebih mudah dan adanya peningkatan produktivitas hasil mulai 20-30%.

Respon Dan Apresiasi Petani Terhadap Gerakan Penerapan PTT Dalam Peningkatan Adopsi Komponen Teknologi

Dalam kajian ini respon dan apresiasi petani terhadap komponen teknologi pada program Gerakan Penerapan PTT dari aspek pengetahuan sudah cukup baik, namun penerapannya yang belum maksimal. Hal ini berarti bahwa timbulnya kesadaran akan adanya hal yang baru tersebut dan adanya keinginan untuk memilih. Selanjutnya memasuki tahap tanggap yang menimbulkan keyakinan dan kemauan untuk mengikuti. Selanjutnya keyakinan dapat menimbulkan penghayatan yang berujung kepada penerapan yang terus-menerus (Van den Ban dan Hawkins, 2003). Sikap inilah yang merupakan keputusan akhir, sehingga dibutuhkan pendampingan dan penyuluhan yang terus menerus. Dalam kajian ini respon dan apresiasi petani dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.



Beberapa alasan yang dikemukakan oleh petani diluar kawasan, bahwa sistem tanam jajar legowo membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan tenaga kerja yang lebih banyak. Penggunaan pupuk organik tidak memberikan hasil lebih, atau dengan kata lain sama dengan tidak menggunakannya. Terbatasnya modal menjadi hambatan dalam melakukan pemupukan berimbang. Namun secara pengetahuan, rata-rata petani di kawasan maupun luar kawasan sudah memahami penerapan inovasi teknologi yang diperoleh dari peneliti, penyuluh maupun antar sesama petani.

Tabel 2. Respon dan Apresiasi Petani (Peserta GP-PTT) Terhadap Teknologi PTT

No	Komponen Teknologi	Peserta GP-PTT					Non GP-PTT				
		Respon dan Apresiasi Petani (%)					Respon dan Apresiasi Petani (%)				
		SS	S	TT	KS	TS	SS	S	TT	KS	T S
1	Penggunaan VUB		100				100				
2	Benih bermutu dan sehat	100					100				
3	Pemberian bahan organik		100				50			50	
4	Pengaturan populasi tanaman jajar Legowo		50		50		25			75	
5	Pemupukan Berimbang/sesuai kebutuhan		100				50			50	
6	OPT sesuai PHT		100				50			50	
7	Pengolahan tanah yang baik	100					100				
8	Umur bibit muda (<21hari)	100					100				
9	Tanam bibit 1-3 batang per rumpun		100				100				
10	Pengairan efektif dan efisien (intermiten)		100				100				
11	Penyiangan dengan gasrok/landak		100				35			65	
12	Penanganan panen dan pasapanen tepat	100					100				



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

waktu

Tabel 3. Respon dan Apresiasi Petani (Peserta GP-PTT) Terhadap Teknologi PTT

No	Komponen teknologi	Peserta GP-PTT					Non GP-PTT				
		Respon dan Apresiasi Petani (%)					Respon dan Apresiasi Petani (%)				
		SS	S	TT	KS	TS	SS	S	TT	KS	TS
1	Penggunaan VUB		100					100			
2	Benih bermutu dan sehat	100						100			
3	Pemberian bahan organik		100					50		50	
4	Pengaturan populasi tanaman jajar Legowo		50		50			25		75	
5	Pemupukan Berimbang/ sesuai kebutuhan		100					50		50	
6	OPT sesuai PHT		100					50		50	
7	Pengolahan tanah yang baik	100						100			
8	Umur bibit muda (<21hari)	100						100			
9	Tanam bibit 1-3 batang per rumpun		100					100			
10	Pengairan efektif dan efisien (intermiten)		100					100			
11	Penyiangan dengan gasrok/landak		100					35		65	
12	Penanganan panen dan pasapanen tepat waktu	100						100			

Sumber data: Data Primer diolah, 2014



Analisis Efisiensi Usahatani Padi

Efisiensi usahatani padi di lahan tadah hujan Dusun Baru memperlihatkan nilai R/C ratio 2,50, bahwa setiap pengeluaran satu rupiah dalam usahatani padi di lahan tadah hujan di Dusun Baru akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp2,50, artinya menguntungkan dan layak dikembangkan karena memiliki R/C ratio di atas 1 (satu) (Tabel 4).

Berdasarkan hasil analisis di atas, dengan penerapan komponen teknologi yang belum maksimal, telah mampu memberikan manfaat ekonomi yang menguntungkan. Dengan kata lain pengawalan dan pendampingan pada kawasan padi di daerah pengkajian memberikan dampak terhadap peningkatan produksi padi dan peningkatan tingkat adopsi teknologi PTT.

Tabel 4. Rata-Rata Biaya Sarana Produksi pada Usahatani Padi Lahan Tadah Hujan di Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	Benih Padi	Kg	30	8000	240.000
2	Pupuk				
	a. Urea	Kg	100	2500	250.000
	b. TSP/SP36	Kg	50	3000	150.000
	c. NPK	Kg	100	2500	250.000
	d. ZA	Kg	-		
	e. Pupuk cair	Lt			
	f. Pupuk kandang/organik	Kg	-		
	g. Amelioran, abu, kapur	Kg	-		
	h. Lain-lain		-		
3	Pestisida				
	a. Padat	Kg	2,5	100000	250.000
	b. Cair	Lt	7,5	90000	675.000
4	Upah kerja (HOK)	Rp/hok	120	50000	6.000.000
5	Pengeluaran lain (PBB, dst)	Rp/musim			
A	Total Biaya input produksi				7.815.000
6	Produksi (ton/ha) GKP	Kg	4600	4.250	19.550.000
7	Nilai/harga produk	Rp/kg	-	-	-



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
B	Total nilai produksi	Rp			19.550.000
	Penerimaan bersih (A-B)	Rp			11.735.000
	R/C Ratio				2,5

Sumber data: Analisis data primer, 2014

PENUTUP

Penerapan komponen teknologi PTT oleh petani di kawasan pengembangan GPPTT belum maksimal. Dengan adopsi inovasi teknologi PTT yang belum maksimal, terjadi peningkatan produksi, dengan ratio yang cukup menguntungkan. Dengan demikian penerapan inovasi teknologi secara optimal untuk peningkatan produksi padi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan dan pendampingan dari berbagai instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S; M.J. Mejaya; P. Sasmita, dan A. Guswara. 2013. *Petunjuk Teknis Lapang. Pengelolaan Tanam Terpadu (PTT) Padi Sawah Irigasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementrian Pertanian*
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jambi Dalam Angka 2014*. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jambi.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jambi Dalam Angka 2013*. Badan Pusat Statistik. Provinsi Jambi
- Basuno, E. 2001. *Kebijakan Sistem Diseminasi Teknologi Pertanian: belajar dari BPTP NTB. Jurnal Analisis Kebijakan Peratanian 1 (3)*.
- Mundi, P. 2000. *Adopsi dan Adaptasi Teknologi Baru. Diadaptasikan dari Makalah untuk Integrated Swamps Development Proyect. Palembang, Agustus 1996. (PATTP) November 2000*.
- Rogers, E. M. 2003. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. The Free Press, New York.
- Rifai Ade Indrawan. 2012. *Dampak Pembangunan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta : UI
- Sudaratmaja, I.G.A.K, Suharyanto dan I.W.A. Artha Wiguna, 2009. *Perilaku Komunikasi Menuju Pelaksanaan IP Padi 400 dan Model Komunikasi Efektif Teknologi Pembibitan Sapi Bali Berkualitas Prima di Bali*. Seminar Hasil Pengkajian SINTA 2009. Badan Litbang Pertanian 9-10 Desember 2009.
- Soekartiwi. 2006. *Analisis Usahatani*. UI.Press. Jakarta.
- Gladwin, C.H. 1979. *Cognitive Strategies and Adoption Precisions a Can Study of Non Adoption of Agronomic Recommendation Economic Development and Cultivation Change*. 28(1):155-174.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Utama, S.P, P.Badrudin, Nusril. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Petani pada Teknologi Budidaya Padi Sawah Sistem Legowo*. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia. Vol.12 (3).
- Van den Ban, A.W dan Hawkins H.S. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.



PERAN PENDAMPING PROGRAM DALAM MENENTUKAN KUALITAS KREDIT BANTUAN MODAL BLM-PUAP DI JAWA TENGAH

Wahyudi Hariyanto dan Parti Khosiyah

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

Jl. Soekarno-Hatta KM. 26 No. 10 Kotak Pos 124, Bergas Kabupaten Semarang
50552

qwahyudi@gmail.com; HP: 08174183522

ABSTRAK

Keberhasilan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar 100 juta rupiah ditentukan oleh peran pendamping dalam menentukan kualitas kredit yang diajukan oleh petani. Pendamping sebagai fasilitator berperan dalam mengawasi kredit secara ketat sehingga pemanfaatannya tepat sasaran. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap petani terhadap peran pendamping PUAP yaitu Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam menilai kualitas kredit yang disalurkan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) kepada petani. Indikator yang mempengaruhinya di antaranya (1) aspek ketrampilan pendamping, parameternya adalah komunikasi dan motivasi pendamping kepada petani; dan (2) aspek administrasi, parameternya yaitu pembinaan administrasi keuangan Gapoktan, serta pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB). Penelitian dilaksanakan bulan Oktober-Desember 2015 dengan mengambil 53 Gapoktan sampel di Jawa Tengah. Skala Likert digunakan sebagai pendekatan untuk melakukan rating hasil survei pendapat petani. Hasil persentase rating pendapat petani dianalisis secara kuantitatif. Kemudian untuk mempertajam pembahasan digunakan data sekunder hasil wawancara pada saat money yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan sikap petani terhadap PMT pada aspek (1) keterampilan berkomunikasi adalah 8% menyatakan sangat baik, 40% baik, 5% kurang baik, dan tidak satupun petani menyatakan tidak baik; dan pada aspek ketrampilan dalam memotivasi, petani menyatakan 5% sangat baik, 41% baik, 7% kurang baik, dan tidak satupun petani menyatakan tidak baik. (2) pada aspek pembinaan administrasi Gapoktan, petani menyatakan 9% sangat baik, 35% baik, 9% kurang baik, dan tidak satupun menyatakan tidak baik; dan pada aspek pembuatan RUB, petani menjelaskan 4% sangat baik, 38% baik, 8% kurang baik, dan 3% tidak baik.

Kata kunci: PMT, kredit, Gapoktan

PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani hingga sekarang adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, selain pasar, teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Modal bagi petani merupakan komponen terpenting dalam menggerakkan usaha agribisnis, kekurangan modal akan mengakibatkan petani tidak dapat mengembangkan usahanya, walaupun usaha



tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Kekurangan modal pada usaha budidaya yang selama ini dialami oleh petani juga berdampak pada tertundanya keinginan mereka untuk menerapkan inovasi teknologi. Padahal dengan menerapkan inovasi teknologi akan menghasilkan produktivitas dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa sentuhan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, maka mulai tahun 2008-2014 Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian (PSP) menyalurkan dana BLM-PUAP sebesar 100 juta kepada 7.065 desa/Gapoktan. Dana tersebut sebagai bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gapoktan. Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk menyalurkan bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, maka Gapoktan didampingi oleh Tenaga Pendamping PUAP atau PMT (Pendum PUAP, 2015).

Sesuai Pedoman Teknis PMT (2016), PMT diharapkan dapat (1) mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A); (2) melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan Bersama dengan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota; (3) melaporkan perkembangan Gapoktan dan LKM-A secara periodik kepada Kementerian Pertanian; (4) mampu berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, buruh tani dan rumah tangga tani di perdesaan; (5) memfasilitasi penumbuhan LKM-A.

Dalam pelaksanaannya Gapoktan penerima dana PUAP menyalurkan modalnya kepada petani anggota berdasarkan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang dibuat dan disepakati bersama dengan penyuluh pendamping dan PMT. Namun demikian masih terjadi beberapa Gapoktan yang menyalurkan dana PUAP tidak melalui mekanisme yang benar, akibatnya banyak terjadi kemacetan atau pengembaliannya tidak sesuai dengan jatuh tempo. Sebagian yang lain, Gapoktan menyalurkannya melalui kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan tanpa diatur dan diawasi oleh PMT, karena beberapa alasan, seperti



luasnya wilayah jangkauan PMT, regulasi penyalurannya belum diatur oleh tim teknis Kabupaten. Biasanya terjadi pada Gapoktan Penerima PUAP tahun 2008.

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, maka PMT berperan penting dalam mengawasi penyaluran pinjaman yang dikelola oleh Gapoktan secara ketat, sehingga dapat menekan *Non Performing Loan* (NPL) atau toleransi pengembalian pinjaman bermasalah. NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengukur kesehatan suatu bank maksimal 5%, sedangkan untuk LKM koperasi memberikan toleransi hingga 15%. Apabila NPL-nya melebihi toleransi yang telah ditetapkan bisa dipastikan LKM koperasi tersebut belum dikelola dengan baik dan benar. Maka kehadiran peran pendamping dalam membina LKM koperasi secara kuantitas dan kualitas harus lebih ditingkatkan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sikap petani terhadap peran PMT dalam menilai kualitas kredit yang disalurkan oleh Gapoktan kepada Kelompok tani maupun petani anggota.

METODE PENELITIAN

Indikator ketrampilan dan kemampuan administrasi PMT merupakan aspek yang mempengaruhi kualitas kredit yang disalurkan oleh Gapoktan. Parameter yang diamati untuk indikator ketrampilan adalah seberapa besar kiprah PMT dalam berkomunikasi dan memotivasi pengurus Gapoktan untuk mengelola dana BLM-PUAP. Sedangkan indikator kemampuan administrasi parameternya adalah seberapa besar PMT melibatkan petani dalam membuat RUB dan melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada Gapoktan.

Metode kuantitatif dan deskriptif digunakan untuk membantu menjelaskan peran PMT dalam menentukan kualitas kredit yang dikelola oleh Gapoktan. Skala *likert* dipakai sebagai pendekatan yang bersifat kuantitatif. Metode *Likert* dipakai untuk menentukan *rating* hasil survei jajak pendapat yang ditujukan kepada Ketua Gapoktan dalam menilai PMT. Terdapat empat kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan skor penilaian, yaitu sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, kurang setuju skornya 2, dan kriteria tidak setuju skornya 1. Sedangkan metode deskriptif memakai pendekatan kualitatif



mencoba memaparkan situasi atau peristiwa yang akan digunakan sebagai pelengkap dalam melengkapi pembahasan.

Data primer, diperoleh dari hasil survey pada saat monitoring dan evaluasi Gapoktan Penerima dana PUAP di Jawa Tengah. Data diperoleh dari 53 responden Gapoktan di Jawa Tengah yang dipilih secara *purposive*, dengan pertimbangan bahwa kabupaten tersebut yang mewakili daerah dengan tipe agroekosistem dataran rendah, sedang, dan tinggi. Kabupaten Pekalongan, Demak, Pati, dan Blora dipilih untuk mewakili agroekosistem dataran rendah (pantai), sedangkan kabupaten Grobogan, Sragen, Semarang, dan Purworejo dipilih untuk mewakili agroekosistem dataran sedang dan tinggi.

Untuk mengukur sikap petani pengurus Gapoktan dilakukan melalui pendekatan pendapat atau pandangan dengan cara (1) menanyakan kepada pengurus Gapoktan (Ketua, sekretaris, bendahara) atau manajer LKM-A secara langsung bagaimana pendapatnya tentang pendampingan yang dilakukan oleh PMT dengan bantuan daftar pertanyaan (kuesioner); (2) meminta pengurus Gapoktan untuk mengemukakan tingkat kesetujuan atau ketidak setujuannya terhadap serangkaian pernyataan mengenai suatu pokok persoalan yang kontroversial; (3) menggali sikap petani dengan mengetahui reaksinya terhadap alat-alat proyektif, yaitu instrumen pengumpulan data yang menyembunyikan tujuan yang sebenarnya sedemikian rupa, sehingga subjek tidak dapat menebak-nebak bagaimana dia akan mengemukakan jawaban terbaiknya. Dengan demikian wataknya yang sesungguhnya akan terungkap (Levis LR, 2013). Data dianalisis menggunakan *skala likert* dengan memaparkan persentase pencapaian skor maksimum yang menggunakan empat kategori skala sikap. Secara kualitatif pendapat responden yang dikemukakannya juga dianalisis walaupun pendapat tersebut belum tentu mencerminkan sikap yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap merupakan pandangan seseorang terhadap suatu objek yang dihadapinya (Sanafiah, 1982). Berdasarkan skor kumulatif yang diperoleh dari setiap responden pengurus Gapoktan dapat diketahui apakah mereka mempunyai



penilaian yang sangat setuju atau tidak setuju terhadap pendampingan yang dilaksanakan oleh PMT. Dua aspek yang berperan penting dalam keberhasilan mengembangkan keuangan Gapoktan dari aspek pembinaan oleh PMT adalah ketrampilan PMT dalam menjalin komunikasi dan memotivasi pengurus Gapoktan, serta ketrampilan PMT dalam membina administrasi keuangan dan mendampingi Gapoktan dalam membuat RUB.

Peran PMT dalam Membina Gapoktan

Kemampuan PMT dalam berkomunikasi dan memotivasi petani merupakan salah satu parameter keberhasilan dalam pendampingan PUAP. Intensitas PMT dalam menjalin komunikasi dengan Gapoktan penerima dana PUAP ditentukan oleh seberapa sering mereka mengunjungi Gapoktan, menanyakan beberapa hal yang perlu dibantu dalam pembuatan laporan keuangan, memberikan jalan keluar dalam mengatasi kemacetan, sampai dengan mencari akses kepada lembaga keuangan lain apabila LKM Gapoktan kekurangan dalam permodalan. Gapoktan masih selalu membutuhkan pembinaan yang terus menerus dari pendamping desa, PMT yang mendampingi Gapoktan dalam urusan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sedangkan Penyuluh Pendamping (PP) bertugas mendampingi dalam bidang pengembangan usaha agribisnis produktif. Komunikasi kedua pendamping desa ini diharapkan selalu harmonis dan sinergi.

Sinergi PMT dan PP dapat menjadi kekuatan dalam mengawal BLM PUAP di desa. Kendala yang dihadapi PMT dalam mengawal dana PUAP terletak pada luasnya wilayah kerja mereka (lintas Kecamatan) dengan rata-rata 35 Gapoktan/Desa yang membutuhkan pendampingan PMT. Sedangkan bagi PP lebih kecil cakupan wilayah kerjanya, yaitu antara 1-5 desa yang menjadi wilayah binaan Penyuluh, walaupun idealnya satu desa dikawal oleh seorang penyuluh, namun hal ini masih belum dapat terealisasi. Tabel 1 memperlihatkan jumlah PMT dan jumlah Gapoktan yang menjadi wilayah binaannya.



Tabel 1. Jumlah PMT dan Gapoktan PUAP di Provinsi Jawa Tengah

Wilayah	Jml Gapoktan	Jumlah PMT	Rasio Binaan per PMT
Banyumas	901	28	32
Kedu	1395	38	37
Semarang	982	30	33
Pekalongan	1224	39	31
Pati	1273	36	35
Surakarta	1290	33	39
Rata-rata PMT dalam membina Gapoktan			35

Sumber Data Primer (2016)

Tabel di atas memperlihatkan luasnya wilayah binaan PMT, secara *agregat* satu PMT membina 35 Gapoktan yang tersebar di beberapa Kecamatan, sehingga kondisi riil di lapangan terdapat Gapoktan yang tidak mendapatkan kunjungan PMT, apalagi sebagian Gapoktan berlokasi di wilayah yang relatif jauh dari tempat tinggal PMT, berdasarkan pengalaman monitoring tim PUAP Provinsi, jenis Gapoktan tersebut jarang atau bahkan tidak pernah dikunjungi oleh PMT. Memang perlu strategi pembinaan Gapoktan PUAP untuk lebih efisien dan tetap terpantau perkembangan pengelolaan keuangannya. PMT dan Tim teknis PUAP Kabupaten/Kota merupakan unsur pembina terdekat dalam struktur pembinaan PUAP sehingga kehadirannya sangat berarti dalam mengawasi perkembangan dana BLM-PUAP yang dikelola oleh Gapoktan. Selama ini sebagian PMT menerapkan strategi pembinaannya berdasarkan kedekatan tempat tinggal, sedangkan yang lain menerapkan berdasarkan tahun Gapoktan menerima dana PUAP kedua strategi tersebut bergantung pada kearifan masing-masing daerah.

Keterampilan PMT dalam berkomunikasi dan memotivasi petani memang belum merata, sebagai pendamping Gapoktan dalam urusan pengelolaan keuangan mikro agribisnis, awalnya (tahun 2008) PMT dikontrak oleh Kementerian Pertanian dengan kualifikasi memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan mikro, disamping standar pendidikan formal minimal D3, tetapi mulai tahun 2011 rekrutmen PMT melalui usulan dari tim teknis Kabupaten, dengan harapan PMT dan tim teknis Kabupaten dapat saling sinergi dalam membina Gapoktan. Tim teknis juga memiliki kewajiban



untuk mengkoordinasikan pembinaan PUAP kepada PMT dan PP di lapangan, karena secara struktural penyuluh berada dalam koordinasi Dinas Pertanian/Badan Penyuluhan/Kelompok Jabatan Fungsional bergantung kepada kelembagaan Kabupaten/Kota masing-masing. Berdasarkan Pedum PUAP (2015) Keterlibatan Penyuluh dan PMT dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tugas Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping (PP) dalam Membina Gapoktan Penerima Dana BLM-PUAP

Penyelia Mitra Tani (PMT)	Penyuluh Pendamping (PP)
Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan;	Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;	memberikan bimbingan teknis usaha gribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan;	membantu memecahkan permasalahan usaha petani/poktan, serta mendampingi Gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
bersama dengan Penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan;	melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP; dan	membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).	memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP 2015 bersama dengan PMT; dan membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP.

Sumber: Pedum PUAP (2015)

Tugas dan fungsi PMT dan PP apabila dicermati menuntut kekompakan dalam melakukan pembinaan di lapangan, namun sering terjadi benturan dalam pelaksanaannya, mengingat honor pendamping PMT dan PP (terutama Tenaga Harian Lepas (THL)-Penyuluh Pertanian) tidak sama, lebih besar PMT



dibandingkan dengan THL-PP sehingga sering terjadi kecemburuan dalam melakukan tugasnya. Hal ini biasanya dipicu oleh ketidak hadirannya PMT secara periodik di lapangan, permasalahan lainnya PMT sering berganti tiap tahun karena mereka tidak memperpanjang kontraknya, akibatnya koordinasi dengan PP mengalami hambatan yang sebelumnya sudah terjalin harmonis. Dengan demikian diperlukan ketrampilan antar pendamping (PMT-PP-Tim Teknis-Gapoktan) dalam menjalin komunikasi.

Ketrampilan PMT dalam berkomunikasi dan memotivasi Gapoktan merupakan parameter kemajuan Gapoktan dalam mengelola permodalan. Penyaluran dana BLM PUAP yang dikoordinasikan oleh pengurus Gapoktan/manager LKM-A kepada kelompok tani yang bergabung atau petani anggota prosedurnya harus melalui rekomendasi PMT, sehingga proses penyaluran dan pengembalian dana sampai kepada perguliran dana berikutnya akan selalu diawasi secara ketat oleh PMT. Pelaksanaan ini menuntut ketrampilan PMT dalam berkomunikasi dan memotivasi pengurus Gapoktan. Tabel 3 menginformasikan pernyataan sikap pengurus Gapoktan terhadap PMT dalam mendampingi petani di lapangan.

Tabel 3. Pernyataan Sikap Pengurus Gapoktan terhadap PMT pada Aspek Komunikasi dan Memotivasi Petani

Kategori Sikap	Aspek Ketrampilan			
	Komunikasi dengan petani	%	Memotivasi petani	%
Tidak setuju	0	0	0	0
Kurang Setuju	5	9,43	7	13,21
Setuju	40	75,47	41	77,36
Sangat Setuju	8	15,09	5	9,43

Sumber: Data Primer (2015)

Data yang ditampilkan pada Tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju (75,47%) tentang strategi atau teknik berkomunikasi dan memotivasi pengurus Gapoktan dalam mengembangkan keuangan mikro. Gapoktan masih memerlukan dan mengharapkan kehadiran PMT dan PP dalam mengembangkan dana PUAP serta penguatan kelembagaan petani.



Kelemahan Gapoktan dalam mengelola dana PUAP terletak pada ketersediaan sumberdaya trampil di desa, terutama dalam aspek administrasi keuangan dan pembuatan rencana usaha bersama (RUB) sebelum dana PUAP dimanfaatkan oleh petani anggota. Proses penyalurannya melalui Rencana Usaha Anggota (RUA) - Rencana Usaha Kelompok (RUK) - Rencana Usaha Bersama (RUB). Belum seluruh Gapoktan mematuhi tahapan tersebut, bergantung kepada kehadiran pendamping dalam membina proses pembuatan RUB. Sehingga frekuensi kehadiran PMT dan intensitas pembinaan penyuluh menjadi ukuran kualitas kredit yang disalurkan kepada anggota kelompok. Tabel 4 adalah hasil pernyataan sikap pengurus Gapoktan terhadap PMT pada aspek pembinaan administrasi dan pembuatan RUB.

Tabel 4. Pernyataan Sikap Pengurus Gapoktan terhadap PMT pada Aspek Administrasi dan Pembuatan RUB

Kategori Sikap	Aspek Ketrampilan			
	Pembinaan Administrasi	%	Pembuatan RUB	%
Tidak setuju	0	0	3	5,66
Kurang Setuju	9	16,98	8	15,09
Setuju	35	66,04	38	71,70
Sangat Setuju	9	16,98	4	7,55

Sumber: Data Primer (2016)

Tabel 4 menggambarkan bahwa sebagian besar pengurus Gapoktan setuju (66,04%) apabila PMT selalu mendampingi Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan keuangan, hanya 16,98% Gapoktan yang menyatakan kurang setuju. biasanya pada kelompok Gapoktan ini yang kurang dikunjungi oleh PMT atau kurang respon kepada kehadiran PMT karena buruknya pengembalian pinjamannya, sehingga mereka tidak ingin diketahui atau mendapat campur tangan dari PMT. Beberapa kejadian di lahan pengurus dan pamong desanya ikut memanfaatkan dana PUAP tetapi belum melunasi pinjamannya.

Pada kelompok Gapoktan yang menyatakan sangat setuju (16,98%) dengan kehadiran PMT dapat dipastikan bahwa pengelolaan keuangannya baik dan dikelola dengan SDM yang mumpuni, sehingga tingkat kemacetan atau NPLnya rendah (dibawah 15%), menurut ukuran koperasi LKM kemacetan 15%



masih pada batas toleransi. Salah satu penciri Gapoktan baik perkembangan dana PUAPnya biasanya ditandai dengan potensi sumberdaya alamnya baik, yaitu menghasilkan komoditas pertanian yang diminati, serta dengan pengelolaan yang profesional, seperti terdapat di Kabupaten Magelang. Kabupaten tersebut mempunyai produk unggulan salak pondoh yang diminati oleh masyarakat dan diekspor ke luar negeri dengan harga yang tinggi.

PENUTUP

Kemampuan pengurus Gapoktan dalam membuat laporan keuangan dan merencanakan usaha agribisnis merupakan kontribusi dari peran PMT dan PP dalam membina Gapoktan. Intensitas kehadiran PMT merupakan indikator meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam mengelola administrasi keuangan. Gapoktan menyatakan setuju dengan cara PMT berkomunikasi dan memotivasi petani. Demikian juga pada aspek pembinaan administrasi dan membantu membuat RUB, petani memberikan pernyataan setuju. Sehingga aspek komunikasi, motivasi, administrasi, dan membantu dalam pembuatan RUB merupakan indikator keberhasilan PMT dalam menentukan kualitas kredit dana BLM-PUAP yang dikelola oleh Gapoktan/LKM-A.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan M.A, dan F. Furywardhana. 2006. Evaluasi Non Performing Loan (Npl) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta) JAAI Volume 10 No. 2, Desember 2006: 155 – 171
- Kementerian Pertanian. (2015). *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015*. Bogor: Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2016.) *Pedoman Teknis Penyelia Mitra Tani (PMT) Tahun 2016*. Bogor: Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Levis, L.R. (2013). *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Yogyakarta: Seminari Tinggi Ledalero.
- Sanafiah, S. 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.



TINGKAT PENGETAHUAN WANITA TANI MENGENAI MENU GIZI SEIMBANG KOTA SAMARINDA (Studi Kasus Pada Rumah Tangga Kelompok Wanita Tani)

Dina Lesmana dan Alfa Raudah
Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Pengetahuan mengenai gizi seimbang merupakan satu unsur penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk mengkonsumsi pangan sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu rumah tangga tentang menu gizi seimbang terkait dengan profesi mereka sebagai anggota kelompok wanita tani sayuran dan mengetahui bagaimana penerapan penganekaragaman pangan pada rumah tangga petani sayur. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada dua kelompok wanita tani sayuran yang terdapat di Kelurahan Lempake Jaya Kecamatan Samarinda Utara yang ditentukan secara purposive. Penentuan responden dilakukan dengan metode sampel jenuh (sensus) dengan responden adalah seluruh anggota pada kelompok wanita petani sayur dengan jumlah 28 responden. Metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuisioner. Data dianalisis secara deskriptif, untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur yang juga merupakan anggota KWT menggunakan skala Likert dengan 10 indikator pedoman gizi seimbang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor rata-rata 10 indikator pedoman menu gizi seimbang adalah 138,96 (dari skor minimal 57 dan skor maksimal 171) yang artinya tingkat pengetahuan wanita tani mengenai menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur termasuk pada kategori 'tinggi' namun untuk penerapan penganekaragaman pangan masih dalam kategori kurang.

Kata Kunci: Tingkat pengetahuan wanita tani, pedoman menu gizi seimbang,

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia masih mengalami berbagai masalah gizi seperti masalah gizi kurang, gizi ganda, dan gizi tidak seimbang. Hasil kajian ilmiah Riskesdas 2013, menunjukkan bahwa perhatian masalah gizi ganda perlu ditingkatkan melalui upaya perubahan perilaku gizi masyarakat kearah perilaku gizi seimbang. Menurut Djafar (2015) meningkatkan pemahaman kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan, perlu disosialisasikan perilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan 4 pilar prinsip yaitu: konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal, yang diwujudkan dalam bentuk Pedoman



Umum Gizi Seimbang (PUGS).

Perilaku buruk dalam menjalankan Menu Gizi Seimbang akan berdampak pada menurunnya status gizi dan jangka panjang akan berpengaruh pada keadaan fisik dan kesehatan (Novitasari, 2009). Bila asupan zat gizi kurang maka akan mengganggu para petani dari segi fisik yaitu menjadi lemah dan tidak bertenaga. Penggunaan PGS merupakan cara termudah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi setiap hari. Tujuan mendasar pembuatan Pedoman Gizi Seimbang yaitu sebagai suatu informasi untuk memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Setiap tubuh dan aktivitas yang dilakukan memerlukan gizi yang berbeda-beda. Sehingga Pedoman Gizi Seimbang dapat digunakan selanjutnya untuk merencanakan asupan makan sehari-hari guna meningkatkan kebutuhan energi.

Berdasarkan pesan pada Pedoman Gizi Seimbang, ada sepuluh pesan yang digunakan sebagai indikator seperti mensyukuri dan menikmati anekaragam makanan, memakan sayur dan buah-buahan yang cukup, mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, mengkonsumsi anekaragam makanan pokok, membatasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak, membiasakan sarapan, meminum air putih yang cukup dan aman, membaca label pada kemasan pangan, mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, beraktivitas fisik yang cukup. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan rumah tangga tani terhadap menu gizi seimbang yang dibagi dalam tiga kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Petani adalah pelaku utama yang sangat penting untuk dapat menjalankan bidang pertanian khususnya dalam kegiatan usahatani. Kegiatan yang dilakukan petani setiap hari memerlukan energi yang cukup untuk beraktivitas. Energi yang cukup di dapat dari asupan makanan yang dikonsumsi setiap hari yaitu makanan yang sehat dan bergizi. Namun pengetahuan setiap petani tentang pangan yang baik dan sehat untuk dikonsumsi berbeda-beda sehingga dibutuhkan pengetahuan yang lebih tentang pangan agar asupan gizi yang dibutuhkan para petani dapat terpenuhi. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca indranya yang berbeda



sekali dengan kepercayaan (*beliefs*) takhyul (*supersition*) dan penerangan-penerangan yang keliru (*misinformation*). Pengetahuan ibu rumah tangga tani sayur tentang pemilihan makanan yang terbaik untuk mencapai hidup yang sehat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi kesehatan. Pengetahuan gizi merupakan salah satu unsur penting untuk meningkatkan status gizi masyarakat jangka panjang (Babys dkk, 2013).

Sayuran adalah bahan pangan yang menjadi syarat untuk memenuhi menu gizi seimbang setiap hari sehingga perlu adanya pengkajian terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki petani tentang menu gizi seimbang sehingga dapat dilakukan penyampaian kepada petani. Melalui sosialisasi dan penyampaian pesan-pesan gizi yang praktis akan membentuk suatu keseimbangan bangsa antara gaya hidup dengan pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat dengan tujuan akhir yaitu tercapainya status gizi masyarakat yang baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur dan bagaimana penerapan penganekaragaman pangan untuk memenuhi menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus pada KWT di Kelurahan Lempake yang merupakan petani sayur. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan sejak bulan Pebruari sampai April 2016. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk menjangkau fakta yang terjadi di lapangan melalui kunjungan dan wawancara langsung. Metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sensus. Pengukuran pengetahuan dilakukan dengan seperangkat kuesioner tentang objek pengetahuan terhadap 10 pesan umum dalam Pedoman Gizi Seimbang (UU No. 41 Thn 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang) dengan parameter pengetahuan dan tingkat penerapan penganekaragaman pangan: rendah, sedang dan tinggi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Wanita tani	
		Σ	%
Umur (th)	15 – 64	27	96,43
	≥65	1	3,57
Pendidikan	Tdk sekolah	4	14,29
	SD	11	39,29
	SLTP	10	35,71
	SLTA	2	7,14
	Diploma-S1	1	3,57
Luas Lahan (ha)	< 0,25	15	53,57
	0,25-0,5	13	46,43

Sumber : analisis data primer

Tingkat pengetahuan menu gizi seimbang yang dimiliki oleh setiap responden berbeda antara responden satu dengan responden lainnya. Responden yang memiliki usia produktif biasanya memahami tentang arti menu gizi seimbang dan makanan apa saja yang dapat memberikan gizi setiap harinya namun masih hanya sebatas pengetahuan dasar. Menurut data yang di dapat saat wawancara bahwa kisaran umur petani responden dalam penelitian ini yaitu antara 30 – 60 tahun. Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden memiliki cukup pengetahuan tentang cara memenuhi gizi seimbang secara sederhana yaitu dengan makan minimal 3 kali dalam sehari, perlunya mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, lauk pauk yang berprotein tinggi serta menjaga kebersihan dan kebugaran jasmani. Hal yang menjadi kendala bagi responden yang lanjut usia karena tidak mengerti dan sering lupa melakukan pengecekan label pada kemasan pangan siap saji. Namun secara keseluruhan responden mengerti akan apa saja menu makanan yang termasuk dalam menu gizi seimbang.

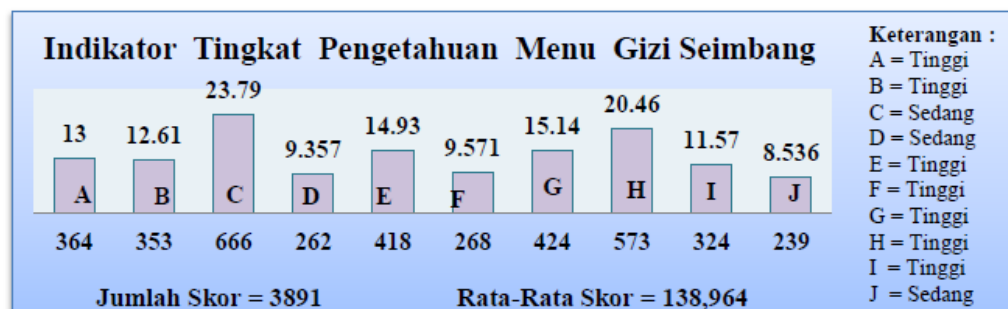
Jika melihat tingkat pendidikan responden maka terlihat bahwa tingkat pengetahuan tentang menu gizi seimbang sangat kecil namun sebaliknya bahwa responden sangat mengerti tentang menu makan yang baik, pentingnya sayur dan lauk pauk saat makan, manfaat buah-buahan bagi pencernaan dan hal-hal



yang berkaitan dengan pengetahuan menu gizi seimbang. Sehingga tingkat pendidikan tidak dapat menunjukkan bahwa seseorang paham atau tidak paham akan cara memenuhi asupan gizi setiap hari bagi tubuhnya. Bagi responden hasil dari sayuran yang ditanam akan dijual dan dikonsumsi sendiri.

Tingkat Pengetahuan Menu Gizi Seimbang Pada Rumah Tangga Petani Sayur

Tingkat pengetahuan menu gizi seimbang pada rumah tangga petani



sayur di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dilihat dari sepuluh indikator sesuai pesan menu gizi seimbang. tingkat pengetahuan menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda termasuk dalam kategori “tinggi” dengan rata-rata skor sebesar 138,964. Berikut rincian 10 indikator yang dapat dilihat pada gambar.

Keterangan:

A : Mensyukuri dan menikmati anekaragam makanan

B : Memakan sayur dan buah-buahan yang cukup

C : Mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi

D : Mengkonsumsi anekaragam makanan pokok

E : Membatasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak

F : Membiasakan sarapan

G : Meminum air putih yang cukup dan aman

H : Membaca label pada kemasan pangan

I : Mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir

J : Beraktivitas fisik yang cukup



Mensyukuri dan Menikmati Anekaragam Makanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, umumnya responden yang berada di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara mengetahui bahwa standar banyaknya makan dalam sehari yaitu 3 kali. Waktu makan pada pagi hari, siang hari dan sore hari namun responden mengganti waktu sore hari dengan malam hari. Cara yang dilakukan responden untuk mensyukuri makanan yang dapat dikonsumsi yaitu dengan melakukan doa sebelum dan sesudah makan tetapi responden hanya melakukan doa saat sebelum atau sesudah makan. Menu makanan yang sering dikonsumsi adalah menu lengkap yang terdiri dari nasi, sayur, lauk pauk, buah dan minuman namun untuk buah hanya beberapa responden yang selalu konsisten mengkonsumsinya saat makan.

Takaran nasi saat makan adalah 2 sendok nasi tetapi bagi ada responden yang takaran nasi kurang dari 2 sendok cukup untuk sekali makan. Anekaragam pangan yang dikonsumsi oleh responden bukan hanya dari jenis makanan pokok, jenis sayur, dan lauk pauk yang berbeda-beda. Cara penganekaragaman pangan yang dilakukan adalah cara mengolah menu makanan setiap hari bisa ditumis/digoreng, dikukus, dan direbus.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hasil penelitian tidak menunjukkan kesamaan pada hasil penelitian. Menurut Djafar (2015), tidak ada hubungan antara sikap dan tindakan kader posyandu tentang PUGS karena masih banyak yang memiliki sikap negatif. Menurut hasil penelitian di lapangan bahwa sikap responden untuk mensyukuri dan menikmati anekaragam makanan termasuk dalam kategori tinggi karena dapat menjaga standar makan setiap hari dengan takaran nasi dan sayuran yang sesuai dengan pesan umum pedoman gizi seimbang serta berdoa sebelum makan dan sesudah makan selalu bersyukur dengan berdoa.

Memakan Sayur dan Buah-Buahan Yang Cukup

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, setiap hari responden selalu mengkonsumsi sayur-sayuran karena menurut responden perlu adanya mengkonsumsi sayuran setiap hari untuk memenuhi gizi. Jenis sayuran yang



sering dikonsumsi yaitu sawi, bayam, kangkung, daun singkong, dan sayuran hijau lainnya. Takaran sayur dalam porsi sekali makan adalah 2 sendok sayur namun sayur yang berkuah responden lebih banyak menaruh kuah sayur dibandingkan dengan sayuran tersebut.

Menurut hasil yang didapatkan dengan cara metode recall, setiap harinya menu sayur yang sering dikonsumsi yaitu jenis kangkung, bayam, sawi, daun singkong, daun pepaya, dan jenis sayuran daun lainnya. Menu buah-buahan yang sering dikonsumsi antara lain seperti pisang, pepaya, semangka, buah naga, dan rambutan sedangkan menu lauk-pauk yang sering dikonsumsi yaitu jenis ikan dan ayam untuk daging dan seafood hanya sesekali dikonsumsi oleh responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan penelitian Rahwamati (2014), menunjukkan hasil yaitu responden mempunyai pengetahuan yang baik tentang gizi seimbang dengan status gizi balita karena semakin banyak pengetahuan gizinya maka lebih banyak mempergunakan tentang nilai gizi makanan. Sehingga dapat terlihat adanya kesinambungan antara hasil penelitian lapangan dengan hasil penelitian dari Rahmawati (2014).

Mengonsumsi Lauk Pauk Yang Mengandung Protein Tinggi

Berdasarkan hasil wawancara kepada responden untuk konsumsi protein setiap harinya responden mengkonsumsi ayam, seafood (ikan, cumi-cumi, kerang dan lainnya), daging, kacang-kacangan (tempe, tahu dan lainnya) serta susu. Takaran lauk-pauk menyesuaikan dengan jenis lauk-pauk yang dikonsumsi jika lauk-pauk berupa ikan dengan ukuran sedang makan takaran lauk-pauk yang dikonsumsi yaitu 1 ekor dalam sekali makan namun untuk ikan ukuran kecil takaran yang dikonsumsi yaitu 2-3 ekor dalam sekali makan dan untuk lauk-pauk seperti ayam (1 potong dalam sekali makan), daging (2-4 potong dalam sekali makan) atau seafood seperti cumi-cumi dan kerang (1 sendok sayur dalam sekali makan). Menurut responden ada yang tidak bisa mengkonsumsi seafood karena tidak suka dengan seafood atau memiliki alergi



terdapat makanan dengan bahan dasar seafood. Bagi responden yang bisa mengkonsumsi seafood hanya satu minggu sekali dapat mengkonsumsi seafood. mengkonsumsi ayam setiap 2-4 hari ada juga yang setiap harinya mengkonsumsi ayam karena pekerjaan dari kepala rumah tangga (suami) adalah seorang pedagang sayur atau berjualan lauk pauk yang sudah dimasak sehingga setiap hari mengkonsumsi ayam.

Berbeda dengan ayam, konsumsi daging bagi para responden paling cepat 1-2 bulan sekali namun ada juga yang hanya dapat mengkonsumsi daging saat ada acara undangan kerabat atau saat hari raya Idul Adha. Lauk-pauk yang mengandung protein tinggi dan sering dikonsumsi yaitu tahu atau tempe dan jenis ikan. Tahu dan tempe adalah menu yang setiap hari harus ada di menu makanan bagi responden dan keluarga. Untuk jenis kacang-kacangan yang lainnya sangat jarang dikonsumsi paling lama yaitu seminggu sekali. Untuk ikan hampir setiap hari responden mengkonsumsi ikan dan waktu paling lama yaitu 2-3 hari sekali. Hal yang membedakan setiap harinya yaitu jenis ikan bisa berupa ikan sungai, ikan laut atau ikan asin yang diolah kembali.

Menurut Suryani dkk (2014), bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara perilaku (pengetahuan, sikap, dan praktik) gizi seimbang dengan status gizi indeks massa tubuh (IMT). Menurut hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang mengkonsumsi lauk-pauk yang mengandung protein tinggi termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil dari dua penelitian diatas dapat terlihat bahwa tidak ada kesinambungan antara hasil penelitian Suryani dkk (2014) dengan hasil penelitian di lapangan.

Mengkonsumsi Aneka Ragam Makanan Pokok

Anekaragam makanan pokok yang dapat menggantikan nasi yaitu berupa ubi-ubian seperti singkong, jagung, kentang, ubi jalar, ataupun ubi rambat. Menurut hasil wawancara bersama responden bahwa responden dan keluarganya di sana pernah mengkonsumsi makanan pokok pengganti nasi namun tidak menggantikan nasi seutuhnya pada menu makanan. Jenis ubi-ubian tadi diolah menjadi menu pendukung atau sebagai camilan disaat-saat tertentu.



Menu pendukung seperti perkedel kentang, singkong atau ubi goreng, kentang goreng dan lain sebagainya.

Porsi yang dikonsumsi dari menu makanan pokok berbeda-beda tergantung dari bagaimana cara mengolah bahan tersebut sehingga menjadi menu pendukung yang bermacam-macam. Untuk jenis perkedel kentang paling banyak dikonsumsi responden yaitu 1-2 biji ukuran bulat kecil sedangkan untuk menu yang digoreng seperti singkong goreng responden dapat menghabiskan seperempat hingga setengah dari ukuran singkong. Dapat terlihat bahwa responden pernah mengonsumsi aneka ragam makanan pokok selain nasi walaupun hanya sebagai menu pendukung.

Hasil dari penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang mengonsumsi aneka ragam makanan pokok termasuk dalam kategori sedang. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Natalia, dkk (2013) yang termasuk dalam kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan remaja putri SMAN 1 Tarutung tentang gizi seimbang adalah sedang.

Membatasi Pangan Manis, Asin dan Berlemak

Berdasarkan hasil pada wawancara bersama responden untuk indikator mengonsumsi pangan manis, asin dan berlemak memiliki rata-rata skor 14,93 dengan kategori “Tinggi” hal ini dapat dilihat dari penggunaan gula dan garam. Menurut Menteri Kesehatan (2014), bahwa penggunaan gula per harinya maksimal 4 sendok setiap hari dan penggunaan garam per harinya maksimal 1 sendok setiap hari dan penggunaan minyak per harinya maksimal 5 sendok setiap hari. Dalam penggunaan gula dan garam sudah sesuai dengan pesan penggunaan maksimal namun untuk minyak masih tidak sesuai pesan tersebut.

Penggunaan minyak sebagian besar masih sangat tinggi yaitu lebih dari 5 sendok. Hal yang membuat masih tingginya penggunaan minyak goreng karena melakukan menumis dan menggoreng ikan yang pasti menggunakan minyak yang cukup banyak. Dalam jangka waktu penggunaan satu liter minyak responden bisa menggunakannya hanya dalam waktu 3-5 hari sedangkan yang paling banyak mendekati standar penggunaan minyak goreng penggunaanya



sampai satu minggu namun ada satu responden yang dapat menggunakan minyak goreng hingga dua minggu namun jika dilihat dari kualitas minyak akan sangat kurang baik untuk kesehatan karena penggunaan yang berulang-ulang. Kesadaran dalam hal pengurangan minyak goreng masih kurang karena responden dalam mengolah makanan lebih sering mengolah makanan yang menggunakan minyak goreng seperti menggoreng atau menumis makanan.

Membiasakan Sarapan

Sarapan merupakan hal yang cukup penting kita lakukan setiap hari khususnya pada pagi hari. Dengan kita melakukan sarapan dapat memberikan energi tambahan untuk melakukan rutinitas kita setiap saat. Dalam indikator membiasakan sarapan memiliki rata-rata skor 9,57 dengan kategori “Tinggi” karena responden atau responden selalu membuat dan melakukan sarapan pagi bersama-sama dengan keluarga namun untuk menu sarapan pagi dapat dikatakan menu berat karena responden langsung memakan nasi berserta sayur, lauk-pauk, dan minuman. Menurut anjuran untuk menu sarapan pagi yaitu berupa kue atau roti dengan segelas susu sehingga saat pagi hari sehingga tidak mengganggu metabolisme tubuh dengan makanan yang masuk untuk dicerna. Menurut para responden jika sarapan hanya menggunakan roti saja maka hanya akan memiliki tenaga yang sangat kecil untuk melakukan aktivitas terutama bertani. Dari total jumlah responden hanya yang terkadang sarapan pagi menggunakan kue atau roti sebagai menu untuk sarapan pagi. Menurut Arifin (2015), bahwa terdapat hubungan antara sarapan pagi dengan konsentrasi responden (siswa di sekolah SD Al-Fathimiyyah Surabaya). Hasil penelitian di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda bahwa responden selalu melakukan sarapan pagi bersama keluarganya sebelum melakukan aktivitas rutin. Dapat terlihat bahwa sarapan dapat mempengaruhi energi dan konsentrasi seseorang dalam melakukan aktivitas rutin setiap harinya sehingga perlunya membiasakan sarapan pagi sebelum melakukan kegiatan.

Meminum Air Putih Yang Cukup dan Aman

Berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang (Menkes, 2014), sebagian besar (dua-per tiga) air yg dibutuhkan tubuh dilakukan melalui minuman yaitu sekitar



dua liter atau delapan gelas sehari bagi remaja dan dewasa yang melakukan kegiatan ringan pada kondisi temperatur harian di kantor/rumah tropis. Semakin berat aktivitas yang dilakukan seseorang maka anjuran meminum air putih pun semakin meningkat dan lebih baik jika konsumsinya lebih dari 8 gelas setiap hari. Untuk indikator meminum air putih yang cukup dan aman memiliki rata-rata skor 15,14 dengan kategori “Sedang”. Indikator ini masuk dalam kategori sedang karena responden memperoleh air putih yaitu dari memasak sendiri dan air yang digunakan untuk dimasak sebagian adalah air bor namun masih banyak responden yang memperoleh air putih dengan cara membeli air isi ulang di depot isi ulang yang ada. Standar meminum air putih bagi responden yaitu 8 gelas setiap harinya namun bagi responden meminum air putih selalu lebih dari 8 gelas setiap harinya tetapi ada juga yang hanya meminum air putih kurang dari 8 gelas setiap harinya. Jika standar atas kebutuhan meminum air putih tercukup maka seseorang tidak akan terkena dehidrasi akibat kekurangan cairan dari dalam tubuhnya dan jika terjadi dehidrasi maka seseorang tersebut akan merasakan lemas dan tidak bertenaga. Sebagian besar responden sudah tau tentang minimal kebutuhan air putih yang harus diminum setiap harinya.

Membaca Label Pada Kemasan Pangan

Label yang selalu ada pada kemasan pangan yaitu label halal, tanggal kadaluarsa dan nomor dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ketiga label tersebut dapat menunjukkan apakah pangan yang dikemas layak dikonsumsi atau tidak layak dikonsumsi. Dalam Pedoman Gizi Seimbang (Menkes, 2014), dianjurkan untuk membaca label pangan yang dikemas terutama keterangan tentang informasi kandungan zat gizi dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli atau mengonsumsi makanan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 10,71% dari jumlah responden masih tidak mengetahui tentang arti label pada kemasan pangan dan tidak melakukan pengecekan terhadap label tersebut. Hal yang membuat responden tidak mengerti arti label atau melakukan pengecekan label karena responden tidak dapat membaca sehingga sulit untuk mengetahui arti dari label seperti label halal, tanggal kadaluarsa dan nomor dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).



Bagi responden lainnya yang mengerti akan label yang tertera di kemasan selalu melakukan pengecekan terhadap produk pangan yang dikemas apakah sudah memiliki label halal, kapan tanggal kadaluarsa barang tersebut dan apakah terdapat nomor dari BPOM sehingga responden tidak ragu dalam membeli produk tersebut. Produk yang sering dibeli oleh responden berupa mie instan, ikan dalam kemasan (sarden), bumbu pangan instan dan produk lainnya. Untuk konsumsi seperti mie responden yang paling sering mengonsumsi setiap hari dan yang paling jarang mengonsumsi yaitu 2-4 hari sekali namun ada responden yang hanya mengonsumsi seminggu sekali.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa responden melakukan pengecekan saat membeli bahan pangan siap saji terlihat kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Menurut Zani, dkk (2013) bahwa label halal dan label aman pangan memiliki hubungan positif searah dengan keputusan pembelian konsumen dan jika informasi mengenai produk yang dibutuhkan oleh responden tidak terdapat dalam kemasan maka responden tidak membeli. Label pada kemasan pangan berperan penting karena dapat memberikan informasi kepada pembeli mengenai kandungan dan nilai gizi yang dimiliki suatu produk.

Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Bersih

Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabun dengan air bersih mengalir adalah agar kebersihan terjaga secara keseluruhan serta mencegah kuman dan bakteri berpindah dari tangan ke makanan yang akan dikonsumsi dan juga agar tubuh tidak terkena kuman (Menkes, 2014). Jika dilihat dari pekerjaan responden yang adalah responden maka setiap hari selalu melakukan aktivitas di lahan pertanian seperti memegang cangkul, menanamkan benih/bibit ditanah dan kegiatan lainnya. Sehingga selesai dari kegiatan bertani perlu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa responden selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai beraktivitas terutama saat selesai melakukan kegiatan bertani. Ada responden yang hanya melakukan cuci tangan menggunakan sabun saat selesai bertani namun saat selesai dari aktivitas lain hanya mencuci tangan dengan air bersih saja tanpa menggunakan sabun. Hal



yang membuat responden tidak mencuci tangan pakai sabun karena kurang tahu akan mencuci tangan yang baik dan benar namun terkadang ada yang lupa mencuci tangan dengan sabun. Pada indikator ini memiliki rata-rata skor 11,57 dan termasuk kategori “Tinggi”.

Berdasarkan hasil penelitian Purwandari, dkk (2013), bahwa hubungan antara perilaku cuci tangan dan insiden diare menunjukkan ada hubungan yang signifikan. Cuci tangan merupakan tindakan pencegahan yang murah namun efektif untuk menurunkan penyakit yang dapat ditularkan melalui tangan (misalnya diare). Hasil penelitian di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda yaitu responden selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai beraktivitas terutama saat selesai melakukan kegiatan bertani. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka terlihat kesamaan mengenai perilaku mencuci tangan selesai melakukan kegiatan karena menularkan kuman dan bakteri yang terdapat pada tangan saat selesai melakukan suatu aktivitas.

Beraktivitas Fisik Yang Cukup

Menurut Pedoman Gizi Seimbang (Menkes, 2014), aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga/energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olah raga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden indikator terakhir ini memiliki rata-rata skor 8,54 dan termasuk dalam kategori “Sedang”. Menurut responden untuk bentuk olahraga yang dilakukan setiap hari adalah mencangkul lahan pertanian para responden yang dapat dilakukan lebih dari 30 menit jika luas lahannya cukup besar. Namun mencangkul bukan termasuk dalam olahraga terstruktur dan terencana untuk menjaga kesehatan jasmani namun masuk kedalam kegiatan atau aktivitas dalam hal pekerjaan.

Latihan fisik adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Beberapa latihan fisik yang dapat dilakukan seperti berlari, jogging, bermain bola, berenang, senam, bersepeda dan lain-lain (Menkes, 2014).



Olahraga yang sering dilakukan oleh responden yaitu olahraga yang termasuk dalam kategori ringan seperti berlari, jalan santai, atau senam yang dilakukan seminggu sekali dengan durasi 30 menit. Waktu melakukan olahraga sering kali pagi atau sore hari karena salah satu olahraga ringan seperti berjalan dilakukan saat ingin menuju kelahan responden. Untuk indikator beraktivitas fisik/olahraga responden masih kurang memahami yang mana olahraga yang terstruktur dan masuk dalam kategori olahraga dan yang mana tidak termasuk dalam kategori olahraga.

Penerapan Penganekaragaman Menu Pangan

Konsumsi anekaragam pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang dan cara menerapkan pesan pertama dari Pedoman Gizi Seimbang adalah dengan mengonsumsi lima kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman (Menkes, 2014). Responden yang merupakan istri atau ibu dalam keluarga dan juga berprofesi sebagai wanita tani perlu mengatur segala hal terutama dalam menu makanan yang selalu dikonsumsi responden beserta keluarganya. Berdasarkan menu makan yang dikonsumsi setiap hari maka dapat diketahui apakah responden mengerti akan menu gizi seimbang dan sudah menerapkan hal tersebut melalui jenis pangan yang dikonsumsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menyiapkan menu makanan selalu berbeda setiap harinya dari menu lauk-pauk dan menu sayuran. Menu sayuran yang dibuat oleh responden yaitu berupa sayuran yang ditumis dan sayuran yang berkuah sedangkan lauk-pauk hanya dibuat menggunakan rempah-rempah atau hanya digoreng saja. Saat responden hanya menginginkan menu makan yang praktis maka responden hanya membeli menu makanan di warung makan atau hanya membeli sayuran dan lauk pauk yang sudah dimasak. Jenis buah-buahan yang dikonsumsi pun beragam mulai dari pisang, pepaya, semangka, buah naga, rambutan dan jenis buah-buahan lainnya namun jenis buah yang sering dikonsumsi yaitu buah pisang, semangka dan pepaya karena harganya yang ekonomis dan termasuk dalam buah-buahan untuk



memenuhi kebutuhan menu gizi seimbang.

Menurut responden jika setiap hari menu makanan tidak berbeda makan akan jenuh atau bosan bagi responden dan keluarganya sehingga perlu adanya menu makanan yang selalu berbeda setiap hari. Jenis lauk-pauk yang sering dikonsumsi oleh responden yaitu tempe dan tahu karena dari segi harga yang dapat dijangkau oleh responden dan bahan baku dari kedua lauk pauk tersebut berupa kacang kedelai yang termasuk dalam lauk-pauk mengandung protein tinggi. Selain menu makanan utama responden juga terkadang membuat camilan untuk konsumsi tambahan di waktu senggang yang bahannya didapatkan dari hasil kegiatan usahatani sebagai wanita tani seperti singkong goreng, ubi goreng, pisang goreng, dan menu lainnya sehingga dapat terlihat bahwa responden melakukan penganeekaragaman pangan yang dapat memenuhi asupan kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh. Namun pengetahuan responden tentang menu gizi seimbang masih pada tingkat mengetahui makanan yang mengandung sumber gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.

Pengetahuan yang dimaksud yaitu responden hanya mengonsumsi pangan yang dapat memberikan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya namun responden tidak memperhatikan berapa kalori yang dibutuhkan tubuh. Agar dapat dikatakan memenuhi status gizi seimbang maka perlunya mengetahui batas maksimum jumlah kalori dari karbohidrat, vitamin, lemak, mineral dan protein karena pada kelompok umur tertentu memiliki kebutuhan jumlah kalori berbeda satu sama lain sehingga perlu adanya mengetahui berapa jumlah asupan yang dibutuhkan. Hasil penelitian di Lingkungan Lempake Jaya, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda bahwa responden yang berprofesi sebagai wanita tani mengerti bahan pangan yang dapat dikategorikan dalam menu gizi seimbang namun responden masih tidak memahami lebih lanjut tentang berapa jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh setiap harinya dengan profesi responden sebagai wanita tani.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Novitasari (2009), bahwa hubungan pengetahuan dan sikap responden dengan perilaku makan berdasarkan PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) termasuk dalam kategori



baik. Sehingga dapat dilihat bahwa pengetahuan dan sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku makan untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Hasil penelitian di Kelurahan Lempake menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik dalam cara memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan jenis pekerjaan responden yaitu sebagai responden. Berdasarkan hasil kedua penelitian diatas makan dapat terlihat adanya kesamaan hasil penelitian.

Kendala dalam penelitian Novitasari (2009), adanya atlet yang berperilaku PUGS baik tetapi pengetahuan kurang. Kendala yang terjadi pada responden di Kelurahan Lempake yaitu cara mengatur menu makan seperti jenis masakan (sayuran dan lauk pauk) yang harus berbeda setiap harinya. Kendala lain yaitu melakukan olahraga ringan secara teratur karena aktivitas sebagai ibu rumah tangga dan faktor usia yang sudah lanjut. Namun untuk mengatasi kendala, dengan cara rutin makan sesuai jam makan, rajin mengonsumsi sayuran, buah-buahan dan lauk pauk, mengatur pola pangan manis, asin dan berminyak sehingga dapat terjaga asupan gizi seimbang setiap harinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Tingkat Pengetahuan Menu Gizi Seimbang Pada Rumah Tangga Petani Sayuran di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda termasuk dalam kategori Tinggi dengan rata-rata skor 138,964.
- b. Penerapan penganekaragaman pangan dari setiap responden yaitu dengan cara membuat menu makanan selalu berbeda setiap harinya namun responden masih kurang memahami cara memenuhi gizi seimbang salah satunya dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum kalori dari karbohidrat, vitamin, mineral, lemak dan protein yang dibutuhkan setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, L.A., 2015. *Hubungan Sarapan Pagi Dengan Konsentrasi Siswa Di Sekolah*. Surabaya.ejournal.unesa.ac.id/article/17369/68/article.pdf. 25 Mei 2016.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Babys, S.G.Y., Wahyuningsih, S., dan Rodiyah. 2013. Hubungan Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Tentang Gizi Dengan Status Gizi Pada Lansia Di Posyandu Lansia Hatsera Kampung Gendeng RW 17 Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta.
<http://journal.respati.ac.id/index.php/medika/article/download/93/89>. 10 Oktober 2015.
- Beck, Mary. E. 2000. *Nutrition And Dietetics For Nurses*. Hal: 1. Dalam: Hartono, Dr. A.D.A., dkk. Ilmu Gizi Dan Diet. Cetakan ke-1. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Daniel, M. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*: Dilengkapi beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan. Hal: 41. Dalam: Sinar Grafik Offset. Metode Penelitian Sosial Ekonomi: Dilengkapi beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan. Cetakan ke-3. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Desa Lempake. 2015. Potensi Kelurahan Lempake. <http://desalempakesmd.blogspot.co.id/2015/09/potensi.html>. 20 Januari 2016.
- Djafar, Meylina. 2015. Dampak Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Tindakan Kader Posyandu Tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS) Di Pondok Betung Pondok Aren. Jurnal Ilmiah Widya. Vol 2(2): 2337-6686.
<http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/176/155>. 10 Oktober 2015. ISSN-L 2338-33.
- Faizah, Nur. 2003. Menyusun Menu Usia Dini. Upi Education.
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PGTK/197011292003122-NUR_FAIZAH_ROMADONA/KES_d_GIZI/MENYUSUN_MENU.pdf. 02 Februari 2016.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang. Jurnal MenteriKesehatan.
[http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum PMK%20No.%2041%20ttg%20Pedoman%20Gizi%20Seimbang.pdf](http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum_PMK%20No.%2041%20ttg%20Pedoman%20Gizi%20Seimbang.pdf). 30 Januari 2016.



PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI PADA SEKTOR PERIKANAN INDONESIA

Praptono Guno Adi

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Diponegoro Semarang

E-mail : praptonogunoadi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Regionalisasi perdagangan MEA sudah mulai dilaksanakan, tak lepas pula dalam sektor Perikanan di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Faktor utama dalam menghadapi dan memenangkan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (2) Implementasi strategi dalam sektor perikanan Indonesia, dan (3) Dukungan yang diperlukan sektor perikanan dalam terbentuknya faktor utama kemenangan MEA. Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data sekunder 2011 hingga tahun 2015. Metodologi analisis data adalah dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian : 1) Faktor utama dalam menghadapi dan memenangkan program MEA adalah terbentuknya Pasar Tunggal dan Basis Produksi (Single Market and Production Base) di Indonesia, 2) Implementasi faktor utama MEA dalam sektor Perikanan masih terkendala tidak meratanya ketercukupan bahan baku antar wilayah di Indonesia dan juga konflik kepentingan dalam Manajemen Sumberdaya Perikanan dengan karakteristik "open access" dan pencurian sumberdaya ikan (Illegal Fishing) oleh pihak asing, dan (3) Dukungan yang diperlukan adalah Komunikasi aktif (penyuluhan) antara pemerintah - masyarakat, terbentuknya Kelembagaan Hukum dan Kesadaran Hukum yang kuat.

Kata Kunci : MEA, Single Market and Production Base, Perikanan

ABSTRACT

ASEAN Economic Community (AEC) trade regionalization has been started, and it's also inseparable for fisheries sector in Indonesia. The research aims to identify and analyze (1) Principal factor to face and win the ASEAN Economic Community (AEC), (2) Implementation for fisheries sector strategy in Indonesia, (3) Necessary support in formation of the main factors to winning the AEC . Supporting data used in this study are from Ministry of Marine and Fisheries (KKP). Secondary data years 2011 to 2015. Methodology of analysis are descriptive analysis (qualitative). Results of the study: 1) Principal factor to face and win the AEC are creation of Single Market and Production Base in Indonesia, 2) Implementation of MEA main factors in fisheries sector are still constrained by unequal distribution of raw materials adequacy between regions in Indonesia and also there are conflicts of interest in Fisheries Resource Management with "open access" characteristics and the Fish Theft (Illegal Fishing) by foreigners, (3) Necessary support are active communication (counselling) between government - people communities, and strong establishment of institutional and legal awareness.

Keywords : AEC, Single Market and Production Base, Fisheries



PENDAHULUAN

Keunggulan mutlak dalam arena persaingan umumnya dipergunakan sebagai ukuran seberapa besar daya saing suatu negara dalam perdagangan (internasional). Memasuki era regionalisasi ASEAN 2015 (pemberlakuan program Masyarakat Ekonomi ASEAN), semua negara anggota ASEAN menggunakan keunggulan komparatif sebagai strategi dalam memasuki era regionalisasi perdagangan MEA tahun 2016, tak terkecuali negara Indonesia.

Sektor Perikanan Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advance*) dan juga keunggulan daya saing kompetitif (*competitive advance*) dalam sektor perikanan (60% wilayah laut) dan juga mempunyai prospek pasar domestik (peningkatan konsumsi ikan nasional) dan pasar internasional (peningkatan ekspor perikanan). Kondisi regionalisasi MEA sekarang ini memunculkan suatu pertanyaan apakah faktor utama dalam memenangkan atau menghadapi MEA dan bagaimanakah implementasi MEA dalam sektor Kelautan Perikanan di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian adalah mengetahui dan menganalisis (1) faktor utama dalam memenangkan Program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (2) implementasi strategi faktor utama kemenangan MEA pada sektor perikanan Indonesia, dan (3) dukungan yang diperlukan sektor perikanan dalam terbentuknya faktor utama kemenangan MEA.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data pendukung dianalisis secara kualitatif yang kemudian akan lebih mengarah kepada jawaban tujuan penelitian. Penelitian membatasi variabel dan konsep pada : Faktor penentu dalam menghadapi dan memenangkan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), bagaimana Implementasi faktor utama kemenangan MEA tersebut dalam sektor perikanan Indonesia, dan bagaimana dukungan yang diperlukan untuk terbentuknya faktor utama dalam kemenangan MEA.

Data pendukung diperoleh dengan mengunduh data sekunder, yakni data



pendukung yang diperlukan dalam analisis penelitian, yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lingkup waktu tahun 2011 hingga tahun 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Utama dalam Kemenangan Program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

ASEAN (2015), menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam visi ASEAN 2020, dimana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan ditransformasi menjadi sebuah *pasar tunggal dan basis produksi*; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global.

Dalam kajian pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu **(1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil**. Kelima elemen inti tersebut dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai strategi *pasar tunggal dan basis produksi* ini dilengkapi lagi dengan **dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor** (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan. (ASEAN, 2015). Secara utuh, diagram struktural Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016 dijelaskan pada Gambar 1 dan 2.

Program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara prinsip terbentuk



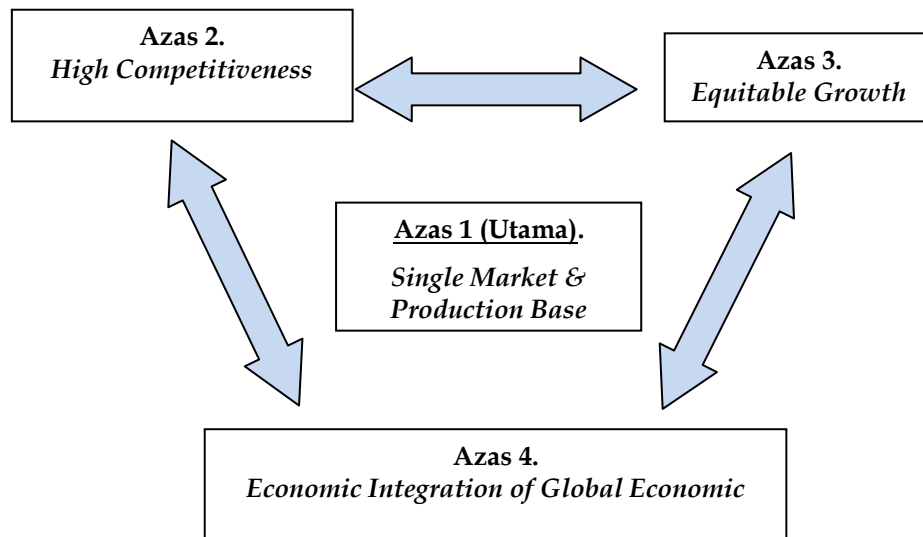
SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

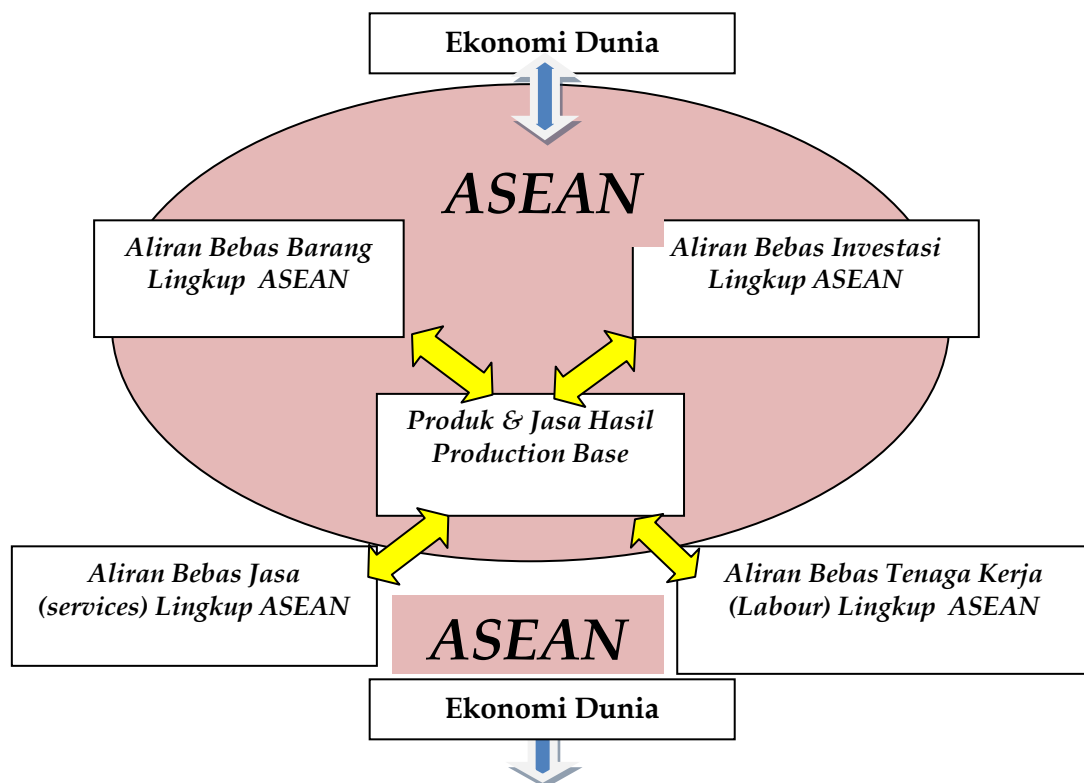
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

dengan desain empat (4) azas yang merupakan elemen / pilar utama, yakni *Single Market and Production Base*, *High Competitiveness*, *Equitable Growth* dan *Economic Integration of The Global Economic* (ASEAN, 2015).



Gambar 1. Empat Azas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)



Gambar 2. Alur Pembentukan " Single Market and Production Base " MEA



Gambar 1 dan 2, menjelaskan bahwa empat (4) azas MEA tersebut diimplementasikan berdasarkan hierarki urutan hingga tercapainya tujuan azas terakhir (integrasi kepada ekonomi global). Azas pokok utama / prinsip dari keempatnya adalah *azas single market and production base* (**pasar tunggal dan basis produksi**). Empat (4) azas MEA tersebut diimplementasikan berdasarkan hierarki urutan hingga tercapainya tujuan azas terakhir (integrasi kepada ekonomi global).

Azas pokok / prinsip dari keempatnya adalah *azas single market and production base* (**pasar tunggal dan basis produksi**). Azas 1 (utama) merupakan visi dan misi MEA untuk menciptakan kawasan basis produksi barang (*goods*) dan pembentukan kesepakatan *single market* (sistem pemasaran 1 pintu) dalam kawasan ASEAN. Azas kedua dan ketiga merupakan azas kebijakan setelah adanya azas pertama. Azas kedua dan ketiga tersebut merupakan pengaturan (*role play*) dalam tata niaga perdagangan internal kawasan ASEAN (kompetisi penuh dan pertumbuhan ekonomi setara/berkeadilan). Azas kedua dan ketiga cenderung mengarah kepada kebijakan-kebijakan ekonomi perdagangan pada internal antar kawasan ASEAN.

Azas keempat MEA (integrasi pada ekonomi global) merupakan visi misi akhir dalam Program MEA. Setelah terbentuknya basis produksi dan pasar tunggal, kompetisi penuh dan ekonomi yang setara dan berkeadilan, maka diimplementasikan azas keempat yakni mengintegrasikan kawasan MEA yang telah siap tersebut kedalam ekonomi dunia (globalisasi perdagangan dunia).

Implementasi Program Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam Sektor Perikanan Indonesia

Mulyadi (2005) menyatakan sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Dalam sektor perikanan, faktor yang berpengaruh penting yakni *sumberdaya manusia, modal* dan *teknologi* menempati posisi yang sangat strategis penting dalam mewujudkan tersedianya barang dan jasa. Soepanto (2001) menjelaskan bahwa



konsep pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*) memiliki konsep hubungan keterkaitan antar komponen – komponen pembentukannya. Komponen dalam pembangunan perikanan berkelanjutan adalah *Sumberdaya Perikanan, Produksi dan Pasar* dalam satu kesatuan yang saling berkaitan.

Beberapa hal penting dalam manajemen pengelolaan sektor perikanan adalah sinergi dari elemen-elemen sistem tataniaga perikanan. Hal ini mencakup industri perikanan (pemanen dan prosesor pengolah), pemerintah badan perwakilan pusat (ahli biologi, ekonom, perikanan manajemen pejabat, perikanan petugas), pemangku kepentingan masyarakat dan pihak yang berkepentingan (lembaga lingkungan dan kelompok kepentingan non pemerintah), serta ketersediaan sumber daya perikanan dan ekosistem dimana biota perikanan hidup. Konstituen beragam kelompok elemen perikanan tersebut haruslah berfungsi, berkontribusi, dan terwakili dalam manajemen pengaturan kebijakan di strategis (jangka panjang) serta dalam tingkat operasional (Lane dan Stephenson, 1998). Sejalan/sepaham dengan pemikiran tersebut, Dodge (2010), menyatakan bahwa hal penentu yang terkait dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara lain: 1) penentu produktivitas (*determinants of productivity*), 2) modal/sumberdaya manusia (*human capital*), 3) sumber daya alam (*natural resources*), 4) teknologi (*technology*), dan 5) lingkungan (*environment*). Dari keseluruhan faktor tersebut, hal/faktor yang banyak berpengaruh dalam “basis produksi” sektor perikanan adalah sumberdaya ikan, sumberdaya manusia, lingkungan, dan teknologi.

Pelaksanaan prinsip utama MEA Pasar Tunggal dan Basis Produksi (*Single Market and Production Base*) pada sektor Perikanan Indonesia mengalami berbagai macam benturan kendala, antara lain tidak meratanya ketercukupan bahan baku (ikan) antar wilayah di Indonesia yang sangat mengganggu dalam penciptaan “basis produksi” pada sektor perikanan Indonesia. Kementerian Kelautan Perikanan (2014) menyebutkan bahwa distribusi hasil produksi perikanan tangkap di Indonesia tidaklah merata dengan perolehan hasil tertinggi adalah wilayah Maluku-Papua (19%) yakni wilayah



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

timur Indonesia. Sebaran distribusi Produksi Perikanan Tangkap Indonesia dijelaskan pada Lampiran 1.

Lampiran 1 menjelaskan bahwa sebaran distribusi volume produksi perikanan tangkap tertinggi di Indonesia adalah berada di wilayah Maluku-Papua (19%), dan secara berurutan posisi kedua adalah wilayah Utara Jawa (16%), Utara Sulawesi (11%), Timur Sumatera (10%), Barat Sumatera (9%), Selat Malaka (9%), Selatan Sulawesi (8%), Bali - Nusa Tenggara (6%), Selatan/barat Kalimantan (6%), dan wilayah produksi terendah adalah Selatan Jawa dan Timur Kalimantan (3%).

Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia masih menganut karakteristik sistem “open acces dan common property”. Bromley (1991) menjelaskan bahwa open acces dan common property berarti bahwa laut adalah milik bersama dengan kondisi pengelolaan sumberdaya perikanan yang bebas dan liar (tak terkontrol) dan siapapun dapat mengakses sumberdaya sejauh diinginkan atau dibutuhkan. Kondisi karakteristik terbuka (open acces) dan milik bersama (common proverty) cenderung berpotensi kapitalisme (si kuat menang) dan menghasilkan konflik-konflik kepentingan dalam pengelolaan karena bersifat meminggirkan “nelayan kecil”. Kapitalisme dalam hal ini akan selalu bertentangan dengan konsep Nasionalisme Pancasila (asas berkeadilan) sehingga konflik-konflik selalu menghasilkan kondisi tidak meratanya suplai bahan baku ikan di Indonesia. Ditinjau dari sisi liberalisasi perdagangan, regionalisasi (MEA) merupakan hasil dari perlawanan terhadap globalisasi perdagangan. Namun secara harafiah essensi blok perlawanan terhadap globalisasi tersebut menghasilkan pula liberalisasi perdagangan dalam lingkup wilayah (region) yang lebih sempit / kecil (regionalisasi, contoh MEA dll).

Bappenas (2014) menyatakan bahwa masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi dalam pembangunan perikanan di Indonesia. Permasalahan sektor perikanan di Indonesia meliputi: 1) Pengelolaan (management); 2) Penegakan hukum (law enforcement); dan 3) Pelaku Usaha Perikanan. Lemahnya Sistem. Manajemen Perikanan Berkelanjutan (miss management)



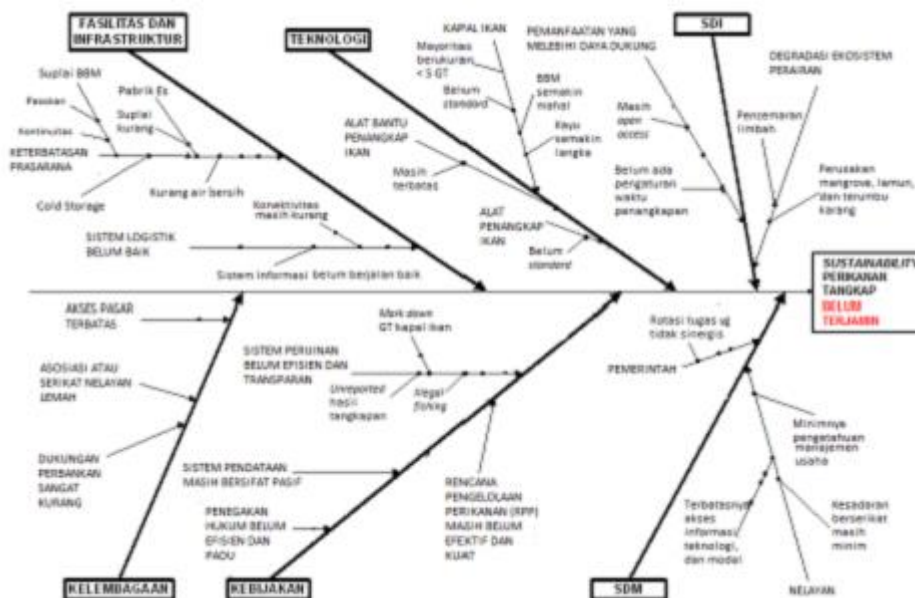
SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

merupakan isu utama dan strategis yang terjadi pada sektor perikanan di Indonesia (Gambar 3).



Gambar 3. Diagram Isu dan Permasalahan Sektor Perikanan Tangkap Indonesia

Mencermati posisi isu dan permasalahan sektor perikanan Indonesia (Gambar 3) secara umum permasalahan perikanan Indonesia adalah Kesalahan Pengelolaan (*Miss Management*), dalam hal ini komponen sistem yang paling atau sangat memegang peranan penting dalam penciptaan Pasar Tunggal dan Basis Produksi Perikanan di Indonesia adalah komponen Sumberdaya Manusia (SDM) karena SDM lah yang merupakan penggerak dari komponen-komponen lain dalam sistem dan permasalahan pada sektor perikanan Indonesia.

Dukungan Penting dalam Terbentuknya Faktor Utama Kemenangan MEA di Sektor Perikanan.

Dalam rangka solusi pemecahan masalah sektor perikanan, beberapa hal yang merupakan faktor essensial penting dalam pencapaian solusi permasalahan adalah : (1)Komunikasi aktif antara pihak Pemerintah (pengelola) dengan Masyarakat Perikanan Indonesia (*stakeholder*), (2) Kelembagaan Hukum yang kuat, (3) Kesadaran Hukum dan Aturan antar komponen sistem selaku Pelaku Usaha Perikanan di Indonesia.

Komunikasi merupakan suatu proses dimana individu dalam



hubungannya dalam kelompok, dalam organisasi, dan dalam masyarakat berperan menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk koordinasi dengan lingkungan dan orang lain (Brent, D.R, 1999). Organisasi/kelembagaan sendiri adalah koordinasi nasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab dan memiliki karakteristik struktur, tujuan, saling berhubungan dan tergantung kepada komunikasi manusia dalam koordinasi aktivitas pada organisasi/kelembagaan tersebut (Schein, 1997).

Dengan komunikasi dan koordinasi aktif yang kuat antara pihak pemerintah dengan masyarakat pelaku usaha perikanan, maka kesalahan pengelolaan (*miss management*) dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Dalam hal ini bentuk peran komunikasi dan koordinasi kelembagaan yang kuat difungsikan oleh kegiatan *penyuluhan tepat sasaran* dari pemerintah. Penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah tersebut dapat berupa *penyuluhan tentang program* dan tentang *aturan perundang-undangan* yang diberlakukan di sektor perikanan Indonesia dan regionalisasi perdagangan MEA. Disamping itu penyuluhan-penyuluhan yang terus dilakukan akan mewujudkan kesadaran hukum yang kuat antar *Stakeholder* (Pelaku Usaha Perikanan).

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan luas wilayah perairan laut lebih besar (60%) dibandingkan wilayah daratannya. Sinergi dari bermacam komponen sistem sektor kelautan perikanan mutlak diperlukan dalam penciptaan Pasar Tunggal dan Basis Produksi (*Single Market and Production Base*) sektor perikanan Indonesia, sehingga dalam menghadapi dan memenangkan MEA, sektor perikanan Indonesia mampu mencukupi kebutuhan perikanannya secara mandiri, untuk kemudian dapat diarahkan menjadi visi misi ke arah regionalisasi MEA yakni "*lumbung ikan*" (basis produksi perikanan) di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Terciptanya konsep Indonesia sebagai "*lumbung ikan*" ASEAN merupakan kemenangan telak/mutlak sektor perikanan Indonesia terhadap program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast Asian Nations / ASEAN. (2015). A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015 : Progress and Key Achievements. Asean Secretariat Publishers. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas . (2014). Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan /KKP. (2015). Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
- Brent, D.R. and Steward. L.P. (2013). *Komunikasi dan Perilaku Manusia* (Edisi Kelima). Rajawali Press. Jakarta.
- Bromley, D. (1991). *Testing for Common Versus Private Property* : Comment. Journal of Environmental and Economics and Management. Vol 21 No 1, pp 92-96.
- Dodge, E. R. (2010). Microeconomics/Macroeconomics. McGraw - Hill, NewYork.
- Lane D, and Stephenson R. (1998). Fisheries Co-management : *Organization, Process, and Decision Support*. Journal of North Atlantic Fisheries Science 23 : 251 - 265.
- Schein, H Edgar. (1997). *Organizational Culture and Leadership*, Fourth Edition, Jossey Bass Publishers, San Francisco.
- Lampiran 1. Tabel dan Diagram Distribusi Volume Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Wilayah Pendaratan Pantai (%).



PENGUASAAN TEKNOLOGI PETANI DALAM USAHATANI KAKAO DAN KAMBING DI TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (TTP) NGLANGGERAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Ari Widyastuti dan Gunawan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Sleman, Yogyakarta
Ariwidya62@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan usahatani salah satunya dipengaruhi oleh tingkat penguasaan teknologi yang dilakukan oleh petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan teknologi petani dalam budidaya kakao dan ternak kambing kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas di kawasan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran. Penelitian dilakukan di desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul pada bulan Maret 2016, melibatkan 45 petani pada 3 kelompok tani, yaitu kelompok Ngudi Makmur II, Mugo Dadi II, dan kelompok Rejo Mulyo II. Penelitian dilakukan dengan metoda survei, dengan cara wawancara terhadap peternak responden, menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang karakteristik petani dan penguasaan teknologi dalam usahatani kakao dan kambing. Data dan informasi yang terkumpul, dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan teknologi petani dalam budidaya kakao, yaitu pemupukan 87%, pemanenan kakao 76%, dan paling rendah penguasaannya adalah pengolahan kakao 23%. Penguasaan teknologi petani dalam teknologi budidaya kambing, semua petani (100%) menguasai teknologi kandang panggung, namun pada penggunaan kulit buah kakao sebagai pakan penguasaannya 19%. Semua petani memiliki tanaman kakao dengan rata-rata pemilikan sebanyak 90 pohon dan pemilikan ternak kambing 2,6 ekor. Produksi susu kambing PE di Nglanggeran 0,5-1 liter/hari dengan pemerahan 2 kali sehari masih dapat ditingkatkan. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman kakao dan ternak kambing perlu dilakukan peningkatan penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan hasil bagi petani, dan perlu dilakukan peremajaan tanaman kakao yang sudah tua serta pengadaan ternak kambing bagi petani yang belum memiliki.

Kata Kunci: Teknologi petani, budidaya Kakao-Kambing, Gunungkidul

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Luas tanaman kakao di



kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014 mencapai 1.373 ha, luas panen kakao 475 ha dengan produksi rata-rata 0,48 ton/ha/tahun (BPS DIY, 2015).

Kakao menjadi komoditas pilihan petani di Gunungkidul mengingat kakao memiliki pangsa pasar yang baik dan cocok ditanam dengan struktur tanah di Gunungkidul. Namun, produktivitas dan mutu buah kakao di Gunungkidul belum memadai, disebabkan oleh antara lain pengelolaan usahatani yang kurang optimal, serta banyaknya tanaman kakao yang sudah tua. Menurut Susanto (1994) upaya perbaikan produksi dan mutu kakao dapat dilakukan di antaranya melalui penerapan teknologi pengendalian hama penyakit, perbaikan teknologi budidaya dan pasca panen serta diversifikasi usaha termasuk upaya integrasi ternak kambing dalam sistim usahatani kakao.

Populasi ternak kambing di kabupaten Gunungkidul sebanyak 175.328 ekor (BPS DIY, 2015) terdiri atas jenis kambing Kacang dan Bligon untuk tipe potong/daging, sedangkan untuk tipe perah adalah kambing Peranakan Ettawa (PE). Integrasi ternak kambing kedalam sistem usahatani kakao merupakan upaya terobosan dalam meningkatkan pendapatan petani (Dishutbun DIY, 2013). Menurut Santiananda *et al.* (2009) keterpaduan antara usahatani kakao dan ternak kambing terbukti dapat meningkatkan pendapatan petani. Hasil pengkajian Gunawan *et al.* (2012) menunjukkan bahwa pendapatan usahatani meningkat dari Rp. 423.000,00 menjadi Rp. 2.481.000,00 per tahun melalui integrasi kakao dengan ternak kambing. Meskipun pendapatan petani dipengaruhi oleh teknologi petani dalam budidaya kakao dan ternak kambing. Munier *et al.* (2009) menyatakan bahwa pendapatan petani dapat meningkat dari Rp.5.286.000,00 menjadi Rp.8.240.000,00 melalui inovasi teknologi.

Pada tahun 2015 Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu lokasi kegiatan Taman Teknologi Pertanian (TTP), yaitu di desa Nglanggeran kecamatan Patuk kabupaten Gunungkidul. Tata guna lahan desa Nglanggeran sebagian besar adalah lahan pertanian, perkebunan, ladang dan pekarangan. Kegiatan TTP Nglanggeran fokus kepada usahatani kakao integrasi dengan ternak kambing PE, sehingga sumber ekonomi petani tidak hanya berasal dari hasil usahatani kakao tetapi juga berasal dari pemeliharaan ternak kambing.



Dalam tulisan ini disajikan penguasaan teknologi petani dalam usahatani kakao dan kambing perah yang diperlukan sebagai bahan masukan bagi upaya peningkatan produktivitasnya di kawasan TTP Nglanggeran. Berdasarkan tingkat penguasaan teknologi tersebut maka dapat disarankan perbaikan atau inovasi teknologi yang diperlukan di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi kawasan Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran yaitu di desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Dalam penelitian ini terlibat 45 orang petani desa Nglanggeran yaitu terdiri atas 15 orang dari kelompok tani Ngudi Makmur II dusun Gunungbutak, 15 orang dari kelompok tani Margo Dadi II dusun Nglanggeran Wetan dan 15 orang dari kelompok tani Rejo Mulyo II dusun Karangsari.

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2016 dengan metoda survei, dengan cara wawancara terhadap petani menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi beberapa pertanyaan tentang karakteristik petani dan tingkat penguasaan teknologi petani dalam usahatani kakao dan kambing. Karakteristik petani meliputi umur dan tingkat pendidikan petani.

Penguasaan teknologi petani dalam usahatani kakao yang diamati meliputi pemangkasan, pemupukan, penggunaan rorak, pengendalian hama terpadu (PHT), panen dan pasca panen kakao, serta pengolahan kakao. Penguasaan teknologi petani dalam budidaya ternak kambing PE yang diamati adalah penggunaan kandang, penggunaan pakan (konsentrat, daun kakao, kulit buah kakao), reproduksi dan penggunaan kalender bagi ternak kambing.

Data dan informasi yang terkumpul dari jawaban kuesioner, dianalisa secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani

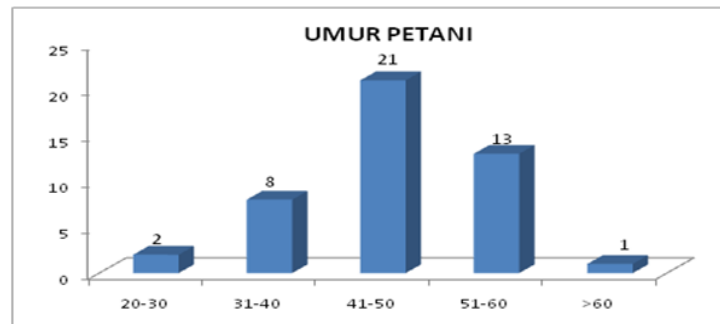
Umur petani di lokasi Kawasan TTP Nglanggeran disajikan pada Gambar 1.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

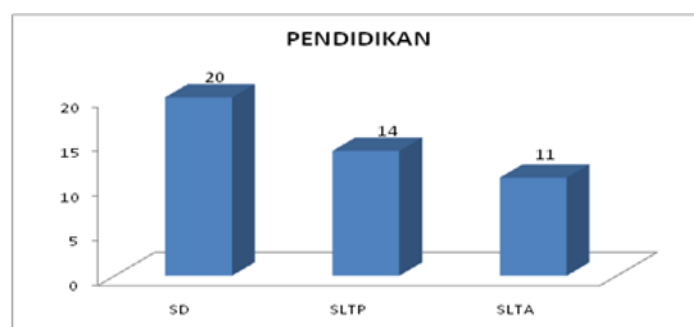
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Gambar 1. Keragaan umur petani TTP di Desa Nglanggeran

Dari gambar 1 terlihat bahwa umur petani di lokasi kawasan TTP Nglanggeran beragam, sebagian besar berumur 20-60 tahun (umur produktif) sebanyak 96,4% dan hanya 3,6% berumur > 60 tahun. Menurut Mardikanto (1993) dan Marliati *et al.* (2008), usia berpengaruh terhadap kemampuan mengadopsi inovasi, petani berusia lanjut cenderung hanya melaksanakan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat. Soekartawi (2005) menyatakan bahwa petani pada umur produktif umumnya mempunyai semangat untuk berusaha lebih cepat mengadopsi suatu inovasi.

Pada gambar 2 terlihat bahwa sebagian besar (55,6%) petani berpendidikan SLTP dan SLTA, hanya 44,4% berpendidikan SD (gambar 2), sehingga diharapkan dengan pendidikannya dapat lebih mudah menerima inovasi teknologi dengan baik. Kartasapoetra (1994) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kemampuan untuk menyaring informasi atau inovasi yang diterima.



Gambar 2. Keragaan tingkat pendidikan petani TTP di Desa Nglanggeran
Penguasaan Teknologi Usahatani Kakao

Penguasaan teknologi dalam usahatani kakao tersaji pada Tabel 1.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Tabel 1. Penguasaan teknologi petani TTP dalam usahatani kakao

No	Teknologi Budidaya Kakao	Penguasaan Teknologi Petani
1	Pemangkasan pohon kakao 6 bulan sekali	53%
2	Pemupukan tanaman kakao	87%
3	Penggunaan Rorak	74%
4	Pengendalian hama terpadu	55%
5	Panen kakao 2 kali/bulan	76%
6	Fermentasi biji kakao	68%
7	Penjualan Biji Kering	70%
8	Pengolahan kakao	23%

Sumber: Data primer diolah, 2016

Dari tabel 1 ditunjukkan bahwa 53% petani telah melakukan pemangkasan pohon kakao secara rutin setiap 6 bulan sekali. Hal ini karena 96% petani berpersepsi baik terhadap kegiatan pemangkasan, hanya 4% yang mengatakan bahwa tanaman dipangkas dan tidak dipangkas sama saja. Widyayanti *et al.* (2012) melaporkan bahwa pemangkasan tanaman kakao oleh petani di Kulon Progo dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh 44% anggota kelompok tani, setiap 1-3 bulan oleh 43% anggota kelompok tani dan 13% tidak melakukan pemangkasan.

Pemupukan tanaman kakao sudah dilakukan sebagian besar petani (87%) dengan pupuk kimia maupun organik dari kotoran ternak (feses) 2 kali setahun, namun belum optimal untuk pemanfaatan urine bagi tanaman kakao. Sebanyak 74% petani membuat rorak di kebun kakao, walaupun jumlahnya belum mencukupi bila dibandingkan dengan luasan lahan dan jumlah tanaman kakao. Rorak berfungsi untuk menjebak/menangkap aliran permukaan dan tanah yang tererosi (Danial *et al.*, 2012).

Pengendalian hama terpadu (PHT) pada tanaman kakao mulai dari pemangkasan, membersihkan lingkungan kebun, pemupukan, dan pengelolaan tanaman penaung sudah dilakukan oleh 55% petani, 30% melakukan pemangkasan dan sanitasi lingkungan, dan 15% hanya melakukan pemangkasan. Oleh karena itu penyuluhan penerapan PHT masih diperlukan.

Panen atau pemetikan buah kakao dilakukan 1-2 kali/bulan oleh 76% petani. Masih sedikit petani yang melakukan pemeraman (33%). Petani menjual



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

kakao dalam bentuk biji kering (70%), biji basah 28% dan 2% dalam bentuk buah utuh. Hal ini lebih baik dibandingkan kondisi petani di Banjarharjo Kulon Progo, karena hanya 15% petani yang menjual kakao dalam kondisi kering sedangkan 85% menjual kakao dalam bentuk basah (Gunawan *et al.*, 2014).

Fermentasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas biji kakao. Fermentasi dilakukan oleh sebagian besar petani secara rutin 68%, dan 15% kadang-kadang dan 17% tidak pernah melakukan fermentasi. Petani dalam penanganan panen masih dihadapkan pada masalah keterbatasan sarana, karena sebagian besar petani (68%) belum memiliki lantai jemur, rak, dan rigen, baru 13% petani yang memiliki semua jenis peralatan.

Petani masih banyak (77%) yang belum melakukan pengolahan biji dan hanya 23% yang telah melakukan pengolahan.

Penguasaan Teknologi Budidaya Kambing

Penguasaan teknologi budidaya kambing PE disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penguasaan teknologi petani dalam budidaya kambing

No	Teknologi Budidaya Kambing PE	Penguasaan Teknologi Petani
1	Penggunaan kandang panggung	100%
2	Penggunaan pakan konsentrat	51%
3	Penggunaan daun kakao sebagai pakan	40%
4	Penggunaan kulit buah kakao sebagai pakan	19%
5	Pengetahuan umur kambing dikawinkan	51%
6	Penggunaan kalender ternak	39%
7	Pengolahan feses menjadi pupuk organik padat (POP) dan urin menjadi pupuk organik cair (POC)	38%

Sumber : Data primer diolah, 2016

Kandang sangat penting bagi kambing, selain sebagai tempat berlindung, juga tempat berproduksi dan bereproduksi. Semua petani memiliki kandang, dan semua petani (100%) telah meyakini bahwa kandang panggung lebih baik daripada kandang lantai tanah. Sebanyak 92% petani melengkapi tempat pakan dan tempat minum. Lantai kandang dibuat sedemikian rupa sehingga kotoran padat dan cair terpisah, walaupun baru 49% yang melakukan. Pengolahan kotoran baru dilakukan oleh 38% petani, baik untuk pengolahan kotoran padat (feses) dan cair (urine).



Sebanyak 51% petani memberikan pakan konsentrat, 39% kadang-kadang, dan 10% belum memberikan karena keterbatasan dana, walaupun petani telah mengetahui manfaatnya bagi ternak. Pakan hijauan diberikan sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore hari berupa rumput dan daun-daunan.

Pemanfaatan daun dan kulit kakao sebagai pakan baru dilakukan oleh 40% petani, 55% kadang-kadang dan 6% petani tidak memberikan. Untuk kulit kakao, 19% petani sudah sering menggunakan, 46% kadang-kadang, dan 35% petani belum pernah menggunakan. Banyaknya petani belum memanfaatkan daun/kulit kakao karena belum dimengertinya daun dan kulit kakao dapat diberikan sebagai pakan kambing, serta masih tersedianya hijauan di lokasi.

Petani mengetahui saat umur kambing dikawinkan, yaitu pada umur 1-1,5 tahun (51%), lebih 1,5 tahun (31%), dan kurang dari setahun (18%). Petani juga mengetahui tanda kambing birahi dan kambing bunting, hal ini penting karena menentukan produktivitas kambing. Service/conception (S/C) cukup baik yaitu 1-2 kali (96%) dan hanya 4% S/C lebih dari 2. Induk kawin kembali pada 2-6 bulan setelah beranak dan penyapihan anak umur 3-4 bulan (51%), umur 4-6 bulan (49%). Kalender ternak berguna dalam pengaturan reproduksi dan pengelolaan perkawinan kambing guna meningkatkan jumlah kelahiran ternak. Petani menerapkan kalender ternak sebanyak 39%, selebihnya (61%) belum karena tidak mengetahui manfaatnya secara pasti. Padahal dengan penggunaan kalender ternak maka jumlah kelahiran anak kambing dapat ditingkatkan menjadi 3 kali dalam 2 tahun, seperti dilaporkan Azmi *et al.* (2006).

Produktivitas Tanaman Kakao dan Ternak Kambing

Luas kebun kakao pada 3 kelompok di kawasan TTP Nglanggeran 14,8 ha, dengan rata-rata pemilikan 0,26 ha setiap petani, mendekati rata-rata pemilikan lahan kakao oleh petani di DIY yaitu 0,27 ha per petani (Dishutbun DIY, 2013).. Dari lahan tersebut ditanami kakao sebanyak 5.047 pohon atau rata-rata setiap petani memiliki 90 pohon. Sebanyak 63,74% atau 3.217 pohon merupakan tanaman menghasilkan (produktif) dan selebihnya 36,26% tanaman tidak menghasilkan (tidak produktif, tanaman sudah tua, tanaman baru).



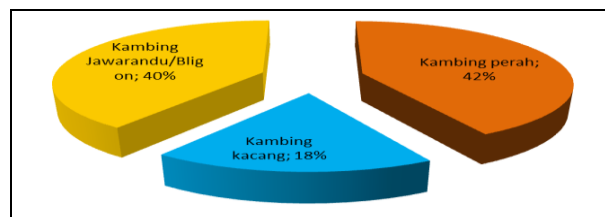
SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Rata-rata produktivitas kakao yang dihasilkan oleh petani di Gunungkidul pada tahun 2014 adalah 480 kg/ha/tahun lebih rendah dibandingkan petani di Kulon Progo yaitu 520 kg/ha/tahun (BPS DIY, 2015), namun keduanya masih belum memenuhi target nasional yaitu 924 kg/ha/tahun. Menurut Munier *et al.* (2009) produksi kakao dapat ditingkatkan dari 644-762 kg/ha/tahun menjadi 1.180-1.423 kg/ha/tahun melalui introduksi teknologi. Rata-rata pemilikan ternak kambing 2,6 ekor/petani dengan pemilikan kambing induk 1,4 ekor per petani. Jenis kambing yang dipelihara meliputi kambing Kacang (18%), Bligon/Jawarandu (40%) dan kambing perah Peranakan Etawah (PE) sebanyak 42%, ditunjukkan pada Gambar 3.

Produksi susu sebesar >1 liter/hari hanya dialami sebagian kecil petani (7%), sedangkan 73% produksi susu 0,5-1 liter/hari, dan 19% produksinya <0,5 liter per hari. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari. Produksi tertinggi dicapai pada 2-3 bulan setelah beranak, dimana pemberian susu pada anak kambing mulai dikurangi. Produksi susu ini lebih rendah dari potensi produksi susu kambing PE umumnya yaitu 1,0-1,5 liter/hari (Gustiani dan Mulijanti, 2010). (Gambar 3).



Gambar 3. Keragaan jenis kambing di TTP Nglanggeran

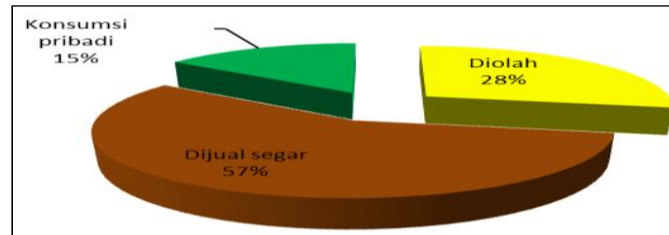
Umumnya (58%) susu yang dihasilkan oleh peternak dijual dalam bentuk segar, diminum segar 15%, dan 28% diolah untuk dijadikan produk olahan. Susu yang dihasilkan peternak masih banyak (78%) belum diolah sendiri, hanya 22% yang sudah mengolah susu kambing yaitu dengan membuat susu fermentasi, permen susu, dan susu bubuk (Gambar 4).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Gambar 4. Keragaan pemanfaatan susu kambing oleh petani

Pemilikan petani terhadap tanaman kakao dan ternak kambing di TTP Nglanggeran adalah 66,1% petani memiliki tanaman kakao sekaligus ternak kambing, 33,9% hanya memiliki tanaman kakao tetapi tidak memiliki ternak kambing.

PENUTUP

Usahatani integrasi tanaman kakao dan ternak kambing di kelompok tani Ngudi Makmur II, Mugo Dadi II dan Rejo Mulyo II pada kawasan TTP Nglanggeran masih memungkinkan untuk lebih ditingkatkan. Penguasaan teknologi petani dalam budidaya kakao untuk pemupukan mencapai 87%, pemanenan kakao 76%, dan paling rendah penguasaannya adalah pengolahan kakao 23%, sedangkan penguasaan teknologi petani dalam budidaya kambing, semua petani (100%) menguasai teknologi kandang panggung, namun pada penggunaan kulit buah kakao sebagai pakan penguasaannya 19%. Untuk meningkatkan produktivitas kakao dan kambing perlu adanya peningkatan penguasaan teknologi budidaya dan pengolahan hasil melalui penyuluhan dan pelatihan bagi petani, dan perlu dilakukan peremajaan tanaman kakao yang sudah tua serta pengadaan ternak kambing bagi petani yang belum memiliki.



DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Gunawan dan Daniswari. 2006. *Petunjuk teknis memelihara kambing unggul*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu. 53 hlm.
- BPS DIY, 2015. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam angka/In Figures 2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Danial, D., dan M. Hidayanto. 2012. Rorak Pada Tanaman Kakao. Folder. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur. Samarinda.
- Dishutbun DIY. 2013. Grand Design Pengembangan Model desa Kakao DIY Tahun 2014-2017. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY.
- Gunawan, Sukar, Wiendarti I.W., Sri Wahyuni B., Setyorini W., Tri Joko S., Sutarno, Anthoni Marthon, Nugroho Siswanto dan Utami Hatmi. 2012. Pengkajian model pengembangan tanaman kakao integrasi dengan ternak kambing guna meningkatkan produktivitas kakao dan pendapatan petani di Kabupaten Kulon Progo. Laporan Akhir Tahun 2012. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. 75 hlm.
- Gunawan, W.I Werdhany, Sukar, S.W. Budiarti, Utami Hatmi, Setyorini Widyayanti, Evi Puji Astuti, Gede Suparta dan Sutarno. 2014. *Pengkajian integrasi tanaman kakao dengan ternak kambing mendukung terwujudnya kawasan agribisnis di DIY*. Laporan Akhir 2014. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. 115 hlm.
- Kartasapoetra, A.G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas maret university Press. Surakarta.
- Marliati, Sumardjo, Pang S. Asngari, Prabowo Tjitropranoto dan Asep Saefuddin. 2008. *Ilmu Penyuluhan. Jurnal Penyuluhan*. (4)2: 92 – 99.
- Munier, F.F., A. Ardjanhar, Y. Langsa dan N.F. Femmi. 2009. *Optimalisasi Produktivitas Tanaman Kakao dan Kambing melalui Perbaikan Budidaya secara Terintegrasi*. Pros. Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. 208-219.
- Sukartawi. 2005. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: UI-Press.
- Santiananda, A., Asmarasari dan B. Tiesnamurti. 2009. *Pengembangan Ternak Kambing Terintegrasi dengan Tanaman Kakao*. Pros. Lokakarya Nasional Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. 220-226.
- Susanto, FX. 1994. *Tanaman Kakao. Budidaya dan Pengolahan Hasil*. Kanisius. Yogyakarta.
- Widyayanti, S., N. Siswanto dan Gunawan. 2012. *Penguasaan Teknologi Petani dalam Usahatani Kakao dan Ternak Kambing di Kulon Progo*. Dalam Buku Integrasi Kambing Kakao. BPTP Yogyakarta. 01-08.



EKSISTENSI PENYULUH AGAMA DALAM MEMBANGUN HARMONISASI KEBERAGAMAAN (Studi Kasus Penyuluh Agama Kota Bogor)

Hasan Sazali

Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : sazalihasansazali.ma@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pembangunan agama dalam mewujudkan kehidupan keberagamaan yang harmoni ditengah kehidupan masyarakat pada dasarnya terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, dan harus mampu menciptakan sinergi dengan pembangunan di bidang lainnya. Dalam hal ini peran aktif segenap warga masyarakat, tidak terkecuali peran penyuluh keagamaan dalam proses pembangunan. Kajian ini bertujuan melihat peran penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, khususnya pembangunan agama. Lokasi penelitian di Kota Bogor. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, analisis kritis dan statistik. Hasil kajian menyatakan bahwa secara kualitas penyuluh agama sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Namun disisi lain, kajian ini mendapatkan bahwa peran penyuluh agama di Kota Bogor, dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan masih relatif lemah. Oleh karena itu perlunya peran aktif penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan keberagamaan masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas penyuluh agama baik secara kompetensi keilmuan maupun keterampilan yang terkait dengan penyuluhan agama. Agar pembangunan keberagamaan dimasyarakat dapat terwujud dengan baik.

Kata Kunci: penyuluh agama, peran aktif, harmonisasi keberagamaan.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Kota Bogor dari tahun ketahun dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Bogor. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, ketersediaan sumberdaya serta tepat waktu Pemerintahan Kota bogor dengan visi pembangunan dalam mencapai perwujudan Visi Kota Bogor yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah”.

Pembangunan di sektor agama merupakan salah satu dari sekian banyak sektor pembangunan yang ada di Indonesia begitu juga dengan Pemerintahan kota Bogor. Maka dari itu kebijakan pembangunan agama di Indonesia memiliki



dua landasan utama yaitu landasan ideal dan landasan instrumental. Landasan ideal adalah cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dirumuskan dalam lima dasar negara Indonesia yang tersimpul dalam Pancasila. Pancasila diawali oleh kewajiban universal setiap manusia bahwa keberadaan dirinya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kebijakan pembangunan agama peranan penyuluh agama pada sektor pembangunan agama sangat dibutuhkan. Apalagi peranan mereka dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan keberagamaan yang menjadi tujuan utama pada sektor pembangunan agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan keberagamaan di Kota Bogor. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana peran penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama di Kota Bogor? Serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan agenda pembangunan agama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama di Kota Bogor? Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah menganalisis peran penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama di Kota Bogor, serta aktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan agenda pembangunan agama khususnya dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama di Kota Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara universal, detail, mendalam, yang terpenting dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian yang akan dilakukan, menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.



Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara serta interviu dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara bisa mengambil beberapa bentuk. Yang paling umum, wawancara studi kasus bertipe *open-ended* Yim (2015: 108) di mana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta atau sesuatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya. Makin besar bantuan responden dalam penggunaan cara yang disebutkan di atas makin besar perannya sebagai “informan”. Informan-informan kedudukannya sangat penting bagi keberhasilan studi kasus. Yim (2015: 109) Wawancara ini dilakukan dengan cara mendalam.

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka, diskusi dan tanya jawab dengan informan yang melibatkan kelompok tertentu (*focus group discussion*) Creswell (2010: 267) hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi data yang lebih dalam, diskusi kelompok juga dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen yang berbeda, dalam hal ini konteks perbedaan terletak pada aspek keyakinan baragama, dengan cara melakukan (*focus group Discusion*). Selain itu juga dilakukan pencatatan yang berkaitan dengan fokus peneitian, tentang kondisi secara umum, dan spesipik apa yang terjadi di lapangan. Untuk lebih melengkapi data supaya lebih komprehensif pada beberapa karakteristik dilakukan kuantifikasi prespektif statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika perkembangan Kota Bogor yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan akan memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Secara sosiologis, masyarakat Kota Bogor merupakan masyarakat transisi karena dengan mobilitas yang tinggi dan menjadi penyangga Ibu Kota dengan keaneka ragam budayanya. Dalam aspek budaya, secara historis Kota Bogor memiliki ikatan yang kuat dengan budaya Sunda. Dalam tataran penghasilan, masyarakat Kota Bogor merupakan kombinasi antara masyarakat industri karena berada dalam kawasan Jabodetabek, dengan masyarakat agraris karena berada disekitar kawasan pertanian dan perkebunan. Hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh kepada kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang ada di Kota Bogor. Bahri (2012: 49)

Penduduk Kota Bogor berdasarkan jumlah penganut agama berjumlah 983.156, di mana Agama Islam sebagai pemeluk mayoritas yang ada di Kota Bogor berjumlah 908.144 (92,4%) dari jumlah keseluruhan masyarakat Kota Bogor dan terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Adapun komposisi jumlah penduduk kota Bogor berdasarkan agama tercantum pada Tabel 1

Tabel 1. Komposisi Penduduk Kota Bogor Berdasarkan Agama

No.	Kecamatan		Agama (orang)						
			Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Kepercayaan
1	Kota Selatan	Bogor	172,838	7,914	4,645	144	2,296	95	80
2	Kota Timur	Bogor	87,056	6,578	4,656	75	1,508	26	3
3	Kota Tengah	Bogor	93,723	5,960	4,102	95	2,910	81	50
4	Kota Barat	Bogor	210,231	5,577	2,805	267	742	63	22
5	Kota Utara	Bogor	161,851	8,628	3,494	402	773	41	44
6	Tanah Sereal		182,445	6,625	3,392	239	615	34	31
Jumlah			908,144	41,282	23,094	1,222	8,844	340	230

Sumber: DUKCAPIL Kota Bogor 2015

Untuk melakukan pembinaan umat beragama yang berjumlah 983.156 di wilayah Pemerintah Kota Bogor, Kantor Kementerian Agama Kota Bogor



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

memiliki penyuluh agama yang bertugas melakukan pembinaan kehidupan keberagamaan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini harmonisasi kehidupan keberagamaan di wilayah Kota Bogor kurang kondusif, mulai dari peristiwa GKI Yasmin, persoalan Ahmadiyah. Begitu juga dengan kondisi wilayah Kabupaten Bogor yang menjadi tetangga terdekat, yang sarat dengan persoalan kasus intoleransi agama, sedikit banyaknya telah memberi pengaruh dalam sendi-sendi sosial kehidupan masyarakat Kota Bogor. Untuk menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan keberagamaan pemerintah memfasilitasi keberadaan penyuluh agama yang secara fungsi dan tugasnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Adapun jumlah data penyuluh agama di Kota Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyuluh Agama Kota Bogor

No	Nama	Unit Kerja
1	H. Rivai,S.Ag.M.Si	Penyuluh Agama Islam. Bogor Timur
2	Abdullah Mukti	Penyuluh Agama Islam Bogor Selatan
3	Dra. Iin Inayah	Penyuluh Agama Islam Bogor Tengah
4	Mas`ah Kholilah	Penyuluh Agama Islam Bogor Barat
5	Dian Fitriani,S.Si	Penyuluh Agama Islam Tanah Sereal
6	H. Armani Syah	Penyuluh Agama Islam Bogor Tengah
7	Zakiah,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Bogor Barat
8	Saurisih,S.Ag	Penyuluh Agama Islam Bogor Utara
9	Kahirun Na`im,ME.I	Penyuluh Agama Islam Tanah Sereal
10	Agus Widodo,S.Ag	Penyuluh Agama Hindu Kota Bogor
11	Hepy Satjanuari,Sth	Penyuluh Agama Keristen Kota Bogor

Sumber Kemenag Kota Bogor 2015

Penyuluh agama yang ada di Kota Bogor sebanyak 11 orang, dengan rincian, 9 penyuluh agama Islam, 1 penyuluh agama Kristen, 1 penyuluh agama Hindu. Secara rasio dengan jumlah penyuluh agama yang 11 orang tersebut harus melayani penganut umat beragama berjumlah 983.156, di mana Agama Islam sebagai pemeluk mayoritas yang ada di Kota Bogor berjumlah 908.144 (92,4%) dari jumlah keseluruhan masyarakat Kota Bogor dan terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Kalau kita analisis secara kuantitas jumlah penyuluh agama sangat tidak berbanding dengan jumlah umat beragama yang menjadi fokus tugas para penyuluh agama yang ada di Kota Bogor. Dengan jumlah penyuluh agama hanya sebanyak itu. Jumlah tersebut belum efektif



dengan jumlah umat beragama yang banyak disertai dengan tugas fungsi para penyuluh agama yang cakupannya sangat luas. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dengan persoalan pembangunan sektor keagamaan di tanah air khususnya pembangunan toleransi umat beragama dalam mewujudkan khidupan yang harmoni dalam sistem sosial masyarakat. Sazali (2016)

Dalam hal ini pemerintah seharusnya memperhatikan rekrutmen untuk mengangkat penyuluh agama dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan terkait dengan aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap penyuluh agama, walaupun dalam proses perjalanan penyuluh agama mendapat diklat-diklat terkait dengan pengembangan profesi yang menjadi tugas pokoknya, akan tetapi, indikator keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyuluhannya sangat kasuistik. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pada dasarnya juga memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan, sekaligus peningkatan kualitas penyuluh agama di wilayahnya masing-masing. Kondisi ini sangat kontekstual, terkait dengan apa yang menjadi persoalan pokok dalam pelaksanaan pada sektor pembangunan agama. Peningkatan kualitas umat beragama, dalam pendekatan peningkatan nilai-nilai keimanan yang diwujudkan dalam nilai-nilai kesalehan sosial, sekaligus untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan keberagamaan. Pada dasarnya, masing-masing penyuluh agama seharusnya mampu memahami pengetahuan agama yang ada diluar keyakinannya, misalnya penyuluh agama Islam, memahami konsep-konsep dasar yang ada pada ajaran agama Keristen, begitu juga dengan sebaliknya, pemahaman ini, nantinya dapat dilanjutkan dengan masing-masing objek yang menjadi tugas pokok para penyuluh agama. Menjadi persoalan jangankan dapat menguasai dengan baik terhadap konten ajaran agama diluar keyakinan masing-masing penyuluh. Memahami ajaran agamanya sendiri dalam sektor hubungan antar manusia pada persoalan ubudiyah masih banyak persoalan. *Khilafiyah* menjadi persoalan yang sensitif ketika permasalahan ini diangkat dalam pemahaman kebergamaan para penyuluh agama, khususnya agama Islam yang menjadi kelompok mayoritas. Terdapat



perbedaan bagi masing –masing penyuluh terkait aspek hubungan antar umat beragama, bermacam alasan yang diangkat. Alasan yang besar banyak muncul dari persoalan akidah. Ini menjadi salah faktor yang menghambat dalam membangun harmonisasi kehidupan keberagamaan di Kota Bogor. Sehingga peran penyuluh agama dapat dikatakan rendah dalam membangun harmonisasi kehidupan keberagamaan. Temuan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya Pemerintah kota Bogor beserta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, terkait dengan eksistensi penyuluh agama dalam membangun harmonisasi kehidupan keberagamaan untuk Kota Bogor, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyuluh agama di Kota Bogor peranan yang mereka lakukan dalam membangun harmonisasi kehidupan beragama masyarakat masih lemah. Kondisi ini disebabkan oleh begitu luasnya ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap penyuluh agama. Begitu juga persoalan yang terkait dengan kompetensi terhadap keilmuan yang terkait dengan hubungan antar agama. Penyuluh agama sebaiknya fokus dalam sektor pembangunan agama, sebagai tugas pokok. Terutama dalam membangun harmonisasi kehidupan umat beragama untuk menjadi lebih baik
- b. Pemerintah seharusnya meredefenisi kembali tentang eksistensi penyuluh agama dalam konteks pembangunan, kondisi ini diawali dari pengertian penyuluh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat statistik Kota Bogor, 2013. Kota Bogor Dalam Angka 2013. Pemerintahan kota Bogor.
- Bahari ed, 2010. Toleransi Beragama Mahasiswa (Studi Tentang Pengaruh Kepribadian, Keterlibatan Organisasi, Hasil Belajar Pendidikan Agama,



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

dan Lingkungan Pendidikan Terhadap Toleransi Mahasiswa Berbeda Agama Pada 7 Perguruan Tinggi Umum Negeri). Penelitian. Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta.

Kementerian Agama R.I, 2010. Perencanaan Program dan Anggaran Departemen Agama.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2010. Lampiran Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJM (2010-2014)

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-21.LT.02.01 Tahun 2011, Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanl Republik Indonesia

Lubis, M, R., 2010, Kebijakan Pembangunan Agama di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Jurnal Harmoni. Volume IX, No.34 April 2010. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, hal. 21-40

Purwanto, A., 2012. Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Umat. <http://anis-purwanto.blog>. diakses tanggal 6 November 2015

Sazali, H., 2016, Penguatan Toleransi Agama dalam Komunikasi Pembangunan Agama, Studi Kasus Pemerintah Kota Bogor dan Yogyakarta. Disertasi. Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta



PERAN PENYULUH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KELOMPOK TANI MANGGA GEDONG GINCU DI KABUPATEN CIREBON

Rani Andriani Budi Kusumo, Anne Charina, Dika Supyandi
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Email : raniandriani081@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi petani Mangga Gedong Gincu di Kabupaten Cirebon adalah kualitas buah yang belum seragam serta produktivitas yang masih rendah. Hal ini salah satunya disebabkan kompetensi petani dalam berusaha tani belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh dalam agribisnis Mangga Gedong Gincu dan menyusun rekomendasi teknis untuk meningkatkan peran penyuluh dalam meningkatkan daya saing kelompok tani Mangga Gedong Gincu. Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Sukamulya Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. Desain penelitian adalah kualitatif dan data dianalisis secara deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani Sukamulya. Hasil penelitian menunjukkan peran penyuluh yang meliputi peran sebagai komunikator dirasakan sudah cukup baik sedangkan peran sebagai konsultan, motivator, dan fasilitator masih dirasakan kurang. Latar belakang pendidikan penyuluh yang beragam serta kurangnya kemampuan berkomunikasi menyebabkan kurangnya kompetensi penyuluh. Revitalisasi peran penyuluh sangat diperlukan untuk mendorong petani agar lebih mampu bersaing di era MEA. Kompetensi dan motivasi penyuluh dapat ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan dan dukungan fasilitas di lapangan.

Kata kunci: peran, penyuluh, daya saing, kelompok tani

THE ROLE OF EXTENSION WORKER IN INCREASING COMPETITIVENESS OF GEDONG GINCU FARMERS GROUP IN CIREBON DISTRICT

ABSTRACT

The problems which is faced by Gedong Gincu farmers in Cirebon is the quality of fruit that has not been same and its low productivity. This is partly due to the competence of farmers in farming is not maximized. The objectives of the research were to analyze the role of extension in Gedong Gincu agribusiness and prepare technical recommendations to improve the role of extension in improving the competitiveness of farmers' groups. The study was conducted in the Sukamulya Farmers Group, Cirebon District. The study design was qualitative and the data were analyzed descriptively. Respondents in this study were all members of Sukamulya farmer groups. The results showed the role of extension worker that includes the role as communicator was good enough whereas the role as a consultant, motivator, and facilitator were still lacking. The educational background of extension worker and lack the ability to communicate led to a lack of extension worker performance. Revitalizing the role of extension worker is needed to



encourage farmers to better compete in the MEA. Competence and motivation of extension worker can be improved with training and provide facilities.

Key words : role, extension worker, competitiveness, farmers group

PENDAHULUAN

Mangga merupakan salah satu komoditas unggulan komersial Indonesia. Data Direktorat Jenderal Hortikultura menunjukkan selama kurun waktu Tahun 2010-2014, produksi manga terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014, produksi mangga nasional adalah sebesar 2,464 juta ton⁴. Pada Tahun 2015, volume mangga yang masuk ke pasar ekspor adalah 1,515 juta ton, dengan jenis mangga yang diekspor sebagian besar adalah Gedong Gincu dan Arumanis.

Sentra produksi mangga di Indonesia di antaranya adalah Provisni Jawa Barat, dengan sentra produksi di Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Di Kabupaten Cirebon salah satu jenis manga yang banyak diusahakan adalah mangga gedong gincu (*Mangifere indica* var.Gedong). Mangga gedong gincu memiliki keunikan dalam hal rasa, bentuk dan aroma sehingga banyak sekali konsumen yang menyukai mangga gedong gincu.

Saat ini kondisi yang dihadapi petani mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon tidak mudah, permasalahan utama pada agribisnis mangga gedong gincu saat ini justru adalah kualitas produk yang belum seragam serta produktifitas hasil yang masih rendah. Salah satu akar penyebab dari persoalan ini adalah masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas dari petani itu sendiri dalam mengelola usahatani mangga gedong gincu, sehingga berimbas pada hasil yang diperoleh (Deliana, 2012). Direktorat Jenderal Hortikultura (2011) juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa permasalahan dalam pengembangan tanaman hortikultura, termasuk dalam hal ini mangga, antara lain budidaya yang masih konvensional, produktivitas dan mutu buah yang rendah, penanganan pasca panen yang kurang baik, skala usaha yang kecil dan berpencar, kelembagaan yang belum mapan, aksesibilitas yang kurang baik, kurangnya dukungan infrastruktur, serta keterbatasan modal petani.

⁴ Diakses melalui situs https://aplikasi.pertanian.go.id/bdsp/hasil_kom.asp, tanggal 5 September 2016



Di era pasar bebas saat ini, petani dituntut tidak hanya berorientasi pada kuantitas produksi tetapi juga kualitas produk yang dihasilkannya. Berbagai persyaratan mutu harus dipenuhi oleh petani mangga, tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar ekspor tetapi juga untuk memenuhi permintaan dalam negeri agar buah mangga produksi lokal mampu menghadapi persaingan dengan buah mangga dari negara lain. Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen mangga terbesar di dunia namun nilai ekspor mangga Indonesia masih rendah (Purnama IN, dkk, 2014). Kualitas mangga yang baik dan seragam, serta kontinuitas pasokan menjadi kendala yang dihadapi Indonesia untuk memasuki pasar ekspor. Negara importir, khususnya dari Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat, menginginkan jaminan kualitas, keamanan produk (bebas lalat buah dan residu pestisida), serta kontinuitas pasokan (Miyauchi, Y & Perry, C 1999).

Perbaikan teknologi budidaya dan pasca panen mutlak diperlukan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan kualitas mangga gedong gincu. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung usahatani mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon, termasuk pada upaya penyebaran pengetahuan dan teknologi kepada petani melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluh sebagai ujung tombak kegiatan penyuluhan berperan mendorong dan memfasilitasi petani dalam kegiatan belajar.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan dari kajian ini adalah untuk Mengetahui peran penyuluh dalam meningkatkan daya saing petani mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul 'Daya Saing Kelompok Tani Mangga Gedong Gincu Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas. Penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi, seperti BPS, data Kementrian



Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan hasil diskusi kelompok terarah dengan informan serta observasi partisipatif di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan pengurus kelompok tani Sukamulya, sedangkan yang menjadi responden anggota kelompok tani Sukamulya yang berjumlah 30 orang.

Analisis Data

Analisis peran penyuluh dalam upaya peningkatan daya saing petani untuk menghadapi pasar bebas akan dilakukan secara dekriptif dengan menganalisa jawaban informan terhadap peran penyuluh berdasarkan kategori : sangat rendah, rendah, sangat tinggi, dan tinggi. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kesiapan Kelompok Tani Sukamulya Menghadapi Perdagangan Bebas

Produktivitas mangga gedong gincu di kelompok tani Sukamulya tergolong tinggi, namun sayangnya kurang didukung oleh kualitas yang baik. Sebagian besar petani telah mengusahakan mangga gedong gincu lebih dari 10 tahun, yang artinya pengalaman petani dalam berusaha tani cukup tinggi. Namun kemampuan petani dari hal budidaya tanaman cukup beragam. Berdasarkan hasil analisis, ternyata hal tersebut berhubungan dengan umur, dan skala usaha petani. Hasil penelitian Pasaribu (2015) juga menunjukkan bahwa umur petani berhubungan dengan kemampuan fisik petani untuk merawat tanaman mangga. Hanya sebagian kecil anggota kelompok tani Sukamulya yang membudidayakan mangga sesuai dengan SOP, akibatnya proporsi produk BS (produk yang tidak masuk ke pasar) yang masih cukup besar. Keseragaman produk mangga yang dihasilkan petani juga masih kurang terutama dalam sisi ukuran dan warna, padahal untuk dapat menembus pasar ekspor, keseragaman produk terutama dalam sisi kualitas dan kuantitas menjadi salah satu syarat utama (Dirjen Hortikultura, 2006).



Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan petani tentang perdagangan bebas cukup beragam. Baru sebagian kecil petani yang memahami tentang perdagangan bebas. Informasi mengenai perdagangan bebas dan MEA sering disampaikan pada kegiatan pelatihan atau pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat ataupun Kabupaten Cirebon. Petani yang mendapatkan pelatihan ataupun mengikuti kegiatan pameran hanyalah beberapa petani yang kebetulan memegang jabatan sebagai ketua dan beberapa pengurus kelompok tani, dan sayangnya informasi yang didapat belum disebarkan seluruhnya kepada anggota kelompok. Pada akhirnya petani menjadi kurang memperhatikan kualitas mangga yang mereka hasilkan, petani beranggapan kualitas buah tidak mempengaruhi pendapatan mereka karena sebagian besar petani menjual mangga gedong gincu dengan sistem tebasan.

Peran Penyuluh Untuk Meningkatkan Daya Saing Mangga Gedong Gincu

Menurut Badan Pengembangan SDM Pertanian (2010), peran penyuluh pertanian adalah sebagai inisiator, fasilitator, motivator, penghubung, guru, organisator dan dinamisator, penganalisa dan agen perubahan. Berdasarkan peran tersebut, Azhari (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat empat peran utama penyuluh pertanian, yaitu sebagai komunikator, konsultan, motivator dan fasilitator. Terkait dengan daya saing petani mangga, peran penyuluh adalah mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas buah mangga gedong gincu yang mereka hasilkan sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis di pasar. Pada Tabel 1 berikut dapat dianalisis pendapat anggota kelompok tani Sukamulya terhadap peran penyuluh.

Tabel 1. Sebaran Pendapat Responden Terhadap Peran Penyuluh Pertanian

No	Peran Penyuluh	Kategori	f (orang)	%
1	Komunikator	Sangat rendah	-	-
		Rendah	2	6.67
		Tinggi	23	76.67
		Sangat Tinggi	5	16.67
2	Konsultan	Sangat rendah	-	-
		Rendah	19	63.33
		Tinggi	11	36.67
		Sangat Tinggi	-	-
3	Motivator	Sangat rendah	2	6.67



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Peran Penyuluh	Kategori	f (orang)	%
4	Fasilitator	Rendah	20	66.67
		Tinggi	8	26.67
		Sangat Tinggi	-	-
		Sangat rendah	2	6.67
		Rendah	16	53.33
		Tinggi	12	40.00
		Sangat Tinggi	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa peran penyuluh dinilai tinggi ketika penyuluh berperan sebagai komunikator; sedangkan peran penyuluh sebagai konsultan, motivator dan fasilitator dinilai kurang oleh sebagian besar responden.

Sebagai seorang komunikator, penyuluh berperan untuk menyampaikan informasi kepada petani dengan harapan terjadi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan keterampilan petani dalam berusahatani mangga gedong gincu. Menurut sebagian besar responden, mereka cukup sering mendapatkan informasi seputar budidaya mangga dari penyuluh dan berbagai macam kegiatan. Menurut informan, anggota Kelompok Tani Sukamulya sebagian besar pernah mendapatkan pelatihan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Cirebon maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan produksi mangga gedong gincu. Pelatihan tersebut antara lain tentang teknik budidaya, SLSOP, SLGAP, SLPHT, teknik pasca panen dan penanggulangan hama penyakit.

Peran penyuluh sebagai konsultan adalah memberikan bimbingan pertimbangan dan masukan kepada petani (Azhari, 2013) dengan mengajak petani menganalisa permasalahan yang mereka hadapi dan membantu petani memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan pendapat lebih dari separuh responden, mereka lebih sering berkonsultasi dan berdiskusi dengan ketua kelompok tani ataupun sesama petani ketimbang berkonsultasi dengan penyuluh. Sekitar 36,67% informan sering berkonsultasi dengan penyuluh dan seputar budidaya tanaman mangga (Tabel 1), mereka yang aktif adalah ketua dan sebagian pengurus kelompok tani. Hasil penelitian Pasaribu (2015) juga menunjukkan tingkat intensitas ketua dan pengurus kelompok tani dalam



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



mengakses berbagai sumber informasi lebih baik dibandingkan dengan anggota. Selain sering berkonsultasi dengan penyuluh, ketua dan pengurus kelompok tani juga sering mendatangi pihak eksportir, kios saprotan ataupun balai penelitian tanaman buah untuk berdiskusi seputar usahatani mangga.

Penyuluh sebagai motivator harus dapat memberikan motivasi kepada petani untuk mau dan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Pada kasus di kelompok tani Sukamulya, meskipun sebagian besar petani merasa cukup menerima informasi seputar budidaya mangga, namun baru sebagian petani yang mempraktekkan SOP tersebut dengan benar. Sebagian petani hanya memanfaatkan informasi tersebut sebagai tambahan pengetahuan saja dan tidak mempraktekannya dengan berbagai macam alasan. Informasi yang paling banyak dipraktekkan adalah seputar pemupukan tanaman dan pengendalian hama penyakit tanaman, sedangkan informasi mengenai penjarangan dan pembungkusan buah baru dipraktekkan oleh sebagian kecil responden. Mosher (1987) mengatakan bahwa terdapat kemungkinan suatu teknologi baru tidak segera diterapkan bahkan ditolak oleh petani. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petani membutuhkan dorongan dan arahan dari penyuluh untuk menerapkan SOP budidaya mangga dengan benar.

Menurut Badan Pengembangan SDM Pertanian (2010), sebagai fasilitator penyuluh idealnya dapat memberikan jalan keluar baik dalam proses penyuluhan ataupun fasilitas bagi petani dalam memajukan usahatani dalam hal kemitraan usaha, akses ke pasar, lembaga keuangan dan sebagainya. Menurut sebagian besar responden, mereka belum dapat merasakan peran penyuluh sebagai fasilitator. Petani berharap penyuluh lebih dapat membantu mereka untuk memecahkan berbagai permasalahan seputar usahatani mangga gedong gincu. Petani mengharapakan rekomendasi pupuk yang dapat meningkatkan produksi buah dengan harga murah dan mudah diperoleh karena masalah yang sering dihadapi petani saat ini adalah kesulitan memperoleh pupuk dan walaupun ada harga di kios dinilai terlalu mahal.



PENUTUP

Peran penyuluh masih dirasakan kurang optimal oleh petani. Peran penyuluh dapat dioptimalkan dengan memberikan pelatihan kepada penyuluh, karena masih terdapat keberagaman dalam kemampuan penyuluh di lapangan. Intensitas kegiatan pendampingan kepada petani juga perlu ditingkatkan agar petani menjadi lebih terdorong dan memahami pentingnya meningkatkan kualitas produk yang mereka hasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Rafnel. (2013). *Pengaruh Karakteristik Individu dan Peran Penyuluh terhadap Peningkatan Diversifikasi Pangan Rumah Tangga*. Tesis. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. (2010). Available at : cybex.deptan.go.id
- Deliana, Y. (2012). *Do Producer and Consumer Care about Certification label on Organic Vegetable*. Proceeding Regional Symposium on Marketing and Finance of The Organic Supply Chain- SEOUL 2012, FAO- APRACA- AFMA-IFOAM, 23-26 September .
- Deliana,Y. (2013). *Implikasi Label Asal Daerah (Origin Labelling) untuk Pemasaran Mangga Gedong Gincu*. laporan Akhir. PUPT. Bandung. Universitas Padjadjaran.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2006. *Vademekum Mangga*. Jakarta : Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
- Miyauchi, Y & Perry, C. (1999). *Marketing fresh fruit to Japanese consumers: exploring issues for Australian exporters*. European J. Marketing, vol. 33, no. 1/2, pp. 196-205.
- Mosher AT. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta : Yasaguna.
- Pasaribu, Junika Megawaty. (2015). *Pemanfaatan Informasi Teknologi oleh Petani Mangga*. Tesis. Bogor : Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Purnama, IN, Sarma, M & Najib M. (2014). *Strategi Peningkatan Pemasaran Mangga di Pasar Internasional (The Enhancement Strategies for Indonesian Mango Marketing in International Market)*. Jurnal Hortikultura. 24(1):85-93, 2014
- Puspadi, Ketut. (2003). *Kualitas SDM Penyuluh Pertanian dan Pertanian Masa Depan di Indonesia: Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

PROFIL SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rahima Kaliky

Penyuluh Pertanian Madya

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

Jl. Stadion Maguwoharjo No.22 Sleman, D.I. Yogyakarta

rahimanonkaliky@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan profil sistem penyuluhan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kelembagaan, SDM, pendekatan, fasilitas dan pembiayaan penyuluhan pertanian, serta jabatan dan alih jenjang fungsional penyuluh Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara tidak terstruktur dengan pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada bulan Agustus 2016. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dan data sekunder yang diolah sesuai kebutuhan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkan Sistem penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai regulasi mengenai penyuluhan pertanian yang berlaku, kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Sleman pada tingkat kabupaten adalah Bidang bereselon III, dan di tingkat kecamatan berbentuk BP3K. SDM penyuluhan di Kabupaten Sleman cukup memadai untuk mengisi ruang satu desa satu penyuluh, pendekatan penyuluhan di Kabupaten Sleman mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan pendekatan polivalen, fasilitas dan pembiayaan penyuluhan pertanian yang disediakan Pemda bagi para penyuluh pertanian secara umum sangat baik. Pelaksanaan promosi jabatan fungsional penyuluh dari penyuluh terampil ke penyuluh ahli dilakukan dengan mekanisme yang sangat baik dan terukur.

Kata kunci: kelembagaan,SDM,pendekatan, pembiayaan,penyuluhan, pertanian.

PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran yang aktif dan dinamis antara komunikator (penyuluh, peneliti, petani maju, pengusaha,dll) dengan komunikan (petani dan pelaku usaha pertanian) dan bertujuan untuk mencerdaskan petani dan pelaku usaha agar mereka dapat dengan sadar mengubah pola pikir, sikap dan perilaku dalam bertani dan berusaha sehingga memperoleh manfaat seperti yang diharapkan yakni pendapatan/keuntungan yang optimal dan pencapaian keluarga yang sehat, sejahtera, dan terdidik (Kaliky, 2013). Lebih lanjut Kaliky (2013) mengatakan



bahwa tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan informasi dan pilihan alternatif dalam pengambilan keputusan dan membantu membangun dinamika petani hingga terbangun sikap positif terhadap inovasi, baik dalam hal aspek kognitif (kesadaran/pemikiran), afektif (perasaan/kecenderungan bersikap) maupun konatif (kecenderungan berperilaku).

Dengan adanya desentralisasi penyuluhan pertanian seiring dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sesuai UU No. 33 Tahun 2004, terasa penyuluhan pertanian di sebagian besar daerah di Indonesia berjalan di tempat (stagnasi) dan diibaratkan seperti “mati suri” (Kaliky, 2013). Kondisi tersebut sangat terasa terutama pada daerah-daerah yang Pemda dan politisi lokalnya kurang *care* dan memandang penyuluhan pertanian kurang penting dan dipersepsi sebagai aktivitas yang kurang membawa dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Mawardi, 2004; Nugroho, 2014; Subejo, 2006; BPTP Sulawesi Selatan 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan tersebut telah gagal paham terhadap tujuan penyuluhan pertanian sebagai suatu proses pendidikan non formal dalam membangun *human capital* masyarakat pertanian di pedesaan.

Gambaran penyuluhan pertanian yang diibaratkan seperti “mati suri” tersebut, tidak terjadi di Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki perhatian cukup besar pada pembangunan pertanian dan memandang penyuluhan pertanian sebagai motor bagi suksesnya pembangunan pertanian di wilayahnya. Oleh karenanya, penyuluhan pertanian di kabupaten ini cukup dinamis dan berlangsung dengan sangat baik. Berkembangnya penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman sangat didukung dengan pembiayaan penyuluhan pertanian yang memadai dan penataan kelembagaan penyuluhan yang sangat baik. Pemda Sleman tidak hanya mengandalkan pembiayaan penyuluhan pertanian pada APBN semata melainkan pembiayaan penyuluhan pertanian juga didanai melalui APBD. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan penyuluhan pertanian, Pemda Sleman telah melakukan reformasi kelembagaan penyuluhan pada level Kecamatan dengan diadakannya Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagai Unit Pelaksana



Teknis Daerah (UPTD) bereselon IV. Hal ini menunjukkan desentralisasi pengelolaan penyuluhan pertanian terlaksana dengan sangat baik di wilayah ini.

Implementasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman tersebut secara teoritis telah diungkapkan oleh Rivera (2001) yang dikutip Kaliky (2013) bahwa desentralisasi penyuluhan pertanian didominasi oleh tiga kebijakan utama, yaitu (a) desentralisasi beban biaya penyuluhan melalui *fiscal sistem redesign* sehingga pemerintahan lokal ikut serta membiayai penyuluhan pertanian; (b) desentralisasi penyuluhan melalui *structural reform*, dengan tujuan meningkatkan *institutional responsiveness* dan *accountability* di tingkat lokal; (c) desentralisasi pengelolaan penyuluhan melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab terhadap program penyuluhan pertanian.

Bagaimanakah kebijakan pembiayaan penyuluhan, reformasi struktural dan pengelolaan penyuluhan di Kabupaten Sleman? Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan suatu kajian ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan profil sistem penyuluhan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi kelembagaan, SDM, pendekatan, fasilitas dan pembiayaan penyuluhan pertanian, serta jabatan dan alih jenjang fungsional penyuluh Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara tidak terstruktur dengan para pejabat struktural dan fungsional di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman pada bulan Agustus 2016. Data yang digunakan adalah data hasil wawancara dan data sekunder yang diolah sesuai kebutuhan penelitian yang disajikan dalam tabel dan grafik dan dideskripsikan secara jelas.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 tahun 2009 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas tersebut menyelenggarakan beberapa fungsi, salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan. Kelembagaan yang menangani penyuluhan dalam Dinas tersebut di Kabupaten Sleman berbentuk Bidang setingkat eselon III dan menangani penyuluhan dan ketahanan pangan, dan didalamnya terdapat Seksi penyelenggaraan penyuluhan setingkat eselon IV.

Guna kelancaran pelaksanaan fungsi tersebut Bupati Sleman menerbitkan Peraturan Nomor 60 tahun 2009 tentang pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K). BP3K merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UPT Dinas). BP3K yang dibentuk sebanyak 8 unit yaitu BP3K wilayah I –VIII. BP3K merupakan UPT Dinas dengan eselon IV.

BP3K Wilayah I meliputi wilayah Kecamatan Moyudan dan Minggir; wilayah II meliputi Kecamatan Godean dan Gamping, wilayah III meliputi Kecamatan Seyegan, Mlati, dan Tempel; wilayah IV meliputi Kecamatan Sleman dan Ngaglik; wilayah V meliputi Kecamatan Pakem dan Turi; wilayah VI meliputi Kecamatan Ngemplak dan Cangkringan; wilayah VII meliputi Kecamatan Berbah dan Depok; dan wilayah VIII meliputi Kecamatan Prambanan dan Kalasan. Dalam melaksanakan tugasnya, BP3K melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di level mikro.

SDM Penyuluhan

Satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian Kabupaten Sleman sebelum tahun 2002 berada pada dinas sub sektor masing masing yaitu Dinas pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Da;am



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

rangka meningkatkan efisiensi dan kinerja dinas sektoral maka pada tahun 2002 Pemda Kabupaten Sleman melakukan penggabungan (*merger*) lima dinas tersebut menjadi satu dinas yaitu Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Dengan bergabungnya lima dinas menjadi satu dinas tersebut maka secara otomatis satmingkal penyuluh pertanian berada di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Jumlah penyuluh saat itu mencapai kurang lebih 160 orang.

Untuk meningkatkan peranan penyuluhan dalam menunjang keberhasilan program-program pertanian di Kabupaten Sleman, maka Dinas tersebut melakukan evaluasi terhadap para pejabat fungsional penyuluh pertanian dengan melakukan *fit and propert test*. Pelaksana tes tersebut oleh tim independen dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Berdasar hasil tes tersebut sebanyak 12 orang penyuluh dinyatakan terdegradasi.

Sesuai data nominatif penyuluh pertanian PNS Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2015 Jumlah penyuluh PNS Kabupaten Sleman pada tahun 2016 mencapai 165 orang dan tersebar di UPTD BP3K wilayah I-VIII seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Nominatif penyuluh pertanian di Kabupaten Sleman per UPTD

N o	UPTD BP3K Wil	Penyuluh PNS /Sub sektor												THL- TBPP	Total
		TPH		Peternaka n		Perkebun an		Perikana n		Kehutana n		Jumlah			
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	A	T		
1	I	5	1	2		1	0	2		1	0	1	11	6	18
2	II	6	0	2		1	0	2		1	0	0	12	7	19
3	III	8	0	4	1	2	0	4		2	0	1	20	8	29
4	IV	5	0	2		2	0	2		2	0	0	13	6	19
5	V	4	0	2	1	2	0	2		3	0	1	13	5	19
6	VI	5	0	3		3	0	2		4	0	0	17	8	25
7	VII	3	1	2		1	0	3		1	0	1	10	6	17
8	VIII	5		2		1	0	2		2	1	1	12	7	19
	Jumla h	41	2	19	2	13	0	19	0	16	1	5	107	53	165

Keterangan : T = penyuluh terampil; A= penyuluh ahli

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kab. Sleman, 2015



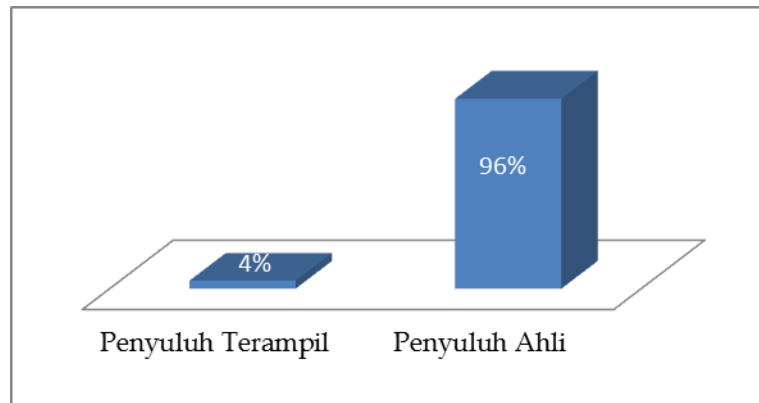
SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 1 memperlihatkan, jumlah penyuluh PNS Kabupaten Sleman sebanyak 112 orang, 4 orang diantaranya adalah penyuluh pertanian ahli dan 107 orang penyuluh pertanian terampil dengan proporsi 4%:96%



Gambar 1. Proporsi Penyuluh pertanian PNS jenjang penyuluh ahli dan penyuluh terampil di Kabupaten Sleman

Berdasar data pada Tabel 1 dan Gambar 1 dapat dijelaskan dua hal penting. *Pertama*, secara administratif wilayah Kabupaten Sleman memiliki 17 kecamatan dan 86 desa, bila mengikuti ditentukan 1 penyuluh untuk 1 desa, maka dapat dikatakan jumlah penyuluh di Kabupaten Sleman telah memadai. Bila 112 penyuluh yang ada memiliki WKPP maka 1 WKPP dapat dapat diisi 1-2 penyuluh.

Kedua, dalam pengaturan SDM penyuluh berdasar jabatan fungsional Pemda Kabupaten Sleman telah melakukannya dengan sangat baik dan sesuai regulasi yang ada. Berdasar kualifikasi professional jabatan penyuluh pertanian sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 tahun 2009, dijabarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh ahli mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis dibidang penyuluhan pertanian; sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya penyuluh pertanian terampil mensyaratkan pengetahuan teknis dibidang penyuluhan pertanian.

Berdasar syarat penguasaan pengetahuan antara penyuluh ahli dan terampil, maka dalam implementasi pelaksanaan penyuluhan, proporsi penyuluh pertanian terampil seharusnya kuantitasnya lebih tinggi dibanding



penyuluh ahli. Mengingat, penyuluh terampil yang secara profesional mempunyai kualifikasi teknis yang dominan, dan pengetahuan teknislah yang disuluhkan dan dibutuhkan oleh petani dibanding pengetahuan metodologis dan analisis yang dikuasai penyuluh ahli. Berdasar kualifikasi professional jabatan penyuluh pertanian sesuai kedua Peraturan Menteri tersebut, maka proporsi penyuluh terampil dan ahli di Kabupaten Sleman sangat ideal.

Pendekatan Penyuluhan

Pada era sebelum tahun 2016, penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman dilakukan dengan pendekatan monovalensi yang didasarkan pada potensi wilayah dan berdasar sub sektor. Dengan pendekatan tersebut maka wilayah kerja penyuluh per sub sektor di Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai berikut: (1) wilayah kerja penyuluh sub sektor tanaman pangan di tingkat desa, dan (2) wilayah kerja penyuluh sub sektor peternakan, perikanan, dan perkebunan, di tingkat kecamatan (dasar pertimbangannya adalah tidak semua desa memiliki potensi sub sektor tersebut).

Dengan adanya program upaya khusus peningkatan produksi padi jagung, kedele (Upsus Pajale) Kementerian Pertanian tahun 2016, Pemda Kabupaten Sleman sangat *concern* untuk mensukseskan program tersebut, dan menyadari peranan penyuluh pertanian sangat penting, sehingga dibutuhkan penyuluh pertanian harus berada di setiap desa. Berdasar hal tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Sleman langsung meresponnya dengan menetapkan kebijakan perubahan pendekatan penyuluhan dari monovalen yang didasarkan pada potensi wilayah dan sub sektor menjadi polivalen. Sehingga semua penyuluh baik penyuluh PNS maupun THL-TBPP harus memiliki wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) di desa.

Fasilitas dan Pembiayaan Penyuluhan

Pemda Kabupaten Sleman menyediakan fasilitas bagi penyuluh pertanian meliputi kendaraan bermotor roda dua dan biaya operasional penyuluhan. Semua penyuluh pertanian Kabupaten Sleman memperoleh fasilitas kendaraan bermotor roda dua. Menurut Kasubag Kepegawaian Dinas Pertanian,



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Perikanan, dan Kabupaten Sleman, bahwa kendaraan bermotor bagi penyuluh pertanian selalu diganti baru setiap tiga tahun sekali.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman dibiayai dengan pembiayaan APBN dan APBD seperti tertera dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sumber Pembiayaan dan Kegiatan Penyuluhan Kabupaten Sleman tahun 2016

No.	Sumber Pembiayaan dan Uraian Kegiatan Penyuluhan	Biaya (Rp)
A.	APBN	
1.	Biaya Operasional Penyuluhan (BOP)	
2.		
B.	APBD	
1.	Penyusunan Programa	128.531.000
2.	Pendampingan Penyusunan RDKK	85.708.750
3.	Diseminasi Peningkatan sumberdaya penyuluhan	84.275.000
4.	Penyuluhan Penerapan teknologi pertanian tepat guna	105.000.000

Sumber: Dinas Pertanian perikanan, dan kehutanan Kabupaten Sleman, 2016.

Anggaran belanja penyuluhan dari APBN dan APBD tersebut dalam Tabel 2 digunakan diantaranya untuk biaya operasional penyuluhan penyuluh pertanian. Perincian Biaya operasional penyuluhan bagi masing-masing penyuluh Pertanian di Kabupaten Sleman seperti tertera dalam Tabel 3.

Tabel 3. Biaya operasional penyuluhan penyuluh pertanian Kabupaten Sleman tahun 2016

No.	Uraian Biaya yang bagi penyuluh	Sumber dan Jumlah Biaya (Rp/orang)		Total
		APBN	APBD	
1	BOP/bulan	320.000		
2	Biaya transportasi (BBM)/bulan		350.000	
3	Uang perjalanan tetap/bulan		100.000	
4	Biaya kesejahteraan pegawai/bulan			
	- Penyuluh terampil		1.500.000	
	- Penyuluh ahli		1.800.000	
Jumlah	Penyuluh terampil	320.000	1.950.000	2.270.000
	Penyuluh ahli	320.000	2.250.000	2.570.000

Sumber: Wawancara dengan Kasi Kelembagaan Penyuluhan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman (18 Agustus, 2016)



Tabel 3 memperlihatkan, jumlah biaya operasional penyuluhan bagi penyuluh ahli per bulan mencapai Rp 2.570.000,- dan penyuluh terampil mencapai Rp.2.270.000. selain biaya tersebut Pemda juga menyediakan biaya eksploitasi kendaraan roda dua bagi penyuluh pertanian sebesar Rp525.000/tahun. Disamping biaya operasional bulanan dan biaya eksploitasi kendaraan, Pemda Kabupaten Sleman juga menyediakan Uang Kerja Bimbingan (UKB) untuk biaya kaji terap teknologi bagi penyuluh ahli sebesar Rp1.500.000/tahun dan penyuluh bagi penyuluh terampil Rp1.375.000/tahun. Biaya UKB tersebut bersifat kompetitif. Pengajuan dana tersebut sesuai proposal yang diajukan oleh penyuluh.

Jabatan dan Alih Jenjang Fungsional Penyuluh

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen-PAN) Nomor 02 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluhan, bahwa jabatan fungsional penyuluh pertanian termasuk dalam rumpun ilmu hayati; penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah, dan merupakan jabatan karier, dimana Penyuluh pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat berwenang.

Jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil dari terendah hingga tertinggi meliputi penyuluh pertanian: Pelaksana Pemula (gol IIa), Pelaksana (gol IIb-IIId), Pelaksana Lanjutan (IIIa-IIIb), dan Penyelia (IIIc-IIId); sedangkan jenjang jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli dari terendah hingga tertinggi meliputi penyuluh pertanian: Pertama (gol IIIa-IIIb), Muda (IIIc-IIId), Madya (IVa-IVc), dan Utama (IVd-IVe).

Pemda Kabupaten Sleman sangat selektif dalam melakukan promosi jabatan fungsional penyuluh pertanian dari jenjang terampil ke jenjang ahli. Pengembangan karier pejabat penyuluh pertanian dengan jenjang penyuluh terampil dapat dialihkan menjadi jenjang penyuluh ahli, namun, pelaksanaan pengalihan tersebut dilakukan berdasar formasi kebutuhan daerah dan



dilaksanakan dengan mekanisme dan persyaratan tertentu. Persyaratan alih jenjang jabatan fungsional penyuluh terampil ke penyuluh ahli adalah (1) memiliki sertifikat alih jenjang, (2) Berpendidikan minimal S1/D4, (3) telah mencapai jabatan penyuluh penyelia, (4) konversi Angka kredit sebanyak 65%, (5) mengikuti tes tertulis, dan (6) melakukan presentasi tentang kinerja menyangkut hal-hal yg telah dilakukan selama menjadi penyuluh terampil, dan apa yang akan dilakukan apabila menjadi penyuluh ahli (poin 6 merupakan puncak penilaian kelayakan). Jika persyaratan tersebut terpenuhi maka seorang penyuluh terampil dengan jabatan penyuluh penyelia dinyatakan layak untuk dialihkan jenjangnya menjadi penyuluh ahli.

PENUTUP

Berdasar hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai regulasi mengenai penyuluhan pertanian yang berlaku
2. Kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Sleman pada tingkat kabupaten adalah Bidang bereselon III dan Seksi bereselon IV dan di tingkat kecamatan berbentuk UPTD BP3K bereselon IV.
3. SDM penyuluhan di Kabupaten Sleman cukup memadai untuk mengisi ruang satu desa satu penyuluh
4. Pendekatan penyuluhan di Kabupaten Sleman mulai tahun 2016 dilaksanakan dengan pendekatan polivalen.
5. Fasilitas dan pembiayaan penyuluhan pertanian yang disediakan Pemda bagi para penyuluh pertanian secara umum sangat memadai,
6. Pelaksanaan promosi jabatan fungsional penyuluh dari penyuluh terampil ke penyuluh ahli dilakukan dengan mekanisme yang sangat baik dan terukur.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. Sistem Penyuluh Pertanian di Indonesia. Buletin Nomor 6 Tahun 2012. BPTP Sulawesi Selatan
- Bupati Sleman, 2009. Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
- Kaliky.R., 2013. Kajian Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi Maluku. Disertasi. Sekolah Pascasarjana universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Mawardi, S., 2004, Persoalan Penyuluhan di Era Otonomi Daerah, SMERU Newsletter, Desember 2004, www.smeru.or.id/newslet/2004/ed12/200412field3.html. (10 April 2010).
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen-PAN) Nomor 02 tahun 2008 tentang jabatan fungsional penyuluhan.
- Menteri Pertanian, 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/Ot.140/7/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
- Novendra Cahyo Nugroho.N.C, 2014. Penyuluhan Pertanian untuk Mewujudkan Petani yang Lebih Sejahtera. http://www.kompasiana.com/novendra/penyuluhan-pertanian-untuk-mewujudkan-petani-yang-lebih-sejahtera_54f7ccb7a33311191c8b4b51 (19 september 2016)
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2009. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
- Rivera, W.M, 2001. *Agricultural and Rural Extension Worldwide: Options for Institutional Reform in the Developing Countries*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Subejo, 2016. Subejo, 2006. Penyuluhan Pertanian Indonesia di Tengah Isu desentralisasi, Privatisasi dan Demokratisasi. Jurnal Penyuluhan. IPB. Vol 2. No.2. Tahun 2006.



PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI MANGGA GEDONG GINCU DALAM MENGHADAPI MEA

Anne Charina, Rani Andriani Budi Kusumo, Dika Supyandi
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Email: anne.rose@gmail.com

ABSTRAK

Era MEA merupakan momentum yang sangat krusial bagi petani kita. Di era ini barang atau komoditas dapat bergerak bebas masuk ke wilayah kita dari negara lain, begitupun sebaliknya. Ini tentunya bisa menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi para petani, termasuk para petani mangga gedong gincu di Kab. Cirebon. Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Tani Suka Mulya dalam menghadapi pasar MEA serta mencari strategi penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah survey deskriptif, dengan responden 30 orang anggota Kelompok Tani Mangga Gedong Gincu Suka Mulya. *Soft System Methodology* digunakan untuk menganalisis masalah dan menghasilkan suatu model konseptual penguatan kelompok tani dalam menghadapi perdagangan bebas MEA. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak kendala yang dihadapi kelompok tani dalam menghadapi MEA diantaranya Tingkat motivasi petani untuk bersaing dalam MEA masih kurang, Kapasitas dan kapabilitas SDM anggota kelompok tani belum maksimal dalam menghasilkan produk dan promosi, ketersediaan TIK yang belum menunjang, jejaring internasional belum terbentuk serta sifat rasionalitas petani sendiri. Model Penguatan kelembagaan berbasis pemahaman dan pemberdayaan dalam pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan SDM merupakan sesuatu yang menjadi penting untuk memperkuat petani memasuki pasar bebas MEA. Sosialisasi MEA, Pengawasan Kualitas, Penerapan TIK dan Persiapan jejaring internasional perlu diterapkan.

Kata kunci: Kelompok Tani, Mangga Gedong Gincu, MEA

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Barang dan jasa dapat dengan mudah keluar masuk ke Negara kita begitupun sebaliknya. Jika petani kita tidak siap, hal ini yang menjadi kendala besar bagi eksistensi produk kita di luar negeri.

Hortikultura merupakan komoditas potensial yang mampu bersaing di pasar bebas. Data menunjukkan tingkat permintaan konsumen luar negeri



terhadap komoditas horti masih menduduki peringkat atas penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Dari sekian banyak horti di Indonesia, Mangga merupakan salah satu komoditas horti yang memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian kita. Berdasarkan data, Indonesia adalah negara keenam produsen mangga terbesar di dunia dengan share sekitar 3.5% pada produksi dunia dan tingkat pertumbuhan sekitar 47%. Tingkat ekspor mangga dewasa inipun mengalami peningkatan yang besar, pada tahun 2010 jumlah ekspor mangga sebesar 1.129 ton, di tahun 2014 ekspor mangga mencapai posisi 1.982 ton (BPS, 2015). Ini merupakan jumlah peningkatan yang luar biasa untuk komoditas hortikultura di Indonesia

Salah satu jenis mangga yang banyak diminati dan prospektif adalah mangga gedong gincu. Mangga gedong gincu (*Mangifera indica* var. Gedong) banyak diusahakan di Jawa Barat dengan salah satu sentra produksi Cirebon. Kelompok Tani Suka Mulya adalah salah satu kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Suka Tani, yang semenjak tahun 2012 telah menjadi pemasok tetap mangga gedong gincu ke eksportir SAE. Sampai saat ini Kelompok Tani Suka Mulya sayangnya belum dapat terjun langsung ke pasar MEA karena keterbatasan yang dimiliki, dimana salah satu permasalahan mendasar yang dimilikinya adalah dari internal kelembagaan mereka sendiri. Dengan tidak terjun langsung tapi hanya sebatas sebagai pemasok, anggota kelompok tani merasa bahwa mereka tidak mendapatkan benefit dari adanya pasar bebas ini.

Penelitian ini akan mengkaji kendala apa yang dihadapi kelompok tani Suka Mulya dalam menghadapi pasar bebas MEA serta mencari strategi penguatan kelembagaan Kelompok tani dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah strategi penguatan kelembagaan petani manga gedong gincu dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Suka Mulya, yang berlokasi di Desa Sedong Lor, Kec.Sedong, Kab.Cirebon. Pemilihan tempat penelitian tersebut



didasarkan atas pertimbangan Kelompok Tani Suka Mulya merupakan salah satu kelompok tani yang menjadi pemasok ke eksportir yang terlibat dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) .

Metode yang digunakan adalah survey deskriptif, dengan responden 30 orang anggota Kelompok Tani Mangga Gedong Gincu. *Soft System Methodology* digunakan untuk menganalisis masalah dan menghasilkan suatu model konseptual penguatan kelompok tani dalam menghadapi perdagangan bebas MEA Alasan peneliti memilih *Soft systems methodology* (SSM) sebagai rancangan analisis data merupakan sebuah pendekatan untuk memecahkan situasi masalah kompleks yang tidak terstruktur berdasarkan analisis *holistic* dan berpikir system. SSM adalah sebuah metodologi yang cocok untuk membantu suatu organisasi dalam menjelaskan tujuan mereka dan kemudian merancang sistem aktivitas manusia untuk mencapai tujuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Kelompok Tani dalam menghadapi MEA

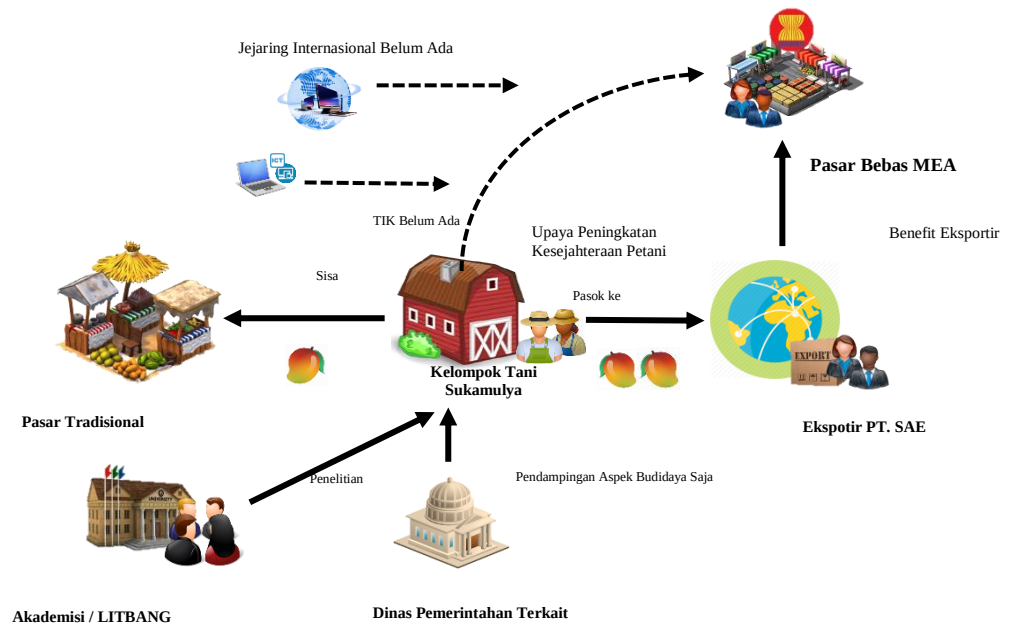
Mengacu pada SSM sebagai tools yang digunakan, maka tahapan pertama yang dikerjakan adalah mendefinisikan situasi keadaan yang muncul di Kelompok Tani Suka Tani yaitu Kinerja kelompok tani yang masih relatif lemah. Secara sosial-ekonomi dan budaya, para futurolog mengatakan bahwa menghadapi persaingan yang semakin ketat dan permasalahan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang semakin kompleks kedepan, jelas tidak dapat diselesaikan secara perorangan, tetapi perlu dengan kekuatan kelembagaan yang disertai kekuatan hukumnya. Tahapan kedua adalah tahapan *rich picture*. Berikut *rich picture* untuk kondisi di Kelompok Tani Suka Mulya.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Gambar 1. Rich Picture

Sumber: Data Olahan, 2016

Dari *rich picture* terlihat kondisi kelompok tani Suka Mulya Sebenarnya Kelompok tani Suka Mulya memiliki peluang yang kuat untuk masuk ke pasar MEA. Dari sisi kualitas dan kuantitas produk, mangga yang dihasilkan oleh mereka mampu diterima dan memenuhi standar untuk barang ekspor. Sejauh ini mereka memasok ke eksportir SAE, dan produk mereka banyak diminati oleh konsumen di luar negeri. Dari sisi bentuk, ukuran dan warna meskipun masih ada yang tidak seragam tapi secara keseluruhan dapat dikategorikan baik. Sehingga sebenarnya kans mereka untuk bisa memasok langsung ke pasar MEA terbuka lebar. Sayangnya hal tersebut tidak didukung dengan kemampuan memanfaatkan TIK untuk promosi. Penggunaan TIK seperti Website kelompok, leaflet belum dimiliki oleh Kelompok tani. Hal ini yang membuat poktan tidak mampu untuk terjun langsung ke pasar MEA.

Dari individu anggota kelompok tani sendiri mereka memiliki motivasi yang masih rendah untuk terjun ke pasar MEA, karena mereka merasa dengan adanya MEA mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Peran ketua kelompok tani sangat dominan dalam mensupport anggotanya, hanya belum bisa meningkatkan atau menggerakkan motivasi anggota untuk lebih baik lagi.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Aktifitas pendampingan yang diberikan oleh Dinas terkait mayoritas masih sebatas Pelatihan Budidaya. Pemaparan tentang Pasar Bebas pernah diberikan hanya untuk ketua kelompok tani nya saja, sehingga informasi belum menyebar ke anggotanya. Tahap berikutnya adalah analisis *Catwoe* yang menjabarkan siapa saja yang terlibat di dalam kesiapan poktan untuk menghadapi MEA

Tabel 1. Analisis Catwoe

1	<i>Customer (C)</i>	Anggota Kelompok Tani Suka Mulya, Dinas Terkait
2	<i>Actors (A)</i>	Kelompok Tani Suka Mulya
3	<i>Transformations (T)</i>	Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Suka Mulya dalam menghadapi MEA Memperbaiki keadaan didalam kelompok secara internal terlebih dahulu terutama motivasi anggota, serta perbaikan TIK untuk mempersiapkan masuk ke pasar MEA
4	<i>World View (W)</i>	Kelompok Tani Suka Mulya, Dinas Terkait
5	<i>Owners (O)</i>	Pemahaman terhadap langkah – langkah yang di lakukan dalam Penguatan Kelompok Tani
6	<i>Environment (E)</i>	

Sumber: Data Olahan, 2016

Setelah melewati tahapan analisis *Catwoe* , langkah selanjutnya adalah Model konseptual sistem yang dideskripsikan dalam definisi awal

Tabel 2. Model Konseptual

No	Aspek	Formulasi
1	<i>Efficacy</i>	Penguatan kelembagaan gapoktan secara internal untuk menghadapi MEA
2	<i>Efficiency</i>	Partisipasi, Motivasi dari setiap anggota dan pihak pemerintah, serta penggunaan TIK untuk keberhasilan poktan
3	<i>Effectiveness</i>	Keberlanjutan pembinaan dari pihak untuk meningkatkan partisipasi dan penguatan kelembagaan poktan

Sumber: Data Olahan, 2016

Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam menghadapi MEA

Perbandingan antara model dan dunia nyata dilakukan untuk mengetahui proses yang terjadi di dunia nyata dan model yang telah disusun. Berikut gambar perbandingan dunia nyata dengan model yang disusun.



SEMINAR NASIONAL

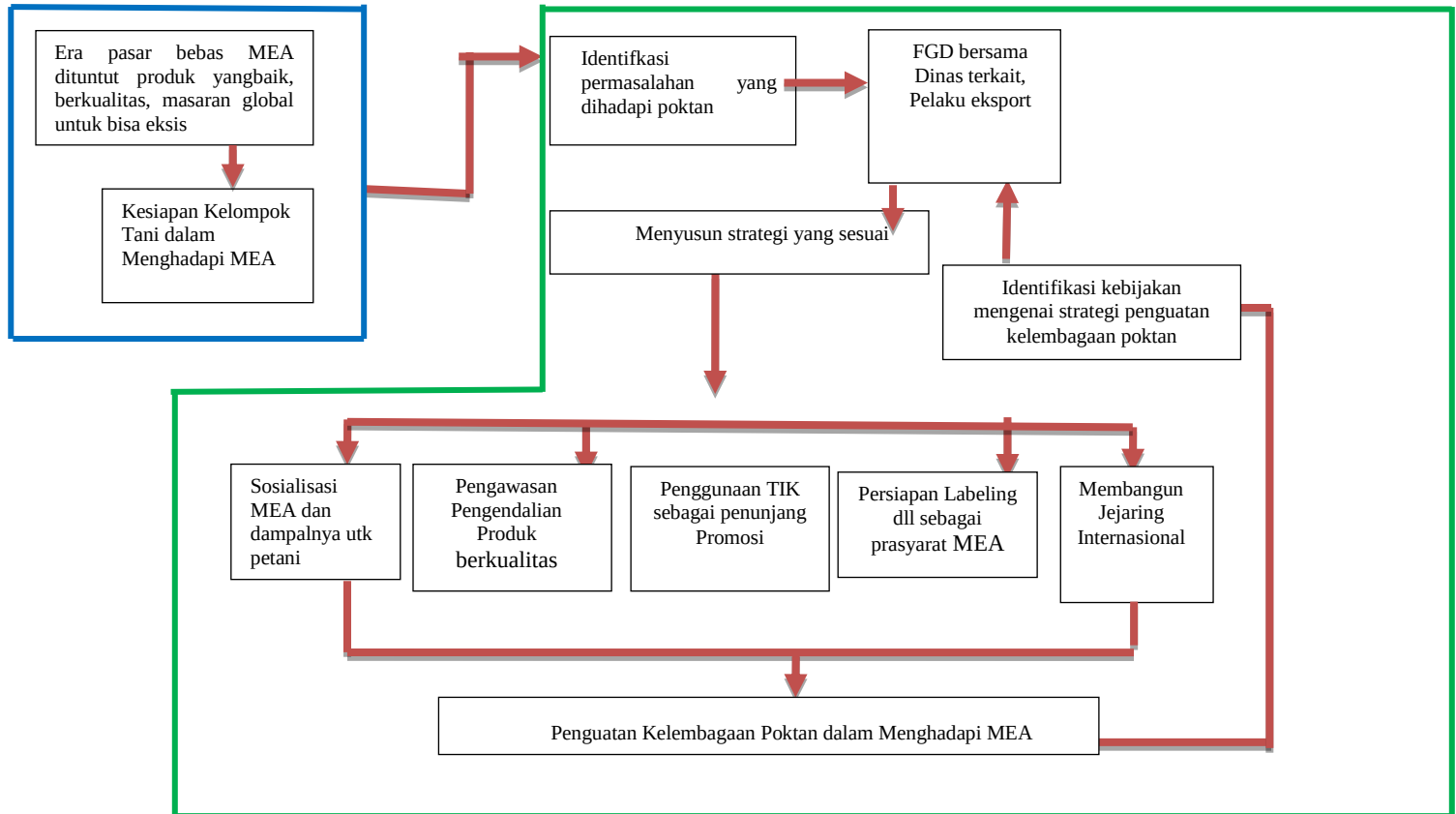
LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REAL WORLD

SYSTEM THINKING



Gambar 2. Model Konseptual Penguatan Kelembagaan Poktan dalam Menghadapi MEA

Berdasarkan model diatas maka strategi penguatan kelembagaan yang harus dilakukan adalah:

Sosialisasi MEA dan dampaknya untuk petani.

Motivasi petani rendah untuk terjun ke MEA dilandasi pemahaman mereka yang kurang tentang MEA. Untuk meningkatkan motivasi diperlukan sosialisasi pemahaman MEA serta dampaknya untuk kesejahteraan petani

Pengawasan pengendalian Produk Berkualitas

Kualitas produk merupakan salah satu factor penting untuk terjun di MEA. Pendampingan terkait produk agar sesuai strandar sngat diperlukan.

Penggunaan TIK Sebagai Penunjang Promosi

TIK yang harus segera dimiliki diantaranya *web site* kelompok tani, leaflet atau brosur.



Pemenuhan Persyaratan untuk masuk pasar MEA misal Labelling

Origin labeling perlu dipersiapkan petani untuk menembus pasar bebas, karena akan menjadi point lebih.

Membangun Jejaring pasar Internasional. Dinas terkait hendaknya memfasilitasi untuk menciptakan dan membangun jejaring kelompok dengan pelaku pasar bebas

PENUTUP

Kendala yang dihadapi kelompok tani dalam menghadapi MEA diantaranya Tingkat motivasi petani untuk bersaing dalam MEA masih kurang, Kapasitas dan kapabilitas SDM anggota kelompok tani belum maksimal dalam menghasilkan produk dan promosi, ketersediaan TIK yang belum menunjang, jejaring internasional belum terbentuk serta sifat rasionalistas petani sendiri. Model Penguatan kelembagaan berbasiskan pemahaman dan pemberdayaan dalam pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan SDM merupakan sesuatu yang menjadi penting untuk memperkuat petani memasuki pasa bebas MEA. Pemberdayaan terkait sosialisasi MEA, Pengawasan Kualitas, Penerapan TIK dan Persiapan jejaring internasional perlu diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hortikultura. 2013. *Produksi Mangga Jawa Barat*. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat. Bandung.
- Checkland, P. & Holwell, S. (1998). *Information, Systems and Information Systems – making sense of the field*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat. 2011. *“Pendahuluan Komoditas Unggulan Mangga”*. Melalui <http://diperta.jabarprov.go.id/indeks.php/subMenu/1429>, 16 Januari 2016)
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2013. *Persentase Ekspor Impor Mangga*. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya.



KAJIAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN PADA ERA MEA DI WILAYAH PENGEMBANGAN KOPI RAKYAT KECAMATAN SILO, JEMBER, JAWATIMUR

Teguh Hari Santosa dan Oktarina

Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember

Email : teguh_hs66@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung kinerja penyuluh pertanian pada era MEA dan untuk mengetahui kinerja penyuluh pertanian di wilayah pengembangan kopi rakyat di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode PRA, FGD, RRA, *indept interview* dan survei. Sampel ditentukan melalui *stratified random sampling* sebanyak 30 orang selama 3 bulan (Mei – Juli 2016). Teknik analisis data secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan penilaian atau skor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor **internal** yang mendukung kinerja penyuluh pertanian pada era MEA di wilayah pengembangan kopi rakyat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur adalah usia penyuluh dan tingkat pendidikan formal. Sebagian besar usia penyuluh kurang dari 50 tahun, usia yang masih produktif untuk mendukung kinerja. Tingkat pendidikan formal Penyuluh Pertanian sebagian besar berpendidikan S1 (SDM yang cukup baik). Faktor **eksternal** yang mendukung kinerja Penyuluh Pertanian adalah ketersediaan sarana, prasarana, informasi dan intensitas penyuluhan. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang sangat baik, misalnya tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani kopi rakyat, tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi, tersedianya informasi secara merata. Kinerja penyuluh pertanian yang harus ditingkatkan adalah mewujudkan kemitraan usaha antara petani kopi rakyat dan pengusaha kopi yang saling menguntungkan.

Kata kunci: kinerja penyuluh pertanian, internal, eksternal, kemitraan

ABSTRACT

This study aims to determine the internal and external factors that support the performance of agricultural extension in the era of the MEA and to determine the performance of agricultural extension in the development of people's coffee in the District of Silo, Jember, East Java. To achieve the objectives, the method used PRA, FGD, RRA, indept interviews and surveys. Samples determined via stratified random sampling of 30 people for 3 months (May - July 2016). Descriptive data analysis techniques and are presented in tabular form. The determination of category be based on assessment or score. The results showed that internal factors that support the performance of agricultural extension in the era of MEA in the development of people's coffee District of Silo, Jember, East Java is the age extension and level of formal education. Most extension workers aged less than 50 years of age who are still productive to support the performance. The level of



formal education Agricultural Extension mostly educated S1 (HR pretty good). External factors that support the performance of Agricultural Extension is the availability of facilities, infrastructure, information and counseling intensity. Performance in the District Agricultural Extension Silo, Jember showed excellent results, such as the drafting of programs and agricultural extension work plan in accordance with the needs of people's coffee farmers, the availability of data maps of the area for the development of specific technologies, the availability of information evenly. Performance should be improved agricultural extension is to create a partnership between farmers and businessmen coffee cupping people mutually beneficial.

Keywords: agricultural extension performance, internal, external, partnerships

PENDAHULUAN

Pengembangan kopi rakyat melalui kerjasama antara Perhutani, PT Perkebunan Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan masyarakat petani kopi merupakan upaya untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa pinggiran hutan (Santosa dan Oktarina, 2015). Masyarakat petani kopi rakyat di pinggiran hutan Silo Sanen Kabupaten Jember yang berada di Kecamatan Silo (meliputi Desa Sidomulyo, Desa Pace, Desa Karangharjo, Desa Pace, Desa Sumberjati dan Desa Mulyorejo) yang secara turun-temurun mengembangkan kopi rakyat menunjukkan hasil peningkatan pendapatan yang baik dibawah bimbingan penyuluh pertanian bidang perkebunan selama lebih dari 15 tahun.

Penyuluh pertanian bidang perkebunan di daerah sentra kopi rakyat pada era MEA di Kabupaten Jember selalu dituntut kreatif dan berpikiran maju agar kontribusinya nyata bagi peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan petani kopi di wilayah binaannya. Di sisi lain, sebagian SDM penyuluh pertanian semakin mendekati usia 50 tahun dan sarana prasarana yang dimiliki harus terus mengikuti kemajuan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung kinerja penyuluh pertanian pada era MEA dan untuk mengetahui kinerja penyuluh pertanian di wilayah pengembangan kopi rakyat di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan (Mei – Juli 2016) dengan mengambil lokasi di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sampel ditentukan melalui *stratified random sampling* sebanyak 30 orang (meliputi : 1 atasan PPL, 9 PPL, dan 20 petani kopi). Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode PRA, FGD, RRA, *indept interview* dan survei. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel.

Penentuan kategori dilakukan berdasarkan penilaian atau skor. Penentuan penilaian keberhasilan kinerja Penyuluh Pertanian berdasarkan total skor dari 9 indikator tersebut. Kategori yang diberikan dalam penelitian ini terdiri atas 3, yaitu : sangat baik, baik dan kurang baik (Nova dkk., 2011).

Penentuan kategori untuk masing-masing indikator kinerja Penyuluh

Range skor untuk menentukan kategori dari masing-masing indikator kinerja Penyuluh tersebut diperoleh dengan mempergunakan rumus sebagai berikut (Nova dkk., 2011) :

Skor tertinggi didapat dari perkalian antara nilai skor tertinggi dengan jumlah responden , yaitu $3 \times 30 = 90$, sedangkan skor terendah didapat dari perkalian antara nilai skor terendah dengan jumlah indikator, yaitu $1 \times 30 = 30$. Dengan demikian range skor yang diperoleh adalah $(90 - 30) / 3 = 20$, Maka :

- Range skor 30 - 50 , berkategori *kurang baik*
- Range skor 51 - 70, berkategori *baik*
- Range skor 71 - 90, berkategori *sangat baik*

Penentuan kategori untuk keseluruhan kinerja Penyuluh

Secara keseluruhan pengukuran kinerja Penyuluh berdasarkan dari masing-masing pemberi penilaian yaitu dari sudut pandang petani dan atasan para Penyuluh. Dalam menentukan kategori untuk keseluruhan kinerja Penyuluh dari 2 penilai tersebut pada dasarnya diperoleh melalui cara yang sama dalam menentukan kategori dari masing-masing indikator kinerja



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

penyuluh di atas, bedanya adalah dalam menentukan skor tertinggi dan terendah.

Skor tertinggi didapat dari perkalian antara nilai skor tertinggi dengan jumlah indikator dan jumlah keseluruhan responden, yaitu $3 \times 9 \times 30 = 810$, sedangkan skor terendah didapat dari perkalian antara nilai skor terendah dengan jumlah indikator dan jumlah keseluruhan responden, yaitu $1 \times 9 \times 30 = 270$. Dengan demikian range skor yang diperoleh adalah $(810 - 270) / 3 = 180$, Maka:

- i. Range skor 270 – 450 ,berkategori *kurang baik*
- ii. Range skor 451 – 630, berkategori *baik*
- iii. Range skor 631 – 810, berkategori *sangat baik*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh

Faktor internal

Faktor internal yang mendukung kinerja penyuluh pertanian pada era MEA di wilayah pengembangan kopi rakyat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Tabel 1) adalah usia penyuluh dan tingkat pendidikan formal. Sebagian besar usia penyuluh kurang dari 50 tahun, usia yang masih produktif untuk mendukung kinerja. Tingkat pendidikan formal Penyuluh Pertanian sebagian besar berpendidikan S1 (SDM yang cukup baik).

Tabel 1. Distribusi Hasil Kajian Penyuluh tentang Faktor Internal Penyuluh

No	Variabel	Range	N	Persentase (%)	Kisaran
1.	Usia (tahun)	< 30 tahun	0	0	38-53 tahun
		30-50 tahun	6	60	
		> 50 tahun	4	40	
2.	Pendidikan	≤ SPMA	4	40	SPMA dan S1
		D3	0	0	
		≥ S1	6	60	
3.	Masa kerja (tahun)	< 10 tahun	2	20	5-26 tahun
		10-15 tahun	4	40	
		> 15 tahun	4	40	
4.	Jumlah tanggungan (orang)	< 2 tahun	3	30	1-5 orang
		2-4 tahun	6	60	
		>4 tahun	1	10	

Sumber : Nova dkk. (2011) dan data primer (2016)



Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mendukung kinerja Penyuluh Pertanian dengan kategori tinggi adalah ketersediaan sarana, prasarana, informasi dan intensitas penyuluhan (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi Hasil Kajian Penyuluh tentang Faktor Eksternal Penyuluh

No	Variabel	Kategori	N	Persentase (%)
1.	Ketersediaan sarana, prasarana dan informasi	Tidak tersedia	0	0
		Kurang tersedia	3	30
		Cukup tersedia	7	70
2.	Kebijakan pemerintah	Kurang	2	20
		Cukup	6	60
		Mendukung	2	20
3.	Intensitas penyuluhan	Rendah	2	20
		Sedang	2	20
		Tinggi	6	60

Sumber : Nova dkk. (2011) dan data primer (2016)

Kinerja Penyuluhan Pertanian

Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang **sangat baik**, misalnya tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani kopi rakyat, tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan perwilayahan komoditas unggulan, terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani kopi. Kinerja penyuluh pertanian yang harus ditingkatkan adalah mewujudkan kemitraan usaha antara petani kopi rakyat dan pengusaha kopi yang saling menguntungkan (Tabel 3).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 3. Hasil Penilaian terhadap 9 Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian

Indikator	Skor yang diperoleh	Kategori
1. Tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani kopi.	81	Sangat baik
2. Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing.	79	Sangat baik
3. Tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan perwilayahan komoditas unggulan.	81	Sangat baik
4. Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani kopi.	87	Sangat baik
5. Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani kopi, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal (koperasi dan usaha formal lainnya).	74	Baik
6. Terwujudnya kemitraan usaha antara petani kopi dengan pengusaha yang saling menguntungkan.	38	Kurang Baik
7. Terwujudnya akses petani kopi ke lembaga keuangan, informasi sarana produksi pertanian dan pemasaran.	67	Baik
8. Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja.	76	Baik
9. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di masing-masing wilayah kerja	87	Baik
Total	670	Sangat baik

Sumber : Nova dkk. (2011) dan data primer (2016)

PENUTUP

Hasil penelitian terhadap kinerja para Penyuluh Pertanian pada Era MEA di wilayah pengembangan kopi rakyat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor internal yang mendukung kinerja penyuluh pertanian pada era MEA di wilayah pengembangan kopi rakyat Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur adalah usia penyuluh dan tingkat pendidikan formal. Sebagian besar usia penyuluh kurang dari 50 tahun, usia yang masih produktif untuk mendukung kinerja. Tingkat pendidikan formal



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Penyuluh Pertanian sebagian besar berpendidikan S1 (SDM yang cukup baik). Faktor eksternal yang mendukung kinerja Penyuluh Pertanian adalah ketersediaan sarana, prasarana, informasi dan intensitas penyuluhan.

2. Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang sangat baik, misalnya tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani kopi rakyat, tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi, tersedianya informasi secara merata. Kinerja penyuluh pertanian yang harus ditingkatkan adalah mewujudkan kemitraan usaha antara petani kopi rakyat dan pengusaha kopi yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nova S. Sumual, Olvie. L. S. Benu, Gene Kapantow, Melisa L. G. Tarore. 2011. *Kajian Kinerja Penyuluh Pertanian di Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Amurang Timur*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/view/6802>.
- Santosa, T.H. dan Oktarina. 2015. *IbPE Kopi Rakyat Asal Kabupaten Jember, Jawa Timur*. Program Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jember dengan Pendanaan Dikti.



ANALISIS PENERAPAN KOMPONEN TEKNOLOGI PADA LAHAN RAWA PASANG SURUT DI KABUPATEN BARITO KUALA, KALIMANTAN SELATAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Siti Sehat Tan dan Lintje Hutahean

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No 10, Cimanggu -Bogor
E-mail: sititan2010@gmail.com

ABSTRAK

Lahan pasang surut di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan, telah dimanfaatkan sejak dulu oleh petani dengan menanam tanaman padi lokal (Siam), dengan pola tanam sekali setahun, produksi 2 ton per hectare dengan kepemilikan lahan 1-2 hektar. Rendahnya produksi, disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada lahan tersebut sehingga tingkat kesuburannya sangat rendah. Introduksi inovasi PTT diharapkan mampu memperbaiki permasalahan tersebut sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil padi pada lahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode survey menggunakan kuesioner yang telah disiapkan yang meliputi beberapa variabel; (1) Pengetahuan petani terhadap komponen teknologi pada pendekatan PTT padi, (2) penerapan petani terhadap komponen teknologi pada pendekatan PTT padi, (3) Media Sumber informasi, (4) Respon dan apresiasi petani terhadap PTT padi. Indikator kelayakan dianalisis berdasarkan ratio penerimaan (*revenue*) atas biaya (*cost*) atau R/C Rasio (Soekartiwati, 2006). Hasil analisis diperoleh, dengan penerapan komponen teknologi PTT padi pada lahan pasang surut di lokasi pengkajian, terutama penggunaan varietas unggul baru Inpara2 terjadi peningkatan produksi menjadi 3-3,5 ton per hektare, dengan nilai R/C Ratio 1,79, yang artinya bahwa usahatani padi di lahan pasang surut di desa Danda jaya menguntungkan dan layak dikembangkan karena memiliki R/C ratio di atas 1 (satu).

Kata kunci: Penerapan, teknologi, lahan pasang surut

PENDAHULUAN

Tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam mendukung program empat target sukses Kementerian Pertanian adalah: 1) menciptakan VUB (varietas unggul baru) spesifik lokasi, 2) menciptakan inovasi teknologi mendukung pencapaian produksi VUB, 3) Penyediaan logistik benih sumber dan 4) pendampingan/pengawasan SL-PTT (sekolah lapang PTT) sebagai salah satu saluran (*channel*) dari sistem diseminasi *multi channel* melalui kerjasama Balai Penelitian Komoditas dengan BPTP (Balai Pengkajian Teknologi



Pertanian) guna meningkatkan *impact recognition* hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) telah diadopsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebagai salah satu Program Strategis Kementerian Pertanian untuk peningkatan produktivitas dan produksi pangan. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas dilakukan melalui introduksi varietas unggul baru produktivitas tinggi yang dibudidayakan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Lahan yang mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian berbasis tanaman pangan dengan pendekatan PTT adalah lahan pasang surut.

Lahan pasang surut di Indonesia cukup luas sekitar 20.1 hektare dan baru dikembangkan 1.5 hektare. Sementara 9.53 hektare mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman pangan (Rubiyanto Hendro Susanto, 2015). Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan memiliki lahan rawa seluas 235.677 hektare, dan dari luasan itu yang telah dimanfaatkan untuk tanaman pangan sebesar 78.544 hektare, sedangkan lahan potensial lain yang dapat dimanfaatkan untuk di rawa lebak mencapai 90.000 hektare.

Pemanfaatan lahan tersebut untuk pertanian merupakan alternatif yang dapat mengimbangi berkurangnya lahan produktif terutama di pulau Jawa yang beralih fungsi untuk berbagai keperluan pembangunan non pertanian. Hasil penelitian Ismail *et al.* (1993) menunjukkan bahwa lahan rawa ini cukup potensial untuk usaha pertanian baik untuk tanaman pangan, perkebunan, hortikultura maupun usaha peternakan. Kedepan lahan rawa ini menjadi sangat strategis dan penting bagi pengembangan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan dan usaha agribisnis (Alihamsyah, 2002).

Dalam penerapan komponen teknologi dalam PTT padi di lahan rawa telah dilakukan oleh petani peserta SL-PTT. Untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan tata pelaksanaannya diperlukan monitoring yaitu melakukan pengamatan bagaimana keadaan penerapan komponen tersebut oleh masing-masing petani di daerah pengkajian. Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana



pelaksanaan penerapan komponen teknologi padi di daerah pengkajian, (2) respon petani terhadap komponen teknologi yang diintroduksi, dan (3) Mengetahui kelayakan financial penerapan komponen teknologi PTT padi di daerah pengkajian. Manfaat dari pengkajian diharapkan sebagai bahan informasi bagi petani tentang keuntungan yang dapat diperoleh dalam penerapan komponen teknologi, dan sebagai bahan masukan untuk pihak yang membutuhkan.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive), atas dasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan daerah lahan pasang surut dan merupakan lokasi SL-PTT. Jumlah responden sebanyak 30 orang⁵ terdiri dari petani peserta SL-PTT yang menerapkan komponen teknologi. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2014 dan data yang diambil yaitu kegiatan SLPTT padi di MH 2013/2014 (Oktober 2013- Maret 2014) dan MK 2014 (April/Mei - Juli/Agustus 2014).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperkaya dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani menggunakan kuesioner yang telah disiapkan yang meliputi beberapa variabel:

1. Pengetahuan dan penerapan petani terhadap komponen teknologi pada pendekatan PTT padi
2. Media Sumber informasi
3. Respon dan apresiasi petani terhadap PTT padi
4. Struktur pembiayaan usahatani

⁵ Dihitung berdasarkan Rumus Slovin



Data sekunder diperoleh dari studi pustaka pada dinas/instansi/lembaga baik lembaga formal maupun non-formal, terutama yang terkait dengan penerapan SL-PTT spesifik lokasi.

Metode Analisis

Penerapan komponen teknologi dianalisis berdasarkan pertanyaan pada variabel 1-3 yang menyangkut aspek (1). Jenis teknologi apa saja yang diketahui dan diterapkan, (2) Lembaga yang menjadi sumber pengetahuan/informasi PTT padi, (3) respon apresiasi PTT padi, (4) media dan sumber informasi teknologi dan (5) respon petani terhadap komponen teknologi yang diintroduksi. Selanjutnya jawaban dianalisis menggunakan metode tabulasi.

Pendapatan usahatani dianalisis berdasarkan penerimaan dengan pembiayaan usahatani. Indikator kelayakan dianalisis berdasarkan ratio penerimaan (*revenue*) atas biaya (*cost*) atau R/C Rasio (Soekartawi, 2006).

$$Pd = TR - TC$$

Di mana:

Pd : Pendapatan usahatani padi,

TR : Total penerimaan usahatani padi, dan

TC: Total biaya usahatani padi

Sedangkan efisiensi usahatani padi dihitung

dengan rumus: Efisiensi= R/C

Dimana

R : total penerimaan usahatani padi dan

C : total biaya usahatani padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Lokasi Kajian

Petani di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala membagi areal lahan menjadi tiga tipe luapan air A, B, dan C. Luapan A merupakan lahan irigasi karena berdekatan dengan sungai barito, Tipe luapan B berada di tengah, dimana bila air pasang besar saja lahan tipe ini bisa mendapatkan air, sedangkan tipe luapan C adalah lahan tadah hujan. Dari Tipe



A, petani mampu menanam padi dua kali setahun menggunakan varietas unggul baru Inpara-2 atau pola tanam Inpara 2-lokal, sedangkan tipe B cenderung hanya sekali atau dua kali setahun dan tipe C cenderung menggunakan varietas lokal (siam) sekali setahun.

Permasalahan dalam pengembangan lahan pasang surut adalah kesuburan alamnya yang rendah dan keragaman kondisi lahan yang tinggi (Suriadikarta dan setyorini 2006; Suriadikarta 2011). Namun demikian padi merupakan tanaman yang paling banyak diusahakan di lahan pasang surut pada lokasi pengkajian dan varietas yang paling banyak digunakan adalah varietas lokal. Menurut Noor dan Jumberi (2008) padi tergolong cocok ditanam di lahan pasang surut.

Rata-rata kepemilikan luas lahan 1-2 ha dengan status milik sendiri (90%), sisanya status sewa. Sawah digarap sendiri oleh pemilik, baik yang berstatus milik ataupun sewa sehingga tidak berbeda dalam penerapan komponen teknologi maupun biaya usahatani. Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60,00%) termasuk dalam golongan *early adopter* (< 50 tahun). Soekartawi (1988) menyatakan bahwa semakin muda seseorang percepatan proses adopsi biasanya relatif lebih cepat. Selanjutnya, Purwanto (2000) menyatakan bahwa orang yang segera dapat mengetahui suatu inovasi biasanya adalah mereka yang lebih berpendidikan, berstatus sosial ekonomi tinggi, dan lebih kosmopolit.

Pengetahuan Dan Penerapan Teknologi PTT Padi.

Adanya program SLPTT dengan bantuan benih, pupuk dan herbisida⁶ mengubah kebiasaan petani di Desa danda jaya dari menanam padi lokal (Siam) umur 6 bulan sekali dalam setahun menjadi dua kali tanam di musim penghujan (Oktober-Maret), menggunakan VUB Inpara-2. Menurut Noor (2004), dengan penggunaan varietas unggul adaptif seperti Ciherang atau Inpara, produktifitas dapat mencapai 3,0 – 3,5 ton di banding varietas lokal seperti siam dengan produktifitas 2,0 ton per hektar.

⁶ Gramoxon untuk persiapan lahan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Selanjutnya Haryono (2013), mengungkapkan potensi lahan rawa dari sepuluh provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kalbar, Sulbar, dan Sulteng) dengan luas 2,27 juta hektar apabila dilakukan optimalisasi dengan dukungan inovasi teknologi dan pengelolaan budidaya yang baik, peningkatan intensitas peranaman (IP 200), maka dapat diperoleh tambahan produksi sebesar 3,5 juta ton gabah per tahun.

Tabel 2. Identifikasi Tingkat Pengetahuan dan Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi di Lokasi Pengkajian

No.	Komponen Teknologi	Diketahui (%)	Diterapkan (%)
1.	Penggunaan VUB	100,00	69,57
2.	Bibit bermutu dan sehat	100,00	73,91
3.	Pengaturan cara tanam jarak legowo	100,00	43,48
4.	Pemupukan berimbang	100,00	95,65
5.	PHT sesuai OPT	100,00	73,91
6.	Bahan organik/pupuk kandang/ameliorant	100,00	69,57
7.	Umur bibit	100,00	86,96
8.	Pengolahan tanah yang baik	100,00	100,00
9.	Pengelolaan air optimal (berselang)	100,00	65,22
10.	Pupuk cair (ZPT, PPC, organik, pupuk mikro)	100,00	78,26
11.	Penanganan panen dan pasca panen	100,00	100,00

Sumber data: Data Primer diolah, 2014

Menurut Saryoko (2009) penggunaan benih bermutu menunjukkan kontribusi terbesar terhadap produksi dibanding penerapan teknologi lainnya. Penerapan sistem tanam jarak legowo masih dibawah 50 % penerapannya. Alasannya adalah membutuhkan ketrampilan, tambahan waktu dan biaya tanam, hal inilah yang membuat petani sulit untuk menerapkan jarak legowo.

Respon Dan Apresiasi Petani Terhadap Komponen Teknologi PTT Padi

Dari hasil survey, terlihat penggunaan VUB inpara-2 cukup diminati petani karena dari aspek rasa hampir mendekati varietas lokal. Indraningsih (2011) menyatakan bahwa persepsi petani terhadap inovasi terkait langsung dengan aspek kebutuhan dan preferensi petani terhadap teknologi lokal ataupun usahatani terpadu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmadi (2009), yang menyatakan bahwa, pandangan seseorang terhadap suatu hal dipengaruhi oleh



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

faktor internal dan eksternal individu, antara lain meliputi kebutuhan individu, lingkungan sosial dan nilai-nilai atau kebiasaan dalam masyarakat..

Tabel 3. Respon dan Apresiasi Petani Terhadap PTT Padi di Lahan Rawa Pasang Surut, Desa Danda Jaya, Kec. Rantau Badauh, Kalimantan Selatan

No.	Komponen teknologi	Respon dan Apresiasi petani				
		SS	S	TT	KS	TS
1.	Penggunaan VUB	73,91	8,70	0,00	17,39	0,00
2.	Bibit bermutu dan sehat	52,17	34,78	4,35	8,70	0,00
3.	Pengaturan cara tanam jajar legowo	26,09	47,83	0,00	17,39	8,70
4.	Pemupukan berimbang	82,61	17,39	0,00	0,00	0,00
5.	PTT sesuai OPT	34,78	43,48	0,00	21,74	0,00
6.	Bahan Organik/pupuk kandang dan ameliorant	86,96	13,04	0,00	0,00	0,00
7.	Umur bibit	43,48	47,83	0,00	8,70	0,00
8.	Pengolahan tanah yang baik	86,96	13,04	0,00	0,00	0,00
9.	Pengelolaan air optimal (berselang)	43,48	34,78	0,00	13,04	8,70
10.	Pupuk cair (ZPT, PPC, Ppk, Organik, Ppk Mikro	47,83	39,13	0,00	4,35	8,70
11.	Penanganan panen dan pasca panen	82,61	17,39	0,00	0,00	0,00

Sumber data: Data Primer diolah, 2014

Analisi Efisiensi Usahatani Padi Di Lahan Pasang Surut Desa Danda Jaya

Efisiensi usahatani padi di lahan pasang surut desa Danda Jaya yang ditunjukkan dengan nilai R/C ratio 1,79 menunjukkan bahwa setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan dalam usahatani padi di lahan pasang surut di desa Danda Jaya akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp1,79 , artinya menguntungkan dan layak dikembangkan karena memiliki R/C ratio di atas 1 (satu)

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Noorginayuwati dan Khairil Anwar (2014) di lahan rawa lebak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan penerapan SL-PTT rata-rata meningkatkan pendapatan sebesar 46,5% dan usahatani menjadi lebih efisien ($R/C > 2$). Selanjutnya Rina *et al* (2008) mengatakan dengan pendekatan PTT dapat meningkatkan produksi sebesar 0,81 ton/ha dan menguntungkan serta terbukti efisien. Namun demikian, menurut Mulyana *et al* (2014) pendapatan usahatani padi per ha per musim tanam di ketiga tipologi lahan suboptimal rata-rata 20 % lebih rendah dibandingkan pendapatan di lahan irigasi.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 4. Rata-Rata Biaya Sarana Produksi pada Usahatani Padi Lahan Rawa Pasang Surut di Desa Danda Jaya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan

No	Uraian	Biaya Per Hektare (Rp)	Persentase (%)
1.	Nilai Produksi Kotor	14.586.927	
2.	Biaya Produksi/Usahatani		
	a. Sewa Traktor dan konsumsi	740.000	13,56
	b. Tenaga Kerja (Rp):	4.718.436	58,03
	o Persiapan lahan	242.500	5,14
	o Menanam (Tabela)	92.045	1,95
	o Menyulam	916.272	19,42
	o Memupuk	148.822	3,15
	o Menyiang	314.818	6,67
	o Panen dan pasca panen	3.003.977	63,67
	Jumlah: 1+2	5.458.436	67,13
	c. Benih , pupuk, pestisida dan Pajak	2.672,455	32,87
	Total Biaya: 1+2+3	8.130.891	100,00
3.	Produksi (ton/ha) gkp = 4.675	14.618.725	
4.	Harga jual (Rp/kg)	3.127	
5.	Keuntungan:	6,456,037	
6.	R/C Ratio	1,79	

Sumber data: Analisis data primer, 2014

Deskripsi di atas mengindikasikan bahwa, pada kondisi sistem usahatani dan produksi padi di lahan suboptimal pada saat ini hanya dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem irigasi yang ada dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga petani. Dari ketersediaan air pada lahan pasang surut dan lahan lebak, terdapat potensi untuk melakukan penanaman padi pada musim kedua, dan sebenarnya sudah dilakukan di beberapa lokasi (Djafar, 2013, Hutapea dan Thamrin 2013)

PENUTUP

Penerapan komponen teknologi PTT oleh petani rerata sudah diatas 50%, kecuali sistem tanam jajar legowo masih dibawah 50%, untuk itu diperlukan suatu metode yang efektif dalam peningkatan sistem tanam jajar legowo. Metode tatap muka/demplot lebih efektif dibanding melalui media cetak atau elektronik. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) sebagai suatu paket teknologi cocok untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pasang surut di desa Danda Jaya.



Berdasarkan hasil analisis usahatani, pada lahan tipe B layak untuk penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. 2009. Psikologi Umum. Jakarta: Rineka Cipta
- Alihamsyah, T. 2002. Optimalisasi Pendayagunaan Lahan Rawa Pasang Surut. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Optimalisasi Pendayagunaan umberdaya Lahan di Cisarua, Tanggal 6-7 Agustus 2001. Puslitbang Tanah dan Agroklimat.
- Djafar, Z.R. 2013. Pengembangan Teknologi Budidaya untuk Meningkatkan Produksi Padi di Lahan Lebak. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal "Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional", Palembang 20-21 September 2013.
- Haryono, 2013. Lahan Rawa: Lumbung Pangan Masa Depan Indonesia. Cetakan ke 2. IAARD. Jakarta.
- Hutapea, Y. dan T. Thamrin. 2013. Spektrum Diseminasi Multi Channel Mendukung Indeks Pertanaman 200 di Lahan Pasang Surut Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal "Intensifikasi Pengelolaan Lahan Suboptimal dalam Rangka Mendukung Kemandirian Pangan Nasional", Palembang 20-21 September 2013.
- Indraningsih, KS. 2011. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Keputusan Petani Dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani terpadu. Jurnal Agro Ekonomi (JAE). Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Ismail, I.G, T. Alihamsyah, I.P. Widjaja Adhi, Suwarno, T. Herawati, R. Tahir, dan D.E. Sianturi. 1993. Sewindu Penelitian Pertanian Lahan Rawa; Kontribusi dan Prospek Pengembangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor.
- Mulyana, A. Yunita, Riswani, dan M.M Hakim. 2013. The Comparative Analysis of Production and Consumption Behaviors of Rice Farmer Households Based on Land Typology and Capital Resources. Proceeding of 2013 International Seminar on Climate Change and Food Security (ISCCFS 2013).
- Noor, M dan Jumberi A. Jumberi. 2008. Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Artikel Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.
- Noorginayuwati, dan Khairil Anwar. 2005. Tingkat Adopsi Komponen Teknologi Usahatani Padi Melalui SL-PTT di Lahan Rawa Lebak Tengahan. Jurnal, Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol.18 (1).
- Noor, M. 2004. Lahan Rawa: Sifat dan Pengelolaan Tanah Bermasalah Suasam. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Purwanto. 2000. Difusi Inovasi. Jakarta: STIA Press.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Rubiyanto Hendro Susanto. 2015. Potensi, Kendala dan Strategi Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak dan Pasang Surut untuk Pertanian (Pajale), Peternakan dan Perikanan dengan TTG Spesifik Lokasi di Indonesia. Universitas Sriwijaya. Pusat Data dan Informasi Daerah Rawa dan Pesisir. Palembang, 8 Oktober 2015. (Diakses 29 Juli 2016).
- Rina Y, A rafieq dan M Sabran. 2008. Analisis Finansial Usahatani Beberapa Varietas Padi Unggul dengan Pendekatan PTT di Lahan Lebak. Makalah Seminar Rutin Balittra. 7 Juli 2008.
- Suriadikarta, D.A. 2011. Teknologi Pengelolaan Lahan Gambut Yang Berkelanjutan. Dalam I. Inounu, D.S. Darmadjati, Supriadi, Bahagiawati, K. Dwiyanto, Sumarno, I.W. Rusastra, dan Subandriyo (Ed). Pembangunan Pertanian Berbasis Iptek. Buku 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta .
- Saryoko, A. 2009. Kajian Pendekatan Penanda Padi (Rice Chek) di Provinsi Banten. Widyariset 12 (2): 43-52.
- Soekartiwi. 2006. Analisis Usahatani. UI.Press. Jakarta.
- Suriadikarta, D.A. dan D. Setyorini. 2006. Teknologi Pengelolaan Lahan Sulfat Masam. Hlm 117-150. Dalam D.A. Suriadikarta, U. Kurnia, Mamat H.S, W. Hartatik, dan D. setyorini (Ed). Karakteristik dan Pengelolaan Lahan Rawa. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.
- Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Jakarta: UI Press



PENTINGNYA MEREK BAGI PRODUK PERTANIAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYASAING KOMODITAS PERTANIAN INDONESIA

Adil Fadillah¹, Komalawati²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Kesatuan, ²Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
(adil_f@stiekesatuan.ac.id)

ABSTRAK

Peningkatan daya saing komoditas pertanian Indonesia sangat diperlukan di era MEA ini. Salah satu permasalahan dalam industri pertanian adalah pemasaran produk pertanian khususnya dalam pengembangan merek produk pertanian. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji tentang pentingnya merek bagi produk pertanian dan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberian merek guna meningkatkan daya saing komoditas pertanian. Merek pada produk pertanian bermanfaat sebagai identitas pembeda dari produk pertanian lainnya yang sejenis. Merek pada produk pertanian juga bermanfaat bagi konsumen untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk pertanian. Di sisi produsen sendiri, merek dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk, menyebabkan produk tersebut dapat dijual dengan harga premium, dan meningkatkan pendapatan petani penghasil. Namun demikian, tidak semua produk pertanian dapat diberikan merek. Untuk itu, diperlukan strategi dalam pemberian merek pada produk pertanian dalam bentuk: (1) mengidentifikasi produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; (2) meningkatkan penelitian budidaya dan pemuliaan tanaman, serta pasca panen untuk komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; (3) meningkatkan peran kelembagaan petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya merek produk pertanian; dan (4) meningkatkan peran penyuluh dan pelaksana teknis kegiatan di lapangan agar dapat memfasilitasi petani dalam menghasilkan produk pertanian yang layak diberikan merek.

Kata kunci: merek, produk pertanian, daya saing

THE IMPORTANCE OF BRANDING TO AGRICULTURAL COMMODITY AS AN EFFORT TO INCREASE INDONESIAN AGRICULTURAL COMMODITY COMPETITIVENESS

ABSTRACT

Increasing the competitiveness of Indonesian agricultural commodities MEA indispensable in this era. One of the problems in the agricultural industry is the marketing of agricultural products, especially in developing agricultural product brand. This paper seeks to examine the importance of brand for agricultural products and strategies that can be done in branding to increase of competitiveness of agricultural commodities. Brand on agricultural products useful as an identity distinct from other Similar agricultural products. Brand Also on agricultural products are useful for consumers to Facilitate the purchase



of a decision-making process agricultural products. On the side of the producers themselves, the brand can provide added value to a product, causing the product can be sold at a premium price, and increase of farmers' income-producing. However, not all agricultural products can be given brand. To that end, the brand strategy is needed in the provision of agricultural products in the form of: (1) identify agricultural products roomates have comparative and competitive advantages; (2) Increase the cultivation research and plant breeding, as well as post-harvest for commodities that have comparative and competitive advantages; (3) Enhance the institutional role of farmers as a group of farmers and farmers 'groups combined to increase of farmers' awareness of the importance of the brand of agricultural products; and (4) increasing the role of facilitators and technical implementation of activities in the field in order to Facilitate the farmers to produce agricultural products worth given brand.

Keywords: brand, agricultural products, competitiveness

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dicanangkan pada akhir tahun 2015 ditujukan untuk membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang menggerakkan para pelaku usaha, suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta kawasan yang terintegasi penuh dengan ekonomi global (Tedjasuksmana, 2014). Dengan kata lain, MEA ditujukan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat (Pujiani, 2014). Hal ini juga merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk Indonesia agar dapat memperluas pasar produk barang/jasa di pasar ASEAN. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan daya saing produk barang/jasa Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan Februari 2016, sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar (BPS, 2016a). Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan terdapat 38, 29 juta orang yang bekerja di sektor pertanian pada Februari 2016. Jika dibandingkan pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini mengalami penurunan dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta



orang atau turun 4,56 persen. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar yang menyerap 31,74 persen tenaga kerja dari total penduduk di atas 15 tahun yang bekerja. Selain itu, sektor ini juga telah berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 13,52% atau kedua setelah industri pengolahan (20,84%) (Badan Pusat Statistik, 2016b).

Merujuk pada pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian Indonesia, peningkatan daya saing komoditas pertanian menjadi penting di era MEA ini. Salah satu permasalahan dalam industri pertanian adalah pemasaran produk pertanian. Pemasaran produk pertanian masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemasaran produk pertanian Indonesia masih terkendala oleh lemahnya infrastruktur, informasi pasar yang tidak merata, kurangnya pengetahuan terkait *grading* dan *standarisasi*, dan tingginya biaya transaksi (Ridjal, nd). Permasalahan lain dari pemasaran komoditas pertanian Indonesia adalah masih kurangnya perhatian dan kesadaran para produsen dan pelaku usaha pertanian dalam menggunakan merek pada produk pertanian. Sementara itu, banyak fakta di lapangan, seperti pada pisang Chiquita, apel Pink Lady, dan produk Fair Trade, menunjukkan bahwa penggunaan merek pada produk pertanian atau komoditi primer telah banyak memberikan manfaat seperti meningkatnya nilai tambah, meningkatnya harga jual komoditi pertanian dan pendapatan petani produsen (Docherty, 2012). Makalah ini ditujukan untuk mengkaji tentang pentingnya merek bagi produk pertanian dan strategi yang dapat dilakukan dalam pemberian merek guna meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia.

Merek Pada Produk Pertanian

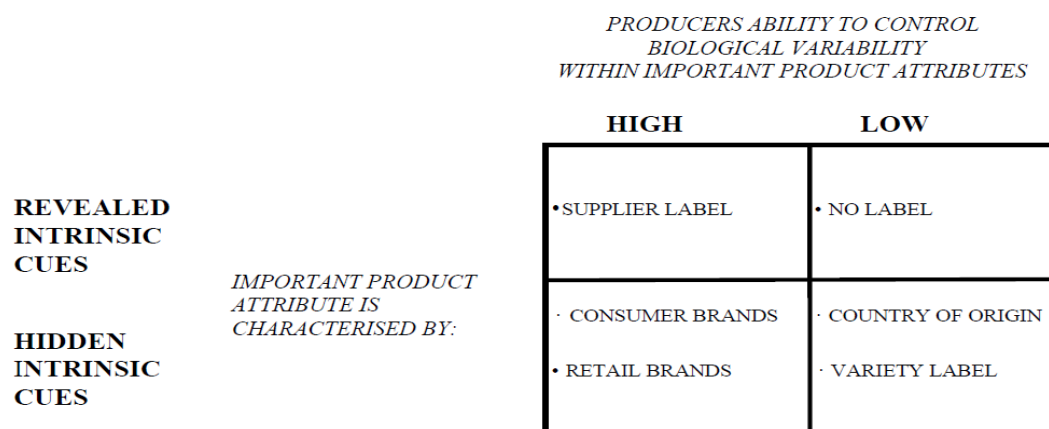
American Marketing Association (Kotler dan Keller, 2009) mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Merek juga dapat didefinisikan bervariasi sebagai “...*the public image of a business, product or individual...*”, sebuah alasan untuk memilih, pertemuan antara janji dan harapan, dan bahkan seperti sebuah “...*love marks*” (Docherty,



2012:4). Docherty (2012:4) juga mendefinisikan bahwa merek merupakan “*Intellectual property...*” yang membedakan suatu produk dari produk lainnya.

Pemberian Merek Pada Produk Pertanian

Merek seringkali dikaitkan dengan kualitas dan konsistensi akan kualitas suatu produk, sehingga pemberian merek tidak dapat dilakukan pada semua produk pertanian. Ketika suatu produk pertanian akan diberikan merek, produsen atau pedagang harus memiliki kontrol yang tinggi terhadap atribut terpenting yang dapat membedakan produk tersebut dari produk lainnya yang sejenis secara konsisten dan ekonomis (White dan Zwart, 1996). Kontrol tersebut dapat berupa kontrol terhadap proses produksi secara biologis, atau praktek manajerial seperti pencucian atau pemilihan. Pemberian merek tidak dapat atau tidak direkomendasikan untuk diberikan pada suatu produk yang memiliki variasi yang tinggi yang sulit dikontrol secara ekonomis (White dan Zwart, 1996). Proses pemberian merek secara terperinci disajikan pada gambar berikut.



Sumber: White and Zwart, (1996)

Gambar 2. Model Pengembangan Merek pada Produk Pertanian

Manfaat Merek Pada Produk Pertanian

Menurut Docherty (2012) merek pada produk pertanian dapat dibedakan berdasarkan: (1) produsen atau siapa yang memproduksi; (2) varietas produk; (3) asal produksi; dan (4) standar etika atau sosial (Gambar 1). Terlepas dari bagaimana merek pada produk pertanian diberikan, merek bagi konsumen berfungsi untuk mempercepat dalam mengambil keputusan dalam proses



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pembelian produk pertanian seperti buah-buahan, terutama yang tidak dapat diidentifikasi dengan mudah.

Merek juga dapat digunakan untuk memberikan informasi dari mana produk pertanian tersebut berasal, jenis varietas yang digunakan, atau pengusaha ritel komoditi tersebut (White dan Zwart, 1996).

	Purpose	Examples	Ownership	Legal device
Producer brands	Distinguish between different products and their producers	• Chiquita bananas • Jablum coffee • Plantation Reserve sugar	Typically primary producers or processors	Trademark
Varietal brands	Distinguish between different varieties of product type	• Pink Lady apples • Tenderstem broccoli • Zespri kiwi fruit	Typically the owner of the variety in question	Trademark with associated patent
Geographical brands	Distinguish products through their geographical origins	• Darjeeling tea • Champagne • Idaho potatoes	Typically public sector bodies or regional associations	Geographical Indicator or Appellation of Origin
Certification brands	Distinguish products through ethical or social standards	• FairTrade • Rainforest Alliance • Organic	Typically certification bodies	Trademark

Sumber: Docherty, (2012)

Gambar 1. Jenis Merek yang Umum diberikan Pada Produk Pertanian

Keengganan produsen untuk memberikan merek pada produknya karena mahalnya biaya dalam memberikan merek, termasuk dalam proses mengemas dan promosi, namun hal ini sebanding dengan keuntungan yang dapat diperoleh produsen. Beberapa pengusaha skala menengah dan kecil dalam penelitian Haimid et.al. (2012) mengemukakan bahwa setiap kenaikan biaya 10% untuk proses pemberian merek, telah dapat meningkatkan harga komoditi tersebut 10-20%. Hal ini sesuai dengan pendapat White dan Zwart (1996) bahwa ketika suatu produk pertanian diberikan merek, produk pertanian tersebut dapat memperoleh harga premium dan memperoleh keuntungan dari pangsa pasar penjualan komoditi yang semakin meluas.

Meningkatkan nilai tambah produk pertanian merupakan manfaat lain yang dapat dirasakan ketika produsen menggunakan merek pada produk pertaniannya. Loeffelholz et.al. (2014) menunjukkan bagaimana anggur menjadi



bernilai tinggi ketika produsen anggur memberikan merek berdasarkan lokasi pertanamannya. Hanya produsen minuman anggur yang memiliki kontrak dengan produsen anggur yang dapat menggunakan merek tersebut. Hal ini telah terbukti dapat meningkatkan nilai, *prestige*, dan reputasi dari komoditi pertanian tersebut sekaligus lahan pertanian asal komoditi.

Dengan manfaat yang diperoleh produsen komoditi pertanian dari pemberian merek, petani produsen dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian, secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian merek pada produk pertanian dapat meningkatkan pendapatan petani produsen.

Strategi Pemberian Merek Pada Produk Pertanian Indonesia

Identifikasi Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Produk Pertanian

Tidak semua produk pertanian dapat diberikan merek. Untuk produk pertanian Indonesia, sebaiknya hanya produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif khususnya di pasar MEA yang diprioritaskan untuk diberikan merek. Untuk itu, identifikasi dan implementasi hasil-hasil penelitian terkait produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi penting untuk dilakukan sebelum pemberian merek diberikan.

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Produk yang Kompetitif

Pemberian merek dapat dilakukan pada produk yang dapat dipertahankan kualitasnya atau standarnya secara konsisten. Untuk itu, penelitian dan pengembangan produk pertanian untuk meningkatkan kualitas produk menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian dan pengembangan produk pertanian tersebut meliputi penelitian terkait proses biologis komoditi pertanian agar dapat seragam, atau dalam hal penanganan pasca panen produk pertanian dan lainnya. Untuk komoditi pertanian Indonesia, sebaiknya komoditi pertanian yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang diprioritaskan untuk diteliti dan dikembangkan.

Peningkatan Peran Kelembagaan Petani

Optimalisasi peran kelembagaan pertanian, seperti Gabungan Kelompok



Tani (gapoktan) dan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dalam dapat meningkatkan efektifitas pembinaan dan pemberdayaan petani untuk menciptakan produk pertanian yang berkualitas dan ter standarisasi secara konsisten sehingga layak untuk diberikan merek.

Peningkatan Peran Penyuluh dan Pelaksana Teknis Kegiatan

Penyuluh dan pelaksana teknis memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya merek untuk meningkatkan daya saing bagi produk pertanian. Serta peningkatan kompetensi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan ter standarisasi.

PENUTUP

Merek memiliki peran penting untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di era MEA. Dengan merek, produk pertanian dapat memperoleh harga premium dibandingkan tanpa merek. Sebelum menggunakan merek, perlu diidentifikasi produk-produk pertanian yang memiliki daya saing di pasar MEA. Peningkatan kualitas produk pertanian serta konsistensinya di kembangkan melalui perbaikan proses biologi. Dibutuhkan proses identifikasi keunggulan omparatif dan kompetitif produk pertanian, peningkatan penelitian dan pengembangan produk yang kompetitif, peningkatan peran kelembagaan petani, peningkatan peran penyuluh dan pelaksana teknis kegiatan sebagai strategi untuk pencapaian produk pertanian yang memiliki merek dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016a. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016b. *Laporan Perekonomian Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Docherty, C. 2012. Branding Agricultural Commodities: The development case for adding value through branding.
- Haimid, T., D. Rizky, dan R.A. Dardak. 2012. Branding as a strategy for marketing agriculture and agro-based industry products. *Economic and Technology Management Review*, 7(2012):37-48.



- Pay, C., M.R. White, dan A.C. Zwart. 1996. *The Role and Importance of Branding in Agricultural Marketing*. Discussion Paper No. 16. Canterbury: Lincoln University.
- Brannon, Linda. (2012). *Gender Psychological Perspectives*. New York: Routledge.
- Ember, Carol dan Ember, Melvin. (2004). *Encyclopedia of sex and gender: men and women in the world's cultures*. New York: Plenum Publisher.
- Engels, Frederick. (1970). *The Origin of The Family, Private Property, and the State in Marx and Engels Selected Works* dalam
Burton, Clare. 1985. *Subordination*. Hong Kong: Wing King Tong Printing Co. Ltd
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kusujiarti, S. (2003). Antara Ideologi dan Transkrip Tersembunyi: Dinamika Hubungan Gender dalam Masyarakat Jawa Dalam Irwan Abdullah (Ed.). *Sangkan Paran Gender* (hal. 176-195). Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM.
- Mangunwijaya, Y.B. (1993). Kemiskinan dan Perempuan. Dalam Faudzie Ridjal (Ed.) *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (hal.147-153). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thapan, Meenakshi. (2001). *Marriage, well-being, and Agency Among Women* dalam Sweetman, Caroline (Ed). (2003). *Gender, Development, and Marriage* (hal. 77-84). USA: Oxfam Publishing.
- The World Bank. (2008). *"Gender in Agriculture Sourcebook"*. The World Bank: Food and Agriculture.
- Wharton, Amy S. 2005. *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*. UK: Blackwell Publishing Ltd.



EFEKTIFITAS PENYULUHAN DALAM MENDUKUNG PERTANIAN ORGANIK DI KELOMPOK TERNAK GENDONGAN KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO

Bekti Nur Utami¹, Deha Purwoko²

¹Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang,

²Mahasiswa Diploma IV (D-4) Program Studi Penyuluh Peternakan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang

Alamat email : bekti_utami@hotmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal di Kecamatan Sekar yaitu mewajibkan penduduknya untuk memiliki ternak sapi sebanyak satu ekor per kepala keluarga. Adanya ternak sapi memproduksi limbah ternak maka perlu sentuhan teknologi kepada para peternak. Penyuluhan mengenai pengolahan limbah ternak menjadi kompos diharapkan membuka wawasan dan perilaku peternak. Pemanfaatan limbah ternak menjadi kompos untuk meningkatkan pendapatan peternak serta mendukung pertanian organik. Tujuan penelitian adalah untuk (1) Mengetahui tingkat efektifitas penyuluhan melalui materi, media dan metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan, dan (2) Mengetahui perubahan perilaku peternak di dalam mendukung pertanian organik. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan penyebaran kuesioner di kelompok ternak Gendongan. Kelompok ternak dipilih secara purposive yaitu sebanyak satu kelompok dengan sampel sebanyak 60 orang. Data dianalisis menggunakan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penyuluhan di kelompok ternak Gendongan tergolong efektif dan berpengaruh terhadap perubahan perilaku peternak. Pengaruh terhadap perubahan perilaku dapat dilihat bahwa kelompok ternak Gendongan mampu membuat pupuk kompos sebanyak satu ton tiap hari dan menguji mutu kandungan kompos olahan ke Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur dengan hasil laboratorium sangat memuaskan. Diharapkan agar peternak tetap mengolah pupuk kompos secara kontinyu dan menggunakannya dalam usahatani serta dapat memasarkan hasil produksinya.

Kata Kunci : Efektivitas, penyuluhan, kearifan lokal, kompos, Gendongan.

PENDAHULUAN

Kecamatan Sekar berjarak 68 km dari Kabupaten Bojonegoro dengan wilayahnya yang dikelilingi hutan dan bukit kapur. Kecamatan Sekar terdiri dari 6 (enam) desa yaitu : (1) Desa Bobol, (2) Desa Bareng, (3) Desa Miyono, (4) Desa Deling, (5) Desa Sekar dan (6) Desa Klino. Di Kecamatan Sekar terdapat 51 (lima puluh satu) kelompok tani dan 2 (dua) kelompok ternak. Salah satu kelompok ternak tersebut terletak di dusun Gendongan.



Kelompok ternak Gendongan mempunyai kandang koloni yang dibangun dengan dana swadaya kelompok senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kandang tersebut terdapat 54 (lima puluh empat) ekor sapi potong. Dari kandang koloni tersebut sangat berpotensi untuk dijadikan usaha kelompok yaitu limbah kotoran ternaknya. Jika diasumsi 1 (satu) ekor ternak bisa menghasilkan kotoran ternak sebanyak 25 Kg/harinya, maka 54 (lima puluh empat) ekor sapi bisa menghasilkan kotoran ternak sebanyak : $25 \text{ kg/hari} \times 54 \text{ ekor sapi}$ maka menghasilkan feses/kotoran sebanyak 1,35 ton perhari. Pupuk kompos inilah yang nantinya digunakan sebagai pupuk tanaman pada umumnya yaitu 3-4 genggam pupuk kompos untuk satu meter persegi lahan atau 7 - 10 setiap hektar lahan, (Anonim, 2014). Kompos adalah pupuk yang dibuat dari hasil penguraian aneka bahan sampah organik (Alex, s., tanpa tahun).

Dalam rangka mendukung pertanian organik guna mengurangi pemakaian pupuk kimia di Kabupaten Bojonegoro, dilakukan penyuluhan mengenai sentuhan teknologi terhadap pengolahan limbah ternak sapi menjadi pupuk kompos. Sebagaimana tersirat dalam undang-undang No. 16 tahun 2006 pasal 1 yaitu Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Anonim, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui tingkat efektifitas penyuluhan melalui materi, media dan metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan, dan (2) Mengetahui perubahan perilaku peternak di dalam mendukung pertanian organik.



METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2016 di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Penentuan kelompok ternak secara *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno Hadi, 1974). Sampel yang digunakan sebanyak 60 responden. Data diukur menggunakan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur (Riduwan, 2007).

Pengukuran efektifitas penyuluhan melalui materi, media dan metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan dengan menggunakan korelasi pearson product moment. Analisis ini digunakan untuk memperoleh koefisien korelasi yaitu ukuran hubungan linier antara dua variabel (Anonim, 2014). Pengukuran tingkat efektifitas penyuluhan melalui tahapan yaitu pengukuran interval kelas dan pengukuran efektifitas penyuluhan. Pengukuran interval kelas dengan rumus (Anonim, 2011) :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Target Kegiatan}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

Dari hasil interval kelas tersebut lalu dicari Efektivitas Penyuluhan dengan rumus (Anonim, 2016) :

$$EP = \frac{\text{Rata-rata nilai penyuluhan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan :

EP = Efektivitas Penyuluhan

Rata-rata nilai penyuluhan = Jumlah total skor dari responden dibagi dengan jumlah responden.

Target = Jumlah pertanyaan X skor tertinggi



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Efektivitas Perubahan perilaku peternak di Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan rumus (Anonim, 2016) :

$$EP = \frac{\text{Rata-rata nilai perubahan perilaku petani}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan :

EP = Efektivitas Perubahan Perilaku

Rata-rata nilai perubahan = Jumlah total skor dari responden dibagi dengan jumlah responden.

Target = Jumlah pertanyaan X skor tertinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan tentang pembuatan pupuk kompos dilakukan dengan menggunakan materi penyuluhan, media penyuluhan dan metode atau teknik penyuluhan. Efektifitas penyuluhan tentang pembuatan pupuk kompos di Kelompok Ternak Gendongan Kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro dianalisis dengan menggunakan korelasi pearson. Hasil analisis korelasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi Materi Penyuluhan, Media Penyuluhan dan Metode atau Teknik Penyuluhan

Pearson Correlation	Materi Penyuluhan	Media Penyuluhan	Metode dan Teknik Penyuluhan
Materi Penyuluhan	1	0,952**	0,955**
Media Penyuluhan	0,952**	1	0,960**
Metode dan Teknik Penyuluhan	0,955**	0,960**	1

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 1 nilai korelasi (r_{23}) antara variabel media penyuluhan (X_2) dan metode atau teknik penyuluhan (X_3) sebesar 0,960 artinya media penyuluhan memiliki hubungan yang sangat tinggi, positif dan sangat nyata



dengan metode atau teknik penyuluhan. Materi penyuluhan yaitu tentang pembuatan kompos dan metode penyuluhan atau cara penyuluhan yang berupa demonstrasi cara (dem-car) mempunyai hubungan yang sangat tinggi. Nilai korelasi (r_{12}) antara variabel materi penyuluhan (X_1) dan media penyuluhan (X_2) sebesar 0,952 artinya materi penyuluhan memiliki hubungan yang sangat tinggi, positif dan sangat nyata dengan media penyuluhan. Materi penyuluhan yaitu tentang pembuatan kompos mempunyai hubungan yang sangat tinggi dengan media penyuluhan yaitu brosur, alat dan bahan pembuat pupuk kompos berupa handsprayer, cangkul, limbah kotoran ternak, dedak, sekam, tetes dan bio aktivator EM4 serta air secukupnya. Nilai korelasi (r_{13}) antara variabel materi penyuluhan (X_1) memiliki hubungan yang sangat tinggi, positif dan sangat nyata dengan metode atau teknik penyuluhan (X_3). Materi penyuluhan yaitu tentang pembuatan kompos mempunyai hubungan yang sangat nyata dengan metode atau teknik penyuluhan yang berupa demonstrasi cara (dem-car).

Pengukuran efektivitas penyuluhan pembuatan kompos di kategorikan menjadi lima kelas dengan kriteria yakni sangat efektif, efektif, ragu-ragu, tidak efektif dan tidak efektif sekali. Kriteria tersebut dapat digunakan dengan:

$$\begin{aligned}\text{Interval Kelas} &= \frac{\text{Target Kegiatan}}{\text{Jumlah Kriteria}} \\ &= \frac{100}{5} \\ &= 20\end{aligned}$$

Dengan demikian, keberhasilan kegiatan pembuatan pupuk kompos melalui kegiatan penyuluhan di kategorikan menjadi:

- Sangat efektif : 80,01 - 100
- Efektif : 60,01 - 80
- Ragu - ragu : 40,01 - 60
- Tidak Efektif : 20,01 - 40
- Tidak Efektif Sekali : 0 - 20



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pengukuran efektifitas penyuluhan melalui pembuatan pupuk kompos di Kelompok Ternak Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

Total skor penyuluhan = jumlah total skor dari responden
= 3.742
Rata-rata nilai penyuluhan = jumlah total skor dari responden dibagi dengan jumlah responden
= 62,37
Target = jumlah pertanyaan x skor tertinggi
= 75

Jadi efektifitas penyuluhan adalah :

$$\begin{aligned} \text{EP} &= \frac{\text{Rata-rata nilai penyuluhan}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{62,37}{75} \times 100\% \\ &= 0.8316 \times 100\% \\ \text{EP} &= 83,16 \% \end{aligned}$$

Efektifitas penyuluhan melalui pembuatan pupuk kompos di Kelompok Ternak Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar 83,16% termasuk dalam kategori sangat efektif. Efektifitas penyuluhan dilihat dari beberapa indikator seperti materi penyuluhan, media penyuluhan, metode atau teknik penyuluhan.

Pengukuran efektifitas perubahan perilaku peternak di Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pertanian organik adalah sebagai berikut :

Total skor perubahan = jumlah total skor dari responden
= 3.399
Rata-rata nilai perubahan = jumlah total skor dari responden dibagi dengan jumlah responden
= 56,65
Target = jumlah pertanyaan x skor tertinggi
= 75

Jadi efektifitas penyuluhan adalah :



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

$$\begin{aligned}
 EP &= \frac{\text{Rata-rata nilai perubahan perilaku petani}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{56,65}{75} \times 100\% \\
 &= 0,7553 \times 100\% \\
 EP &= 75,53 \%
 \end{aligned}$$

Efektifitas perubahan perilaku peternak di Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebesar 75,53% termasuk dalam kategori efektif. Efektifitas perubahan perilaku peternak di Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dilihat dari peternak mampu mengolah limbah ternak menjadi pupuk kompos sebanyak 1 ton tiap harinya.

Guna mendukung pertanian organik yang sekarang sedang digalakan di Kabupaten Bojonegoro, kelompok ternak Gendongan mengujikan pupuk kompos olahan kelompoknya ke laboratorium BPTP Jawa Timur. Hasil dari uji mutu kandungan pupuk kompos olahan milik kelompok ternak Gendongan Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Pengujian Pupuk Organik Padat bentuk Remah

No	Parameter	Nilai	Satuan	Metode
1	C-Organik	14,94	%	Method 967.05, Pengabuan Kering 600°C *)
2	C/N Ratio	17,37	-	Perhitungan
4	Kadar Air	10,95	%	Metode 950.01, Pemanasan Oven 105°C *)
9	pH	8,85	-	Metode 994.18, pH Meter *)
10	Hara Makro			
	Kadar N total	0,86	%	Kjeidahl, titrimetry
	Kadar P ₂ O ₅	0,28	%	Oksidasi Basah (HNO ₃ + HClO ₄), molibdovanadat, spectrophotometry
	Kadar K ₂ O	1,88	%	Oksidasi Basah (HNO ₃ + HClO ₄), AAS
	Total (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	3,02	%	
13	Hara Mikro			
	Kadar Fe total	6991,44	Ppm	Oksidasi Basah (HNO ₃ + HClO ₄), AAS

Keterangan : *) AOAC 18th, 2005

Sumber : Laboratorium Tanah BPTP Jatim, 2016



Dari hasil laboratorium tersebut menunjukkan bahwa pupuk kompos olahan kelompok ternak Gendongan mempunyai kandungan organik yang baik. Pupuk kompos olahan kelompok ternak Gendongan tersebut di uji dengan demonstrasi di lahan milik kelompok Barokah Jaya Desa Sekar Kabupaten Bojonegoro. Penggunaan pupuk kompos sebagai pupuk dasar tanaman diharapkan para petani di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia sehingga produktivitas meningkat dan unsur hara tanah tetap terjaga.

PENUTUP

Melimpahnya kotoran ternak di kandang koloni kelompok ternak Gendongan Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro menjadi inspirasi diadakannya penyuluhan tentang pembuatan pupuk kompos. Kegiatan penyuluhan pembuatan pupuk kompos tersebut ternyata sangat efektif. Efektifitas penyuluhan ditunjukkan dengan materi penyuluhan yang dapat diterima peternak, media penyuluhan yang menarik perhatian peternak dan metode atau teknik penyuluhan yang sesuai yaitu demonstrasi cara. Efektifitas penyuluhan mempengaruhi perubahan perilaku peternak dalam mendukung pertanian organik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan kelompok ternak Gendongan yang bisa membuat pupuk organik sebanyak 1 ton setiap hari. Harapannya dari hasil pupuk kompos olahan tersebut dapat digunakan oleh para petani di Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro sebagai pupuk dasar tanam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. UU No. 16 Tahun 2006. Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Kementrian Pertanian Jakarta.
- _____, 2011. Teknik Menyusun Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Secara Sederhana. <http://bppcijati.blogspot.co.id/2011/02/teknik-menyusun-evaluasi-kegiatan.html>. diakses tanggal 9 April 2016.
- _____, 2014. Pembuatan Pupuk Kompos. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.
- _____, 2014. Analisis Data Penelitian dengan SPSS 22. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- _____, 2016. Mengukur Efektivitas Penyuluhan dan Perubahan Perilaku pada Penyuluhan di Desa Winong Kecamatan Boyolali. <http://cybex.pertanian.go.id/gerbangdaerah/detail/12218/mengukur-efektivitas-penyuluhan-dan-perubahan-perilaku-pada-penyuluhan-di-desa-winong-kecamatan-boyolali>. diakses tanggal 9 April 2016.
- Alex S, Tanpa Tahun. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Pustaka Baru Press Yogyakarta. Yogyakarta
- Hadi Sutrisno, 1974. Statistik. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yogyakarta.
- Riduwan, 2007. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta Bandung. Bandung.



PENINGKATAN PEREKONOMIAN MELALUI PERBAIKAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM MENGHADAPI MEA

Cut R. Adawiyah, S. Rusdiana, dan U. Adiati

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl.A. Yani No. 70 Bogor

Email : cnoni89@gmail.com

Balai Penelitian Ternak Bogor Po Box 122 Bogor

ABSTRAK

Indonesia saat ini masih perlu mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagi Indonesia, MEA bisa jadi peluang emas untuk semakin maju dan kuat, mengingat negara kita memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar US \$ 878 miliar atau 38,67 persen dari total PDB negara ASEAN (World Bank 2012). Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, Indonesia menjadi pasar terbesar ASEAN. Hal tersebut semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dinilai belum siap menghadapi MEA, hal ini disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap ditambah dengan keterbatasan infrastruktur dalam negeri juga menjadi masalah krusial di masa mendatang. Secara umum, daya saing produk pertanian Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara produsen/eksportir produk pertanian negara lain di ASEAN. Standar mutu produk pertanian harus tinggi untuk dapat bersaing di pasar ASEAN dan global. Tujuan dari tulisan ini adalah ingin mengetahui upaya apasaja yang harus dilakukan dalam perbaikan produk pertanian untuk peningkatan perekonomian Indonesia di era MEA. Agar Indonesia mampu bersaing di pasar global maka harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pertanian dan penyiapan sektor pertanian dengan meningkatkan daya saing produk pertanian, pengembangan sistem agribisnis berkelanjutan dan menyusun strategi pengembangan produk pertanian berkualitas.

Kata kunci : peningkatan perekonomian, perbaikan produk petanian

IMPROVED ECONOMIC IMPROVEMENT THROUGH PRODUCTION AGRICULTURE IN DEALING MEA

ABSTRACT

Indonesia is currently still need to prepare lots of things for the ASEAN Economic Community (AEC). For Indonesia, the MEA could be a golden opportunity for the more advanced and powerful, considering our country has a gross domestic product (GDP) of US \$ 878 billion, or 38.67 percent of the total GDP of ASEAN countries (BPS 2014). With a population of around 250 million people, Indonesia is the largest market of ASEAN. It reinforces Indonesia as the country with the largest economy in ASEAN. Indonesia as one of the ASEAN countries rated not ready for MEA, this is due to the competitiveness of the national economy and the area is not ready coupled with the lack of infrastructure in the country is also a crucial issue in the future. In general, the competitiveness of agriculture Indonesia is still far behind compared producer / exporter of agricultural products of other countries in ASEAN. The quality standards of



agricultural products must be high to be competitive in the global market and the ASEAN. The purpose of this paper is to know anything what efforts should be made in the improvement of agricultural products to Indonesia in the era of economic development for MEA. In order for Indonesia to compete in the global marketplace it must do a paradigm shift agricultural development and preparation of the agricultural sector to improve the competitiveness of agricultural products, sustainable agribusiness system development and strategy development of quality agricultural products.

Keywords: *improving the economy, improvement of agricultural products*

PENDAHULUAN

Pada 1 Januari 2016 era perdagangan bebas di kawasan negara-negara ASEAN telah berlaku, ini menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan yang berbasis produksi, dimana mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil akan bergerak bebas antar negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian Asia Tenggara yang beragam, dengan potensi pasar. Terbentuknya MEA, diharapkan dapat memperlancar perekonomian di kawasan ASEAN. Di atas kertas, MEA bertujuan untuk menyatukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ada empat pilar utama dalam cetak biru MEA. Pertama, pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional. Kedua, ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi. Ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan pembangunan ekonomi merata. Keempat, ASEAN sebagai kawasan terintegrasi dengan ekonomi dunia. Menurut Yonariza dan Mahadi (2013) bahwa, cetak biru menjelaskan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional mempunyai lima element inti, yaitu aliran bebas barang, bebas jasa, bebas investasi, modal yang lebih bebas, serta bebas tenaga kerja terampil.

Bagi Indonesia, MEA bisa jadi peluang emas untuk semakin maju dan kuat, mengingat negara kita memiliki produk domestik bruto (PDB) sebesar US \$ 878 miliar atau 38,67 persen dari total PDB negara ASEAN (World Bank 2012). Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang, Indonesia menjadi pasar terbesar ASEAN. Hal tersebut semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN.



Ketergabungan Indonesia dalam MEA dikhawatirkan hanya akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat di eksploitasi oleh negara-negara maju ASEAN sebab tidak adanya perhatian dari pemerintah mengenai perkembangan sektor pertanian, kesiapan yang belum maksimal dalam menghadapi MEA yang menjadikan Indonesia sebagai negara konsumtif yang kurang mampu menjual hasil produksi komoditas ekspor asli Indonesia, karena faktanya Indonesia sampai tahun 2015 belum menunjukkan kenaikan produksi sektor pertanian yang signifikan untuk dijadikan sebagai komoditas ekspor unggulan. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dinilai belum siap menghadapi MEA, hal ini disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap ditambah dengan keterbatasan infrastruktur dalam negeri juga menjadi masalah krusial di masa mendatang. Secara umum, daya saing produk pertanian Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara produsen/eksportir produk pertanian negara lain di ASEAN. Standar mutu produk pertanian harus tinggi untuk dapat bersaing di pasar ASEAN dan global, karena hal tersebut pemerintah perlu segera membenahi industri berbasis pertanian dan membuat sebuah kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk-produk pertanian strategis untuk bisa bersaing atau menguasai pasar domestik dan pasar ASEAN. Permasalahan umum yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian yang dapat memenuhi peningkatan permintaan pasar. Tujuan dari tulisan ini adalah ingin mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan dalam perbaikan produk pertanian untuk peningkatan perekonomian Indonesia di era MEA. Makalah ini berupa review pustaka dari beberapa tulisan yang didapat dari data sekunder.

Paradigma Baru Pembangunan Pertanian

Menurut Belon (2013), paradigma pembangunan pertanian ke depan bertumpu pada kemampuan SDM untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan pertanian perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru pembangunan pertanian, yaitu peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia tani sebagai pelaku aktif pembangunan pertanian. Dengan



demikian perlu dirumuskan suatu kebijaksanaan pembangunan pertanian yang mengarah pada peningkatan kemampuan dan profesionalitas petani dan masyarakat pedesaan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan lestari dengan memanfaatkan rekayasa teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat pedesaan serta menghapus kemiskinan. Arah pembangunan pertanian menurut paradigma baru ini dapat diwujudkan terutama melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tani dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan kebutuhannya. Pembangunan pertanian perlu dirumuskan untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif disertai penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian di pedesaan. Sehingga berimplikasi pada proses pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar nutrisi bagi masyarakat untuk generasi masa kini dan mendatang; (2) dapat menyediakan lapangan pekerjaan; (3) memelihara kapasitas produksi pertanian; (4) mengurangi dampak kegiatan pembangunan pertanian yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan; dan (5) menghasilkan berbagai produk pertanian, baik primer maupun hasil olahan, yang berkualitas serta berdaya saing tinggi.

Pembangunan Pertanian dengan Ekonomi Biru

Menurut (Baharsjah 2014), bahwa sejarah panjang revolusi hijau telah menempatkan petani Indonesia hanya sebagai Petani produsen, yaitu petani yang hanya mampu memproduksi melalui penerapan intoruksi Panca Usaha Tani atau teknologi produksi . Agar pertanian Indonesia mampu bersaing dalam perdagangan bebas MEA disarankan agar model pembangunan teknologi hijau untuk ditinggalkan dan diganti model “Ekonomi Biru”.

Ekonomi Biru yang diinisiasi Gunter Pauli memiliki beberapa kelebihan bila diterapkan dalam pembangunan pertanian. Ekonomi Biru yang mengedepankan pendekatan *ekoregional*, menempatkan petani sebagai operator dalam kelompok tani, koperasi atau badan usaha milik petani mempunyai kemampuan bermitra dengan usaha swasta. Konsep Ekonomi Biru (*Blue*



Economy) merupakan konsep yang menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut (Permadi 2014), konsep Ekonomi Biru mencontoh cara kerja alam (*ekosistem*), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam (*shifting from scarcity to abundance*), limbah dari yang satu menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang, energi didistribusikan secara efisien dan merata tanpa ekstraksi energi eksternal, bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya.

Model Ekonomi Biru ini sangat sesuai diterapkan dengan kondisi dan situasi di Indonesia saat ini untuk dapat bersaing di MEA. Menurut (Tapari 2015), ciri-ciri model ekonomi biru adalah: (a) Memanfaatkan semua tipe lahan; (b) Petani adalah pelaku utama pertanian; (c) Usahatani polikultur terintegrasi; (d) Menghasilkan produk bernilai tambah; dan (d) Tidak menyisakan limbah.

Persiapan Sektor Pertanian Dalam Menghadapi MEA

Meningkatkan Daya Saing Produk Pertanian

Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, baik dari segi kewilayahan maupun jumlah penduduk, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa Indonesia negara yang memiliki kapasitas untuk bersaing dalam MEA. Akan tetapi karena belum mendapatkan perhatian yang serius dan dukungan fasilitas yang memadai, Indonesia masih bergantung pada barang impor. Kondisi pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan skala kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, wilayah pasarnya yang masih lokal, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, serta pasar komoditi pertanian dikuasai pedagang besar.

Tingkat daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan faktor keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Selain dua



faktor tersebut, tingkat daya saing suatu negara sesungguhnya juga dipengaruhi oleh apa yang disebut *Sustainable Competitive Advantage* (SCA) atau keunggulan daya saing berkelanjutan. Menurut Hermanto (2007) bahwa, Indonesia dapat dijadikan sebagai kawasan berdaya saing yang cukup tinggi, juga sebagai kawasan pembangunan perekonomian yang cukup merata dan dari kawasan terintegrasi dengan ekonomi dunia yang seimbang. Persamaan nilai ekonomi yang tinggi maka dengan sendirinya persaingan perekonomian dalam meningkatkan nilai produksi hasil pertanian akan sejajar dengan negara-negara di Asia (Rusdiana dan Adawiyah 2013).

Menurut Hadi dan Sinuraya (2016) komoditas pertanian Indonesia sudah banyak yang mempunyai daya saing yang cukup kuat dan bahkan sangat kuat, tetapi juga masih sangat banyak yang daya saingnya rendah, dan bahkan tidak mempunyai daya saing sama sekali. Karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mempertahankan atau memperkuat daya saing yang sudah dimiliki, dan merubah komoditas yang semula tidak mempunyai daya saing menjadi mempunyai daya saing, baik di pasar dunia maupun di pasar domestik. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu ditempuh, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian melalui pengembangan teknologi dan inovasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal dan efisien, serta mengurangi hambatan ekspor; (2) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dan perbaikan rantai pasok (*supply chain management*); (3) Penguatan sistem penyuluhan dan kelembagaan petani dengan peningkatan kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan perilaku), dan pemberdayaan para petani sehingga terwujud masyarakat petani yang sejahtera dan mandiri; (4) Penetapan standarisasi kualitas produk-produk pertanian; (5) Optimalisasi pemanfaatan lahan (Adila 2015).

Pengembangan Sistem Agribisnis Berkelanjutan

Untuk mendayagunakan keunggulan Indonesia sebagai negara agraris dan maritime dalam menghadapi tantangan liberalisasi Perdagangan, perubahan pasar internasional, pemerintah (Departemen terkait) harus mengembangkan sistem dan usaha agribisnis berdaya saing (*competitiveness*), berkerakyatan



(*people-driven*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Pemerintah harus mengembangkan secara sinergis pembangunan sistem agribisnis yang mencakup; (1) Subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*); (2) Subsistem pertanian primer (*on-farm agribusiness*); (3) Subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*); dan (4) Subsistem penyedia jasa agribisnis (*services for agribusiness*). Sistem dan usaha agribisnis yang dikembangkan pemerintah, harus berkerakyatan yang dicirikan dengan keterlibatan rakyat dalam sistem dan usaha agribisnis, berlandaskan sumber daya yang dimiliki rakyat baik sumberdaya alam, teknologi (*indigenous technologies*), kearifan lokal (*local wisdom*), budaya ekonomi lokal (*local culture, capital social*) dan menjadikan organisasi ekonomi rakyat banyak menjadi pelaku utama agribisnis. Menurut (Nainggolan dan Aritonang 2012) bahwa, pengembangan sistem dan usaha agribisnis juga harus berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, teknologi maupun dari segi ekologis. Dari sisi ekonomi, pembangunan sistem dan usaha agribisnis harus berakar pada sumberdaya dan organisasi ekonomi lokal dan menjadikan inovasi teknologi ramah lingkungan dan kreativitas (*skill*) rakyat sebagai sumber pertumbuhan, untuk menghasilkan sistem dan usaha agribisnis yang berkelanjutan.

Strategi Pengembangan Produk Pertanian Berkualitas

Kualitas produk pertanian menjadi salah satu parameter keberhasilan produk pertanian dalam menembus pasar internasional. Penjaminan kualitas produk harus dimulai sejak masa tanam. Bahkan, untuk produk organik, persyaratan dapat lebih ketat karena tidak setiap lahan dapat digunakan untuk budidaya produk tertentu. Kualitas produk pertanian juga ditentukan oleh perlakuan panen dan pasca panen. Mengingat semakin ketat persaingan perdagangan internasional, maka harus dilakukan upaya yang lebih nyata dan terkoordinasi di dalam mendorong produk pertanian untuk mampu menembus pasar internasional. Menurut (Yuwono 2011) Beberapa hal mendasar yang harus dilakukan dalam memperbaiki produk pertanian, antara lain adalah; (1) edukasi terhadap petani tentang persyaratan kualitas produk pertanian yang lebih tinggi; (2) pelatihan teknis penjaminan mutu budidaya, pemanenan, dan



pasca panen dengan orientasi ekspor baik bagi petani maupun eksportir; (3) membuat kebijakan pembangunan pertanian yang lebih kondusif bagi petani untuk dapat bersaing di pasar internasional, misalnya dengan memberikan insentif pajak atau subsidi harga; (4) meningkatkan dan mengefektifkan lobi perdagangan internasional; (5) memperluas pasar internasional dengan produk-produk pertanian yang khas Indonesia sehingga mempunyai keuntungan komparatif.

Negara, lembaga pembangunan, organisasi swadaya masyarakat dan lembaga konsumen internasional turut mendorong dan mengawasi pelaksanaan perbaikan pengadaan produk pertanian yang berdaya saing. Kepatuhan produsen terhadap standar praktek pertanian berkelanjutan menjadi salah satu acuan bagi konsumen atas produk pertanian. Karena itu, setiap perusahaan agribisnis harus mematuhi prinsip Praktek Pertanian yang Baik (PPB) agar dapat memperoleh akses pasar, khususnya di pasar internasional (Saptana dan Ashari, 2007).

PENUTUP

Terbentuknya MEA diharapkan dapat memperlancar perekonomian di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN dinilai belum siap menghadapi MEA, hal ini disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap ditambah dengan keterbatasan infrastruktur dalam negeri. Agar Indonesia mampu bersaing di pasar global maka harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pertanian dan menyiapkan sektor pertanian dengan meningkatkan daya saing produk pertanian, pengembangan sistem agribisnis berkelanjutan dan menyusun strategi pengembangan produk pertanian berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, F. (2015). Kesiapan Petani dalam Menghadapi AEC 2015. https://www.academia.edu/9844850/KESIAPAN_PETANI_DALAM_MENGHADAPI_AEC_2015. Diakses tanggal 20 Juli 2016.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Baharsjah, S. (2014). Berani Membalik Arus. Tabloid sinar Tani. http://m.tabloidsinartani.com/index.php?id=148&tx_ttnews%5Btt_news%5D=491&cHash=7f22626d84d705ac7a4c4ecd66376ac1
- Belon. (2013). Paradigma baru pembangunan pertanian Indonesia, <http://belon86.blogspot.co.id/artikel>, diakses tgl, 19 Juli 2016.
- Hadi, PU dan Sinuraya, JF. (2016). Kinerja Dan Strategi Penguatan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia. Buku Wawasan Daya Saing Dan Kinerja Pembangunan Pertanian. Litbang Kementan. Jakarta. http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/memperkuat_dayasaing_produk_pe/BAB-II-3.pdf. Diakses tanggal 2 Agustus 2016.
- Hermanto, R. 2007. Rancangan kelmbagaan tani dalam implementasi prima tani di Sumatera Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Pusat Penelitian Ssosial ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Vol. 5 No. 2 Juni 2007. ISSN. 1693-2021 hal. 110-125.
- Nainggolan, HL dan Aritonang, J. 2012. Pengembangan Sistem Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Prosiding. http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/JURNAL/TULISAN%20JOHNDIKSON%20ARITONANG/2.Pengembangan%20Sistem%20Agribisnis...pdf. Diunduh tanggal 3 Agustus 2016.
- Permadi, A. 2014. Ekonomi Biru Untuk Indonesia Baru. <http://kehidupanpetani.blogspot.co.id/2014/06/ekonomi-biru-untuk-indonesia-baru.html>. Diakses tanggal 19 Juli 2016.
- Rusdiana, S. dan Cut .R. Adawiyah. 2013. Permasalahan ekonomi dan sistem perekonomian hasil produksi pertanian di Indonesia, Jurnal ACTIVITA, Jurnal Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat Vo. 4 No.2 Agustus 2013, ISSN. 2087-9091 hal. 263-280
- Saptana dan Ashari, 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha Jurnal Litbang Pertanian RI, 26 (4). Jakarta.
- Tapari, H. (2015). Menyongsong era pasar bebas ASEAN dan perkuat poros penelitian penyuluhan pada petani penyuluh pertanian pada Sekretariat, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah, <http://setbakorluh.jatengprov.go.id/artikel> 3 August 2015. di akses tanggal 6 April 2016.
- World Bank. (2012). Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Mengatasi tantangan saat ini dan ke depan. Diakses tanggal 13 Juli 2016. <http://documents.worldbank.org/curated/en/529581468044652951/pdf>.
- Yonariza dan Mahdi. 2013. Potensi dampak masyarakat ekonomi asean/mea 2015 terhadap sektor pertanian Indonesia, Universitas Andalas Padang Andalas, Sumatera Barat. Diakses tanggal 18 Juli 2016. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/jurnal/> hal. 99-119.
- Yuwono, T. 2011. Mengapa produk pertanian kita sulit di ekspor ?. <https://inspirasiabloid.wordpress.com/category/pertanian/>. Diunduh tanggal 3 Agustus 2016.



PERAN PETANI DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI SEBAGAI REALISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Cut R. Adawiyah¹ dan S. Rusdiana²

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl.A. Yani No. 70 Bogor

Email : cnoni89@gmail.com

²Balai Penelitian Ternak Bogor Po Box 122 Bogor

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya alam yang melimpah sehingga perlu digali dan dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan bersama. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9 persen dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7 persen bagi GNP Indonesia. Fungsi dan Peran petani dalam meningkatkan produksi masih terkendala dengan kurangnya modal, lahan yang sempit, tenaga kerja yang semakin sedikit, teknologi yang minim, dan bencana yang sering terjadi. Realisasi pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet, dan mampu mengoptimalkan sumberdaya, modal, tenaga, serta teknologi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka keberhasilan pertanian dalam pembangunan tidak lepas dari fungsi dan peran petani. Tujuan tulisan ini adalah, 1) Mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan ; 2) Upaya apa yang dapat mengoptimalkan peran dan fungsi petani dalam meningkatkan produksi sebagai realisasi dari pembangunan pertanian. Peningkatan Produksi tanaman bisa terlaksana dengan dukungan sumberdaya yang ada seperti sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, sumberdaya hayati dan sumberdaya ternak yang tersedia di pedesaan. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi adalah mendukung peran petani dalam usahatani dengan Kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pertanian dan pelayanan penyuluhan.

Kata kunci : peran petani, peningkatan produksi, pembangunan pertanian

ROLE OF FARMERS IN INCREASING PRODUCTION AS THE REALIZATION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT

ABSTRACT

State of Indonesia is an agricultural country which has great potential and abundant natural resources that need to be explored and utilized in accordance with the common interest. Agriculture is a sector that has a significant role for the Indonesian economy. The agriculture sector employs 35.9 percent of the total workforce in Indonesia and contributed 14.7 percent to the GNP Indonesia. The function and role of the farmers in increasing production is still constrained by lack of capital, land is narrow, the less labor, tech- nologies, and frequent disasters. Actual construction is done must be supported by all components of the dynamic, resilient, and able to optimize resources, capital, labor and



technology that can create prosperity. Based on the above problems, the success of agriculture in development can not be separated from the function and role of farmers. The purpose of this paper is, 1) Determine the factors that can increase agricultural production and; 2) What efforts can optimize the role and function of the farmers in increasing production as the realization of agricultural development. Increased crop production can be realized with the support of existing resources such as land resources, human resources, biological resources and livestock resources available in rural areas. Efforts should be made by the government in favor of increasing production is to support the role of farmers in farming with policies that support improved agricultural system and extension services.

Keywords : *the role of farmers, increase production, agricultural development*

PENDAHULUAN

Menurut Landora (2011) bahwa, pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35.9 persen dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14.7 persen bagi GNP Indonesia (BPS, 2012). Pertanian yang dimaksud dalam arti luas meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan (kesejahteraan) masyarakat. Besarnya porsi pertanian dalam menyumbang pendapatan nasional tidak dapat lepas dari peran besar pertanian, selain itu peran penting dari sektor pertanian sebagai penyelamat perekonomian masyarakat dalam kondisi krisis dengan perannya yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan, penyedia pangan dan juga sebagai penghasil devisa negara, mengurangi kemiskinan di pedesaan, mengurangi impor dan akhirnya mendorong ekspor.

Menurut Suhariyadi (2014) bahwa, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian memegang penting dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya pendapatan nasional. Pada kenyataannya pertanian masih kurang mendapat perhatian oleh pemerintah, untuk itu pembangunan sektor pertanian sangat diperlukan dalam membantu proses pengembangan perekonomian bangsa khususnya dalam peningkatan pendapatan nasional. Pertanian berperan besar dalam penciptaan kesempatan kerja dalam memberi sumbangan terhadap pendapatan nasional, sumbangan terhadap ekspor bersih, dan memberi pengaruh terhadap inflasi. Pertanian merupakan satu-satunya ujung tombak



pembangunan nasional yang mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat petani dalam upaya melakukan usaha pertanian yang mandiri.

Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usahatani terpadu (*integrated farming system*). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (*institution*) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut *on farm bussiness* saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek *off farm agribussiness* (Susilowati *et al*, 2009). Pada dasarnya keberhasilan suatu usaha yang melakukan penerapan teknologi dan budidaya baik itu pertanian maupun peternakan dapat dinilai dari tingkat profitabilitas kemampuan sumberdaya manusianya (Demitria *at al* 2006); (Kusnadi *et al* 2006).

Faktor yang dapat mempengaruhi petani tidak melakukan usahanya dengan baik, dikarenakan modal dan lahan yang digunakan sangat terbatas. Kehidupan petani Indonesia semakin terpuruk, tidak hanya itu bahkan para petani banyak yang mengalami kemiskinan. Petani Indonesia kebanyakan sebagai petani penggarap, buruh tani, dimana petani akan semakin sulit mengharapkan dalam memperoleh penghasilan yang cukup seperti yang diinginkan petani. Menurut Sarah (2010) permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan adanya beberapa kebijakan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah malah mencekik petani ditambah kurangnya lahan dan sarana prasarana yang cukup memadai.

Berdasarkan data (BPS 2013), 29 juta jiwa penduduk indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dimana 18 juta jiwa tersebut berada di pedesaan. Selain itu, Nilai Tukar Petani sekitar 100-105 sejak 2010, dibandingkan dengan target batas bawah RPJMN, yaitu 115-120. Hal ini menunjukkan petani di Indonesia belum sejahtera.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembangunan pertanian selain kemiskinan, tidak tepat bantuan sarana prasarana, adalah ketergantungan impor. Impor tanaman pangan menempati 74 persen dari total impor yang dilakukan



pemerintah (BPS 2013). Impor yang dilakukan sebagian besar untuk konsumsi, bukan untuk proses produksi. Hal ini menunjukkan sangat tergantungnya pemenuhan konsumsi domestik terhadap impor.

Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil, sehingga petani memilih untuk menggarap lahan milik orang lain. Padahal menurut (Irawan dan Prayitno 2012) Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh produktivitas lahan, luas lahan dan intensitas panen per tahun. Artinya ada variabel luas lahan yang harus diperhatikan dalam menjaga ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan. Banyaknya lahan para petani yang belum bersertifikat menambah dampak buruk bagi masa depan para petani yang menyebabkan terjadinya persengketaan antara pihak petani dan pihak yang mencoba merampas hak milik petani.

Tenaga kerja produktif di Indonesia semakin berkurang, mereka lebih tertarik bekerja pada bidang nonpertanian dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah pada sektor pertanian. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah petani di Indonesia menurun. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di sana menunjukkan jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang bekerja sebagai petani per Februari 2013 mencapai 39,95 juta. Jumlah itu menurun dibandingkan pada tahun Februari 2010 sebanyak 42,82 juta.

Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan budidaya tanaman pangan, belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang lebih banyak menggunakan peralatan tradisional.

Penyebab penurunan produktivitas pertanian bisa disebabkan *forcemajeur* atau dengan kata lain diluar kendali manusia seperti bencana alam Indonesia terletak di *ring of fire*, sehingga Indonesia akan lebih sering terkena dampak bencana alam.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi persaingan perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni



tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia dan persaingan perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan tulisan ini adalah, 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan produksi pertanian dan ; 2) Upaya apa yang dapat mengoptimalkan peran dan fungsi petani dalam meningkatkan produksi sebagai realisasi dari pembangunan pertanian. Makalah ini berupa review pustaka dari beberapa tulisan yang didapat dari data sekunder.

Potensi Sumberdaya di Indonesia dalam Peningkatan Produksi Pertanian

Menurut Dewi dan Satya (2011) Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam, termasuk plasma nutfah, yang sangat melimpah (*mega biodiversity*). Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang sudah sejak lama diusahakan oleh petani sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Usaha pertanian tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, karena dukungan itulah Indonesia sangat berpotensi mengembangkan pertanian lebih maju lagi.

Sumberdaya Lahan

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan petani. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (2006), melakukan kajian akademis data penelitian memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6%) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4%) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal



yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian (Kementan 2010).

Lahan pertanian adalah modal yang sangat penting dalam menggenjot peningkatan produksi tanaman pangan. Tanpa perluasan lahan (*ekstensifikasi*) upaya peningkatan produksi pangan hanya bertumpu pada inovasi teknologi atau peningkatan produktivitas (*intensifikasi*). Bila hanya bertumpu pada peningkatan produktivitas, pada titik tertentu, produksi pangan bakal tak mampu memenuhi permintaan terhadap pangan yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk (Ruslan, 2014). Untuk mempertahankan ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional, diperlukan strategi dan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan, baik lahan pertanian (sawah yang sudah dimanfaatkan saat ini maupun lahan cadangan. Strategi dan kebijakan tersebut adalah : (Wahyunto 2009)

1. Mengoptimalakan pemanfaatan sumber daya lahan eksisting agar lebih produktif dan lestari baik secara kuantitas dan kualitas, yaitu dengan intensifikasi dan peningkatan intensitas tanam, pengembangan inovasi teknologi, dan pengendalian konversi lahan.
2. Perluasan areal pertanian, seperti ekstensifikasi dengan memanfaatkan lahan potensial.
3. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan/sawah.

Sumberdaya Hayati

Perkembangan teknologi pemupukan dalam dekade terakhir telah menunjukkan makin banyak tanda-tanda kelelahan tanah (*fatigue soils*) akibat aplikasi input kimia puluhan tahun. Tanah-tanah yang semula subur karena mengandung cukup bahan organik makin tidak mampu lagi mendukung produktivitas tanaman secara ekonomis. Menyusutnya kadar bahan organik tanah akibat budidaya intensif dan minimnya input organik mengakibatkan



efisiensi pemupukan kimia menurun drastis. Menurut (Goenadi 2014), satu-satunya kunci untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut adalah dengan pemberian *ameliorant* (pembenah) tanah seperti pupuk organik, pupuk hayati, dan/atau pupuk mineral alami. Dengan mempertimbangkan manfaat pupuk organik bagi tanah dan tanaman, maka posisi pupuk organik setara dengan pupuk an-organik. Pupuk organik berfungsi sebagai pembenah tanah, sedang pupuk an-organik lebih pada penyediaan kekurangan nutrisi yang tidak dapat dipenuhi oleh tanah sesuai yang dibutuhkan tanaman. Penggunaan pupuk organik yang bermutu baik mampu meningkatkan kapasitas tanah sehingga lebih efisien menggunakan pupuk kimia buatan (anorganik) hingga 25-50 persen, dan keuntungannya biaya pemupukan dapat dihemat hingga 35 persen. Untuk memberikan keyakinan lebih dalam kepada petani maka diperlukan insentif berupa subsidi pupuk organik.

Sumberdaya Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian masih sangat bergantung dengan keberadaan dan peran petani yang selalu memproduksi tanaman untuk pangan, industri dan kebutuhan lainnya . Petani menjadi actor utama dalam pertanian. Secara kuantitas, sumberdaya manusia yang terlibat dapat berasal dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga (Rustan 2006). Sedangkan secara kualitas sangat dipengaruhi oleh karakteristik petani yaitu umur, pendidikan, tingkat adopsi teknologi, dan tingkat kesejahteraan keluarga petani.

Sumberdaya Ternak

Usahatani terpadu mengurangi resiko kegagalan panen, karena ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos produksi. Menurut (Handaka *et al* 2009) sistem pertanian terpadu tanaman dan ternak adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usahatani atau dalam suatu wilayah. Menurut (Atmaja 2007) pola pertanian terpadu sangatlah menunjang dalam penyediaan pupuk kandang dilahan pertanian, sehingga pola ini sering disebut pola peternakan tanpa limbah karena limbah peternakan digunakan untuk pupuk, dan limbah pertanian untuk makan ternak.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Usaha tanaman pangan sebagai fungsi usaha pokok dan usaha pemeliharaan ternak biasanya sebagai usaha yang masih bersifat sederhana atau sampingan (Rusdiana *et al* 2010). Petani sewaktu-waktu dengan harapan yang paling utama adalah dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan tujuan akhir petani menjadi sejahtera. Fungsi usaha tanaman pangan dan fungsi usaha ternak di pedesaan dapat menambah pendapatan petani, terlihat pada Tabel.1.

Tabel. 1. Fungsi usaha tanaman pangan dan ternak di petani

Uraian	Responden (n-20)	Presentase (%)
Fungsi dan peran usaha tanaman		
-Usaha pokok padi	20	100
-Usaha sampingan/sewaktu-waktu jagung	8	40
-Lainnya, kacang tanah, singkong dan cabe	3	15
Fungsi dan peranan ternak		
-Usaha pokok	3	15
-Usaha sampingan / sewaktu-waktu	13	65
-Tabungan	4	20
-Lainnya	2	10

Sumber : Adawiyah dan Rusdiana (2013)

Tabel 1. Memperllihatkan fungsi dan peran tanaman pangan sumber besarnya sumber pendapatan atau usaha pokok padi (90%), usaha sampingan jagung (40%), dan yang lainnya kacang tanah dan kacang tanah, singkong dan cabe sekitar (15%), sedangkan usaha ternak domba sebagai sumber pendapatan atau usaha pokok (15%), usaha sampingan (85%), sebagai tabungan (20%) dan yang lainnya sekitar (10%). Artinya usaha tanaman pangan dan ternak dapat menguntungkan petani, karena menambah pendapatan dan bisa sebagai tabungan.

Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian

1. Perbaikan Sistem Pertanian dan Pelayanan Penyuluhan

Rata-rata petani di Indonesia mengusahakan pertaniannya dalam skala yang kecil, sehingga petani masuk dalam kondisi kemiskinan. Sarana produksi yang mahal membuat petani semakin pasrah dengan kehidupannya dan hasil produktivitas tanaman yang diusahakannya. Usaha pertanian yang ada sekarang ini didominasi oleh ciri-ciri : (a) skala kecil, (b) modal terbatas, (c) teknologi sederhana, (d) sangat dipengaruhi musim, (e) wilayah pasarnya lokal , (f)



umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) Pasar komoditi pertanian sifatnya mono/oligopsoni sehingga terjadi eksploitasi harga pada petani. Untuk memulihkan pertanian di Indonesia perlu peningkatan perhatian terhadap bidang pertanian yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan negara berbasis pertanian yang strategis dan berjangka panjang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah selama ini, Pemerintah berupaya membuat berbagai kebijakan Pertanian namun program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien dan efektif.

2. Kebijakan Harga

Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak Negara dan biasanya digabung dengan pendapatan sehingga disebut kebijakan harga dan pendapatan (*price and income policy*). Dari segi harga dari kebijakan itu bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedangkan segi pendapatannya bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga untuk hasil-hasil pertanian supaya tidak merugikan petani atau langsung sejumlah subsidi tertentu bagi petani.

3. Kebijakan Subsidi Input

Kebijakan subsidi berpengaruh dalam menurunkan biaya produksi dan meningkatkan penawaran. Pemberian subsidi kepada petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Pemberian insentif tidak saja didasarkan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga karena desakan dan dorongan politik dan sosial. Bisa terjadi, pemberian subsidi dan dukungan harga bagi petani lebih didominasi oleh pertimbangan politik dan sosial. Sebagai contoh, berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan pupuk pada usahatani sawah telah berlebihan sehingga pemberian subsidi harga pupuk yang terus meningkat merupakan kebijakan yang tidak



tepat dipandang dari pertimbangan ekonomi. Namun demikian, pemberian subsidi pupuk yang terus meningkat mendapatkan dukungan politik dari parlemen maupun masyarakat luas karena dipandang bijaksana menolong petani yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Ada dua argumentasi yang melandasi pentingnya pemerintah memberikan bantuan kepada petani:

- 1) suatu kewajiban pemerintah membantu petani yang sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian sementara eksistensi produksi pertanian ke depan masih sangat diperlukan;
- 2) Melindungi petani miskin dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka memberdayakan mereka menjadi masyarakat yang mandiri mampu menghidupi dirinya dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke depan.

4. Kebijakan struktural

Kebijakan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara. Produk-produk pertanian kita baik komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan dan peternakan harus menghadapi pasar dunia yang telah dikemas dengan kualitas tinggi dan memiliki standar tertentu. Tentu saja produk dengan mutu tinggi tersebut dihasilkan melalui suatu proses yang menggunakan muatan teknologi standar. Indonesia menghadapi persaingan yang keras dan tajam tidak hanya di dunia tetapi bahkan di kawasan ASEAN.

5. Akses Permodalan

Sebagian besar petani Indonesia masih sangat lemah dalam mengakses sumber-sumber permodalan formal. Lemahnya kepemilikan modal disebabkan



oleh kecilnya skala usaha sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan akumulasi modal. Setiap selesai panen, hasil penjualan digunakan untuk membayar pinjaman sarana produksi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, lemahnya akses petani kecil terhadap sumber-sumber permodalan formal disebabkan oleh prosedur yang tidak sederhana dan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani (Sayaka dan Rivai 2011).

Menyelesaikan masalah permodalan ini pemerintah harus memihak kepada petani kecil dengan berupaya meringankan beban pembiayaan usahatannya dengan membuat kebijakan atau penunjukan lembaga keuangan yang menyalurkan modal kepada petani dengan syarat yang mudah.

6. Asuransi Pertanian

Sebagian besar usaha di bidang pertanian merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri terhadap bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim. Dengan terbitnya PERMENTAN RI No. 40/Permentan/SR.230/7/2015, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani yaitu meringankan kerugian akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dan/atau dampak perubahan iklim kepada petani, perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitasi asuransi pertanian.

7. Pelayanan Penyuluhan

Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional, kelembagaan penyuluh yang handal, materi penyuluhan yang terus-menerus mengalir, sistem penyelenggaraan penyuluhan yang benar serta metode penyuluhan yang tepat dan manajemen penyuluhan yang polivalen. Dengan demikian penyuluhan pertanian sangat penting artinya dalam memberikan modal bagi petani dan keluarganya, sehingga memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

petani dan keluarganya. Dalam perspektif jangka panjang para penyuluh pertanian tidak lagi merupakan aparatur pemerintah, akan tetapi menjadi milik petani dan lembaganya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan usahatani adalah petani tersebut, karena petani bertanggung jawab terhadap pengelolaan usahatani yang ia lakukan, apabila petani dapat melakukan pengelolaan secara baik maka usahatani yang ia lakukan juga dapat berkembang dengan baik, dan sebaliknya.

PENUTUP

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi besar dan sumber daya yang melimpah sehingga perlu digali dan dimanfaatkan dengan baik dan seharusnya dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Pada kenyataannya Indonesia masih bergantung pada impor, petani masih miskin, banyak usia produktif meninggalkan pertanian. Permasalahan yang terjadi dibagi tiga yaitu pertama aspek geografi, Indonesia berpotensi terkena dampak bencana alam. Kedua aspek kebijakan pemerintah, dimana kebijakan pemerintah kurang pro-petani dan ketiga, aspek program pemerintah seperti subsidi baik benih, pupuk dan bunga kredit pertanian yang kurang tepat sasaran. Kedaulatan pangan ini mampu tercapai apabila terdapat arah kebijakan yang tegas dan implementasi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi adalah mendukung peran petani dalam usahatannya dengan Kebijakan yang mendukung perbaikan sistem pertanian dan pelayanan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, CR dan S, Rusdiana. 2013. Kontribusi usaha tanaman pangan dan ternak. Seminar Nasional Balai Besar Tanaman Padi, Sukamandi, 12-13 Nopember. Prosiding. Hal. 142-149.
- Atmaja, SW. 2007. Pertanian organik, Integrasi ternak dan tanaman. Solo Pos. terbit Rabo Pon, 7 Maret 2007.
- BPS. 2012. Indonesia dapat menguatkan sub bidang pertanian Kementerian Pertanian Jakarta dalam angka sementara.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Demitria. D., Harianto, Sjafril.M., dan Nunung. 2006. Peran Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum Pascasarjana. IPB. Vol.33. No.3. Juli 2010. hal. 155-164.
- Dirjen SDA. 2006. Pewilayahan pertanian dalam luasan lahan. Dalam angka sementara. Kementan. Jakarta.
- Dewi, GP dan Satya FE. 2011. Urgensi Perubahan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 1, Juni 2011. Jakarta.
- Handaka, A. Hendriadi, dan T. Alamsyah. 2009. Perspektif pengembangan Mekanisasi Pertanian dalam Sistem Integrasi Ternak – Tanaman Berbasis Sawit, Padi dan Kakao. Prosiding Workshop Nasional Dinamika dan Keragaan Sistem Integrasi ternak-Tanaman. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Irawan, B dan Prayitno. (2012). Dampak Koversi Lahan Sawah di Jawa Terhadap Produksi Beras dan Kebijakan Pengedaliannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.
- Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, Jakarta: Litbang Kementerian Pertanian, 2010, hal.25.
- Kusnadi, U., B. Setiadi dan E. Juarini. 2006. Analisis Potensi Wilayah Peternakan di Pulau Sumatera. Prosiding Seminar Nasional Peternakan, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat, Kerjasama, Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang Mangatas, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Balai Besar Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Padang 11-12 September 2006. hal. 32-41.
- Landora Tarsif. 2011. Potensi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. <http://jembatan4.blogspot.co.id/artikel>, creating website, Jony, <https://www.blogger.com>. Copyright©2011. Catatan Kuliah Geografi - All Rights Reserved, diakses tgl, 22 Juli 2016.
- Permentan RI. No. 40/Permentan/SR.230/7/2015. Pelaksanaan Fasilitas Asuransi Pertanian.
- Rusdiana, S., B. Wibowo dan L. Praharani. 2010. Penyerapan sumberdaya manusia dalam analisis fungsi usaha penggemukan sapi potong rakyat di pedesaan. Prosiding Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner Puslitbangnak Bogor Oktober 2010. hal. 453-460.
- Rustan, M. 2006. Prospek pengembangan alat dan mesin pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian Kalimantan Selatan. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Balai Besar Pengkajian dan pengembangan Teknologi Pertanian Vol. 9 No. 2 Juli 2006. Selatan. 184-192.
- Susilowati, S.H., P.U.Hadi, Sugiarto, Supriyati, W K. Sejati, Supadi, A. K. Zakaria, T.B. Purwantini, D. Hidayat dan M. Maulana. 2009. Analisis indikator pembangunan pertanian dan perdesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. hal, 1-112.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Sarah. 2010. Peran petani didalam perekonomian Indonesia. Artikel ini disampaikan pada saresan mencari yang terbaik. Email-sarahs08.student.ipb.ac.id/artikel, diakses tanggal 22 Juli 2016.
- Suhariyadi.A.2014. Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Pendapatan Nasional. Univeritas Pembangunan Nasional veteran. *Skripsi*. [http://www.academia.edu/skripsi/pertanian agrotenolog B/](http://www.academia.edu/skripsi/pertanian_agrotenolog_B/) diakses tanggal 8 september 2016.
- Sayaka, B dan Rivai, RS. Peningkatan Akses Petani Terhadap Kredit Ketahanan Pangan dan energi. Diakses tanggal 2 September 2016.
http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Pros_MP_BSK_2011.pdf.
- Wahyunto. 2009. Lahan sawah Indonesia sebagai pendukung ketahanan pangan nasional. Inform. Pert. Vol. 18(2).



PEMAHAMAN PETANI TERHADAP PENGENDALIAN HAMA TIKUS TERPADU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Subagiyo dan Arlyna Budi Pustika

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

Jl. Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta

Email: subagiyosarbini@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemahaman petani terhadap pengendalian hama tikus terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2014 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul DIY seluas 57 hektar dengan melibatkan sebanyak 30 responden petani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan partisipatif on farm research, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman petani mengenai pengaruh serangan hama tikus terhadap hasil panen padi dan dampak serangan hama tikus saat tanam dan panen selama lima tahun terakhir. Peningkatan pemahaman petani secara postif meningkatkan pula: 1) pengetahuan petani terhadap serangan hama tikus; 2) pengetahuan petani terhadap pengelolaan hama tikus yaitu; 3) pengetahuan petani terhadap pengendalian tikus dan 4) teknik pengendalian hama tikus yaitu waktu pengendalian tikus terbaik adalah sepanjang musim tanam, namun waktu pengendalian paling efektif menurut petani responden yaitu pada saat memasuki stadia bunting. Perlu adanya organisasi pengendali tikus sawah di tingkat desa yang beranggotakan para petani yang tergabung dalam kelompok tani sehampanan dan pelaksanaan dikoordinasikan oleh aparat desa dan digerakkan oleh PPL setempat.

Kata Kunci: Pemahaman, Pengendalian, Hama, Tikus, Terpadu.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor penyebab tidak stabilnya produksi beras nasional adalah adanya serangan hama dan patogen penyebab penyakit tanaman. Kerusakan tanaman paling luas disebabkan oleh tikus sawah (*Rattus argentiventer*). Tikus sawah menyebabkan kerusakan tanaman padi pada beberapa fase pertumbuhan padi, mulai dari fase pembibitan hingga panen, bahkan di gudang penyimpanan beras. Kerusakan akibat serangan tikus sawah mencapai 10-15% per tahun di negara-negara di Asia (Singleton et al, 2003). Sedangkan di Indonesia kerusakan padi mencapai kurang lebih 152.000 ha per tahun (Direktorat Perlindungan Tanaman, 2012). Luas serangan tikus di Daerah



Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai kurang lebih 2.000 hektar dari rata-rata luas panen padi 150.000 hektar selama 7 tahun terakhir.

Pengendalian hama tikus di beberapa daerah termasuk di DIY belum adanya konsistensi dan belum semua petani mengetahui tata cara pengendalian tikus yang benar. Beberapa faktor penyebab kurang berhasilnya pengendalian tikus sawah oleh petani adalah: (1) kurangnya monitoring keberadaan tikus yang menyebabkan kurangnya upaya antisipasi pengendalian tikus; (2) kurangnya pengetahuan petani terhadap berbagai macam aspek biologi tikus dan teknologi pengendaliannya; (3) kegiatan-kegiatan pengendalian masih berjalan sendiri-sendiri, kurang dikoordinir dengan baik dan tidak berkelanjutan; (4) ketersediaan sarana pengendalian masih terbatas; (5) beberapa petani masih mempunyai persepsi “mistik” terhadap tikus.

Introduksi Model Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) yang dilaksanakan tahun 2013 telah terbukti efektif mengendalikan tikus (Arlyna *et al.*, 2013; Sudarmaji dan Arlyna, 2014a; Sudarmaji dan Arlyna, 2014b). PHTT adalah pengendalian tikus yang didasarkan pada pengetahuan (pemahaman) petani tentang ekologi tikus, pengendalian secara dini, intensif dan berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang tepat pada waktu yang tepat. Penerapan Model PHTT yang berdasar pada pemahaman petani tentang dinamika populasi tikus perlu dilakukan di beberapa daerah endemik serangan tikus sawah untuk memantapkan efektivitas pengendalian tikus sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman petani terhadap pengendalian hama terpadu tikus di DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2014 di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman dan Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, DIY dengan jumlah responden sebanyak 30 petani. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survai dan *partisipatif on farms research*, dengan wilayah kegiatan meliputi Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Moyudan dan Desa Argosari, Kecamatan Sedayu. Data primer diperoleh melalui



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pengamatan langsung di lapang dan wawancara langsung dengan petani, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi literatur dan instansi terkait. Data yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sasaran penelitian ini sebanyak 30 responden yang meliputi umur petani, pendidikan petani dan luas pemilikan lahan petani, untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Petani

Deskripsi	Petani	
	frekuensi	Persentase (%)
Umur petani		
< 23	0	0.00
23-33	1	3.33
34-44	4	13.33
45-55	19	63.33
>55	6	20.00
Jumlah	30	100
Pendidikan		
SD	13	43.33
SMP	9	30.00
SLA	7	23.33
Sarjana	1	3.33
Jumlah	30	100
Pemilikan Luas lahan		
0-1000	21	70.00
1001-2002	7	23.33
2003-3004	1	3.33
>3005	1	3.33
Jumlah	30	100

Sumber: Aalisis data primer (2014)

Umur petani didominasi kelompok umur 45-55 tahun 63,33%, kelompok umur ini merupakan umur produktif, sedangkan petani yang suduah kurang produkti yaitu diatas 56 tahun 20%.

Tingkat pendidikan responden mempunyai peran penting dalam menerima inovasi teknologi yang diperkenalkan, semakin tinggi tingkat



pengetahuannya, maka akan semakin mudah atau memahami bahkan menerima setiap inovasi yang diperkenalkan. Responden yang terlibat dalam kegiatan ini lebih didominasi oleh responden berpendidikan SD 43,33%, SMP 30,00%, SMA 23,33% dan yang berpendidikan tinggi hanya 3,33%.

Luas pemilikan lahan mempunyai peran penting dalam usahatani, semakin luas pemilikan lahan maka semakin bersemangat dalam mengelola usahatannya. Luas pemilikan lahan responden lebih didominasi oleh pemilikan antara 0-1000 m² 70%, hal ini tergolong lahan sempit < 2500 m² (0,25 ha

Pemahaman Petani Tentang Pengendalian Hama Tikus Terpadu (PHTT) Pengaruh Serangan Hama Tikus Terhadap Hasil Panen Padi Sawah Menurut Petani

Hasil panen petani selama 5 tahun terakhir kurang dari 2 ton/ha sebanyak 75,86% petani. Sedangkan sebanyak 24,14% petani hanya mampu memanen padi 2 – 4 ton/ha (Tabel 2). Walaupun semua petani responden selalu panen, namun hasil panennya tidak mencapai 5 – 6 ton/ha.

Tabel 2. Hasil panen petani selama 5 tahun terakhir.

Hasil Panen Selama 5 Tahun Terakhir	Persentase Responden (n = 30)	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
a. Tidak pernah panen	0,00	0.00
b. Kurang dari 2 ton per hektar	76,67	56.67
c. 2 – 4 ton per hektar	23,30	26.67
d. 5 – 6 ton per hektar	0,00	16.67
e. Lebih dari 6 ton per hektar	0,00	0.00

Dengan penerapan Model PHTT, petani yang menghasilkan 5-6 ton per hektar meningkat dari 0.00 menjadi 16.67% dan petani yang panen kurang dari 2 ton/ha berkurang dari 76.67% menjadi 56.67%.

Dampak Serangan Hama Tikus Saat Tanam dan Saat Panen Selama 5 Tahun Terakhir

Dalam 5 tahun terakhir petani responden yang membiarkan lahannya bero karena sikap pesimis terhadap hasil panen akibat serangan tikus sebanyak 3,33%. Petani yang menanam padi dua kali setahun dan berhasil panen sebanyak 73,33%, sedangkan 23,34% petani menanam padi sebanyak tiga kali setahun tetapi hanya panen dua kali setahun. Setelah penerapan Model PHTT, petani



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

yang tanam 2 kali dan panen 2 kali meningkat dari 73,33% menjadi 76,66% (Tabel 3).

Tabel 3. Banyaknya petani yang tanam dan panen selama 5 tahun terakhir

Petani Tanam Dan Panen Dalam Setahun (selama 5 Tahun Terakhir)	Persentase Responden (n=30)	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
a. Diberokan beberapa kali akibat gagal panen	3,33	0
b. Tanam 2 kali setahun dan panen 2 kali setahun	73,33	76,66
c. Tanam 3 kali setahun dan panen 2 kali setahun	23,34	23,34

Pengetahuan Petani Terhadap Serangan Hama Tikus

Sebanyak 93,10% petani menyatakan bahwa lahan sawahnya pernah terserang tikus, karena sebanyak 82,76% petani tidak melakukan gropyokan secara serentak. Disamping itu, pola tanam yang selalu padi - padi - padi (79,31%) juga menyebabkan serangan tikus cukup tinggi dikarenakan pola tanam tersebut juga selalu menyediakan pakan/inang bagi tikus. Hanya 6,90% petani berpendapat bahwa penyebab serangan tikus karena tikus itu sakti, tikus tidak dapat dikendalikan serta petani tidak tahu penyebab terjadinya serangan tikus.

Sebanyak 86,21% petani mengetahui adanya tikus disawah melalui jejak kaki tikus dan lubang - lubang yang menjadi sarang tikus yang terdapat pada lahan petani. Untuk melihat keberadaan tikus bisa dilihat dengan cara adanya kotoran tikus menjadi cara yang dilakukan oleh 44,83% petani. Menurut petani sejak tahun 1985 telah terjadi serangan tikus, pada tahun 2001 sebanyak 48,28% petani mulai merasakan dampak dari serangan tikus dihampan sawahnya. Akibat dari serangan tikus tersebut sangat berpengaruh terhadap turunnya hasil panen petani. Sebanyak 27,59% petani mengatakan bahwa akibat dari serangan tikus hasil panen turun 71-80%. Hanya 6,90% petani yang mengatakan bahwa serangan hama tikus menurunkan hasil panen kurang dari 10%.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 4. Pengetahuan petani terhadap serangan hama tikus

Uraian	Persentase Responden (n=30)	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
1 Lahan Pernah/Tidak Terserang Tikus		
a. Pernah	93,10	93,10
b. Tidak pernah	6,90	6,90
c. Tidak tahu	0,00	0,00
2 Penyebab Serangan Tikus		
a. Pola tanam padi – padi – padi	79,31	79,31
b. Varietas padi yang tidak tahan	34,48	23,33
c. Tidak serempak gropyokan	82,76	93,10
d. Tanam padi saling injen-injenan	72,41	93,10
e. Banyak semak belukar dan rumput	75,86	75,86
f. Tidak pernah melakuka pengemposan	44,83	44,83
g. Tidak pernah melakukan pengendalian	51,72	93,10
h. Tikus itu sakti dan pintar sehingga tidak boleh dibunuh	6,90	3,33
i. Tikus tidak bisa dikendalikan dengan cara apapun	6,90	0,00
j. Tidak tahu	6,90	0,00
3 Cara Mengetahui Adanya Tikus Sawah		
a. Kotoran tikus	44,83	44,83
b. Jejak kaki tikus	86,21	86,21
c. Lubang tikus	86,21	86,21
d. Anakan padi yang terpotong tikus	79,31	79,31
e. Tanaman padi yang rusak sehingga hampir botak bagian tengah sawahnya	65,52	65,52
4 Tikus Terbanyak Di Masa Lalu		
a. Lupa/tidak tahu	13,79	17,24
b. 1985-1990	3,45	6,90
c. 1991-1995	6,90	6,90
d. 1996 -2000	17,24	17,24
e. 2001-2005	48,28	48,28
f. 2006-2010	44,83	44,83
g. Tiga tahun terakhir	24,14	17,24
5 Presentase Kehilangan Hasil Akibat Serangan Tikus		
a. < 10%	6,90	6,90
b. 11 – 20%	0,00	0,00



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Uraian	Persentase Responden (n=30)	
	Sebelum	Sesudah
	PHTT	PHTT
c. 21 – 30%	3,45	3,45
d. 31 – 40%	3,45	3,45
e. 41 – 50%	17,24	17,24
f. 51 – 60%	20,69	20,69
g. 61 – 70%	20,69	20,69
h. 71 – 80%	27,59	27,59
i. 81 – 100%	17,24	27,59

Tabel 4 menunjukkan bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengendalian hama tikus adalah menyadarkan petani tentang pentingnya pengendalian tikus sebelum terjadi kerusakan tanaman padi dihamparannya. Petani harus diberi motivasi dan diberikan contoh tentang aktivitas pengendalian hama tikus terpadu untuk mengurangi intensitas kerusakan tanaman padi dan luas serangan tikus pada tanaman padi sehingga dapat menekan tingkat kehilangan hasil panen yang disebabkan oleh serangan tikus. Dengan adanya penerapan Model PHTT, petani memahami bahwa sistem tanam yang tidak serempak merupakan faktor penting yang menyebabkan tingginya serangan hama tikus sawah.

Pengetahuan Petani dalam Pengelolaan Hama Tikus

Sebagian besar petani (96,55%) berpendapat bahwa pengendalian tikus itu penting dimana sebanyak 65,52% petani yakin bahwa tikus dapat dikendalikan. Bahkan sebanyak 89,66% petani berpendapat bahwa tikus harus dikendalikan sepanjang musim tanam. Petani justru tidak setuju (72,41 %) jika tikus dikendalikan hanya pada saat musim bero atau setelah panen saja. Petani tidak yakin jika pengendalian tikus dengan bahan kimia itu aman bagi manusia, hewan dan lingkungan. Hal tersebut terlihat bahwa sebanyak 48,28 % petani tidak setuju dengan penggunaan bahan kimia untuk pengendalian tikus. Petani setuju (75,86%) bahwa pengendalian tikus dilakukan secara bersama – sama (serempak). Sebagian besar petani (86,21%) yakin bahwa dengan mengendalikan tikus, petani dapat meningkatkan hasil panen, dan petani juga yakin bahwa



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

hama tikus menjadi penyebab hilangnya hasil panen (86,21%) seperti yang tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Pengetahuan petani dalam pengelolaan hama tikus

Pengetahuan Petani Dalam Pengelolaan Tikus	Persentase Responden (n=30)					
	Setuju		Tidak setuju		Tidak Tahu	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
a. Pengendalian tikus adalah penting	96,55	100,00	0,00	0,00	3,45	0,00
b. Tikus dapat dikendalikan	65,52	100,00	3,45	0,00	31,03	0,00
c. Pengendalian tikus harus dilakukan sepanjang musim tanam padi	89,66	100,00	3,45	0,00	6,90	0,00
d. Tikus hanya dikendalikan saat musim bero atau setelah panen saja	6,90	0,00	72,41	100,00	17,24	0,00
e. Pengendalian tikus dengan bahan kimia adalah aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan	17,24	17,24	48,28	82,76	34,48	0,00
f. Dengan mengendalikan tikus, petani dapat meningkatkan hasil panen	86,21	100,00	3,45	0,00	10,34	0,00
g. Tikus dapat menyebabkan kehilangan hasil yang berat	75,86	100,00	3,45	0,00	20,69	0,00
h. Tikus dapat dikendalikan hanya jika petani bekerjasama dengan petani lainnya pada waktu yang sama (serempak)	75,86	100,00	6,90	0,00	17,24	0,00
i. Tikus dapat membawa penyakit dan menular ke manusia	82,76	100,00	0,00		17,24	0,00



Pengetahuan petani tentang pengelolaan hama tikus meningkat setelah adanya kegiatan penerapan Model PHTT. Semua petani setuju bahwa pengendalian tikus sangat penting, tikus dapat dikendalikan, kegiatan pengenalan harus dilakukan sepanjang musim tanam, dan tikus dapat dikendalikan hanya jika petani melakukan secara serempak bersama-sama dalam hamparan yang luas.

Pengetahuan Petani Terhadap Pengendalian Hama Tikus

Pada Tabel 6 terlihat bahwa sebagian besar petani setuju (89,66%; 68,97% dan 82,76%) bahwa penanaman secara serempak, praktek bero atau pergiliran tanaman dalam skala luas dalam waktu bersamaan serta pengaturan pola tanam dapat menurunkan populasi tikus. Petani juga setuju (82,76% dan 58,62%) dengan pernyataan bahwa pembersihan semak belukar dan rumput serta mempersempit ukuran pematang sawah juga dapat menurunkan jumlah populasi tikus.

Petani tidak setuju (86,21%) jika pengendalian tikus dilakukan secara sendiri – sendiri. Maka dari itu sebanyak 82,76% dan 82,76% petani memberikan respon positif jika pengendalian dilakukan secara serempak dengan gropyokan dapat menurunkan populasi tikus dan dilakukan sepanjang musim tanam padi.

Tabel 6. Pengetahuan petani dalam pengendalian hama tikus

Pengetahuan Petani Dalam Pengelolaan Tikus	Persentase Responden (n=30)					
	Setuju		Tidak setuju		Tidak Tahu	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
a. Pengendalian tikus adalah penting	96,55	100,00	0,00	0,00	3,45	0,00
b. Tikus dapat dikendalikan	65,52	100,00	3,45	0,00	31,03	0,00
c. Pengendalian tikus harus dilakukan sepanjang musim tanam padi	89,66	100,00	3,45	0,00	6,90	0,00
d. Tikus hanya dikendalikan saat musim bero atau setelah panen saja	6,90	0,00	72,41	100,00	17,24	0,00
e. Pengendalian tikus dengan bahan kimia adalah aman	17,24	17,24	48,28	82,76	34,48	0,00



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pengetahuan Petani Dalam Pengelolaan Tikus	Persentase Responden (n=30)					
	Setuju		Tidak setuju		Tidak Tahu	
	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT	Sebelum PHTT	Sesudah PHTT
f. bagi manusia, hewan, dan lingkungan						
g. Dengan mengendalikan tikus, petani dapat meningkatkan hasil panen	86,21	100,00	3,45	0,00	10,34	0,00
h. Tikus dapat menyebabkan kehilangan hasil yang berat	75,86	100,00	3,45	0,00	20,69	0,00
i. Tikus dapat dikendalikan hanya jika petani bekerjasama dengan petani lainnya pada waktu yang sama (serempak)	75,86	100,00	6,90	0,00	17,24	0,00
j. Tikus dapat membawa penyakit dan menular ke manusia	82,76	100,00	0,00		17,24	0,00

Teknik Pengendalian Hama Tikus Yang Telah Dilakukan Petani

Petani berpendapat bahwa waktu pengendalian tikus terbaik adalah sepanjang musim tanam (65,52%), namun waktu pengendalian paling efektif menurut petani yaitu pada saat memasuki stadia bunting. Untuk cara pengkoordinasian pengendalian tikus, petani menyatakan bahwa sebaiknya yang mengkoordinir adalah kelompok tani (72,41%). Sebanyak 72,41% petani juga merasa bahwa penanganan tikus yang tertangkap adalah dibunuh kemudian diproses untuk dijadikan pakan lele.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 7. Teknik pengendalian hama tikus yang telah dilakukan petani

Uraian kegiatan	Persentase Responden (%)	
	Sebelum PHTT	Setelah PHTT
1 Waktu Pengendalian Tikus yang paling efektif		
a Persemaian	62,07	93,33
b Anakan	34,48	62,07
c Bunting	48,28	93,33
d Pembungaan	27,59	62,07
e Pemasakan	27,59	62,07
f Sepanjang musim	65,52	93,33
2 Cara Paling Efektif Mengorganisir Pengendalian Tikus		
a Pemerintah Desa/Kecamatan	34,48	68,97
b Kelompok tani	72,41	93,33
c Staf penyuluh dari BPP	27,59	68,97
d Pengamat hama (POPT)	24,14	24,14
e Masyarakat petani (teman-teman)	68,97	93,33
3 Penanganan Tikus Yang Tertangkap		
a Dibunuh kemudian dibuang begitu saja	10,34	10,34
b Diberikan ke karantina	17,24	10,34
c Dibunuh kemudian diproses menjadi pakan lele	72,41	93,33
4 Dasar Memutuskan Cara Pengendalian Tikus		
a Pengalaman sendiri	31,03	20,69
b Pengalaman teman di dalam desa yang sama	17,24	20,69
c Pengalaman teman di lain desa dalam kecamatan yang sama	20,69	20,69
d Pengalaman teman dari kecamatan lain	10,34	55,17
e Pedagang	0,00	0,00
f Penyuluh BPP	34,48	34,48
g Pengamat Hama (POPT)	24,14	20,69
h Pelatihan yang pernah diikuti	55,17	93,33
i Informasi TV, radio, brosur	31,03	93,33
5 Cara Pengendalian Tikus Yang Telah Dilakukan		
a Gropyokan	100,00	100,00
b Rodentisida	55,17	6,90



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Uraian kegiatan	Persentase Responden (%)	
	Sebelum PHTT	Setelah PHTT
c Bubu perangkap	31,03	93,33
d Emposan dengan alat pengempos dan belerang	89,66	89,66
e Pembersihan semak belukar dan rumput	82,76	93,33
f Musuh alami (ular, burung hantu, musang/garangan)	72,41	55,17
g Alpostran	44,83	13,93
h Tembak langsung	13,79	3,45
i Suluh di malam hari	13,93	3,45
j TBS (Trap Barrier System)	6,90	93,33
k LTBS (Linier Trap Barrier System)	3,45	93,33
l Dibiarkan saja (tidak dikendalikan)	3,45	0,00

Tabel 7 memperlihatkan bahwa sebanyak 55,17% petani berpendapat bahwa sebagai dasar memutuskan cara pengendalian tikus adalah dari hasil pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh petani, baik pelatihan dari PPL, BPTP ataupun dari Dinas terkait. Petani mengendalikan tikus dengan berbagai cara pengendalian antara lain: gropyokan, penggunaan rodentisida, penggunaan alpostran, tembak langsung dan lain - lainnya. Petani sangat setuju dengan dilakukannya gropyokan.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman petani mengenai pengaruh serangan hama tikus terhadap hasil panen padi dan dampak serangan hama tikus saat tanam dan panen selama lima tahun terakhir. Peningkatan pemahaman petani secara postif meningkatkan pula: (1) pengetahuan petani terhadap serangan hama tikus; (2) pengetahuan petani terhadap pengelolaan hama tikus yaitu; (3) pengetahuan petani terhadap pengendalian tikus dan (4) teknik pengendalian hama tikus yaitu waktu pengendalian tikus terbaik adalah sepanjang musim tanam, namun waktu pengendalian paling efektif menurut petani responden yaitu pada saat



memasuki stadia bunting. Perlu adanya organisasi pengendali tikus sawah di tingkat desa yang beranggotakan para petani yang tergabung dalam kelompok tani sehamparan dan pelaksanaan dikoordinasikan oleh aparat desa dan digerakkan oleh PPL setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlyna B. Pustika, Sriwahyuni Budiarti, Charisnalia, Agung Iswadi, Eko Srihartanto, Fibrianty, Sarjiman, dan Sudarmaji. 2013. Pengendalian Hama Tikus Terpadu di Kabupaten Sleman, DIY. Prosiding Seminar Nasional 2013. Inovasi Teknologi Padi Adaptif Perubahan Iklim Global Mendukung Surplus 10 Juta ton Beras Tahun 2014. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. 1105-1116.
- Singleton, G. R., Sudarmadji, and S.S. Permana. 2003. An experimental field study to evaluate a trap barrier system and fumigation for controlling the rice field rat. *Rattus argentiventer* in rice crops West Java. *Crop Protection* 17(1):55-64.
- Sudarmaji dan Arlyna B. Pustika, 2014a. Ecologically-Based Rodent Management implementation in an area of chronically high rodent damage in Yogyakarta. Kumpulan abstract the 5th International Conference on rodent biology and management, China. Agustus 2014.
- Sudarmaji dan Arlyna B. Pustika, 2014b. Integrated Management to reduce rat damage at lowland rice crops in Godean Sleman Yogyakarta Indonesia. The 4th International Rice Congress. 27 Oct - 1 Nov 2014. Bangkok Thailand.



ANALISA DAYA SAING DAN PELUANG EKSPORT WORTEL DI KELOMPOK TANI KATATA, PANGALENGAN, BANDUNG, JAWA BARAT

Muhammad Arief Budiman

Faperta Universitas Padjadjaran, Jl Raya Sumedang KM.21, Bandung

muhammad@unpad.ac.id

ABSTRAK

Komoditas wortel telah lama menjadi andalan produksi salahsatu kelompok tani Katata yang berada di Pangalengan, Jawa Barat. Produksinya memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak hanya baik dalam pemenuhan lokal saja, namun juga terhadap pemenuhan Ekspor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui daya saing dan peluang ekspor dari dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani wortel di Kelompok Tani Katata. Penelitian dilakukan di Kelompok Tani Katata, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Data dianalisis dengan *Policy Analysis Matrix* (PAM), untuk menghitung keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan dampak kebijakan pemerintah dengan menggunakan harga aktual dan harga bayangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan wortel di Kelompok Tani Katata memiliki keunggulan kompetitif karena nilai PCR sebesar 0,062 atau PCR kurang dari satu ($PCR < 1$). Hal yang sama menunjukkan bahwa wortel memiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRC 0,060 atau DRC kurang dari satu ($DRC < 1$). Kebijakan pemerintah dinilai menghambat ekspor *output* dan adanya proteksi terhadap *input* lokal dibuktikan dengan nilai NPCO dan NPCI yang kurang dari satu. Secara keseluruhan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini masih belum mendukung dalam hal pengembangan dan peningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif perusahaan komoditas wortel di Kelompok Tani Katata.

Kata kunci: Daya saing, wortel, Ekspor, *Policy Analysis Matrix* (PAM)

PENDAHULUAN

Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan salah satu sentra produksi utama sayuran bermutu tinggi. Sayuran yang dibudidayakan di Pangalengan diantaranya adalah cabe, wortel, brokoli, tomat, sawi dan selada⁷. Menurut data statistik luas panen dari wortel di Kecamatan Pangalengan adalah 1.120,94 Ha dengan produksi 3.167,1 ton dan wortel merupakan salah satu produk unggulan yang ada di Kecamatan Pangalengan (BPS Kabupaten Bandung, 2015). Salah satu kelompok tani yang

⁷Press Release Humas Setda Kabupaten Bandung, "Pangalengan, Sentra Produksi Sayuran Bernilai Tinggi", diakses dari Pemerintah Kabupaten Bandung [Online]



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

membudidayakan hortikultura di Pangalengan adalah Kelompok Tani Katata yang berada di Desa Margamekar ini memiliki 125 anggota yang tersebar di 8 desa.

Tabel 1. Volume Ekspor Impor Wortel Tahun 2012 - 2014

Tahun	Volume (kg)		Selisih Ekspor Impor Wortel
	Ekspor	Impor	
2012	72750	63231841	-63159091
2013	22890	18598765	-18575875
2014	38310	41526990	-41488680

Sumber: Kementerian Pertanian(2015)

Dengan kondisi seperti itu, maka perlu diketahui: (1) Keadaan kelompok tani wortel dan daya saing wortel Kelompok Tani Katata, (2) Dampak kebijakan Pemerintah dilihat dari faktor input, output dan input-outputnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Kelompok Tani Katata yang dikaitkan dengan daya saing dan dampak kebijakan Pemerintah terhadap komoditas wortel. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan ketua dan anggota Kelompok Tani Katata, sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas terkait dan studi kepustakaan. Teknik pengambilan responden dilakukan secara *purposive* terhadap 10 orang petani anggota Kelompok Tani Katata. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dimasukkan ke dalam *Policy Analysis Matrix* (PAM) *table*.

Tabel 2. Matriks Analisis Kebijakan (PAM)

Uraian	Penerimaan <i>Output</i>	Biaya <i>Input</i>		Keuntungan
		<i>Tradable</i>	<i>Non Tradable</i>	
Harga <i>Privat</i>	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Divergensi	I = A - E	J = B - F	K = C - G	L = D - H

Sumber :Pearson *et al.* (2005)

Keterangan :

Private Profitability (D) = (A) - (B + C) *Social Profitability* (H) = (E) - (F + G)



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

$$\begin{aligned}
 \text{Social Profitability (H)} &= (E) - (F + G) & \text{Output Transfer (I)} &= (A) - (E) \\
 \text{Input Transfer (J)} &= (B) - (F) & \text{Factor Transfer (K)} &= (C) - (G) \\
 \text{Net Transfer (L)} &= (D) - (H) = I - (J + K) & \text{Private Cost Ratio (PCR)} &= C / (A-B) \\
 \text{Dom Resou Cost Ratio(DRCR)} &= G / (E-F) & \text{Nom Protect Coef Output(NPCO)} &= A/E \\
 \text{Nom Protect Coef Input(NPCI)} &= B / F & \text{Effective Protect Coef(EPC)} &= (A-B) / (E-F) \\
 \text{Profitability Coefficient(PC)} &= D/H & \text{Subsidy Ratio to Producers(SRP)} &= L / E
 \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daya saing wortel di Kelompok Tani Katata akan tergambar melalui hasil perhitungan dari PAM, yaitu seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Policy Analysis Matrix

Komponen	Pendapatan	Input		Keuntungan
		Tradable	Non-Tradable	
Privat	126312500	6806960	7420466	112085074
Sosial	131656276	8242505	7420466	115993305
Divergensi	(5343776)	(143545)	0	(3908231)

Private Profitability (PP) untuk perusahaan komoditas wortel di Kelompok Tani Katata adalah Rp 112.085.073,00 hal ini menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh petani lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Terlihat jelas bahwa kegiatan usahatani ini menguntungkan secara finansial sehingga layak untuk diusahakan. *Private Cost Ratio (PCR)* dari perusahaan komoditas wortel adalah 0,062. Nilai PCR 0,062 dapat diartikan bahwa untuk mendapatkan nilai tambahan *output* sebesar satu satuan diperlukan biaya tambahan faktor domestik adalah 0,062.

Secara keseluruhan usahatani wortel di Kelompok Tani Katata menguntungkan dari sisi finansial maupun ekonomi sehingga sangat direkomendasikan untuk diusahakan. Selain itu juga memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dilihat dari nilai $PCR < 1$ dan $DRC < 1$.



Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Wortel Di Kelompok Tani Katata

Hasil dari perhitungan *Policy Analysis Matrix* (PAM) pada Tabel 4, dapat diketahui dampak kebijakan pemerintah terkait usahatani wortel di Kelompok Tani Katata sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Dampak Kebijakan Pemerintah Pada Usahatani Wortel di Kelompok Tani Katata

Jenis Kebijakan	Indikator	Nilai
Kebijakan pada <i>Output</i>	OT	-5.343.776,6
	NPCO	0,96
Kebijakan pada <i>Input</i>	IT	-1.435.545,185
	NPCI	0,83
	FT	0
	EPC	0,97
Kebijakan <i>Input-Output</i>	NT	-3.908.231,5
	PC	0,97
	SRP	-0,03

Secara keseluruhan, analisis dampak kebijakan terhadap *output* wortel di Kelompok Tani Katata mengindikasikan bahwa adanya intervensi pemerintah yang menyebabkan perbedaan keuntungan petani dibandingkan dengan tidak adanya intervensi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah membuat keuntungan petani lebih rendah dibandingkan keuntungan yang diterima seharusnya. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah terhadap *output* tidak mendukung peningkatan keunggulan kompetitif komoditas wortel di lokasi penelitian.

Input transfer untuk pengusaha wortel di Kelompok Tani Katata adalah Rp 1.435.545,185 yang bernilai negatif. Hal ini disebabkan oleh biaya *inputtradable* dalam harga *privat* lebih rendah dibandingkan dengan biaya *inputtradable* dalam harga sosialnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya implisit subsidi atau transfer sumberdaya ke dalam sistem. Nilai NPCI dari pengusaha wortel di Kelompok Tani Katata adalah 0,83. Hal ini berarti terdapat kebijakan subsidi atas *inputtradable* yang menyebabkan harga domestik lebih rendah dibandingkan dengan harga dunia dan seolah-olah disubsidi oleh kebijakan yang ada. Nilai *factor transfer* untuk pengusaha wortel adalah 0. Hal ini berarti tidak adanya distorsi kebijakan pemerintah pada faktor domestik. Hal ini dikarenakan faktor



domestik seperti tenaga kerja, modal dan lahan dianggap sama nilainya baik pada harga sosial maupun harga privat.

Nilai untuk *Effective Protection Coefficient* (EPC) perusahaan wortel adalah 0,97 yang artinya tidak adanya perlindungan atau proteksi pemerintah terhadap usahatani wortel di Kelompok Tani Katata. Hal ini terlihat dari harga wortel domestik lebih rendah dibandingkan dengan harga wortel dunia. Nilai yang didapat untuk *net transfer* adalah Rp 3.908.231,415 per hektar yang bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa produsen kehilangan keuntungan dengan adanya kebijakan pemerintah yang diterapkan pada *input* dan *output*.

Nilai *Profitability Coefficient* (PC) untuk perusahaan wortel menunjukkan tidak adanya proteksi atau perlindungan dari pemerintah terhadap pelaku usahatani wortel di Katata yaitu 0,97. Nilai ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah membuat kehilangan keuntungan yang diperoleh petani lebih tinggi dibandingkan tanpa adanya kebijakan. Nilai PC dapat menjadi indikator yang menunjukkan dampak insentif dari semua kebijakan *output*, kebijakan *input* asing dan *input* domestik (*net policy transfer*).

Nilai *Subsidy Ratio Producers* (SRP) menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh untuk perusahaan wortel di lokasi penelitian senilai - 0,03. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk memproduksi. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum menguntungkan bagi pengembangan dan peningkatan daya saing wortel.

PENUTUP

1. Bagi perusahaan wortel di Kelompok Tani Katata memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang hampir sama. Untuk keunggulan komparatifnya dilihat dari nilai *Domestic Resources Cost* (DRC) sebesar 0,060 sedangkan untuk keunggulan kompetitifnya dilihat dari nilai *Privat Cost Ratio* (PCR) sebesar 0,062. Sehingga diindikasikan bahwa wortel ini memiliki daya saing dan peluang ekspor serta mampu bersaing



dengan komoditi sejenis baik impor yang terdapat dalam negeri maupun mancanegara.

2. Kebijakan pemerintah baik pada kebijakan *output*, *input* maupun *input-output* belum mampu mendukung pengusaha wortel dalam pengembangan dan peningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif wortel di Kelompok Tani Katata. Hal ini dapat dilihat dari nilai NPCO yang didapat sebesar 0,96 yang berarti ada kebijakan pemerintah yang menghambat ekspor output berupa pajak. Sedangkan untuk nilai NPCI yang didapat sebesar 0,83 yang berarti adanya proteksi terhadap *input* lokal dan mengindikasikan adanya subsidi terhadap *input tradabel* sehingga petani mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya *input tradabel* sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Kecamatan Pangalengan*. Statistik Kabupaten Bandung
- Cahyono, Bambang. 2002. *Wortel; Teknik Budidaya dan Analisis Usaha Tani*. Yogyakarta : Kanisius
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2013. *Nilai PDB Hortikultura di Indonesia Tahun 2010-2012*. Dirjen Hortikultura : Jakarta
- Direktorat Jenderal Hortikultura dan Pusdatin (2015). *Nilai PDB Hortikultura di Indonesia Tahun 2010-2014*. Dirjen Hortikultura : Jakarta
- Kementerian Pertanian. 2015. *Ekspor Komoditi Pertanian Berdasarkan Negara Tujuan*. [Online]
<http://aplikasi.pertanian.go.id/eksim2012/hasil eksporNegara.asp>.
- Kuraisin, Vivin. 2006. *Analisis Daya Saing dan Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditi Susu Sapi*[Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Maftuhah, Gina Nur. 2011. *Wortel Impor Kurang di Sukai Masyarakat*. [Online], (<http://economy.okezone.com/read/2011/12/26/320/547327/wortel-impor-kurang-disukai-masyarakat>)
- Mulyahati, A. 2005. *Saluran Pemasaran Wortel di Kawasan Agropolitan Cianjur*. [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- Pearson, S., C. Gotsch and S. Bahri. 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Terj. Sjaiful Bahari (ed). Jakarta: Buku Obor.
- Pusat Data dan Informasi. 2015. *Nilai PDB Hortikultura di Indonesia Tahun 2013-2014*. Pusdatin Kementan : Jakarta
- Rukmana, R. 1995. *Bertanam Wortel*. Yogyakarta : Kanisius.



KAJIAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PETANI DI JAWA TENGAH

Sapja Anantanyu, Suwarto, Sutarto, Arip Wijianto

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta

email: sap_anan@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan pertanian di Indonesia pada saat ini diarahkan pada upaya mencapai ketahanan pangan, meningkatkan taraf hidup dan kemandirian petani. Dukungan penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian tidak diragukan lagi, namun perkembangan terakhir menunjukkan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten sehingga keefektifan peran kelembagaan pelaksana penyuluhan pertanian di daerah belum memadai. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kelembagaan penyuluhan pertanian di berbagai tingkatan, yaitu: provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil lokasi kabupaten, yaitu: Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Masing-masing kabupaten diambil dua kecamatan, dan masing-masing kecamatan diambil dua desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan melalui: wawancara terstruktur dengan responden, wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci, dan FGD yang melibatkan berbagai stakeholder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah didasarkan pada kebijakan daerah yang beragam. Berdasarkan penilaian struktur, tugas, dan fungsi memperlihatkan memperlihatkan pada parameter peraturan, personil, kebijakan, dan program berada pada kategori memadai, sedangkan strategi dan pengembangan jejaring kurang memadai. Keberadaan dan peran kelembagaan diakui oleh *stakeholder* memberikan kontribusi pada pengembangan pertanian, kemampuan memfasilitasi pelaku utama kurang memadai.

Kata kunci: kebijakan, kelembagaan, penyuluhan pertanian, peran

PENDAHULUAN

Kebijakan untuk mencapai swasembada pangan menjadi agenda pemerintah Indonesia pada saat ini. Keberadaan kelembagaan penyuluhan mempunyai peran yang strategis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengisyaratkan dan menuntut dilakukannya perubahan tatanan kelembagaan penyuluhan; baik struktur, tugas dan fungsi dari pusat sampai



daerah agar penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan berjalan secara efektif dan efisien.

Perubahan dalam tatanan penyuluhan pertanian sangat diperlukan, mengingat peran dan fungsi penyuluhan sangat strategis dalam mendorong pembangunan pertanian, bukan saja untuk peningkatan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat baik sasaran utama maupun sasaran antara. Selain itu, peran penting lainnya adalah terus berupaya membangun kualitas sumberdaya manusia sasaran penyuluhan secara lebih demokratis, partisipatif, berkelanjutan, serta adil dan bertanggung jawab. Kenyataannya di lapangan belum semua daerah memiliki pemaknaan yang sama tentang kedudukan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian.

Distorsi pemaknaan dan pengertian terhadap kedudukan dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian yang berbeda tersebut menyebabkan beragamnya bentuk kedudukan dan struktur kelembagaan penyuluhan di daerah, sehingga pelaksanaan penyuluhan pertanian masih banyak mengalami peran dan fungsi yang tidak optimal, sehingga kurang berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan yang diamanahkan oleh UU No. 16 Tahun 2006.

Keberadaan kelembagaan lokal dalam pembangunan perdesaan dan pertanian sangat diperlukan (Mosher, 1969). Urgensi kelembagaan untuk kegiatan-kegiatan: pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur pedesaan, pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan pertanian, dan usaha non-pertanian. Uphoff (1986) mengkategorikan kelembagaan lokal, termasuk kelembagaan pertanian, salah satunya ke dalam 'administrasi lokal' (*local administration*); agen dan staf lokal dari departemen-departemen pusat, yang bertanggung jawab secara hirarkis. Kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia keberadaannya mulai dari pusat sampai tingkat desa. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006, kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Paper ini bertujuan mendiskripsikan kelembagaan penyuluhan



pertanian pemerintah di berbagai tingkatan, yaitu: provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif (Neuman, 1994), dengan penggalan data dilakukan dengan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah, dengan mengambil dua lokasi kabupaten, yaitu: Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Lokasi kabupaten ditentukan berdasarkan keragaan kabupaten dalam menerapkan kelembagaan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, demikian juga lokasi kecamatan dan desa. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan ada 4, yaitu: di Kecamatan Teras dan Wonosegoro untuk Kabupaten Boyolali, serta Sukodono dan Ngrampal untuk Kabupaten Sragen. Masing-masing kecamatan diambil dua desa, sehingga total desa yang diambil adalah 8 desa.

Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui: wawancara terstruktur dengan responden, dan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci, dan FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Data penelitian mencakup: kondisi kelembagaan; struktur, fungsi, dan peran; manajemen; serta pola-pola hubungan. Responden berjumlah 89 orang merupakan *stakeholder* dari berbagai tingkatan kelembagaan. pimpinan lembaga, penyuluh pertanian, komisi penyuluhan, Gapoktan, Pusluhdes, petani (pelaku utama), dan *stakeholder* yang lain. Analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan profil dan peran kelembagaan, profil penyuluh, serta persepsi pelaku pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah pada saat penelitian adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) yang berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Lembaga ini menjalankan



program kerja yang mengacu pada: Nawa Cita Jokowi-Jk (Point 7), yaitu: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik; dan Program Unggulan Pembangunan Jawa Tengah 2016 (Point 4 dan 10), yaitu: Pengembangan desa mandiri menuju kedaulatan pangan dan ijo royo-royo.

Kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota dalam kenyataan bervariasi dalam nomenklatur dan dasar pembentukannya. Dari pemerintahan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah terdapat kelembagaan penyuluhan pertanian yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah (Perda) sebanyak 16 kabupaten/kota, berdasarkan peraturan bupati/walikota sebanyak 14 kabupaten/kota, dan terdapat 4 kabupaten/kota yang belum ada kelembagaan penyuluhan pertanian. Pemerintah Kabupaten Sragen telah membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 tahun 2008. Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja badan pelaksanaan penyuluhan kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen No 43/2009.

Kabupaten Boyolali mempunyai kebijakan berbeda, kelembagaan penyuluhan pertanian digabung dengan Badan Ketahanan Pangan sehingga menjadi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Kelembagaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Peraturan Bupati Boyolali No. 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Boyolali yang bertugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan disebut Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. Kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan relatif sama. Dari lokasi 4 kecamatan menunjukkan struktur organisasi yang hampir sama, keragaan terdapat pada ketersediaan sumberdaya penyuluh, bangunan kantor dan sarana prasarana yang dimiliki. Jumlah



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

penyuluh sebanding dengan jumlah desa, sedangkan rasio Penyuluh PNS dengan Penyuluh THL bervariasi, di BPP Teras terdapat 3:5, Wonosegoro 4:4, Ngrampal 5:4, Sukodono 4:4 orang. Secara keseluruhan, tenaga fungsional penyuluh di Kabupaten Sragen terdiri dari 84 penyuluh PNS dan 88 orang Penyuluh THL dengan rasio penyuluh dan desa yaitu 1,21 dengan jumlah desa adalah 208 desa. Di Kabupaten Boyolali terdiri dari 63 penyuluh PNS dan 84 orang Penyuluh THL. Rasio penyuluh dan desa yaitu 1,81 dengan jumlah desa.

Keberadaan komisi penyuluhan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan belum dapat berperan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan komisi penyuluhan secara struktur sudah ada tetapi aktivitas dan kontribusi yang diberikan belum memadai.

Struktur, Tugas, dan Fungsi Kelembagaan

Struktur, tugas, dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian berdasarkan penilaian responden dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian Struktur, Tugas dan Fungsi Kelembagaan

Aspek	Penilaian (orang)		
	Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
1. Perda atau peraturan lain	57	14	8
2. Personil	42	33	10
3. Kebijakan	46	19	5
4. Strategi	36	38	1
5. Program	58	18	2
6. Pengembangan jejaring	37	39	3

Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa struktur, tugas dan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian memperlihatkan pada parameter peraturan, personil, kebijakan, dan program berada pada kategori memadai, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan penyuluhan dianggap mampu memberikan dukungan kepada penyuluh dan stakeholder yang lain. Strategi dan pengembangan jejaring berada pada kategori kurang memadai. Strategi



penyuluhan selama ini relatif kurang dikembangkan, pendekatan penyuluhan masih bersifat konvensional dan belum mampu keluar dari cara-cara lama sehingga hasil penyuluhan kurang terlihat. Jejaring/kerjasama dalam upaya menjalankan fungsi-fungsi penyuluhan belum dikembangkan secara optimal. Kebijakan dan program penyuluhan sudah berjalan melalui mekanisme yang mengakomodasi kepentingan stakeholder sektor pertanian. Namun kebijakan ini hanya bersifat sementara, parsial dan kurang memadai.

Peran Kelembagaan Penyuluhan

Peran kelembagaan penyuluhan pertanian dalam mendukung kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Penilaian Peran Kelembagaan

Aspek		Derajat		
		Memadai	Kurang memadai	Tidak memadai
a.	Kesesuaian struktur	74	6	0
b.	Tugas/fungsi	72	8	0
c.	Manfaat	68	10	1
d.	Memfasilitasi			
-	Saprotan	32	46	1
-	Proses produksi	29	46	5
-	Pengolahan	28	43	9
-	Pemasaran	19	52	11
-	Pengembangan jaringan	15	53	13
-	Pemodalan	11	61	9

Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa peran kelembagaan penyuluhan terhadap pelaku utama dilihat dari aspek kesesuaian struktur, tugas/fungsi dan manfaat berada pada kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan peran kelembagaan diakui oleh *stakeholder* memberikan kontribusi pada pengembangan pertanian. Dilihat dari aspek memfasilitasi, peran kelembagaan penyuluhan terhadap pelaku utama dalam kategori kurang memadai. Peran kelembagaan penyuluhan pertanian dilihat pada fungsi-fungsi memfasilitasi: proses produksi, pengolahan, pemasaran, pengembangan jaringan, dan permodalan sebagian besar berada pada kategori kurang memadai. Kurang memadainya peran kelembagaan penyuluhan dalam memfasilitasi



pelaku utama karena berbagai faktor, mencakup: kompetensi penyuluh, administrasi, sarana prasarana, kebijakan pemerintah, dan koordinasi.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Persimpangan Jalan

Dengan keluarnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah terjadi perubahan besar dalam tata kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan penyuluhan pemerintah. Sesuai Undang-Undang ini, penyuluhan perikanan dikembalikan ke pusat, penyuluhan kehutanan ke provinsi, sedangkan penyuluhan pertanian menjadi tanggung jawab semua level secara konkurensi. Undang-Undang ini mementahkan Perpres Nomor 154 Tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang belum lama terbit. Terdapat kondisi paradoks antara Undang-Undang No. 16 tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Diakui bahwa semangat dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini adalah memaksimalkan peranan pemerintah daerah yang mampu melaksanakan kewenangannya yang berorientasi pelayanan dasar.

Pada saat ini berlangsung proses transisi kelembagaan di tingkat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Selama ini keberadaan kelembagaan penyuluhan di daerah belum berubah, namun sejalan dengan waktu upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan kelembagaan penyuluhan di berbagai daerah selalu diusahakan oleh penyuluh-penyuluh di daerah. Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor: 02/SM.600/M/1/2015 kepada Gubernur seluruh Indonesia perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian menyatakan bahwa sambil menunggu berbagai kelengkapan peraturan, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap dilaksanakan sesuai Undang-Undang No. 16 tahun 2006 karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2014.

PENUTUP

Keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, selama ini telah memberikan kontribusi dalam



mendukung pembangunan pertanian melalui pelaksanaan program penyuluhan, namun dalam menjalankan perannya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi penyuluhan masih kurang atau belum memadai. Upaya-upaya penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian semestinya sangat diperlukan, kebijakan yang dihasilkan pemerintah tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa kelembagaan yang melayani kepentingan petani tidak diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- _____. 2013. Jawa Tengah Dalam Angka 2012. BPS Jawa Tengah. Semarang.
- _____. 2014. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Mosher, Arthur T. 1969. *Creating A Progressive Rural Structure: To Serve a Modern Agriculture*. The Agricultural Development Council, Inc. New York.
- Neuman, W.L. 1994. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Second Edition. Allyn and Bacon. Boston.
- Uphoff, Norman Thomas. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.



PERAN KELEMBAGAAN KELOMPOK DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN SAPI POTONG DI KABUPATEN SLEMAN

Sri Budhi Lestari

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
sribudhilestari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelembagaan kelompok peternak dalam mendukung pengembangan kawasan peternakan sapi potong. Penelitian dilakukan pada bulan April dan Juli tahun 2016, di kelompok peternak Andini Mulyo Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, karena lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pendampingan pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, sejauh mana peranannya dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan peternakan sapi potong di wilayahnya. Parameter yang diamati meliputi (1) kinerja kelompok dalam mengembangkan unit usaha; (2) kapasitas kelompok dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Evaluasi dilakukan pada saat sebelum dan sesudah pendampingan dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara diskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok telah mengembangkan unit usaha yang semula hanya ada 1 unit usaha, yakni usaha pembibitan sapi potong berkembang menjadi 3 unit usaha yaitu unit pengolahan dan pemasaran pupuk organik padat dan unit pemasaran pakan konsentrat. Demikian juga kapasitas kelompok dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar, ternyata kelompok mampu melakukan dengan baik. Untuk meningkatkan peran kelembagaan kelompok dalam mendukung pengembangan kawasan peternakan sapi potong, masih diperlukan pendampingan secara masif.

Kata kunci: Kelembagaan, kawasan, sapi potong, Sleman.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan program swasembada daging sapi adalah perkembangan populasi dan perbaikan produktivitas sapi potong, serta peningkatan produksi daging sapi sehingga pendapatan dan kesejahteraan peternak, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan usaha peternakan dapat terwujud. Populasi sapi potong di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 53.022 ekor yang tersebar di 17 wilayah kecamatan, dengan pemeliharaan relatif sederhana, sehingga produktivitasnya belum sesuai harapan (Dipertahut Kabupaten Sleman, 2015). Strategi untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi antara lain dengan



rekayasa teknologi untuk memperpendek jarak beranak kurang dari 14 bulan; S/C kurang dari 1,5; kematian pedet pra sapih dibawah angka 5%; penambahan bobot badan harian pra sapih mencapai 0,4 kg untuk sapi PO dan lebih dari 0,8 kg untuk sapi silangan (Puslitbangnak, 2012).

Populasi sapi potong di Kabupaten Sleman, tercatat sebanyak 53.022 ekor yang tersebar di 17 wilayah kecamatan. Seperti halnya pada ranah nasional, beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain kondisi reproduksi sebagian besar sapi betina produktif adalah angka S/C (service per conseption) lebih dari 3, CI (calving interval) lebih dari 8 bulan serta body condision score antara 1-3; untuk penggemukan, penambahan berat harian masih dibawah 0,7kg. Permasalahan non teknis terutama pada organisasi kelembagaan kelompok antara lain peran dan fungsi pengurus belum optimal, kaderisasi relatif masih kurang, pemupukan modal relatif masih lemah; demikian juga gangguan reproduksi pada sapi betina masih relatif tinggi serta keterbatasan penyediaan hijauan pakan pada musim kemarau (BPTP Yogyakarta, 2014; Dinas Pertanian, 2014; Dipertahut Kabupaten Sleman, 2015)

Memperhatikan permasalahan di tingkat nasional dan kondisi factual yang ada di tingkat peternak, diperlukan kelembagaan peternak yang mampu berfungsi sebagai kelas belajar bagi anggotanya; sebagai wahana kerjasama dan mampu berfungsi sebagai unit produksi (Permentan No 82/Permentan OT.140/8/2013). Dengan demikian, kelembagaan kelompok peternak ini mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sehingga dapat meningkatkan skala usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga dapat memberikan nuansa baru dalam suatu kawasan peternakan sapi potong. Hal ini tentunya membutuhkan kepedulian dari pihak-pihak yang kompeten terutama dari institusi/lembaga terkait untuk ikut andil dalam upaya mengembangkan kapasitas kelompok sebagai unit usaha sekaligus dapat mendekatkan kelompok dalam memperoleh peluang kerjasama guna mengembangkan usaha budidaya sapi potong di satu kawasan tertentu. Seberapa besar kemampuan kelompok dalam mengambil peran guna mendukung pengembangan kawasan sapi potong tersebut.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelembagaan kelompok dalam mendukung pengembangan kawasan sapi potong ditinjau dari aspek pengembangan unit usaha dan peranannya dalam menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan sapi potong di wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kelembagaan kelompok peternak dalam mendukung pengembangan kawasan peternakan sapi potong. Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Juli tahun 2016, di kelompok peternak Andini Mulyo Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, karena lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pendampingan pengembangan kawasan sapi potong di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan mengamati dan mencatat segala sesuatu pada kondisi sebelum dan sesudah pendampingan berlangsung.

Parameter yang diamati meliputi (1) peran kelompok dalam mengembangkan unit usaha; (2) kapasitas kelompok dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara diskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik peternak dan kelembagaan kelompok peternak.

Kelompok Andini Mulyo beranggotakan 21 orang dengan populasi ternak sebanyak 63 ekor. Karakteristik peternak dan kelembagaan kelompok Andini Mulyo, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik peternak dan kelembagaan kelompok peternak Andini Mulyo di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman

Karakteristik peternak		
Umur (th)	Pendidikan (th)	Pengalaman beternak (th)
< 41 = 0 %	6 = 47,62%	< 10 = 71,42%
41 – 50 = 42,86%	9 = 19,04%	10 – 15 = 4,77%
51 – 60 = 42,86%	12 = 28,57%	➤ 15 = 23,81%



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

➤ 60 = 14,28%

➤ 12 = 4,77%

Karakteristik kelembagaan kelompok		
Item	Sebelum pendampingan	Sesudah pendampingan
Jumlah anggota	21 orang	22 orang
Pertemuan (kehadiran)	85%	90%
Administrasi	Kurang lengkap	Cukup lengkap
Unit usaha	1 (pembesaran pedet)	3 (penjualan pedet, POP, konsentrat,
Tamu lembaga	Petugas peternakan setempat (PPL, tenaga medis Puskesmas setempat)	PPL, Puskesmas, ESDM Sleman, Dipertahut Sleman, kelompok peternak se Kecamatan, DPR-RI

Sumber: Data Primer Diolah, 2016.

Tabel 1 menunjukkan bahwa anggota kelompok peternak sebagian besar pada kategori produktif, yaitu berkisar antara 41-60 tahun. Umur produktif ini cenderung seseorang lebih matang dan selektif dalam bertindak, walaupun tingkat pendidikannya relatif rendah yakni hanya pada tingkatan sekolah dasar. selektif dalam menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan. Terkait dengan kegiatan pendampingan kawasan peternakan sapi potong, semua anggota kelompok berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi yang dilakukan setiap akhir bulan selama pendampingan berlangsung.

Kapasitas Kelompok dalam Mengembangkan Unit Usaha

Salah satu fungsi kelompok adalah mengembangkan unit usaha atau unit produksi dari anggotanya, dan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas (Permentan, 2007).

Memperhatikan kapasitas kelompok dalam mengembangkan unit usaha, dapat dikatakan cukup baik. Semula hanya mampu melakukan satu jenis usaha yakni pembesaran pedet jantan sampai dengan umur layak jual. Pada kondisi saat ini, kelompok mampu mengembangkan usahanya dengan menggunakan uang simpan pinjam untuk pengadaan konsentrat guna mencukupi kebutuhan para anggotanya. Demikian juga dalam pengelolaan unit usaha pembuatan



POP (pupuk organik padat), kelompok mampu memproduksi 6-8 ton/bulan dengan pemasaran ke luar wilayah pedesaan, bahkan di luar wilayah kecamatan. menjalin kerjasama pemasaran dengan kelompok-kelompok yang berada di luar wilayah desanya bahkan di luar wilayah kecamatan serta perguruan tinggi Universitas Pembangunan Nasional di Yogyakarta. Jika permintaan POP melebihi dari kemampuan ketersediaan limbah, kelompok berupaya untuk menjalin kerjasama dengan kelompok peternak lain yang berada disekitarnya.

Kapasitas Kelompok Peternak dalam Menjalinkan Kerjasama dengan Pihak Luar

Kapasitas kelompok untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak lain, terutama dari aspek pemasaran POP sudah terbangun, yaitu di kelompok Andini Mulyo (Sleman) mampu bekerjasama dengan GAPOKTAN Desa Purwomartani untuk mendukung GP-PTT padi. Keterbatasan bahan baku kotoran sapi di Andini Mulyo, menjadikan pemikiran pengurus untuk meningkatkan kerjasama dengan kelompok-kelompok peternak yang ada disekitar, agar produksi POP dapat mencukupi kebutuhan pupuk organik para petani yang tergabung dalam wadah GAPOKTAN di desa tersebut Pendampingan untuk meningkatkan jejaring kerjasama kelompok dengan pihak luar, masih diperlukan.

Kapasitas kelompok dalam upaya menarik perhatian masyarakat, telah melakukan pendekatan kepada perangkat desa setempat untuk memperoleh kesempatan berdialog dengan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya guna memperoleh pejuantan unggul terutama untuk menangani permasalahan reproduksi sapi betina yang mengalami Inseminasi Buatan secara berulang.

Merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan, bahwa sebagai unit produksi kelompok mampu memperkuat, memperlancar dan sekaligus mendorong pengembangan produksi yang dikelola secara bersama dalam satu kelompok. Hal ini selaras dengan pedoman kelompok sebagai unit produksi (Kementerian Pertanian, 2012). Senada dengan Syahyuti (2007), bahwa pembentukan dan pengembangan kelompok di setiap desa harus menggunakan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip pemberdayaan. Pendekatan yang top-down planning menyebabkan partisipasi kelompok tidak tumbuh (Suradisatra, 2007; Syahyuti, 2007).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Institusi/lembaga dan bentuk kerjasama yang telah terjalin antara kelompok Andini Mulyo dengan pihak luar, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Institusi/lembaga dan bentuk kerjasama antara kelompok Andini Mulyo dengan pihak luar.

Institusi/lembaga	Bentuk kerjasama
Gapoktan Purwomartani-Kalasan	Pemasaran POP
Gapoktan Tamanmartani-Kalasan	Pemasaran POP
Gapoktan Tirtomartani-Kalasan	Pemasaran POP
Kelompok Ngudimulyo-Pleret-Bantul	Pengadaan konsentrat
Puskesmas-Ngemplak-Sleman	Yanduwan
BP3K Prambanan-Sleman	Pelatihan POC (pupuk organik cair)
	Penguatan kelembagaan kelompok
Dipertahut Kabupaten Sleman	Pendampingan teknologi dan kelembagaan
UPN-Yogyakarta	Pemasaran POP
BPTP Yogyakarta	Pendampingan teknologi perbibitan dan kelembagaan kelompok
Komisi IV DPR-RI	Pengadaan pejantan unggul

Memperhatikan Tabel 2 terlihat, bahwa beberapa institusi atau lembaga yang sudah mau bekerjasama dengan kelompok Andini Mulyo, baik dalam bentuk opemasaran produk pupuk organik maupun pengadaan pejantan. Kerjasama tersebut masih perlu ditingkatkan terutama dalam upaya kelestarian hubungan yang telah terjalin juga dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai implementasi kapasitas kelompok sebagai unit usaha terutama terkait dengan pengembangan kawasan peternakan sapi potong di wilayah.

PENUTUP

Peran kelembagaan kelompok dalam mendukung pengembangan kawasan peternakan sapi potong masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan secara berkesinambungan, baik pendampingan teknologi maupun kelembagaan sehingga kelompok peternak ini mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sehingga dapat meningkatkan skala usahanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan dapat memberikan nuansa baru dalam suatu kawasan peternakan sapi potong.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta. 2014. Pendampingan PSDS/K di D.I.Yogyakarta. Laporan Akhir Tahun 2014.
- Dipertahut Kabupaten Sleman. 2015. Laporan Akhir Tahun 2015.
- Dinas Pertanian D.I.Yogyakarta. 2014. Kinerja PSDSK tahun 2010-2014 di D.I.Yogyakarta. Materi workshop PSDSK. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2013. Permentan No 82/Permentan OT.140/8/2013 Pedoman Umum Pembinaan Kelompok tani dan Gapoktan. Jakarta
- Kementerian Pertanian, 2012. Kelompok tani sebagai Unit Produksi. Materi Penyuluhan Pertanian: Penguatan Kelembagaan Petani. Jakarta.
- Puslitbangnak. 2012. Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Program Swasembada Daging Sapi.
- Suradisastra K. 2007. Peran Modal Sosial (Sosial Capital) dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Forum Agro Ekonomi Vol. 26. No.01.2008.
- Syahyuti. 2007. Strategi Pengembangan Kelompok tani dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Sayuran Agribisnis Sayuran Organik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.



TANTANGAN PERKEBUNAN KARET UNTUK MENGATASI KELANGKAAN TENAGA PENYADAP DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Akhmad Rouf, Mudita Oktorina Nugrahani, Yoga Bagus Setya Aji

Balai penelitian getas-pusat penelitian karet

Email: aronidah@yahoo.co.id

ABSTRAK

MEA merupakan agenda integrasi negara-negara kawasan ASEAN yang bertujuan untuk mempermudah dalam menjalankan perdagangan berupa barang, jasa, tenaga kerja terampil, maupun aliran modal (investasi). Arus perdagangan yang semakin terbuka tersebut diharapkan mendukung perkembangan ekspor di sektor perkebunan Indonesia agar semakin lebih baik, misalnya karet sebagai salah satu sumber devisa terbesar. Pada saat ini bisnis perkebunan karet di Indonesia mengalami permasalahan dalam hal mengatasi kelangkaan tenaga penyadap (pemanen). Padahal penyadap merupakan unsur terpenting dalam bisnis ini, karena sampai dengan sekarang, teknis pemanenan masih dilakukan manual dengan membutuhkan tenaga kerja terampil agar getah karet dapat keluar secara optimal. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan strategi studi kasus di perkebunan karet Jawa Barat dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kelangkaan tersebut dan memberikan alternatif solusi agar perkebunan karet Indonesia di era MEA tetap eksis. Solusi atas kondisi ini sangat dibutuhkan segera, misalnya melalui perbaikan teknologi penyadapan agar lebih praktis dan tidak memerlukan tenaga (manual) yang harus terampil, sistem pengupahan yang menarik, pelatihan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas penyadap. Hasil kajian disimpulkan bahwa solusi tersebut perlu dilakukan secara simultan agar tenaga penyadap dapat tercukupi secara kuantitas maupun kualitas.

Kata Kunci: kelangkaan tenaga penyadap, karet, MEA

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi yang merupakan satu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA terbentuk dalam serangkaian pertemuan dan kesepakatan antar negara yang berlangsung cukup lama. Dalam kesepakatan tersebut terdapat lima hal yang tidak boleh dibatasi peredarannya di seluruh negara ASEAN termasuk Indonesia, yaitu arus barang, jasa, modal, investasi dan arus tenaga kerja terlatih (Bappekab, 2015).

Salah satu komoditas perkebunan yang dapat diandalkan dengan adanya MEA adalah karet. Karet alam diproduksi terutama di Asia Tenggara



(93%). Indonesia menjadi negara produsen kedua terbesar di dunia setelah Thailand, meskipun sebenarnya Indonesia adalah negara terluas perkebunan karetnya di dunia (Sumarmadji *et al.*, 2015).

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan penting, baik sebagai sumber pendapatan, kesempatan kerja dan devisa, pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet maupun pelestarian lingkungan dan sumberdaya hayati. Perkembangan volume ekspor karet Indonesia sejak tahun 1980-2014 mengalami peningkatan walaupun berfluktuasi. Volume ekspor karet tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 2.701.445 ton. Sedangkan pertumbuhan volume ekspor karet tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 18,10 %, menjadi 2.351.915 ton dari sebesar 1.991.533 ton pada tahun 2009. Potensi ekspor tersebut masih dapat ditingkatkan lagi (Ditjenbun, 2015).

Keberadaan MEA dipandang akan berdampak positif bagi para pelaku agribisnis karet di Indonesia, karena kemudahan akses transaksi penjualan. Bahkan dimungkinkan berdampak pada peningkatan animo investasi untuk perluasan lahan perkebunan karet Indonesia. Hanya saja kendala yang dihadapi para pelaku bisnis perkebunan karet saat ini adalah harga yang masih rendah, sedangkan harga pokok produksi semakin meningkat terutama biaya pemanenan.

Selain itu, permasalahan utama lainnya adalah kelangkaan tenaga penyadap. Ada beberapa hal menyebabkan daya tarik menjadi penyadap rendah dan semakin ketat persaingan dengan sektor lainnya, sehingga terjadi kelangkaan. Persaingan dimungkinkan semakin ketat seiring dengan terbukanya arus perdagangan antar negara dalam konsep MEA. Ketika era MEA berlangsung namun permasalahan tersebut belum dapat diatasi dengan baik, dikhawatirkan berdampak negatif terhadap profitabilitas dan keberlanjutan perkebunan karet Indonesia.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran permasalahan yang sedang dihadapi perkebunan karet utamanya dalam mengatasi kelangkaan tenaga penyadap, dan melakukan kajian berupa alternatif solusi agar perkebunan karet Indonesai di era MEA tetap eksis.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan strategi studi kasus dan studi pustaka. Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah perkebunan karet di Jawa Barat. Sumber data adalah data primer, data sekunder dan literatur pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirumuskan (latar belakang dan permasalahan), serta dikaji dengan dikaitkan adanya MEA. Bila hasil kajian dijumpai adanya permasalahan, kemudian diberikan alternatif solusi guna mengatasi permasalahan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelangkaan tenaga penyadap

Saat ini ketersediaan tenaga penyadap menjadi faktor pembatas dalam menjalankan bisnis perkebunan karet pada saat ini. Padahal penyadapan merupakan perihal penting dalam perkebunan karet. Santoso dan Basuki (1991) menyatakan bahwa aspek biaya penyadapan menyerap biaya sebesar 45 – 50 % dari biaya produksi. Penyadapan menempati porsi penting dalam bisnis perkebunan karet juga dikarenakan sampai dengan sekarang ini proses pemanenan karet masih dilakukan secara manual oleh tenaga penyadap dan harus dilakukan oleh tenaga penyadap terampil agar kualitas sadap terjaga. Namun pada kenyataanya kondisi di hampir semua perkebunan Indonesia mengalami kekurangan tenaga penyadap yang ahli dan terampil.

Berdasarkan hasil survei pada beberapa kebun karet di Jawa Barat, terdapat kekurangan penyadap 17–300 orang/hari (Tabel 1). Ironisnya adalah banyak warga sekitar lebih memilih menjadi TKI ke Malaysia dibandingkan bertahan di Indonesia. Di sana mereka berprofesi sebagai tenaga penyadap karet di perkebunan Malaysia. Ketika perusahaan Malaysia melakukan pengurangan tenaga kerjanya, banyak TKI yang pulang ke Indonesia kemudian kondisi



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha perkebunan di Indonesia untuk menjadikan mereka sebagai penyadap dengan status borong.

Tabel 1. Gambaran kekurangan tenaga penyadap di perkebunan karet

Tahun Tanam	Luas (Ha)	Aktual			Ideal		Kurang (orang /hari)
		Σ pohon /Ha	Σ pohon /anca	Σ penyadap /hari	Σ pohon /anca	Σ penyadap /hari	
2009	1.108,33	578	522	151	500	427	277
2008	1.413,04	530	482	233	500	499	266
2007	855,58	511	472	137	500	292	154
2006	1.436,75	486	455	217	450	517	301
2005	918,85	490	451	149	450	334	185
2004	57,00	620	612	8	450	26	18
2003	232,06	492	437	39	400	95	56
2002	86,39	452	400	16	400	33	17
2001	1.137,88	459	418	168	400	435	267
2000	500,59	430	432	69	375	191	122
1999	1.422,64	386	374	201	375	488	287
1998	1.355,45	369	378	168	375	444	276
1997	1.204,55	353	304	169	350	405	236
1996	514,99	357	317	70	350	175	105
1995	294,01	328	337	38	325	99	60
1994	160,67	265	335	16	325	44	28

Sumber: rekapitulasi data sekunder pengawalan teknologi penyadapan oleh Balit Getas tahun 2016. Diolah

Dampak negatif keterbatasan tenaga kerja penyadap

Penggunaan tenaga sadap tidak terampil berdampak negatif terhadap mutu sadap yang kemudian berimbas pada keberlangsungan produksi. Mutu sadap rendah ditandai dengan irisan terlalu tebal dan / atau dalam menyebabkan terjadi keborosan konsumsi kulit dan luka kayu. Siagian *et al.*, (2009) menjelaskan bahwa luka kayu menyebabkan mutu kulit pulihan menjadi jelek dan tidak berpotensi untuk disadap kembali. Dampak lebih lanjut akibat mutu sadap jelek (luka kayu dan boros kulit) oleh tenaga penyadap tidak terampil menyebabkan produktivitas satu siklus menjadi tidak terwujud (Siagian, *et al.*, 2009). Bila produktivitas kumulatif (*cumulative yield*) dalam satu siklus tidak tercapai, maka profitabilitas bagi perusahaan akan terganggu dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Pencapaian produksi dalam satu siklus ini sulit dicapai jika permasalahan keterbatasan tenaga penyadap belum teratasi.



Untuk itu perlu adanya solusi segera, untuk mengatasi permasalahan kelangkaan tenaga penyadap terampil.

Alternatif solusi

Dampak negatif akibat kelangkaan tenaga kerja perlu segera diberikan solusi melalui beberapa langkah pendekatan, antara lain:

Peningkatan pendapatan penyadap melalui peningkatan produksi

Upaya merangsang agar orang tertarik menjadi penyadap dapat dilakukan melalui pemberian pendapatan yang berpotensi lebih tinggi. Pendapatan yang tinggi berkorelasi positif dengan semangat pekerja untuk memperoleh hasil produksi lateks / karet kering. Penggunaan stimulasi (cair atau gas) secara teratur dapat meningkatkan produksi karet (Yew, 1998; Karyudi dan Junaidi, 2009; dan Rouf *et al.*, 2015), bahkan menurut Kuswanhadi *et al.*, (2009) pada klon-klon yang tergolong metabolisme rendah memerlukan untuk diaplikasi stimulan agar produksi optimal.

Sistem pengupahan yang menarik

Adanya peningkatan produksi saja bisa jadi tidak menarik bagi penyadap bila tidak berdampak secara langsung terhadap kenaikan upah yang diperolehnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis perkebunan karet seringkali merangsang para penyadapnya melalui pemberian premi bila produksi yang diperoleh mengalami kenaikan. Fauzi *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa pemberian premi sadap bertujuan untuk merangsang penyadap menghasilkan produksi yang optimal sesuai potensi tanaman sekaligus menghasilkan mutu sadapan yang baik.

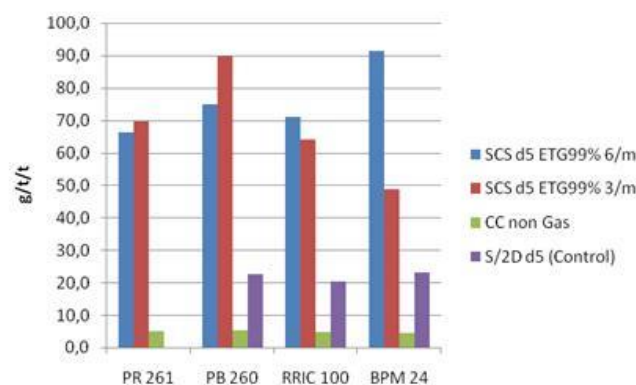
Peningkatan ketrampilan tenaga sadap melalui tapping school

Peningkatan kualitas penyadap agar memiliki skill yang lebih baik perlu diaktifkan kembali antara lain melalui pelatihan penyadapan (*tapping school*). Mahmudi (2012) menyampaikan bahwa program *tapping school* adalah metode yang paling efektif untuk meningkatkan skill penyadap. Objek dari program *tapping school* adalah orang-orang baru yang hendak direkrut menjadi penyadap, maupun tenaga penyadap yang hendak ditingkatkan keterampilannya.



Alternatif teknologi mekanisasi penyadapan

Dalam hal terjadi persaingan tenaga kerja yang sangat ketat, sehingga mencari tenaga kerja penyadap terampil sangat sulit, maka peran teknologi sangat diharapkan. Teknologi yang telah dicoba di Indonesia adalah menerapkan sistem sadap alternatif yang dikombinasi dengan cara menyadap yang lebih sederhana, misalnya SRC atau sadap rangsang tusuk (Sutardi, 1991), sadap hipodermik (Karyudi dan Siagian, 2001), SCS atau *sirkel cutting system* (Setiono, *et al.*, 2015). Teknologi tersebut memiliki keunggulan dalam hal capaian produksi yang mengalami peningkatan secara signifikan dan penyadapan dilakukan dengan tidak membutuhkan skill khusus. Namun demikian teknologi tersebut memiliki kelemahan berkaitan dengan kesinambungan produksi pada periode berikutnya, maupun dampak negatif terhadap kesehatan tanaman karet.



Gambar 2. Teknologi penyadapan SCS dan grafik capaian produksi gtt

(Sumber : Setiono, *et al.*, 2015)

Teknologi lain di Malaysia juga telah menghasilkan prototipe pisau sadap mekanis menggunakan tenaga baterai, diberi nama Motoray. Alat tersebut telah ditemukan dan dikembangkan sejak tahun 1980-an. Namun pada saat ini alat tersebut sudah tidak digunakan lagi (Malaysian Rubber Board, 2009).

Solusi pendekatan dari sisi teknologi nampaknya memberikan peluang yang prospektif sebagai upaya mengatasi kelangkaan penyadap, namun hingga saat ini teknologi tersebut masih belum memberikan hasil final (masih dalam level riset skala kecil).



PENUTUP

MEA memberikan nuansa baru sebagai tantangan bagi perkebunan karet Indonesia dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas mutu karet (bahan ekspor), serta dalam pemenuhan jumlah tenaga penyadap. Apabila perkebunan karet Indonesia tidak mampu memberikan sistem pengupahan yang menarik bagi calon tenaga penyadap, maka daya saing dan daya tarik untuk menjadi penyadap di perkebunan karet Indonesia akan terus menurun. Akan semakin parah bila perkebunan karet di luar negeri mampu memberikan upah yang lebih menarik, sehingga dalam konteks MEA dapat membuka peluang tenaga kerja Indonesia bermigrasi ke luar negeri untuk menjadi penyadap karet di sana. Upaya lain berupa peningkatan kualitas dan kuantitas penyadap karet melalui pelatihan perlu terus dilanjutkan guna mencetak tenaga penyadap yang terampil. Terlebih lagi, hingga saat ini pengembangan teknologi yang berorientasi pada perbaikan metode penyadapan yang sebenarnya diharapkan dapat lebih praktis dan tidak perlu mengandalkan tenaga kerja terampil masih belum bisa diterapkan dalam skala komersial dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappekab-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. 2015. Masyarakat Ekonomi Asean. <http://bappekab.malangkab.go.id/downloads/BUKU%20MEA%202015.pdf>
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Karet 2013 – 2015. Kementerian Pertanian Indonesia.
- Fauzi, I.R., L.F. Syarifa, E. Herlinawati, N. Siagian. 2014. Keragaan sistem premi penyadap di beberapa perusahaan perkebunan karet. *Jurnal Penelitian Karet*, 32 (1): 157-180
- Karyudi dan Junaidi. 2009. Penggunaan stimulan untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet. *Pros. Pertemuan Teknis Eksploitasi Tanaman Karet*. Medan, 1-2 Desember 2009. Balai Penelitian Sungei Putih.
- Karyudi dan N. Siagian. (2001). Sistem Sadap Hipodermik Terkendali Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman Karet. *Jurnal Penelitian Karet*. 21 (1-3) : 25-44
- Kuswanhadi, Sumarmadji, Karyudi, T.H.S. Siregar. (2009). Optimasi produksi klon karet melalui sistem eksploitasi berdasarkan metabolisme lateks. *Pros. Lok. Nas. Pemuliaan Tanaman Karet*. Batam, 4-6 Agustus 2009. Hal: 150-156.



- Mahmudi. 2012. Paket teknologi peningkatan produktivitas karet di PTPN IX (Persero). *Pros. Konferensi Karet Nasional*. Yogyakarta, 19-20 September 2012. Pusat Penelitian Karet.
- Malaysian Rubber Board. (2009). *Latex Harvesting, In Rubber Plantation and Processing Technologies*. Kuala Lumpur, Malaysia. p 254
- Rouf, A., M.O. Nugrahani, A.S. Pamungkas, Setiono, dan H. Hadi. (2015). Strategi peningkatan produksi lateks secara kontinu dengan teknologi stimulan gas etilen RIGG-9. *Warta Per karetan*, 34 (1): 31-42.
- Sumarmadji, A. Rouf, Y.B.S.. Aji, dan T. Widyasari. (2015). Optimalisasi Produksi Dan Penekanan Biaya Penyadapan Dengan Sistem Sadap Intensitas Rendah. *Makalah Workshop Per karetan*. Pusat Penelitian Karet. Bogor, 8-10 Desember 2015.
- Santoso, B. dan Basuki. (1991). Manajemen Panen Tanaman Karet di Perkebunan. *Kumpulan Makalah Lokakarya Karet 1991*. Medan, 2 – 4 Juli 1991.
- Setiono, Aji. Y.B.S., M.O. Nugrahani, A. Rouf, and N.D. Rinojati. (2015). Effort to Increase Latex Yield and Reduce Production Cost Through Pre Eliminary Research of Sircle Cutting System (SCS). *Proc. International Rubber Conference 2015*. Ho Chi Minh City, Vietnam: 2-3 November 2015. Hal 297-304.
- Siagian, N., T.H.S. Siregar, Sumarmadji, dan Karyudi. (2009). Potret umum pelaksanaan norma baku eksploitasi di beberapa perkebunan karet. *Makalah Pertemuan Teknis Eksploitasi Tanaman Karet*. Medan, 1-2 Desember 2009. Balai Penelitian Sungei Putih.
- Sutardi. (1992). Sistem sadap rangsang cucuk meningkatkan produksi karet. *Risalah Penelitian*. Pusat Penelitian Perkebunan Getas Salatiga. Hal: 1-12
- Yew, F.K. (1998). RRIMFLOW system of exploitation recent improvement and update on yield performance. *Seminar of Low Intensity Tapping System*.



DIVERSIFIKASI EKONOMI MASYARAKAT PETANI BERBASIS POTENSI BIOFARMAKA DI KABUPATEN KLATEN DI ERA MEA

Sri Marwanti dan Pardono

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

srimarwanti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki kekayaan tanaman biofarmaka yang sangat besar dengan ribuan species telah diidentifikasi dan 950 species diantaranya diketahui memiliki fungsi biofarmaka. Dengan kekayaan tersebut Indonesia berpotensi besar untuk menjadi salah satu negara terbesar dalam industri obat tradisional dan kosmetika alami berbahan baku tanaman biofarmaka. Namun menurut Badan POM dari total tersebut baru 283 species yang terdaftar dan digunakan oleh industri obat tradisional Indonesia. Tanaman biofarmaka memiliki keunggulan komparatif untuk diusahakan masyarakat petani. Penelitian Diversifikasi Ekonomi Masyarakat Petani Berbasis Potensi Biofarmaka di Kabupaten Klaten bertujuan mengidentifikasi potensi biofarmaka beserta faktor pendukung dan penghambatnya untuk memberdayakan dan mendiversifikasi perekonomian masyarakat petani di kabupaten Klaten. Metode penelitian secara diskriptif bersumber dari data primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah, dianalisis dengan metode analisis interaktif dan analisis internal eksternal. Hasil penelitian menunjukkan tanaman biofarmaka di masyarakat petani Klaten memiliki potensi untuk dikembangkan di daerah berbasis sumberdaya lahan tegal dan pekarangan di kecamatan Bayat dan kecamatan Kemalang. Dukungan Pemerintah Daerah dan permintaan pasar menjadi pendukung dan peluang bagi masyarakat maupun petani mengembangkan potensi biofarmaka. Faktor penghambat pengembangan potensi biofarmaka rendahnya daya saing petani dan produk biofarmaka yang belum memenuhi standarisasi pasar global. Diperlukan penyadaran dan pendampingan akan standarisasi mutu produk maupun proses yang konsisten di pasar global era MEA.

Kata kunci: biofarmaka, masyarakat, petani, diversifikasi ekonomi

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan tanaman biofarmaka yang sangat besar dengan ribuan species telah diidentifikasi dan 950 species di antaranya diketahui memiliki fungsi biofarmaka (Hemani, 2011). Dengan kekayaan tersebut Indonesia berpotensi besar untuk menjadi salah satu negara terbesar dalam industri obat tradisional dan kosmetika alami berbahan baku tanaman biofarmaka yang memiliki peluang pasar cukup besar (Purba, 2013). Namun



menurut Badan POM dari total tersebut baru 283 spesies yang terdaftar dan digunakan oleh industri obat tradisional Indonesia.

Tanaman biofarmaka memiliki keunggulan komparatif untuk diusahakan masyarakat petani. Tanaman biofarmaka atau tanaman obat-obatan merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif yang tinggi. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai biofarmaka dapat berupa daun, bunga, buah, akar, batang maupun kulit kayu. Saat ini permintaan pasar internasional terhadap tanaman biofarmaka semakin tinggi, hal itu disebabkan oleh kesadaran masyarakat atas kehidupan yang sehat dan alami sehingga mereka mulai meninggalkan obat-obatan kimiawi dan beralih menggunakan tanaman biofarmaka (*back to nature*). Selain itu tanaman ini juga bermanfaat untuk bumbu masakan dan kosmetik (Insani, 2014). Namun akhir-akhir ini secara kualitatif di pasar internasional, produk biofarmaka Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan produk biofarmaka China.

Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Tanaman biofarmaka dibedakan menjadi dua kelompok: Tanaman biofarmaka rimpang yang terdiri dari; jahe, laos/lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temuireng, temukunci dan dlingo/dringo, dan tanaman biofarmaka non rimpang seperti kapulaga, mengkudu/pace, mahkota dewa, kejibeling, sambiloto dan lidah buaya. Produk berbasis tanaman biofarmaka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni jamu, obat herbal terstandar (OHT), dan fitofarmaka (Hemani, 2011, Juniarti, 2013).

Data Badan Pusat Statistik & Direktorat Jenderal Hortikultura (2014) menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dalam konteks nasional jumlah hasil panen biofarmaka secara umum mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi biofarmaka yang besar. Bahkan penjualan ekspor biofarmaka selalu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 1991 sebesar Rp. 95,5 miliar, tahun 1999 meningkat menjadi Rp. 600 miliar, dan pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp.



4 triliun (Purba, 2013). Untuk merealisasikan pengembangan sumber daya potensial tersebut diperlukan penelitian yang dapat memberikan terobosan pemikiran kepada upaya pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman obat sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi.

Diversifikasi ekonomi berarti penganejaragaman usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan usaha, produksi, jasa, investasi, atau pasar. Pada suatu perusahaan diversifikasi ekonomi dimaksudkan untuk menganejaragaman produk, bidang usaha, atau lokasi perusahaan guna memaksimalkan keuntungan dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, sehingga apabila suatu perusahaan mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu produk atau daerah/negara, perusahaan tersebut bisa memperoleh kelebihan pendapatan dari produk atau daerah/negara lain agar stabilitas arus kas dapat terjaga. Di samping itu diversifikasi ekonomi juga bermanfaat untuk mengembangkan strategi multi bisnis dan meningkatkan daya saing strategis (Harsen, 2015; Hardono & Saliem,). Terdapat beberapa alasan yang mendorong suatu perusahaan melakukan diversifikasi. Namun pada dasarnya diversifikasi dilakukan untuk memperluas usaha agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau paling tidak, bisa memperoleh pendapatan yang stabil (Wahyuningsih, 2008).

Penelitian Diversifikasi Ekonomi Masyarakat Petani Berbasis Potensi Biofarmaka di Kabupaten Klaten bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi potensi biofarmaka yang dapat memberdayakan dan mendiversifikasi perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Klaten, (2) mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan akan menghasilkan deskripsi hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, dan hambatan yang berkaitan dengan upaya untuk mendiversifikasi ekonomi masyarakat petani melalui akselerasi usaha pertanian



berbasis potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten. Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Pemilihan tempat atau lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di Kabupaten Klaten terdapat banyak potensi biofarmaka yang dapat dikembangkan untuk mendiversifikasi ekonomi masyarakat setempat. Teknik pengambilan sampel atau cuplikan (*sampling technique*) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *snowbal*. Untuk memperoleh validitas data, dalam penelitian ini akan digunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data (Moleong, 2000).

Data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD). Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan *interactive model of analysis* atau metode analisis interaktif (Miles & Huberman, 1984) dan analisis internal eksternal. Analisis interaktif memiliki beberapa elemen penting, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten sangat beragam, baik biofarmaka kategori rimpang maupun non rimpang. Demikian pula daerah yang telah mengembangkan potensi tanaman biofarmaka juga tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Klaten, utamanya di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kemalang. Selain itu beberapa daerah juga memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil tanaman obat seperti Kecamatan Karangnong, Jatinom, dan Tulung. Namun demikian pengembangan biofarmaka di beberapa sentra tersebut pada dasarnya memang masih bersifat parsial. Dalam hal ini belum ada fokus dan belum ada keterpaduan antar berbagai unsur pendukung pengembangan potensi biofarmaka tersebut. pada saat ini potensi biofarmaka yang besar tersebut banyak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya masing-masing untuk menanam tanaman obat-obatan, selain memanfaatkannya sebagai lahan untuk menanam berbagai macam sayuran untuk kebutuhan gizi keluarga. Optimalisasi



pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam tanaman obat-obatan dan sayuran juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Pengembangan potensi biofarmaka perlu didukung oleh berbagai komponen, baik kebijakan, SDM, maupun ketersediaan lahan yang sesuai. Beberapa komponen pendukung pengembangan potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut (1) Kondisi lahan yang potensial untuk tanaman biofarmaka seperti Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kemalang. Meskipun daerah Kecamatan Kemalang merupakan dataran tinggi kering, hampir semua tanaman bisa hidup di daerah ini, termasuk tanaman obat-obatan atau biofarmaka (2). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten yang sudah mengarah kepada upaya pengembangan biofarmaka melalui program pengembangan kawasan agropolitan.(3) Program optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam tanaman obat-obatan atau biofarmaka (4).Ketersediaan bahan baku yang melimpah untuk pembuatan jamu tradisional (5) Fasilitas dana dari Bea Cukai untuk pengembangan program optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan penanaman tanaman obat-obatan.(6) Adanya pembinaan dari Dinas Ketahanan Pangan untuk produk olahan pasca panen bagi tanaman biofarmaka. (7) Adanya pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk mendapatkan legalisasi produk PIRT. (8) Adanya fasilitasi dan pendampingan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengembangkan produk obat tradisional seperti yang terdapat di Dukuh Sonayan Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko dan di Dukuh Jetis Desa Tambong Wetan Kecamatan Kalikotes yang telah berkembang menjadi Usaha Kecil Obat Tradisional (9). Adanya organisasi petani seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, dan gabungan kelompok tani, termasuk sebagian diantaranya yang sudah berbadan hukum (10) Adanya bantuan pemerintah untuk gabungan kelompok tani (gapoktan) di setiap desa melalui bantuan PUAP. (11) Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mengapresiasi kreativitas masyarakat melalui lomba KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi) untuk pelajar dan umum yang bisa memunculkan peserta yang



memiliki inovasi dalam rangka memperkuat, menggali, mendorong agar pemberdayaan muncul dan dapat memberi wadah untuk brekreasi.(12) Adanya peluang untuk bekerja sama dalam pemasaran produk biofarmaka dengan pihak swasta seperti Alfamart, Lotte Mart, Mirota Kampus, dan toko swalayan lainnya dengan bekal PIRT dan label halal.

Beberapa faktor yang menghambat pengembangan potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.(1) Harga hasil bumi berupa empon-empon atau tanaman obat-obatan tidak stabil sehingga membuat masyarakat petani enggan untuk menanam tanaman obat-obatan. Keberadaan asosiasi berupa Gabungan Pengusaha Jamu di Surakarta yang terdiri atas perusahaan Deltomed, Air Mancur, dan lainnya hingga saat ini belum mampu memberikan dampak positif terhadap kestabilan harga. (2) Masih terdapat banyak produk herbal tradisional yang memiliki kandungan ALT (Angka Lempeng Total) tinggi atau dengan kata lain kandungan bakteri produk herbal tersebut tinggi. Hal ini berarti produk herbal tersebut belum memenuhi standar kesehatan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). (3) Belum adanya konsentrasi daerah penanaman yang dikhususkan untuk tanaman obat-obatan sesuai dengan karakteristik lahan. Hingga saat ini penanaman tanaman obat masih campur aduk dan belum ada spesifikasi kawasan. (4) Pemasaran produk herbal, baik yang berupa hasil panen tanaman biofarmaka maupun hasil olahan biofarmaka berupa jamu tradisional, belum menentu, atau dengan kata lain masih stabil dan belum rutin. (5) Sebagian besar masyarakat, baik yang menanam tanaman biofarmaka maupun yang memproduksi olahan biofarmaka berupa jamu tradisional belum menikmati hasil yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menekuni bidang usaha tersebut secara sungguh-sungguh. (6) Belum ada pendampingan dalam bentuk pelatihan dari *stakeholder* seperti penyelenggaraan *training* masalah pengepakan (*packaging*). (7) Adanya ketidaksesuaian antara harga pokok produksi tidak harga jual. Hal ini membuat penghasilan atau pendapatan dari produksi biofarmaka sangat minim. (8) Belum ada pendampingan dalam bentuk pelatihan dari *stakeholder*, utamanya dalam hal pengembangan produk



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

jamu cair siap minum yang banyak diminati konsumen. (9) Kurangnya inisiatif dan kreativitas dari pelaku usaha, termasuk para pelakau usaha biofarmaka. (10) Banyaknya pelaku usaha (UKM) yang kurang memiliki daya saing dan semangat juang untuk mengembangkan usahanya. (11) Banyaknya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bersikap *status quo* atau monoton sehingga berdampak pada minimnya program maupun kegiatan yang kreatif dan inovatif. (12) Tingginya egoisme sektoral di masing-masing SKPD yang menyebabkan kurangnya terintegrasinya program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Kabupaten Klaten. (13) Lamanya pemerolehan ijin seperti PIRT sehingga menyebabkan banyak pengusaha enggan untuk mengurus perijinan berkaitan dengan usaha mereka.

PENUTUP

Potensi biofarmaka di Kabupaten Klaten sangat beragam, baik biofarmaka kategori rimpang maupun non rimpang. Potensi tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan dengan baik karena terdapat beberapa faktor pendukung, baik dalam hal dukungan Pemerintah Kabupaten Klaten maupun pihak swasta. Namun demikian untuk mengembangkannya masih terdapat banyak kendala

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014, Luas panen biofarmaka di Indonesia 2009 – 2013, http://www.pertanian.go.id/ATAP_2013_IP/LP_Biofarmaka_%28ATAP%29.pdf
- Hardono, Gatoet Sroe & Handwi P. Saliem, tt, Diversifikasi pendapatan rumah tangga di Indonesia: Analisis data SUSENAS, <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/Mono27-5.pdf>
- Harsen, Rio, 2015: Apa Itu Diversifikasi dan Pendiversifikasian? <http://rioharsengultom.blogspot.com/p/diversifikasi.html>
- Hemani, 2011, Pengembangan biofarmaka sebagai obat herbal untuk kesehatan, Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, http://pascapanen.litbang.pertanian.go.id/assets/media/publikasi/bulletin/Buletin_Pascapanen_7.1_3_2011.pdf



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Insani, Mavia Indra, 2014, Tanaman Biofarmaka di Indonesia dan Persaingannya dengan Negara China, Surabaya: Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Purba, Frans Hero K., 2013, Pengembangan Agribisnis Biofarmaka Indonesia dalam Potensi Usaha, <http://heropurba.blogspot.com/2013/07/pengembangan-agribisnis-biofarmaka.html>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M, 1984, Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods, London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy, 2000, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Samanhudi, dkk, tt, Optimsalisasi pemanfaatan pekarangan melalui pengembangan tanaman biofarmaka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Karanganyar, <http://lppm.uns.ac.id/kinerja/files/pemakalah/lppm-pemakalah-2012-0407201374439.pdf>
- Sudaryanto, Tahlim, Pantjar Simatupang & Ketut Kariyasa, 2005, Konsep sistem usaha pertanian serta peranan BPTP dalam rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ART03-4c.pdf>
- Wahyuningsih, 2008, Diversifikasi pertanian menuju pertanian tangguh dalam upaya memantapkan struktur ekonomi pedesaan, Jurnal Mediagro, Vol. 4 No. 1, hal 1 – 11.



PENYULUHAN ERA MODERN MELALUI SDMC

Septi Wulandari, Martina Sri Lestari, Yuliantoro Baliadi

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
Jln Yahim No. 49 Sentani No Hp 0813 9271 2238
Email : septi.agustus1989@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan pertanian merupakan salah satu kelembagaan yang memberikan kontribusi pembangunan pertanian. Laju pembangunan pertanian yang dinamis menuntut percepatan adopsi teknologi oleh pelaku utama maupun pelaku usaha di sektor pertanian. Diseminasi melalui pendekatan model *spektrum diseminasi multi channel* (SDMC) memungkinkan inovasi teknologi pertanian hasil penelitian dapat didistribusikan secara cepat kepada para penggunanya. Salah satu aplikasi SDMC media massa elektronik yang mampu dan mudah diakses petani maupun penyuluh melalui web, sms, serta aplikasi smartphone berbasis android yaitu Sistem Informasi Kalender Tanam. Pengembangan sistem kalender tanam terpadu yang bersifat interaktif diharapkan dapat mempermudah penyuluh maupun petani dalam merekomendasikan awal waktu tanam serta kebutuhan benih/varietas dan pupuk pada setiap awal musim tanam.

Kata kunci: Penyuluhan, Spektrum Diseminasi Multi Channel, Katam

PENDAHULUAN

Penyuluhan Pertanian merupakan suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), kontribusi penting penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan peningkatan produksi pangan telah menyebabkan cepatnya perkembangan minat orang dalam penyuluhan selama beberapa dekade terakhir.

Adanya senjang hasil merupakan salah satu indikator lemahnya aspek diseminasi atau penyampaian teknologi hasil penelitian dan pengkajian kepada petani. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai komunikator pembangunan diharapkan dapat bermain multiperan, sebagai guru, pembimbing, penasehat, penyampai informasi dan mitrapetani. Peningkatan kinerja PPL sangat penting di dalam mempertahankan kelangsungan program penyuluhan di tingkat



lapangan. Hal ini erat kaitannya dengan motivasi dan kepuasan kerja yang dapat diperoleh oleh penyuluh.

Laju pembangunan pertanian semakin dinamis menuntut percepatan adopsi teknologi oleh pelaku utama maupun pelaku usaha di sektor pertanian. Dalam merespon tuntutan tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) pada setiap tahunnya menghasilkan inovasi adaptif. Pada tahun 2011 Badan Litbang Pertanian melakukan terobosan diseminasi dengan menginisiasi model Spectrum Diseminasi Multi Channel (SDMC). Terobosan ini merupakan salah satu upaya mempercepat adopsi teknologi oleh pengguna.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga sangat pesat dan sudah memasuki berbagai bidang kehidupan. Penggunaan jaringan telekomunikasi khususnya telepon seluler sudah merata di semua elemen masyarakat. Jumlah pengguna telepon seluler juga meningkat. Berdasarkan penelitian Spekman (2008) disimpulkan bahwa Android adalah sistem operasi yang paling baik digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile device. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, programmer dapat mengembangkan sistem informasi yang diperlukan sebagaimana yang biasa dikembangkan di komputer. Ini membuka peluang untuk bisa mengembangkan sistem informasi di Android sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh adalah penyebaran informasi kalender tanam terpadu, yang bukan hanya berbasis *website* saja, tetapi juga berbasis SMS dan Android.

Android merupakan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang meliputi system operasi middleware dan aplikasi inti yang dirilis oleh google. System operasi android bersifat terbuka sehingga dapat dikembangkan oleh siapa saja sehingga dengan adanya kemajuan teknologi yang berbasis aplikasi di android banyak para pemrogram membuat aplikasi yang mampu memudahkan petani maupun penyuluh dalam mengakses informasi. Salah satu aplikasi yang bisa diakses oleh petani maupun penyuluh antara lain Sistem Informasi Kalender Tanam. Makalah ini disusun untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media massa terhadap penyuluhan



HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengartikan penyuluhan sebagai berikut: “proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Slamet (2003) telah menegaskan penyuluh harus mampu merespon tantangan-tantangan baru yang muncul dari situasi baru. Dalam paradigma baru penyuluhan pertanian, salah satu faktornya adalah penyuluh perlu berpikir tentang agribisnis sebagai sistem yang terjadi interdependensi subsistem hulu-hilir. Tabel 1. menunjukkan keragaan ketenagaan penyuluh pertanian di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan. Tahun 2013, penyuluh pertanian sebesar 63.728 penyuluh terdiri dari penyuluh PNS 44,71 %; penyuluh THL-TBPP 32,66 %, honorer 1,96% dan penyuluh swadaya 20,66%. Ketersediaan penyuluh Indonesia yang belum merata mengakibatkan teknologi inovasi Badan Litbang Pertanian belum seluruhnya diadopsi oleh petani.

Tabel 1. Keragaan Ketenagaan Penyuluh Pertanian Indonesia

No	Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian			
		2011	2012	2013	Presentase (%)
1	PNS	28.529	28.494	28.494	44,71
2	THL-TBPP	21.653	21.249	20.814	32,66
3	Honorer	1.251	1.251	1.251	1,96
4	Swadaya	8.344	8.344	13.169	20,66
Jumlah Total		59.777	59.338	63.728	100,00

Sumber : Pusluhtan, 2013

Keberhasilan pembangunan pertanian, salah satunya dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas dari penyuluh pertanian. Menurut Rasyid (2014), Untuk mempersiapkan produksi pertanian yang berdaya saing di dalam dan di luar



negeri, diperlukan Penyuluh Pertanian yang tidak saja menguasai aspek budidaya, tetapi juga menguasai keseluruhan aspek manajemen agribisnis secara komprehensif, termasuk pengenalan dan penerapan konsep manajemen rantai pasokan dan nilai tambah (*value and supply chain analysis*), serta kemampuan dalam menumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani. Sehubungan dengan hal tersebut, kapasitas Penyuluh Pertanian harus ditingkatkan dan diarahkan tidak hanya sebagai fasilitator bagi petani, namun sebagai penghubung (*knowledge broker*) antara petani dengan berbagai lembaga penyedia layanan agribisnis bagi petani.

Untuk mempercepat adopsi teknologi oleh pengguna, Badan Litbang Pertanian mulai tahun 2011 melakukan terobosan diseminasi dengan menginisiasi model Spectrum Diseminasi Multi Channel (SDMC). Pendekatan SDMC, memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait. Penyebaran teknologi tidak lagi dilakukan hanya pada satu pola diseminasi, tetapi dilakukan secara multi channel.

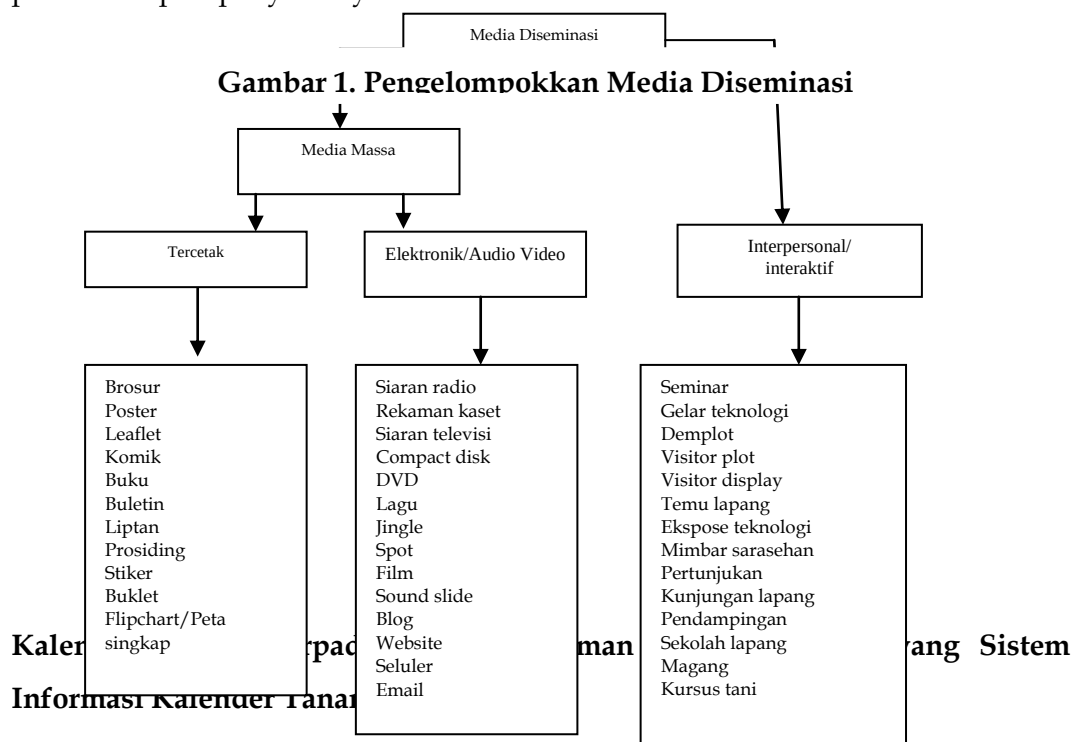
SDMC dibangun untuk memperkuat sistem diseminasi inovasi pertanian dan sekaligus mendukung eksistensi kelembagaan penyuluhan. SDMC bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi pertanian oleh pengguna (Balitbangtan, 2011). Badan Litbang Pertanian mendiseminasikan teknologi secara berkesinambungan menggunakan berbagai media diseminasi. Berdasarkan Gambar 1. Pengelompokan media diseminasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu media massa/nirmassa dan media interpersonal. Media massa merupakan media komunikasi yang disampaikan kepada sejumlah orang contohnya brosur, leaflet, komik, buku, buletin dll sedangkan media massa interpersonal merupakan media komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang sasarannya sudah ditentukan, contohnya seminar, gelar teknologi, demplot, visitor display, dll. Inovasi teknologi spesifik lokasi didiseminasikan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna untuk meningkatkan percepatan (akselerasi) dan efektifitas hasil litkaji Badan Litbang Pertanian.

Hasil penelitian Wahyuningrum et al (2014), bahwa media yang bisa didengar dan dilihat (dialog interaktif TV dan sandiwara TV) juga lebih efektif



daripada media yang hanya bisa didengar (dialog interaktif radio dan sandiwara radio). Variabel umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan cenderung juga mempengaruhi efektivitas media diseminasi inovasi ayam KUB. Pada petani sayuran telah terjadi perubahan proses diseminasi informasi dari cara konvensional menjadi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Diseminasi yang biasanya melibatkan fasilitas berupa material/fisik seperti buku berkembang dengan memanfaatkan fasilitas jaringan kerja (network) dengan memanfaatkan teknologi komputer, internet, dan telepon genggam (HP). Adanya peranan media massa dalam mengubah perilaku pelaku utama dan pelaku usaha merupakan salah satu keberhasilan model SDMC.

Model SDMC juga sebagai salah satu sarana yang mampu membantu proses penyuluhan sebagaimana hasil penelitian Sumardjo *et al.* (2013) menunjuk-kan bahwa implementasi sistem diseminasi inovasi pertanian berbasis teknologi informasi (TI) dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan kelembagaan formal (penyuluh), bersinergi dengan kelembagaan lokal, dan didukung oleh revitalisasi kelembagaan informal di tingkat lokal. salah satu diseminasi media massa elektronik yang mempunyai peranan penting bagi petani maupun penyuluh yaitu Sistem Informasi Kalender Tanam.





SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Kalender Tanam Terpadu adalah pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang prediksi musim, awal tanam, pola tanam, luas tanam potensial, wilayah rawan banjir dan kekeringan, potensi serangan OPT, serta rekomendasi varietas dan kebutuhan padi dan palawija, serta rekomendasi dosis dan kebutuhan pupuk berdasarkan prediksi variabilitas dan perubahan iklim.

Sistem Informasi Kalender Tanam (Katam) Terpadu memberi informasi tentang potensi pola tanam, waktu tanam, luas areal tanam potensial dan rekomendasi teknologi adaptif pada level provinsi sampai dengan tingkat kecamatan, di seluruh Indonesia. Sistem ini sangat operasional, disusun berdasarkan prakiraan iklim per musim, dapat diintegrasikan dengan rekomendasi pemupukan, benih dan pengelolaan hama terpadu (PHT) (Feriadi, 2015). Badan Litbang Pertanian mengembangkan Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu (SI untuk mempercepat penyebaran informasi ke seluruh Indonesia. Informasi Kalender Tanam Terpadu dapat diperoleh web, sms serta aplikasi HP android.



Gambar 2. Halaman depan website Kalender Tanam

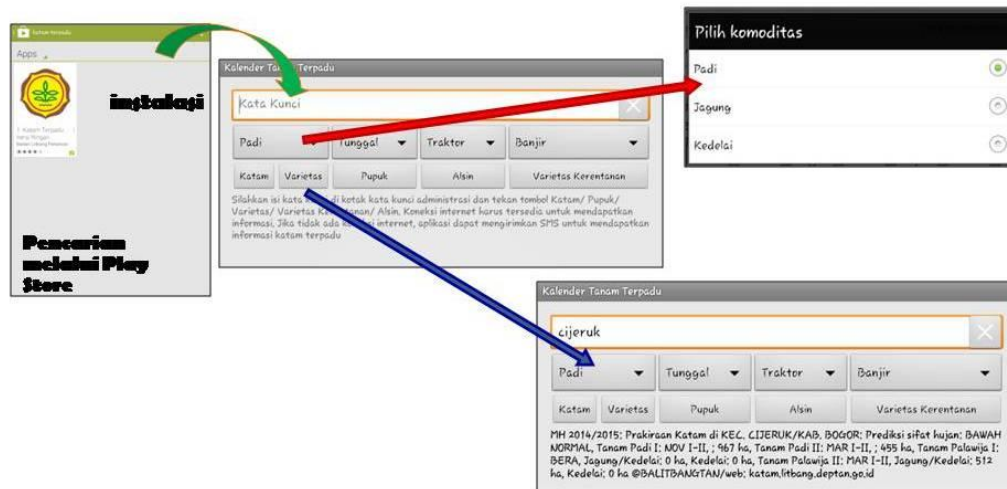


SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Gambar 3. Cara Akses Sistem Informasi Katam Melalui Hp

Kemudahan pengguna untuk mengakses data katam terpadu dari tingkat pusat sampai dengan petani melalui beberapa jalur komunikasi diharapkan dapat menurunkan kegagalan petani akibat perubahan iklim (Ramadhani et.al, 2001). Pengembangan sistem kalender tanam terpadu yang bersifat interaktif diharapkan dapat mempermudah pengambil kebijakan dalam merekomendasikan awal waktu tanam serta kebutuhan benih/varietas dan pupuk pada setiap awal musim tanam. Selain pengambil kebijakan, petani juga mampu menentukan kebutuhan tanam/pupuk/varietas secara mandiri.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian menerapkan Kalender Tanam mulai tahun 2007 sampai sekarang. Selama penerapan Kalender Tanam penyuluh maupun petani memperoleh kemudahan dalam mengakses info terkait jadwal tanam, varietas unggul baru serta rekomendasi dosis pupuk. Jaringan internet yang lemah di beberapa kabupaten di Provinsi Papua menjadi salah satu kendala mengakses Kalender Tanam melalui aplikasi android maupun web, sehingga sms merupakan cara yang paling digunakan oleh petani maupun penyuluh.

Sistem Informasi Katam Terpadu bersifat dinamik karena informasinya disusun dengan mempertimbangkan hasil interpretasi prakiraan curah hujan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

dan prakiraan awal musim dari BMKG. Keakuratan dalam pengambilan data memperkuat keyakinan penyuluh maupun petani dalam keberlanjutan mengakses informasi Kalender Tanam.

PENUTUP

Penyuluhan pertanian memiliki peranan penting sebagai pendamping, perantara, dan penyebarluasan teknologi Litbang Pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian. Penyuluhan mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya kemandirian petani. Peran serta diseminasi informasi teknologi pertanian sebagai salah satu tugas penyuluh. Strategi pendekatan melalui SDMC mulai dikembangkan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan pemangku kepentingan. Diseminasi atau penyebaran informasi teknologi tidak hanya dilakukan pada satu pola diseminasi, tetapi melalui diseminasi multi channel, sehingga inovasi teknologi pertanian mampu di sebarlaskan secara cepat kepada pengguna. Sistem Informasi Kalender Tanam sebagai salah satu bentuk SDMC sudah diterapkan semua Provinsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet M. 2003. Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah. Dalam : Yustina I, Sudradjat A, penyunting. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Bogor.
- Speckmann, B. 2008. The Android Mobile Platform. Departement of Computer Science. Eastern Michigan University. Michigan.
- Feriadi, 2015. Kalender Tanam Terpadu (KATAM), Sistem Informasi Petani Modern Indonesia. Sumber: http://babel.litbang.pertanian.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=298:-tanam-terpadu-katam-sistem-informasi-petani-modern-indonesia&catid=15:info-teknologi Diakses : 17 Juni 2015.
- Ramadhani, F., H.Syabbuddin, dan E. Runtunuwu. 2015. Aplikasi Android pada Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu. Jurnal INKOM Vol 9 (1) : 39-44. jurnal.informatika.lipi.go.id/index.php/inkom/article/download/414/189. Diakses tanggal 24 Agustus 2016.
- Rasyid, Fathan A. 2014. Program Pertanian Nasional Tahun 2015. Pusat Penyuluhan Pertanian, Jakarta.
- Balitbangtan. 2011. Pedoman Umum Spektrum Diseminasi Multi Channel. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



2011.

- Sumardjo, R., S.H. Mulyandari, D. Prawiranegara, dan L. Darmawan. 2013. Sistem Diseminasi Inovasi Pertanian Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Keberdayaan Petani Sayuran. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB. Bogor.
- Taylor, H.M. and B. Klepper. 1978. The role of rooting characteristics in the supply of water to plants. *Advances in agronomy* 30:99-128.
- Wahyuningrum, R.D., S.S. Hariadi, Sulasmi, dan Gunawan. 2014. Efektivitas Media Komunikasi dalam Diseminasi Inovasi Ayam KUB untuk Mendukung Kedaulatan Pangan. Laporan Akhir. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
- Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins., 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBERDAYAAN USAHA SAPI PERAH RAKYAT DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI SUSU (Studi kasus di di Kabupaten Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah)

Mukson, M. Handayani dan H. Setiyawan

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang
e-mail : mukson.fapetundip@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor pemberdayaan usaha sapi perah rakyat di Kabupaten Semarang dan Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai. Penentuan lokasi diambil secara *purposive sampling*, diambil 2 Kabupaten Semarang dan Boyolali dengan pertimbangan merupakan wilayah yang populasi sapi perah terbanyak di Jawa Tengah. Sampel peternak diambil sebanyak 30 responden secara acak sederhana. Data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan statistik dengan model regresi linier berganda. Variabel dependen (Y) produksi susu dan sebagai variabel independen (x1 sd. x8) masing-masing adalah jumlah ternak laktasi (x1), umur peternak (x2), jenis pekerjaan (x3), pengalaman (x4), harga susu (x5), Jumlah anggota rumah tangga (x6), pendidikan peternak (x7) dan motivasi usaha (x8). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi susu rata-rata sebanyak 10,18 liter/ekor/hari. Produksi susu masih di bawah target revitalisasi persusuan nasional sebesar 15 liter/ekor/hari. Analisis faktor-faktor pemberdayaan usaha sapi perah rakyat secara bersama-sama sangat nyata ($P < 0,01$) dipengaruhi oleh faktor x1 sampai dengan x8. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi susu pada peternak sapi perah rakyat perlu memperhatikan aspek pemberdayaan yang antara lain aspek teknis, sosial dan ekonomi.

Kata kunci: faktor pemberdayaan, sapi perah rakyat, produksi susu.

PENDAHULUAN

Usaha sapi perah merupakan industri biologis yang memerlukan penanganan yang baik, mulai dari pengadaan sarana produksi, aspek budidaya ternak dan pemasaran produk serta penanganan pasca panen. Kondisi saat ini, pengelolaan usaha sapi perah rakyat masih dilakukan secara tradisional dan belum banyak memperhatikan berbagai aspek usaha, sehingga usaha sapi perah rakyat tidak banyak mengalami kemajuan. Upaya peningkatan produktivitas usaha sapi perah perlu mendorong berbagai faktor usaha seperti peningkatan kualitas SDM (sumberdaya manusia) peternak, zooteknis usaha, sosial, ekonomi,



kelembagaan dan lingkungan usaha, agar usaha dapat terus berlangsung dan memberikan jaminan atau prospek usaha yang menguntungkan.

Produksi susu yang dihasilkan dari usaha peternakan sapi perah rakyat masih rendah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama industri pengolah susu (IPS). Permasalahan utama menurut Siregar (1989) antara lain disebabkan oleh : 1) Populasi sapi perah relatif masih sedikit, sementara permintaan susu terus meningkat sehubungan dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, 2) Kesadaran pentingnya pangan bergizi, 3) Produktivitas ternak sapi perah masih belum memadai, yang disebabkan oleh pengelolaan usaha mulai dari pakan, kesehatan, reproduksi belum ditangani dengan baik dan 4) Tingkat pengetahuan peternak masih terbatas terutama aspek yang terkait dengan manajemen usaha. Rendahnya produksi dan produktivitas susu dalam negeri antara lain juga disebabkan oleh terbatasnya modal usaha, skala kepemilikan ternak yang masih relatif kecil, pemberian pakan baik kualitas dan kuantitas masih terbatas, kebersihan kandang dan penanganan produk pasca panen dan pemasaran yang terbatas (Boediyana, 2009 dan Yulianto, 2011).

Potensi usaha sapi perah di Jawa Tengah sangat besar, terutama dari aspek populasi, dan produksi susu yang dihasilkan. Data statistik peternakan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 populasi sapi perah di Jawa Tengah sebanyak 100.868,08 ekor dan produksi susu sebesar 95.075.227 liter. Namun dilihat dari produktivitas susu rata-rata masih rendah, yaitu sebesar 7 - 10 liter.per/hari. Data produktivitas susu di Jawa Tengah masih di Bawah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

Upaya peningkatan produktivitas usaha sapi perah perlu terus dilakukan, mengingat agribisnis sapi perah mampu menggerakkan sektor ekonomi daerah melalui upaya pengembangan sub sistem dalam agribisnis sapi perah, mulai dari hulu (pengadaan sarana dan prasaranan produksi), *on farm* (budi daya), sampai hilir (pengolahan dan pemasaran). Peningkatan produktivitas susu, perlu memberhatikan berbagai aspek, terutama terkait dengan aspek sumberdaya manusia dan faktor-faktor yang terkait dengan



pengembangan usaha sapi perah. Menurut Mardikanto (2010) pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, dalam penelitian ini dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha sapi perah rakyat di Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh manfaat dan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha sapi perah rakyat dalam upaya peningkatan produktivitas usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, merupakan wilayah sentra sapi perah di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dan observasi pada usaha sapi perah rakyat. Metode survei yang dilakukan adalah mengambil sampel peternak sapi perah dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun dan Effendi, 1989). Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2016. Lokasi penelitian diambil 1 kecamatan tiap kabupaten, secara “purposive sampling”, dengan pertimbangan populasi sapi perah cukup banyak, yaitu diambil Kecamatan Getasan (Kabupaten Semarang) dan Kecamatan Musuk (Kabupaten Boyolali). Masing-masing kecamatan diambil 3 Kelompok Tani Ternak sapi perah yang cukup aktif, sehingga secara keseluruhan ada 6 KTT. Sampel peternak sapi perah diambil secara acak sederhana, diambil sebanyak 5 responden per KTT, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 30 peternak sapi perah.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan peternak sapi perah, meliputi aspek identitas responden, kepemilikan ternak, produksi susu, kegiatan usaha sapi perah dan pemasaran produk susu, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi atau lembaga lain yang terkait dengan masalah penelitian. Data dianalisis secara deskriptif dan secara statistik.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sapi perah rakyat dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda sesuai petunjuk Rochaety *et al.* (2009), sebagai berikut:



$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + e, \dots\dots\dots(1)$$

Dimana Y sebagai variabel dependen, produksi susu (liter/ekor/hari) dan x_1 sampai dengan x_8 sebagai variabel independen (pemberdayaan usaha), masing-masing adalah kepemilikan ternak sapi laktasi (x_1 =ekor), umur peternak (x_2 =tahun), jenis pekerjaan (x_3 =skor), pengalaman usaha (x_4 =tahun), harga susu (x_5 =Rp/liter), jumlah anggota rumah tangga (x_6 =orang), pendidikan (x_7 =tahun), dan motivasi usaha (x_8 =skor), a = konstanta dan $b_1, b_2, \dots b_n$ = koefisien regresi. Uji F digunakan untuk menguji model regresi linier berganda secara keseluruhan variabel independen dengan taraf signifikan 1% dan 5%. Sedangkan Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Peternakan Sapi Perah Di Jawa Tengah

Produksi susu merupakan tujuan utama dalam kegiatan usaha sapi perah. Berdasarkan produksi susu, pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 46.906.493 liter (Kab. Boyolali) dan 27.530.077 (Kab. Semarang), mempunyai sumbangan kurang lebih 76,3 %, dari total produksi susu di Jawa Tengah. Selama 5 tahun (2009-2013) produksi susu di Kabupaten Boyolali tumbuh 7,15%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan produksi susu di Jawa Tengah, yaitu sebesar 1,73%, sedangkan di Kabupaten Semarang mengalami penurunan 1,35%.

Perkembangan populasi sapi perah di lokasi penelitian selama 5 tahun, menunjukkan pertumbuhan positif (Kabupaten Semarang), yaitu sebesar 2,99%, sedangkan di Kab. Semarang turun 8,30%), demikian juga tingkat Jawa Tengah turun sebesar 1,42%. Perkembangan populasi sapi perah dan Produksi susu di Kabupaten Boyolali dan Semarang dapat dilihat pada Tabel 1.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 1. Perkembangan Populasi Sapi Perah dan Produksi Susu di Kabupaten Boyolali dan Semarang Tahun 2009 - 2013

No.	Tahun	Kabupaten Boyolali		Kabupaten Semarang	
		Populasi Sapi Perah (ekor)	Produksi Susu (Liter)	Populasi Sapi Perah (ekor)	Produksi Susu (Liter)
1.	2009	62.038	35.910.000	35.451	30.039.838
2.	2010	62.480	42.522.500	37.999	34.568.345
3.	2011	87.793	46.260.000	36.962	34.761.635
4.	2012	88.533	46.775.509	39.017	34.386.871
5.	2013*)	61.8878	46.906.493	22.408	27.530.077
r (%)		2,99	7,15	(8,30)	(1,35)

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (2014)

*)Hasil sensus pertanian ST 13

Gambaran Identitas Responden Peternak Sapi Perah

Berdasarkan Tabel 2. bahwa sebagian besar responden peternak berada pada kisaran umur 31-55 tahun, di Kabupaten Boyolali sebanyak 12 orang (80,00%) dan di Kabupaten Semarang sebanyak 9 orang (60,00%). Pendidikan responden peternak sebagian besar adalah SMA, di Kabupaten Boyolali sebanyak 9 orang (60,00%) dan Kabupaten Semarang sebanyak 7 orang (46,67%). Pekerjaan utama responden peternak di Kabupaten Boyolali sebagai peternak sebanyak 9 orang (60,00%) dan Kabupaten Semarang sebagian besar sebagai petani sebanyak 7 orang (46,67%). Rata-rata kepemilikan ternak sebagian besar pada kisaran 1-2 ekor, di Kabupaten Boyolali sebanyak 9 orang (60,00%) dan Kabupaten Semarang sebanyak 12 orang (80,00%). Produksi susu sebagian besar pada kisaran 5 - 8 liter/ekor/hari, di Kabupaten Boyolali sebanyak 11 orang (73,33%) dan Kabupaten Semarang sebanyak 8 orang (53,33%). Pengalaman usaha sebagai peternak di Kabupaten Boyolali pada kisaran umur 1 - 10 tahun sebanyak 11 orang (73,33%), sedangkan pada Kabupaten Semarang pada kisaran umur 11-20 tahun, sebanyak 7 orang (46,67%). Produksi susu yang dihasilkan rata-rata sebesar 10,18 liter/ekor/hari, masih dibawah target revitalisasi persusuan nasional yang diharapkan sapi perah mampu memproduksi rata-rata sebanyak 15 liter/ekor/hari.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 2. Karakteristik Responden Peternak Sapi Perah di Lokasi Penelitian

No.	Uraian	Kab. Boyolali (n=15)		Kab. Semarang (n=15)	
1.	Umur (th):				
	• 20-30	2	13,33%	1	6,67%
	• 31-55	12	80,00%	9	60,00%
	• > 55	1	6,67%	5	33,33%
2.	Pendidikan :				
	• SD	3	20,00%	6	40,00%
	• SMP	1	6,67%	2	13,33%
	• SMA	9	60,00%	7	46,67%
	• PT	2	13,33%	-	-
3	Pekerjaan Utama :				
	• Petani	4	26,67%	7	46,67%
	• Peternak	9	60,00%	6	40,00%
	• Lainnya	2	13,33%	2	13,33%
4.	Rata-rata Kepemilikan Ternak Laktasi (ekor):				
	• 1-2	9	60,00%	12	80,00%
	• 3-4	4	26,67%	1	6,67%
	• >4	1	6,67%	2	13,33%
5.	Produksi Susu (ltr/ekor/hari):				
	• 5 – 8	11	73,33%	8	53,33%
	• 9 – 12	2	13,33%	5	33,33%
	• >12	2	13,33%	2	13,33%
6.	Pengalaman Usaha (th):				
	• 1- 10	11	73,33%	4	26,67%
	• 11- 20	2	13,33%	7	46,67%
	• >20	2	13,33%	4	26,67%

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Usaha Sapi Perah Rakyat di Lokasi Penelitian

Penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha sapi perah rakyat untuk peningkatan produksi susu di lokasi penelitian menggunakan model regresi linier berganda, dengan variabel dependen (Y= produksi susu) dan variabel independen (pemberdayaan) terdiri dari x1 (jumlah sapi laktasi), x2 (umur peternak), x3 (jenis pekerjaan), x4 (pengalaman), x5 (harga susu), x6 (jumlah anggota rumah tangga), x7 (pendidikan) dan x8 (motivasi



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

usaha) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen sangat nyata ($P < 0,01$) mempengaruhi produksi susu sapi perah. Hasil analisis regresi berganda di sajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Usaha Sapi Perah Rakyat di Lokasi Penelitian

No.	Faktor Pemberdayaan	Koefisien Regresi	Sign.
1.	Konstanta	-91,671	
2.	Jumlah ternak sapi laktasi (x1)	4,485	0,05*)
3.	Umur peternak (x2)	-1,323	0,05*)
4.	Jenis pekerjaan (x3)	8,945	0,297
5.	Pengalaman usaha (x4)	1,639	0,03*)
6.	Harga susu (x5)	0,021	0,173
7.	Jumlah anggota RT (x6)	5,366	0,141
8.	Tingkat pendidikan (x7)	2,149	0,126
9.	Motivasi (x8)	6,550	0,489
10.	Fhit	3.152	0,00**)
	R ²	0,57	

Keterangan : **) sangat nyata (1%) dan *) nyata (5%)

Hasil ini menunjukkan faktor pemberdayaan usaha sapi perah sangat terkait dengan faktor sosial, ekonomi dan teknis. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012) bahwa upaya pemberdayaan masyarakat meliputi tiga aspek, yaitu: 1) potensi untuk berkembang (*enabling*), bahwa setiap individu/masyarakat mempunyai potensi yang perlu didorong dan dimotivasi untuk berkembang, 2) memperkuat daya yang dimiliki (*empowering*) yang dimiliki, dalam aspek ini perlu diperhatikan pendidikan, akses terhadap sumberdaya ekonomi dan pasar serta infrastruktur dan 3) aspek perlindungan yang mengarah pada upaya mengurangi persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Berdasarkan faktor-faktor pemberdayaan, maka perlu upaya mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan sumberdaya manusia peternak, baik terkait dengan pendidikan, motivasi usaha, permodalan, pasar, infrastruktur dan pelatihan dalam upaya peningkatan produksi susu.

Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa faktor pemberdayaan secara parsial adalah faktor jumlah sapi perah, mempunyai pengaruh positif dan nyata, kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan ternak sapi perah masih menjadi



kendala dalam pengembangan usaha. Di samping itu, juga dipengaruhi oleh pengalaman usaha, dalam hal pengalaman perlu adanya pelatihan yang mendukung sehingga diperoleh penguasaan teknologi yang mampu meningkatkan produksi susu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nuraeni dan Purwanto (2006) yang menyebutkan bahwa potensi sumberdaya dan analisis pendapatan usaha peternakan sapi perah di Kabupaten Sinjai dihasilkan bahwa potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sarana penunjang berpengaruh pada pengembangan usaha sapi perah. Hasil penelitian Turinawe *et al.* (2012) penggunaan teknologi peningkatan pakan berserat berpengaruh sangat nyata terhadap peningkatan profit margin dibanding pakan lokal. Penggunaan teknologi pakan dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi antara lain umur peternak, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas kepemilikan lahan, jumlah sapi perah. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,57, artinya faktor pemberdayaan usaha sapi perah rakyat dalam upaya peningkatan produksi susu sebesar 57,0% dapat dijelaskan oleh faktor x1 sampai dengan x8, sedangkan sisanya sebesar 43,0% disebabkan oleh faktor lain diluar model.

PENUTUP

Produksi susu rata-rata usaha ternak sapi perah rakyat masih relatif rendah, dibawah standar revitalisasi persusuan nasional (10,18 vs 15 liter/ekor/hari). Faktor-faktor pemberdayaan usaha sapi perah rakyat dipengaruhi oleh faktor jumlah sapi laktasi, umur peternak, jenis pekerjaan, pengalaman usaha, harga susu, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan dan motivasi usaha. Perlu dorongan berbagai pihak, khususnya stakeholder yang bergerak di bidang usaha sapi perah dan industri pengolah susu untuk meningkatkan sumberdaya manusia peternak, melalui pemberdayaan peternak. Langkah yang dilalukan antara lain perlunya peningkatan skala usaha dengan diikuti berbagai program pelatihan dan motivasi usaha dan dukungan pasar terutama harga susu.



DAFTAR PUSTAKA

- Boediyana, T. 2009. Pengembangan model usaha agribisnis sapi perah dalam upaya peningkatan pendapatan usaha kecil dan menengah. Makalah dalam Workshop oleh Ditjen P2HP, Bandung.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah. 2014. Statistik Peternakan Tahun 2014. Tarubudaya, Ungaran.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah. 2015. Statistik Peternakan Tahun 2015. Tarubudaya, Ungaran.
- Mardikanto, T dan P. Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Cetakan ke-3. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Nuraeni dan Purwanta. 2006. Potensi sumberdaya dan analisis pendapatan usaha peternakan sapi perah di Kabupaten Sinjai. Jurnal Agrisistem. 2 (1) : 8 - 17
- Rochaety, E., R. Tresnati dan A.M. Latief. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Edisi Revisi. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1996. Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.
- Siregar, S. 1998. Sapi Perah, Jenis, Teknik Pemeliharaan dan Analisa Usaha. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.
- Turinawe, A., J. Mugisha, dan J. Kabirizi. 2012. Socio-economic evaluation of improved forage technologies in smallholder dairy cattle farming systems in Uganda. Journal of Agricultural Science. Vol. 4 (3) : 163 - 173
- Yulianto, H. 2011. Peningkatan produksi dan konsumsi susu segar dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas. Seminar Milk Day : Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kementerian Pertanian. Semarang. June 7, 2011. p : 1-5



PERAN KELOMPOK DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PETANI APEL

(Studi Kasus Petani Apel di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu)

Acep Hariri ¹⁾ Sunarru Samsi Hariadi, Roso Witjaksono ²⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

²⁾Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan SPs UGM

Email : acep101984@gmail.com

ABSTRAK

Kota Batu merupakan salah satu daerah andalan pariwisata di Jawa Timur. Perkembangan wisata di Kota Batu sangat pesat. Pada tahun 2015 lebih dari 3,5 juta orang mengunjungi Kota Batu. Salah satu wisata yang dipromosikan adalah bidang pertanian seperti petik apel. Apel merupakan komoditas unggulan Kota Batu, bahkan buah apel menjadi ikon Kota Batu. Kondisi apel saat ini terutama di Desa Punten mengalami penurunan. Kendala cuaca dan mahalanya budidaya menjadikan petani banyak beralih ke tanaman jeruk. Kelompok sebagai media belajar, kerjasama dan usaha memiliki peranan dalam mempertahankan keberlangsungan apel di Kota Batu. Apel malang sebagai buah khas Kota Batu diharapkan mampu bertahan dan bersaing dengan produk luar sehingga petani lebih berdaya dalam menghadapi tantangan pasar bebas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kelompok dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing petani apel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kelompok memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator dalam pengembangan agribisnis apel. Kelompok berusaha menjaga tradisi leluhur dalam budidaya apel. Permasalahan dan tantangan dilakukan bersama dalam kelompok. Peran kelompok akan banyak menguatkan dan meningkatkan daya saing petani di pasar bebas.

Kata kunci: Kelompok, agribisnis apel, petani apel.

ABSTRACT

Batu City is one of the mainstays of tourism in East Java. Tourist developments in Batu City very rapidly. In 2015 more than 3.5 million people visited the Batu City. One of the tours that promoted agriculture is like picking apples. Apples are an excellent commodities in Batu City, even apples become an icon of Batu. Apples condition today especially in Punten decreased. Weather constraints and the high cost of farming and farmers are switching to citrus crops. The group as a medium of learning, cooperation and businesses have a role in maintaining the sustainability of apples in Batu City. Poor apples as fruit typical of Batu expected to survive and compete with foreign products so that farmers are more helpless in facing the challenges of the free market. The purpose of this study was to determine the role of the group in maintaining the sustainability and competitiveness of apple growers. The approach used in this study is qualitative. The group has a role as a facilitator and motivator in the development of agribusiness apples. The group tries to keep ancestral traditions in the cultivation of apples. The problems and challenges do together in groups. The role of the group will be a lot strengthen and improve the competitiveness of farmers in a global market.

Keywords: Group, agribusiness apple, apple growers



PENDAHULUAN

Kota Batu merupakan salah satu lokasi pavorit wisata di Propinsi Jawa Timur. Setiap akhir pekan Kota Batu selalu dipadai oleh wisatawan yang ingin menikmati sejuknya Kota Batu. Perkembangan sektor wisata di Kota Batu sangat pesat. Hal ini terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pada tahun 2015 lebih dari 3,5 juta orang mengunjungi Kota Batu dan diprediksi akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya wahana rekreasi di Kota Batu.

Salah satu wisata yang dipromosikan adalah bidang pertanian seperti petik apel, petik sayur maupun produk horti yang lain. Apel merupakan komoditas unggulan Kota Batu, bahkan buah apel menjadi ikon Kota Batu. Pengunjung akan mengetahui Kota Batu sebagai sentra penghasil apel, tidak jarang wisatawan datang ke Kota Batu hanya untuk mengetahui pohon apel. Kondisi apel saat ini terutama di Desa Punten mengalami penurunan. Kendala cuaca dan mahalanya biaya pupuk dan obat-obatan menjadikan banyak petani yang beralih dari tanaman apel ke tanaman jeruk. Permasalahan tersebut sangat terasa dengan turunnya produksi apel. Upaya sudah dilakukan oleh kelompok petani.

Kelompok sebagai media belajar, kerjasama dan usaha memiliki peranan dalam mempertahankan keberlangsungan apel di Kota Batu. Kelompok memberikan sarana untuk diskusi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Semua lembaga pertanian baik kelompok maupun lembaga lainnya dapat berperan dengan baik dalam setiap tahapan sistem agribisnis asalkan dapat menguntungkan bagi petani (Cahyono dan Tjokropandojo, 2013). Kelompok diharapkan mampu mendorong petani agar tetap menjaga komoditas apel dengan memperbaiki teknologi dalam mendukung keberhasilan produksi apel. Kelompok juga diharapkan mampu mendorong petani untuk mampu menjaga dan bersaing dengan petani lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kelompok dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing petani apel.



METODE PENELITIAN

Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengungkap fenomena dan makna yang ada pada kelompok yang akan peran kelompok dalam menjaga dan meningkatkan daya saing petani apel.

Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan ditentukan secara sengaja (*purposive*) sesuai dengan penelitian tentang peran kelompok dalam menjaga dan meningkatkan daya saing petani apel di Desa Punten Kota Batu. Informan penelitian ditentukan dan diwawancarai berdasarkan kemungkinannya dalam memberikan data secara menyeluruh dan mendalam tentang perkembangan agribisnis apel. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap para informan yang telah dipilih secara selektif. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus, anggota dan penyuluh setempat.

Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

Wawancara mendalam

Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur, yaitu struktur wawancara tidak terlalu ketat, lebih fleksibel mengenai urutan topik yang dibahas.

Pengamatan partisipan (Participant Observation)

Observasi dilakukan secara langsung pada obyek penelitian. Waktu observasi peneliti adalah saat melakukan wawancara sambil mengamati sekeliling dengan seksama.

Focus Group Discussion (FGD)

Pada tahap ini dilakukan pertemuan antara informan kunci untuk mengklarifikasi isu yang menjadi utama dalam penelitian ini.



Teknik Analisis Data

Teknik analisa data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Model ini terdiri dari tiga hal pokok yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal ini saling jalin menjalin pada saat, selama dan setelah pengumpulan data dilakukan sehingga seakan-akan membentuk siklus yang interaktif.

Triangulasi

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan data sehingga valid. Adapun triangulasi yang dilakukan ialah triangulasi sumber dengan pengecekan data antara pengurus kelompok dengan anggota kelompok serta penyuluh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realita dan Kondisi Petani Apel di Desa Punten

Komoditas apel merupakan usaha pertanian yang diusahakan sebagian besar petani di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Produksi apel di Desa Punten termasuk salah satu sentra penghasil apel di Kota Batu. Petani banyak yang mengembangkan apel karena menguntungkan dan ciri khas daerah tersebut. Akan tetapi kondisi iklim yang berubah serta mahalnyanya sarana produksi menyebabkan banyak petani beralih ke budiaya jeruk. Apalagi kondisi harga apel yang kadang naik bahkan rendah menyebabkan banyak petani berpikir untuk menanam apel. Pengembangan usaha apel memerlukan pupuk dan pestisida yang banyak sehingga biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Kondisi tersebut cukup membuat petani apel berpikir keras dalam melaksanakan usaha agribisnis apel.

Kelompok sebagai Media Komunikasi

Kelompok yang memiliki fungsi sebagai media belajar, kerjasama dan produksi banyak digunakan untuk melakukan komunikasi antar anggota dalam melakukan usaha apel. Banyaknya petani yang beralih menanam jeruk bukan berarti memisahkan kelompok atau memutuskan komunikasi. Akan tetapi jadi bervariasi dalam kelompok sehingga ada dibentuk seksi pengembangan jeruk



dan pengembangan apel. Kelompok selalu digunakan sebagai media komunikasi antar anggota dalam pengembangan usaha. Informasi yang didapat bisa sarana produksi, teknologi budidaya maupun pemasaran.

Komunikasi antar anggota dilakukan dengan media kebun apel miliki kelompok. Kebun apel kelompok dikelola bersama dengan koordinator seksi pengembangan usaha apel. Mulai pemeliharaan, pemupukan, penyemprotan dan panen dilakukan oleh anggota kelompok. Pada saat kegiatan tersebut banyak digunakan untuk saling tukar informasi dan mempererat hubungan antar anggota kelompok. Lahan bersama juga digunakan sebagai lahan percontohan dalam pengembangan apel.

Pengembangan kelompok sebagai wahana komunikasi perlu dijaga akan tetapi kelompok juga perlu ditingkatkan kapasitasnya. Selain itu, kelompok juga perlu dibekali dengan teknik dan metoda untuk meningkatkan kekuatan organisasi petani melalui latihan kerjasama, pemecahan masalah dan kepemimpinan (Sadono, D, 2008). Kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan upaya kelompok dalam menghadapi pasar global. Adanya berbagai upaya dapat membuat kelompok tahan terhadap berbagai rintangan terutama era pasar bebas.

Kelompok Sebagai Fasilitator dan Motivator

Anggota ikut kelompok karena memiliki persamaan tujuan dengan anggota yang lain serta menerima manfaat. Gibson (1996) menyatakan seseorang ikut kelompok pada hakikatnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan individu percaya mereka bisa memperoleh manfaat. Kelompok banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam keberhasilan petani apel. Berbagai bantuan yang datang kepada petani melalui kelompok. Berbagai bantuan akan diterima dan digunakan oleh kelompok. Bantuan yang datang bisa dari dinas, pemerintah pusat maupun lembaga lainnya. Nuryanti dan Swastika (2011) menyatakan peran sebuah kelompok tani tidak hanya digunakan sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru. Dalam hal ini peran kelompok bisa lebih banyak sebagai fasilitasi kegiatan penerapan teknologi. Petani apel banyak dibantu



dengan penggunaan teknologi terbaru meskipun belum sepenuhnya memecahkan permasalahan.

Salah satu teknologi yang banyak diterapkan adalah dengan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati. Upaya tersebut untuk menghindari kebutuhan biaya yang tinggi akan pupuk dan obat-obatan. Permasalahan iklim yang terus berkembang belum sepenuhnya ada solusi yang tepat agar perkembangan apel tidak terganggu apalagi pada saat berbunga. Petani akan mengalami kerugian apabila bunga apel jatuh akibat hujan yang lebat sehingga tidak terjadi buah apel.

Kelompok selalu memotivasi anggota untuk terus menjaga apel dari kepunahan. Salah satu motivasi ialah dengan menanam apel di lahan bersama, mendatangkan ahli apel dari lembaga penelitian untuk memecahkan masalah. Selain itu motivasi juga diberikan untuk menjaga apel karena tanaman ini khas hanya tumbuh di Kota Batu berbeda dengan jeruk yang bisa tumbuh di daerah manasaja. Selain itu dengan memelihara buah local mampu bersaing dipasaran global yang sudah tentu memiliki rasa yang segar dan enak. Dorongan selalu diberikan kelompok agar anggota tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

Penguatan petani melalui kelompok

Kelompok digunakan sebagai media dalam mencapai keberhasilan petani. Pembelajaran bagi petani apel akan lebih mudah melalui kelompok. Melalui media kelompok berbagai informasi akan lebih mudah diterima petani apel. Petani akan saling bertukar informasi tentang apel lewat kelompok. Meningkatkan kapasitas petani dalam melakukan usaha apel perlu dilakukan karena petani sebagai subyek dalam pembangunan sehingga memiliki peranan vital dalam pembangunan. Pengembangan kapasitas diharapkan dapat menyiapkan mereka untuk bersaing dengan petani apel baik dari lokal maupun luar. Penguatan SDM petani akan lebih mudah dan efektif lewat kelompok yang memiliki fungsi proses belajar, produksi dan usaha. Kelompok mampu meningkatkan SDM lewat pelatihan, diskusi, kunjungan atau metode lain yang dapat merangsang petani untuk berkembang.



Kekuatan kelompok menjaga daya saing di MEA

Kegiatan kolektif akan mempermudah dan memperlancar kegiatan usahatani. Saling membantu atau saling menolong menjadi modal utama dalam kelompok untuk memperkuat peran kelompok. Adanya media kelompok akan mempermudah mendapat perlindungan dari pemerintah dalam menghadapi MEA. Kelompok juga mampu menjaga petani agar bersaing dengan petani lainnya. Pembentukan kelompok diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan baik persaingan lokal maupun global. Kelompok banyak melakukan upaya untuk menjaga kualitas apel agar mampu bersaing dengan apel impor. Salah satu upaya adalah dengan mengadakan sekolah lapang (SL) bagi petani apel.

Adanya SL diharapkan petani akan mampu menghasilkan apel yang berkualitas. Selain itu kelompok juga membuka sarana untuk diskusi berbagai masalah yang dihadapi dan dipecahkan bersama. Cahyono dan Tjokropandojo (2013) menyatakan semakin petani menerima/terbuka pada hal yang baru misalnya informasi teknologi memudahkan lembaga petani berperan secara efektif. Hal senada Thoha (2012) menyebutkan dengan semakin banyak interaksi akan membentuk sentiment yang dapat mempermudah menuju keberhasilan kelompok. Keaktifan anggota kelompok akan mempermudah kelompok dalam membantu daya saing petani terutama petani apel.

PENUTUP

Kelompok memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator dalam pengembangan agribisnis apel. Kelompok digunakan sebagai media komunikasi antar anggota kelompok dalam menghadapi berbagai masalah. Permasalahan dan tantangan dilakukan bersama dalam kelompok sehingga cepat teratasi. Kelompok memiliki peran dalam menguatkan kapasitas petani sehingga mampu bersaing dengan petani apel luar. Adanya MEA perlu upaya yang keras agar petani mampu berdaya dan bersaing sehingga berjaya ditanah sendiri. Peran kelompok akan banyak menguatkan dan meningkatkan daya saing petani di



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pasar bebas sehingga penguatan kelompok harus dilakukan secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono dan Tjokropandojo. 2013. Peran Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Loka. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota BSAPPK Volume 2 No1.
- Hariadi, S.S. 2011. Dinamika Kelompok : Teori dan Aplikasi untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis. Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana UGM
- Nuryanti dan Swastika (2011). Peran Kelompok tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI, Volume 29 No. 2, Desember 2011:115-128
- Miles. M.B dan Huberman A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Sadono. 2008. Pemberdayaan petani: Paradigma baru penyuluhan pertanian Di Indonesia. Jurnal Penyuluhan Maret 2008 Volume 4 No.1.
- Thoha, M. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.



POLA TANAM UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN PERTANIAN DI DAERAH RAWA LEBAK SUMATERA SELATAN

Waluyo

Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan

Jl. Kol.H. Burlian KM 6 Palembang, Tlp : (0711) 410155; Fax: (0711)411845)

Email: waluyo240@yahoo.com

ABSTRAK

Lahan rawa lebak memiliki potensi yang besar dan merupakan salah satu pilihan strategis untuk mendukung perkembangan pertanian terutama tanaman pangan. Namun dalam pengembangan pertanian di lahan rawa lebak tidak terlepas dari beberapa kendala utama pengembangan rawa lebak selain karena faktor agrofisiknya terutama fluktuasi genangan air, juga karena faktor teknis, sosial ekonomi dan kelembagaannya. Usaha untuk memperbaiki kondisi lahan rawa lebak tersebut adalah melalui perbaikan teknologi sistem usahatani yang spesifik lokasi, yaitu dengan pengaturan pola tanam pada masing-masing tipologi lebak. Upaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di daerah lebak dapat dilakukan dengan pola tanam dan meningkatkan indek pertanaman. Pola tanam dalam setahun yang dapat diterapkan di lahan rawa lebak, adalah sebagai berikut: Lahan rawa lebak dangkal dengan pola tanam:padi – palawija/sayuran-padi,dengan masa tanam bulan Januari – Oktober/November. Lebak tengahan dengan pola tanam: padi – palawija umur genjah/sayuran- Padi II, dengan masa tanam bulan Februari – November, sedangkan Lebak dalam dengan pola tanam: padi – ikan. Adanya pola tanam diharapkan lahan rawa lebak dapat dilakukan penanaman 2 kali masa tanam padi dalam satu tahun.

Kata kunci: Pola tanam, rawa lebak, Tanaman pangan,sayuran

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan rawa dalam sektor pertanian di Indonesia dapat memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan pertanian. Lahan rawa dapat dijadikan pusat produksi pangan yang berkelanjutan dengan cara pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan yang sesuai, serasi dan seimbang dengan karakteristiknya.

Di Pulau Sumatera, lahan rawa lebak yang terluas terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, yakni mencapai 2,98 juta ha. Namun lahan rawa lebak yang sudah dimanfaatkan untuk tanaman padi di Sumatera Selatan baru seluas 368.690 ha, yang terdiri dari 70.908 ha lebak dangkal; 129.103 ha lebak tengahan, dan 168.670 ha lebak dalam (Puslitbangtanak, 2002).



Hidrologi lahan rawa lebak cocok untuk tanaman padi, oleh sebab itu padi salah satu komponen utama dalam sistem usahatani masyarakat lahan rawa lebak. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan varietas unggul padi di lahan lebak dapat mencapai 5 - 7 ton gabah kering panen per hektar, sehingga prospeknya sangat baik dalam meningkatkan produksi serta pendapatan petani melalui pengembangan sistem usahatani terpadu (Waluyo dan Suparwoto, 2010). Selanjutnya, Waluyo dan Ismail (1995) menyatakan bahwa kedelai yang ditanam di daerah lebak mempunyai prospek yang cukup baik dan bisa menghasilkan produksi sebesar 1,2 - 1,9 ton/ha.

Perbaikan teknologi melalui pola kondisi air rawa lebak dapat menunjang keberhasilan petani, sebab kondisi air pada lahan rawa lebak sepenuhnya alami. Masalah utama yang dijumpai pada lahan rawa lebak adalah genangan atau kekeringan yang datangnya belum dapat diramal dengan tepat (Waluyo dan Sudaryanto, 2008). Kondisi tergenang yang cukup lama akan berpengaruh pada tingkat kesuburan fisik, kimia, dan biologi tanah (Sudarsono, 1991).

Berdasarkan kedalaman genangan air maksimumnya lahan rawa lebak diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu lahan rawa lebak dangkal dengan kedalaman genangan air maksimum 50 cm, rawa tengahan 50 - 100 cm, dan rawa lebak dalam lebih dari 100 cm (Direktorat Rawa, 1992). selanjutnya Suwarno (1988), untuk mempermudah perencanaan dan penerapan teknologi usahatani, menambahkan kriteria dalam klasifikasi lahan rawa lebak dengan lamanya periode tergenang dan kering. Dengan adanya teknologi pengukuran pola kondisi air rawa dapat digunakan untuk menentukan alternatif waktu dan pola tanam di lahan rawa lebak.

Berdasarkan hasil penelitian Waluyo (2010), bahwa lahan lebak mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan produksi padi baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pada musim kemarau dan melalui penanaman padi pada musim hujan atau padi air dalam. Pertanaman padi pada musim penghujan dapat menghasilkan 6 - 7,5 ton gkp/ha (waluyo et al. 2009).



Berdasarkan sifat dan keragaman lahan rawa lebak tersebut perlu dilakukan tulisan tentang pola tanam untuk mendukung pengembangan pertanian di lahan rawa lebak Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pola tanam untuk mendukung pengembangan pertanian di rawa lebak dilaksanakan pada tahun 2015, di Kecamatan rantau Panjang, kabupaten Ogan Ilir. Metode yang digunakan penelitian adalah metode survei, dengan tahapan yang meliputi beberapa tahapan, antara lain:

1. Studi identifikasi lahan, antara lain karakteristik penggunaan lahan, tipologi lahan rawa lebak, pengamatan genangan rawa lebak, dan pola tanam rawa lebak. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan lokasi yang sesuai dan mendukung hipotesis yang telah ditentukan.
2. Perencanaan pola tanam lahan rawa lebak pada masing-masing tipologi lahan, Penelitian ini untuk mengetahui pola tanam dan kelayakan usahatani pada masing-masing tipologi rawa lebak.

Karakteristik Lahan Rawa Lebak

Berdasarkan lama dan ketinggian genangan air, lahan rawa lebak dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu lebak dangkal, lebak tengahan dan lebak dalam. **Lebak dangkal**, dicirikan oleh ketinggian genangan air < 50 cm dengan lama genangan < 3 bulan. Lahan ini umumnya mempunyai kesuburan tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan rawa tengahan dan rawa dalam, karena adanya proses pengkayaan dari luapan air sungai yang membawa lumpur dari wilayah hulu (Waluyo *et al*, 2008). Berdasarkan hasil pengkajian lahan rawa lebak dangkal dapat diterapkan dengan pola tanam padi-palawija-padi. (Waluyo, 2003).

Lebak tengahan, dicirikan oleh ketinggian genangan air antara 50 cm-100 cm, dengan lama genangan 3-6 bulan, mempunyai genangan air yang lebih dalam dan lebih lama daripada lebak dangkal. Oleh karena itu, masa pertanaman padi pada wilayah ini lebih belakng dibanding lebak dangkal. Pola



tanam pada wilayah ini umumnya mono kultur padi sedangkan komoditas palawija utamanya kacang tanah, jagung merupakan komoditas kedua setelah padi, Sedangkan **Lebak dalam** dicirikan oleh ketinggian genangan air diatas 100 cm, dengan lama genangan lebih dari 6 bulan. Pada musim kemarau dengan kondisi iklim yang normal masih ada genangan air. Untuk budidaya padi dilakukan satu kali dalam setahun, kecuali pada musim kering yang panjang akibat adanya anomali iklim seperti El-Nino. (Puslitanak, 2002).

Pemanfaatan Lahan Rawa Lebak Untuk Pertanian

Pemanfaatan lahan rawa lebak oleh penduduk setempat masih dilaksanakan secara tradisonal yang masih sangat tergantung pada kondisi alam. Kesulitan yang dihadapi petani ialah kondisi genangan air yang sulit untuk diprediksi secara tepat, terutama mengenai kapan mulainya, berapa tinggi genangan yang akan dihadapi, kapan mulai air surut, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Sangat berbeda dengan lahan yang berpengairan, dimana petani dapat mengatur kondisi tinggi dan lama genangan setiap saat. Dalam hal ini petani pada umumnya berspekulasi menghadapi kondisi alam, sehingga petani sering gagal panen karena banjir atau kekeringan yang mendadak dan ekstrim. (Tim Puslitanak, 2007).

Pertanian di lahan rawa lebak dimulai akhir bulan Februari dimana permukaan air cenderung mulai turun, pengerjaan sawah lebak dangkal dimulai, dan dilanjutkan pada lahan rawa lebak tengahan dan rawa lebak dala.

Pengelolaan Lahan Dan Sistem Usahatani

Sistem pengelolaan lahan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan pertanian di lahan rawa lebak sesuai dengan agroekosistem setempat. Sistem pengelolaan lahan yang dianjurkan untuk tipologi lahan rawa lebak (Tabel 1).

Genangan air pada lahan lebak sangat dipengaruhi oleh pola hujan yang pada suatu hamparan lahan dapat dijumpai berbagai tipe genangan air, baik berupa dangkal maupun lebak tengahan dan lebak dalam.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 1. Sistem pengelolaan lahan yang dianjurkan untuk setiap tipologi lahan

Tipologi Lahan	Penataan Lahan	Pola Tanam yang dianjurkan
Lebak Dangkal	Sawah tadah hujan	Padi-palawija-Padi
	Sistem Surjan	Guludan : Palawija 3 X Tabukan : Padi-palawija-padi
	Caren	Padi-palawija-padi
Lebak Tengahan	Sistem hampang /mina padi	padi-palawija-padi+ikan
Lebak Dalam	Sawah lebak	padi+ikan

Sumber: Waluyo. (2010)

Tanaman pangan utama yang diusahakan di lahan lebak adalah padi, sedangkan palawija seperti jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tunggak, ubi jalar dan ubi alabio dalam luasan terbatas, biasanya ditanam pada guludan surjan di lebak dangkal. Varietas padi unggul yang beradaptasi dan tumbuh dengan baik di lahan lebak adalah Inpara 3, Inpara 4, Inpari 22 dengan kisaran hasil 4-7 t/ha. Sedangkan varietas Inpara 1 dan Inpara 2 cukup baik di lahan rawa lebak kabupaten Banyuasin (Suparwoto dan Waluyo, 2011).

Peningkatan produksi dan pendapatan di lahan lebak dapat dilakukan juga dengan penerapan sistem usahatani yang mencakup pengaturan pola tanam dan budidaya komoditas yang disesuaikan dengan penataan lahan untuk setiap tipologi lahan (Tabel 2). Pola tanam untuk lahan lebak dangkal dan menengah bisa berupa padi-palawija-padi, sedangkan untuk lebak dalam airnya dapat ditanami padi sekali setahun dengan kombinasi budidaya ikan (Waluyo, 2000).

Analisa Usahatani

Kelayakan pengembangan usahatani tidaklah cukup bila hanya dilihat dari segi peningkatan produksi tetapi juga dari segi kelayakan sosial ekonominya. Dari hasil wawancara sistem usahatani di desa Tanjung Alai terlihat bahwa pengembangan sistem usahatani melalui pengembangan sistem usahatani padi dan kedelai, selain meningkatkan produksi juga pendapatan petani (Tabel 3). Selanjutnya nilai Incremental Benefit Cost Ratio (IBCR) yang



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

lebih besar dari satu menunjukkan bahwa usahatani tersebut menguntungkan. Penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak pada usahatani dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari upah yang berlaku setempat berarti dapat meningkatkan lapangan kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi.

Tabel 2. Pola pertanian sawah lebak di Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Jenis lebak	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Lebak dangkal												
	Semai		Tanam-panen			Tanam palawija				Tanam padi air dalam		
Lebak tengahan												
	Semai		Tanam padi-panen				Tanam palawija(genjah)			Tanam padi		
Lebak dalam												
	Genangan air ikan		Semai		Tanam padi-panen + ikan						Bera	

Sumber: Waluyo. (2010)

Kelayakan pengembangan teknologi usahatani tidak cukup hanya dilihat dari segi peningkatan produksi, tetapi juga dari segi kelayakan sosial ekonominya. Hasil penelitian pengembangan sistem usahatani, menunjukkan bahwa pengembangan pola tanam dan teknik budidaya padi dan kedelai dapat meningkatkan produksi dan pendapatan usahatani (Tabel 3)

Tabel 3. Analisis ekonomi usahatani padi dan kedelai di lahan lebak

Uraian	Padi MK I	Kedelai	Padi MH
Hasil (t/ha)	5,0	1,8	6,0
Penerimaan (Rp)	17.500.000	10.800.000	21.000.000
Biaya produksi (Rp)	1.800.000	1.500.000	2.150.000
Biaya tenaga kerja (Rp)	5.800.000	3.200.000	6.400.000
Total Biaya (Rp)	7.600.000	4.700.000	8.550.000
Pendapatan (Rp 000)	9.900.000	6.100.000	12.450.000
Incremental B-C Ratio	1,3	1,29	1,5

Hasil pengkajian teknologi tanaman pangan lainnya selama beberapa tahun di Sumsel menunjukkan bahwa teknologi sistem usahatani yang



mencakup pemanduan komoditas dan teknik budidaya sudah cukup mantap dan layak dikembangkan.

PENUTUP

Lahan rawa lebak memiliki potensi yang besar dan merupakan salah satu pilihan strategis sebagai sumber pertumbuhan produksi pertanian terutama tanaman pangan mendukung program ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Kebijakan yang perlu diperhatikan untuk optimalisasdi pengembangan lahan rawa lebak perlu dilakukan melalui pendekatan holistic dan partisipatif.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan sumberdaya hendaknya pengembangan pengembangan lahan rawa hendaknya diarahkan kepada usaha aneka komoditas pengelolaan tanaman terpadu (PTT) sesuai dengan wilayah dan prospek pemasarannya.

Agar supaya pengembangan lahan rawa lebak secara optimal dengan baik, maka peningkatan koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi kerja antar instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Rawa. 1992. Kebijakan Departemen Pekerjaan Umum dalam Rangka Pengembangan Daerah rawa. Diskusi Pola Pengembangan Pertanian tanaman pangan di lahan pasang surut/lebak di Palembang, 30 Juli - 2 Agustus 1984 (tidak dipublikasi).
- Puslitbangtanak. 2002. Anomali iklim. Evaluasi dampak, peramalan dan teknologi antisipasinya. Untuk menekan resiko penurunan produksi. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat.
- Suparwoto dan waluyo. 2011. Pertumbuhan dan daya hasil padi Varietas Inpara 1, Inpara 2, dan Ciherang Di lahan rawa lebak tengahan kab. Banyuasin Sumatera selatan. Proseding Seminar Ilmiah Balai Besar Padi Sukamandi (Buku 1).
- Suwarno dan I.G. Ismail. 1991. Peluang dan tantangan peningkatan produksi padi di lahan rawa lebak. Proseding seminar nasional pemanfaatan potensi lahan rawa untuk pencapaian dan pelestarian swasembada pangan. Palembang, 23-24 Oktober 1991. p: 26-44.
- Puslitbangtanak. 2002. Anomali iklim. Evaluasi dampak, peramalan dan teknologi antisipasinya. Untuk menekan resiko penurunan produksi.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



- Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat
- Tim Puslitanak. 2007. Karakterisasi lahan rawa lebak Prima Tani desa Kota daro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Provinsi Sumatera Selatan. Badan Litbang Departemen Pertanian
- Waluyo dan I.G. Ismail. 1995. Prospek pengembangan tanaman pangan di lahan rawa lebak Sumatera Selatan. Makalah pada Seminar Nasional Pemanfaatan Lahan Rawa, di Kalimantan selatan. Banjarbaru 14-15 Februari 1995. 15p.
- Waluyo. 2000. Pola kondisi air rawa lebak sebagai penentu masa dan pola tanam padi dan kedelai di daerah Kayu Agung (OKI) Sumatera Selatan. Tesis Program Pasca sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. 108p.
- Waluyo dan Sudaryato. 2008. Fluktuasi genangan air lahan rawa lebak dan manfaatnya bagi bidang pertanian di Ogan komering Ilir. Jurnal Hidrosfir indonesia (BPPT) Jakarta.
- Waluyo, Suparwoto dan Jumakir. 2008. Karakteristik dan potensi lahan rawa lebak untuk pengembangan pertanian di Sumatera Selatan. Proseding Lokakarya Nasional BPTP Jambi.
- Waluyo, Suparwoto dan Rudy. S. 2008. Inovasi teknologi polatanam padi di lahan lebak untuk mendukung IP 200 di Sumsel. Proseding Seminar Nasional Balitbangda Sumatera Selatan. 2010.
- Waluyo, Suparwoto, dan I.W Supartha. 2009. Laporan Akhir Prima Tani di lahan Rawa Lebak, Kabupaten Ogan Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan.
- Waluyo. 2010. Prospek, potensi dan kajian rawa lebak sebagai areal produksi padi melalui penerapan teknologi spesifik lokasi di Sumatera selatan.
- Waluyo dan Suparwoto. 2011. Penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi untuk meningkatkan pendapatan petani rawa lebak di lokasi Prima tani Kab. Ogan Ilir Sumsel. Proseding. Seminar Nasional Balai Besar Padi Sukamandi (Buku 3).
- Wijaya Adhi, IPG., Nugroho, dan A. Syarifuddin, K. 1992. Sumber Daya Lahan Rawa; Potensi, Keterbatasan dan Pemanfaatan, Pp.19-38. Puslitbangtan, Badan Litbang Departemen Pertanian



KESIAPAN PETANI DAN PERAN PENYULUH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR

Wahyu Windari, Andi Warnaen, dan Nurlaili
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang,
Jl. Dr. Cipto 144A Bedali, Lawang
wahyu_windari@yahoo.com

ABSTRAK

Kesiapan Petani dan Peran Penyuluh dalam Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dikaji untuk mendiskripsikan kesiapan petani dan peran penyuluh dalam menghadapi era berlakunya MEA di Kabupaten Probolinggo. Metode Penelitian adalah Metode kualitatif deskriptif, Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan adalah PPL, petani, Ketua Kelompok Tani/Gapoktan, tokoh masyarakat, Pejabat di lembaga penyuluhan dan pakar penyuluhan. Penelitian ini menelaah dan mendeskripsikan mengenai kesiapan Petani, PPL dan upaya dalam menghadapi era MEA di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petani belum siap dengan adanya liberalisasi ekonomi dan diberlakukannya MEA di awal Januari 2016. Ketidaksiapan ini nampak dari tidak pahamnya tentang adanya peluang dan ancaman MEA, rendahnya kualitas dan jumlah tenaga kerja pertanian, model pola usahatani yang masih tradisional, tidak memperhatikan aspek GAP dan GMP untuk menghasilkan produk ASUH, sebagaimana persyaratan produk pertanian yang bisa dipasarkan ditingkat ASEAN. Peran penyuluh dalam mendampingi petani dalam menyongsong MEA kurang optimal namun materi penyuluhan sudah sedikit mengarah pada upaya menghasilkan produk pertanian yang ASUH, tetapi belum berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini adalah peran penyuluh dalam mensosialisasikan peluang dan ancaman MEA perlu ditingkatkan, serta memerankan lembaga petani menjadi lembaga profit yang berbadan hukum untuk menangkap peluang MEA.

Kata kunci: Kesiapan Petani, Peran Penyuluh, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

THE READINESS OF FARMERS AND THE ROLE OF EXTENSION WORKERS TO FACE THE AEC ERA IN PROBOLINGGO REGENCY, EAST JAVA PROVINCE

ABSTRACT

The readiness of farmers and the role of extension workers in facing the enactment of AEC in Probolinggo Regency, East Java Province was studied to describe the farmer's readiness and the roles of extension workers in facing an AEC era in Probolinggo Regency. This research was a descriptive qualitative research. This research strategy was a case study. The sources of information was used as informants are PPL, farmer, Chairman of Farmers Group, community leaders, officials in the extension services and



extension specialists. This research was examines and describe the farmer's readiness, extension workers (PPL) and government's role in in activating BPP or BP3K roles on farmer's group empowerment in Probolinggo Regency to face the AEC era. The result showed that the farmers were not ready with the economic liberalization and the implementation of AEC in early January 2016. This uneasiness was visible from their less-understanding towards the opportunities and the threats of AEC, lack and low quality of agricultural labour, traditional farming system, do not pay attention to GAP and GMP aspects to produce ASUH's (Safe, Healthy, Intact, Halal) products as required for agricultural products that could be marketed in ASEAN and International levels. The role of extension workers in assisting farmers in facing the AEC wasn't optimal. Extension's materials already slightly directed to changes farmer's behavior that is to produce ASUH's agricultural products but it's not sustainable. This research's recommendation is the extension worker's role in socializing the opportunity and AEC's threat need to be improved, and portray the farmer's institution into a profit and legal institution to catch AEC's opportunities.

Keywords: *The farmer's readiness, The Role of extension workers, ASEAN Economic Community (AEC)*

PENDAHULUAN

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC (Asean Economic Community) adalah bentuk kerjasama ekonomi regional asia tenggara yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015 tepatnya bulan Desember. Tujuan utama MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.

Sektor pertanian hingga kini masih memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Peran strategis sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi antara lain: Penyedia pangan bagi penduduk Indonesia, penghasil devisa negara melalui ekspor, penyedia bahan baku industri, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan PDB, pengentasan kemiskinan dan perbaikan SDM pertanian melalui kegiatan Penyuluhan Pertanian (Kementan, 2008).

Kegiatan penyuluhan pertanian adalah suatu proses berkesinambungan untuk menyampaikan informasi serta teknologi yang berguna bagi petani dan keluarganya. Kegiatan penyuluhan diupayakan agar tidak menimbulkan ketergantungan petani kepada penyuluh, tetapi untuk menciptakan kemandirian



petani dengan memposisikannya sebagai wiraswasta agribisnis. Penyuluh pertanian menjadi ujung tombak pembangunan pertanian dalam menghadapi MEA tahun 2015, penyuluh mempunyai peranan strategis dalam menyiapkan SDM pertanian yang mampu berdaya saing dengan SDM Pertanian di Asia Tenggara.

Masyarakat Ekonomi Asean 2015 merupakan peluang yang sangat baik bagi petani, dengan dibukanya peluang pasar ekspor bagi produk-produk pertanian, namun Masyarakat Ekonomi Asean akan menjadi ancaman yang luar biasa bagi petani, dikarenakan produk petani akan bersaing dengan produk petani Negara ASEAN lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu untuk mengetahui kesiapan petani dalam menghadapi era berlakunya MEA di Kabupaten Probolinggo, mendiskripsikan peran penyuluh pertanian dalam menghadapi era berlakunya MEA di Kabupaten Probolinggo dan mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menangkap peluang dan menghadapi ancaman di era berlakunya MEA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai kesiapan petani, peran PPL dan upaya dalam menghadapi era MEA di Kabupaten Probolinggo. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive sampling*. Sumber informasi yang dapat dijadikan informan adalah PPL, petani, Ketua Kelompok Tani/Gapoktan, tokoh masyarakat, pejabat di lembaga penyuluhan dan pakar penyuluhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Observasi, (2) Wawancara secara mendalam (*indepth interviewing*), (3) Mengkaji dokumen dan arsip, dan (4) Pengumpulan data dengan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai penunjang. Validitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi data, triangulasi sumber dan triangulasi metode.



Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data, ada tiga komponen pokok dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasinya. Penarikan simpulan (verifikasi), tidak lepas dari reduksi dan penyajian data. Dari permulaan pengumpulan data mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi (Miles dan Huberman, 1984).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Petani dalam menghadapi Era Berlakunya MEA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Probolinggo belum paham tentang MEA, bahkan beberapa petani belum pernah mendengar tentang MEA. Sehingga adanya MEA tidak menjadi kekhawatiran serta ancaman bagi petani di Kabupaten Probolinggo. Petani di Probolinggo pun tidak melihat MEA sebagai suatu peluang. Peluang dan ancaman MEA tersebut tercermin dari cara bertani masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk tanaman padi misalnya, meskipun telah disampaikan tentang pentingnya pupuk berimbang, perlunya pupuk organik, serta sistem tanam padi jajar legowo akan lebih meningkatkan produktivitas, mereka tetap saja melakukan budidaya seperti kebiasaannya. Pasaribu, dkk (2014) menjelaskan bahwa Pasar tunggal akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan MEA juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global. Apabila melihat hal tersebut tentunya MEA harusnya menjadi peluang dan sekaligus ancaman bagi petani.

Materi penyuluhan belum menyentuh secara langsung kepada persiapan menjelang MEA. Budidaya secara organik dengan pembatasan penggunaan pupuk kimia sampai dengan pengukuran residu pestisida juga belum banyak dilakukan. Pertanian organik dirasakan sulit dan kurang diminati karena prosesnya yang lama dan kurang menjanjikan di mata petani. Menurut Dirjen



Kerjasama Perdagangan Internasional (2014) menjelaskan bahwa menjamin keamanan produk pangan telah menjadi sasaran pokok ASEAN. ASEAN telah mengembangkan *Good Agricultural Practices* (GAP), standar untuk produksi, penanganan panen dan pasca panen produk pertanian, batasan residu maksimum pestisida. Sehingga apabila petani ingin menangkap MEA menjadi peluang pemasaran ekspor, maka keamanan produk pangan menjadi syarat mutlak bagi pertanian Indonesia.

Masalah yang banyak dihadapi oleh petani adalah masalah tenaga kerja, kelembagaan dan harga produk yang tidak bersaing. Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (2014) menjelaskan apabila MEA terwujud pada tahun 2015, dapat dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Setiap warga negara dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tanpa adanya hambatan dari negara yang ditujunya itu. Kondisi dilapangan hampir seluruh wilayah di Kabupaten Probolinggo mengalami kesulitan tenaga kerja pertanian, hal ini disebabkan regenerasi petani yang tidak berjalan dengan baik. Para generasi muda pertanian, rata-rata tidak mau serta tidak diarahkan oleh orang tua nya untuk menjadi seorang petani yang sukses.

Peran Penyuluh Pertanian di Kab. Probolinggo dalam Menghadapi Era Berlakunya MEA

Penyuluh di Kabupaten Probolinggo mempunyai strategi dalam menyiapkan petani untuk menghadapi MEA, yaitu dengan cara melakukan penguatan kelembagaan petani yaitu Poktan dan Gapoktan. Lahan petani yang sempit yaitu rata-rata 0,25 ha, produksi tidak akan bisa bersaing serta tidak bisa kontinyu. Kelembagaan yang kokoh dianggap mampu menyelesaikan segala permasalahan dan persaingan global ditingkat ASEAN dan memenuhi kebutuhan produksi. Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada pihak yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung



pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strenghtening*) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa atau pihak luar yang lain seperti penyuluh atau LSM.

Materi khusus tentang MEA yang seharusnya disampaikan kepada petani belum nampak secara eksplisit dalam perencanaan penyuluhan di programa penyuluhan pertanian yang disusun. Informasi tentang MEA masih sebatas wacana, sosialisasi, dan sekedar sebagai bahan informasi. Meskipun sebenarnya materi penyuluhan tentang budidaya organik dan ketahanan pangan yang merupakan bagian dari materi MEA telah diberikan dan seharusnya sudah dipahami oleh petani. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPL di Probolinggo hanya sekedar tahu tentang MEA. PPL belum memahami dan belum ada keseriusan dalam mempersiapkan petani menghadapi MEA. Seperti yang disampaikan oleh RSD bahwa:

"Terkait mengenai MEA yang jelas kesiapan MEA dari berbagai level sudah berjalan sengaja atau tidak, kita sudah terbawa arus oleh MEA, petani mengerti atau tidak sudah berangkat dari MEA. Bagaimana kelembagaan supaya mandiri, permodalan dan itu semua untuk MEA, namun apabila ditanyakan tentang MEA saya yakin mereka tidak tau, namun mereka sudah masuk ke bagian dari MEA" (RSD, Agustus 2016).

Kerjasama ASEAN di bidang pangan, pertanian dan kehutanan meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah daya saing pangan, pertanian, dan produk kehutanan di pasar internasional, juga pemberdayaan petani melalui promosi koperasi. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa prakarsa menuju perwujudan integrasi ASEAN tentang bidang pangan, pertanian dan kehutanan dilakukan melalui harmonisasi kualitas dan standart jaminan kewan pangan dan standarisasi sertifikasi perdagangan, produk pertanian ASEAN diharapkan siap bersaing di pasar global dengan menawarkan makanan yang aman, sehat dan berkualitas (Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, 2011). Penyuluh



beranggapan bahwa MEA lebih menguntungkan para pengusaha yang sudah punya label Internasional daripada para petani kecil, sehingga menganggap hal ini tidak terlalu signifikan terhadap petani.

Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi MEA

Menghadapi semua permasalahan tersebut, maka ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Beberapa solusi yang mungkin dapat digunakan adalah pertama, meningkatkan peran penyuluh dalam mensosialisasikan peluang dan ancaman MEA ditingkat petani. Kedua, pelaksanaan program 3P yaitu Penyadaran (membangkitkan motivasi dan kepercayaan diri para petani), Peningkatan kapasitas (meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku petani sehingga dapat mendorong proses peningkatan pertanian), dan Pemberdayaan (proses perubahan sosial yang terencana dan melibatkan secara aktif para petani sehingga terwujud masyarakat petani yang sejahtera dan mandiri) melalui penumbuhan kelembagaan petani menjadi lembaga profit yang berbadan hukum. Ketiga, diberlakukannya standarisasi produk-produk pertanian dan pemberian ekolabel oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI). sendiri tetapi juga tetap dapat mengeksport produk-produknya ke luar negeri. Keempat meningkatkan minat generasi muda dalam bidang pertanian.

PENUTUP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain: (1) Petani belum siap dengan adanya liberalisasi ekonomi dan akan diberlakukannya MEA di awal Januari 2016. Ketidaksiapan ini nampak dari tidak fahamnya tentang adanya peluang dan ancaman MEA, rendahnya kualitas tenaga kerja pertanian, model pola berusaha tani yang masih tradisional, tidak memperhatikan aspek GAP dan GMP untuk menghasilkan produk ASUH, sebagaimana persyaratan produk pertanian yang bisa dipasarkan ditingkat ASEAN maupun Internasional. Petani tidak merasa khawatir dengan adanya MEA karena mereka berusaha tani dan melakukan budidaya belum berorientasi agribisnis sehingga hasil panen dikonsumsi sendiri sehingga imbas MEA tidak dirasakan; (2) Peran penyuluh dalam mendampingi petani dalam menyongsong



MEA kurang optimal. MEA sekedar informasi dan wacana dan belum terlalu dissosialisasikan di tingkat petani. Materi penyuluhan sudah sedikit mengarah pada upaya perubahan perilaku yaitu kelembagaan menghasilkan produk pertanian yang ASUH, tetapi belum intensif sehingga petani tetap melakukan budidaya dengan pola lama; (3) Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah daerah, tetapi gaung dan aktifitas belum terlalu nampak dan hanya sekedar wacana, belum menyentuh langsung pada permasalahan di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional. 2011. Buku Informasi Umum MEA. Jakarta: Kementerian Perdagangan
- Direktur Jendral Kerjasama Perdagangan Internasional. 2014. *Menuju ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Miles, Mathew B. and Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publication, Inc.
- Pasaribu, S.M., dkk. 2014. *Kajian Kesiapan Sektor Pertanian Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Balitbangtan
- Slamet M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.



PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN PADA UKM PANGAN LOKAL : KAJIAN PUSTAKA

Muhammad Fajri

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

fajri.litbangtan08@gmail.com

ABSTRAK

Pangan lokal terus digalakkan oleh pemerintah guna mendukung ketahanan pangan. Pada era MEA, daya saing produk pangan sangat ditentukan oleh mutu dan keamanannya. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan mutlak dilakukan pada produk olahan pangan lokal untuk memberikan jaminan. Industri pangan lokal yang biasanya berbasis di daerah pedesaan perlu didorong terus untuk menerapkan sistem keamanan pangan agar produk pangan lokal mampu bersaing di era pasar bebas. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah mengubah sistem kerja industri pangan lokal yang berbasis rumah tangga (home industry) menjadi industri pangan modern yang menitikberatkan pada standar mutu dan keamanan pangan. Faktor-faktor yang menentukan penerapan sistem mutu dan keamanan pangan lokal antara lain komitmen industri pangan lokal, kualitas sumber daya manusia, dukungan pemerintah setempat, inovasi teknologi, infrastruktur, standardisasi internasional, standar produksi dan sanitasi.

Kata kunci: keamanan, pangan lokal

IMPLEMENTATION OF FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL FOOD SMALL INDUSTRY : A REVIEW

ABSTRACT

Local food continues to be encouraged by the Government to promote food security. In the era of AEC, the competitiveness of the food product is largely determined by the quality and safety. The implementation of food safety management system to be conducted at local processed food products to provide a guarantee . Local food industry is usually based in rural areas should be encouraged continuously to implement food safety systems so that local food products able to compete in the free market era . The purpose of the application of this system is to change a working system based local food industry household (home industry) into a modern food industry which focuses on food quality and safety standards. Factors that determine the implementation of quality systems and local food security , among others, the commitment of local food industry , quality human resources , local government support , technological innovation , infrastructure , international standardization , production and sanitation standards.

Keywords: security, local food



PENDAHULUAN

Saat ini era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau AEC (*ASEAN Economic Community*) telah bergulir, yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN (Wikipedia, 2015). Salah satu produk perdagangan yang strategis dalam era MEA adalah produk pangan, termasuk di dalamnya pangan lokal. Setiap industri pangan yang ingin *go international* dan melakukan ekspor harus menerapkan standar mutu dan keamanan pangan. Berbagai standar internasional telah dirilis, di antaranya ISO 22000 mengenai Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

Standar sistem manajemen keamanan pangan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/jasa Indonesia di pasar global. Di samping itu tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan (BSN, 2014).

Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap perusahaan dan industri yang bergerak di bidang pengolahan pangan lokal agar mampu menerapkan inovasi teknologi produksi pangan baik mulai dari budidaya, pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan hingga distribusinya (Lintang dkk, 2013).

Di era MEA, tantangan dan tuntutan konsumen dan pasar semakin tinggi. Tuntutan tersebut lebih ditekankan pada aspek mutu dan keamanan produk pangan yang dihasilkan. Industri pangan harus menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (Thaheer, 2005). Bahkan, keamanan pangan tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekspor, namun juga diperlukan untuk menjaga keamanan pangan bagi konsumen dalam negeri (Kurniawan, 2008).

Sistem manajemen keamanan pangan merupakan suatu sistem yang mengkombinasikan unsur-unsur yang terdiri dari komunikasi interaktif antar organisasi, manajemen sistem internal perusahaan, program persyaratan dasar (PPD) keamanan pangan dan prinsip HACCP (*Hazard Analysis Critical Control*



Point). Sistem ini juga perlu dijalankan dalam kerangka sistem manajemen yang terstruktur dan terpadu (BSN, 2009).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh BSN (1998), HACCP adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang nyata (biologi, kimia, fisika, dan lainnya) bagi keamanan. Program persyaratan dasar (PPD) adalah kondisi dan kegiatan dasar yang penting untuk memelihara lingkungan yang higienis di seluruh rantai pangan yang sesuai untuk produksi, penanganan dan penyediaan produk akhir yang aman dan pangan yang aman untuk dikonsumsi manusia. PPD meliputi aspek *good manufacturing practices* (GMP) dan *sanitation standard operating procedure* (SSOP) (BSN, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur (kajian pustaka) terhadap berbagai tulisan yang terdapat di dalam jurnal, prosiding, buku dan artikel lainnya yang berkaitan. Setelah itu dilakukan sintesa atau perumusan rekomendasi terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan pangan sudah menjadi isu global antar negara terutama karena adanya risiko interkoneksi jaringan rantai makanan global. Isu keamanan pangan lebih difokuskan pada usaha kecil menengah (UKM) yang lebih banyak bermasalah dalam hal keamanan pangan (Hariyadi, 2008). Kebanyakan industri pangan yang muncul merupakan industri perorangan atau industri rumah tangga yang berskala kecil (Hariyadi dan Ratih, 2009).

Industri rumah tangga dan jasa boga lebih banyak dikaitkan dengan kejadian luar biasa (KLB) keamanan pangan. Sebagian besar KLB keamanan pangan disebabkan oleh mikroba. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah keamanan pangan adalah kurangnya sarana sanitasi dan higiene perorangan pada usaha kecil menengah (Hariyadi, 2015).

Beberapa kendala yang dihadapi UKM pangan dalam mengantisipasi



keamanan pangan antara lain, (1) praktek higienis dan proses produksi, (2) pengadaan prasarana dan fasilitas keamanan pangan, (3) sumber daya manusia, (4) sumber daya modal dan (5) pengetahuan dan informasi. Beberapa hal yang diperlukan di antaranya kebijakan pemerintah yang konsisten dan terpadu, kemauan politik dan perlindungan hukum, penyediaan sarana dan fasilitas keamanan pangan, pengadaan alat bantu pengolahan dan bahan tambahan pangan yang diperlukan (Hariyadi, 2015).

Sistem Manajemen Keamanan Pangan dilakukan dengan pendekatan metode HACCP. Dengan pendekatan ini, pengawasan keamanan pangan yang dikelola oleh perusahaan makanan, jasa boga, rumah makan, restoran maupun yang dikelola sebagai makanan jajanan dan rumah tangga dapat lebih terjamin mutunya karena setiap tahapan proses produksi dikendalikan potensi bahaya dan risiko yang timbul (Renosori, dkk, 2012).

Penerapan HACCP mengacu pada 5 (lima) langkah dan 7 (tujuh) prinsip (Thaheer, 2005). Lima langkah tersebut adalah : (1) pembentukan tim HACCP, (2) deskripsi produk, (3) identifikasi rencana penggunaan, (4) pembuatan diagram alir dan (5) konfirmasi diagram alir di lapangan. Sementara, 7 (tujuh) prinsip HACCP meliputi : (1) analisis bahaya, (2) penentuan titik kendali kritis, (3) penetapan batas kritis pada setiap titik kendali kritis, (4) sistem pemantauan titik kendali kritis, (5) penentuan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan pada titik kendali kritis, (6) penetapan prosedur verifikasi untuk memastikan pelaksanaa HACCP dan (7) dokumentasi semua prosedur dan catatan.

Implementasi HACCP membutuhkan dukungan dari semua sistem di perusahaan yang bersangkutan. Selain perbaikan sistem penunjang, implementasi HACCP juga didukung oleh implementasi GMP dan SSOP sebagai *pre-requisite* HACCP (Trisnawati, 2008). Keberhasilan PPD diperlukan untuk menjamin fasilitas pengolahan pangan telah dalam keadaan kondusif untuk memproduksi makanan yang aman (World Bank, 2013).

Menurut Girsang (2007), strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan penerapan sistem HACCP adalah (1) peningkatan komitmen manajemen untuk peningkatan mutu, (2) pembangunan sistem



sanitasi yang baik, (3) peningkatan standar mutu produk, (4) peningkatan kepercayaan konsumen atas produk melalui sertifikasi, (5) pelatihan SDM tentang HACCP dan (6) peningkatan inovasi teknologi produksi dengan peralatan yang lebih canggih.

Faktor higiene perorangan berpengaruh besar terhadap kemungkinan masuknya kontaminan ke dalam rantai pangan. Kesehatan dan kebersihan pengolah makanan mempunyai pengaruh yang cukup besar pada mutu produk yang dihasilkan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh (Agustina, 2005). Sosialisasi mengenai pentingnya HACCP kepada seluruh SDM yang terlibat mutlak diperlukan (Mutiarani, 2015).

Unit produksi harus memiliki kelayakan teknis dalam berbagai aspeknya untuk mendukung tercapainya keamanan produk pangan, termasuk tata letak fasilitas produksi. Tata letak pabrik adalah tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area (*space*) untuk penempatan mesin atau fasilitas penunjang produksi lainnya, kelancaran gerakan-gerakan material, penyimpanan material (*storage*) baik yang bersifat temporer maupun permanen, personil pekerja dan sebagainya (Wignjosoebroto, 2003). Tata letak fasilitas produksi perlu memperhatikan faktor keamanan pangan dengan mempertimbangkan 18 aspek GMP, 8 aspek SSOP dan 12 prinsip HACCP (Pramesti dkk, 2013).

Beberapa rekomendasi untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam perencanaan penerapan ISO 22000:2009 meliputi (1) Penyusunan manual Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP) secara tersendiri, (2) Peningkatan komitmen manajemen, (3) Sosialisasi SMKP pada level operator, (4) Penentuan Kelayakan Dasar Operasional dan Pengecekan/pengawasan terhadap CCP (5) Melengkapi dokumen tertulis terkait tim keamanan pangan, dan (6) Memperbaiki fasilitas bangunan yang sesuai dengan persyaratan standar ISO (Chindarwani, 2007).

Sutrisno (2013) merekomendasikan bahwa strategi yang perlu dilakukan dalam penerapan HACCP adalah menjaga kesatuan sistem keamanan pangan



HACCP, Halal, ISO 9001, GMP, dan SSOP, pendidikan dan pelatihan HACCP, orientasi kepada peningkatan mutu, evaluasi CCP dan perbaikan ruang produksi. Faktor yang paling dominan dalam pemenuhan strategi adalah bangunan, mesin dan peralatan produksi. Aktor yang paling dominan adalah Tim HACCP (0,431); Tujuan yang paling dominan adalah produk dengan mutu yang baik dan aman. Alternatif strategi yang tepat adalah evaluasi CCP dan perbaikan ruangan produksi. Melalui pendekatan kesetaraan persyaratan, maka dapat dikembangkan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) yang mengacu pada persyaratan sistem manajemen ISO 9001, ISO 22000 dan HAS 23000.

Sistem manajemen keamanan pangan terus berkembang dengan makin meningkatnya keinginan masyarakat dan tuntutan perdagangan dunia. Untuk dapat mengkaji bahaya yang sesungguhnya dihadapi maka pendekatan risiko, dan bukan bahaya, lebih dianggap tepat. Pada intinya, sistem manajemen keamanan pangan modern menuntut pendekatan ilmiah dalam menekan risiko yang mungkin terjadi, tentu saja dengan pengertian bahwa sistem tersebut tidak mungkin bersifat *zero risk* (Ratih dan Hariyadi, 2006).

Penerapan sistem manajemen keamanan pangan dapat memberikan bagi perdagangan internasional antara lain: (1) kesempatan yang sama untuk bersaing di kancah perdagangan bebas maupun perdagangan regional, (2) menciptakan batasan teknis terhadap perdagangan, meskipun perlu persetujuan politik untuk menangani kuota import, (3) memiliki arti teknis yang penting dimana persetujuan perdagangan politis dapat diperkirakan (Friana, 2005).

PENUTUP

Persaingan produk pangan di era pasar bebas ASEAN dan dunia menuntut para pelaku usaha kecil menengah (UKM) pangan lokal untuk menerapkan sistem manajemen keamanan pangan sesuai dengan ISO SNI 22000:2009. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan membutuhkan komitmen manajemen, kompetensi sumberdaya manusia, inovasi teknologi pengolahan, sarana produksi dan sanitasi, integrasi HACCP dengan GMP dan



SSOP. Dukungan pemerintah sangat diperlukan terutama dalam bentuk fasilitasi dan bimbingan proses sertifikasi sistem mutu dan keamanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN. https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN Diakses 9 September 2016.
- Agustina, T. (2005). Pentingnya Higiene Penjamah Makanan Tradisional, disajikan dalam *Seminar Nasional Membangun Citra Pangan Tradisional*. Fakultas Teknik: UNNES
- Badan Standardisasi Nasional. (1998). *SNI 01-4852-1998 Sistem Analisa dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2009). *ISO SNI 22000:2009 Sistem Manajemen Keamanan Pangan*.
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). *Pengantar Standardisasi Edisi Kedua*. Jakarta.
- Chindarwani. (2007). Kajian Sistem Manajemen Keamanan Pangan Berbasis Iso 22000 Di PT. Nestle Indonesia, Kejayan Factory. *Skripsi*. FTP IPB.
- Friana, Veronika. 2006. Pengembangan Sistem Manajemen Kemanan Pangan Dan Harmonisasi Standar ISO 2000 Di PT. Central Pertiwi Bahari. *Skripsi*. IPB, Bogor.
- Girsang, CI. (2007). Formulasi Strategi Pengendalian Mutu dan Keamanan Produk Pangan Crude Plam Oil di PT. Perkebunan Nusantara III dan PT. Astra Agro Lestari, Tbk. *Thesis*. Sekolah Pasca Sarjana IPB.
- Hariyadi, P. (2008). Isu Terkini Terkait dengan Keamanan Pangan. Makalah dalam *Pra-Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi IX*, 9 Juni 2008.
- Hariyadi, P. (2015). Pembangunan Keamanan Pangan. *Harian Bisnis dan Investasi KONTAN*, hal. 23 tanggal 4 Juni 2015.
- Hariyadi, P, Ratih, DH. (2009). *Petunjuk Sederhana Memproduksi Pangan Yang Aman*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Kurniawan, W. (2008). Urgensi Penerapan ISO 9000, ISO 14000 Dan Hazard Analytical Critical Control Point Pada Agroindustri Kelapa Sawit. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi VII Program Studi MMT-ITS*, hal. 1 – 9.
- Lintang, M, Payung, L, Bahtiar. (2013). Potensi Pangan Lokal dalam Membangun Kemandirian Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangehe dalam *Membangun Kemandirian Pangan Pulau-pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan*, hal. 213 – 231. IARRD Press: Jakarta
- Mutiarani, CN. (2015). Implementasi Sistem Keamanan Pangan Berbasis HACCP Dalam Proses Produksi Crackers Sandwich Di PT Mondelez Indonesia Manufacturing – Cikarang, Bekasi. *Skripsi*. FTP IPB.
- Pramesti, N. 2013. Analisis Persyaratan Dasar dan Konsep Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dengan Rekomendasi Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas (Studi Kasus: KUD DAU Malang). *Skripsi*. Universitas Brawijaya, Malang.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Ratih, D, Hariyadi, P. (2006). Sistem Manajemen Keamanan Pangan Modern Berbasis Risiko. *Prosiding Seminar Nasional PATPI 2- 3 Agustus 2006*, hal. 127 – 132.
- Renosori, P, Rahmat, C, Rima, U. (2012). Upaya Meningkatkan Pengendalian Kualitas Keamanan Pangan UKM Melalui Penerapan Prinsip Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM, Vol. 3 No. 1 Th 2012*, hal. 217 – 224.
- Sutrisno, A.(2013). Analisis Strategi Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Di PT. Sierad Produce Tbk. Parung. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Manajemen IPB.
- Thaheer, H. (2005). *Sistem Manajemen HACCP*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Trisnawati, L. (2008). Perancangan Dan Implementasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Plan Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) (Studi Kasus di PT. AGRItch GLOBAL CEMERLANG, Bogor) *Skripsi*. FTP IPB. Bogor.
- Wikipedia. (2015). Masyarakat Ekonomi ASEAN. https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN. Diunduh 1 September 2016.
- Wignjosoebroto, S. (2003). *Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan*. Jakarta: Gama Widya.
- World Bank. (2013). Penerapan Keamanan Pangan pada Perikanan Budidaya. *Training Modules on Food safety for Aquaculture*. Kerjasama World Bank, APEC, Michigan University dan FSCF.



KERAGAAN IMPLEMENTASI PENYULUHAN INOVASI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI, JAGUNG DAN KEDELAI DI LAMPUNG

Slameto

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung

islameto@yahoo.co.id

ABSTRAK

Budidaya padi, jagung, dan kedelai dengan pendekatan SL-PTT terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani. Namun diseminasi dan implementasi PTT diduga belum optimal tingkat penerapannya. Tujuan penelitian ini mengetahui sejauh mana tingkat implementasi teknologi dan penyebaran PTT padi, jagung dan kedelai di Lampung. Penelitian dilakukan di kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Tanggamus dengan mengambil sampling 12 wilayah kerja BP3K. Pengambilan data dilakukan dengan cara survey terhadap penyuluh dan petani yang telah dilatih PTT komoditas padi, jagung, kedelai. Penentuan responden penyuluh dan petani diambil secara acak dengan jumlah 10 orang setiap BP3K, sehingga total jumlah responden sebanyak 120 orang. Analisis dilakukan terhadap variabel persepsi terhadap inovasi, respon terhadap inovasi, penyebaran inovasi, adopsi atau implementasi inovasi oleh pengguna. Hasil kajian menunjukkan bahwa persepsi akan inovasi PTT padi, jagung dan kedelai sangat penting, respon terhadap inovasi PTT padi, jagung dan kedelai sangat baik, implementasi PTT padi, jagung, kedelai dilakukan pada beberapa komponen inovasi PTT yang mudah dilakukan pengguna. Komponen teknologi yang diterapkan berkaitan dengan kemudahan penerapan dan kepemilikan modal petani. Implementasi inovasi mempertimbangkan sarana pendukung yang dimiliki petani. Dimasa mendatang agar pelatihan PTT berjalan efektif maka selalu disertai dengan praktek lapangan dengan membuat demplot dan melakukan upaya pemecahan studi kasus di lapangan.

Kata kunci: implementasi, penyuluhan, PTT padi, jagung, kedelai.

PENDAHULUAN

Padi, jagung dan kedelai di Indonesia masih menjadi komoditas pangan yang strategis. Padi merupakan kebutuhan pokok pangan penduduk. Jagung menjadi komoditas bahan pangan dan bahan pakan. Kedelai merupakan sumber protein nabati mendukung ketahanan pangan nasional (Hasanuddin *et.al*, 2005). Konsumsi kedelai mencapai 8,12 kg/kapita/tahun (Sudaryanto dan Swastika, 2007). Kebutuhan kedelai secara nasional berkisar 2 juta ton/tahun (Badan Pusat Statistik, 2011), meskipun Indonesia sebagai negara produsen kedelai utama (Partohardjono, 2005) namun produksi kedelai masih dibawah 1 juta ton per



tahun, kekurangan kedelai biasanya dicukupi dari impor sekitar 60-75% dari total kebutuhan kedelai (Alimoeso, 2006). Pengembangan pertanian padi, jagung dan kedelai diarahkan pada 3 agroekosistem utama yaitu lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, dan lahan kering (Zaini, 2005). Areal untuk penanaman komoditas tersebut terus mengalami alih fungsi lahan sehingga berdampak produksi dan produktivitasnya semakin melandai (Sudana, 2005).

Produksi padi nasional tahun 2015 mencapai 74,99 juta ton GKG, jagung 19,83 juta ton pipilan kering dan kedelai 982,97 ribu ton biji kering. Demi menuju swasembada pangan maka untuk tahun 2016 melalui upaya khusus ditargetkan produksi padi mencapai 81,012 juta ton GKG, produksi jagung mencapai 24 juta ton pipilan kering dan produksi kedelai mencapai 1,5 juta ton biji kering (Kementerian Pertanian, 2016). Demikian juga di Propinsi Lampung, komoditas padi, jagung dan kedelai menjadi prioritas utama komoditas yang terus diupayakan peningkatan produksinya demi target program swasembada pangan. Produksi padi di Lampung tahun 2015 mencapai 3,642 juta ton GKG, jagung 1,503 juta ton pipilan kering dan kedelai 9.815 ton biji kering (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung, 2016). Untuk tahun 2016 target sasaran produksi padi sebesar 4,373 juta ton GKG pada luas tanam 786.552 ha dan target rata-rata produktivitas mencapai 5.577 kg/ha. Target sasaran produksi jagung sebanyak 2,26 juta ton pipilan kering pada luas tanam 439.777 ha dan target rata-rata produktivitas mencapai 5.417 kg/ha. Sedangkan target sasaran produksi kedelai sejumlah 22.500 ton biji kering pada luas tanam 19.142 ha dan target rata-rata produktivitas mencapai 1.230 kg/ha. Dengan demikian pada tahun 2016 Propinsi Lampung rata-rata menargetkan tambahan produksi padi sawah 20%, jagung 50% dan kedelai sebesar 129% dari tahun sebelumnya.

Pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas komoditas padi, jagung dan kedelai setiap tahunnya sangat membutuhkan program, strategi dan kerja keras. Sejak tahun 2002, inovasi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) menjadi pilihan utama suatu inovasi dan teknologi (Badan Litbang Pertanian, 2007a; 2007b; 2007c) yang terus menerus diintroduksi melalui



penyuluhan. Menurut Bananiek dan Abidin (2013) inovasi PTT nyata berdampak positif terhadap produksi padi bahkan perubahan pendapatan petani. Pendekatan awal yang dilakukan sekitar kurun waktu 2002-2013 melalui penyuluhan diberbagai sentra produksi pangan dengan melakukan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) padi sawah, jagung, kedelai (Departemen Pertanian, 2008a; Departemen Pertanian, 2008b; Departemen Pertanian, 2008c). Pada saat ini inovasi PTT tersebut menjadi suatu gerakan massal pengelolaan tanaman terpadu (GP-PTT) yang merupakan bagian dari penyuluhan dan upaya khusus pencapaian swasembada komoditas padi, jagung dan kedelai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (2), bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi penyuluhan merupakan suatu proses yang sistematis (Van den Ban dan Hawkins, 1996), penyuluhan membutuhkan metode dan teknik komunikasi yang efektif (Mukmin, 1992; Mardikanto, 2009), penyuluhan memerlukan peran seorang penyuluh (Rogers, 2003). Demikian juga penyuluhan bidang pertanian berupa inovasi pengelolaan tanaman terpadu komoditas padi, jagung dan kedelai membutuhkan proses pembelajaran dengan metode sekolah lapang. Dalam proses pembelajaran tersebut membutuhkan peran penyuluh agar inovasi tersebut dipahami dan diadopsi petani.

Namun dalam proses penyuluhan inovasi pengelolaan tanaman terpadu komoditas padi, jagung dan kedelai dengan metode sekolah lapang pada masyarakat di wilayah Lampung belum sesuai dengan harapan. Diseminasi dan implementasi PTT hasil pembelajaran sekolah lapang diduga masih terjadi kendala di masyarakat sehingga belum optimal penerapannya. Tujuan penelitian



ini mengetahui keragaan implementasi dan penyebaran inovasi PTT padi, jagung dan kedelai di Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (Nazir, 2005). Populasi penelitian ini adalah para penyuluh serta petani yang pernah mendapatkan pendampingan dan pembelajaran inovasi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi, atau jagung atau kedelai. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan (meliputi kecamatan Penengahan, Candipuro, Jati Agung), Kabupaten Lampung Timur (meliputi kecamatan Way Bungur, Braja Seleh, Metro Kibang), Kabupaten Pesawaran (meliputi kecamatan Tegineneng, Kedondong, Negeri Katon), Kabupaten Tanggamus (meliputi kecamatan Wonosobo, Gisting, Pulau Panggung) dengan mengambil sampling wilayah kerja penyuluh BP3K di wilayah kecamatan tersebut. Penentuan lokasi dengan pertimbangan bahwa lokasi merupakan sentra produksi padi, jagung atau kedelai dan pernah mendapatkan program SL-PTT padi, jagung atau kedelai. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dengan sumber data dari para penyuluh pertanian lapangan dan petani padi, petani jagung atau petani kedelai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Data diambil dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan sesuai tujuan penelitian. Penentuan responden penyuluh dan petani diambil secara acak dengan jumlah 10 orang setiap BP3K sehingga jumlah responden sebanyak 120 orang. Analisis data dilakukan terhadap variabel persepsi dan respon terhadap inovasi, penyebaran inovasi, implementasi inovasi oleh pengguna. Analisis dan penyajian data dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyuluhan Inovasi PTT Padi Sawah di Lampung

Prosentase jumlah penyuluh yang mempersepsikan sangat pentingnya tingkatan komponen inovasi PTT padi sawah dimana menurut penyuluh bahwa penggunaan benih padi varietas unggul, benih berlabel, dan penggunaan sistem



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

tanam jejer legowo merupakan inovasi PTT padi sawah yang dipersepsikan oleh 85% penyuluh adalah sangat penting. Hal tersebut dimungkinkan karena komponen inovasi tersebut merupakan kunci dalam budidaya padi sawah. Sedangkan irigasi berselang dirasakan belum banyak memberikan tambahan hasil produksi padi.

Tabel 1. Prosentase jumlah penyuluh yang mempunyai tanggapan (respon) bahwa komponen inovasi PTT padi sawah adalah mudah diimplementasikan

Penggunaan Komponen inovasi PTT Padi Sawah	Kabupaten				Propinsi Lampung
	Lampung Selatan	Lampung Timur	Pesawaran	Tanggamus	
-Varietas unggul (%)	95	82	71	90	84,5
-Benih berlabel (%)	80	67	64	93	76
-BWD (%)	25	44	22	26	29,25
-PHT (%)	45	44	38	38	41,25
-Jejer legowo (%)	40	44	41	56	45,25
-Bibit muda (%)	20	51	29	31	32,75
-Bibit 1-3 batang (%)	60	72	29	39	50
-Bahan organik (%)	35	50	55	42	45,5
-Irigasi berselang (%)	15	33	21	26	23,75
-Pasca panen tepat (%)	65	48	46	46	51,25
Rata-rata (%)	48	53,5	41,6	48,7	47,95

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Berkaitan dengan penggunaan benih varietas unggul dan benih berlabel, menurut para penyuluh sangat mudah diimplementasikan dalam budidaya padi asalkan di penangkar padi sudah tersedia varietas unggul tersebut. Pengairan berselang menjadi komponen inovasi yang rumit diimplementasikan dilapangan karena ketersediaan air irigasi tidak kontinyu sepanjang waktu (Tabel 1).

Sebagian besar penyuluh di Lampung (96%) yang memperoleh pembelajaran sekolah lapang telah melakukan penyebaran inovasi PTT padi sawah. Para penyuluh dalam rangka menyebar luaskan inovasi PTT padi sawah sebagian besar (95%) mengajarkan praktek di lapangan tentang inovasi PTT padi sawah dan ditunjang dengan pembuatan demplot di lapangan (82,5%). Rata rata seorang penyuluh telah melakukan penyebaran inovasi PTT padi sawah pada 39 kelompok tani.

Secara keseluruhan bahwa para petani telah menerapkan komponen inovasi PTT padi sawah. Komponen yang paling banyak diadopsi adalah



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

penggunaan benih padi varietas unggul dan benih bermutu serta penanaman pasca panen secara benar. Sedangkan penggunaan bagan warna daun untuk menentukan dosis pemupukan serta pemberian air irigasi secara berselang basah kering masih kurang memadai (Tabel 2).

Tabel 2. Rata-rata jumlah petani yang mengimplementasikan komponen inovasi PTT padi sawah dalam satu wilayah binaan penyuluh di wilayah Propinsi Lampung

Penggunaan Komponen inovasi PTT Padi Sawah	Kabupaten				Propinsi Lampung (orang)
	Lampung Selatan (orang)	Lampung Timur (orang)	Pesawaran (orang)	Tanggamus (orang)	
-Varietas unggul	1626	641	443	253	741
-Benih berlabel	1256	233	129	254	468
-BWD	414	303	60	55	208
-PHT	854	309	129	194	372
-Jejer legowo	687	256	283	143	342
-Bibit muda	588	420	211	146	341
-Bibit 1-3 batang	740	557	267	152	429
-Bahan organik	827	429	391	98	436
-Irigasi berselang	337	361	73	164	234
-Panen/pasca panen tepat	1007	668	498	173	587
Rata-rata	834	418	248	163	416

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Implementasi Penyuluhan Inovasi PTT Jagung di Lampung

Menurut penyuluh bahwa pemupukan berimbang adalah komponen inovasi yang paling penting dalam budidaya tanaman jagung. Selanjutnya penggunaan benih jagung varietas unggul, benih berlabel merupakan inovasi PTT jagung yang dipersepsikan lebih dari 78% penyuluh dan dirasakan adalah sangat penting. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kesadaran petani bahwa pupuk dan benih merupakan faktor produksi utama dalam budidaya jagung. Sedangkan pembuatan saluran drainase dan irigasi dirasakan belum banyak memberikan kontribusi nyata terhadap produksi jagung.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 3. Prosentase jumlah penyuluh yang mempunyai tanggapan (respon) bahwa komponen inovasi PTT jagung *adalah mudah diimplementasikan*

Komponen inovasi PTT Jagung	Kabupaten				Propinsi
	Lampung Selatan	Lampung Timur	Pesawaran	Tanggamus	Lampung
-Benih unggul	93	69	51	80	73,25
-Benih bermutu	90	34	48	60	58
-Populasi ideal	87	73	27	15	50,5
-Pemupukan berimbang	7	13	21	0	10,25
-Pembuatan drainase/irigasi	17	7	24	55	25,75
-Penyiapan lahan TOT/OTS	70	63	53	25	52,75
-Bahan organik	23	39	34	30	31,5
-Pengendalian gulma	53	47	45	30	43,75
-PHT	47	24	41	15	31,75
-Panen/ pasca panen tepat	53	30	21	10	28,5
Rata-rata	54	39,9	36,5	32	40,6

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Demikian juga berkaitan dengan penggunaan benih jagung varietas unggul dan benih bermutu/sehat sangat mudah diimplementasikan dalam budidaya jagung karena telah tersedia di kios-kios saprodi. Berbeda dengan kondisi tersebut maka pemupukan berimbang yang dipersepsikan penyuluh adalah paling penting, namun dalam implementasinya tidak mudah karena hal tersebut sangat berkaitan dengan ketersediaan kondisi finansial atau modal dari pengguna teknologi terutama petani. Persepsi penyuluh terhadap sangat mudahnya penerapan pemupukan berimbang hanya menempati 10,25% dari total jumlah penyuluh. (Tabel 3).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 4. Rata-rata jumlah petani yang mengimplementasikan komponen inovasi PTT jagung dalam satu wilayah binaan penyuluh di wilayah Propinsi Lampung

Komponen inovasi PTT jagung	Kabupaten				Propinsi Lampung (orang)
	Lampung Selatan (orang)	Lampung Timur (orang)	Pesawaran (orang)	Tanggamus (orang)	
-Benih unggul	409	184	213	213	255
-Benih bermutu	379	174	173	212	235
-Populasi ideal	412	205	170	122	227
-Pemupukan berimbang	285	108	163	139	174
-Pembuatan drainase/irigasi	493	159	92	135	220
-Penyiapan lahan TOT/OTS	423	191	307	188	277
-Bahan organik	295	134	300	104	208
-Pengendalian gulma	302	98	228	119	187
-PHT	297	81	175	90	161
-Panen/ pasca panen tepat	338	142	281	81	211
Rata-rata	363	148	210	140	215

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Sebagian besar penyuluh di Lampung (87%) yang memperoleh pembelajaran sekolah lapang telah melakukan penyebaran inovasi PTT jagung di wilayah binaannya. Para penyuluh dalam rangka menyebar luaskan inovasi PTT jagung sebagian besar (71%) mengajarkan praktek di lapangan tentang inovasi PTT jagung dan ditunjang dengan pembuatan demplot di lapangan (52%). Rata rata seorang penyuluh telah melakukan penyebaran inovasi PTT jagung pada 12 kelompok tani dan memberikan pembelajaran sebanyak 189 petani.

Di Propinsi Lampung apabila dilihat rata-ratanya bahwa para petani telah menerapkan komponen inovasi PTT jagung. Komponen yang paling banyak diadopsi adalah penerapan inovasi berupa penyiapan lahan untuk ditanami jagung menggunakan sistem tanpa olah tanah atau olah tanah sempurna tergantung situasi kondisi di lapangan. Kemudian penggunaan benih jagung varietas unggul dan benih bermutu juga telah banyak diadopsi. Sedangkan penerapan pemupukan berimbang serta pengendalain hama penyakit secara terpadu dirasakan masih sulit untuk diterapkan secara massal



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

karena dirasakan masih rumit penerapannya (Tabel 4).

Implementasi Penyuluhan Inovasi PTT Kedelai di Lampung

Penyuluh mempersepsikan sangat pentingnya penggunaan benih kedelai varietas unggul, benih bermutu atau berlabel serta penanganan pasca panen yang tepat merupakan inovasi PTT kedelai yang dipersepsikan lebih dari 80% penyuluh dan dirasakan adalah sangat penting. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kesadaran petani bahwa untuk mendapatkan produksi yang optimum maka benih merupakan sarana produksi utama dalam budidaya kedelai. Sedangkan penanganan pasca panen yang tepat juga menjadi faktor penting yang akan memberikan kontribusi nyata terhadap berkurangnya kehilangan hasil panen kedelai sehingga memberikan tambahan produksi.

Tabel 5. Prosentase jumlah penyuluh yang mempunyai tanggapan (respon) bahwa komponen inovasi PTT kedelai adalah mudah diimplementasikan

Komponen inovasi PTT Kedelai	Kabupaten		Propinsi Lampung
	Lampung Selatan	Tanggamus	
-Benih varietas unggul (%)	50	30	40
-Benih bermutu (berlabel) (%)	40	70	55
- Pemupukan tanaman dan bahan pembenah tanah berdasar analisis	20	10	15
- PHT (%)	20	40	30
- Pembuatan drainase/irigasi (%)	40	20	30
- Pengelolaan tanaman, pengaturan populasi dan cara tanam (%)	40	30	35
-Penggunaan bahan organik/pupuk kandang 1-5 ton/ha (%)	0	10	5
- Pengairan di musim kemarau untuk perbaikan kelembaban tanah (%)	10	20	15
- Penggunaan pupuk cair, organik, biohayati, ZPT dan mikro (%)	30	50	40
- Panen dan pasca panen yang tepat (%)	30	40	35
Rata-rata	28	32	30

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Demikian juga berkaitan dengan penggunaan benih kedelai varietas unggul dan benih bermutu/berlabel cukup mudah diimplementasikan dalam



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

budidaya kedelai bergantung ketersediaan di penangkar benih kedelai. Berbeda dengan kondisi tersebut maka pemupukan tanaman dan pemberian bahan pembenah tanah sesuai dengan hasil analisis, penggunaan bahan organik/pupuk kandang 1-5 ton/ha, serta pengairan pada saat kemarau hanya dipersepsikan oleh penyuluh (5-15%) adalah mudah diimplementasikan. Sehingga diperkirakan 85-95% penyuluh mempersepsikan bahwa implementasi ketiga komponen inovasi PTT kedelai tersebut adalah tidak mudah. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan sarana prasarana penunjang pengairan dan ketersediaan pupuk kandang di lokasi yang cenderung terbatas (Tabel 5).

Tabel 6. Rata-rata jumlah petani yang mengimplementasikan komponen inovasi PTT kedelai dalam satu wilayah binaan penyuluh di wilayah Propinsi Lampung

Komponen inovasi PTT kedelai	Kabupaten		Propinsi Lampung (orang)
	Lampung Selatan (orang)	Tanggamus (orang)	
-Benih varietas unggul	40	80	60
-Benih bermutu (berlabel)	40	96	68
- Pemupukan tanaman dan bahan pembenah tanah berdasar analisis	40	39	40
- PHT	30	63	47
- Pembuatan drainase/irigasi	35	87	61
- Pengelolaan tanaman, pengaturan populasi dan cara tanam	40	92	66
- Penggunaan bahan organik/pupuk kandang 1-5 ton/ha	30	60	45
- Pengairan di musim kemarau untuk perbaikan kelembaban tanah	5	27	16
- Penggunaan pupuk cair, organik, biohayati, ZPT dan mikro	40	66	53
- Panen dan pasca panen yang tepat	40	50	45
Rata-rata	34	66	50

Sumber : Data Primer Diolah, 2013.

Pada gambaran tingkat penyebaran inovasi PTT kedelai yang dilakukan penyuluh di wilayah Propinsi Lampung maka 45% penyuluh di Lampung yang memperoleh pembelajaran sekolah lapang telah melakukan penyebaran inovasi



PTT kedelai di wilayah binaannya. Para penyuluh dalam rangka menyebar luaskan inovasi PTT kedelai sebagian besar (55%) mengajarkan praktek di lapangan tentang inovasi PTT kedelai dan sebanyak 5% penyuluh melakukan pembuatan demplot di lapangan. Rata rata seorang penyuluh telah melakukan penyebaran inovasi PTT kedelai pada 6 kelompok tani kedelai dan telah memberikan pembelajaran tentang inovasi PTT kedelai sebanyak 130 petani.

Di Propinsi Lampung komponen yang paling banyak diadopsi adalah penerapan inovasi berupa penggunaan benih berlabel (68%), penggunaan benih varietas unggul kedelai (60%). Kemudian pengelolaan tanaman yang baik meliputi populasi dan cara tanam (66%) dan pembuatan saluran drainase dan irigasi (61%) juga telah banyak diadopsi. Sedangkan pengairan di musim kemarau untuk perbaikan kelembaban tanah dirasakan masih sulit untuk diterapkan secara massal karena dirasakan membutuhkan peralatan pendukung seperti pompa air dalam penerapannya (Tabel 6).

Penentuan pemupukan tanaman dan bahan pembenah tanah sesuai dengan hasil analisis;Pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu; Penggunaan bahan organik/pupuk kandang 1-5 ton/ha;Penggunaan pupuk cair, organik, biohayati, ZPT dan mikro;serta penanganan panen dan pasca panen yang tepat menunjukkan bahwa komponen inovasi PTT kedelai tersebut telah diadopsi juga di petani kedelai.

PENUTUP

Inovasi PTT padi, jagung dan kedelai dipersepsikan dan dinilai sangat penting oleh pengguna. Respon terhadap inovasi PTT padi, jagung dan kedelai sangat baik. Inovasi PTT padi, jagung, dan kedelai di Lampung yang disuluhkan telah diadopsi dan diterapkan petani pada beberapa komponen teknologi yang menurut petani mudah dilakukan. Komponen teknologi yang diterapkan berkaitan dengan kemudahan penerapan serta ketyersediaan modal yang dimiliki petani untuk usahatani. Implementasi inovasi pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai oleh petani juga mempertimbangkan sarana pendukung usahatani yang dimiliki. Dimasa mendatang agar penyuluhan



pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung, kedelai berjalan efektif maka sebaiknya disertai dengan praktek atau pembuatan demplot di lapangan serta pembelajaran pemecahan studi kasus di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimoeso, S. (2006). *Departemen Pertanian Republik Indonesia Canangkan Program Bangkit Kedelai*. <http://www.jabar.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Produksi padi, jagung, dan kedelai tahun 2011*. Berita Resmi Statistik 14:1-9.
- Bananiek, S. Dan Z. Abidin. (2013). *Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang mempengaruhi Adopsi Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi sawah di Sulawesi Tenggara*. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol.16. Nomor2. Juli 2013. p:111-121.
- Badan Litbang Pertanian, 2007a. *Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian, 2007b. *Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Badan Litbang Pertanian, 2007c. *Pengelolaan Tanaman Terpadu Kedelai*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. (2008a). *Panduan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Sawah*. Deptan. Jakarta. 39 hal.
- Departemen Pertanian. (2008b). *Panduan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Jagung*. Deptan. Jakarta. 38 hal.
- Departemen Pertanian. (2008c). *Panduan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai*. Deptan. Jakarta. 39 hal.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. (2016). *Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2016*. Bandar Lampung.
- Hasanuddin, A., J.R. Hidayat, dan S. Partohardjono. (2005). *Kebijakan program penelitian kacang-kacangan potensial dalam Partohardjono et.al (penyunting). Analisis dan opsi kebijakan penelitian dan pengembangan tanaman pangan*. Monograf, No.2, 2005. Puslitbangtan, Bogor: hal. 64-77.
- Partohardjono, S. (2005). *Upaya peningkatan produksi kedelai melalui perbaikan teknologi budidaya dalam Partohardjono et.al (penyunting). Analisis dan opsi kebijakan penelitian dan pengembangan tanaman pangan*. Monograf, No.1, 2005. Puslitbangtan, Bogor: hal.132-147.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudana, W. (2005). *Potensi dan Prospek Lahan Rawa Sebagai Sumber Produksi Pertanian*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 3 (2), Juni 2005: 141 – 151.
- Sudaryanto, T. dan O.K.S. Swastika. (2007). *Kedudukan Indonesia dalam perdagangan internasional kedelai dalam Sumarno, Suyamto, A. Widjono, Hermanto, dan H. Kasim (editor). Kedelai. Teknik produksi dan Pengembangan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor. Hal:28-44.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Zaini, Z. (2005). *Prospek pengembangan kedelai di lahan kering masamdalam Makarim, et.al.Prosiding Lokakarya Pengembangan Kedelai di Lahan Sub Optimal*. Puslitbangtan, Bogor, 2005: hal. 37-46.
- Kementerian Pertanian.(2016). *Basis Data Statistik Pertanian*. Pusdatin, Kementerian Pertanian. <http://www.pusdatin.setjen.pertanian.go.id/> diakses 18 September 2016.
- Mardikanto, Totok.(2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Diterbitkan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press). Surakarta.
- Mukmin, U. (1992). *Peranan Penyuluhan Pembangunan dalam Pelestarian Sumberdaya Alamdalam: Penyuluhan Pembangunan Indonesia:Menyongsong Abad XXI*. Diedit oleh AVS Hubeis, P. Tjitropranoto, W. Ruwiyanto. Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Rogers, E. M., 2003.*Diffusion of Innovations*: 5th Edition. Free Press. New York.
- UURI No. 16 Tahun 2006. *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92.
- Van den Ban, A.W., dan Hawkins, H.S. (1996). *Penyuluhan Pertanian*. Penerjemah: Haerdiasti, A.D., Terjemahan dari: Agricultural Extension. Yogyakarta: Kanisius.



KETAHANAN SOSIAL EKONOMI SEBAGAI JAWABAN KREATIF TERHADAP KUALITAS SOSIAL KELOMPOK TANI DALAM MENGHADAPI MEA

Hikmah Nur Annisa

Alumni Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan

Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta

hikmahnurannisa@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan sosial dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat membutuhkan suatu strategi pemberdayaan dan antisipasi dalam menanggapinya agar kualitas sosial yang ada dalam masyarakat bisa terjamin, karena jika perubahan tidak disertai dengan tindakan cepat maka akan mengakibatkan kemunduran. Demikian yang dilakukan oleh Kelompok Tani Gisik Pranaji dan Bangun Karyo yang berada di lahan pesisir tepatnya di Desa Bugel dan Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, mereka mempunyai kemampuan untuk hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya disertai dengan kemampuan komuniti dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik khususnya dalam menghadapi MEA. Dengan menggunakan metode dasar diskriptif kualitatif, kajian ini bertujuan untuk memotret kesederhanaan ketahanan sosial-ekonomi Kelompok Tani sebagai jawaban kreatif terhadap kualitas sosial yang ada di kedua desa tersebut. Data diperoleh dengan cara mengeksplorasi hasil wawancara dengan narasumber dan pengamatan lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa mereka a) mampu mengolah lahan pasir marginal, membuat teknologi sederhana dalam budidayanya, dan membuat pasar lelang sehingga mampu melindungi secara efektif anggotanya dari perubahan sosial dan b) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik lahan yang akan dijadikan tambang pasir besi seperti dalam memobilisasi masa dan fund rising.

Kata Kunci : Strategi Pemberdayaan, Kelompok Tani, Ketahanan Sosial-Ekonomi, Kualitas Sosial

PENDAHULUAN

Dikutip dari *Tempo* tanggal Juli 2013 bahwa orang yang berada pada tingkat sosial-ekonomi yang rendah (yang diindikasikan oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, atau pendapatannya) rata-rata mati lebih muda dan lebih buruk kesehatannya daripada mereka yang berada pada tingkat sosio-ekonomi yang lebih tinggi. Orang yang berada pada posisi sosio-ekonomi yang tinggi cenderung yang pertama mengadopsi perilaku yang baru, dan dengan mudah melepaskan perilaku yang dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang.



Adalah Kelompok Tani Gisik Pranaji dan Bangun Karyo yang berada di Desa Bugel dan Desa Garongan, melalui ilmu pengetahuan, mereka mempunyai kesadaran dan cita-cita untuk menguasai dan membentuk masa depannya. Mereka mempunyai keinginan untuk hidup yang lebih baik dari apa yang dirasakan sebelumnya. Awal mula kelompok tani ini adalah kelompok tani budidaya kelapa, namun apa yang terjadi dengan mengandalkan kelapa saja mereka tidak bisa *survive*. Gelombang perubahan sosial khususnya di era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang terjadi dalam masyarakat pesisir memaksa mereka untuk bekerja keras mengelola kehidupan mereka.

Menurut Roestam (1993) bahwa gelombang perkembangan di era MEA ini menjadi lebih besar karena ilmu semakin tumbuh dan menyatu dengan teknologi, dan teknologi tumbuh menyatu dengan ekonomi. Sehingga, seperti yang telah dilakukan kelompok tani ini, mereka mencoba untuk berpikir kreatif dalam upaya mengantisipasi perubahan sosial dengan menyatukan ilmu, teknologi sehingga ekonomi mereka bisa meningkat dan mereka bisa *survive*, salah satu upaya yang dilakukan kelompok tani ini adalah berusaha keras dalam mengembangkan budidaya cabai, meskipun banyak sekali hambatan salah satunya adalah konflik lahan.

Ada rencana dari pemda setempat bahwa lahan pesisir tersebut akan dijadikan tambang pasir besi namun mereka tidak serta merta menolak pertambangan pasir besi, mereka secara kritis bisa memperlihatkan apa dampak positif dan negatif yang berakibat dari pertambangan ini. Adalah Kelompok Tani Desa Bugel dan Desa Garongan yang dengan tegas menolak rencana pertambangan ini. Mereka sangat menyakini bahwa pertambangan ini akan lebih menyengsarakan warganya, karena proses dan pengadaan kegiatan ini yang melupakan aspek ekonomi, ekologi dan sosial termasuk politik serta budaya yang ada dalam masyarakat. Dari peristiwa tersebut bisa kita lihat bahwa warga desa tersebut mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik yang ada.

Dengan mempertahankan lahan ini, mereka juga mampu membuktikan dan melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu, keluarga dan



kelompok dari perubahan sosial yang terjadi, Hal ini diindikasikan dengan jumlah pendapatan mereka yang lebih dari cukup untuk kehidupan bagi individunya, mampu mencukupi keperluan keluarganya, dan kelompok tani yang semakin maju. Kemampuan yang dimiliki kelompok Tani Desa Bugel dan Desa Garongan dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik ini menjadi salah satu aspek dalam kualitas sosial. Untuk selanjutnya studi ini akan membahas ketahanan sosial-ekonomi yang sederhana sebagai jawaban kreatif terhadap kualitas sosial Kelompok Tani dalam menghadapi MEA di Desa Bugel dan Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat gambaran atau deskripsi secara lebih jelas mengenai keadaan atau gejala tertentu, dengan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala yang terbatas dengan fokus yang dalam dan rinci. Strategi yang digunakan adalah studi kasus dengan pengambilan informan kunci. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara untuk mengeksplorasi informasi yang komprehensif dari informan dan observasi. Selain itu. Lokasi penelitian dipilih secara purposif berdasarkan kajian yang akan diteliti atau ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Tani di Desa Bugel dan Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo, telah berhasil mengolah lahan pasir marginal menjadi sebuah lahan yang sangat produktif, Khususnya untuk budidaya cabai. Tidak hanya berhenti pada usaha tani cabai, mereka mampu mengembangkan secara swadaya model pasar lelang sebagai tempat pemasarannya. Awal dari perubahan ini adalah bahwa mereka berusaha untuk bisa keluar dari ketidakbebasan mereka dari kemiskinan. Perlahan dan secara terus-menerus mereka lalui dengan usaha keras. Banyak ide-ide yang mereka kembangkan, mulai dari hal yang sangat sederhana yaitu ketika ada salah satu petani yang



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

melihat biji cabai yang bisa tumbuh di lahan pasir, kemudian diuji coba dan dikembangkan. Tidak hanya sampai pada budidayanya saja tapi mereka bisa mengembangkan sumur pantek⁸, tanaman pemecah angin, pemberian mulsa, mencoba untuk memilih bibit yang terbaik, dan sebagainya, dan yang menjadi keunikan dari kelompok ini adalah model pasar lelang yang sangat membantu peningkatan kesejahteraan bagi anggota kelompoknya. Melihat proses kedua kelompok tersebut nampak bahwa selama bertahun-tahun kedua kelompok tani ini mampu untuk bertahan dari perubahan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi. Kemampuan suatu masyarakat untuk hidup sesuai dengan daya tampung sosialnya disertai kemampuan untuk memulihkan dirinya setelah mengalami perubahan alam maupun masyarakat inilah yang oleh purba (2002) disebut sebagai ketahanan sosial yang didalamnya juga menyangkut ketahanan ekonomi.

Tabel 1. Tabel Indikator Ketahanan Sosial-Ekonomi

No.	Indikator	Penjelasan
1.	Sumber Daya Finansial	Sumber daya pendapatan utama berasal dari usaha tani cabai. Mereka berpendapat bahwa pendapatan yang mereka dapatkan lebih dari cukup. Rata-rata keuntungan yang mereka dapatkan selama musim panen adalah Rp 34.330.060 per 1000 m ² . Berdasarkan pendapatan tersebut, petani mengaku aman dan masih mampu mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri, keluarga, dan kelompok taninya.
	- kecukupan Pendapatan	
	- Keamanan Pendapatan	Mereka baru merasa khawatir ketika harga cabai dibawah BEP yaitu sebesar Rp 3.652,-. Namun selama ini harga cabai selalu di atas BEP yang telah mereka hitung sehingga petani mendapatkan keuntungan.
2.	Perumahan Dan Lingkungan	Dikatakan oleh salah satu informan bahwasanya keadaan rumah dan kondisi lingkungan yang semakin maju, awalnya dikatakan rumah mereka masih menggunakan genteng dari daun kelapa, rumah masih belum permanen, tetapi untuk saat ini hampir semua rumah mereka sudah
	- Keamanan Rumah	
	- Keadaan Rumah dan Kondisi Lingkungan	

⁸ Sumur yang dibuat didekat pantai dengan bantuan pompa air, mengingat air laut tidak bisa digunakan untuk irigasi tanaman



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Indikator	Penjelasan
		permanen. Hal ini sebagai akibat dari peningkatan pertanian cabai. Sebagai hasil dari kerja keras mereka dalam perencanaan pengolahan tanah, pemilihan bibit yang cocok, usaha pembuatan sumur pantek, sampai pada usaha pelelangan yang meskipun sederhana tapi tersistematis, Inilah yang menjadi usaha mereka sampai pada akhirnya usaha lelang mereka berhasil, banyak pedagang yang mempercayakan pada kualitas cabainya, sehingga tiap produksi cabai selalu laku, akibatnya cash flow petani dan kelompok pun semakin lancar.
3.	Kesehatan dan Perawatan	
	- Syarat Keamanan dan Kesehatan	keputusan yang mereka lakukanpun menjadi solusi bersama, sehingga membuat kondisi sosialnya pun semakin erat, keamanan yang selalu terjaga, ini terbukti tidak ada orang yang berani mencuri buah cabai atau buah-buah yang ditanam para petani
	- Jasa Kesehatan Dan Perawatan	Di Desa Bugel dan Desa Garongan telah ada Puskesmas sehingga untuk masalah kesehatan bisa tertangani
		Terlepas dari ada atau tidaknya jaminan kesehatan, warga ke dua desa tersebut mampu membayar biaya secara mandiri baik untuk pribadi atau untuk keluarganya
4.	Pekerjaan	
	- Keamanan Pekerja dan Lingkungan Pekerjaan	Tenaga kerja baik laki-laki atau perempuan akan dibayar sesuai dengan upah beban kerja untuk laki-laki Rp 40.000,-, untuk perempuan Rp 30.000,-, jadi tetap ada jaminan keamanan upah pekerja dalam usaha tani ini. Perbedaan jumlah upah antara laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari perbedaan pekerjaan yang dilakukan. Dalam kedua kelompok tani tersebut keamanan upah bisa terjaga karena dari perhitungan usaha tani cabai di kedua Desa tersebut dengan upah sejumlah yang sudah tersebut di atas petani tidak mengalami kerugian. Biaya total untuk tenaga kerja dari pengolahan sampai petik sebesar Rp 3.838.750,-.
5.	Pendidikan	
	- Keamanan pendidikan dan kualitas pendidikan	Pendidikan yang ditempuh oleh kalangan petani yang lebih dulu (tua), sebagian besar mengenyam pendidikan sampai 9 tahun, namun setelah sukses dalam usaha tani cabai mereka memikirkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun masih ada anak-anak mereka yang lebih menikmati pekerjaan sebagai petani mengikuti orang tuanya.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No.	Indikator	Penjelasan
6.	Jaringan Sosial - Ketergantungan pada keluarga, teman, dan bantuan	Ketergantungan pada kelompok tani khususnya dalam pasar lelang, sangat mereka rasakan. Pasar tersebut memberi banyak keuntungan selain mudah dalam menjual, harganyapun menguntungkan petani, dan ditawarkan melebihi harga dari pengepul biasa. Selisih antara pasar lelang dan pengepul biasanya Rp 2000/kg, ini sangat petani. Hal inilah yang membuat pemasukan menjadi lebih dan petani bisa survive
7.	Waktu - Waktu yang dihabiskan pada perawatan (pekerjaan yang tidak dibayar)	Rata-rata petani yang memiliki lahan lebih dari 3000 m2 dengan tenaga kerja dari anggota keluarga karena dengan lahan tersebut masih bisa dikerjakan sendiri (tenaga kerja keluarga), pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu banyak serta bisa menghemat pengeluaran sehingga bisa bertahan untuk menanam cabe musim berikutnya

Ketahanan sosial-ekonomi dalam melindungi anggotanya, termasuk individu, keluarga, dan kelompok dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam era ini bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu sumber daya finansial, perumahan dan lingkungan, kesehatan dan perawatan, pekerjaan, pendidikan, jaringan sosial, dan waktu (Herrmann, 2006).

Selanjutnya ketahanan sosial-ekonomi dalam menghadapi MEA yang bisa dilihat dari kemampuan Kelompok Tani Di Desa Bugel dan Desa Garongan dalam mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik. Hal ini bisa dilihat dari upaya kedua kelompok tersebut dalam menolak rencana tambang pasir besi. Mereka tidak serta merta menolak pembangunan tambang pasir besi tersebut, tetapi mereka dapat membaca ke depan efek positif dan negatif apabila rencana tambang pasir tersebut beroperasi. Mereka bisa menilai bahwa tambang pasir tersebut akan lebih menyengsarakan lebih banyak warga khususnya yang berada dalam daerah pesisir. Banyak warga yang akan kehilangan pekerjaannya sebagai petani dan akan berkurang kebebasannya dalam lingkungan pesisir. Meskipun pemerintah telah menjamin ganti rugi akan diberikan dengan jumlah yang besar, namun hal ini tidak membuat mereka untuk buta terhadap uang, mereka bisa menghitung ganti rugi yang jumlahnya besar tapi belum tentu mereka nikmati, berbeda dengan lahan pesisir yang



digunakan untuk usaha tani cabai, meskipun harus bekerja. Jadi dalam hal ini mereka telah berpikir panjang untuk tetap mempertahankan lahan pesisir ini.

Usaha keras yang mereka lakukan dalam mempertahankan lahan pesisir ini adalah mereka rela berdemo sampai tingkat DPRD Yogyakarta, yang hasilnya mereka sampai saat ini dapat memperjuangkan lahan pesisir untuk dijadikan lahan pertanian yang dari segi ekonomi menguntungkan, dari segi ekologi pun masih tetap lestari. Uang Demo sengaja mereka kumpulkan dari hasil lelang sebesar Rp 50,- /kg. Sengaja nominal ini dipungut kecil supaya anggota kelompok tani tidak merasa keberatan dengan pungutan tersebut.

Kesederhanaan dan kemudahan perencanaan yang mereka bangun dalam kelompok membuat ketahanan sosial-ekonomi Kelompok Tani Desa Bugel dan Desa Garongan juga bisa dijalankan dengan mudah oleh anggotanya. Ketika ketahanan sosial ekonomi sudah tercipta maka kualitas sosial akan mengikutinya. Menurut Van der Maesen dkk (2005) Kualitas sosial adalah sejauhmana orang dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi, budaya, hukum, dan politik masyarakat dalam kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan meningkatkan potensi mereka untuk berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Dalam hal ini ketahanan sosial ekonomi menjadi aspek yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sosial yang mewujudkan kesejahteraan bagi warga Desa Bugel dan Desa Garongan.

PENUTUP

Kelompok Tani Desa Bugel dan Desa Garongan mempunyai kemampuan untuk hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya disertai dengan kemampuan mereka dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik di era MEA, hal ini dibuktikan dengan kemampuan dalam mengolah lahan pasir marginal, membuat teknologi sederhana dalam budidayanya (sumur pantek, tanaman pemecah angin dan sebagainya), dan membuat pasar lelang, selain itu mereka juga mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik lahan yang akan dijadikan tambang pasir besi, mampu memobilisasi masa, dan mampu dalam



mengumpulkan dana demonstrasi yang tidak membebankan kelompok. Dalam hal ini ketahanan sosial ekonomi menjadi aspek yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sosial yang mewujudkan kesejahteraan bagi warga Desa Bugel dan Desa Garongan. Belajar dari Ketahanan sosial ekonomi Kelompok Tani Di Desa Bugel dan Desa Garongan bisa dijadikan sebagai salah satu contoh strategi pemberdayaan masyarakat untuk membangun pedesaan dalam menghadapi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial. 2003. Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jakarta : Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Herrmann, Peter. *Social Quality – Opening Individual Well-Being for a Social Perspective*. 2006. The European journal of social quality 6(1).
- Khudori. 2013. Tragedi Pertanian Indonesia, Koran Tempo. 11 September. hal. A10.
- Mackenbach, Johan P. 2013. Yang Miskin Yang Mati Muda. Koran Tempo. Edisi No 4274 Tahun XIII 1 Juli. Halaman A10.
- Purba, Jonny. 2002. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Yogyakarta : Yayasan Obor.
- Roestam, Soepardjo. 1993. Pembangunan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Van der Maesen, Laurent dan Alan C. Walker. 200. *Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network*. The European Journal of Social Quality. 5(1,2).



PROSPEK PENGEMBANGAN AYAM KUB MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

Budi Setyono

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
setyonobudi12@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian yang berbasis sumber daya lokal, serta untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani, diimplementasikan inovasi teknologi pada bulan Agustus 2015. Ayam kampung adalah jenis ternak yang biasa dipelihara oleh masyarakat pedesaan. Selama ini pemeliharaan ayam kampung dilakukan secara tradisional. Pengembangan ayam kampung mendukung kemandirian pangan di Kabupaten Sleman dilaksanakan di Desa Jogotirto, Kecamatan Berbah. Sistem ini diupayakan dapat meningkatkan pendapatan dan mengubah perilaku petani ke arah suatu usaha agribisnis perdesaan. Usaha ternak ayam KUB dianalisis secara sederhana khususnya untuk usaha pembesaran/pedaging sebanyak 100 ekor day old chick (DOC) pada waktu kurang lebih 70 hari, diperoleh laba Rp. 900.735. Sedangkan hasil analisis usaha ternak dapat disimpulkan bahwa dengan memelihara 100 ekor induk ayam KUB yang ditujukan untuk bisnis penjualan DOC mampu menghasilkan penghasilan sekitar Rp. 2.191.778 per bulan. Disimpulkan bahwa usaha ternak ayam KUB menguntungkan sehingga dapat menambah pendapatan bagi peternak.

Kata Kunci: Prospek, Pengembangan, Ayam KUB

CHICKEN KUB DEVELOPMENT PROSPECTS SUPPORTING FOOD SELF RELIANCE IN SLEMAN

ABSTRACT

In order to support agricultural development based on local resources, as well as to increase food self sufficiency, value added, competitiveness and the welfare of farmers, technological innovation implemented in august 2015. Chicken is the kind of livestock that may be kept by rural t chicken to support self sufficiency in Sleman held in the village Jogotirto, district Berbah. This system is striving to increase revenue and to change the behavior of farmers towards a rural agribusiness. KUB chicken farming was analyzed in a simple, especially for the business of enlarging as many as 100 day old chick (DOC) in less than 70 days, obtained a profit of rp. 900 735. while the results of the analysis of the cattle business can be concluded that by taking care of 100 breeding chickens kub devoted to the business of selling doc capable of generating an income of about rp. 2,191,778 per month. it was concluded that chicken KUB farming profitable so as to increase income for farmers.

Keywords: Prospects, Development, Chicken KUB



PENDAHULUAN

Ayam kampung adalah jenis ternak yang biasa dipelihara oleh masyarakat pedesaan. Selama ini pemeliharaan ayam kampung dilakukan secara tradisional, dengan jumlah pemilikan sangat beragam dan belum terarah kepada struktur populasi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta rencana produksi (Suprijatna E. 2010.; Ditjen Peternakan. 2008). Perkembangbiakan ternak umumnya berlangsung secara alami dan belum banyak memperoleh campur tangan pemeliharanya. Pemeliharaan ayam kampung dapat dilakukan dengan teknologi sederhana, sehingga cocok untuk diterapkan oleh masyarakat di pedesaan (MSI. 2013.; Baswarsiati, Purnomo S. 2008). Jika dibudidayakan secara baik ayam kampung berpeluang untuk menjadi usaha ternak yang mampu menjadi sumber protein hewani serta menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Berbah melihat bahwa usaha ayam KUB memiliki peluang yang besar, dengan mencoba melakukan usaha menghasilkan DOC dan pembesaran Ayam KUB. Dengan adanya usaha tersebut dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat wilayah Kecamatan Berbah. Mengingat masih barunya usaha Ayam KUB ini dan tingginya permintaan masyarakat pada Ayam KUB, diperlukan adanya studi kelayakan usaha menghasilkan DOC dan usaha pembesaran Ayam KUB. Dari studi kelayakan ini, akan dilihat apakah usaha ini layak atau tidak untuk dikembangkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah: partisipatif dalam arti bahwa perencanaan inovasi dan pengembangannya dibangun berdasarkan *bottom up planning* melalui pemberdayaan masyarakat petani. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2015, menggunakan metode survey dan dianalisis secara deskriptif (Singarimbun & Effendi 1995). Lokasi penelitian di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dengan cara *farm record keeping* secara periodic. Analisis data yang akan digunakan adalah diskriptif, disamping itu juga analisis kelayak usahatani.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Ayam KUB

Keunggulan ayam KUB (ayam Kampung Unggul dari Badan Litbang Pertanian) antara lain : warna bulu beragam seperti ayam kampung umumnya, cita rasa & kualitas daging seperti ayam kampung biasa, bobot badan dewasa berkisar antara 1.200 - 1.800 gram, umur mulai bertelur lebih cepat (umur 5 - 5,5 bulan), produktivitas telur lebih tinggi (140 - 160 butir/ekor/tahun), sifat mengeram sudah hilang hingga 90%, panen pedaging berkisar antara 60 - 90 hari, kebutuhan pakan hingga umur 70 hari (masa panen 2 kg/ekor), daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi (Balitbangtan. 2011).

Mengingat keunggulannya secara genetis maupun ekonomis, keberadaan ayam KUB layak untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Rintisan penyebarluasannya dapat dilakukan melalui kelompok ternak yang selama ini menjadi basis terdepan dalam penyampaian informasi teknologi kepada peternak diperdesaan (Syahyuti. 2006)

Cara Pemeliharaan Anak Ayam KUB

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam usaha beternak ayam kampung, maka perlu kiranya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

Bibit

Bibit mempunyai kontribusi sebesar 30% dalam keberhasilan suatu usaha peternakan. Bibit ayam kampung (DOC) dapat diperoleh dengan cara : dengan membeli DOC ayam kampung langsung dari pembibit, membeli telur tetas dan menetaskannya sendiri, atau membeli indukan untuk menghasilkan telur tetas kemudian ditetaskan sendiri baik secara alami atau dengan bantuan mesin penetas. Secara singkat DOC ayam kampung yang sehat dan baik mempunyai kriteria sebagai berikut : dapat berdiri tegap, sehat dan tidak cacat, mata bersinar, pusar terserap sempurna, bulu bersih dan mengkilap, tanggal menetas tidak lebih lambat atau cepat.

Pakan

Kita ketahui bersama bahwa pakan mempunyai kontribusi sebesar 30% dalam keberhasilan suatu usaha. Bahan pakan yang bisa diberikan antara lain :



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



konsentrat, dedak, jagung, pakan alternatif seperti sisa dapur/warung, dan lain sebagainya. Yang terpenting dalam menyusun atau memberikan ransum adalah kita tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi ayam kampung yaitu protein kasar (PK) sebesar 12% dan energi metabolis (EM) sebesar 2500 Kkal/kg.

Perkandangan

Syarat kandang yang baik : jarak kandang dengan permukiman minimal 5 m, tidak lembab, sinar matahari pagi dapat masuk dan sirkulasi udara cukup baik. Sebaiknya memilih lokasi yang agak rindang dan terhalangi oleh bangunan atau tembok lain agar angin tidak berhembus langsung ke dalam kandang. Ukuran kandang : tidak ada ukuran standar kandang yang ideal, akan tetapi ada anjuran sebaiknya lebar kandang antara 4-8 m dan panjang kandang tidak lebih dari 70 m.

Manajemen Pemeliharaan.

Manajemen atau tatalaksana pemeliharaan memegang peranan tertinggi dalam keberhasilan suatu usaha peternakan yaitu sekitar 40%. Bibit berkualitas serta pakan yang berkualitas belum tentu memberikan jaminan keberhasilan suatu usaha apabila manajemen pemeliharaan yang diterapkan tidak tepat. Sistem pemeliharaan pada ayam kampung bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu : ekstensif/tradisional, semi intensif dan intensif.

Pengendalian Penyakit

Hal yang tak kalah pentingnya adalah pengendalian penyakit. Kita semua akan setuju dengan statement “mencegah lebih baik daripada mengobati”. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan tindakan antara lain :

- Menjaga sanitasi lingkungan kandang, peralatan kandang dan manusianya
 - Pemberian pakan yang fresh dan sesuai kebutuhan ternak
 - Melakukan vaksinasi secara teratur
 - Pemilihan lokasi peternakan di daerah yang bebas penyakit.
 - Manajemen pemeliharaan yang baik

Pasca Panen dan Pemasaran.

Pemasaran ayam kampung pada dasarnya mudah karena disamping jumlah permintaan yang tinggi, harga ayam kampung masih tergolong tinggi



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

dan stabil, sedang produksi masih terbatas. Ayam kampung dapat dijual dalam bentuk hidup atau sudah dipotong (karkas).

Analisis Usahatani Ayam KUB

Analisis usaha ternak ayam KUB umur satu tahun secara sederhana dengan asumsi memelihara 100 ekor induk ayam KUB yang ditujukan untuk bisnis penjualan DOC sampai berproduksi tertera pada Tabel 1 dan 2. Sedangkan Usaha pembesaran/pedaging sebanyak 100 ekor DOC memerlukan waktu kurang lebih 70 hari tertera pada Tabel 3.

Analisis usaha ayam KUB (usaha DOC)

Analisis secara sederhana usaha ternak ayam KUB khususnya usaha DOC sampai produksi dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil analisis usaha ternak dapat disimpulkan bahwa dengan memelihara 100 ekor induk ayam KUB yang ditujukan untuk bisnis penjualan DOC mampu menghasilkan penghasilan sebesar Rp. 26.301.337 per tahun atau sekitar Rp. 2.191.778 per bulan.

Perlu diketahui bahwa ayam KUB mempunyai sifat mengeram rendah bila dibanding dengan ayam kampung biasa. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengatasi produksi telur yang setiap hari kurang lebih 150 butir telur diperlukan beberapa mesin penetas untuk pengembangannya. Untuk penetasan yang dilakukan kelompok tani saat ini dengan mencoba secara alami yaitu dengan mesin penetas manual dan ada yang dieramkan dengan ayam kampung biasa yang siap mengeram.

Tabel 1. Pengeluaran usaha ternak ayam KUB (100 ekor betina + 10 ekor jantan)

Komponen	Banyak	Harga (Rp./ekor)	Jumlah (Rp.)
Biaya Pembelian DOC			
Betina (ekor)	100	9.000	900.000
Jantan (bonus) (ekor)	10	-	-
Subjumlah	110		900.000
Biaya pakan			
Pakan DOC hingga 8 minggu (kg)	142,45	6.700	954.415
Pakan umur 9-22 minggu (kg)	743,05	3.167	2.353.239
Pakan umur 9-22 minggu (kg)	1963,5	3.167	6.218.405
Pakan DOC s.d umur lima hari (kg)	242,72	6.700	1.626.224
Subjumlah	2.849		11.152.283
Biaya vaksin, obat-obatan dan vitamin			



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Indukan dan pejantan (ekor)	110	1.800	198.000
DOC siap jual (ekor)	6068	85	515.780
Subjumlah			713.780
Biaya tenaga kerja (HOK)	5	50.000	250.000
Biaya perbaikan dan perluasan kandang (paket/ tahun)	1	750.000	750.000
Biaya sanitasi/ penyemprotan kandang (kali/ tahun)	12	15.000	180.000
Biaya peralatan kandang (paket/ tahun)	1	150.000	150.000
Biaya pembelian mesin tetas (buah)	5	350.000	1.750.000
Biaya perawatan mesin tetas (paket/ tahun)	1	200.000	200.000
Subjumlah			1.950.000
Biaya pembelian kardus untuk <i>packing</i>	100	2.500	250.000
Biaya listrik (periode)	38	7.500	285.000
Biaya transportasi (bulan)	12	50.000	600.000
Total biaya			17.181.063

Tabel 2. Penerimaan usaha ternak ayam KUB

Komponen	Banyaknya	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah
Telur minggu ke-22-25	815	Butir	1.200	978.000
Telur minggu ke-26-27	543	Butir	1.200	651.600
Telur minggu ke-28-52	1.634	Butir	1.200	1.960.800
Subjumlah				3.590.400
Hasil penjualan DOC	6.068	Ekor	6.500	39.442.000
Hasil limbah kandang	3	Colt	150.000	450.000
Total penerimaan				43.482.400
Laba tahun pertama				26.301.337

Analisis usaha ternak ayam KUB (usaha pedaging)

Berternak ayam KUB memiliki prospek lebih baik dari pada berternak jenis unggas lain. Hal ini dikarenakan beberapa keunggulan dari ayam KUB, antara lain: (1) Memiliki fisik dan corak seperti ayam kampung pada umumnya; (2) Masa panen yang relatif lebih singkat; (3) Harga jual yang lebih tinggi dan stabil; (4) Lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan bau yang menyengat; (5) Pemeliharaanya mudah karena memiliki daya tahan tubuh yang tinggi; dan (6) Untuk analisis usaha secara sederhana beternak ayam KUB khususnya untuk pedaging selama 70 hari tertera pada Tabel 3.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 3. Analisis usaha pembesaran ternak ayam KUB

Komponen	Volume	Harga satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)
DOC FS (ekor)	100,00	6.500	650.000
BR1 (kg)	82,35	7.500	617.647
Jagung (kg)	32,35	5.000	161.765
Katul (kg)	11,76	2.000	23.529
<i>Vita chicks</i> (bungkus)	5,88	10.000	58.824
Vaksin (dosis)	100,00	1.000	100.000
Tenaga kerja (orang)	3,75	50.000	187.500
Jumlah			1.799.265

Memperhatikan Tabel 3, bahwa dengan usaha ternak ayam KUB dianalisis secara sederhana khususnya untuk usaha pembesaran sebanyak 100 ekor DOC memerlukan waktu kurang lebih 70 hari. Hasil penjualan 100 ekor ayam KUB = $100 \times \text{Rp. } 27.000 = \text{Rp. } 2.700.000$. Sehingga diperoleh laba = $\text{Rp. } 2.700.000 - \text{Rp. } 1.799.265 = \text{Rp. } 900.735$.

PENUTUP

Dengan memelihara 100 ekor induk ayam KUB yang ditujukan untuk bisnis penjualan DOC mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 26.301.337 per tahun atau sekitar Rp. 2.191.778 per bulan. Sedangkan usaha ternak ayam KUB dianalisis secara sederhana khususnya untuk usaha pembesaran/pedaging sebanyak 100 ekor DOC memerlukan waktu kurang lebih 70 hari. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.799.265. Hasil penjualan Rp. 2.700.000. Peternak memperoleh laba Rp. 900.735. Dengan memperhatikan hal ini disimpulkan bahwa prospek usaha mandiri dalam memelihara ayam KUB dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Sleman karena dapat menambah pendapatan keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Balitbangtan. 2011. Panduan umum : Model pengembangan pertanian perdesaan melalui inovasi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta (Indonesia): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Baswarsiati, Purnomo S. 2008. Strategi rintisan agribisnis industrial pedesaan (AIP) melalui inovasi teknologi dan kelembagaan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kabupaten Malang. Jurnal. 2:86-100.
- Ditjen Peternakan. 2008. Statistik peternakan. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan. Kementerian Pertanian.
- MSI. 2013. Bangkitkan Kejayaan ayam kampung: Merintis kemandirian ayam KUB dan beternak ayam KUB menuai untung ganda. Jakarta (Indonesia): Majalah Sains Indonesia.
- Singarimbun M, Effendi S. 1995. Metode penelitian survey. Jakarta (Indonesia): LP3ES.
- Suprijatna E. 2010. Strategi pengembangan peternakan ayam lokal di Indonesia. Pidato Pengukuhan. Semarang (Indonesia): Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syahyuti. 2006. 30 konsep penting dalam pembangunan pedesaan dan pertanian. Jakarta (Indonesia): PT. Bina Rena Pariwisata.



PERSEPSI KWT DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT ADOPSI MODEL-KRPL SERTA KEERATAN HUBUNGANNYA

Wiendarti I Werdhany¹, Murwati¹, Kurnianita¹, Adhi Surya Perdana²

¹Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

²Fakultas Pertanian, Universitas Tidar Magelang
windiedhany@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi terhadap model- KRPL yang merupakan konsep dari Kementerian Pertanian terhadap prinsip pemanfaatan pekarangan secara optimal. Penelitian menggunakan metode survei padabulan Maret sampai Nopember 2015 pada lokasi KRPL di kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Penentuan 100 responden dilakukan secara simple random sampling. Parameter faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi meliputi : 1) Faktor Internal (kohesi, motivasi, cosmopolitan), dan 2) Faktor Eksternal (peran penyuluh, sifat teknologi, dan ketersediaan sarana produksi). Variabel tingkat persepsi yaitu manfaat m-KRPL terhadap peningkatan : pengetahuan; diversifikasi konsumsi; gizi keluarga; penghematan pengeluaran; pendapatan; aktivitas kelompok. Data dan informasi yang dihimpun, dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa persepsi petani berpengaruh nyata terhadap model, meskipun tergolong sedang (52,87%). Faktor-faktor yang berpengaruh nyata adalah variabel kohesi kelompok, sifat teknologi dan persepsi KWT, sebesar 66.66%. dengan faktor kohesi dan sifat teknologi bermakna negatif.

Kata Kunci : Persepsi KWT, adopsi model Kawasan Rumah Pangan Lestari, kelompok wanita tani

PENDAHULUAN

Model-Kawasan Rumah Pangan Lestari (model-KRPL) merupakan salah satu bentuk diseminasi inovasi dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta telah melakukan diseminasi inovasi model-KRPL di seluruh Kabupaten dan Kota Yogyakarta yang bertujuan agar dapat diadopsi secara utuh oleh berbagai pihak baik warga masyarakat maupun instansi pemerintah. Dalam implementasinya, aplikasi teknologi pada lahan pekarangan oleh para anggota kelompok sebagai Rumah Pangan Lestari (RPL) harus menyesuaikan dengan kondisi dan spesifikasi agroekosistem, sosial



ekonomi dan budaya setempat. Melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga tersebut diharapkan pelaku KRPL yang pada umumnya adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) dan sebagian adalah kelompok dasawisma atau kelompok pengajian ibu-ibu, mampu meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. Pada tahun 2013, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan D.I.Yogyakarta telah memprogramkan untuk melakukan adopsi secara utuh model-KRPL bagi KWT melalui kegiatan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) guna mendukung percepatan diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan keluarga dalam pemenuhan pangan dan gizi keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis persepsi KWT terhadap model-KRPL, dan (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi model-KRPL serta keeratan hubungannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif dengan penekanan pada metode kuantitatif. Menggunakan metode survey kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, serta diperkaya dengan uraian-uraian deskriptif secara kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta yaitu : Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, pada bulan Maret sampai dengan Nopember tahun 2015. Responden sebanyak 100 orang yang mewakili masing-masing kelompok dan ditentukan secara *simple random sampling* yaitu pengurus dan anggota kelompok.

Kelompok pelaku KRPL ditentukan secara *proporsional random sampling*, sebesar 50 % dari jumlah kelompok pelaku KRPL-P2KP di setiap kabupaten/kota Yogyakarta. Indikator persepsi KWT terhadap model-KRPL yaitu manfaat yang telah dirasakan dengan parameter peningkatan pengetahuan; peningkatan diversifikasi konsumsi; peningkatan gizi keluarga; penghematan pengeluaran; peningkatan pendapatan; peningkatan aktivitas



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



kelompok. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan rumus fungsi regresi:

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n + e$$

Dimana: Y merupakan adopsi model-KRPL, b_0 adalah intersep, $b_1, \dots, b_n$ adalah koefisien regresi, x_1 adalah Kohesi Kelompok, x_2 adalah Motivasi Kelompok dan e adalah error term. Pengukuran dilakukan dengan skoring dan pendekatan *Likert* (Suryabrata, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi KWT terhadap model-KRPL

Keunggulan dan kerugian suatu inovasi teknologi dalam model-KRPL penting untuk diketahui petani, sebagai bahan pertimbangan untuk penerapan atau penolakan. Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas petani (52,87%) mempunyai persepsi sedang terhadap model-KRPL.

Tabel 1. Persepsi Petani

No	Klasifikasi Persepsi KWT	Interval Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	5-21	2	2,30
2.	Sedang	22-37	46	52,87
3.	Tinggi	38-53	39	44,83
Jumlah			87	100,00

Sumber : Analisis data primer 2015

Setiap petani mempunyai pandangan atau persepsi yang berbeda-beda terhadap segala hal yang mereka anggap baru (inovasi). Pandangan atau persepsi petani dipengaruhi oleh karakter dan manfaat atau keuntungan yang mereka rasakan.

Faktor - Faktor yang mempengaruhi adopsi model-KRPL

Kohesi Kelompok

Komponen Kohesi kelompok yaitu : (1) Anggota merasakan manfaat terhadap aktivitas kelompok, (2) Keaktifan kehadiran anggota setiap pertemuan kelompok



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Keterlibatan anggota dalam perencanaan kegiatan

Tabel 2. Kohesi petani

No	Klasifikasi Kohesi	Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah responden (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	4 - 6	14	16,09
2.	Sedang	7 - 10	70	80,46
3.	Tinggi	11 - 13	3	3,45
Jumlah			87	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2015

Mayoritas petani (80,46 %) memiliki kohesi kelompok dengan klasifikasi sedang terhadap kegiatan KRPL yang bersifat komunal, dan dilakukan bersama-sama dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. (Tabel 2).

Motivasi anggota KWT

Keberhasilan kegiatan KRPL disebabkan oleh motivasi KWT yang tinggi untuk optimalisasi lahan pekarangan, yang ditunjukkan dengan mayoritas memiliki motivasi tinggi (85,06%).

Tabel 3. Motivasi Petani

No	Klasifikasi Motivasi	Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	0-2	1	1,15
2.	Sedang	3-4	12	13,79
3.	Tinggi	5-8	74	85,06
Jumlah			87	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2015

Kosmopolitan

Kosmopolitan menggambarkan keterbukaan KWT dalam memperoleh informasi maupun pengalaman secara personal ke personal, personal ke kelompok, kelompok ke kelompok lain, dan berbagai pihak lainnya.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 4. Kosmopolitan kelompok

No	Klasifikasi Kosmopolitan	Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	0-2	2	2,30
2.	Sedang	3-5	75	86,21
3.	Tinggi	6-8	10	11,49
Jumlah			87	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2015

Mayoritas (86,21%) petani berada dalam tingkat kosmopolitan sedang (Tabel 4).

Peran penyuluh

Penyuluh Pertanian merupakan pendamping kelompoktani dalam penerapan teknologi maupun dalam upaya memberdayakan kelompok menuju kemadirian. Tabel 5 Menunjukkan bahwa mayoritas petani (58,62%) memposisikan peran penyuluh dalam katagori tinggi.

Tabel 5. Peran Penyuluh

No	Klasifikasi Peran Penyuluh	Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	5-10	4	4,60
2.	Sedang	11-16	32	36,78
3.	Tinggi	17-22	51	58,62
Jumlah			87	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2015

Kondisi ini dirasakan petani terutama pada saat pembentukan dan memberi contoh untuk pemanfaatan pekarangan dengan berbagai tanaman sayuran, ternak dan pangan lokal.

Sifat Teknologi

Komponen sifat teknologi yaitu menguntungkan, mudah dilaksanakan, mudah dicoba, layak diterapkan, dan mudah dilihat.



Tabel 6. Sifat Teknologi

No	Klasifikasi Sifat Teknologi	Interval Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	6-12	61	70,11
2.	Sedang	13-19	26	29,89
3.	Tinggi	20-27	0	0,00
Jumlah			87	100,00

Sumber : Analisis data primer 2015

Dalam Tabel 6, mayoritas petani (70,11%), memposisikan indikator sifat teknologi termasuk dalam klasifikasi rendah dengan 61 orang, interval skor 6-12 .

Sarana Produksi

Sarana produksi merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan secara khusus baik dari kerterjangkauan harga dan kemudahan mendapatkannya. Mayoritas petani (78,16%) mengklasifikasikan sarana produksi dalam katagori sedang (Tabel 7).

Tabel 7. Sarana Produksi

No	Klasifikasi Sarana Produksi	Interval Skor	Petani pelaksana/ responden	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah	4-10	11	12,64
2.	Sedang	11-18	68	78,16
3.	Tinggi	19-26	8	9,20
Jumlah			87	100,00

Sumber : Analisis data primer 2015

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi m-KRPL dengan variabel independen (kohesi, motivasi, kosmopolitan, peran penyuluh, sifat teknologi, ketersediaan sarana produksi dan persepsi KWT) dan adopsi model sebagai faktor dependen.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 8. Analisis Regresi Faktor Internal, Eksternal dan Persepsi Terhadap Adopsi m-KRPL (Model 4)

Nama Variabel (Model 4)	Koefisien regresi	T-hitung	Probabilitas
Kohesi (X_1)	-1,532	-2,763	0,007**
Kekosmopolitanan (X_3)	0,984	1,884	0,063 ^{ns}
Sifat Teknologi (X_5)	-2,430	-7,531	0,000***
Persepsi KWT (X_7)	0,274	4,250	0,000***

Konstata = 59,130, Adj R square = 0,666, F-hitung = 43,914, Ftabel = 2,699, Ttabel = 1,984, Alpha = 5 % (0,05),
Keterangan = Siginifikan (0,000***; 0,001**; 0,05*) dan Non Signifikan (ns)

Sumber : Analisis data primer, 2015

Variabel dominan yakni, kohesi kelompok, sifat teknologi dan persepsi KWT merupakan faktor-faktor yang berpengaruh nyata pada pelaksanaan KRPL (Tabel 8). Kohesi kelompok (probabilitas 0,007) dapat meningkatkan partisipasi kelompok secara swadaya, yang idealnya dilakukan oleh kumpulan individu. Koefisien kohesi sebesar -1,532 (bermakna negatif), menjelaskan semakin tinggi kohesi kelompok maka semakin rendah adopsi M-KRPL. Hasil *Foccus Group Discussion* (FGD) menjelaskan penyebab terjadinya makna negatif faktor kohesi, diantaranya karena banyaknya program pemerintah selain KRPL. Koefisien sifat teknologi KRPL -2,430 (bermakna negatif), menjelaskan semakin tinggi sifat teknologi KRPL maka semakin rendahnya adopsi m-KRPL dikarenakan banyaknya sifat teknologi yang diperkenalkan ke KWT membuat mereka merasa kebingungan saat aplikasi langsung di kawasan pekarangan rumah. Hasil penelusuran dan evaluasi terhadap kondisi ini, dapat dijelaskan dengan beberapa teknologi yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknologi hidroponik dan vertikultur yang merupakan teknologi baru bagi mereka. Perlu dilakukan pembinaan secara perlahan.

Hubungan antara persepsi dan adopsi model-KRPL

Guna melancarkan penerapan KRPL diperlukan persepsi KWT yang positif (probabilitas 0,000 dan koefisien 0,274), menjelaskan semakin tinggi persepsi KWT maka semakin tinggi adopsi m-KRPL. Dengan kata lain pengamatan tentang pengalaman menerapkan KRPL menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan secara positif sehingga dapat membawa KWT menuju



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

peningkatan gizi pangan dan kesejahteraan keluarga. Hubungan persepsi KWT dengan adopsi M-KRPL, dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9. Hubungan Persepsi dengan Adopsi model-KRPL

		Persepsi KWT	Adopsi M-KRPL
Persepsi KWT	Pearson Correlation	1	0,394**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	87	87
Adopsi M-KRPL	Pearson Correlation	0,394**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	87	87

Keterangan : Siginifikan (0,000***; 0,001**; 0,05*), Non Signifikan (ns)

Sumber : Analisis data primer, 2015

Tabel 9, hubungan persepsi dengan adopsi m-KRPL sebesar 0,394 dengan sig 0,000 (Korelasi *Pearson*). Klasifikasi kekuatan persepsi masih tergolong lemah untuk dapat mengubah penerapan KRPL yang dilakukan oleh KWT. Persepsi KWT yang terjadi dilapangan dapat terlihat dari menambahnya pengetahuan cara budidaya menggunakan teknologi vertikultur, aplikasi kalender tanam, pengalaman dalam pencatatan usaha tani, mempermudah memperoleh berbagai jenis tanaman sayuran yang dikonsumsi keluarga, meningkatnya diversifikasi pangan bergizi, pemasaran hasil panen dapat meningkatkan pendapatan, dan sebagainya. Kekuatan hubungan yang dihasilkan pada R^2 sebesar 0,666 menjelaskan adanya hubungan yang terjadi secara bersama-sama kohesi, sifat teknologi dan persepsi KWT terhadap adopsi m-KRPL sebesar 66,60% sedangkan sisanya sebesar 33,40% dijelaskan oleh faktor di luar model yang tidak diteliti.

PENUTUP

Persepsi KWT terhadap adopsi m-KRPL berpengaruh nyata pada keberlanjutan KRPL, walaupun tergolong pada kategori sedang dan ada hubungan positif antara persepsi KWT dengan adopsi m-KRPL namun tergolong lemah untuk dapat mengubah penerapan KRPL oleh KWT. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi m-KRPL yakni kohesi kelompok, sifat teknologi dan persepsi KWT. Persepsi KWT memiliki hubungan yang positif



dengan Adopsi M-KRPL, maka perlu dilakukan penguatan persepsi kelompok KWT melalui pertemuan sosial kemasyarakatan yang bersifat fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian. 2012. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pedoman Umum. Jakarta.
- Hariadi, S.S. 2011. Dinamika Kelompok tani. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Harunawan, 2007. <https://adityachandrasetiawan.wordpress.com/2013/05/08/teori-persepsi-perception-theory/>. diunduh 2 November 2014.
- Indraningsih, K. S. 2011. Pengaruh Penyuluhan terhadap Keputusan Petani dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Agro Teknologin, vol 29 Nomor 1.
- Priyatno, D. 2012. Belajar Praktis Analisis Parametrik dan Non Parametrik dengan SPSS. Gava Media. Yogyakarta.
- Singarimbun, M., dan S. Effendi. 2011. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta
- Sugiyono. 1999. Statistik untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- Van den Ban, A.W dan Hawkins, H.S. 1999. Penyuluhan Pertanian. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Wiendarti, I.W dan Gunawan. 2012. Teknik Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Ilmu Pertanian, Vol 16, No 2. Hlm 76-83
- Wiendarti, I.W dan Gunawan. 2012. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Daerah Istimewa Yogyakarta. BPTP Yogyakarta, BBP2TP, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Wiendarti, Budhi L, Kurnianita, Murwati, Suradal. 2014. Laporan Akhir RDHP Pendampingan KRPL di DI Yogyakarta. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
- Wiendarti, I.W, Gunawan, Sukar, Endang W. 2014. Laporan Akhir Pendampingan KRPL Kota Yogyakarta. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta.
- Winardi, 2004. [http://ekzaiislami.blogspot.com/2011/http://www.researchgate.net/publication/42348919_Hubungan_Tingkat_Kosmopolitandengan_Sikap_Petani_Padi_Sawah_Terhadap_Kelompok_Tani_Di_Kabupaten_Deli_Serdang._\(Studi_Hasil_Kelompok_Tani_Kampung_Baru_Tani_Jaya_Hotma_Jaya_Desa_Pasar_Melintang_Kecamatan_Lubuk_Pakam\)](http://ekzaiislami.blogspot.com/2011/http://www.researchgate.net/publication/42348919_Hubungan_Tingkat_Kosmopolitandengan_Sikap_Petani_Padi_Sawah_Terhadap_Kelompok_Tani_Di_Kabupaten_Deli_Serdang._(Studi_Hasil_Kelompok_Tani_Kampung_Baru_Tani_Jaya_Hotma_Jaya_Desa_Pasar_Melintang_Kecamatan_Lubuk_Pakam))



STRATEGI PEMBINAAN BUDIDAYA PETANI PADI SAWAH SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE MELALUI KEKUATAN MODAL SOSIAL MENGHADAPI ERA MEA

Yolanda Holle dan Amestina Matualage
Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat
yolandaholle@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan bagi sektor pertanian, dimana petani dituntut untuk produktif sehingga dapat bersaing di pasar Asean. Peningkatan sumberdaya manusia petani menjadi hal mutlak yang dibutuhkan, melalui kegiatan pemberdayaan petani akan menciptakan petani yang berdaya saing regional bahkan global. Kabupaten Merauke provinsi Papua merupakan wilayah potensial pertanian komoditi padi sawah, dimana Suku Marind sebagai petani lokal pemegang hak ulayat. Tulisan ini mengkaji strategi pembinaan budidaya padi sawah yang bersumber pada kekuatan nilai-nilai hakiki sosial budaya Suku Marind. Penelitian ini dilakukan pada enam distrik di Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan fokus diskusi dengan informan kunci. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Suku Marind memiliki tujuh unsur kekuatan modal sosial yang bersumber pada lima unsur roh modal sosial dalam aktifitas bercocok tanam padi sawah yaitu nilai sosial persahabatan, nilai budaya totem, sikap kepemimpinan tradisional pria berwibawa, kebiasaan hidup peramu, dan nilai padi sawah sebagai tanaman introduksi. Strategi pembinaan bercocok tanam padi sawah spesifik bagi Suku Marind dilakukan melalui pendekatan kelompok klen yang diarahkan untuk mendidik pemimpin klen sebagai kontak tani. Berdasarkan hal ini, maka pendekatan pembangunan yang harus digunakan kepada petani Suku Marind adalah dengan pendekatan kelompok klen.

Kata kunci: MEA, Suku Marind, Modal sosial, Klen.

PENDAHULUAN

Peningkatan sumberdaya manusia petani menjadi hal mutlak yang dibutuhkan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar dapat menciptakan insan petani yang berdaya saing regional bahkan global. Ada dua kegiatan penting agar petani bisa bersinergi dalam menghadapi era MEA yaitu pertama aksi kolektif petani melalui kegiatan penguatan kelembagaan petani, kedua kegiatan pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan penyuluhan. Penyuluhan pertanian memegang peranan penting untuk



meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani sehingga terjadi perubahan perilaku. Proses pemberdayaan petani akan sinergis dan berkelanjutan apabila bertumpu pada kekuatan masyarakat.

Kekuatan masyarakat tercermin melalui nilai-nilai, norma-norma, tata aturan, dan pranata-pranata sosial budaya yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara khusus untuk kekuatan sosial masyarakat tercipta melalui hubungan sosial yang harmonis, tingkah laku berdasarkan norma yang kuat, dan interaksi sosial. Badaruddin (2006) mengemukakan bahwa, kekuatan sosial masyarakat dikenal sebagai modal sosial dalam upaya untuk dapat memberdayakan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Memanfaatkan modal sosial secara internal dapat membangun dan memperkuat kohesi sosial, solidaritas sosial, serta secara eksternal dapat membangun jaringan sosial yang lebih luas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Soetomo, 2012).

Suku Marind merupakan penduduk asli Papua yang bermukim di wilayah Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia. Latar belakang kehidupan Suku Marind adalah masyarakat peramu yang bergantung hidupnya dari kekayaan sumberdaya alam dengan cara mengambil hasil hutan berupa sagu, kelapa, serta hasil laut. Sebagai masyarakat peramu, Suku Marind dapat langsung memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah tanpa harus berupaya melakukan tindakan bercocok tanam. Boelaars (1992) mengemukakan bahwa, selalu ada ketersediaan sumber daya yang melimpah di hutan, sungai dan dusun bagi Suku Marind.

Saat ini, Suku Marind telah mengusahakan padi sawah sebagai komoditi introduksi yang masuk ke dalam sistim sosial budaya Suku Marind. Pengusahaan padi sawah oleh Suku Marind terbentuk melalui hubungan sosial dengan beberapa fasilitator. Informasi dan bimbingan dari fasilitator telah mengakibatkan Suku Marind membuka lahan-lahan padi sawah dan diharapkan dapat mencapai peningkatan produksi. Holle (2015) mengemukakan bahwa, terjadi perbedaan produksi beras yang cukup menyolok antara Suku Marind dengan petani transmigrasi. Hasil produksi beras yang dihasilkan Suku Marind



sebesar 930 kg/ha sebaliknya petani transmigrasi nasional sebesar 3 ton/ha per musim tanam per tahun.

Memasuki era MEA, pembinaan cara bercocok tanam padi sawah yang berkelanjutan bagi Suku Marind sangat dibutuhkan, agar mereka dapat turut berpartisipasi dalam pengembangan padi sawah. Dilain pihak, Suku Marind sebagai pemegang hak ulayat memiliki kekuatan modal sosial yang dapat digunakan dalam pengembangan padi sawah. Bertitik tolak dari kekuatan modal sosial yang berasal dalam masyarakat untuk mengerakkan pembangunan, maka hal yang dipertanyakan adalah kekuatan modal sosial apa yang dimiliki Suku Marind dalam aktifitas bercocok tanam padi sawah dan bagaimana kekuatan modal sosial Suku Marind dapat dimanfaatkan dalam proses pembinaan. Oleh sebab itu, tujuan kajian yang ingin dicapai yaitu (1) mendeskripsikan kekuatan modal sosial Suku Marind dalam bercocok tanam padi sawah, dan (2) menyusun strategi pembinaan bercocok tanam padi sawah melalui pemanfaatan kekuatan modal sosial Suku Marind.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada enam distrik di Kabupaten Merauke dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dimana peneliti menggali data-data dari informan kunci melalui wawancara semi struktural, *in-depth interview* dan *focus group discussion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Modal Sosial Suku Marind

Suku Marind telah melakukan hubungan sosial dengan sepuluh fasilitator sumber informasi bercocok tanam padi sawah yaitu anggota keluarga, tetangga, Penyuluh Pertanian Lapang (PPL), petani Jawa Merauke (petani Jamer), petani transmigrasi nasional, pastor paroki, pengurus kelompok tani, Yayasan Kasih Mulia (YKM), anggota kelompok tani, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Merauke. Hubungan sosial tersebut telah memunculkan kekuatan modal sosial Suku Marind antara lain: (1) Sikap rela berkorban pemimpin klen; Suku Marind



percaya terhadap pemimpin yang memiliki sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban tercermin dari sikap peduli, bertanggung jawab, memperhatikan kesulitan serta kebutuhan Suku Marind sebagai anggota kelompok tani. (2) Interrelasi timbal balik antar anggota klen Suku Marind atas dasar nilai *totem*⁹; Suku Marind terbagi dalam tujuh klen yaitu klen *Gebze* dengan totem kelapa (*Cocos nusifera*), klen *basik-basik* dengan totem babi (*Sus scrofa*), klen *Mahuze* dengan totem sagu (*Metroxylum Sp*), klen *Balagaize* dengan totem buaya (*Crocodylus Sp*), klen *Ndiken* dengan totem burung bangau coklat berkaki panjang/burung ndik, klen *Samkakai* dengan totem kanguru (*Micropos agilis*) dan klen *Kaize* dengan totem burung kasuari (*Casuarius-casuarius Sp*). Nilai totem pada kelompok klen yang sama akan menciptakan keterikatan antar keluarga-keluarga dalam kelompok klen, yang ditandai dengan saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi rasa aman, dan tidak ada rasa curiga mencurigai; (3) Tata kelakuan Suku Marind yang memberikan kepercayaan terhadap orang lain di luar sistimnya, apabila dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam bentuk tindakan nyata yang bermanfaat. Hal yang sama bagi PPL dalam melakukan hubungan sosial dengan Suku Marind, maka tindakan pembinaan yang dapat memberikan manfaat merupakan bukti nyata bagi Suku Marind untuk percaya kepada PPL. (4) Tata kelakuan Suku Marind yang memberikan kepercayaan dan berinteraksi dengan orang lain di luar sistimnya, apabila dapat menunjukkan sikap peduli, sikap melayani, dan sikap altruisme. Orang lain dengan sikap peduli, melayani dan altruisme akan dipandang sebagai bagian dari keluarga yang tidak dicurigai dan bukan merupakan ancaman baginya. (5) Peran proaktif pemimpin klen Suku Marind dalam menggerakkan anggota klen. Pemimpin yang proaktif merupakan energi pendorong yang dibutuhkan anggota klen dalam menggerakkan kelompok. (6) Kelompok klen sebagai wadah berkelompok yang sesuai dengan nilai sosial budaya Suku Marind. Adanya kesamaan nilai sosbud akan

⁹ *Totem* adalah lambang bagi kelompok sub-sub Suku Marind yang terbentuk dalam klen-klen, dimana setiap klen memiliki keterikatan dengan lambang alam yang diyakini sebagai simbol pembentuk klen.



mempererat hubungan kekeluargaan diantara keluarga-keluarga pada klen. (6) Adat sagu tidak menjadi patokan yang mendorong dan mengatur Suku Marind bercocok tanam padi sawah. Kondisi ini memberi peluang bagi Suku Marind untuk melakukan hubungan sosial dengan fasilitator..

Tujuh kekuatan modal sosial Suku Marind perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam menyampaikan informasi dan pembinaan kepada Suku Marind dalam bercocok tanam padi sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar utama sumber kekuatan modal sosial Suku Marind berasal dari lima hal dasar yaitu (1) nilai sosial persahabatan Suku Marind; Nilai ini mencerminkan suatu hubungan sosial yang ditandai perilaku berbagi kasih yaitu peduli, berbagi, dan mengerti satu dengan lainnya. Sejalan dengan pendapat Mansoben (2010), nilai kepedulian sosial atau berbagi kasih adalah suatu nilai yang sangat tinggi dijunjung oleh orang Papua termasuk Suku Marind didalamnya. Selanjutnya (2) nilai budaya totem dan *dema* Suku Marind; Suku Marind meyakini bahwa nilai budaya *totem* dan *dema* pada klen akan menciptakan saling peduli, saling mengerti, saling bekerjasama, saling memperhatikan, saling berbagi, sehingga tercipta perasaan tenang dan rasa aman untuk berinteraksi. Sebagaimana dinyatakan oleh Mercer dan Clayton (2002) bahwa, adanya kesamaan akan memberikan suatu rasa familiaritas bahwa diantara anggota dalam kelompok memiliki ikatan kekeluargaan, sehingga hubungan sosial akan semakin dekat. (3) sikap kepemimpinan tradisional pria berwibawa (*big leader man*); Karismatik dan kewibawaan seorang pemimpin lebih diakui jika pemimpin tersebut peduli akan kebutuhan anggotanya. Sebagaimana pernyataan Mansoben (2010) bahwa dalam budaya orang Papua, seseorang menduduki posisi penting tertentu di dalam masyarakat hendaknya menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk menganyomi, melindungi dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya, dan bukan hanya melindungi dan mensejahterakan keluarga dan kelompoknya sendiri. (4) kebiasaan hidup peramu Suku Marind; jika alam menyediakan sumberdaya yang bermanfaat maka fasilitator luar harus mampu menunjukkan bukti nyata manfaat yang dapat diberikan melalui pembinaan yang dilakukan. Borlaars (1986) menyatakan bahwa, kebanyakan kaum peramu masih hidup



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

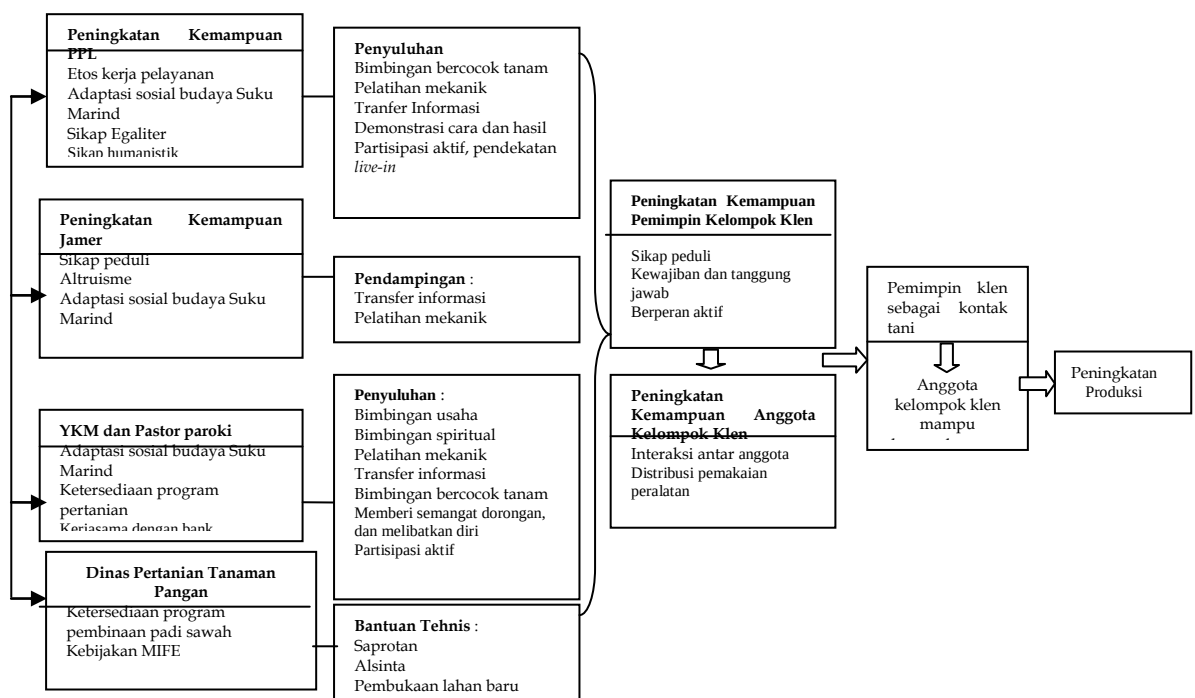
PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

dalam suatu hubungan dengan alam setempat, dimana pemuasan kebutuhan tidak ditunda-tunda dan secepat mungkin. (5) nilai padi sawah sebagai tanaman introduksi; Suku Marind tetap mempertahankan dan mentaati nilai adat sagu sebagai tanaman yang bernilai sakral dalam kehidupan Suku Marind, sebaliknya nilai padi sawah hanya diterima sebagai sumber kebutuhan pangan yang tidak memiliki keterikatan dengan nilai adat Suku Marind.

Strategi Pembinaan Bercocok Tanam Padi Sawah melalui Pemanfaatan Modal Sosial Suku Marind.

Guna mengembangkan padi sawah yang diusahakan oleh Suku Marind, maka disusun strategi pembinaan bercocok tanam padi sawah yang menitikberatkan pada pemanfaatan kekuatan modal sosial Suku Marind. Selengkapny strategi pembinaan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Strategi Pembinaan Bercocok Tanam Padi Sawah
melalui Pemanfaatan Kekuatan Modal Sosial Suku Marind

Langkah strategi dalam pembinaan melalui pemanfaatan modal sosial Suku Marind antara lain: (1) Membangun jaringan integrasi komunikasi yang terpadu dan sinergis antar fasilitator pembina bercocok tanam padi sawah; (2)



Pendekatan kelompok klen atas dasar kesamaan *totem* sebagai kelompok sasaran pembinaan; (3) Pengurus kelompok klen adalah pemimpin klen pada masing-masing totem yang akan berperan sebagai kontak tani. (4) Penyuluh pertanian lapang (PPL) sebagai tenaga lapang harus memiliki prinsip etos kerja melayani dan adaptasi sosial budaya; (5) Metode pembinaan "*seeing is believing*" dengan pendekatan *live-in* dari fasilitator merupakan perwujudan kedekatan psykis yang perlu dibangun; (6) Yayasan Kasih Mulia (YKM) melalui pastor paroki berperan sebagai katalisator pembuka jalan untuk mengajak, mendorong, dan memberi semangat bagi Suku Marind; (7) Lembaga pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur berperan lewat penyediaan saprodi, alsinta, maupun pembukaan lahan baru; (8) Lembaga pemerintah tetap memperhatikan kebijakan pengembangan padi sawah dengan mengedepankan sasaran Suku Marind sebagai penduduk asli Papua dan memperhatikan nilai sosial budaya Suku Marind.

Arah tujuan akhir strategi pembinaan bercocok tanam bagi Suku Marind adalah menciptakan pemimpin klen sebagai kontak tani, dimana diharapkan melalui kesamaan nilai-nilai sosial budaya antara pemimpin klen dan masyarakat Suku Marind maka arus difusi tehnik bercocok tanam padi sawah dapat berlangsung lebih cepat dan tidak mengalami hambatan.

PENUTUP

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Suku Marind memiliki tujuh kekuatan modal sosial dalam merealisasi hubungan sosial yang kuat dengan fasilitator sumber informasi bercocok tanam padi sawah. Selanjutnya, dasar utama kekuatan modal sosial Suku Marind bersumber pada lima unsur roh modal sosial yaitu nilai sosial persahabatan, nilai budaya *totem*, sikap kepemimpinan tradisional pria berwibawa, kebiasaan hidup peramu, dan nilai padi sawah sebagai tanaman introduksi. Strategi pembinaan bercocok tanam padi sawah bagi Suku Marind menitikberatkan pada tujuan akhir yaitu penciptaan pemimpin klen sebagai kontak tani melalui pendekatan klen.



DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin. 2006. Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet) di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. *Jurnal Wawasan*. 12(2): 118-125.
- Bank Dunia. 1999. *What is Social Capital*. Diunduh pada tanggal 12 November 2012 dari :
<http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm>.
- Boelaars, J. 1992. Sistem Nilai Budaya Berbagai Suku Irian Jaya dalam Kaitannya dengan Pembangunan. *Dalam: Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian Jaya*. Manuel kaisepo, Ishadi, Abdul Razak. Jakarta. Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Flassy, D.J., S. Rais, dan A. Supriono. 2009. Modal Sosial: Defenisi, Demensi, dan Tipologi. Diunduh dari: <http://p2dtk.bappenas.go.id> pada tanggal 13 November 2012
- Holle, Y. 2015. Modal Sosial Suku Marind dalam Pengembangan Padi Sawah. Disertasi. Universitas Udayana. Bali.
- Mansoben, J.R. 2010. Kebudayaan dan Pembangunan dalam Kerangka Otonomi Khusus. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Papua : Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. Jakarta Tanggal 7-9 April 2010.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Edisi Pertama. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. 2010. Model-model Pemberdayaan Masyarakat. Acuan Bagi Akademisi dan Praktisi Pemberdayaan Masyarakat. Kerjasama Fakultas Pertanian, Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS. Surakarta.
- Mardikanto, T dan P. Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mercer, J dan D. Clayton. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat. Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.



PENERAPAN SISTEM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI

Shinta Anggreany dan Ardhiyan Saputra

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Shintaanggreany@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk: mengetahui perkembangan peremajaan dan sistem peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode survei dan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Jumlah sampel penelitian ini adalah 83 orang. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Perkembangan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi dimulai pada tahun 2011 dikarenakan terjadi penurunan produksi kelapa sawit petani sehingga petani berinisiatif melakukan peremajaan; 2) Sistem peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani di Provinsi Jambi adalah sistem sisip, tumpang sari dan penumbangan serempak.

Kata kunci: kelapa sawit, penerapan, sistem peremajaan

PENDAHULUAN

Program revitalisasi perkebunan sebagai upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat dilakukan dengan cara peremajaan, perluasan dan rehabilitasi tanaman perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas serta mengembangkan industri hilir sehingga dapat meningkatkan daya saing pada komoditi perkebunan serta mendukung perkembangan wilayah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Produksi dan produktivitas dari tahun ketahun mengalami peningkatan begitu juga dengan tanaman tidak menghasilkan (tua/rusak). Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Kecamatan Sungai Bahar juga telah memasuki masa peremajaan karena daerah ini merupakan tempat penanaman kelapa sawit pertama di Provinsi Jambi dan juga sebagai eks Perkebunan Inti Rakyat (PIR-Trans), sehingga peremajaan kelapa sawit pertama kali dilakukan di daerah ini. Pada tahun 1983/1984 Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) melaksanakan Pola PIR di Sungai Bahar dan terdapat program transmigrasi. Pada saat ini kebun kelapa sawit milik petani memasuki usia tidak produktif yaitu di atas 25 tahun, ditandai dengan penurunan produktivitas menjadi sebesar 12 ton/Ha/tahun dan harus segera dilakukan peremajaan. Berikut ditampilkan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

data perkembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Jambi dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Luas Areal Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Tahun 2013- 2015

	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015*
TBM	109.795	114.729	119.471
TM	293.944	307.154	319.849
TTM	3.080	3.522	3.832
Produksi (Ton)	903.291	1.028.008	1.088.509
Produktivitas (Kg/ha)	3.277	3.347	3.403

Sumber : Data statistik Kementerian Perkebunan Indonesia 2013-2015

Ket : * data estimasi

TBM : Tanaman belum menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

TTM : Tanaman tidak menghasilkan (tua/ tanaman rusak)

Hasil observasi awal diketahui bahwa peremajaan kelapa sawit merupakan suatu inovasi yang baru bagi petani, petani juga takut kehilangan mata pencahariannya apabila tanaman kelapa sawitnya diremajakan. Pada awal tahun 2011 sebelum dilakukannya demplot percontohan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berkerja sama dengan BUMN. Petani mulai berpartisipasi dalam menerima inovasi baru yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Herawati dan Pulungan (2006), partisipasi yang terus tumbuh dan berkembang menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam hal ini adalah bagaimana bentuk peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan peremajaan kelapa sawit merupakan hal penting untuk melihat seberapa besar petani memahami sebuah inovasi yang diberikan dan alasan-alasan pemilihan inovasi tersebut untuk diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui perkembangan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi; 2) Mengetahui sistem peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani di Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengamati sistem peremajaan kelapa sawit dengan sistem tumpang sari, sistem penumbangan serempak dan sistem sisip. Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Mulya dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Bahar,



Kabupaten Muaro Jambi mulai bulan Maret sampai Mei 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan unit analisis yaitu individu. Responden dalam penelitian ini adalah petani, ketua kelompok tani dan informan kunci (perusahaan PTPN VI, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, penyuluh, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat).

Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sevilla *et al.*, 2007). Diperoleh 83 responden sebagai sampel dalam penelitian ini dan merupakan petani yang telah melaksanakan peremajaan kelapa sawit serta merupakan petani eks Transmigran (Tabel 1). Penentuan jumlah sampel pada masing-masing desa ditentukan secara *proportional simple random sampling* yang mengacu pada rumus (Nasir, 1988). Menurut Muljono (2012) teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan korelasional. Analisis dilakukan dengan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi

Berdasarkan data statistik tahun 2012 Kecamatan Sungai Bahar merupakan kecamatan yang memiliki luasan lahan perkebunan sawit terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Muaro Jambi yaitu seluas 30 719 Ha dengan jumlah petani sebanyak 13 311 KK petani. Berdasarkan data tersebut terlihat jelas bahwa potensi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kecamatan Sungai Bahar sangat besar.

Pada tahun 2011 beberapa desa di Kecamatan Sungai Bahar telah melaksanakan peremajaan kelapa sawit. Peremajaan yang dilaksanakan merupakan program pemerintah sebagai kebun percontohan. Pelaksanaan tahap awal peremajaan di tahun 2011 tersebut melibatkan 15 orang petani dengan luas lahan mencapai 30 Ha dan seluruh kegiatan didanai oleh pemerintah dengan bantuan PTPN VI sebagai penyedia bibit dan juga membantu proses pelaksanaan



secara teknis. Tahun 2012 petani di Desa Mekar Sari Makmur juga mendapatkan bantuan pelaksanaan peremajaan seluas 30 Ha yang dimiliki oleh 15 orang petani. Bantuan hibah dana pelaksanaan peremajaan diperoleh dari Bank Indonesia.

Sistem Peremajaan Kelapa Sawit yang Diterapkan Petani

Pemilihan sistem tersebut dilandasi oleh beberapa alasan antara lain ketersediaan modal, penurunan produksi kelapa sawit petani, keinginan petani mempertahankan usahatannya. Sebagian besar petani (Tabel 3) memilih untuk melakukan peremajaan kelapa sawit dengan sistem sisip, dikarenakan petani menganggap sistem sisip mudah dilakukan dan petani tetap bisa mendapatkan hasil dari kebun kelapa sawitnya. Pemilihan peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani sangat menentukan perkembangan kelapa sawit kedepan. Karena pertumbuhan kelapa sawit yang terhambat dapat mempengaruhi produksi kelapa sawit dimasa depan.

Peremajaan kelapa sawit merupakan inovasi baru yang artinya peremajaan berupa gagasan baru atau praktek-praktek baru yang digunakan petani dalam mempertahankan keberlangsungan usahatani kelapa sawitnya. Hasil penelitian Sadono (1999) menemukan bahwa tingkat penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) oleh petani termasuk tinggi ke sedang menunjukkan bahwa tingkat persepsi yang tinggi belum sepenuhnya didukung oleh penerapan di lapangan. Dari hasil penelitian tersebut terlihat jelas bahwa pemahaman petani terhadap suatu inovasi tergolong baik belum tentu petani bisa berpartisipasi menerapkan inovasi tersebut dalam usahatannya. Adapun beberapa sistem peremajaan yang dilakukan di Provinsi Jambi antara lain adalah:

Tabel 2. Sistem peremajaan yang diterapkan oleh petani di Provinsi Jambi

No	Sistem peremajaan	Jumlah Petani (Orang)	Persentase (%)
1	Sistem sisip	67	80,7
2	Demplot (Tumpang sari)	15	18,2
3	Penumbangan serempak	1	1,2
Total		83	100

Sumber: Olahan data penelitian, Tahun 2014



Sistem peremajaan tumpang sari

Terdapat beberapa jenis sistem peremajaan kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Jambi sistem peremajaan yang dianggap paling sesuai untuk diterapkan pada saat melakukan peremajaan adalah sistem peremajaan tumpang sari (*intercropping*). Teknik peremajaan tumpang sari (*intercropping*) berupa kegiatan menanam kembali, kemudian diikuti dengan penanaman tanaman sela (tanaman semusim) di antara barisan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan (TBM). Selama kelapa sawit belum produksi, pendapatan petani dari penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit diganti dengan produksi tanaman sela

Kekurangan peremajaan sistem ini adalah dibutuhkan modal tambahan untuk tanaman sela dengan pengelolaan yang lebih intensif. Modal dalam pengelolaan lahan, tanam dan perawatan dalam peremajaan relatif besar. Kendala yang dialami petani yaitu letak kebun yang jauh dari pemukiman sehingga menyulitkan petani untuk merawat tanaman sela secara intensif. Akses ke pasar yang jauh juga menyulitkan dalam proses penjualan hasil produksi tanaman sela. Tidak tersedia pasar untuk menjual hasil dari tanaman sela berupa, jagung, kedelai serta tanaman lainnya yang dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar.

Peremajaan sistem penumbangan serempak

Sistem peremajaan kelapa sawit secara penumbangan serempak yaitu sistem peremajaan dengan cara menumbang keseuruhan tanaman tua dan merupakan suatu teknik yang biasa diterapkan oleh perkebunan besar. Peremajaan sistem penumbangan serempak telah dilakukan oleh PTPN VI yang dekat dengan daerah penelitian. Sistem ini kurang tepat dilaksanakan pada perkebunan rakyat kecuali petani telah bermitra dengan perkebunan besar sebagai pengelola. Petani akan kehilangan mata pencahariannya.

Herman dan Puranawo (2011) menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari peremajaan kelapa sawit adalah untuk meningkatkan produktifitas tanaman kelapa sawit, upaya tersebut dinilai sangat efektif dilakukan untuk meningkatkan produksi khususnya di negara Indonesia. Menurut sutarta (2012) pada peremajaan penumbangan serempak dilakukan juga kegiatan penanaman



kacangan guna mempercepat laju pemupukan, menekan resiko perkembangan hama serta menjaga kelembaban tanah. Adapun kekurangan dari sistem penumbangan serempak ini adalah hilangnya pendapatan petani yang bisa berlangsung selama 3 tahun sampai kelapa sawit menghasilkan TBS.

Peremajaan sistem sisip

Peremajaan sistem sisip merupakan suatu teknik peremajaan yang dianggap petani dapat mempertahankan pendapatannya. Kekurangan dari sistem ini adalah pemusnahan kelapa sawit tua dengan cara penyuntikan memungkinkan jamur dan hama berkembang dengan baik karena kondisi kelapa sawit tua yang membusuk dan rentan terhadap penyakit *Gonaderma*. Hasil dari penelitian Herman dan Puranawo (2011) menyatakan bahwa pola peremajaan sawit rakyat secara tebang pilih (sisip) menyebabkan tanaman sawit muda mengalami *etiolasi* (perkembangan tanaman yang abnormal ditandai dengan batang memanjang, kandungan klorofil berkurang dan warna daun pucat) sehingga pertumbuhannya kurang maksimal.

Mubyarto (1989) menyatakan bahwa perubahan teknik dan inovasi (teknologi) mempunyai peranan yang penting dalam suatu pembangunan atau menunjukkan unsur perubahan suatu cara dalam produksi serta perbaikan dan peningkatan produktivitas usahatani yang sudah ada. Menurut Sutarta *et al.* (2008) sistem *underplanting* merupakan salah satu sistem yang memungkinkan petani tidak kehilangan pendapatan yaitu menanam tanaman baru di antara tanaman tua dari berbagai sistem peremajaan yang ada.

PENUTUP

Perkembangan peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi dimulai pada tahun 2011 karena tanaman kelapa sawit telah melewati umur ekonomisnya dan berdampak terhadap produksi kelapa sawit petani sehingga petani berinisiatif melakukan peremajaan. Sebagian besar peremajaan dengan menggunakan sistem sisip. Sistem peremajaan kelapa sawit yang diterapkan oleh petani di Provinsi Jambi adalah sistem sisip, tumpang sari dan penumbangan serempak. Peremajaan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilakukan penyuluhan,



pelatihan dan pembinaan dalam proses peremajaan kelapa sawit sehingga petani menguasai dan memahami sistem peremajaan yang sesuai dengan anjuran. Petani perlu melakukan diversifikasi usaha selain berusaha tani kelapa sawit sehingga petani tidak kehilangan pendapatan selama kegiatan peremajaan. Diperlukan juga keikutsertaan pemerintah dalam upaya mendukung peremajaan kelapa sawit sehingga memberikan kemudahan dalam akses modal dan sarana produksi bagi petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2013. *Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan*. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013 – 2015* Kementerian Pertanian Indonesia. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Herawati, Pulungan I. 2006. Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kontaktani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian (Kasus WKUPP Nyalindung, Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor*. 2 (2).
- Herman M, Puranawo D. 2011. *Produktifitas Jagung Sebagai Tanaman Sela pada Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat di Bagan Sapta Permai Riau*. [Laporan Penelitian]. Sukabumi: Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri.
- Muljono P. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bogor (ID): IPB Press.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Nasir M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Sadono D. 1999. Tingkat adopsi inovasi pengendalian hama terpadu oleh petani (kasus di Kabupaten Karawang Jawa Barat) [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Sevilla CG, JA Ochave, TG Punsalan, BP Regala, GG Uriate. 2007. *Research Methods*. Quezon City (PH): Rex Printing Company.
- Sutarta ES, Ginting EN, Rahutomo S, Santoso H, Susanto A. 2008. *Peremajaan Kelapa Sawit Sistem Under Planting, Keunggulan dan Kelemahannya*. Medan (ID): Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).



PERUBAHAN PERILAKU PETANI DALAM PENERAPAN “SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION” DI DESA SITU ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Elih Juhdi Muslihat, Yul Harry Bahar dan Lindon Berry Pangwalahew
Jurusan Penyuluhan Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
elihmuslihat@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari perubahan perilaku petani dalam adopsi inovasi teknologi terutama dalam penerapan teknologi ramah lingkungan, dengan tujuan (1) mendiskripsikan tingkat perilaku petani pada setiap tahapan penerapan teknologi *System of Rice Intensification*; (2) Menganalisis perbandingan perilaku antara petani yang sudah melaksanakan dengan yang belum melaksanakan teknologi *System of Rice Intensification*. Penelitian dilakukan pada tanggal 7 Maret sampai 30 April 2016 yang berlangsung di Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel adalah dengan *purposive sampling*, kriteria sampel adalah ketua dan beberapa anggota kelompok tani. Populasi dalam penelitian ini adalah 122 orang dimana sampel diambil sebanyak 37 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap petani dalam mereapkan teknologi SRI masih belum baik, 2) Petani yang pernah mendapat bantuan kegiatan SRI mendapat nilai tertinggi dari segi keterampilan, tetapi tidak demikian dalam aspek pengetahuan dan sikap, 3) nilai terendah adalah dari aspek aspek perbenihan, pemeliharaan tanaman dan pemupukan.

Kata Kunci : Perilaku dan Penerapan SRI.

PENDAHULUAN

Hasil pemantauan lapangan diberbagai daerah menunjukkan teknologi SRI telah dapat terlaksana, hanya saja teknologi SRI tidak diadopsi secara berkelanjutan. Padahal bila mengacu pada hasil penelitian di beberapa wilayah, teknologi SRI ini cukup menjanjikan untuk peningkatan produksi padi. Fokus permasalahan saat ini adalah mengapa teknologi budidaya oleh petani tidak berubah dengan adanya pengenalan teknologi SRI tersebut, yang terjadi petani cenderung kembali ke teknologi budidaya tradisional. Hal ini yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu “Perubahan Perilaku Petani dalam Penerapkan *System Rice of Intensification*” mencakup Pengetahun, Ketrampilan dan Sikap pelaku utama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk dendiskripsikan tingkat perilaku petani pada setiap tahapan penerapan teknologi *System of Rice Intensification*



(SRI), serta menganalisis perbandingan perilaku antara petani dalam adopsi dan penerapan teknologi SRI di Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tingkat perilaku petani dalam penerapan/adopsi dan perbandingan perilaku antara petani yang sudah melaksanakan teknologi SRI dengan yang belum melaksanakan teknologi SRI.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian telah dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 30 April 2016. Lokasi penelitian bertempat di Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengambilan populasi dan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* dengan kriteria, pengurus kelompok tani, dan anggota kelompok tani serta, petani yang sudah mendapatkan sosialisasi dan menerapkan SRI, kelompok tani yang belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi dan menerapkan SRI.

Tabel 1. Keadaan Kelompok Tani sebagai Objek Penelitian Penerapan SRI

	Nama Kelompok Tani	Thn Berdiri	Jumlah Anggota	Status Penerapan SRI
1	Suka Tani	1988	48 orang	Menerima sosialisasi/pelatihan dan bantuan penerapan teknologi SRI.
2	Mega Tani	2006	39 orang	Telah menerima sosialisasi/pelatihan teknologi SRI.
3	Lestari	1988	35 orang	Tidak menerima sosialisasi dan bantuan penerapan teknologi SRI.

Karena populasi penelitian 122 orang maka untuk menentukan banyaknya sampel yang dijadikan objek penelitian, dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin*. Berdasarkan hasil perhitungan maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 37 orang petani dari populasi sebanyak 122 orang. Agar sampel mewakili dari 3 kelompok tani sehingga penarikan sampel dapat dilihat pada Tabel 2.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 2. Penetapan Jumlah Resonden pada setiap Kelompok Tani

No	Kelompok tani	Jumlah Populasi	Jumlah Resonden
1	Suka Tani	48	14
2	Mega Tani	39	12
4	Lestari	35	11
	Jumlah	122	37

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digali dalam penelitian ini terdiri dari umur, pendidikan, luas kepemilikan lahan, status petani, pengalaman bertani, dan jabatan dalam kelompok tani. Keragaan dan distribusi karakteristik responden secara umum terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keragaan dan Distribusi Karakteristik Responden

No	Variabel	Kategori	Jumlah (Org)	Persentase (%)
1.	Umur (tahun)	0 - 14 (Belum Produktif)	0	0
		15 - 64 (Produktif)	32	86,48
		> 65 (Tidak Produktif)	5	13,51
2.	Tingkat Pendidikan	Perguruan Tinggi	0	0
		SMU atau sederajat	0	0
		SMP	14	37,83
		SD	23	62,16
3.	Luas Lahan Garapan (Ha)	< 0.5 (sempit)	5	13,51
		0.5 - 1 (sedang)	11	29,72
		> 1 (luas)	21	56,75
4.	Pengalaman Bertani (tahun)	< 19 (rendah)	14	37,83
		19-38 (sedang)	23	62,16
		> 38 (tinggi)	0	0

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2016.

Umur Responden

Umur responden dikelompokkan menjadi 3 yaitu umur 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk belum produktif, kelompok penduduk umur 15-64 tahun sebagai kelompok produktif dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk yang tidak lagi produktif. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 86,48 % umur responden termasuk dalam kategori usia



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

produktif (15 – 64 tahun) dan pada usia >65 (usia tidak produktif) dengan persentase 13,51 %.

Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden masih tergolong rendah, yaitu dari 37 responden terdapat 23 orang (62,16%) yang berpendidikan SD/ sederajat, yang berpendidikan atau tamat SLTP/ sederajat sebanyak 14 orang (37,83%), lulusan sedangkan SLTA/ sederajat tidak ada karena rata-rata penduduk dengan tingkat pendidikan demikian kebanyakan bekerja menjadi buruh pabrik dan pedagang.

Luas Lahan Garapan

Secara umum tergolong sempit, yaitu < 0,5 Ha sebanyak 5 orang (13,51%), sedang dengan lahan 0,5 – 1,0 Ha sebanyak 11 orang responden (29,72%), dan kemudian kategori luas yaitu diatas 1 ha ada sebanyak 21 orang (56,75). Lahan yang dikelola oleh petani yaitu lahan sawah dengan status tanah pemilik penggarap, sewa dan/ atau buruh tani. Komoditas utama yang diusahakan oleh petani adalah padi sawah, singkong, ubi jalar dan sayuran.

Pengalaman Bertani Responden

Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Cibungbulang termasuk kategori pengalaman bertani sedang (19–38 tahun) sejumlah 23 responden (62,16%), responden yang termasuk kategori pengalaman bertani rendah (< 19 tahun) sebanyak 14 responden (37,83%). dan tidak ada responden yang termasuk kategori pengalaman bertaninya tinggi (> 38 tahun).

Analisis Penerapan Teknologi SRI

Analisis Deskriptif

Kelompoktani Suka Tani sudah pernah mendapatkan penyuluhan tentang SRI dan pernah mendapatkan bantuan penerapan teknologi SRI. Kelompoktani Mega Tani sudah mendapatkan penyuluhan SRI namun uhan SRI namun belum menerapkan atau mendapatkan bantuan, sedangkan kelompoktani Lestari yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dan menerapkan teknologi SRI. Dalam penelitian ini menelaah dari tiga kelompok tersebut



Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kelompok tani Suka Tani memiliki beberapa parameter terkait dengan prinsip penerapan teknologi SRI yang memperoleh nilai rendah yaitu :

1. Pengetahuan, pada item pemeliharaan dengan perolehan nilai 1,43 (rendah)
2. Keterampilan, pada item pemeliharaan dengan perolehan nilai 1,86 (rendah) dan pada item Pemupukan dengan perolehan nilai 1,43 (rendah).
3. Sikap, pada item pemeliharaan dengan perolehan nilai 1,71 (rendah).

Hal ini berarti bahwa kelompok tani Suka Tani masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan teknologi SRI, khususnya pada pemeliharaan dan pemupukan sesuai prosedur.

Analisis tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kelompok tani Mega Tani dengan kriteria kelompok tani yang sudah mendapatkan penyuluhan namun belum pernah menerapkan atau mendapatkan bantuan teknologi SRI. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui analisis deskriptif kelompok tani ini memiliki beberapa parameter terendah terkait dengan prinsip penerapan SRI.

1. Pengetahuan, pada parameter pembibitan dengan perolehan nilai 1,75 (rendah) dan pada item pemeliharaan 1,58 (rendah).
2. Keterampilan, pada parameter pembibitan dengan perolehan nilai 1,83 (rendah) dan parameter pemupukan 1,58 (rendah) serta pada parameter pemeliharaan 1,75 (rendah)
3. Sikap, pada parameter pembibitan dengan perolehan nilai 1,58 (rendah) dan pemeliharaan adalah 1,75 (rendah).

Artinya bila melihat hasil data penilaian yang diperoleh bahwa kelompok tani Mega Tani masih enggan menggunakan teknologi SRI sesuai prosedur, terutama pada parameter pembibitan dan pemeliharaan.

Analisis tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap kelompok tani Lestari dengan kondisi belum pernah mendapatkan penyuluhan dan menerapkan/mendapatkan bantuan teknologi SRI. Berdasarkan analisis



deskriptif maka parameter terendah terdapat pada kelompok tani Lestari terkait penerapan teknologi SRI sebagai berikut.

1. Pengetahuan, pada parameter pembibitan dengan nilai 1,45 (rendah) dan pemeliharaan 1,82 (rendah).
2. Keterampilan, pada parameter pembibitan dengan nilai 1,65 (rendah) dan pemupukan 1,73 (rendah) serta pemeliharaan 1,73 (rendah).
3. Sikap, parameter pembibitan 1,73 (rendah) dan pemeliharaan 1,82 (rendah).

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa kelompok tani Mega Tani masih belum sesuai dengan prosedur teknologi SRI terutama pada parameter pembibitan dan pemeliharaan.

Analisis Perbandingan Nilai SRI antar Kelompok tani

Analisis perbandingan kelompok tani dengan kriteria Suka Tani adalah kelompok tani yang sudah mendapatkan penyuluhan tentang teknologi SRI dan pernah menerapkan teknologi tersebut dan kelompok tani Mega Tani pernah mendapatkan penyuluhan tentang teknologi SRI tetapi belum pernah menerapkan teknologi tersebut sedangkan kelompok tani Lestari adalah kelompok yang belum mendapatkan penyuluhan serta menerapkan SRI.

Tabel 7. Analisis Perbandingan Nilai Penerapan Teknologi SRI

Indikator/Poktan	Suka Tani	Mega Tani	Lestari
Pengetahuan	1,64	1,79	1,55
Keterampilan	2,54	1,92	1,68
Sikap	1,82	2,29	2,77

Sumber : Data Primer diolah, tahun 2016

Berdasarkan analisis *Kendall's W* ternyata tidak satupun kelompok tani yang memperoleh nilai tinggi, nilai keterampilan sedang hanya didapatkan pada kelompok tani Suka Tani serta nilai sikap sedang hanya didapatkan pada kelompok tani Mega Tani dan Lestari. Dengan demikian terlihat bahwa secara keseluruhan teknologi SRI belum dapat dilaksanakan secara baik.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi karena, berdasarkan tingkat pendidikan, umur, dan status petani. Kelompok tani Mega Tani memperoleh nilai tertinggi dikarenakan selain mengenyam pendidikan rata-rata SMP juga masih



dalam usia produktif sehingga mampu menyerap materi tentang teknologi SRI dengan baik meskipun masih dalam katagori rendah.

Kelompoktani Suka Tani adalah kelompok yang memiliki indikator tertinggi pada keterampilan, karena kelompoktani ini pernah mendapat bantuan penerapan teknologi SRI. Indikator pengetahuan dan sikap rendah, karena dipengaruhi tingkat pendidikan yang minim yaitu SD, kemudian umur rata-rata memasuki 62 tahun yang mendekati usia tidak produktif >64 tahun, dan status petani kebanyakan sebagai petani sewa lahan, dan buruh tani sehingga pengambilan keputusan (sikap) dipengaruhi pemilik lahan.

Kelompok tani Lestari adalah kelompoktani yang memiliki indikator tertinggi pada sikap, meskipun belum pernah menerima sosialisasi dan menerapkan SRI. Hal tersebut dipengaruhi oleh selain umur yang masih produktif, kelompoktani Lestari juga banyak yang berstatus sebagai petani pemilik lahan dan penggarap lahan sehingga pada proses pengambilan keputusan (sikap) tidak dipengaruhi oleh pemilik lahan.

PENUTUP

Anggota kelompok tani Suka Tani memiliki parameter penerapan teknologi SRI terendah pada aspek pemeliharaan dan pemupukan tanaman. Kemudian kelompok tani Mega Tani dan Kelompoktani Lestari memiliki parameter terendah pada penerapan teknologi SRI dari aspek pembibitan, pemeliharaan dan pemupukan tanaman. Dari analisis deskriptif, maka materi penyuluhan dan pembinaan berikutnya adalah aspek seleksi benih, pemeliharaan tanaman, pembuatan pestisida nabati dan pembuatan pupuk organik cair.

Pada perbandingan perilaku antar kelompok tani, Suka Tani memiliki keterampilan yang lebih tinggi dari dua kelompok lainnya karena pernah mendapatkan bantuan untuk menerapkan SRI, berbeda dengan Mega Tani dan Lestari yang belum pernah menerapkan memiliki nilai terendah pada keterampilan namun memiliki keunggulan pada sikap dengan katagori sedang, dapat disimpulkan bahwa kelompoktani Mega Tani dan Lestari mau menerima



dan menerapkan teknologi SRI hanya saja berkendala pada pengetahuan dan keterampilan. Kesimpulan dalam penelitian ini baru dari satu desa, perlu dilakukan perluasan penelitian lanjutan di lokasi lainnya, sehingga dapat memberikan pandangan dan kesimpulan secara lebih representatif.

Ke depan, pembinaan penerapan teknologi SRI harus dilakukan lebih intensif dan masif, baik dalam bentuk kegiatan penyuluhan, sosialisasi, maupun bantuan pelaksanaan kegiatan SRI. Penyuluh pertanian harus bisa memfasilitasi, dan memotivasi para petani agar mau mengadopsi teknologi SRI, selain itu perlu kesabaran dalam mendampingi dan membimbing petani sehingga, mau melakukan dan menerapkan teknologi SRI secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Departemen Pertanian.
- Arikunto S., 1991. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Effendi Lukman, 2014. Metode Pengpenelitian Penyuluhan. STPP Bogor.
- Kementan, 2015. Pedoman Teknis Pengembangan SRI APBN-P TA. Jakarta.
- Kementan, 2015. Panduan Teknologi Budidaya SRI. Jakarta.
- Kementan, 2013. Gagasan dan implementasi *System of Rice Intensification* (SRI) dalam Kegiatan Budidaya Padi Ekologis (BPE). Jakarta.
- Kusnadi Dedy, 2011. Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian STPP. Bogor.
- Nurshafaat, 2015. Penerapan SRI di Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. STPP. Bogor.
- Samsudin, 1982. Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian. Angkasa Offset. Bandung.
- Thomas Soedarsono dkk, 2005. Program dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.



STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT PARTISIPATIF DENGAN PEMASARAN SOSIAL (Studi Kasus Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kelurahan Suryatmajan Kota Yogyakarta)

Nurasih Shamadiyah¹ dan Rahima Kaliky²

¹ Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

² Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta
diah.nessa@gmail.com

ABSTRAK

Pemasaran sosial dapat menjadi alternatif memberdayakan masyarakat dalam memperoleh dukungan termasuk sumber dana yang potensial dari dan untuk masyarakat maupun dari luar. Pemasaran internal menerapkan prinsip yang sama dengan pemasaran bisnis, yang membedakan ialah pemasaran sosial “menjual” gagasan kepada masyarakat agar mau “membeli” gagasan yang akan mempengaruhi perubahan perilaku. Kepadatan penduduk di Kelurahan Suryatmajan menempati terpadat kedua di Kota Yogyakarta. Hal tersebut menimbulkan masalah yang kompleks baik masalah pemukiman, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu PNPM Mandiri Perkotaan mengadakan program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Tujuan dari penelitian ini ialah membantu masyarakat dan pemerintah agar gagasan yang telah disepakati dalam rangka penataan lingkungan dapat diterima oleh masyarakat. Penelitian dilakukan di Kelurahan Suryatmajan Kota Yogyakarta dengan mengambil sampel sebanyak 50 orang dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran internal dilakukan melalui sosialisasi dalam forum-forum formal maupun informal yang ada di masyarakat. Kegiatan pemasaran eksternal dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta maupun pemerintah yang mendukung penataan lingkungan.

Kata kunci: pembangunan masyarakat, pemasaran sosial

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas



lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian), pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Program PLPBK merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sehat (Pedoman Teknis PLPBK, 2014).

Pemasaran sosial adalah kegiatan merancang dan mengkomunikasikan nilai kepada individu, organisasi, dan komunitas, agar mengubah atau mempertahankan sebuah perilaku sekelompok orang, demi keuntungan masyarakat secara luas. Kegiatan yang dimaksud terdiri dari perancangan, penerapan, dan pengendalian. Menurut Andersen, definisi pemasaran sosial adalah penerapan teknik pemasaran komersial mulai dari analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mempengaruhi perilaku yang disadari oleh target audiens agar status kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kepadatan penduduk perkotaan tidak terlepas dari masalah penataan lingkungan. Kepadatan penduduk di Kelurahan Suryatmajan menempati terpadat kedua di Kota Yogyakarta setelah Keparak. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah yang kompleks baik masalah pemukiman, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Untuk mengurangi permasalahan tersebut maka diadakan program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas. Karena berbasis komunitas maka diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pelaku. Tidak dapat disangkal lagi bahwa walaupun strategi pembangunan di Indonesia yang bersifat sentralistik dan birokratis, Strategi ini telah berhasil menaikkan taraf hidup masyarakat. Apabila ingin membuat hasil pembangunan lebih merata, maka strategi pembangunan yang partisipatif perlu dikembangkan (Soetrisno, 1995). Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Di dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif



memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan masyarakatnya sendiri (Hikmat, 2001).

Dasar penataan lingkungan pemukiman dalam program PLPBK ini adalah berbasis komunitas, sehingga diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Partisipasi masyarakat juga bukan hanya datang pada saat rapat perencanaan dan ikut dalam pembangunan sarana, tetapi juga dalam pemasaran sosial (Shamadiyah, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya (Irawan, 2000). Penelitian dilakukan di Kelurahan Suryatmajan, yang merupakan salah satu dari empat kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta yang menerima program PLPBK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan "metode kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan



dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 1989). Pada teknik partisipasi terbatas peneliti tidak menyembunyikan identitas sesungguhnya dan berusaha untuk mengembangkan hubungan yang baik antara peneliti dengan responden. Peneliti melalui teknik ini, baik melakukan observasi formil melalui suatu proses wawancara yang didasarkan atas daftar-daftar pertanyaan yang telah disiapkan (*schedules*), maupun berpartisipasi dalam beberapa kegiatan informan (Vredenburg, 1984).

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *simple random sampling* (metode acak sederhana) dengan penarikan sample sebanyak 10% dari jumlah populasi setiap kepala keluarga (KK), yaitu sebanyak 151 orang. Wawancara dengan informan dilakukan beberapa kali di rumah masing-masing informan. Wawancara demikian dilakukan dalam latar alamiah, dalam suasana biasa, wajar seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 1989). Ini dilakukan untuk mengakrabkan hubungan antara peneliti dan informan agar tidak terkesan kaku dan berjarak, sehingga informan lebih terbuka kepada peneliti dalam menjawab pertanyaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Suryatmaja berada di daerah administratif Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 0, 28 Km² dengan kepadatan penduduk tertinggi kedua setelah Kelurahan Keparakan di Kota Yogyakarta Kelurahan Suryatmaja berada di 114 Km ketinggian tanah dari permukaan laut. Kelurahan Suryatmaja terdiri atas 6 kampung dengan 14 RW dan 45 RT.

Proses perencanaan strategi pemasaran sosial strategi pemasaran sosial PLPBK Kelurahan Suryatmaja, terdiri dari beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap penyepakatan visi dan misi PLPBK Kelurahan Suryatmaja.
2. Tahap menganalisis hasil pemetaan swadaya (PS) yang bertujuan untuk menggali permasalahan dan potensi, sehingga dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di kawasan prioritas.



3. Tahap penyusunan dan penyepakatan strategi pemasaran sosial dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD), untuk menemukan formulasi sasaran, strategi, dan program-program pemasaran sosial yang akan dilakukan.
4. Tahap implementasi dilakukan setelah dokumen strategi pemasaran sosial telah disusun dan disepakati bersama oleh tim pemasaran PLPBK Kelurahan Suryatmajan. Dalam tahap implementasi kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan edukasi, advokasi, dan kemitraan selama 5 tahun ke depan.
5. Tahap umpan balik dan pengendalian, dalam tahap ini diharapkan kegiatan edukasi sudah berjalan dengan baik, yang ditandai dengan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada kegiatan advokasi, dapat ditandai dengan adanya peraturan daerah dan kesepakatan masyarakat mengenai program-program penataan lingkungan berbasis komunitas yang telah disusun oleh tim pemasaran PLPBK Kelurahan Suryatmajan. Sedangkan pada kegiatan kemitraan, dapat ditandai dengan adanya kesepakatan (MoU) dengan mitra-mitra yang dituju dalam pengembangan program-program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas yang telah disusun oleh tim pemasaran PLPBK Kelurahan Suryatmajan

Kegiatan pemasaran internal PLPBK Kelurahan Suryatmajan meliputi:

1. Penguatan tim inti perencanaan dan pemasaran (TIPP) dengan pelatihan pemasaran. Pelatihan pemasaran berisi materi tentang pemahaman substansi pemasaran sosial (strategi pemasaran, penyiapan tools & penyelenggaraa n event-event pemasaran/promosi, sosialisasi & komunikasi, lobi dan negoisasi, pemahaman proses dan isi perencanaan RPLP & RTPLP, termasuk pengenalan *branding* gagasan perencanaan strategis, pemahaman skema kemitraan dan legalitas (perjanjian kerjasama dan kemitraan yang setara).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kelompok kerja untuk menganalisis dokumen perencanaan (hasil pemetaan swadaya) dan menyusun strategi pemasaran.
3. Pembentukan tim pemasaran sosial PLPBK Kelurahan Suryatmajan.
4. Membentuk struktur organisasi tim pemasaran sosial yang dapat bersinergi sehingga tujuan dan kegiatan pemasaran dapat terealisasi dan tersistem dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para calon investor.
5. Melakukan pertemuan rutin bersama tim pemasaran untuk membahas progres dan evaluasi pemasaran setiap minggu untuk mengetahui proses pemasaran sosial baik internal maupun eksternal serta mengevaluasi proses pemasaran yang sudah dilakukan.
6. Melakukan branding kawasan dengan logo PLPBK Kelurahan Suryatmajan. Melalui branding yang kuat, maka Kelurahan Suryatmajan lebih mudah untuk memasarkan dan menarik investor untuk mengembangkan Kelurahan Suryatmajan terutama kawasan prioritas.
7. Penunjukan *brand ambassador* PLPBK Kelurahan Suryatmajan. *Brand ambassador* PLPBK Kelurahan Suryatmajan diperlukan untuk semakin memperkuat citra kawasan.
8. Sosialisasi dan komunikasi gagasan-gagasan yang akan dilakukan dalam perencanaan. Dilakukan melalui forum-forum formal maupun informal yang ada di masyarakat agar seluruh gagasan-gagasan perencanaan dapat berjalan sesuai rencana pembangunan dan penataan kawasan lingkungan pemukiman.
9. Penyuluhan dan sosialisasi untuk perubahan perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejalan dengan perencanaan yang telah disepakati.
10. Pengembangan media masyarakat. Media masyarakat berupa papan-papan informasi, brosur, leaflet, spanduk, baliho, film, maupun media sosial yang berisi tentang informasi perencanaan partisipatif dan pemasaran sosial.



11. Pemulihan modal sosial masyarakat. Menumbuhkan kepercayaan antara anggota masyarakat, dan masyarakat terhadap BKM selaku pengelola PLPBK Kelurahan Suryatmajan.
12. Pengembangan kapasitas masyarakat, yaitu pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha masyarakat agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun pelatihan lainnya.

Kegiatan pemasaran eksternal PLPBK Kelurahan Suryatmajan meliputi:

- a. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama kelompok kerja untuk mengidentifikasi mitra potensial yang diberikan proposal kemitraan kemudian presentasi gagasan perencanaan di depan mitra potensial.
- b. Pengakuan Rencana Tindak Lanjut Penataan Lingkungan Permukiman untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pengajuan anggaran dan promosi metodologi partisipasi.
- c. Mengadakan kegiatan promosi kawasan serta perencanaan serta kampanye melalui media, baik media cetak, televisi, maupun internet.
- d. Melakukan kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam MoU atau bentuk perjanjian lainnya.

PENUTUP

Strategi pembangunan masyarakat dengan pemasaran sosial diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjalankan program perencanaan dan pemasaran sosial dengan baik dan berkelanjutan melalui proses belajar. Inti dari pemberdayaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan adalah terwujudnya proses belajar yang mandiri dan terus menerus dilakukan. Dalam setiap upaya pemberdayaan harus terkandung upaya pembelajaran (edukasi). Kegiatan advokasi dan kemitraan dijadikan sebagai kegiatan pendukung pemberdayaan masyarakat, karena bukan bangunan fisik yang menentukan keberhasilan PLPBK Kelurahan Suryatmajan, melainkan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi lebih baik dalam penataan kawasan lingkungan pemukiman, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pemasaran perlu ditingkatkan dengan



memberikan pemahaman pada tahap perencanaan bahwa program PLPBK merupakan program penataan lingkungan yang berbasis komunitas sehingga semua tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pemasaran sosial diikuti masyarakat agar menumbuhkan rasa memiliki terhadap gagasan yang telah direncanakan. Rasa memiliki ini penting untuk ditumbuhkan untuk keberlanjutan program penataan lingkungan pemukiman selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2014. *Pedoman Teknis Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J.W. 2003. *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Hikmat, H. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- (ed). 2004. *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Cipruiy.
- Irawan, P. 2000. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Isbandi, R. Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Johnson, D.W, Frank P. Johnson. 2000. *Joining Together Group Theory and Group Skills*. Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Allyn and Bacon.
- Koentjaraningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kotler, P. 1989. *Social Marketing Strategies for Changing Public Behaviour*. New York: The Free Press, A Division of Macmillan, Inc.
- Moleong, L. J. 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. New Jersey: Prentice Hall.
- Notoatmojo, S. 2003a. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003b. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shamadiyah, N. 2010. *Pengaruh Sosial Budaya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Margoyoso Kabupaten Magelang*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Vredenburg, J. 1984. *Metode dan teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.



MODEL PENGEMBANGAN KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI DI UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER

Devi Arieni, dan Tanti Kustiari

Pascasarjana Agribisnis Politeknik Negeri Jember

tanti_ipb@yahoo.com

ABSTRAK

Kinerja lembaga pelayanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila didukung sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pengetahuan dan ketrampilan kerja pegawai dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dapat berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) Lembaga Tembakau Jember. Penelitian bertujuan menganalisis faktor internal, dukungan kepemimpinan dan institusi serta merancang model pengembangan kemampuan pegawai dalam pelayanan sertifikasi mutu. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2015. Responden adalah seluruh pegawai UPT PSMB - LT Jember sebanyak 31 orang dengan teknik sensus sampling atau complete anumeration. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakteristik individu, dukungan kepemimpinan dan dukungan institusi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pegawai PSMB. Karakteristik individu menjadi variabel penyumbang pengaruh terbesar terhadap kemampuan kerja pegawai, kemudian diikuti oleh dukungan kepemimpinan dan dukungan intitusi. Model pengembangan kemampuan pegawai dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga variabel tersebut melalui perbaikan karakteristik pribadi pegawai dan meningkatkan dukungan penuh dari pimpinan dan institusi berupa penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, perbaikan sistem evaluasi dan membangun komunikasi yang efektif dan konvergen.

Kata kunci : Kemampuan, Karakteristik Individu, Kepemimpinan, Model

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terkemuka di dunia. Tembakau dipandang membahayakan kesehatan manusia. Kini, tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku rokok saja akan tetapi dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk. Tembakau telah dikembangkan kemanfaatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan di bidang industri farmasi, kecantikan, pertanian dan sebagainya.

Tembakau dikembangkan diversifikasinya menjadi produk-produk yang tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Bahan dasar kimia daun



tembakau digunakan secara positif untuk pembuatan pestisida, parfum, beobetahin, kosmetik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang maka keberadaan tembakau perlu dipertahankan dan dilestarikan. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif pada Produk Tembakau. Pemerintah melalui Lembaga Tembakau berupaya memperkuat, mendukung dan melestarikan tanaman tembakau.

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang – Lembaga Tembakau Jember (UPT PSMB – LT Jember) merupakan unit atau badan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Jenis layanannya berupa inspeksi tembakau; inspeksi proses fumigasi dan inspeksi kontainer. Salah satu contoh kegiatannya adalah pengawasan komoditi export yaitu memberikan layanan pengujian, pengawasan tembakau serta mengeluarkan sertifikat mutu tembakau layak eksport. Bentuk operasi layanan yang diberikan pada para exportir harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional.

Dalam melakukan pelayanan, petugas seringkali mengalami kesulitan dalam menampilkan mutu layanan sesuai Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional. Beberapa keterbatasan seperti rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis dan non teknis seperti rendahnya penguasaan ilmu tembakau, rendahnya pemahaman standar yang digunakan dalam praktek lapang serta lambannya penerbitan sertifikat hasil sertifikasi mutu. Faktor kendala lainnya berasal dari ketidak-kondusifan dukungan institusi dan kepemimpinan. Terbatasnya fasilitas layanan dapat mengakibatkan gangguan dalam layanan publik.

Rendahnya kemampuan kerja pegawai perlu dikaji dan dianalisis faktor-faktor penyebabnya untuk dapat disusun model Pengembangan Kemampuan Kerja Pegawai di UPT PSMB – LT Jember dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Tembakau dalam meningkatkan daya saing produsen tembakau Indonesia memasuki pasar global. Dengan demikian kemampuan kerja pegawai UPT PSMB – LT Jember perlu dikembangkan kinerja layanan masyarakat dalam



memberikan sertifikasi mutu serta kemampuan mendorong produsen untuk menghasilkan komoditi tembakau yang kompetitif di pasar tingkat internasional.

Penelitian bertujuan untuk : (1) menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik individu, kepemimpinan dan dukungan institusi terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan pelayanan di UPT. PSMB – Lembaga Tembakau Jember. (2) menyusun model pengembangan kemampuan pegawai dalam pelayanan sertifikasi mutu tembakau di UPT. PSMB – Lembaga Tembakau Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di UPT PSMB – LT Jember pada bulan Juni – Agustus 2015. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu UPT PSMB – LT Jember yang merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang menangani tembakau yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Jember. Metode pengambilan sampel adalah sensus (*complete anumeration*). Seluruh pegawai UPT PSMB LT Jember merupakan responden sebanyak 31 orang. Menurut Nazir (2005) *complete anumeration* adalah penentuan responden berdasarkan teknik sensus kepada seluruh anggota populasi, atau dapat dikatakan penelitian ini tidak menggunakan sampel. Pengambilan data melalui kegiatan wawancara dan observasi mendalam. Penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*), karena penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Analisis Statistik Deskriptif. Menurut Rudhaliawan, et al (2013) analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial dari lokasi penelitian, objek penelitian serta distribusi item dari masing-masing variabel. (2) Analisis Jalur (*Path*) yaitu alat analisis statistik untuk menguji eksistensi variabel antara terhadap hubungan antara variabel X dan Y (Bungin, 2009).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik individu meliputi aspek: (1) sikap, (2) minat kerja, (3) motivasi dan (4) kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai memiliki sikap positif untuk melaksanakan tugas layanan di luar kota seperti Bojonegoro dan bersedia bekerja di hari libur untuk memenuhi permintaan layanan inspeksi fumigasi dan inspeksi sarana angkut/container. Minat bekerja di UPT PSMB LT Jember sangat tinggi. Pegawai akan tetap bertahan bekerja di UPT PSMB LT meskipun harus melalui menjadi enaga honorer terlebih dahulu dalam jangka waktu yang lama. Pegawai memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, beradaptasi dengan perubahan. Motivasi rendah dalam mengikuti perubahan organisasi. Sebagian besar pegawai memiliki tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di UPT PSMB - LT Jember. Sebagian kecil pegawai tidak taat aturan seperti keengganan menggunakan seragam lapang, alat pelindung diri saat melakukan pelayanan di lapang.

Dukungan kepemimpinan meliputi kompetensi pimpinan dan gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi dan mengarahkan pegawai bekerja sesuai SOP. Pimpinan UPT PSMB - LT Jember mampu mewujudkan kredibilitas, artinya mampu untuk membuat pegawai mempercayainya, namun, pemimpin masih perlu ditingkatkan kemampuan dalam menumbuhkan kerjasama tim dan intensitas komunikasi dengan pegawai. Umumnya interaksi dan komunikasi pimpinan dengan seluruh karyawan dilakukan secara formal pada saat acara apel pagi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya pengasuh yaitu memberikan perhatian secara personal dan memberikan bimbingan secara langsung pada pegawai pada saat tersedia waktu luang.

Dukungan institusi merupakan ketersediaan fasilitas, kesempatan yang dapat menunjang kelancaran kerja pegawai seperti pelatihan kerja, peralatan dan teknologi, kompensasi di luar gaji dan pemberian kesempatan cuti. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelatihan hanya diselenggarakan tahun 2014 dengan materi fumigasi dan pengujian mutu tembakau. Pelatihan yang diselenggarakan lebih didominasi pada penyampaian teori. (2) Peralatan dan Teknologi belum tersedia secara memadai. Pada saat ini hanya memiliki 3 (tiga) buah alat ukur



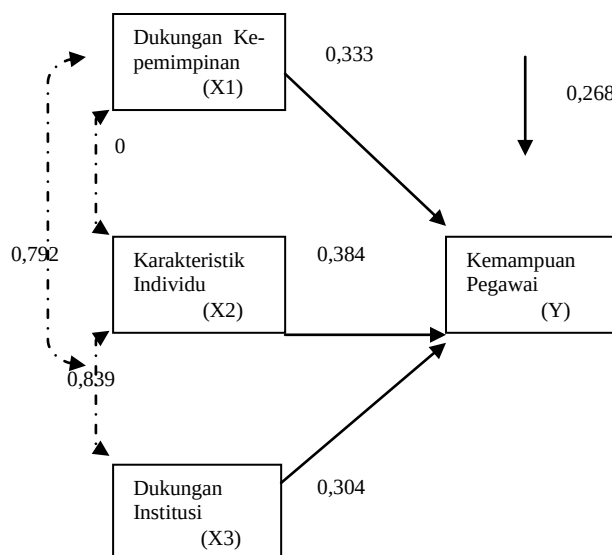
kadar gas Phospine (PH₃), padahal dalam sehari jumlah permohonan layanan untuk pengukuran kadar phospine bisa melebihi 5 (lima) pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan tidak bisa mendapatkan pelayanan tepat waktu. Selain itu, masih ada sekitar 10% pegawai belum memiliki peralatan seperti komputer dan printer di mejanya, padahal sebagai petugas dituntut untuk melakukan pencetakan sertifikat hasil inspeksi sendiri serta penyediaan peralatan yang digunakan untuk pelayanan inspeksi dilapang. Jika tidak difasilitasi, hal ini akan menghambat pegawai melakukan pekerjaan dengan baik. (3) Kompensasi di Luar Gaji yang diberikan pada pegawai belum sesuai dengan harapan beberapa pegawai. Bagi PNS telah ada ketentuan yang mengatur pemberian kompensasi, akan tetapi tidak dapat berlaku bagi pegawai honor atau tenaga kontrak. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, karena kompensasi dapat meningkatkan atau merangsang pegawai untuk bekerja lebih baik, seperti yang diungkapkan Tohardi (2002), yang menyatakan bahwa kompensasi dapat meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan atau loyalitas para pegawai terhadap institusi; menurunkan jumlah absensi para pegawai.

Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya yang meliputi : kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Kemampuan kerja pegawai menunjukkan (1) belum maksimalnya kemampuan Teknis menggunakan peralatan kerja seperti alat ukur kadar Phospine (PH₃) dan alat pendeteksi kebocoran (micropack), alat ukur daun tembakau dan alat ukur daya bakar daun tembakau, hingga mengoperasikan komputer dan printer untuk penerbitan sertifikat hasil pelayanan. (2) Kemampuan Non Teknis pegawai masih kurang optimal dalam hal pengetahuan tentang pentingnya fumigasi dan hama yang dikendalikan dalam fumigasi. Petugas inspeksi sarana angkut harus memahami ketentuan sarana angkut/kontainer dan pengetahuan tentang kondisi sarana angkut/kontainer yang baik, pemahaman teknik pengujian mutu tembakau, standar mutu tembakau sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk menentukan mutu tembakau yang diuji. Banyak pegawai belum menguasai dan memahami pekerjaan yang harus dilakukan sebagai pelaku pelayanan inspeksi. Pegawai hanya sebatas melaksanakan perintah dari atasan



tanpa mengetahui secara rinci sehingga pekerjaan tidak dapat dikerjakan dengan tepat. Kurangnya inisiatif pegawai dapat dinilai menjadi penyebab kurangnya kemampuan yang dimiliki, karena institusi telah menyediakan sarana seperti komputer, internet dan instruksi kerja yang memadai. Akan tetapi, belum termanfaatkan secara baik oleh pegawai. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan juga menyebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki pegawai, tanpa pengawasan dan evaluasi yang baik dapat menyebabkan pegawai tidak memahami bahwa kemampuan yang mereka miliki masih kurang.

Hasil analisis jalur secara keseluruhan dapat digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber: Data Primer Diolah, (2015)

Gambar 1. Model Analisis Jalur

Karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pegawai. Semakin baik karakteristik pribadi yang dimiliki oleh pegawai maka kemampuannya akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdullah (2006) yang menyatakan faktor karakteristik berpengaruh terhadap kemampuan karyawan. Rendahnya dorongan pengembangan diri, tingkat minat menekuni bidang pertembakauan berdampak pada kemampuan kerja pegawai dalam melakukan tugas inspeksi tembakau, inspeksi fumigasi dan inspeksi container. Selain itu, sikap pegawai yang positif



untuk bekerja extra tenaga dan waktu akan meningkatkan kemampuan pegawai melaksanakan tugas pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu tembakau. Ketidaktaatan pegawai terhadap peraturan penggunaan alat pelindung diri saat inspeksi, seragam merupakan wujud ketidakmampuan melaksanakan tugas pelayanan uji mutu tembakau tidak sesuai standar operasional dan prosedural yang berlaku.

Dukungan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pegawai. Semakin tinggi dukungan kepemimpinan yang diberikan maka dapat meningkatkan kemampuan pegawainya. Penelitian Hutagaol (2010) yang menyatakan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan. Komunikasi pemimpin yang searah dan kurang memberdayakan pegawai baik secara personal maupun secara team work dapat mengakibatkan pegawai kurang mampu melaksanakan tugas pelayanan uji mutu dan sertifikasi mutu tembakau. Rendahnya pimpinan melakukan kontrol dan evaluasi maka pegawai cenderung bekerja didominasi dengan cara berfikir, pemahaman pribadi dibandingkan ketentuan standar kerja yang berlaku.

Dukungan institusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pegawai. Hal ini sejalan dengan penelitian Wikendari (2010) yang menjelaskan bahwa dukungan organisasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Penelitian ini membuktikan bahwa apabila pegawai mendapat dukungan dari institusinya, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Jumlah peralatan pengujian mutu tembakau yang terbatas seringkali tidak mampu untuk menangani banyaknya jumlah permohonan layanan masyarakat. Hal ini berdampak pada waktu pengurusan lebih lama dan keterlambatan penerbitan surat sertifikasi mutu tembakau.

PENUTUP

Kemampuan pegawai dalam memberikan layanan prima pada seluruh pengguna jasa UPT PSMB – LT Jember dapat ditingkatkan melalui penguatan faktor internal dan faktor eksternal secara terintegrasi. Kemampuan kerja pegawai dapat ditingkatkan dengan pemberian motivasi pengembangan diri dan



beradaptasi dengan perubahan global, bekerja sesuai standar nasional dan standar internasional yang didukung kemampuan kepemimpinan dalam berkomunikasi, penumbuhan kerja sama tim, serta dukungan ketersediaan fasilitas, peralatan dan teknologi uji tembakau yang memadai, serta fasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan inspeksi tembakau, inspeksi proses fumigasi, inspeksi kontainer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. Jahi, A. 2006. *Hubungan Sejumlah Karakteristik Petani Dengan Pengetahuan Mereka tentang Pengelolaan Usahatani di Kota Kendari Sulawesi Tenggara*. Jurnal Penyuluhan. Volume 2 No. 4. ISSN 1858-2664.
- Bungin, B. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana. Jakarta.
- Hutagaol, AJ. 2010. *Pengaruh Kepemimpinan Wanita Terhadap Kompetensi Guru Pada SMA Negeri 1 Medan*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Mohan, Reenu. 2013. *Using Competency Models For Performance Management*. International Monthly Refereed Journal Of Research in Management & Technology. Volume III. ISSN-2320-0073.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Rudhaliawan, Mahmuditya V. Utami, Hamidah N. Hakam, Moehammad S. 2013. *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kemampuan Kerja dan Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT. Telkom Indonesia, Tbk kandatel malang)*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Tohardi, A. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Tanjung Pura. Mandar Maju. Bandung
- Wikendari, U. 2010. *Pengaruh Dukungan Organisasi Dan Penilaian Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Universitas Al Washliyah Labuhanbatu*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan



KEEFEKTIFAN METODE DEMPLOT PADA SOSIALISASI TEKNOLOGI BUDIDAYA KENTANG RAMAH LINGKUNGAN DI DESA TLAHAB KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

Sherly Sisca Piay dan Nur Fitriana

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

sisca_piay@yahoo.com

ABSTRAK

Sosialisasi Teknologi Budidaya Kentang Ramah Lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung ditempuh dengan berbagai metode diantaranya demonstrasi plot (demplot). Keberhasilan sosialisasi teknologi dengan demplot perlu diketahui dengan melakukan kajian tingkat keefektifan metode demplot. Kajian keefektifan metode demplot teknologi budidaya kentang ramah lingkungan dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap petani pengguna teknologi (responden). Kajian dilakukan pada 2014 dengan metode survey, data yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden, tingkat pemahaman/pengetahuan, sikap (respon) petani terhadap teknologi budidaya kentang ramah lingkungan. Responden ditentukan secara purposive ($n = 20$). Analisis data secara deskriptif. Keefektifan metode terhadap pengetahuan dan sikap peserta diklasifikasikan 3 kategori (efektif, kurang efektif dan tidak efektif). Signifikansi peningkatan pengetahuan, sikap dan respon responden sebelum dan sesudah melakukan demplot diketahui melalui uji t (t-test) dengan nilai koreksi 5%. Hasil kajian menunjukkan sosialisasi teknologi budidaya kentang ramah lingkungan dengan menggunakan metode demplot dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap bagi peserta. Hasil uji T test tingkat pengetahuan dan sikap responden sebelum melaksanakan demplot ada perbedaan yang signifikan dengan setelah responden melaksanakan demplot. Hal ini menunjukkan bahwa metode demplot efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap bagi pesertanya.

Kata kunci: sosialisasi teknologi, keefektifan, demplot

PENDAHULUAN

Petani tembakau di wilayah Kabupaten Temanggung akhir-akhir ini sering mengalami kerugian akibat gagal panen atau harga jual tembakau rendah. Padahal budidaya tembakau memerlukan waktu relatif lama, sehingga dalam satu tahun praktis para petani hanya bergantung pada hasil dari satu kali panen tembakau. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Temanggung mengeluarkan anjuran agar para petani tidak bergantung pada tembakau, tetapi mencari alternatif komoditas lain agar dapat panen 2-3 kali/tahun.



Pada saat ini ada beberapa petani di dataran tinggi Kabupaten Temanggung mulai beralih mengusahakan komoditas kentang sebagai alternatif pengganti tembakau. Namun dari pantauan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung diperoleh informasi bahwa teknik budidaya kentang yang dilakukan petani masih jauh dari prinsip-prinsip ramah lingkungan, diantaranya penggunaan pestisida kimia masih berlebihan dan tidak mengacu prinsip PHT (pengelolaan hama/penyakit terpadu), penggunaan benih tidak berkualitas, teknik budidayanya tidak memperhatikan garis kontur lahan sehingga tidak mendukung upaya konservasi tanah. Selain itu sebagian besar petani menggunakan pupuk kandang yang belum matang. Kondisi-kondisi tersebut menuntut adanya inovasi tepat guna untuk mendukung pengembangan usahatani kentang ramah lingkungan.

Salah satu kendala utama budidaya kentang adalah gangguan penyakit busuk daun yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora infestans*. Untuk mengendalikan hama penyakit kentang, petani menggunakan pestisida berlebihan. Oka, IN. (1995) *cit* Bondansari, *et all*, (2011) mengatakan bahwa penggunaan pestisida yang berlebihan akan menyebabkan timbulnya resistensi organisme pengganggu tanaman (OPT), resurgensi hama sasaran, ledakan hama sekunder, matinya organisme berguna dan musuh alami, residu pada hasil panen, pencemaran lingkungan dan keracunan pada manusia. Penggunaan pestisida yang berlebihan harus dikurangi sehingga budidaya kentang menjadi lebih ramah lingkungan. Budidaya kentang ramah lingkungan melalui aplikasi benih sehat, penggunaan aplikasi fungisida secara bergantian antara yang bersifat sistemik dan protektan, penggunaan pupuk organik matang, penyiraman langsung ke tanah, mampu menurunkan frekuensi penyemprotan dari 21-25 kali per periode tanam menjadi 10-15 kali semprot per periode tanam (Paryono, *et. all.*, 2012).

Dalam penelitian Bahrudin, *et all.* (2010) menggunakan paket teknologi ramah lingkungan berupa pemakaian bibit bebas penyakit, pupuk organik dan biopestisida. Pemupukan awal dengan menggunakan pupuk kandang dan kompos. Pengendalian hama dilakukan dengan sistem pengendalian hama



terpadu menggunakan biopestisida berupa mikroba *Pseudomonas fluorescens* dan *Bacillus subtilis* untuk mengendalikan pathogen-pathogen tanah. Bondansari, et. all. (2011) menganjurkan guludan jalur/larik penanaman dibuat memotong lereng atau searah kontur disertai dengan penguat teras. Berkaitan dengan hal-hal tersebut perlu upaya sosialisasi inovasi untuk memperbaiki penerapan teknologi budidaya kentang di tingkat petani yang berwawasan ramah lingkungan

Sosialisasi inovasi teknologi kentang ramah lingkungan kepada pengguna dapat ditempuh dengan menerapkan berbagai metode yang saling menunjang dan melengkapi. Sosialisasi/pemasyarakatan suatu inovasi teknologi pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pertanian baik perorangan atau korporasi berkaitan erat dengan penggunaan metode penyuluhan pertanian. Van den Ban dan Hawkins (1999) berpendapat bahwa pilihan agen penyuluhan terhadap satu metode tergantung pada tujuan khusus dan situasi kerjanya. Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pusat Penyuluhan Pertanian, 2011).

Pemilihan strategi sosialisasi/pemasyarakatan inovasi pertanian (metode penyuluhan pertanian) perlu mempertimbangkan berbagai faktor yaitu (i) karakteristik sasaran, (ii) tujuan perubahan perilaku dari sasaran yang diinginkan, (iii) materi yang disampaikan dan (iv) metode (Sinar Tani, 2001). Dijelaskan lebih lanjut tujuan perubahan perilaku sasaran antara lain meliputi (i) untuk mengembangkan perhatian menggunakan media cetak, media elektronik, pameran, demonstrasi, (ii) untuk mengembangkan minat menggunakan metode penjelasan secara langsung, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, (iii) untuk mengembangkan kepercayaan dengan metode demonstrasi hasil, petani melihat



demonstrasi, praktek yang dapat diadopsi, (iv) untuk mengembangkan hasrat dengan metode petani melihat obyek nyata, partisipasi dalam demonstrasi, (v) untuk mengembangkan tindakan dengan metode menyediakan pelajaran dan pembekalan. Kegiatan pemasyarakatan/pembelajaran yang efektif memerlukan kombinasi berbagai metoda.

Salah satu metode yang digunakan dalam rangka sosialisasi inovasi budidaya kentang ramah lingkungan adalah demonstrasi plot (demplot). Metode demplot adalah demonstrasi teknologi pertanian yang dilakukan secara perorangan/kelompok pada luasan lahan antara 0,1 – 0,5 ha (Badan SDM pertanian, 2005). Untuk mengetahui sejauh mana metode demplot efektif perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kajian keefektifan metode demplot teknologi budidaya kentang ramah lingkungan dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan sikap petani pengguna teknologi (responden).

METODE PENELITIAN

Kajian keefektifan metode demplot budidaya kentang ramah lingkungan dilakukan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada 2014 dengan metode survey dengan wawancara terstruktur menggunakan kuisioner. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden, tingkat pemahaman/pengetahuan, sikap (respon) petani terhadap teknologi budidaya kentang ramah lingkungan. Survey dilakukan saat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan demplot. Responden ditentukan secara purposive yakni petani anggota kelompok pelaksana kegiatan demplot dimana petani tersebut sudah mengenal usahatani kentang namun belum sepenuhnya menerapkan teknologi budidaya kentang ramah lingkungan ($n = 20$). Pelaksana kegiatan demplot adalah gapoktan “Daya Manunggal”. Keefektifan metode terhadap pengetahuan dan sikap peserta diklasifikasikan 3 kategori yaitu efektif (skor antara 2,34 – 3,00), kurang efektif (skor antara 1,67 – 2,33) dan tidak efektif (skor antara 1 – 1,66). Analisis data secara deskriptif. Signifikansi peningkatan pengetahuan, sikap dan respon responden sebelum dan sesudah melakukan demplot diketahui melalui uji t (t -test) dengan nilai koreksi 5%.



Hipotesis ditentukan apabila H_0 adalah rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap responden sebelum dan sesudah melaksanakan demplot tidak berbeda atau $t_{hit} > t_{tab}$ dan H_1 adalah rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap responden sebelum dan sesudah melaksanakan demplot berbeda atau $t_{hit} < t_{tab}$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan demplot budidaya kentang ramah lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sangat berpengaruh atau efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap petani terhadap teknologi yang disosialisasikan. Pengetahuan petani tentang budidaya kentang ramah lingkungan diukur dengan 12 pernyataan yang menyangkut cara tanam sabuk gunung, penggunaan pestisida kimia, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan varietas dan benih umbi sehat serta pemupukan. Sikap petani diukur dengan 4 pernyataan antara lain manfaat teknologi yang disosialisasikan, kemudahan teknologi untuk diterapkan, teknologi dirasa menguntungkan dan teknologi sesuai kebutuhan sehingga akan diterapkan.

Sebelum ada kegiatan demplot budidaya kentang ramah lingkungan sebagian besar responden menyatakan ragu-ragu terhadap pengetahuan teknologi yang dikenalkan. Namun setelah kegiatan demplot dilaksanakan maka semua responden menyatakan sudah tahu dengan teknologi diperagakan, meskipun masih ada komponen teknologi yang belum sepenuhnya dipahami (Tabel 1.).

Sikap responden dalam menanggapi teknologi budidaya kentang yang akan dikenalkan/disosialisasikan melalui demplot masih ada sebagian responden yang meragukan bahkan tidak setuju. Namun sebagian besar responden menunjukkan sikap positif dengan memberikan pernyataan setuju pada 4 pertanyaan yang disampaikan, meskipun kegiatan demplot belum dilaksanakan. Setelah kegiatan demplot dilaksanakan semua responden menunjukkan sikap yang positif dengan memberikan pernyataan setuju (Tabel 1.).



Tabel 1. Pernyataan responden dalam hal pengetahuan dan sikap terhadap teknologi budidaya kentang ramah lingkungan saat sebelum dan sesudah melaksanakan demplot di Desa Tlahab Kabupaten Temanggung pada 2014

Pernyataan	Responden (%)	
	Sebelum Demplot	Sesudah Demplot
PENGETAHUAN		
- Tahu	30	100
- Ragu-ragu	60	0
- Tidak tahu	10	0
SIKAP		
- Setuju	55	100
- Ragu-ragu	25	0
- Tidak setuju	20	0

Hasil analisis pernyataan responden dalam peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap menunjukkan rata-rata skor pengetahuan responden setelah melaksanakan demplot masuk pada kategori efektif (2,34 – 3,00). Hasil uji t test terhadap tingkat pengetahuan dan sikap responden sebelum dan sesudah melaksanakan demplot budi daya kentang ramah lingkungan menunjukkan bahwa nilai sig pengetahuan $0,000 < 0,05$ dan nilai sig sikap $0,000 < 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$. Apabila $t_{hit} < t_{tabel}$ dapat disimpulkan H_0 ditolak atau H_1 diterima yang artinya tingkat pengetahuan dan sikap responden sebelum melaksanakan demplot ada perbedaan yang signifikan setelah responden melaksanakan demplot. Hal ini menunjukkan bahwa metode demplot efektif meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap petani kentang di Desa Tlahab Kabupaten Temanggung. Van den Ban dan Hawkins dalam Mardikanto (1993) menjelaskan bahwa metode demonstrasi dapat menumbuhkan kesadaran petani terhadap inovasi, masalahnya sendiri dan mengalihkan pengetahuan serta mengubah perilaku. Petani akan membentuk sikap menerima atau menolak inovasi apabila inovasi yang didemonstrasikan mempunyai keuntungan relatif, kompatibel, tidak rumit, dapat dicoba dan dapat dilihat orang (Roger dan Shoemaker dalam Hanafi, 1981).



Tabel 2. Rata-rata skor perubahan pengetahuan dan sikap responden pada saat sebelum dan sesudah melaksanakan demplot budidaya kentang ramah lingkungan di Desa Tlahab Kabupaten Temanggung pada 2014

	Rata-rata Skor
Pengetahuan	2,77
Sikap	2,95

Keterangan:

- Skor antara 2,34 – 3,00 : kategori efektif
- Skor antara 1,67 – 2,33 : kategori kurang efektif
- Skor antara 1 – 1,66 : kategori tidak efektif

PENUTUP

Sosialisasi Budidaya kentang ramah lingkungan kepada petani kentang di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung menggunakan metode demonstrasi plot dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang inovasi budidaya kentang ramah lingkungan dan dapat mengubah sikap petani terhadap inovasi yang dikenalkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode demplot efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap bagi petani kentang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A. Syaifuddin, dan N. Rosida.(2010). *Membangun Kawasan Perbenihan Kentang Melalui Program Iptekda-LIPI di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin.
<http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321319802096.makalah.pdf> diunduh 5 Pebruari 2014.
- Badan Pengembangan SDM Pertanian. (2005). *Materi Pelatihan Metodologi Penyuluhan pertanian*. Jakarta
- Bondansari, K.E. Sularso dan E. Dewanto.(2011).Studi Tentang Budidaya Tanaman Kentang *Solanum tuberosum* L. di Dataran Tinggi Dieng: *Kajian dari Aspek Ekonomi dan Lingkungan*. Jurnal Pembangunan Pedesaan Volume 11 (1) 17-28. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Hanafi, A. (1981). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Paryono,T.J., B. Prayudi. (2012). *Penyakit Busuk Daun pada Kentang dan Pengendaliannya*. Warta Inovasi Vol. 5 No. 2 Tahun 2012 : 28 - 29. Jawa Tengah: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah.
- Sinar Tani. (2001). *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani
- Van denBan dan Hawkins. (1999). *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.



AKSESIBILITAS PETANI TERHADAP INFORMASI TEKNOLOGI PENGENDALIAN HAMA TIKUS TERPADU MELALUI MEDIA KELOMPOK

Sylvatra Puspita Sari, Subejo, dan Roso Witjaksono

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

sylvatrapuspitasari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kecamatan Minggir merupakan salah satu wilayah yang endemik terhadap tikus sawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat aksesibilitas petani dalam memperoleh informasi tentang teknologi pengendalian hama tikus terpadu (PHTT) dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani. Metode penelitian dasar adalah metode deskriptif analisis dengan mewawancarai 60 petani menggunakan kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa aksesibilitas petani di Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman tergolong dalam kategori sedang dengan persentase 66,67%. Faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas petani adalah keaktifan dalam kelompok tani dan kredibilitas media kelompok tani. Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh adalah umur, pendidikan, luas lahan, dan lama bertani.

Kata kunci : aksesibilitas, kredibilitas, PHTT, tikus, hama

PENDAHULUAN

Tikus sawah (*Rattus argentiventer*) adalah hama padi yang utama. Disamping gulma, tikus merupakan hama yang mendatangkan kerugian hampir disepanjang tahun. Tikus adalah hama yang cerdas, karena itu untuk mengendalikan tikus kita harus lebih cerdas. Mereka mempunyai syaraf peraba, pembau dan pengecap yang sangat baik, tetapi ternyata tikus mempunyai daya ingat yang lemah. Untuk mengendalikan hama ini dengan sebaik-baiknya kita harus mempelajari sifat-sifat dan perilaku mereka (Gallagher, 1991).

PHTT (Pengendalian Hama Tikus Terpadu) merupakan strategi pengendalian tikus yang didasarkan pada pemahaman ekologi tikus, dilakukan secara dini, intensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai teknologi pengendalian yang sesuai dan tepat waktu untuk menurunkan populasi tikus. Pengendalian dilakukan oleh petani secara serempak dan terkoordinasi dalam cakupan skala hamparan yang luas, meliputi: 1). Tanam serempak (selisih waktu



tanam yang tidak lebih dari 2 minggu); 2). Sanitasi, yaitu membersihkan gulma atau semak-semak di habitat utama tikus (tanggul irigasi, perbatasan dengan kampung, pematang, parit dan saluran irigasi); 3). Gropyokan massal yang dilakukan serempak dan fokus pada habitat utama tikus; 4). Fumigasi atau pengemposan menggunakan asap belerang terutama pada stadia generatif padi; 5). Pemanfaatan beragam musuh alami tikus (musang, burung hantu atau *Tyto alba* dan ular); 6). TBS (*Trap Barrier System*) atau system bubu perangkap; serta 7). LTBS (*Linier Trap Barrier System*) atau system bubu perangkap linier.

Media komunikasi merupakan suatu perantara yang menghubungkan tersampainya suatu informasi ke sasarannya. Dalam melakukan komunikasi dibutuhkan suatu perantara yang disebut saluran komunikasi. Menurut Pertiwi dan Saleh (2010) Saluran komunikasi penyuluhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran komunikasi langsung (interpersonal) dan saluran komunikasi tidak langsung (bermedia).

Kecamatan Minggir merupakan wilayah endemik tikus sawah. Tikus sawah yang menyerang lahan petani dapat mengurangi produktivitas padi bahkan dapat menyebabkan petani gagal panen. Untuk dapat meningkatkan produktivitas petani, maka diperlukan suatu informasi mengenai teknologi baru yang diterapkan oleh petani untuk mengendalikan hama tikus sawah. Agar informasi tersebut dapat sampai ke petani dengan baik, maka diperlukan suatu akses penyaluran informasi yang baik juga.

Dalam proses penyebaran informasi, digunakan saluran komunikasi yang merupakan jalur sampainya informasi dari komunikator kepada komunikan. Ada berbagai macam saluran komunikasi. Dalam penelitian ini akan difokuskan untuk meneliti saluran komunikasi melalui media kelompok tani. Media kelompok tani bagi petani adalah media yang cukup dominan untuk tersampainya suatu informasi teknologi kepada petani. Hampir semua petani di Kecamatan Minggir tergabung dalam suatu kelompok tani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat aksesibilitas petani di Kecamatan Minggir dalam memperoleh informasi teknologi pengendalian hama tikus terpadu melalui media kelompok tani dan



mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas petani di Kecamatan Minggir terhadap teknologi pengendalian hama tikus terpadu melalui media kelompok tani.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Pengambilan sampel Kecamatan Minggir dilakukan secara purposive. Pemilihan Desa dilakukan secara purposive yaitu memilih 3 desa dari 5 desa yang ada di Kecamatan Minggir. Untuk pengambilan sampel petani diambil 60 orang petani dengan masing-masing 20 petani yang diambil dari 3 kelompok tani, dengan tiap desa diambil satu kelompok tani yang dilakukan secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*).

Untuk menguji hipotesis pertama tentang tingkat aksesibilitas petani terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani, maka diuji dengan menggunakan analisis uji proporsi dengan persamaan H_0 yaitu diduga kurang atau sama dengan 50% petani di Kecamatan Minggir mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani. H_a yaitu diduga lebih dari 50% petani di Kecamatan Minggir mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani. Tingkat signifikansi pada $\alpha = 0,05$ (5%), $n = 60$. Statistika pengujian menggunakan Uji Parameter Proporsi $Z_{hitung} = \frac{p - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}}$.

Dimana p merupakan presentase parameter hasil pengamatan (x/n), P_0 merupakan presentase hasil pengamatan yang ditetapkan (50%) dan n adalah jumlah sampel.

Untuk menguji hipotesis kedua yaitu untuk mengetahui apakah umur, pendidikan, luas lahan, lama bertani, keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani, dan kredibilitas media kelompok tani mempengaruhi aksesibilitas petani terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, karena terdapat satu variabel dependen yaitu aksesibilitas petani terhadap informasi mengenai PHTT melalui



media kelompok tani dan beberapa variabel independen yaitu umur, pendidikan, luas lahan, lama bertani, keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani, dan kredibilitas media kelompok tani. Persamaan regresi adalah $Y = A + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6$. Dimana Y merupakan aksesibilitas petani terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani, A adalah nilai konstanta, b_1 - b_6 adalah koefisien regresi, X_1 adalah umur petani, X_2 adalah pendidikan, X_3 adalah luas lahan, X_4 adalah lama bertani, X_5 adalah keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani dan X_6 adalah kredibilitas media kelompok tani. Pengujian hipotesisnya adalah $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = b_6 = 0$ dan $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq b_6 \neq 0$. Jika $Sig \geq \alpha$; H_0 diterima maka H_a ditolak dan jika $Sig < \alpha$; H_0 ditolak maka H_a diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Petani terhadap Pengendalian Hama Tikus Terpadu

Menurut The Mathematical Theory of Communication, saluran adalah media untuk mengirimkan sinyal dari transmitter (alat pengirim) ke penerima. (Severin, W. J dan James W. Tankard, 2009). Dalam penelitian ini saluran adalah media kelompok, *transmitter* adalah penyuluh dan anggota kelompok, dan penerimanya adalah anggota kelompok tani. Aksesibilitas petani terhadap informasi teknologi pengendalian hama tikus terpadu dibagi menjadi 3 kategori. Sebaran petani berdasarkan tingkat aksesibilitas petani dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1. Sebaran Tingkat Aksesibilitas Petani di Kecamatan Minggir

No	Kategori tingkat aksesibilitas	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Rendah (0-37)	13	21,67
2.	Sedang (38-74)	40	66,67
3.	Tinggi (75-111)	7	11,66
Jumlah		60	100

Menurut Witjaksono, R., Mudiyo, dan Hariadi, S.S. (2013), aksesibilitas petani adalah derajat kemudahan petani untuk mendapatkan modal, sarana produksi, peralatan, informasi, pelayanan pasca panen, dan fasilitas pemasaran. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat aksesibilitas petani di Kecamatan Minggir tergolong dalam kategori sedang dengan skor (38-74) dengan



persentasi 66,67%.

Tinggi rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi teknologi pengendalian hama tikus terpadu bisa diketahui dengan uji proporsi. Hasil perhitungan menggunakan uji proporsi diperoleh nilai Zhitung sebesar -5,89. Hasil tersebut lebih kecil dibandingkan Ztabel yaitu -1,64. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, dimana kurang dari atau sama dengan 50% petani di Kecamatan Minggir mempunyai tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aksesibilitas Petani terhadap Pengendalian Hama Tikus Terpadu

Aksesibilitas para anggota kelompok tani terhadap informasi teknologi pengendalian hama tikus terpadu memiliki tingkat yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi aksesibilitas dalam penelitian ini adalah umur, pendidikan, luas lahan, lama bertani, keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani dan kredibilitas media kelompok tani. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tersebut dianalisis menggunakan analisis linier berganda (*multiple linier regrestion*). Pada analisis ini aksesibilitas sebagai *dependent variable*, sedangkan umur, pendidikan, luas lahan, lama bertani, keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani, dan kredibilitas media kelompok tani sebagai *independent variable*. Hasil analisis regresi linier berganda pada model *backward* (model 5) dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa keaktifan dalam kelompok tani dan kredibilitas media kelompok memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya memiliki pengaruh nyata terhadap aksesibilitas petani. Persamaan regresi adalah $Y = -15,952 + 1,104 X_5 + 0,528 X_6$. Y merupakan aksesibilitas petani terhadap informasi mengenai PHTT melalui media kelompok tani, X_5 adalah keaktifan petani dalam kegiatan kelompok tani dan X_6 adalah kredibilitas media kelompok tani.

Adjusted square mencapai 0,210 menunjukkan bahwa sebesar 21 % variabel aksesibilitas petani dapat dijelaskan oleh variabel keaktifan petani dalam kelompok tani dan kredibilitas media kelompok. Sedangkan 79% sisanya



dijelaskan oleh variabel lain diluar model tersebut. Nilai F adalah perbandingan antara rerata kuadrat dari regresi dengan rerata kuadrat residu. Berdasarkan analisis F hitung adalah 8,833 dan F tabel adalah 0,051. Apabila F hitung > F tabel menunjukkan bahwa variabel independen yaitu keaktifan dalam kelompok tani dan kredibilitas media kelompok tani secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen yaitu aksesibilitas petani.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Berganda Mengenai Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Aksesibilitas Petani terhadap Informasi Teknologi Pengendalian Hama Tikus Terpadu di Kecamatan Minggir (Model 5)

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig	Ket
Keaktifan dalam kelompok tani (x_5)	1,104	2,499	0,015	*
Kredibilitas media kelompok (x_6)	0,528	2,348	0,022	*
Konstanta	-15,952			
R square	0,237			
Adjusted R Square	0,210			
F Hitung	8,833			
F Tabel	0,0513			
Keterangan : * Signifikan pada $\alpha = 5\%$				
Sumber : Analisis Data Primer 2015				

PENUTUP

Tingkat aksesibilitas petani terhadap informasi pengendalian hama tikus terpadu tergolong sedang dengan faktor keaktifan petani dan kredibilitas media kelompok menjadi faktor yang berpengaruh nyata terhadap aksesibilitas petani di Kecamatan Minggir. Media kelompok sebaiknya selalu diaktifkan sebagai wadah bagi para petani untuk mendapatkan informasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Gallagher, Kevin. 1991. Pengendalian Hama Terpadu Untuk Padi. Proyek Prasarana Fisik BAPPENAS, Jakarta.
- Pertiwi, P. R dan A. Saleh. 2010. Persepsi petani tentang saluran komunikasi usahatani padi. Jurnal Komunikasi Pembangunan. Vol, 8. No. 2.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Severin, Werner J dan James W. Tankard. Teori Komunikasi: sejarah, metode, dan Terapan di dalam Media Massa. Dialihbahasakan Sugeng Hariyanto. Kencana, Jakarta.

Witjaksono, R., Mudiyo., dan Hariadi, S.S. 2013 . Aksesibilitas Petani Dalam Agribisnis Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Jurnal Agriekonomika. Vol 1., No. 2.



PERAN KELOMPOK TANI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI MELALUI ADOPTI INOVASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KECAMATAN PRAMBANAN

Diah Fitria Widhiningsih¹, Sunarru Samsi Hariadi², dan Roso Witjaksono³

¹Mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP), Sekolah Pascasarjana, UGM

²Sekolah Pascasarjana, UGM

³ Sekolah Pascasarjana, UGM

diah.fitria.w@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Tingginya permintaan pasar akan beras di Indonesia membuat petani berupaya meningkatkan produktivitas padi dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga diperlukan pengembangan usahatani berbasis kearifan lokal. Kelompok tani menjadi media untuk perubahan pengetahuan, sikap, keterampilan, hingga perilaku dalam menerapkan usahatani tersebut. Teknologi ramah lingkungan yang diadopsi oleh petani meliputi pemilihan benih, pemeliharaan secara organik, dan pemanenan yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran kelompok tani terhadap adopsi inovasi berbasis kearifan lokal; (2) mengidentifikasi proses adopsi inovasi yang terjadi terkait peran kelompok tani, dan (3) memahami pengaruh adopsi inovasi berbasis kearifan lokal terhadap produktivitas padi. Dalam penelitian ini, 60 petani padi dipilih secara acak menggunakan simple random sampling di Kecamatan Prambanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan inovasi kearifan lokal. Dalam hal ini, kelompok tani memiliki peran sebagai unit belajar, kerjasama, dan produksi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peran kelompok tani berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi inovasi, yang juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas padi dengan peningkatan produktivitas sebesar 1,18 ton/Ha. Dengan demikian, diperlukan adanya strategi peningkatan produktivitas melalui peningkatan partisipasi anggota kelompok tani sehingga kelompok berperan dalam peningkatan adopsi inovasi.

Kata kunci: kearifan lokal, adopsi inovasi, peran kelompok tani, produktivitas

PENDAHULUAN

Tingginya pola konsumsi nasi pada masyarakat Indonesia membuat pemerintah fokus pada komoditas padi. Target swasembada pangan di tahun 2017 menarik perhatian penyuluh pertanian untuk menyukseskan program tersebut. Kekhawatiran publik akan tata cara budidaya padi dengan berbagai zat yang dapat memicu tanaman padi untuk memproduksi lebih banyak bulir perlu



dikaji sebab dapat mengancam kestabilan ekosistem. Untuk itu, diperlukan teknologi tepat guna ramah lingkungan yang sesuai kondisi masyarakat setempat sehingga diperlukan kearifan lokal. Phongphit dan Nantasuan (2002) *cit.* Kongprasertamorn (2007) menjelaskan bahwa kearifan lokal mengandung nilai moral untuk mencintai alam yang berasal dari anggota masyarakat tertua (turun-temurun). Dalam praktiknya, walaupun pemerintah menekankan praktik usahatani ramah lingkungan berbasis kearifan lokal, perlu dipertanyakan apakah petani secara sadar mengadopsinya.

Petani cenderung mengadopsi suatu inovasi jika petani lain mengadopsinya dan terbukti memperoleh hasil yang menguntungkan. Sebenarnya, budaya “ikut-ikutan” ini dapat menuju pertanian berkelanjutan jika terjadi proses *social learning* yang baik terhadap adopsi pertanian organik berbasis kearifan lokal. Bandura (1971) menambahkan bahwa adanya contoh lebih baik daripada tindakan yang tanpa didasari oleh suatu panduan. Dengan kata lain, proses *social learning* akan lebih terarah jika dilakukan melalui kelompok tani karena melalui kelompok tani-lah penyuluh akan mendampingi petani dalam mencapai peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan.

Proses adopsi inovasi menurut Rogers (1983) dimulai dari tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, pelaksanaan, hingga konfirmasi dimana setelah mengadopsi, petani akan tetap mengadopsi atau tidak; dan setelah tidak mengadopsi, petani cenderung mengadopsi atau tetap tidak mengadopsinya. Melalui peran kelompok tani, adopsi inovasi diarahkan menuju tahapan konfirmasi yang positif. Mwaura (2014) mengatakan bahwa untuk tanaman pangan berkarbohidrat, anggota kelompok tani menunjukkan tingkat adopsi inovasi pertanian organik yang lebih tinggi daripada non-anggota. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis peran kelompok tani terhadap adopsi inovasi berbasis kearifan lokal; (2) mengidentifikasi proses adopsi inovasi yang terjadi terkait peran kelompok tani; dan (3) memahami pengaruh adopsi inovasi berbasis kearifan lokal terhadap produktivitas padi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari 60 petani di Desa Bokoharjo, Madurejo, dan Sumberharjo pada tahun 2015. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengambilan data survei. Selain itu, juga dilakukan observasi, *in-depth interview* terhadap informan, serta studi pustaka.

Data diuji reliabilitas dan validitasnya. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis regresi, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = A + b_1X_1 \quad (1)$$

Dimana Y merupakan adopsi inovasi, A adalah konstanta, b_1 , b_2 adalah koefisien regresi, X_1 adalah peran kelompok tani.

$$Y = A + b_1X_1 \quad (2)$$

Dimana Y merupakan produktivitas, A adalah konstanta, b_1 , b_2 adalah koefisien regresi, X_1 adalah adopsi inovasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya swasembada pangan dengan kualitas produksi yang baik serta tidak merusak lingkungan, dibentuk program pelaksanaan usahatani ramah lingkungan. Melalui kelompok tani, petani diarahkan untuk mencapai peningkatan produktivitas melalui pendekatan *participator* sehingga salah satu strategi pengembangan usahatani di Prambanan adalah dengan berbasis pada kearifan lokal. Kearifan lokal yang diadopsi antara lain pemilihan benih meliputi penggunaan air garam dan telur ayam atau bebek dalam perendaman benih, penggunaan pupuk organik dan pestisida hayati dalam proses pemeliharaan, dan tata cara panen yang tepat meliputi kehati-hatian, serta penggunaan dan posisi terpal, dan pemilihan wadah yang tepat.

Kelompok tani memiliki peran sebagai unit belajar, unit kerjasama, unit produksi, serta unit usaha dan bisnis, dan juga sebagai kesatuan aktivitas (Departemen Pertanian dalam Hariadi, 2011). Akan tetapi, penelitian ini hanya berfokus kepada peran kelompok tani sebagai unit belajar, kerjasama, dan produksi yang merupakan kesatuan aktivitas. Penelitian ini tidak melihat



perannya sebagai unit bisnis karena tidak banyak petani di Kecamatan Prambanan yang memanfaatkan keberadaan kelompok tani sebagai sarana untuk mengembangkan usaha kelompok dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk kegiatan pemupukan modal.

Tabel 1. Hasil regresi pengaruh peran kelompok tani terhadap adopsi inovasi kearifan lokal

Variabel	Koefisien Regresi(B)	Sig	Keterangan
Peran kelompok tani	0,589	0,000	***
Konstanta	5,729		
R	0,754		
Adjusted R ²	0,561		
Ket. *** signifikan pada $\alpha=1\%$			

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa peran kelompok tani sebagai unit belajar, kerjasama, dan produksi berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi inovasi yang ditunjukkan oleh nilai sig yang lebih kecil dari α . Selain itu, pengaruh tersebut bersifat positif yang berarti semakin tinggi peran kelompok tani, semakin tinggi pula adopsi inovasi kearifan lokal. Adopsi inovasi dipengaruhi oleh peran kelompok tani sebesar 56,1% sedangkan 43,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Peran kelompok tani memiliki korelasi yang kuat atau tinggi dengan adopsi inovasi ($R=0,754$) (Samah dan Suandii, 1999). Apabila peran kelompok tani bernilai 0, adopsi inovasi akan bernilai 5,729. Di samping itu, kenaikan tiap satu satuan peran kelompok tani akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,589 satuan adopsi inovasi.

Terdapat beberapa tahapan proses adopsi inovasi pertanian ramah lingkungan berbasis kearifan lokal di Kecamatan Prambanan, yang dipengaruhi oleh peran kelompok tani. Sesuai dengan teori Rogers (1983) tentang *innovation-decision process*, proses adopsi di Kecamatan Prambanan dimulai dengan transfer informasi, persuasi, keputusan, hingga pelaksanaan. Perbedaannya terletak pada tahapan konfirmasi. Pada penelitian ini, tahapan konfirmasi belum dapat diamati karena proses tersebut belum terjadi dan hanya dapat diketahui di musim tanam berikutnya.

Keseluruhan proses adopsi tersebut difasilitasi oleh kelompok tani.



Informasi terkait budidaya padi organik berbasis kearifan lokal didifusikan melalui pertemuan kelompok tani maupun dengan cara komunikasi interpersonal antara penyuluh dan petani di lahan pertanian. PS (78) mengatakan bahwa petani cenderung memperoleh banyak informasi dari penyuluh daripada media massa misalnya folder. Informasi tersebut diperoleh petani melalui proses ceramah dan tampilan gambar pada *powerpoint*. Informasi yang disampaikan penyuluh melalui komunikasi kelompok saat pertemuan kelompok tani lebih bervariasi dan lengkap jika dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Di sisi lain, informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi interpersonal di lahan lebih mengarah pada studi kasus tertentu dan lebih mendalam pada masalah khusus yang dijumpai di lahan. Karena sebagian besar informasi diperoleh melalui pertemuan kelompok tani, dapat dikatakan bahwa kelompok tani memang berperan sebagai unit belajar. Lebih lanjut lagi, Gailhard *et al.* (2014) mengemukakan bahwa baik penyampaian pesan secara formal (dalam penelitian ini melalui pertemuan kelompok) maupun informal (ketika di lahan), keduanya berpengaruh terhadap adopsi secara efektif.

Dalam penyampaian informasi saat pertemuan kelompok tani, persuasi dilakukan dengan dua cara. Petani di desa A dan B diberi motivasi untuk mengadopsi suatu inovasi dengan cara menceritakan keberhasilan petani lain yang dapat meningkatkan produktivitas padi melalui usahatani ramah lingkungan. Akan tetapi, petani di desa C lebih dirangsang kekhawatirannya akan gagal panen atau penurunan produktivitas padi jika melakukan usahatani yang tidak sesuai anjuran. Po (53) berpendapat bahwa rasa takut akan kegagalan membuat mereka lebih ingin saling membantu dan bertukar pikiran untuk terhindar dari gagal panen—dalam hal ini, kelompok tani berperan sebagai unit kerjasama. Akan tetapi, terkadang mereka juga khawatir untuk mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa petani masih belum berani untuk mengambil risiko dalam berusaha tani.

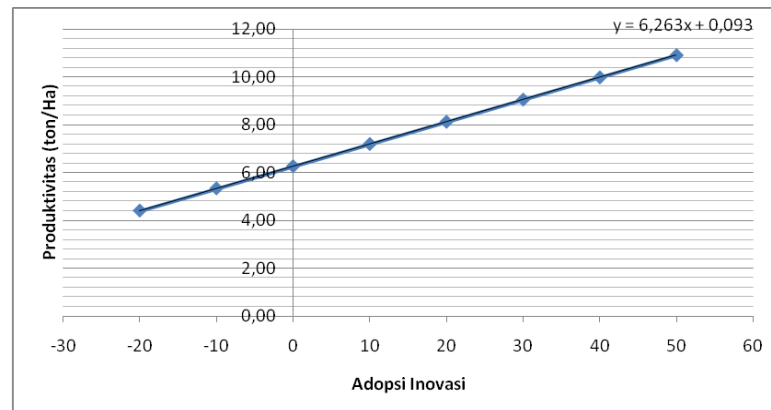
Kekhawatiran akan kegagalan maupun sifat inovasi yang terlalu rumit membuat petani ragu untuk mengambil keputusan dengan mantap. Sebagai contoh, beberapa petani di Desa B mengatakan bahwa mereka cenderung



merendam benih dengan air biasa, tanpa garam dan tanpa diapungi telur, khususnya telur bebek. Mereka juga beranggapan bahwa hasilnya akan sama saja sehingga mereka tidak perlu melakukan hal yang rumit. Dalam hal ini, petani juga belum memahami pentingnya penggunaan garam dan telur saat seleksi benih padi. Hal ini didukung oleh Rogers (1983) yang menjelaskan bahwa tingkat kompleksitas misalnya inovasi sulit untuk dimengerti maupun diaplikasikan juga perlu dipertimbangkan saat tahap persuasi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan.

Bagi petani yang menganggap bahwa teknologi mudah dijangkau dan menguntungkan, akan dengan senang hati mengadopsi suatu inovasi. Sebagian besar petani di Bokoharjo, Madurejo, dan Sumberharjo mengadopsi pupuk organik dari kotoran ternak. Alasan pertama, kotoran tersebut tersedia secara melimpah di masing-masing desa. Kedua, petani telah terbiasa menggunakan kotoran ternak untuk pupuk, walaupun pada awalnya mereka tidak mengolah kotoran tersebut. Oleh karena itu, kotoran ternak dengan berbagai jenis cara pengolahan pupuk organik maupun pestisida hayati dengan memanfaatkan sumberdaya alam lokal misalnya daun mimba sangat mudah diterima oleh petani. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, rerata petani yang mengadopsi pupuk organik dari kotoran ternak mencapai nilai tertinggi yaitu 3,983. Sebaliknya, rerata terendah adalah adopsi pemanfaatan mikrobial dari akar bambu, yang hanya mencapai 0,683. Singkat kata, seluruh inovasi telah diadopsi petani, walaupun terdapat inovasi yang hanya diadopsi oleh sebagian kecil petani.

Gambar 1 menggambarkan pengaruh yang signifikan dan positif dari adopsi inovasi terhadap produktivitas padi. Ketika adopsi bernilai 0, produktivitas akan bernilai 0,093 dan setiap peningkatan satu satuan adopsi dapat meningkatkan 6,263 satuan produktivitas padi. Berdasarkan hasil penelitian, kenaikan produktivitas selama satu tahun mencapai 1,18 ton/Ha.



Sumber: Analisis data primer (2015)

Gambar 1

Grafik pengaruh adopsi inovasi terhadap produktivitas padi

Terjadi perbedaan antara produktivitas sebelum petani mengadopsi inovasi dan setelah mereka mengadopsinya. Adopsi inovasi secara signifikan dan positif mempengaruhi produktivitas dengan nilai $\text{sig}=0$. Karena adopsi inovasi dipengaruhi oleh peran kelompok tani, hal ini berarti kelompok tani berperan sebagai unit produksi dengan memfasilitasi petani untuk meningkatkan produktivitas demi tercapainya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

PENUTUP

Dalam proses adopsi inovasi pertanian ramah lingkungan berbasis kearifan lokal, peran kelompok tani memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu, keduanya memiliki hubungan yang kuat. Proses adopsi yang terjadi di Kecamatan Prambanan meliputi transfer informasi, persuasi, pengambilan keputusan, adopsi atau pelaksanaan, namun tanpa konfirmasi. Adopsi inovasi tersebut juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas sehingga dicapai peningkatan produktivitas dalam satu tahun. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan tanpa adanya keraguan yang berlebih akan kegagalan panen, sebaiknya ada gabungan yang seimbang dari persuasi dengan cara menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari suatu usahatani agar petani dapat mempertimbangkan peluang dan risiko serta tidak



terlalu khawatir untuk mengambil sebuah keputusan demi tercapainya proses adopsi yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1971). *Social Learning Theory*. New York City: General Learning Press.
- Gailhard, I. U., M. Bavorova, dan F. Pirscher. (2014). Adoption of agri-environmental measures by organic farmers: the role of interpersonal communication. *The Journal of Agricultural Education and Extension* 21 (2) (hal.127-148).
- Hariadi, S. S. (2011). *Dinamika Kelompok*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Kongprasertamorn, K. (2007). Local wisdom, environmental protection and community development: the clam farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi province, Thailand. *Journal of Humanities* 10 (1) (hal. 1-10).
- Mwaura. (2014). Effect of farmer group membership on agricultural technology adoption and crop productivity in Uganda. *African Crop Science Journal* 22 (hal. 917-927).
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press.
- Samah, B. A. dan T. Suandii. (1999). *Statistics for Social Research: with Computer Application*. Universiti Putra Malaysia.



RESPONS PETANI KEDELAI HITAM *MALLIKA* TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN PT. UNILEVER DI KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO

Ria Widyaningrum, Dyah Woro Untari, dan Subejo

Program Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
ria.widyaningrum@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan produksi kedelai hitam dapat dikembangkan melalui program kemitraan yang melibatkan antara perusahaan mitra dengan petani mitra yang diharapkan mampu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Tujuan penulisan penelitian antara lain: (1) untuk mengetahui tingkat respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever dan (2) mengetahui pengaruh respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever. Metode penelitian dasar adalah metode deskriptif. Pengambilan responden sejumlah 30 responden yang dilakukan dengan metode sensus. Hasil analisis menunjukkan bahwa respons petani kedelai hitam *Mallika* di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo tergolong dalam kategori positif. Respons petani kedelai hitam *Mallika* berpengaruh nyata terhadap keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever. Tingkat keberlanjutan tertinggi yaitu pemasaran telah terjamin, hasil panen dibeli secara tunai, modal benih dan resiko kegagalan ditanggung oleh PT. Unilever.

Kata kunci: respons, kemitraan, kedelai hitam, PT. Unilever

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lahan pertanian yang potensial. Lahan pertanian tersebut memiliki potensi untuk ditanami beberapa tanaman pangan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu kedelai hitam (*Glycine soja*) yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kecap. Pengembangan produksi kedelai hitam dapat dikembangkan melalui program kemitraan yang melibatkan antara perusahaan mitra dengan petani mitra yang diharapkan mampu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak tersebut. Kemitraan akan berjalan harmonis apabila kedua belah pihak memiliki prinsip dasar kemitraan yang sejalan.



Menurut Tondok (1999) bahwa prinsip dasar kemitraan agribisnis meliputi (1) Saling membutuhkan, dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dari petani untuk keperluan usahanya; (2) Saling menguntungkan, dalam arti petani dan perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan yang lebih dibanding apabila masing-masing pihak melakukan kegiatan sendiri-sendiri; dan (3) Saling memperkuat, yaitu petani dan perusahaan mitra dapat melanjutkan usaha secara bersama lebih efektif, efisien, dan dalam suatu skala usaha yang ekonomis.

Respons positif dari para petani yang mengikuti program kemitraan mampu menghasilkan hasil produksi kedelai hitam secara maksimal. Petani berusaha untuk mengikuti bimbingan dari petugas perusahaan mitra dalam proses membudidayakan kedelai hitam. Adanya bimbingan dari petugas perusahaan mitra menjadikan para petani mempunyai pengetahuan yang meningkat dalam hal budidaya kedelai hitam. Namun, dari semua gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang bermitra dengan PT. Unilever tidak semua anggotanya mengikuti program kemitraan tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif secara survei. Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Pituruh secara *purposive*. Pengambilan responden sebanyak 30 responden yang dilakukan dengan metode sensus. Dalam menjawab tujuan dalam penelitian ini, dilakukan beberapa metode analisis yaitu:

Menguji hipotesis pertama menggunakan uji proporsi dengan persamaan sebagai berikut :

$$H_0 : P \leq 50\%$$

$$H_a : P > 50\%$$

Dengan pengertian:



Ho : diduga kurang atau sama dengan 50% petani kedelai hitam *Mallika* mempunyai respons yang tinggi terhadap program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.

Ha : diduga lebih dari 50% petani kedelai hitam *Mallika* mempunyai respons yang tinggi terhadap program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo

Statistik Pengujian

$$Z_{hit} = \frac{x/n - p_o}{\sqrt{\frac{p_o(1-p_o)}{n}}} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

Z_{hit} : statistik uji Z

p_o : Proporsi populasi (50%)

x: Jumlah responden yang mempunyai respons positif terhadap program kemitraan dengan PT. Unilever

n: Jumlah responden

Tingkat signifikansi (kepercayaan) pada $\alpha=0,05$ (5%), $n=30$

Kriteria pengujian :

$Z_{hit} > Z$ tabel : Ho ditolak, Ha diterima.

$Z_{hit} \leq Z$ tabel : Hi diterima, Ha ditolak

Menguji hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linier sederhana

$$Y = A + bX \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan :

Y : Keberlanjutan program kemitraan kedelai hitam *Mallika*

A : Bilangan konstanta

b : Koefisien korelasi

X : Respons petani kedelai hitam *Mallika*

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu diduga semakin positif respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan program kemitraan bersama PT. Unilever.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Respons Petani Kedelai Hitam *Mallika* terhadap Program Kemitraan PT. Unilever

Menurut Andriani (2010) menyatakan bahwa respons masyarakat tani adalah adanya tanggapan-tanggapan atau reaksi berupa jawaban terhadap obyek atau suatu inovasi baru. Berdasarkan ungkapan tersebut maka seseorang hanya akan memberikan tanggapan yang diterimanya apabila dengan memberi tanggapan itu ia memperoleh suatu manfaat. Pernyataan tersebut didukung oleh Walgito (2004) bahwa hanya beberapa stimulus yang menarik individu yang akan diberikan respons dalam hal ini, stimulus yang dimaksud adalah modal, penyedia teknologi, informasi-informasi baru, dan jaminan pemasaran hasil yang diberikan oleh perusahaan. Individu mengadakan seleksi stimulus mana yang akan diberikan respons.

Komponen respons petani kedelai hitam *Mallika* di Kecamatan Pituruh diantaranya pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan seseorang menurut Irmasari (2013) merupakan wawasan yang dimiliki seseorang yang dapat memberikan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. Sedangkan Van den Ban dan Hawkins (1999) menjelaskan bahwa sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan objek sikap. Menurut Irmasari (2013) bahwa perilaku adalah tindakan yang mengimplementasikan akan pengetahuan dan sikap yang telah terbentuk pada diri manusia. Hal ini juga berkaitan dengan norma yang berlaku pada masyarakat. Adapun respons petani terhadap program kemitraan PT. Unilever dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Respons Petani Kedelai Hitam *Mallika* terhadap Program Kemitraan PT. Unilever

No	Kategori (Skor)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Negatif (0 - 30)	0	0,00
2.	Netral (31- 60)	0	0,00
3.	Positif (61- 90)	30	100,00
Jumlah		30	100,00

Sumber: Analisis Data Primer 2015



Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever termasuk dalam kategori positif dengan persentase 100%. Hal ini menjelaskan bahwa seluruh petani yang mengikuti kegiatan program kemitraan PT. Unilever Tahun 2014 dapat menerima program kemitraan PT. Unilever.

Hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji proporsi sebagai berikut:

$$Z_{hit} = \frac{\frac{X}{n} - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}}$$

$$Z_{hit} = \frac{\frac{30}{30} - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5(1-0,5)}{30}}}$$

$$Z_{hit} = \frac{0,5}{0,0912}$$

$$Z_{hit} = 5,48$$

$$Z_{tabel} = -1,64$$

Jadi hasil uji proporsi $Z_{hit} \geq Z_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_a diterima.

Perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% petani kedelai hitam *Mallika* mempunyai respons yang positif terhadap program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar petani kedelai hitam *Mallika* mendapatkan tambahan pengetahuan, sikap, dan perubahan perilaku dari adanya program kemitraan PT. Unilever. Berdasarkan hal tersebut maka petani merasa senang dan dapat menerima satu kegiatan program kemitraan PT. Unilever karena kemitraan tersebut saling menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan teori rangsangan dan tanggapan (*Stymulus Respons Theory*) mengemukakan bahwa seseorang hanya akan memberi tanggapan atau rangsang yang diterimanya manakala dengan memberi tanggapan itu ia memperoleh suatu manfaat (Indraswari dalam Rahayu, 2013).



Pengaruh Respons Petani Kedelai Hitam *Mallika* terhadap Keberlanjutan Program Kemitraan PT. Unilever

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu diduga semakin positif respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan program kemitraan bersama PT. Unilever. Hipotesis kedua penelitian diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis pengaruh respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Linier Sederhana Mengenai Respons Petani Kedelai Hitam *Mallika* terhadap keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever

No.	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t _{hitung}	Sig	Ket
1.	Respons Petani Kedelai Hitam <i>Mallika</i>	0,754	8,077	0,000	*
	Konstanta	-16,748		0,037	
	R	0,836			
	R square	0,700			
	Adjusted R square	0,689			
	F _{hitung}	65,245			
	F _{tabel}	0,004			
Keterangan:					
* = signifikansi pada taraf 5%					

Sumber : Analisis Data Primer 2015

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana pada tabel 2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -16,748 + 0,754X$$

Keterangan:

Y = Keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever

X = Respons petani kedelai hitam *Mallika*

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dapat diartikan respons petani kedelai hitam *Mallika* berpengaruh positif (+) terhadap program kemitraan PT. Unilever dimana semakin tinggi tingkat respons petani kedelai hitam *Mallika* maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan bahwa arah



hubungan antara variabel respons petani kedelai hitam *Mallika* dengan keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever searah. Nilai konstanta dari hasil persamaan regresi sebesar -16,748. Apabila tidak ada pengaruh variabel respons petani kedelai hitam *Mallika* ($X = 0$) maka keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever -16,478. Nilai koefisien regresi variabel respons petani kedelai hitam *Mallika* sebesar 0,754 berarti bahwa setiap penambahan satu satuan variabel tersebut akan menaikkan keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever sebesar 0,754.

Hasil persamaan tersebut selaras dengan hipotesis penelitian bahwa diduga semakin positif respons petani kedelai hitam *Mallika* terhadap program kemitraan PT. Unilever maka semakin tinggi tingkat keberlanjutan program kemitraan bersama PT. Unilever. Perlu diketahui bahwa konsep keberlanjutan menurut Haris dalam Jaya (2004) dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan lingkungan yang diartikan system keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnta yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3) Keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Program kemitraan PT. Unilever menurut Habibi (2012) merupakan program pengembangan yang menjadi bagian program *Enhanced Livelihoods USLP* yang mencakup *sustainable sourcing* dan *better livelihoods*. Program pengembangan petani kedelai hitam (P3KH) menjadi program andalan Unilever Indonesia untuk menopang ketersediaan bahan baku pasca akuisisi kecap Bango dari PT. Anugrah Setia Lestari. Tujuan utama dari pelaksanaan program P3KH



yaitu (1) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani melalui pendampingan, pembinaan, fasilitasi akses pasar dan fasilitasi pembiayaan; (2) meningkatkan kehidupan petani dengan melibatkan mereka dalam bisnis kecap Bango. Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever dengan petani kedelai hitam *Mallika* merupakan hubungan kerjasama antara petani dengan perusahaan mitra yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara terus menerus.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa petani menyadari program kemitraan PT. Unilever untuk selalu ada setiap tahun (musim kemarau) khususnya di wilayah Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. Keberlanjutan program kemitraan PT. Unilever membantu petani yang memiliki keterbatasan modal dalam hal ini untuk membeli benih. Karena untuk membeli benih kedelai varietas lainnyapun petani harus mengeluarkan modal yang tinggi. Terkadang ketika panen kedelai harganya anjlok. Oleh karena itu adanya program kemitraan PT. Unilever secara berkelanjutan akan memberikan kemudahan untuk petani dalam usahatani.

Keadaan tersebut sejalan dengan ungkapan Hartono (1999) bahwa petani sebagai produsen di sektor primer mempunyai kelemahan yang sangat mendasar. Kedudukan petani lemah dalam mengakses sumber permodalan dan pasar sehingga tidak mudah memperoleh margin terkecil dan menghadapi resiko usaha yang paling besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanian berskala kecil memerlukan dorongan pemerintah guna peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan pemasaran.

PENUTUP

Sebagian besar petani kedelai hitam *Mallika* di Kecamatan Pituruh mempunyai respons positif terhadap program kemitraan PT. Unilever. Hal ini berarti bahwa respons yang diberikan oleh petani telah sesuai harapan dari adanya program kemitraan PT. Unilever. Respons dalam penelitian ini mencakup 3 komponen yang diantaranya pengetahuan, sikap, dan perilaku. Respons petani kedelai hitam *Mallika* berpengaruh positif terhadap keberlanjutan



program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Hal tersebut berarti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam usahatani salah satunya melalui sistem kemitraan yang dibentuk melalui kerjasama antara usaha kecil (petani mitra) dengan usaha besar (perusahaan mitra) yang disertai pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan prinsip saling membutuhkan dan keterbukaan.

Agar program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo dapat berjalan secara berkelanjutan oleh karena itu perlu adanya peningkatan dari beberapa sudut diantaranya perlu adanya peningkatan pemahaman bagi petani mitra PT. Unilever melalui sosialisasi dan penyuluhan yang wajib diikuti oleh petani mitra PT. Unilever, adanya evaluasi secara langsung antara asisten lapangan PT. Unilever dengan semua petani kedelai hitam *Mallika* setelah selesai program kemitraan PT. Unilever di Kecamatan Pituruh setiap tahunnya, dan perlu adanya dukungan melalui pelatihan bagi istri petani kedelai hitam *Mallika* dalam proses penyortiran kedelai hitam *Mallika* dan pengolahan sisa sortasi kedelai hitam *Mallika* menjadi produk olahan makanan bernilai ekonomi seperti susu kedelai, kopi, dan rempeyek

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2010. Respons Petani Tebu Rakyat terhadap Program Kemitraan Pabrik Gula Tasikmadu di Afdelling Colomadu Kabupaten Karanganyar. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Skripsi.
- Habibi, M. 2012. Motivasi dan Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* PT. Unilever Indonesia Tbk. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Tesis.
- Hartono, S. 1999. Kinerja PIR-TRANS Kelapa Sawit. Prosiding Seminar Kemitraan Usaha Perkebunan. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Irmasari, R. 2013. Respons Perangkat Desa terhadap Penganekaragaman Pangan Melalui Tepung Umbi-Umbian di Kabupaten Bantul. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Skripsi.
- Jaya, A. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pengantar Falsafah Sains. Program S3 Institut Pertanian Bogor.
- Rahayu, A. P. M. 2013. Respons Masyarakat Terhadap Inovasi Pengolahan Limbah Serabut Kelapa Menjadi *Cocopillow* di Desa Tirtorahayu



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Skripsi.
- Tondok, A.R. 1999. Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan. Prosiding Seminar Kemitraan Usaha Perkebunan. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Kanisius. Yogyakarta.
- Walgito, B. 2004. Pengantar Psikologi Umum. ANDI. Yogyakarta.



STRATEGI PEMBERDAYAAN SANTRI PESANTREN KAHUDUL ULUM PENAJUNG DESA BOJONGSARI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

Ratna Widiyati

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Pesantren sebagai lembaga pendidikan pertama yang ada di Indonesia telah menunjukan kiprahnya tidak hanya sebagai tempat menuntut agama saja lebih dari itu pesantren telah mengkiprakan dirinya juga sebagai agen penggerak ekonomi khususnya kepada para santri yang belajar dalam pesantren tersebut. Pesantren memberikan bekal ketrampilan dan kemandirian Agar nantinya mereka benar-benar bisa mandiri dan dapat memenuhi kebutuhannya ketika sudah terjun kedalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pesantren khaudul ulum penajung desa Bojongsari alian, dalam mengembangkan serta meningkatkan bakat dan minat dari tiap potensi yang dimiliki serta mengetahui hasil dari pemberdayaan yang dilakukan pesantren kepada santrinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pengambilan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan pengambilan dokumen dan sebagai informan adalah pak Kyai, pengurus pesantren, santri dan alumni. Pengambilan lokasi penelitian adalah pesantren khaudul ulum penajung desa Bojongsari Alian kabupaten kebumen. Hasil penelitian menunjukan (1) pesantren memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para santri untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan berbagai variasi kegiatan. (2) Pemberdayaan yang dilakukan pesantren memberikan dampak positif terciptanya kemandirian para santri dan penelitian ini memberikan saran kepada pesantren bahwa kiranya santri terus mendapat dorongan dan bimbingan dari para pengurus pesantren agar mereka benar-benar dapat mandiri apabila nanti sudah pulang ke daerah masing-masing.

Kata kunci: Strategi, Pemberdayaan, Pesantren

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan pertama di Indonesia, sejak awal kelahirannya pesantren tumbuh dan berkembang tersebar di berbagai daerah. Menurut A'la Abd (2006) mengatakan Pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman yang berada di tengah-tengah masyarakat, dan sangat kental dengan karakteristik Indonesia sekaligus mengajarkan moralitas luhur dan disandingkan dengan kearifan lokal, dan pondok pesantren disebut sebagai lembaga pendidikan islam oleh masyarakat karena lembaga ini berupaya menanamkan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat.



Pesantren sendiri menurut Zamakksyari Dofier (1938) adalah tempat belajar para santri. Pondok pesantren yang awalnya sebagai suatu sistem pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena sejak awalpun pesantren tumbuh bersama masyarakat khususnya adalah masyarakat pedesaan, sekaligus sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lebih kedepan harapanya pesantren selain sebagai tempat belajar agama juga sebagai tempat yang juga memberika variasi dalam membekali santrinya serta memberikan alternatif dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada era globalisasi ini pesantren harus menunjukan daya tahannya dalam mengemban amanah sebagai lembaga agama sekaligus sebagai lembaga sosial, lebih dari sekedar lembaga agama pesantren juga seharusnya menyiapkan bekal untuk para santrinya untuk hidup di era global saat ini. Pesantren dihadapkan dalam permasalahan baru yaitu adanya MEA (Masyarakat Ekonomi Asian), dengan adanya ini pesantren dipertanyakan bagaimana kiat dan strategi yang akan diambil pesantren untuk mempersiapkan para santrinya dalam menghadapi arus global serta adanya masyarakat Ekonomi Asia ini

Untuk bisa bertahan di arus global kiranya perlu strategi Pemberdayaan kepada santri dengan mengoptimalkan potensi serta kreatifitas. Diharapkan nantinya santri akan mempunyai kemandirian dan pada akhirnya santri mampu mensejahterakan dirinya serta lingkungan disekitarnya. Strategi sendiri menurut Anwar Arifin (1989) adalah sebagai keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Lucie Setiana (2004) dalam bukunya Teknik Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pemberdayaan mengacu pada kata Empowerment sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto (1996) pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya tidak hanya ekonomi meningkat namun harkat martabat dirinya dan rasa percaya diri

Menurut Islam sendiri pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti, hal ini sejalan dengan gerakan islam itu sendiri sebagai agama gerakan



atau perubahan. Nanih dan Agus Syafe'i (2001) harapannya nanti setelah selesai dari pesantren santri selain ahli agama juga akan mendapatkan penghidupan yang baik dengan bekal yang telah dipelajari pada saat tinggal di pondok pesantren.

Pesantren Khaudul Ulum Penajaung adalah pesantren tradisioanal yang mana selain memberikan ilmu-ilmu agama pesantren ini juga membekali santrinya dengan ketrampilan life skill dan memberikan kebebasan kepada santrinya unntuk memilih sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya kemudian dikembangkan dengan kegiatan yang ada di pesantren tersebut. Diharapkan nantinya santri akan mendapatkan penghidupan serta kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi para santrinya, pesantren memberikan panduan dalam belajar di pesantren, yaitu dengan cara menggabungkan atau memadukan pembelajaran yang ada antara ilmu agama dan ilmu umum serta adanya praktik secara langsung yang dilakukan oleh para santri. Dalam hal ini tentunya banyak strategi yang diberikan pesantren untuk melakukan proses pendidikan kepada santri. Dari latar belakang tersebut penulis memberikan judul penelitian ini dengan "Strategi pemberdayaan Santri Pesantren Khaudul Ulum Penajung, Desa Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen".

METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan prespektifnya dalam dunia, dari segi konsep, prilaku, presepsi, dan persoalan manusia yang teliti. Lexy J. Moleong (2007). Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud kan untuk mengungkap gejala secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya), melalui pengumpulan data sebagai latar alami sebagai sumber langsung. Mad Tanzeh (2007). Jadi hasil penelitian kualitatif data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan perilaku tidak



dituangkan dalam bentuk angka atau statistik. Melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi dan hasil penelitian berupa teks naratif Margono (2009).

Pada penelitian ini, desain penelitian yang penulis gunakan adalah dengan memakai model studi lapangan (*Field research*), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Desain penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Subjek dari penelitian ini adalah pak kyai Pesantren Khaudul Ulum, para pengurus Pesantren Khaudul Ulum, para santri serta para alumni pesantren. Sedangkan Objeknya adalah Pemberdayaan santri Pesantren Khaudul Ulum Penajung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi kemudian teknik analisis yang kita gunakan adalah deskriptif kualitatif yang artinya data yang peneliti peroleh dari lapangan disajikan dalam bentuk apa adanya tanpa melakukan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Khaudul Ulum Penajung Desa Bojongsari, Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, adalah pesantren yang telah hampir 40 tahun bersama dengan membangun masyarakat dengan basis agamanya, namun di tengah arus global dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks pesantren juga tergerak untuk turut serta membangun santrinya menjadi santri yang penuh kreatif dan mempunyai daya saing ketika terjun ke dalam masyarakat.

Santri Pesantren Khaudul Ulum Penajung terbagi atas dua kategori yang pertama adalah mereka yang selain mencari ilmu agama di pesantren namun siangannya mereka sekolah di sekolah-sekolah umum ataupun sekolah yang dimiliki pesantren, mereka terdiri dari jenjang pendidikan SD sampai perkuliahan. Sedangkan kategori yang lain adalah mereka yang hanya nyantri di Pesantren Khaudul Ulum Penajung namun tanpa masuk sekolah umum jadi murni belajar di pesantren.



Melihat adanya tantangan bagi santri dalam arus global, terdapat beberapa strategi yang dilakukan Pesantren Khaudul Ulum Penajung untuk membekali santrinya dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh santri untuk dijadikan bekal bagi masa depan mereka, jadi setelah mereka selesai belajar di pesantren mereka juga bisa bertahan dan mencari pekerjaan atau mengembangkan usaha dengan ketrampilan yang mereka miliki.

Strategi yang dilakukan pesantren terbagi atas 3 hal, yaitu: (1) pemberian modal (2) pelatihan, dan (3) Pendampingan. Pemberian modal diberikan untuk menjalankan kopentren yang mana modal diberi oleh pesantren untuk mengelola kopentren yang mana santrilah yang mengurus semuanya mulai dari pembelanjaan sampai pengelolaan. Untuk kegiatan pelatihan memang mendatangkan guru dari luar seperti menjahit, dekorasi dan lain sebagainya yang memang memerlukan keahlian khusus untuk diajarkan kepada santrinya. Kegiatan pendampingan dituangkan dalam bentuk kegiatan seperti berkebun dan beternak (memilihara unggas) yang semuanya dilakukan berkelompok dan setiap kelompok melakukan kegiatannya sendiri seperti contoh ketika berkebun mereka menanam sayur di kebun atau ladang yang memang disediakan pesantren melalui dari menanam, merawat dan memanen sendiri dilakukan oleh anak-anak bersama-sama satu kelompok mengolah hasilnya.

Semua santri dibekali dengan keterampilan sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, namun karena waktu yang padat untuk melakukan pembelajaran di pesantren. Kebanyakan santri yang mengikuti kegiatan ini adalah santri yang mereka tidak mengikuti pendidikan formal, jadi mereka mempunyai waktu luang pada siang hari untuk meningkatkan potensi mereka tanpa mengganggu kewajibannya untuk belajar ilmu agama di pesantren.

Hasil dari kegiatan pemberdayaan santri yang dilakukan Pesantren Khaudul Ulum Penajung ini ternyata memberikan dampak positif kepada santri. Dari hasil yang didapat sebagai contoh santri putri bisa menjahit sendiri bajunya tanpa harus pergi ketukang jahit, sedangkan dalam bidang peternakan santri putra bisa menjual sendiri hewan peliharaannya seperti ayam untuk



digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. lebih dari itu mereka yang sudah menjadi alumni juga merasakan dampak dari pemberdayaan yang dilakukan pesantren khaudul ulum penajung, salah satunya Pak Nurudin salah satu alumni pesantren khaudul ulum penajung yang kini memiliki warung di rumahnya mengatakan bahwa dia belajar berwirausaha ketika waktu nyantri, bertahun-tahun dia mengelola koperasi pesantren dan itu memberikan ilmu yang banyak untuk bisa membuka warung. Dan masih banyak alumni yang lain yang ketika pulang mereka juga membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

PENUTUP

Pesantren Khaudul Ulum Penajung ternyata mempunyai strategi dalam memberdayakan santrinya untuk menghadapi arus global yaitu dengan cara meningkatkan potensi para santri dan memberikan pelatihan soft skill. Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan Pesantren Khaudul Ulum Penajung terhadap para santrinya ternyata memberikan dampak yang sangat positif yaitu terciptanya ketrampilan para santri serta kemandirian dalam berkarya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin. 1989. Strategi Komunikasi. Bandung. Amico
- Edi Suharto. 2000. Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan, Dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Rafika Adetama
- Jubaedi. 2007., Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Yogyakarta Pustaka Pelajar
- Lucie Setiana. 2004. Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lexy J. Moleon. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mad Tanzeh. 2009 Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Teras
- Margono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta Teras
- Mubyarto. (1996). Mubyarto Ekonomi Rakyat Program IDT Dan Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media
- Naneh Dan S'afei. 2001. Pengembangan Masyarakat Islam Dari Strategi Sampai Tradisi. Bandung Remaja Rosdakarya
- Zamakhshari Dhofier. 1938. Tradisi Pesantren Pandangan Hidup Kyai Mengenai Visinya Terhadap Masa Depan Indonesia. Jakarta : LP3S



RESPONS PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN TERHADAP PROGRAM UPAYA KHUSUS PADI JAGUNG DAN KEDELAI DI KABUPATEN SLEMAN

Ani Dwi Wimatsari, Subejo, Roso Witjaksono

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
anidwi94@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan program Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) merupakan program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dan diimplementasikan oleh Kementerian Pertanian, TNI, lembaga riset pertanian serta perguruan tinggi yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada padi, jagung dan kedelai pada tahun 2017. Implementasi program UPSUS PAJALE adalah dengan dilakukannya pendampingan kepada petani oleh penyuluh pertanian, babinsa dan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mengetahui : 1) Mengetahui tingkat respons penyuluh pertanian lapangan terhadap program UPSUS PAJALE; dan 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respons penyuluh pertanian lapangan terhadap program UPSUS PAJALE. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik melalui survei. Pengambilan sampel kabupaten dan kecamatan (UPT BP3K) dilakukan dengan metode purposive, sedangkan pengambilan sampel penyuluh pertanian lapangan dilakukan dengan metode sensus. Total sampel sebanyak 66 penyuluh pertanian, yaitu penyuluh pertanian TPH (Tanaman Pangan dan Hortikultura). Data dianalisis uji proporsi serta analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat respons penyuluh pertanian terhadap program UPSUS PAJALE dalam kategori tinggi dengan respons pengetahuan sebesar 69,97%, respons sikap sebesar 75,65%, dan respons perilaku sebesar 81,89%. Persepsi penyuluh, motivasi penyuluh dan peran mahasiswa berpengaruh positif terhadap respons penyuluh dalam pelaksanaan program UPSUS PAJALE. Faktor yang tidak berpengaruh nyata terhadap respons penyuluh dalam program UPSUS PAJALE adalah umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja penyuluh, status penyuluh, dan peran babinsa.

Kata kunci: Respons, penyuluh pertanian lapangan, UPSUS PAJALE, Kabupaten Sleman

PENDAHULUAN

Swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2017 merupakan salah satu program utama yang diusung oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program ini ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program UPSUS (Upaya Khusus) pada tanaman pangan, yaitu padi, jagung dan kedelai (PAJALE).



UPSUS PAJALE ini dilaksanakan melalui pendampingan secara langsung oleh penyuluh, babinsa dan mahasiswa terhadap petani (Anonim, 2015).

Penyuluhan dapat didefinisikan sebagai pemberian penerangan untuk menolong seseorang agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri, dapat juga diartikan sebagai proses perubahan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dalam diri sendiri atau masyarakat (Van den Ban dan Hawkin, 1999; Mardikanto, 1996). Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah salah satu tokoh sentral dalam kegiatan penyuluhan. PPL sebagai tokoh yang berperan untuk menjadi komunikator pembangunan diharapkan dapat bermain multiperan. Oleh karena itu, kelangsungan program penyuluhan di lapangan sangat dipengaruhi oleh peningkatan respons atas kerja atau tugas dari PPL. Hal ini disebabkan karena terkait erat dengan motivasi dan kepuasan kerja yang dapat diperoleh oleh penyuluh (Hubeis, 2007).

Dalam melaksanakan tugas di dalam penyuluhan dan tanggapan (respons) terhadap pekerjaannya, penyuluh pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) kemampuan penyuluh, 2) faktor motivasi, 3) sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan, serta 4) budaya kerja (Siregar dan Saridewi, 2010).

Respons adalah suatu tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Tanggapan tersebut timbul dari sebuah interpretasi seseorang yang ditangkap oleh indra (Novia, 2011). Dalam dunia kerja, respons atau tanggapan pekerja terhadap pekerjaannya dapat mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya umur. Pekerja tua dianggap kurang luwes menerima suatu inovasi namun memiliki peluang yang kecil untuk melakukan pengunduran diri karena etos kerja serta komitmen yang tinggi terhadap mutu kerja (Robins, 2003 dalam Sari, 2013).

Respons atau tanggapan pekerja terhadap pekerjaannya juga dapat ditentukan melalui jenis kelamin dari pekerja itu sendiri. Hal ini disebabkan karena jenis kelamin menentukan keagresifan dalam pencapaian tugas (kesuksesan), atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin akan menentukan respons terhadap pencapaian tujuan dalam pekerjaan, di mana



pekerja pria (laki-laki) cenderung memiliki motivasi yang tinggi terhadap keberhasilan ekonomi, otonomi dan prestasi (Arnania-Kepuladze, 2010). Begitu halnya dengan pendidikan, di mana pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang melalui cara yang sistematis dan terorganisir yang akan mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap suatu inovasi. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki pekerja (dalam hal ini penyuluh), maka akan semakin baik persepsi penyuluh akan perannya (tugas dan fungsinya sebagai penyuluh) (Notoatmodjo, 2003 dalam Sunaryo, 2004; Sari, 2013; dan Narso *et al.*, 2012)

Menurut Bahua *et al.* (2010), bahwa masa kerja seorang penyuluh pertanian berpengaruh nyata pada peningkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masa kerja penyuluh mempengaruhi respons penyuluh terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Hubeis (2007), dapat diketahui bahwa status penyuluh memiliki korelasi positif dengan produktivitas kerja atau dengan kata lain bahwa status penyuluh berkorelasi positif dengan respons penyuluh terhadap pekerjaannya yang diukur dalam satuan produktivitas kerja.

Selain faktor-faktor tersebut, motivasi juga merupakan fungsi dalam menentukan suatu kinerja pada pekerja (tanggapan pekerja dalam pekerjaannya), di mana kinerja (respons terhadap pekerjaan) dalam suatu organisasi merupakan fungsi dari motivasi, kemampuan, persepsi, ciri-ciri personalitas, sistem organisasi (struktur organisasi, kepemimpinan, sistem imbalan) dan sumberdaya (fasilitas fisik); di mana persepsi bersama sikap, kebutuhan, dan keputusan akan tercermin ke dalam motivasi (Wahjosumidjo, 1987; Arnold dan Feldman, 1986 dalam Sari, 2013). Teori motivasi yang tepat digunakan dalam dunia kerja dan organisasi adalah teori McClelland karena teori ini menjelaskan akan kebutuhan manusia yaitu bahwa manusia memerlukan kebutuhan akan afiliasi, kekuasaan, dan prestasi atau pencapaian tujuan (Hariadi, 2011).

Sebagai salah satu program baru, UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman perlu dikaji lebih lanjut mengenai respons pelaksana program tersebut, yaitu



penyuluh. Terutama di dalam hal faktor yang mempengaruhi dan tingkat respons yang ada. Apabila dapat diketahui tingkat serta faktor yang mempengaruhi respons, akan dapat ditentukan langkah maupun kebijakan untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas program serta kualitas kerja pelaksana demi pelaksanaan program yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi respons penyuluh pada program UPSUS PAJALE, dan 2) mengetahui tingkat respons penyuluh pada program UPSUS PAJALE.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini meliputi studi pustaka, pra survei, pembuatan proposal penelitian, penyusunan kuesioner, penelitian lapangan, tabulasi data, analisis data, pembuatan laporan penelitian, dan pembuatan karya ilmiah. Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode dasar yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan metode kuantitatif secara survei. Penelitian dilakukan pada suatu populasi penyuluh pertanian TPH (Tanaman Pangan dan Hortikultura) di Kabupaten Sleman dan data yang dianalisis adalah data dari kegiatan sensus, dengan total sampel 66 responden penyuluh TPH. Data dianalisis menggunakan analisis *multiple regression* dengan program SPSS untuk menjawab tujuan 1, serta uji proporsi untuk mengetahui faktor yang berpengaruh dan tingkat respons penyuluh untuk menjawab tujuan 2. Hubungan antarvariabel adalah sebagai berikut (Sugiono, 2014):

$$Y = \beta_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots b_9X_9 \quad (1)$$

Di mana Y = respons penyuluh terhadap program UPSUS PAJALE; β_0 = konstanta; b_1 - b_6 = koefisien regresi; X_1 - X_9 = usia penyuluh, jenis kelamin penyuluh, pendidikan penyuluh, masa kerja penyuluh, status penyuluh, motivasi penyuluh, persepsi penyuluh, peran mahasiswa dan peran babinsa.

Uji proporsi yang digunakan yaitu dapat diketahui melalui rumus (Dixon and Massey, 1969):



$$Z_{hit} = \frac{\frac{x}{n} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \quad (2)$$

Di mana x = jumlah sampel penyuluh dengan respons tinggi; n = jumlah sampel; p_0 = proporsi populasi (50%)

Variabel diukur dengan menggunakan skala likert (untuk variabel motivasi, persepsi, peran mahasiswa dan peran babinsa), dalam skala *Dummy* (untuk variabel jenis kelamin dan status penyuluh), dalam satuan tahun (untuk variabel usia, masa kerja dan pendidikan penyuluh).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respons Penyuluh Pertanian terhadap Program UPSUS PAJALE

Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi respons penyuluh pertanian lapangan terhadap program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman. Melalui hasil analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respons Penyuluh Pertanian terhadap Program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman (Model 1)

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Sig	Keterangan
1.	Umur (X1)	-0,461	-1,135	0,261	NS
2.	Jenis Kelamin (X2)	6,994	1,523	0,133	NS
3.	Pendidikan (X3)	1,183	0,920	0,361	NS
4.	Masa Kerja Penyuluh (X4)	0,303	0,777	0,441	NS
5.	Status Penyuluh (X5)	2,794	0,328	0,744	NS
6.	Motivasi (X6)	0,603	2,798	0,007	*
7.	Persepsi (X7)	2,741	2,827	0,007	*
8.	Peran Mahasiswa (X8)	0,533	1,522	0,134	NS
9.	Peran Babinsa (X9)	-0,372	-1,601	0,115	NS
	Konstanta	96,890			
	R Square	0,403			
	Adjusted R Square	0,307			
	F Hitung	4,203			



F Tabel 1,746

Keterangan :

* : Signifikan pada $\alpha = 10\%$

NS : Not Significant atau tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber : Analisis Data Primer, 2016

Untuk menghilangkan faktor-faktor yang tidak signifikan, digunakan metode *backward* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Respons Penyuluh Pertanian Lapangan (Model 6)

No	Variabel	Koefisien Regresi (B)	t Hitung	Sig	Keterangan
1.	Motivasi (X6)	0,471	2,485	0,016	*
2.	Persepsi (X7)	2,920	3,189	0,002	*
3.	Peran Mahasiswa (X8)	0,636	1,869	0,066	*
4.	Peran Babinsa (X9)	-0,340	-1,559	0,124	NS
	Konstanta	106,283			
	R Square	0,349			
	Adjusted R Square	0,306			
	F Hitung	8,175			
	F Tabel	2,791			

Keterangan :

* : Signifikan pada $\alpha = 10\%$

NS : Not Significant atau tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber : Analisis Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 2., dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel *independent* yang berpengaruh positif terhadap respons penyuluh pertanian, yaitu motivasi, persepsi dan peran mahasiswa. Selain itu, faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap respons penyuluh adalah persepsi karena memiliki nilai koefisien regresi terbesar. Hal ini sesuai dengan hal yang dikemukakan oleh Wahjosumidjo (1987), bahwa persepsi penyuluh bersama sikap, kebutuhan, dan keputusan akan tercermin ke dalam motivasi, sehingga apabila penyuluh memiliki persepsi yang baik pada suatu program, maka penyuluh juga akan cenderung untuk memiliki motivasi yang tinggi di dalam melaksanakan program tersebut, di mana sikap, pengetahuan dan perilaku merupakan komponen yang terdapat dalam respons.



Tingkat Respons Penyuluh Pertanian terhadap Program UPSUS PAJALE

Berdasarkan penelitian, juga dapat diketahui tingkat respons penyuluh pertanian terhadap program UPSUS PAJALE. Setelah melalui uji proporsi dengan menggunakan rumus Z_{hitung} dimana $\alpha=0,1$ (10%), $n=66$, $x=66$, $p_o=50\%$; dapat diketahui bahwa nilai Z_{hit} adalah sebesar 8,124 dengan nilai Z_{tabel} adalah 1,282. Hal tersebut membuktikan bahwa lebih dari 50% penyuluh pertanian memiliki respons yang tinggi terhadap program UPSUS PAJALE.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata dan positif pada respons penyuluh pertanian lapangan terhadap program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sleman adalah motivasi penyuluh, persepsi penyuluh dan peran mahasiswa. Selain itu juga dapat diketahui bahwa sebanyak lebih dari 50% penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Sleman memiliki respons yang tinggi pada program UPSUS PAJALE. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan respons penyuluh terhadap program UPSUS PAJALE serta untuk mensukseskan program UPSUS PAJALE pada periode selanjutnya yaitu keberlanjutan pendampingan tidak hanya oleh penyuluh, namun juga mahasiswa dan babinsa serta upaya penyediaan sarana produksi serta alsintan yang tepat waktu, mutu serta sesuai dengan kondisi di lapangan (spesifik lokasi), dengan terlebih dahulu melakukan survei lokasi penerima bantuan alsintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi Sentra Padi, Jagung dan Kedelai. <<http://cybex.pertanian.go.id/files/kp/Pedoman%20umum%20pengawasan%20&%20Pendampingan%20Penyuluh%20di%20lokasi%20PAJALE.pdf>>. Diakses pada 15 September 2015.
- Arnania-Kepuladze, T.(2010). Gender stereotypes and gender feature of job motivation: differences or similarity?. Problems and Perspective in Management 8 (2): 84-93.
- Bahua, M. I., A. Jahi, P. S. Asngari, A. Saleh dan G. P. Purnaba. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian dan dampaknya



- pada perilaku petani jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agropolitan* 3 (1): 293-303.
- Dixon, W. J. and F. J. Massey. (1969). *Introduction to Statistical Analysis*. McGraw-Hill, Kogakusha.
- Hariadi, Sunarru Samsi. (2011). *Dinamika Kelompok; Teori dan Aplikasi untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hubeis, A.V. S. (2007). Motivasi, kepuasan kerja dan produktivitas penyuluh pertanian lapangan; kasus Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penyuluhan* 3 (2) : 90-99.
- Mardikanto, Totok. (1996). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Narso, A. Saleh, dan P. Mudjiono. (2012). Persepsi penyuluh pertanian lapangan tentang perannya dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten. *Jurnal Penyuluhan* 8 (1) : 92-102.
- Sari, Awal Maulid. (2013). *Kinerja Penyuluh Pertanian dalam Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Bali di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. Tesis.
- Siregar, A. N. dan T. R. Saridewi. (2010). Hubungan antara motivasi dan budaya kerja dengan kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian* 5 (1) : 24-35.
- Sugiyono. (2014). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sunaryo. (2004). *Psikologi untuk Keperawatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Van den Ban, A. W. dan H. S. Hawkins. (1999). *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius, Yogyakarta.
- Wahjosumidjo. (1987). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.



STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PAPUA

Detia Tri Yunandar

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana UGM
detiatri@gmail.com

ABSTRAK

Papua yang meliputi Papua dan Papua Barat telah mengalami pergeseran pola konsumsi pangan pada masyarakatnya. Apabila tidak diantisipasi dengan tepat, pergeseran ini dapat berdampak pada terjadinya kerawanan pangan. Untuk itu, perlu adanya strategi penyuluhan pertanian yang mampu mendukung penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Penelitian bertujuan untuk merumuskan strategi penyuluhan pertanian untuk mendukung penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua berdasarkan analisis lingkungan strategis penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada September-Desember 2014. Metode dasar penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian 82 orang meliputi penyuluh, kontak petani, dan pejabat yang membidangi penyuluhan. Data dianalisis dengan analisis strategik menggunakan SWOT analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dapat mendukung penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua meliputi: (1) Perubahan mind-set penyuluhan pada tataran pengambil keputusan; (2) Penyelenggaraan penyuluhan berbasis kearifan lokal (local wisdom) dan diversifikasi pangan; (3) Penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan penyuluhan; (4) Pendampingan berkelanjutan bagi petani asli Papua; dan (5) Penguatan peranan tokoh agama dalam penyuluhan bagi petani asli Papua.

Kata kunci: penyuluhan pertanian, strategi, ketahanan pangan.

THE STRATEGIES OF AGRICULTURAL EXTENSION IN FOOD SECURITY STRENGTHENING IN PAPUAN COMMUNITY

ABSTRACT

The community of Papua, which includes Papua and West Papua, have experienced a shift in food consumption patterns. If it is not anticipated appropriately, the shift has an impact on the occurrence of food insecurity. It required a strategy of agricultural extension that is capable of supporting the strengthening of food security in the community of Papua. The study aimed to formulate the strategies of agricultural extension that capable of supporting the strengthening of food security in the community of Papua based analysis of the strategic environmental of agricultural extension and food security in the community of Papua. Research was conducted in September-December 2014. The basic method of research was descriptive with quantitative approach. The research sample were includes 82 of extension agents, contact farmers and officials that



responsible in agricultural extension program. Data were analyzed by strategic analysis using SWOT analysis. The results showed that the agricultural extension strategies compable for strengthening the Papuan community food sceurity were formulated: (1) The change in mind-set of extension at the level of decision makers; (2) The extension based on local wisdom and food diversification; (3) Strengthening of extension institutional, infrastructure, human resources, and finance; (4) Continuous assistance to Papuans farmers; and (5) Strengthening the role of religious leaders in assistance to Papuans farmers.

Keywords: *agricutural extension, strategies, food security.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan terus menjadi isu strategis, baik di tingkat internasional, nasional, bahkan daerah. Fakta tersebut menunjukkan vitalnya ketahanan pangan secara global. Masyarakat Papua baik di Papua Barat maupun Papua telah mengalami pergeseran pola konsumsi pangan. Pergeseran ini dapat berdampak pada ketahanan pangan masyarakat Papua. Fakta menunjukkan telah teridentifikasinya indikator-indikator yang apabila tidak diantisipasi secara tepat dan cepat, akan mengarah pada keadaan kerawanan pangan pada masyarakat Papua, di antaranya yaitu: (1) Pergeseran pola konsumsi pangan pokok dari sagu dan ubi-ubian menjadi beras. Saat ini tingkat konsumsi beras masyarakat Papua telah mencapai 80 kg per kapita per tahun; (2) Hasil penelitian Ariningsih dan Rachman (2008) menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah kawasan timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibandingkan wilayah kawasan barat Indonesia dan daerah perkotaan; dan (3) Pengalaman empiris menunjukkan terjadinya kasus kelaparan di beberapa daerah di Papua, seperti di Yahukimo, Jayawijaya, dan Puncak Jaya. Indikator penting lainnnya yang mengarah pada keadaan rawan pangan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Husodo (2006) mengemukakan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas pangannya. Tidak ada perbaikan kualitas SDM negara ini secara signifikan tanpa perbaikan kualitas gizi makanan sehari-hari masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat dan Papua sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 masing-masing berada pada peringkat ke-30 dan 33 dari 33 provinsi di Indonesia (BPS,



Susenas 2005-2009). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM Papua dan Papua Barat, yang dalam hal ini faktor penyebabnya sangat berkaitan dengan keadaan ketahanan pangan masyarakat Papua.

Penyuluhan pertanian seharusnya memiliki peranan strategis dalam akselerasi penguatan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu secara langsung menyentuh masyarakat petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Selanjutnya ketahanan pangan sebagai sistem yang terintegrasi terdiri atas berbagai subsistem terutama ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut, dan interaksi yang sinergis antara ketiga subsistem tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan penyuluhan pertanian.

Dalam rangka menguatkan peranan penyuluhan dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Papua, maka perlu adanya strategi penyuluhan pertanian yang mampu mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Untuk itu, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian yaitu bahwa sampai dengan saat ini belum ada rumusan strategi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua yang secara khusus diarahkan pada upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan merumuskan strategi penyuluhan pertanian yang mampu mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian 82 orang responden meliputi 20 orang penyuluh PNS di BPP (Warmare, Prafi, Masni, Sidey, dan Angkasa Mulyono), 15 orang THL-TBPP, 3 orang penyuluh PNS di kabupaten, 40 orang kontak petani dan pengurus kelompok tani, dan 4 orang pejabat yang membidangi penyuluhan. Sampel



diambil dengan teknik *proporsional random sampling*. Data dianalisis dengan analisis strategik menggunakan SWOT analysis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Internal Lingkungan Strategis

Faktor internal lingkungan strategis penyelenggaraan penyuluhan dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua terdiri atas faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Hasil analisis faktor internal tersebut tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Faktor Internal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

No	Kekuatan (S)	Rating	Bobot	Bobot Skor
1	Penyuluhan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal	3,50	0,080	0,28
2	Materi penyuluhan mendukung kearifan lokal	3,50	0,080	0,28
3	Materi mendukung diversifikasi pangan lokal	3,50	0,090	0,32
4	Dukungan kelembagaan di tingkat distrik dan kabupaten	3,25	0,080	0,26
5	Penyuluhan meliputi sasaran petani asli Papua	3,25	0,090	0,29
6	Tokoh agama berperan dalam penyuluhan	3,75	0,080	0,30
Total S			0,500	1,73
Kelemahan (W)				
1	Jumlah penyuluh terbatas	3,50	0,100	0,35
2	Upaya pengembangan kualitas penyuluh minim	3,75	0,100	0,38
3	Fasilitas penyuluhan kurang memadai	2,75	0,100	0,28
4	Pembiayaan penyuluhan sangat terbatas	2,75	0,100	0,28
5	Pendampingan bagi petani asli Papua kurang intensif	2,75	0,100	0,28
Total W			0,500	1,55
Total Internal			1,000	3,28
Selisih Internal (S-W)				0,18

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil analisis faktor internal, bobot skor kekuatan adalah 1,73 dan bobot skor kelemahan 1,55. Selisih antara bobot skor kekuatan dengan kelemahan adalah sebesar 0,18. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua memiliki kekuatan yang lebih besar dari kelemahan. Artinya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih dapat mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua khususnya di daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.



Analisis Faktor Eksternal Lingkungan Strategis

Faktor eksternal lingkungan strategis penyelenggaraan penyuluhan dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua terdiri atas faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman. Hasil analisis faktor eksternal tersebut tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Faktor Eskternal Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

No	Peluang (O)	Rating	Bobot	Bobot Skor
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006	2,75	0,125	0,34
2	Dukungan pihak pengambil keputusan	2,50	0,125	0,31
3	Potensi pangan lokal	4,00	0,125	0,50
4	Dukungan pembiayaan penyuluhan dari pusat	3,00	0,125	0,38
Total O			0,500	1,53
Ancaman (T)				
1	Kebijakan otonomi daerah	3,50	0,250	0,88
2	Pergeseran pola konsumsi pangan lokal	2,25	0,250	0,56
Total T			0,500	1,44
Total Eksternal			1,000	2,97
Selisih Internal (O-T)				0,09

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal seperti tercantum pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa bobot skor peluang adalah sebesar 1,53 dan bobot skor ancaman adalah 1,44. Selisih antara bobot skor peluang dengan ancaman adalah sebesar 0,09. Hasil demikian menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian memiliki peluang yang baik dalam mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Peluang yang ada lebih dominan dibandingkan dengan ancamannya.

Strategi Penyuluhan Pertanian untuk Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan berarti akses bagi semua penduduk atas makanan yang cukup untuk hidup sehat dan aktif (FAO, 1993, dalam Kartasasmita, 2005). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 68 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Definisi tersebut menunjukkan bahwa target akhir dari ketahanan pangan adalah pada tingkat rumah tangga. Dalam hal ini, Kartasasmita (2005) mengemukakan bahwa



ketahanan pangan nasional merupakan agregat dari ketahanan pangan rumah tangga, sehingga strategi pembangunan pangan di masa depan disusun berdasarkan pengertian tersebut.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal lingkungan strategis penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Papua, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan penyuluhan memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Artinya, penyuluhan pertanian dapat memberikan peran yang strategis dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Swanson dan Rajalahti (2010) mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) tujuan utama pembangunan pertanian, yaitu: (1) *Achieving National Food Security*; (2) *Improving Rural Livelihoods*; dan (3) *Improving Natural Resource Management*. Dan penyuluhan memiliki peranan nyata dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, khususnya melalui peranan penyuluhan dalam: Transfer teknologi, terutama menyangkut pangan pokok; Melatih petani menerapkan diversifikasi sistem usaha taninya; Melatih petani agar mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan; dan Memberdayakan petani dan kelompoknya. Selanjutnya Mahela dan Sutanto (2006) mengemukakan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan; subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata; dan subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Interaksi yang sinergis antara ketiga subsistem tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan penyuluhan pertanian.



Hasil analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan dan ancaman, terhadap faktor internal dan faktor eksternal penyelenggaraan penyuluhan dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua, selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi penyuluhan pertanian yang mampu mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua. Strategi yang dapat dirumuskan yaitu: (1) Perubahan *mind-set* penyuluhan pada tataran pengambil keputusan. Langkah awal yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peranan strategis penyuluhan dalam penguatan ketahanan pangan adalah perubahan *mind-set* tentang penyuluhan. Perubahan *mind-set* merupakan bentuk perubahan budaya, sikap mental, perilaku, bahkan keyakinan akademis dan pandangan politis. Fokus perubahan *mind-set* tersebut perlu ditujukan kepada para pengambil keputusan dan generasi mendatang (Krisnamurthi, 2006); (2) Penyelenggaraan penyuluhan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dan diversifikasi pangan; (3) Penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan penyuluhan. Penguatan sumber daya manusia penyuluh merupakan langkah yang sangat penting. Swanson dan Rajalahti (2010) mengemukakan bahwa dalam rangka penguatan sistem penyuluhan, maka perlu upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM penyuluhan; (4) Pendampingan berkelanjutan bagi petani asli Papua; dan (5) Penguatan peranan tokoh agama dalam penyuluhan bagi petani asli Papua.

PENUTUP

Strategi penyuluhan yang dapat mendukung upaya penguatan ketahanan pangan masyarakat Papua meliputi: (1) Perubahan *mind-set* penyuluhan pada tataran pengambil keputusan; (2) Penyelenggaraan penyuluhan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dan diversifikasi pangan; (3) Penguatan kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan penyuluhan; (4) Pendampingan berkelanjutan bagi petani asli Papua; dan (5) Penguatan peranan tokoh agama dalam penyuluhan bagi petani asli Papua.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih, E. dan H.P.S. Rachman. 2008. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 6 No. 3, September 2008 : 239-255.
- Kartasasmita, G. 2005. Ketahanan Pangan dan Ketahanan Bangsa. Disampaikan pada Seminar Pengembangan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal di Bandung, 26 November 2005.
- Krisnamurthi, B. 2006. *"Revitalisasi Pertanian: Sebuah Konsekuensi Sejarah dan Tuntutan Masa Depan"* dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mahela dan Sutanto. 2006. Kajian Konsep Ketahanan Pangan. Jurnal Protein. Volume 13 No. 2 Tahun 2006 : 194-202.
- Swanson, B. E and R. Rajalahti. 2010. Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Washington DC.



RELASI AGAMA DAN PETANI DI DESA KURIPAN KABUPATEN WONOSOBO

Najmu Tsaqib Akhda^{1,2}

¹Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

²Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran, Yogyakarta
email: najmuakhda@gmail.com

ABSTRAK

Studi tentang pedesaan dan aktivitas keseharian masyarakat tidak terlepas dari pengaruh kepribadian dan lingkungan (*personality and environment*). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan pola perilaku dan pandangan hidup adalah faktor agama. Beberapa peran penting agama antara lain agama dapat dijadikan sarana komunikasi untuk menciptakan pertanian dan lingkungan yang berkelanjutan, memotivasi petani untuk terus berusaha dalam bertani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta dapat juga digunakan sebagai gerakan perlawanan atas berbagai ketidakadilan dan penindasan. Perbedaan dengan kajian lain adalah pada lokasi dan pola hubungan antara agama dan petani yang terjadi di Desa Kuripan Kabupaten Wonosobo. Data diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan juga focus group discussion. Secara spesifik studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan keagamaan dan ritual dalam kehidupan petani, serta bagaimana peran kegiatan keagamaan dan ritual yang dilakukan petani.

Kata kunci: agama, ritual, petani, Wonosobo

PENDAHULUAN

Studi tentang pedesaan dan aktivitas keseharian masyarakat tidak terlepas dari teorinya Kurt Lewin (1935) yaitu adanya pengaruh kepribadian dan lingkungan (*personality and environment*). Kepribadian dan lingkungan ini akan membentuk sikap tertentu yang nantinya berpengaruh pada pola perilaku dan pandangan hidup. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan pola perilaku dan pandangan hidup adalah faktor agama. Kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat pedesaan sangat melekat dan ada dalam setiap aktivitas keseharian masyarakat. Kegiatan ritual dan organisasi keagamaan memberikan warna tersendiri bagi masyarakat. Dalam konsep Weber agama mampu dijadikan sebagai motivasi dalam menggerakkan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *protestant ethic* (Weber, 1968). Selain itu dalam konsep komunikasi



pembangunan, agama juga dapat berperan sebagai katalis (*catalyst communicator*) dalam mempercepat proses komunikasi (White, 2004).

Kajian Wuysang (2010) dan Falvey (2005) menunjukkan bahwa teologi dan ekonomi mempunyai hubungan dengan lingkungan serta perilaku manusia. Motivasi teologi dan ekonomi mampu menggerakkan masyarakat untuk bekerja dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya, etos kerja dan motivasi keberhasilan akan berkorelasi positif terhadap produktivitas pertanian (Iskandar, 2002).

Fenomena agama yang menjadi bagian dari motivasi ini dapat dilihat pada masyarakat petani dataran tinggi di Dieng dan Sindoro yang terletak di Kecamatan Garung dan Kejajar. Di tengah krisis lingkungan dan semakin kompleksnya permasalahan pertanian, petani masih terus bertahan mengolah lahan pertanian sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan untuk mereka.

Kajian dalam bidang pertanian ini untuk melengkapi kajian bagaimana kaitannya antara agama dan pertanian. Oleh karena itu tujuan dari kajian ini adalah untuk (1) mengetahui aktivitas keagamaan dan ritual pertanian, dan (2) mengetahui peran agama dalam kehidupan masyarakat petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012 yang meliputi Desa Kuripan dan sekitarnya di Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. Data yang diperoleh dari kajian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, diskusi kelompok (FGD) dan observasi. Wawancara dilakukan secara individu secara detail. Wawancara ini menggunakan metode snowball, dimana narasumber diperoleh dari rujukan masing-masing individu. Sementara FGD dilakukan di rumah warga dengan melibatkan para tokoh masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Keuntungan adanya FGD adalah informasi yang diperoleh bisa dilengkapi satu sama lain sehingga lebih lengkap dan detail. observasi dilakukan untuk mengetahui praktek pertanian dan kegiatan keagamaan di masyarakat.



Desa yang dijadikan lokasi penelitian adalah desa Kuripan Kecamatan Garung dan sekitarnya meliputi Gumelar, Boralan, Garung. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian mempunyai karakteristik masyarakat dan pertanian yang hampir sama. Desa-desa tersebut terletak di lereng gunung Sindoro dan merupakan lahan dataran tinggi. Mayoritas tanaman yang ditanam di daerah ini antara lain tembakau, kentang, kubis, cabai, sawi dan tomat. teknologi yang dipakai dalam mengolah lahan juga masih menggunakan tenaga manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Keagamaan dan Ritual Pertanian Masyarakat Kuripan

Petani mempunyai beragam kegiatan keagamaan baik di lingkup desa maupun di lahan pertanian. Masing-masing rutinitas keagamaan ini mempunyai jenis dan karakter yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai rutinitas keagamaan yang ada di Desa Kuripan dan sekitarnya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Aktivitas keagamaan yang masyarakat ikuti dan selenggarakan, seperti pengajian rutin *selapanan*, *tarekat*, *yasinan*, *genduren*, *tahlilan*, *mujahadah*. Ajaran agama yang petani dapatkan baik dari pengajian, menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan alam. Masyarakat Kuripan mempunyai prinsip hidup untuk bekerja, makan dan ibadah.

Selapanan, merupakan kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap 35 hari sekali menurut kalender Jawa. Misalnya hari Kamis Wage, Selasa Pon dll. Selain pengajian, kegiatan *selapanan* biasanya diisi dengan *tahlilan*, *tarekatan*, atau *mujahadah*. *Tarekat* yang dimaksud di sini adalah jalan yang digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kegiatan ini dilaksanakn secara kelompok yang dibimbing oleh guru *tarekat* atau disebut *Mursyid*. *Tarekat* yang diikuti adalah *Qodiriyah Naqsyabandiyah* dan *Syadzaliyah*.

Genduren, merupakan kegiatan doa tahlil bersama-sama yang bertujuan untuk mendoakan arwah. Biasanya dilakukan setelah ada anggota keluarga yang wafat dan dilaksanakn dalam watu 3 hari, 40 hari, 100 hari, *mendak*, dan *khoul*. Sementara untuk *Yasinan*, juga termasuk mendoakan arwah leluhur, namun



dilakukan rutin tiap minggu . Kegiatannya adalah dengan membaca surat Yasin dalam Al Quran.

Sedangkan ritual pertanian biasanya bersamaan dengan pengolahan pertanian, mulai dari mencangkul sampai memanen. Masyarakat desa Kuripan menyebut ritual ini dengan istilah *slametan*. Tradisi ini dilakukan secara turun temurun. Ritual *slametan* dipimpin langsung oleh tokoh adat, dan diikuti oleh pemilik lahan, serta petani yang punya lahan disekitarnya. Ritual slametan dilaksanakan dalam tiga tahap.

Pertama, necel macul, yaitu ritual yang dilakukan pada saat akan memulai mencangkul lahan. Tahap ini, ritual di mulai pada hari selasa. Selasa artinya *anggara, ngara-ngara*, yang mempunyai makna cepat selesai. Apabila tiba hari Jumat, dan lahan belum selesai dicangkul, maka petani tidak berani melanjutkan, dan menunggu hari berikutnya. Mereka khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan menimpa dirinya. Dalam tahap ini, petani akan membawa *dedeh* (darah yang dibekukan); kikir sapi; *bucu* (tumpeng), yang isinya meliputi *jangan lombok* (sayur cabai), *rese* (ikan asin), *bongkreng* (ampas tahu) dan telur ayam kampung.

Kedua, necel nandur, yaitu ritual yang dilakukan pada saat memulai tanam. Sesaji yang dibawa terdiri dari *sega liwet asin* (nasi liwet asin) yang dibawa bersama katelnya, *rese*, *jangan tempe lombok* (sayur tempe dan cabai), rokok kretek, kinang (daun sirih dan gambir), beras kapiroto (beras diberi kunir), wedang kopi gula jawa (minuman kopi dengan gula aren), air panas, dan membakar menyan.

Ketiga, necel amet, yaitu ritual yang dilaksanakan pada saat panen pertama. Sesaji yang dibawa antara lain: ketan *abang* (makanan dari beras ketan yang ditambah dengan gula aren); ketan putih; *salak* (beras ketan dicampur gula); *bucu*; pepes *katul* (bekatul); dan jajanan pasar, yang meliputi *dawet*, buah-buahan, dan *wajik*. Tujuannya supaya hasil panen dapat melimpah, baik pada saat petik pertama maupun petik berikutnya. Lokasi ritual *necel amet* berada di tengah lahan dan juga disesuaikan dengan weton pemilik lahan. Misalnya, hari Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon, lokasi ritual berada di tengah sebelah selatan,



sedangkan untuk hari Selasa Pon dan Senin Manis, lokasinya berada di tengah sebelah utara.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan petani tidak terlepas dari kehidupan sosial para petani (Adams, *et. al.*, 2009). Petani tidak bekerja secara individu. Ritual dan ibadah dilakukan secara bersama-sama dan membentuk modal sosial yang juga berpengaruh terhadap motivasi petani untuk terus bertani. Ritual dan rutinitas keagamaan membantu petani dalam membentuk waktu dan kondisi yang mengelilingi mereka ke dalam sesuatu yang komprehensif. Kepercayaan beragama juga akan membentuk “ideologi” petani yang akan mempengaruhi pandangan hidup mereka. Petani mempunyai pandangan tersendiri (*world view*) terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi (Lundius and Lundahl, 2000).

Agama dalam Diri Petani

Hubungan antara manusia dengan Tuhan terjadi tidak hanya ketika sedang melaksanakan ibadah, akan tetapi kegiatan keseharian, khususnya bertani, juga merupakan kegiatan yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Tuhan-nya. Dalam hal mengelola tanaman, petani mengelola seoptimal mungkin supaya hasil pertaniannya bagus. Namun, urusan apakah nanti hasilnya baik atau tidak mereka belum dapat memastikan. Petani didefinisikan sebagai individu yang berhenti pada takdir dan bersikap pasif ketika berhadapan dengan harapan (Ortiz, 1971).

Ketika hasil pertanian bagus, akan dikatakan bahwa itu berkah dari campur tangan kekuatan supranatural, dan jika terjadi gagal panen atau bencana, hal tersebut sudah merupakan takdir. Menurut Myren, yang dikutip oleh Ortiz (1971), petani akan menggantungkan apa yang akan terjadi kepada Tuhan atau dengan kata lain mengikuti kehendak Tuhan “*What God wishes*”. Hal ini dilakukan oleh petani sendiri, sebagai respon dari berbagai tantangan yang ada seperti perubahan iklim, hama, penyakit, dan harga panen yang rendah serta ini dilakukan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

Lundius dan Lundahl (2000) menjelaskan bahwa petani memperlakukan alam layaknya perilaku petani di masyarakat. Petani percaya adanya kekuatan



supranatural yang menyebabkan berkah dan kadangkala berupa musibah. Dalam hal ini, ritual maupun kegiatan keagamaan petani menjadi faktor penting dalam kehidupan sehari-hari petani.

Dengan adanya interaksi yang sangat intensif ini, petani menjadi aktor utama dalam relasi agama dengan masyarakat. Menurut Weber, seperti yang dikutip Lundius dan Lundahl, petani dapat dikatakan sebagai "*carrier of religion*". Berbagai fenomena yang ada di lahan baik yang kasat mata ataupun yang nampak, mampu dimaknai oleh petani dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Inilah yang menjadi ruh semangat petani dalam menjalani hidup baik disaat senang maupun susah.

Dalam setiap kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penyiapan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan, dan pengolahan pascapanen, tidak terlepas dari usaha dan harapan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya hasil panen baik. Usaha dan harapan ini diekspresikan oleh petani dalam berbagai ritual, dengan memohon kepada Tuhan supaya apa yang diinginkan terkabul. Selain itu, dalam memelihara tanaman pun, para petani akan selalu ingat akan faktor transenden yang dapat menyebabkan tanaman tumbuh subur serta terbebas dari hama dan penyakit tanaman. Di sinilah faktor kepercayaan dan agama berpengaruh terhadap petani dan aktivitas bertani.

PENUTUP

Dari kajian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kuripan mempunyai beragam aktivitas keagamaan dan beragam ritual dalam pertanian. Kegiatan keagamaan dan ritual pertanian dapat memberi ketenangan dan motivasi kepada petani. Agama sudah melekat pada diri petani sehingga mampu menyikapi beragam fenomena yang terjadi di sekitar mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cristina, Rui M., Walter N., Mark H. (2009). *Amazon Peasant Societies in a Changing Environment. Political Ecology, Invisibillity and Modernity in the Rainforest*. Sao Paulo: Springer Science.
- Falvey, Lindsay. (2005). *Religion and agriculture: Sustainability in Christianity and Buddhism*. Australia: Institute for International Development (IID).
- Iskandar, Otto. (2002). Etos Kerja, Motivasi, dan Sikap Inovatif terhadap Produktivitas Petani. *Makara*. 6 (1), 26-29.
- Lewin, Kurt. (1935). *A Dynamic Theory of Personality: Selected Papers*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Lundius Jan dan M. Lundahl. (2000). *Peasants and religion: a socioeconomic study of Dios Olivorio and the Palma Sola movement in the Dominican Republic*. London: Taylor and Franchis e-Library.
- Ortiz, Sutti. (1971). *Reflections on the Concept of "Peasant Culture" and "Peasant Cognotive System"*, dalam Teodor Shanin, *Peasants and Peasant Societies*, England: Penguin Books Ltd, Harmondsworth.
- White, Robert A. (2004). Is 'Empowerment' the Answer? Current theory and Research on Development Communication. *Gazette*. Vol 66 (1): 7-24
- Weber, Max. 1968. *The Sociology of Religion*. Boston: Beacon Press.
- Wuysang, Angie Olivia. (2010). *Ecotheology in the Crisis of Lake Tondano*. Yogyakarta: Tesis CRCS UGM.



UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING SAPI POTONG MELALUI BIOINDUSTRI INTEGRASI PADI-SAPI DI KABUPATEN BANTUL

Kurnianita Triwidyastuti, Erna Winarti dan Ari Widyastuti

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

Email : k.nieta@gmail.com

ABSTRAK

Sapi potong merupakan salah satu komoditas strategis pertanian yang sampai saat ini masih terus menjadi perhatian menuju swasembada pangan. Salah satu upaya peningkatan daya saing sapi potong adalah melalui bioindustri integrasi padi-sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya peningkatan daya saing sapi potong melalui bioindustri padi-sapi di Kabupaten Bantul. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif di daerah yang berpotensi dalam pengembangan peternakan sapi potong dan pertanian padi sawah, yaitu di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan tokoh kelompok tani tani, kelompok ternak, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, petani dan peternak, sebagai informan. Data dianalisis secara deskriptif. Melalui pertanian bioindustri, diperoleh hasil adanya peningkatan kualitas ternak yang ditandai dengan meningkatnya angka panen pedet 74,4%, meningkatnya bobot lahir pedet menjadi 25 – 33 kg, meningkatnya kesehatan ternak, meningkatnya harga jual pedet. Selain itu, adanya peningkatan nilai tambah bagi produk peternak, berupa pupuk organik padat dan organik cair, serta biogas yang mampu menghemat biaya pembelian gas elpiji sebesar Rp.720.000 – Rp.1.440.00/bulan untuk 18 KK. Dengan penerapan bioindustri di semua kawasan, diharapkan dapat meningkatkan daya saing sapi potong secara nasional.

Kata Kunci : Daya saing, bioindustri, integrasi padi-sapi potong.

EFFORTS TO ENHANCING COMPETITIVENESS OF BEEF CATTLE THROUGH INTEGRATED RICE-CATTLE BIOINDUSTRY IN THE BANTUL DISTRICT

ABSTRACT

Beef cattle is one of the strategic agricultural commodities, which until now still continue to be attentive towards food self-sufficiency. One effort to improve the competitiveness of beef cattle is through integration bioindustry beef-rice. This study aims to assess efforts to increase competitiveness through bioindustry rice beef-cattle in Bantul District. The location determination is done purposively in areas that are potentially in the development of beef cattle farms and paddy fields, namely in the village Wonolelo, Pleret subdistrict, Bantul, Yogyakarta. The method used is qualitative descriptive, using figures of farmer groups, groups of livestock, community leaders, academics, farmers and ranchers, as informants. Data were analyzed descriptively. Bioindustry through agriculture, the results obtained to improve the quality of cattle characterized by improved calf crop indeks of 74.4%, and adding value to the products of farmers, in the form of solid organic fertilizer and organic liquid, as well as biogas that can save the cost



of purchasing LPG from Rp.720.000 – Rp.1.440.00/months for 18 families. With the application of bioindustri in all regions, are expected to improve the competitiveness of beef cattle nationwide.

Keywords: *Competitiveness, bioindustry, integration-beef rice.*

PENDAHULUAN

Untuk menghadapi pasar global, diperlukan peningkatan daya saing berbagai produk, termasuk komoditas peternakan. Sapi potong merupakan salah satu komoditas yang terus menjadi perhatian terutama sebagai sumber penghasil daging di Indonesia.

Sampai saat ini, sapi masih menjadi komoditas unggulan peternak di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di Kabupaten Bantul. Jumlah populasi sapi di Kabupaten Bantul selama periode 2007 – 2014 terlihat berfluktuasi dan mengalami penurunan di tahun 2012 – 2013. Pada tahun 2007, populasi tercatat mencapai 49.655 ekor (19,26% dari populasi di DIY) dan secara bertahap meningkat menjadi 84.423 ekor (23,56% dari populasi di DIY) pada tahun 2011. Namun, setelah itu terjadi penurunan secara signifikan di tahun 2013 hingga menjadi 50.552 ekor (18,53% dari populasi di DIY), akibat banyaknya sapi betina yang dipotong untuk memenuhi lonjakan permintaan daging sapi lokal setelah ada pengurangan impor daging sapi. Dengan berbagai upaya, secara bertahap jumlah tersebut meningkat menjadi 54.640 ekor (17,82% dari populasi di DIY) di tahun 2015 (Badan Pusat Statistik DIY, 2016).

Sebagai komoditas peternakan yang diharapkan memiliki daya saing yang tinggi, diperlukan beberapa upaya penguatan daya saing sapi potong, yang tidak saja hanya berpijak pada kuantitas. Suradisastra dkk., (2014) menyatakan bahwa suatu produk atau komoditas akan memiliki daya saing yang tinggi bila produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sekaligus mampu menggantikan produk lain yang menjadi saingannya. Kondisi demikian mengisyaratkan bahwa suatu produk berdaya saing harus memiliki keunikan tersendiri atau kekhususan yang tidak dimiliki produk lain yang serupa. Keunggulan kreatif yang dapat dimunculkan dapat berupa nilai tambah produk, atau nilai tambah pelayanan kepada para pengguna produk. Keunggulan



tersebut diperoleh antara lain dengan meningkatkan kualitas produk, mempercepat proses produksi, atau kalau memungkinkan mengurangi biaya produksi (The International Strategy, 2010 dalam Suradisastra dkk., 2014). Selain itu, Hadi dkk (2014), menyatakan ada beberapa langkah strategis untuk penguatan daya saing. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian (termasuk peternakan) melalui pengembangan teknologi dan inovasi, dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara maksimal dan efisien. Hal ini penting untuk menjamin jumlah dan kontinuitas pasokan (aspek logistik) .

Pertanian bioindustri adalah langkah konkret upaya peningkatan daya saing produk pertanian dan peternakan. Secara konseptual, pertanian bioindustri adalah sistem pertanian yang pada prinsipnya mengelola dan/atau memanfaatkan secara optimal seluruh sumberdaya hayati termasuk biomassa dan/atau limbah pertanian bagi kesejahteraan masyarakat dalam suatu ekosistem secara harmonis (Prastowo, 2013 dalam Badan Litbang Pertanian, 2015), dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Gunawan dan Talib, 2014). Konsep *biorefinery* pun telah dikembangkan, sebagai konsep yang bagus untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Bioindustri integrasi padi sapi menjadi salah satu upaya yang perlu dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sapi potong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya peningkatan daya saing sapi potong melalui bioindustri padi-sapi potong di DIY.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan ada Bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Maret 2016. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif, yaitu Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan usaha ternak sapi potong dan usahatani padi sawah secara terintegrasi di Kecamatan Bantul. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tokoh kelompok tani tani, kelompok ternak, tokoh masyarakat, tokoh akademisi, petani dan peternak,



sebagai informan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, yaitu data BPS, data desa, dan data-data dari dinas atau instansi terkait lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi lokasi penelitian

Desa Wonolelo, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Desa tersebut adalah desa mempunyai potensi pengembangan peternakan dan pertanian padi sawah. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Desa Wonolelo mempunyai lahan yang subur, sebagian terairi saluran irigasi, sebagian berupa sawah tadah hujan. Dari data Statistik Kecamatan Pleret, Desa Wonolelo mempunyai lahan sawah seluas 133,31 ha, yang sebagian besar merupakan lahan sawah tadah hujan (BPS Kabupaten Bantul, 2015). Usaha peternakan yang dominan di desa tersebut adalah sapi potong. Selain sapi, juga berkembang usaha ternak yang lain yaitu ternak kambing, domba, ayam buras, dan itik.

Jumlah ternak sapi potong di Desa Wonolelo mengalami fluktuasi, meskipun dari data tahun 2013 dan 2014, meningkat dari 1028 ekor menjadi 1048 ekor. Berdasarkan informasi peternak, bahwa para peternak menjual sapiunya tidak didasarkan waktu tertentu saja, tetapi pada saat mereka membutuhkan dana untuk kebutuhan hariannya. Terutama hal ini terjadi pada para peternak yang mengusahakan ternaknya secara sendiri. Sedangkan para peternak yang memelihara sapiunya secara komunal, kebanyakan mereka sudah memperhitungkan harga jual pada saat itu. Hal ini disebabkan proses penjualan sapi dilakukan melalui kelompok, sehingga kelompok mempunyai kebijakan-kebijakan yang memperhitungkan berbagai hal, salah satunya keuntungan bagi peternak. Penjualan sapi tidak serta merta diikuti dengan pengadaan bibit, sehingga kekosongan ternak kadang-kadang terjadi.



Karakteristik petani peternak

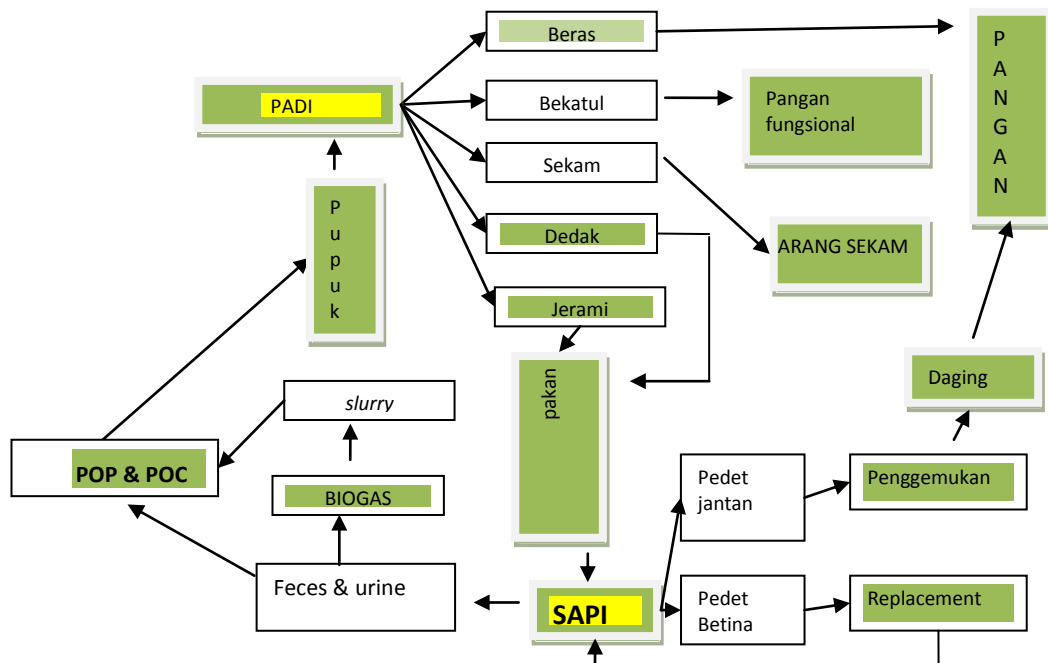
Di Desa Wonolelo, sudah terdapat 9 Kelompok Tani, dan 5 diantaranya sudah tergabung dalam gapoktan. Berdasarkan data karakteristik petani yang diperoleh dari ketua kelompok tani Ngudi Mulyo Mojosari dan Ketua Kelompok Ngudi Mulyo, Depok, kedua kelompok tani tersebut mempunyai rata-rata umur produktif, dengan kisaran umur antara 26 – 80 tahun. Pendidikan anggota kelompok tani tersebut sangat beragam, dari tidak bersekolah sampai perguruan tinggi, namun mayoritas berpendidikan SD. Pekerjaan utama adalah sebagai petani/buruh tani, dengan berbagai pekerjaan lain sebagai sampingan. Lahan garapan umumnya berupa lahan sawah tadah hujan, namun beberapa petani menggarap sawah milik sendiri ataupun milik orang lain, di desa lain yang berupa sawah irigasi. Berdasarkan kepemilikan ternak, kebanyakan peternak memiliki ternak sebanyak 1 – 2 ekor, namun ada juga beberapa peternak yang mampu memelihara sampai lebih dari 3 ekor.

Secara fisik, para petani masih terlihat kuat dan mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha tani dan ternaknya dengan baik, dan masih mempunyai kemungkinan mengembangkan usaha taninya dengan baik. Dari pendidikannya, sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, namun dalam kesehariannya terlihat semangat para petani peternak yang tinggi untuk belajar mengembangkan usahatannya, baik padi maupun sapi potongnya. Melalui pelatihan dan penyuluhan dari berbagai pihak, pengetahuan dan ketrampilan petani/peternak dapat ditingkatkan.

Bioindustri Integrasi Padi-sapi

Pertanian bioindustri yang dilaksanakan di Desa Wonolelo, merupakan pengembangan dari usahatani ternak sapi yang sudah dikelola sebelumnya secara komunal. Pelaksanaan yang terjadi di Desa Wonolelo dapat digambarkan seperti pada gambar 1.

Gambar tersebut menunjukkan keberagaman proses dalam penanganan hasil samping dari tanaman padi (jerami) untuk menjadi pakan bagi ternak sapi, pengolahan sekam untuk arang sekam dan penanganan hasil samping ternak



Gambar 1. Model Bioindustri Padi Sapi

Usaha sapi potong di Desa Wonolelo merupakan usaha ternak yang sudah lama dikembangkan, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Kelompok ternak Ngudi Mulyo Depok, merupakan salah satu kelompok ternak sapi potong yang sudah cukup lama mengusahakan sapi potong secara komunal, sedangkan di KT Ngudi Mulyo Mojosari, masih mengusahakan ternaknya secara sendiri-sendiri. Sebagai komoditas utama, maka KT Ngudi Mulyo Depok sangat menekankan pada usaha-usaha peningkatan produktivitas ternaknya. Dengan membangun kandang diatas tanah kas desa, mereka mulai mengembangkan ternaknya secara lebih terorganisir. Sedangkan KT Ngudi Mulyo Mojosari, lebih mengedepankan usaha tani padinya, meskipun juga mengusahakan ternak sapi. Sapi yang diusahakan adalah sapi PO dan simetal.

Mulai tahun 2015, dengan adanya pertanian bioindustri, maka kedua KT tersebut mengembangkan kegiatannya. Tidak hanya fokus pada satu komoditas, tetapi pada padi dan sapinya, serta penanganan limbah dari kedua komoditas



tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dari kedua komoditas dan mendapatkan nilai tambah bagi usaha taninya.

Upaya peningkatan kualitas ternak dilakukan melalui perbaikan pakan. Teknologi flushing yang diberikan dari BPTP terus diupayakan untuk meningkatkan jumlah pedet per tahunnya. Teknologi flushing yaitu perbaikan pakan ternak sapi pada masa kritis. Masa kritis pada usaha pembibitan sapi potong adalah pada saat bunting tua (umur kebuntingan 8 bulan) dan pada saat menyusui selama 2 bulan. Pemberian pakan yang berkualitas seperti jerami padi fermentasi diupayakan selalu tersedia, dari hasil limbah panen sendiri maupun dari sawah disekitarnya. Disamping itu hijauan untuk melengkapi gizi ternak, dibudidayakan secara rutin oleh para peternak. Peternak sudah mampu membuat formulasi pakan sendiri menggunakan bahan-bahan yang tersedia di lokasi, bahkan telah terbangun pabrik pakan yang terus dikembangkan dengan baik pengelolaannya. Selama tahun 2015, jumlah kelahiran pedet di kelompok Ngudi Mulyo, Depok, sebanyak 32 ekor dari jumlah induk 43 ekor sehingga angka panen pedet sebesar 74,4%. Angka panen pedet di kelompok Ngudi Mulyo lebih tinggi dibanding target Badan Litbang Pertanian yaitu sebesar 70%. Produktivitas sapi dikategorikan rendah apabila mempunyai angka panen pedet 50% (Minish dan Fox, 1979) . Ketua kelompok Ngudi Mulyo Depok menuturkan bahwa dengan adanya teknologi flushing, selain meningkatkan angka panen pedet, juga dapat meningkatkan bobot lahir pedet, yang tadinya hanya 20 – 25 kg, menjadi 25 – 33 kg. Kesehatan ternak juga lebih baik, yang ditandai dengan tidak adanya kematian pedet dan pertumbuhan pedet yang lebih baik sehingga meningkatkan harga jual.

Pengelolaan kandang merupakan aspek yang menjadi perhatian bagi para peternak. Salah satunya dengan melakukan pemisahan kotoran ternak berupa feses dan urin. Dengan pemisahan limbah padat (feses) dan cair (urin) melalui perbaikan kandang, diperoleh limbah padat / feces cukup besar, rata-rata feces sapi di kelompok tani tersebut sebesar 13,48 kg/ekor/hari, dan limbah cair/urine sebanyak 4,1 liter/ekor/hari. Hasil pengumpulan kotoran ternak diolah menjadi pupuk organik, baik pupuk organik padat (POP), maupun pupuk



organik cair (POC). Pengolahan pupuk kandang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok. Sebagian pupuk organik padat (lebih kurang 50 ton) telah digunakan untuk menanam padi pada MT II, di lahan sawah milik petani. KT Ngudi Mulyo Depok secara rutin dapat menghasilkan rata-rata 7 ton/bulan. Mengingat berlimpahnya bahan baku, POP yang dihasilkan tersebut masih kurang maksimal. Menurut petani, hal tersebut disebabkan keterbatasan tenaga dan waktu peternak untuk mengolah, serta pemasaran yang belum begitu lancar. Apabila pemasaran lancar, peternak di KT. Ngudi Mulyo Depok masih dapat memaksimalkan POP sekitar 20 ton/bulan. Sebagian lain, POP dijual ke kelompok lain, baik di Kabupaten Bantul maupun di luar Kabupaten Bantul. Limbah cair sebagian diolah menjadi pupuk, dan sebagian dijual langsung melalui kerjasama dengan pihak swasta. Pupuk cair digunakan untuk pemupukan di lahan sawah maupun di pekarangan. Pemanfaatan limbah ternak (kotoran) merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak.

Selain dimanfaatkan untuk menghasilkan pupuk, kotoran sapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas. Di KT Ngudi Mulyo Depok, telah dibangun biodigester dengan kapasitas 50 m³. Kurang lebih 485 kg feces tiap hari dimasukkan kedalam biodigester yang berasal dari 36 ekor sapi dari berbagai umur. Biogas yang dihasilkan dimanfaatkan untuk lampu penerangan di lingkungan kandang serta kebutuhan bahan bakar untuk memasak di 18 rumah tangga. Rerata penggunaan gas untuk menyalakan kompor adalah 1,3 jam/rumah tangga/hari. Bila dibandingkan dengan penelitian Widodo dkk., (2009), hasil biogas ini belum optimal. Namun dari penuturan petani, penggunaan biogas tersebut sudah dapat menghemat pembelian gas 2 - 4 tabung 3 kg/bulan/rumah tangga. Dengan demikian, adanya biogas dapat menghemat pembelian gas elpiji sekitar Rp 720.000,-/bulan - Rp 1.440.000,-/bulan. Hasil samping dari biogas berupa *sludge* dan *slurry* sampai saat ini masih diupayakan untuk dapat digunakan sebagai pupuk yang berkualitas, sebagai media cacing, sebagai campuran pakan ternak, ataupun media pertumbuhan ikan.



PENUTUP

Pertanian bioindustri pada dasarnya merupakan implementasi dari konsep sistem pertanian terpadu. Dengan penerapan prinsip bioindustri, maka dapat dihasilkan produk berkualitas, peningkatan nilai tambah dan daya saing. Pengembangan kawasan bioindustri di berbagai tempat, diharapkan dapat meningkatkan daya saing sapi potong secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Pertanian. (2014). *Pokok-pokok Pikiran Pengembangan Kawasan Pertanian Bioindustri Berbasis Sumberdaya Lokal*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. (2016). *DIY dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul. (2015). *Kecamatan Pleret Dalam Angka*.
- Gunawan dan Talib C. (2014). *Potensi Pengembangan Bioindustri dalam Sistem Integrasi Sapi Sawit*. Jurnal Wartazoa Vol 24 No 2 Th 2014, Hlm 67-74 DOI
- Hadi, Prajoga U, dan Julia F. Sinuraya. (2014). Kinerja dan Strategi Penguatan Daya Saing Komoditas Pertanian Indonesia. Dalam Haryono (Ed). *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian* (Hal 79 - 95). Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Minish, G.L dan Fox. (1979). *Beef Production and Management*. Reston Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company Reston, Virginia
- Suradisastra, K., Suherman, Dariah. (2014). Inovasi Kreatif untuk Membangun Daya Saing Komoditas Pertanian. Dalam Haryono (Ed). *Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian* (Hal 49 - 78). Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Widodo, T.W., A. Asari, Ana N dan Elita R. (2009). *Design and development of biogas reactor for farmer group scale*. Indonesian Jurnal of Agriculture 2(2) 121 - 128.



PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH KEDELAI MELALUI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PEDESAAN

Chanifah, J. Triastono dan R. K. Jatuningtyas

BPTP Jawa Tengah

Email: chanifahnurokhman@yahoo.com

ABSTRAK

Benih kedelai yang bermutu dan berkualitas menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas kedelai. Sifat kedelai yang spesifik dan mudah mengalami penurunan daya tumbuh, membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman bagi para petani penangkar maupun produsen benih untuk memproduksi benih kedelai yang berkualitas dan bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan volume dan kualitas benih kedelai bermutu adalah melalui pelatihan produksi benih kedelai di tingkat petani pedesaan dengan pendekatan PTT kedelai untuk mencapai produktivitas kedelai 3 ton/ha. Kajian bertujuan untuk mengetahui perubahan/peningkatan pengetahuan dan persepsi petani terhadap teknik memproduksi benih kedelai melalui pendekatan PTT. Lokasi pengkajian dilaksanakan di Kabupaten Grobogan sebagai sentra produksi kedelai di Jawa Tengah. Pengkajian dilaksanakan pada Musim Hujan (MH)/bulan Oktober 2015 – Januari 2016. Metode pengambilan sampel dilaksanakan secara purposive sampling yaitu sebanyak 48 orang petani kedelai (petani kooperator) sebagai responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara survey kepada responden menggunakan alat bantu kuisioner. Pengambilan data dilaksanakan sebelum responden mengikuti pelatihan (pre test) dan setelah mengikuti pelatihan (post test). Peningkatan pengetahuan petani dianalisis secara deskriptif yaitu menggunakan persentase kebenaran jawaban yang mampu dijawab oleh responden dengan benar, sedangkan sikap petani terhadap inovasi teknologi produksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT dipetakan menggunakan perceptual mapping yang diimplementasikan kedalam Grafik Sarang Laba-Laba. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan petani tentang cara memproduksi benih kedelai dari sebelum pelatihan (pre test) dan sesudah pelatihan (post test) rata-rata sebesar 81 %. Sebanyak 100 % petani memiliki persepsi yang positif terhadap kegiatan pelatihan Produksi Benih Sumber Kedelai melalui Pendekatan PTT. Indikasinya adalah petani akan melaksanakan berbagai pengetahuan yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan produksi benih kedelai melalui pendekatan PTT.

Kata kunci: peningkatan pengetahuan, persepsi, produksi benih kedelai, pengembangan sumberdaya petani

PENDAHULUAN

Komoditas kedelai merupakan komoditas strategis (Supadi, 2009; Drajat, 2010) secara nasional setelah komoditas padi. Kedelai memang bukan tanaman



asli Indonesia, namun kedelai sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat di negeri ini. Permintaan kedelai terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, namun tidak diikuti dengan laju pertumbuhan penyediaan pasokan yang cukup. Berdasarkan data tahun 2000-2012, tingkat konsumsi kedelai cenderung meningkat namun produksi justru menurun, akibatnya terjadi peningkatan impor (Supadi, 2009). Dari total konsumsi masyarakat terhadap kedelai, hanya rata-rata 40 % saja yang dapat dipenuhi oleh produksi kedelai di dalam negeri, sisanya hampir 60 % kedelai di impor (Sari, P. M., et all. 2014). ketidaktersediaan kedelai menjadi polemik bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menargetkan terwujudnya swasembada kedelai melalui Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Padi, Jagung dan Kedelai (PAJALE) dengan target swasembada kedelai dalam kurun waktu 3 tahun.

Beberapa upaya strategi untuk meningkatkan ketersediaan kedelai dan mengurangi ketergantungan impor kedelai yang terus meningkat dari tahun ke tahun antara lain melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk, perbaikan akses pasar dan sistem permodalan, pengembangan infrastruktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha (Damardjati et el., 2005). Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kedelai adalah melalui perbaikan mutu intensifikasi dan implementasi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Kedelai (Rukmana R., 1996). Peningkatan produktivitas kedelai dengan pendekatan PTT terutama untuk memproduksi benih sumber kedelai ditingkat petani bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan mutu benih yang dihasilkan.

Salah satu komponen produksi yang dibutuhkan petani adalah benih bermutu. Benih unggul bermutu dan berkualitas merupakan salah satu titik pengungkit peningkatan produktivitas kedelai. Benih unggul dapat mempengaruhi produktivitas, mutu hasil dan sifat ekonomis produk agribisnis (Udin et al, 2009). Sehingga ketersediaan benih bermutu dinilai strategis karena sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman. Namun, hingga saat ini



ketersediaan benih kedelai bermutu dan berkualitas ditingkat petani masih sangat fluktuatif dan cenderung terbatas. Chanifah (2015) menyatakan bahwa pada tahun 2010-2014, ketersediaan benih sumber kedelai bermutu dan bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah sangat berfluktuatif dan cenderung defisit (Tabel 1). Keterbatasan benih kedelai tersebut menyebabkan petani menggunakan benih sumber seadanya, penggunaan benih aneka kacang yang bersertifikat ditingkat petani masih kurang dari 3 % (Balitbangtan, 2013). Mengingat pentingnya fungsi benih dalam pengembangan agribisnis dan ketahanan pangan, maka penggunaan varietas unggul yang sesuai dengan preferensi konsumen dan sistem produksi benih secara berkelanjutan menjadi semakin penting.

Tabel 1. Kebutuhan, Ketersediaan dan Defisit Benih Sumber Kedelai Bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2010-2014

Tahun	Luas Panen (Ha)	Kebutuhan Benih Kedelai (Ton)	Ketersediaan Benih Kedelai (Ton)	Kekurangan benih kedelai bersertifikat (Ton)
2010	114.070	5.704	4.457	-1.247
2011	81.988	4.099	4.001	-99
2012	97.112	4.856	4.248	-608
2013	65.278	3.264	1.673	-1.591
2014	72.235	3.612	2.674	-938

Sumber: BPSB Jawa Tengah Tahun 2015, data diolah.

Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri perbenihan, karena menjadi sumber produksi benih kelas dibawahnya yang akan digunakan petani. Jika hanya mengandalkan produsen benih kedelai yang berasal dari instansi pemerintah maupun produsen/penangkar benih kedelai yang ada saat ini, maka defisit benih sumber kedelai akan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dibina calon-calon penangkar benih kedelai baru yang kompeten ditingkat kelompok tani dengan pendampingan dari pihak terkait.

Penumbuhan penangkar benih kedelai dari kelompok tani memiliki keunggulan areal lahan yang luas, jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan sekaligus sebagai sarana pemberdayaan masyarakat pedesaan/petani. Oleh karena itu, UPBS BPTP Jawa Tengah selaku penyedia benih sumber



melaksanakan pelatihan memproduksi benih sumber kedelai ditingkat kelompok tani calon penangkar. Kajian bertujuan untuk mengetahui secara kuantitatif perubahan/peningkatan pengetahuan dan sikap petani terhadap teknik memproduksi benih kedelai melalui pendekatan PTT.

METODE PENELITIAN

Pelatihan Produksi Benih Sumber Kedelai melalui Pendekatan PTT kepada kelompok penangkar dilaksanakan pada Musim Hujan (MH)/bulan Oktober 2015 – Januari 2016. Pelatihan dilaksanakan di Kecamatan Pulokulon dan Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai sentra produksi kedelai di Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel dilaksanakan secara *purposive sampling* yaitu sebanyak 48 orang petani kedelai (petani kooperator) sebagai responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara survey kepada 48 responden menggunakan alat bantu kuisioner. Kuisioner berisi tentang i) karakteristik responden, ii) variabel pengetahuan berupa pertanyaan tentang cara memproduksi benih sumber kedelai dengan pendekatan PTT dan iii) variabel sikap (kognitif, afektif, Konatif) berupa pernyataan tentang sikap setuju/ragu-ragu/tidak setuju terhadap inovasi teknologi produksi benih sumber kedelai (Lampiran 1). Pengambilan data dilaksanakan sebelum responden mengikuti pelatihan (*pre test*) dan setelah mengikuti pelatihan (*post test*).

Karakteristik petani akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Travers 1995, diacu dalam Umar 2005). Perubahan/peningkatan pengetahuan petani dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase kebenaran jawaban yang mampu dijawab oleh responden dengan benar. Sikap petani terhadap inovasi teknologi produksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT dipetakan menggunakan *perceptual mapping* yang diimplementasikan kedalam Grafik Sarang Laba-Laba.

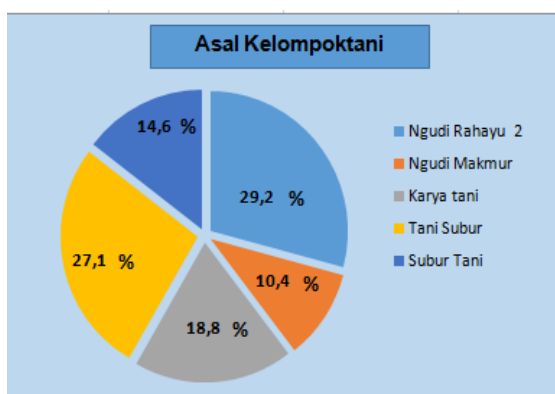


HASIL DAN PEMBAHASAN

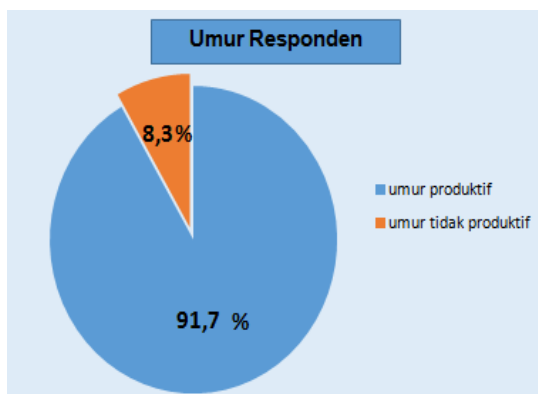
Karakteristik Responden

Responden merupakan petani yang mengusahakan usahatani kedelai dan padi di Kabupaten Grobogan. Sebanyak 93,8 % responden adalah Laki-laki dan 6,3 % adalah wanita tani. Responden berasal dari kelompok tani Ngudi rahayu 2 sebanyak 29,2 %, kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 10,4 %, kelompok tani Karya Tani sebanyak 18,8 %, kelompok tani Tani subur sebanyak 27,1 % dan kelompok tani Subur Tani sebanyak 14,6 % (Gambar 1).

Umur Responden berada pada rentang 30 – 70 tahun. Jika Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang tenaga kerja maka penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja dengan batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun (Kemenakertrans. 2013), pada usia tersebut tergolong usia produktif untuk bekerja. Gambar 2 menunjukkan bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka sebanyak 91,7 % merupakan usia produktif (15 - 64 tahun) sedangkan 8,3 % tidak produktif (>64 tahun). Responden pada rentang umur yang produktif akan mampu menerapkan hasil pelatihan secara nyata pada waktu relatif lama, sehingga pelatihan menjadi efektif.



Gambar 1
Asal kelompok tani pada Pelatihan Produksi Benih Sumber Kedelai Melalui Pendekatan PTT



Gambar 2
Umur peserta pelatihan Produksi Benih Sumber Kedelai Melalui Pendekatan PTT

Tingkat pendidikan responden pada taraf SD hingga SLTA. Sebagian besar responden yaitu 20,8 % tidak tamat SD, kemudian 47,9 % hanya bersekolah



hingga tingkat SD, 18,8 % bersekolah hingga tingkat SLTP dan hanya 12,5 % saja yang bersekolah hingga tingkat SLTA. Sebagian besar petani yaitu 50 % memiliki pengalaman berusahatani padi dan kedelai lebih dari 20 tahun, 29,3 % responden memiliki pengalaman 10-20 tahun dalam berusahatani padi dan kedelai sedangkan 20,8 % kurang dari 10 tahun.

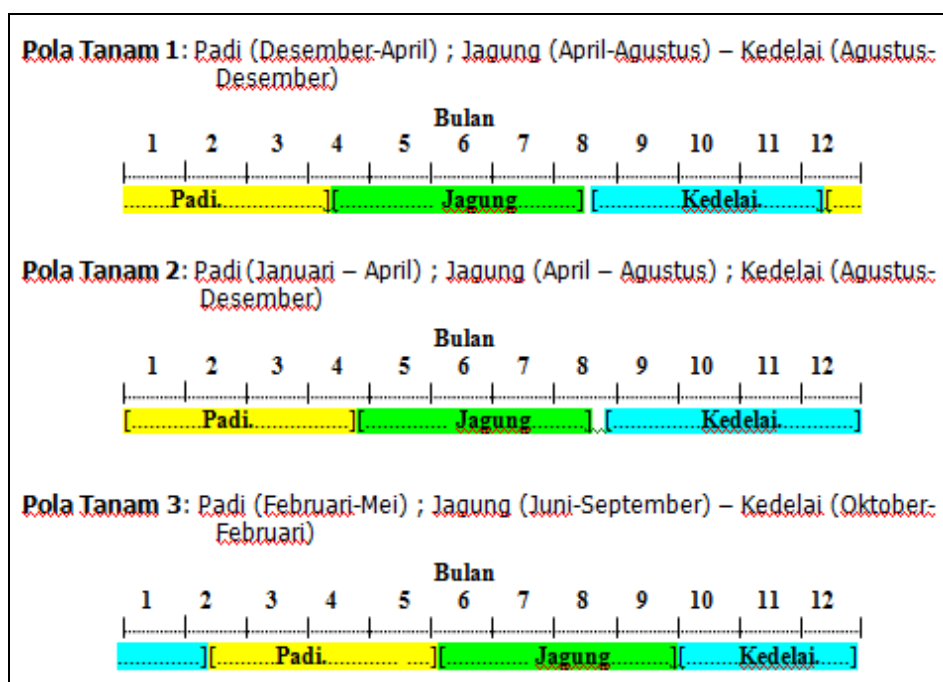
Berdasarkan kepemilikan dan penguasaan lahan ditingkat responden menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki lahan seluas $\pm 0,38$ ha dengan status hak milik dan digarap sendiri. Pada umumnya, petani kedelai juga merupakan petani padi dan jagung dengan pola tanam padi - jagung - kedelai. Pola tanam selama setahun ditingkat responden ditampilkan pada Gambar 3. Terdapat tiga pola tanam ditingkat petani yaitu penanaman padi pada pertengahan Desember, Januari dan pertengahan Februari. Penanaman komoditas Jagung pada pertengahan April, Mei atau awal Juni. Penanaman komoditas Kedelai dilaksanakan pada akhir Agustus, September atau Oktober. Penanaman kedelai sangat tergantung oleh adanya hujan, petani akan menanam kedelai setelah hujan turun sekitar 2-3 kali. Jika musim kemarau cukup panjang maka penanaman kedelai akan mundur dan biasanya lahan akan dibiarkan bera hingga hujan turun, jadi semakin panjang musim kemarau maka penanaman kedelai akan semakin mundur.

Pola tanam tersebut mempengaruhi produksi kedelai dan kebutuhan benih kedelai oleh petani, sehingga bisa menjadi acuan bagi penangkar maupun produsen benih dalam memproduksi benih kedelai. Semakin panjang musim kemarau maka akan mempengaruhi kualitas benih. Oleh karena itu, dengan sifat benih kedelai yang mudah menurun daya tumbuhnya serta memiliki masa simpan yang singkat maka peredaran benih kedelai di Jawa Tengah terbentuk pola/sistem perbenihan JABALSIM (Jalinan Arus Benih Antar-Lapang dan Antar-Musim) (Chanifah, 2015).

Sistem JABALSIM merupakan proses mengalirnya benih antar daerah secara dinamis berdasarkan atas asas keterkaitan dan ketergantungan, sehingga menjadi suatu sistem pemenuhan kebutuhan benih di suatu daerah. Sistem JABALSIM terjadi karena: 1) benih kedelai tidak memiliki dormansi sehingga



semakin baru akan semakin bagus daya tumbuhnya, 2) sifat benih yang mudah rusak, penurunan daya tumbuh yang menyebabkan pada kondisi tertentu benih tidak dapat ditanam pada musim berikutnya, 3) adanya perbedaan agroklimat atau musim tanam antar wilayah dan 4) adanya persamaan ekologi lahan antar wilayah (Dirjentan Tanaman Pangan, 2013). Seharusnya benih yang disebar dengan pola JABALSIM tetap harus melalui proses sertifikasi, namun yang terjadi di tingkat lapang menunjukkan hal lain yaitu pola JABALSIM jarang diikuti oleh sertifikasi benih sehingga mutu dan kualitas benih masih diragukan. Penggunaan sistem JABALSIM sebenarnya cukup efektif, maka disarankan agar petugas BPSB lebih proaktif ke Produsen/penangkar (Nurasa, 2007).



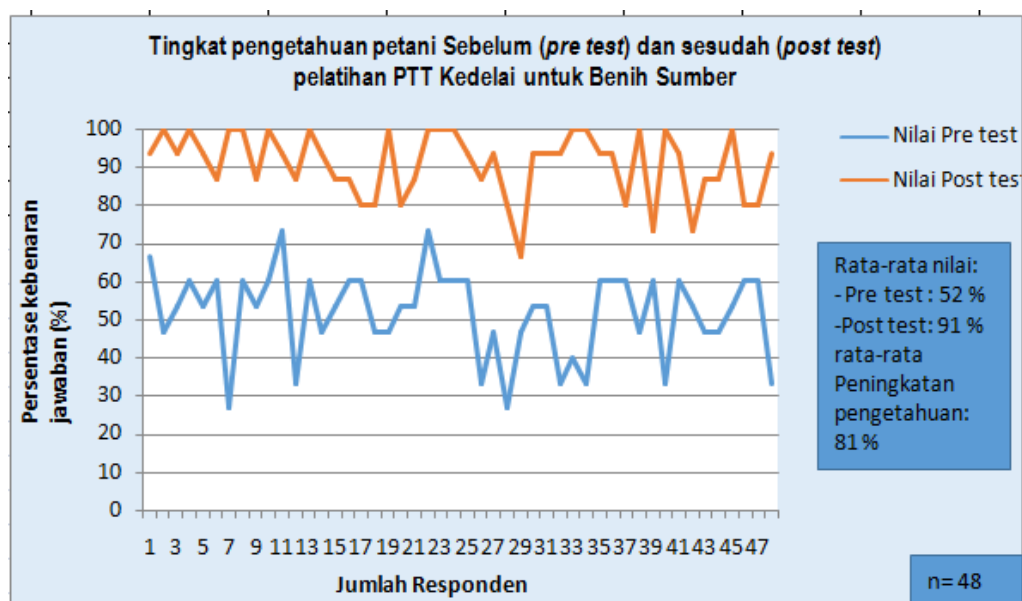
Gambar 3. Pola tanam selama satu tahun ditingkat petani responden di Kabupaten Grobogan.

Perubahan/Peningkatan Pengetahuan Petani dalam TeknikMemproduksi Benih Sumber Kedelai melalui Pendekatan PTT

Gambar 4 menunjukkan perbandingan tingkat pengetahuan petani tentang teknik memproduksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT selama sebelum pelatihan (*pre test* garis berwarna biru) dan sesudah pelatihan (*post test* garis berwarna merah). Hasil wawancara kepada responden tentang



tingkat pengetahuan petani terhadap produksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT sebelum mengikuti pelatihan (*Pre-test*) hanya mencapai taraf nilai rata-rata 52 %, artinya bahwa dari 15 pertanyaan yang diajukan kepada 48 responden hanya mampu dijawab sebagian saja yaitu sebesar ± 52 %. Namun, setelah petani mengikuti pelatihan (*post test*) baik secara teori maupun praktek langsung penerapan PTT dalam memproduksi benih sumber kedelai dengan bimbingan dari BPTP Jawa Tengah maka kemampuan petani dalam menjawab pertanyaan meningkat menjadi sebesar rata-rata 91 % (Jawaban benar ± 91 %).



Gambar 4. Perubahan/peningkatan pengetahuan petani tentang teknik memproduksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT sebelum pelatihan (*pre test*) dan setelah pelatihan (*post test*), tahun 2015.

Gambar di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan pada peserta dari sebelum pelatihan dan setelah mengikuti pelatihan. Rata-rata peningkatan pengetahuan petani atas kebenaran jawaban setelah mengikuti pelatihan meningkat sebesar 81 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelatihan produksi benih sumber kedelai dengan pendekatan PTT yang di inisiasi oleh BPTP cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani dalam implementasi produksi benih sumber kedelai dengan pendekatan PTT.

Sikap Responden terhadap Inovasi Teknologi Produksi Benih Sumber Kedelai melalui Pendekatan PTT





PENUTUP

Pelatihan teknik memproduksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT kedelai ditingkat kelompok tani mampu merubah dan meningkatkan pengetahuan petani dari sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Secara kuantitatif, pertanyaan dari variabel pengetahuan yang mampu di jawab oleh petani dengan benar sebelum pelatihan (*Pre-test*) sebesar 52 %, namun setelah mengikuti pelatihan petani mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebesar 91 %. Rata-rata peningkatan pengetahuan petani ± 81 %. Secara keseluruhan petani memiliki sikap yang positif terhadap inovasi teknologi produksi benih sumber kedelai melalui pendekatan PTT (garis warna orange memiliki skala interval >25), artinya petani setuju dengan berbagai pernyataan yang diajukan. Sikap yang positif dari petani biasanya akan diikuti dengan perilaku yang mendukung sikap tersebut. Penumbuhan calon-calon penangkar benih sumber kedelai di tingkat petani merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat pedesaan yang diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). 2013. Pedoman Umum Produksi dan Distribusi Benih Sumber Kedelai. Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah. 2014. Daftar Produsen Benih Kedelai Kedelai di Jawa Tengah. BPSB Jawa Tengah.
- Chanifah. 2009. Analisis Sikap dan Kepuasan Petani terhadap Atribut Benih Padi Hibrida (Kasus Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Jawa Barat) [Skripsi]. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Chanifah dan J. Triastono. 2015. Pendampingan untuk Pemberdayaan menuju Daulat Pangan. Indonesian Agency For Agricultural Research And Development (IAARD) Press. Hal: 116-126.
- Damardjati, D. S., Marwoto, D.K.S. Swastika, D. M. Arsyad, dan Y. Hilman. 2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Drajat, D. 2010. Analisis Fungsi Produksi Tanaman Kedelai di Pulau Jawa Tahun 2010. Skripsi. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Kemenakertrans. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.



- Nurasa, T. 2007. Revitalisasi benih dalam Meningkatkan Pendapatan petani Kedelai di Jawa Timur. Jurnal Akta Agrosia Edisi Khusus No. 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.
- Rukmana R dan Yuyun Y. 1996. Kedelai Budidaya dan Pascapanen. Kanisius: Yogyakarta.
- Sari, P. M., Hasdi, A. dan Efrizal, S. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Impor Kedelai di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Vol. III.
- Simamora. 2008. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia.
- Supadi, 2009. Dampak Impor Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Pangan. Analisis Kebijakan Pertanian, 7(1): 87-102.
- Udin, S. N. 2012. Penguatan Sistem Perbenihan Nasional: Roadmap Pengembangan UPBS Padi. Makalah disampaikan pada Workshop Peningkatan Kinerja UPBS Badan Litbang Pertanian, Denpasar 21-23 November 2012.
- Umar H. 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Simamora. 2008. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia.



TEMA 2

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era MEA



REGULASI PENYULUHAN PERTANIAN, TITIK KRITIS DAN IMPLEMENTASINYA DI KALIMANTAN BARAT

Gontom C. Kifli

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat

keevle354@yahoo.com

ABSTRAK

Beberapa regulasi yang menyangkut langsung dengan penyuluhan pertanian di Indonesia, berupa Undang-Undang (UU) ataupun Peraturan Pemerintah (PP) adalah ; UU RI Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, UU RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa peraturan menteri. Kesemua regulasi tersebut memerlukan kajian untuk melihat hal penting dalam penyuluhan pertanian, khususnya di Kalimantan Barat. Tujuan kajian adalah memetakan dan menguraikan beberapa bab atau pasal di dalamnya yang berkaitan langsung dengan penyuluhan pertanian, serta mengamati dan menelisik implementasi dari regulasi tersebut di tatanan praksis secara umum di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis statistik deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi tentang penyuluhan telah termaktub cukup jelas dan rinci di dalam undang-undang dan peraturan menteri, namun secara umum regulasi bersifat anjuran dan tidak menjamin keberhasilan usahatani petani. Implementasi regulasi penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini sedang mengalami proses menuju peningkatan dinamika penyuluhan pertanian melalui lembaga penyuluhannya dan sumberdaya penyuluhnya, walaupun masih terdapat kekurangan pada pelaksanaannya.

Kata kunci: Regulasi, penyuluhan pertanian, Implementasi dan Kalimantan Barat

REGULATION OF AGRICULTURE EXTENSION, CRITICAL POINT AND THE IMPLEMENTATION IN WEST KALIMANTAN

ABSTRACT

There are many regulations about agriculture extension in form of act and ministerial regulation, namely; The Act Number 12 Year of 1992 About Farming Systems, The Act Number 16 Year of 2006 About Extension System of Agriculture, Fisheries dan Forestry, The Act Number 19 Year of 2013 About Farmer Protection and Empowerment, The Act Number 6 Year of 2014 About Rural, The Act Number 23 Year of 2014 About Local Government and some ministerial regulations. All the act and regulations need to be researched or studied. The objective of the study are to map out and to explain of article which relating to agriculture extension and to observe of implementation of the regulations in the field. The method of study are literature study and descriptive statistical analysis. The results of study are; the regulations about agriculture extension



are clear and detailed in the act and ministerial regulations, but generally regulations are suggestion and no guarantee for success of farming. The implementation of regulations of agriculture extension in West Kalimantan is moving forward to better dynamic through extension institution and extension agent, even though there are some lack of implementation.

Keywords: Regulations, agriculture extension, implementation and West Kalimantan

PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Beberapa tokoh pertanian seperti Iso Rekso hadiprojo menganggap bahwa sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia dimulai sejak didirikannya Departemen Penyuluhan Pertanian (*Landbouw Voorlichting Diënst*) oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1905 (Mardikanto, 2007). Penyuluhan pertanian Indonesia berlanjut setelah era kemerdekaan dengan dibentuknya Badan Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) yang berlanjut pada era orde baru dengan aktifnya organisasi Bimbingan Massal atau lebih dikenal dengan BIMAS dan selanjutnya dianggap sebagai puncak atau masa keemasannya penyuluhan pertanian, yaitu dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984.

Kecenderungan yang terjadi selanjutnya setelah momentum swasembada beras adalah melandainya kegiatan penyuluhan pertanian dengan berbagai dinamikanya dan seiring semakin menguatnya dorongan fenomena otonomi daerah. Dinamika penyuluhan pertanian mengalami kondisi stagnan pada era masa peralihan dari orde baru ke era reformasi. Patut disyukuri pada saat awal era reformasi tersebut, pemerintah menyadari kembali akan pentingnya penyuluhan pertanian, yaitu ditandai dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Terbitnya regulasi tersebut menjadi patok penting dalam regulasi penyuluhan pertanian, karena sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur langsung tentang penyuluhan pertanian secara menyeluruh dan cukup detil.

Undang-Undang RI No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman berisikan regulasi yang meliputi pengaturan budidaya dan petani



secara umum, sedangkan aspek penyuluhan pertanian secara eksplisit hanya termaktub dalam satu pasal pada Bab VII Pasal 57 ayat 1, yang menjelaskan secara umum, yaitu “Pemerintah menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat untuk melakukan kegiatan penyuluhan dimaksud”. Sebelum terbitnya UU RI No.12/1992 tersebut, regulasi penyuluhan bahkan dapat dianggap tidak ada sama sekali, karena pengaturan sistem pertanianpun masih merupakan bagian dari regulasi UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka UU SP3K tersebut dianggap sebagai tonggak penting kebangkitan kembali penyuluhan pertanian.

Beberapa regulasi, baik undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dan berkepentingan dengan sistem pertanian, khususnya penyuluhan pertanian, pada perkembangan berikutnya setelah terbitnya UU SP3K adalah terbitnya Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memiliki semangat dalam meningkatkan kekuatan atau kapasitas petani. Beberapa regulasi tersebut dapat dijadikan dasar di dalam pelaksanaan dan pemantauan dari pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian yang terjadi di lapangan. Pemantauan dari implementasi regulasi tersebut dianggap penting dilakukan untuk melihat efektivitas dari regulasi tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan, penambahan atau perubahan. Kondisi tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilakukan kajian mengenai hal-hal penting dan kritis dari semangat dan kandungan regulasi tersebut sendiri dan implikasinya saat ini.

Kajian yang dilakukan difokuskan kepada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu; (1) apa sajakah esensi atau pasal-pasal yang penting dan kritis di dalam beberapa regulasi penyuluhan pertanian yang berlaku saat ini? Kemudian (2) bagaimanakah gambaran kondisi dari implementasi regulasi pembangunan pertanian dan penyuluhan petani di Kalimantan Barat saat ini? Adapun arah tujuan kajian ini adalah; (1) memetakan dan menguraikan beberapa bab atau pasal yang penting dan urgen dari regulasi pembangunan pertanian dan



penyuluhan pertanian yang berlaku saat ini dan (2) menggambarkan dan menjelaskan implementasi secara umum dari regulasi pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat pada saat sekarang.

METODE PENELITIAN

Kajian yang dilakukan, menggunakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif yang disandingkan dengan studi literatur. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengambilan data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan studi literatur digunakan untuk menelaah beberapa teks, artikel atau tulisan di dalam beberapa undang-undang atau peraturan yang menyangkut pembangunan pertanian atau penyuluhan pertanian. Data dan informasi tersebut selanjutnya diolah, ditransformasi dan diterjemahkan, serta dibahas untuk mendapatkan kesimpulan dan saran atau rekomendasi akhir pada akhir tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa hal penting di dalam regulasi Undang-Undang RI No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT), yaitu bahwa regulasi ini merupakan regulasi pertama yang mengatur secara langsung bidang pertanian nasional, yang sebelumnya belum ada regulasi yang menyangkut langsung bidang pertanian. Pengaturan sistem pertanian sebelumnya adalah menjadi bagian dari undang-undang agraria yang mengatur tentang kepemilikan dan perusahaan tanah. UU SBT ini menjadi penting karena negara Indonesia yang merupakan negara agraris, baru memiliki pengaturan pemanfaatan lahan pertanian, setelah 47 tahun Indonesia menjalani kemerdekaannya, sehingga dapat dikatakan bahwa UU SBT merupakan regulasi yang terlambat terbit. UU SBT hingga saat masih berlaku dan belum ada UU penggantinya, sehingga UU tersebut tetap dijadikan acuan di dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

UU SBT memiliki artikel tentang penyuluhan pertanian meliputi satu bab dan dua pasal, yaitu pada Bab VII mengenai Pembinaan dan Peranserta



masyarakat pada pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat 1 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan pengembangan sumberdaya masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dan membina masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pasal 57 ayat 1 menyebutkan pemerintah menyelenggarakan penyuluhan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat untuk melakukan penyuluhan tersebut, sedangkan ayat 2 menyebutkan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi yang mendukung pengembangan budidaya tanaman serta mendorong dan membina peranserta masyarakat dalam pemberian pelayanan tersebut. Penjelasan ayat 2 menjelaskan bahwa pelayanan informasi dimaksud meliputi diantaranya informasi pasar, promosi komoditas dan prakiraan cuaca dan iklim.

Kedua pasal tersebut memiliki perihal kegiatan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat (petani), salahsatunya melalui penyuluhan. Proporsi perihal, artikel atau pengaturan tentang penyuluhan di dalam UU SBT ini hanya termuat atau terakomodasi di dalam dua pasal dari 66 pasal keseluruhan yang ada, yang dapat diartikan belum sepadan dengan pentingnya penyuluhan di dalam penyuluhan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pola pemikiran pembuat regulasi sendiri pada saat itu, yang menganggap bahwa penyuluhan merupakan bagian kecil dari sistem budidaya atau pertanian secara luas, padahal penyuluhan sejatinya hal yang penting, strategis dan dinamis di dalam pembangunan suatu negara. Penyuluhan di dalam pembangunan pertanian, khususnya negara-negara berkembang sangatlah penting. Leeuwis (2004) mengungkapkan bahwa lembaga penyuluhan saat ini sudah seharusnya merubah pola dan strategi organisasinya di dalam mengikuti isu perubahan yang terjadi pada lingkungannya saat ini seperti isu globalisasi, ketahanan pangan, pencemaran lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Rivera dan Qamar (2003) mengungkapkan bahwa penyuluhan pertanian saat ini dapat mengikuti isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, pendekatan metode pedesaan yang terpadu, perlunya kajian, paradigma penyuluhan jangka panjang dan terpadunya penyuluhan di dalam program desentralisasi, sehingga diperlukan metode dan strategi baru di dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.



Implementasi UU SBT yang terjadi di lapangan saat ini, khususnya di Kalimantan Barat saat ini dapat melalui indikator yang terjadi. Secara umum, penerapan penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi cukup baik dengan melihat dari aktifnya lembaga penyuluhan yang ada di kabupaten, kota maupun provinsi. Namun demikian, dengan keterbatasan dana, sumberdaya manusia dan fasilitas yang terbatas, intensitas penyuluhan di tingkat petani tersebut belum dapat dilakukan secara rutin dan sering, serta belum dapat menjangkau seluruh petani, kelompok tani atau desa yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat umumnya terintegrasi dengan bidang lainnya, seperti ketahanan pangan atau menjadi bagian dari dinas pertanian. Kabupaten Kubu Raya, Kab. Sanggau dan Kab. Landak, secara mandiri menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan yang berada di bawah koordinasi lembaga penyuluhan di kabupaten dan kota memiliki nama atau nomenklatur yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota, seperti Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau yang lainnya adalah Balai Penyuluhan Pertanian. Esensi dari kemandiriannya suatu lembaga, termasuk di lingkup pemerintah daerah menunjukkan otonomi di dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, sumberdayanya, sehingga posisi lembaga turut menentukan kapasitas dan kapabilitas di dalam menjalankan perannya di dalam pemerintahan dan masyarakatnya.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) terlahir sebagai respon positif dari keprihatinan akan kondisi penyuluhan pertanian pada saat itu, setelah penyuluhan pertanian dianggap mati suri di era awal reformasi. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang penyuluhan pertanian. UU SPK banyak diharapkan para penggiat penyuluhan pertanian sebagai titik balik bergairah kembalinya penyuluhan pembangunan sebagai penyokong pembangunan pertanian nasional. UU SPK mengandung 13 Bab dan 41 pasal dan secara umum memiliki lingkup penyuluhan pertanian yang komprehensif



dari berbagai aspek, baik kelembagaan, sumberdaya penyuluhan, programa penyuluhan dan kaitannya dengan petani.

Beberapa pasal yang penting dan krusial dari regulasi ini adalah; Bab VI pasal 6 dan 7 secara umum menyebutkan secara tersurat bahwa strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dengan pemangku kepentingan. Sepadan dengan hal tersebut di dalam Bab VI, secara umum dimaktubkan bahwa kelembagaan petani difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah. Pasal-pasal tersebut secara tersurat maupun tersirat tidak menyebutkan bahwa pelaku utama, yaitu petani, dilibatkan dalam pembuatan strategi dan pemberdayaan petani, sehingga pasal-pasal tersebut belum mengakomodasi partisipasi petani sebagai pelaku utama di dalam pembangunan pertanian. Kondisi tersebut menjadi salahsatu kelemahan di dalam implementasi penyuluhan tersebut. Teori maupun praktek di lapangan, peran serta petani sebagai pelaku utama merupakan keniscayaan di dalam merencanakan programa penyuluhan dan juga pembangunan pertanian di daerahnya, karena petanilah yang akan melaksanakan dan menjalani usahatannya di daerahnya tersebut. Sadono (2008) mengungkapkan bahwa diperlukan perubahan paradigma dalam bidang penyuluhan saat ini, yaitu dengan mengutamakan petani sebagai subjek. Hariadi (2009) mengungkapkan bahwa penyuluhan dialogis antara penyuluh dan petani menjadi pola dan model ideal dalam penyuluhan saat ini. Selain itu, Bunch di dalam Moeliono (2001) menyatakan bahwa tugas utama dalam pemberdayaan petani atau penyuluhan yaitu memberikan kesempatan kepada petani untuk dapat mempelajari dan belajar serta mandiri dalam setiap tahap dan aktivitas usahatannya, sehingga merupakan suatu keniscayaan bahwa program penyuluhan pertanian dimulai dengan melibatkan petani dalam mengidentifikasi masalah dan rencana kerja yang akan dilakukan dalam usahatannya. Leilana dan Jahi (2006) mengungkapkan bahwa bidang tugas pokok yang dianggap penting oleh petani dalam penyusunan rencana penyuluhan di desanya adalah pengembangan program.



Sucihatiningih dan Waridin (2010) mengungkapkan bahwa pelibatan petani dalam menyusun dan merealisasikan rencana kerja kegiatan kelompok tani di daerah Grobogan tinggi, sedangkan di Klaten sedang dan di Magelang rendah. Abubakar dan Siregar (2010) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan penyuluh pertanian di kecamatan Cibungbulang, kabupaten Bogor lebih rendah dibandingkan tingkat kepentingan petani sehingga petani belum merasa puas dengan layanan penyuluh pertanian tentang perencanaan kegiatan kelompok tani, penanganan dan pengolahan hasil ubi jalar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penyuluh masih belum merata dan maksimal dalam bekerjasama dengan petani. Indraningsih (2011) mengungkapkan bahwa penyuluhan yang intensif dapat meningkatkan persepsi petani terhadap penyuluhan. Dinar (2015) mengungkapkan, terdapat hubungan yang nyata antara pembinaan penyuluh pertanian dengan peningkatan pelaksanaan kegiatan kelompok tani.

Bahua dkk (2010) menyebutkan bahwa kompetensi, motivasi dan kemandirian penyuluh berpengaruh tidak langsung pada perubahan perilaku petani jagung di Gorontalo. Penyuluhan pada hakikatnya adalah suatu proses pembelajaran agar petani dapat memahami bahwa berusahatani merupakan suatu proses belajar yang berputar, seperti yang diungkapkan Sairi (2015) mengungkapkan bahwa penyuluhan pertanian sangat penting artinya dalam memberikan modal bagi petani dan keluarganya, sehingga memiliki kemampuan menolong dirinya sendiri untuk mencapai tujuan dalam memperbaiki kesejahteraan hidup petani dan keluarganya,

Artikel lain dalam UU SP3K yang dianggap penting adalah pada BAB V pasal 8 sampai dengan pasal 18 yang berisikan mengenai keberadaan, aturan dan pengaturan kelembagaan penyuluhan mulai dari tingkat pusat hingga di tingkat desa, yaitu berupa Pos Penyuluhan, yang pada implementasinya di lapangan di Kalimantan Barat saat ini, keberadaan kelembagaan lingkup terkecil yaitu berupa lembaga penyuluhan tingkat kecamatan dan belum dibentuk Pos Penyuluhan yang diamanatkan oleh UU SP3K tersebut. Paradigma pembentukan Pos Penyuluhan di tingkat desa merupakan hal yang baik dan penting,



sehingga setiap desa memiliki tempat pelayanan pertanian terdekat yang dapat dikunjungi petani. Pos Penyuluhan tersebut akan dirasakan jauh lebih penting untuk wilayah-wilayah yang berada di luar Pulau Jawa, karena cakupan wilayah yang sangat luas dalam satu kecamatan. Namun demikian, Syahyuti (2014) mengkritisi bahwa pendirian instansi Badan Koordinasi Penyuluhan di level provinsi dan kabupaten baru sebatas transformasi keorganisasian, namun belum pada transformasi kelembagaan yang sejatinya membutuhkan pemikiran dan upaya yang lebih dalam dan substansial. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian di Kalimantan Barat pada tahun 2014 mencapai 132 unit dari 180 unit jumlah ideal yang dibutuhkan (antarakalbar.com 2014)

Regulasi lain yaitu UU RI Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU PPP), secara umum berisikan pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah, yang meliputi pemberian kepastian atau penjaminan berjalannya proses produksi, pemasaran hasil produksi usahatani petani, serta pemberian penyuluhan, penyediaan fasilitas pembiayaan usahatani dan kelembagaan petani. Regulasi ini memberikan atmosfer atau semangat positif bagi petani yang selama ini dalam melakukan usahatannya belum terlindungi dan diberdayakan secara formal hukum.

Beberapa artikel yang dianggap penting yang menyangkut penyuluhan pertanian adalah terdapat pada Bab III Pasal 7, Bab V Pasal 46, 67, 68 dan Bab VIII Pasal 98 mengenai pemberdayaan pertanian yang dilakukan melalui penyuluhan dan kelembagaannya. Secara umum peesensi pemberdayaan petani melalui penyuluhan yang termaktun di dalam UU PPP tersebut selaras dan sesuai dengan UU SP3K. Terdapat hal yang spesifik dan teknis dalam UU PPP ini, yaitu mengenai pengaturan jumlah penyuluh dalam satu desa. Bab V Pasal 46 menyebutkan bahwa jumlah penyuluh untuk membina masyarakat petani pada satu desa adalah minimal berjumlah satu orang, atau satu penyuluh satu desa. Hal tersebut merupakan hal menarik dan krusial dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan, karena jumlah penyuluh saat ini dirasakan masih kekurangan untuk menangani seluruh desa. Kompas (2016) mengungkapkan bahwa



kementerian Pertanian menyatakan bahwa saat ini terdapat 12.007 orang penyuluh PNS yang menangani sebanyak 71.470 desa, maka apabila merujuk kepada kebutuhan minimal ideal jumlah penyuluh satu orang untuk satu desa, maka terdapat kekurangan 54.472 orang penyuluh. Rekrutmen dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) yang ada saat ini dengan ditambah dengan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta, diharapkan dapat menutupi kekurangan penyuluh tersebut.

Kuantitas penyuluh di Kalimantan Barat terdiri dari beberapa kelompok, yaitu Penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan penyuluh swadaya. Jumlah penyuluh di Kalimantan Barat saat ini adalah sebanyak 1.647 orang, yang didominasi oleh PPL PNS sebanyak 45,07% dari jumlah keseluruhan penyuluh. Jumlah perbandingan ideal penyuluh adalah satu orang untuk satu desa seperti yang diamanatkan dalam UU PPP, sehingga untuk wilayah Kalimantan Barat dengan jumlah desa sebanyak 1.737 desa (BPS Kalimantan Barat, 2015), maka diperlukan sedikitnya 1.737 orang penyuluh pertanian, maka dengan demikian kekurangan jumlah penyuluh pertanian yang diperlukan adalah sebanyak 93 orang. Jumlah penyuluh pertanian yang dimiliki tersebut relatif telah terpenuhi (94,8%), sehingga dalam segi sumber daya manusia, kebutuhan tersebut hanya memerlukan sedikit tambahan.

Beberapa hasil uraian mengenai regulasi penyuluhan pertanian, didapatkan beberapa hal penting mengenai pasal-pasal penting yang menjadi titik kritis dalam regulasi tersebut di dalam implementasinya. Selain itu dapat diamati implementasi titik kritis tersebut yang terjadi di dalam penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini (Tabel 1). Beberapa hal dan kritis yang terdapat di dalam Tabel 1 merupakan ringkasan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



Tabel 1. Pasal-Pasal Kritis Dalam Regulasi Penyuluhan Pertanian Dan Implementasinya Pada Penyuluhan Pertanian di Kalimantan Barat

Regulasi	Pasal kritis	Kandungan pasal dan kritik	Implementasi saat ini
UU SBT	Bab VII Pasal 56 dan 57 Tentang pembinaan dan peranserta masyarakat	Pemerintah menyelenggarakan pembinaan, dan menyelenggarakan penyuluhan, serta berkewajiban memberikan pelayanan informasi usahatani.	Kegiatan penyuluhan yang dilakukan lembaga penyuluhan di tingkat provinsi, kab/kota telah cukup aktif, namun belum intensif disebabkan banyak keterbatasan dari penyuluh.
UU SP3K	Bab VI pasal 6 dan 7 tentang strategi penyuluhan	Kebijakan dan strategi penyuluhan disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan <u>tanpa</u> melibatkan pelaku utama (petani).	Keterbatasan penyuluh menyebabkan belum intensifnya pertemuan dengan kelompok tani untuk membahas penyusunan strategi kebijakan penyuluhan.
	Bab V Pasal 8 s/d 18 tentang lembaga penyuluhan	Lembaga penyuluhan dibentuk dari tingkat pusat hingga tingkat desa (pos penyuluhan).	Belum terealisasinya pos penyuluhan di desa-desa.
	Bab XI pasal 35 tentang sanksi bagi penyuluh tentang materi penyuluhan	Materi penyuluhan harus direkomendasikan pemerintah, bila tidak terkena sanksi administratif.	Materi penyuluhan belum seluruhnya mendapat rekomendasi Komisi Teknologi, namun tidak ada sanksi.
UU PPP	Bab VI Pasal 12 tentang perlindungan petani	Perlindungan diberikan kepada petani pemilik/penggarap dengan luas lahan maksimal 2,0 Ha.	Belum ada realisasi melalui asuransi pertanian.
	Bab V Pasal 46 tentang fasilitas penyuluhan	Jumlah minimal ideal penyuluh adalah 1 orang untuk 1 desa.	Sebesar 94,8% desa telah ada penyuluhnya, sedikitnya 1 orang.
	Bab XI Pasal 102 tentang sanksi	Pihak yang melakukan Penyuluhan dengan materi yang belum direkomendasikan, terkena sanksi Rp 50.000.000 dan kurungan maks. 2 Tahun	Belum pernah ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggar.

Sumber : Diolah dari data primer dan sekunder



PENUTUP

Beberapa hal penting yang dianggap penting dan kritis dari tiga regulasi mengenai bidang pertanian dan menyangkut penyuluhan pertanian, UU SBT, UU SP4K dan UU PPP, adalah perencanaan penyuluhan pertanian disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melibatkan petani selaku pelaku utama sistem usahatani, kemudian materi penyuluhan atau inovasi teknologi yang disampaikan kepada petani harus direkomendasi terlebih dahulu oleh pemerintah sebagai bentuk lain jaminan dan perlindungan kepada petani, serta kelembagaan penyuluhan dan jumlah penyuluh yang proporsional menjadi syarat untuk berjalan dan berkembangnya penyuluhan pertanian di suatu daerah. Dinamika penyuluhan pertanian di Kalimantan Barat saat ini adalah cukup berjalan baik dan berkembang dalam aspek kelembagaan dan sumberdaya penyulunya, salahsatunya adalah dengan hampir terpenuhinya secara umum proporsi jumlah penyuluh untuk seluruh desa di Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar dan A.N. Siregar. 2010. Kualitas Pelayanan Penyuluh Pertanian dan Kepuasan Petani Dalam Penanganan dan Pengolahan Hasil Ubi Jalar. *Jurnal Penyuluhan Pertanian* Vol. 5 Nomor 1, STPP Bogor. Bogor
- Antara Kalimantan Barat. 2014. Kalbar Masih Kekurangan Balai Penyuluhan Pertanian. *antarakalbar.com*. Tanggal upload 23 Februari 2014. Tanggal akses 25 Agustus 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2015. Kalimantan Barat Dalam Angka. BPS Kalimantan Barat. Pontianak
- Bahua, M. I., A. Jahi, P. S. Asngari. A. Saleh dan I. G. P. Purnaba. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyuluh Pertanian dan Dampaknya pada Perilaku Petani Jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agropolitan* Volume 3 Nomor 1. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Bunch, R. 1982. di dalam Moeliono, I. 2001. Dua tongkol jagung. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Dinar. 2015. Hubungan Pembinaan Penyuluh Pertanian dengan Peningkatan Kemampuan Kelompok Tani. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan* Volume 3 Nomor 2. Universitas Majalengka, Majalengka
- Hariadi, S.S. 2009. Penyuluhan Dialogis Untuk Menjadikan Petani Penyuluh dan Mandiri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Indraningsih, K. S. 2011. Pengaruh Penyuluhan Terhadap Keputusan Petani Dalam Adopsi Inovasi Teknologi Usahatani Terpadu. *Jurnal Agro*



- Ekonomi Vol. 29 Nomor 1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor
- Kompas. 2016. Indonesia Masih Kekurangan 40.000 Penyuluh Pertanian. <http://regional.kompas.com>. Tanggal unggah 25 April 2016. Tanggal akses 25 Agustus 2016
- Leeuwis, C. 2004. Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension. A Blackwell Publishing Company, India
- Leilana, A dan A. Jahi. 2006. Kinerja Penyuluh Pertanian di Beberapa Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan, Vol 2 Nomor 2. IPB, Bogor
- Mardikanto, T. 2007. Sistem Penyuluhan Pertanian. Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Perhutanan Nasional, Surakarta.
- Rivera, W.M dan M.K. Qamar. 2003. Agricultural Extension, Rural Development and The Food Security Challenge. FAO, Rome.
- Sadono, D. 2008. Pemberdayaan Petani : Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Jurnal Penyuluhan Vol 4 No.1, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sairi, A. 2015. Peran Petugas Penyuluh Pertanian Dalam Mengembangkan Budidaya Padi Di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. e-journal Ilmu Komunikasi, Vol. 3 Nomor 2. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Samarinda
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Jakarta
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta
- Sucihatiningih, DWP dan Waridin. 2010. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost, Studi Empiris Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11 Nomor 1. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Syahyuti. 2014. Peran Strategis Penyuluh Swadaya Dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 32 Nomor 1. Pusat Sosial ekonomi dan Kebijakan. Bogor



KOMPLEKSITAS *NEW MEDIA* DALAM BUDIDAYA KAMBING PERANAKAN ETTAWA (PE) DI KABUPATEN PURWOREJO

Tatag Handaka¹, Hermin Indah Wahyuni², Endang Sulastris², Paulus Wiryono²

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIB – Universitas Trunojoyo Madura
Mahasiswa S3 Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP)
Sekolah Pascasarjana (SPs.) – UGM
Email: tataghandaka@gmail.com

²Staf Pengajar Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan (PKP)
Sekolah Pascasarjana (SPs.) – UGM

ABSTRAK

Peternak Purworejo telah membudidayakan kambing PE selama bertahun-tahun, sejak pemerintah kolonial Belanda hingga sekarang. Seiring perkembangan teknologi komunikasi (*new media*), peternak menginisiasinya untuk pemasaran dan penjualan kambing PE. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui kompleksitas *new media* dalam budidaya kambing PE di Purworejo. Kedua, menjelaskan proses produksi dan reproduksi sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas *new media*. Metode penelitian menggunakan *explorative case study*. Populasi penelitian di Kabupaten Purworejo dan sampel penelitian di 11 Kecamatan diantara 16 Kecamatan, teknik sampel yang digunakan *purposive sampling*. Tantangan dan tuntutan ini menjadi kompleksitas lingkungan bagi sistem komunikasi Pemerintah. Sistem seharusnya segera mereduksi kompleksitas untuk mendapatkan informasi lingkungan yang akan menjadi input bagi dirinya. Informasi ini yang digunakan sistem untuk proses produksi dan reproduksi. Namun sistem komunikasi Pemerintah lambat dalam mereduksi kompleksitas *new media*. Sistem komunikasi Pemerintah menjadi tidak adaptif dengan kompleksitas lingkungan ini.

Kata Kunci: kompleksitas, *new media*, budidaya kambing PE, sistem komunikasi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi komunikasi (*new media*), peternak di Kabupaten Purworejo mulai menggunakan media ini sebagai sarana untuk memasarkan dan menjual kambing PE. Salah satu aplikasi yang digunakan dari media ini adalah *Facebook* (FB), *WhatsApp* (WA), dan *web*. Peternak memiliki grup FB dan WA. Mereka berkomunikasi melalui aplikasi ini.

Penggunaan *new media* oleh peternak adalah perkembangan baru sekaligus merupakan kompleksitas bagi sistem komunikasi Pemerintah. Pemanfaatan *new media* untuk pemasaran kambing PE yang diinisiasi peternak adalah tantangan dan tuntutan lingkungan bagi sistem komunikasi Pemerintah.



Gejala ini menjadi “kebisingan” lingkungan yang harus segera direduksi dan diseleksi oleh sistem komunikasi Pemerintah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem komunikasi dalam perspektif Niklas Luhmann (Luhmann, 2002: 160-161; Luhmann, 1992: 254; Luhmann, 2000: 96; Viskovatoff, 1999: 501-502). Sistem komunikasi adalah proses produksi dan reproduksi informasi. Sistem selalu berada dalam kompleksitas lingkungan (Luhmann, 1995: 181-182; Lee, 2000: 320; Leydesdorff, 2000: 276). Ia dituntut untuk mereduksi kompleksitas ini (King and Thornhill, 2006: 200; Hardiman, 2008: 1-13). Sistem akan menyeleksi informasi yang bernilai bagi dirinya. Informasi ini akan menjadi input untuk memproduksi informasi yang berupa regulasi (Luhmann, 1989: 28-29; Luhmann, 2004: 86). Penelitian tentang sistem komunikasi pernah dilakukan sebelumnya, ditinjau dari aspek struktur adaptif (Handaka, 2014: 243-246) dan relasi kuasa (Handaka, 2015: 280-289).

Konsep *new media* meminjam dari konsep Lievrouw (2004). Ia sejak lebih dari satu dasa warsa yang lalu mengingatkan, bahwa *new media* akan menjadi *mainstream*. Dimana persoalan *shopping*, pendidikan, hiburan, sosialisasi hingga politik hilir mudik dalam satu jaringannya (Bell, 2007: 132). Wacana *new media* sering dikaitkan dengan interrelasi teknologi yang memperluas relasi sosial secara umum (Holmes, 2005: 13).

New media juga menawarkan keterhubungan (*interconnection*) antar subyek pada waktu yang sama (Stevenson, 2010: 157). Dalam *new media*, seseorang bisa turut terlibat memproduksi pesan sekaligus menerima pesan (Freedman, 2011: 209). Martin Lister mengatakan bahwa dalam *new media*, produksi dan distribusi teks/*contents* menjadi terdesentralisasi dan sangat individual (Rayner et.al., 2004: 221). Menurut McLuhan, *new media* juga ditandai dengan berbagi ide dan tingkah laku secara kolektif (Durham and Kellner, 2006: xxi). *New media* berfungsi untuk partisipasi, membangun identitas, sosialisasi dan jaringan, serta representasi diri (Croteau, et.al., 2006: 319). Ia juga membuka kemungkinan untuk membentuk kolektifitas, pengertian, dan intimitas secara *online* (McQuails, 2003: 44).



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explorative case study*. Populasi penelitian di Kabupaten Purworejo. Kabupaten ini dipilih karena menjadi sentra budidaya kambing PE di Indonesia. Selain itu sejarah budidaya kambing PE oleh peternak sudah berlangsung bertahun-tahun. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Sampel penelitian ditentukan 11 Kecamatan diantara 16 Kecamatan yang ada di Purworejo. Sebelas Kecamatan ini untuk mewakili kriteria berikut: (1) sentra utama budidaya kambing PE, yaitu Kecamatan Kaligesing, (2) daerah dataran rendah, yaitu Kecamatan Grabag, (3) daerah dataran sedang, yaitu Kecamatan Bayan, Gebang, Kemiri, Purworejo, dan Pituruh, dan (4) daerah dataran tinggi, yaitu Kecamatan Bener, Loano, Bagelen, dan Bruno.

Informan penelitian adalah ketua kelompok tani (poktan)/peternak, Kepala DPPKP, Kepala Bidang Peternakan di DPPKP, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di DPPKP, Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), dan Petugas Penyuluh Lapang (PPL). Informan ini dipilih karena memiliki banyak informasi (*rich information*) tentang penggunaan *new media* oleh peternak dan produksi dan reproduksi yang dijalankan sistem komunikasi Pemerintah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan konsistensi data dari sumber yang berbeda. Ketiga sumber tersebut adalah peternak, Pemerintah, dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas *New Media*

Peternak sudah mulai menggunakan media baru (*new media*) berupa *facebook* (FB). Peternak selain menggunakan FB juga *Whats App* (WA). Peternak menggunakan media ini untuk menjual-beli kambing PE. Anggota FB “Etawa Indonesia” milik peternak ini sudah lebih dari 1.000 orang. Anggota FB bukan hanya peternak dan pedagang dari Purworejo saja, tapi juga sudah menjangkau



peternak daerah luar Purworejo. Bahkan ada anggota yang berasal dari luar Jawa, misalnya Sumatera dan Kalimantan.

Peternak mem-*posting* berbagai jenis pejantan, indukan, dan anakan tiap hari di FB ini. Peternak menjadi lebih mudah menawarkan kambing PE-nya, pembeli juga lebih mudah mencari kambing PE yang diinginkan karena banyak pilihan dari berbagai peternak.

“Ya yang mending saya awal-awale sekitar tahun 2011 kalo gak salah ya, 2011 sama teman disuruh bikin facebook saya ndak mau, karena mengganggu pekerjaan e Pak. Saya disuruh-suruh dan akhirnya saya coba saya bikin. Awal pertama kali saya coba ngapload satus saya itu cempe umur 1 bulan, ternyata langsung laku ditawar sama orang Blitar namanya mas Safik, nama fecaebook mas Kadi Getung. Nah itu laku 5 juta Pak, itu fantastik dan luar biasa, itu yang bikin saya semangat.” [SM-BY, 18 November 2015].

“Banyak Pak, kurang lebih sekitar 1000 e untuk anggota itu Pak, dari berbagai daerah anggota luar Jawa yang ikut anggota Etawa Indonesia. Sangat membantu sekali untuk ternak-ternak yang ingin menjual atau ingin mencari bibit-bibit kambing PE. Disitu banyak postingan-postingan yang di upload setiap harinya, gonta-ganti kambing itu Pak.” [SM-BY, 18 November 2015].

Pembeli yang menginginkan kambing PE melalui FB, bisa langsung bertransaksi dengan penjualnya. Bila pembeli berasal dari daerah Purworejo, ia biasanya akan langsung datang ke rumah peternak untuk melihat secara langsung kambing PE yang ditawarkan. Bila pembeli dan penjual cocok dan sepakat harganya, maka transaksi dilakukan.

“Kadang facebook bisa lewat darat bisa, ya facebook itu tergantung daerah Pak. Kita dari daerah luar biasanya, kalo dari luar kota itu biasanya meninjaunya jauh Pak, itu dari internet saja. Kalo dekat bisa kita meninjau langsung gitu, jual belinya begitu Pak.” [SM-BY, 18 November 2015].

Handphone (HP) menjadi alat penting bagi peternak untuk mengakses FB dan WA. Peternak yang menawarkan kambing PE di sebuah grup WA, akan dihubungkan oleh anggota lain ke pembeli yang mencari spesifikasi kambing PE seperti yang ditawarkan. Masing-masing anggota punya jaringan ke peternak lain yang tidak masuk dalam grup WA. Maka Kambing PE yang ditawarkan melalui WA, bisa jadi pembelinya bukan anggota tapi jaringan anggota dari grup WA tersebut.

“Biasanya lewat HP, tapi yang paling mudah yaitu HP, misal ada bagaimana kita ada anakan yang bagus, ada yang mau dijual ga? Nah lewat HP biasanya ditelpon, biasanya jaringan. Misal jaringan kita di Kaligesing, nanti Kaligesing punya jaringan lagi. Sebenarnya penjualan kambing PE selama ini banyak di jaringan, disamping ada pasarnya di Kaligesing. Ini istilahnya disini belum ada pasar yang baku, masih ikut Kaligesing sana.” [TS-GR, 12 November 2015].



“Awalnya sebenarnya dari kita beli, nyatet nomor HP, trus nanti kalau ada lagi lewat HP, trus nyatet no HP lagi, ya gitu loh dikasih kan akhirnya kan berkembang. Tapi paling banyak ya itu ngasih nomor HP, ngasih nomor HP.” [TS-GR, 12 November 2015].

Produksi Informasi *New Media*

Peternak kambing PE sudah banyak menggunakan media baru (*new media*) untuk bertukar informasi tentang teknik budidaya, manajemen budidaya, dan pemasaran kambing PE. Peternak menggunakan *Facebook* (FB), *What's App* (WA), dan blog untuk bertukar informasi.

Peternak menggunakan WA untuk mengadakan acara pertemuan poktan di tiap pekan/bulan. Sesama anggota poktan menawarkan dan berjual-beli kambing PE melalui WA dan FB. Peternak memiliki grup di WA dan FB. Grup ini bukan hanya dalam satu poktan, tapi sudah meliputi seluruh peternak di Purworejo dan ada yang nasional. Salah satu grup FB yang cukup terkenal di kalangan peternak adalah “kampus Ettawa”.

Peternak yang berjual-beli kambing PE melalui WA biasanya melalui grup. Peternak memotret kambing PE miliknya. Peternak lain biasanya akan menanyakan spesifikasi kambing yang ditawarkan. Bila ada kecocokan kualitas dan harga, kadang calon pembeli akan melihat dulu kambing di kandang penjual. Terutama bila rumah pembeli dekat dengan rumah penjual. Bila rumah keduanya berjauhan, biasanya akan langsung diadakan tawar-menawar harga/transaksi.

Peternak di Kaligesing ada yang membuat *blog/web* yang khusus membicarakan budidaya kambing PE. Peternak, peminat, pedagang, atau orang awam banyak yang berdiskusi tentang berbagai hal tentang kambing PE di alamat *web* tersebut. Pengelola *web* rajin memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan penanya.

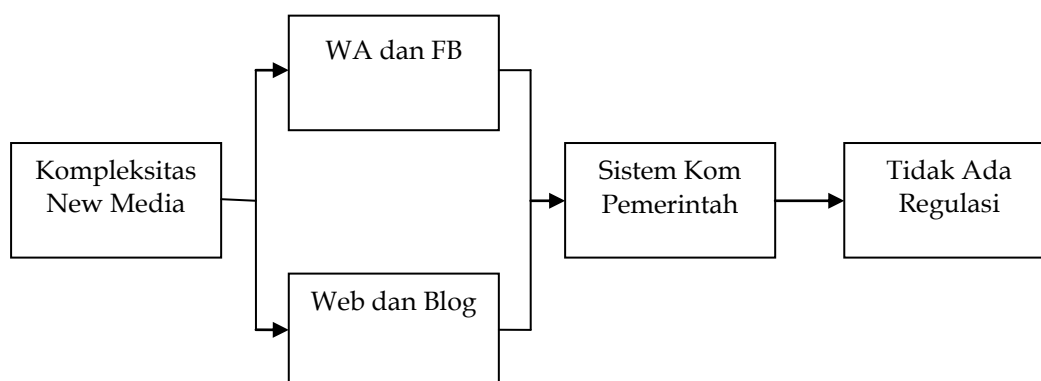
Peternak sekaligus pengelola *web* ini sering menulis tentang persoalan teknik budidaya, perhitungan ekonomis budidaya, dan berbagai persoalan pemasaran kambing PE. Kalkulasi ekonomis budidaya kambing PE dijelaskan dengan detil dan disertai dengan contoh. Peminat budidaya kambing PE dari berbagai daerah di Indonesia banyak memanfaatkan media ini untuk bertukar pendapat dan pengalaman.



Pengelola *web* “gunungkelir.com” ini juga menyediakan rumahnya untuk berbagi pengalaman dan tempat belajar bagi semua orang yang berminat dalam budidaya kambing PE. Secara tidak langsung, peternak ini turut memberikan penyuluhan tentang budidaya kambing PE kepada banyak orang, meskipun ia sendiri banyak yang tidak mengenalnya.

Banyak poktan yang sudah memiliki grup WA atau FB. Jual-beli kambing PE di kalangan peternak ada yang sudah bergeser melalui media baru ini. Kadang bila sesama peternak yang menjadi anggota grup tidak ada yang berminat dengan kambing yang ditawarkan. Peternak-peternak yang menjadi anggota menawarkan ke teman-teman lain yang tidak tergabung dalam grup ini. Peternak yang menjadi anggota grup tinggal menghubungkan ke anggota yang menawarkan kambing PE-nya.

Media baru sudah mulai digunakan secara masif oleh peternak, terutama peternak muda. Mereka lebih banyak menggunakan media ini untuk berbagi dan mendapatkan berbagai informasi budidaya kambing PE.



Gambar 1. Kerangka Analisis Produksi Informasi *New Media*

Sistem komunikasi Pemerintah dalam menghadapi kompleksitas ini, tidak memiliki regulasi yang khusus untuk menjawab persoalan riil ini. Sistem komunikasi Pemerintah bahkan tidak menggunakan media baru untuk menyebarkan informasi budidaya kambing PE ke peternak.

Sistem komunikasi Pemerintah juga menggunakan media tapi bukan *new media*. Pemerintah menggunakan siaran radio untuk menyampaikan informasi budidaya kambing PE. PPL menyampaikan materi budidaya bidang peternakan,



lalu pendengar radio menyampaikan pertanyaan, dan PPL memberikan jawaban. Siaran ini dipandu oleh penyiar radio tempat siaran dilaksanakan.

Pemerintah sebenarnya sudah menggunakan media baru dalam menyampaikan informasi budidaya kambing PE. Informasi ini bisa dijumpai di alamat web pemerintah Kabupaten Purworejo (kabupatenpurworejo.go.id). Tapi informasi ini sangat sedikit dan terbatas, informasi ini juga jarang diperbarui (*update*).

PENUTUP

Peternak sudah menginisiasi *new media* untuk memasarkan dan menjual kambing PE. Sistem komunikasi Pemerintah belum berhasil mereduksi kompleksitas *new media* dalam kaitannya dengan budidaya kambing PE. Sistem komunikasi Pemerintah belum memproduksi regulasi untuk menghadapi tuntutan dan tantangan lingkungan berupa perkembangan *new media*, sehingga tidak adaptif. Sebagai langkah awal, sistem komunikasi Pemerintah bisa memproduksi regulasi berkaitan dengan *new media* melalui *web* Pemerintah Kabupaten Purworejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, David. (2007). *Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway*. New York: Routledge.
- Croteau, David, and Hoynes, William, and Milan, Stefania. (2006). *Media/Society: Industries, Images, and Audiences*. 4th Edition. Los Angeles: SAGE Publications.
- Durham, Meenakshi Gigi and Kellner, Douglas M. (2006). *Media and Cultural Studies: Key Works*. Revised Edition. USA: Blackwell Publishing Ltd.
- Freedman, Eric. (2011). *The Limits of the Cellular Imaginary*. In *Flow TV: Television in the Age of Media Convergence*. Kackman, Michael, and Binfield, Marnie, and Payne, Matthew Thomas, and Perlman, Allison and Sebok, Bryan (eds). New York: Routledge.
- Handaka, Tatag. (2014). *Struktur Adaptif (Adaptive Structure) dalam Sistem Komunikasi Budidaya Kambing Peranakan Etawa (PE) di Kabupaten Purworejo*. Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Peternakan Indonesia Berbasis Riset Inovatif, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, UNS.
- Handaka, Tatag. (2015). *Relasi Kuasa dan Sistem Komunikasi Pemerintah dalam Budidaya Kambing Peranakan Etawa (PE) Kaligesing di Kabupaten Purworejo*.



- Prosiding Komunikasi Politik di Era Digital, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara (UMN).
- Hardiman, F. Budi. *Teori Sistem Niklas Luhmann*, Th. XXIX no. 3/2008, Jurnal Filsafat Driyarkara, Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.
- Holmes, David. (2005). *Communication Theory: Media, Technology and Society*. London: SAGE Publications.
- King, Michael and Thornhill, Chris (ed). (2006). *Luhmann on Law and Politics: Critical Appraisals and Applications*. Oxford: Hart Publishing.
- Lee, Daniel. *The Society of Society: The Grand Finale of Niklas Luhmann*, Journal of Sociological Theory 18 (July 2000), American Sociological Association, USA.
- Leydesdorff, Loet. *Luhmann, Habermas, and the Theory of Communication*, Systems Research and Behavioral Science 17 (3). 2000. pp. 273-288. <<http://www.leydesdorff.net/montreal.htm>> (Diunduh hari Sabtu, 1 Maret 2014, jam 20.15).
- Luhmann, Niklas. (1989). *Ecological Communication*. Translated by John Berdnarz, Jr. Chicago: The University of Chicago Press.
- Luhmann, Niklas. (1992). *What is Communication*, Journal of the International Communication Association, Volume 2, Issue 3, ISSN: 1050-3293, pp. 251-259.
- Luhmann, Niklas. (1995). *Social Systems*. Translated by John Bednarz Jr. with Dirk Baecker. Stanford: Stanford University Press.
- Luhmann, Niklas. (2000). *The Reality of the Mass Media*. Translated by Kathleen Cross. California: Stanford University Press.
- Luhmann, Niklas. (2002). *Theories of Distinction: Redescribing the Description of Modernity*. Translated by Joseph O'Neil [et al.]. California: Stanford University.
- Luhmann, Niklas. (2004). *Law as A Social System*. Translated by Klaus A. Ziegert. New York: Oxford University Press.
- McQuails, Denis. (2003). *New Horizons for Communication Theory in the New Media Age*. In *A Companion to Media Studies*. Angharad N. Valdivia (ed). USA: Blackwell Publishing Ltd.
- Proposal Usulan Penetapan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing (Kambing PE) di Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, DPPKP Kabupaten Purworejo, 2015.
- Rayner, Philip, and Wall, Peter and Kruger, Stephen. (2004). *Media Studies: The Essential Resource*. London: Routledge.
- Stevenson, Nick. (2010). *New Media, Popular Culture and Social Theory*. In *The Routledge Companion to Social Theory*. Elliott, Anthony (ed.). New York: Routledge.
- Viskovatoff, Alex. *Foundations of Niklas Luhmann's Theory of Social Systems*, Philosophy of the Social Sciences, Vol. 29 No. 4. December 1999, pp. 481-516.



KOMUNIKASI STRATEGIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN LAHAN GAMBUT (Refleksi Fenomenologis Masyarakat Riau)

Arifudin

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

arif_udin@yahoo.com

ABSTRAK

Dokumen komunikasi strategis dalam pembangunan pada kawasan lahan gambut, belum dimiliki oleh pemerintah maupun perusahaan. Hal ini dapat diduga sebagai salah satu alasan mengapa bencana kabut yang muncul setiap tahun sejak tahun 1997, belum dapat diselesaikan. Pertanyaannya adalah, apa pendekatan perubahan sosial dalam memberdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah ini, yang dapat dilakukan?. Duta (2011) memberikan konsep pendekatan dalam komunikasi strategis untuk perubahan sosial melalui tiga aspek: budaya, struktur, dan agen. Pendekatan tersebut dapat diimplementasikan dengan mengetahui secara mendalam kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Kasus Provinsi Riau, misalnya, memiliki kondisi unik, karena akses terbuka, sehingga sangat memudahkan bagi pendatang. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah ataupun perusahaan harus memperhatikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki masalah dan sekaligus sumber daya untuk memecahkan masalah mereka masing-masing. Dengan demikian, perubahan sosial melalui komunikasi pembangunan yang strategis dapat dilakukan melalui pendekatan budaya, struktur dan agen.

Kata kunci: Komunikasi Strategis, Pembangunan, Perubahan Sosial, Lahan Gambut.

PENDAHULUAN

Isu yang khas dari pembangunan di Propinsi Riau adalah persoalan lahan gambut yang menutupi 50% luas daratan yang ada, baik gambut darat maupun gambut pulau. Artinya, isu pembangunan di Riau dipastikan akan terkait dengan pemanfaatan lahan gambut, seperti pembangunan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) maupun perkebunan kelapa sawit. Persoalan ini menjadi keresahan bagi masyarakat Riau, akibat kesalahan dalam proses pembangunan, khususnya dalam pengkomunikasinya, menyebabkan terjadinya bencana tahunan.

Terdapat berbagai isu penting dalam masyarakat yang harus diperhatikan dalam komunikasi strategis pembangunan kawasan lahan gambut,



diantaranya adalah dominasi perusahaan terhadap aktifitas ekonomi masyarakat dan isu masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba memaparkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Riau, khususnya terkait dengan perkembangan masyarakat dengan hadirnya korporasi HTI dan Perkebunan Kelapa Sawit dan tawaran komunikasi strategis dalam pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah sebuah refleksi fenomenologis terhadap persoalan masyarakat, khususnya pada lahan gambut di Propinsi Riau yang penulis peroleh dan analisis selama tinggal dan beraktifitas di Propinsi Riau, selanjutnya penulis membandingkannya dengan referensi komunikasi strategis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam teori ekonomi dapat dijelaskan bahwa investasi pembangunan, seperti kehadiran perusahaan akan memberikan efek ganda (*multiplayers effect*) terhadap masyarakat setempat. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit, yang menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Sebagai contoh di dua kabupaten di Propinsi Riau, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Pelalawan, sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Kampar. Sejak berdirinya Perusahaan HTI, PT. RAPP, kehidupan di salah satu desa di pelalawan berubah drastis menjadi kota baru dengan segala aktifitasnya. Ribuan pendatang, berdatangan tanpa diundang, sebab aktifitas perusahaan memang memancing kehadiran pendatang baik dari Riau, maupun dari luar Propinsi Riau, seperti Sumatera Barat, Sumatra Utara dan Jambi. Imigran dari pulau Jawa juga tidak sedikit yang datang mengadu nasib, ditunjang dengan mudahnya akses menuju kota ini melalui jalan lintas timur. Dapat dikatakan aktifitas perusahaan menjadi detak jantung bagi kabupaten ini.

Begitu juga dengan Kabupaten Siak, Kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis ini juga berubah setelah adanya otonomi daerah, kawasan



yang paling hidup dan banyak aktifitas ekonomi masyarakatnya bukan berada di Ibukota Kabupaten, namun terdapat di salah satu Kecamatan, yakni Perawang. Di sini, kehadiran Grup Sinar Mas mengelola Pabrik Pulp and Paper-nya dan sekaligus sebagai penggerak ekonomi dari aktifitas perusahaan dan ribuan karyawan yang bekerja. Dengan demikian kehadiran perusahaan menjadi motor penggerak aktifitas ekonomi masyarakat.

Sebelum aktifitas perusahaan berlangsung, telah bermukim masyarakat tempatan yang tinggal bertahun-tahun. Masyarakat tempatan pada umumnya bersuku melayu, ataupun suku-suku pedalaman seperti Suku Sakai dan Suku Akik. Selain suku asli, masyarakat tempatan yang sudah beberapa generasi menetap. Dominasi suku pada desa tertentu dapat dilihat dari nama desa, dimana nama-nama desa yang mayoritas penduduk jawa, mengandung unsur penamaan jawa, seperti desa sukajadi, suka maju, ataupun suka ramai, dan masyarakat biasanya menyebut dengan kampung jawa. Sedangkan nama desa asli biasanya bernuansa melayu, seperti Desa Sialang, Desa Sepahat, Desa Tanjung Leban, Desa Seminai. Pada umumnya penamaan desa disebabkan sejarah unik dari masing-masing desa tersebut, yang dikenal dengan “alam berkembang menjadi guru”.

Masyarakat tempatan pada beberapa program pemerintah, seperti pada program PIR Trans ditahun 1980-an mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta Transmigrasi, dimana 20% dari peserta program adalah masyarakat tempatan. Namun hasil penelitian Arifudin (2013), menunjukkan bahwa sebagian besar dari peserta transmigrasi lokal kembali ke desa asal. Pada umumnya mereka membuat kebun sendiri, sebab merasa mampu untuk mengelola kebun sawit sendiri dengan luasan yang lebih besar. Pada umumnya mereka menjual lahan plasma mereka kepada peserta transmigrasi yang bertahan, dan membeli lahan ditempat lain yang lebih luas dan tambahan pembangunan rumah yang cukup layak. Di desa asli, mereka dapat hidup dengan budaya mereka, seperti yang terjadi di Desa Senama Nenek, kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.



Seiring perkembangan pembangunan, maka masyarakat luar juga berdatangan ke Propinsi Riau, baik itu melalui program transmigrasi, hubungan persaudaraan, ataupun yang datang sendiri dengan alasan untuk merubah nasib. Pendatang yang resmi dan faktor sengaja adalah karyawan perusahaan, baik itu sebagai karyawan tetap maupun sebagai karyawan kontrak dari kontraktor perusahaan besar. Sebagian dari mereka juga membeli lahan disekitar perusahaan, dan tidak sedikit yang menikah dengan masyarakat tempatan. Terdapat juga migrant yang datang secara berbondong-bondong datang ke Propinsi Riau, dengan pola membeli lahan yang sangat murah. Hal ini terjadi di Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis, dimana pada awalnya mereka membeli lahan, kemudian menanam sawit sekedarnya, hanya untuk klaim atas lahan yang dimiliki (Arifudin, 2014). Pola lain adalah seperti yang terjadi di Dusun Tasik Betung, Kabupaten Siak, dimana pembagian masyarakat dengan pendatang dengan sistem pinang dibelah dua, artinya 50% untuk penggarap/pendatang, dan 50%nya untuk warga tempatan (Arifudin, 2011). Kelompok ini termasuk kelompok yang berani membakar lahan, sebab sehabis membakar mereka bisa pulang ke kampung halaman, dan akan kembali pada waktu saat tanam, untuk merawat tanaman yang sudah ada. Keberadaan mereka illegal, tetapi pemerintah daerah tidak bisa mengambil sikap. Contoh lain adalah yang pemukiman masyarakat dalam kawasan hutan lindung, yang jelas-jelas terlarang untuk pemukiman

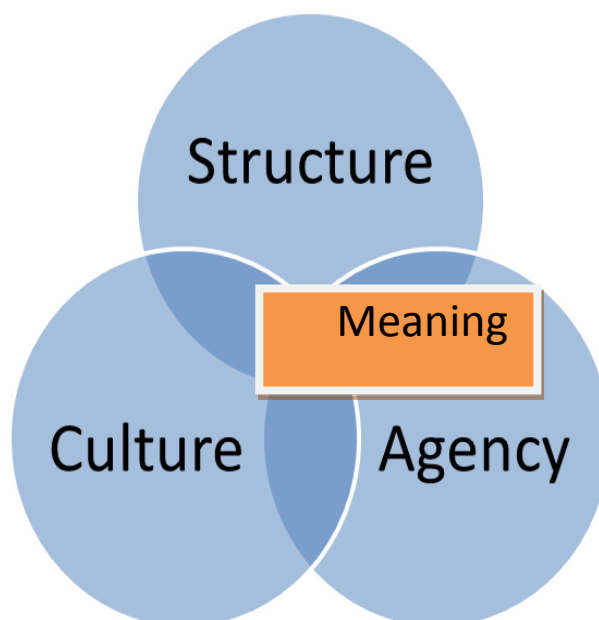
Untungnya, konflik terbuka antara penduduk lokal dan pendatang jarang terjadi, tetapi tetap menyisakan persoalan. Penduduk lokal dibeberapa tempat juga sudah terdesak dan banyak kehilangan lahan. Seperti di Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Penduduk asli yang bersuku melayu, hampir tidak lagi memiliki lahan. Pada umumnya mereka menjual lahan kepada pendatang yang pelan-pelan namun pasti secara kuantitas lebih banyak. Akses yang sangat terbuka sejak dibangunnya jembatan Siak dan jauh sebelumnya beoperasinya PT. Caltex dan telah diambil oleh Pemda setempat yang selanjutnya dioperasikan bersama dengan Pertamina Hulu. Saat ini, Dayun seperti kota kecil yang cukup hidup, dimana terdapat pasar Kecamatan yang



sangat ramai, bahkan Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan Mapolres Siak di Desa Dayun.

Hal tersebut diatas, merupakan bentuk-bentuk dinamika perkembangan masyarakat yang menyebabkan kompleksitas dalam pembangunan. Selain itu, hal tersebut diduga menjadi sulitnya mengkomunikasikan secara strategis persoalan kebakaran lahan gambut. Sehingga diperlukan sebuah konsep pengkomunikasian pemberdayaan masyarakat secara strategis, sehingga dapat menjadi kesadaran bagi siapapun juga, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk memperhatikan aspek pembangunan secara utuh, meliputi pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Secara komprehensif, Dutta (2011) menawarkan pendekatan budaya dalam komunikasi strategis untuk perubahan sosial dalam konteks pembangunan atau *Culture-Centred Aproach for Social Change Communication (CCA)*. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini membangun partisipasi dalam usaha-usaha perubahan sosial. Menekankan pada perubahan baik secara individu maupun kelompok untuk dapat menentukan pilihan-pilihan mereka.



Gambar 1. Culture, Structure, Dan Agency (Duta, 2011)

Dari gambar tersebut dapat kita pahami bahwa, (1) *Culture*/ Budaya adalah dinamika dan area yang secara terus-menerus dikontentasikan antara



nilai-nilai, kepercayaan, aturan, peran, dan prakteknya yang menjadi kerangka berfikir dalam komunikasi; (2) *Structure/* struktur, merujuk pada sistem pengorganisasian, aturan, peran dan proses-prosesnya melalui akses terhadap sumberdaya yang dapat disediakan dan atau terbatas; (3) *Agency/* Agen: merujuk pada kapasitas yang mendasar dari masyarakat lokal, keluarga, dan individu untuk membuat pilihan-pilihan dalam hubungan dengan struktur.

Selain itu terdapat beberapa intervensi yang dapat dilakukan sebagai bentuk campur tangan atau strategi yang bisa dilakukan, yakni (1) *Intervention in Knowledge Production*, yakni campur pengetahuan dalam ilmu pengetahuan, dimana communicator dapat mempengaruhi kurikulum, atau ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penyusunan maupun perubahan kurikulum; (2) *Intervention in Policy Circles*, bagaimana pihak-pihak pengambil keputusan, dalam hal ini legislatif dan eksekutif harus di ajak atau diberikan pendekatan apa yang menjadi focus dalam perubahan sosial. (3) *Intervention in Implementation and evaluation cycle*, yakni bagaimana komunikasi itu dilakukan pada saat implementasi, monitoring dan evaluasi, sehingga dapat dipastikan bagaimana pelaksanaannya, dan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi apakah perubahan sosial yang diinginkan sudah berada pada jalurnya. Dengan mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Duta (2011), maka komunikasi strategis untuk perubahan sosial di lahan gambut dapat dilakukan dengan 3 pendekatan yang ditawarkan, yakni budaya, struktur, dan agen.

Pendekatan Budaya

Lahan gambut pada umumnya berada pada wilayah pesisir timur pulau sumatera, dimana masyarakat pesisir memiliki budaya yang inklusif, artinya terbuka kepada orang luar yang datang. Hal ini dapat dilihat dari komposisi penduduk yang tidak didominasi oleh satu suku bangsa, meskipun suku melayu merupakan suku asli, kita masih bisa menjumpai orang Jawa, China, Bugis, Banjar, Batak dan Minang berinteraksi satu sama lain dan hidup saling berdampingan. Istilah yang lebih tepat untuk mengelompokkan masyarakat



adalah penduduk tempatan dan pendatang seperti yang disampaikan pada isu-isu yang ada dilahan gambut.

Dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang beragam, maka diperlukan pendekatan yang beragam pula. Sebelum adanya perusahaan perekebunan kelapa sawit dan HTI, masyarakat tempatan pada umumnya adalah para nelayan, pedagang ataupun berladang, sedangkan tanaman perkebunan yang sejak dahulu dibudidayakan dan sebagai mata pencaharian pokok adalah tanaman karet, dimana banyak ditemui hutan karet yang dibudidayakan dengan cara tradisional.

Dalam strategi komunikasi yang dilakukan, komunikator harus memperhatikan bagaimana budaya masyarakat tempatan yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya sangat berbeda. Sebagai contoh, di Desa Dayun, Kabupaten Siak, melayu disana memiliki kebiasaan untuk menjual tanah yang dimiliki, tidak terlalu suka berbudidaya tanaman sayur, sebab menghabiskan waktu di ladang. Sedangkan masyarakat jawa adalah masyarakat yang guyup, pada umumnya pekerja keras, mau bekerja dilahan orang lain untuk mendapatkan upah, tetapi juga pelan-pelan berivesitasi untuk membangun kebun sendiri. Sedangkan warga yang bersuku batak, adalah kelompok yang pekerja keras, dengan hasrat menduduki lahan yang cukup tinggi. Maka akan berbeda pendekatan budaya yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan sosial setempat. Namun demikian juga, sebagai budaya induk yang memiliki kelembagaan yang sangat kuat seperti Lembaga Adat Melayu (LAM) dapat digunakan sebagai saluran efektif untuk melakukan perubahan sosial dalam cakupan yang lebih luas.

Pendekatan struktur dapat dilakukan melalui sistem, aturan, dan kebijakan yang sudah ada. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, tentang bagaimana pengelolaan ekosistem gambut yang berkelanjutan. Pada umumnya, pembuat kebijakan tidak memiliki wawasan yang dalam tentang hal tersebut. Melalui dialog yang intensif, seperti workshop, seminar, diskusi interaktif, *hearing* dengan legislatif, dapat memunculkan kesadaran pengambil kebijakan



untuk berpikir ulang seperti apa seharusnya pembangunan dilahan gambut itu dilakukan.

Pendekatan melalui sistem pendidikan yang sudah berjalan juga dapat dilakukan, seperti dalam kurikulum yang diberikan di sekolah-sekolah, dari pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan sampai keperguruan tinggi lokal dengan memasukkannya sebagai muatan lokal yang penting. Biasanya, muatan lokal yang dimasukkan adalah pada mata pelajaran bahasa daerah, namun tidak ada salahnya untuk memasukkan wawasan tentang pembangunan lahan gambut berkelanjutan kepada para siswa. Siswa di Riau sebenarnya sangat merasakan bagaimana dampak asap yang mengganggu aktifitas belajar mengajar, dan banyak dari siswa-siswa yang rentan terhadap polusi asap, mengalami berbagai macam penyakit akibat asap. Sehingga akan lebih mudah memunculkan kesadaran kepada siswa-siswa disekolah

Sistem kesehatan, kehutanan, dan lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan struktur yang memang selalu berurusan dengan persoalan asap. Pendekatan ini memang harus dilakukan secara komprehensif, masif, dan sistematis, sehingga semua unsur pendukung untuk melakukan perubahan sosial itu dapat berjalan dengan baik secara simultan. Tentunya akan terjadi berbagai benturan, terutama dari sisi industri kelapa sawit dan HTI, yang mengalami gangguan dari zona kenyamanan dari para pejabat sebelumnya yang melepaskan banyak kawasan yang tidak layak untuk digunakan sebagai areal konsesi. Namun demikian, pendekatan struktur ini sangat penting untuk dilakukan.

Agen sangat penting dalam komunikasi untuk perubahan sosial, sebab agen yang akan menjadi duta yang mengkomunikasikan materi penting dari perubahan. Agen bisa jadi individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat yang bisa memberikan rujukan bagaimana pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Agen yang baik, adalah agen yang bisa menjadi *role model* bagi masyarakat lainnya. Sehingga apa yang dikomunikasikan lebih mudah diterima oleh konstituen atau calon penerima. Dalam masa periode penyuluhan pada



tahun-tahun awal kemerdekaan, model ini pernah diterapkan dengan nama pangreh praja, yaitu seorang petugas yang tinggal bersama dengan masyarakat, memiliki lahan yang luas, dimana diusahakan berbagai jenis tanaman atau tanaman yang ingin dikembangkan, dimana masyarakat sekitar dapat meniru model yang diterapkan. Bahkan diharapkan orang lain dapat mengembangkan lebih lanjut dengan memodifikasi model yang sudah ada, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam kegiatan penyuluhan pada umumnya memiliki agen, yaitu petugas penyuluh. Agen ini menguasai materi, metode dan teknik-teknik yang dapat digunakan dalam perubahan sosial.

Keluarga juga dapat menjadi agen, maksudnya disini sebuah model keluarga yang berhasil melakukan perubahan sosial dapat menjadi contoh bagi keluarga lainnya. Secara praxis, usaha tani sebagai sebuah usaha keluarga pada lahan gambut yang berhasil menerapkan bagaimana usaha tani yang ideal dapat dijadikan sebuah model yang berhasil. Selain keluarga, kelompok masyarakat yang berhasil menerapkan sebuah konsep yang ideal di lahan gambut juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat lain. Sebagai contoh usaha yang sedang dilakukan oleh Masyarakat Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, dimana mereka memiliki kearifan lokal untuk memanfaatkan lahan gambut untuk tanaman yang cocok untuk ekosistem gambut tersebut, yakni tanaman sagu. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat lain diluar komunitas ini untuk belajar, bagaimana terjadi harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Dalam strategi komunikasi untuk perubahan sosial pada masyarakat di lahan gambut dapat menggunakan strategi yang ditawarkan oleh Dutta (2011) dengan *Culture-Centred Approach*, yakni pendekatan budaya, pendekatan struktur, dan pendekatan agen. Pemahaman terhadap keberagaman budaya masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang akan dapat memudahkan untuk komunikasi yang lebih efektif. Begitu juga dengan struktur yang sudah



eksis sebagai wadah strategis untuk melakukan perubahan sosial. Agen, baik individu, keluarga, dan kelompok masyarakat yang berhasil dapat menjadi model yang ideal bagi pengembangan masyarakat di lahan gambut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin., Defrioza, (2011). *Dinamika Masyarakat Desa Tasik Betung (Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Konservasi dalam Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau Jurnal Activita Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat. Universitas Negeri Sebelas Maret. Solo*
- Arifudin, Rosnita, Yulida R, Sayamar E. (2013) *Adopsi dan Difusi Teknologi Budidaya Kelapa Sawit di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kampar Proseding Seminarata BKS Barat, Universitas Tanjung Pura*
- Dutta. M.J. 2011. *Communicating Social Change: Structure, Culture, and Agency (Routledge Communication Series)*
- Jalil, A., Gunawan, H. Arifudin. (2014). *Jerebu di Negeri Kami. Bencana Asap dan Solusituntasnya. Unri Press. Pekanbaru.*



PENGUATAN KOMUNIKASI KELOMPOK DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DALAM PENGGUNAAN PESTISIDA NABATI DI KABUPATEN KOLAKA

M. Najib Husain

Dosen FISIP Universitas Halu Oleo

najib_75husain@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu kendala yang merupakan faktor penyebab utama rendahnya produksi kakao di Sulawesi Tenggara terutama 3 tahun terakhir adalah adanya serangan hama PBK (Penggerek Buah Kakao). Kabupaten Kolaka merupakan sentra produksi kakao terbesar di Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sultra merupakan sentra kedua kakao nasional setelah Sulawesi Selatan. Kondisi akhir-akhir ini dimana produktivitas kakao menurun, produktivitas tanaman kakao berkisar 1,1 ton/ha tahun 2010 dan 2012 berkisar 524 kg/ha, ini menunjukkan adanya penurunan. Upaya mengatasi serangan hama PBK dan busuk buah tersebut umumnya petani lebih banyak menggunakan pestisida (fungisida) anorganik sintetik. Mengingat dampak negatif dari penggunaan pestisida organik sintetik terhadap lingkungan dan biaya pengendalian yang semakin tinggi seiring dengan makin mahalannya harga pestisida maka perlu dicarikan alternatif pengendalian misalnya menggunakan *Pestisida Nabati* yang dibuat dari bahan-bahan tumbuhan seperti umbi gadung, brotowali, daun sirsak, akar tuba, pulai, kulit jambu mete dan lain-lain. Untuk bersaing di era MEA, petani dituntut menghasilkan produk yang cukup dengan kualitas yang memadai sehingga nilai jualnya tinggi. Persoalan yang muncul kemudian bagaimana memperkenalkan pestisida nabati ini sehingga dapat digunakan oleh petani, salah satu jalan yang dilakukan adalah dengan penguatan komunikasi kelompok pada petani di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus kelompok tani, petani dan pemerintah. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD).

Kata Kunci : Penguatan Komunikasi Kelompok, Pemberdayaan Petani Kakao, dan Pestisida Nabati.

PENDAHULUAN

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang dikenal sebagai sentra produksi kakao nasional. Kakao merupakan komoditas unggulan Sulawesi Tenggara, luas areal tanaman kakao di Sulawesi Tenggara adalah 109.516,70 ha dengan produksi biji 771.481,48 ton per tahun. Luas areal perkebunan kakao sampai tahun 2007 telah mencapai 200.009 ha yang meliputi Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna



dan Buton. Akan tetapi produksi biji kakao mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan produksi 137.730 ton (Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, 2008).

Salah satu kendala yang merupakan faktor penyebab utama rendahnya produksi kakao di Sulawesi Tenggara terutama 3 tahun terakhir adalah adanya serangan hama PBK yang disebabkan oleh *Conopomorpha crameylla* dan penyakit busuk buah yang disebabkan oleh patogen *Phytophthora palmivora*. Di daerah-daerah lokasi revitalisasi kakao jumlah petani responden yang tanamannya terserang hama PBK mencapai 89,47 % di Konawe Selatan; 81,74 % di Konawe; 91,75 % di Kolaka Utara dan 92,97 % di Kolaka. Sementara yang tanamannya terserang penyakit busuk buah mencapai 70,18 % di Konawe Selatan; 77,39 % di Konawe; 76,29 % di Kolaka Utara dan 69,53 % di Kolaka.

Dalam upaya mengatasi serangan hama PBK dan busuk buah tersebut umumnya petani lebih banyak menggunakan pestisida (fungisida) anorganik sintetik. Mengingat dampak negatif dari penggunaan pestisida organik sintetik terhadap lingkungan dan biaya pengendalian yang semakin tinggi seiring dengan makin mahalnya harga pestisida dipasaran maka perlu dicarikan alternatif pengendalian yang lebih aman terhadap lingkungan dengan harga yang lebih murah.

Salah satu alternatif pengendalian yang lebih aman terhadap lingkungan dan murah tersebut adalah dengan menggunakan pestisida nabati yang dibuat dari bahan-bahan tumbuhan seperti umbi gadung, brotowali, daun sirsak, akar tuba, pulai, kulit jambu mete dan lain-lain. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah. Pertama, bagaimana menyebarluaskan informasi tentang Pestisida Nabati sebagai produk inovatif dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman Kakao. Kedua, sejauhmana penerimaan petani terhadap inovasi tersebut melalui pendekatan teori difusi inovasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus kelompok



tani, petani dan pemerintah. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prospek Pemanfaatan Pestisida Nabati

Petani di Indonesia, khusus di Sulawesi Tenggara, umumnya memiliki lahan, modal dan sumberdaya ekonomi terbatas, untuk membeli pestisida organik sintetis yang semakin mahal, sangat membutuhkan suatu alternatif pengendalian yang murah, praktis dan relatif aman terhadap lingkungan. Penggunaan sediaan sederhana Pestisida Nabati dari tumbuhan yang ada disekitar lahan petani atau tempat tinggal petani sebagai alternatif dari insektisida organik sintetis diharapkan dapat menekan biaya produksi.

Tabel 1. Analisis Biaya Pengendalian Hama PBK dann Penyakit Tanaman dengan

Menggunakan Pestisida Kimia dan Pestisida Nabati

Pestisida Kimia Sintetik		Pestisida Nabati	
Sprayer 1 buah @Rp.300.000	Rp.300,000	Sprayer 1 buah @ Rp. 300.000	Rp. 300.000
Insektisida Acodan 35 EC 6 ltr x Rp. 160.000	Rp. 960.000	Pestisida Nabati Ramuan 412 Umbi Gadung 9 x 4 kg x Rp. 1.000	Rp. 36.000
Penyemprotan 6 kali@Rp.30.000	Rp. 180.000	Daun Vitex 1 kg Rp. 1.000	Rp. 1.000
		Daun Srikaya 1 kg Rp. 1.000	Rp. 1.000
		Tenaga Kerja 9 x Rp. 30.000	Rp. 270.000
Total Biaya	Rp.1.440,000		Rp.608.000
Keuntungan Rp.1.440.000-Rp.608.000 = Rp. 832.000			

Selain keuntungan tersebut di atas, terdapat Keuntungan Ikutan (Eksternalitas) yaitu: Produk Biji Kakao bebas residu pestisida sehingga memenuhi syarat di pasar global, Pencemaran Lingkungan dapat dihindari dan Musuh Alami di Kebun Kakao berkembang



Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Di mana peran Komunikator, pemahaman pesan dan partisipasi Komunikan menjadi komponen penting dalam proses penguatan kelompok.

Peran Komunikator

Komunikator dalam memperkenalkan program pestisida nabati di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ini adalah TIM UHO sendiri dan ketua kelompok. Di Kecamatan Wolo ketua kelompok memiliki peran yang cukup besar, karena sebagian besar informasi anggotanya mengetahui informasi mengenai program pestisida nabati dari ketua kelompok. Sementara Kepala Desa berperan hanya sebatas membantu ketua kelompok dalam menyampaikan informasi mengenai program pestisida nabati kepada petani. Dan selebihnya informasi mengenai program pestisida nabati diperoleh dari rekan-rekan sesama anggota kelompok yang terlebih dahulu sudah ikut bergabung di TIM UHO.

Sedangkan di Kecamatan Watubanga informasi mengenai program pestisida nabati tidak didapatkan dari ketua kelompok melainkan dari aparat desa setempat. Itu artinya peran dari ketua kelompok sebagai komunikator dinilai kurang memberikan kontribusi. Hal ini dapat terlihat dari anggotanya yang mendapatkan informasi dari aparat desa, dan sebagian kecil dari TIM UHO. Sementara yang mengetahui dari ketua kelompok hanya satu orang saja.

Di Kecamatan Wolo cara yang umum digunakan dalam menjelaskan program pestisida nabati yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin. Dalam pertemuan rutin tersebut terjadi interaksi antar ketua kelompok dengan anggota, dan juga interaksi antar anggota itu sendiri. Melalui pertemuan ini setiap anggota kelompok dapat melakukan diskusi dan tanya jawab seputar program TIM UHO dan usaha yang mereka kelola.

Sementara di Kecamatan Watubangga cara ketua kelompok menjelaskan program program pestisida nabati dengan 3 teknik komunikasi yaitu; sosialisasi, *door to door* dan pertemuan. Perbedaan dari tiga teknik itu adalah, pertama, sosialisai merupakan bentuk komunikasi di mana ketua kelompok



hanya sekedar memberikan informasi dan menjelaskan program program pestisida nabati. Kedua, *door to door* merupakan bentuk teknik komunikasi ketua kelompok yang secara personal melakukan komunikasi antarpribadi dengan anggota satu per satu. Ketiga, pertemuan merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh ketua kelompok dengan berkumpul dan terjadi diskusi dan tanya jawab di dalamnya. Keberadaan ketua kelompok yang dinilai oleh anggota kelompok yang ada di Kecamatan Wolo dapat tergambar dari tabel di bawah ini;

Tabel 2. Kategori peran keberadaan ketua kelompok di Kecamatan Wolo

Kategori	Informan	Jumlah
Bidang Ekonomi	Budiman , Andi Sakka, Karniah, Tuti	4 orang
Bidang Pemberdayaan	Murni, Jubaedah, Mulyati, Rusilawati	4 orang
Kognisi/Informasi	Ernawati, Safruddin	2 orang

Di Kecamatan Watubangga keberadaan ketua kelompok dapat memberikan mereka keuntungan dalam bidang ekonomi dan psikologis. Sama halnya dengan keberadaan ketua kelompok dibidang ekonomi dapat membantu dalam usaha pembuatan pestisida nabati yang dipandu oleh TIM UHO. Sementara secara psikologis anggota kelompok dapat terbantu mengatasi masalahnya, mereka dapat berkeluh kesah sehingga beban di hatinya dapat berkurang. Berikut tabel penilaian anggota kelompok terhadap keberadaan ketua kelompok dalam program memperkenalkan inovasi pertanian dengan menggunakan pestisida nabati.

Tabel 3. Kategori peran keberadaan kelompok di Kecamatan Watubangga

Kategori	Informan	Jumlah
Bidang Ekonomi	Beddu, Rahim, Endang, Taridalah, Komariah, Kaswati, Husnah, Wati, Komar	9 orang
Bidang Psikologi	Herman	1 orang

Peran ketua kelompok juga dapat dinilai oleh anggota kelompoknya. Peran yang dimaksud disini adalah bagaimana ketua kelompok memposisikan dirinya sebagai ketua kelompok untuk merangkul dan menciptakan suasana yang hangat dalam sebuah kelompok. Namun penilaian terhadap ketua



kelompok di Kecamatan Watubangga lebih mengarah pada perannya yang hanya sebagai penyampai informasi.

Pemahaman Pesan

Pesan yang disampaikan pertama kali oleh TIM UHO untuk mengajak petani mengikuti kegiatan ini adalah dengan memberikan pengarahan untuk kembali menggunakan pestisida nabati yang ramah lingkungan dan sangat menguntungkan bagi kesehatan tanaman Kakao dan pestisida bisa dibuat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan sekitar. Pesan yang disampaikan oleh TIM UHO kepada anggota kelompok di dua Kecamatan ini memiliki peranannya sendiri. Pesan yang disampaikan oleh TIM UHO terhadap para anggota kelompok berhasil memberikan pemahaman kepada mereka sehingga tujuan TIM UHO sejalan dengan persepsi mereka tentang inovasi yang disampaikan TIM UHO. Namun tidak sedikit pula di antara yang tidak memahami program dari TIM UHO. hal ini mungkin dikarenakan faktor kurangnya intensitas pertemuan yang dilakukan antara ketua kelompok dan anggotanya seperti yang terjadi di Kecamatan Wolo yang anggotanya masih belum memahami tentang program TIM UHO.

Ketidaktahuan anggota kelompok mengenai program TIM UHO ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang terjalin antara ketua kelompok dengan anggotanya. Ketua kelompok cenderung membatasi diri untuk berinteraksi dengan anggotanya. Komunikasi kelompok di Kecamatan Watubangga tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan pesan yang diterima oleh anggota kelompoknya kurang dan hal ini mempengaruhi partisipasi aktif dari anggota kelompokpun tergolong lemah.

Partisipasi Komunikan

Perubahan yang mereka alami pun tak lepas dari konsisten mereka mengikuti setiap pertemuan yang diadakan oleh TIM UHO. Anggota kelompok tertarik untuk rutin mengikuti pertemuan adalah karena dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor ketertarikan mereka terhadap pemberdayaan petani dengan mengajarkan membuat pestisida nabati. Khususnya di Kecamatan Wolo,



Anggota kelompok tertarik untuk rutin mengikuti pertemuan karena dalam pertemuan tersebut mereka mendapatkan pengalaman baru dan tertarik dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap anggota. Sehingga melalui partisipasi mereka dalam pertemuan ini membuat mereka mendapatkan banyak informasi dan siap untuk diberdayakan. Sementara dari segi ekonomi dengan rutin berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan akan memberikan mereka banyak informasi mengenai keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan pestisida nabati dan pestisida an organik.

Partisipasi anggota Kelompok di Kecamatan Wolo ini berbanding terbalik dengan keadaan partisipasi anggota kelompok di Kecamatan Watubangga. Di Kecamatan Watubangga hampir semua anggotanya tidak mengikuti pertemuan rutin yang diadakan oleh TIM UHO. hal ini dikarenakan setiap anggota kelompok memiliki kesibukan sehari-hari yang tidak bisa ditinggalkan. Kegiatan mereka harus mengurus kebutuhan rumah tangga dan menguus usaha mereka sehingga waktu mereka sudah banyak tersita oleh urusan pribadi mereka masing-masing. Penggunaan Bahan organik dalam mengatasi penyakit pada tanaman merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TIM UHO pemerintah dapat terbantu menyosialisasikan program penyelamatan lingkungan yang dapat mendukung pembangunan negara.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Penguatan komunikasi kelompok sebagai upaya dalam memperkenalkan Pestisida Nabati yang memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan Pestisida Kimia Sintetik yaitu dari segi ekonomi lebih murah, bahan-bahannya mudah diperoleh, cara pengolahannya mudah dilakukan oleh petani. Keuntungan lainnya yaitu lebih ramah lingkungan. Penguatan komunikasi difokuskan pada komunikator, pesan dan komunikan



- b. Komunikator memiliki perannya tersendiri dalam menyampaikan pesan berupa sosialisasi program TIM UHO dalam memperkenalkan penggunaan Pestisida nabati.
- c. Pesan yang disampaikan oleh TIM UHO kepada petani di Kecamatan Wolo dan Kecamatan Watabangga dimaknai sama. Hal ini dapat terlihat dari motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan TIM UHO hampir sama yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan mengikuti program penggunaan Pestisida nabati.
- d. Partisipasi komunikasi pada dua kecamatan terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Di Kecamatan Wolo partisipasi komunikasi dinilai sangat positif. Sementara di Kecamatan Watubangga, partisipasi komunikasi tidak menunjukkan antusias yang positif.

Saran

- a. Untuk memasyarakatkan penggunaan pestisida nabati untuk pemberdayaan petani perlu demplot penyuluhan di daerah-daerah serangan hama sasaran sesuai potensi sumber daya bahan pestisida nabati setempat, disamping itu perlu usaha pembudidayaan tanaman sumber pestisida nabati untuk menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan di tingkat petani.
- b. Perlu kajian tingkat lapangan (Spesifik lokasi) jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati sebagai bahan rekomendasi pestisida nabati untuk masing-masing lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Fisher, B.Aubrey. 1986. *Teori-Teori Komunikasi*. Penerjemah: Soejono Trimono, MLS. Bandung : CV. Remadja Karya.
- Kardiman, A. 2000. *Pestisida Nabati Ramuan dan Aplikasinya*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Liliweri, Alo. 2003. *Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi; Suatu Pendekatan Ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Bandung; PT. Cipta Aditya Bakti.



- Mariadi, Abd. Rahman, 2000. Prospek Penggunaan Pestisida Nabati untuk Pengelolaan Hama PBK di Sultra. Disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Prog. Pasca Sarjana. Faperta Unhalu
- Moleong, Lexy J, Prof. Dr. M.A. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005 *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rogers, E.M. 1986. *Diffusion of Innovation*. Four Edition. The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co. Inc. New York.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiryanto. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo



ANALISIS DETERMINASI ADOPSI E-COMMERCE DALAM PEMBERDAYAAN PENGRAJIN ALAS KAKI DI CIOMAS KABUPATEN BOGOR

Sulistiono dan Mumuh Mulyana

Program Studi Manajemen Pemasaran STIE Kesatuan Bogor

EMail : anggaslt@gmail.com & mumuh.mulyana@stiekesatuan.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan Sentra Usaha Kerajinan Alas Kaki di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor memiliki kemampuan untuk bertahan dan mengembangkan usahanya secara turun temurun dari generasi ke generasi. Untuk memberdayakan keberadaan usaha kerajinan alas kaki Ciomas, perlu dilakukan berbagai upaya dan terobosan-terobosan yang dapat menciptakan peluang pasar bagi peningkatan kapasitas produksi (jumlah permintaan) terhadap produk alas kaki Ciomas. Salah satu terobosan yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan media elektronik internet dalam perdagangan (*e-commerce*) produk kerajinan alas kaki Ciomas. Adopsi Ecommerce oleh Pengrajin Alas Kaki Ciomas dipengaruhi secara nyata oleh Kompabilitas. Sedangkan Kesiapan Organisasi dan Manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh nyata terhadap Adopsi Ecommerce. Masih perlu dimasukkan variabel lain ke dalam model.

Kata kunci: SEM, E-Commerce, Pengrajin Alas Kaki

DETERMINATION ANALYSIS OF E-COMMERCE ADOPTION TO EMPOWER THE FOOTWEAR CRAFT BUSINESS CENTER IN CIOMAS BOGOR

ABSTRACT

The existence Footwear Crafts Business Center in the District Ciomas Bogor Regency has the ability to survive and develop their business from generation to generation. To empower footwear craft business IN CIOMAS, needs to be done various efforts and breakthroughs that can create market opportunities for increased their production capacity. One of the breakthroughs that can be done is utilization of internet as electronic media to market footwear products from Ciomas. Ecommerce adoption by them influenced significantly by Compatibility. Organizational readiness and perceived benefits did not significantly affect the Ecommerce Adoption. Still need to put the other variables in the model.

Keywords: SEM, E-Commerce, Craftsman of Footwear

PENDAHULUAN

Keberadaan sentra usaha kerajinan alas kaki (sepatu dan sandal) di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah berlangsung sejak puluhan tahun, dikerjakan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Seiring waktu perjalanannya, sentra usaha kerajinan ini mengalami pasang surut usaha yang



terjadi sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kondisi mikro dan makro ekonomi Indonesia. Kemampuan sentra usaha ini dalam bertahan dan mengembangkan usahanya, menjadi salah satu faktor yang menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat di wilayah Ciomas dan sekitarnya.

Fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan hasil observasi awal, adalah para pengrajin di sentra alas kaki Ciomas secara umum memiliki berbagai kelemahan, hambatan dan kendala yang relatif seragam, antara lain dalam hal: 1). manajemen administrasi keuangan; 2) jalur akses terhadap sumber permodalan; 3) akses pasar dan memperbesar pangsa pasar; 4) pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan; 5) kualitas dan kompetensi SDM; 6) kontinuitas bahan baku, kuantitas dan kualitas; dan 7) sistem kemitraan dan distribusi pemasaran yang belum optimal.

Perlu dilakukan berbagai upaya dan terobosan yang dapat menciptakan peluang pasar bagi peningkatan kapasitas produksi (jumlah permintaan) terhadap produk alas kaki Ciomas. Salah satunya adalah dengan mempromosikan potensi usaha kerajinan ini melalui teknologi informasi yang telah berkembang sangat pesat. Pemanfaatan media elektronik internet dalam perdagangan (*e-commerce*) produk kerajinan alas kaki Ciomas, diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perluasan pangsa pasar bagi eksistensi dan pengembangan sentra usaha kerajinan alas kaki Ciomas.

Laudon dan Traver (2002) dalam Asing-Cashman, dkk (2004) menjelaskan *e-commerce* sebagai transaksi komersial antara dan antar organisasi dan individual yang dilakukan secara digital. Sementara Schneider dalam Asing-Cashman, dkk (2004) menjelaskan *e-commerce* adalah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi transmisi data elektronik seperti yang digunakan di internet dan *World Wide Web* untuk menerapkan atau meningkatkan proses bisnis.

Dengan pemanfaatan *e-commerce*, maka transaksi perdagangan yang sebelumnya hanya dilakukan antara pembeli dan penjual secara tatap muka langsung, dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung, tanpa batas waktu maupun jarak. Hal ini penting untuk diimplementasikan, mengingat



Indonesia sudah mengglobal dengan memasuki *ASEAN Economic Community* (AEC).

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis faktor kompatibilitas dalam membentuk adopsi *e-commerce* pada sentra usaha kerajinan alas kaki Ciomas, (2) Menganalisis faktor kesiapan organisasional dalam membentuk adopsi *e-commerce* pada sentra usaha kerajinan alas kaki Ciomas, dan (3) Menganalisis faktor manfaat yang dirasakan pengrajin dalam membentuk adopsi *e-commerce* pada sentra usaha kerajinan alas kaki Ciomas.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dari variabel kategori kualitatif yang telah diberi bobot angka dengan menggunakan skala Likert 1 – 5. Data dikumpulkan pada rentang waktu tertentu dan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas empat variabel, yakni kompatibilitas, kesiapan organisasional, dan manfaat yang dirasakan sebagai variabel eksogen, dan adopsi *e-commerce* sebagai variabel endogen. Data primer bersumber dari instrumen angket, yang diberikan dan diisi dengan lengkap oleh responden para pengrajin di sentra usaha kerajinan alas kaki Ciomas.

Populasi penelitian ini adalah seluruh unit usaha kerajinan alas kaki Ciomas yang mengacu pada data dari Diskoperindag Kabupaten Bogor dalam Septiani, Sarma, Limbong (2013), berukuran 1.941 orang. Sampel penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*), berukuran 100 orang responden. Lokasi penelitian adalah pada sentra usaha kerajinan alas kaki yang berada di beberapa desa pada wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penelitian ini adalah selama dua belas bulan atau satu tahun.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan bantuan instrumen angket atau kuesioner, mengkombinasikan antara pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup. Untuk mengukur secara kuantitatif pendapat responden yang bersifat katagorik, maka digunakan skala Likert yaitu mulai dari angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju dan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju.



Teknik analisis data yang akan digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM), dengan bantuan *software SmartPLS 3*. Teknik SEM memberikan kemungkinan untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang keseluruhan model. Metode Maximum Likelihood akan menghasilkan estimasi parameter yang valid, efisien dan handal (*reliable*) apabila data yang digunakan adalah *multivariate normality* (normalitas multivariat) dan akan *robust* (tidak terpengaruh/kuat) terhadap penyimpangan *multivariate normality* yang sedang (*moderate*).

Hubungan kausalitas di antara konstruk dirumuskan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

$$AEC = \beta_1 \text{KOMPT} + \beta_2 \text{KESOG} + \beta_3 \text{MYD} + z$$

Dimana, KOMPT adalah Kompatibilitas, KSOG adalah Kesiapan organisasional, MYD adalah Manfaat yang dirasakan, AEC adalah Pengadopsian *E-commerce*, β adalah *Regression Weight* dan z adalah *Measurement Error*

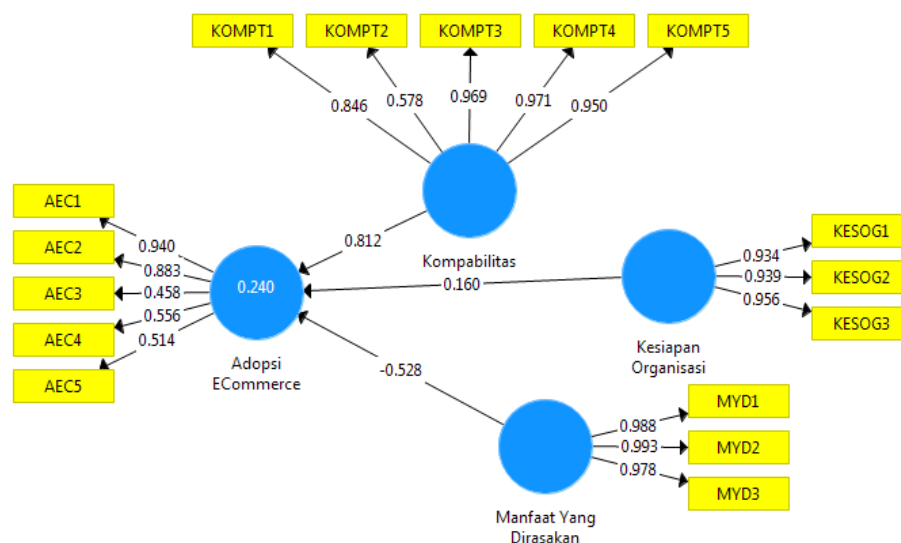
Operasionalisasi variabel kompatibilitas dicerminkan dari lima indikator, dikembangkan mengacu pada Soh, dkk dalam Seyal dan Rahman (2003), Limthongchai dan Speece (2002), serta Grandon dan Pearson (2003). Lima indikator tersebut adalah: 1). Konsisten dengan kebutuhan bisnis ($X_{1.1}$); 2). Konsisten dengan proses/operasi perusahaan saat ini ($X_{1.2}$); 3). Konsisten dengan nilai-nilai perusahaan ($X_{1.3}$); 4). Konsisten dengan cara pemasok dan pelanggan melakukan bisnis ($X_{1.4}$); dan 5). Konsisten dengan budaya ($X_{1.5}$).

Operasionalisasi variabel kesiapan organisasional dicerminkan dari tiga indikator, dikembangkan mengacu pada Chwelos, dkk (2000) dan Grandon dan Pearson (2003). Tiga indikator tersebut adalah: 1). Sumberfinansial ($X_{2.1}$); 2). Sumber teknologi ($X_{2.2}$); dan 3). Tingkat pemahaman manajemen($X_{2.3}$). Operasionalisasi variabel manfaat yang dirasakan dicerminkan dari tiga indikator, dikembangkan mengacu pada Chwelos, dkk (2000) dan Grandon dan Pearson (2003). Tiga indikator tersebut adalah: 1). Mempercepat penyelesaian kerja ($X_{3.1}$); 2). Memudahkan pelaksanaan pekerjaan($X_{3.2}$); dan meningkatkan keefektifan kerja ($X_{3.3}$).



Sedangkan operasionalisasi variabel pengadopsian *e-commerce* dicerminkan dari lima indikator, dikembangkan mengacu pada Seyal dan Rahman (2003). Lima indikator tersebut adalah: 1). Aktivitas pemasaran umum (Y_1); 2). Meneliti pasar (Y_2); 3). Meraih penetrasi nasional (Y_3); 4). Melakukan transaksi bisnis ke bisnis (Y_4); dan 5) Melakukan transaksi bisnis ke konsumenn (Y_5).

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Model Adopsi Ecommerce Pengrajin Alas Kaki Cionas

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Model Adopsi Ecommerce dalam penelitian ini dibangun atas empat variabel laten: 1 variabel endogen (Adopsi Ecommerce) dan 3 variabel eksogen (Kompabilitas, Kesiapan Organisasi dan Manfaat Yang Dirasakan). Untuk memastikan bahwa setiap indikator yang disertakan ke dalam model memiliki keshahihan, dilakukan analisis PLS Algorihtm. Dari analisis tersebut diketahui bahwa semua indikator memiliki *loading factor* lebih dari 0,500 (Lihat Gambar 1). Dengan demikian, semua indikator memiliki convergent validity yang baik. Analisis selanjutnya dari *convergent validity* adalah reliabilitas konstruk dengan memperhatikan output *composite reliability* atau *cronbach's alpha*. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari



0,70.

Tabel 4. Nilai Composite Reliability, Cronbach's Alpha, AVE dan Akar AVE

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	AVE	Akar AVE
ADOPSI ECOMMERCE	0,815	0,737	0,500	0,707
Kesiapan Organisasi	0,960	0,938	0,889	0,943
Kompabilitas	0,941	0,915	0,767	0,876
Manfaat Yang Dirasakan	0,991	0,987	0,973	0,986

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis outer model dari variabel-variabel pada Model Adopsi ECommerce. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa Variabel Kompabilitas memiliki nilai composite reliability sebesar 0,941 dan nilai cronbach's alpha sebesar 0.915 yang lebih dari 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Kompabilitas dinyatakan *reliable*. Demikian pula dengan variabel Kesiapan Organisasi, Manfaat Yang Dirasakan dan Adopsi ECommerce dapat dikatakan *reliable*. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* adalah memperhatikan nilai AVE masing- masing variabel. Konstrak yang memiliki *covergent validity* baik adalah jika memiliki nilai AVE lebih dari 0,50. Dalam Tabel 4, terlihat seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50

Setelah evaluasi *measurement model* terpenuhi, selanjutnya adalah *structural model evaluation*. Evaluasi ini meliputi nilai signifikansi tiap koefisien jalur yang menyatakan apakah ada tidaknya pengaruh antar variabel. Kemudian dilanjutkan dengan melihat nilai *R Square* dan *Stone-Geisser's Q²*.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dinyatakan bahwa variabel Kompabilitas memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap Adopsi Ecommerce, hal ini dibuktikan dengan nilai Original Sample sebesar 0,812 dan nilai T-Statistics yang lebih dari 1,96. Sedangkan variabel Kesiapan Organisasi dan Manfaat Yang Dirasakan tidak signifikan berpengaruh terhadap Adopsi Ecommerce.

Secara bersamaan, variabel eksogen memiliki kemampuan menjelaskan variability Adopsi Ecommerce sebesar 24% berdasarkan nilai R-Square sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan, bahwa Adopsi Ecommerce masih dipengaruhi oleh faktor lainnya yang belum dimasukkan dalam model sebesar 76%.



Tabel 5. Nilai Hasil Bootstrap Koefisien Jalur Variabel Eksogen terhadap Adopsi Ecommerce Pengrajin Alas Kaki Ciomas

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)	P Values
Kesiapan Organisasi →ADOPSI ECOMMERCE	0,160	0,165	0,106	1,507	0,132
Kompabilitas →ADOPSI ECOMMERCE	0,812	0,853	0,215	3,771	0,000
Manfaat Yang Dirasakan →ADOPSI ECOMMERCE	-0,528	-0,523	0,281	1,877	0,061

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Tabel 6. Nilai Q Square Model Adopsi Ecommerce Pengrajin Alas Kaki Ciomas

Variabel	SSO	SSE	1-SSE/SSO
Adopsi Ecommerce	500,000	351,462	0,297
Kesiapan Organisasi	300,000	77,314	0,742
Kompabilitas	500,000	168,832	0,662
Manfaat Yang Dirasakan	300,000	32,869	0,890

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Kriteria lain untuk mengukur *structural model* adalah dengan menggunakan nilai *predictive relevance Q Square*. Dalam Tabel 6 dapat terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Q Square* (1-SSE/SSO) di atas nol. Hal ini menunjukkan adanya relevansi dalam memprediksi dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen (Adopsi Ecommerce).

PENUTUP

Beberapa simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Kompabilitas berpengaruh positif secara nyata terhadap Adopsi Ecommerce Pengrajin Alas Kaki Ciomas, (b) Kesiapan Organisasi dan Manfaat yang Dirasakan tidak berpengaruh nyata terhadap Adopsi ECommerce Pengrajin Alas Kaki Ciomas, (c) Masih dapat dimasukkan faktor-faktor lainnya ke dalam model untuk



menganalisa faktor-faktor yang menentukan Adopsi Ecommerce oleh Pengrajin Alas Kaki atau UKM secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asing-Cashman, Joyce Georgina; Obit, Joe Henry; Bolongkikit, Jetol dan Geoffrey Harvey Tanakinjal (2004), "An Exploratory Research of the Usage Level of E-commerce among Small and Medium Enterprises (SMEs) in the West Coast of Sabah, Malaysia",
<http://www.handels.gu.se/ifsam/Streams/etmisy/175final.pdf>.
- Chwelos, Paul; Benbasat, Izak dan Dexter, Albert S. (2000), "Research Report: Empirical Test of an EDI Adoption Model",
<http://ebusiness.commerce.ubc.ca/internal/UBCBEBR2000-003.pdf>
- Grandon, Elizabeth E. dan Pearson J. Michael (2003), "Perceived Strategic Value and Adoption of Electronic Commerce: An Empirical Study of Small and Medium Sized Businesses", Paper presented on The 36th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'03).
- Limthongchai, Passachon dan Speece, Mark W. (2002), "The Effect of Perceived Characteristics of Innovation on E-Commerce Adoption by SMEs in Thailand",
<http://blake.montclair.edu/~cibconf/conference/DATA/The me7/Thailand2.pdf>.
- Ling, Chong Yee (2001), "Model of Factors Influences on Electronic Commerce Adoption and Diffusion in Small- & Medium-sized Enterprises",
http://ecom.fov.unimb.si/ecis2001/doctoral/Students/ECIS-DC_Chong.pdf.
- Septiani, Stevia, Ma'mun Sarma, Wilson H. Limbong, Pengaruh *Entrepreneurial Marketing* dan Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Industri Alas Kaki di Bogor. Jurnal Manajemen dan Organisasi. Vol IV, No 2, Agustus 2013 Hal 91 - 111
- Seyal, Afzaal H. dan Rahman, Mohd. Noah Abd (2003), "A Preliminary Investigation of Ecommerce Adoption in Small & Medium Enterprises in Brunei", Journal of Global Information Technology Management Vol. 6 Iss: 2, 2003, pp. 6-26.
- Sulistiono dan Mumuh Mulyana (2012). Strategi Pengembangan Pemasaran UKM Pengrajin Sepatu Sandal, Jurnal Ilmiah Ranggagading, Volume 12 Nomor 1 April 2012.
<http://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/jir/article/view/259>



STRATEGI PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KELOMPOK USAHA MANDIRI DI KOTA KENDARI

Jumrana

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari

Jumrana.s@gmail.com

ABSTRAK

Media komunikasi adalah sarana diseminasi informasi dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari telah melakukan upaya dalam memperbaiki kualitas produk, *branding*, kemasan dan pemasaran produk pada kelompok usaha mandiri dengan menggunakan beberapa media komunikasi, namun upaya tersebut dirasa belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dan menganalisis media komunikasi yang efektif digunakan dalam pemberdayaan kelompok usaha mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan FGD pada enam kelompok usaha mandiri, yang terdiri dari 24 orang pelaku usaha dan empat orang pendamping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua media komunikasi efektif digunakan dalam pemberdayaan kelompok usaha mandiri. Hal tersebut bergantung pada karakteristik media komunikasi seperti, keterjangkauan dan akses, reproduksi informasi, kemungkinan disinformasi, dan sebagainya. Media komunikasi yang digunakan kelompok usaha mandiri mengkombinasikan media tatap muka dan media seluler. Meskipun demikian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi antar kelompok, intra kelompok, komunikasi dengan pendamping, *supplier*, distributor dan pemasar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ikut mempengaruhi penggunaan media komunikasi. Kendala dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan literasi media dan pendampingan yang intensif

Kata kunci: media, komunikasi, informasi, kelompok, usaha

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis rumah tangga. Untuk itu, berbagai program dilakukan seperti mengadakan pelatihan manajemen dan kewirausahaan, memberikan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), memfasilitasi berdirinya Usaha-Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan melakukan pembinaan terhadap usaha mandiri yang telah ada.



Pembinaan kelompok usaha mandiri dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui fasilitasi kelompok usaha. Tujuannya agar pelaku UMKM ini dapat berkembang dan menjadi bagian dari sektor andalan pemerintah kota. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi media komunikasi yang efektif untuk pemberdayaan kelompok usaha mandiri tersebut.

Pendampingan ini penting untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan informasi, komunikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh kelompok -kelompok pelaku usaha. Shingi (1994) menyebutkan kesenjangan dapat terjadi karena (1) tingkat keterampilan komunikasi yang berbeda antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam masyarakat; (2) banyaknya informasi (yaitu pengetahuan) yang diperoleh dari media yang sebagian belum tentu dipahami; (3) kontak sosial yang relevan; (4) pembacaan yang selektif, penerimaan, serta pengendalian informasi. Mengikuti perkembangan media maka pembacaan selektif dapat dipahami sebagai pemilihan media dan topik yang selektif. Oleh karena itu, kehadiran pendamping dapat memfasilitasi pengaturan informasi dan komunikasi, membantu menyaring informasi yang tepat dan memberikan dorongan dan motivasi pada kelompok pelaku usaha mandiri.

Dalam melakukan pendampingan, berbagai kendala ditemui, khususnya kendala komunikasi dalam memberikan informasi, pengetahuan, inovasi, dan keterampilan. Untuk itu pendamping menggunakan berbagai strategi media komunikasi agar kendala tersebut dapat teratasi. seorang pendamping atau fasilitator harus dapat memakai beragam teknik untuk memudahkan sebuah proses, yang secara efektif menjadi alat yang mempercepat aksi dan membantu kelancaran proses. (Ife dan Tesoriero, 2008)

Program-program yang digalakkan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, Millennium Development Goals (MDGs) dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya tidak dapat berhasil dengan baik apabila akses informasi kepada masyarakat tidak terbuka. Kehadiran fasilitator/pendamping dapat menjadi pembuka akses pada informasi. Dengan demikian, seorang agen



perubahan berperan untuk membangun hubungan pertukaran informasi dengan klien (Rogers, 1995).

Pendamping dapat mengembangkan berbagai penggunaan media komunikasi untuk berhubungan dengan kelompok pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi memungkinkan digunakannya cara-cara kreatif dalam berkomunikasi. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia tujuannya antara lain adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing bangsa (Anonim, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Jenis riset deskriptif membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu (Kriyantono, 2012).

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan FGD pada enam kelompok usaha mandiri, yang terdiri dari 24 orang pelaku usaha dan empat orang pendamping untuk menganalisis strategi penggunaan media komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat pada kelompok usaha mandiri di kota kendari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Teori Difusi Inovasi, Everett M. Rogers (1995) menyatakan difusi adalah proses dari suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial, atau suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru.

Dari hasil FGD pada pelaku usaha mandiri dan pendamping dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kendari ditemukan bahwa dalam kegiatan



pendampingan digunakan dua saluran komunikasi untuk melakukan difusi informasi, transfer pengetahuan, dan upaya peningkatan keterampilan, yaitu saluran komunikasi tatap muka atau saluran komunikasi tatap muka dan saluran komunikasi dengan media seluler.

Komunikasi bagi pembangunan adalah sebuah desain dan penggunaan yang sistematis dari aktivitas partisipatif, pendekatan komunikasi, metode dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan diantara para pihak dalam sebuah proses pembangunan untuk memastikan saling pengertian dan konsensus yang mengarah pada pelaksanaan kegiatan (Anyagbunam *et.al*, 2004) Penggunaan saluran komunikasi tatap muka memungkinkan terjadinya proses saling pengertian dan konsensus bersama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Biasanya dilakukan oleh pendamping kelompok dengan menggunakan komunikasi antarpribadi dan komunikasi kelompok. Saluran tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan personal dan profesional dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha mandiri. Aktivitas komunikasi dalam saluran antarpribadi dilakukan dengan beragam cara, yaitu pelatihan, kunjungan rumah, dan diskusi kelompok.

Pelatihan adalah media edukatif yang paling spesifik menurut Ife dan Tesoriero (2008) karena mengajarkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pekerja masyarakat tidak akan menjadi pelatih, namun akan membantu kelompok untuk menemukan seseorang yang dapat memberikan pelatihan yang dibutuhkan, lebih baik jika sumberdayanya dari masyarakat itu sendiri, namun jika tidak ada, maka dapat mencari dari sumberdaya eksternal. Oleh karena itu, pelatihan juga melibatkan individu profesional, organisasi yang relevan, lembaga pendidikan keterampilan, dan sebagainya untuk berperan sebagai narasumber.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, kemampuan, dan keterampilan. Menurut pendamping, pelatihan yang diselenggarakan bersifat tematik bergantung pada bentuk keterampilan yang akan diajarkan kepada masyarakat. Materi pelatihan disesuaikan dengan tujuan penyelenggaraan pelatihan. Seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan



pelaku usaha, peningkatan kapasitas pengelolaan keorganisasian dan manajemen keuangan, peningkatan kemampuan pengelolaan usaha, dan peningkatan keterampilan lainnya yang mendukung pengembangan usaha kelompok mandiri seperti *branding*, kemasan, pemasaran, dan perpajakan. Oleh karena itu, pesan komunikasi yang disampaikan lebih kepada penguatan ekonomi masyarakat.

Anggota kelompok usaha mandiri yang telah mengikuti pelatihan didorong untuk dapat membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari kepada anggota kelompok dan masyarakat lainnya. Dengan model transfer pengetahuan dan keterampilan seperti ini, kelompok usaha mandiri jumlahnya terus berkembang dengan beragam jenis usaha. Strategi seperti ini mampu mendorong masyarakat terlibat dalam keorganisasian, membangun kelompok ekonomi produktif, memiliki usaha mandiri, serta bekerjasama dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Fasilitasi kelompok usaha mandiri di Kota Kendari memiliki lebih dari satu kelompok dampingan. Pendamping bertugas mengarahkan dan membimbing kelompok-kelompok usaha mandiri tersebut agar mampu melakukan berbagai inovasi dalam peningkatan kualitas produksi dan pengembangan usaha. Kegiatan fasilitasi ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemasaran. Secara spesifik Iff dan Tesoriero (2008) menyebutkan fasilitasi kelompok meliputi kegiatan kelompok, struktur panitia, perencanaan kelompok, peningkatan kesadaran kelompok, pelatihan kelompok, tugas kelompok, rekreasi kelompok, *self hep* kelompok, dan bentuk-bentuk pengambilan keputusan lokal

Dalam perencanaan kegiatan, menurut Harlinda (27 th.) kelompok usaha mandiri didampingi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi sumberdaya yang dimiliki, dan mengidentifikasi pasar. Selanjutnya kelompok dibimbing untuk membuat rancangan dan perencanaan usaha. Pada pelaksanaan pendampingan selanjutnya, kelompok usaha mandiri dimotivasi dan diarahkan untuk melaksanakan berbagai upaya yang telah direncanakan bersama kelompok. Pengawasan mengenai penggunaan



keuangan untuk usaha dan penyelenggaraan usaha bersama tetap dilakukan oleh pendamping. Pada tahap selanjutnya pendampingan terkait dengan pemasaran. Dalam tahap ini, pendamping membantu membuka pasar bagi kelompok usaha. Melibatkan kelompok dampingan dalam pameran produksi dan kerajinan, mengenalkan dengan beberapa pengusaha lokal yang menerima produksi dan kerajinan setempat untuk dijual.

Kunjungan ke rumah-rumah penduduk adalah salah satu bentuk komunikasi yang dikembangkan oleh pendamping dalam melakukan diseminasi informasi kepada kelompok usaha mandiri yang menjadi kelompok dampingan. Sifat komunikasinya informal, selain bertujuan menambah pengetahuan juga sebagai upaya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang cenderung tertutup dan melibatkan dalam percakapan yang aktif untuk mendorong partisipasi dalam memberikan saran dan umpan balik. Oleh karena itu, Ite dan Tesoriero (2008) menyarankan bahwa seorang pekerja masyarakat harus memiliki keterampilan komunikasi antar pribadi yang baik sehingga dapat berkomunikasi secara efektif.

Keunggulan kunjungan rumah dibanding dengan bentuk komunikasi lainnya dalam pemberdayaan masyarakat adalah dapat menumbuhkan kepercayaan antara pendamping dan anggota kelompok usaha mandiri, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dengan kunjungan rumah, dapat terjalin saling pengertian antara keduanya. Anggota kelompok dapat dengan leluasa menyampaikan permasalahan dan mengajukan pertanyaan, sesuatu yang biasanya jarang terjadi dalam forum sosialisasi atau rapat.

Berikut matriks kekuatan dan hambatan penggunaan saluran komunikasi personal menurut anggota kelompok usaha dan pendamping :

Matriks Penilaian Penggunaan Jenis Teknik Komunikasi

Teknik komunikasi	Kekuatan	Hambatan
Pelatihan	Memberikan pengetahuan, mentransfer teknologi, melatih keterampilan,	Waktu terbatas, jumlah peserta yang banyak tdk efektif untuk pelatihan
Fasilitasi Kelompok	Memberikan informasi, pengetahuan,	Kesibukan pendamping, dan waktu pertemuan yang



	pendampingan, informasi	pertukaran	sulit untuk disesuaikan
Kunjungan Rumah	Memberikan dukungan dan motivasi, komunikasi efektif	kesibukan	pendamping, jarang terlaksana

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Dari matriks tersebut, dapat disimpulkan beberapa kendala terkait saluran komunikasi tatap muka dalam pemebudayaan pelaku usaha mandiri:

- Minimnya jumlah pendamping sehingga waktu yang dimiliki untuk mendampingi kelompok dan mengunjungi anggota kelompok jarang terlaksana.
- Pekerjaan dan kesibukan anggota kelompok sehingga sulit menemukan jadwal yang sesuai untuk melakukan fasilitasi kelompok
- Waktu pelatihan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan semua peserta mendapatkan perhatian pelatih.
- Kemampuan anggota kelompok dan masyarakat umumnya yang tidak sama dalam menyerap informasi
- Hambatan komunikasi pada sebagian anggota kelompok dan masyarakat yang disebabkan oleh perasaan malu, gagap, tidak percaya diri dan sebagainya.

Hambatan ruang dan waktu dalam komunikasi tatap muka di daerah perkotaan seringkali dapat diatasi dengan saluran komunikasi menggunakan media internet. Menurut Darmastuti (2007), kelebihan media internet adalah (1) Internet memiliki jangkauan luas dan tidak terbatas; (2) Informasi dapat diakses selama 24 jam; (3) Adanya interaksi yang cepat dari komunikan ke komunikator; (4) Mempunyai peluang untuk memberikan respon yang cepat terhadap pesan yang disampaikan; (5) Mempunyai banyak sekali informasi; (6) Informasi yang diberikan selalu *up to date* dan *factual*; (7) Memudahkan akses update informasi; (8) Biaya yang relatif murah, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan; (9) Kontak dengan media lebih mudah untuk dilakukan (Darmastuti, 2007).

Media dengan teknologi internet yang dapat menutupi kelemahan komunikasi tatap muka adalah media seluler. Media ini dianggap efektif dalam memudahkan berkomunikasi dengan pendamping dan sesama anggota



kelompok melalui SMS dan telepon. Namun segera ditemukan bahwa media ini tidak cukup efisien. Menurut beberapa anggota kelompok, media seluler dengan handphone memerlukan biaya yang tinggi serta hanya dapat dilakukan komunikasi dua arah, disebabkan oleh karakteristik media tersebut. Akibatnya informasi yang didapat bersifat personal dan seringkali terjadi miskomunikasi dalam penyebaran informasi. Kelemahan lainnya adalah terbatasnya informasi yang dapat dikirim.

Pada perkembangan selanjutnya, para pendamping dan pelaku usaha kemudian menggunakan media internet berjejaring, yaitu media sosial. Media yang digunakan adalah Facebook (FB) dengan memanfaatkan fasilitas pesan untuk bertukar informasi penting, gambar dan video. Pendamping biasanya mengirimkan gambar mengenai contoh-contoh model kemasan, gambar leaflet, brosur, dan info grafis lainnya. Sedangkan video yang dibagikan oleh pendamping pada anggota kelompok adalah video yang bermanfaat bagi pengembangan usaha seperti video pengolahan rotan yang baik sebelum dijadikan kerajinan pada kelompok industri alat rumah tangga berbahan rotan. Video kemasan produk dengan sistem *wrapping*, video pembuatan produk tertentu sebagai alternatif pengembangan dan diversifikasi produk, serta berbagai video menarik lainnya.

Hampir semua pelaku usaha binaan menyatakan bahwa mereka merasa sangat terbantu dan mendapatkan banyak informasi, pengetahuan dan keterampilan dengan media sosial FB ini. Namun dalam FGD terungkap bahwa beberapa anggota kelompok menganggap bahwa dengan FB kurang efisien karena mereka harus memiliki akun dan penggunaannya kurang praktis. Dari wawancara, beberapa diantara pelaku usaha mandiri kurang 'melek' dengan teknologi, dan masih banyak yang belum mampu memilih informasi yang tepat bagi mereka, untuk itu masih dibutuhkan pendampingan informasi dan literasi media.

Untuk menutupi kekurangan yang dirasakan oleh sebagian kecil anggota kelompok usaha mandiri dalam pemanfaatan media FB, pendamping kelompok kemudian membuat grup WhatsApp (WA) untuk masing-masing kelompok



usaha. Sehingga ada WA khusus usaha rotan, usaha mete, usaha kain tenun, usaha kue rumahan, usaha olahan ikan dan lain-lain.

Menurut beberapa pelaku usaha mandiri penggunaan WA ini jauh lebih efektif dan komunikatif dibandingkan dengan FB. WA secara otomatis terhubung dengan nomor handphone pemakai telepon pintar sehingga tidak memerlukan pembuatan akun, dapat mengirim pesan, gambar, video dan dapat digunakan untuk menelpon ke sesama anggota dalam grup, serta dapat berkomunikasi secara personal dengan anggota grup dan pendamping. Komunikasi berjalan lebih efisien. Pelaku usaha pengguna WA hanya perlu terhubung dengan jaringan internet pada telepon pintar. Hal ini tidak menjadi hambatan karena sebagian pelaku usaha mandiri yang menjadi sampel menyatakan mereka telah menggunakan telepon pintar.

Sebagian besar pelaku usaha mandiri juga melakukan penjualan produknya dan berkomunikasi dengan pembeli menggunakan WA. Menurut mereka, fasilitas dan fitur yang tersedia pada WA memadai untuk aktifitas pemasaran online. Mereka bisa mengirim gambar produk, tawar menawar harga, bahkan dalam hal pengaturan distribusi produk. Bahkan untuk kelompok usaha kain tenun mereka sudah memiliki jaringan pemasaran dengan sistem *reseller*. Meskipun demikian, semua kelompok pelaku usaha mandiri menyatakan bahwa meskipun penggunaan komunikasi bermedia semacam WA melalui telepon pintar banyak memberikan kemudahan namun komunikasi tatap muka masih tetap harus dilakukan, baik antar anggota dalam kelompok, antara pendamping dengan kelompok, penyedia bahan baku, distributor, dan pemasar. Sebab transfer pengetahuan dan peningkatan keterampilan hanya dapat dilakukan dengan baik dalam pelatihan, pengambilan keputusan pemasaran hanya bisa dipastikan dalam komunikasi personal. Oleh karena itu, mengkombinasikan komunikasi tatap muka dan komunikasi seluler dianggap sebagai strategi yang baik dalam penggunaan media pemberdayaan masyarakat bagi pelaku usaha mandiri di Kota Kendari.



PENUTUP

Pilihan penggunaan media komunikasi yang efektif dalam pemberdayaan kelompok usaha mandiri bergantung pada karakteristik media komunikasi seperti besaran biaya yang diperlukan, keterjangkauan dan akses, reproduksi informasi, kemungkinan disinformasi, dan sebagainya. Media komunikasi yang digunakan kelompok usaha mandiri menjadi beragam digunakan sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi antar kelompok, intra kelompok, komunikasi dengan pendamping, *supplier*, distributor dan pemasar. Strategi kombinasi media komunikasi tatap muka dan media seluler dianggap efektif dalam menyebarkan informasi, mentransfer pengetahuan dan meningkatkan keterampilan pelaku usaha mandiri di Kota Kendari. Kendala dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan literasi media dan pendampingan yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Buku Putih Kementrian Riset dan Treknologi. Jakarta: Kemenristek RI.
- Anyaeibunam, Chika, Paolo Mefalopulos, and Titus Moetsabi. 2004. Participatory Rural Communication Appraisal, A Handbook. SADC Centre of Communication for Development. Rome: FAO-UN
- Darmastuti, Rini. 2007. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: Gava Media
- Ife, Jims dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kriyantono, Rahmat. 2012. Teknis Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Rogers, M. Everett. 1995. Diffusi of Innovations 4th edition. New York: The Free Press
- Rogers, M. Everett. 1994. Komunikasi dan Pembangunan: Memudarnya Model Dominan. Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis (ed.) Everett M. Rogers. Jakarta: LP3ES
- Shingi, M. Prakash. 1994. Kesenjangan Akibat Pengaruh Komunikasi: Sebuah Penelitian Lapangan Mengenai Televisi dan Keterbelakangan Pertanian. Komunikasi dan Pembangunan: Perspektif Kritis (ed.) Everett M. Rogers. Jakarta: LP3ES



MODEL KOMUNIKASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cut Alma Nurafiah

Universitas Dharmawangsa Medan

alma294@yahoo.com

ABSTRAK

Komunikasi merupakan sebuah kajian keilmuan yang melekat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, demikian sebaliknya, masyarakat membutuhkan komunikasi pada seluruh aspek kehidupannya. Masyarakat dalam stratifikasinya dibagi menjadi 3 golongan besar, yakni masyarakat kelas atas, menengah dan bawah. Dalam era masyarakat ekonomi Asia (MEA), Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi masyarakat kelas bawah untuk terus dikembangkan dan diberdayakan, salah satunya adalah dengan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia. Proses pemberdayaan dalam sebuah program penyuluhan dan pengembangan masyarakat memerlukan integrasi seluruh pihak baik pemerintah, stake holder maupun masyarakat. Untuk mensinergikan semua pihak tersebut, diperlukan jembatan komunikasi yang efektif. Terutama komunikasi yang dilakukan di masyarakat. Karena itu, kajian tentang efektifitas komunikasi kelompok dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan dan pengembangan masyarakat perlu diketahui dan dikembangkan lebih lanjut, karena menurut tinjauan penulis, komunikasi kelompok merupakan salah satu jembatan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sebuah program pemberdayaan dengan tujuan mendukung kemandirian dan daya saing di era MEA.

Kata kunci: Efektifitas komunikasi kelompok dan pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Memasuki era masyarakat ekonomi Asia di awal tahun 2016 yang lalu, masih banyak persoalan pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan, lingkungan kumuh, pengangguran, anak jalanan dan masalah sosial lainnya menjadi persoalan-persoalan pembangunan yang mustahil dapat diatasi tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan *stakeholders*.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di tahun 2015 yang lalu sebesar 28,59 juta jiwa atau sekitar 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut bisa saja terus bertambah apabila pemerintah, swasta dan *stakeholder* tidak



melakukan upaya-upaya tertentu untuk mengatasinya. Karena itu, dalam upaya mengentaskan persoalan kemiskinan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain program pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyertakan program pemberdayaan sumber daya masyarakat berbentuk penyuluhan, pelatihan dan pengembangan sumber daya lainnya. Tujuannya tak lain agar masyarakat dapat mengembangkan sumber daya yang mereka miliki sehingga selain meningkatkan kemandirian mereka juga dapat ikut serta berperan aktif dalam era masyarakat ekonomi asia sekarang ini.

Program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat tidak hanya dilakukan secara *top down* namun juga dilakukan secara *bottom up*, namun pemberdayaan yang dilakukan secara *bottom up* dinilai sangat strategis karena mampu mempersiapkan landasan kemandirian bagi masyarakat, hal ini disebabkan kemandirian masyarakat hanya bisa dibangun melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan (Anwas, 2014:61), dengan meletakkan fondasi kemandirian inilah, diharapkan masyarakat mampu berdiri diatas kakinya sendiri dan memiliki daya saing di era MEA, dan yang terpenting adalah bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar pengembangan kualitas pendidikan dan ketrampilan, namun juga pada pembenahan visi, motivasi dan pandangan hidup manusia itu sendiri. (Harahap:137)

Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowering dan sustainable*. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan, karena konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu/masyarakat yang tidak berdaya/lemah. Bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memberikan kekuasaan/daya daya kepada pihak yang lemah (*powerless*), sehingga pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) dapat mengurangi kekuasaannya (*disempowered*) dan terjadi keseimbangan kekuasaan, (Djohani, 2003:10) dan tujuan akhir dari pemberdayaan yakni untuk meningkatkan



kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56) dapat tercapai.

Soeharto (2004:2) menjelaskan bahwa pemberdayaan dikatakan juga sebagai sebuah proses perubahan, dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada kekuasaan yang dapat diubah dan kekuasaan yang dapat diperluas (kekuasaan yang dinamis, tidak statis). Gillin John dan Philip Gillin mengatakan arti perubahan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. (Ranjabar, 2015) Pemahaman tersebut sejalan dengan pengertian pemberdayaan dengan aspek pendelegasian kekuasaan, dan memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu/masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Soeharto, 2004:3)

Proses Komunikasi

Komunikasi pembangunan dalam perkembangannya terbagi dalam dua pendekatan, yakni pendekatan diifusi inovasi dan pendekatan paradigma partisipatif. (Syam, 2002:58) Peterson mengungkapkan bahwa komunikasi dalam konteks pembangunan merupakan sebuah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang berlangsung didalam negara yang sedang berkembang. (Dilla, 2007:57). Jika komunikasi dipandang sebagai sebuah proses, maka komunikasi tersebut haruslah berlangsung secara dinamis. Dengan kedinamisannya, komunikasi menjadi bagian dalam setiap kegiatan pemberdayaan, seperti program penyuluhan, pengembangan masyarakat



maupun program-program lainnya, semua tidak terlepas dari proses komunikasi.

Tahapan proses komunikasi dapat dilihat mulai dari kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, strategi komunikasi, sampai pada tahap operasional komunikasi, sebagaimana Ely D. Gomez ungkapkan bahwa sebuah perencanaan komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa mengaitkan dengan kebijakan komunikasi, sebab kebijakan komunikasi merupakan perencanaan strategi jangka panjang yang harus dijabarkan dalam perencanaan operasional, sedangkan strategi komunikasi merupakan kiat atau taktik yang bisa dilakukan dalam melaksanakan perencanaan komunikasi tersebut. (Cangara, 2013:62-63)

Kebijakan komunikasi menurut Sean McBraid merupakan prinsip-prinsip, aturan-aturan atau pedoman dimana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi serta berusaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal serta menetapkan prioritas yang akan diambil.(Cangara:12)

Hubungan antara kebijakan dan perencanaan komunikasi dikemukakan oleh Wedemeyer bahwa keduanya adalah suatu mata rantai yang saling bergantung satu sama lain. Kebijakan memberi kerangka dasar sebelum perencanaan diimplementasikan, sebaliknya perencanaan mengoperasionalkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. (Cangara, 2013:20) Oleh karena itu, perencanaan harus selalu taat asas pada kebijakan komunikasi. Sebagaimana dinyatakan oleh O'Sullivan et al (2013:9) dimana kebijakan publik dan strategi komunikasi mempengaruhi perubahan individu dan masyarakat, membangun norma-norma masyarakat yang baru dan setelah beberapa waktu akan mendukung kebijakan dan program yang lebih kuat dan efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan komunikasi dari program pemberdayaan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun non pemerintahan secara



signifikan bukan hanya akan mempengaruhi organisasi tetapi juga kelompok-kelompok binaan yang terdapat dalam organisasi tersebut.

Penyuluhan dan pengembangan masyarakat yang menjadi fokus perhatian dari komunikasi pemberdayaan ini termasuk dalam komunikasi pembangunan dimana dalam komunikasi pembangunan dilakukan secara sadar, sistematis dan berencana untuk mengubah pola berfikir dan tingkah laku masyarakat, (Arifin, 2006:32) dan tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat memiliki control yang besar terhadap lingkungan dan dirinya sendiri (Dilla, 2007:57)

Model Komunikasi

Penyuluhan dan program pengembangan sumber daya manusia lainnya yang terdapat dalam setiap program pemberdayaan memerlukan tenaga-tenaga pendamping. Para pendamping masyarakat ini hakikatnya adalah sebagai agen pembaharu (*agent of changes*) atau agen pemberdayaan. (Anwas, 2014:61) Realitas masyarakat yang heterogen dengan beragam karakter mempengaruhi agen pemberdayaan dalam memilih teknik pelaksanaan pemberdayaan. Dubois dan Miley menjelaskan empat teknik pelaksanaan pemberdayaan dalam masyarakat, yakni: membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi, terlibat dalam pemecahan masalah dan yang terakhir merefleksikan sikap dan nilai secara profesional. (Anwas, 2014:88)

Salah satu poin penting adalah membangun komunikasi. Bagaimana tenaga pendamping masyarakat membangun komunikasi ditengah-tengah masyarakat lokal yang heterogen, Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss memberikan tiga pendekatan komunikasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya lainnya yakni model komunikasi linear (satu arah), model komunikasi interaksional (dua arah) dan model komunikasi transaksional, pendekatan komunikasi tersebut juga senada dengan yang dijelaskan Richard West dan Lynn H, Turner, (2008) dimana pendekatan utama dalam komunikasi terdiri dari komunikasi sebagai aksi, interaksi dan transaksi (West dan Turner, 2007:11).



Model komunikasi linier atau model komunikasi satu arah (*one way view of communication*)

Komunikasi linier didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran (penyaring). Komunikator memberikan suatu stimulus dan komunikan memberi tanggapan/ respon sebagaimana yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi atau interpretasi. Komponen utama dari model ini adalah pesan, sumber, *gatekeepers*, penerima, dan umpan balik (*feedback*). Menurut model ini, komunikasi dikatakan efektif apabila penerima atau pada program-program penyuluhan lebih sering disebut sebagai sasaran mampu menerima pesan (informasi/misi) sesuai dengan yang dikehendaki oleh sumber.

Model komunikasi dua arah atau model komunikasi interaksional

Model ini merupakan model komunikasi lanjutan dari pendekatan linier. Dalam model ini terjadi umpan balik (*feedback*), dimana ada pengirim (*sender*) yang mengirimkan informasi dan ada penerima (*receiver*) yang melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon balik terhadap pesan pengirim. Setiap partisipan memiliki peran ganda, dalam satu waktu dapat berperan sebagai pengirim dan pada waktu lain berperan sebagai penerima, begitupun sebaliknya, dengan demikian komunikasi yang berlangsung terjadi dalam proses dua arah (*cyclical process*).. Schram menjelaskan bahwa dalam berkomunikasi dibutuhkan setidaknya tiga buah elemen yaitu sumber, pesan dan sasaran. Sumber bisa jadi seorang individu ataupun organisasi sedangkan pesan adalah setiap tanda yang dapat ditafsirkan, dan sasaran bisa jadi seseorang lain, kelompok maupun khalayak. Dalam model Schramm ini menempatkan sumber dan penerima dengan kedudukan yang sederajat (Wiryanto, 2004:18). Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, dimana sumber pertama akan menjadi penerima kedua dan penerima pertama akan berfungsi sebagai sumber kedua, begitu seterusnya (Cangara, 2008:46)



Model komunikasi transaksional, merupakan komunikasi yang dipahami dalam konteks hubungan (relationship) diantara dua orang atau lebih.

Pendekatan model ini menekankan semua perilaku adalah komunikatif dan masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi saling bertukar pesan. (Sendjaya, 1993:44) Komponen utama dari model komunikasi ini adalah informasi, hubungan baik antara partisipan, dan penerima aktif. Menurut model ini komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara partisipan dan penerima atas suatu pesan atau informasi. Model komunikasi ini sudah mendekati asas demokrasi atau partisipatif. Hanya prosesnya masih berlangsung diantara relasi-relasi yang ada. Kondisi demikian bisa melemah seiring dengan semakin cepatnya arus perubahan sosial yang mengikis sosial kapital dan sumberdaya lokal lainnya, model komunikasi ini disempurnakan dengan adanya model model konvergensi.

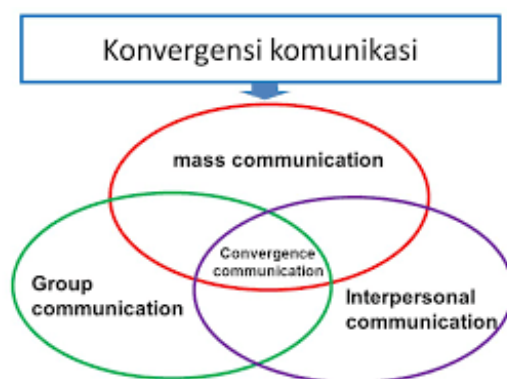
Dalam konteks komunikasi antarmanusia, Kincaid melihat bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang cenderung bergerak kearah satu titik temu (*convergence*), maka dapat didefinisikan bahwa komunikasi konvergensi sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai ke saling pengertian (konsensus). Dengan kata lain komunikasi konvergensi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih saling menukar informasi untuk mencapai kebersamaan pengertian. Meski berbeda latar belakang pengalaman, saling kebersamaan pengertian ini dapat dicapai meski tidak sempurna, hal ini dikarenakan karena adanya toleransi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi (Cangara, 2008: 47).

Komponen utama dari model ini adalah informasi (*uncertainly*), konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama dan jaringan hubungan sosial (*network relationship*). Menurut model ini komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. Disini tidak lagi dikenal istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan (pihak-pihak yang berpartisipasi). Dalam



mekanisme pembangunan, model komunikasi seperti ini yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan pemberdayaan sosial (*social empowerment*).

Secara sederhana model komunikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Komunikasi Konvergen

Pendamping masyarakat harus memahami dengan baik bagaimana karakteristik situasi dan kondisi masyarakat setempat. Tidak hanya itu, pendamping juga harus memiliki pemahaman yang sama dengan stakeholders mengenai konsep pengembangan masyarakat (Nasdian, 2014:105). Dengan kesamaan pemahaman antara stakeholder dan tenaga pendamping maka lingkup profesionalisme pendampingan dapat dilakukan, ditambah lagi dengan penguasaan ketiga pendekatan dalam komunikasi, menjadikan tenaga pendamping memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam mengembangkan sumber daya masyarakat.

PENUTUP

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemberdayaan yang dinilai efektif dan relevan untuk pengembangan sumber daya manusia adalah sintesa dari ketiga model linear, interaksional dan transaksional. Namun model transaksional yang disempurnakan dalam model konvergensi merupakan model komunikasi yang dinilai efektif. Pendekatan ini lebih menempatkan martabat manusia secara lebih layak, keberadaan masyarakat dengan aspek kepentingan dan kemampuannya menjadi lebih dikenali dan dihargai, sehingga lebih mendorong terjadinya partisipasi



masyarakat yang tinggi. Meski demikian, komponen utama model komunikasi “linier” seperti, pesan, sumber atau komunikator, saluran, penerima dan efek tetap menjadi perhatian penting. Karena bersifat dua arah, yakni partisipatif vertikal dan horizontal, dalam pengambilan keputusan, perencana komunikasi program pemberdayaan sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan di tingkat bawah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Cangara, Hafied, H. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Cangara, Hafied, H. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Dilla, Sumadi, *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*, Bandung: Simbiosis, 2007.
- Djohani, Rianingsih, *Partisipasi, Pemberdayaan dan Demokratisasi Komunitas*, Bandung: Studio Driya Media, 2003.
- Harahap, Nasruddin, *Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2011
- Ife, Jim, *Community Development Creating Community Alternatives Vision, Analysis And Practice*, Australian: Longman, 1995.
- Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Pustaka Obor Indoensia, 2014.
- Ranjabar, Jacobus, *Perubahan Sosial*, bandung, Alfabeta, 2015
- Soeharto, Edi, *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial dan Pekerjaan Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press. 2004.
- O’Sullivan, Arthur, *Urban Economics, Fifth Edition*, NewYork: McGraw-Hill, 2003.
- Sendjaya, Sasa Djuarsa, *Teori Komunikasi*, Jakarta: UT, 1993.
- West, Richard dan Lyyen, H.Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2007.
- www.bps.go.id, diakses September, 2016.



PERSEPSI DAN PREFERENSI PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI JAJAR LEGOWO DI KABUPATEN PEKALONGAN

Endah Nurwahyuni, Selvia Dewi Anomsari, Setyo Budiyananto

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah

endah_nurwahyuni@yahoo.com - 087886374416

ABSTRAK

Upaya peningkatan adopsi teknologi jajar legowo oleh petani tidak lepas dari persepsi dan preferensinya terhadap teknologi tersebut. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, preferensi petani terhadap teknologi sistem tanam jajar legowo serta mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan teknologi ini. Pengkajian ini dilaksanakan di Petak Percobaan yang terletak di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Persiapan dimulai pada bulan Juni hingga September 2015 (MT II). Analisis data dilakukan secara deskriptif. Kuisisioner disusun dengan skala pengukuran interval dengan tipe skala likert. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap teknologi sistem tanam jajar legowo sebagian besar adalah 56,4% petani memiliki persepsi baik, dan 43,6% lainnya memiliki persepsi buruk. Disamping itu, preferensi petani terhadap teknologi sistem tanam jajar legowo 2 : 1 lebih tinggi (61,53%) dibanding jajar legowo 4 : 1 (31,89%), dilihat dari segi fisiologis dan keragaan tanaman.

Kata kunci: persepsi, preferensi, jajar legowo

FARMER'S PERCEPTION AND PREFERENCE TO INOVATION AND TECHNOLOGY OF JAJAR LEGOWO IN PEKALONGAN

ABSTRACT

Efforts to increase adoption to technology of jajar legowo can not be separated from its perception and preference for this technology. This assessment aims to determine perception and preference of farmers to jajar legowo technology and know the challenges and solutions in the implementation of this technology. This assessment was conducted in the demonstration plots located in the village Kalijambe, District Sragi, Pekalongan. Preparations began in June to September 2015 (MT II). The data were analyzed descriptively. A questionnaire prepared by the interval measurement scale with a Likert-type scale. The assessment results that majority of the farmers have a good perception (56.4%), and the other had a bad perception (43.6%). In addition, the preference of farmers to jajar legowo 2 : 1 technology was higher (61.53%) compared Legowo row 4: 1 (31.89%), in terms of physiological and performance of the plant.

Keywords: perception, preferences, jajar legowo technology



PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian pangan memiliki tujuan strategis sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Komoditas tanaman pangan yang terus meningkat permintaannya adalah padi, jagung dan kedelai (Pajale). Rata-rata laju pertambahan penduduk Indonesia sekitar 1,27-1,29% pertahun, dengan laju pertumbuhan tersebut pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 296 juta jiwa dengan kebutuhan beras sekitar 41,5 juta ton atau setara dengan 78,3 juta ton gabah kering Misran (2014). Hal ini memerlukan perhatian pemerintah sebagai pemangku kebijakan agar produksi beras meningkat dan sebagai dampaknya yaitu terpenuhinya kebutuhan beras bagi masyarakat juga menjaga stabilitas harga beras sehingga impor beras dapat dihindari.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan program untuk mewujudkan swasembada pangan (padi, jagung dan kedelai) dalam 3 tahun ke depan, dengan target produksi nasional yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah produksi padi 73,40 juta ton dengan pertumbuhan 2,21%/tahun melalui program yang dinamakan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Pajale. Jawa Tengah pada tahun 2015 ini ditargetkan 11,6 juta ton untuk komoditas padi (meningkat 2 juta ton dari produksi tahun sebelumnya). Upaya pencapaian sasaran tersebut tidak lepas dari inovasi teknologi yang diperkenalkan di suatu daerah salah satunya Kabupaten Pekalongan sebagai penghasil padi di Jawa Tengah. Inovasi teknologi yang dianggap mampu meningkatkan produksi padi sawah salah satunya adalah sistem tanam jajar legowo.

Prinsip jajar legowo menurut Suharno (2007) adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanam sehingga pertanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi oleh barisan kosong dimana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanam antar barisan. Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu rekomendasi yang terdapat dalam



paket anjuran Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Sistem tanam jarak legowo juga merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti diketahui bahwa tanaman padi yang berada dipinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibanding tanaman padi yang berada di barisan tengah sehingga memberikan hasil produksi dan kualitas gabah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tanaman yang berada dipinggir akan memperoleh intensitas sinar matahari yang lebih banyak (efek tanaman pinggir).

Lebih lanjut dikatakan bahwa manfaat dan tujuan dari penerapan sistem tanam jarak legowo diantaranya (1) menambah jumlah populasi tanaman padi sekitar 30 % yang diharapkan akan meningkatkan produksi baik secara makro maupun mikro, (2) mempermudah pelaksanaan pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman yaitu dilakukan melalui barisan kosong/lorong, (3) mengurangi kemungkinan serangan hama dan penyakit terutama hama tikus. Pada lahan yang relatif terbuka hama tikus kurang suka tinggal di dalamnya dan dengan lahan yang relatif terbuka kelembaban juga akan menjadi lebih rendah sehingga perkembangan penyakit dapat ditekan, (4) menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan, (5) menambah kemungkinan barisan tanaman untuk mengalami efek tanaman pinggir dengan memanfaatkan sinar matahari secara optimal bagi tanaman yang berada pada barisan pinggir. Semakin banyak intensitas sinar matahari yang mengenai tanaman maka proses metabolisme terutama fotosintesis tanaman yang terjadi di daun akan semakin tinggi sehingga akan didapatkan kualitas tanaman yang baik ditinjau dari segi pertumbuhan dan hasil.

Berdasarkan hasil penelitian Misran (2014), prosentase peningkatan hasil gabah kering panen jarak legowo berkisar 19,90-22,00% dibandingkan dengan tanpa jarak legowo. Rata-rata hasil gabah yang diperoleh pada perlakuan paling tinggi dicapai dengan jarak legowo 4:1 (6,45), jarak legowo 2:1 (6,40 ton per hektar), jarak legowo 8:1 (6,30 ton per hektar) dan jarak legowo 6:1 (6,24 ton per hektar), semuanya berbeda nyata dengan perlakuan tanpa jarak legowo (4,25 ton



per hektar). Menurut Hamzah dan Atman (2000), peningkatan hasil gabah ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya populasi tanaman padi. Selain pengaruh populasi tanaman, peningkatan hasil gabah juga disebabkan oleh meningkatnya nilai komponen hasil.

Namun demikian, tingginya hasil yang dicapai oleh sebuah inovasi teknologi tidak selalu disukai dan diadopsi oleh petani. Diketahui dalam sebuah penelitian bahwa adopsi teknologi oleh petani dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan adopsi petani disebutkan dalam penelitian Lalla (2012) yang menunjukkan bahwa sebagian besar (60,78 %) petani memiliki tingkat adopsi terhadap sistem tanam jajar legowo 2:1 yang rendah. Faktor internal petani menunjukkan hubungan yang nyata terhadap tingkat adopsi teknologi sistem jajar legowo 2:1 yang meliputi motivasi mengikuti teknologi jajar legowo 2:1, tingkat keuntungan relatif, tingkat kerumitan dan tingkat kemudahan untuk dicoba. Sedangkan umur, lama pendidikan, pengalaman berusaha tani, luas lahan, frekuensi mengunjungi informasi, dan pandangan petani terhadap sifat-sifat inovasi yang meliputi tingkat kesesuaian dan kemudahan untuk melihat hasilnya tidak menunjukkan hubungan yang nyata. Faktor eksternal petani, yakni tingkat ketersediaan sumber informasi dan intensitas penyuluhan tidak memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat adopsi teknologi jajar legowo 2:1. Sebaliknya, tingkat adopsi jajar legowo 2 : 1 memiliki hubungan yang nyata terhadap peningkatan produktivitas usaha tani.

Adopsi teknologi jajar legowo di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibanding propinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. Padahal penemu teknologi tersebut berasal dari Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa petani di Jawa Tengah masih memerlukan pendampingan dan pengkajian untuk meningkatkan preferensinya terhadap teknologi tersebut. Lebih lanjut, dukungan pemerintah melalui kebijakan instansi terkait diperlukan agar pengembangan inovasi ini tepat sasaran baik petani maupun lokasi, efektif dan dapat meningkatkan penghasilan petani.



Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui persepsi petani terhadap teknologi sistem tanam jajar legowo, (2) mengetahui preferensi petani terhadap teknologi sistem tanam jajar legowo, (3) mengetahui kendala dalam pelaksanaan teknologi sistem tanam jajar legowo, (4) merumuskan solusi dan alternatif untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan teknologi sistem tanam jajar legowo.

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini dilaksanakan di Petak Percobaan yang terletak di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Persiapan dimulai pada bulan Juni hingga September 2015 (MT II). Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sumber daya air yang tersedia sepanjang tahun dan lahan sawah berupa hamparan yang dikelola oleh satu petani, sehingga mengurangi galat karena perbedaan perlakuan. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Kuisisioner disusun dengan skala pengukuran interval dengan tipe skala likert.

Persepsi petani terhadap sistem tanam jajar legowo adalah pandangan yang dimiliki petani dalam melihat manfaat yang diperoleh dari penerapan jajar legowo. Persepsi petani dapat diketahui melalui pernyataan yang mempunyai tiga alternatif jawaban (setuju = 3, ragu-ragu = 2, tidak setuju = 1). Persepsi petani dikatakan baik, jika total skor responden > skor median, sedangkan persepsi buruk jika total skor responden < skor median.

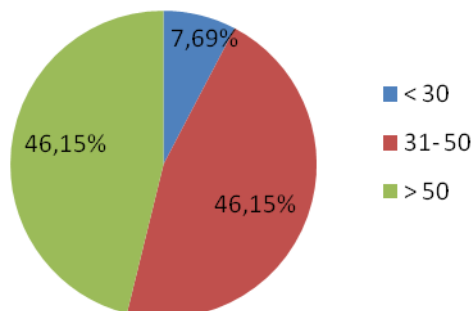
Preferensi petani adalah tingkat kesukaan petani terhadap sistem jajar legowo, dalam pengkajian ini jajar legowo 2 : 1 dibanding sistem tanam tegel. Variabel preferensi diketahui dari pernyataan yang memiliki alternatif jawaban yang terdiri atas (Tertarik = 3, ragu-ragu = 2, tidak tertarik = 1).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kalijambe terletak di 10 mdpl, sebelah selatan pusat kota Kecamatan Sragi dengan luas 1,82 km² dengan kepadatan penduduk 2.333 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kalijambe 4.246 jiwa dengan luas lahan sawah 119.179 ha, 62.788 ha, berdasarkan data BPS, Buku Sragi dalam angka (2010).

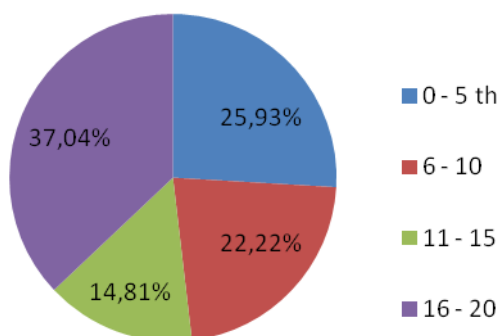


Karakteristik Petani



Grafik 1. Karakteristik berdasarkan umur

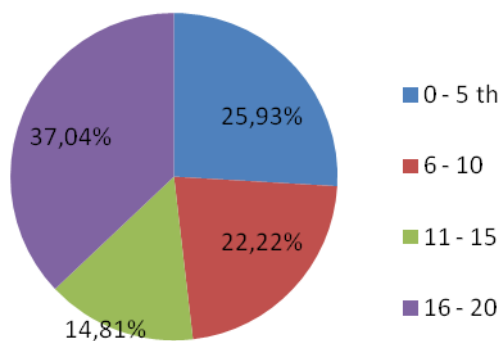
Berdasarkan umur, 46,15% petani di Desa Kalijambe merupakan usia produktif yaitu 31 - 50 th, 46,15% lainnya merupakan petani di usia tua/lanjut sementra hanya 7,69% petani berusia dibawah 30 tahun. Usia < 30 tahun merupakan usia produktif namun secara pengalaman tidak sebaik kelompok usia diatasnya. sedangkan usia lanjut yaitu > 50 tahun adalah usia dimana petani telah memiliki banyak pengalaman, namun produktifitasnya mulai menurun. Kelompok usia 31 - 50 adalah kelompok usia dimana petani mulai mengenal dann tertarik untuk mengaplikasikan teknologi sehingga telah banyak pengalaman disamping produktifitas kerjanya yang masih tinggi.



Grafik 2. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan pendidikan, karakteristik responden di Desa Kalijambe cukup beragam dan merata. Meskipun demikian, pendidikan yang paling banyak ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas atau setara yaitu 35,90%. Selain itu, 2,56% adalah sarjana, 15,90% tamatan sekolah menengah pertama, 25,64% pernah menempuh Sekolah Dasar dan 20,51% sisanya tidak pernah bersekolah. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar responden dapat membaca, menulis bahkan dapat mengikuti perkembangan teknologi khususnya di sektor pertanian. Diharapkan, responden merupakan pengguna inovasi teknologi yang baik.

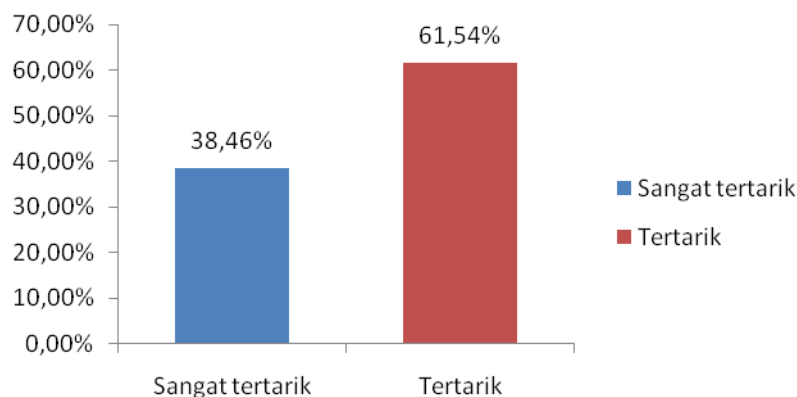


Grafik 3. Karakteristik Berdasarkan Pengalaman

Sebanyak 37,04% petani merupakan petani dengan pengalaman 16 - 20 tahun, 14,81% petani berpengalaman 11 - 15 tahun, 22,22% berpengalaman 6 - 10 tahun dan selebihnya (25,93%) berpengalaman 5 th atau kurang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Desa Kalijambe merupakan masyarakat petani yang berpengalaman. Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun pengalaman yang telah dilalui dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyerapan inovasi dan teknologi khususnya di bidang pertanian.



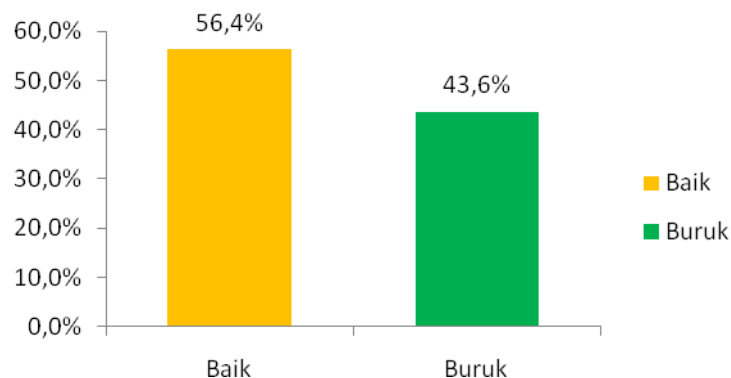
Ketertarikan Terhadap Teknologi Jarak Tanam



Grafik 4. Ketertarikan terhadap Teknologi Jarak Tanam

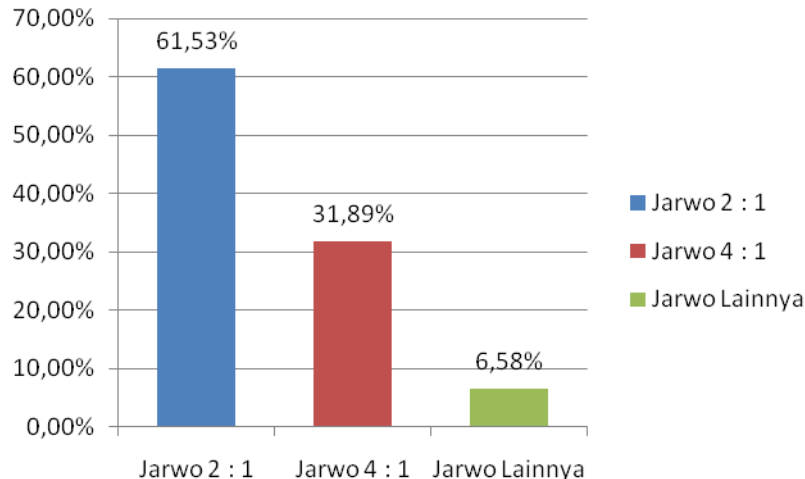
Sebanyak 61,54% petani menyatakan tertarik dan 38,46% lainnya sangat tertarik terhadap penggunaan teknologi jarak tanam yang diperkenalkan oleh demplot. Hal ini menunjukkan bahwa petani antusias untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan jarak tanam jajar legowo dibandingkan dengan jarak tanam tegel. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih hasil yang didapat dari petak contoh jajar legowo dibandingkan tegel.

Lebih lanjut petani menyatakan beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya minat petani terhadap sistem tanam jajar legowo adalah pertama, tanaman mendapatkan sinar matahari lebih maksimal dengan adanya legowo terutama untuk tanaman pinggir. Kedua, petani lebih mudah dalam melakukan perawatan seperti pemupukan, penyemprotan dan pengendalian gulma. Ketiga, tanaman lebih tahan hama dan krapak, disamping pengendaliannya yang juga lebih mudah. Keempat, petani telah membuktikan bahwa populasi tanaman lebih banyak sehingga dapat meningkatkan hasil. Kelima, kebutuhan benih lebih sedikit karena jumlah bibit per lubang tanaman dua atau tiga per lubang. Keenam, jumlah anakan lebih banyak dan bulir per malai lebih banyak dan yang terakhir, petani lebih mudah melakukan pengamatan.



Grafik 5. Persepsi Petani terhadap Teknologi Jajar Legowo

Data menunjukkan bahwa 56,4% petani memiliki persepsi baik, dan 43,6% lainnya memiliki persepsi buruk. Dilihat dari karakteristik petani berdasarkan pengalaman, persepsi baik petani terhadap teknologi jajar legowo sebagian besar disebabkan oleh pengalaman mereka yang telah menerapkan jajar legowo meskipun dengan jarak tanam beragam. Jarak tanam yang pernah diterapkan adalah legowo 4 : 1, legowo 6 : 1 dan legowo 7 : 1.



Grafik 6. Preferensi Petani terhadap Beberapa Jarak Tanam Jajar Legowo

Data hasil wawancara petani mengenai aspek jarak tanam pada sistem jajar legowo, menunjukkan bahwa petani lebih menyukai jajar legowo 2 : 1 (61,53%) dibanding jajar legowo 4 : 1 (31,89%). Sedangkan 6,58% petani menyukai jajar legowo lainnya (6 : 1 dan 7 : 1). Hal ini terjadi karena melihat secara fisiologis, keragaan tanaman jajar legowo 2 : 1 dianggap lebih baik sehingga hasilnya diyakini lebih tinggi daripada jajar legowo 4 : 1. Meskipun



demikian, menurut petani jarak tanam 4 : 1 lebih mudah dalam penanaman, pemupukan, pengendalian gulma dan organisme pengganggu tanaman lainnya dibanding jarak legowo 2 : 1.

Kendala yang muncul dalam peningkatan preferensi petani terjadi karena beberapa alasan, namun yang paling sering ditemui yaitu tenaga tanam. Tenaga tanam yang ada belum terampil menanam jarak legowo dan sudah terbiasa menanam dengan sistem tegel sehingga sulit untuk merubah kebiasaan. Alasan lain muncul dari segi membengkaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menanam, disamping hasil tanam yang kurang memuaskan dari segi kerapihan dan ketepatan jarak tanam. Sebagian petani juga beranggapan bahwa penggunaan lahan tidak maksimal karena harus menyisakan legowo, sehingga populasi tanaman lebih sedikit dan ditakutkan akan menurunkan hasil.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan diantaranya adalah perlunya mengadakan kursus tani secara bertahap dengan melibatkan tenaga tanam, melakukan sosialisasi lebih luas dan lebih sering sehingga petani terbiasa, melakukan pendampingan lebih intensif dan lebih sering disamping bertatap muka dan berdiskusi dengan petani

PENUTUP

Pengkajian ini menunjukkan persepsi petani terhadap teknologi sistem tanam jarak legowo sebagian besar adalah 56,4% petani memiliki persepsi baik, dan 43,6% lainnya memiliki persepsi buruk. Disamping itu, preferensi petani terhadap teknologi sistem tanam jarak legowo 2 : 1 lebih tinggi (61,53%) dibanding jarak legowo 4 : 1 (31,89%), dilihat dari segi fisiologis dan keragaan tanaman. Pengkajian ini juga memberikan informasi bahwa aspek tenaga tanam, dilihat dari keterampilan, hasil tanam, produktifitas tenaga dan juga biaya jasa tanam menjadi kendala dalam pelaksanaan teknologi sistem tanam jarak legowo sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan petani khususnya tenaga tanam dalam aplikasi tanam jarak legowo.



DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupten Pekalongan. 2014. Kecamatan Sragi dalam Angka 2014/2015. Nomor Katalog : 1401.3326.100
- Lalla, Hajrah dkk. 2012. Adopsi Petani Padi Sawah terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. J. Sains & Teknologi, Desember 2012, Vol.12 No.3 : 255 – 264.
- Misran. 2014. Studi Sistem Tanam Jajar Legowo terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 14 (2): 106-110
- Suharno. Sistem Tanam Jajar Legowo (Tajarwo) Salah Satu Upaya Peningkatan Produktivitas Padi. Naskah.



ADOPSI PETANI TERHADAP TEKNOLOGI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI DI KABUPATEN PEKALONGAN

Endah Nurwahyuni, Selvia Dewi Anomsari, Setyo Budiyanto

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah

endah_nurwahyuni@yahoo.com – 087886374416

ABSTRAK

Adopsi petani terhadap komponen-komponen teknologi PTT padi berbeda antara petani satu dengan lainnya. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui adopsi petani terhadap komponen PTT di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah deskriptif, dengan metode pengambilan data purposive sampling melalui survei, wawancara dan pengamatan langsung pada 30 petani peserta PTT di Kelompok Tani Setyo Tani, Kelurahan Kalijambe. Pengukuran tingkat adopsi petani dilakukan terhadap seluruh komponen PTT padi sawah yang direkomendasikan yaitu pemilihan VUB, penggunaan benih berlabel, perlakuan benih sebelum semai (seed treatment), sistem tanam jajar legowo, pengolahan tanah, pemberian pupuk organik, penanaman bibit muda (<18 hss), penanaman jumlah bibit sedikit (1 – 2 bibit), penggunaan rekomendasi dosis pupuk, pemupukan lengkap, pengairan berselang, pengendalian OPT, penggunaan predator, penggunaan perangkat hama, pengendalian tikus, penyemprotan tepat, pengendalian gulma dan panen tepat waktu dengan menggunakan kuisisioner. Hasil menunjukkan bahwa seluruh petani telah mengadopsi teknologi penggunaan VUB, perlakuan benih sebelum semai, pengolahan tanah, pemupukan, pengamatan OPT, pengendalian tikus, penyemprotan secara tepat dan pengendalian hama. Sementara itu petani menggunakan benih berlabel (68,75%), menggunakan sistem tanam jajar legowo (93,75%), menggunakan pupuk organik (56,25%), menanam bibit muda (81,25%), menggunakan 1 - 2 bibit per lubang (81,25%), melakukan pemupukan sesuai rekomendasi (87,5%), melakukan pengairan berselang (75%), menggunakan predator (56,25%), menggunakan perangkat hama (56,25%) dan melakukan panen tepat waktu (93,75%).

Kata kunci : adopsi, PTT, padi

FARMER'S ADOPTION TO TECHNOLOGY OF INTEGRATED CROP MANAGEMENT OF RICE IN PEKALONGAN

ABSTRACT

Farmers' adoption to the components of technology of Integrated Crop Management of rice is different among farmers. This assessment aims to determine farmers' adoption to the technology of Integrated Crop Management of rice in Pekalongan. This research is the descriptive, using purposive sampling through survey approach, interview and direct observation to 30 farmers applying PTT in Kalijambe. The level of farmers' adoption measured by using questionnaires on all components of Integrated Crop Management of rice recommended which are the choice of VUB, the use of labeled seeds, seed treatment, the use of Jajar Legowo system, tillage, organic fertilizer, planting young seedlings (<18



hss), planting 1-2 seeds, the use of fertilizer dosage recommendations, complete fertilizer, intermittent irrigation, pest control, use of predators, using pest traps, rodent control, precise spraying, weed control and punctually harvest. The results showed that all farmers have adopted the use of VUB technology, seed treatment before seedlings, tillage, fertilizing, pest surveillance, rodent control, spraying accurately and pest control. Meanwhile farmers using labeled seeds (68.75%), using Jajar Legowo system (93.75%), using organic fertilizers (56.25%), planting young seedlings (81.25%), using a 1-2 seeds per hole (81.25%), fertilizing as recommended (87.5%), perform intermittent irrigation (75%), using a predator (56.25%), using a pest traps (56.25%) and punctually harvesting (93.75%).

Keywords: adoption, PTT, rice crop

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk, sementara alih fungsi lahan juga semakin mengalami percepatan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan terus melakukan inovasi teknologi dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan salah satunya Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi adalah pendekatan yang ditempuh dalam menerapkan teknologi budidaya padi yang spesifik lokasi (spesifik lokasi ditentukan berdasarkan karakteristik biofisik dan sosial ekonomi) dengan mengintegrasikan berbagai komponen teknologi yang inovatif, dinamis, dan kompatibel untuk dapat memecahkan permasalahan setempat, sehingga timbul efek sinergis. Efek sinergis berarti efek komponen teknologi secara bersama-sama lebih besar dari penjumlahan efek teknologi secara individual. Karena lahan sawah mempunyai tingkat kesesuaian berbeda dan unsur yang menyebabkan perbedaan itu juga tidak sama, maka kombinasi komponen teknologi di satu lokasi dapat berbeda dengan lokasi lainnya (Makarim, et al, 2004).

Sementara itu menurut Kushartanti, et al (2007), anjuran teknologi dalam PTT adalah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan teknologi berdasar kearifan lokal yang sudah terbukti unggul untuk lokasi tertentu. Alternatif



teknologi yang dapat diterapkan salah satunya adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan dan keinginan petani (seperti daya hasil, cita rasa, umur, maupun ketahanan terhadap penyakit tertentu) untuk lokasi setempat.

Konsepsi tentang pendekatan PTT telah disosialisasikan sejak tahun 2001, bahkan PTT telah masuk ke areal program PMI (Peningkatan Mutu Intensifikasi) sejak 2003. Namun demikian PTT diinterpretasikan berbeda, dan tidak segera dipahami oleh praktisi yang telah terbiasa menerapkan anjuran paket teknologi secara umum (*blanked recommendation*). Karena itu pengertian dan penerapan PTT perlu disosialisasikan secara intensif (Makarim, et al, 2004).

Menurut Toha (2005), komponen teknologi PTT harus saling melengkapi, bila perlu dilihat kemungkinan adanya efek sinergisme antar komponen. Teknologi yang diterapkan tidak saling bertentangan atau antagonis satu dengan yang lainnya. Paket teknologi disusun untuk memecahkan masalah (bila ada) serta sesuai dengan karakterisasi lokasi setempat dan kondisi sosial ekonomi petani. Secara utuh komponen teknologi disusun untuk mengoptimalkan sumberdaya setempat, dapat menjaga kelestarian lingkungan dan dapat menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Disisi lain, adopsi petani terhadap komponen-komponen teknologi PTT padi berbeda antara petani satu dengan lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melekat pada sifat inovasi itu sendiri antara lain keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, triabilitas dan observabilitas. Selain sifat inovasi, ada juga jenis keputusan inovasi, saluran komunikasi yang digunakan dalam menyebarkan inovasi tentang PTT Padi, dan kegiatan promosi tentang PTT. Mengacu pada landasan tersebut, maka dilakukan pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui adopsi petani terhadap komponen PTT di Kabupaten Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini dilaksanakan di Petak Percobaan yang terletak di Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Persiapan dimulai pada

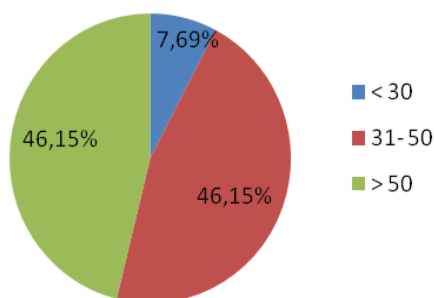


bulan Juni hingga September 2015 (MT II). Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan sumber daya air yang tersedia sepanjang tahun dan lahan sawah berupa hamparan, selain kelembagaan kelompok tani yang sudah terbentuk. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data diambil dengan metode *purposive sampling* terhadap petani yang menerapkan PTT di Kelurahan Kalijambe. Data primer diambil menggunakan kuisioner yang diberikan kepada 30 petani yang melaksanakan PTT dan dokumentasi pelaksanaan PTT, selain data sekunder yang diambil dari Badan Statistik dan Dinas Pertanian setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kalijambe terletak di 10 mdpl, sebelah selatan pusat kota Kecamatan Sragi dengan luas 1,82 km² dengan kepadatan penduduk 2.333 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kalijambe 4.246 jiwa dengan luas lahan sawah 119.179 ha, 62.788 ha, berdasarkan data BPS, Buku Sragi dalam angka (2010).

Karakteristik Petani



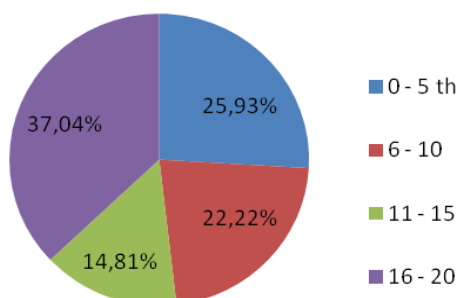
Grafik 1. Karakteristik berdasarkan umur

Berdasarkan umur, 46,15% petani di Desa Kalijambe merupakan usia produktif yaitu 31 - 50 th, 46,15% lainnya merupakan petani di usia tua/lanjut sementara hanya 7,69% petani berusia dibawah 30 tahun. Usia < 30 tahun merupakan usia produktif namun secara pengalaman tidak sebaik kelompok usia diatasnya. sedangkan usia lanjut yaitu > 50 tahun adalah usia dimana petani telah memiliki banyak pengalaman, namun produktifitasnya mulai menurun. Kelompok usia 31 - 50 adalah kelompok usia dimana petani mulai mengenal dan



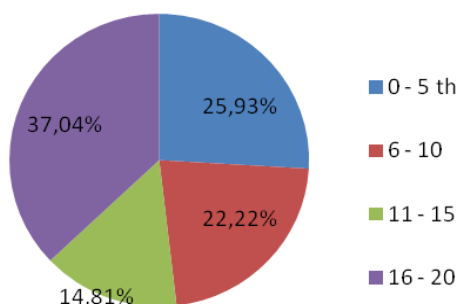
tertarik untuk mengaplikasikan teknologi sehingga telah banyak pengalaman disamping produktifitas kerjanya yang masih tinggi.

Berdasarkan pendidikan, petani di Kalijambe cukup beragam dan merata. Meskipun demikian, pendidikan yang paling banyak ditempuh adalah Sekolah Menengah Atas atau setara yaitu 35,90%. Selain itu, 2,56% adalah sarjana, 15,90% tamatan sekolah menengah pertama, 25,64% pernah menempuh Sekolah Dasar dan 20,51% sisanya tidak pernah bersekolah seperti yang diperlihatkan pada grafik 2.



Grafik 2. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar responden dapat membaca, menulis bahkan dapat mengikuti perkembangan teknologi khususnya di sektor pertanian. Diharapkan, responden merupakan pengguna inovasi teknologi yang baik.



Grafik 3. Karakteristik Berdasarkan Pengalaman

Sebanyak 37,04% petani merupakan petani dengan pengalaman 16 - 20 tahun, 14,81% petani berpengalaman 11 - 15 tahun, 22,22% berpengalaman 6 - 10



tahun dan selebihnya (25,93%) berpengalaman 5 tahun atau kurang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Desa Kalijambe merupakan masyarakat petani yang berpengalaman. Sebagaimana diketahui, sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan maupun pengalaman yang telah dilalui dan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyerapan inovasi dan teknologi khususnya PTT.

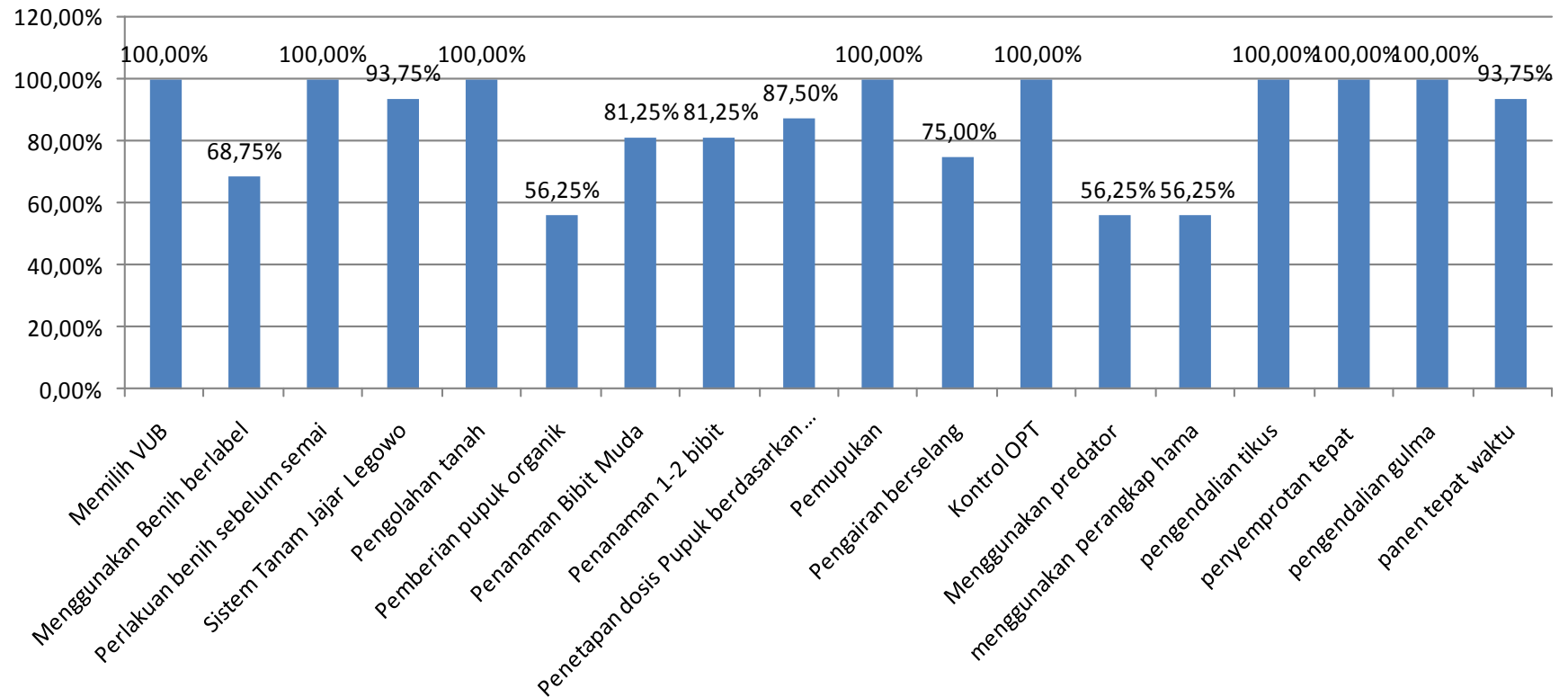


SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



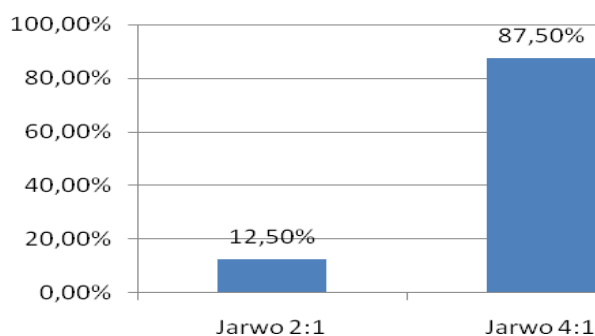
Grafik 4. Adopsi Petani terhadap Teknologi PTT



Adopsi Petani Terhadap Seluruh Komponen Teknologi PTT

Pengukuran tingkat adopsi petani dilakukan terhadap seluruh komponen PTT padi sawah yang direkomendasikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah yaitu pemilihan VUB, penggunaan benih berlabel, perlakuan benih sebelum semai (*seed treatment*), sistem tanam jajar legowo, pengolahan tanah, pemberian pupuk organik, penanaman bibit muda (<18 hss), penanaman jumlah bibit sedikit (1 – 2 bibit), penggunaan rekomendasi dosis pupuk, pemupukan lengkap, pengairan berselang, pengendalian OPT, penggunaan predator, penggunaan perangkap hama, pengendalian tikus, penyemprotan tepat, pengendalian gulma dan panen tepat waktu.

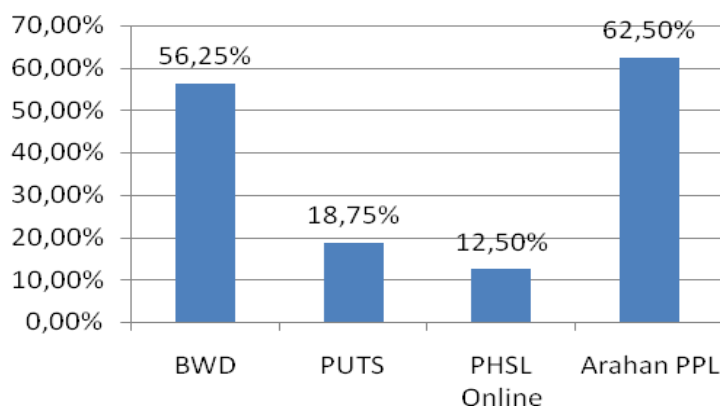
Tingkat adopsi petani terhadap teknologi PTT rekomendasi dapat ditunjukkan dalam grafik 4 diatas. Diketahui bahwa seluruh petani di Kalijambe telah melakukan penggunaan VUB, perlakuan benih sebelum semai, pengolahan tanah, pemupukan, kontrol atau pengamatan OPT, pengendalian tikus, penyemprotan secara tepat dan pengendalian hama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adopsi komponen PTT diatas tergolong tinggi. Sementara itu komponen PTT lainnya relatif beragam tingkat adopsinya meskipun diatas 50%. Disebutkan bahwa 68,7% petani telah menggunakan benih berlabel. Hal ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh petani telah mengadopsi teknologi benih berlabel. Terdapat informasi bahwa petani menggunakan varietas Ciherang dan IR 64 dari penangkar benih sekitar, sementara penangkar benih mendapatkan benih berlabel dari kios-kios pertanian dengan label biru.



Grafik 5. Jarak Tanam yang Digunakan pada Sistem Jajar Legowo



Komponen sistem tanam jarak legowo telah diadopsi oleh 93,75% petani. Lebih lanjut jarak tanam dalam jarak legowo dapat disajikan dalam grafik 5 diatas. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diketahui bahwa petani Kalijambe lebih banyak menggunakan jarak legowo 4 : 1 (87,5%), dibanding jarak legowo 2 : 1 (12,50%). Hal ini telah sesuai rekomendasi bahwa jarak legowo 4 : 1 dapat meningkatkan produktivitas padi untuk keperluan produksi beras.



Grafik 6. Rekomendasi Pemupukan yang Digunakan Petani

Sebanyak 87,50% petani telah melakukan pemupukan dengan rekomendasi. Jumlah tersebut terbagi menjadi empat sesuai sumber dan jenis rekomendasi. Berdasarkan grafik 6, dapat diketahui bahwa 56,25% petani melakukan pemupukan berdasarkan rekomendasi Bagan Warna Daun (BWD), 18,75% berdasarkan Perangkat Uji Tanah Sederhana (PUTS), 12,50% menggunakan PHSL online dan 62,5% petani lainnya melakukan pemupukan sesuai arahan PPL setempat. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PPL relatif besar dalam pengambilan keputusan yang diambil petani khususnya pemupukan.

Disisi lain, teknologi pemberian pupuk organik diadopsi oleh 56,25% petani. Meskipun lebih dari separuh petani telah melakukan teknologi ini, namun jumlah petani melakukan pemberian pupuk organik masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya pupuk organik sebagai bahan pembenah tanah. Kecuali itu, pupuk organik telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Untuk itu,



sangat perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan bokashi jerami maupun pemanfaatan pupuk kandang di Kalijambe.

Lebih lanjut pada grafik 4 disebutkan bahwa sebanyak 81,25% petani telah melakukan penanaman 1 – 2 bibit yang berumur kurang dari 18 hari setelah sebar (hss). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian petani telah mengetahui manfaat dan kelebihan dari penanaman 1 – 2 bibit muda. Sebagian besar petani telah membuktikan sendiri bahwa bibit muda dapat meningkatkan jumlah anakan dengan pertumbuhan yang lebih baik dibanding bibit berumur lebih dari 25 hari seperti yang sebelumnya dilakukan. Kendala yang ditemui yaitu hama keong yang menyenangi bibit muda. Namun demikian kendala tersebut dapat diatasi dengan pengendalian keong sebelum tanam.

Pengairan berselang telah dilakukan oleh 75% petani Kalijambe. Hal ini didukung oleh jaringan irigasi semi teknis yang melalui area demplot dari arah timur ke barat. Saluran irigasi tersebut selalu menyediakan air sepanjang tahun, dan pembuangannya (*drainase*) relatif lancar, sehingga memudahkan petani melakukan pengaturan pengairan berselang. Sedangkan 25% petani lainnya, khususnya yang berada pada sisi barat jalan raya sragi tidak melakukan pengairan berselang. Menurut informasi mereka terkendala pengairan yang alirannya melalui pabrik gula. Apabila musim penggilingan, pengairan yang mengarah ke sawah petani ditutup sehingga menyulitkan petani yang tidak menggunakan pompa. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta instansi terkait untuk mengadakan bantuan pompanisasi di daerah tersebut terutama di musim kemarau.

Sebanyak 56,25% petani diketahui telah melakukan pengendalian hama dengan penggunaan predator dan perangkap hama. Namun demikian, dalam pelaksanaan telah banyak menemui hambatan. Predator hama yang digunakan adalah burung hantu (*Tito alba*), yang menurut petani pemeliharaannya memerlukan perhatian dan keterampilan. Menurut hasil wawancara, petani belum mendapatkan pengarahan dan pelatihan khusus mengenai pembuatan dan pemeliharaan rumah burung hantu (rubuha) yang sering menemui kendala.



Rubuha yang ada telah banyak yang rusak sehingga burung hantu melakukan migrasi ke lokasi lain.

Panen tepat waktu telah dilakukan oleh 93,75% petani Kalijambe. Sebagian besar petani menjual padinya ke penebas sehingga petani dapat melakukan panen tepat waktu tidak terkendala tenaga panen yang semakin sulit didapat. Namun demikian, sebagian petani yang menerapkan teknologi jajar legowo memanen sendiri hasil panennya karena mengetahui hasil yang akan didapat akan lebih tinggi, meskipun konsekuensinya harus mampu membayar tenaga panen yang relatif tinggi secara tepat waktu.

PENUTUP

Tingkat adopsi petani terhadap seluruh komponen PTT padi sawah yang direkomendasikan telah lebih dari 50%. Seluruh petani telah mengadopsi teknologi penggunaan VUB, perlakuan benih sebelum semai, pengolahan tanah, pemupukan, pengamatan OPT, pengendalian tikus, penyemprotan secara tepat dan pengendalian hama. Sementara itu petani menggunakan benih berlabel (68,75%), menggunakan sistem tanam jajar legowo (93,75%), menggunakan pupuk organik (56,25%), menanam bibit muda (81,25%), menggunakan 1 - 2 bibit per lubang (81,25%), melakukan pemupukan sesuai rekomendasi (87,5%), melakukan pengairan berselang (75%), menggunakan predator (56,25%), menggunakan perangkap hama (56,25%) dan melakukan panen tepat waktu (93,75%).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupten Pekalongan. 2014. Kecamatan Sragi dalam Angka 2014/2015. Nomor Katalog : 1401.3326.100
- Kushartanti, E., Suhendrata, et al. 2007. Petunjuk Teknis PTT Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Jawa Tengah.
- Makarim, Irsal et al. 2004. Padi Tipe Baru. Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Sukamandi.
- Puspadi K, Untung S, Pridimminggo, Hadiawat L. 2011. Akselerasi adopsi varietas unggul baru padi melalui model industri perbenihan padi rakyat (MIP2R) di Nusa Tenggara Barat. Prosiding Seminar Nasional



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Penguatan Sosial Ekonomi Menuju Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Toha, Husin. 2005. Padi Gogo dan Pola Pengembangannya. Balai Penelitian Tanaman Padi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Subang.



PERAN PENYULUH SEBAYA DALAM MEMBENTUK PERILAKU PREVENTIF KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KABUPATEN BANYUMAS

Agoeng Noegroho, Sunarru Samsi Hariadi, Paulus Wiryono Priatamtama
Prodi Komunikasi Unsoed, PKP UGM, Psikologi Sanata Dharma
Noegroho_agoeng@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan peran penyuluh khususnya pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja seperti membentuk penilaian ancaman kesehatan reproduksi remaja yang mempengaruhi perilaku seks remaja sebelum menikah menjadi lebih baik dan pencegahan penyakit menular seksual di kalangan remaja Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan FGD terhadap informan remaja anggota dari kelompok PIK remaja dan para pembina PIK remaja di Kabupaten Banyumas yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh sebaya (konselor dan pendidik sebaya) sangat diperlukan dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja dengan indikator remaja sering memeriksakan kesehatan organ reproduksi, menolak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, serta dapat mencegah penyakit infeksi menular seksual (IMS). Hubungan pertemanan (*peer group*) secara psikologis lebih terbuka dan nyaman untuk menceritakan segala keluhan kesehatan reproduksi dengan teman sebayanya di dalam kelompok PIK dibandingkan kepada orang tuanya. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja melalui PIK remaja di Kabupaten Banyumas bukan tanpa masalah, sehingga diperlukan peran dari pembina dalam mengarahkan dan memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh kelompok PIK remaja agar setiap kegiatan tetap terselenggara secara berkesinambungan, meskipun disadari motto PIK remaja itu sendiri adalah dari, oleh dan untuk remaja. Apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh sebaya dalam hal ini remaja patut diberikan karena mereka yang telah bersedia menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk menolong sebayanya agar perilaku seks remaja sebelum menikah menjadi lebih baik dan pencegahan berbagai penyakit menular seksual di kalangan remaja sejak dini.

Kata kunci: remaja, penyuluh sebaya, kesehatan reproduksi, perilaku preventif

PENDAHULUAN

Perkembangan remaja dalam ilmu kedokteran dikenal sebagai suatu tahap perkembangan secara fisik, yakni masa alat-alat kelamin manusia mulai mencapai tingkat kematangannya. Secara anatomis berarti organ-organ kelamin pada khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya, sudah mencapai pada



bentuk sempurna dan sudah berfungsi secara sempurna pula. Ciri fisik yang dapat diidentifikasi bagi seorang pria pada umumnya adalah berkumis/berjanggut, dan mampu memproduksi beberapa ratus juta sel mani (*spermatozoa*) setiap kali ia berejakulasi. Bagi seorang wanita bagian payudara dan pinggulnya akan membesar serta setiap bulannya akan mengeluarkan sel telur dari indung telurnya.

Masa pematangan fisik berjalan kurang lebih dua tahun dan biasanya dihitung mulai haid yang pertama pada wanita atau sejak seorang laki-laki mengalami mimpi basah (mengeluarkan mani pada waktu tidur) yang pertama. Masa dua tahun ini dinamakan pubertas (Inggris: *puberty*), yang dalam bahasa latin berarti usia kedewasaan (*the age of manhood*) dan yang berkaitan dengan kata Latin lainnya *pubescere* yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang *pubic* (di wilayah kemaluan). Masa pubertas atau yang disebut juga masa puber, pada usia berapa persisnya masa ini dimulai sulit ditetapkan, karena cepat lambatnya haid atau mimpi basah sangat bergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Jadi masa pubertas bervariasi. (Sarwono, 2010: 9)

Piaget dalam Sarwono (2010: 53) membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya. Periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget sekaligus sebagai tahap awal seorang anak memasuki usia remaja adalah tahap operasional formal. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada "gradasi abu-abu" di antaranya. Dilihat dari faktor *biologis*, tahapan ini muncul saat pubertas (saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak



mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkrit.

Csikszentmihalyi dan Larson dalam Sarwono (2010: 14-15) menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negentropy*. Entropy adalah keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik, sehingga belum berfungsi secara maksimal. Keadaan *entropy* ini selama masa remaja, secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga lambat laun menjadi kondisi *negative entropy* atau *negentropy*. Kondisi *negentropy* adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik (*minimal friction disorder*), pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain, pengetahuan dengan perasaan atau sikap. Orang dalam keadaan *negentropy* ini merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh dan bisa berperilaku dengan tujuan yang jelas, tidak bimbang lagi sehingga mempunyai tanggung jawab dan semangat kerja yang tinggi. Demikian pula dalam soal seks. Anak-anak tabu bicara soal seks, apalagi melakukannya, dan masih terus ditabukan sampai ia menikah. Sementara itu, secara fisik dorongan seksnya sudah mendesak untuk disalurkan sejak ia berusia 11-14 tahun. Terjadi lagi friksi dan *entropy*.

Russel dan Andrews dalam Villarruel et.al (2003: 146) mengemukakan bahwa masa remaja adalah masa ketika banyak orang mengalami *sexual expression* untuk pertama kalinya. Periode ini bagi kebanyakan remaja, dimanfaatkan sebagai masa belajar perihal keintiman untuk pertama kalinya, seperti mulai dari berkencan, berciuman, bergandengan tangan dengan teman laki-laki atau perempuan, serta saat mengidentifikasi orientasi seksualnya dan perbedaan gender dengan teman-teman yang sebayanya. Istilah yang sering dipakai oleh para remaja Indonesia adalah pacaran.

Orientasi WHO terhadap masalah utama kesehatan reproduksi remaja adalah masa kehamilan yang terlalu awal (*teen pregnancy*). Kehamilan pada usia remaja mempunyai resiko yang lebih tinggi, seperti kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat, kematian bayi atau ibu dari pada usia-usia di atasnya



(Sanderowits & Paxman, 1985; Hanifah, 2000; Sarwono, 2010). Upaya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai kesehatan reproduksi remaja menurut Konferensi Sedunia tentang Wanita tahun 2000 di New York dalam Notoatmojo (2007), menekankan pada pemberian informasi yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Adapun tujuannya adalah mendorong agar remaja senantiasa menjaga kesehatan organ reproduksinya. Upaya promotif biasanya selalu juga diikuti dengan upaya preventif kesehatan reproduksi, yaitu mendorong agar remaja senantiasa memeriksa kesehatan organ reproduksi, mampu mencegah agar tidak tertular penyakit organ reproduksi, dan mampu menahan diri untuk tidak berhubungan seksual sebelum menikah.

Kalau kita menyimak kasus kehamilan remaja di luar nikah yang diekspos media maupun yang tidak diekspos media di Indonesia ternyata sudah cukup banyak. Sebab kehamilan remaja di luar nikah dapat karena diperkosa, melakukan seks atas dasar paksaan dari teman/pacar, melakukan seks atas dasar sama-sama mau. Bagi kalangan tertentu, seks kadang menjadi suatu hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi yang menganut paham 'ketimuran' seperti Indonesia. Dampaknya akan sungguh fatal, apabila para remaja memilih mencari tahu sendiri, bahkan melakukan seks tanpa mengetahui konsekuensi yang harus ditanggung di masa depan, seperti kehamilan dan tertular penyakit menular seksual.

Upaya pencegahan perilaku seksual pranikah pada remaja menurut Soetjiningsih (2008) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara simultan, yaitu meningkatkan kualitas hubungan orang tua-remaja, *self esteem*, religiusitas, keterampilan menolak tekanan negatif teman sebaya, dan meminimalkan eksposur media pornografi. Faktor ketercukupan informasi tentang kesehatan reproduksi yang diterima oleh orang tua dan remaja melalui berbagai macam media dan penyuluhan kesehatan, juga berpengaruh pada perilaku seks sebelum menikah dan pencegahan penyakit menular seksual.

Dalam kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK), sosok



konselor sebaya dan pendidik sebaya memiliki peran penting yaitu memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan penunjang lainnya. Selain itu juga memberikan solusi, nasehat maupun jalan keluar bagi kawan sebaya yang mempunyai permasalahan pergaulan, reproduksi dan narkoba. Hal ini sesuai dengan kecenderungan remaja yang lebih menyukai bercerita tentang permasalahannya dengan teman sebaya. Inilah yang menjadi fokus penelitian, yakni peran konselor sebaya dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja.

Dari latar belakang masalah baik secara teoritis maupun empiris, maka perumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran penyuluh sebaya (konselor sebaya dan pendidik sebaya) dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Banyumas?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan FGD terhadap informan remaja pengurus dan anggota dari kelompok PIK remaja serta para pembina PIK remaja di Kabupaten Banyumas yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber seperti menurut Patton (Moleong, 2002) dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, dan dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Model analisis data dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif. Dalam pandangan ini ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan proses siklus dan interaktif (Miles dan Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja sebagai bentuk pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha menyampaikan



pesan kesehatan kepada remaja secara kelompok atau individu, dengan harapan mendapatkan pengetahuan dan dapat membawa akibat pada pembentukan perilaku preventif kesehatan reproduksi. Untuk mencapai tujuan dari pendidikan kesehatan, yakni perubahan perilaku sasaran, menurut Notoatmodjo (1993: 39) diperlukan beberapa komponen, seperti petugas atau yang menyampaikan, materi atau pesannya, metodenya, dan media alat bantu/peraga yang dipakainya.

Kaitannya dengan penyuluhan kesehatan reproduksi melalui kelompok PIK remaja, penyuluh adalah Pendidik Sebaya (PS), dan Konselor Sebaya (KS) yang terlatih agar dapat memberikan informasi yang benar bagi teman sebayanya. Sehingga penyuluh sebaya memiliki kompetensi yang memadai untuk menyampaikan pesan tentang kesehatan reproduksi remaja dan sekaligus menjadi konselor sebaya, namun apabila diperlukan, petugas kesehatan juga turut membantu menyampaikan informasi pelayanan kesehatan secara medis.

Peran penyuluh sebaya dari hasil penelitian juga sesuai dengan peran penyuluh menurut Levin (1943) dalam Mardikanto (1993:46) terdiri atas kegiatan-kegiatan:

1. Pencairan diri dengan masyarakat sasaran
2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan
3. Pemantaban hubungan dengan masyarakat sasaran.

Dalam kaitannya dengan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja melalui kelompok PIK Remaja, peran penyuluh juga berperan dalam pencarian jati diri remaja sasaran penyuluhan agar memiliki komitmen dalam menjalankan hubungan antarlawan jenis yang lebih sehat untuk masa depan yang baik. Kemudian peran penyuluh sebaya juga dapat menggerakkan remaja untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PIK remaja, karena mereka adalah teman sebaya yang tumbuh bersama dalam usia yang relatif sama, sehingga mudah bagi penyuluh sebaya untuk mengajak teman-temannya. Peran penyuluh sebaya dalam pemantaban hubungan dengan klien remaja sasaran penyuluhan sangat mungkin terbangun karena secara psikologis hubungan pertemanan (*peer group*) secara psikologis lebih terbuka dan nyaman untuk menceritakan segala keluhan



kesehatan reproduksi dengan teman sebayanya di dalam kelompok PIK dibandingkan kepada orang tuanya. Hal tersebut diungkap oleh Irfan anggota PIK SMU Al Irsyad dari hasil FGD dengan para siswa.

“..bener mas, kami perlu sekali tempat curhat bagi permasalahan remaja yang kami hadapi dengan teman kami sendiri (konselor sebaya)..setidaknya kami bisa cerita dengan bebas masalah hubungan pertemanan di sekolah”

Berkaitan dengan peran penyuluh sebaya, menurut Mosher (1968) dalam Mardikanto (1993:47-48) mengungkapkan bahwa setiap penyuluh harus mampu melakukan peran ganda sebagai:

1. Guru, penyuluh sebaya berperan untuk mengubah perilaku (sikap, pengetahuan, keterampilan masyarakat sasaran).
2. Penganalisa, penyuluh sebaya selalu melakukan pengamatan terhadap keadaan (sumberdaya alam, perilaku masyarakat, kemampuan dana, dan kelembagaan yang ada) dan masalah-masalah serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat sasaran, dan melakukan analisis tentang alternatif pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut.
3. Penasehat, penyuluh sebaya mampu memilih alternatif perubahan yang paling tepat, yang secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomi menguntungkan, dan dapat diterima oleh nilai-nilai sosial budaya setempat.
4. Organisator, penyuluh sebaya mampu menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat (terutama tokoh-tokohnya), mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat, mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan-perubahan serta dapat memobilisasi sumberdaya, mengarahkan dan membina kegiatan-kegiatan maupun mengembangkan kelembagaan-kelembagaan yang efektif untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang direncanakan.

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja melalui PIK remaja di Kabupaten Banyumas bukan tanpa masalah, sehingga diperlukan peran dari pembina dalam mengarahkan dan memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh kelompok PIK remaja agar setiap kegiatan tetap terselenggara secara berkesinambungan, meskipun disadari motto PIK remaja itu



sendiri adalah dari, oleh dan untuk remaja. Seperti menurut Drs. Ardi sebagai PLKB Kecamatan Baturraden sekaligus pembina PIK remaja GIBITA dan PIK remaja Berkibar (2013), dalam pelaksanaannya sulit dilepaskan dengan struktur di tingkat desa dan kecamatan. Berikut petikan wawancara dengan pak Ardi.

“Walau bagaimanapun saya sebagai PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) kecamatan punya kewajiban untuk memelopori pendirian dan mendampingi secara terus menerus para remaja karang taruna Desa Rempoah...ya setiap kegiatan dilakukan PIK remaja ketika membutuhkan pendanaan atau butuh kerja sama dengan pihak luar..tetap difasilitasi dari desa dan kecamatan”

Apresiasi yang tinggi kepada para petugas PLKB di kecamatan yang selama ini bergerak dengan dana yang minim dan kepada para penyuluh sebaya dalam hal ini remaja patut diberikan karena mereka yang telah bersedia menyediakan tenaga, waktu dan pikiran untuk menolong sebayanya agar perilaku seks remaja sebelum menikah menjadi lebih baik dan pencegahan berbagai penyakit menular seksual di kalangan remaja sejak dini.

PENUTUP

Peran penyuluh berperan dalam pencarian jati diri remaja sasaran penyuluhan agar memiliki komitmen dalam menjalankan hubungan antarlawan jenis yang lebih sehat untuk masa depan yang baik. Kemudian peran penyuluh sebaya juga dapat menggerakkan remaja untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PIK remaja, karena mereka adalah teman sebaya yang tumbuh bersama dalam suatu wilayah RT/RW/desa dan sekolah, sehingga mudah bagi penyuluh sebaya untuk mengajak teman-temannya. Peran penyuluh sebaya dalam pemantaban hubungan dengan klien remaja sasaran penyuluhan sangat mungkin terbangun karena secara psikologis hubungan pertemanan (*peer group*) mereka sehari-hari. Selain itu juga penyuluh sebaya juga dituntut memiliki peran ganda, yakni sebagai guru, penganalisa, penasehat, dan organisator agar kegiatan melalui kelompok PIK remaja berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian khususnya bagi pembina dalam hal ini PLKB (PIK karang taruna), guru BK (PIK sekolah) dan pengelola kelompok PIK remaja di Kabupaten Banyumas, yakni perlu intensitas



yang lebih dalam mendampingi dan menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja secara berkelanjutan, karena peran para pendidik dan konselor sebaya dalam penyuluhan kesehatan reproduksi melalui kelompok PIK remaja menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN, 2008, *Buku Panduan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR)*, Jakarta
- Dacey, J., Travers, J., and Fiore, L. 2009. *Human Development: Across the Life Span*. New York: McGraw-Hill Company Inc.
- Mardikanto, Totok, 1993, *Penyuluh Pembangunan Pertanian*, Surakarta: UNS Press.
- Moleong, Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Machfoedz, I., dan Suryani, E., 2006, *Pendidikan Kesehatan bagian dari Promosi Kesehatan*, Yogyakarta: Penerbit Fitramaya.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1993, *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Rinawati, S., 2011, *Pengaruh Promosi Kesehatan Reproduksi Terhadap Perilaku Seks Sebelum Menikah (Di Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto)*, Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Grasindo
- Soetjiningsih, Chistiana Hari, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja*, Disertasi: Fak. Psikologi UGM.
- Villarruel, FA., et.al, 2003, *Community Youth Development: programs, policies and practices*, New Dehli: Sage Pub.



TINGKAT PERILAKU PETANI KEDELAI MELALUI PENDEKATAN PTT DI KAMPUNG SANGGARIA DISTRIK ARSO I KABUPATEN KEEROM

Septi Wulandari, Sri Rahayu D. Sihombing, Syafruddin Kadir, Sitti Raodah
Garuda

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua

Jalan Yahim Nomor 49 Sentani

Nomor *Handphone*: 0813 9271 2238

Email: septi.agustus1989@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan produksi kedelai. Penelitian di Kabupaten Keerom bertujuan untuk mengetahui tingkat perilaku petani melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tanaman kedelai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survei. Pengambilan sampel petani responden secara acak sederhana berjumlah 30 petani. Data dianalisis menggunakan uji proporsi dan analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perilaku petani melalui pendekatan PTT termasuk tinggi. Variabel keaktifan petani dalam penyuluhan berpengaruh positif terhadap perilaku petani. Keaktifan petani dalam penyuluhan perlu ditingkatkan dari segi peserta maupun waktu penyuluhan sehingga berdampak pada perubahan perilaku petani dalam melakukan pengelolaan tanaman yang sesuai anjuran.

Kata kunci: perilaku, PTT, kedelai

PENDAHULUAN

Salah satu upaya peningkatan produksi kedelai yang dilaksanakan dewasa ini adalah melalui program intensifikasi, yaitu upaya peningkatan produksi melalui teknik peningkatan produksi persatuan luas, di antaranya pengolahan tanah yang baik, penggunaan benih bermutu, pemupukan yang berimbang, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan dan penanganan pasca panen yang tepat dan benar (Jumakir dan Endrizal, 2013).

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas kedelai, di antaranya varietas unggul yang sebagian telah dikembangkan oleh petani. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Badan Litbang Pertanian juga telah menghasilkan dan mengembangkan melalui pendekatan Pengelolaan Tanaman



Terpadu (PTT) yang ternyata mampu meningkatkan produktivitas kedelai dan efisiensi input kedelai (Departemen Pertanian, 2008).

Varietas berperan penting dalam produksi kedelai karena untuk mencapai hasil yang tinggi sangat ditentukan oleh potensi genetiknya. Dewasa ini dikenal beberapa varietas unggul yang beredar di masyarakat, di antaranya varietas Anjasmoro, Kipas Merah dan Grobogan. Varietas Anjasmara memiliki potensi hasil 2,25 ton/ha tahan rebah, polong tidak mudah rebah pecah, agak tahan terhadap penyakit karat daun, ukuran biji besar (16 g/100 biji), umur panen 83 -93 hari. Varietas Kipas Merah memiliki potensi hasil 3,5 ton/ha, polong tidak mudah pecah, agak tahan terhadap penyakit karat daun dan fusarium, bobot biji 12 g/100 biji, umur panen 85-90 hari. Varietas kedelai grobogan memiliki potensi hasil 2,77 ton/ha, bobot biji 18g/100 biji, umur panen 76 hari (Balitkabi, 2005).

Dalam teori Lawrence Green (1980) seperti yang dikutip oleh Notoadmojo (2003: 113) mencoba menganalisis perilaku manusia dari tingkat kesehatan, dimana kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non behavior causes*). Adapun faktor perilaku dibentuk oleh:

- a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*), yang terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
- b. Faktor pendukung (*enabling factor*), yang terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana untuk kegiatan pertanian.
- c. Faktor pendorong (*reinforcing factor*) yang terwujud dalam sikap dan perilaku petani yang merupakan referensi dari perilaku masyarakat.

Dalam penelitian Sunarru (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan melalui analisis jalur adalah umur, persepsi, dan motivasi kerja. Semakin bertambah usia petani, perilaku dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan semakin baik. Semakin baik persepsi petani tentang pengendalian hama dan penyakit tumbuhan, perilaku dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan semakin



baik. Lalu, semakin tinggi motivasi kerja petani, perilaku dalam pengendalian hama dan penyakit tumbuhan semakin baik.

Metode penyuluhan tentang pengendalian hama penyakit tumbuhan perlu terus dikembangkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan guna meningkatkan motivasi kerja dan persepsi petani, terutama melalui pendekatan kelompok. Penyuluhan pertanian sebaiknya tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani (kognitif) tetapi juga meningkatkan keterampilan pengendalian hama dan penyakit tumbuhan (psikomotorik), serta menggunakan metode partisipatif dalam suasana yang menyenangkan (aspek afektif).

Sub pertanian Kabupaten Keerom mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian. Sektor ini pun berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan manusia seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Menurut BPS (2014), kontribusi produksi kedelai Papua tahun 2014 sebesar 0,37 persen terhadap produksi kedelai nasional sedangkan kontribusi produksi kedelai wilayah luar Jawa sebesar 34,78 persen dan kontribusi produksi kedelai wilayah Jawa sebesar 65,22 persen.

Oleh karena itu untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya bagi rumah tangga miskin pedesaan, ketersediaan dan kestabilan komoditas kacang-kacangan perlu diperhitungkan (Hanafie, 2004). Produktivitas kedelai Kabupaten Keerom mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Tahun 2013, produktivitasnya sekitar 1,32 ton/ha sedangkan tahun 2014 produktivitasnya sekitar 1,7 ton/ha (BPS 2013 dan BPS 2014). Selain faktor ekstensifikasi, faktor intensifikasi juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kedelai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Tingkat Perilaku Petani Kedelai melalui Pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) di Keerom”.



METODE PENELITIAN

Pengkajian dilaksanakan di Kabupaten Keerom dengan alasan lokasi merupakan sentra tanaman kedelai dan sebagai lokasi SL PTT tanaman kedelai. Dalam penelitian ini, teknik pelaksanaannya menggunakan metode survey. Semua informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner. Umumnya, pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi (Singarimbun dan Effendi, 2011). Dalam penelitian ini, populasinya adalah petani di Kabupaten Keerom sedangkan pemilihan sampel petani dilakukan secara *simple random sampling* yaitu dari 1 sampel kelompok tani diambil 30 petani sampel petani.

Kemudian dalam menjawab tujuan dalam penelitian ini maka dilakukan beberapa metode analisis. Pada hipotesis pertama, menganalisis tingkat perilaku petani kedelai melalui pendekatan PTT dengan menggunakan uji proporsi sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

$H_o = P \leq 50\%$

$H_a = P > 50\%$

H_o = diduga kurang atau sama dengan 50% petani mempunyai tingkat perilaku yang kuat dalam budidaya kedelai melalui pendekatan PTT.

H_a = diduga lebih dari 50% petani mempunyai tingkat perilaku yang kuat dalam budidaya kedelai melalui pendekatan PTT.

Tingkat signifikansi 0,05 (95%), $n = 60$

Statistik pengujian

$$Z_{hit} = \frac{x/n - P_o}{\sqrt{\frac{P_o(1 - P_o)}{n}}}$$

Kriteria Pengujian

H_o diterima, H_a ditolak : jika $Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$

H_o ditolak, H_a diterima : jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$



Hipotesis kedua untuk mengetahui pengaruh keaktifan petani terhadap perilaku petani kedelai dalam peningkatan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di Keerom adalah dengan menggunakan analisis regresi linier.

$$Y = A + b_1x_1$$

Dimana :

Y = Perilaku petani

A = Nilai konstanta

b_1 = Koefisien regresi

x_1 = Keaktifan petani

Pengujian hipotesis :

H_0 : $b_1 = 0$

H_a : $b_1 \neq 0$

H_0 : Tidak ada pengaruh keaktifan petani dalam peningkatan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di Keerom.

H_a : Ada pengaruh keaktifan petani dengan perilaku petani kedelai dalam peningkatan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di Keerom

Kriteria pengujian:

Dengan menggunakan *software* SPSS 16.0 maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

- R square* atau koefisien determinasi menunjukkan persen variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen.
- Dari uji ANOVA atau *F test* untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,1) maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.



- c. Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, maka pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut (dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,1$):
- Jika nilai Sig. $< \alpha \rightarrow H_0$ ditolak
- nilai Sig. $\geq \alpha \rightarrow H_0$ diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sebelum berdiri menjadi kabupaten merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura. Hingga payung hukum UU RI No.26 Tahun 2002, Keerom resmi menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut (Mdpl), wilayah Kabupaten Keerom merupakan lereng dengan kemiringan lebih dari 40%. Sebagian besar wilayah yakni seluas 5.722,96 Km² (61,11% dari total wilayah) berada pada ketinggian 400 – 1.500 Mdpl. Distrik Arso, Skanto, dan Arso Timur merupakan wilayah terendah dengan ketinggian diantara 0 sampai 1000 mdpl.

Kondisi geografis dan tingkat kesesuaian lahan pertanian Kabupaten Keerom menunjukkan bahwa terdapat potensi yang besar untuk pengembangan kedelai sebagai produk unggulan dan sumber ketersediaan pangan untuk wilayah Papua. Hal ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa jenis tanah didominasi aluvial dan podsolik serta sebagian kecil jenis tanah organosol dan mediteran dengan luas areal 75,063.49 hektar atau 7,38 % dari total luas wilayah Kabupaten Keerom. Pilihan jenis tanaman seperti kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, talas dan ubi kayu dapat ditanam di antara jenis tanaman tahunan atau tanaman kakao, kopi, kelapa sawit, matoa, rambutan, duku dan lain-lain sebagai tanaman tetap. Sistem pertanian konservasi masih sangat perlu diterapkan pada zona ini yaitu pengolahan tanah minimal, terasering, dan pilihan jenis tanaman sela yang tepat akan sangat membantu dalam mencegah erosi sekaligus meningkatkan kesuburan tanah khususnya jenis tanaman legum (Kubelaborbir dan Yarangga, 2010).



Sejak tahun 1980 Kabupaten Keerom merupakan daerah tujuan program transmigrasi, dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, salah satunya usaha tani kedelai. Usaha untuk memenuhi kebutuhan kedelai terus dilakukan melalui implementasi berbagai program pemerintah, mulai dari program Supra Insus, Program Operasi Khusus (Opsus) Kedelai, program selanjutnya Gema Palagung melalui peningkatan Index Pertanaman dan Program Bangkit Kedelai. Pada tahun 2008 sampai tahun 2015 Kementerian Pertanian mencanangkan Program SL PTT Padi Jagung Kedelai sebagai terobosan baru dalam usaha peningkatan produksi kedelai. Selanjutnya dipaparkan mengenai perilaku petani kedelai melalui pendekatan PTT.

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem atau pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani. Sistem intensifikasi tanaman padi dengan Pengelolaan Tanaman Terpadu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai). Perilaku petani kedelai sebagai salah satu indikator yang menentukan berhasil tidaknya pendekatan inovatif yang telah dilakukan.

Perilaku petani dalam penelitian ini merupakan variabel terikat yang diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu pengetahuan, sikap, dan ketrampilan usaha tani kedelai mulai dari persiapan benih, pengolahan, pemupukan, pemeliharaan dan penanaman.

Tabel 1. Perilaku Petani Kedelai Melalui Pendekatan PTT

No	Indikator	Interval Skor	Skor Rerata	Tingkat Penyuluhan (%)
Persiapan Benih				
1	Pemilihan benih sebelum tanam	0-4	3,87	96,75
2	Penggunaan benih unggul	0-4	3,87	96,75
3	Persiapan benih sebelum tanam	0-4	3,87	96,75
4	Penggunaan benih yang dianjurkan PPL/Dinas Pertanian/BPTP	0-4	3,87	96,75



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Indikator	Interval Skor	Skor Rerata	Tingkat Penyuluhan (%)
5	Penggunaan benih yang dijual di toko-toko pertanian	0-4	3,87	96,75
Jumlah		0-20	19,35	96,75
Pengolahan				
1	Persiapan lahan tanam	0-4	3,87	96,75
2	Pembersihan tanah terhadap gulma dan sisa-sisa tanaman	0-4	3,93	98,25
3	Pengolahan tanah sampai keadaan gembur	0-4	3,86	96,50
4	Pembuatan saluran drainase dengan jarak tertentu	0-4	3,73	93,25
5	Penggunaan pupuk dasar	0-4	3,93	98,25
Jumlah		0-20	19,32	96,60
Pemupukan				
1	Sesuai dosis yang dianjurkan	0-5	4,07	81,40
2	Menggunakan pupuk urea	0-4	2,67	66,75
3	Menggunakan pupuk TSP dan KCL	0-4	3,53	88,25
4	Menggunakan pupuk organik	0-4	3,67	91,75
5	Melakukan pemupukan tanap II dan tahap III	0-5	4,07	81,40
Jumlah		0-22	18,01	81,86
Penanaman dan Pemeliharaan				
1	Pola tanam monokultur	0-4	3,80	95,00
2	Perencanaan waktu tanam	0-4	3,60	90,00
3	Pembuatan lubang tanam dengan jarak sesuai anjuran	0-5	3,80	76,00
4	Melakukan penyulaman apabila ada tanaman yang mati/tidak tumbuh	0-5	3,67	73,40
5	Penyiangan setelah tanaman berumur $\pm$ 15 hari	0-5	3,93	78,60
6	Penyiangan tahap II setelah tanaman berumur $\pm$ 1 bulan	0-4	4,00	100,00
7	Pemberantasan hama sesuai anjuran	0-4	3,60	90,00
8	Melakukan panen saat tanaman cukup umur	0-5	3,80	76,00
Jumlah		0-36	30,2	83,89
Total		0-98	86,88	88,65

Sumber : Data Primer, 2015

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat dijelaskan bahwa perilaku petani kedelai melalui pendekatan PTT di Keerom sebesar 88,65%. Hal itu dapat



diartikan bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Keerom telah menerapkan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada Usaha tani komoditas kedelai. Indikator persiapan benih (pemilihan benih, penggunaan benih unggul, persiapan benih, dan penggunaan benih sesuai anjuran) sebesar 96,75%. Pengolahan (persiapan lahan tanam, pembersihan tanah terhadap gulma dan sisa-sisa tanaman, pengolahan tanah, pembuatan saluran drainase, dan penggunaan pupuk dasar) sebesar 96,60%. Pemupukan (sesuai dosis dan anjuran) sebesar 81,86% sedangkan untuk penanaman dan pemeliharaan (mulai dari penggunaan jarak tanam yang sesuai, penyulaman, penyiangan, pemberantasan hama serta melakukan panen pada umur yang tepat) sebesar 83,89%. Kabupaten Keerom telah mendapatkan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu komoditas Padi, Jagung, dan Kedelai di Kabupaten Keerom sudah dimulai sejak tahun 2012 . Walaupun tidak semua distrik/kecamatan sebagai lokasi Sekolah Lapang namun dengan adanya kegiatan penyuluhan atau arisan, petani dapat menyampaikan atau menyalurkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

Dari indikator perilaku petani, Penggunaan pupuk urea di Kabupaten Keerom hanya sebesar 66,75%. Rendahnya penggunaan pupuk urea dibandingkan dengan indikator lain karena ketersediaan pupuk urea di lapangan yang sudah langka. Perilaku Petani digolongkan kedalam kategori rendah, sedang, dan tinggi menggunakan skala likert. Sebaran Perilaku Petani Kedelai Melalui Pendekatan PTT dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Petani Berdasarkan Perilaku Petani Kedelai Melalui Pendekatan PTT

No	Kategori Tingkat Perilaku Petani (Skor)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Rendah (0-32)	0	0,00
2	Sedang (33-66)	0	0,00
3	Kuat (67-69)	30	100,00
Jumlah		60	100,00

Sumber : Data Primer, 2015

Dari Tabel 2. dapat diketahui bahwa sebesar 100% perilaku petani kedelai melalui pendekatan PTT sangat kuat . Kuat lemahnya perilaku petani juga dapat diketahui dengan uji proporsi. Pada hipotesis pertama, yaitu diduga lebih dari



50% petani mempunyai perilaku yang kuat dalam budidaya kedelai melalui pendekatan PTT. Untuk membuktikan kebenaran dan hipotesis maka dilakukan perhitungan menggunakan uji proporsi. Adapun langkah-langkah dalam uji proporsi adalah :

Merumuskan hipotesis

$H_0 = P \leq 50\%$, diduga kurang atau sama dengan 50% petani mempunyai tingkat perilaku yang kuat dalam budidaya kedelai melalui pendekatan PTT.

$H_a = P > 50\%$, diduga lebih dari 50% petani mempunyai tingkat perilaku yang kuat dalam budidaya kedelai melalui pendekatan PTT.

a. Taraf signifikansi 5%, $x = 30$, $n = 30$, $P_0 = 50\%$

$$Z_{hit} = \frac{x/n - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1 - P_0)}{n}}}$$

$$Z_{hit} = \frac{30/30 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5(1 - 0,5)}{30}}}$$

$$Z_{hit} = \frac{0,5}{0,091287}$$

$$Z_{hit} = 5,477$$

b. Kriteria Pengujian

H_0 diterima, H_a ditolak : jika $Z_{hitung} \leq Z_{tabel}$

H_0 ditolak, H_a diterima : jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$

c. Kesimpulan

$$Z_{hit} = 5,477$$

$$Z_{tab} = 1,53$$

$Z_{hitung} < Z_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji proporsi, diperoleh nilai Z_{hitung} sebesar 5,47. Hasil nilai uji proporsi lebih besar dibandingkan dengan nilai Z_{tabel} yaitu 1,53. Hal ini menunjukkan sebagian besar petani di Kabupaten Keerom telah menerapkan Pengelolaan Tanaman Terpadu pada usaha tani kedelai. Melalui penerapan PTT Kedelai mampu meningkatkan produktivitas petani di samping memperdalam pengetahuan petani terkait penggunaan benih



berlabel, pemakaian saprodi sesuai dosis dan kebutuhan, serta pengendalian hama penyakit yang efektif. Berikutnya dipaparkan mengenai pengaruh kaktifan petani terhadap perilaku petani dalam peningkatan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di Keerom

Keaktifan petani dalam kegiatan penyuluhan berpengaruh pada penambahan informasi-informasi yang bermanfaat bagi peningkatan kemampuan bertani di lahan garapannya. Keaktifan petani dalam kegiatan penyuluhan meliputi kehadiran, keaktifan bertanya, keaktifan dalam mengeluarkan pendapat, serta berperan mengikuti praktek lapangan yang diadakan. Berdasarkan tabel 3 di bawah ini dapat diketahui bahwa keaktifan petani dalam penyuluhan mencapai persentase 86,09%. Kegiatan penyuluhan di Kabupaten Keerom dapat diadakan secara formal maupun non formal. Secara formal diadakan oleh Dinas Pertanian, BKP4K Kabupaten Keerom, Balai Penyuluhan Pertanian/BKP5K,BPS dan lain sebagainya, sedangkan penyuluhan non formal biasanya dilakukan saat arisan, ronda, serta kegiatan masyarakat lainnya. Dengan aktifnya petani mengikuti penyuluhan maka semakin banyak ilmu yang diperoleh dan diaplikasikan terutama dalam melakukan usahatani.

Tabel 3. Keaktifan Petani dalam Penyuluhan

No	Indikator	Interval Skor	Skor Rerata	Tingkat Penyuluhan (%)
1	Ikut serta dalam kegiatan pertemuan kelompok tani	0-4	3,57	89,25
2	Mengeluarkan pendapat saat pertemuan kelompok tani	0-5	4,30	86,00
3	Mengikuti kegiatan pertemuan kelompok tani sampai selesai	0-5	4,30	86,00
4	Ikut serta dalam kegiatan penyuluhan	0-5	4,20	84,00
5	Bertanya saat kegiatan penyuluhan berlangsung	0-5	4,30	86,00
6	Mencatat materi-materi penting yang disampaikan	0-5	4,30	86,00
7	Mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesai	0-5	4,30	86,00
Total			29,27	86,09

Sumber : Data Primer, 2015



Tabel 4. Hasil Analisis Regresi (Model 5)

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig	Ket
Keaktifan (X_3)	1,110	2,210	0,035	*
Konstanta	54,040			
R square	0,149			
Adjusted square	0,118			
F hitung	4,884			
Keterangan : * signifikansi pada $\alpha = 10\%$				
NS Non signifikansi pada $\alpha = 10\%$				

Sumber : Data Primer, 2015

Pada tabel 4. Di atas menyatakan bahwa nilai signifikansi keaktifan penyuluh lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha : 0,1$. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan petani dalam penyuluhan memiliki pengaruh nyata terhadap perilaku petani. Semakin aktif petani dalam kegiatan penyuluhan maka semakin tinggi pula perilaku petani kedelai dalam menerapkan PTT. Keaktifan petani dalam kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ketrampilan masing-masing petani. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai R-square 0,149 berarti variabel perilaku dapat dijelaskan oleh variabel keaktifan penyuluh sebesar 14,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian seperti faktor lingkungan dan norma sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem atau pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi dan dilakukan secara partisipatif oleh petani. Berhasil tidaknya teknologi inovatif yang diterapkan dapat dilihat melalui perilaku petani. Hasil analisis menunjukkan bahwa perilaku petani melalui Pendekatan PTT sangat kuat sebesar 88,65%. Hal itu dapat diartikan bahwa sebagian besar petani di Kabupaten Keerom telah menerapkan Pengelolaan Tanaman Terpadu pada Usahatani komoditas kedelai. Lantas keaktifan petani dalam penyuluhan memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di



Kabupaten Keerom. Semakin aktif petani dalam kegiatan penyuluhan maka semakin baik perilaku petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman kedelai melalui pendekatan PTT di Kabupaten Keerom.

Saran

1. Kabupaten Keerom mempunyai wilayah yang luas dan belum seluruhnya memperoleh pengetahuan terkait Pengelolaan Tanaman Terpadu sehingga untuk mempercepat diseminasi perlunya perhatian dari Dinas Pertanian dalam melakukan penyuluhan PTT Tanaman Pangan maupun Tanaman perkebunan.
2. Keaktifan petani dalam penyuluhan perlu ditingkatkan dari segi jumlah peserta maupun waktu penyuluhan sehingga akan berdampak pada perubahan perilaku petani melakukan pengelolaan tanaman sesuai anjuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2015. ([http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd 20150417110853.pdf](http://papua.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd%20150417110853.pdf), diakses tanggal 28 April 2016).
- Balitkabi. 2005. *Teknologi Produksi Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian*. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian.
- BPS Kabupaten Keerom. 2013. *Keerom dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom.
- BPS Kabupaten Keerom. 2014. *Keerom dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom.
- Departemen Pertanian. 2008. *Panduan Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Kedelai*. Badan Litbang. Puslitbangtan. Balitkabi. Jakarta
- Hariadi, Sunarru S. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Petani dalam Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan Melalui Analisis Jalur*. Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia Vol XII No.1.
- Jumakir dan Endrizal. 2013. *Produktivitas Kedelai Varietas Anjasmoro melalui Pendekatan PTT pada Lahan sub Optimaml di Provinsi Jambi*.
- Kubelaborbir, Hendrik dan Karel Yarangga. 2010. *Zona Agroekologi Kabupaten Keerom Provinsi Papua Berdasarkan Pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Jurnal Agrikultura Vol 21 (1) hal 77-84.
- Lawrence Green. 1980. *Health Education Planning, A Diagnosis Approach*. California: Mayfield Publishing.
- Nawawi, H dan M. Mimi. 1994. *Penelitian Terapan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Singarimbun, M dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.



KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN (Studi Kasus Diseminasi Budidaya Kentang Ramah Lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung)

Nur Fitriana^{1) 2)}, Sherly Sisca Piay¹⁾

¹⁾ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

²⁾ Mahasiswa Pascasarjana Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Universitas Gadjah Mada
Nurfitriana_btpjateng@yahoo.com

ABSTRAK

Komunikasi partisipatif menjadi salah satu metode komunikasi dalam melakukan penyuluhan di masyarakat. Metode ini menggunakan pendekatan dari bawah (bottom up) yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga diharapkan masyarakat menjadi subyek pembangunan. Makalah ini bertujuan untuk melihat suatu bentuk komunikasi partisipatif dalam pembangunan masyarakat dengan mengambil contoh program diseminasi budidaya kentang ramah lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dari hasil penelitian komunikasi partisipatif dipraktikkan dalam program Diseminasi Budidaya Kentang Ramah Lingkungan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Upaya komunikasi partisipatif dilakukan dengan cara dialog antara pemerintah dan petani. Setiap anggota Gapoktan dilibatkan dalam setiap proses kegiatan. Partisipasi berada pada tingkatan “mendelegasikan”, yaitu pemerintah menyampaikan program pembangunan pertanian ramah lingkungan sedangkan serangkaian keputusan dilakukan oleh Gapoktan. Di sini pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

Kata kunci: komunikasi, partisipatif, pembangunan, pertanian, kentang

PENDAHULUAN

Kabupaten Temanggung terkenal sebagai salah satu sentra penghasil tembakau di Jawa. Berkembangnya komoditas tembakau karena agroekologi yang sesuai. Salah satu desa yang menjadi sentra budidaya tembakau yaitu Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Budidaya ini sudah dilakukan turun-temurun dan membudaya. Namun akhir-akhir ini banyak petani tembakau yang mengalami kerugian akibat gagal panen atau harga jual tembakau rendah.

Kerugian dalam budidaya tembakau menjadi pukulan yang berat bagi petani tembakau. Budidaya tembakau memerlukan waktu relatif lama sehingga



dalam satu tahun para petani hanya bergantung pada hasil dari satu kali panen tembakau. Kondisi tersebut memunculkan kesadaran pada sekelompok pemuda tani untuk mulai mengubah kebiasaan bertanam tembakau. Kelompok yang tergabung dalam Kelompok Tani Daya Manunggal ini berusaha mencari alternatif komoditas lain untuk ditanam di lahan mereka.

Keinginan para pemuda tani untuk diservikasi komoditas sejalan dengan anjuran Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan anjuran agar para petani tidak bergantung pada tembakau tetapi mencari alternatif komoditas lain agar dapat panen 2-3 kali/tahun.

Kemudian pembangunan masyarakat di sini mempunyai beragam pendekatan. Secara garis besar dikelompokkan pendekatannya dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Dahulu, pendekatan pembangunan dominan dilakukan secara *top-down* namun selama beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran pendekatan kepada *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* ini menjadikan masyarakat tidak hanya objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan. Pembangunan berpusat kepada manusia (*people centered*). Artinya peran pemerintah lebih sebagai fasilitator dan aktualisasi potensi masyarakat lebih didorong.

Metode komunikasi yang dilakukan dalam pendekatan *bottom-up* beragam, di antaranya partisipasi dari masyarakat sasaran. Metode ini merupakan perubahan dari bawah dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi digunakan melalui keterlibatan dalam proses-proses dengan orang lain dan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan serta keseimbangan kekuasaan.

Rogers menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan adalah: "*the study of social change brought about by the application of communication research, theory, and technologies to bring about development*". Sehingga makna pembangunan di sini didefinisikan sebagai partisipasi yang luas dari proses perubahan sosial dalam sebuah masyarakat (Ife, 2002). World Bank (2013) menyatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan integrasi strategi komunikasi dalam program-program pembangunan.



Komunikasi partisipatif adalah model komunikasi yang memberikan kesempatan kepada suatu kelompok atau komunitas masyarakat untuk memproduksi dan mengelola informasi secara mandiri. Model ini mengakomodasi perspektif-perspektif masyarakat yang sebelumnya kurang diapresiasi pada model komunikasi pembangunan yang searah (tanpa proses dialog dan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa menentukan arah pembangunan). Melalui komunikasi partisipatif, masyarakat mampu memberdayakan diri dan memperkuat perannya di dalam pembangunan

Adapun tingkatan partisipasi masyarakat dari UK health for All Network (Ife dan Tesoriero, 2008) menjadi tujuh tingkatan. Tingkatan tersebut antara lain: (1) nihil, (2) menerima informasi, (3) dikonsultasikan, (4) menasehati, (5) merencanakan bersama, (6) mendelegasikan, dan (7) memiliki control. Untuk tahapan partisipasi, Cohen dan Uphoff (1979 dalam Rosyida dan Nasdian, 2011) membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu: (1) tahap pengambilan keputusan, (2) tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, (3) tahap evaluasi, dan (4) tahap menikmati hasil. Keseluruhan tahapan partisipasi tersebut merupakan kesatuan integratif dari kegiatan pengembangan perdesaan meskipun sebuah siklus konsisten dari kegiatan partisipatoris mungkin dinilai belum biasa dilakukan.

Komunikasi partisipatif dalam program pembangunan berusaha dilaksanakan di beberapa tempat. Makalah ini mencoba melihat suatu bentuk komunikasi partisipatif dalam pembangunan masyarakat dengan mengambil contoh program diseminasi budidaya kentang ramah lingkungan di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang komunikasi partisipatif dalam pembangunan pertanian ini menggunakan metode studi kasus. Lokasi yang dipilih adalah Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang menjadi lokasi diseminasi kentang ramah lingkungan bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah serta Pemerintah Daerah



Kabupaten Temanggung. Pengamatan dikhususkan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Daya Manunggal. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder yang mendukung penelitian. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi partisipatif dipilih dalam rangka mengkomunikasikan program-program pembangunan. Tujuan utama penerapan komunikasi partisipatif ini adalah agar para pemuda tani yang tergabung dalam Gapoktan Daya Manunggal dapat mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi untuk keputusan pengelolaan usahatani. Komunikasi partisipatif juga digunakan untuk mempertemukan keinginan petani dengan program pemerintah. Program pemerintah di sini adalah pembangunan pertanian yang ramah lingkungan. Upaya komunikasi partisipatif dilakukan dengan cara dialog antara pemerintah dan petani. Dalam dialog ini, setiap anggota Gapoktan memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat.

Selanjutnya, pada tahap kegiatan budidaya kentang ramah lingkungan ini, setiap anggota Gapoktan dilibatkan dalam setiap proses kegiatan. Proses kegiatan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dalam setiap proses, Gapoktan mengadakan pertemuan dimana setiap anggota Gapoktan dan pendamping kegiatan ikut hadir. Adapun untuk perencanaan dilakukan secara musyawarah oleh seluruh peserta. Anggota pun bebas mengemukakan keinginan dan ide-ide. Semua ide yang telah dikemukakan akan dipertimbangkan bersama agar dapat memperoleh sebuah keputusan. Keputusan yang telah disepakati tersebut menjadi dasar perencanaan kegiatan yang harus ditaati.

Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati. Dalam pelaksanaan, setiap komponen pembangunan berpartisipasi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Evaluasi kegiatan dilakukan bersama-sama.

Dari hasil dialog, diperoleh keputusan bahwa komoditas diversifikasi yang



akan diusahakan adalah kentang. Budidaya tanaman kentang ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Upaya budidaya kentang yang ramah lingkungan diantaranya penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang terkendali, pemanfaatan pupuk organik, serta proses tanam dengan mempertimbangkan kemiringan lahan (*nyabuk gunung*).

Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada rencana yang telah disusun dan disepakati bersama sebelumnya. Kemudian dalam pelaksanaan, setiap komponen pembangunan berpartisipasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing. Evaluasi kegiatan dilakukan bersama-sama. Partisipasi ini penting sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh (Ife dan Tesoriero, 2008), dalam proses pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat serta menciptakan kembali masa depan masyarakat dan individu. Senada dengan hal tersebut, Ban dan Hawkins (1999) juga menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat tani.

Dari proses komunikasi partisipasi yang terjadi, partisipasi dalam tingkatan “mendelegasikan”. Pemerintah menyampaikan program pembangunan pertanian ramah lingkungan sedangkan serangkaian keputusan dilakukan oleh Gapoktan. Di sini Pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang memberikan jalan tengah atau alternatif ketika muncul beberapa masalah selama kegiatan berlangsung. Tingkatan partisipasi “mendelegasikan” diartikan oleh Ife dan Tesoriero (2008) sebagai organisasi mengidentifikasi dan mempresentasikan sebuah masalah kepada masyarakat, menetapkan batas-batas dan meminta masyarakat membuat serangkaian keputusan yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah rencana yang akan diterimanya. Sehingga sisi dari *bottom up* tersebut memang benar dijalankan sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Komunikasi partisipatif dipraktikkan dalam program pembangunan melalui budidaya kentang ramah lingkungan di Desa Tlahab, Kecamatan



Kledung, Kabupaten Temanggung. Upaya komunikasi partisipatif dilakukan dengan cara dialog antara pemerintah dan petani. Dalam dialog ini, setiap anggota Gapoktan memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Setiap anggota Gapoktan dilibatkan dalam setiap proses kegiatan. Proses kegiatan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Lanjut, partisipasi yang berada dalam tingkatan “mendelegasikan”, yaitu pemerintah menyampaikan program pembangunan pertanian ramah lingkungan sedangkan serangkaian keputusan dilakukan oleh Gapoktan. Di sini pemerintah bertindak sebagai fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardianto, M.E. 2011. *Komunikasi Partisipatif Melalui Proses Kegiatan Panda Click: Studi Kasus pada Program Komunikasi Partisipatif Panda Click yang Dilakukan Oleh World Wildlife Fund For Nature (WWF) Indonesia Program Kalimantan Barat di Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Ife, J. dan F. Tesoriero. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Melkote, Srinivas R. 2002. *Theories of Development Communication*. Dalam *Handbook of International and Intercultural Communication* editor William B. Gudykunst dan Bella Mody. California: Sage Publications.
- Nasdian, Fredian Tonny, 2015, *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosyida, Isma dan F. T. Nasdian. 2011. *Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya terhadap Komunitas Perdesaan*. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Volume 5, Nomor 01
- Van de Ban, A. W. dan H. S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wicaksono, Roso, 2015. *Pengantar Komunikasi Pembangunan*. Bahan Kuliah Matrikulasi Program S3 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



TINJAUAN EMIK DINAMIKA PERTANIAN DI ERA OTONOMI DI KABUPATEN MUNA BARAT

La Mani¹⁾, Dwiningtyas Padmaningrum²⁾

¹⁾ Marketing Communication, Communication and Economic Faculty
Bina Nusantara University Jakarta

²⁾ Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret Solo
Email: lamani2707@gmail.com

ABSTRAK

Paper ini berusaha memaparkan realitas secara kualitatif dengan pendekatan emik tentang dinamika pertanian masyarakat lokal di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini ideal sebagai salah satu sentra pertanian karena kondisi topografi dan tanahnya cocok untuk ditanami berbagai budidaya tanaman pangan. Kenyataan yang ada pada petani lokal di Kabupaten Muna Barat belum menunjukkan perubahan sistem berusaha tani yang masih tradisional. Hadirnya sistem otonomi seyogyanya dapat memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah dalam memahami konteks pembangunan sehingga mampu mendesain dan berkreasi terhadap potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. Namun otonomi daerah belum memberikan harapan yang didambakan dan bahkan pembangunan di Kabupaten Muna Barat terkesan mengalami stagnasi, khususnya di bidang pertanian. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa stagnasi pertanian di Kabupaten Muna Barat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni rendahnya pengetahuan petani terhadap budidaya pertanian yang baik, petani lokal masih menggunakan pola pertanian tradisional yang masih banyak dipengaruhi mitos, redupnya konsep hidup masyarakat berkaitan dengan kearifan lokal pokaowu, dan kaseise dalam berusaha tani; tidak adanya kelembagaan desa dan kelembagaan petani yang berfungsi; belum bekerjanya penyuluhan yang tepat di level petani; serta belum tampaknya kebijakan pemerintah daerah yang pro petani.

Kata kunci: emik, dinamika pertanian, otonomi daerah

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan bidang yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan kelangsungan manusia. Bagi negara agraris seperti Indonesia, masyarakat banyak menggantungkan dirinya pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh luasnya bentangan dataran yang masih potensial untuk diolah menjadi area pertanian baru. Indonesia bisa memaksimalkan usaha di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri maupun untuk ekspor sehingga cita-cita kedaulatan pangan dapat terwujud.



Di masa lalu, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan keberdayaan masyarakat, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Hal ini dapat dicapai dengan memusatkan perhatian pada produksi seperti beras, jagung, singkong, kedelai, kacang tanah, dan hortikultura. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah dengan mayoritas petani lemah dalam mengadopsi inovasi disertai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani kemudian peran penyuluh di era sekarang menjadi semu.

Kompleksitas masalah yang melingkupi petani dan pertanian menjadikannya sulit menentukan dari mana kita akan memulai untuk menjawab permasalahan petani dan pertanian. Hal ini juga berkaitan dengan sifat usaha pertanian yang memiliki karakteristik unik, yakni bergantung pada sumber daya alam maupun manusia sehingga memiliki permasalahan yang bisa bersifat spesifik antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, pemahaman terhadap kondisi dan situasi setempat dimana aktivitas pertanian berlangsung menjadi isu strategis agar kebijakan pertanian yang didesain mampu mengatasi permasalahan pertanian.

Widodo dan Nawangsari (2016) menyatakan bahwa pertanian adalah suatu sistem masalah (*system problem*) dimana hasil sebuah diagnosa terhadap permasalahan pertanian akan menunjukkan suatu pemecahan masalah yang efektif apabila keseluruhan keadaan yang saling terkait dapat dipenuhi. Mengingat kompleksitas sektor pertanian tentang berbagai elemen yakni petani selaku pelaku utama, penyedia sarana produksi, pasar, kebijakan pertanian, penyuluhan dan sebagainya, maka memberikan fokus perhatian pada faktor-faktor yang dianggap menyumbang terbesar pada keberhasilan maupun kegagalan sektor pertanian menjadi cara agar mampu menguraikan permasalahan dan memberikan solusi yang berdampak maksimal.

Secara umum Indonesia memiliki potensi pertanian yang besar namun kenyataannya sebagian besar dari petani masih banyak yang termasuk golongan



miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang memberdayakan petani dan sektor pertanian. Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya, usaha pertanian cenderung mengalami stagnasi, yang didominasi oleh kelemahan pada usaha skala kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, pasar lokal mendominasi, serta melibatkan banyak tenaga kerja keluarga sebagai tenaga utama. Hal tersebut menciptakan terjadinya involusi pertanian atau pengangguran tersembunyi, akses kredit serta teknologi yang rendah, pasar komoditi pertanian yang dikuasai oleh pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk lebih serius lagi dalam upaya penyelesaian masalah pertanian demi terwujudnya pembangunan pertanian yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi dan mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas dari semua pihak apabila menginginkan pertanian dapat menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini masalah yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga komoditas, kenaikan harga pupuk, dan persaingan tidak sehat, yang lebih disebabkan oleh kekeliruan kebijakan pemerintah, bukan hanya karena cara bertani. Kendatipun demikian petani harus berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya sebab kebutuhan pangan sangat mendesak untuk dipenuhi.

Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian petani masih mempertahankan sistem pertanian tradisional. Sistem pertanian tradisional yang dilakukan oleh penduduk di Kabupaten Muna Barat mulai dari pengolahan tanah, penyediaan bibit, cara menanam, penggunaan pupuk, sistem dengan tadah hujan, serta panen dua kali dalam setahun. Lahan tadah hujan umumnya



hanya dapat ditanami padi, jagung, dan kacang tanah sekali atau dua kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan.

Usaha pertanian di Kabupaten Muna Barat belum menunjukkan peningkatan produksi usaha pertanian yang signifikan dibandingkan dengan dukungan ketersediaan tenaga kerja dan lahan pertanian yang cukup tersedia. Data menunjukkan bahwa produksi tanaman padi tahun 2013 naik dari 7.817 ton tahun 2012 menjadi 12.764 ton tahun 2013 atau naik 63,29 persen. Peningkatan produksi padi terjadi pada produksi padi ladang, yaitu dari 1.971 ton tahun 2012 naik menjadi 7.208 ton tahun 2013. Produksi padi sawah menurun dari 5.846 ton tahun 2012 menjadi 5.556 ton pada tahun 2013 atau turun sebesar 4,96 persen. Produksi jagung tahun 2013 mencapai 37.275 ton turun dibanding tahun 2012 berjumlah 39.846 ton atau turun sebesar 6,45 persen (La Tarifu, 2016).

Turunnya produksi jagung tersebut disebabkan berkurangnya luas panen jagung dari 15.970 hektar tahun 2012 menjadi 14.785 hektar tahun 2013 atau turun sebesar 7,42 persen. Produksi kacang tanah tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012 yang diakibatkan oleh berkurangnya luas panen. Produksi ubi kayu pada tahun 2013 naik dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 27.460 ton tahun 2012 menjadi 30.353 ton tahun 2013 atau naik sebesar 10,54 persen. Luas panen tanaman kacang tanah tahun 2013 berjumlah 4.09 hektar turun dibanding tahun 2012 seluas 5.058 hektar atau turun sebesar 19,12 persen. Demikian pula produksi tanaman ubi jalar, kacang kedelai, dan kacang hijau pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab menurunnya produksi tanaman tersebut karena berkurangnya luas panen setiap tahunnya (Muna dalam Angka, 2014).

Data-data empirik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Muna Barat idealnya merupakan salah satu sentra pertanian karena dukungan sumber daya tenaga kerja memadai dan tingkat kesuburan tanahnya cukup baik untuk ditanami berbagai budi daya tanaman pangan namun kenyataannya para petani belum mampu menunjukkan hasil produksi pertanian yang optimal karena dalam sistem usaha tani masih bersifat tradisional.



Melihat kondisi empirik tentang potensi untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Muna Barat dengan hadirnya konsep otonomi, diharapkan dapat memberikan implikasi yang besar. Bertitik tolak dengan konsep otonomi daerah maka penulis berusaha untuk menjelaskan realitas dan pola pertanian yang terjadi pada masyarakat lokal sehingga nantinya dapat memberikan argumentasi kritis tentang signifikansi otonomi daerah terhadap keberdayaan dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Paper ini merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emik. Emik merupakan bentuk pendekatan penelitian yang kebanyakan digunakan dalam etnografi. Emik artinya eksplorasi atau eksplanasi realitas berdasarkan sudut pandang internal orang (*in group*) dari suatu etnis atau suku. Peneliti berasal etnis Muna untuk menjelaskan dinamika pertanian di otonomi daerah di Kabupaten Muna Barat. Teknik penelitian ini kualitatif ditempuh dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan informan dari kalangan petani dan kepala desa di Kabupaten Muna Barat. Secara implisit, pembahasan penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian besar, yaitu internal dan eksternal. Internal yang bersumber dari dalam diri petani dan eksternal berhubungan dengan permasalahan kebijakan pemerintah, dukungan kelembagaan, sumber daya penyuluh dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan dalam mencari solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah kadang diidentikan dengan konsep *local government* di negara-negara barat. Bhenyamin Hoessein (Nurcholis, 2007) menjelaskan bahwa *local government* dapat mengandung tiga arti. *Pertama*, berarti pemerintah lokal. *Kedua*, berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. *Ketiga*, berarti daerah otonom. *Local government* dalam arti yang



pertama, menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam arti istilah inilah *local government* sering dipertukarkan dengan *local authority*. Baik *local government* maupun *local authority* keduanya menunjuk kepada *council* dan *major* (dewan dan kepala daerah yang rekrutment pejabatnya melalui pemilihan. *Local government* dalam arti yang kedua, menunjuk pada fungsi kegiatannya. Dalam arti ini *local government* sama dengan pemerintahan daerah.

Dalam konteks Indonesia pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah lebih kepada bentuk pasif dan pemerintahan daerah dalam bentuk aktif. *Local government* dalam arti yang ketiga, menunjuk pada yaitu daerah otonom, dimana definisi yang diberikan *The United Nations of Public Administration* yaitu sub divisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Badan pemerintah ini secara keseluruhan dipilih atau ditunjuk secara lokal (UN, 1961). Dalam pengertian *local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government*, yaitu kewenangan untuk mengatur (*rules making = regelling*) dan mengurus (*rules application*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*) (Bhenyamin Hoessein, dalam Nurcholis, 2007).

Penyelenggaraan otonomi daerah di samping merupakan amanat konstitusi juga merupakan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Pola penyelenggaraan pemerintahan sentralistik di masa lalu sudah tidak sesuai lagi karena di samping tidak efisien, biayanya mahal juga tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang telah berubah baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak kepada hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan



pengendalian serta pelaksanaan terhadap hal teknis dan tidak strategis sudah harus diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, demokratis, dan mendorong peranserta masyarakat dalam mewujudkan pemerataan dan keadilan serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah harus mampu memberdayakan potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah (Darise, 2009).

Sistem otonomi daerah telah memberikan perubahan yang banyak dalam sistem pengelolaan daerah, dari sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Sistem desentralisasi ini memberikan kesempatan dan tanggungjawab yang besar bagi daerah untuk mengurus kepentingannya sendiri tanpa ada intervensi yang besar dari pemerintah pusat.

Fakta yang harus diakui terdapat beberapa perubahan nyata yang terjadi Kabupaten Muna Barat dengan adanya otonomi daerah, misalnya kondisi prasarana seperti jaringan jalan dan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Kondisi ini juga sudah jauh lebih baik kondisinya dibandingkan pada awal orde baru yang masih bersifat sentralistik. Demikian pula prasarana dan sarana telekomunikasi, tenaga listrik, serta sarana pendidikan dasar telah dapat menjangkau sebagian besar daerah. Kondisi dan momen otonomi ini pula dapat diperluas lagi jangkauannya sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan oleh konstitusi sehingga dapat melingkupi semua dimensi kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian harus menjadi salah satu prioritas negara karena bangsa ini akan terancam kekurangan pangan jika diabaikan. Kekuatan negara tidak hanya terletak pada persenjataan tetapi pula pada kemandirian dan berdaulat dalam pangan melalui pembangunan sektor pertanian yang lebih baik.



Bagian Wajah Petani dan Pertanian di Kabupaten Muna Barat

Tantangan petani dan pertanian setiap saat senantiasa mengalami pergeseran-pergeseran, baik karena faktor kultural, struktural, dan kelembagaan, sosial maupun alam. Tantangan-tantangan ini menerpa setiap petani tanpa kecuali. Setiap tantangan tersebut dari kalangan petani, ada yang mampu mengatasinya dan ada pula petani yang kalah atau tidak mampu mengatasi.

Meskipun perubahan-perubahan dengan adanya otonomi daerah telah tampak pada sebagian daerah namun haruslah diakui bahwa tingkat perubahan dan kemajuan yang dialami, tidak merata disemua daerah dan semua bidang pembangunan. Ada daerah-daerah yang sudah lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Yunus Jarmi (1994) mengidentifikasi adanya 3 kategori wilayah pertanian yang berbeda nyata tingkat kemajuannya. Perbedaan-perbedaan itu menyangkut prasarana fisik, produktifitas pertanian, serta tingkat kemajuan petaninya. Tiga kategori wilayah pertanian itu adalah: (1) Wilayah yang prasarananya relatif memadai (karena telah dibangun sejak jaman penjajahan), teknologi yang diterapkan sudah maju secara mantap, produktivitas tinggi, berorientasi pada pasar, dan (karenanya) para petaninya telah membutuhkan dan mencari secara aktif informasi-informasi pertanian. (2) Wilayah yang prasarananya baru dibangun tetapi belum memadai, mulai mengenal dan menerapkan teknologi maju tetapi belum mantap, produktivitas sedang, belum berorientasi ke pasar, dan belum aktif mencari informasi pertanian. (3) Wilayah yang relatif belum memiliki prasarana-prasarana pertanian, teknologi tradisional masih mendominasi, produktivitas rendah, petaninya masih tradisional dan pertaniannya masih bersifat subsisten, belum merasa memerlukan informasi pertanian (Slamet, 1995).

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yunus Jarmi di atas, terjadi beberapa hal nyata pada fakta pertanian dan petani di Kabupaten Muna Barat, baik sebelum maupun setelah dimekarkan dari Kabupaten Muna sebagai kabupaten induk¹⁰. Fakta-fakta tersebut, yaitu wilayah yang prasarananya tetapi

¹⁰ Bapak FD menyatakan ...penyuluh di Kecamatan Wadaga, Kecamatan Barangka, kantornya saja tidak ada, belum kita melihat yang lainnya, jangan dulu kita sebut teknologi dimana kami masyarakat tidak punya,



belum memadai; mulai mengenal dan menerapkan teknologi maju tetapi belum mantap, produktivitas sedang, belum berorientasi ke pasar, dan belum aktif mencari informasi pertanian; wilayah yang relatif belum memiliki prasarana-prasarana pertanian, teknologi tradisional masih mendominasi, produktivitas rendah; petaninya masih tradisional dan pertaniannya masih bersifat subsisten, belum merasa memerlukan informasi pertanian. Selain hal tersebut, realitas petani dan pertanian di Kabupaten Muna Barat, fakta yang terjadi adalah sumber informasi dan pengetahuan petani yang terbatas; eksistensi penyuluh dan penyuluhan yang belum jelas; lilitan mitos dalam hati masyarakat dalam berusaha tani; akses terhadap pasar yang terbatas; kesewenang-wenangan pedagang pengumpul dalam menentukan harga jual hasil pertanian; dan intervensi pemerintah dalam kebijakan harga hasil pertanian yang belum ada.

Redupnya Eksistensi Penyuluh dan Penyuluhan

Eksistensi penyuluh dan penyuluhan di Kabupaten Muna Barat tepat jika dikatakan “adanya sama seperti tidaknya”. Namanya hanya ada dalam kamus kosakata, tetapi wujud aktivitas nyatanya belum tampak bagi masyarakat, terutama di Kecamatan Barangka, Kecamatan Lawa dan Kecamatan Wadaga. Kondisi ini menambah terbelakangnya kisah hidup petani dan pertanian masyarakat lokal di Kabupaten Muna Barat.

Jujur harus dikatakan bahwa titian dan sumber pengetahuan petani lokal dapat dikatalisasi melalui peran penyuluh dan penyuluhan. Akan tetapi kehadiran penyuluh dan penyuluhan dapat diciptakan dan diintensifkan di lingkungan petani lokal di Kabupaten Muna Barat. Penyuluhan pada hakekatnya merupakan wadah pendidikan non formal bagi penerusan ilmu pengetahuan pada kelompok masyarakat tertentu. Timbulnya perubahan dalam kebiasaan dan cara berusahatani karena adanya penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian melalui kegiatan penyuluhan. Petani akan sukar menerima

semua bertaninya tradisional. Yang kami bisa lakukan sendiri cuma menggunakan obat untuk mematikan rumput liar, itupun kami melihat petani-petani pendatang dari transmigrasi...

...kami bertani hanya untuk makan dan dijual juga tapi harganya rendah, karena pedagang-pedagang di pasar seenaknya saja menentukan harga, misalnya jagung sekilo 25 ribu rupiah, kacang mete 20 ribu per kilo gram, kacang tanah kurang lebih 15 ribu rupiah per kilo gram. Kami susah sebagai petani pemerintah juga tidak tahu gimana mereka ke kami petani....(Kutipan wawancara, 2 September 2016).



hal-hal baru yang sekiranya hal-hal tersebut tidak dimengerti oleh petani tanpa intervensi *expert* dan pihak luar.

Pengakuan dan pengalaman petani dalam mengikuti penyuluhan di Kabupaten Muna Barat, dimana petani diundang di kantor desa, kemudian diberikan materi penyuluhan, antara lain bagaimana cara mengolah tanah, pemupukan, penggunaan pestisida, dan sebagainya¹¹. Penyuluhan yang ada di Kabupaten Muna Barat terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban penyuluh karena hanya kadang dilakukan sekali dalam setahun dengan durasi waktu penyuluhan yang lama dengan materi yang banyak yang meliputi semua jenis pertanian yang dimiliki petani. Penyuluhan dilakukan secara formal, dimana masyarakat diundang ke balai pertemuan desa.

Kearifan Lokal : Manfaat atau Petaka?

Salah satu kekhasan negara Indonesia adalahnya terdiferensiasinya masyarakat dalam ribuan suku bangsa dengan nilai-nilai budayanya masing-masing. Keragaman budaya disatu sisi merupakan kekayaan bangsa yang menyimpan manfaat¹² yang besar, akan tetapi di sisi lain menjadi energi potensial yang mengundang petaka¹³. Kearifan lokal dikatakan manfaat jika dapat mendukung kehidupan masyarakat secara positif, dan menjadi petaka makala kearifatan

Moendardjito (Ayatrohaedi, 1986) mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Pada kesempatan lain, kearifan lokal juga dikatakan sebagai pengetahuan lokal. Gobyah (2003) mengatakan bahwa pengetahuan lokal adalah kebenaran yang tetap atau ditegakkan di suatu daerah. Dijelaskan

¹¹ Bapak IM sebagai petani kadang bingung juga dengan penyuluhan yang diikuti, materinya banyak sekali, dilakukan dalam sehari, kami sebagai orang-orang tua jelas lupa juga...setahu saya begitu penyuluhan di sini, dilakukan setahun sekali untuk semua jenis pertanian masyarakat.

....kami begini-begini saja tanpa ada yang bisa dilakukan. Bagi saya seharusnya petani itu datang ke kebun-kebun petani, mencontohkan. Di kecamatan barangka setahun saya ada penyuluh, tapi hanya lewat-lewat saja... Kalau mau bertanya tentang cara berkebun harus ke rumahnya saja, saya juga tidak pergi (Kutipan wawancara, 2 September 2016).

¹² Memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, misalnya membantu terpelihara dan terjaganya lingkungan.

¹³ Memiliki implikasi jelek terhadap pola hidup masyarakat, misalnya penentuan musim tanam petani berdasarkan hari baik. Hal ini sangat membatasi masyarakat dalam berusaha.



oleh Sartini (2004) bahwa pengetahuan lokal adalah segala bentuk ekspresi dimana orang melakukan kegiatan dan perilaku disesuaikan dengan ide-ide mereka, dan tindakan mereka menghasilkan karya seperti pembuatan artefak sesuai dengan pola pikir mereka. Oleh karena itu, kearifan lokal tidaklah sama antara suatu suku dengan suku yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda dan bahkan keyakinan (Anonim, 2016).

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Dalam masyarakat tradisional, kearifan-kearifan lokal dapat dijumpai dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti perilaku berusaha tani pangan.

Dengan tidak menafikan manfaat¹⁴ kearifan lokal bagi masyarakat lokal di Kabupaten Muna Barat, akan tetapi memiliki eksese negatif yang malah menjadi petaka¹⁵ bagi praktek berusaha tani dari masyarakat lokal. Kearifan lokal masyarakat Kabupaten Muna yang memiliki manfaat, yaitu:

1. Konsep Hidup “*Pokadulu Pokaowa*” dan “*Kaseise*”

Pokadulu pokaowa merupakan salah satu filosofi hidup yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat tradisional suku Muna. *Pokadulu pokaowa* identik

¹⁴ Bapak AD menyatakan....saya secara pribadi sebagai petani sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang tua dulu. Tapi kebanyakan masyarakat tani di Kabupaten Muna Barat yang tradisional masih memegang kuat. Kalau dibidang manfaat, sebenarnya juga ada, misalnya masyarakat lokal percaya dengan *falia* (pantang/larangan). Dahulu orang-orang Muna dilarang untuk mendekati *bhake* (pohon-pohon besar atau beringin). Ini dikatakan *falia* mendekati pohon-pohon besar, maka hutan terpelihara dan pencurian hutan (*illegal logging*) hampir tidak ada, padahal polisi kehutanan belum ada. (Kutipan wawancara, 2 September 2016).

¹⁵ Bapak IM mengatakan bahwa ...iya ada juga keyakinan yang kurang bagus dalam masyarakat lokal di sini, misalnya *falia* atau tidak boleh untuk menanam atau memanen jagung, padi, ubi kayu, kacang tanah pada sembarang waktu. Menanam dan memanen bahkan untuk makan pertama kali dari hasil pertanian harus melalui ritual dari tokoh adat yang disebut *parika*. *Parika* adalah tokoh adat yang dipercaya memiliki ilmu untuk mengawali penanaman dan pemanenan, setelah baru bisa dilanjutkan oleh pemiliknya.

...dalam satu bulan itu hanya ada beberapa waktu yang bisa digunakan untuk menanam. Sebenarnya tidak hanya menanam dan memanen hasil pertanian yang banyak *falia*-nya, tetapi sejak membuka lahan atau mulai mengolah lahan...

...orang lokal berbeda dengan masyarakat pendatang seperti Jawa, Bugis, dan Bali, mereka lebih maju pertaniannya karena mereka sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan, seperti di Kecamatan Tiworo dan sekitarnya (Kutipan wawancara, 2 September 2016).



dengan makna gotong royong dalam kebiasaan budaya Jawa. Kebiasaan *pokadulu pokaowa* banyak mewarnai mekanisme hidup masyarakat Suku Muna.

Kaseise memiliki arti kebersamaan. *Kaseise* merupakan visualisasi dari sikap simpati dan empati sosial suku Muna terhadap sesama, khususnya dalam suasana “duka”, walaupun *kaseise* juga bisa diterapkan dalam suasana “suka”. *Pokadulu pokaowa* dan *kaseise*, dua filosofi dan nilai hidup yang masih melekat dalam hati-hati masyarakat Muna. *Pokadulu pokaowa* dan *kaseise* sebagai kearifan lokal masyarakat Muna yang memiliki manfaat besar yang masih diakui sampai saat ini. Dalam kegiatan pertanian *pokadulu pokaowadan kaseise* terlihat mulai pembukaan lahan pertanian, pengolahan, penanaman, dan pasca panen. Implementasi *pokadulu pokaowa* dan *kaseise*, di dalam berusahatani saat ini sudah mulai redup, petani lebih memilih memberi upah kepada buruh tani dibandingkan dengan menerapkan *pokadulu pokaowa* dan *kaseise*¹⁶. Hal ini dapat terlihat pada saat pengolahan lahan dan pengangkutan hasil panen.

2. Adanya Keyakinan “*Falia*”

Kata “*falia*” identik maknanya pantangan atau larangan. *Falia* dalam suku Muna memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positif *falia* dalam kehidupan masyarakat Muna dapat dilihat ketika para tokoh-tokoh adat (*opinion leader*) melarang pada suatu perkara, maka tanpa bertanya terhadap hakikat *falia* tersebut, masyarakat langsung mempercayainya¹⁷. Misalnya dahulu masyarakat Muna mendekati pohon-pohon besar karena sebagai tempat tinggal jin atau makhluk halus sehingga kalau mendekatinya dikhawatirkan bisa terkena penyakit dan bisa mematikan. Implikasi *falia* mendekati pohon-pohon besar, akhirnya lingkungan hutan menjadi terpelihara. Artinya *falia* memiliki kandungan makna pesan konservasi terhadap hutan.

¹⁶ Bapak IM menyatakan bahwa: ... *pokadulu pokaowa*” dan “*kaseise*, hal yang menjadi kebiasaan orang Muna. Khususnya *pokadulu pokaowa* sudah mulai redup, terutama pada saat pengolahan lahan dan pengangkutan hasil pertanian, kalau menanam dan memanen masih dilakukan...

¹⁷ Bapak AD menyatakan bahwa: ...*falia* itu kami percayai sebagai kebiasaan nenek moyang kami turun temurun kami yakini itu benar. Misalnya tidak boleh mendekati pohon-pohon besar takut kena penyakit, melihat bintang di langit untuk menentukan hari baik mulai menanam (jagung, padi ladang, ubi kayu), demikian untuk panen. Kemudian, memberi sesajen kepada pemilik alam sebelum dimakan oleh keluarga. Kalau dilanggar bisa berisiko kebun tidak berhasil, dimakan babi hutan, tanaman berulat, bahkan menimbulkan kematian bagi petani.



Dalam pertanian *falia* menurut pandangan penulis dapat dikatakan sebagai penghambat mekanisme pertanian suku Muna. Misalnya ketika petani akan membuka lahan atau memulai pengolahan ladang, menanam, dan memanen harus mencari hari-hari yang baik. Hari-hari baik tersebut ditentukan oleh para tokoh-tokoh adat yang dianggap memiliki kemampuan magis. *Falia* ini dapat menjadi petaka pertanian karena tidak sembarang waktu untuk menanam, dan memanen hasil pertanian masyarakat. Implikasi dari *falia* ini, maka masyarakat tradisional suku Muna hanya bisa memanfaatkan ladangnya dengan dua kali tanam dalam setahun. Perilaku pertanian seperti ini menjadikan petani lokal lebih tertinggal dari petani pendatang atau transmigrasi dari suku Jawa, Bugis dan Bali yang berada di Kecamatan Tiworo.

Solusi dan Polusi sebagai Petani dan Pertanian

Pembahasan tentang petani dan pertanian, tidak hanya berkisar pada solusi tetapi juga di sana juga terdapat polusi. Solusi berbicara tentang cara mengatasi problem pertanian sedangkan polusi merupakan eksekusi negatif dari solusi maupun kognisi sosial masyarakat terhadap petani dan pertanian. Adapun stagnasi perkembangan pertanian di Kabupaten Muna Barat, tidak bisa ditimpahkan kepada masyarakat sebagai penyebabnya, akan tetapi harus dilihat dari 2 sisi, baik dari petani maupun pemerintah secara struktural sebagai pemegang kebijakan.

a. Dari Pihak Pemerintah

Pertanian sebagai salah satu hajat hidup orang banyak, mau tidak mau membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Jatuh bangunnya pertanian tidak lepas dari seberapa peduli pemerintah dalam memikirkan petani. Pada suatu negara yang memiliki basis pertanian kuat, seperti yang terjadi di Thailand (Safei, 2016) pemerintahnya memiliki peran besar dalam membangun daya saing pertanian, diantaranya memberikan subsidi dalam bentuk bibit dan berbagai proteksi dengan harga pembelian lebih tinggi saat harga jatuh. Dalam konteks



Kabupaten Muna Barat, yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka perbaikan pertanian, antara lain:

1. Kemauan yang baik pemerintah (*good will*). Pemerintah sebagai pengambil kebijakan yang harus berpihak pada petani¹⁸. Khususnya di Kabupaten Muna Barat, masyarakat mempunyai motivasi yang baik untuk bertani, tetapi karena pasar tidak diciptakan maka produksi pertanian juga menurun¹⁹.
2. Menyediakan tenaga ahli yang siap mendampingi petani dari awal proses hingga pasca panen. Khususnya di Kabupaten Muna Barat petani lokal tidak berdaya karena pengetahuan sangat rendah dan intervensi *expert* terbatas dan bahkan tidak ada.
3. Perlu adanya dukungan dunia perbankan. Bank kurang bersahabat²⁰ untuk menjadi mitra petani dengan mendanai setiap proses produksi sampai pasca produksi sehingga menjadikan petani semakin tak berdaya.
4. Penambahan jumlah penyuluh. Jumlah penyuluh belum representatif dengan luas wilayah kerja dan jumlah petani yang ditangani. Sebagaimana di Kecamatan Barangka, hanya terdapat 1 orang penyuluh PNS dan 1 orang penyuluh non PNS (bukan latar pendidikan pertanian)²¹.
5. Memperbaiki mekanisme kerja penyuluhan. Perlu adanya pengembangan kapasitas kepada aktor-aktor penyuluhan di daerah sehingga memiliki

¹⁸ Bapak HF menyatakan...dalam setiap pertemuan di tingkat kabupaten, masyarakat petani kesusahan untuk memasarkan hasil taninya. Pedagang pengumpul yang berkuasa menentukan harga, petani di Kabupaten Muna Barat, akan tetap seperti ini jika pemerintah tidak memperhatikannya melalui kebijakan harga dan menyediakan pasar...

....penyuluh di Kabupaten Muna yang saya liat kurang memiliki kemampuan, sehingga apa yang mau disampaikan ke petani, hanya tamatan SMA. Saya lebih layak jadi penyuluh karena saya lebih berpengalaman berkebun...

¹⁹ Bapak HF menyatakan: ...seperti kemaren kami diberi bantuan bibit jagung kuning dari pemerintah daerah, setelah kami tanam hasilnya sangat banyak sekali, tapi apa harganya rendah, akhirnya kami malas untuk menanamnya lagi...(Kutipan wawancara, 2 September 2016).

²⁰ Petani menginginkan skim kredit yang sederhana prosedurnya dan cepat realisasinya, sedangkan perbankan sangat mengutamakan kehati-hatian; umumnya petani terkendala dari sisi yang sifatnya prosedural. Ini merupakan masalah klasik, karena setiap kredit harus ada agunan (Subejo, 2014).

²¹ Bapak IM menyatakan: di Desa Bungkolo memang ada penyuluh, tapi pendidikannya hanya SMA, bukan sarjana pertanian, mau ngomong kalau hanya SMA, susahlah untuk maju kita punya pertanian...(Kutipan wawancara, 2 September 2016).



kemampuan untuk memfasilitasi petani dalam mengakses pengetahuan serta proses belajar.

6. Intervensi pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang dapat mendukung petani. Misalnya penyediaan pasar untuk hasil pertanian, kebijakan standarisasi harga hasil pertanian, dan sebagainya. Di Kabupaten Muna Barat atau sebelumnya masih menyatu dengan Kabupaten Muna sebagai kabupaten induk, petani belum mendapatkan seperti yang diinginkan²², sehingga petani meningkat ekonomi dan kesejahteraannya.
7. Menciptakan dan meningkatkan kapasitas organisasi petani, seperti kelompok tani, koperasi pertanian dan bank desa, sebagai bagian dari usaha-usaha untuk meraih pembangunan desa, sebagaimana tahun 1971. Pertumbuhan organisasi²³ desa dianggap sangat penting untuk pelaksanaan program intensifikasi padi pemerintah.

Di atas telah dijelaskan tentang solusi untuk perbaikan kondisi pertanian. Tetapi bersamaan dengan muncul polusi-polusi pertanian sehingga masyarakat malas untuk bertani. Adapun polusi pertanian yang ada di Kabupaten Muna Barat, antara lain:

1. Kebijakan raskin (beras miskin) untuk petani yang dahulunya makan pokoknya jagung. Pembagian raskin di desa-desa di Kabupaten Muna dan Muna Barat masih berlangsung sampai saat ini dan sudah menggeser pangan lokal yang dimiliki masyarakat. Hal yang paling menyedihkan adalah pangan lokal diidentikan dengan pangan untuk orang-orang miskin dan sudah menjadi makanan eksklusif. Di Kabupaten Muna Barat memiliki beberapa jenis pangan, yaitu: jagung, ubi kayu/singkong, ubi jalar, gembili, talas, gadung (ubi hutan). Sedangkan makanan dari olahan beras dahulu hanya dikonsumsi pada saat hari raya idul fitri/idul adha, dan pesta-pesta besar saja.

²² Bapak FD menyatakan bawah ...lihat saja harga jual hasil panen petani, ditentukan oleh pembeli, pemerintah tidak memperhatikannya, pembeli dengan seenaknya saja... (Kutipan wawancara, 2 September 2016).

²³ Di antara organisasi desa ini, Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) diberi peran krusial dalam proses pembangunan desa, khususnya untuk mendukung usaha-usaha yang lebih terkoordinir dalam menyediakan input-input pertanian (Winarno, 2008).



2. Mengedepankan impor. Kebijakan yang berorientasi jangka pendek dan solusi instan atas permasalahan pangan terbukti belum maksimal dalam membuat perbaikan dunia pertanian sebagaimana di Kabupaten Muna Barat. Terlebih setelah proteksi atas pertanian harus dicabut secara bertahap melalui MoU negara ini dengan kapitalisme global semakin memperparah keadaan pangan. Impor sebagai solusi instan semakin menurunkan daya saing pertanian bangsa ini di kancah global dan melemahkan posisi petani kita.

b. Dari pihak petani

Nasib pertanian di masa depan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Hal yang tidaknya dahsyatnya adalah tantangan pertanian. Stagnasi pertanian di Kabupaten Muna Barat, sebagai penulis saya menitikberatkan pada hal pokok, berikut:

1. Stigma Masyarakat Terhadap Petani dan Pertanian

Berdasarkan teori-teori yang ada, argumentasi kebenaran pertanian terpadu sebagai penyedia pangan yang paling efektif dan efisien sudah tidak diragukan lagi. Siklus dan keseimbangan nutrisi serta energi yang akan membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan akan terjadi dalam sistem pertanian terpadu. Dengan demikian secara deduktif pertanian terpadu akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi produksi yang berupa peningkatan hasil produksi dan penurunan biaya produksi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah semudah itu? Jawabannya belum tentu tidak. Peningkatan produksi pertanian akan menjadi kenyataan jika pemerintah dan elemen yang terkait mampu mengurai permasalahan yang terjadi dalam dunia pertanian itu sendiri.

Hal lain yang faktor penghambat pembangunan pertanian terkait kognisi sosial masyarakat terutama di Kabupaten Muna Barat dalam memberikan pemaknaan terhadap petani dan pertanian. Pertanian sering diasosiasikan sebagai pekerjaan yang kasar. Pertanian distigmakan sebagai pekerjaan yang hanya layak untuk mereka yang tidak berpendidikan. Stigma ini membuat generasi muda berusaha menjaga jarak dari pertanian.



Gambaran susahny mencapai kesejahteraan, para petani berkeinginan agar anak-anak mereka harus sekolah tinggi untuk mendapatkan kerja yang terhormat dengan bekerja di kantor dan di perkotaan. Orang tua yang bermata pencaharian sebagai petani merasa gengsi²⁴ jika melihat anaknya hanya berprofesi sebagai petani. Kondisi ini, sangat kontras dengan pelaku pertanian di luar negeri yang mayoritas berpendidikan tinggi dan makin banyak sarjana yang mau terjun di sektor pertanian/agrobisnis (Subejo, 2014).

2. Rendahnya suplai tenaga kerja angkatan muda di sektor pertanian

Tenaga kerja di sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2005 tenaga kerja di sektor pertanian 44,03%, tahun 2006 meningkat 44,46%, tahun 2009 menurun 41,18% hingga tahun 2013 semakin menurun 35,05%. Hal tersebut diakibatkan beberapa hal, di antaranya, yaitu pola pikir masyarakat bahwa sektor pertanian dianggap tidak lagi menjadi sektor yang menjanjikan bagi kesejahteraan petani. Selain itu, pemuda desa lebih tertarik merantau ke kota dibandingkan dengan mengelola pertanian di desanya sehingga tidak heran jika tenaga kerja sektor pertanian kini didominasi oleh kalangan tua (45 tahun sampai lebih 60 tahun) (Subejo, 2014). Kondisi yang dikemukakan Subejo di atas nyata terjadi pada tenaga kerja pertanian di Kabupaten Muna Barat, sehingga hal tersebut menjadi sebab menurunnya anggota masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi petani.

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian di Kabupaten Muna rata-rata sudah berusia tua²⁵. Mayoritas petani saat ini adalah orang yang sudah berada pada usia tidak produktif lagi. Petani di Indonesia kini rata-rata sudah tua, yaitu berkisar 45 tahun hingga di atas 60 tahun (45,54%). Bahkan, realitas di lapangan yang memprihatinkan adalah petani menjadi pelaku pertanian paling banyak berada pada rentang usia 60 tahun ke atas 13,99% (Subejo, 2014).

²⁴ Bapak LH menyatakan..."cukuplah kami yang tidak punya sekolah, kalian sekolah yang tinggi-tinggi kalau perlu sampai S3. Saya juga bangga kalau saya liat anak saya berhasil. Bertani itu berat, hasilnya tidak seberapa..." (Kutipan wawancara, 3 September 2016).

²⁵ Bapak LI menyatakan : ...di sini petaninya sudah tua-tua, anak-anak muda mereka malu jadi petani, kemudian anak-anak kami lebih baik sekolah saja karena bertani itu ya...kerjaan yang rendah hanya untuk orang-orang yang tidak sekolah...(Wawancara, 2 September 2016).



PENUTUP

Pembangunan pertanian di Kabupaten Muna Barat masih mengalami stagnasi, hal ini ditengarai beberapa sebab:

1. Aktivitas kegiatan penyuluhan masih sangat rendah, selain karena profesionalisme yang rendah, jumlah penyuluh juga terbatas dibandingkan dengan banyaknya masyarakat petani.
2. Tidak adanya organisasi dan lembaga yang membantu usaha pertanian di Kabupaten Muna, misalnya koperasi unit desa, dan bank desa.
3. Kentalnya stigma di kalangan masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Muna Barat bahwa profesi petani merupakan pekerjaan yang rendah, sehingga para petani berlomba untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi, dan bahkan di kalangan petani di Kabupaten Muna, sarjana dianggap sebagai indikator prestasi dan prestise keluarga. Hal ini berdampak kepada menurunnya suplai tenaga kerja sektor pertanian terutama dari golongan generasi muda.
4. Masyarakatnya masih menggunakan cara-cara pertanian yang tradisional yang masih sarat dengan *falia*.
5. Redupnya konsep hidup *pokadulupokaowa* dan *kaseise* di kalangan petani, karena petani lebih memilih memberikan upah terutama pada saat pengolahan lahan dan pengangkutan hasil panen. Sedangkan pada saat penanaman dan pemanenan masih menggunakan konsep *pokadulu pokaowa* dan *kaseise*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2002). *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- La Tarifu. (2016). *Pola dan Model Komunikasi Penyampaian Pesan Usahatani di Kabupaten Muna Barat*. Disertasi, Kendari: Universitas Halu Oleo.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, Surakarta: Sebelas Maret University.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ray, G.L. (1998). *Manajemen dan Komunikasi Penyuluhan*, (Materi Kuliah), Yogyakarta.



- Rogers, E. M. (1986). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru* (Terjemahan Abdillah Hanafi), Surabaya: Usaha Nasional.
- Safei, A. (2016). *Siapa Mau Jadi Petani?*. Jakarta: PT. Grasindo
- Samsudin, U. (1976). *Dasar-Dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Slamet, M. (1995). *Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian* (Makalah ini disusun untuk Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II, yang diselenggarakan oleh PSE, Pustaka dan CIIFAD; 4 - 5 Juli 1995 di Ciawi, Bogor), Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Subejo. (2014). *5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suprpto, T., dan Fahrianoor. (2004). *Komunikasi Penyuluhan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Widodo, S. Dan P. Nawangsari. (2016). *Dinamika Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty.
- Winarno, B. (2008). *Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.



RURAL SOCIETY DEVELOPMENT STRATEGY CONFRONT GLOBAL COMPETITION IN THE ERA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Ben Ibratama

benibratama10@gmail.com

ABSTRAK

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 lalu menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (*developing country*) yang pada dasarnya masih memiliki pekerjaan rumah untuk mempersiapkan sumber daya manusianya agar mampu bersaing secara global, khususnya dalam regional ASEAN. Kondisi seperti ini tentu bisa menjadi peluang, tantangan, sekaligus ancaman untuk negara yang tidak siap dalam melawan gelombang globalisasi ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan masyarakat pedesaan untuk menghadapi persaingan global di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tulisan ilmiah ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti, buku, jurnal ilmiah, dan internet. Untuk menghadapi persaingan global ada beberapa strategi pembangunan masyarakat pedesaan yang menjadi prioritas di antaranya adalah melakukan penyuluhan dan pelatihan di bidang kewirausahaan secara sustainable atau berkelanjutan, meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui inkubasi kewirausahaan, dan menciptakan produk kewirausahaan yang kompetitif.

Kata kunci : Strategi pembangunan, MEA, persaingan global, *developing country*.

PENDAHULUAN

James Petras dan Henry Veltmeyer mengatakan globalisasi dapat dimaknai sebagai proses liberalisasi pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia (Paulus, 2014). Merujuk pada pengertian di atas seluruh kepala negara yang tergabung dalam satu kumpulan yang bernama ASEAN menyepakati dan memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan salah kesepakatan yang dihasilkan dengan cita-cita untuk memberikan banyak dampak positif bagi negara. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia dan selanjutnya dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang



berlangsung di Bali Oktober 2003, para petinggi ASEAN mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015 (nationalgeographic.co.id).

Dengan disepakatinya lalu bergulirnya era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 lalu, artinya Indonesia membuka diri untuk bersaing dengan para negara tetangga dari berbagai bidang dalam sebuah wadah yang bernama persaingan global di wilayah regional ASEAN. Kondisi seperti ini tentu bisa menjadi sebuah, peluang, tantangan, sekaligus ancaman untuk negara jika tidak siap dalam melawan gelombang globalisasi ini. Tidak ada lagi sekat yang membatasi arus impor dan ekspor, produk dari berbagai negara menjadi hal yang lumrah dan tak bisa dihindarkan.

Pada kenyataannya sebagai negara berkembang (*developing country*) Indonesia pasti membutuhkan negara lain khususnya kebutuhan terhadap berbagai produk mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan industri dalam skala yang lebih besar. Dengan kondisi seperti ini tentu akan menciptakan persaingan yang luar biasa khususnya gempuran produk dari luar yang berpotensi mengancam produk dalam negeri. Ketika pada kenyataannya produk dari luar memang memiliki kualitas yang baik, atau harga yang relatif lebih murah, atau harga murah dan memiliki kualitas yang cukup baik dibandingkan produk kita dalam negeri dengan karakteristik sebaliknya.

Dengan kondisi seperti ini persaingan global antar negara ASEAN menjadi arena kompetensi resmi yang menghadirkan banyak kompetitor dari segala sektor yang sudah pasti dapat memberikan dampak atau resiko serta tantangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Tantangan untuk bertahan dalam persaingan, serta keinginan untuk memenangkan persaingan, serta mendapatkan *income* atau *benefit* yang lebih besar menjadi prioritas bagi pemerintah, masyarakat, dan individu dalam lingkup terkecil. Dalam era globalisasi sekarang ini masyarakat pedesaan merupakan subjek bukan lagi objek, yang sejatinya harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama tetapi pemerintah juga harus hadir untuk memberikan dukungan modal, *knowledge*, pelatihan, informasi, teknologi, serta kebijakan yang menguntungkan masyarakat pedesaan.



Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan global lintas negara ASEAN ini adalah pilihan bijak yang telah diambil oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal dan konsekuensi yang akan diterima meskipun memiliki potensi resiko tidak berdayanya masyarakat pedesaan dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan pemerintah dengan membuka diri untuk mengikuti persaingan global regional ASEAN tidak bisa sepenuhnya dapat disalahkan meskipun pada kenyataannya dapat memberikan dampak negatif kepada para pelaku ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat pedesaan. Sejatinnya pemerintah sebagai penyelenggara negara tentu memiliki otoritas serta kebijakan untuk merumuskan strategi dalam meminimalisir sebuah resiko, menghadapi persaingan, bahkan memenangkan kompetisi khususnya di wilayah regional ASEAN.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan memberdayakan masyarakat sebagai *human capital* dalam sebuah negara, khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Menurut Sutoro Eko pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen baik pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya karena mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain (dalam Cholisin, 2011). Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan masyarakat pedesaan untuk menghadapi persaingan global di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

METODE PENELITIAN

Tulisan ilmiah ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kajian literatur atau studi pustaka. Pendekatan teori/konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan internet. Semua uraian dan gagasan yang ada digabungkan dan menjadi sebuah kerangka pemikiran baru.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan untuk menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sebenarnya sudah mulai terlihat dengan program *nawacita* pemerintah yang mulai melakukan pembangunan dari pedesaan dan memberikan bantuan dana desa sebesar 1,4 M setiap desa tetapi untuk mendapatkan hasil maksimal harus didukung dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk selalu mandiri, inovatif, kreatif, dan berdaya saing. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi penyuluhan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, meningkatkan kapasitas usaha mikro melalui inkubasi kewirausahaan di pedesaan, serta menciptakan produk kewirausahaan yang kompetitif agar memiliki daya saing. Ketiga metode di atas merupakan alternatif yang dapat digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat desa dalam menghadapi gelombang MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), memenuhi janji-janji politik pemerintah, dan mewujudkan UU no 6 tahun 2014 tentang desa dalam mewujudkan kemandirian Desa.

1. Penyuluhan dan Pelatihan di bidang Kewirausahaan secara *sustainable*

Menurut Jhingan pengusaha mempunyai kriteria kualitas sebagai berikut (1) energik, banyak akal, siap siaga terhadap peluang baru, mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah dan mau menanggung resiko dalam perubahan dan perkembangan (2) memperkenalkan perubahan teknologi dan memperbaiki kualitas produknya (3) mengembangkan skala operasi dan melakukan persekutuan, mengejar dan menginvestasikan kembali labanya (Jhingan, 2010: 426). Berdasarkan pemaparan di atas ada tiga komponen utama yang harus dimiliki individu sebagai pengusaha atau pelaku kewirausahaan. Hal ini tentu sangat minim dimiliki khususnya masyarakat pedesaan. Mayoritas masyarakat pedesaan pada umumnya melakukan aktivitas perdagangan atau usaha hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Sebenarnya potensi ini bisa ditingkatkan agar setiap usaha masyarakat pedesaan memiliki pola untuk berkembang tetapi yang sering menjadi kendala pada umumnya adalah minimnya penyuluhan, edukasi, *transfer knowledge*, dan pelatihan mengenai kewirausahaan.



Usaha yang dijalankan oleh masyarakat pedesaan cenderung stagnan dan tidak memiliki perkembangan walaupun memiliki potensi untuk berkembang. Penyuluhan dan pelatihan secara *sustainable* merupakan salah satu *tools* yang dapat mengakselerasi potensi masyarakat untuk berkembang dan menambah *capacity building* agar terciptanya masyarakat yang mandiri dan kompetitif. Secara umum *capacity building* adalah suatu proses atau kegiatan memperbaiki kemampuan seseorang, kelompok, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan atau kinerja yang lebih baik (dalam Sudaryanto, 2014). Penyuluhan dan pelatihan sangat berkaitan erat dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Dengan demikian strategi komunikasi, baik secara makro atau mikro mempunyai fungsi ganda seperti menyebarluaskan pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada target sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal (Effendy, 2000: 300).

Strategi komunikasi merupakan sebuah katalisator bagi penyuluh profesional karena merupakan kunci yang bisa membuka potensi masyarakat pedesaan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dimiliki ke arah yang lebih baik sehingga mendatangkan *income* dan *benefit* yang lebih tinggi. Secara tidak langsung akselerasi ini tentu dapat berkontribusi pada pendapatan per kapita masyarakat khususnya bagi masyarakat di pedesaan, serta diharapkan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tantangannya adalah bagaimana seluruh *stakeholder* seperti pemerintah, LSM, pihak swasta, perguruan tinggi, serta instansi terkait bersinergi sehingga mampu menyediakan tenaga profesional dalam bidang penyuluhan di bidang kewirausahaan. Pemerintah memiliki otoritas dalam membuat regulasi dan kebijakan serta memiliki sumber daya secara finansial, atau sumber daya manusia sebagai tenaga penyuluh, pihak swasta tentu dapat menyediakan modal fiskal khususnya melalui dana *Corporate Social Responsibility* yang sudah dianggarkan oleh setiap manajemen perusahaan swasta, dan seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat secara luas, LSM dan perguruan



tinggi memiliki sumber daya manusia yang mumpuni yang bisa menjadi generator atau penggerak dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan.

2. Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Desa Melalui Inkubasi Kewirausahaan

Menurut Stephen Robinson strategi adalah merupakan penentuan suatu tujuan dan sasaran usaha jangka panjang yang diadopsi upaya pelaksanaannya, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Cutlip dkk, 2006:353). Pengembangan usaha mikro melalui inkubasi kewirausahaan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan merupakan sebuah strategi dalam memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan, seperti melalui penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran. Konsep inkubasi kewirausahaan adalah pedesaan harus dijadikan lumbung usaha strategis, dengan kapasitas SDM yang memadai mulai dari pengetahuan dan *skill* dalam berwirausaha khususnya usaha pada level mikro. Berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000 dan hasil penjualan tahunan mencapai Rp.300.000.000 (kemenkeu.go.id).

Contoh usaha mikro yang ada di Indonesia seperti petani dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, pedagang kaki lima, penjahit, perbengkelan, tukang ojek, tukang sayur, dan lain-lain. Beberapa alasan logis kenapa perlu dikembangkannya usaha mikro khususnya bagi masyarakat pedesaan adalah 1) usaha mikro di Indonesia dominan berada pada daerah pedesaan, 2) perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi dan tahan terhadap situasi krisis (kemenkeu.go.id). Artinya dengan pengembangan yang dilakukan terhadap usaha mikro, secara tidak langsung tentu akan berimplikasi pada perekonomian masyarakat di pedesaan.

Selain itu usaha mikro mampu bertahan dalam krisis, dan ini merupakan salah satu modal untuk bersaing dalam menghadapi persaingan global seperti era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kendala dalam pengembangan usaha mikro adalah sumber daya manusia-nya yang belum memiliki jiwa kewirausahaan mumpuni dan rendahnya taraf pendidikan masih mendominasi



pelaku usaha mikro, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini tentu berpotensi menghambat peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

3. Menciptakan Produk Kewirausahaan yang Kompetitif

Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat pedesaan merupakan suatu hal yang wajib agar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan. Untuk menjawab tantangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat dibutuhkan produk-produk yang kompetitif agar bisa bersaing di tengah persaingan regional ASEAN yang semakin ketat. Produk yang kompetitif hanya akan dihasilkan jika pemberdayaan masyarakat terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Sutoro Eko pemberdayaan merupakan suatu proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (dalam Cholisin, 2011). Tujuan akhir dari proses pemberdayaan adalah agar masyarakat pedesaan memiliki daya saing khususnya dalam hal penciptaan produk-produk usaha yang kompetitif.

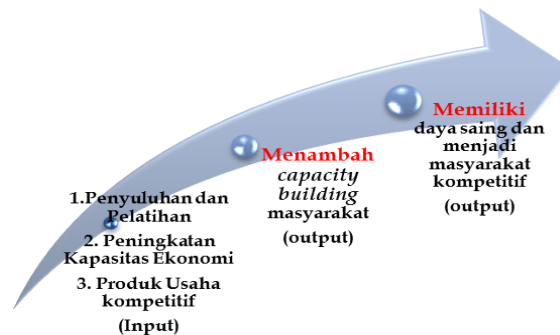
Dalam hal ini untuk menciptakan produk yang kompetitif ada dua hal yang perlu diaplikasikan yaitu menetapkan *positioning product* dan melakukan *mapping strategy*. Dua hal tersebut sangat berkaitan erat, *positioning product* berkaitan dengan penetapan posisi produk agar mudah diingat oleh konsumen dan *mapping strategy* merupakan pemetaan target pasar dari produk yang dihasilkan. Dalam hal ini produk yang dihasilkan harus berada pada posisi yang jelas misalnya, apakah produk ini bersaing pada level harga atau kualitas. Merujuk kepada Tiongkok yang secara konsisten menetapkan *positioning product*-nya pada level harga yang *low price* sehingga produk-produk yang dihasilkan menjadi kompetitif di pasaran.

Menurut MS Hidayat ada beberapa faktor penyebab produk Tiongkok bisa dijual lebih murah, karena pemerintah Tiongkok memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha seperti insentif yang menyangkut masalah perpajakan. Dalam bidang ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja Tiongkok sangat banyak dan bunga perbankan yang murah. Di Tiongkok bunga kredit perbankan



untuk usaha hanya 4% sampai 6%, sedangkan di Indonesia 14% sampai 16% pertahun (dalam Riana,2010).

Gambar 1. Input dan Output dari Strategi Pembangunan Masyarakat Pedesaan



Sumber : Olahan Penulis

PENUTUP

Indonesia telah membuka diri untuk bersaing dengan negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan harapan mampu menghadirkan perubahan baik dari tatanan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 lalu, menjadi dilema tersendiri bagi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (*developing country*) yang pada dasarnya masih memiliki pekerjaan rumah untuk mempersiapkan sumber daya manusianya agar mampu bersaing secara global, khususnya dalam regional ASEAN. Untuk menjaga citra dan martabat negara di dunia internasional tidak mungkin Indonesia menutup diri dengan alasan belum memadainya sumber daya manusia untuk bersaing secara global. Hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah dengan ikut berpartisipasi dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan melakukan berbagai akselerasi dalam berbagai bidang atau sektor serta membuat strategi dalam rangka untuk pembangunan masyarakat pedesaan, seperti penyuluhan dan pelatihan dibidang kewirausahaan, meningkatkan usaha mikro, dan menciptakan produk kewirausahaan yang kompetitif sehingga dapat berimplikasi pada *capacity building* masyarakat pedesaan untuk meningkatkan daya saing agar terciptanya masyarakat pedesaan yang kompetitif.



DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat di kabupaten Sleman*. Staff.uny.ac.id
- Cutlip, Scott, et al. 2006. *Effective Public Relations*. Jakarta: Pustaka Media Group
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- M. Jhingan. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015, diakses pada 20 September 2016 jam 13.08
- Paulus Rudolf Yuniarto. (2014). *Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan*. PSDR: LIPI
- Riana Panggabean. (2010). *Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) Studi Kasus dampak ACFTA terhadap UMKM di provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal.smecca.com
- Sudaryanto, dkk. (2014) *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean*. Kemenkeu.go.id, diakses pada 15 September 2016 jam 20.07



PERAN KOMUNIKATOR PEMBANGUNAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN BENCANA KEKERINGAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BINANGA LUMBUA KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ayu Adriyani, Despry Nur Annisa Ahmad

¹ Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,
ayu.adriyani@mail.ugm.ac.id

² Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Kabupaten Jeneponto menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang masuk dalam 122 deretan wilayah Kabupaten di Indonesia yang tertinggal. Kondisi ketertinggalan juga erat kaitannya dengan kemiskinan (Subejo, 2013). The World Bank and Asia Development Bank (Subejo, 2008) merumuskan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan peningkatan produktivitas pertanian. Jeneponto, jika dipertimbangkan dari aspek topografi, berada pada ketinggian 0-1500 meter di atas permukaan laut. Hal ini berarti, Jeneponto memiliki kondisi topografi yang variatif yang pada dasarnya mampu berkontribusi positif terhadap aspek ekonomi masyarakat setempat. Namun yang terjadi adalah kerusakan lingkungan yang ditandai dengan kekeringan. Secara umum, salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap dan perilaku manusia yang tidak bersinergi dengan alam. Baik dari segi kemiskinan dan kerusakan lingkungan, keduanya melibatkan manusia sebagai objek dan subjek. Olehnya, melalui studi literatur, peneliti melakukan analisis peran Komunikator Pembangunan dalam memberdayakan masyarakat Jeneponto. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk merumuskan peran Komunikasi Pembangunan yang efektif melalui kehadiran Komunikator Pembangunan untuk membangun masyarakat yang berdaya. Adapun hasil dari studi literatur ini, diharapkan bisa membawa muatan informatif bagi masyarakat umum dan untuk pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: daerah tertinggal, kemiskinan, lingkungan, komunikasi.

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama. Interaksi ini membuat masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan menganggapnya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas (Linton dalam Bungin, 2011). Selain itu, Soemardjan (dalam Pratikto 1975) juga mengungkapkan bahwa masyarakat



adalah orang-orang yang hidup secara bersama-sama dan menghasilkan kebudayaan.

Berangkat dari berbagai definisi yang dirumuskan oleh tidak sedikit ahli, masyarakat hadir dengan berbagai dinamikanya. Mulai dari tidak adanya keabsolutan jumlahnya, hingga angka pasti berapa lama waktu yang digunakan untuk berkumpul bersama. Terlepas dari konsep waktu, masyarakat hadir dalam hubungan antar manusia, kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian dan sebagainya (Bungin, 2011). Masyarakat adalah kelompok yang kompleks. Tidak hanya tentang jumlah namun budaya, kesejahteraan, kemiskinan, hingga kerusakan lingkungan hadir menjadi masalah yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat hari ini.

Pemerintah melalui Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 bahkan telah menetapkan 122 deretan daerah tertinggal di Indonesia. Kabupaten Jeneponto menjadi satu-satunya kabupaten di provinsi ini yang masuk dalam 122 daftar daerah tertinggal tersebut. Olehnya, dengan berangkat dari Penelitian sebelumnya, yaitu Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Upaya Pencegahan Bencana Kekeringan di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Binanga Lumbua, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Ahmad, dkk) dilakukan analisis lanjutan dengan menggunakan studi kepustakaan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerja-kerja Komunikasi Pembangunan dalam hal memberdayakan masyarakat terutama melalui peran Komunikator Pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus karena berdasarkan kondisi topografinya, Jeneponto berada pada ketinggian 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Hal ini menunjukkan kondisi topografi Jeneponto bervariasi sehingga pada dasarnya masyarakat Jeneponto memiliki modal besar untuk bisa berkembang dari segi ekonomi. Namun hal ini tidak dijumpai di Jeneponto. Hasil observasi singkat yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Kabupaten Jeneponto sering kali mengalami banjir pada musim penghujan dan kekeringan yang parah pada saat musim kemarau. Kondisi lingkungan yang demikian, mengindikasikan terjadinya kekritisian pada DAS yang ada di wilayah



Kabupaten Jeneponto ini. Salah satu DASnya ialah DAS Binanga Lumbua. Kritisnya DAS ini menjadikan masyarakat setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani mengalami kerugian akibat gagal panen karena hanya mengandalkan air hujan untuk lahan pertaniannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka pada buku, jurnal yang membahas tentang masyarakat dan dinamikanya, pertanian, dan komunikasi pembangunan baik secara umum maupun khusus. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh berbagai data penelitian yang mendukung temuan penelitian sebelumnya. Berdasarkan studi ini, digunakan sumber primer dan sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini berangkat dari penelitian Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Upaya Pencegahan Bencana Kekeringan di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Binanga Lumbua, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (Ahmad, dkk). Berdasarkan hasil identifikasi kekeringan, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di wilayah ini. Kerusakan lingkungan ini terutama terjadi pada zona yang seharusnya dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi namun pada kenyataannya dialihfungsikan sebagai kawasan budidaya.

Melalui penelitian ini ditemukan arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Binanga Lumbua dengan luas wilayah keseluruhan 13058 Ha didominasi oleh kawasan penyangga. Selebihnya adalah kawasan budidaya tanaman tahunan, kawasan lindung, dan kawasan budidaya tanaman semusim.

Hasil analisis karakteristik lahan tersebut seharusnya bermuara pada pola pemanfaatan ruang yang benar. Pemanfaatan ruang yang sesuai dilakukan



untuk melindungi kelangsungan fungsi, dan manfaat sumber daya alam pada satu kawasan DAS. Artinya, apabila penggunaan lahan pada masing-masing kawasan tidak sesuai dengan fungsi utamanya maka perlu dilakukan rencana aksi naturalisasi untuk menindak lanjuti arahan fungsi pemanfaatan ruang dengan menerapkan tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (Ahmad, dkk, 2016).

Tindakan ini, tidak lepas dari upaya untuk mengentaskan problematika ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kabupaten Jeneponto. The World Bank & Asia Development Bank menulis bahwa kemiskinan bisa diatasi salah satunya dengan peningkatan produktivitas pertanian. Pertanian telah menjadi salah satu kunci utama untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di dunia (Subejo, 2008). Pertanian yang dimaksud adalah pertanian secara umum yaitu perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Pembangunan Masyarakat dan Komunikasi dalam Pembangunan

Berbagai terminologi atas penerapan konsep pembangunan masyarakat telah bermuculan, bahkan sebelum konsep komunikasi pembangunan dikenal seperti hari ini (Nasution, 1996). Misalnya, penyuluhan, pengembangan masyarakat, pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, dan lain-lain. Namun meski berbeda dalam hal penggunaan terminologi, tujuannya sama yaitu peningkatan kapasitas diri masyarakat baik dari segi pengetahuan hingga perubahan pola perilaku.

Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata dipandang sebagai objek namun juga sebagai subjek dan aktor pelaku (Soetomo, 2013). Pembangunan pada dasarnya, jauh lebih kompleks dan dinamis dari sekedar urusan mengelolah input faktor-faktor produksi menjadi output karena di dalamnya terdapat lebih banyak faktor, variabel, aspek, dan dimensi pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, teknologi dan lingkungan (Hadad, 2016). Proses untuk menyatukan ketiga dimensi tersebut membutuhkan peran komunikasi sebagai katalisator.

Wilbur Schramm telah mengkaji bahwa komunikasi dalam konteks media massa dapat berperan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan



dapat memberikan kemampuan melek huruf dan kemampuan keterampilan lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat (Nasution, 1996). Pada dasarnya, informasi mengenai pembangunan seharusnya disebarluaskan secara masif kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari tujuan mulia pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataan bahwa komunikasi bagai dua sisi mata uang tetap hidup. Olehnya, yang perlu dihindari adalah terjadinya kesenjangan efek komunikasi. Kesenjangan bisa terjadi karena perbedaan tingkat keterampilan berkomunikasi di antara segmen-segmen khalayak, tingkat pengetahuan, akses yang berbeda pada sumber daya yang terbatas, kurangnya partisipasi dari khalayak sasaran dalam pembuatan keputusan dan implementasi keputusan, dll (Jahi, 1988).

Peran komunikasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata kemudian membutuhkan strategi komunikasi yang memadai. Pemilihan strategi komunikasi merupakan hal yang utama dan penting dalam perencanaan pembangunan (Dilla, 2007). Para ahli komunikasi, di berbagai negara berkembang memandang bahwa efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasinya. Strategi Komunikasi Pembangunan yang telah dilakukan selama ini adalah strategi yang didasarkan pada media yang dipakai adalah strategi desain instruksional, strategi partisipatori, strategi pemasaran (AED dalam Nasution, 1996). Namun terlepas dari semua itu, strategi komunikasi menjadi perencanaan keseluruhan komunikasi dalam mencapai tujuan dengan tidak mengabaikan situasi dan kondisi yang berlaku di daerah setempat. Seperti penggunaan media rakyat, pemaksimalan peran komunikator sebagai agen pembangunan, dan lain-lain.

Teori Model interaktif dan Komunikasi Partisipatori

Pada akhir dasawarsa 1960, hadir model komunikasi “interaktif” atau “konvergen” (Jahi, 1988). Model interaktif melihat komunikasi sebagai sebuah proses transaksi di antara partisipan. Dalam model ini, memungkinkan setiap orang mampu berkontribusi pada proses transaksi tersebut walaupun dalam derajat yang berbeda. Model interaktif ini juga merumuskan diagram venn, model helix, dan model zigzag. Diagram venn menunjukkan bahwa semakin



banyak kesamaan (pengalaman, pengetahuan) dari tiap-tiap orang yang berkomunikasi maka akan semakin besar pula kemampuan memahami satu sama lain. Sedang model Helix adalah model yang menggambarkan bahwa orang-orang yang terlibat komunikasi saling memahami dengan lebih baik tanpa harus didasari atas kata sepakat atau tidak satu dengan yang lain. Terakhir, model Zigzag adalah model yang menunjukkan komunikasi sebagai proses interaktif. Dalam prosesnya terdapat pertukaran tanda-tanda informasi. Dalam model ini, partisipan dalam suatu situasi komunikasi memerlukan waktu untuk meyakinkan diri bahwa partisipan lain atau lawan bicara telah sedikit banyak memahami apa yang mereka maksudkan.

Dalam teori interaktif, komunikasi lebih menyerupai suatu proses negosiasi. Pengalaman, hingga derajat tertentu akan menentukan derajat pemahaman pada isu yang dihadapi. Dalam kasus ini, komunikator pembangunan akan berhadapan dengan berbagai jenis individu dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan motivasi yang tidak sama. Maka tugas utama komunikator pembangunan adalah meningkatkan kapasitas diri individu yang dihadapinya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Teori model interaktif erat kaitannya dengan komunikasi partisipatori. Paulo Freire menerangkan bahwa partisipasi masyarakat dalam komunikasi sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan (Servaes, 2008). Komunikasi partisipatori ini sekaligus mematahkan model komunikasi linier. Model komunikasi linier dipandang terjadi karena kurangnya perhatian dan pemahaman terhadap aspek-aspek komunikasi, baik unsur maupun teori komunikasi (Dilla, 2007).

Komunikator Pembangunan

Hari ini, eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan manusia tanpa memperhitungkan keberlangsungan hidup dalam konteks jangka panjang (Kutanegara, dkk, 2014). Olehnya, diperlukan kerja Komunikator Pembangunan sebagai orang yang akan berhadapan dengan masyarakat secara langsung. Pembangunan menjadi proses yang selain menuntut juga menghasilkan



perubahan. Berangkat dari pilihan pendekatan pembangunan untuk mencapai hasil yang diharapkan, para komunikator pembangunan harus membudayakan pendekatan yang berorientasi proses. Pendekatan yang berorientasi proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia karena di dalamnya yang terpenting bukanlah bagaimana hasilnya secara material melainkan bagaimana prosesnya (Soetomo, 2013).

Bekal utama komunikator pembangunan adalah memahami saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada komunikan (masyarakat). Saluran komunikasi yang dimaksud adalah antar pribadi dan atau saluran media massa. Karakteristik keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing (depari, Colin, 1982). Misalnya, berdasarkan karakteristik arus pesan, saluran antar pribadi sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sedangkan pada media massa cenderung hanya satu arah. Sedangkan pada karakteristik efek yang mungkin terjadi, saluran media massa akan memberikan tambahan pengetahuan bagi khalayak, sebelum pada akhirnya mampu merubah sikap, seperti yang dicapai pada saluran antar pribadi.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari studi literatur yang merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini adalah dibutuhkan masyarakat yang berdaya untuk merealisasikan fungsi pemanfaatan ruang yang sesuai, menekan efek kerusakan lingkungan, untuk mencapai sinergitas antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, Komunikasi Pembangunan dapat memainkan perannya dalam memberdayakan masyarakat di Kawasan DAS Binanga Lumbu, Kabupaten Jeneponto. Berangkat dari pemahaman tentang pembangunan, model, serta strategi komunikasi yang tepat, komunikator pembangunan dapat memainkan perannya untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga, masyarakat di Kawasan DAS Lumbua dapat lebih arif dalam memanfaatkan lahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Despry Nur Annisa., dkk. (2016). *Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Upaya Pencegahan Bencana Kekeringan di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Binanga Lumbua Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai
- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, Diskursus, dan Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Depari, Eduard dan MacAndrews, Colin. (1982). *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dilla, Sumadi. (2007). *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Hadad, Ismid (2016). *Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Pasca 2015 dalam Prisma. Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim (Hal-10)*. Jakarta: LP3ES
- Jahi, Amri. (1988). *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Kutenegara, Pande Made, dkk. (2014). *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nasution, Zulkarimein. (1996). *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Pratikto, Riyono. (1975). *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Ekosistem, Beberapa Pokok Pikiran dan Masalah-Masalah Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Servaes. (2008). *Communication for Development and Social Change*. Paris: Sage Publications
- Soetomo. (2013). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subejo. (2013). *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jakarta: UI-Press.



PERBANDINGAN KONTRIBUSI SURAT KABAR LOKAL DENGAN NASIONAL DALAM PEMBERITAAN PERTANIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Paksi Mei Penggalih, Subejo, dan Harsoyo

Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Gadjah Mada
paksimei@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu upaya pembangunan pertanian adalah pengembangan jaringan informasi dengan memanfaatkan media massa, misalnya surat kabar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi penyajian berita pertanian dari jumlah item berita, volume berita, sumber materi berita, cakupan materi berita, serta cakupan wilayah peliputan berita pada SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Kompas, (2) melakukan perbandingan isi yang berkaitan dengan informasi bidang pertanian yang dimuat dalam dua jenis surat kabar yang berbeda cakupan terbitnya. Penelitian ini mengambil sampel dua jenis surat kabar, yaitu surat kabar lokal (SKH Kedaulatan Rakyat) dan surat kabar nasional (SKH Kompas). Pengambilan sampel melalui Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 540 berita. Metode yang digunakan adalah survey deskriptif komparatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Uji statistik yang digunakan adalah uji One-Way Anova dan Chi-square Test. Hasil penelitian menunjukkan SKH Kedaulatan Rakyat berkontribusi lebih besar dari segi kuantitasnya dalam memberitakan pertanian karena jumlah item beritanya lebih besar dibandingkan dengan SKH Kompas namun dengan kualitas berita yang kurang baik. Sumber berita keduanya didominasi oleh pemerintah. Cakupan materi paling banyak yaitu teknologi, pengembangan sumber daya, dan produksi pertanian di kedua surat kabar serta keduanya didominasi berita lokal namun pada skala yang berbeda. Secara umum penyajian berita telah memenuhi kaidah pemberitaan dan tidak memihak.

Kata Kunci: berita pertanian, analisis isi, surat kabar lokal, surat kabar nasional

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.



Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk pembangunan pertanian di Indonesia adalah melalui pengembangan jaringan informasi yang mampu menyediakan sejumlah informasi penting untuk membangun sektor pertanian itu sendiri. Pengembangan sumber informasi pertanian nasional untuk informasi pasar dan teknologi pertanian merupakan salah satu langkah untuk penguatan akses petani atau pelaksana pengembangan pertanian terhadap informasi pasar (termasuk di dalamnya informasi produksi, pasar distribusi, dan bahan baku), serta informasi teknologi pertanian) (Mulyandari dan Ananto, 2005).

Studi tentang keefektifan media massa, dalam hal ini surat kabar mengenai pembangunan pertanian telah menghasilkan kesimpulan bahwa surat kabar di dunia ketiga mampu memainkan peranan yang penting dalam ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberadaan surat kabar akan menjadi salah satu unsur yang dapat mengubah peran masyarakat dalam pembangunan terutama bidang pertanian dan pedesaan (Subejo *et al.*, 2005).

SKH Kompas sebagai surat kabar nasional dan SKH Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar lokal yang terus berperan dalam menyampaikan informasi-informasi lokal maupun nasional termasuk informasi-informasi bidang pertanian. Dengan mengetahui perbedaan karakteristik penyajian berita oleh dua jenis surat kabar tersebut maka diharapkan mampu dijadikan referensi oleh masyarakat tani dan pelaku agribisnis agar mengetahui surat kabar mana yang dapat memberikan informasi pertanian yang lebih banyak dan lebih variatif dalam upaya pembangunan pertanian di wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan metode dasar deskriptif komparatif dengan teknik penelitiannya adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh dari SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Kompas yang terdokumentasi sepanjang tahun 2013. Sampel yang diambil adalah sebanyak dua sampel tiap bulannya



dari Januari hingga Desember 2013 pada masing-masing surat kabar sehingga diperoleh 48 terbitan dengan jumlah sampel 540 berita dengan metode pengambilan sampel berupa *Simple Random Sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (*coding sheet*). Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat, menyeleksi dan mengkode data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, dan (2) studi pustaka. Uji statistik yang digunakan adalah uji *One-Way Anova* dan *Chi-square Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut dipaparkan hasil yang telah diperoleh dalam studi ini. Pertama mengenai jumlah berita, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Volume Item Berita Pertanian

Surat Kabar	Σ Berita Pertanian	% Volume Berita Pertanian
Kedaulatan Rakyat	305	9,71
Kompas	235	5,36

Sumber: Data Primer Diolah, 2014

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah dan volume berita pertanian pada SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Kompas. Jumlah dan volume berita pertanian yang disajikan oleh Kedaulatan Rakyat lebih banyak dibanding Kompas. Mengenai volume berita, angka tersebut bisa dikatakan cukup besar karena dalam satu edisi surat kabar baik Kedaulatan Rakyat maupun Kompas memuat banyak rubrik selain rubrik pertanian, seperti politik dan hukum, ekonomi, gaya hidup, dan yang lainnya. Dengan demikian pernyataan yang dikemukakan oleh Sutopo (1989) dalam Widodo (2003) bahwa berita pertanian di Indonesia hanya 4,7% dari total ruang berita dikatakan bahwa itu termasuk menempati tempat yang kecil adalah tidak sepenuhnya benar.

Kedua, mengenai sumber berita pertanian yang disajikan.

Tabel 2. Sumber Berita Pertanian

Sumber Berita	Kedaulatan Rakyat		Kompas	
	Σ	%	Σ	%
Pemerintah	153	50,16	127	54,04
Non Pemerintah	152	49,84	108	45,96
Total	305	100	235	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014



Tidak ada perbedaan mengenai sumber berita. Dalam menyajikan berita pertanian, keduanya lebih banyak bersumber dari pemerintah. Hal ini karena salah satu kelemahan yang dimiliki para jurnalis di bidang pertanian adalah bahwa mereka masih merasa lebih mudah dan murah untuk memodifikasi materi *press release* dari pejabat pemerintah daripada melakukan wawancara dengan petani atau menulis sesuai pendapatnya sendiri. Jurnalis kurang paham mengenai materi pertanian karena pada dasarnya latar belakang pendidikan sebagian besar dari mereka jauh dari bidang pertanian. Generoso (1987) dalam Subejo (1995) menyebutkan jika meliput berita pertanian berbeda dengan bidang lain, terlebih sebagian besar wartawan adalah orang kota.

Ketiga, dalam menyediakan informasi pertanian tentu memiliki cakupan materi yang beragam. Berikut hasil kajian yang diperoleh:

Tabel 3 Cakupan Materi Berita Pertanian

Berita Pertanian	Kedaulatan Rakyat		Kompas	
	Σ	%	Σ	%
Teknologi, pengembangan sumberdaya, dan produksi pertanian	122	40,00	117	49,79
Pemasaran, pendistribusian, dan harga produk pertanian	70	22,95	42	17,87
Kebijakan pemerintah	51	16,72	27	11,49
<i>Human interest</i>	9	2,95	3	1,28
Lain-lain	53	17,38	46	19,57
TOTAL	305	100	235	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Kedua surat kabar tidak menunjukkan perbedaan dalam hal cakupan materi beritanya. Dalam menyajikan berita pertanian, keduanya didominasi oleh materi mengenai teknologi, pengembangan sumber daya, dan produksi pertanian. Materi tersebut menjadi dominan karena dianggap sangat penting untuk diinformasikan kepada masyarakat dibandingkan materi-materi yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa isu mengenai produksi hasil pertanian masih menjadi masalah petani pada umumnya yang dijadikan agenda utama bagi penyajian berita pertanian di kedua surat kabar. Dalam menyajikan materinya, Kedaulatan Rakyat memiliki validitas yang kurang baik jika dibandingkan



dengan Kompas. Hal tersebut diketahui ketika dalam proses analisis isi berita ditemukan dua berita yang tidak saling mendukung antara isi berita dengan gambar dan juga berita yang menyebutkan nama suatu instansi dengan tidak benar.

Keempat, kajian mengenai cakupan wilayah peliputan berita yang disajikan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Kompas.

Tabel 4 Cakupan Wilayah Peliputan Berita

Cakupan Wilayah Peliputan Berita	Kedaulatan Rakyat		Kompas	
	Σ	%	Σ	%
Lokal	288	94,43	120	51,06
Non Lokal	17	5,57	115	48,94
Total	305	100	235	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Uji statistik menggunakan *Chi-Square Test* menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan. Dari temuan tersebut terlihat bahwa surat kabar Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal yang konsisten mengunggulkan prinsip kelokalannya. Lokal di sini berarti dekat dengan masyarakat, mudah dijangkau, dan diaplikasikan oleh masyarakat. Keterikatan baik sosiologis maupun geografis akan berdampak pada kelangsungan penerbitan surat kabar daerah karena SKH Kedaulatan Rakyat mengungkapkan informasi yang ada di daerah dan menginformasikannya untuk masyarakat lokal juga. Masyarakat lokal akan cenderung lebih tertarik dengan berita yang menyangkut daerah tempat tinggalnya atau sekelilingnya.

Sementara itu, Kompas yang merupakan surat kabar nasional ternyata juga lebih menitikberatkan terhadap berita-berita lokal. Kedua jenis surat kabar sama-sama lebih menitikberatkan pada berita-berita lokal namun dengan lingkup yang berbeda. Kedaulatan Rakyat lebih banyak memberitakan berita pertanian lokal lingkup kabupaten sedangkan Kompas lebih banyak berita pertanian lokal lingkup propinsi. Hal tersebut terjadi karena Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal propinsi yang hanya beredar di Yogyakarta dan Jawa Tengah sehingga isu-isu pertanian yang diliput hanya sekitar lingkup itu saja. Hal tersebut yang menyebabkan informasi pertanian yang disajikan lebih



didominasi lingkup bawahnya. Dalam kajian ini diketahui bahwa cakupan lokal yang dominan adalah yaitu lingkup kabupaten. Berbeda dengan Kompas yang merupakan surat kabar nasional yang beredar di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan aksesibilitasnya dalam meliput berita lebih luas sehingga meskipun cakupan wilayah peliputan beritanya didominasi oleh berita-berita pertanian lokal namun lokal yang lebih luas dibandingkan Kedaulatan Rakyat, yaitu lingkup propinsi.

PENUTUP

Terdapat perbedaan pemberitaan pertanian yang disajikan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dan SKH Kompas dalam hal jumlah item berita, volume berita, dan cakupan wilayah peliputan berita. SKH Kedaulatan Rakyat menyajikan jumlah dan volume berita pertanian lebih banyak dibandingkan SKH Kompas. Cakupan wilayah peliputan berita yang disajikan oleh kedua surat kabar didominasi oleh cakupan lokal namun dengan skala yang berbeda. Tetapi tidak ada perbedaan antara kedua jenis surat kabar dalam hal sumber berita dan cakupan materi berita. Kedua surat kabar didominasi berita pertanian yang berasal dari pemerintah dan cakupan materi berita pertanian didominasi oleh berita tentang teknologi, pengembangan sumber daya, dan produksi pertanian. Dari segi kuantitas, SKH Kedaulatan Rakyat berkontribusi lebih besar namun dari segi kualitas SKH Kedaulatan Rakyat belum sepenuhnya berkualitas baik karena masih ditemukan beberapa kesalahan dalam penyajian beritanya. Berdasarkan hasil kajian yang telah didapat, diharapkan kedua surat kabar lebih banyak lagi menginformasikan pertanian karena mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada sektor ini. Kepada pemerintah atau dinas-dinas yang terkait dengan bidang pertanian hendaknya lebih memanfaatkan media massa yang ada dalam hal ini adalah surat kabar untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan, inovasi-inovasi baru, serta informasi apapun yang terkait dengan pertanian untuk lebih meningkatkan hasil usahatani masyarakat petani mengingat surat kabar merupakan media massa yang mudah dan murah untuk diakses oleh petani.



DAFTAR PUSTAKA

- Mulyandari, R. S. H dan E. Eko Ananto, E. E. 2005. Teknik implementasi pengembangan sumber informasi pertanian nasional dan lokal P4MI. *Informatika Pertanian* 14: 802-817.
- Ngatif, M.S., Harsoyo, Subejo. 2005. Pemberitaan pertanian oleh surat kabar daerah: Studi kasus pada rubrik Kanda Raharja-SKH. *Kedaulatan Rakyat-reporting of agricultural news by local newspaper:-case study on rubric of Kandha Raharja-SKH. Kedaulatan Rakyat*). *Jurnal STPP Yogyakarta* 2: 1-13.
- Subejo. 1995. Perbandingan Berita Pembangunan Pertanian dan Pedesaan pada Rubrik Gema Desa Surat Kabar Harian Wawasan dengan Mingguan Minggu Pagi. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Skripsi.
- Widodo, S. 2003. Analisis Isi Perkembangan Berita Pertanian pada Media Cetak di Indonesia. Fakultas Pertanian. Universitas Gadjah Mada. Skripsi.



KOMUNIKASI PARIWISATA DALAM MENGGAGAS TIGA DESA UMKM DI KABUPATEN CIREBON

(Analisis Desa Wisata Batik Pewarna Alam Desa Ciwaringin,
Kerajinan Gerabah Desa Sitiwinangun dan Kerajinan Rotan Desa
Galmantro, Tegal Wangi)

Nurul Chamidah, M.I.Kom, Resti Titis Purbasari, Agung Sulistio

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana, S3 Penyuluhan dan Komunikasi
Pembangunan UGM,

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Cirebon
nurul.chamidah@ugm.ac.id

ABSTRAK

Saat ini sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu alternatif pendapatan devisa negara pengganti sektor migas. Keseriusan dari kementerian pariwisata mengembangkan pariwisata di Cirebon adalah dengan mengkampanyekan Cirebon sebagai destinasi wisata unggulan pada bulan Juni 2016 di Keraton Kasepuhan. hal ini ditinjau dari berbagai potensi wisata Cirebon seperti wisata budaya dan sejarah, wisata kuliner, wisata belanja dan lain sebagainya. Selain itu, peluang terbukanya akses jalan tol Cikampek-Palimanan serta rencana pembangunan bandara internasional Kertajati adalah potensi yang sangat menguntungkan bagi daerah sekitar Cirebon. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu bagian yang bisa mendapat keuntungan dari program kementerian pariwisata ini. UMKM bisa dikemas dalam bentuk desa wisata yang menjual kerajinan masyarakat dan edukasi budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menggagas tiga desa wisata yaitu desa wisata batik pewarna alam Ciwaringin, desa wisata Kerajinan Grabah Sitiwinangun, dan desa wisata Kerajinan Rotan Galmantro. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga desa wisata tersebut memiliki potensi dan peluang besar untuk bisa maju dan berkontribusi besar dalam pembangunan sektor ekonomi dan budaya.

Kata kunci: Komunikasi Pariwisata, Desa Wisata, Cirebon, UMKM.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin maju menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Hampir di setiap dimensi kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Salah satu wujud kemajuan itu adalah munculnya MEA (*Masyarakat Ekonomi ASEAN*). Sebuah agenda besar yang mengintegrasikan negara-negara dalam satu kawasan yaitu Asia Tenggara dalam segala bidang. Tujuan utamanya adalah menghilangkan hambatan dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing dengan raksasa-raksasa ekonomi di kawasan Asia,



seperti China, Jepang, dan Korea. Dengan digagasnya MEA tentu menjadi sebuah tantangan yang tidak dapat dihindarkan namun juga sekaligus sebagai peluang yang sangat besar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Maka di sinilah peran masyarakat yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kreatifitas dalam menciptakan berbagai ide usaha yang mampu mendukung daya saing produk dalam negeri. Sebagai bentuk kreativitas dan produktivitas masyarakat maka hal yang paling utama adalah mengoptimalisasikan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Termasuk juga kekayaan berupa nilai-nilai kearifan lokal yang tidak habis untuk digali. Jika berbicara tentang potensi kearifan lokal yang ada di Indonesia maka kita tidak dapat melupakan salah satu wilayah yang kaya akan keberagaman budaya dan kearifan lokal, yaitu Cirebon.

Dalam sejarah nusantara, wilayah Cirebon dahulu dikenal sebagai kota pelabuhan dan juga pusat bisnis serta perdagangan. Maka tidak heran jika kapal-kapal dagang banyak berlabuh di sana. Keberadaan Cirebon dalam peta perdagangan dan politik sangatlah sentral di kala itu. Dengan letak geografis yang sangat strategis memungkinkan suplai barang dan berbagai komoditi perdagangan berjalan lancar. Bahkan hingga saat ini pun Cirebon masih menjadi pusat perdagangan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar ini pula maka tidak heran jika Cirebon menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di nusantara yang secara resmi dikukuhkan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2016. Keberadaannya yang sangat strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia maka membuat semua akses sangat terbuka untuk menuju ke Cirebon. Bahkan pemerintah telah membangun akses jalan yang dapat mempercepat mobilitas berbagai sektor, yaitu pembangunan jalan bebas hambatan (tol) Cipali. Direncanakan pula pemerintah akan membangun Bandara Kertajati di masa yang akan datang yang membuat Cirebon menjadi salah satu destinasi pariwisata bertaraf internasional.

Wilayah Cirebon sebagai titik transit baik dari arah barat maupun timur menjadikan semua arus lalu lintas pasti melewati wilayah Cirebon. Hal itu memberikan keuntungan langsung bagi wilayah tersebut. Selain strategisnya



wilayah yang dimiliki Cirebon, kekayaan budayanya pun tidak kalah potensial. Bahkan ada beberapa produk budaya yang telah menjadi unggulan yang pangsa pasarnya hingga mancanegara. Salah satunya adalah batik dengan motif *mega mendung*. Karena itu dengan melihat potensi besar ini maka pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk mengenalkan dan mempromosikan berbagai seni dan budaya dalam balutan desain desa wisata untuk para turis domestik maupun mancanegara.

Cara pengemasan yang baik membuat potensi desa wisata menjadi sangat menarik sehingga sangat layak untuk dijadikan sebagai destinasi unggulan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengkampanyekan budaya lokal serta menjadi salah satu langkah yang baik guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dengan dibentuknya UMKM di lokasi desa wisata tersebut. Pada tahun 2015 tercatat Kabupaten Cirebon menggagas tiga desa wisata yang berbasis UMKM yaitu desa wisata batik Tulis Pewarna Alam Ciwaringin, Desa Wisata Kerajinan Gerabah Sitiwinangun, dan Desa Wisata Galmanthro Tegalwangi. Ketiga desa wisata tersebut memiliki banyak potensi yang dikembangkan dalam bentuk ekonomi kecil berbasis masyarakat. Ditambah lagi ketiga desa itu terletak di jalan nasional yang menghubungkan beberapa kota besar dan juga ibu kota negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM di tiga desa wisata seperti ketua kelompok usaha dan Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh Bapak Made Casta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Ciwaringin UMKM Batik Tulis Pewarna Alam Ciwaringin

Industri rumah tangga yang berbasis unit ekonomi terletak di blok Kebon Gedang, Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Batik



tulis Ciwaringin menambah khazanah ragam motif batik yang ada di Kabupaten Cirebon. Akar sejarah menyebutkan kerajinan batik tulis Ciwaringin sudah berlangsung selama tiga generasi. Motif batiknya banyak dipengaruhi motif batik Lasem, Rembang, Jawa Tengah dan daerah Jawa Timur. Batik Ciwaringin sudah ada sejak tahun 1900. Motif batik Ciwaringin di antaranya adalah *ganggengan*, *pecutan*, *sapu jagat*, *pring sedapur*, *kawung sruwet*, *kapal kandas* dan *ceker ayam*. Kekhasan yang dimiliki batik ini adalah pewarnaan alami yang berasal dari alam, seperti daun mangga, kulit pohon mahoni, kulit manggis dan daun indigo. Akar sejarah menyebutkan kerajinan batik tulis Ciwaringin sudah berlangsung selama tiga generasi. Motif batiknya banyak dipengaruhi motif batik Lasem Jawa Tengah dan daerah Jawa Timur. Akan tetapi siapa yang pertama membawa pengaruh itu hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.

Secara historis pada tahun 1900-an, konon saat itu daerah Ciwaringin banyak dikunjungi oleh para santri yang berasal dari Jawa Timur. Mereka menetap di salah satu pondok pesantren daerah Ciwaringin. Ketika di pondok pesantren itu para santri-santri tidak hanya belajar agama tetapi juga mengajarkan cara membatik. Maka dari sinilah pengaruh motif batik Lasem, Madura, dan daerah lainnya di Jawa mulai menyebar ke masyarakat Desa Ciwaringin, terutama di Blok Kebon Gedang. Satu Blok yang berisi tiga RT di mana mayoritas ibu rumah tangganya menekuni batik tulis. Atas pengaruh itulah sehingga motif batik dari Ciwaringin mirip dengan batik motif Lasem-Rembang, Pekalongan, maupun Madura.

Asal-usul pembawa atau pembatik pertama di Ciwaringin hingga saat ini belum diketahui dengan jelas. Menurut tokoh masyarakat setempat dijelaskan bahwa sejarah batik Ciwaringin sulit diungkap karena penarikan histori dari orang tua sudah tidak dapat diungkap lagi. Kisah dari mulut ke mulut hanya mendapatkan kejelasan dibawa santri-santri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masyarakat di sana meyakini sebelum Indonesia merdeka, penduduk Blok Kebon Gedang sudah menekuni batik tulis. (*Radar Cirebon, April 2015*).

Jumlah perajin batik saat itu hanya bisa dihitung dengan jari. Mereka pada umumnya adalah orang tua yang masih memiliki waktu luang untuk



beraktivitas. Hingga pada tahun 2010 geliat batik Ciwaringin pun mulai tumbuh. Setelah adanya bantuan dari pemerintah dan juga kepedulian dari salah satu perusahaan besar yaitu *Indocement* dengan menggulirkan dana dari program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Batik tulis Ciwaringin memiliki karakteristik motif khas yang tidak dimiliki daerah lain. Banyak motif khas batik tulis yang lahir dari kreasi para perajin batik Ciwaringin. Motif tersebut sudah berkembang sejak dahulu hingga kini. Ada motif batik *ganggengan*, *pecutan*, *sapu jagat*, *pring sedapur*, *kawung sruwet*, *kapal kandas* dan *ceker ayam*.

Motif-motif itu tidak hanya sebagai hiasan fashion semata. Akan tetapi juga mempunyai makna filosofi dan cerita tersendiri. Motif batik yang khas yaitu batik Ciwaringin yang juga menjaga orisinalitas dengan masih menggunakan pewarna kain yang alami. Bahan baku pewarna dari daun mangga, kulit pohon mahoni, kulit buah manggis, kulit buah rambutan, dan yang dikembangkan saat ini yaitu dari daun indigo. Wilayah tersebut terdapat 40 pembatik yang terbagi dalam 8 UMKM. Awalnya di kampung ini hanya ada pembatik rumahan yang tidak terlalu banyak tetapi seiring waktu maka sekarang dikembangkan sebagai pelaku ekonomi. Mereka bernaung dalam koperasi bernama Samudra Sejahtera. (Chamidah, 2015)

Profil Desa Sitiwinangun UMKM Kerajinan Gerabah

Cirebon selain terkenal dengan kerajinan tangan berupa batik dan rotan ternyata juga memiliki sentra kerajinan gerabah khas Cirebon yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kerajinan gerabah khas Cirebon ini juga memiliki nilai estetika yang tinggi dan telah diakui baik di dalam negeri maupun mancanegara. Salah satu desa di kabupaten Cirebon yaitu Sitiwinangun yang merupakan daerah penghasil kerajinan tangan tersebut. Sitiwinangun adalah nama sebuah desa di kecamatan Klangeran yang terletak 15 kilometer arah barat kota Cirebon. Sitiwinangun berasal dari bahasa Jawa yang berarti “tanah yang dibentuk”. Siti berarti *tanah* dan Wangun berarti *bentuk*. Tradisi membuat kerajinan gerabah sudah dilakukan oleh nenek moyang penduduk Sitiwinangun yang memiliki budaya agraris sejak zaman dahulu.



Pertemuan beragamnya budaya di Cirebon meliputi Sunda, Jawa, Arab, Cina, Islam serta Hindu membuat gerabah Cirebon memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dari daerah yang lainnya. Menurut penuturan cerita masyarakat di sana, asal mula kerajinan tangan ini adalah dari Pangeran Panjunan. Ketika itu sang pangeran memiliki keahlian dalam membuat karya seni berupa gerabah. Bahkan karya-karyanya banyak disukai orang. Hasil karyanya terlihat sangat halus dan indah, seakan dapat membius pandangan siapapun yang melihatnya. Konon katanya, bahan dasar grabah tersebut berupa tanah liat yang berasal dari Sitiwinangun sudah memiliki kualitas tinggi tanpa perlu tambahan bahan apapun lagi.

Gerabah merupakan suatu kerajinan tangan yang berasal dari tanah liat yang juga bagian dari keramik. Namun banyak masyarakat beranggapan bahwa gerabah bukanlah bagian dari keramik karena tekstur permukaannya yang tidak mengkilap seperti halnya vas bunga atau guci. Akan tetapi keduanya memiliki bahan dasar yang sama yaitu tanah liat dan merupakan bahan pecah belah.

Mata pencaharian masyarakat desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon secara umum adalah pengrajin gerabah. Namun karena kemajuan zaman yang sangat pesat dan berdampak pada kejayaan gerabah Sitiwinangun. Banyak pengrajin yang kebingungan karena grabahnya tidak laku dijual. Kalah bersaing dengan berbagai prodak gerabah dari wilayah lain di nusantara yang tentunya memiliki kualitas dan lebih modern. Maka jalan satu-satunya agar tidak merugi adalah dengan menjual gerabah-gerabah tersebut kepada pengepul atau bandar yang siap menampung.

Lebih disayangkan adalah minimnya kaderisasi dalam pelestarian kerajinan grabah Sitiwinangun. Generasi muda setempat lebih memilih bekerja keluar wilayah sebagai buruh yang menerima upah harian atau bulanan dari pada meneruskan membuat gerabah. Sebab bagi mereka hal itu lebih menjanjikan dan cepat mendatangkan uang dibandingkan dengan membuat gerabah yang membutuhkan waktu lama dan belum tentu mendatangkan penghasilan besar bagi mereka.



Penghasilan sebagai pengrajin gerabah tidaklah besar. Contohnya, satu produk berupa cetakan kue serabi misalnya hanya dihargai antara Rp 5.000,00 hingga Rp 10.000,00. Padahal untuk membuatnya dibutuhkan tanah liat yang dibeli dari pemilik sawah di daerah sekitar dengan harga yang lumayan tinggi. Sementara bagi mereka yang tidak mempunyai tanah liat dan tidak memiliki modal untuk membeli tanah liat maka terpaksa menganggur atau bahkan gulung tikar. Beberapa warga masih mencoba untuk bertahan menjadi pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah memang dituntut kreatif dan inovatif agar karyanya selalu penuh hal-hal baru dan tidak menjemukan. Akan tetapi karena perkembangan zaman yang tidak dapat dikendalikan serta semakin mahalnya kebutuhan pokok maka membuat para pengrajin gerabah Sitiwinangun mengalami kelesuan dalam produksinya. Sehingga mereka hanya bisa berharap masih ada peminat gerabah yang mau membeli.

Profil Desa Wisata Galmantro UMKM Kerajinan Rotan

Kerajinan rotan telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat di Desa Tegalwangi. Hampir di semua sudut desa penuh dengan pengrajin berbagai barang dari bahan rotan. Mulai dari pinggir jalan raya hingga gang kecil. Bahkan kampung di belakangnya pun nampak kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan kerajinan rotan. Berbagai produk kerajinan mulai dari keranjang sampah berukuran kecil hingga ranjang tidur berukuran besar, terlihat di ruang pameran atau outlet penjual kerajinan rotan. Barang tersebut dipajang untuk menarik minat pembeli. Selain diperuntukkan bagi pasar lokal, kerajinan rotan desa tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Rotan telah menjadi identitas bagi masyarakat Tegalwangi secara turun-temurun. Menurut cerita yang diyakini oleh masyarakat sekitar bahwa orang yang pertama kali mengawali pembuatan kerajinan rotan di Tegalwangi adalah penduduk asli desa tersebut yang bernama Nyi Tegelmantra atau akrab dipanggil Nyi Mantra sekitar tahun 1920-an.

Cirebon menguasai 60% pasar industri rotan Indonesia sehingga artinya sebagian besar wilayah Indonesia ini hasil produksi olahan rotan berasal dari Cirebon, khususnya dari Desa Tegalwangi. Sementara untuk pasar luar negeri atau dunia, Indonesia menguasai 30% ekspor industri rotan. Menurut Ketua



Asosiasi Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komisariat Daerah Cirebon, Sumarca, mengatakan bahwa saat ini tercatat sekitar 70.000 tenaga kerja yang terlibat dalam jalur produksi kerajinan rotan di Tegalwangi (www.tegalwangi.go.id, 20 September 2016).

Tokoh masyarakat Tegalwangi dan Forum Kolaborasi Galmantro memiliki ide membentuk Kampung Wisata Rotan di Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Langkah ini didukung oleh PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) yang didalamnya memiliki program *Propect Indonesia* untuk mempromosikan rotan Indonesia yang ramah lingkungan.

“Mereka memberikan respons yang positif. Kami sebagai fasilitator mendukung. Kita mulai inisiasi pertengahan 2014. Sosialisasi ke stakeholder karena perlu dukungan semua OPD. Rakor di Bappeda Kabupaten Cirebon Desember 2014 lalu dan mereka siap mendukung. Termasuk Kasultanan Kasepuhan dan biro perjalanan. Kita harap bisa direalisasikan tahun 2015 ini apalagi momen sekarang ada MEA” (www.radarcirebon.com, 20 September 2016).

Bapak Asun selaku kepala Desa Tegalwangi mempunyai keinginan agar semua warganya mau berkreasi dengan adanya fasilitas untuk berkarya dan mengembangkan kreatifitas guna memproduksi berbagai kerajinan dari bahan rotan. Dengan sistem kerja yang digunakan berupa ‘*padat karya*’, serta pengolahannya yang tidak menggunakan mesin maka diharapkan akan menampung banyak pekerja sehingga akan mengurangi angka pengangguran di desa tersebut.

Pengembangan Tiga Desa UMKM menjadi Desa Wisata

Tiga desa yang berbasis pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Cirebon dapat diketahui potensinya dengan menggunakan analisis SWOT. (*lihat table terlampir*).



Strategi Komunikasi Pariwisata Desa UMKM Cirebon

Ketiga desa di atas yang memiliki potensi wisata yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah. Usaha tersebut berasal dari kearifan lokal dan menjadi kekayaan budaya di kabupaten Cirebon sekaligus sebagai destinasi wisata potensial yang sangat menjanjikan. Hal itulah yang menjadi modal utama untuk kembali menggiatkan pariwisata berbasis usaha kecil menengah ini bisa dikemas dengan konsep berupa desa wisata.

Masyarakat sebagai penggerak utama sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan warisan nenek moyang mereka. Usaha masyarakat yang tergabung dan terikat dalam sebuah norma yang dijunjung dan dihormati bersama menjadi landasan yang cukup kuat untuk terus bertahan dan lestari. Selain itu dibutuhkan pula dukungan dari banyak pihak, di antaranya:

1. Dukungan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berwenang mengurus dan melayani masyarakat secara langsung dan tidak langsung perlu mendukung perekonomian masyarakat. Wacana pembentukan ketiga desa wisata sudah disampaikan oleh masyarakat namun pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyatakan bahwa penyusunan *roadmap* sebuah desa wisata tidak menjadi tanggung jawab satu dinas semata akan tetapi dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategis serta didukung oleh semua pihak dan dinas yang terkait. Beberapa di antaranya adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Keika semua bergerak dan memiliki visi yang sama dalam mengarap potensi wisata yang ada serta didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi kelangsungan dan kelestarian budaya maka akan muncul sinergisitas yang baik dalam mewujudkannya.

2. Pendampingan

Pemberdayaan masyarakat desa wisata perlu adanya pendampingan dari berbagai sektor. Dalam hal ini beberapa desa UMKM yang telah mendapatkan pendampingan langsung dari beberapa institusi besar seperti perusahaan



Indocement dan juga Bank Rakyat Indonesia melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk pengembangan usaha batik tulis pewarna alam.

Selain itu, Gerabah Sitiwinangun yang menjadi salah satu bagian dari kebudayaan Cirebon pun mendapat pendampingan dari Forum Bisnis Cirebon yang dipimpin oleh Sultan Sepuh Arif Natadiningrat. Kemudian Pemerintah Desa Sitiwinangun menggandeng pula dari kalangan akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sedangkan untuk kerajinan Rotan Galmantro juga telah menggandeng Ikatan Pengusaha Rotan untuk membantu menghadirkan investor guna turut serta membangun kawasan wisata yang berbasis edukasi dan kerajinan rotan.

3. Promosi Desa Wisata

Promosi yang terencana dan meluas dalam sebuah kegiatan usaha menjadi satu hal yang sangat penting. Karena itulah dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengangkat sebuah potensi usaha kecil dan menengah sehingga berkembang dengan sangat baik. Ketiga desa UMKM tersebut sesungguhnya telah memiliki pola strategi promosi yang baik. Beberapa bentuk promosi dilakukan dengan membuat gapura pintu masuk desa yang mencirikan produk unggulan masyarakat. Selain itu, kelompok UMKM sudah menggunakan media sosial seperti web resmi desa, facebook koperasi usaha guna mensosialisasikan berbagai hasil kerajinan dan produk unggulan mereka. Selain itu juga mereka selalu rajin mengikuti pameran-pameran sebagai sarana promosi dan marketing yang efektif dan efisien.

PENUTUP

Untuk mengembangkan desa wisata sekaligus melestarikan kearifan lokal menjadi sesuatu yang berdaya saing tinggi membutuhkan sinergi dari banyak pihak. Tidak hanya masyarakat yang memiliki kewajiban untuk mengembangkan daerahnya namun pemerintah selaku pemegang kebijakan sebaiknya juga ikut berpihak demi kemajuan dan keberlangsungan industri di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Chamidah, Nurul. *Strategi Komunikasi Pemasaran Batik Tulis Ciwaringin*. Jurnal Orasi, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Harini, Yostiani Noor Asmi, *Mega Mendung: Dari Warisan Nusantara Hingga Diplomasi Budaya dalam Prosiding Marketing Communication Pariwisata dan Korporasi di Indonesia*. Puskombis. Jakarta, 2013.
- Ruslan, Rosady, *Managemen Humas dan Managemen Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- www.radarcirebon.com. *Tegal Wangi jadi kampung wisata rotan*. Diunduh pada 20 September 2016, pukul 18.07 WIB.
- www.tegalwangi.go.id. *Kampung wisata rotan Tegal Wangi*. Diunduh pada 20 September 2016, pukul 18.06 WIB.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Lampiran

Analisis Lokasi	<i>Strengths</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
Desa Wisata Batik Tulis Ciwaringin	- Akar budaya yang kuat dan masih dilestarikan - Kesadaran masyarakat mulai tumbuh - Peninggalan budaya berupa batik mulai dikembangkan menjadi usaha - Struktur kelembagaan sudah ada dalam bentuk koperasi - Mendapat dukungan dari CSR perusahaan Indocement - Infrastruktur sudah mulai ada	- Belum adanya <i>stakeholder</i> yang mendampingi - Belum adanya web resmi - Promosi dan pemasaran lewat media sosial pribadi dan belum mewakili keseluruhan anggota koperasi - Regulasi dari pemerintah yang belum menca- nangkan desa wisata secara tertulis	- Mainstream pengguna- an batik yang mulai berkem- bang. - Alternatif pilihan batik khas Cirebon selain trusmi dan pewarna alam.	- Masuknya batik cap impor dari Cina - Isu MEA menjadikan produk lokal bersaing dengan produk asing yang tentunya memengaru- hi kualitas produk lokal (belum mampu bersaing).
Desa Wisata Kerajinan Gerabah Sitiwinangun	- Akar budaya yang kuat dan masih dilestarkan - Kesadaran masyarakat kembali tumbuh - Peninggalan budaya berupa batik mulai dikembangkan	- Tampilan web resmi desa yang belum tertata secara apik dan menarik - Variasi bentuk kerajinan yang belum lengkap - Kurang	- Mainstream pengguna- an produk lokal yang mulai berkem- bang	- Gerabah dari plastik dan barang impor dari Cina - Isu MEA menjadikan produk lokal bersaing dengan produk asing.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Analisis Lokasi	Strengths	Weaknees	Opportunities	Threats
	- n menjadi usaha - Struktur kelembagaan sudah ada dalam bentuk koperasi - Mendapat dukungan dari perangkat desa dan karang taruna - Terdapat pendampingan dari perguruan tinggi - Bekerjasama dalam pengembangan usaha forum bisnis Cirebon dan keraton kasepuhan Cirebon - Infrastruktur sudah mulai ada	- adanya desain kerajinan gerabah yang bernilai seni untuk bisnis properti - Regulasi dari pemerin-tah yang belum menca-nangkan desa wisata secara tertulis - Sarana dan prasarana untuk kunjungan wisatawan yang belum baik		
Desa Wisata Kerajinan Rotan Galman-tro Tegal Wangi	- Usaha yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu - Keahlian yang dilakukan turun-temurun.	- Variasi bentuk kerajinan yang belum lengkap - Regulasi dari pemerin-tah yang belum menca-nangkan	Mainstream penggunaan produk lokal yang mulai berkembang.	- Penggunaan barang non rotan dari plastik dan barang impor dari Cina - Isu MEA menjadikan produk lokal



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Analisis Lokasi	Strengths	Weaknees	Opportunities	Threats
	- Nama desa sudah terkenal sebagai sentra kerajinan rotan di Indonesia - Struktur kelembagaan sudah ada dalam bentuk koperasi - Mendapat dukungan dari perangkat desa dan karang taruna - Bekerjasama dalam pengembangan usaha forum usaha rotan dengan pengusaha asal Jepang dan Jerman. - Penggunaan website yang sudah mulai baik - Rencana kerja pemerintah desa menjadikan desa wisata sudah dibentuk	- desa wisata secara tertulis di Kabupaten Cirebon - Sarana dan prasarana untuk kunjungan wisatawan yang belum baik		- bersaing dengan produk asing. - Harga yang relatif mahal karena bahan baku yang terbatas



KOMUNIKASI TERAPEUTIK SEBAGAI BENTUK PELAYANAN PRIMA DI PUSKESMAS

Ida Wiendijarti

Mahasiswa S3 PKP-UGM

ida.wiendijarti@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan, berfungsi sebagai kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Setiap pasien yang berkunjung ke puskesmas mempunyai harapan terhadap pelayanan prima yang diberikan Puskesmas. Bagi puskesmas, kualitas pelayanan yang baik terkait dengan kesembuhan, meningkatnya derajat kesehatan, kecepatan pelayanan, kepuasannya terhadap lingkungan fisik sarana kesehatan, dan tarif yang dianggap memadai sesuai dengan kemampuan pasien. Penggunaan komunikasi terapeutik yang efektif menjadikan pelayanan dalam pemberian nasehat, perawatan, dan pengobatan juga berjalan efektif. Komunikasi terapeutik mempunyai peranan vital dalam membantu proses penyembuhan pasien di samping obat-obatan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji model komunikasi terapeutik sebagai bagian dari pelayanan prima di Puskesmas. Melalui penelitian ini dapat menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik dianggap efektif dan efisien dalam mengembangkan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas. Subjek dalam penelitian ini adalah Puskesmas Depok I Kabupaten Sleman yang beralamat di Nanggulan Ringinsari Maguwoharjo Kecamatan Depok Sleman sebagai salah satu Puskesmas yang telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2000 untuk bidang pelayanan.

Kata kunci : komunikasi terapeutik, pelayanan kesehatan, pelayanan prima.

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes, 2009). Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama pun menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan (*private goods*), dan pelayanan kesehatan masyarakat (*public goods*).



Berkaitan dengan pelaksanaan terapi kepada pasien yang umumnya membutuhkan nasehat, perawatan, hingga pengobatan, maka salah satu yang harus diperhatikan dalam tindakan tersebut adalah penggunaan komunikasi terapeutik yang efektif agar pelayanan dalam pemberian nasehat, perawatan, dan pengobatan juga berjalan efektif. Pelaksanaan komunikasi terapeutik yang efektif akan membawa kepuasan bagi pasien yang berujung pada kepulihan kesehatan pasien.

Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien (Depkes RI, 1997). Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antar perawat dengan pasien. Persoalan mendasar dari komunikasi ini adalah adanya saling membutuhkan antara perawat dan pasien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi pribadi di antara perawat dan pasien, perawat membantu, dan pasien menerima bantuan (Suryani, 2005: 48).

Manfaat komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerja sama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan dan mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat (Suryani, 2005: 50). Sedangkan tujuan Komunikasi Terapeutik (Suryani, 2005: 48), adalah 1) membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien, membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan diri sendiri, 2) kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat-klien, bila perawat tidak memperhatikan hal ini, hubungan perawat-klien tersebut bukanlah hubungan yang memberikan dampak terapeutik yang mempercepat kesembuhan klien tetapi hubungan sosial biasa. Komunikasi Terapeutik memiliki karakteristik sebagai berikut: (Arwani, 2003: 54) yaitu 1). ikhlas (*genuiness*), 2) empati (*empathy*), 3) hangat (*warmth*).

Puskemas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dan menjadi indikator pelayanan kesehatan yang bermutu, serta berperan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pasien atau klien. Hakikat pelayanan



publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Agenda perilaku pelayanan sektor publik (SESPANAS LAN dalam Nurhasyim, 2004: 16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah *pertama*, pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa, *kedua*, pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan, dan *ketiga*, pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Pertimbangan memilih Puskesmas Depok I Sleman adalah Puskesmas ini adalah salah satu Puskesmas yang telah berhasil meraih sertifikat ISO 9001:2000 artinya dinyatakan mampu melaksanakan pelayanan sesuai standar prosedur internasional (Data Dinkes Kabupaten Sleman 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan multidisipliner serta kajian secara kritis. Metode kualitatif sendiri merupakan pemaparan fakta-fakta untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada suasana alamiah yang memaparkan situasi atau peristiwa (Rakhmat 1999: 45). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan dan observasi dengan subyek sebanyak 15 tenaga medis dan 15 tenaga non medis yang berhubungan langsung dengan pasien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas Depok I merupakan salah satu puskesmas dari 24 puskesmas di wilayah Kabupaten Sleman. Visinya adalah menjadi pusat layanan kesehatan yang bermutu dan mandiri dengan menerapkan sendi-sendi pelayanan prima, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan misinya antara lain: 1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan bermutu, dilaksanakan oleh tenaga yang profesional, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan; dan 3)



mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat; serta 4) mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang tersedia dan membentuk tim kerja yang kompak dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan.

Sebelum memperoleh ISO 9001-2000 kondisi pelayanan Puskesmas Depok I, pelayanan yang dilakukan tidak secara prima, bahkan kadang-kadang pasien diperiksa oleh petugas yang tidak kompeten. Selain itu juga tidak ada standar baku terhadap tindakan kepada pasien sehingga antara pasien yang satu dengan yang lain bisa terjadi perlakuan yang berbeda untuk kasus yang sama, pemahaman, dan kepatuhan petugas terhadap standar kurang, memperlakukan pasien tidak sesuai dengan hak dan kewajiban, dokumentasi data tidak teratur, dan bahkan banyak data pasien yang hilang.

Setelah memperoleh ISO 9001-2000 ada perubahan yang signifikan terkait dengan pemeriksaan pasien oleh dokter dan tidak ada perbedaan tindakan kepada pasien untuk kasus yang sama. Pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap standar baik terjadi apabila tidak muncul laporan layanan tidak sesuai, petugas memperlakukan pasien sesuai dengan hak dan kewajiban, data pasien mulai terdokumentasi teratur, dan apabila terdapat data yang hilang bisa segera dirunut, permasalahan yang ada diselesaikan sampai akar permasalahan, semua petugas ikut memikirkan peningkatan mutu dan wajib memeliharanya, kemudian selalu melakukan evaluasi, melaksanakan tindakan perbaikan dan memikirkan peningkatan mutu serta secara kontinyu melakukan pengukuran, evaluasi, tindakan perbaikan dan peningkatan.

Komunikasi Terapeutik sebagai Pelayanan Prima di Puskesmas Depok I

Penerapan komunikasi terapeutik pada penelitian ini dibedakan antara tenaga media dan tenaga non media. Hal ini untuk melihat bagaimana kesadaran petugas Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada pasien sehingga pasien memperoleh kesembuhan. Untuk petugas medis beberapa konsep dasar komunikasi terapeutik sudah diterapkan meliputi keikhlasan, empati, dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Meningkat pada fase interaksi dalam komunikasi terapeutik, nampaknya petugas medis belum



memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara pribadi kepada pasien. Hal ini melihat padatnya kunjungan pasien.

Pada fase orientasi secara umum petugas medis selalu menyapa pasien terlebih dulu ketika melayani, jujur dalam memberikan informasi kepada pasien, dan bisa menerima apapun kondisi pasien, berusaha mendengarkan keluhan pasien sebagai upaya untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi pasien, sehingga mampu mengidentifikasi penyakit pasien dan menjelaskan kepada pasien terkait dengan penyakit yang dihadapi. Tahap selanjutnya adalah fase kerja, petugas medis pun mulai melakukan beberapa hal yang terkait dengan upaya pelayanan prima seperti mulai memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama ketika pasien menyampaikan keluhan kesehatannya atau penyakit yang diderita sebagai upaya untuk mengambil tindakan selanjutnya.

Pada fase terminasi petugas medis setelah selesai melakukan pemeriksaan atau tindakan tertentu pada pasien, biasanya menanyakan kepada pasien dari tindakan yang telah dilakukan dan mengakhiri pemeriksaan dengan menyampaikan salam dan mengucapkan terimakasih dan memberikan nasehat kepada pasien untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila diperlukan akan mengingatkan jadwal kontrol berikutnya untuk pasien dengan kondisi tertentu. Sebelumnya petugas medis terlebih dulu memberikan kesempatan kepada pasien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas atau yang terkait dengan penggunaan obat dan pencegahan selanjutnya.

Pada petugas non medis, komunikasi terapeutik juga melalui fase dasar, petugas non medis mengawali kegiatan pelayanan dengan selalu tersenyum, ikhlas, dan selalu memberikan keramahan dan “kehangatan” dalam menghadapi pasien. Hanya saja untuk perasaan empati mereka pada umumnya jarang untuk bisa merasakan apa yang menjadi keluhan dari pasien, untuk fase interaksi petugas non medis selalu menyesuaikan diri dengan pasien dalam berkomunikasi dan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami pasien. Terdapat perbedaan yang signifikan pada fase interaksi antara petugas medis dan petugas non medis. Pada petugas medis kurang adanya upaya untuk



menyesuaikan dengan kondisi pasien karena adanya posisi yang berbeda, sedangkan pada petugas non medis pada umumnya lebih mau dan mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi social pasien.

Pada fase orientasi, petugas non medis selalu jujur dalam memberikan informasi kepada pasien dan menerima apapun kondisi pasien yang datang. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka menghargai setiap pasien yang datang dengan menjaga hubungan baik dengan pasien, seperti mengingatkan ketika datang sebelumnya atau dengan menanyakan kondisi awal dari keluhan pasien. Pada fase kerja, petugas non medis berusaha untuk mendengarkan dan memperhatikan pasien dengan seksama, hanya apabila sedang banyak pekerjaan, petugas non medis mendengarkan, dan memperhatikan pasien dilakukan sambil mengerjakan pekerjaan lain.

Pada fase terminasi petugas non medis jarang menanyakan perasaan pasien tentang pelayanan di puskesmas namun hanya berkomunikasi sesuai prosedur dan bidang masing-masing, dan setelah pasien selesai menjalankan pemeriksaan dan akan pulang, tenaga medis cukup menyampaikan salam dan mengatakan semoga cepat sembuh.

Analisis Komunikasi Terapeutik sebagai Pelayanan Prima

Komunikasi terapeutik yang diterapkan sebagai pelayanan prima di Puskesmas Depok I pada dasarnya harus didukung dengan keikhlasan, empati, dan kehangatan petugas dalam memberikan pelayanan. Perolehan ISO 9001-2000 telah menjadikan pelayanan kepada pasien menjadi tanggungjawab bersama antara petugas medis dan non medis karena semua bentuk pelayanan kesehatan telah jelas pengukurannya dan selalu ada evaluasi sehingga semua pihak perlu bersama-sama berupaya melakukan perbaikan dan memikirkan peningkatan mutu pelayanan.

Penerapan komunikasi terapeutik sebagai bentuk pelayanan prima, akan membantu pasien dalam memperoleh kesembuhan, mengingat puskesmas merupakan layanan kesehatan masyarakat yang terdekat. Penerapan komunikasi terapeutik akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan akan mengurangi resiko penyakit yang lebih parah. Apabila petugas medis dan non



medis mampu menerapkan komunikasi terapeutik dengan baik, tentu tingkat kesembuhan pasien akan meningkat. Hal ini perlu adanya kesadaran dari petugas medis dan non medis dalam memberikan pelayanan, dengan memiliki keikhlasan dalam menjalankan tugas, kemampuan berempati terhadap pasien dan mampu bersikap ramah. Hal ini bisa dijadikan sebagai slogan Puskesmas, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan.

PENUTUP

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, petugas medis maupun non medis punya tanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima demi kesembuhan pasien. Model komunikasi terapeutik yang bisa diterapkan sebagai pelayanan prima perlu melalui 4 (empat) fase, yaitu fase pre-interaksi, petugas berupaya menjalin komunikasi dengan pasien; fase orientasi, petugas terbuka dan menghargai pasien apaun kondisinya; fase kerja, petugas menjalankan pelayanan sesuai fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik, dan fase terminasi, mengakhiri pelayanan dengan sikap yang menyenangkan. Apabila masih perlu kontak lanjutan petugas akan mengingatkan dan tidak memerlukan kontak lanjutan sebaiknya memberikan kesan yang baik. Sedangkan rekomendasi yang bisa disampaikan adalah pentingnya kontinuitas dalam penerapan komunikasi terapeutik sebagai pelayanan prima bagi puskesmas dan menjadikan sebagai *Standar Operating Procedur* (SOP) bagi bentuk pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, A.Y.S (1996). Komunikasi Terapeutik. Jakarta: tidak dipublikasikan
- Keliat, B.A. (2002), Hubungan Terapeutik Perawat-Klien, EGC, Jakarta.
- Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. 1998. Surat Edaran Menko Wasbangpan Nomor 56/MK.WASBANGPAN 6/98 Tahun 1998 Tentang Penataan dan Perbaikan Pelayanan Umum. Jakarta.
- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 2003. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Jakarta.
- Normann. 1991. Service Management. Chicester, England: Wiley & Son.



- Notoatmodjo, S 1997, Ilmu Perilaku dan komunikasi Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta
- Nurhasyim. 2004. Pengembangan Model Pelayanan Haji Departemen Agama Berdasarkan Prinsip Reinventing Government Yang Berorientasi Pada Pelanggan di Kabupaten Gresik. Tesis. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga
- Purwanto, H. (1998). Komunikasi untuk Perawat. EGC, Jakarta.
- Republik Indonesia.2007. Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sears.M.(2004). Using Therapeutic Communication to Connect with Patients. <http://www.NonviolentCommunication.com>
- Suryani.(2005). Komunikasi Terapeutik Teori & Praktek. Jakarta, EGC.
- Sutopo dan Suryanto, Adi. 2003. Pelayanan Prima. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.



PERLINDUNGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DARI PESATNYA PERKEMBANGAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN MELALUI PERDA NO 18 TAHUN 2012

Clara Shinta Paskasari

Magister Penyuluhan dan Komunikasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
shintapaskasari@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan toko modern di Kabupaten Sleman ternyata menimbulkan permasalahan di berbagai bidang. Data menyebutkan bahwa saat ini baru 4,4% dari keseluruhan toko modern yang ada di Kabupaten Sleman yang sudah memiliki izin sedangkan sisanya belum. Perkembangan yang semakin tak terkendali tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk pada usaha kecil milik rakyat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Perda No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang di dalamnya mencakup juga upaya-upaya perlindungan terhadap UMKM. Namun kemudian dipertanyakan keefektifan dari peraturan daerah tersebut dalam upaya perlindungan terhadap UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum efektif untuk melindungi UMKM karena tujuan untuk mewujudkan hubungan yang sinergis dengan UMKM belum dapat berjalan. Akibatnya perlindungan terhadap UMKM sebagai salah satu tujuan dari kebijakan ini juga belum tercapai.

Kata kunci: toko modern, kebijakan publik, UMKM, strategi komunikasi

PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan di era modern ini semakin luas seiring dengan kebutuhan konsumen yang semakin berkembang. Cara perdagangan pun semakin bervariasi mulai dari warung konvensional, toko modern, bahkan perbelanjaan melalui sistem daring. Keberagaman tersebut tak dapat terelakkan lagi apalagi di era globalisasi. Kondisi seperti ini tentu bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi konsumen mendapat kemudahan dalam mengakses kebutuhan, variasi pilihan tempat berbelanja yang sesuai keinginan, dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, ada pihak-pihak yang tersisihkan dari persaingan perdagangan di era global ini. Pihak-pihak tersebut adalah usaha mikro, kecil, dan menengah dari masyarakat. Padahal menurut data BPS pada tahun 2011 UMKM mampu menyumbang penerimaan negara 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pajak yang dibayarkan.



Sehingga pemberdayaan dan perlindungan UMKM ini harus dilakukan karena UMKM merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia sudah berada di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana era perdagangan liberal sudah semakin tak terbendung. Usaha-usaha untuk melindungi UMKM harus diwujudkan secara nyata di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang sedang berkembang pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Sleman maka jumlah persebaran toko modern di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Sleman

Jenis	2012	2013	2014	2015
Minimarket	213	280	282	328
- Lokal	59	133	133	133
- Cabang/ waralaba nasional	154	147	149	195
• Alfamart	55	55	56	60
• Circle K	25	21	17	16
• Indomaret	74	74	75	118
Supermarket	6	6	6	6
Hypermarket	2	2	2	2
Perkulakan	2	2	2	2
Pusat perbelanjaan	1	2	2	3

Sumber: BPMPPT Kab. Sleman 2015

Jumlah di atas menunjukkan pertambahan yang signifikan dari jumlah toko modern di Kabupaten Sleman dari tahun 2012 hingga 2015 ternyata sudah bertambah 115 toko modern dalam bentuk minimarket. Permasalahan kemudian muncul ketika ternyata dari jumlah tersebut baru ada 15 toko modern yang mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana tercantum di dalam Perda No 18 Tahun 2012. Perkembangan toko modern ini juga mulai mengancam usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah dari masyarakat terutama UMKM di bidang perdagangan.



Bahkan bermunculan pemberitaan di media massa terkait konflik antara masyarakat dan toko modern akibat ketakutan pada matinya usaha lokal akibat pesatnya perkembangan toko modern. Salah satu kasus yang sempat menjadi berita salah satunya di *website* Antara tahun 2015 adalah konflik masyarakat Dusun Corongan, Maguwoharjo dengan Indomaret yang akan berdiri di daerah tersebut. Masyarakat menolak untuk menandatangani persetujuan karena merasa toko modern akan mematikan usaha rakyat. Kasus tersebut hanyalah satu di antara sekian banyak penolakan masyarakat akan keberadaan toko modern di Kabupaten Sleman yang disebabkan oleh ketakutan perkembangan toko modern yang demikian pesat akan mematikan usaha rakyat.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari permasalahan ini dan membuat kebijakan agar keberadaan toko modern dapat sinergis dengan UMKM dan pasar tradisional dengan mengesahkan Perda No 18 Tahun 2012 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sinergisitas tersebut diharapkan terjadi karena perkembangan toko modern tidak dapat serta merta ditolak sementara penyelamatan UMKM juga harus segera dilakukan. Namun setelah diimplementasikan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ternyata kebijakan tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu diambil pertanyaan penelitian tentang bagaimana efektivitas dari Perda No 18 Tahun 2012 dalam upaya perlindungan terhadap UMKM di Kabupaten Sleman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini ingin memberikan gambaran tentang strategi komunikasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman dari pesatnya perkembangan toko modern. berusaha menemukan pemahaman dan penafsiran tentang makna dari suatu peristiwa dan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu (Hamidi, 2005). Untuk mendapatkan data dilakukan dengan melakukan *in depth interview* yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap



muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan (Nazir, 2005) dan juga analisis data sekunder. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman; Kepala Seksi Operasional Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Sleman; Kepala Sub Bidang Pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman; dan juga kepala dusun di beberapa lokasi yang terdapat toko modern antara lain Dusun Nayan, Dusun Berjo Kulon, dan Dusun Panjen. Analisis data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data terkait perkembangan toko modern di Kabupaten Sleman, analisis berita terkait permasalahan tersebut, dan melihat pada hasil kajian lembaga terkait. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Perda Kabupaten Sleman No 18 Tahun 2012

Subarsono (2004) memahami kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Hal tersebut mendasari munculnya Perda No 18 Tahun 2012 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern dan pusat perbelanjaan. Implikasi dari pesatnya pertumbuhan toko modern adalah berpindahnya konsumen dari toko-toko bahkan pasar tradisional ke toko modern.

Melihat dari gencarnya perkembangan toko modern di Kabupaten Sleman hingga saat ini maka kebijakan ini diharapkan dapat membawa manfaat yaitu hubungan yang sinergis antara toko modern dengan UMKM dan pasar tradisional. Sinergisitas tersebut diharapkan terjadi karena perkembangan toko modern tidak dapat serta merta ditolak sementara penyelamatan UMKM juga harus segera dilakukan. Oleh karena itu diatur mengenai kewajiban memenuhi



jarak minimal dengan pasar tradisional dan kewajiban untuk melaksanakan kemitraan dengan UMKM.

Pada kenyataannya manfaat tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat pelaku usaha di pasar tradisional. Peraturan Daerah ini memang telah mengatur adanya kewajiban untuk mendirikan toko dengan jarak minimal 1 kilometer dari pasar tradisional kecuali bagi toko modern lokal. Namun jika ditilik saat ini bahwa ternyata masih ada puluhan toko modern cabang/waralaba nasional yang melanggar ketentuan tersebut dan belum dilakukan penertiban. Sehingga sama saja ketika masih banyak ditemukan toko modern yang justru malah berdampingan dengan pasar tradisional. Pada akhir November 2015, Pejabat Sementara Bupati Sleman yaitu Gatot Saptadi menggaungkan wacana untuk menertibkan 89 toko modern yang belum berizin. Namun kenyataannya kegiatan penertiban ini sampai sekarang tak kunjung terselesaikan.

Muncul pula untuk pelaku usaha toko kelontong yang mengaku kalah bersaing dengan toko modern. Hal ini seperti diungkapkan oleh Harnowo yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Cebongan sebagaimana dikutip dari harian Kedaulatan Rakyat yang mengatakan bahwa pedagang di pasar tidak bisa bersaing dengan toko modern karena perbedaan pola penjualan. Faktor kalah saing pula yang menjadi sebab warga di Dusun Corongan, Nayan, dan Dewan menolak adanya Indomaret berdiri di kawasan mereka. Sebagaimana diungkapkan Bapak Basuki selaku Kepala Dusun Nayan bahwa di sekitar toko modern tersebut banyak usaha kecil dan warga sempat trauma dengan adanya Circle K di depan Hotel Grand Quality yang membuat omzet mereka menurun.

Kemitraan UMKM dengan Toko Modern di Kabupaten Sleman

Berbicara masalah hubungan kemitraan antara toko modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman yang diharapkan dari kebijakan ini, maka dari hasil penelitian Bappeda Kabupaten Sleman di tahun 2014 memang sudah terjalin hubungan kemitraan dengan sistem konsinyasi yaitu dari UMKM menitipkan barang dagangan untuk dijual di toko modern dengan konsekuensi jika tidak habis terjual maka akan dikembalikan kepada produsen. Sistem lain yang diterapkan adalah pengemasan ulang atau *private label*. Namun



pelaksanaan kemitraan ini belum maksimal karena tidak semua UMKM mau dan mampu memasarkan usahanya melalui toko modern.

Berdasarkan penelitian dari Bappeda tersebut pun menyimpulkan bahwa toko modern belum mampu menyerap minimal 5% dari produk lokal disebabkan oleh rumitnya aturan kemitraan, tuntutan toko modern yang tinggi, *display* barang yang terkesan seadanya, dan mahal nya sewa tempat. Rumitnya aturan memang menjadi hambatan karena toko modern menuntut standar yang tinggi sementara UMKM di Kabupaten Sleman sendiri belum banyak yang bisa memenuhinya. Seperti yang tertera di *website* resmi Indomaret bahwa syarat produk dagangan bisa masuk ke Indomaret di antaranya adalah sesuai target *marketing*, harga kompetitif, produk teregistrasi, dan adanya *barcode*.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi selaku instansi teknis ternyata belum memiliki data terkait toko modern yang memiliki IUTM sehingga pelaksanaan kemitraan tidak dapat diawasi dan dipastikan sudah dapat berjalan atau belum. Upaya menjembatani komunikasi antara pihak toko modern dengan pihak UMKM dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan memfasilitasi pertemuan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pada tahun 2015 mengatakan bahwa Disperindagkop sudah memfasilitasi pertemuan antara UMKM dan toko modern namun belum didapatkan kesepakatan.

Freeman (dalam Putra, 2008) mengatakan bahwa *stakeholder* adalah pihak-pihak yang berkepentingan dari kepustakaan manajemen. Pihak yang berkepentingan di dalam hal ini adalah pemerintah, UMKM, dan toko modern. Hubungan antara pemerintah dan UMKM khususnya toko tradisional sudah dilakukan dengan mengkomunikasikan program pendampingan. Tujuan dari kegiatan komunikasi menurut Pace, Petterson, dan Burnett (dalam Effendy, 1984) adalah (1) *to secure understanding* yaitu memastikan komunikasi mengerti pesan yang diterimanya; (2) *to establish acceptance* yang berarti jika sudah mengerti dan menerima maka harus dibina; (3) *to motivate action* artinya jika sudah dilakukan maka harus dimotivasi.

Hal ini pula yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman dalam rangka pembinaan toko tradisional supaya



tidak kalah bersaing dengan pasar tradisional maka dilakukan dengan pembinaan dan motivasi. Adapun kegiatannya adalah (1) memberi pencerahan tentang kondisi saat ini yaitu persaingan yang berbasis modal dengan harapan bahwa para pedagang tradisional akan menata diri, (2) pedagang yang tertarik untuk berubah maka akan diberikan pendampingan harapannya supaya semakin sadar diri, (3) melakukan pendampingan kepada pedagang yang berubah. Namun diakui oleh Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Kabupaten Sleman bahwa program ini belum banyak menjaring peminat.

Untuk melakukan pengawasan pada toko modern yang ada salah satunya mengawasi terkait kemitraan, Disperindagkop Kabupaten Sleman menyatakan bahwa hal tersebut belum dapat dilakukan karena tidak memiliki data toko modern yang sudah memiliki Ijin Usaha. Sementara dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sudah mengantongi daftar 15 toko modern yang sudah berizin. Dari Satpol PP yang memiliki kewenangan dalam penegakan peraturan daerah ternyata juga tidak memiliki data yang sinkron dengan kedua instansi tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa komunikasi antar organisasi pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Hidayat (1986) mengatakan bahwa efektivitas berarti suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang dicapai maka akan semakin tinggi tingkat efektivitas. Melihat dari hasil kebijakan tersebut maka dapat dikatakan kebijakan ini tidak efektif untuk melindungi UMKM. Dalam jangka waktu 3 tahun ternyata kemitraan yang diharapkan akan sinergis justru terhambat oleh kesenjangan yang tidak terselesaikan. Selain itu pelanggaran dari ketentuan Perda ternyata juga masih sangat tinggi.

PENUTUP

Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 di Kabupaten Sleman ternyata belum dapat berjalan efektif untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya UMKM yang menjalin kemitraan dengan toko modern akibat kesenjangan yang belum teratasi. Sementara dari dinas terkait menyatakan bahwa untuk pengawasan kemitraan



tidak dapat dilakukan karena belum memiliki daftar toko yang sudah mengantongi perizinan. Selain itu untuk usaha toko tradisional juga tidak dijelaskan bentuk kerjasamanya selain hanya dilibatkan pada saat sosialisasi saja. Saran yang dapat diberikan adalah (1) melakukan revisi pada peraturan daerah tersebut dengan menambahkan ketentuan yang jelas terkait kemitraan dengan UMKM ataupun dengan toko tradisional, (2) memperbaiki komunikasi antar instansi agar terjadi keselarasan di dalam data maupun tindakan, dan (3) menggunakan strategi komunikasi partisipasi pada toko tradisional yang dibina.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendy, Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hamidi. 2005. *Teknik Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hidayat, 1986. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Mas Agung
- Kedaulatan Rakyat 19 Januari 2016. *Bandel, Toko Modern Disegel*. Kedaulatan Rakyat
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Purwata, Heri. *Mayoritas Minimarket di Sleman Tak Penuhi Syarat IUTM*.
<http://jognews.com/index.php/bisnis/8-mayoritas-minimarket-di-sleman-tak-penuhi-syarat-iutm>
- Pranyoto, Sat Victorianus. *Warga Corongan Tolak Kehadiran Toko Modern*.
<http://www.antarayogya.com/berita/333192/warga-corongan-tolak-kehadiran-toko-modern>



PENGUATAN MODAL SOSIAL PETANI MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM ADOPSI TEKNOLOGI BUDIDAYA BAWANG MERAH DI LAHAN PASIR PANTAI KABUPATEN BANTUL

Roso Witjaksono⁽¹⁾, Supriyati⁽²⁾

⁽¹⁾Laboratorium Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Departemen Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Jalan Flora
Bulaksumur Yogyakarta 55281

⁽²⁾Akademi Pertanian Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul “Penguatan modal sosial petani melalui komunikasi interpersonal dalam adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul” bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal terhadap penguatan modal sosial petani dalam adopsi teknologi budidaya bawang merah, dan (2) mengetahui pengaruh modal sosial terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul. Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik survai. Dari Kabupaten Bantul dipilih secara purposif satu sampel kecamatan yang memiliki budidaya bawang merah di kawasan pesisir pantai, yaitu Kecamatan Sanden. Dari Kecamatan Sanden dipilih 2 desa sampel secara purposif, yaitu desa Srigading dan desa Gadingsari. Dari masing-masing desa sampel diambil 20 petani sampel secara acak sederhana sehingga secara keseluruhan diperoleh 40 petani sampel sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,50% petani dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan narasumber untuk mendapatkan informasi pertanian tergolong rendah. Intensitas komunikasi interpersonal petani dengan berbagai narasumber tersebut dapat memperkuat modal sosial petani; dan selanjutnya modal sosial petani yang semakin kuat terbukti dapat meningkatkan adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: modal sosial, komunikasi interpersonal, adopsi, bawang merah, lahan pasir pantai

PENDAHULUAN

Isu hangat yang berkembang dalam pembangunan pertanian akhir-akhir ini adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Indonesia, di samping isu lain seperti perubahan iklim global, globalisasi, dan kedaulatan pangan. Dalam menghadapi pemberlakuan MEA di Indonesia, selain modal ekonomi diperlukan pula penguatan modal sosial dan budaya lokal masyarakat untuk menghadapi kompetisi antar sesama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Dengan modal sosial yang kuat diharapkan mampu menumbuhkan



UKM yang kuat, termasuk UKM yang bergerak di sektor pertanian. Untuk tumbuh dan berkembangnya UKM di sektor pertanian secara berkelanjutan membutuhkan dukungan kedaulatan pangan di Indonesia.

Dalam hal ini kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui pembangunan pertanian yang lebih fokus pada produk unggulan lokal yang lebih kompetitif, baik dari segi kualitas, harga, maupun kuantitas yang mampu merespons permintaan pasar, baik pasar domestik maupun pasar global. Salah satu upaya untuk mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Bantul adalah dengan memanfaatkan lahan pasir pantai untuk budidaya bawang merah. Di Kabupaten Bantul semula budidaya bawang merah hanya dilakukan petani di lahan sawah dan sejak akhir tahun 1990-an mulai dikembangkan di lahan pasir pantai yang berstatus sebagai tanah kasultanan (*sultan ground*).

Pemanfaatan lahan pasir pantai untuk usaha pertanian sendiri tidak begitu saja dapat digunakan karena lahan pasir pantai memiliki karakteristik tertentu yang harus diperlakukan secara khusus terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk usaha pertanian. Demikian pula apabila lahan pasir pantai akan dimanfaatkan untuk budidaya bawang merah. Teknologi untuk budidaya bawang merah di lahan pasir pantai cukup banyak dan selalu berkembang. Teknologi tersebut diperoleh baik dari lembaga penelitian maupun merupakan hasil pengembangan teknologi yang sudah ada di masyarakat petani.

Kemudian untuk menerapkan teknologi pertanian pada masyarakat tani memerlukan media komunikasi yang mendukung, baik media komunikasi cetak, elektronik, hingga media komunikasi interpersonal. Bahkan penggunaan media komunikasi interpersonal lebih efektif karena didapatkan dari saling tukar-menukar informasi yang diperoleh dari petani yang satu dengan yang lain secara langsung. Proses tukar menukar informasi juga dapat terjadi di dalam kegiatan kelompok maupun keluarga. Di samping bentuk komunikasi interpersonal dipandang lebih efektif dalam menyampaikan teknologi pertanian dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya pun dapat sekaligus digunakan sebagai penguatan modal sosial antar masyarakat tani. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal terhadap penguatan modal



sosial petani dalam adopsi teknologi budidaya bawang merah dan (2) pengaruh modal sosial terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul.

Menurut Hardjana (2003), komunikasi interpersonal (komunikasi antarpersonal) merupakan komunikasi tatap muka antar dua atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Komunikasi interpersonal kebanyakan berbentuk verbal disertai ungkapan-ungkapan nonverbal dan dilakukan secara lisan.

Sedangkan menurut Devito (1997) komunikasi interpersonal (komunikasi antarpribadi) didefinisikan dalam tiga komponen utama, yaitu:

- a. Komunikasi antarpribadi berdasar komponen: komunikasi antarpribadi dijelaskan dengan mengamati komponen-komponen utamanya.
- b. Komunikasi antarpribadi berdasar hubungan diadik: komunikasi antarpribadi didefinisikan sebagai komunikasi yang berlangsung di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas.
- c. Komunikasi antarpribadi berdasar pengembangan: kDalam hal ini komunikasi dilihat sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang bersifat tak-pribadi (impersonal) pada satu ekstrim menjadi komunikasi pribadi pada ekstrim yang lain.

Effendy (1986) mengemukakan bahwa pada hakikatnya komunikasi interpersonal atau antarpribadi adalah komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam hal mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis, berupa percakapan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wiryanto (2004), yang mengatakan bahwa sumber-sumber informasi di pedesaan dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, cenderung melalui jalur komunikasi antarpribadi. Dalam hal ini komunikasi interpersonal menggunakan jasa juru penerangan, penyuluh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Peranan keempat sumber informasi tersebut cukup penting sebagai agen perubahan dalam



menyebarkan ide-ide baru. Kredibilitas keempat sumber sangat terpecaya untuk mengajak orang lain dalam menerima ide-ide baru.

Komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif apabila masing-masing pihak yang berkomunikasi saling dapat dipercaya (*trust*), memiliki perilaku berpola (tatanan atau *norm*), dan satu sama lain memiliki jaringan hubungan yang luas (*network*). Dengan demikian komunikasi interpersonal yang efektif akan dapat membangun *trust*, *norm* dan *network* yang kuat. Ketiga komponen tersebut merupakan modal sosial bagi petani dalam melakukan adopsi teknologi budi daya bawang merah di lahan pasir pantai.

Menurut Putman (1993) cit Field (2010) modal sosial adalah bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Dalam memaknai modal sosial, Fukuyama (1995) lebih menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan didalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Mawardi, 2007). Sedangkan Coleman menyebutkan setidaknya terdapat tiga bentuk modal sosial, yaitu: (1) struktur kewajiban (*obligation*); (2) ekspektasi (*expeptation*); dan (3) kepercayaan (*trust wortbisness*) (Yustika, 2006).

Kelembagaan gotong-royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat merupakan manifestasi bangunan modal sosial yang muncul akibat interaksi sosial (hubungan sosial) yang terjadi secara masif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam Teori Hubungan Sosial (*The Social Relationship Theory*) deFleur menyatakan bahwa orang lebih banyak menggunakan komunikasi dari mulut ke mulut dibandingkan dengan menggunakan komunikasi massa untuk mendapatkan informasi (Depari dan MacAndrews, 1995). Bentuk komunikasi interpersonal tersebut sering digunakan oleh masyarakat petani di pedesaan



karena mereka saling percaya dan memiliki jaringan hubungan sosial yang luas sehingga tanpa mengandalkan media komunikasi massa informasi dapat tersebar luas dalam masyarakat.

Kelembagaan gotong royong merupakan basis tumbuhnya kelompok tani yang selama ini dijadikan media penyuluhan yang dipandang paling efektif dalam mendifusikan inovasi pertanian. Hal ini disebabkan karena kelompok tani dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, media kerja sama, media pengambilan keputusan kolektif, dan media untuk memperoleh legitimasi dari pihak eksternal dalam transaksi dan negosiasi secara kelembagaan. Dengan demikian diharapkan apabila modal sosial masyarakat kuat maka peranan kelompok tani akan semakin efektif dalam mendifusikan inovasi pertanian.

METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan teknik survei. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan pertimbangan bahwa kabupaten tersebut merupakan sentra pengembangan hortikultura terutama bawang merah lahan pasir pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Kabupaten Bantul dipilih Kecamatan Sanden sebagai sampel secara purposif karena kecamatan ini paling potensial untuk pengembangan budidaya bawang merah di lahan pasir pantai. Dari kecamatan Sanden dipilih dua sampel desa secara purposif, yaitu desa yang potensial dalam pengembangan budidaya bawang merah di lahan pasir pantai. Desa yang terpilih sebagai sampel adalah desa Srigading dan desa Gadingsari. Dari masing-masing desa sampel diambil satu sampel kelompok tani yang masih aktif melakukan budidaya bawang merah yaitu Kelompok Tani Manunggal dan Kelompok Tani Pasir Makmur. Dari masing-masing kelompok tani sampel diambil 20 petani sampel secara acak sederhana sehingga secara keseluruhan diperoleh 40 petani sampel sebagai responden. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Umur dan Pendidikan Petani Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Sebagian besar petani (92,50%) di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori usia produktif, yaitu berada di antara umur 15 hingga 64 tahun sedangkan sisanya sebesar 7,50% termasuk dalam kategori tidak produktif atau telah berusia lanjut. Dari segi pendidikan formal, 7,50% petani bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul yang tidak tamat SD, 27,50% petani masing-masing berpendidikan SD dan SMP, 35% petani berpendidikan SMA, dan 2,50% petani berpendidikan Perguruan Tinggi.

Komunikasi Interpersonal Petani dalam Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Dalam budidaya bawang merah di lahan pasir pantai petani membutuhkan informasi tentang teknologi yang digunakannya. Untuk memperoleh informasi tersebut petani melakukan komunikasi interpersonal dengan penyuluh, ketua kelompok, pamong desa, sesama anggota kelompok, pedagang, pembina, peneliti, dan mantra tani, yang intensitasnya berbeda-beda. Tingkat intensitas komunikasi interpersonal petani disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komunikasi Interpersonal Petani dalam Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai

Narasumber	Interval Skor	Skor Rerata Capaian	Tingkat Intensitas (%)
Penyuluh	0-4	2,70	67,50
Ketua Kelompok	0-3	2,22	74,00
Pamong Desa	0-3	1,37	45,67
Sesama Anggota	0-3	2,32	77,33
Pedagang	0-3	1,75	43,75
Pembina dari Dinas	0-4	1,15	28,75
Peneliti BPTP	0-3	1,00	33,33
Peneliti Perguruan Tinggi	0-3	0,88	29,17
Mantri Tani	0-4	0,85	21,25
Jumlah	0-30	14,24	
Rerata			46,75

Sumber: Analisis Data Primer 2015



Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat intensitas komunikasi interpersonal petani dalam budidaya bawang merah sebesar 46,75% atau kadang-kadang dilakukan. Paling intensif komunikasi interpersonal petani dilakukan dengan sesama petani, yaitu sebesar 77,33% atau termasuk dalam kategori sering dilakukannya, dan yang paling rendah intensitasnya adalah komunikasi dengan mantra tani yaitu sebesar 21,25% atau jarang dilakukan.

Pengaruh Media Komunikasi Interpersonal terhadap Penguatan Modal Sosial Petani dalam Adopsi Teknologi Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Modal sosial bagi petani merupakan salah satu kekuatan masyarakat petani dalam menghadapi MEA yang diberlakukan mulai awal tahun 2016. merupakan dasar dari seseorang untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam kajian ini kekuatan modal sosial akan diukur melalui tiga indikator, yaitu: kepercayaan (*trust*) antar petani dan petani dengan *stakeholders*, norma atau tatanan (*norm*) yang berlaku di masyarakat, dan jaringan (*network*) kerjasama dalam masyarakat. Modal sosial petani di lahan pasir pantai dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Modal Sosial Petani di Lahan Pasir Pantai

Indikator	Interval Skor	Skor Rerata Capaian	Kekuatan Modal Sosial (%)
Kepercayaan	0-50	38,48	76,96
Norma	0-70	46,06	65,07
Jaringan	0-139	27,12	21,02
Jumlah	0-259	111,66	
Rerata			54,35

Sumber : Analisis Data Primer, 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial petani di lahan pasir pantai sebesar 54,35% atau termasuk dalam kategori sedang. Apabila dirinci lebih lanjut maka komponen yang paling lemah adalah jaringan kerja sama yaitu sebesar 21,02% atau termasuk kategori lemah, sedangkan komponen kepercayaan dan norma masing-masing mencapai 76,96% dan 65,07% atau termasuk dalam kategori kuat.



Komunikasi interpersonal dapat membuka jaringan hubungan sosial antar petani dengan sesama petani dan dengan *stakeholders* lainnya sehingga diharapkan dapat memperkuat modal sosialnya terlebih apabila dalam melakukan komunikasi interpersonal dilandasi dengan rasa saling percaya. Oleh karena itu, dalam penelitian diduga komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap penguatan modal sosial. Untuk membuktikan dugaan tersebut digunakan analisis regresi linier sederhana, yang hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Penguatan Modal Sosial Petani dalam Adopsi Teknologi Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig	Ket
Komunikasi Interpersonal (X ₁)	3,889	3,885	0,000	*
Konstanta	53,008		0,001	
R square	0,284			
Adjusted square	0,265			
F hitung	15,094			
F table	1,514			

Keterangan : *signifikansi pada taraf 1%

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh nyata terhadap penguatan modal sosial, artinya semakin intensif petani dalam melakukan komunikasi interpersonal maka modal sosialnya semakin kuat dalam adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul.

Pengaruh Modal Sosial Petani terhadap Adopsi Teknologi Budidaya Bawang Merah Di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Adopsi teknologi adalah proses seseorang dari mulai mengenal sampai menerapkan teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai Kabupaten Bantul. Unsur-unsur teknologi yang diadopsi meliputi: pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, dan penyakit,



dan pasca panen. Untuk mengetahui sampai sejauh mana unsur-unsur teknologi tersebut diadopsi oleh petani dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Adopsi Teknologi Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Unsur Teknologi	Interval Skor	Skor Rerata Capaian	Tingkat Adopsi (%)
Pembibitan	0-24	18,60	75,95
Pengolahan Tanah	0-21	16,60	78,42
Penanaman	0-18	14,90	80,47
Pengairan	0-4	3,60	90,00
Pemupukan	0-18	14,00	77,33
Pengendalian HPT	0-8	6,90	65,33
Pasca Panen	0-5	3,30	66,67
Jumlah	0-98	77,90	
Rerata			76,31

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2015

Dari Tabel 4 dapat diketahui adopsi teknologi dalam pengembangan inovasi budidaya bawang merah tergolong tinggi yaitu sebesar 76,31%. Unsur teknologi yang paling tinggi diadopsi adalah pengairan (90%). Hal tersebut karena hampir seluruh petani lahan pasir dalam mengairi lahannya menggunakan inovasi baru, yaitu dengan membuat sumur buatan di setiap petak lahannya dan menggunakan selang/pipa yang dihubungkan ke mesin pompa air. Sementara itu unsur teknologi yang paling rendah diadopsi adalah pengendalian HPT (65,33%). Hal tersebut karena sebagian besar petani masih menggunakan pestisida tanpa memperhitungkan ambang batas ekonomi.

Faktor yang diduga berpengaruh terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah adalah modal sosial, peran penyuluh, peran ketua kelompok, peran tokoh masyarakat, dan peran kelompok tani. Untuk membuktikan hipotesis tersebut digunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *backward*, yang hasilnya disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa modal sosial dan peran tokoh masyarakat berpengaruh nyata terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah. Modal sosial berpengaruh positif, artinya semakin kuat modal sosial maka semakin tinggi tingkat adopsi teknologi budidaya bawang merah di



lahan pasir pantai sedangkan peran tokoh masyarakat berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi peran tokoh masyarakat maka semakin rendah tingkat adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin formal seperti kepala desa dan kepala dusun ternyata tidak aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi pertanian sehingga penguasaannya terhadap teknologi pertanian terbatas. Dengan demikian informasi tentang teknologi pertanian yang disampaikan kepada petani kadang-kadang tidak sejalan dengan perkembangan teknologi yang inovatif dan bercirikan spesifik lokal. Akibatnya peranan tokoh masyarakat berdampak dapat menurunkan tingkat adopsi petani terhadap teknologi yang aktual.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Mengenai Faktor-faktor yang diduga Mempengaruhi Adopsi Teknologi Budidaya Bawang Merah di Lahan Pasir Pantai Kabupaten Bantul

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig	Ket
Modal Sosial (X ₁)	0,381	3,092	0,004	*
Peran Penyuluh (X ₂)	0,000	0,000	0,999	NS
Peran Ketua (X ₃)	0,281	1,772	0,085	NS
Peran Tokoh Masyarakat (X ₄)	-0,887	-3,781	0,001	*
Peran Kelompok (X ₅)	-0,199	-0,860	0,396	NS
Konstanta	39,651		5,116	
R Square	0,507			
Adjusted R Square	0,434			
F Hitung	6,986			
F Tabel	1,514			

Keterangan: * Signifikansi pada $\alpha = 1\%$

NS Non Signifikansi pada $\alpha = 1\%$

Sumber: Analisis Data Primer 2015

Di samping itu hasil analisis regresi berganda tersebut juga dapat disimpulkan bahwa peranan penyuluh pertanian, peranan kelompok, dan peranan ketua kelompok tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir Kabupaten Bantul.



PENUTUP

Komunikasi interpersonal petani untuk mendapatkan informasi teknologi pertanian dilakukan dengan sesama petani, penyuluh, pembina dari Dinas terkait, mantra tani, pedagang, dan peneliti. Komunikasi interpersonal paling intensif terjadi antar sesama petani, sedangkan paling jarang dilakukan dengan mantri tani. Sedangkan intensitas petani dalam melakukan komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap penguatan modal sosial petani dalam adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai; semakin intensif petani melakukan komunikasi interpersonal maka semakin kuat modal sosial petani. Lalu, modal sosial berpengaruh terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai; dengan simpulan bahwa semakin kuat modal sosial petani maka semakin tinggi tingkat adopsi terhadap teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai. Demikian pula peran tokoh masyarakat juga berpengaruh terhadap adopsi teknologi budidaya bawang merah, tetapi pengaruhnya negatif yaitu semakin tinggi peran tokoh masyarakat maka semakin rendah tingkat adopsi teknologi budidaya bawang merah di lahan pasir pantai. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tokoh masyarakat yang merupakan pemimpin formal seperti kepala desa dan kepala dusun ternyata tidak aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi pertanian sehingga penguasaannya terhadap teknologi pertanian terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Depari, Eduard dan Colin MacAndrews (ed), 1995. Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Devito, A, Joseph.1997. Komunikasi Antar Manusia. Professional books. Jakarta
- Effendy Uchjana Onong. 1986. Dinamika Komunikasi. Remadja Karya. Jakarta.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Vertues and The Creation of Property*. Free Press. New York.
- Hardjana, Agus. 2003. Komunikasi Intrapersonal dan Komunikasi Interpersonal. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Mawardi, M. 2007. Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Volume 3 No. 2, Juni 2007: 5-14



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: *Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Yustika, Ahmad, Erani. 2006. Ekonomi Kelembagaan: *Definisi, Teori, dan Strategi*. Banyumedia. Publishing. Malang.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Tema 3

Pembangunan Masyarakat Perdesaan dalam Menghadapi Persaingan Global di Era MEA



PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI KORBAN KEKERASAN DI PONOROGO (Suatu Kajian Teoritis dan Empiris)

Muhamad Fajar Pramono

Dosen ISID/ UNIDA Gontor Ponorogo

E-mail:isidmfpramono@yahoo.co.id

mfpramono@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Di Kabupaten Ponorogo kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan pada kasus yang tidak diketahui atau dilaporkan ke kepolisian dan dipublikasikan melalui media tidak mudah untuk diteksi. Oleh karena itu diyakini bahwa perilaku tindak kekerasan tersebut merupakan fenomena gunung es, dimana yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibanding dengan yang tersembunyi. Kenyataan ini ternyata merupakan fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Tujuan yang akan diperdalam dan dikaji dalam studi ini, yaitu: untuk mengetahui apakah fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan itu karena faktor kemiskinan, atau karena faktor lain dan juga ingin mengetahui kondisi riil kekerasan pada anak dan perempuan di Ponorogo dan bagaimana solusinya. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan literatur dan pendekatan empiris. Hasilnya diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak semata-mata karena faktor kemiskinan, justru dalam konteks di Ponorogo yang paling dominan adalah faktor family stress.

Kata Kunci: Perlindungan, Perempuan, Anak dan Kekerasan di Ponorogo

ABSTRACT

In Ponorogo, violence against children has increased both quantitatively and qualitatively. As for the case which is unknown or reported to the police and publicized through the media is not easy to detect. Therefore, it is believed that the violence is just like an iceberg with the surface far less than the underwater. It turns out that the case is a common phenomenon occurring in Indonesia. The objectives of the study are : to determine whether the violence against children and women is because of poverty or other factors; and to know for sure the violence against children and women in Ponorogo and its solution. The method used is literary and empirical approach. The result shows that violence is not merely because of poverty. In the context of Ponorogo, the most dominant factor is family stress.

Keywords: Protection, Women, Children and Violence in Ponorogo

PENDAHULUAN

Berbicara kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya dimaknai dengan **perdagangan perempuandan anak (trafficking)**. Bahkan arti *trafficking*



dapat ditemukan dalam Konvensi PBB tentang pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisasi beserta Protokolnya (*The United Nations Convention Against Transnational Organised Crime dan Protocol To Prevent, Surpress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang ditandatangani di Palermo, Italia 2002. Selain itu pengertian serupa juga dapat ditemukan dalam Keppres No. 88 th 2002 tentang RAN P3A dan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Namun pengertian kekerasan tersebut tidak sepenuhnya tepat, berbeda sebagaimana hasil Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi (1997), yang berhasil menggalang konsesus internasional atas pentingnya mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban kekerasan, yaitu: "*Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib)*".

Dalam kaitan itu penulis condong memakai bentuk-bentuk sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2004. Sukerti (2005) dalam laporan penelitiannya di Kota Denpasar mengatakan sebagai berikut : 1) Kekerasan fisik. Contoh : dipukul dengan tangan, dipukul dengan sendok, ditentang, dicekik, dijambak, dicukur paksa, kepala dibenturkan ke tembok. 2) Kekerasan psikologis. Contoh : diancam, disumpah, pendapat korban tidak pernah dihagai, dilarang bergaul, tidak pernah diajak timabang-pendapat, direndahkan dengan mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan posisi perempuan. 3) Kekerasan ekonomi. Contoh : membebankan biaya rumah tangga sepenuhnya kepada istri (istri yang bekerja secara formal) atau tidak memberikan pemenuhan finansial kepada istri. Jadi menelantarkan rumah tangga.

Maka yang tepat konsep kekerasan yang digunakan dalam konteks Ponorogo dengan merujuk Konferensi Dunia Wanita III di Nairobi (1997) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam



Rumah Tangga (PKDRT) bahwa kekerasan adalah yaitu *setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi*".

Buramnya potret anak Indonesia dapat dilihat dari data tahun 2002 yang di sajikan Edi Suharto (2006) sebagai berikut : Anak usia 6 – 12 tahun yang paling sering mengalami kekerasan seksual (*sexual abuse*) sebanyak 33% dan emosional (*mental abuse*) 28,8%. Mengalami kekerasan fisik (*physical abuse*) 24,1 %. Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah 29 kasus, di jalanan 79 kasus, Sekolah 10 kasus, lembaga keagamaan 2 kasus dan sektor perekonomian 21 kasus. Kekerasan seksual terjadi di rumah 48,7 %, tempat umum 6,1 %, sekolah 4,1 %, tempat kerja 3,0 %, lain-lain 0,4%.

Komisioner Komisi Nasional Perempuan Saur (2015) Tumiur mengatakan: angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam diskusi catatan akhir tahun Komnas Perempuan di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2015. Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Pola yang terjadi selama ini masih didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal sebanyak 68 persen, dan kekerasan yang terjadi dalam komunitas sebanyak 30 persen.

Di Kabupaten Ponorogo kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif. Menurut catatan Polres Ponorogo diketahui bahwa tahun 2005 terjadi 4 kasus yang dilaporkan ke Polisi, tahun 2006 ada 4 kasus, tahun 2007 ada 13 kasus dan tahun 2008 sampai bulan maret tercatat 6 kasus dalam penanganan pihak berwajib.

Berdasarkan latar belakang di atas, ada yang akan diperdalam dan dikaji dalam studi ini, yaitu: 1) Apakah fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan itu karena faktor kemiskinan, atau karena faktor lain? 2) Bagaimana kondisi riil kekerasan pada anak dan perempuan di Ponorogo dan bagaimana solusinya?



METODE PENELITIAN

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah: 1) **Pendekatan Literatur**: mengkaji berbagai literatur dan berbagai produk hukum, termasuk konvensi, konvenan dan protokol serta berbagai hasil penelitian terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. 2) **Pendekatan Empiris**: eksplorasi, konfirmasi, komparasi, verifikasi dan validasi berbagai kasus yang terekam/ dilaporkan/ ditangani oleh stakeholder dengan memanfaatkan hasil penelitian yang ada, terutama di Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia sendiri terjadi banyak masalah sosial yang tidak kunjung terselesaikan, salah satunya adalah masalah **kemiskinan**. Dilihat dari jumlah penduduk miskin menurut data BPS, pada Februari 1999 jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan mencapai 47,9 juta jiwa atau 23,4 persen dan pada Februari 2004 jumlahnya diperkirakan turun menjadi 36,1 juta jiwa atau 16,7 persen. Dengan penurunan demikian, jumlah penduduk miskin tahun 2025 diperkirakan sebanyak 15,2 juta jiwa atau 5,3 persen dari perkiraan jumlah penduduk tahun 2025. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk miskin di Ponorogo untuk tahun 2014 sebanyak 99.362 atau 11,53% dari jumlah penduduk Ponorogo yakni 855.281.

Kemiskinan membawa kemunduran secara signifikan bagi anak. Kehidupan yang layak sukar untuk diraih pada kondisi miskin. Kemiskinan sering menjadi lingkaran setan yang serius bagi kelangsungan hidup anak. Bahkan, mereka pun akan kehilangan akses untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang pada gilirannya akan semakin menambah beban ketergantungan kepada orang lain (Zill 1993, Duncan et al 1994, McLanahan & Sandefur 1994). Implikasinya, dengan tingginya tingkat deprivasi ekonomi yang dialami anak-anak akan menyebabkan lestarnya kemiskinan ketika mereka dewasa nantinya (Teddy Lesmana, 2007).

Kaum perempuan adalah kelompok rentan untuk menjadi korban kejahatan dan bermula dari persoalan kemiskinan ini. Diskriminasi yang dialami



oleh kaum perempuan berdasar pada persoalan kemiskinan, menjadi penting untuk dicermati. seyogyanya penanggulangan Kemiskinan, pembangunan kesejahteraan sosial, dan pembangunan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penanggulangan Kemiskinan secara lebih adil, merata dan berkualitas.

Fenomena ini lebih memperkuat dari pendapatnya Siti Fathimah (1992) bahwa faktor pendorong atau penyebab terjadinya **kekerasan** atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak-anak adalah: **Faktor ekonomi, atau kemiskinan**, masalah keluarga, faktor perceraian, kelahiran anak di luar nikah, permasalahan jiwa atau psikologis, dan tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Hanya saja fenomena ini (faktor kemiskinan) kurang berpengaruh secara signifikan terhadap tindak kekerasan di Ponorogo.

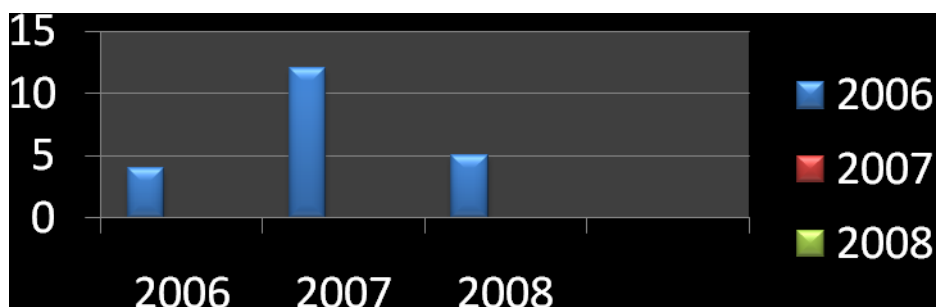
Banyak teori sosial yang menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Selain faktor kemiskinan, salah satunya adalah suatu teori yang di kenal berhubungan dengan stress dalam keluarga (*family stress*). *Family therapy* tidak secara langsung muncul dari kajian psikologi, melainkan berawal dari teori *general systems* dan *cybernetics*. Norbert Wiener, seorang matematis dari *Massachusetts Institute of Technology* menginisiasi pengembangan teknologi dalam perang di awal 1940-an, mulai mempelajari mesin, membandingkan hal tersebut dengan organisme hidup untuk memahami dan mengendalikan sistem yang kompleks (Becyar & Becyar, 2003).

Sebagai gambaran bahwa sebanyak 29 dari 303 desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sebagai desa merah atau miskin pada 2007 ini. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan 2001 di mana ada sebanyak 40 yang masuk kategori miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Ponorogo, desa-desa tersebut sebagian besar berada di Kecamatan Badegan dan Sukorejo. Disisi lain tingkat tindakan kekerasan selama tahun 2014-2015 paling tinggi di kecamatan Ponorogo 12 kasus atau 18% dari 66 kasus di Ponorogo. Sedangkan kecamatan



Badegan dan Sukorejo yang sinyalir sebagai kecamatan miskin, masing-masing untuk kecamatan Bedegang 2 kasus atau 3% dan kecamatan Sukorejo sebanyak 3 kasus atau 5%

Di Kabupaten Ponorogo kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan data dari Tim KPAA Kabupaten Ponorogo dapat diketahui perkembangan kasus kekerasan pada anak sebagai berikut : tahun 2006 sebanyak 4 kasus, tahun 2007 ada 12 kasus dan sampai april 2008 ada 5 kasus (KPAA, 2008). Sedang pada kasus yang tidak diketahui atau dilaporkan ke kepolisian dan dipublikasikan melalui media tidak mudah untuk diteksi. Oleh karena itu diyakini bahwa perilaku tindak kekerasan tersebut merupakan *fenomena gunung es*, dimana yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibanding dengan yang tersembunyi. Kenyataan ini ternyata merupakan fenomena umum yang terjadi di Indonesia.



Gambar 1. Kecenderungan kekerasan di Ponorogo

Sumber: Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAA) Kabupaten Ponorogo, 2008.

Urutan tertinggi dalam kasus kekerasan yang menimpa anak berupa kekerasan fisik (*physical abuse*) yaitu (33%), disusul dengan pencabulan (*sexual abuse*) sebesar 29%. Kekerasan kejiwaan atau *emotional abuse / Psychis abuse* dan *sexual abuse* (khususnya kasus perkosaan), masing-masing sebesar 14 %, dan yang terakhir berupa *sexual abuse* yang dilakukan dengan saudara sedarah (*incest*) sebesar 10 % (tabel 1).



Tabel 1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

NO	Bentuk Kekerasan	Jumlah	Prosentase
1.	Kekerasan Fisik	7	33
2.	Pencabulan	6	29
3.	Perkosaan	3	14
4.	Psikis/Kejiwaan	3	14
5.	INCEST(Sexual Abuse)	2	10
		21	100

Sumber: Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAA) Kabupaten Ponorogo, 2008.

Dalam konteks Ponorogo menarik untuk dicermati bahwa pelaku kekerasan dari segi usia sebesar 57% dilakukan oleh pelaku yang berusia antara 41-50 tahun, disusul usia 51-60 tahun sebanyak 19 %, kemudian antara usia 16-30 tahun sebanyak 10% dan usia antara 32-40 tahun sebanyak 5% (tabel 2). Sedangkan dari sisi korban sebanyak 52% berusia antara 11-15 tahun dan sebanyak 24% pada usia antara 4,5 – 10 tahun.

Tabel 2. Pelaku Kekerasan Berdasarkan Usia

NO	Usia Pelaku	Jumlah	Prosentase
1.	51-60	4	19
2.	41-50	12	57
3.	31-40	1	5
4.	21-30	2	10
5.	0-20	2	9
		21	100

Sumber: Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAA) Kabupaten Ponorogo, 2008.

Oleh *Bernice Nengeartein* (dalam Callhoun dan Acocella, 1990) dikatakan bahwa periode ini (usia 41-50 tahun) merupakan suatu masa ketika orang dapat merasa puas dengan keberhasilannya. Jadi umumnya kondisi pelaku secara ekonomi relatif mapan. Itu artinya, bukan faktor kemiskinan, tetapi faktor lain, yaitu: *family stress*. Sedangkan dilihat dari kedekatan antara pelaku dan korban diketahui bahwa pelaku tindak kekerasan 90% dilakukan oleh keluarga dekat dan sebanyak 10% dilakukan oleh orang lain (tabel 2).



Tabel 3. Pelaku berdasarkan kedekatan dengan Korban

No.	Kedekatan dengan Korban	Jumlah	Jumlah
1.	Orang dekat	19	90%
2.	Orang lain	2	10%
Jumlah		21	100%

Sumber: Tim Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAA) Kabupaten Ponorogo, 2008.

Adapun rinciannya diketahui yang dimaksud orang dekat (90%), yang paling banyak adalah guru (29%), ayah kandung (19%), tetangga (14%), orang lain, paman, pacar (10%) dan ayah tiri, kakak ipar (5%) dan lain-lain (23%). Menyikapi hal tersebut para ahli berpendapat bahwa perubahan yang terjadi di dalam pola interaksi keluarga yang paling berpengaruh terhadap anak dan perkembangannya ada beberapa faktor, diantaranya adalah: 1) Faktor perceraian, perpisahan, dan pernikahan kedua atau ketiga meningkat. 2) Faktor anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah daripada di dalam rumah. 3) Ikatan dengan anggota keluarga yang lebih longgar dan kontak antara anggota keluarga semakin berkurang (Hurlock, 1989; Ollenburger, 1996; Sanderson, 2000).

Di antara dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, stigma internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempuan tidak mau lagi berkeluarga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, stigma eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan sosial.



PENUTUP

Uraian di atas menjelaskan bahwa tindakan kekerasan tidak semata-mata karena faktor kemiskinan, justru dalam konteks di Ponorogo yang paling dominan adalah faktor *family stress*. Jadi, sudah seharusnya Pemerintahan Kabupaten Ponorogo tidak melihat semata-mata atau berfokus pada persoalan faktor kemiskinan. Justru ke depan yang harus mendapatkan perhatian adalah faktor keluarga, khususnya yang terkait dengan masalah ketahanan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2007). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2007*. Ponorogo : BPS.
- Baker, David, (1980), "Memahami kemiskinan di Kota". Prisma, 6 98, hal.3-8.
- Cahoun, J.F & Acocella (1990). *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan 3th ed (terj)*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Edi Suharto (2003). *Pendekatan Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Masalah Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional Penanggulangan Masalah Anak, "Eradication Child Problems : Policy, Program and Strategy", 5 Juli di Wisma Buana Kampus UNILABandung.
- Fatimah, Siti Nur, (2012). *Dinamika Konsep Diri Pada Orang Dewasa Korban Child Abuse*. Jurnal Psikologi, Vol. I, No. I.
- KPPA.(2006). *Hasil Rapat Kerja Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo*.
- Lesmana, Teddy (2007). Ketahanan Pangan dan Pemberantasan Kemiskinan dalam <http://sangpenerang1985.wordpress.com> (diakses 14 September 2016, jam 9:53).
- Miler, Susan L., (2000), "Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered" dalam *It is a Crime, Women and Justice*, Roslyn Muraskin, Long Island University, Upper Sadle River, New Jersey.
- Polres Ponorogo. (2008). *Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2008*.
- Sugeng Wibowo, (2010), "Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Ponorogo (Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik)" dalam *Jurnal Dimensi*, Vol.2, No.2 , Juli.
- Sukerti, Ni Nyoman, (2005), "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Kajian Dari Perspektif Hukum Dan Gender (Studi Kasus Di Kota Denpasar)", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Udayana.



KEMANDIRIAN EKONOMI SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN KAUM PEREMPUAN DI DESA REJODADI KECAMATAN CIMANGGU CILACAP

S. Bekti Istiyanto, Nuryanti

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed Purwokerto

Email: bektiis@yahoo.com, ry4nti_nyun@yahoo.com

ABSTRAK

Lemahnya posisi kaum perempuan dibandingkan para laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama seringkali disebabkan oleh persoalan ekonomi yang tidak berdaya. Tujuan untuk memberdayakan kaum perempuan secara ekonomis pada akhirnya akan menyeimbangkan posisinya dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan dalam keluarga. Karenanya perencanaan sebuah strategi rekayasa sosial melalui program pendampingan dan pelatihan ekonomi produktif yang menyesuaikan dengan sumber daya alam dan kemampuan kaum perempuan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam penelitian digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan FGD. Informan yang terpilih berasal dari tokoh masyarakat dan pengurus kelompok-kelompok sosial kaum perempuan Desa Rejodadi yang memahami permasalahan. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa pertama, motivasi dan antusiasme kaum perempuan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi mandiri membuat hambatan-hambatan yang ada tidak terlalu dirasakan; kedua, strategi pemberdayaan kaum perempuan dapat dinilai berhasil dalam bentuk terbentuknya dua buah usaha ekonomi mandiri yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga; ketiga, pemberdayaan ekonomi meskipun tidak mengubah posisi kaum perempuan secara radikal dalam pengambilan keputusan keluarga. Penghormatan terhadap posisi suami dalam keluarga masih menjadi pemikiran yang sangat kuat dalam benak kaum perempuan.

Kata kunci: perempuan, strategi pemberdayaan, kemandirian ekonomi

PENDAHULUAN

Diberlakukannya zona Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak semuanya dipahami oleh masyarakat Indonesia. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak memahami proses pelaksanaannya seperti apa. Situasi seperti ini semestinya harus ditindak lanjuti dengan beragam cara dari pemerintah kepada warganya demi meningkatkan pemahaman yang utuh, sehingga bisa mengambil langkah terbaik dalam menyikapinya. Namun nampaknya dikarenakan masih banyak pemahaman masyarakat, terutama



pedesaan, yang belum mengerti betul pemberlakuan MEA menjadikan mereka seperti tidak acuh tentang isu ini.

Ketidak pedulian pemberlakuan MEA pada masyarakat Indonesia sangat tergantung dengan upaya sosialisasi dan pelaksanaannya yang terhitung masih sangat minim ataupun kalau ada sangat terbatas diakses atau diterima oleh kebanyakan masyarakat. Di Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yang menjadi lokasi penelitian ini sebagai misalnya, dalam hal kesetaraan gender dalam pengambilan sebuah keputusan keluarga sebagai salahsatu dampak pemberlakuan MEA belum terdampak secara nyata akan mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Nuryanti, Hamidah dan Bestari (2015) dimana dalam pengambilan keputusan untuk pembuatan tempat MCK/jamban bagi keluarga masih sangat didominasi oleh laki-laki sebagai pencari utama nafkah keluarga. Keputusan utama penggunaan pendapatan keluarga masih dihabiskan untuk kebutuhan primer yaitu makan dan pendidikan anak, sedangkan kebutuhan MCK/jamban keluarga baru menjadi skala berikutnya yang belum termasuk prioritas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Di lain pihak, ada tuntutan bahwa perempuan harus memiliki daya saing dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Tuntutan agar perempuan memiliki kemampuan mandiri ini sebagai misal, dikupas dalam acara Hari Perempuan Sedunia dengan tema “Berbagi Wacana, Perempuan Sejahtera di Era MEA” di Kota Bandung, Sabtu, 5 Mei 2016. Ketiga narasumber pembicara dalam kegiatan ini yaitu Ratih Ananda Puteri, Violetta Simatupang, Otje Popong Djundjunan, dan Agus Santosa (dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/03/05/363355/memasuki-era-mea-perempuan-harus-berdaya-saing>).

Posisi ketidak mandirian dan subordinat kaum perempuan terutama di masyarakat tradisional pedesaan di banyak daerah yang bersumber pada budaya Jawa dalam pengambilan sebuah keputusan keluarga tidak dilepaskan dari beberapa penyebab. Merujuk pendapat Wildan (2009), penyebab-penyebab tersebut antara lain: pendidikan yang kurang seimbang dengan kaum laki-laki,



fungsi utama kaum laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga, dan faktor budaya kaum perempuan untuk lebih tunduk atas keputusan laki-laki sebagai pemimpin keluarga.

Kondisi-kondisi yang terjadi seperti di Desa Rejodadi tersebut di atas menjadi latar belakang mengapa penelitian lanjutan ini dilakukan. Apakah diperlukan sebuah upaya khusus untuk tidak sekedar menyadarkan dan memahami kaum perempuan dalam berkiprah di masyarakat? Atau perlukan sebuah strategi pemberdayaan tertentu yang dipilih dan dilaksanakan sebagai sebuah jalan pintas memotong dan mengubah keadaan yang relatif stabil dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama? Ataukah diperlukan sebuah upaya kemandirian ekonomi sebagai cara terpadu untuk membantu mencari solusi atas persoalan kesetaraan peranan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga?

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Itu semua kemudian dikaitkan dengan pemberlakuan MEA dan dampaknya bagi masyarakat desa terutama kaum perempuan. Dipilihnya Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap sebagai lokasi penelitian didasari sebagai lokasi penelitian lanjutan dan desa ini telah mendapat program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) pada tahun 2012 yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program ini mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang berujung kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan tema penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan sangat erat (Sitompul, 2007). Kedudukan komunikasi dalam konteks pembangunan adalah sebagai satu bagian dari pembangunan dan komunikasi sebagai satu set variabel yang berperan dalam membawa perubahan itu sendiri (Roy dalam Jayaweera dan Anumagama, 1987). Karena itu,



sebuah strategi pembangunan akan menentukan strategi komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara (Sitompul, 2007).

Komunikasi dalam pembangunan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan menumbuhkan motivasi dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan membangun dengan jalan membuka saluran - saluran komunikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan dan peningkatan kemampuan yang mereka miliki dan sekaligus menempatkan mereka sebagai pelaku aktif. Dalam proses komunikasi tersebut perlu dilakukan pendekatan perubahan masyarakat agar proses dan tujuan komunikasi yang direncanakan dapat tercapai (Ikhrumullah, 2014).

Perubahan masyarakat sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah menjadi lebih baik. Seringkali perubahan itu dikenal dengan istilah pemberdayaan (empowerment) masyarakat. Menurut Ife (dalam Martono, 2011) konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Kartasasmitha (1995), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Intinya bahwa pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.

Setiap kondisi memiliki potensi yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan melepaskan diri dari keterbelakangan dan ketergantungan. Masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat tersebut, karena masyarakat



merupakan subyek dari pemberdayaan. Jadi pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Ikhramullah, 2014).

Persoalan pemberdayaan hingga menghasilkan kemandirian dari masyarakat tersebut juga sangat terkait dengan kaum perempuan. Karena dalam perspektif yang mayoritas ada di benak masyarakat Indonesia, kaum perempuan sering hanya menjadi obyek penderita dalam sebuah kegiatan. Sebagai ukuran bisa dilihat dari tingkat pendidikan, daya pengetahuan dan keterampilan. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa siapkah kaum perempuan dipersaingkan dengan kaum laki-laki? Tentu saja karena ada anggapan sosial di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugas utamanya sangat terkait dengan dapur menjadikan kaum perempuan lebih sulit untuk berdaya.

Dari statistik pendidikan perempuan sebagai contohnya, hingga saat ini, masih ada sekitar 5,1 juta perempuan Indonesia yang buta huruf. Angka partisipasi sekolah untuk jenis kelamin perempuan, terutama untuk pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, juga lebih rendah: SMA (18,59 %), Diploma (2,74 %), dan Universitas (3,02 %) (Rini, 2015).

Tuntutan pemberdayaan bagi kaum perempuan di era MEA ini sebenarnya telah dikonsepsikan. Menurut Nuraini (2015) konsepsi pemberdayaan ekonomi perempuan di era MEA itu antara lain:

1. MEA menjadi pendorong meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.
2. MEA menjadi pemberdayaan ekonomi perempuan (Pengurangan kemiskinan perempuan, kemandirian ekonomi perempuan, aliran modal untuk perempuan, lapangan kerja untuk perempuan, pasar yang lebih luas untuk berbagai produk).
3. Perempuan menjadi maju dan mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dengan adanya konsep pemberdayaan masyarakat dalam pemberlakuan MEA bagi kaum perempuan dibandingkan dengan realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya jurang kesenjangan yang sangat lebar. Karena itu, pemilihan strategi komunikasi yang mampu memberdayakan masyarakat



khususnya secara tepat perlu dipikirkan dengan bijaksana. Keberadaan MEA bukanlah sebagai penghambat proses pemberdayaan namun seyogyanya menjadi langkah pemercepat perubahan ke arah yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang lebih menekankan pada suatu proses, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, fokus sangat berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga masalah penelitian pada hakikatnya merupakan fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pemikiran yang bersifat Empirical Inductive, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini, ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan (Vredenberg, 1983).

Pemilihan informan dilakukan dengan cara sengaja (purposive sampling), yakni peneliti memilih informan, dalam hal ini para tokoh masyarakat dan pengurus kelompok-kelompok sosial kaum perempuan Desa Rejodadi yang memahami permasalahan dan berperan serta dalam aktifitas kemasyarakatan. Untuk teknik pengumpulan data sesuai pendapat Kasto (1998) digunakan observasi langsung, wawancara mendalam (Indepth Interview), Focus of Group Discussion (FGD), dan analisa Dokumentasi.

Untuk menguji kemantapan dan keabsahan data yang telah berhasil dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Patton, triangulasi data adalah usaha membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (dalam Moleong, 2000: 330).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan satu cara di antara empat jenis triangulasi yang disebut Denzim (dalam Moleong, 2000: 178) yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Adapun cara-cara yang telah dilakukan adalah:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.



2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian awal yang telah diperoleh mengungkapkan tentang beberapa kondisi yang terjadi pada masyarakat Desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap yaitu tingkat kesehatan masyarakat dalam tingkatan yang rendah. Ukuran rendah tersebut dilihat dari dua hal utama yaitu sumber air bersih yang masyarakat gunakan dan ketersediaan tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di sekitar tempat tinggal mereka. Karena tercatat kurang lebih 1200 KK yang tinggal menetap ternyata hanya sekitar 40KK pada tahun 2012 yang mempunyai sumber air bersih sendiri dan meningkat di angka 270an KK pada tahun 2015. Untuk jumlah kepemilikan satu kamar mandi baik permanen maupun nonpermanen di sekitar tempat tinggal mereka juga masih terbatas. Maka tidak mengherankan bila dengan kondisi demikian penyakit kulit, diare dan muntah-muntah merupakan sebuah situasi yang umum terjadi di Desa Rejodadi. Data berikutnya juga mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan di pos kesehatan desa lebih jarang mengobati penyakit lain kecuali pelayanan kehamilan dan ibu bersalin.

Keberadaan air bersih dan tuntutan sanitasi yang sehat sebenarnya sudah menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Salah satu bentuknya adalah ikut mensukseskan keberadaan program PAMSIMAS yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2008. Desa Rejodadi sendiri termasuk desa yang mendapatkan bantuan baik berbentuk sosialisasi maupun bantuan fisik sebagai stimulan kebutuhan air bersih bagi masyarakat mulai pada tahun 2012 yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2016. Akan tetapi dalam kenyataannya, hasil penelitian menjabarkan beberapa hasil bahwa posisi kaum perempuan dalam kegiatan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat seperti kepemilikan sumber air bersih dan bangunan MCK permanen di rumah mereka, tidak berjalan efektif dikarenakan para suami lebih mengutamakan pemenuhan konsumsi dan pendidikan anak sebagai prioritas utama dibandingkan kebutuhan sumber air bersih dan bangunan MCK.



Posisi pengambil keputusan dalam keluarga pada kasus di atas masih sepenuhnya dipegang oleh para suami (laki-laki). Kaum perempuan lebih bersifat menerima dan menjadi pasif dalam keterlibatannya di program tersebut. Meskipun di awal pelaksanaan program Pamsimas sebelumnya yaitu kegiatan sosialisasi justru terlihat jumlah peserta terbanyaknya adalah kaum perempuan. Bahkan kondisi ini cepat menyebar dikarenakan aktifitas kaum perempuan yang lebih banyak dan berada di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka aktif dengan kegiatan Dawis, PKK, pelayanan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, dan pengajian di saat para suami atau para laki-laki mencari nafkah di luar desa mereka.

Di sinilah terjadi ketidak sesuaian antara tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terutamanya kaum perempuan yang telah mendapat program sosialisasi tentang pentingnya meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat dengan ukuran keberadaan sumber air bersih dan bangunan MCK dibandingkan dengan persoalan ekonomi keluarga. Dengan kebutuhan ekonomi sebagai realitas persoalan terbesar masyarakat Desa Rejodadi yang harus dipenuhi terutama oleh para suami (laki-laki) maka diperlukan sebuah upaya nyata untuk membuat tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama kaum perempuan untuk berubah menjadi sebuah tindakan kemandirian.

Tindakan yang diharapkan dapat dilakukan adalah mewujudkan sebuah bentuk rekayasa sosial kemandirian ekonomi yang diharapkan adalah bertujuan utama untuk menjadikan kaum perempuan berdaya secara ekonomi, sehingga pada akhirnya sesuai pendapat Nuraini (2015) taraf kesejahteraan keluarga juga dapat meningkat sejalan dengan berkurangnya beban tanggungan suami sebagai pencari nafkah utama. Pada akhirnya dengan kemampuan dan kemandirian ekonomi kaum perempuan akan mampu meningkatkan taraf keberdayaan kaum perempuan Desa Rejodadi secara umum. Target realistis yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan pemberdayaan kaum perempuan dapat dilihat dalam beberapa kriteria, antara lain:

1. Munculnya dua kelompok usaha produktif dari kaum perempuan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Usaha yang dipilih adalah menghasilkan aneka criping untuk dijual di pasar



bersumber dari berbagai sumber daya yang ada di desa mereka seperti pisang dan ketela.

2. Meningkatnya jumlah kepemilikan sumber air bersih dan bangunan kamar mandi untuk MCK baik permanen maupun non permanen di sekitar rumah warga.
3. Berkurangnya jumlah angka penderita penyakit yang dilayani di Pos Kesehatan Desa Rejodadi seperti penyakit kulit, diare dan muntah-muntah yang sering dialami kebanyakan kaum perempuan dan anak-anak.

Keberadaan kegiatan kemandirian ekonomi yang dipilih oleh kaum perempuan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat ternyata menjadi motivasi dan antusiasme kaum perempuan yang dapat mengalahkan hambatan-hambatan yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak terlalu merasakan kesulitan karena menganggap hal ini sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara bersama dengan kelompok perempuan sesamanya. Selain itu, adanya pendapatan tambahan didukung oleh pihak keluarga untuk diteruskan.

Pada kegiatan ekonomi mandiri dapat dikatakan cukup berhasil dikarenakan tingkat kepemilikan dan partisipasi kaum perempuan dalam usaha tersebut cukup tinggi dan mereka menganggapnya sebagai usaha bersama. Apalagi adanya dukungan perangkat desa dan pengurus PKK desa yang mencoba menjadi motivator ketika terjadi penurunan semangat dalam pelaksanaan usaha yang dipilih. Di awal modal diperoleh atas bantuan penanam modal yang ingin mengembangkan potensi sumber daya desa menjadi lebih bernilai. Pada tingkat selanjutnya modal dikembangkan berdasar bagi hasil usaha untuk kas kelompok usaha dan pelakunya.

Pemilihan usaha produktif ekonomi sendiri dikembangkan sebagai strategi pemberdayaan bagi kaum perempuan. Kegiatan tersebut dihasilkan atas adanya masukan dan musyawarah perangkat desa dengan akademisi yang melakukan kegiatan di Desa Rejodadi. Keberhasilan perencanaan yang telah dirumuskan kemudian diaplikasikan dengan terbentuknya dua buah usaha ekonomi mandiri yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi



keluarga yang dikerjakan secara mandiri oleh kaum perempuan. Meskipun demikian pendapatan yang diperoleh bukan berfungsi untuk menggantikan peran dan fungsi kaum laki-laki sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Pada kegiatan peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang diukur oleh dua kondisi yaitu meningkatnya jumlah kepemilikan sumber air bersih, MCK dan berkurangnya penderita penyakit kulit dan diare bagi kaum perempuan dan anak-anak dapat dinilai cukup berjalan baik. Ini membuktikan adanya upaya pemberdayaan kaum perempuan mampu memberi dampak positif atas kondisi kesehatan masyarakat meskipun secara tidak langsung. Dengan adanya tambahan pendapatan bagi keluarga dapat menjadi umpan bagi suami untuk mengizinkan atau minimal tidak menolak rencana kepemilikan sumber air bersih dan adanya bangunan MCK di sekitar mereka.

Yang menjadi menarik dari keberhasilan strategi pemberdayaan kaum perempuan di Desa Rejodadi adalah faktor tidak adanya upaya untuk mengganti peran dan fungsi utama para suami dalam keluarga. Proses ini juga menjadi indikator keberhasilan lain dalam kegiatan pemberdayaan kaum perempuan yang telah dirumuskan. Tidak adanya niatan untuk merendahkan para suami menjadikan kegiatan pemberdayaan kaum perempuan tidak mengubah posisi kaum perempuan secara radikal dalam hal pengambilan keputusan keluarga. Kondisi ini nampak sesuai seperti pendapat Wildan (2009) yang secara kultural penghormatan terhadap posisi suami dalam keluarga masih menjadi pemikiran yang sangat kuat dalam benak kaum perempuan. Karena proses pemberdayaan ekonomi kaum perempuan ini secara langsung tidak mampu mengubah keadaan secara frontal keadaan khususnya dalam sebuah keluarga di desa Rejodadi, namun dapat dilihat sebagai kegiatan yang lebih bermanfaat dan memberi rasa kemandirian dalam bentuk yang terbatas bagi mereka. Secara tidak langsung dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan kaum perempuan memang membawa sedikit dampak perubahan, akan tetapi kondisi tersebut dinilai lebih sesuai dengan situasi sosial dan budaya yang kuat menancap di masyarakat Desa Rejodadi.



PENUTUP

Sebagai akhir tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pertama, motivasi dan antusiasme kaum perempuan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi mandiri membuat hambatan-hambatan yang ada tidak terlalu dirasakan; kedua, strategi pemberdayaan kaum perempuan dapat dinilai berhasil dalam bentuk terbentuknya dua buah usaha ekonomi mandiri yang mampu menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga; ketiga, pemberdayaan ekonomi meskipun tidak mengubah posisi kaum perempuan secara radikal dalam pengambilan keputusan keluarga. Penghormatan terhadap posisi suami dalam keluarga masih menjadi pemikiran yang sangat kuat dalam benak kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhrumullah, Riyan. 2014. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Dalam <http://masriyanikhram.blogspot.co.id/2014/03/a.html>
- Kartasasmita, Ginanjar. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat. Kumpulan Materi Community Development*. Purwokerto: Pustaka Pribadi Alizar Isna
- Kasto. 1998. *Metode Pengumpulan Data*. Dalam: Singarimbun, M. dan Effendi, S.(Ed). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Rajawali Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, Nabilah. 2015. *Disfungsi Peran Wanita dalam Masyarakat Ekonomi Asean*. Dalam <http://nebulanabilah.blogspot.co.id/2015/11/disfungsi-peran-wanita-dalam-masyarakat.html>
- Rini. 2015. *Nasib Perempuan Dihadapan MEA 2015*. Dalam <http://www.berdikarionline.com/nasib-perempuan-dihadapan-mea-2015/>
- Sitompul, Mukti. 2007. *Konsep – Konsep Komunikasi Pembangunan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara.
- Wildan, Syaiful. 2009. *Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Istri Dalam Masyarakat Kraton Yogyakarta Hadiningrat*. Yogyakarta: Tesis UIN Suka.
- Vredenberg, J. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/03/05/363355/memasuki-era-mea-perempuan-harus-berdaya-saing>



PERAN KEJREUN BLANG TERHADAP PERILAKU PETANI DALAM MENGIKUTI KETENTUAN ADAT PERTANIAN DI ACEH

Andrian WiraSyah Putra¹, Sunarru Samsi Hariadi², Subejo³.

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan,
Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Telp. 085260002070

E-mail: juniorwira@rocketmail.com

ABSTRAK

Kelembagaan lokal merupakan salah satu sistem yang dipandang penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat lokal dan telah berjalan dengan mekanisme lokal serta cukup efektif mengatur kepentingan masyarakat. Salah satu kelembagaan dan kearifan lokal yang penting di Nanggroe Aceh Darusalam adalah Kejreun Blang yang merupakan kelembagaan lokal terkait dengan pengelolaan sumberdaya air. Tujuan penelitian (1) Mengetahui pengaruh peran Kejruen Blang terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan adat pertanian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian dipilih secara (purposive) yaitu di Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Pengambilan sampel responden menggunakan metode acak sederhana (Simple Random Sampling) dengan jumlah responden sebanyak 201 orang petani yang tergabung dalam kelompok tani dari jumlah anggota kelompok sebanyak 1343 orang. Metode statistik yang digunakan adalah uji regresi Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kejruen blang berpengaruh positif secara signifikan terhadap perilaku petanidalam mengikuti ketentuan adat pertanian ($r=0,900$; $p<0,05$). Pengaruh kejruen blang terhadap perilaku petani sebesar 81%.

Kata kunci: Kelembagaan lokal, Kejruen Blang, Perilaku.

PENDAHULUAN

Keberhasilan proses pembangunan pertanian dan pedesaan selain ditentukan oleh inovasi teknis dan layanan dari pemerintah juga ditentukan oleh sistem yang dikembangkan oleh pelaku usaha pertanian dipedesaan. Kelembagaan local merupakan salah satu system yang dipandang sangat penting yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat local dan telah berjalan dengan mekanisme local serta cukup efektif mengatur berbagai kepentingan masyarakat.

Pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah RI dan GAM, lahir Undang Undang No. 11 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) pada tahun 2006, sejak itu masyarakat adat di Aceh mulai mengikuti proses membangun dan



merevitalisasi institusi adat seperti di daerah lain di Indonesia. Selain dengan Undang-undang Otonomi Daerah, revitalisasi adat di Aceh juga didukung oleh pemberlakuan UU-PA, dimana ada pasal khusus yang secara tegas menyatakan lembaga adat di Aceh harus difungsikan kembali sesuai dengan karakteristik daerah dan masyarakat adat yang ada (Pasal 114 ayat 4).

Dukungan terhadap revitalisasi institusi lokal di Aceh juga diperkuat dengan dikeluarkannya produk hukum setingkat Peraturan Daerah (PERDA) yang di sebut dengan Qanun dimana Qanun mengatur secara lebih rinci tentang peranan adat serta fungsi lembaga adat dalam masyarakat di Nangroe Aceh Darusalam, utamanya yang diformulasikan dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun tersebut menjabarkan tentang berbagai aturan dasar yang berhubungan dengan bagaimana adat difungsikan kembali dalam kehidupan sosial masyarakat di Aceh yang selama ini tidak berfungsi akibat kebijakan politik sentralisasi yang diterapkan pemerintah orde baru sejak tahun 1979. Ada tiga hal utama yang ditekankan dalam Qanun yaitu: (1) pelestarian adat yang bersifat kultural dalam masyarakat, (2) pemungisian kembali peradilan adat dan (3) Membangun kembali lembaga adat dalam masyarakat.

Khusus terkait dengan pembangunan dalam bidang Pertanian, masyarakat Aceh sesungguhnya sudah memiliki sebuah lembaga adat yang disebut dengan *Kejruen Blang*. Kelembagaan *Kejruen Blang* adalah ketua adat yang merupakan tokoh sentral yang memegang peranan penting dalam kegiatan pertanian di aceh. Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984, PP Nomor 23 tahun 1982 dan Pedoman Pemberdayaan P3A *Keujreun Blang*, Sumber Daya Air Propinsi Aceh 2007 kemudian mempersempit peran dan fungsi lembaga tersebut dalam pengelolaan air di setiap kawasan, dengan alasan *Keujreun Blang* memiliki beberapa keterbatasan seperti dana dan tenaga, oleh sebab itu berdasarkan kebijakan tersebut sebagian besar pengelolaan pengairan sawah ditangani oleh dinas-dinas terkait termasuk penyediaan tenaga-tenaga lapangan (Abubakar, dkk, 2012).



Dalam Qanun No. 10 sudah di jabarkan sangat jelas tentang peran dari *kejreun blang*. Lembaga adat ini dinilai penting untuk dihidupkan kembali sebagai salah satu mitra pemerintah dalam membangun bidang pertanian. Kehadiran *Kejreun Blang* ini diharapkan akan berfungsi sebagai sebuah wahanapartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah dalam penyelenggaraan usaha pertanian.

Yusoef, A., dkk. (2011) menyatakan dasar hukum untuk lembaga adat di Aceh telah diperkuat kembali dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat Provinsi Aceh yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang PA tahun 2006. Sedangkan Yulia, Sulaiman dan Herinawati (2012) menjelaskan peran dan kedudukan lembaga- lembaga adat di Aceh masih sangat besar dalam membuat kebijak sanaan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam salah satu lembaga adat *kejruen blang* dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan Bahwa *kejruen blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

Qanun No. 10 Bab IV Tahun 2008 Bagian Kedelapan pasal 25 berbunyi *Kejruen Blang* atau nama lain mempunyai tugas: (1). Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah. (2). Mengatur pembagian air ke sawah petani. (3). Membantu pemerintah dalam bidang pertanian. (4). Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. (5). Memberi teguran atau sangsi kepada petani yang melanggar aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. (6). Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Dalam struktur sosial secara umum mengandung unsur seperti sistem, status, peran, interaksi, dan kelompok sebagaimana tertuang dalam pernyataan Beth. B. Hess dkk dalam Yusoef, A, dkk (2011) yang secara rinci diurai sebagai berikut: *Social structure has several components: systems, norms, statuses, roles, interactions, and groups*. Lembaga adat adalah suatu komponen dari struktur



sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kebudayaan yang diperankan, berkenaan dengan mempertahankan sumber daya alam dan kelestarian lingkungannya dalam peningkatan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya sesuai dengan bidangnya masing-masing, demi tercapainya tujuan pembangunan. *Kejruen blang* adalah salah satu lembaga adat yang ada di Aceh yang bernaung di bawah lembaga adat mukim.

Manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai pribadi dalam dirinya sendiri memiliki aspek kehidupannya yang dipengaruhi oleh dalam diri sendiri maupun masyarakat ataupun lingkungan yang ada disekitarnya. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu perilaku manusia adalah dengan menggunakan teori Medan dari Kurt Lewin. Jhonson dan Jhonson (2000) menjelaskan Lewin berteori bahwa individual bergerak melalui wilayah yang berbeda dari ruang hidup mereka, juga menjadi terdorong oleh kekuatan atau ditarik oleh valensi yang ada sepanjang vektor kekuasaan. Beberapa dari kekuatan dan valensi terkuat dan pengalaman individu berasal dari kelompok.

Sujadi (2014) menerangkan bahwa lingkungan tersebut sebagai lingkungan psikologis yang merupakan batas antara pribadi dan lingkungannya sehingga fakta-fakta lingkungan dapat mempengaruhi pribadi. Pribadi sebagai sifat heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Sebagai pembentuk perilaku Lewin menggambarkan bahwa ruang hidup (*Life Space*) sebagai tempat faktor-faktor yang menentukan baik kepribadian manusia maupun lingkungannya sehingga perilaku seseorang (*Behavior (B)*). dapat dirumuskan dalam suatu bentuk persamaan yang terdiri dari faktor personal (*Personality (P)*) dan lingkungan (*Environment (E)*) maka persamaan bentuk tersebut di gambarkan dalam fungsi $B = f(P, E)$.

Teori perilaku Kurt Lewin mengatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh keadaan pribadi dan lingkungan (Azwar, 2011). Kurt Lewin menegaskan perilaku dipengaruhi oleh lingkungan dan organisme yang bersangkutan. Dalam teori medan (*Field Theory*) oleh Lewin (1951) dalam Azwar (2011), mengatakan bahwa teori ini adalah adanya *Life Space (LS)* yang merupakan



konstelasi dari faktor-faktor yang menentukan baik individual maupun lingkungan. Perilaku seseorang (B) dapat digambarkan sebagai fungsi dari *Life Space* (LS) dimana LS terdiri dari faktor personal (P) dan lingkungan (E)".

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa peran yang dilakukan *Kejruen* dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam pengelolaan pertanian. Meskipun *Kejruen Blang* dipandang strategis dalam pembangunan pertanian dan pedesaan di Aceh, namun dalam prakteknya, efektivitas dan fungsi *kejruen blang* belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Juanda (2002) telah dilaporkan bahwa apa yang dilakukan *kejruen* hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya peran maupun kinerja yang diberikan lembaga *kejruen blang* kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga *kejruen blang* oleh petani. Status dan posisi *kejruen blang* menjadi tantangan terhadap optimalisasi fungsi dan peran lembaga *kejruen blang* yang pada beberapa waktu terakhir menghadapi beberapa masalah seperti lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah dalam menguatkan kelembagaan ini, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Dari hasil temuan Yulia, Sulaiman dan Herinawati (2012) dalam jurnal berjudul pemberdayaan fungsi dan wewenang *kejruen blang* di kecamatan sawang aceh utara (dalam pelaksanaan Qanun nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat). *Kejruen blang* merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat dalam Qanun nomor 10/2008 tentang Lembaga Adat. Di Daerah Lain di Luar Aceh, *kejruen blang* tersebut hampir sama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi serta wewenang *kejruen blang* yang berjalan sekarang masih berdasarkan pengalaman saja,



belum mengenal fungsi secara detail termasuk yang terdapat didalam qanun. Bahkan fungsi kejrueen blang dipahami hanya dalam sebatas menjaga dan pembagian air sawah. Koordinasi dan tugas kejrueen blang juga tidak jelas dengan pihak aparaturnya desa yang lain. Terhadap keadaan demikian telah dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dengan menjadi motivator dan fasilitator bagi kejrueen blang dalam menjalankan fungsi serta wewenang, kemudian juga dilakukan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif didukung dengan kualitatif (*mixed method*). Menurut Singarimbun dalam Syahputra (2012), metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang fenomena yang ada, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, menguji hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dari implikasi dari suatu permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh.

Metode pemilihan sampel lokasi menggunakan metode *Multi Stage Sampling*, yang merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara bertingkat dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja suatu pemerintahan. Tahap awal pemilihan sampel lokasi dimulai dari Nanggroe Aceh Darussalam karena merupakan Daerah yang memiliki Qanun no. 9 dan no. 10 Tahun 2008 Tentang Adat Serta Adat Istiadat dan memiliki *Kejrueen Blang*. Aceh sendiri memiliki sebanyak 23 Kabupaten dan Kota. Pada Tahap berikutnya dari Aceh yang memiliki 23 Kabupaten/ Kota dipilih sampel lokasi penelitian secara *purposive* pada Kabupaten Pidie, dengan pertimbangannya bahwa Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten, selain Pidie Jaya, yang menjadi lokasi *pilot project* PPI (Penyerahan Pengelolaan Irigasi) kepada *kejrueen blang* sebagai implikasi dari Qanun no. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kemudian ditahap selanjutnya pada Kabupaten Pidie sendiri, yang terdiri dari 22



kecamatan serta 735 *gampoeng* (desa), akan dipilih satu kecamatan secara *purposive* sebagai sample lokasi penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro.

Pengambilan sampel menggunakan metode *simplerandom sampling*, metode ini dilakukan terhadap seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kecamatan Glumpang Baro, dengan mengambil masing-masing 15% dari jumlah anggota tiap kelompok tani. Seperti yang dinyatakan Arikunto (2006) apabila subjeknya kurang dari 100 (seratus), lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Akan tetapi jika jumlah populasi terlalu besar, maka dapat diambil antara 10- 15% atau 15- 20%.

Jumlah seluruh anggota (populasi) adalah sebanyak 1343 orang dari 21 kelompok tani, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 201 sampel. Dalam teknik *simplerandom sampling*, Menurut Saebani (2008) menjelaskan bahwa semua individu dalam populasi, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Menurut Arikunto (2006), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sementara menurut Sugiyono, (2012) metode pengumpulan data utama menggunakan kuesioner dan didukung oleh data- data wawancara, serta observasi. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner kepada responden petani yang didukung dengan wawancara dengan informan *kejruen blang* desa di lokasi penelitian serta berbaur dengan responden yang berada dalam Kecamatan tempat penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro. Sementara Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan pencatatan atau pelaporan yang dimiliki instansi terkait dengan data-data penduduk yang relevan dengan masalah penelitian, menyangkut keadaan umum daerah penelitian; keadaan fisik daerah, keadaan pertanian, kelembagaan sosial dan ekonomi petani, dalam wilayah tempat penelitian yaitu Kecamatan Glumpang Baro.

Untuk menjawab Hipotesis “Diduga peran *kejruen blang* berpengaruh terhadap perilaku petani dalam mengikuti ketentuan adat pertanian” digunakan analisis Regresi Linier Sederhana. Riduwan dan Sunarto (2007) menjelaskan analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel *dependent*



(terikat) dapat diprediksikan (meramal) melalui variabel *independent* (bebas) secara parsial, maupun bersama-sama (simultan). Sebelum dilakukan proses analisis data penelitian diawali dengan dilakukan uji validitas dan reabilitas data serta Normalitas Data untuk dapat melihat kelayakan data yang didapatkan di lapangan sehingga layak untuk digunakan dalam analisis regresi sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *kejruen blang*

Peran *Kejruen blang* dengan indikator-indikator sebagai berikut: (1) peran kepemimpinan adat tani, (2) peran penyelenggara ritual tradisional, (3) peran pengaturan jadwal tanam, (4) peran pembagian air merata. Masing-masing indikator tersebut memiliki nilai yang akan dijelaskan lebih lanjut, secara ringkas disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat capaian Peran *kejruen blang*

o	Indikator Peran <i>Kejruen Blang</i>	Interval Skor	Rata-rata Capaian Skor	Tingkat Peran(%)
	Kepemimpinan Adat Tani	6-24	17,74	74
	Penyelenggara Kegiatan ritual Tradisional	8-20	15,17	76
	Pengatur Jadwal Tanam	0-24	17,85	74
	Pembagian Air Merata	0-24	17,60	73
	Total	14-92	68,36	74,37

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat peran *kejruen blang* sebesar 74,37%. Rata-rata capaian skor tertinggi pada umumnya petani sangat merasakan peran *kejruen* dalam penyelenggaraan ritual tradisional melalui memimpin upacara adat (*Troen u Blang*) turun ke sawah pada awal setiap tahun, *kejruen* juga mengawasi anggota mematuhi aturan adat yang telah ditentukan, melaksanakan ritual *khanduriblang* setiap tahun, dan memfasilitasi petani dalam melaksanakan ritual tradisional pertanian, yaitu 76%. Kemudian rata-rata capaian skor kepemimpinan adat melalui mengawasi petani membangun serta merehabilitasi saluran air, menentukan dan mengatur iuran, menentukan iuran baik berupa uang, tenaga dan hasil panen untuk pendaya gunaan irigasi, aktif membimbing petani mematuhi adat pertanian, mengorganisir anggota untuk

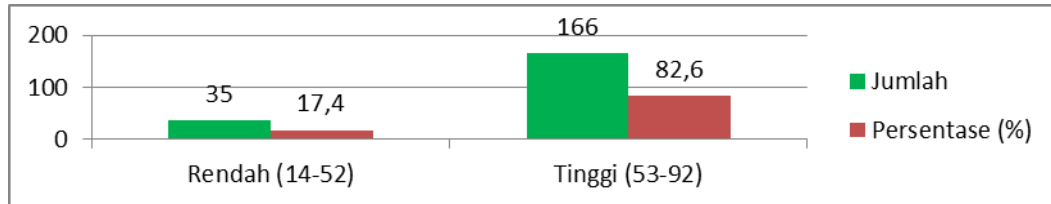


SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

disiplin mengutip uiran pemeliharaan saluran air, yaitu 74%. Distribusi Peran *Kejrue Blang* dapat dilihat Pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Distribusi Peran *Kejrue Blang*

Gambar 4.1 menunjukkan 82,6% petani berpendapat *Kejrue Blangsangat* berperan dalam kegiatan petani, sedangkan 17,4% menilai rendah. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan petani menilai peran *kejrue blang* setelah sangat tinggi dalam penyelenggaraan ritual tradisional, kepemimpinan dalam adat pertanian, pengaturan jadwal tanam serta, pembagian air merata ke sawah petani.

Perilaku Petani dalam Melakukan Ketentuan Adat Pertanian

Perilaku Petani dalam melakukan ketentuan adat pertanian diambil empat indikator yaitu mengikuti aturan adat, mengikuti jadwal tanam, mengikuti gotong royong serta kepatuhan membayar iuran pemeliharaan saluran air. Masing-masing indikator dijelaskan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Capaian perilaku Petani Melakukan Ketentuan Adat Pertanian

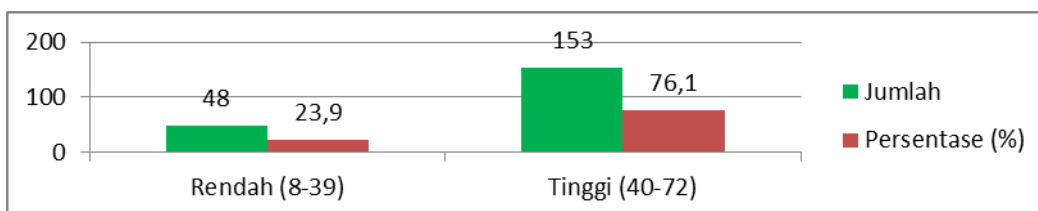
o	Indikator Perilaku Petani dalam Melakukan ketentuan Kejrue blang	Interval Skor	Rata-rata Capaian Skor	Tingkat Melakukan (%)
	Mengikuti Aturan Adat	4 – 16	11,61	73
	Mengikuti Jadwal Tanam	4 – 16	11,70	73
	Gotong Royong	0 – 20	15,01	75
	Kepatuhan Membayar Iuran	0 – 20	15,05	75
	Total	8 – 72	53,37	74

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkatperilaku petani mengikuti ketentuan Adat Pertanian sebesar 74%. Pada umumnya rata-rata capaian skor tertinggi petani berada pada perilaku petani melakukan ketentuan Adat di kegiatan Gotong royong melaui, gotong royong membersihkan saluran air ke sawah petani, gotong royong sebelum melakukan ritual tradisional, selalu ikut gotong royong yang dianjurkan *kejrue blang*, rutin ikut gotong royong serta melakukan gotong royong pembersihan *Gampoeng* (Desa) yaitu 75%. Kemudian rata-rata capaian skor perilaku petani mengikuti ketentuan yang diberikan



kejruen blang sebagai ketua adat pertanian dalam hal kepatuhan membayar iuran melalui membayar iuran sesuai ketentuan *kejruen blang*, membayar iuran salah satunya dengan tenaga, dengan uang, serta membayar dengan hasil panen, membayar iuran pemeliharaan saluran air tepat waktu, yaitu 75%. Distribusi perilaku petani melakukan ketentuan Adat Pertanian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 4.2 Distribusi perilaku petani melakukan ketentuan Adat Pertanian

Gambar 2 menunjukkan 76,1% petani berpendapat perilaku petani dalam melakukan ketentuan adat pertanian sangat tinggi, sedangkan 23,9% petani menilai rendah. Jadi dapat disimpulkan kebanyakan petani menilai Perilaku mereka dalam mengikuti ketentuan adat pertanian tinggi, ini petani tunjukkan dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh *kejruen blang* sebagai ketua adat seperti, mengikuti gotong royong pembersihan saluran air, kepatuhan membayar iuran pemeliharaan saluran air, mengikuti jadwal tanam yang telah ditentukan *kejruen blang* serta mengikuti aturan adat yang telah ditetapkan *kejruen blang* dalam bidang pengelolaan air dan pertanian.

Pengaruh Peran *Kejruen Blang* Terhadap Perilaku Petani mengikuti ketentuan Adat Pertanian.

Pengaruh Peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani dalam mengikuti ketentuan Adat Pertanian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3.



Tabel 3. Pengaruh peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani dalam melaksanakan ketentuan Adat Pertanian

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Peran <i>Kejruen Blang</i> (X)	0,900	29,121	0,000*
Perilaku Petani (Y)			
Konstanta	-9.595		
R ²	0,810		
F-hitung	848.055		
F-tabel	3,890		
t-tabel	1,652		
Keterangan= *Signifikansi pada Taraf 5%			

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 ditunjukkan bahwa Peran *Kejruen Blang* berpengaruh terhadap perilaku petani dalam mengikuti ketentuan adat pertanian, secara matematis dapat dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = - 9,595 + 0,900 X$$

Keterangan:

Y = Perilaku Petani, *a* = Nilai Konstanta, X = Peran *Kejruen Blang*,

Hipotesis yang digunakan:

Ho : Tidak ada pengaruh nyata peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani mengikuti ketentuan Adat Pertanian

Ha : Ada pengaruh nyata peran *kejruen blang* terhadap perilaku petani mengikuti ketentuan Adat Pertanian

Nilai konstanta sebesar -9,595 artinya bila nilai *peran kejruen Blang* adalah 0, maka perilaku petani dalam melakukan ketentuan Adat Pertanian nilainya negatif sebesar -9,595. Koefisien regresi variabel peran *kejruen blang* (X) sebesar 0,900 artinya apa bila terjadi penambahan 1 angka pada peran *kejruen blang* (X), maka akan terjadi peningkatan pada perilaku petani dalam melakukan ketentuan Adat (Y) sebesar 0,900. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif/searah antara peran *kejruen blang* (X) dengan perilaku petani mengikuti ketentuan Adat Pertanian (Y). Semakin baik peran *kejruen blang* (X) dilapangan, maka semakin baik pula perilaku petani dalam mengikuti ketentuan Adat Pertanian (Y). Begitupun sebaliknya, jika peran *kejruen blang* (X) mengalami



penurunan, maka akan terjadi penurunan pula pada perilaku petani dalam mengikuti ketentuan Adat (Y) dilapangan.

Koefisien determinasi (R^2), hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa angka R^2 sebesar 0,810, ini berarti bahwa 81,00 % proporsi perilaku petani (Y) dapat dijelaskan oleh variable peran *kejren blang* (X), sedangkan sisanya 19 % ditentukan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Uji F, dari uji Anova atau nilai F hitung diperoleh nilai sebesar 848,05 dengan probabilitas siginifikansi sebesar 0,000 karena nilai F hitung (858,05) > F tabel (3,890) dan nilai probablitas signifikansi (0,000) lebih kecil dari nilai probabilitas signifikansi (0,05), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perilaku petani (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Peran *Kejrue Blang* (X) berpengaruh terhadap perilaku petani (Y).

Uji t, nilai (p) untuk variabel Peran *Kejrue Blang* (X) sebesar 0,000, nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau $0,00 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya bahwa semakin tinggi Peran *Kejrue Blang* maka perilaku petani dalam mengikuti ketentuan Adat Pertanian semakin baik. Variabel Peran *Kejrue Blang* (X) mempunyai t hitung sebesar 29,121 dengan t tabel sebesar 1,652. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Peran *Kejrue Blang* (X) memiliki kontribusi terhadap perilaku petani (Y). Nilai t positif menunjukkan bahwa Peran *Kejrue Blang* (X) mempunyai hubungan yang searah dengan perilaku petani (Y). Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran *Kejrue Blang* (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku petani dalam mengikuti ketentuan adat pertanian (Y).

Peran *kejruen blang* melalui indikator kepemimpinan adat tani dilapangan, penyelenggaraan ritual tradisional dalam bidang pertanian, pengaturan jadwal tanam serta pembagian air yang merata kepada para petani sangat mempengaruhi perilaku petani dilapangan dalam mengikuti ketentuan Adat Pertanian. *Kejrue blang* sudah sangat menyatu dengan kehidupan para petani di Aceh, setelah no10 dikeluarkan, lembaga adat ini semakin eksis dalam kehidupan petani. Selain mengurus masalah pengairan sawah, *kejruen blang* juga di anggap oleh para petani sebagai rujukan kapan harus menanam padi, *kejruen*



blang juga menjadi salah seorang penengah yang sangat penting jika terjadi sengketa di bidang pertanian di Aceh maupun jual beli tanah sawah. Petani sangat menghormati *kejruen blang* sebagai salah satu tokoh adat pertanian, oleh karena itu, apa bila *kejruen blang* menganjurkan sesuatu harus dilakukan atau dilaksanakan seperti gotong royong dan lain sebagainya maka para petani akan segera melaksanakannya. Semakin aktif peran *kejruen blang* dilapangan. Maka akan semakin aktif pula para petani mengikuti kegiatan serta anjuran *kejruen blang* sebagai ketua adat pertanian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan peran *Kejruen Blang* berpengaruh sangat signifikan terhadap perilaku petani dalam melakukan ketentuan Adat Pertanian. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Aceh masih sangat membutuhkan peran lembaga adat *Kejruen blang* dalam proses pelaksanaan kegiatan pertanian dan khususnya dalam pengelolaan sumberdaya air untuk mendukung aktivitas pertanian di Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Anwar Yusoef, Anwar, 2012. *Peran lembaga Adat Kejruen Blang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Sawah di Kabupaten Bireun*. Al- Iman. Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat Volume I No. 6. ISSN: 2085 – 5672. Hal. 3-5.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Azwar, Saefudin. 2011. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Johnson, D. W & Johnson, F. P, 2000. *Joining Together: Group Theory and Group Skill*. Allyn and Bacon. A person education Company. 160 Gould Street. Needham Height, MA 02494. United States of Amerika
- Juanda, Edi, (2002). *Peran Lembaga Adat Kejruen Blang Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Dalam pengelolaan pertanian sawah*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Diakses dari <http://www.digilib.ui.ac.id> pada tanggal 23 November 2014.
- Mujib, Ibnu. 2014. *Konstruksi Identitas Keacehan Pasca Konflik dan Tsunami*. Ringkasan Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.



- Riduan dan Sunarto, H. 2007. *Pengantar Statistika Untuk penelitian pendidikan, sosial, ekonomi, komunikasi dan bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Saebani, B.A. 2008. *Metode Penelitian*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Alfabeta. Bandung.
- Sujadi, Eko. 2014. *Teori Medan Lewin*. www.ekosujadi-bintan.blogspot.com. Diakses pada Tanggal 25 Desember 2014 pukul 16.20
- Syahputra, Andrian wira, 2012. *Pengaruh Peran Penyuluh dan Kearifan Lokal Terhadap Adopsi Inovasi Padi Sawah Di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. Diajukan kepada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Yulia, sulaiman dan Herinawati. 2012. *Pemberdayaan Fungsi dan Wewenang Kejrueun Blang di Kecamatan Sawang Aceh Utara (Dalam Pelaksanaan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No.2.
- Yusoef Anwar, Abubakar, Yanis Rinaldi, 2011. *Konsep Pemanfaatan Lembaga Adat Keujreun Blang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pemakai Air (Sawah) Di Kabupaten Bireuen*. Laporan Hasil Penelitian DIKTI. Universitas Serambi Mekah. Banda Aceh.



PERAN SEKTOR PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI ERA GLOBAL

Toti Rahayu

Alumni Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pascasarjana UGM

toti.rahayu@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam serta keberagaman budayanya. Hal tersebut menjadi suatu keunikan yang dapat menjadi nilai tambah dalam pembangunan di era global. Pembangunan desa berbasis kearifan lokal menjadi suatu gagasan menarik untuk mencapai tujuan menyejahterahkan masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya. Dalam suatu pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Sektor pariwisata menjadi alternatif dalam strategi pembangunan seiring dengan meningkatnya tren wisata di era global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat desa di era global. Penelitian ini merupakan studi pustaka melalui literatur-literatur terkait. Pembangunan desa melalui pengembangan sektor pariwisata khususnya ekowisata yang berbasis pada kearifan lokal memberikan peran positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya. Peran sektor pariwisata dalam aspek ekonomi memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek sosial budaya dapat mempertahankan kearifan lokal untuk menjaga alam dan budaya dari terpaan negatif globalisasi. Dalam pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal, turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tujuan pemberdayaan sehingga diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa dalam jangka panjang. Potensi kearifan lokal yang dioptimalkan dalam pengembangan sektor pariwisata akan mewujudkan kesejahteraan melalui kemandirian bagi masyarakat setempat.

Kata kunci: Kearifan lokal, Pariwisata, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Arah pembangunan pada saat ini tidak lepas dari globalisasi yang tengah melanda. Globalisasi ditandai dengan adanya integrasi perdagangan global yang mengutamakan kepentingan ekonomi. Cara pandang globalisasi kapitalis yang hanya mementingkan aspek ekonomi akan merusak tatanan sosial, lingkungan alam, budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa (M.Anwas, 2014). Seyogianya pembangunan yang menyejahterahkan tidak menghilangkan identitas sosial dan akar budaya.



Negara dalam era globalisasi, harus memiliki kemampuan untuk dapat bersaing. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan dari SDA yang melimpah dan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Potensi yang sudah ada tersebut seharusnya menjadi kekuatan dalam pembangunan di Indonesia.

Perkembangan era globalisasi semakin nyata dirasakan dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Luhulima (2008) menyatakan gagasan pembentukan MEA dapat ditelusuri dari pembentuka AFTA pada tahun 1992. Inti dari MEA adalah pencapaian suatu pasar dan landasan produksi tunggal, dengan peredaran barang, jasa dan modal. Agenda kerjasama ekonomi ASEAN memusatkan pada upaya integrasi *“turning the diversity that characterises the region into opportunities for business complementation making ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain”*. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa tujuan pembentukan MEA adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi bersama dengan menggaling kekuatan dari negara-negara anggota ASEAN.

Dalam Warta Ekspor Kementerian Perdagangan (2015) pada cetak biru MEA terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah yaitu 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Termasuk salah satunya adalah pariwisata yang termasuk ke dalam sektor jasa. Sektor-Sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Pariwisata dapat menjadi sektor dapat menjadi sektor unggulan yang berdaya saing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat kekayaan potensi alam dan budaya di Indonesia yang beragam. Adapun syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk menjadikan pariwisata Indonesia menjadi berdaya saing melalui kesiapan infrastruktur, ketrampilan SDM, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Keragaman budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi negara-negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terdiri dari 17.504 pulau, puluhan etnis yang memiliki budaya masing-masing dari Pulau Sumatra hingga Papua, dan ratusan bahasa daerah (Nuraeni&Alfan, 2012). Banyaknya budaya di Indonesia melahirkan adanya kearifan lokal di masing-



masing daerah. Nuraeni&Alfan (2012) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Kearifan lokal lahir dari proses panjang yang berakar dari budaya masyarakat. Hal tersebut mewujudkan dalam bentuk cara pandang, pengetahuan lokal (indigenous knowledge) sampai pada kebiasaan masyarakat setempat. Pembangunan di tengah era globalisasi sekarang ini sejatinya tidak mengabaikan kearifan lokal daerah. Adapun relevansi kearifan lokal dalam pembangunan yang dijelaskan oleh Mubyarto (dalam Theresia, dkk, 2015) bahwa setiap masyarakat akan mengembangkan pranata dan kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya sebagai strategi untuk beradaptasi, sehingga mengenali unsur kearifan lokal menjadi penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan. Selanjutnya Theresia, dkk (2015) menjelaskan bahwa kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan “aset” yang dimiliki suatu masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Pembangunan akan menjadi sia-sia jika pemerintah tidak mengenali kebiasaan dan potensi untuk masing-masing daerah.

Marzali (2015) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan perlu selaras dengan nilai-nilai kultural bangsa Indonesia sehingga tidak menciptakan lahan subur bagi pertumbuhan kultur asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai dampak negatif dari globalisasi. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pijakan dalam pembangunan, hal tersebut berarti ikut mewujudkan adanya partisipasi masyarakat. Dimana dalam suatu pembangunan tersebut juga turut memberdayakan masyarakat lokal dan ikut melestarikan kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Soetomo (2010) menjelaskan bahwa perspektif pembangunan saat ini telah bergeser dari sentralistik ke desentralisasi. Hal ini berarti masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Desentralisasi dalam suatu pembangunan juga berarti meningkatkan partisipasi dari masyarakat.



Menelaah tentang pembangunan desa, telah tertulis dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Hal tersebut tentunya pembangunan yang dilakukan tidak melupakan konteks budaya setempat. Dilla (2012) menyatakan konsep pembangunan yang bertumpu pada aspek sosial budaya dapat didefinisikan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang. Pembangunan tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan partisipatif untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok.

Usman (2015) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa perlu diawali dengan kerjasama di antara stakeholder untuk mengimplementasi program-program yang menjadi tumpuan masyarakat desa. Setelah ada kesepakatan rencana suatu kegiatan, selanjutnya adalah memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Disini pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan masyarakat untuk menemukan solusi yang tepat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa berbasis pada kearifan lokal, tentunya perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan. Mardikanto (2010) menjelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Ada beberapa macam partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan diantaranya peran serta masyarakat dalam membuat keputusan, pelaksanaan, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui peran sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat desa di era global.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan review pustaka yaitu studi pustaka yang menggunakan literatur-literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Masyarakat Desa di Era Global

Era pembangunan saat ini sudah bergeser ke paradigma *bottom up*. Paradigma tersebut menyatakan pembangunan dilakukan dan dimulai dari masyarakat sehingga dapat dikatakan *people centered development*. Dalam hal ini diharapkan tujuan akhir dari pembangunan dapat memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berdaya. Muslim, Azis (2007) menyatakan bahwa model pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) menekankan bahwa pembangunan bukan hanya sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi nyata untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi.

Soetomo (2010) menjelaskan tentang pembangunan masyarakat melalui pendekatan variasi lokal. Hal ini lebih melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Program-program yang berorientasi pada kondisi, potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat lokal akan melibatkan mereka dalam identifikasi masalah, perencanaan, dan pelaksanaan program. Hal ini sekaligus melibatkan mereka untuk bekerja sambil belajar. Pembangunan melalui pendekatan variasi lokal akan memberikan peluang partisipasi dalam keseluruhan proses.

Era globalisasi menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan sehingga mereka dapat bersaing. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga harus sejalan dengan peningkatan kapasitas baik sejak identifikasi masalah, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan. Dalam hal ini pemerintah perlu hadir dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa dan mau memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.



Menurut Korten dalam Soetomo (2009) pembangunan dapat ditafsirkan sebagai upaya membangun *power* oleh suatu masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan. *Power* tersebut dapat berupa kontrol terhadap sumber daya, pengelolaan sumber daya dan hasil manfaat yang diperoleh sehingga menjadikan masyarakat mengelola pembangunan secara mandiri.

Pembangunan Desa Melalui Sektor Pariwisata Berdaya Saing

Untuk membangun desa berbasis pada kearifan lokal maka perlu mengenali dan memahami karakter dan potensi suatu desa terlebih dahulu. Masing-masing desa memiliki karakter budaya berbeda. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat dan pengalaman masyarakat di suatu desa. Disini penulis melihat adanya daya tarik dari kearifan lokal sebagai kunci dalam pembangunan desa khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata.

Dalam media publikasi Dirjen Kerja Sama ASEAN dari Kemenlu (2015) menyatakan bahwa pariwisata adalah sektor unggulan. Pariwisata Indonesia menyumbangkan kontribusi cukup besar bagi devisa negara. Sektor pariwisata menyumbang 9,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2014. Jumlah wisatawan asing meningkat dari 8,8 juta wisatawan pada tahun 2013 menjadi 9,4 juta pada tahun 2014. Disisi lain, walaupun sektor pariwisata menjadi unggulan nasional, tetapi belum berarti unggul di mancanegara. Indonesia berada di urutan keempat di tingkat ASEAN untuk kunjungan wisatawan. Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menjadikan pariwisata Indonesia unggul dan berdaya saing.

Saat ini tren pariwisata semakin berkembang sebagai dampak dari teknologi dan perkembangan media sosial. Media massa juga ikut berperan dalam mempromosikan pariwisata. Tujuan dari kegiatan pariwisata tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan yang memberikan manfaat positif. Seperti yang tertulis dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dalam Bab I Pasal 4 berbunyi kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan;



mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. Melalui strategi pariwisata yang tentunya berbasis pada kearifan lokal suatu desa maka hal tersebut dapat membawa dampak positif dalam pembangunan. Tentunya masyarakat lokal juga ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan ini. Kearifan lokal yang dimiliki dari potensi keberagaman budaya di Indonesia menjadi nilai tambah yang mendukung pembangunan pariwisata.

Ekowisata dan Kearifan Lokal

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam aspek, sosial, ekonomi, dan budaya jika mampu dikembangkan dengan baik. Pengembangan sektor pariwisata yang memanfaatkan potensi lokal suatu daerah dapat menjadi suatu daya tarik yang unik bagi masyarakat. Pemanfaatan potensi lokal dari sumber daya alam dan budaya dapat menjadi keunggulan masing-masing daerah wisata tanpa menghilangkan jati diri dan kearifan lokal suatu daerah.

Berdasarkan hal tersebut, berkembanglah suatu pariwisata yang turut memanfaatkan dan menjaga kekayaan alam serta budaya yaitu ekowisata. Menurut World Conservation Union (WCU) dalam Nugroho (2015), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungannya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya konservasi, tidak menimbulkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi dan menghargai partisipasi penduduk lokal. Adapun ekowisata sebagai *sustainable tourism* memuat upaya-upaya : (1) Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya, (2) Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta menikmati kesejahteraan, (3) Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung, (4) Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil.

Fakih (2003) menyatakan bahwa budaya lokal dapat menjadi budaya tandingan (*counter culture*) dalam dominasi budaya global yang tidak dapat dihindari. Ekowisata dapat menjadi suatu alternatif pembangunan melalui sektor



pariwisata berbasis kearifan lokal yang ikut memberdayakan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya setempat. Hal ini dapat meminimalisir dampak negatif dari globalisasi.

Peran Pembangunan Pariwisata Pada Aspek Ekonomi

Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Antara dan Parining bahwa pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang erat dengan banyak sektor (*multiplier effects*). Selanjutnya penelitian yang dilakukan Erawan tentang daerah tujuan wisata Bali, menemukan bahwa pengeluaran wisatawan terhadap perekonomian Bali terdistribusi ke berbagai sektor seperti hotel dan restoran, sektor pertanian, sektor industri dan kerajinan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa lainnya (Pitana dan Gayatri, 2005).

Pariwisata menjadi peluang ekonomi menarik di era global yang memberikan kontribusi dalam pembangunan. Antariksa (2016) mengungkapkan alasan untuk mendorong pemerintah membangun pariwisata berkelanjutan yaitu : (1) peluang bagi negara untuk membangun perekonomian yang terintegrasi, (2) terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) industri pariwisata tidak memerlukan investasi terlalu besar dalam jangka panjang, (4) mengurangi ketergantungan impor, (5) pariwisata dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, dan (6) dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Pitana dan Diarta (2009) menyatakan bahwa dampak positif pariwisata bagi perekonomian dapat meningkatkan permintaan akan produk pertanian lokal. Bagi daerah tujuan wisata yang mampu mengintegrasikan pembangunan pariwisata dan pembangunan pertanian akan mendorong petani untuk memproduksi bahan pangan. Pariwisata juga akan mendorong munculnya usaha pengolahan makanan sebagai nilai tambah produk pertanian lokal sehingga akan meningkatkan petani untuk berswasembada.



Peran Pembangunan Pariwisata Dalam Aspek Sosial Budaya

Dengan adanya pembangunan berbasis pada kearifan lokal, maka dampak negatif dari masuknya budaya luar di era globalisasi dapat diminimalisir. Hal tersebut karena dalam konteks ini, kearifan lokal tersebut yang menjadi daya tarik dalam pariwisata sehingga masyarakat akan turut menjaga kelestarian alam dan mempertahankan budayanya. Bahkan pengetahuan lokal yang dimiliki dapat menjadi *sharing* pengetahuan kepada para wisatawan. Tentunya hal ini perlu didukung upaya pemerintah desa dalam pendampingan dan fasilitator. Selain itu dengan adanya partisipasi aktif masyarakat untuk berperan dalam pembangunan pariwisata akan meningkatkan kolektivitas kelompok yang menjadi modal dalam pembangunan.

Namun, tidak dapat dielakkan bahwa pembangunan pariwisata juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Irianto (2011) dalam penelitiannya pada masyarakat Gili Trawangan di Lombok, terjadi akulturasi budaya lokal dengan budaya asing serta merosotnya nilai kegotongroyongan masyarakat sekitar. Namun, ada yang berpendapat sebaliknya bahwa pariwisata tidak merusak kebudayaan. Seperti di Bali, bahwa pariwisata justru memperkuat terjadinya proses involusi kebudayaan. Mc Kean (1978) mengatakan bahwa perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Bali justru sejalan dengan usaha konservasi kebudayaan tradisional, reformasi, dan penciptaan kembali berbagai tradisi (Pitana dan Gayatri, 2005).

Mewujudkan Kemandirian Desa

Pembangunan masyarakat di desa identik dengan masalah kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan yang relatif rendah berhubungan dengan masalah kemiskinan, yang merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (Suharto, 2016). Diharapkan dengan adanya peran sektor pariwisata dapat membawa peningkatan dari sisi ekonomi, namun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan meningkatkan kapasitas masyarakat yang pada tujuan akhirnya adalah mampu memberdayakan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian desa. Hal ini dapat menjadi tujuan jangka



panjang dari partisipasi yang memberdayakan masyarakat desa untuk membangun kemandirian desa.

PENUTUP

Hadirnya komunitas MEA dalam era globalisasi menjadi suatu hal yang perlu dipersiapkan. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu sasaran dalam MEA bertujuan untuk meningkatkan perkonomian masyarakat. Keunggulan keragaman SDA dan budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan pariwisata dengan tetap menjaga kearifan lokal budaya setempat yang menjadi daya tarik pariwisata. Peran sektor pariwisata dalam aspek ekonomi memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran sektor pariwisata dalam aspek sosial budaya dapat mempertahankan kearifan lokal untuk menjaga alam dan budaya dari terpaan negatif globalisasi. Dalam pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal, turut meningkatkan partisipasi masyarakat untuk tujuan pemberdayaan sehingga diharapkan mampu mewujudkan kemandirian desa dalam jangka panjang. Adapun dampak negatif dari sektor pariwisata yang dapat merusak tatanan budaya setempat. Untuk itu perlu upaya dari segenap masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk menguatkan nilai-nilai kearifan lokal. Serta sebagai upaya untuk dapat meminimalisir dampak negatif dari globalisasi. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dan masing-masing desa setempat mengenai aturan pembangunan dalam pariwisata maupun sanksi untuk suatu pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, Basuki. (2016). *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang: Intrans Publishing.
- Dilla, Sumadi. (2012). *Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fakih, Mansour. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Irianto. (2011). Dampak Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 7 No. 3 Nopember 2011.
- Luhulima, CPF. (2008). *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Anwas, Oos. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, Totok. (2010). *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Marzali, Amri. (2015). *Antropologi&Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Masyarakat ASEAN : Membidik Peluang MEA. Edisi 7/Maret 2015.
- Muslim, Azis. (2007). Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. VIII No. 2 Desember 2007.
- Nugroho, Iwan. (2015). *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nuraeni, Heny Gustini dan Alfian, Muhammad. (2012). *Studi Budaya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soetomo. (2010). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . (2010). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Didik G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Theresia, dkk Frederick. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Usman, Sunyoto. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warta Ekspor Kementerian Perdagangan. Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN. Ditjen PEN/WRT/04/I/2015 edisi Januari.



STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI MUDA KOPI WIRAUSAHA DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Titik Sumarti¹, Rokhani² dan Sriwulan Ferindian³

¹Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor Indonesia
titiksumarti61@gmail.com

²Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jember, Indonesia

³Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor Indonesia

ABSTRAK

Kopi arabika merupakan produk global dan kopi arabika Simalungun mampu bersaing di dunia internasional. Keberlanjutan usaha kopi arabika tergantung pada petani muda wirausaha. Petani muda sebagai aset bangsa perlu mendapat perhatian agar usahanya mampu bersaing di era global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer. Teknik pengumpulan data adalah FGD dan wawancara mendalam. Subyek penelitian adalah petani muda kopi yang terlibat dalam usaha kopi. Hasil penelitian menunjukkan: strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha memerlukan faktor penggerak dan pelancar. Faktor penggerak meliputi: perubahan sistem ekonomi non pasar menjadi pasar, perubahan sistem patron klien menjadi pasar; membuka akses alat pengolahan kopi, membentuk citra petani muda sebagai agen yang aktif dan kritis, menempatkan petani muda kopi sebagai subyek yang dinamis dalam membangun karakter kepemimpinan dan kewirausahaan. Faktor pelancar meliputi: membangun kolektifitas, mengorganisir petani muda kopi dengan memperkuat modal sosial, melindungi basis sumberdaya air dan lahan dengan menerapkan good agricultural practices (GAP), diversifikasi mata pencaharian, membuka akses pasar, penyuluhan dan pendampingan usaha kopi berbasis informasi dan teknologi. Dalam era pasar bebas (MEA), diperlukan reposisi petani muda kopi dari petani produsen menjadi petani pemasok.

Kata Kunci: Pendampingan, tipologi petani, usaha kopi.

STRATEGIES OF YOUNG FARMER ENTREPRENEURSHIP EMPOWERMENT IN SIMALUNGUN REGENCY

ABSTRACT

Arabica coffee is a product people all around the world know well. It is also recognized that such a coffee product from Simalungun Regency has high quality to compete internationally. The sustainability of the business of the coffee in Simalungun Regency really depends on young farmer entrepreneurs. The young farmers as national asset need more attention from the stakeholders, including the government to be able to compete during the globalization era. The method used in this study was a qualitative approach with the primary data. The techniques of data collection were focus group discussions (FGD) and in-depth interviews. The subjects of the study were young coffee farmers involved in the coffee business. The result shows: it is necessary to emerge driving and facilitating factors as the strategies of empowering young coffee entrepreneurs. The



driving factors include: the change on the system of non-market economy into the market system, the change of patron-client system into the market system; opening an access to coffee processing tools, creating the image of young farmers as an active and critical agents, putting the young coffee farmers as dynamic subjects in building leadership and entrepreneurship characters. Facilitating factors include: building collectivity, organizing coffee young farmers by strengthening social capital, protecting water and land resources by applying good agricultural practices (GAP), livelihood diversification, market access, and technology and information based extension and advisory-based coffee business. In the era of free markets (MEA), it is necessary to reposition the young coffee farmers from producing farmers into suppliers.

Keywords: advisory-based, farmer typology, coffee business.

PENDAHULUAN

Kopi merupakan produk global dan kopi arabika Simalungun mampu bersaing di dunia internasional. Pasar internasional tersebut antara lain Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Thailand, Hongkong, Philipina dan Vietnam (Antara, 2012). Keberlanjutan usaha kopi tergantung pada petani muda kopi. Petani muda sebagai aset bangsa perlu mendapat perhatian agar usahanya mampu bersaing di era global. Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2013) menunjukkan selama periode 2010-2012, struktur umur tenaga kerja subsektor perkebunan untuk golongan produktif menengah sebesar 43.12 persen, produktif muda sebesar 41.92 persen, dan produktif tua sebesar 14.96 persen. Semakin menuanya tenaga kerja pertanian dan subsektor perkebunan di satu sisi, dan di sisi lain lambatnya peningkatan jumlah tenaga kerja golongan produktif menengah serta relatif terbatasnya keterlibatan golongan produktif muda sebagai tenaga kerja memerlukan upaya penanganan serius dari pemerintah.

Sebagai negara dengan produsen kopi keempat terbesar dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia, produksi kopi Indonesia sangat tergantung pada usaha perkebunan rakyat. Produksi kopi telah mencapai lebih kurang 650.000 ton per tahun dari sektor perkebunan rakyat (96,2 persen), sisanya dari sektor perkebunan swasta lebih kurang sebesar 10.000 ton (1,5 persen) dan sektor perkebunan negara menyumbang rata-rata 15.000 ton (2,3 persen) per tahun. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu penghasil kopi arabika di



Indonesia. Luas perkebunan kopi rakyat di Sumatera Utara adalah 79.181 Ha, dengan produksi 55.313 ton. (BPS Sumatera Utara, 2013). Salah satu kabupaten yang potensial dalam pengembangan kopi adalah Kabupaten Simalungun (9.966 Ha) (BPS Sumatera Utara, 2013).

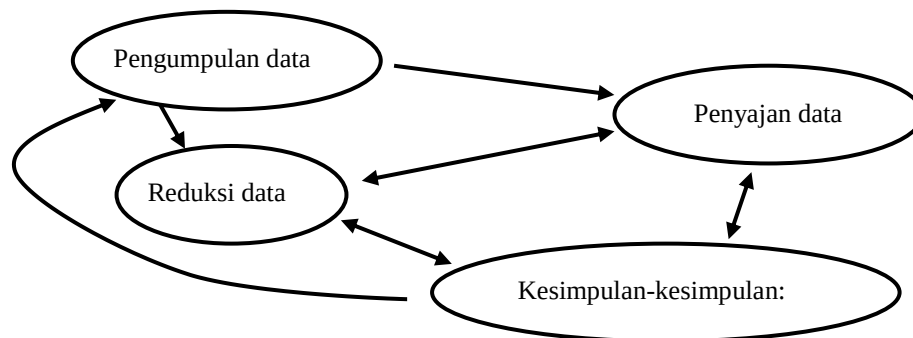
Berdasarkan paparan tentang permasalahan ketenagakerjaan di subsektor perkebunan serta keberlanjutan usaha kopi, maka menjadi relevan untuk melakukan penelitian strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha di Kabupaten Simalungun. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tipologi petani muda kopi di Kabupaten Simalungun? (2) Apa saja faktor penggerak dan pelancar strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha di Kabupaten Simalungun? (3) Dalam kaitannya dengan pasar global (MEA) dengan reposisi petani muda kopi? Dengan rumusan pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menjelaskan tipologi petani muda kopi; (2) Menjelaskan faktor penggerak dan pelancar dalam strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha; dan (3) menjelaskan reposisi petani muda kopi dalam kaitannya dengan pasar global (MEA).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data primer. Jenis data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. FGD dilakukan 2 kali masing-masing diikuti 15 petani muda kopi di Desa Sait Buttu Saribu dan Pamatang Sidamanik Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun. Batasan usia petani muda kopi adalah 20 sampai dengan 40 tahun sesuai dengan pandangan setempat (emic). Subyek penelitian dalam wawancara mendalam adalah petani muda kopi yang terlibat dalam usaha kopi yang dipilih secara sengaja dengan teknik *snowball* (bola salju). Data jenuh pada subyek penelitian ke 11. Wawancara mendalam dengan subyek penelitian dilakukan semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dilakukan dengan model interaktif mengikuti pendapat Miles dan Huberman (1992: 16). Dalam model ini, dilakukan reduksi



data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang ketiganya merupakan suatu siklus untuk memperkuat pengambilan kesimpulan Gambar 1.



Gambar 1. Analisis model interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, (1992:16)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Petani Muda Kopi

Sebelum membahas strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha, akan dideskripsikan terlebih dahulu tipologi petani muda kopi di Simalungun. Mengacu pada konsep White (1980;1991), tipologi petani muda kopi di Kecamatan Pamatang Sidamanik dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu petani muda yang berusaha tani kopi dengan tujuan masih untuk bertahan hidup (*survival*), konsolidasi hingga untuk akumulasi kapital. Rumah tangga yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya masuk dalam kelompok strategi survival, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan mampu menghadapi fluktuasi perubahan pendapatan sewaktu-waktu masuk tipologi strategi konsolidasi dan rumah tangga yang sudah berlebih sehingga mampu melakukan investasi masuk tipologi strategi akumulasi.

Pertama, Tipologi petani muda kopi untuk tujuan bertahan hidup (*Survival*). Petani muda kopi dengan tipologi ini memproduksi kopi untuk tujuan pasar ekspor namun hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Karakter petani muda tipologi ini umumnya masih tinggal bersama orangtua, masih mengandalkan sumberdaya manusia (*human capital*) dengan bekerja sebagai tenaga kerja upahan di kebun kopi maupun perusahaan (PT.



Toba Pulp Lestari) untuk mendapatkan uang tunai pada masa kopi arabika tidak panen (*track*). Artinya petani muda kopi dengan strategi *survival* hanya mengandalkan tenaga kerja (*human capital*) untuk bertahan hidup, karena kepemilikan sumberdaya (aset) lain seperti lahan relatif terbatas, hanya mengelola ladang milik orang tuanya. Modal utama dalam bekerja hanyalah tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya petani muda harus senantiasa sehat, karena sakit berarti kehilangan sumber nafkah karena tidak dapat bekerja.

Kedua, Tipologi petani muda kopi untuk tujuan konsolidasi. Petani tipologi ini umumnya mulai inisiatif memelihara kopi dengan menerapkan *Good Agricultural Practice* (GAP) dan SOP agar kopi yang diproduksi memenuhi standar pasar global (MEA). Usaha memelihara kopi dengan prinsip-prinsip GAP dan sesuai SOP diperoleh dari berbagai tenaga agronomis dari pendamping eksportir, seperti ECOM-Indocafco maupun dari Sumatera Specialty Cofffee (SSC) hingga starbucks selaku pembeli (*buyer*). Para pendamping eksportir umumnya memiliki tenaga agronomis sebanyak 3 (tiga) orang, 2 orang bagian budidaya dan seorang bagian hama dan penyakit tanaman kopi. Petani muda kopi yang menerapkan GAP dan SOP dapat bertanya langsung pada pendamping eksportir untuk mempelajari teknik budidaya kopi yang benar untuk mendapatkan hasil panen yang besar secara kuantitas dan bermutu tinggi.

Petani kopi dengan strategi konsolidasi menganggap kopi sebagai tanaman tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan akan uang tunai, petani muda kopi menanam tanaman muda seperti: cabe rawit, cabe merah, tomat, jagung yang berumur lebih pendek sehingga cepat panen di sela-sela tanaman kopi. Petani muda kopi dengan strategi konsolidasi umumnya memiliki pekerjaan di sektor jasa (misal salon, reparasi motor maupun sopir). Hasil bekerja di sektor jasa disimpan sebagai tabungan untuk mengembangkan usaha, termasuk untuk membeli ladang kopi secara bertahap.

Ketiga, Tipologi petani muda kopi untuk tujuan akumulasi adalah petani muda kopi yang telah menguasai teknologi pasca panen atau teknologi di hilir. Jumlah petani dengan tipologi ini masih terbatas. Berbagai alat pengolah kopi



dari alat yang menghasilkan *green bean*, kopi sangrai hingga kopi bubuk telah dikuasai. Berkat jaringan yang dimilikinya petani muda kopi pun dapat mengakses berbagai macam alat pengolah kopi dari berbagai instansi, mulai dari kementerian pertanian, Dirjen P2HP, Dinas Perkebunan Propinsi maupun Kabupaten Simalungun hingga bantuan Bank Indonesia. Seluruh peralatan diperoleh karena kelembagaan yang kuat, dalam bentuk kelompok tani (Taruna Tani). Beberapa alat pengolah kopi tersebut adalah: Satu unit *pulper* kapasitas 500 kilogram per jam dari Dirjen P2HP (tahun 2013) senilai 30 juta rupiah, satu unit *huller* kapasitas 400 kilogram per jam dari Dirjen P2HP (tahun 2013) senilai 40 juta rupiah, satu unit *huller* kapasitas 2,5 sampai 3 ton per jam dari Bank Indonesia (tahun 2015) senilai 207 juta rupiah, satu unit mesin sortir kapasitas 1 ton per jam dari Dirjen P2HP (tahun 2013) senilai 30 juta rupiah, satu unit mesin sangrai (*roasting*) kapasitas 20 kilogram dari dirjen P2HP (tahun 2013) senilai 73 juta rupiah, satu unit mesin press Aluvo kapasitas 100 kilogram per jam dari Dirjen P2HP (tahun 2013) senilai 13 juta rupiah, satu unit *hand tractor* dari menteri pertanian (tahun 2015) senilai 43 juta rupiah. Alat pengolah kopi dikelola di tingkat kelompok dengan sistem bagi hasil 20 persen untuk kas kelompok, 40 persen untuk operasional tenaga kerja (upah tenaga kerja) dan 40 persen untuk cadangan biaya perawatan peralatan.

Petani muda kopi yang sudah berstrategi akumulasi sudah berposisi dalam kelompok tani, dan orientasi usahanya sudah beribah dari petani produsen menjadi petani pemasok. Dengan jaringan yang dimiliki, petani muda dapat mengakses pembibitan kopi seluas 2 rante (800 meter persegi) dengan kapasitas 25.000 bibit kopi bantuan dari (*Conservation International Indonesia*) atau CII dan starbucks (tahun 2013) senilai 43 juta rupiah dan saung tani senilai 52 juta rupiah dari CII dan starbucks (tahun 2014). Saung tersebut dipergunakan untuk tempat penyuluhan dan pelatihan bagi petani kopi (*farmer training coffee conservation and organic*). Dengan jaringan yang dikuasai petani muda kopi yang telah berposisi dalam kelompok tani mampu mengakses pasar bebas (MEA). Teknologi (internet) sangat membantu petani muda kopi mendapatkan informasi harga kopi langsung dari eksportir yaitu Sumatera Specialty Coffee (SSC) dan



specialty coffee asociatioan American (SCAA). Dengan IT pemasaran kopi arabika sumatera simalungun berbasis teknologi (*on line*). Petani muda kopi yang berstrategi akumulasi umumnya berciri innovator, dengan ciri berani mencoba hal-hal yang baru, akses berbagai pelatihan seperti *test cupper* selama 2 minggu yang diselenggarakan oleh *Sustainable Coffee Platform Indonesia (SCOPI)* Jakarta dengan 48 juta rupiah, sebesar 42 juta rupiah diperoleh dari Kemenkumham. Petani muda kopi menyadari bahwa dalam dunia usaha, jaringan yang luas mutlak diperlukan. Upaya memperluas jaringan pasar juga dilakukan dengan mengikuti berbagai pameran baik di dalam maupun luar negeri atas sponsor beberapa lembaga, diantaranya adalah: kementerian perdagangan, kementerian pertanian, kementerian koperasi dan UMKM hingga Kemenkumham dan kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif²⁶ (Bekraf) Jakarta.

Faktor Penggerak dan Pelancar Dalam Strategi Pemberdayaan Petani Muda Kopi

Dari sintesa tipologi petani muda kopi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD, petani muda kopi wirausaha yang dianggap berdaya adalah petani muda yang memiliki karakter wirausaha, akses dan kontrol pada usaha kopi kuat, dan posisi sosial yang diakui masyarakat. Strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha dilakukan melalui pengembangan karakter wirausaha, pemberdayaan ekonomi, dan penyadaran pengakuan petani muda kopi. Dalam program pengembangan karakter wirausaha, dilakukan kegiatan: (1) Pembentukan *reference group* (petani muda berhasil), (2) Pelatihan kewirausahaan; dan (3) Magang. Dalam program pemberdayaan ekonomi kopi, dilakukan kegiatan: (1) Peningkatan akses terhadap usaha kopi; (2) Sewa lahan jangka panjang; (3) Peningkatan akses modal sesuai musim dan kebutuhan anak muda; (4) Pelatihan teknologi (IT); (5) Demplot tumpangsari dan pengolahan hasil kopi, (6) *Pilot project* pedagang kopi dan pengusaha kopi. Demikian Program pengembangan sosial petani muda kopi, dilakukan kegiatan: (1)

²⁶ Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Bekraf dibentuk era presiden Joko Widodo.



Pendampingan keluarga petani muda kopi melalui penanaman nilai positif kopi; (2) Pembentukan kelompok petani muda kopi wirausaha; (3) Pelibatan kaum muda dalam jaringan pasar; (4) Koordinasi kelompok dalam pengembangan kopi.

Dalam upaya pemberdayaan petani muda kopi wirausaha, diperlukan faktor penggerak dan pelancar. Faktor penggerak mencakup: (1) Perubahan orientasi usaha dari non pasar menjadi pasar; (2) Asuransi/jaminan pribadi, patron klien menjadi pasar (cadangan uang tunai untuk tabungan); (3) Membuka akses pada alat produksi; (4) Membentuk citra petani muda sebagai agen yang aktif dan kritis; dan (5) Menempatkan petani muda kopi sebagai subyek yang dinamis dalam membangun karakter kepemimpinan dan kewirausahaan. Faktor pelancar mencakup: (1) Membangun kolektifitas melalui penguatan kelembagaan petani muda kopi (kelompok tani, Koperasi, Gapoktan); (2) Memperkuat modal sosial: *trust*/kepercayaan, jaringan, kelembagaan yang kuat; (3) Melindungi basis sumberdaya: sumber mata air, sungai, lahan subur untuk kelestarian lingkungan (*good agricultural practices*); (4) Diversifikasi mata pencaharian (nafkah ganda) dengan melepaskan ketergantungan pada peminjam uang; (5) Membuka akses pasar; dan (6) Memberikan penyuluhan dan pendampingan usaha kopi berbasis IT.

Reposisi Petani Muda Kopi Dalam Kaitan Dengan Era Pasar Bebas (MEA)

Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menuntut kesiapan petani untuk memasuki sistem pasar bebas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Pada uraian sebelumnya telah dibahas di era MEA diperlukannya penguatan kelembagaan petani, baik melalui kelompok tani, koperasi maupun Gapoktan agar dapat bernegosiasi dengan pihak luar dan membangun jaringan kerja. Jaringan merupakan salah satu unsur modal sosial. Modal sosial berkontribusi terhadap tindakan atau aksi kolektif (Meinzen-Dick *et al*, 2004). Aksi kolektif dalam bentuk kelembagaan dapat mencapai tujuan bersama. Hasil studi Rokhani, *et al* (2016) menunjukkan bahwa dengan tindakan kolektif, petani dapat mengakses pasar global, artinya pasar dengan segala tuntutan tidak



dihindari oleh petani, namun petani berusaha memenuhi segala tuntutan pasar global.

Di Era MEA, peran kelembagaan petani sangat penting karena melalui kelembagaan petani dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*), bernegosiasi, memperluas jaringan pasar dengan membuat nota kesepahaman (MoU) dalam pemasaran hasil dengan harga yang telah disepakati. Penguatan kelembagaan memerlukan peran penyuluh sebagaimana amanah UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang menyebut penyuluhan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Memperkuat peran kelembagaan petani di era MEA perlu dibarengi dengan usaha mereposisi petani bukan hanya sebagai petani produsen namun juga petani pemasok. Reposisi petani merupakan implementasi dari UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memberi ruang untuk mereposisi petani dari petani produsen menjadi petani pemasok. Berbeda dengan petani produsen yang pernah diraih Indonesia pada masa revolusi hijau, dimana petani mampu memproduksi hasil pertanian melalui teknologi usaha tani. Namun di era pasar bebas (MEA), bukan sekedar petani produsen yang dibutuhkan namun petani yang mampu merespon dan memenuhi permintaan pasar atau petani pemasok.

PENUTUP

Tipologi petani muda *survival*, konsolidasi maupun akumulasi bernafkah ganda. Tipologi petani muda kopi yang berstrategi akumulasi memiliki skala usaha besar, menguasai teknologi pengolahan kopi, telah berposisi dalam kelompok tani dan berposisi sebagai petani produsen sekaligus pemasok. Petani muda kopi dengan strategi *survival* maupun konsolidasi masih fokus pada usaha



lain (bukan usaha kopi), skala usahanya relatif kecil, belum berposisi di dalam kelompok tani, baru sebagai petani produsen belum menjadi petani pemasok. Strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha memerlukan faktor penggerak dan pelancar. Faktor penggerak meliputi: perubahan sistem ekonomi non pasar menjadi pasar, perubahan sistem patron klien menjadi pasar; membuka akses alat pengolahan kopi, membentuk citra petani muda sebagai agen yang aktif dan kritis, menempatkan petani muda kopi sebagai subyek yang dinamis dalam membangun karakter kepemimpinan dan kewirausahaan. Faktor pelancar meliputi: membangun kolektifitas, mengorganisir petani muda kopi dengan memperkuat modal sosial, melindungi basis sumberdaya air dan lahan dengan menerapkan *good agricultural practices (GAP)*, diversifikasi mata pencaharian, membuka akses pasar, penyuluhan dan pendampingan usaha kopi berbasis informasi dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2012, April 19). AS, Perancis, Jepang, Hongkong Tertarik Kopi Arabika Simalungun. from <http://www.medanmagazine.com/as-perancis-jepang-hongkong-tertarik-kopi-arabika-simalungun/>
- Meinzen-Dick, R., Di Gregorio, M. (2004). *Collective Action and Property Rights for Sustainable Development*. 2020 Vision for Food, Agriculture and the Environment. Focus 11, Brief 1. Washington DC: IFPRI.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2013). *Analisis dan Proyeksi tenaga Kerja Pertanian 2013-2019*. Jakarta.
- Rokhani, *et al.* (2016). Dilema Kolektivitas Petani Kopi: Tinjauan Sosiologi Weberian (Kasus Petani Kopi di Nagori Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara). *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 4, No. 1 (2016). ISSN: 2302-7525
<http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/12772/9706>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- White, Benjamin N.F. (1980). *Rural Household Studies in Anthropological Perspective. Bunga rampai: Rural Household Studies in Asia*. Singapore: Singapore University Press.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

----- (1991). Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java 1900-1990. Pp 41-49. Alexander, Paul, Boomgard, Peter and White, Benjamin (eds). 1991. *In the Shadow of Agrarculture: Non Farm Activities in Javanese Economy, Past and Present*. Amsterdam: Royal Tropical Institute .



MEMBANGUN KEBERDAYAAN PEMULUNG BERBASIS ASET DI ERA PASAR BEBAS (MEA)

Tri Prasetijowati¹ dan Ita Kusuma Mahendrawati²

¹FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, ²FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya

triprasetijowati @ co.id dan itakusuma67@yahoo.com

ABSTRAK

Peningkatan jumlah urbanisasi seperti di Surabaya memberikan dampak tersendiri khususnya dalam ketersediaan lapangan kerja di sektor formal. Pemulungan adalah salah satu pekerjaan di sektor informal yang banyak diminati kaum urban karena pekerjaan ini tidak memerlukan persyaratan tertentu. Hasil pulungan tersebut dibutuhkan sejumlah perusahaan tertentu yang bergerak di bidang produksi barang pulungan seperti besi, kaca, plastik, tulang, serta kertas. Dari identifikasi di lapangan ditemukan adanya aset fisik, finansial, sumber daya manusia, dan modal sosial meskipun masih dalam kondisi rendah. Di samping hal tersebut keberdayaan pemulung dalam peningkatan taraf hidup meliputi pendapatan, keprofesionalan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, adopsi teknologi, kepercayaan diri, kebiasaan menabung serta orientasi pada anak pada kondisi rendah. Sedangkan proses pemberdayaan selama ini belum pernah dilakukan karena belum ada lembaga atau dinas yang memberikan payung hukum terhadap komunitas pemulung ini. Saat ini Indonesia termasuk dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan diri dalam era persaingan pasar bebas ini misal dengan mempersiapkan sumberdaya manusia handal. Pemulung sebagai ujung tombak dalam perdagangan sampah harus menjadi subyek pembangunan dan mampu membangun keberdayaannya. Sebagai komunitas dengan ciri tertentu pemberdayaan bagi komunitas pemulung mengarah pada upaya meningkatkan taraf hidup yang mencakup 3 dimensi yaitu pencitraan pemulung, kembali ke desa asal, dan peningkatan kecakapan hidup (serta melibatkan peran pemerintah dan swasta. Penelitian ini bertujuan menemukan sebuah model pemberdayaan dengan mengkaji aset yang dimiliki oleh pemulung di Kota Surabaya. Dengan menggunakan pendekatan mix method dalam menganalisis data serta pengambilan data dengan menggunakan questioner serta wawancara dan focus group discussion maka akan menjawab permasalahan yang ada.

Kata kunci: pemberdayaan ,aset ,pemulung, peningkatan taraf hidup

PENDAHULUAN

Kajian mengenai kehidupan pemulung berawal dari sebuah keprihatinan atas kehidupan pemulung yang umumnya hidup di kawasan kumuh, dengan segala keterbatasan yang dimiliki serta kadang menghadapi tindakan yang kurang manusiawi, tetapi mereka dapat bertahan hidup dan berupaya



meningkatkan taraf hidupnya. Disatu sisi, kehadirannya dianggap telah mengganggu keindahan,kenyamanan, dan ketertiban kota. Namun di sisi lain, pemulung turut membantu pihak Dinas Kebersihan/pemerintah kota setempat setempat dalam mengurangi gunungan sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) ataupun tempat pembuangan akhir (TPA) serta sebagai ujung tombak dalam perdagangan barang yang masih bernilai ekonomis yang di pungut dari sampah yang mana dibutuhkan oleh beberapa perusahaan tertentu.dalam upaya menghadapi.Sebagai ujung tombak dalam perdagangan sampah pemulung perlu membangun keberdayaannya sehingga dapat berperan sebagai subyek pembangunan dengan cara meningkatkan taraf hidup karena meningkatkan taraf hidup merupakan masalah utama bagi manusia.

Dalam teori People Centered Development (Pembangunan yang berpusat pada manusia) tujuan dari Pembangunan sosial adalah meningkatnya taraf hidup manusia, berdasarkan tujuan tersebut penekanan pembangunan sosial adalah pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri.Bila tujuan akhir setiap kegiatan pembangunan, baik dalam konteks makro maupun mikro, adalah peningkatan taraf hidup, maka optimalisasi pencapaian tujuan itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara optimal. Berdasarkan konsep di atas, dukungan SDM yang berkualitas sangat menentukan keoptimalan keberhasilan pencapaian tujuan itu.Adapun langkah strategis Indonesia dalam menghadapi MEA adalah peningkatan sumberdaya manusia.

Demikian pula yang ada pada diri pemulung , ditengah berbagai tekanan ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup hal ini akan sulit terlaksana tanpa adanya aset atau modal yang dimiliki oleh komunitas pemulung Dari identifikasi pada lokasi penelitian ,karakteristik pemulung 77,6 % berusia antara 26-56 tahun,serta 70,8% mereka mempunyai status sudah berkeluarga, dan 56,9 % pendidikan mereka hanya sampai SD.Adapun status tempat tinggal mereka 87,6% indekost dan frekuensi lamanya bekerja sebagai pemulung 66,9% adalah lebih dari 4 tahun, serta status kependudukan mereka 66,2% ber-KTP luar



Surabaya. Meskipun hidup dalam kondisi kekurangan banyak fasilitas yang tidak didapatkan, nyatanya pemulung dapat hidup dalam struktur kehidupan perkotaan yang keras. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai aset atau potensi atau modal sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Dalam konsep pemberdayaan menurut Priyono dan Pranaka (1996) manusia adalah subyek dari dirinya sendiri artinya tidak ada manusia atau masyarakat yang sama sekali tanpa daya atau tanpa aset (Adi, 2003). Adapun kondisi aset yang dimiliki pemulung 72,1% pemulung mempunyai *aset sumber daya manusia* pada taraf sedang, dalam arti kepemilikannya sangat terbatas. Mereka pernah mengenyam pendidikan walaupun hanya tingkat SD, di samping itu mereka juga mempunyai kemampuan memilah sampah yang bernilai ekonomis sedangkan teknologi mengolah hasil pulungan masih sangat sederhana.

Aset lain dimiliki pemulung adalah *aset fisik*, dimana sebanyak 97,4 % pemulung tidak memiliki aset fisik. Aset ini meliputi kepemilikan sarana transportasi, sarana produksi dan sarana kerja. Selanjutnya *aset finansial* yang mana sebanyak 63,2% pemulung mempunyai aset finansial rendah karena penghasilan mereka tergolong pas-pasan yang mana hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengirim keluarganya di daerah asal. Selain ketiga aset di atas, sebanyak 93,5% pemulung mempunyai *aset modal sosial* yang rendah. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa norma, trust, resiprocity, partisipasi serta jaringan antara sesama pemulung atau dengan pengepulnya timbul bukan dari kesadaran masing masing anggota komunitas ini, tetapi karena adanya keharusan atau keterpaksaan karena mereka telah menerima jasa baik dari pengepulnya serta imbalan yang diharapkan apabila mereka melakukan suatu jasa pada sesama pemulung.

Demikian juga dengan keberdayaan pemulung dalam peningkatan taraf hidup, yang mana meliputi indikator *pendapatan pemulung* dimana 66,7 persen pemulung mempunyai pendapatan termasuk dalam kategori sedang, dalam arti pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. *Keprofesionalan*, identifikasi di lapangan 74,9 % pemulung mempunyai keprofesionalan termasuk dalam kategori sedang. Keprofesionalan disini adalah



upaya pemulung untuk menunjukkan sebagai pribadi yang jujur, sopan, disiplin dapat dilihat dari perilaku pemulung ketika berada di tengah masyarakat. *Pemenuhan kebutuhan dasar* sebanyak 74,9 % pemulung pada kondisi sedang. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan tempat tinggal, meskipun sangat terbatas karena untuk kebutuhan tersebut adakalanya terpenuhi karena pemberian orang lain. Selanjutnya *tingkat adopsi teknologi* adalah sebanyak 86,9 % pemulung mempunyai adopsi teknologi rendah ,bahkan dapat dikatakan teknologinya bersifat tradisional dimana proses pengolahan bahan pulungan dilakukan secara manual. Selanjutnya 44,4% pemulung kurang memiliki *kebiasaan menabung* atau dalam kondisi sedang dalam arti bahwa mereka mengharuskan menyisihkan sedikit hasil pendapatannya untuk keperluan lain. Menyisihkan pendapatan tersebut dilakukan setiap hari karena ada suatu kebutuhan membayar uang kos yang harus dipenuhi setiap bulannya. Di samping itu ada beberapa pemulung mempunyai kewajiban mengirim uang pada keluarga di daerah asal untuk indikator selanjutnya sebesar 83,1%, pemulung kurang mempunyai *kepercayaan diri* atau dengan kata lain pada tingkat sedang. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa mereka yakin bahwa pekerjaan memulung adalah sebuah pekerjaan yang tidak melanggar hukum atau dapat juga sebagai pekerjaan yang khalal, bahkan mereka beranggapan bahwa pekerjaan mereka menguntungkan masyarakat, sebab barang pulungan yang mereka ambil adalah barang yang bersifat non organik yaitu tidak mudah hancur dengan tanah. Sebagai indikator selanjutnya sebanyak 65,4 % pemulung memiliki *orientasi pendidikan pada anak* pada tingkat sedang, dalam arti mereka kurang begitu yakin anak mereka bisa melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi ,karena membutuhkan biaya yang mahal.

Sebagian besar pemulung merupakan kaum migran yang pindah ke kota dengan harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam kondisi serba terbatas, komunitas ini tetap bertahan hidup dan berupaya meningkatkan taraf hidupnya, hal tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya mereka mempunyai suatu daya atau aset yang menjadi



kekuatan mereka (Hikmat, 2004) meskipun daya atau aset tersebut masih lemah sehingga perlu adanya penguatan pada aset aset yang lemah tersebut melalui suatu pemberdayaan. Dari fenomena yang dipaparkan di atas maka luaran dari penelitian ini akan di susun sebuah model pemberdayaan berbasis aset agar tercipta suatu keberdayaan pemulung untuk menghadapi persaingan di era pasar bebas mengingat pemulung sebagai ujung tombak perdagangan sampah yang dibutuhkan beberapa perusahaan besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap dimana pada tahap ke 1 menggunakan metode gabungan (*mixed method*) yaitu dengan memadukan metode kuantitatif dan kualitatif dalam memahami suatu realitas sehingga dapat memberikan hasil yang sangat baik menyediakan data lebih kaya dan saling melengkapi. Informasi kualitatif menjadi sama ilmiahnya dengan data kuantitatif bahkan sering lebih valid. Adapun metode utama yang digunakan adalah metode kuantitatif kemudian didukung metode kualitatif. Populasi penelitian ini adalah 14.000 pemulung di kota Surabaya. Pengambilan sampel dengan menggunakan interval kepercayaan atau *confidence interval* yaitu suatu tebaran nilai yang dibuat sekitar point estimate yang memungkinkannya untuk menyatakan tentang probabilitas (kemungkinan bahwa interval yang berisi parameter populasi antara batas keyakinan yang terbawah dan batas keyakinan yang teratas (Bohrnstedt dkk, dalam Slamet 2006).

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah sebesar 390 pemulung dengan interval kepercayaan 95% dan P:Q = 0,5:0,5 dan besarnya sample pada standart Error + - 5% (Arkin, Herbert.al, 1957 Tables For Statisticians dalam Slamet, 2006). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 390 pemulung dengan rincian Surabaya Barat sebanyak 146 pemulung, Surabaya Selatan sebanyak 84 pemulung, Surabaya utara sebanyak 79 pemulung dan Surabaya Timur sebanyak 81 pemulung. Alat analisis yang digunakan adalah *path anlysis* untuk mengetahui besarnya pengaruh (sumbangan efektif) variabel independen terhadap variabel dependen baik langsung, tidalangsung, bersama-



sama maupun dari luar model sehingga akan melahirkan model pemberdayaan yang efektif.

Pada tahap ke-2, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan akan mengambil lokasi di kota Surabaya dengan alasan sebagai kota no 2 terbesar di Indonesia, sebagai kota besar tidak luput dengan adanya kaum migrant, yang banyak beralih ke sektor informal salah satu nya bekerja sebagai pemulung, dan mempunyai jumlah pemulung yang besar 14000 jiwa dan kelompok komunitas ini dikoordinir IPI (Ikatan Pemulung Indonesia). Subyek dalam penelitian ini adalah pemulung di 4 wilayah kota Surabaya yaitu Surabaya Barat Surabaya selatan, Surabaya timur, dan Surabaya utara. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimasing masing wilayah penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan angket, teknik observasi dan dilakukan selama proses pelaksanaan penelitian berlangsung, instrument yang relevan untuk mengamati proses penelitian adalahah chek-list yaitu terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang dipersiapkan sebelum dilakukan observasi. Disamping itu teknik pengambilan data juga menggunakan teknik Focus Group Discussion dengan instansi yang terkait. Teknik Analisis data menggunakan metode kualitatif akan dilakukan dengan penggunaan model analisis interaktif (Miles & Huberman, dalam Sutopo, 2002: 186). Dalam model analisis ini merupakan logika analisis yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu Reduksi Data, Sajian Data, dan Penarikan Simpulan atau Verifikasi.

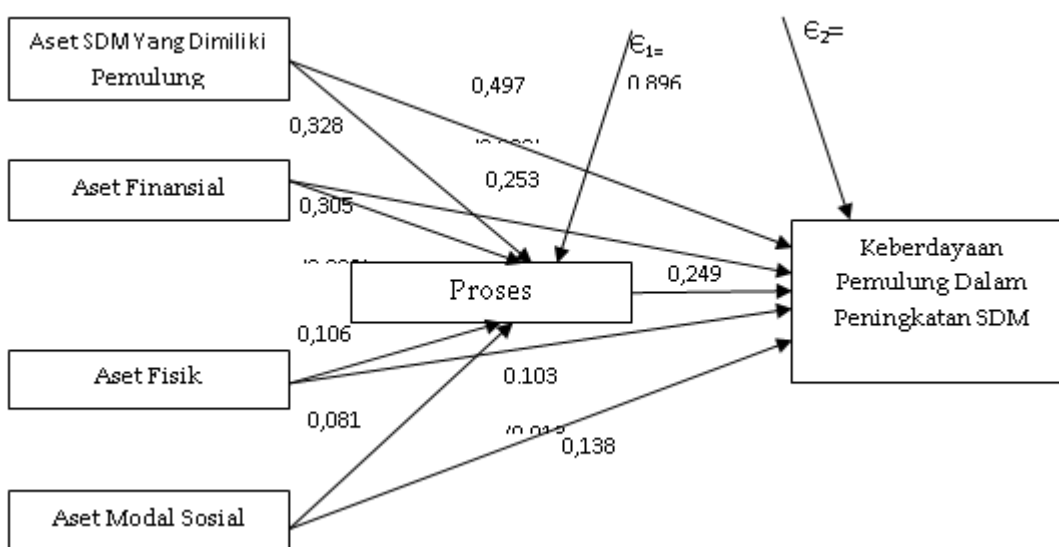
HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberdayaan Pemulung dalam Peningkatan Taraf Hidup

Faktor-faktor yang menjadi komponen model pemberdayaan terdiri dari faktor *input*, *process*, *output* dan *outcome*. Faktor *input* terdiri dari modal fisik, modal SDM, modal sosial, serta modal finansial. Faktor yang berfungsi sebagai *process* adalah proses pemberdayaan, yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lingkungan dan bina kelembagaan sedangkan faktor *output* adalah tingkat



keberdayaan dan faktor *outcome* adalah peningkatan taraf hidup. Faktor-faktor yang ada dalam model pemberdayaan pemulung dibangun berdasarkan teori dan logika, dianalisis menggunakan analisis jalur (*path analysis*) berdasarkan data empirik yang dikumpulkan dari hasil survei, pengamatan, *indepth interview* dan *focus grup discussion* (FGD). Analisis jalur (*path analysis*) dimaksudkan untuk memperoleh nilai pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh secara bersama-sama dan pengaruh di luar model untuk setiap faktor. Analisa data dengan menggunakan analisis jalur akan didiskripsikan dibawah ini dibawah ini :



Gambar 1 Diagram Analisis Jalur dengan koefisien path dan signifikansinya

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien jalur seperti yang tampak pada gambar diatas maka menunjukkan bahwa semua faktor atau variabel bebas memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap tingkat keberdayaan pemulung dalam peningkatan taraf hidup. Faktor proses pemberdayaan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat . Hal ini mengandung makna bahwa tingkat keberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan melalui perbaikan proses pemberdayaan warga masyarakat terutama dalam bina manusia, bina lingkungan, bina usaha dan bina lembaga serta faktor-faktor modal finansial, modal SDM modal sosial, dan modal fisik



Model pemberdayaan Pemulung berbasis aset

Setelah mengidentifikasi aset –aset yang dimiliki pemulung yang ternyata mempunyai pengaruh terhadap peningkatan taraf hidup, maka akan diuraikan pola pemberdayaan pemulung berbasis aset. Pola pemberdayaan yang diperuntukkan bagi mereka tidak dapat disamakan dengan pola yang diperuntukkan bagi komunitas lainnya. Setelah melakukan kajian secara komprehensif terhadap kondisi eksisting pemulung maka model pemberdayaan pemulung berbasis aset dapat dikelompokkan dalam 3 dimensi yaitu pencitraan pemulung, kembali ke desa asal, dan peningkatan kecakapan hidup (life skill). Disamping itu diperlukan campur tangan pemerintah yang berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan. Agar lebih jelasnya maka di bawah ini akan disajikan model pemberdayaan pemulung berbasis aset.

Model Pemberdayaan Pemulung Berbasis Aset di Kota Surabaya

Dasar Pemikiran

1. Ketimpangan pembangunan desa –kota merupakan kondisi yang melatarbelakangi arus migrasi penduduk dari desa ke kota sehingga pekerjaan di sektor informal merupakan salah satu pilihan mereka untuk dapat bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidup di kota Surabaya. Salah satu bentuk sektor informal tersebut adalah perdagangan sampah yang mana sebagai ujung tombaknya adalah komunitas pemulung.
2. Jenis pekerjaan sebagai pemulung merupakan jenis pekerjaan yang belum tertulis sampai saat ini dalam arti belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah, sehingga orang-orang yang berprofesi menjadi pemulung belum menjadi bagian dari kebijakan Negara, padahal mereka adalah warganegara yang harus diperhatikan.
3. Belum adanya dinas atau SKPD yang menaungi dan memberikan payung hukum pada komunitas pemulung, sehingga belum ada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemulung.
4. Adanya potensi atau aset yang ada dalam diri pemulung, yaitu aset fisik, finansial, aset modal Sosial yang mana tergolong rendah dan aset SDM yang



tergolong sedang yang memungkinkan untuk di kembangkan. Untuk itu diperlukan program pemberdayaan berbasis aset guna peningkatan taraf hidup pemulung

Tujuan

Pemberdayaan pemulung berbasis aset dilaksanakan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan penguatan dan mengembangkan aset yang dimiliki oleh komunitas pemulung, sehingga mereka dapat mempunyai keberdayaan dalam peningkatan taraf hidupnya. Kriteria dari pencapaian tujuan tersebut adalah :
 - a. Terpenuhi pendapatan sesuai dengan Upah minimum Regional kota Surabaya
 - b. Mempunyai jiwa profesionalisme yang tinggi
 - c. Terpenuhi kebutuhan makan ,sandang dan tempat tinggal.
 - d. Dapat melakukan aktivitas keseharian sesuai standart umum
 - e. Dapat melakukan adopsi teknologi dengan baik dan Mempunyai kebiasaan menabung
 - f. Mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya
 - g. Mempunyai orientasi pendidikan pada anak.
2. Mengembangkan mekanisme pemecahan masalah sosial dalam komunitas pemulung. Kriteria pencapaian tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya dinas yang menaungi komunitas pemulung ini
 - b. Adanya Kerjasama dari pemerintah atau swasta dan perguruan tinggi untuk menangani permasalahan komunitas pemulung.

Sasaran

Sasaran dari pemberdayaan berbasis aset ini adalah orang yang datang dari daerah lain dalam satu kota ,kabupaten, provinsi, dan satu pulau atau antar kota, kabupaten, propinsi dan antar pulau dalam satu wilayah tertentu.

Adapun Kriteria sasaran:

- a. Mempunyai pekerjaan pokok sebagai pemulung yang sudah menetap di Surabaya sekurang kurangnya 1 tahun



- b. Memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosialnya
- c. Usia minimal 15 Tahun atau sudah berkeluarga

Program dan Kegiatan

Program

Program Pemberdayaan berbasis 725sset , merupakan program pemberdayaan yang mana memberikan penguatan pada 725sset - 725sset yang lemah yang dimiliki pemulung agar mempunyai keberdayaan guna peningkatan dalam taraf hidup. Program pemberdayaan ini menggunakan pendekatan kelompok dengan 725sset725725 melalui pendektan kelompok seseorang akan mengalami proses belajar 725sset725 yang efektif untuk mengembangkan kapasitas diri, sehingga dapat memenuhi segala kebutuhannya.Konsep kelompok ini tidak menekankan pada bentuk fisik kelompok tetapi paa hubungan 725sset725 dalam kelompok tersebut Dalam pendekatan kelompok perlu memperhatikan berbagai 725sset725 , yaitu daerah asal,pelaku pemberdayaan ,dan proses pemberdayaan . disamping itu ada 3 dimesi dalam pemberdayaan berbasis 725sset ini , *pertama* adalah pencitraan pemulung, *kedua* kembali kedesa asal dan yang *ketiga* adalah life Skill.

Kegiatan

Ada 2 jenis kegiatan dalam PEMBERDAYAAN PEMULUNG BERBASIS ASET , yaitu

Kegiatan Pokok terdiri 3 dimensi

Dimensi pencitraan Pemulung

Usulan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pihak-pihak yang terlibat
Siaran Radio/ Telivisi/ media on line	Memberikan informasi harga-harga produk pulungan. Mensosialisasikan bhw profesi pemulung adalah baik, pahlawan kebersihan lingkungan. Mensosialisasi!kan program pengemba- ngan pemulung.	1. Pemulung 2Masyarakat luas	Dinas Kebersihan Radio daerah Asosiasi pemulung Perguruan Tinggi Pihak swasta (Pabrik pengola- han sampah).



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Usulan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pihak-pihak yang terlibat
Perumusan istilah baru pemulung	Merumuskan istilah baru yang dapat mengangkat citra pemulung yang dapat diterima masyarakat luas sebagai kelompok produktif (tidak marginal).	Akademisi, Masyarakat Pemulung, dan Pemerintah.	Politisi Perguruan Tinggi Dinas Kebersihan Asosiasi pemulung Pemerhati lingkungan.
Identitas pemulung	Memberikan status dan identitas kependudukan. Melengkapi atribut pemulung untuk meningkatkan K3 (keterampilan, keamanan dan keselamatan kerja).	1. Pemulung 2. TPA	Pemda (Dinas Kependudukan dan Dinas Kebersihan) Kepolisian Pemulung.
Asuransi pemulung	Untuk memberikan perlindungan kepada pemulung sebagai tenaga kerja (Jamsostek).	Pemulung	Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja Jamsostek
Pemeliharaan kesehatan	Meningkatkan kualitas kesehatan pemulung dan keluarganya.	Pemulung dan keluarga	Dinas Kesehatan Dinas Sosial

Dimensi bermitra di desa asal

Usulan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pihak Yang Terlibat
1. Kemitraan	1. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pihak swasta (Mall, Rumas Sakit, Perumahan ,pabrik , PKK ,untuk membentuk jaringan kerja dalam hal perdagangan sampah	Pemulung dan Keluarga	Dinas Tenaga Kerja Dinas Sosial, Dinas Pasar Pengelola Mall dan Realstet



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dimensi Life Skill

Usulan Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Pihak Yang Terlibat
Bimbingan Sosial	Agar mempunyai tanggung jawab sosial pada masyarakat	Pemulung dan keluarga	Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas TenagaKerja Perguruan Tinggi Badan pemberdayaan Provinsi dan kota
Bimbingan Fisik	Agar mempunyai kesegaran fisik sehingga bisa menjaga kesehatan	Pemulung dan keluarga	Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas TenagaKerja Perguruan Tinggi Badan pemberdayaan Provinsi dan kota
Bimbingan mental keaga maan	Agar memiliki kesadaran beragama sehigga dapat beragama denga baik	Pemulung dan keluarga	Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas TenagaKerja Perguruan Tinggi Badan pemberdayaan Provinsi dan kota
4. Bimbingan ketrampil an kerja	Agar memiliki ketrampilan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga	Pemulung dan keluarga	Dinas Sosial Dinas Pendidikan Dinas TenagaKerja Perguruan Tinggi Badan pemberdayaan Provinsi dan kota
5. Pelatihan penyorti ran barang pulungan	Agar pemulung mengetahui jenis barang pulungan melalui penyortiran, karena akan mempunyai harga yang berbeda dengan apabila di jual tanpa di sortir lebih dahulu	Pemulung dan keluarga	Badan pemberayaan Provinsi Dinas perindustrian provinsi

Kegiatan Pendukung

Kegiatan ini bersifat tidak langsung yang dilakukan terhadap komunitas pemulung yaitu penyediaan fasilitas , seperti penyediaan tempat tinggal dan penyediaan fasilitas lainnya seperti sarana air bersih, tempat ibadah dsb.



Pendampingan

Pendampingan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mengendalikan kegiatan pemberdayaan komunitas pemulung, mempertahankan kemajuan yang di capai dan memanfaatkan hasil untuk keberlanjutan program

Pemantauan (Monitoring)

Merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan agar tujuan dapat di capai secara optimal, adapun diolaksanakan oleh Dinas atau SKPD atau LSM yang di beri wewenang memberikan naungan melalui keputusan pemerintah. Sebagaimana disampaikan oleh Cernea dan Tepping dalam Mardikanto (2010) pemntauan adalah proses pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan yang terjadi selama pelaksanaan program dengan maksud menghindari keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program sehingga program dilaksanakan sesuai rencana Dalam kegiatan ini diperoleh data atau informasi sejauh mana faktor input dan proses telah sesuai dan mendukung tujuan.

PENUTUP

1. Model pemberdayaan pemulung berbasis aset meliputi tiga dimensi yaitu pencitraan pemulung, bermitra di desa asal dan bimbingan dan pelatihan life skill
2. Untuk *program pencitraan pemulung* kegiatan yang dilakukan pertama bekerjasama dengan media masa (radio / media cetak) / membentuk radio komunitas dengan tujuan memberikan informasi tentang harga barang pulungan,,mensosialisasikan tentang peran pemulung dalam hal kebersihan. Kedua adalah merumuskan istilah baru untuk pemulung. Ketiga memberikan kartu identitas kota tempat tinggal saat ini, keempat memberikan asuransi khusus nya kesehatan.
3. Untuk *program bermitra di desa asal* kegiatan yang dilakukan adalah menjalin kemitraan di desa asal dengan pihak pemerintah kota / kabupaten, Mall, PKK, atau rumah sakit membentuk jaringan kerja



dalam hal perdagangan sampah

4. Untuk *program life Skill* kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan mental keagamaan dan bimbingan ketrampilan kerja, serta pelatihan penyortiran barang pulungan.
5. Perlu adanya Dinas yang berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan pemulung sehingga dapat berperan menjembatani kepentingan pemulung dengan pihak luar (swasta / pemerintah , LSM ,Perguruan tinggi)
6. Melihat peran pemulung sampai saat ini terutama sebagai ujung tombak perdagangan sampah serta kemampuannya dalam memisahkan sampah organik dan an organik maka pemulung masih diperlukan , hanya saja perlu peran serta pemerintah dan pihak lainnya agar citra komunitas ini menjadi baik serta aktivitas memulung ini dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mendapat pengakuan umum dan pemerintah

Saran

1. Agar masyarakat sekitar tidak selalu merasa curiga dan memberikan styrotype yang negative pada kelompok pemulung , maka perlu diberikan seragam kerja dan kartu identitas .
2. Perlu adanya Paguyuban Pemulung di setiap wilayah dan mempunyai struktur kepengurusan yang jelas dan berfungsi untuk kesejahteraan pemulung
3. Dalam pemmberdayaan pemulung berbasis aset perlu adanya dukungan lembaga dinas / instansi/ LSM secara terpadu baik pusat atau daerah
4. Perlu adanya sarana komunikasi yang bisa memberikan informasi harga barang pulungan agar pemulung dapat mengetahui secara terbuka, berapa harga masing masing barang yang diperolehnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi,Isbandi Rukminto,2003.*Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat,dan Intervensi Komunitas :Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*,Jakarta Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Daniel T Sicular,Pockets of Peasant in Indonesia Cities :*The Case Of Scavenger,World Development*,Vol 9,1991
- Hikmat, Harry, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniosa Utama Press.
- Mardikanto Totok ,2010*Konsep Pemberdayaan Masyarakat*,UNS,Surakarta
- Pranarka&Vidhyandika M. 1996. "*Pemberdayaan*" dalam Onny S.P. dan A.M.W. Pranarka (ed.). Jakarta: CSIS.
- Slamet Y, 2006,*Metode Penelitian Sosial*, Surakarta: Sebelas Maret Univerity Press
- Suharto Edi, 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama,Bandung
- Versvel Hans.1986."*Scavenging in Indonesia Cities*" dalam Peter J.M Nas (ed). *The Indonesian City Studies in Urban Development and Planning*.Dordrecht:Foris Publications



MENUJU PERGESERAN PARADIGMA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Subejo

Prodi Penyuluhan dan Komunikasi, Fakultas Pertanian UGM dan
Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana UGM
Email: subejo@ugm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dan dinamika pembangunan global berdampak pada pemahaman komunikasi pembangunan, pada awalnya komunikasi dipandang sebagai proses transmisi pesan yang bersifat satu arah (linier) sampai dengan pertukaran pesan (interaktif) dalam proses pembangunan. Pada beberapa dekade terakhir, komunikasi pembangunan dimaknai sebagai proses pertukaran pengetahuan, dialog untuk mencapai konsensus yang bermuara pada tindakan kolektif untuk mencapai kemajuan pihak-pihak yang terkait yang berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan. Studi ini merupakan studi deskriptif analitis dilakukan dengan studi literatur, observasi dan pengalaman keterlibatan dalam berbagai program pembangunan di daerah. Pendekatan baru komunikasi pembangunan mengintegrasikan dua pendekatan dominan yaitu monologis (one-way communication) dan dialogis (two-way communication) dalam konsep komunikasi multi jalur (multi track communication). Setiap masyarakat memiliki tahapan perkembangan yang berbeda karakteristik kepemilikan sumberdaya yang beragam sehingga kombinasi dua pendekatan dengan fokus dan bobot pada pendekatan tertentu dapat dipilih dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat. Komunikasi pembangunan yang efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan orientasi pada pencapaian tingkatan partisipasi yang tertinggi yaitu partisipasi yang memberdayakan (empowered participation). Partisipasi aktif stakeholders terkait dan keberhasilan komunikasi pembangunan juga ditentukan oleh strategi komunikasi pembangunan. Intervensi pada semua lapisan masyarakat melalui strategi advokasi, mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan perilaku individu secara terintegrasi dapat memfasilitasi perubahan masyarakat yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Kata kunci: komunikasi, pembangunan, multi jalur, partisipasi, strategi komunikasi

PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemaknaan tentang komunikasi pembangunan (*development communication*) perlu dilihat dari dua komponen penyusunnya yaitu “pembangunan (*development*)” dan “komunikasi (*communication*)”. Pemaknaan atas konsep pembangunan telah berkembang dan sangat variatif, dimulai dari



pemaknaan yang relatif sempit yaitu pembangunan sebagai modernisasi ekonomi sampai dengan pemaknaan pembangunan yang lebih luas sebagai perbaikan berbagai aspek sosial-ekonomi.

Sejalan dengan kesepakatan arah dan orientasi pembangunan global yang dirumuskan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan sejak 2015 dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembangunan secara garis besar dapat dimaknai sebagai “upaya-upaya untuk mencapai perbaikan kualitas kehidupan” yang ditempuh dengan (1) peningkatan kemakmuran (*wealthy*) dan (2) peningkatan kesejahteraan (*prosperity*). Upaya untuk mewujudkan kemakmuran dilakukan dengan perbaikan pada akses ekonomi yang utamanya dapat dilihat sebagai peningkatan akses sumberdaya produksi untuk mencapai peningkatan pendapatan, sedangkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan peningkatan pada akses non-ekonomi yang antara lain mencakup akses kesehatan, pendidikan, politik, sosial-budaya, dll.

Pemaknaan komunikasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, pada awalnya dimaknai sebagai proses transmisi pesan yang bersifat satu arah (linier) sampai dengan pertukaran pesan (interaktif). Dalam perkembangannya, komunikasi dimaknai sebagai proses pertukaran pengetahuan, dialog untuk mencapai konsesus yang bermuara pada tindakan kolektif untuk mencapai kemajuan pihak-pihak yang terkait. Pemanfaatan komunikasi secara sistematis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dirumuskan dalam terminologi **Development Communication** atau **DevelopmentSupportCommunication** (Moemeka, 1994; Gomez, 1997, Servaes, 2008). Dalam konteks Indonesia, terminologi yang umum digunakan adalah **Komunikasi Pembangunan**.

Jan Servaes (2008) mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai penerapan komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial yang mengacu pada pertukaran pengetahuan yang bertujuan pada pencapaian konsensus untuk tindakan bersama (*collective action*) sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan kapasitas semua pihak yang terkait. Sedangkan Thomas Thufte



(2010), memberikan pengertian bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu proses sosial berlandaskan dialog dengan memanfaatkan berbagai metode. Hal ini juga mengacu pada perubahan pada berbagai level yang mencakup kemampuan untuk mendengarkan, membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan dan keterampilan, membangun kebijakan, dan pembelajaran untuk suatu perubahan yang bermakna dan berkelanjutan.

Secara praksis, komunikasi pembangunan dapat dilihat dari praktek saling menukar ide untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Komunikasi yang diterapkan untuk (1) mempercepat proses transformasi bangsa yang meliputi pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi dan (2) pengembangan masyarakat yang mencakup aktualisasi diri, pemenuhan potensi manusia dan aktualisasi diri. Komunikasi pembangunan diimplementasikan melalui identifikasi dan penggunaan keahlian yang tepat untuk mendorong peningkatan partisipasi kelompok penerima manfaat hingga mencapai level akar rumput.

Komunikasi pembangunan berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia dimana menurut Moemeka (1994) secara umum komunikasi pembangunan memiliki peran utama untuk : (1) transformasi/perubahan social dengan kualitas hidup dan keadilan sosial yang dan (2) sosialisasi, mempertahankan nilai masyarakat yang sudah mapan selaras dengan nilai pembangunan (kearifan lokal). Secara operasional, komunikasi pembangunan dapat bekerja melalui beberapa aktivitas yaitu: (1) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan penyediaan layanan umpan balik, (2) Penyediaan komunikasi yang interaktif pada setiap level masyarakat, (3) Mendukung pelestarian budaya masyarakat lokal dan menyediakan media lokal yang efektif, (4) Menyediakan informasi yang relevan, (5) Mendukung proyek pembangunan yang spesifik dan layanan sosialnya, dan (6) Membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap program dan peluang pembangunan, memperkuat sikap dan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi.

Lebih lanjut Moemeka (1994) memberikan argumentasi substansi komunikasi pembangunan mencakup hal-hal berikut: (1) Saling menukar



informasi tentang pemecahan masalah, (2) Melibatkan antar generasi dalam mobiliasi dan empati, (3) Meningkatkan aspirasi, (4) Mengajarkan keterampilan baru dan (5) Merangsang partisipasi lokal.

Pendekatan Komunikasi Monologis dan Dialogis

Proses dan tantangan pembangunan di berbagai negara mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mozamel (2008) memberikan gambaran bahwa proses pembangunan terkini memiliki beberapa karakteristik yaitu: (1) berkembangnya demokratisasi dalam proses pembangunan, (2) tuntutan akan transparansi, (3) pendekatan yang holistik: mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, budaya dan lingkungan, dan (4) tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Keberfungsian dan efektivitas serta kemanfaatan proses pembangunan menuntut adaptasi dari pendekatan baru dalam komunikasi pembangunan. Mozamel (2008) menegaskan perlunya memberikan penekanan pada paradigma baru komunikasi pembangunan yang bercirikan pada: (1) dialog, (2) partisipasi dengan derajat yang beragam, (3) memberi perhatian pada *two-way model* selain dalam hal tertentu masih menggunakan *one-way model* dan (4) menekankan pada proses (*process-based communication*) daripada pada hasil akhir (*product-focused communication*))

Sebagaimana dirumuskan pada bagian pendahuluan, komunikasi dimaknai sebagai bentuk interaksi manusia dari interpersonal sampai menggunakan media, dari one-way linier flow ke two-way dialogic process. Secara umum terdapat dua pendekatan dasar komunikasi yaitu: (1) monologis dan (2) dialogis. Karakteristik Pendekatan Monologis dan Dialogis dapat dilihat dari aspek tujuan, model serta metode dan penggunaan media. Komparasi pendekatan komunikasi monologis dan dialogis secara rinci sajikan pada Tabel 1.



Tabel. 1. Komparasi Pendekatan Komunikasi Monologis dan Dialogis

Keterangan	Komunikasi dengan Pendekatan Monologis		Komunikasi dengan Pendekatan Dialogis	
	Komunikasi untuk Menginformasikan	Komunikasi untuk Mempersuasi	Komunikasi untuk Mengeksplorasi	Komunikasi untuk Memberdayakan
Tujuan Utama	Meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan	Mendorong perubahan sikap dan perilaku	Menilai, mendalami isu, mengeksplorasi pencegahan konflik	Membangun kapasitas yang melibatkan <i>stakeholders</i>
Model utama sebagai referensi	<i>One-way</i> (satu jalur)	<i>One-way</i> (satu jalur)	<i>Two-way</i> (dua jalur)	<i>Two-way</i> (dua jalur)
Metode dan media	Penggunaan media masa dominan	Penggunaan media dominan	Penekanan pada interpersonal	Menggunakan dialog untuk mendorong partisipasi

Sumber: diadaptasi dari Mozamel (2008)

Pergeseran Paradigma dan Fokus Riset Komunikasi

Salah satu tokoh terkemuka pengembangan teori dan praksis komunikasi, Denis Mcquail (2013) menggambarkan komunikasi umumnya mengacu pada *“technical means of communication”* dan tujuan penggunaan komunikasi yang dominan mencakup menginformasikan, mempersuasi, menjual, menghibur dan lain sebagainya, dimana hal tersebut terus menerus mengalami perubahan. Komunikasi pada awalnya dipersepsikan lebih terfokus pada pemanfaatan komunikasi masa dan sering diasosiasikan dengan komunikasi publik (*public communication*). Terkait dengan studi/kajian dan praksis komunikasi, sebagian besar perhatian diberikan pada tiga isu utama yaitu: (1) efek komunikasi, (2) audiens media dan penggunaan media, dan (3) keterkaitan komunikasi (*communication relationships*).

Asumsi awal, cara kerja media masa dalam proses pembangunan dan proses modernisasi dipandang sangat strategis dan memiliki daya pengaruh yang kuat. Kapasitas untuk mencapai audiens dipandang ampuh dengan jangkauan pada seluruh masyarakat secara simultan melewati batas dan hambatan budaya-keluarga-agama atau politik, memiliki kapasitas untuk mengontrol isi dan sumber informasi, dan pada akhirnya dapat mencapai keseragaman pesan dan



efek sebagaimana yang diharapkan atau dirancang oleh negara atau kekuatan lain sehingga sering direferensikan sebagai “*public communication*”. Mcquail (2013) memandang pada tahap awal berkembangnya komunikasi masa dalam konteks pembangunan dilihat sebagai alat kontrol yang potensial.

Sejalan dengan perkembangan dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat di berbagai belahan dunia, pada akhir abad 20 dan setelahnya, menjadi pertanyaan yang kuat oleh berbagai pihak apakah komunikasi masa yang umumnya merpresentasikan public communication masih relevan dalam konteks pembangunan kekinian ataupun sudah tergantikan dengan paradigma baru komunikasi. Sebagaimana dicatat oleh Mcquail (2013), paradigma baru melihat komunikasi telah memperluas wilayah penerapannya, dengan fokus perhatian pada komunikasi masa maka wilayah pengembangan antara lain mencakup advertising skala besar, kampanye politik dengan target massa yang luas, jurnalisme populer, hiburan dan termasuk informasi yang spesifik serta penciptaan pasar untuk konsumen.

Paradigma baru komunikasi mengadvokasi berbagai agenda pembangunan seperti politik, sosial, komersial, budaya, dll. Pengembangan komunikasi semakin mengarah pada keragaman dan dalam banyak kasus menunjukkan adanya spontanitas serta proses pencarian sendiri (*self-generated*) dengan tujuan dan penerapan serta cara-cara yang baru. Untuk memberikan gambaran tentang karakteristik paradigma lama dan paradigma baru komunikasi ditinjau dari beberapa aspek atau komponen komunikasi, secara ringkas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Paradigma Lama dan Paradigma Baru Komunikasi

Aspek Komunikasi	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Mekanisme	Saru arah; pengiriman pesan, makna dan peran	Interaktif; pertukaran pesan, makna dan peran
Aksesibilitas dan jaringan	Jaringan terbatas	Keterbukaan akses jaringan untuk mengirim dan menerima
Pemanfaatan media	Media terpilih	Bersifat multimedia
Kemampuan	Kontrol kuat	Kontrol lemah, pengaturan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Aspek Komunikasi	Paradigma Lama	Paradigma Baru
kontrol		penyediaan dan pilihan terbatas
Kapasitas	Kapasitas terbatas	Kapasitas tidak terbatas
Pembiayaan	Biaya relatif mahal	Biaya transmisi murah
Wilayah sasaran	Terdapat target wilayah tertentu	Tidak ada basis wilayah (tidak ada lokasi sasaran/target)
Kontrol pada isi dan penggunaan	Kontrol umumnya dilakukan oleh perancang komunikasi (pemerintah/negara)	Keragaman kontrol pada isi dan penggunaan
Arah dan konsekuensi komunikasi	Arah dapat ditentukan oleh perancang komunikasi, konsekuensi dapat diramalkan	Arah sulit ditentukan termasuk pemaknaan dan konsekuensi yang mungkin terjadi

Sumber: Diadaptasi dan dimodifikasi dari Denis Mcquail (2013)

Multi Track Communication: Paradigma Baru Komunikasi Pembangunan

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pendekatan komunikasi baik monologis maupun dialogis memiliki karakteristik masing-masing dengan potensi kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan peran dan daya kerja yang beragam. Dalam konteks aplikasi pendekatan komunikasi untuk mendorong pencapaian berbagai tujuan pembangunan dengan orientasi pada perbaikan kualitas kehidupan manusia, bagaimanapun perlu menjadi pertimbangan penting akan kondisi kapasitas masyarakat yang secara faktual sangat beragam yang mencakup kapasitas sumberdaya manusia, kapasitas sumberdaya fisik, kapasitas sumberdaya sosial dan budaya serta kapasitas politik. Oleh karenanya, satu resep atau satu model atau pendekatan tunggal komunikasi nampaknya tidak akan bekerja dan berfungsi dengan baik untuk menjawab semua situasi, kebutuhan dan problematika pembangunan baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Kombinasi dan perpaduan dua pendekatan (monologis dan dialogis) dengan bobot penekanan tertentu pada dua pendekatan yang ada dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategisnya nampaknya akan menjadi jalan keluar yang optimal. Jan Servaes (2008) telah memelopori munculnya konsep "*multitrack communication*" yang merupakan kombinasi atas



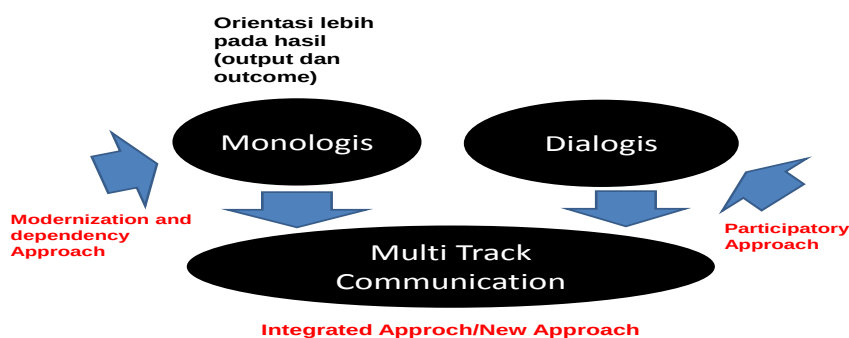
cakupan, karakteristik dan kekuatan atas dua perspektif komunikasi (monologis dan dialogis) ke dalam model yang homogen dan terintegrasi. Dalam pendekatan monologis atau pendekatan difusi, tujuan komunikasi dirancang untuk mendorong terjadinya perubahan pada level kesadaran, pengetahuan, sikap dengan tujuan akhir adalah perubahan perilaku atau praktek pada kelompok atau orang yang spesifik.

Sedangkan dalam model dialogis, cakupan utama terkait dengan pelibatan *stakeholders* dalam menilai kemungkinan adanya resiko, mengidentifikasi peluang yang mungkin dicapai, mencegah konflik dan problem, serta mengidentifikasi dan konfirmasi terhadap perubahan yang diinginkan. Menggunakan perspektif yang berbeda, pendekatan komunikasi yang berbasis dialog dapat didefinisikan sebagai prioritas dan tujuan program pembangunan supaya lebih terpercaya dan dengan cara yang efektif sehingga menentukan peningkatan rancangan secara keseluruhan dalam inisiatif pembangunan. Pada banyak praktek pembangunan, kekayaan dan keragaman pengetahuan lokal serta perspektif selama ini telah sering diabaikan dengan merasuknya modernisasi pada berbagai aspek kehidupan, oleh karenanya komunikasi dialogis dapat dipandang sebagai cara terbaik untuk mengatasi dan memperbaiki hal tersebut.

Integrasi dan model memerlukan “komunikasi berbasis dialog pada tahap awal atau inisiatif” tidak peduli tujuan dan sektor yang akan diintervensi. Setelah tahap awal, selanjutnya pendekatan dengan *multitrack* menggunakan beragam pendekatan yang sesuai dengan situasi. Variasi pendekatan dapat dilakukan antara lain dengan diseminasi informasi, pemasaran sosial, lobi, education, mobilisasi komunitas, dll (Servaes, 2008). Paradigma komunikasi yang baru yang menggabungkan dua pendekatan utama dapat memperluas batas yang mencakup komunikasi yang lebih interaktif. Komunikasi pembangunan yang dialogis dapat memfasilitasi pemberdayaan melalui pelatihan khusus dengan menciptakan ruang untuk bekerja secara bersama melalui inisiatif khusus dari individu, institusi atau pada level komunitas.



Dialog juga dapat dimaknai sebagai pelibatan *stakeholders* dalam mendefinisikan dan menginvestigasi isu yang relevan untuk suatu inisiatif pembangunan. Dialog juga dimaknai sebagai suatu proses penciptaan pengetahuan bersama (*knowledge sharing creation*). Pendekatan baru komunikasi pembangunan yang merupakan integrasi dari model monologis dan dialogis secara skematis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pendekatan Baru Komunikasi Pembangunan

Strategi Komunikasi Pembangunan

Selain pentingnya memadukan dua pendekatan komunikasi, keberhasilan komunikasi pembangunan juga sangat ditentukan oleh strategi komunikasi pembangunan. Secara garis besar, tiga komponen dasar komunikasi yang mendasari komunikasi dapat dibedakan menjadi: (1) Advokasi (*advocacy*), (2) Mobilisasi sosial (*social mobilization*) dan (3) komunikasi untuk perubahan perilaku (*behavioral change communication*). Meskipun secara konsepsi dan praksis masing-masing strategi komunikasi memiliki perbedaan, namun menurut UNICEF (2008), efektivitas komunikasi pembangunan sangat tergantung dari sinergitas atas tiga komponen strategis komunikasi.

Dalam konteks komunikasi pembangunan, struktur masyarakat dapat dipandang sebagai lapisan-lapisan dimana pada lapisan terdalam sebagai inti (*core*) merupakan individu yang dilingkupi oleh lapisan terdekat (keluarga inti, kerabat, tetangga, kawan) dan dilapisan luarnya adalah komunitas tempat individu berada mulai dari komunitas primer rukun tetangga, dusun, desa, kecamatan dan level administrasi pemerintahan yang lebih luas. Pada lapisan terluar adalah negara dan masyarakat internasional. Perubahan yang dirancang



akan berjalan dengan baik jika dilakukan intervensi yang terintegrasi dan proses komunikasi pada berbagai lapisan secara sinergis dengan berbagai pendekatan yang relevan.

Advokasi (**Advocacy**) dapat dimaknai sebagai upaya untuk menginformasikan dan memotivasi kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung/kondusif untuk pencapaian tujuan program pembangunan. Dalam konteks komunikasi pembangunan di Indonesia, advokasi dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dengan lembaga internasional terkait, kementerian/lembaga terkait, badan legislatif, organisasi perangkat daerah terkait pada berbagai level untuk memberikan dukungan kebijakan (termasuk penganggaran dan regulasi serta program) yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Mobilasi sosial (*Social mobilization*) secara garis besar dimaknai sebagai pelibatan dan pengerahan dukungan dari lembaga, jaringan komunitas, kelompok sosial, kelompok agama, untuk mendukung penyampaian kebutuhan-kebutuhan dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan menuju pencapaian tujuan pembangunan. Komunikasi perubahan perilaku (*Behavior change communication/BCC*) mencakup komunikasi tatap muka dialog (*face-to-face dialogue*) dengan individu-individu, atau kelompok-kelompok untuk menginformasikan, memotivasi, perencanaan pemecahan masalah dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.



Gambar 2. Struktur Strategi Komunikasi Pembangunan

Strategi komunikasi yang efektif dalam konteks pembangunan diarahkan untuk mendorong partisipasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Partisipasi menurut Mefalopulus (2006) memiliki tingkatan-tingkatan yang



mencakup : (1) Penyampaian informasi (*information sharing*), (2) Konsultasi (*consultation*), (3) Kolaborasi (*colaboration*) dan (4) Pemberdayaan (*empowerment*).

Tingkat partisipasi yang paling rendah adalah kondisi dimana masyarakat hanya sebatas diberi informasi tentang apa yang sedang atau telah terjadi di lingkungannya (umumnya disampaikan dengan model *one-way communication*). Banyak contoh kasus pembangunan yang terjadi menunjukkan seluruh proses perencanaan dan bahkan pelaksanaan dilakukan oleh perencana pembangunan dan sangat sedikit melibatkan masyarakat setempat dan ketika program sudah selesai baru diberikan informasi tentang keberaan program pada masyarakat sekitar. Pada tingkatan partisipasi konsultasi, komunikasi sudah dibangun dengan memberi ruang umpan balik dan *stakeholders* dapat memberikan masukan namun belum memiliki kontribusi dalam pembuatan keputusan. Pada tingkatan kolaborasi, sudah dibangun dengan model *two-way communication*, telah terbuka interaksi terbuka antar *stakeholders* dan pembuatan keputusan terjadi secara berimbang.

Pada tingkatan yang tertinggi yaitu partisipasi yang memberdayakan (*empowered participation*), telah terjadi transfer kontrol dalam memutuskan pengelolaan sumberdaya yang dibangun dengan *two-way communication* dalam pembuatan keputusan bersama. Komunikasi pembangunan idealnya mampu memfasilitasi pencapaian partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan hingga mencapai pemberdayaan (*empowerment*). Secara ringkas Struktur Partisipasi dan Karakteristik Komunikasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur Partisipasi dan Karakteristik Komunikasi

Tingkatan Partisipasi	Karakteristik Dasar Terkait Komunikasi
Penyampaian informasi (<i>information sharing</i>)	Masyarakat diberi informasi tentang apa yang sedang atau telah terjadi di lingkungannya (umumnya disampaikan dengan model <i>one-way communication</i>)
Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Komunikasi sudah dibangun dengan memberi ruang umpan balik dan <i>stakeholders</i> dapat memberikan masukan namun belum memiliki kontribusi dalam pembuatan keputusan (masih banyak didominasi model <i>one-way communication</i>)
Kolaborasi (<i>Colaboration</i>)	Sudah dibangun dengan model <i>two-way</i>



Tingkatan Partisipasi	Karakteristik Dasar Terkait Komunikasi
Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	<i>communication</i> , telah terbuka interaksi terbuka antar <i>stakeholders</i> dan pembuatan keputusan terjadi secara berimbang Telah terjadi transfer kontrol dalam memutuskan pengelolaan sumberdaya yang dibangun dengan <i>two-way communication</i> dalam pembuatan keputusan bersama

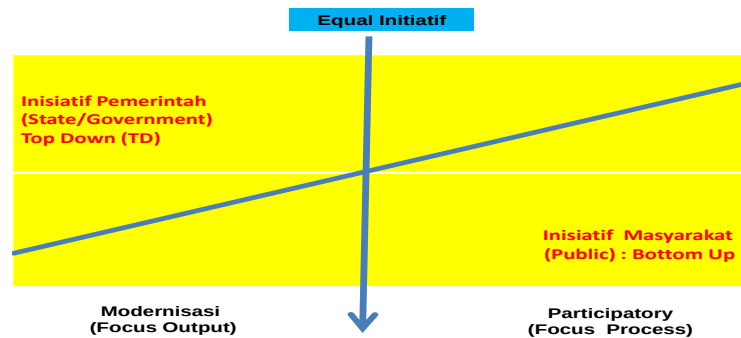
Sumber: Diadaptasi dari Mefalopulus (2006)

Umumnya pada awal pembangunan ketika kapasitas sumberdaya manusia masih relatif rendah dan akses terhadap berbagai sumberdaya juga masih terbatas, peran pemerintah dalam program pembangunan dominan dan sangat kuat. Model komunikasi satu arah yang lebih bersifat pemberitahuan akan suatu program pembangunan dan pemanfaatannya cenderung dominan. Dalam kondisi ini, inisiatif partisipasi sering dikenal dengan model *top-down*. Merespon perkembangan masyarakat dan adaptasi perubahan sosial yang diikuti perbaikan kapasitas sumberdaya manusia serta perbaikan akses sumberdaya lain, maka arah hubungan akan semakin menuju keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat dan pada akhirnya peran pemerintah semakin menurun dengan fokus menjadi fasilitator sedangkan inisiatif masyarakat akan semakin kuat dan otonom sehingga dalam batas tertentu mampu mengontrol pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk sebaik-baiknya peningkatan kualitas kehidupannya. Ketika pada awal pembangunan dimana pemerintah dominan, model komunikasi *one-way communication* yang didesain *top-down* cukup kuat, namun akan bergeser secara bertahap sehingga *model-two-way communication* akan semakin menguat yang secara operasional dapat diwujudkan dalam bentuk dialog antar pemangku kepentingan (model inisiatif *bottom up*).

Konteks pembangunan nasional di Indonesia perlu memperhatikan keragaman kapasitas sumberdaya dan akses sumberdaya yang sangat variatif, ada suatu masyarakat dengan kondisi yang sangat maju namun ada juga masyarakat yang masih cukup terbelakang. Oleh karenanya tidak ada satu resep tunggal (*single model*) dalam mendorong proses inisiatif partisipasi dalam pembangunan. Pada masyarakat yang sudah siap maka model *bottom up* akan



sangat sesai namun dalam kondisi masyarakat yang masih belum siap maka model inisiatif *top-down* dalam batas tertentu masih bisa bekerja dengan baik. Dalam kasus yang lain terjadi keseimbangan posisi antara *top-down* dengan *bottom-up*. Dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks inisiatif partisipasi pembangunan disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Konteks Inisiatif Pembangunan

PENUTUP

Pada tahap awal pembangunan yang ditandai dengan modernisasi pada berbagai aspek pembangunan, komunikasi mendapat tempat yang strategis karena komunikasi merupakan media untuk menyebarkan berbagai gagasan pembangunan dan dalam batas tertentu juga dimaknai sebagai alat kontrol pemerintah pada masyarakat. Komunikasi memiliki peran penting dalam pembangunan dimana komunikasi dengan memanfaatkan media masa secara masif sering dipandang sebagai komunikasi publik (*public communication*). Secara konseptual, komunikasi awalnya dipandang sebagai proses transmisi pesan yang bersifat satu arah (linier) selanjutnya sejalan dengan ide demokratisasi, komunikasi pembangunan berkembang dan dimaknai sebagai pertukaran pesan (interaktif) dalam proses pembangunan.

Dalam cara pandang baru, komunikasi pembangunan dimaknai sebagai proses pertukaran pengetahuan, dialog untuk mencapai konsensus yang bermuara pada tindakan kolektif untuk mencapai kemajuan pihak-pihak yang terkait yang berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan.

Perkembangan terakhir menunjukkan pendekatan komunikasi pembangunan baru telah mengintegrasikan dua pendekatan dominan yaitu



monologis (*one-way communication*) dan dialogis (*two-way communication*) dalam konsep komunikasi multi jalur (*multi track communication*). Setiap masyarakat memiliki tahapan perkembangan yang berbeda dan karakteristik kepemilikan sumberdaya yang beragam sehingga kombinasi dua pendekatan dengan fokus dan bobot pada pendekatan tertentu dapat dipilih dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat. Komunikasi pembangunan yang efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan orientasi pada pencapaian tingkatan partisipasi yang tertinggi yaitu partisipasi yang memberdayakan (*empowered participation*). Partisipasi aktif dan keberhasilan komunikasi pembangunan juga ditentukan oleh strategi komunikasi pembangunan. Intervensi pada semua lapisan masyarakat melalui strategi advokasi, mobilisasi sosial dan komunikasi perubahan perilaku individu secara terintegrasi dapat memfasilitasi perubahan masyarakat yang berkelanjutan menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gomes, Ricardo, 1997, The Emergence of a New Paradigm in Development Communication, Paper presented in International Seminar on Culture, Communication and Power.
- Mcquail, Denis, 2013, Communication Research Paradigms : Reflections on Paradigm Change in Communication Theory and Research: International Journal of Communication 7 (2013), Feature 216-229
- Mefalopulus, Paolo, 2008, Reflections on the Theory and Practice of Development Communication (book chapter: Development Communication Sourcebok, The World Bank)
- Mozammel, Masud, 2008, Development Communication: Challenges in An Empowered Information Environment, The World Bank, Oxford
- Moemeka, Andrew A, 1994, Communicating for Development: A New Pan-Disciplinary Perspective, State University of New York Press
- Servaes, Jan (ed.), 2008, Communication for Development and Social Change, Sage Publication)
- Tufte, Thomas, 2010, Communicating for Development Reflections on the Theory and Practice of Articulating Development and Social Change through Communication, Presentation given to the Delegation from the Vietnamese Ministry of Science and Technology (MOST), May 5 2010.
- UNICEF Team Members, 2008, Writing Communication Strategy for Development Programs, A Guideline for Program Managers and Communication Officers, UNICEF



STRATEGI KOMUNIKASI BERBASIS SUMBERDAYA KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PROGRAM SIMANTRI DI BALI

I Dewa Putu Oka Suardi

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Bali

E-mail: okasuardi@unud.ac.id

ABSTRAK

Perilaku anggota kelompok sangat menentukan capaian keberhasilan program. Pendamping program memiliki peranan penting dalam menumbuhkan perilaku positif anggota kelompok terhadap program. Pendamping harus mampu berkomunikasi efektif dengan anggota kelompok, sehingga anggota kelompok dapat melaksanakan program dengan baik. Komunikasi Program Simantri dapat memanfaatkan strategi komunikasi berbasis sumberdaya komunikasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dalam pemanfaatan strategi tersebut harus memperhatikan sinergitas tiga komponen utamanya, yaitu perencanaan sumberdaya komunikasi, manajemen sumberdaya komunikasi, dan taktik operasional komunikasi.

Kata kunci: program simantri, strategi komunikasi, sumberdaya komunikasi, efektivitas komunikasi

COMMUNICATION RESOURCES BASED COMMUNICATION STRATEGY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN PROGRAM ASSISTANCE OF INTEGRATED FARMING SYSTEM IN BALI

ABSTRACT

The behavior of group members will determine achievement of the program's success. Assistants program has an important role in creating a positive attitude of group members towards the program. Assistants must be able to communicate effectively with members of the group, so the group members can implement the program properly. Communication of integrated farming system can utilize the communication resources based communication strategy to increase its effectiveness. In the use of these strategies must consider the synergy of three main components, namely communication resources planning, management of communication resource, and the communication of operational tactics.

Keywords: *Simantri program, communication strategy, communication resources, the effectiveness of communication*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mengantisipasi isu penting pembangunan pertanian yang berkaitan dengan rawan pangan, peningkatan produksi protein, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, pertanian organik, pengembangan



energi biogas, dan pengurangan pencemaran lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri). Tujuan program tersebut antara lain: (1) mendukung berkembangnya diversifikasi usahatani terpadu yang berwawasan agribisnis; (2) pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; dan (3) mendukung pembangunan ramah lingkungan untuk menciptakan Bali bersih dan hijau serta mewujudkan program Bali organik (DISTAN, 2010).

Pelaksanaan Program Simantri tampaknya masih memerlukan penanganan yang lebih intensif karena capaian keberhasilannya belum sesuai dengan target sasaran. Hasil evaluasi pelaksanaan Simantri menunjukkan bahwa: ternak sapi maupun kambing telah berkembang 72,78%; instalasi bio urine yang masih berfungsi 56,09%; dan pengolahan pupuk yang memproduksi sebanyak 55,37%, sedangkan instalasi bio gas yang masih berfungsi hanya 46,54%. Di samping itu, ada 63 kelompok Simantri bantuan program Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 diidentifikasi memiliki kinerja belum optimal (DISTAN, 2014). Sejalan dengan hasil evaluasi tersebut, hasil penelitian OkaSuardi, dkk. (2015) mengungkapkan bahwa proses komunikasi Program Simantri belum berjalan dengan efektif, perubahan perilaku anggota kelompok belum mampu menunjang pelaksanaan program dengan baik, sehingga capaian keberhasilan program belum sesuai dengan sasaran yang ditargetkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, tampak ada kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dan pelaksanaan program di lapangan, dimana perilaku anggota kelompok belum sepenuhnya menunjukkan dukungan yang positif terhadap pelaksanaan program. Kondisi tersebut mengindikasikan terdapat hambatan untuk menumbuhkan partisipasi anggota kelompok dalam pelaksanaan program. Diduga salah satu penyebabnya adalah komunikasi antara pendamping dan kelompok Simantri tidak berlangsung dengan efektif. Guna mengatasi hal tersebut, perlu ada perbaikan penataan proses komunikasi program secara keseluruhan, tidak hanya komunikasi antara pendamping dengan kelompok Simantri, tetapi dengan semua pemangku kepentingan.



Perbaikan penataan proses komunikasi Program Simantri dapat dilakukan dengan memanfaatkan strategi komunikasi berbasis sumberdaya komunikasi.

Program Simantri di Bali

Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) adalah upaya percepatan alih teknologi kepada masyarakat perdesaan dengan mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Kegiatan utama Simantri adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah untuk pakan ternak dan cadangan pakan pada musim kemarau, dan limbah ternak (*faeces, urine*) diolah menjadi bio gas, bio urine, bio pestisida, dan pupuk organik. Sistem integrasi berorientasi pada usaha tani tanpa limbah (*zero waste*) yang dapat menghasilkan pangan, pakan, pupuk, dan bahan bakar (*food, feed, fertilizer, dan fuel*) (DISTAN, 2010).

Sasaran yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan Program Simantri meliputi: (1) peningkatan luas tanam, populasi ternak, perikanan dan kualitas hasil; (2) tersedia pakan ternak berkualitas sepanjang tahun; (3) tersedia pupuk dan pestisida organik serta bio gas; dan (4) berkembangnya diversifikasi usaha, lembaga usaha ekonomi dan infrastruktur di perdesaan. Indikator-indikator keberhasilan Program Simantri meliputi: (1) berkembangnya kelembagaan dan SDM baik petugas pertanian maupun petani; (2) terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan diversifikasi usaha pertanian dan industri rumah tangga; (3) berkembangnya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani; (4) meningkatnya insentif berusaha tani melalui peningkatan produksi dan efisiensi usaha tani (pupuk, pakan, biogas, bio urine, bio pestisida diproduksi sendiri atau *in situ*); (5) tercipta dan berkembangnya pertanian organik menuju *green economic*; (6) berkembangnya lembaga usaha ekonomi perdesaan; dan (7) peningkatan pendapatan petani (minimal dua kali lipat).

Unit Program Simantri terdiri atas paket kegiatan yang terkait antarsatu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Paket utama Program Simantri meliputi kegiatan-kegiatan: (1) pengembangan komoditi tanaman pangan, peternakan,



perikanan, dan intensifikasi perkebunan sesuai potensi wilayah; (2) pengembangan ternak sapi atau kambing dengan kandang koloni untuk 20 ekor sapi atau 40 ekor kambing; (3) bangunan instalasi bio gas dua unit, terdiri atas: masing-masing satu unit kapasitas 11 m³ dan kapasitas 5 m³ yang dilengkapi dengan kompor bio gas; (4) bangunan instalasi bio urine sebanyak satu unit; (5) bangunan pengolah kompos dan pengolah pakan masing-masing sebanyak satu unit; (6) pengembangan tanaman kehutanan sesuai kondisi dan potensi masing-masing wilayah.

Program Simantri pertama kali diluncurkan pada Tahun 2009 sebagai pilot projek dengan penyerahan 10 unit Simantri kepada Gapoktan di 10 desa tersebar di tujuh kabupaten di Bali dengan nilai Rp 2.120.000.000. Tahun 2010 ditambah lagi 40 unit untuk 40 desa sasaran di 24 kecamatan yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, dengan nilai Rp 10.365.252.164. Tahun 2011 sebanyak 150 unit diserahkan kepada 150 Gapoktan, dengan rincian 100 unit dari alokasi anggaran induk dan 50 unit dari anggaran perubahan. Pada tahun 2012 diserahkan lagi sebanyak 125 unit kepada 125 Gapoktan dengan rincian 100 unit dari alokasi anggaran induk dan 25 unit dari anggaran perubahan. Selanjutnya, periode Tahun 2013 disalurkan lagi 94 unit, sehingga terdapat 419 unit Simantri yang telah tersebar di seluruh Provinsi Bali, termasuk 11 unit dengan ternak utamanya kambing. Hingga akhir Tahun 2013 seluruh dana yang dialokasi untuk Program Simantri sebanyak 83,8 milyar rupiah (DISTAN, 2014).

Sejak Tahun 2014 dana Program Simantri ditingkatkan menjadi 225 juta rupiah per unit dari yang sebelumnya rata-rata 200 juta rupiah per unit. Pada tahun 2014 jumlah unit Simantri yang disalurkan sebanyak 83 unit dengan nilai Rp 18.650.000.000. Tahun 2015 disalurkan sebanyak 47 unit dengan nilai Rp 10.575.000.000 dan Tahun 2016 sudah disalurkan sebanyak 83 unit dengan nilai Rp 18.675.000.000. Hingga tulisan ini disusun jumlah unit Simantri yang sudah disalurkan kepada kelompok tani di seluruh Provinsi Bali sebanyak 632 unit dengan total nilai sebesar Rp 131.700.000.000 (DISTAN, 2016).



Pendampingan Program Simantri

Program Simantri merupakan adaptasi dari Primatani yang dikembangkan oleh BPTP Bali. Pada saat masih sebagai pilot proyek (Th 2009) dan awal pengembangan Tahun 2010 dan Tahun 2011, yang ditugaskan mengawal program adalah PPL yang bertugas di wilayah dimana Program Simantri dilaksanakan. Selanjutnya mulai Tahun 2012 pendamping Program Simantri direkrut dari tamatan Perguruan Tinggi di Bali dengan status tenaga kontrak (*outsourcing*). Tampak terdapat perbedaan karakteristik kompetensi antara PPL dan Tenaga Pendamping Outsourcing. Berdasarkan hasil penelitian OkaSuardi, dkk. (2015), usia pendamping Program Simantri rata-rata 31,42 tahun dengan kisaran umur 23-45 tahun. Latar belakang pendidikan formalnya sebagian besar (80%) sarjana (S1) dan (20%) pascasarjana (S2). Sebagian besar (90%) belum berpengalaman dalam kegiatan pendampingan, hanya 10% pernah bertugas sebagai pendamping, seperti: pendamping desa tertinggal; pendamping program desa mandiri pangan; pendamping perluasan tanaman pangan; pendamping ketenagakerjaan; pendamping program CBD; pendamping Program ADD & PPD; dan pendamping program LM3. Pengalaman pendamping sangat mempengaruhi kinerja pendampingan. Pendamping yang berpengalaman tentu memiliki kinerja lebih baik dibandingkan yang belum berpengalaman.

Pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) yang berkaitan dengan kompetensi pendamping Program Simantri yang secara umum pernah diikuti oleh seluruh pendamping antara lain: pengolahan pakan ternak, kesehatan hewan, pengolahan kompos, dan pengolahan bio urine. Ada beberapa materi bimtek seperti: pengolahan pestisida organik, dinamika kelompok, pelatihan inseminasi buatan, pengolahan silase, pembuatan MOL, kelembagaan dalam organisasi, dan penggunaan bahan fermentasi, tidak diikuti oleh semua pendamping, sehingga tampaknya belum semua pendamping memiliki kompetensi yang memadai. Secara kasuistik dan situasional materi bimtek bagi pendamping memang ada yang tidak sama, karena disesuaikan dengan potensi usahatani kelompok dampingannya. Seperti budidaya lele, teknik budidaya



tanaman perkebunan, dan teknik budidaya hortikultura hanya diberikan kepada pendamping yang petani dampingannya memiliki potensi usahatani terkait dengan materi tersebut.

Berbagai alasan pendamping memutuskan menerima tugas sebagai pendamping Program Simantri, antara lain: menerapkan ilmu pengetahuan (46%); berpartisipasi dalam pembangunan pertanian (22%); menambah pengalaman (14%); memperoleh pendapatan (14%); dan ketertarikan pada Program Simantri (4%). Berdasarkan karakteristik pendamping tersebut, terutama tentang pengalaman pendampingan, motifnya sebagai pendamping, dan bimtek yang pernah diikuti, maka nampak ada hal prinsip yang kurang diperhatikan dalam pelaksanaan Program Simantri. Seyogyanya pendamping yang ditugaskan adalah yang sudah berpengalaman, mengingat Program Simantri yang didampingi memiliki nilai strategis untuk pemberdayaan masyarakat khususnya petani dan merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan “Bali Mandara”. Penyiapan pendamping yang memenuhi kriteria dapat dilakukan mulai sejak proses seleksi penerimaan pendamping dan selanjutnya pendamping harus diberikan pelatihan agar memiliki kompetensi memadai melalui bimtek yang relevan mendukung operasional pendampingan Program Simantri. Salah satu materi yang sepatutnya diberikan kepada pendamping adalah keterampilan berkomunikasi. Kompetensi komunikasi sangat berperan bagi pendamping untuk dapat menyampaikan dengan efektif pesan-pesan substansi program yang bersifat teknis. Jadi melalui bimtek, pendamping harus dibekali tidak saja materi teknis program tetapi juga materi nonteknis yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial ekonomi, antara lain: keterampilan komunikasi, manajemen konflik, penguatan kelembagaan, membangun jejaring, pemasaran, dan penumbuhan kelembagaan perekonomian desa.

Efektivitas Pendampingan Program Simantri

Penilaian terhadap efektivitas pendampingan Program Simantri dilakukan melalui pendekatan indikator-indikator perubahan perilaku anggota kelompok dan melalui pendekatan indikator-indikator capaian keberhasilan



program. Perubahan perilaku anggota kelompok menentukan tingkat capaian keberhasilan Program Simantri dan perubahan perilaku tersebut ditentukan oleh kualitas pelaksanaan pendampingan. Perubahan perilaku anggota kelompok Simantri meliputi aspek: pengetahuan tentang Program Simantri, sikap terhadap Program Simantri, dan pelaksanaan Program Simantri. Berdasarkan temuan penelitian OkaSuardi, dkk. (2015), pendampingan sudah mampu menimbulkan perubahan perilaku anggota kelompok Simantri hanya saja baru mencapai kategori cukup. Dari tiga indikator perilaku, hanya pengetahuan tentang Program Simantri mencapai kategori baik, sedangkan sikap terhadap Program Simantri, dan pelaksanaan Program Simantri tergolong cukup. Pengetahuan anggota kelompok tentang Program Simantri tergolong baik, terutama tentang pemeliharaan ternak sapi dan pembuatan pupuk kompos, sedangkan pengetahuan tentang: tujuan program, integrasi antarkegiatan program, peran anggota kelompok dalam program, pembuatan pupuk cair bio urine, dan pembuatan biogas baru mencapai kategori cukup.

Sikap anggota kelompok terhadap Program Simantri tergolong cukup yang mengindikasikan bahwa posisi penerimaan anggota kelompok terhadap program berada pada nilai antara menerima dan menolak program. Sikap menerima Program Simantri tampak lebih disebabkan oleh program tersebut berupa “bansos” yang tidak ada kewajiban pengembalian kepada pihak pemberi atau menggulirkan kepada petani atau kelompok tani lain. Persyaratan bagi penerima program juga tidak diberlakukan secara ketat, sehingga dengan mudah memperolehnya. Pada sisi lain, sikap ragu-ragu anggota kelompok ternyata terhadap hal-hal substansial yang merupakan komponen penting dari program tersebut, yang meliputi: keraguan terhadap dapat terlaksananya kegiatan antarprogram secara terintegrasi, keraguan terhadap keberlanjutan pemeliharaan sapi dengan sistem kandang koloni, keraguan terhadap keberlanjutan produksi pupuk kompos, pupuk cair bio urine, dan biogas.

Sikap ragu tersebut timbul karena pemahaman yang tidak utuh terhadap substansi Program Simantri, dimana tingkat pengetahuan petani yang tergolong baik hanya pada substansi pemeliharaan sapi dan pembuatan pupuk kompos,



sedangkan pengetahuan tentang substansi penting lainnya baru mencapai kategori cukup. Tindakan anggota kelompok dalam pelaksanaan Program Simantri masih tergolong cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa petani belum sepenuhnya melaksanakan program sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kegiatan yang dilaksanakan dengan baik hanya pemeliharaan sapi dan memanfaatkan pupuk kompos pada lahan usahatannya, sedangkan kegiatan lain seperti diversifikasi tanaman dan memanfaatkan bio urine pada lahan usahatani sendiri hanya sekedar dilaksanakan. Pada sisi lain, kebanyakan kelompok Simantri tidak melakukan pengolahan biogas, sedangkan yang mengolah hasil produksinya hanya dapat dimanfaatkan di lokasi unit Simantri. Biogas hasil olahan belum mampu disalurkan kerumah-rumah anggota kelompok, karena volumenya belum memadai, disamping itu pipa jaringan distribusi belum ada dan jarak rumah anggota kelompok relatif jauh dari lokasi unit Simantri.

Capaian perubahan perilaku tersebut ternyata belum mampu secara maksimal mendukung keberhasilan Program Simantri. Berdasarkan penilaian terhadap indikator-indikator keberhasilannya, terdapat empat indikator yang berkontribusi terhadap kurang berhasilnya Program Simantri mencapai sasaran, yaitu: perkembangan pertanian organik, pendapatan petani, lembaga usaha ekonomi perdesaan, dan insentif usahatani. Keempat indikator tersebut secara *partial* memperoleh nilai yang kurang diharapkan, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu: kelembagaan pertanian, intensifikasi-ekstensifikasi usahatani, dan tercipta lapangan kerja baru cukup berkontribusi terhadap capaian keberhasilan Program Simantri (OkaSuardi, dkk., 2015). Dengan kinerja pendampingan yang belum maksimal, ditunjukkan oleh perilaku anggota kelompok yang belum sepenuhnya melaksanakan program dengan baik hingga capaian keberhasilan belum sesuai dengan sasaran program, makaseyogyanya ada tindakan perbaikan terhadap Program Simantri. Upaya yang relevan dilaksanakan adalah perbaikan proses komunikasi pendampingan dengan memanfaatkan pendekatan strategi komunikasi. Salah satu strategi komunikasi yang ditawarkan adalah strategi komunikasi berbasis sumberdaya komunikasi.



Strategi Komunikasi Berbasis Sumberdaya Komunikasi (Strakom-bSK)

Penelitian Oka Suardi, dkk. (2015) menghasilkan sebuah model komunikasi, yaitu Model Komunikasi Program Simantri. Model tersebut dirancang berdasarkan pendekatan *Partial Least Squares Path Modeling (PLS-SEM)* dengan alat analisis aplikasi *freeware* SmartPLS versi 2.0 M3 (Ringle, Wende, Will, 2005; Latan dan Ghazali, 2012). Kemudian hasil rancangan model diuraikan dengan pendekatan metode deskriptif (Mulyana, 2001; Birowo, 2004; Mulyana dan Solatun, 2008). Berdasarkan hasil analisis, rancangan model komunikasi tersebut menunjukkan kesesuaian yang dapat diterima (*model fit*) dan memiliki *predictive relevance* yang tinggi, sehingga layak dimanfaatkan dalam proses komunikasi Program Simantri.

Model Komunikasi Program Simantri terdiri atas empat variabel utama, yaitu: strategi komunikasi, proses komunikasi, perubahan perilaku, dan keberhasilan program. Variabel strategi komunikasi merupakan variabel level kedua (*second order construct*) yang terbentuk dari tiga variabel level pertama (*first order construct*), yaitu variabel perencanaan sumberdaya komunikasi, manajemen sumberdaya komunikasi, dan variabel taktik operasional komunikasi. Strategi komunikasi yang menyinergikan fungsi perencanaan, manajemen, dan taktik operasional terhadap unsur-unsur sumberdaya komunikasi Program Simantri--- yang meliputi: pendamping, anggota kelompok, substansi program, metode komunikasi, peralatan komunikasi, dan regulasi program selanjutnya disebut dengan istilah Strategi Komunikasi Berbasis Sumberdaya Komunikasi (Strakom-bSK). Strategi komunikasi tersebut diuraikan sebagai berikut.

Perencanaan Sumberdaya Komunikasi

Perencanaan sumberdaya komunikasi disusun dari unsur-unsur sumberdaya komunikasi Program Simantri berdasarkan besaran nilai loading factor masing-masing unsur terhadap nilai perencanaan. Susunannya berurut dari nilai terbesar diikuti nilai yang lebih kecil seperti diuraikan sebagai berikut.

1. Penyiapan metode dan teknik komunikasi. Metode dan teknik komunikasi sesuai dengan hakikatnya merujuk kepada pengertian



pendekatan dan cara berkomunikasi. Dengan pertimbangan yang bijak dalam pemilihan serta pemanfaatan metode dan teknik komunikasi maka proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Keunggulan beberapa metode komunikasi seperti: metode jurnalistik, metode advertising, metode publik relation, dan metode propaganda dapat dikombinasikan dengan keunggulan praktis beberapa teknik komunikasi seperti: teknik informatif, teknik persuasif, teknik pervasif, dan teknik hubungan sosial.

2. Penyiapan pendamping sebagai komunikator. Penyiapan pendamping sebagai komunikator Simantri harus dilakukan secara selektif sejak proses *recruitment* dengan penekanan pada kualifikasi kompetensi *public speaking*, utamanya adalah keterampilan berkomunikasi dengan kelompok tani.
3. Penyiapan peralatan komunikasi. Penyediaan peralatan komunikasi berupa perangkat audio visual dan multimedia termasuk fasilitas akses internet menjadi penting karena sangat berperan dalam memperlancar proses komunikasi. Spesifikasi peralatan harus disesuaikan dengan konteks komunikasi dengan memperhatikan: tingkat respon petani, substansi pesan yang disampaikan, dan perubahan perilaku petani yang diharapkan.
4. Penyiapan kelompok tani sebagai komunikan. Penentuan kelompok tani sebagai komunikan sangat menentukan efektivitas komunikasi Program Simantri, sehingga harus dipilih kelompok tani yang memiliki kebutuhan sesuai dengan yang ditawarkan oleh Program Simantri. Petani yang dipilih harus memiliki waktu penuh melaksanakan profesi sebagai petani, bukan petani paruh waktu yang melaksanakan kegiatan pertanian sebagai sampingan.
5. Penyiapan pesan komunikasi. Pesan-pesan yang akan disampaikan sebaiknya bersifat sederhana, mudah dipahami, dan mampu mengatasi hambatan yang dihadapi anggota kelompok dalam penerapan Simantri. Pesan komunikasi dapat disiapkan dalam bentuk cetakan, tayang, rekaman, dan visualisasi objek pesan.



6. Penyiapan regulasi. Regulasi adalah aspek legalitas yang merupakan dasar operasional kegiatan komunikasi Program Simantri. Aturan pelaksanaan serta kebijakan yang ada akan memberikan dukungan bagi pendamping untuk lebih percaya diri berimprovisasi dalam proses komunikasi.

Manajemen Sumberdaya Komunikasi

Fungsi manajemen sumberdaya komunikasi menyangkut aktivitas pengaturan, pengawasan, penilaian, pembinaan, dan motivasi atas pemanfaatan sumberdaya komunikasi Program Simantri yang pelaksanaannya berdasarkan urutan besaran nilai loading factor dari nilai terbesar diikuti nilai yang lebih kecil seperti diuraikan sebagai berikut.

1. Supervisi aktivitas komunikasi. Fungsi supervisi adalah untuk memastikan bahwa pendamping dapat melaksanakan proses komunikasi dengan benar dan sedini mungkin dapat memperbaiki kekeliruan pelaksanaan proses komunikasi. Supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkala oleh seorang supervisor yang berpengalaman.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja komunikasi. Fungsi monitoring dilakukan melalui pemantauan lapang terhadap proses komunikasi pendampingan serta faktor-faktor lain yang terkait, sehingga kondisi faktual dari seluruh rangkaian kegiatan dapat diketahui. Sejalan dengan itu, dilakukan pengukuran serta penilaian capaian hasil dari proses komunikasi tersebut yang berupa perubahan perilaku kelompok Simantri setelah proses komunikasi pendampingan berlangsung.
3. Penugasan pendamping yang terampil berkomunikasi. Pendamping sebagai komunikator utama dalam proses komunikasi Program Simantri harus mampu berkomunikasi efektif dengan kelompok Simantri dan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Penerimaan serta penugasan tenaga pendamping yang terampil berkomunikasi menjadi suatu keharusan.
4. Peningkatan kompetensi komunikasi pendamping. Peningkatan kompetensi pendamping menyangkut aspek komunikasi dan aspek



substansi Program Simantri, yang dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan secara berkala atau atas kebutuhan yang mendesak dan situasional. Pelaksanaan fungsi ini dimaksudkan agar pendamping selalu mampu memenuhi kebutuhan petani akan informasi yang berkaitan dengan Program Simantri.

5. Pemberian penghargaan serta sanksi kepada komunikator Simantri. Penghargaan yang layak harus diberikan kepada pendamping yang memiliki kinerja komunikasi baik. Pemberian gaji atau honorarium, bonus, serta pengakuan prestasi dapat memotivasi pendamping untuk melaksanakan tugas dengan baik. Demikian juga sebaliknya, pendamping yang kinerja komunikasinya buruk dan melalaikan tugas-tugas pendampingan harus diberikan sanksi. Sanksi dapat berupa pemotongan gaji dan pemberhentian sebagai pendamping. Penghargaan serta sanksi diberikan setelah melalui proses penilaian yang transparan dan terukur.

Taktik Operasional Komunikasi

Taktik operasional komunikasi merupakan aktivitas komunikasi terbaik yang dipilih serta dimanfaatkan dalam proses pendampingan setelah melalui pertimbangan yang bijak terhadap beberapa alternatif sesuai dengan konteks komunikasi. Taktik operasional komunikasi yang relevan dimanfaatkan dalam pendampingan Program Simantri sesuai dengan urutan besaran nilai loading factor dari nilai terbesar hingga nilai terkecil diuraikan sebagai berikut.

1. Komunikasidialogis-interaktif. Konteks komunikasi dialogis-interaktif memberikan ruang yang luas untuk tumbuhnya partisipasi anggota kelompok, sehingga cenderung menghasilkan komunikasi yang efektif.
2. Pendekatanpersuasif. Pemanfaatan teknik persuasif sangat relevan dengan kondisi petani yang membutuhkan pendekatan penyadaran secara halus dengan kesabaran dan tanpa paksaan, namun pesan mampu menyentuh ranah kognitifnya. Penggunaan teknik ini dalam proses komunikasi dapat membantu mengatasi keterbatasan kompetensi komunikasi petani, sehingga akhirnya petani dapat memahami isi pesan



dengan baik.

3. Substansi pesan bersifat solutif. Pesan komunikasi yang solutif dapat membantu petani mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Simantri. Isi pesan yang solutif jauh lebih diminati dan diapresiasi oleh petani dibandingkan dengan pesan-pesan yang tidak jelas maknanya.
4. Kemasan pesan sederhana. Kesederhanaan pesan komunikasi tercermin dari isinya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang umum dilaksanakan oleh petani, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dapat juga dilihat dari bahasa serta simbol-simbol (gambar, warna, peraga) yang dipergunakan oleh pendamping. Intinya, taktik ini harus mampu mengelaborasi inovasi Simantri menjadi pesan yang isinya menarik dan mudah dipahami oleh petani.
5. Pemanfaatan peralatan komunikasi secara selektif. Peralatan komunikasi hasil rekayasa teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan membawa pengaruh dasyat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan sebagai determinasi dalam proses komunikasi. Peralatan komunikasi yang bersifat audio-visual dan multi media harus dipilih dengan cermat, selektif, dan dimanfaatkan secara bijak.

PENUTUP

Pemanfaatan strategi komunikasi berbasis sumberdaya komunikasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pendamping dengan anggota kelompok Simantri. Efektifnya komunikasi tersebut dapat mengembangkan perilaku positif anggota kelompok dalam melaksanakan program untuk meningkatkan capaian keberhasilan Program Simantri. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan strategi komunikasi berbasis sumberdaya komunikasi, adalah sinergitas tiga komponen utamanya, yaitu perencanaan sumberdaya komunikasi, manajemen sumberdaya komunikasi, dan taktik operasional komunikasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Birowo, A. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Gitanyali.
- [DISTAN] Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. (2010). "Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali". Denpasar.
- [DISTAN] Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. (2014). "Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali". Denpasar.
- [DISTAN] Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali. (2016). "Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) di Provinsi Bali". Denpasar.
- Latan, H., Imam Ghozali. (2012). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Undip
- Mulyana. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D., Solatun. (2008). *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Oka Suardi IDP., IN. Supartha, Ma'mun Sarma, IG. Setiawan AP. (2015). "Strategi Komunikasi Program Pembangunan Pertanian: Kasus Program Simantri di Provinsi Bali". Denpasar: Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Ringle, C.M., Wende, S., Will, S. (2005). "SmartPLS 2.0 Beta". Hamburg: University of Hamburg. Available from <http://www.smartpls.de/index.php>.



PENGARUH MEDIA KOMIK TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG MANFAAT TELUR DI KELURAHAN NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Sriroso Satmoko dan Siwi Gayatri

Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang

namjuni55@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan media komik yang tepat berdasarkan jumlah frame dan ukuran berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan siswa sekolah dasar. Pengaruh ini diharapkan dapat memberikan alternatif media penyuluhan yang tepat berdasarkan jenis media itu sendiri dan sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan pengetahuan tentang manfaat telur. Hasil nilai pre-tes kelompok media komik frame tunggal adalah 63,50 (84%) dan frame ganda adalah 64,50 (86%), artinya pengetahuan awal responden sudah cukup baik. Uji-t kelompok komik frame tunggal menghasilkan $t\text{-hitung } 6,98 > t\text{-tabel } (0,05;19) (2,09)$, dan kelompok frame ganda $t\text{-hitung } 7,67 > t\text{-tabel } (0,05;19) (2,09)$ artinya media komik frame tunggal dan frame ganda dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan. Hasil analisis keragaman satu arah (uji F) menunjukkan $F \text{ hitung } (53,154) > F \text{ tabel } (0,05;38)(4,10)$ artinya terdapat perbedaan pengaruh antara media komik frame tunggal dan frame ganda dalam meningkatkan pengetahuan. Perbandingan rata-rata dan persentase media komik frame tunggal yaitu 6 (9,45%) dan frame ganda sebesar 5,75 (8,92%) artinya media komik frame tunggal memberikan pengaruh yang lebih baik.

Kata kunci : komik, frame, siswa SD, manfaat telur

PENDAHULUAN

Komik adalah satu bentuk media cetak yang menggabungkan unsur grafis dan tulisan dapat dijadikan media yang tepat dalam penyuluhan dengan sasaran anak-anak, Karena secara psikologis akan lebih mudah menangkap pesan dari cerita bergambar daripada tulisan atau suara saja. Macam komik bisa dibedakan berdasarkan ukuran, jumlah frame, desain dan alur cerita dari komik itu sendiri. Tingkat keefektifan komik bisa diukur dengan metoda skoring pada penelitian eksperimen.

Telur adalah salah satu hasil ternak yang mengandung protein tinggi. Kandungan gizi dalam telur sangat dibutuhkan oleh manusia untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh dan dapat meningkatkan kecerdasan anak (Warsito, 2004). Beragamnya manfaat bisa didapat dari mengkonsumsi telur,



perlu disosialisasikan sejak dini untuk membangun kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi telur. Anak-anak adalah sasaran yang tepat untuk mensosialisasikan manfaat telur, terlebih di usia 9 – 11 tahun yang merupakan fase pertumbuhan dan rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Bertolak dari permasalahan mengenai pemilihan media penyuluhan, maka perlu diteliti Pengaruh Media Komik Terhadap Peningkatan Pengetahuan Siswa Sekolah Dasar Tentang Manfaat Telur di kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemilihan media penyuluhan yang tepat khususnya komik berdasarkan 1 frame dan 2 frame, dan seberapa besar tingkat keefektifan (pengaruh) media komik terhadap peningkatan pengetahuan siswa Sekolah Dasar. Manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan informasi untuk penyuluh dalam pemilihan media yang tepat.

METODE PENELITIAN

Media komik merupakan salah satu media komunikasi cetak untuk membantu menyampaikan pesan kepada komunikan untuk menarik perhatian sasaran terhadap tema atau permasalahan yang diajukan. Media ini terdiri dari unsur gambar dan kata-kata yang menjelaskan maksud dari gambar dan dapat dibuat dalam berbagai jumlah frame. Sebagai media komunikasi, komik digunakan dengan maksud agar dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan menumbuhkan minat komunikan untuk berusaha mengetahui lebih jauh dari pesan yang disampaikan.

Komik bisa dibedakan berdasarkan ukuran, desain, alur cerita, layout per halaman dan sebagainya, tidak terdapat batasan secara spesifik. Penciptaan komik lebih pada kreatifitas dari pembuat baik pada cerita maupun desainnya. Pada penelitian ini, pengukuran efektivitas komik berdasarkan layout (perwajahan) pada jumlah frame pada tiap halaman, yaitu komik dengan layout tunggal dan ganda.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diajukan hipotesis:

1. Media komik berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan responden



2. Terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan media komik dengan layout frame tunggal dan ganda.
3. Komik frame tunggal lebih tinggi pengaruhnya dibanding frame ganda terhadap peningkatan pengetahuan.

Metode yang digunakan adalah eksperimen pre-tes dan pos-tes (Nawawi, 2001). Prosedur yang digunakan, dengan memberikan soal (test) yang berkaitan dengaisi pesan komik sebelum dan sesudah eksperimen, Skor peningkatan pengetahuan diukur dengan mengurangkan hasil pos-tes dengan hasil pre-tes.

Lokasinya adalah Sekolah Dasar Negeri Nongkosawit 01 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penentuan sampel secara purposive random smpling dengan kriteria 1) siswa kelas 3, 4 dan 5 2) berdomisili di kelurahan Nongkosawit 3) umur 9 – 11 tahun. Jumlah responden terpilih 60 siswa kemudian secara acak sederhana diambil 40 siswa.

Dilaksanakan pada Oktober 2014 di Sekolah Dasar Negeri 01 Nongkosawit, kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan pada penelitian, yang terdiri media komik dengan layout 1 frame dan 2 frame serta daftar pertanyaan (soal). Kuesioner terdiri dari dua macam, yaitu kuesioner tentang karakteristik responden dan kuesioner berupa 15 pertanyaan dengan pilihan betul (B) dan salah (S) yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan

Data berupa primer dan sekunder. Data primer terdiri dari nilai hasil test pada saat pre-test maupun pos-test yang didapatkan sekaligus selama satu hari dan pada media, waktu dan tempat yang sama. Bentuk test tertulis yang digunakan berupa pertanyaan onyektif Benar (B) – Salah (S) sebanyak 15 soal, dan masing-masing soal mempunyai bobot 5 apabila benar dan 0 apabila salah. Responden sebanyak 40 orang dibagi dalam 2 kelompok sama besar yaitu kelompok frame tunggal berjumlah 20 orang dan frame ganda 20 orang. Pada saat penelitian responden tidak diberikan penjelasan secara lisan terhadap materi. Efek komunikasi hanya dibatasi pada efek kognitif dengan tujuan pada perubahan pengetahuan responden. Sebelum responden diber kesempatan membaca komik, maka dilakukan pre test terlebih dahulu untuk mengukur



pengetahuan responden sebelum diberikan perlakuan dengan menguji homogenitas. Penelitian dilanjutkan dengan melihat dan membaca komik, kemudian diberikan pos-test yaitu test untuk mengetahui peningkatan pengetahuan responden setelah membaca komik dengan alokasi waktu selama masing-masing 20 menit.

Reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik Kuder-Richardson (KR20) dan dilakukan terhadap responden yang diperkirakan sama karakteristiknya dengan responden penelitian, tetapi lokasinya berbeda yaitu di sekolah lain.

Uji homogenitas responden dilakukan agar tidak ada factor lain yang dapat mengganggu penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengetahuan awal sebelum responden memperoleh pengetahuan dan data yang digunakan adalah tingkat pengetahuan awal responden. Pengujian dilakukan dengan uji Bartlett (Steel and Torrie, 1993).

Data penelitian dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Metode analisis yang digunakan antara lain:

1. Untuk menjawab hipotesis pertama, dilakukan uji-t untuk mengetahui adanya pengaruh media komik dalam meningkatkan pengetahuan responden.
2. Untuk menjawab hipotesis kedua, digunakan uji *one way anova* (Sumanto, 1996)
3. Untuk menguji hipotesis ke tiga, dilakukan perbandingan rata-rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Gunungpati memiliki 16 kelurahan merupakan daerah agraris dengan lahan perkebunan yang berpotensi sebagai lahan peternakan sebesar 1.843,862 ha. Mempunyai batas wilayah sebelah utara wilayah kecamatan gajah mungkur, sebelah Timur kecamatan Banyumanik, sbelah barat Kabupaten Kendal dan sbelah selatan Kabupaten Semarang. Dari 16 kelurahan, lokasi yang diambil adalah kelurahan Nongkosawit. Kelurahan Nongkosawit



terletak di kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan populasi ayam kampung sebesar 3000 ekor dan ayam ras sebesar 25.000 ekor pada tahun 2014.

Jumlah penduduk kelurahan Nongkosawit adalah 2761 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan yaitu tidak sekolah sebanyak 318 jiwa (11,52%), tidak tamat SD sebanyak 60 jiwa (2,17%), tamat SD sebanyak 1716 jiwa (62,15%), tamat SMP sebanyak 392 (14, 20%), tamat SMU sebanyak 231 jiwa (8,37%), tamat D3 sebanyak 25 jiwa (0,91%) dan Sarjana sebanyak 19 jiwa (0,69%).

Identitas Responden

Indikator yang digunakan untuk menentukan identitas responden dalam penelitian ini adalah umur, mata pencaharian kepala keluarga dan tingkat pendidikan di Sekolah Dasar. Indikator tersebut dapat mengetahui tingkat pengetahuan responden berkaitan dengan kemampuan responden dalam menyerap informasi. Apabila antar responden mempunyai karakteristik yang sama, maka ada kecenderungan responden mempunyai tingkat pengetahuan yang sama. Identitas responden dalam penelitian ini telah diketahui melalui uji homogenitas bahwa karakteristik responden seragam. Responden berumur 9 - 11 tahun sesuai dengan metoda penentuan responden yang telah dijelaskan sebelumnya. Responden terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas 3, 4 dan 5 pada Sekolah dasar Nongkosawit 01 dan dibedakan pula menurut jenis kelamin.

Tabel 1. Identitas Responden

No	Jenis	Kategori	Jumlah	Persen
1	Umur	9 tahun	8	20
		10 tahun	21	52.5
		11 tahun	11	27.5
2	Kelas SD	3	9	22.5
		4	17	42,5
		5	14	35
3	Jenis kelamin	Laki-laki	22	55
		Perempuan	18	45

Sumber : Data terolah (2014)

Tabel 1 menunjukkan bahwa umur responden terbanyak adalah 10 tahun atau 52,5% atau 20% responden berumur 9 tahun, dan 27,5%, atau 11 responden berumur 11 tahun. Media komik sangat baik diberikan pada



responden anak-anak, Karena menurut Alwi (2001) komik adalah cerita bergambar yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Tingkat umur 9 dan 11 tahun menunjukkan kesesuaian responden terhadap media yang digunakan, Karena anak-anak dengan umur tersebut lebih mudah menerima informasi yang disampaikan dengan tambahan kelucuan di dalamnya.

Reliabilitas Instrumen

Instrumen penelitian agar dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat dipercaya, maka perlu diuji reliabilitas instrument. Hal ini sesuai dengan Arikunto (1993) reliabilitas instrument adalah instrument yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik atau dapat dipercaya (*reliable*). Arikunto (1993) menambahkan bahwa instrument terbukti reliabel berdasarkan perhitungan dengan teknik Kuder-Richardson 21 (K-R21). Hasil perhitungan menunjukkan $r_{hitung} 0,8337735 > r_{table} (0,05;19) (0,444)$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa instrument yang digunakan adalah reliabel, sehingga dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpul data.

Homogenitas Responden

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa $t_{hitung} (2,30) < t_{table} (0,05;19) (30,144)$ berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil perhitungan menunjukkan dapat dianggap memiliki pengetahuan awal yang homogen walaupun karakteristiknya berbeda, sehingga diharapkan tidak ada faktor lain yang mengganggu.

Pengetahuan Awal Responden sebelum diberi perlakuan

Nilai yang didapatkan apabila seluruh hasil test terjawab dengan benar adalah 75 dan rata-rata nilai pre tes untuk kelompok media komik 1 frame adalah 63,50 atau 84,7% sedangkan kelompok media komik 2 frame adalah 64,50 atau 86%. Nilai tersebut menunjukkan rata-rata pengetahuan responden pada kelompok komik 1 frame lebih baik daripada kelompok 2 frame, sedangkan pengetahuan awal responden secara keseluruhan dapat dikatakan sudah cukup baik tentang manfaat telur. Nilai pre-tes yang cukup baik tidak hanya disebabkan komoditas telur sendiri telah dikenal dengan baik (populer) di



masyarakat, tetapi juga disukai oleh masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Hintono (1995) bahwa kepopuleran telur tidak hanya Karena gampang diperoleh dan mempunyai kegunaan yang luas dalam memasak, lebih dari itu nilai gizi telur yang hamper tak terkalahkanoleh bahan pangan lain; bahkan telur dapat dikatakan sebagai bahan makanan yang hamper sempurna.

Peningkatan Pengetahuan Responden Setelah diberi Perlakuan

Perubahan pengetahuan responden setelah dibaerikan perlakuan dapat dilihat pada nila pos-tes dikurangi pre-tes. Nilai yang didapatkan apabila tes terjawab dengan benar adalah 75 dan rata-rata nilai pos-tes untuk kelompok komik 1 frame adalah 69,50 atau 92,70%, sedangkan kelompok komik 2 frame adalah 70,25 atau 93,7%. Hasil pos-tes menunjukkan bahwa sebagian responden menalami peningkatan pengetahuan setelah menerima perlakuan, dan kelompok komik 2 frame memiliki nilai pos-tes yang lebih disbanding kelompok 1 frame. Peningkatan pengetahuan responden terjadi Karena responden membaca komik segera setelah responden melaksanakan pre-tes. Peningkatan pengetahuan ini dapat memberikan gambaran, bahwa media komik efekif digunakan untuk peningkatan pengetahuan. Sesuai dengan pendapat Mardikanto (1993), bahwa pemilihan media atau alat peraga harus efektif untuk tujuan perubahan perilaku ssaran. Hal ini disebabkan Karena tidak semua alat peraga selalu tersedia atau mudah disediakan, alat peraga yang efektif dan untuk tujuan perubahan perilaku tertentu tersedia banyak alternative yang dapat digunakan.

Pengaruh Media Komik

Media komik yang telah dijadikan instrument penelitian dan menjadi media penyampaian pesan tentang manfaat telur memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap pengetahuan responden. Analisa pengaruh media komik terhadap peningkatan responden dilakukan dengan metode tertentu dengan tujuan dapat menjelaskan hipotesis yang telah diajukan.

Analisis Pengaruh Media Komik

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan uji-t pada kelompok komik 1 frame adalah $6,98 > t\text{-tabel}(0,05;19)(2,09)$, sedangkan pada kelompok 2 frame nilai t-hitung adalah $7,67 > t\text{-tabel}(0,05;19)(2,09)$. Hasil uji-t menunjukkan



bahwa media komik dengan 1 frame dan 2 frame dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan pengetahuan siswa SD tentang manfaat telur, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh media komik 1 frame dan 2 frame dapat meningkatkan pengetahuan dapat diterima.

Kesimpulan hasil uji-t menunjukkan bahwa media komik 1 frame dan 2 frame efektif digunakan sebagai sarana penyampaian informasi tentang manfaat telur. Media komik dapat mempengaruhi pengetahuan responden. Karena media komik memiliki fungsi sebagai media pengajaran dan informasi. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam situs www.mediaaide.blogspot.com, bahwa komik bisa dipakai sebagai media ajar yang berbiaya murah. Media komik juga merupakan media gambar yang efektif dalam memvisualisasikan suatu materi yang akan disampaikan. Karena dengan adanya visualisasi tersebut responden dapat lebih tertarik dan berminat membaca. Responden yang telah tertarik dan berminat membaca, kemudian diharapkan dapat lebih memahami materi yang disampaikan yaitu tentang manfaat telur. Hal ini sesuai pendapat Wahono (2006), bahwa pendekatan visualisasi dengan komik biasanya digunakan untuk menarik minat baca kaum muda dan mempermudah dalam memahami pesan yang akan disampaikan.

Tabel 2. Hasil Perhitungan uji-t pada 2 kelompok Responden.

Kelompok Komik	t-hitung	t-tabel
1 frame	6,98	2,09
2 frame	7,67	2,09

Sumber : Data terolah

Penyuluhan dengan media komik tersebut dapat dikatakan tercapai, Karena dapat menambah pengetahuan siswa SD tentang manfaat telur. Penelitian ini baru mencapai tujuan pada ranah kognitif, yaitu menambah tingkat pengetahuan responden, dari yang belum tahu menjadi tahu. Widjaya (1993) mengatakan, bahwa kelebihan penyuluhan dengan menggunakan media cetak adalah relative murah dan dapat disimpan dengan mudah, sehingga dapat lebih efektif untuk mempengaruhi pengetahuan. Suharjo (1996) menambahkan bahwa media adalah alat yang dapat dijadikan perantara untuk menyampaikan



pesan atau gagasan kepada sasaran tertentu dan sebagai sarana untuk menunjang proses belajar. Media komik adalah media yang efektif digunakan, Karena dapat dijadikan perantara untuk menyampaikan pesan.

Analisis Perbedaan Pengaruh Media Komik

Perhitungan untuk mengetahui adanya perbedaan media komik dalam meningkatkan pengetahuan responden tentang manfaat telur, dilakukan uji one way anova (uji F). Hasil uji menunjukkan, $F_{hitung} (53,154) > F_{table} (4,10)$ yang berarti terdapat perbedaan pengaruh antara media komik 1 frame dan 2 frame dalam meningkatkan pengetahuan siswa SD, sehingga hipotesis ke dua dapat diterima.

Tabel 3. Perbandingan Besarnya Peningkatan Pengetahuan Responden dengan Perbandingan Rata-rata.

Keterangan	Komik 1 Frame	Komik 2 frame
Rata-rata Pre-tes	63,5	64,5
Rata-rata Peningkatan	6	5,75
Persentase (%)	9,45%	8,92%

Sumber : Data terolah

Pengaruh penggunaan antara 1 frame dan 2 frame dalam meningkatkan pengetahuan dapat diketahui dengan perbandingan rata-rata. Komik 1 frame mempunyai rata-rata dan persentase peningkatan pengetahuan yang lebih besar yaitu 6 r 9,45% dibandingkan media komik 2 frame yaitu 5,75 dan 8,9%. Nilai perbandingan tersebut dapat diterima pada hipotesis ke tiga, yang menyatakan bahwa komik 1 frame berpengaruh lebih baik daripada 2 frame. Hal ini menunjukkan, bahwa jumlah frame dapat menarik perhatian sasaran, sehingga pesan akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh sasaran.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah media komik berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah Dasar tentang manfaat telur. Terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan media komik dengan layout 1 frame dan 2 frame dalam meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah Dasar. Media komik 1 frame memiliki pengaruh yang lebih baik



diandingkan dengan 2 frame dalam meningkatkan pengetahuan siswa Sekolah dasar tentang manfaat mengkonsumsi telur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1993. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Hapsoro, Andrianto. 2006. Frame Panel dan Komik. Wordpress Indonesia (<http://www.anthronic.com>) .
- Hintono, A. 1995. Dasar-dasar Ilmu Telur. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro. Semarang
- Mardikanto, T. 1992. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Edisi Keempat. Sebelas Maret University Press, Surakarta
- Masdiono. 2001. 14 jurus Membuat Komik. Creative Media. Jakarta.



CONTRACT FARMING SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN PETANI KECIL DI ERA MEA

Komalawati

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah

(lalabptptjtg@gmail.com)

ABSTRAK

Era Masyarakat Ekonomi Asean memberi peluang bagi komoditas pertanian Indonesia untuk dapat dipasarkan lebih luas. Namun demikian, peluang tersebut tidak selalu dirasakan oleh petani kecil karena akses terhadap informasi pasar yang terbatas. Contact farming dapat digunakan sebagai salah satu solusi bagi petani kecil untuk dapat terlibat memanfaatkan peluang pasar tersebut. Makalah ini ditujukan untuk membahas secara lebih mendalam tentang contract farming dan manfaatnya bagi petani kecil, serta potensinya dalam meningkatkan pendapatan petani. Hasil kajian menunjukkan bahwa contract farming dapat menjadi bagi solusi bagi petani kecil untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada. Selain dapat meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang dihasilkannya, contract farming juga dapat meningkatkan pendapatan petani penghasil. Agar petani kecil dapat ikut terlibat dalam contract farming, pembentukan dan pembinaan terhadap kelembagaan kelompok tani menjadi sangat penting. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah dan atau lembaga swadaya manusia (LSM) untuk memfasilitasi terbentuknya kelembagaan kelompok tani yang lebih baik.

Kata kunci: masyarakat ekonomi ASEAN, contract farming, petani kecil, pendapatan.

CONTRACT FARMING AS AN EFFORT TO EMPOWER SMALL FARMERS IN AEC ERA

ABSTRACT

ASEAN Economic Community era has given an opportunity to Indonesian agricultural commodity to be marketed widely. However, the opportunity is not always perceived by small farmers because of their limited access to market information. Contact farming can be used as a solution to small farmers to be involved in exploiting the market opportunity. This paper is aimed to discuss comprehensively contract farming and its benefits to small farmers, and its potential in increasing farmers' income. The study shows that contract farming can be a solution to small farmers to exploit the market opportunity. Aside from being able to improve the competitiveness of agricultural commodities produced, contract farming can also increase farmers' income. In order for small farmers to be involved in contract farming, formation and guidance to farmer group institutions have become very important. Therefore, governments' and or non-governmental organization's (NGO) roles are needed to facilitate the formation of a better farmer group institutions.

Keywords: ASEAN economic community, contract farming, small farmers, income.



PENDAHULUAN

Era Masyarakat Ekonomi Asean yang dimulai sejak tahun 2015 memberikan tantangan sendiri bagi Indonesia. Di satu sisi, MEA dapat menjadi tantangan bagi produk Indonesia dengan masuknya barang, jasa, dan modal dengan bebas. Namun di satu sisi yang lain, hal ini juga dapat menjadi peluang bagi produk Indonesia terutama komoditas pertanian di Indonesia untuk dapat dipasarkan lebih luas di negara-negara ASEAN. Namun demikian, tidak semua petani atau produsen dapat memanfaatkan peluang pasar tersebut karena terbatasnya akses terhadap peluang pasar yang ada. Petani miskin, wanita, tidak memiliki lahan, dan petani subsisten atau marjinal biasanya tidak memiliki akses terhadap peluang pasar yang ada (Actionaid, 2015).

Ketidakmampuan petani untuk dapat mengakses peluang pasar yang ada, dapat diakomodasi melalui *contract farming*. *Contract farming* dipercaya oleh pemerintah dan lembaga donor sebagai salah satu solusi untuk memperkuat akses petani terhadap pasar domestik dan luar negeri (Bijman, 2008). *Contract farming* juga dianggap sebagai salah satu solusi bagi pemerintah di tengah terbatasnya kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan teknis, input produksi, dan penyuluhan pertanian (Bijman, 2008). Melalui *contract farming*, petani memperoleh akses terhadap berbagai hal yang sebelumnya sangat sulit diperoleh, seperti akses terhadap input produksi, modal, teknologi, penyuluhan dan bimbingan, serta berkurangnya resiko produksi yang harus ditanggung oleh petani (Prowse, 2007).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa *contract farming* dapat meningkatkan pendapatan (Setboonsarng et.al., 2006; Setboonsarng, 2008; Miyata et.al., 2009; Ministry of Planning and Investment, 2014), namun belum tentu dapat membantu mengentaskan kemiskinan (Actionaid, 2015). Makalah ini ditujukan untuk mengkaji dampak dari *contract farming* terhadap peningkatan pendapatan dan upaya yang dapat dilakukan agar petani kecil dapat terlibat dalam *contract farming*.



Konsep Contract Farming

Contract farming atau kontrak kerjasama pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama antara petani dan pedagang atau pengusaha pengolah produk pertanian yang memuat tentang kewajiban petani dan pengusaha sebagai mitra bisnis (Will, 2013). Kewajiban petani dalam kontrak adalah memasok produk hasil pertanian sesuai perjanjian, dan kewajiban pengusaha adalah untuk membeli atau mengambil seluruh produk yang dihasilkan petani dan membayarnya sesuai kesepakatan bersama. Tidak hanya terkait jenis produk dan jumlah yang diminta, kontrak dapat juga berisi tentang bentuk bantuan yang akan diberikan perusahaan kepada petani untuk menjamin kontinuitas produksi dan kualitas produknya. Bantuan tersebut dapat berupa input (benih, pupuk, atau produk obat-obatan), teknologi, bantuan finansial, atau penyuluhan, pelatihan, atau transport dan logistik (Will, 2013; Ministry of Planning and Investment, 2014).

Bentuk Contract Farming

Contract farming memiliki banyak variasi dalam model kerjasamanya. Jika dilihat dari substansi, bentuk, dan proses pengambilan kesimpulan, *contract farming* bervariasi dalam hal: (1) bentuk perjanjian formal atau informal, verbal atau tertulis; (2) kerjasama dilakukan dengan individu petani atau dengan kelompok petani; (3) isi kerjasama tersebut dibuat tidak terlalu detail atau sangat spesifik; (4) kontrak tersebut diperbaharui setiap musim atau meliputi kesepakatan jangka panjang; dan (5) apakah spesifikasi yang diambil didasarkan pada negosiasi kasus per kasus, atau berdasarkan sub sektor (Will, 2013). Model kerjasama lainnya dalam *contract farming* disajikan pada Gambar 1.

Contract farming juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kontraknya, antara lain: (1) *marketing contract* yaitu jenis kontrak dimana petani dan pengusaha telah menyepakati terlebih dahulu sebagian besar komponen yang mempengaruhi keputusan produksi petani. Petani memegang kendali penuh atas aktivitas usahatani dan aset pertanian, dan menanggung penuh resiko produksi, sementara itu, pengusaha atau pembeli menanggung resiko pemasaran; (2) *production management contract*, dimana pengusaha sebagai

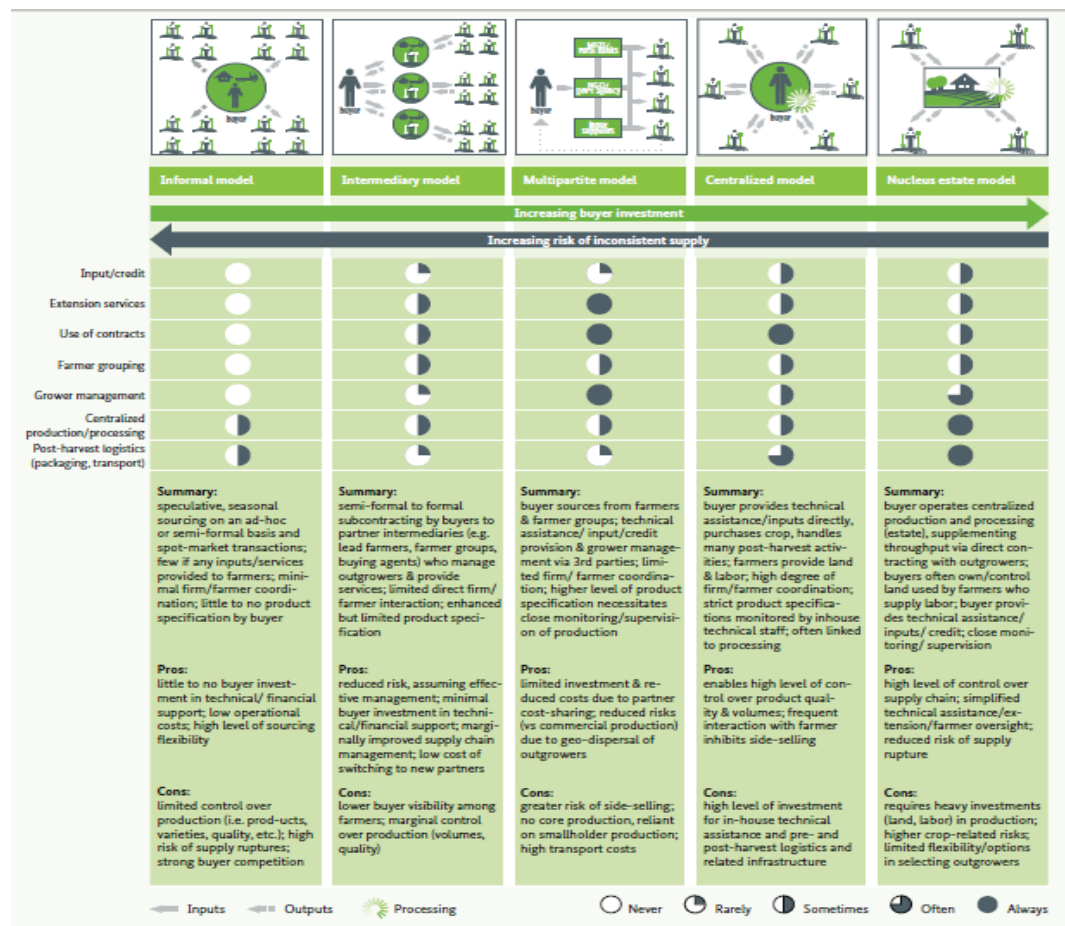


SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

pembeli menentukan bagaimana proses produksi dan pengolahan pasca panen, sedangkan petani mengikuti spesifikasi yang diinginkan pengusaha; (3) *resource providing contract*, dimana pengusaha kontraktor memberikan kredit dalam bentuk input, yang dibayar ketika produk dikirim. Besarnya keterlibatan mulai manajemen produksi oleh petani hingga manajemen produksi oleh kontraktor (Bijman, 2008).



Gambar 1. Berbagai Model Kerjasama dalam Contract Farming

Sumber: Technoserve dan IFAD (2011 dalam Will, 2013:19)

Di Asia sendiri, bentuk *contract farming* dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu: (1) berdasarkan motivasi dan tujuan kontraktor (motif sosial, promosi kegiatan pertanian alternatif, pengentasan kemiskinan, komersial, bagian dari Corporate Social Responsibility; (2) berdasarkan struktur dan skala operasi (Sentralisasi Skala Besar, Desentralisasi Skala Kecil) (Setboonsarng, 2008). Kontrak formal atau informal dapat terjadi antara



pedagang perantara dan pengusaha. Pengusaha akan membeli produk hortikultura dari pedagang perantara. Sementara itu, pedagang perantara biasanya berhubungan langsung secara informal dengan petani.

Dampak Contract Farming

Contract farming tidak hanya memberikan manfaat bagi pedagang atau pembeli, tetapi juga bagi petani. Bagi pembeli, *contract farming* memberikan manfaat dalam bentuk terjaminnya ketersediaan pasokan produk pertanian secara kontinu, dan efisiensi biaya (Setboonsarng et.al., 2006). Efisiensi biaya tersebut tercipta karena perusahaan tidak perlu berinvestasi lahan dan tenaga kerja untuk memperoleh produk yang diperlukannya, dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengawasi proses produksinya. Walaupun pada beberapa model, sebenarnya biaya tersebut ada, namun karena ada sebagian resiko produksi yang ditanggung oleh petani, pembeli tetap masih memiliki keuntungan dalam hal biaya.

Sementara itu, petani sebagai pelaku usahatani juga memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam: (1) akses terhadap pasar; (2) akses terhadap kredit; (3) akses kepada teknologi/pengembangan keterampilan; (4) akses kepada input; (5) mengurangi resiko harga; (6) mengurangi resiko produksi; (7) memotivasi tenaga kerja dalam keluarga untuk bekerja dengan lebih baik; (8) introduksi tanaman dengan nilai yang tinggi (Setboonsarng et.al., 2006; Setboonsarng, 2008; Prowse, 2007). Selain berbagai manfaat tersebut, petani tentunya memiliki keuntungan dari meningkatnya pendapatan.

Beberapa bukti empiris dari pelaksanaan *contract farming* di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa *contract farming* berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan (Tabel 1). Hasil penelitian Miyata et.al. (2009) dan Bahari et.al. (2012) menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh petani dari pendapatan merupakan salah satu yang memotivasi petani untuk terlibat dalam *contract farming*, walaupun motif tersebut relatif rendah dari motif lainnya. Meningkatnya pendapatan dari *contract farming* disebabkan oleh rendahnya biaya produksi dan harga jual lebih baik yang diterima oleh petani (Bahari, 2011).



Hasil penelitian Sokchea dan Culas (2015) juga menyatakan bahwa *contract farming* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan petani.

Tabel 1. Dampak dari Contract Farming terhadap Pendapatan di Beberapa Negara di Asia

Penulis	Komoditas	Lokasi Penelitian	Dampak terhadap pendapatan
Simmons et.al. (2003)	Benih hibrida	Jatim, Indonesia	+
Setboonsarng et.al. (2006)	Beras organik	Thailand	+
Sriboonchitta dan Wiboonpoongse (2008)	Sayuran (kentang, tomat)	Thailand Utara	+
Miyata et.al. (2009)	Apel dan bawang daun	Cina	+
Saigenji dan Zeller (2009)	The	Vietnam	+
Manzilati et.al. (2010)	Jagung	Blitar, Jawa Timur, Indonesia	+
Bahari (2011) dan Bahari et.al. (2012)	Ayam broiler	Malang, Jawa Timur	+
Ministry of Planning and Investment (2014)	Jagung, singkong, pisang	Laos	+
Sokchea dan Culas (2015)	Beras	Kamboja	+

Namun demikian, dampak dari *contract farming* terhadap pengentasan kemiskinan masih diragukan. *Contract farming* dapat membantu mengentaskan kemiskinan jika *contract farming* melibatkan petani miskin atau petani kecil. Penelitian yang dilakukan Simmons et.al. (2003) pada kerjasama kemitraan MNC Grup dan petani pada usahatani benih jagung di Indonesia dan penelitian Miyata et.al. (2009) pada *contract farming* yang dilakukan oleh petani di Cina menunjukkan bahwa sepertinya petani kecil belum dilibatkan dalam kegiatan *contract farming*. Hal ini ditunjukkan oleh karakteristik petani yang terlibat dalam *contract farming* di kedua negara tersebut yang ternyata memiliki aset kepemilikan yang besar, sehingga mereka sebenarnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap kredit dan juga memiliki tabungan. Sementara itu, menurut APCAS (2010), petani miskin biasanya memiliki keterbatasan modal, dan



kesulitan untuk memperoleh kredit atau pinjaman modal dari lembaga perbankan.

Jika dilihat dari sisi perusahaan, tidak dilibatkannya petani kecil dalam *contract farming* disebabkan oleh preferensi perusahaan atau pembeli untuk bekerjasama dengan beberapa petani dengan luasan lahan yang besar atau dengan kepemilikan aset yang memadai. Hal ini diperkirakan terkait dengan biaya transaksi yang perlu dikeluarkan dan sulitnya melakukan pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh Dietrich (1994 dalam Simmons et.al., 2003) terdapat empat biaya transaksi yang harus ditanggung oleh perusahaan saat melakukan kontrak dengan petani kecil: (1) biaya membuat draft, negosiasi, dan *enforcing* kontrak; (2) biaya yang harus dikeluarkan jika ternyata perjanjian tidak dapat dipenuhi; (3) biaya yang harus dikeluarkan untuk mendesign atau memulai dan menjalankan usaha terkait dengan organisasi; dan (4) biaya untuk mengikat agar komitmen terpenuhi. Menurut Prowse (2010), biaya transaksi juga terjadi karena adanya kesadaran bahwa perjanjian melibatkan berbagai pihak yang rasional dan membawa kepentingannya masing-masing, sehingga ada unsur ketidakpastian bahwa perjanjian akan dipenuhi kedua belah pihak. Dengan banyaknya petani kecil yang terlibat, biaya transaksi perusahaan akan semakin tinggi. Untuk itu, perusahaan lebih menyukai untuk bertransaksi dengan beberapa petani besar.

Guna melibatkan petani kecil dalam *contract farming*, kelompok tani dapat menjadi salah satu solusi. Melalui kelompok tani, petani kecil dapat menyatukan aset mereka, sehingga memiliki aset yang lebih besar dan lebih terbuka terhadap akses kredit. Perusahaan juga terbantu dalam hal biaya transaksi dan monitoring jika transaksi dilakukan dengan kelompok tani. Namun demikian, seperti halnya pada kerjasama langsung dengan individu, perjanjian kerjasama dengan kelompok tani seringkali terhambat karena adanya ketidakpastian atau informasi yang tidak simetris tentang kondisi kedua belah pihak. Dengan demikian, struktur organisasi yang tepat, kepengurusan kelompok tani dan lembaga perantara yang dapat dipercaya merupakan kunci dari keberhasilan kerjasama *contract farming* melalui kelompok tani dan lembaga perantara. Jika kelompok tani



atau organisasi produsen dapat menjembatani petani dan pengusaha, kelompok tani dapat memberikan potensi yang besar untuk pengentasan kemiskinan (Prowse, 2007).

PENUTUP

Contract farming dapat meningkatkan pendapatan, walaupun ternyata belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tidak dilibatkannya petani kecil dalam *contract farming*. Perusahaan lebih tertarik untuk bekerjasama dengan petani yang memiliki aset besar karena biaya transaksi yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan petani kecil. Agar petani kecil dapat dilibatkan dalam *contract farming*, petani kecil sebaiknya bergabung dalam kelompok tani. Namun demikian, dengan bergabung dalam kelompok tani, petani kecil seringkali terkendala jaminan struktur organisasi yang tepat, dan kepengurusan kelompok tani atau lembaga perantara yang dapat dipercaya. Agar kelompok tani dapat berjalan dengan baik, pembentukan kelompok tani sebaiknya diawasi, dan disinilah peran pemerintah atau lembaga swadaya manusia (LSM) sebagai fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Actionaid. 2015. *Contract farming and Out-grower Schemes: Appropriate Development Models to Tackle Poverty and Hunger?*. Diunduh tanggal 15 Januari 2016 dari http://www.actionaidusa.org/sites/files/actionaid/contract_farming.pdf
- Asia and Pacific Commission on Agricultural Statistics (APCAS). 2010. *Characterisation Of Small Farmers in Asia and The Pacific*. Kamboja: FAO.
- Bahari. 2011. Upaya Peningkatan Pendapatan Peternak Ayam Broiler Melalui *Contract farming*: Pendekatan Analisis Persamaan Simultan (Kasus Usaha Ayam Broiler Di Kecamatan Bululawang, Malang). *Agriplus*, 21(03): 224-236.
- Bahari, M.M. Mustadjab, N. Hanani, dan B.A. Nugroho. 2012. Analisis *Contract farming* Usaha Ayam Broiler. *Jurnal Agro Ekonomi*, 30(2):100-127.
- Bijman, J. 2008. *Contract farming in Developing Countries: an Overview*. Working Paper. The Netherlands: Wageningen University.
- Manzilati, A., A.E. Yustika, B. Krisnamurthi, dan A. Suman. 2010. Implikasi Kontrak Usahatani dengan Perusahaan terhadap Keberlanjutan Usahatani (Studi Pada Komoditi Jagung). *Wacana*, 13(3):439-457.



- Ministry of Planning and Investment. 2014. *Executive Summary: Impacts of Contract Farming on Poverty and Environment in Lao PDR*. Lao PDR: Ministry of Planning and Environment.
- Miyata, S., N. Minot, dan D. Hu. 2009. Impact of *Contract farming* on Income: Linking Small Farmers, Packers, and Supermarkets in China. *World Development*, 37(11):1781-1790.
- Prowse, M. 2007. Making *Contract farming* Work with Co-operatives. *Opinion*, October 2007. London: Overseas Development Institute.
- Prowse, M. 2012. *Contract farming in Developing Countries-A Review*. Prancis: AFD.
- Saigenji, Y. dan M. Zeller. 2009. *Effect of Contract farming on Productivity and Income of Small Holders: The Case of Tea Production in North-Western Vietnam*. Makalah untuk Presentasi pada the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, 16-22 Agustus 2009.
- Setboonsarng, S. 2008. *Global Partnership in Poverty Reduction: Contract farming and Regional Cooperation*. ADB Institute Discussion Paper No. 89. Jepang: Asian Development Bank Institute.
- Setboonsarng, S., P. Leung, dan J. Cai. 2006. *Contract farming and Poverty Reduction: the Case of Organic Rice Contract farming in Thailand*. ADB Institute Discussion Paper No.49. Jepang: Asian Development Bank Institute.
- Simmons, P., I. Patrick, dan P. Winters. 2003. *Evaluation Of A Hybrid Seed Contract Between Smallholders And An MNC In East Java, Indonesia*. Makalah disajikan pada 47th Annual Conference of the Australian Agricultural & Resource Economics Society, Freemantle, Western Australia, February, 2003.
- Sokchea, A. dan R.J. Culas. 2015. Impact of *Contract farming* with Farmer Organizations on Farmers' Income: A Case Study of Reasmey Stung Sen Agricultural Development Cooperative in Cambodia. *Australasian Agribusiness Review*, 23 (1):1-11.
- Sriboonchitta, S. dan A. Wiboonpoongse. 2008. *Overview of Contract farming in Thailand: Lessons Learned*. ADB Institute Discussion Paper No. 112. Jepang: Asian Development Bank Institute.
- Will, M. 2013. *Contract farming Handbook: A Practical Guide for Linking Small-Scale Producers and Buyers through Business Model Innovation*. Jerman: GIZ.



CERTIFICATION STRATEGIES SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA DESA DALAM MENGHADAPI MEA

Sutiyono

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

sutiyonojaya@yahoo.com

ABSTRAK

Era globalisasi membuka peluang terbukanya pasar bebas lintas negara. Setiap negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan dalam negeri masing-masing. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi semakin membuat batas negara menjadi semu dan mobilitas tinggi. Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, desa sebagai bagian dari wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di NKRI tidak terlepas dari persaingan bebas tersebut. Sehingga, dibutuhkan upaya kreatif dan inovatif untuk survive ditengah percaturan global. Sertifikasi sumber daya merupakan upaya pengakuan terhadap sumber daya yang ada di desa untuk dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang siap berdaya saing dengan pasar bebas. Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam mengenai certification strategies sumber daya desa untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan makalah ini, yaitu library research yang membahas secara komprehensif mengenai urgensi certification strategies untuk meningkatkan daya saing sumber daya desa. Sertifikasi sumber daya desa menjadi salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan daya saing desa. Pemerintah perlu mendukung upaya kreatif tersebut melalui jalur yuridis akan dapat diterapkan secara masif di seluruh desa di Indonesia demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kata kunci: *Certification Strategies*, Daya Saing Desa, MEA

PENDAHULUAN

Era globalisasi membuka peluang terbukanya pasar bebas lintas negara. Setiap negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan dalam negeri masing-masing. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi semakin membuat batas negara menjadi semu. Terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara menciptakan peningkatan mobilitas baik barang maupun manusia dari negara satu ke negara yang lainnya. Apalagi pada awal 2015, negara-negara khususnya di Asia Tenggara telah menyepakati adanya komunitas baru untuk



meningkatkan ekonomi bersama. Komunitas diantara negara-negara di asia tenggara tersebut disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA.

Masyarakat ekonomi ASEAN adalah perwujudan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang telah digariskan dalam visi ASEAN 2020, untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi, yang di dalamnya terdapat arus barang, jasa, dan investasi yang bebas, aliran modal yang lebih bebas, serta pembangunan ekonomi yang adil dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020 (Choiruzzad, 2015:94).

Memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, desa sebagai bagian dari wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari persaingan bebas tersebut. Sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI yang ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, desa merupakan wilayah terbanyak yang membentuk negara Indonesia. Karena jumlah desa di Indonesia mencapai 70 ribu desa dan populasi di dalamnya mencapai 140 juta jiwa, sehingga data ini menunjukkan bahwa desa memiliki peningkatan populasi yang awalnya dari 128,5 juta jiwa. Artinya, desa memegang kendali besar akan populasi dibanding perkotaan sebanyak 126,3 juta jiwa (Agusta, 2014:ix).

Selain itu, desa memiliki berbagai kekayaan alam, seni dan budaya yang merupakan bagian kekayaan dari Indonesia yang perlu dijaga, dan dilestarikan sebagai *local wisdom*. Sumber daya desa tersebut adalah salah satu tonggak bagi Indonesia untuk bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Oleh karena itu, upaya memajukan ekonomi desa akan mendukung pilar ke-3 MEA yaitu membentuk kawasan yang memiliki ekonomi yang setara. Mengingat rerata tingkat kemandirian desa mencapai 0,54 atau tergolong rendah (Agusta, 2014:xiv). Hal ini menunjukkan titik kontradiktif dimana desa merupakan pemasok kebutuhan kota, yang artinya banyak sumber daya desa yang melimpah akan tetapi menjadi kawasan yang tergolong ekonomi lemah.



Rendahnya manajemen sumber daya desa menjadi pokok persoalan yang menghambat desa untuk berdikari. Kekayaan alam yang banyak, tenaga ahli yang tidak sedikit pula, tidak dapat berfungsi maksimal karena kurangnya pengakuan sumber daya desa tersebut. Hal ini menjadikan kurangnya optimalisasi sumber daya yang ada di desa untuk bisa bersaing ditengah mobilisasi baik berupa barang maupun jasa. Semestinya, dengan pendataan sumber daya desa dan sebuah komunitas pemberdayaan yang diorganisasi dengan baik, desa diharapkan memiliki daya saing yang mumpuni ditengah pasar ekonomi yang global. Sehingga, diperlukan strategi khusus untuk menginventarisasi sumber daya desa guna mendapatkan pengakuan sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*).

Pendataan mengenai sumber daya desa menjadi hal penting sebagai poros penguatan ekonomi di desa. Sertifikasi sumber daya merupakan upaya pengakuan terhadap sumber daya yang ada di desa untuk dipertahankan sebagai bentuk kearifan lokal yang siap berdaya saing dengan pasar bebas. Strategi-strategi sertifikasi yang selanjutnya disebut *certification strategies* menjadi salah satu alternatif solusi mempertahankan produk lokal dan meningkatkan daya saing desa yang pada akhirnya akan memiliki daya saing global (*go global*). Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih mendalam mengenai *certification strategies* sumber daya desa untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi MEA.

METODE PENELITIAN

Metode penukisan karya ilmiah ini menggunakan metode *library research*. Metode ini merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Riset pustaka ini membatasi hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (*preliminary research*) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Mustika Zed, 2004). Selanjutnya, Menurut Mestika Zed (2004:54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan sering adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode



pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu berasal dari berbagai literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Hal tersebut, didasarkan dengan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan.

Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku-buku mengenai kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa, masyarakat ekonomi ASEAN, juga didukung oleh perundang-undangan tentang desa, artikel ilmiah, dan artikel lepas yang bersumber dari internet. Jenis data yang diperoleh bersifat variatif, artinya gabungan dari data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan *library research*, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul karya tulis. Data atau informasi tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas.

Analisis data dilakukan secara induktif, yang di dalamnya terdiri dari dua tahap yaitu proses reduksi data dan penyajian data. Reduksi data bertujuan untuk penulis lebih mudah dalam memilih data yang valid, sedangkan penyajian data agar dimungkinkan penarikan simpulan. Penyajian data yaitu pengumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan, maupun pengambilan suatu tindakan tertentu. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk gambar sehingga penulis dapat dengan menguasai dengan baik.

Penarikan simpulan didapatkan sesudah merujuk rumusan masalah, tujuan penulisan, analisis dan sintesis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik merepresentasikan pokok-pokok bahasan dalam karya tulis serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ketiga yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan memberdayakan desa tidaklah mudah. Salah satu tantangan yang dihadapi khususnya masyarakat pedesaan adalah masih carut marutnya penataan aset yang dimiliki oleh desa sendiri. UU Desa pasal 116 (4) secara gamblang semestinya menegaskan bahwa inventarisasi aset desa paling lambat adalah dua tahun sejak disahkannya UU Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Pemdes) harusnya sudah mulai melakukan kegiatan inventarisasi aset dan sudah selesai sebelum 15 Januari 2016.

Fakta di lapangan, sebagai contoh adalah data yang diperoleh dari M.Zainal Anwar (2016), atas perolehan data wawancaranya terhadap sekretaris desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, bahwa masih belum banyak hal yang dilakukan terkait penataan aset desa, padahal desanya punya aset yang melimpah. Sebagai gambaran aset yang melimpah yaitu aset tanah, perkebunan, sawah, air, pasir masuk dalam kategori aset sumber daya alam, sedangkan dalam kategori aset sosial-budaya seperti halnya arisan, anjangsana, paguyuban. Kategori aset sumber daya manusia atau tenaga kerja terampil, seperti buruh tani, buruh kebun. Pada kategori aset fisik seperti pasar desa, hingga alokasi dana desa dan dana desa tersendiri atau aset finansial. Sayangnya manajemen untuk menginventarisasikan terhadap kekayaan sumber daya desa belum berjalan optimal.

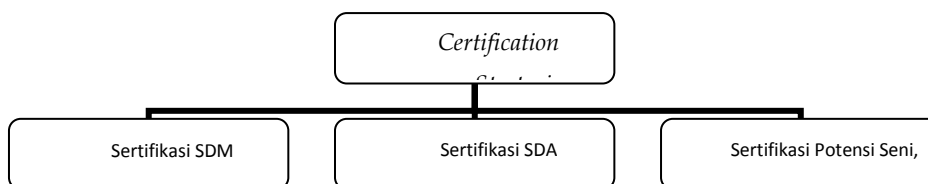
Beberapa data tersebut menunjukkan bahwa betapa identifikasi aset dan tata manajemen sumber daya desa berjalan stagnan atau monoton. Kenyataan tersebut, tidak berbanding lurus dengan inventarisasi dan membukukannya dengan baik dan mudah diakses publik. Disisi regulasinya, Permendagri 114/2014 Pasal 13 (2) memberikan panduan arah melakukan identifikasi aset desa untuk dituliskan ke dalam laporan data desa, akan tetapi tidak berjalan dengan optimal. Kenyataan ini menandakan bahwa lemahnya kontrol dan fasilitas pemerintah pusat terhadap persoalan manajemen sumber daya yang



dimiliki oleh desa. Bisa jadi alasannya adalah inventarisasi tidak menjadi *tranding topic* dibanding informasi dana desa.

Merujuk pada UU Desa pasal 4 (d), salah satu poin pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Regulasi ini memberikan informasi penting bahwa aset desa merupakan modal untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Sehingga, perlu adanya upaya kreatif untuk mendata dengan melibatkan partisipasi masyarakat demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, gagasan baru tercipta untuk mendokumentasikan beberapa aset dan sumber daya desa yang bertujuan membangun dan melibatkan peran serta masyarakat. Upaya-upaya untuk menginventarisasi aset dan sumber daya desa dalam rangka pembangunan desa mandiri selanjutnya disebut sebagai *certification strategies*.

Certification strategies adalah startegi-strategi kreatif yang muncul sebagai terobosan baru untuk menginventarisasi dan pengakuan terhadap sumber daya desa sebagai sutau kearifan lokal (*local wisdom*). *Certification Strategies* mempunyai tiga strategi sertifikasi.



Gambar.1 Certification Strategies dalam mensertifikasi

Pertama, sertifikasi sumber daya manusia di desa atau pembentukan komunitas pengembangan (*community development*). Upaya sertifikasi sumber daya manusia di desa yaitu melalui sebuah komunitas. Secara umum, tenaga terampil yang ada di desa adalah tukang pacul/gali, tukang pengrajin tradisional, pemetik kelapa, tukang batu, tukang kayu, dll. Dengan didokumentasikan atau diinventarisasi maka komunitas-komunitas seperti ini akan lebih mudah diorganisir dengan baik. Soetomo (2013:79) mengatakan bahwa *community development* adalah suatu usaha masyarakat secara mandiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultur komunitas. Mengintegrasikan komunitas dalam



kehidupan nasional dan mendorong komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Arti *community* mengandung tiga elemen penting yaitu lokalitas (*local ecology*), kehidupan sosial yang terorganisasi, dan solidaritas sosial. Konsep ini sekaligus akan menumbuhkan modal sosial yang merupakan marwah masyarakat Indonesia yaitu budaya gotong-royong, sikap peduli yang tinggi, dan relasi sosial yang saling mendukung (Soetomo, 2013:85). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Zubaedi (2016:158), bahwa pengembangan masyarakat ini menekankan pada pengembangan masyarakat secara partisipatif (*collective action*). Jadi dengan melibatkan masyarakat secara aktif, menjadikan masyarakat menjadi sadar akan urgensinya strategi yang diarahkan untuk kesejahteraan bersama. Strategi ini menjadi langkah utama dalam upaya meningkatkan daya saing desa di era MEA.

Kedua, sertifikasi pada sumber daya alam. Strategi sertifikasi yang kedua adalah sertifikasi dibidang sumber daya alam. Ketergantungan masyarakat terhadap berbagai produk dan jasa dari luar sistem kian tinggi dan seolah tidak terkendali. Limpahan kekayaan sumber daya lokal menjadi terbengkalai dan kurang diperhatikan sehingga, pemanfaatannya belum optimal. Apabila permasalahan ini dibiarkan akan menjadi pola hidup yang konsumtif, hedonis, komersial, kontraktual dan mudah terpengaruh tekanan penetrasi pasar global (Santosa, 2014:107). Sehingga, pengakuan akan produk lokal akan sangat penting untuk bersaing dengan produk luar. Upaya yang dilakukan seharusnya dengan komunitas yang telah dibentuk berbasis pada potensi desa. Pembentukan ekonomi kreatif yang berbasis sumber daya lokal ini juga sekaligus akan memberdayakan komunitas yang telah dibentuk pada tahap sebelumnya. Dengan demikian, produk lokal sebagai (*local wisdom*) menjadi basis daya saing desa menghadapi ekonomi global. Pada tahap ini, upaya lebih diarahkan untuk mengedepankan potensi sumber daya alam yang ada di desa untuk dijadikan ikon yang membedakan desa yang satu dengan desa yang lain.

Ketiga, sertifikasi pada sumber daya desa di bidang seni, sosial, dan budaya sebagai rekayasa sosial untuk meningkatkan daya saing desa di era global. Strategi sertifikasi yang terakhir ini mengarah pada kesenian, budaya,



dan keunikan lain yang dimiliki desa. Hal ini berkaitan dengan kesenian yang berbudaya misalnya; sedekah bumi, nyekar, dan sebagainya. Beberapa sumber daya yang dimiliki desa ini akan lebih dikenal dan faktor pendorong daya saing desa dalam kerangka global. Tak cukup demikian, adanya kolaborasi antar aparat desa dengan masyarakat akan menjadi modal sosial-hukum yang lebih kuat dan terarah. Dalam hal ini, pemerintah melalui UU Desa nomor 6 tahun 2014 telah berkomitmen untuk mengembangkan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dimana BUM Desa memiliki peran strategis dalam mendukung *certification strategies* demi peningkatan daya saing desa di tingkat global.

PENUTUP

Era globalisasi membuka peluang terbukanya pasar bebas lintas negara. Setiap negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan dalam negeri masing-masing. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi semakin membuka peluang mobilitas yang tinggi antar negara. memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, desa sebagai bagian dari wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di NKRI tidak terlepas dari persaingan bebas tersebut. *Certification Strategies* menjadi salah satu solusi alternatif dalam menginventarisasi sumber daya desa. Tiga strategi yang dimiliki yaitu sertifikasi dalam sumber daya alam, manusia, dan potensi desa berupa kekayaan sosial budaya. Saran yang bisa direkomendasikan adalah sumber daya desa sangat melimpah sehingga perlu penerapan inventarisasi. Implementasi inventarisasi memerlukan instrument dari segi yuridis yang di intruksikan kepada pemdes agar memperoleh kekuatan hukum yang tetap.



DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich., dan Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa, Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indonesia
- Anwar, M.Zainal. *Aset Desa Sebagai Basis Desa Membangun*. <http://www.iain-surakarta.ac.id> (Diunduh tanggal 20 September 2016)
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. 2015. *ASEAN Di Persimpangan Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Santosa, Imam. 2014. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2013. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Zubaedi. 2016. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Goup
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENGHADAPI ERA MEA

S. Djuni Prihatin

Fisipol UGM

djuni_pr@yahoo.com

ABSTRAK

Strategi pemberdayaan UMKM dimaksudkan untuk memberikan daya dan kemampuan terutama untuk para pelaku usaha dalam menghadapi era MEA. Kesiapan dan kesadaran pelaku usaha dalam menghadapi kompetisi MEA perlu menjadi sebuah gerakan dan kesadaran kolektif sehingga para pelaku usaha senantiasa produktif dan inovatif, sehingga pada gilirannya mampu meraih pangsa pasar yang lebih luas sesuai jangkauan dalam MEA, dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional. Peluang penyerapan tenaga kerja nasional makin bertambah.

Kata kunci : pemberdayaan, pelaku usaha, produktif, inovatif.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan baru era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Banyak pihak meragukan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Hal ini didasarkan karena masih banyaknya kekurangan dibidang sumberdaya manusia dan produk lokal yang dibuat oleh pengusaha dan pelaku UMKM. Sebenarnya berbagai tantangan dan kekurangan yang harus dihadapi Indonesia tersebut dapat diatasi dengan penguatan potensi dan pemberdayaan UMKM melalui berbagai strategi taktis yang dapat dilakukan. Penguatan UMKM dapat ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk lokal milik pelaku usaha Indonesia sehingga mampu bersaing dengan produk dari negara lain. Upaya untuk mengoptimalkan potensi ini sangat penting agar Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional melalui kompetisi dalam MEA. Penguatan potensi juga penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena MEA membuka peluang pasar yang baru sehingga pengusaha Indonesia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasarkan produk ataupun karya-karya cipta yang lainnya. Jika ditinjau dari tujuan diberlakukannya, MEA merupakan realisasi nyata yang selama ini telah tercantum dalam Visi 2020 ASEAN, untuk



mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi bersama. Visi 2020 menyatakan dalam pelaksanaan MEA semua negara-negara ASEAN melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama yaitu prinsip pasar terbuka (*open market*), berorientasi keluar (*outward looking*), dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar (*market drive economy*) sesuai dengan ketentuan multilateral. MEA telah diberlakukan akhir Desember 2015 yang lalu ditandai peraturan yang ada dalam ASEAN *Economic Community Blueprint* yaitu liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan pekerja (*free flow of goods, free flow of services, free flow investment, free flow of capital, and free flow of skill labor*). Liberalisasi yang secara memaksa memasuki ruang kesadaran dan budaya mengandung beberapa implikasi yaitu, pertama, penyertaan pelaku ekonomi nasional dalam dinamika mondial secara lebih terbuka dan langsung berhadapan dengan pelaku ekonomi di berbagai kawasan, kedua, penyertaan pelaku ekonomi lokal dalam dinamika nasional, regional dan mondial, ketiga, penyertaan pelaku ekonomi tradisional dalam dinamika ekonomi modern yang rasional. (Sunartiningsih dan Suyatna, 2009 : 2). Untuk itu Indonesia harus dapat melihat dan menyongsong MEA dengan segala peluang dan tantangan serta segera mengambil tindakan nyata yang berdampak positif. Liberalisasi perdagangan mengandung konsekuensi tingkat persaingan akan semakin ketat dalam memperebutkan peluang dalam pasar MEA. Adanya MEA akan memberikan pengaruh yang besar terhadap bagaimana kondisi perekonomian Indonesia kedepan khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi aktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan yang masih harus dihadapi UMKM Indonesia dalam memanfaatkan pasar tunggal ASEAN adalah kemampuan daya saing industri kecil menengah Indonesia yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Peningkat daya saing Indonesia yang relatif masih rendah tidak terlepas dari masih banyaknya persoalan baik pada tataran mikro maupun makro. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa mengalami *Loss Opportunity*. Hal ini tidak akan terjadi jika Indonesia mampu melakukan strategi memberdayakan UMKM dan melihat kekuatan yang



perlu ditonjolkan dalam MEA maupun mengurangi hambatan-hambatan UMKM agar mampu bersaing.

Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan angka yang sangat positif. Menurut Badan Statistik Indonesia pada tahun 2012 terdapat 56.534.592 unit UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini telah menyumbang 1.504.928,20 Milyar Rupiah ditahun yang sama. Berdasarkan data tersebut dapat disebutkan bahwa potensi yang dimiliki UMKM tersebut perlu didukung dan terus dikembangkan sebagai bentuk usaha unggulan Indonesia. Perhatian yang besar pada UMKM akan mampu memperbaiki kualitas dan kuantitas produk serta sistem yang melingkupinya untuk bersaing dengan produk luar negeri. Jika produk Indonesia dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional pemerintah Indonesia sehingga perkembangan perekonomian Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekilas Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM pada dasarnya usaha yang bergerak di sektor perumahan dan industri. Menurut sejarahnya UMKM telah ada di berbagai negara didunia termasuk Indonesia. Menurut definisinya UMKM Indonesia memiliki dua pengertian, satu Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan UMKM didasarkan atas jumlah tenaga kerja yang bekerja, yakni industri mikro atau industri rumah tangga yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang, industri kecil yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang, dan industri sedang atau menengah jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Kedua menurut Undang Undang No.20 Tahun 2008 disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Kemudian yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :

(1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk



tanah dan bangunan tempat usaha, dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah). Adapun yang termasuk jenis usaha didalam UMKM tersebut beraneka ragam, diantaranya meliputi makanan, minuman, pakaian jadi, industri tekstil, pencetakan dan reproduksi media rekaman, pengolahan tembakau, restoran, penginapan, waralaba dan lain-lain.

Pada dasarnya UMKM yang sampai saat ini masih memproduksi menjadi salah satu upaya dan strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih spesifiknya lagi, UMKM tersebut memiliki tujuan yang salah satunya adalah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Pendapatan Domestik Bruto(PDB) melalui berbagai produk yang dipasarkan. Hal ini sejalan dengan yang pernah diulas dalam sebuah berita atau media online yang mengatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini jumlah UMKM Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen (Berita Satu, Jumat 12 November 2014). Selain itu, UMKM juga memiliki tujuan atau kontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah UMKM ini, maka tenaga kerja yang terserap pun juga akan meningkat banyak yang pada akhirnya mampu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Seperti yang pernah disampaikan oleh mantan



mentri Koperasi dan UKM, bahwa pertumbuhan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus meningkat dari tahun ketahun sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia (Antara News, Sabtu 1 Pebruari 2014). Dengan adanya kontribusi UMKM terhadap kenaikan PDB dan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM Indonesia saat ini menjadi sebuah strategi pembangunan di Indonesia yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.

Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi MEA

Pada dasarnya pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengelola proses pembangunan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Asumsinya, kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya paling menanggung akibat dari keputusan tersebut. Menjadi penting untuk memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat. (Suyatna, Soetomo, Astuti , 2015:119)

Pemberdayaan seringkali hanya dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang merupakan prasyarat pemberdayaan. Namun sebenarnya lebih dari sekedar hal yang berkaitan dengan ekonomi, pemberdayaan merupakan usaha perbaikan di segala aspek baik sosial, budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelompok sosial. Jadi esensi pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan lain sebagainya, baik secara kolektif maupun personal. Pemberdayaan UMKM dengan demikian adalah upaya untuk memberikan keberdayaan bagi pelaku UMKM dalam berbagai aspek tersebut, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menjadi dirinya, lepas dari berbagai eksploitasi yang ada. (Nurhadi, 2007). Payne (dalam Winarni, 2015)



pemberdayaan dengan menumbuhkan kesadaran kolektif, memobilisasi materialisasi, mengurangi struktur yang menindas dan meningkatkan kesadaran kritis akan dapat meningkatkan kekuatan dari orang-orang yang kurang berdaya menjadi mandiri dan dapat mengubah pribadi, aktivitas sosial sehingga akan terjadi perubahan. Semangat perubahan inilah yang akan menjadi strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM untuk dapat bersaing dalam menghadapi era MEA. Melihat besarnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional, kiranya semua pihak harus senantiasa melakukan upaya-upaya penguatan dan peningkatan strategi UMKM agar bisa meningkatkan persoalan klasik yang menghinggapinya. Suyatna (2015) menyebutkan persoalan UMKM (a) Kurangnya sosialisasi mengenai MEA yang dirasakan masih sangat minim (b) sinkronisasi kebijakan antara lembaga yang masih kurang. Antara pusat dan daerah yang berpihak pada penguatan UMKM (c) kurangnya kebanggaan masyarakat pada produk lokal (d) lemahnya dukungan infra struktur terutama bidang transportasi, yang berakibat pada tingginya harga dibanding produk asing (e) masih banyak pelaku UMKM yang *inward looking*. Merasa puas laku di pasaran domestik (f) kapasitas pelaku usaha UMKM yang masih terbatas termasuk penguasaan bahasa inggris (g) Standarisasi produk yang masih lemah (h) masih kurangnya dukungan kebijakan pemerintah mendorong standarisasi dan sertifikasi produk (h) masih terbatasnya strategi-strategi inovasi pengembangan UMKM. Oleh karenanya Suyatna (2015) juga menambahkan perlunya strategi pemberdayaan UMKM dalam menghadapi MEA : (a) Sosialisasi MEA yang lebih intensif (b) sinkronisasi kebijakan pemerintah (c) gerakan cinta produk dalam negeri (d) membangun infra struktur yang memadai untuk kelancaran UMKM (e) meningkatkan daya saing pelaku UMKM (f) penguatan kapasitas pelaku usaha UMKM dan meningkatkan kemampuan bahasa inggris (g) pemberian subsidi/insentif pelaku UMKM untuk mampu meningkatkan standar produk (h) peningkatan strategi inovasi, promosi dan pemasaran produk serta mempermudah perijinan usaha. Komarudian (2012) menambahkan meningkatkan daya saing menjadi kata kunci dalam upaya penguatan pelaku UMKM dalam menghadapi MEA. Tambunan (2012)



menyebutkan juga bahwa salah satu cara efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing adalah melakukan inovasi terus menerus. Inovasi bukan saja penting untuk meningkatkan kualitas produk akan tetapi juga menghasilkan produk-produk baru mengikuti perubahan selera pasar.

PENUTUP

Beberapa strategi pemberdayaan UMKM itulah yang diharapkan dapat dilakukan dalam menghadapi era MEA. Hal yang tidak kalah penting adalah merubah pola pikir masyarakat dan pelaku usaha UMKM dalam meningkatkan kapasitas diri untuk berani bersaing, melakukan tindakan-tindakan inovatif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, memiliki kepercayaan diri yang lebih tangguh dan siap menghadapi era kompetisi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Komarudin, Ade, 2012, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta, Semesta Rakyat Merdeka.
- Nurhadi, 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta, Media Wacana.
- Sunartiningsih, A dan Suyatna, Hempry, 2009, *Ekonomi Rakyat dalam Pusaran Pasar Bebas*, Yogyakarta, Media Wacana
- Suyatna, Hempry, *Kebijakan Pengembangan UMKM Menghadapi MEA*, dalam Suzana Eddyono, 2015, *Tantangan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Azza Grafika.
- Suyatna, Hempry, Soetomo dan Astuti, EZL, 2015, *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Azza Grafika.
- Tambunan, Tulus, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia, Isu-isu Penting*, Jakarta, LP3ES.
- Winarni, Tri, *Peran Pendamping dalam Pengembangan Posdaya*, dalam Eka Zuni Lusi A, 2015, *Merajut Kesejahteraan di Aras Lokal*, Yogyakarta, Azza Grafika.



REVITALISASI PERAN KELUARGA DALAM PENANAMAN NILAI NASIONALISME DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA): TINJAUAN TERHADAP HASIL-HASIL PENELITIAN

Agus Ganjar Runtiko

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
runtiko@gmail.com

ABSTRAK

Berita mengenai nasionalisme akhir-akhir ini menjadi sorotan luas di berbagai media. Penyebabnya adalah figur publik yang menduduki jabatan strategis namun diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Isu nasionalisme kemudian menjalar ke berbagai bidang. Menjadi penting untuk merevitalisasi peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme khususnya pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini karena di era MEA masyarakat di Indonesia akan memiliki kesempatan mendapatkan berbagai produk luar negeri dengan lebih mudah dan murah, mendapatkan jasa pelayanan dari tenaga kerja luar negeri dengan lebih mudah, hingga kesempatan bekerja di luar negeri yang lebih luas. Semua kemudahan tersebut dapat merugikan produk dalam negeri, jasa dalam negeri, hingga pembangunan dalam negeri. Analisis systematic review terhadap jurnal di lingkungan UGM diharapkan dapat menjadi pijakan awal pengambilan kebijakan serta pengembangan teori terkait penanaman nilai nasionalisme dalam keluarga. Keluarga sebagai lembaga penanaman nilai diharapkan dapat menjadi benteng terakhir nilai nasionalisme yang dapat menumbuhkan daya saing serta kemandirian bangsa di era MEA.

Kata kunci: MEA, Keluarga, Komunikasi, Nasionalisme, Pewarisan nilai

REVITALIZATION OF FAMILY ROLE IN NATIONALISM CHARACTER BUILDING IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC): REVIEW ON RESEARCH RESULTS

ABSTRACT

News of nationalism issue lately become an attention in the mainstream media. The cause is a public figure who have a strategic occupation but is allegedly have dual citizenship. The issue of nationalism then spread to various fields. It becomes essential to revitalize the role of the family in building nationalism character, especially in the era of the ASEAN Economic Community (AEC). This is because in the era of AEC people will have a chance to get a wide range of foreign products more easily and cheaply, get the foreign services easily, have wider opportunities to work overseas. All these conveniences can be detrimental to domestic products, domestic services, and domestic development. Systematic review analysis from UGM journals is expected to be the starting point of theory development and policy making related of nationalism character building on family.

Keywords: AEC, Family, Communication, Nationalism, Character building



PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, Indonesia bersama sepuluh negara anggota ASEAN yang lain, bersepakat untuk memulai era ekonomi baru yang dinamakan ASEAN Economic Community (AEC) atau lebih kita kenal dengan nama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Meskipun terkesan mengejutkan, MEA ini sebenarnya telah didahului dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992, kemudian dilanjutkan dengan adanya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada tahun 2012 (lihat Abdurofiq, 2014). Terdapat sedikit kekhawatiran terkait pelaksanaan MEA bagi bangsa Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan visi ASEAN mengenai aliran bebas barang (*free flow of goods*), di mana perdagangan barang dapat dilakukan secara bebas tanpa mengalami hambatan, baik tarif maupun non-tarif (Pratiwi & Daulay, 2015).

Tabel 1. Perdagangan Jasa Indonesia

2012		2013		2014	
Ekspor	Impor	Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
23.660,2	34.224,4	22.944,1	35.014,6	23.531,0	33.539,4

Sumber: asean.org

Tabel 1 secara tidak langsung sudah menyatakan betapa lemah daya saing sumberdaya manusia lokal.

Kondisi perdagangan jasa yang memprihatinkan akan semakin bertambah dengan kekhawatiran mengenai daya saing industri yang lemah, proteksi negara terhadap industri-industri lokal yang kurang, hingga mentalitas konsumen Indonesia yang masih lebih memilih produk asing dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal yang disebut terakhir ini menurut penulis merupakan aspek yang paling vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti apapun upaya pemerintah untuk memajukan ekonomi negara, tampaknya akan sia-sia apabila tidak diiringi dengan memupuk nasionalisme konsumen Indonesia.

Masalah penanaman nilai atau lebih tepatnya pewarisan nilai nasionalisme bukanlah hal mudah. Ada yang melalui institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal. Keluarga sebagai salah satu institusi dalam



masyarakat merupakan salah satu wadah penanaman dan pewarisan nilai yang sering dilupakan.

Tulisan ini mencoba melakukan observasi sekaligus revidu mengenai isu nasionalisme yang ditulis oleh para pemikir dalam jurnal di lingkungan UGM. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam penanaman nilai, penulis melakukan observasi juga isu penanaman nilai serta peranan keluarga dalam perkembangan psikologis seseorang. Pertanyaan yang muncul ketika hendak melakukan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemikiran para akademisi UGM mengenai nasionalisme? (2) Bagaimana pula pandangan para akademisi ini terhadap keluarga sebagai institusi penanaman sekaligus pewarisan nilai?, dan (3) Apa rekomendasi yang dapat diberikan mengenai penanaman nilai nasionalisme?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *systematic review*. *Systematic review* merupakan suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham dalam Siswanto, 2010).

Pada pelaksanaan penelitian, dilakukan observasi dan perangkuman terhadap beberapa jurnal yang menjadi koleksi perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Koleksi ini diakses melalui <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/index.php>, pada bulan Agustus hingga September 2016. Kata kunci yang digunakan adalah “nasionalisme” dan “keluarga”, yang tercantum dalam judul dan abstrak jurnal. Hasil dari pencarian kemudian disaring dengan menggunakan perangkat lunak *scanner* sehingga dipilah jurnal yang benar-benar bersinggungan dengan tema yang hendak dikaji dan yang tidak. Selanjutnya, dilakukan meta-sintesis, yakni melakukan perangkuman penelitian secara deskriptif kualitatif (Perry dan Hammond dalam Siswanto, 2010).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga, Interaksi, dan Pewarisan Nilai

Definisi keluarga dari Sciascia *et al.* (2013), yang menyatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial dasar masyarakat, dan keluarga terikat bersama-sama dengan semacam ikatan yang mengikat, di mana kita mengembangkan keyakinan kita tentang bagaimana hubungan harus terstruktur, disosialisasikan ke masyarakat, dan bagaimana kebutuhan sosial dasar disediakan. Sementara Soeleman (dalam Apollo & Ancok, 2003) menyatakan bahwa keluarga merupakan suatu kelompok orang sebagai suatu unit yang berkumpul dan hidup bersama untuk waktu yang relatif berlangsung terus karena terikat oleh perkawinan dan hubungan darah atau adopsi.

Penelitian-penelitian yang terangkum dalam jurnal-jurnal di lingkungan UGM melihat keluarga dalam berbagai perspektif. Dari 143 judul jurnal yang didapatkan dari pencarian menggunakan kata kunci 'keluarga', terdapat 22 judul yang benar-benar mengkaji peran dan fungsi keluarga dalam perkembangan individu. Sepuluh judul di antaranya (45,45%) melihat peranan keluarga dalam kesehatan individu, baik berupa kesehatan kesehatan jiwa sebanyak tujuh judul (70%), maupun kesehatan badan sebanyak tiga judul (30%).

Dari 22 judul jurnal yang dianalisis, terdapat empat judul (18,18%) yang mengkaji tentang interaksi intrakeluarga, serta interaksi keluarga dengan elemen masyarakat lainnya dalam konteks sosial.

Tabel 2. Rekapitulasi Jurnal dengan Kata Kunci "Keluarga"

Jenis judul		Jumlah	Persentase
Tidak Berhubungan		121	84,61
Peran dan Fungsi Keluarga	Kesehatan Jiwa	7	4,89
	Kesehatan Badan	3	2,09
	Sosial	4	2,79
	Lainnya	8	5,59
Total		143	100

Sumber: Pengolahan Pribadi

Delapan judul terakhir dari 22 judul jurnal yang diobservasi memiliki variasi tema. Ada yang melihat keluarga dalam perspektif filsafat, hukum, budaya, hingga ekonomi.



Pembangunan keluarga yang dicanangkan lebih dari dua dekade silam ternyata mengubah fungsi sosial dalam keluarga menjadi fungsi ekonomis (Effendi & Sukamdi, 1994). Perubahan keluarga, pada akhirnya juga seiring dengan perubahan pendidikan nilai pada anak. Sejalan dengan makin intensifnya serta makin luasnya kontak dengan bangsa lain, generasi muda Indonesia mengalami apa yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Tantangan yang dihadapi tentu saja semakin kompleks. Perlu adanya sebuah nilai yang mencirikan identitas diri sebagai bangsa. Nilai (*values*) didefinisikan sebagai konsepsi yang diinginkan yang memandu cara individu dalam menyeleksi tindakan, mengevaluasi orang dan peristiwa, dan menjelaskan tindakan maupun melakukan evaluasi (Schwartz dalam Lestari, 2012). Nilai dapat diartikan juga sebagai seperangkat pandangan-pandangan, kriteria, pedoman-pedoman, mengenai apa yang dianggap baik, buruk, biasa-biasa saja, penting, tidak penting, harus, tidak harus dan sebagainya (Putra, 2002). Fungsi nilai menurut Rokeach (dalam Adisubrota, 1993) adalah (1) sebagai standar, yaitu standar yang menunjukkan tingkah laku dari berbagai cara; (2) sebagai rencana umum dalam penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan; (3) sebagai motivasional; (4) sebagai bentuk penyesuaian; (5) sebagai *ego defensive*; dan (6) sebagai pengetahuan atau aktualisasi diri.

Nasionalisme di Era MEA

Monigue (dalam Saleh, 2011) mendefinisikan nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tujuan yang disebut integrasi nasional. Sementara Hendrastomo (2007) melihat nasionalisme sebagai sebuah paham yang muncul ketika seseorang diharuskan memilih pada dirinya mengenai status kebangsaan, misalnya saja, ketika ada dua atau lebih pilihan yang berkenaan dengan kewarganegaraan, atau suatu kelompok, yang secara imajiner ada keterikatan.

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN, nasionalisme menjadi sebuah hal penting. Apalagi apabila dimiliki oleh mereka yang mempunyai modal atau kekuasaan. Cantillon (dalam Preparata & Elliott, 1996) mengatakan “jika pemilik



tanah...bersedia mengkonsumsi produksi negara mereka secara eksklusif, tidak peduli seberapa inferior dan rendahnya produk tersebut pada awalnya, akan tetap memberikan kontribusi secara bertahap, dan lebih jauh lagi, mereka akan menjaga (pekerjaan) sejumlah pekerja dalam negeri, alih-alih memberikan keuntungan kepada orang asing....” Kesiadaan menggunakan produk dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan, mengingat Negara Dunia Ketiga seperti Indonesia seringkali tertinggal dalam kaitannya dengan kompetisi teknologi. Walhasil, inovasi dan kualitas produk sering kalah bersaing.

Sebagai tulang punggung ketahanan nasional, pembangunan ketahanan regional ASEAN, utamanya dalam aspek ekonomi dan keuangan, merupakan ketahanan nasional Indonesia di baris kedua (Hendropriyono, 2008). Meskipun aspek ekonomi yang sedemikian penting ternyata tidak satupun judul jurnal yang dijumpai di laman <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/index.php> yang membahas nasionalisme dari perspektif ini.

Tabel 3. Rekapitulasi Jurnal dengan Kata Kunci “Nasionalisme”

Jenis judul	Jumlah	Persentase
Sejarah	7	46,67
Filsafat	3	20
Sosial	5	33,33
Total	15	100

Sumber: Pengolahan Pribadi

Dapat dilihat dalam tabel di atas, bahwa dominan penulis jurnal melihat nasionalisme dari perspektif sejarah sebanyak tujuh tulisan (46,67%), diikuti dengan perspektif sosial sebanyak lima tulisan (33,33%), dan perspektif filsafat (20%).

Apabila penanaman nilai nasionalisme berhasil, diharapkan akan muncul generasi konsumen nasionalis. Konsumen nasionalis beranggapan bahwa membeli produk impor merupakan sebuah kesalahan karena akan melukai ekonomi dalam negeri, menyebabkan hilangnya pekerjaan dalam industri domestik, dan tidak patriotik. Dalam penelitiannya mengenai konsumen yang nasionalis, Shimp and Sharma (dalam Rawwas *et al.*, 1996) menemukan bahwa nasionalisme konsumen berkorelasi negatif dengan pembelian produk asing. Konsumen yang sangat nasionalis cenderung menekankan aspek positif produk



dalam negeri dan mengecilkan kelebihan produk buatan luar negeri.

PENUTUP

Nasionalisme merupakan salah satu aspek yang berperan besar dalam mempertahankan identitas bangsa. Nasionalisme menjadi penting ketika menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Adanya nilai nasionalisme yang kuat dapat membangun ketahanan nasional. Meskipun, di sisi lain dapat dilihat bahwa nilai nasionalisme semakin memudar seiring semakin menguatnya ide globalisme serta universalisme yang bermuatan kapitalisme dan konsumerisme. Perkembangan teknologi yang semakin maju, murah, dan mudah didapatkan siapa saja, semakin memperkuat ide globalisme dan universalisme pada masyarakat.

Berdasar kajian pustaka terhadap beberapa jurnal di lingkungan UGM, tidak ada yang menyebut keluarga sebagai institusi penting dalam penanaman nilai nasionalisme. Hal ini bersesuaian dengan masih minimnya juga kajian-kajian yang mengkhususkan masalah keluarga, baik dari bidang komunikasi, sosiologi, psikologi, bahkan penyuluhan. Meskipun disadari atau tidak, keluarga merupakan institusi penting yang menjadi sumber dan tujuan pembangunan. Sehingga, revitalisasi keluarga sebagai institusi paling penting dalam perkembangan kehidupan manusia perlu dilakukan, baik dalam kajian yang bersifat teoretis, maupun dalam kajian praktis.

Secara umum, mengutip Faturochman (2001), ada beberapa upaya revitalisasi yang dapat dilakukan: (1) Menetapkan perspektif jangka panjang, (2) Mengaji ulang kehidupan perkawinan dan keluarga, (3) Pertimbangkan ulang peran dalam keluarga, (4) Mengaji ulang tujuan, (5) Integrasi sistem dalam keluarga, (6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, (7) Menciptakan rasa aman untuk keluarga, dan (8) Membangun misi keluarga. Muara dari upaya revitalisasi tersebut adalah bangsa yang mandiri dan bermartabat dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia. *Salam*, 1(2), 249-256.
- Adisubrota, D. (1993). Nilai: sifat dan fungsinya. *Buletin Psikologi*, 1(2), 28-33.
- Apollo, & Ancok, D. (2003). Hubungan antara Intensitas Menonton Tayangan Televisi Berisi Kekerasan, Persepsi terhadap Keharmonisan Keluarga, Jenis Kelamin, dan Tahap Perkembangan dengan Kecenderungan Agresivitas Remaja. *Sosiohumanika*, 16A(3), 529-544.
- Effendi, S., & Sukamdi. (1994). Perubahan Struktur dan Peranan Keluarga dalam PJP II. *Populasi*, 5(1), 1-10.
- Faturochman. (2001). Revitalisasi Peran Keluarga. *Buletin Psikologi*, 9(2), 39-47.
- Hendrastomo, G. (2007). Nasionalisme VS Globalisasi, 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. *Dimensia*, 1(1), 1-11.
- Hendropriyono, A. M. (2008). Ide dan Praksis Neo-Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Filsafat*, 18(1), 81-91.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi, M., & Daulay, M. (2015). Pengaruh MEA2015 terhadap Integrasi pada Sistem Perdagangan di Indonesia. *Ekonomi dan Keuangan*, 3(4).
- Preparata, G. G., & Elliott, J. E. (1996). Protecting the infant industry: Cosmopolitan versus nationalist economists. *International Journal of Social Economics*, 23(2), 4-34. doi: doi:10.1108/03068299610110879
- Putra, S. A. (2002). Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(3), 45-55.
- Rawwas, M. Y. A., Rajendran, K. N., & Wuehrer, G. A. (1996). The influence of worldmindedness and nationalism on consumer evaluation of domestic and foreign products. *International Marketing Review*, 13(2), 20-38. doi: doi:10.1108/02651339610115746
- Saleh, M. H. (2011). Model Pemaknaan Nasionalisme Masyarakat Pulau Sebatik Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(2), 202-221.
- Sciascia, S., Clinton, E., Nason, R. S., James, A. E., & Rivera-Algarin, J. O. (2013). Family Communication and Innovativeness in Family Firms. *Family Relations*, 62(3), 429-442. doi: 10.1111/fare.12014
- Siswanto, S. (2010). Systematic Review sebagai Metode Penelitian untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(4), 326-331.



PETANI SAWIT DI HADAPAN MEA DAN STRATEGI KEBUDAYAAN: STUDI LEVEL MIKRO PADA PETANI PLASMA DI KECAMATAN LONG IKIS, KALIMANTAN TIMUR

Sukpti Wartiharjono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

vkapti89@gmail.com

ABSTRAK

Tantangan Indonesia sebagai produsen sawit di era MEA adalah masuknya perkebunan pemodal besar dari negara anggota ASEAN ke dalam negeri yang dapat mengancam keberadaan petani kecil. Ketimpangan daya saing antara petani kecil dengan perusahaan besar menjadi masalah yang perlu ditangani, agar petani kecil tidak menjadi korban pasar bebas. Kajian ini bertujuan: (1) menunjukkan persoalan yang masih terjadi dalam pengelolaan perkebunan sawit oleh petani kecil yang menjadi hambatan dalam menghadapi persaingan bebas. (2) Menyusun suatu pilihan nilai dan rekomendasi sebagai jalan keluar untuk memampukan petani kecil. Penelitian dilakukan di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan produktivitas petani kecil masih rendah serta lemahnya kelembagaan. Kondisi ini disebabkan oleh praktik-praktik manipulatif dan merendahkan dalam pola kemitraan dengan perusahaan besar, dimana petani ditempatkan sebagai obyek eksploitasi untuk mengejar target pertumbuhan. Kajian ini merekomendasikan pemberdayaan petani dengan cara penguatan kesadaran kritis dan mempraktikkan tindakan-tindakan anti-kebodohan dan pembodohan, dan anti-kecurangan dan pencurangan dalam kemitraan sebagai bagian dari strategi kebudayaan.

Kata kunci: MEA, perkebunan, petani, strategi kebudayaan

PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan integrasi ekonomi untuk menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi menghadapi pasar bebas. Dalam bidang perkebunan komoditas kelapa sawit, era MEA memiliki karakter tersendiri dimana hampir semua negara anggota ASEAN merupakan produsen komoditas kelapa sawit. Dengan demikian, pangsa pasar ekspor sawit Indonesia ke kawasan ASEAN menjadi kurang besar, sehingga harus diarahkan untuk ekspor di pasar dunia. Beruntung, peluang komoditas sawit sangat besar dimana permintaan pasar global akan komoditas sawit meningkat dari tahun ke tahun mencapai rata-rata sekitar 4% per tahun, melampaui permintaan komoditas kedelai sebesar 2% per tahun (Colchester,



2006). Menjelang tahun 2020 diperkirakan tumbuh sampai hampir 60 juta ton (World Growth, 2011).

Besarnya kebutuhan minyak sawit di pasar dunia direspon dengan antusias melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Perkebunan sawit di kawasan Asia Tenggara saat ini, Indonesia (9,4 juta Ha), Malaysia (4,6 juta Ha), Thailand (644.000 Ha), Filipina (46.608 Ha), Kamboja (118.000 Ha), Vietnam (650 Ha), dan juga negara tetangga PNG (500.000 Ha) terus dalam proses perluasan secara massif saat ini (Colchester, 2011). Kesamaan produksi komoditas sawit antar negara ASEAN, selain mendorong kerjasama kemitraan antar anggota, juga menjadi tantangan bagi Indonesia dan masing-masing negara agar tidak kalah bersaing dengan sesama negara produsen.

Kendati Indonesia telah menjadi produsen CPO terbesar di dunia, namun tidak lepas dari tantangan baru. Tatanan pasar bebas MEA, paling tidak memberikan konsekuensi pada tiga hal yakni: (1) ASEAN menjadi wilayah yang lebih bebas dalam hal aliran barang, tenaga kerja terdidik, modal, dan aliran investasi. Konsekuensinya, Indonesia semakin dibanjiri investor pengembangan sawit yang bermodal besar dengan manajemen modern, terutama dari Malaysia. Hal ini merupakan tantangan baru bagi produsen dalam negeri, terutama petani kecil. (2) Tuntutan dari banyak kalangan internasional akan proses produksi sawit yang menjaga keberlangsungan lingkungan alam dan sosial. ASEAN sebagai basis produksi sawit harus menjamin proses produksinya ramah lingkungan agar komoditas sawit diterima di pasar global. (3) Pasar bebas menuntut produk minyak sawit berkualitas/memenuhi standar.

Tantangan-tantangan itu telah diantisipasi oleh pemerintah dengan berbagai cara, diantaranya program revitalisasi perkebunan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, meluncurkan MP3EI tahun 2011 untuk penguatan ekonomi yang dibagi dalam beberapa koridor. Dalam MP3EI, komoditas sawit ditempatkan sebagai komoditas andalan yang mendapat dukungan kebijakan maupun dukungan teknis yang sangat besar (MP3EI, 2011). Disiapkan/dibentuk pula ISPO dan RSPO sebagai respon untuk melawan kampanye negatif tentang



sawit, sekaligus menjamin proses produksi yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk berkualitas.

Namun, masih banyak keraguan mengenai kesiapan dan ketangguhan Indonesia menghadapi MEA, khususnya pada petani sawit kecil. Petani kecil/plasma dengan keterbatasan modal dan teknologi akan sulit bersaing dengan produsen bermodal besar. Kajian ini akan menunjukkan bagaimana pengelolaan perkebunan sawit oleh petani plasma binaan perusahaan?. Apakah perusahaan inti sebagai mitra petani kecil telah berhasil mempersiapkan dan mampu mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada petani plasma sehingga menjadi petani yang memiliki tatanan budaya baru untuk siap berkompetisi?. Hasil kajian ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang berguna bagi pemberdayaan komunitas petani sawit agar tidak menjadi korban di era MEA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pendekatan kualitatif dirasa cocok digunakan untuk menggali praktik dan persoalan pada pengelolaan perkebunan sawit plasma. Teknik wawancara dan pengamatan terlibat digunakan untuk menghimpun data tentang pengalaman, persoalan perkebunan, dan hubungan kemitraan (pola PIR dan KKPA) dengan perusahaan inti. Informan dalam kajian lapangan ini adalah petani plasma, baik yang hanya memiliki kebun plasma maupun kebun swadaya. Teknik penelusuran pustaka digunakan untuk mencari data sekunder dan kajian terdahulu mengenai hubungan kemitraan dan perkebunan rakyat. Data dianalisa dengan menghubungkan-hubungkan antar tema yang ditemukan dan diinterpretasi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik produksi pola kemitraan: Dominasi perusahaan.

Pola kemitraan diterapkan sebagai bagian dari pembangunan, yakni membentuk petani plasma --yang semula adalah petani sawah dan peladang berpindah-- dapat menginternalisasi budaya (aturan) baru sebagai petani



perkebunan modern. Pola kemitraan merupakan sinergi antara perusahaan besar dan petani kecil demi kemajuan bersama. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petani kecil, terutama kurangnya pengetahuan dan teknologi dan keterbatasan meraih pasar dapat diatasi dengan menyerap pengetahuan dan teknologi dari perusahaan besar. Perusahaan juga mendapat keuntungan dari pasokan buah sawit berkualitas dari petani kecil binaannya.

Namun berdasar kajian lapangan diketahui bahwa proses internalisasi budaya menjadi petani modern melalui praktik kemitraan inti-plasma cenderung manipulatif. Praktik kemitraan mencerminkan adanya praktik dominasi dan eksploitasi perusahaan atas petani, dimana petani plasma ditempatkan sebagai sasaran/ obyek tindakan untuk mengejar keuntungan perusahaan. Petani dianggap sebagai obyek dan direndahkan dan dicurangi, dengan asumsi petani tidak terampil dan malas. Petani tidak dianggap sebagai mitra sejajar dalam kemitraan mutualistik. Beberapa indikasi dari hal itu adalah: (1) petani kecil tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan serta tidak mendapat informasi yang cukup tentang prinsip-prinsip manajemen perkebunan modern. Tidak diajak mendiskusikan persoalan untuk mengambil solusi. (2) Petani dijadikan sebagai buruh/ tenaga kerja upahan dalam pengelolaan kebun plasma milik petani sendiri. (3) Perusahaan menekankan pada pencapaian target kerja dan target produksi yang bermuara pada keuntungan perusahaan, daripada pencapaian kemampuan dan ketrampilan baru yang dibutuhkan oleh petani untuk mandiri/ berdaya saing. Tidak jarang perusahaan melakukan manipulasi data agar proyek kemitraan sebagai bagian dari program pembangunan pemerintah tampak berhasil. Tabel di bawah menunjukkan praktik kemitraan seperti terurai di atas.

Tabel 1. Praktik Produksi Perkebunan pada Pola Kemitraan

Tahap dan kegiatan pokok	Pelaksana	Keterangan/ deskripsi:
Tahap investasi kebun (persiapan dan TBM 0-3 tahun)		
Pembuatan rancangan dan kendali pembangunan kebun	Perusahaan	Petani tidak dilibatkan. Penggunaan anggaran dilakukan oleh perusahaan.
Pemilihan jenis dan	Perusahaan	Petani tidak dilibatkan dan tidak diberi



Tahap dan kegiatan pokok	Pelaksana	Keterangan/ deskripsi:
pengadaan bibit		informasi yang cukup tentang bibit yang berkualitas
Pemilihan dan pengadaan pupuk	Perusahaan	Petani tidak dilibatkan dan tidak mendapat informasi yang cukup tentang jenis pupuk. (Pupuk yang digunakan perusahaan merupakan pupuk pesanan khusus dari pabrik).
Pemupukan	Petani	Petani sebagai buruh
Penanaman	Petani	Petani sebagai buruh
Pemeliharaan masa TBM	petani	Petani sebagai buruh
Tahap konversi (TM)		
Pemeliharaan masa TM	Petani	Tanggung jawab pada petani, peran pendampingan perusahaan kurang efektif
Pemanenan	Petani	Tanggung jawab pada petani, peran pendampingan perusahaan kurang efektif

Keterangan: TBM=Tanaman Belum Menghasilkan; TM=Tanaman Menghasilkan

Demikian pula, lembaga koperasi (KUD) petani yang dibentuk oleh perusahaan cenderung digunakan sebagai alat perusahaan untuk menguasai petani, bukan sebagai wadah petani untuk meningkatkan ekonomi. Koperasi hanya berperan membantu perusahaan dalam pengelolaan kebun, seperti memobilisasi petani sebagai tenaga kerja atau membantu proses distribusi buah sawit ke pabrik. Tidak jarang KUD hanya menjadi sarana dari sebagian kecil petani terutama pengurus untuk memperoleh keuntungan pribadi. KUD belum menjadi lembaga bagi kekuatan petani.

2. Persoalan dalam Pengelolaan Kebun: Kendala Menghadapi MEA.

Program kemitraan dengan perusahaan besar tidak berhasil membentuk petani siap menghadapi tuntutan pasar bebas. Indikasinya, petani masih mengabaikan tentang kualitas (sertifikasi) bibit, pemeliharaan, dan produk. Pada tahap konversi, dimana tanggung jawab pengelolaan kebun sepenuhnya telah diserahkan ke petani (bukan lagi di tangan perusahaan) terjadi kecenderungan menurunnya pemeliharaan kebun. Hal yang paling terlihat adalah pola pemberian pupuk, pemanenan dan distribusi, dan penentuan bibit saat *replanting*. (1) Pemberian pupuk tanaman tidak sesuai dengan standar



pengelolaan kebun, padahal produktivitas tanaman sawit sangat tergantung pada input produksi terutama pupuk. Sebagian besar petani tidak mengalokasikan modal untuk pembelian pupuk, yang memang harganya cukup mahal. Diperkirakan biaya pupuk sekitar 60% dari total biaya produksi. (2) Tidak memperhatikan kualitas buah sawit saat pemanenan. Tindakan memanen buah mentah, pemeram dan mencampurkan buah mentah ke dalam buah matang menjadi kebiasaan petani, baik petani kaya maupun miskin. (3) Penggunaan bibit sawit yang tidak bersertifikat. Hal ini tampak pada kasus *replanting* kebun plasma. Sebagian petani bersedia melakukan *replanting* pola kemitraan dengan perusahaan, dengan alasan tidak memiliki tenaga kerja dan waktu (biasanya petani kaya), dan ketiadaan biaya (petani miskin) apabila melakukan *replanting* mandiri. Sebagian besar petani lain tidak lagi bersedia menjalin kerjasama kemitraan dengan perusahaan dengan beragam alasan, di antaranya: tidak percaya kepada perusahaan (yang dianggap pembohong, mencari untung sendiri); tidak mau terlilit kredit kemitraan (yang cukup besar); merasa mampu dan fleksibel tentang biaya apabila melakukan peremajaan mandiri.

Petani yang melakukan peremajaan swadaya pada umumnya tidak menggunakan benih/bibit sawit bersertifikat. Hal ini terjadi karena: (a) Sebagian petani percaya bibit non-sertifikat juga akan menghasilkan sawit. (b) Benih sawit bersertifikat sulit diakses oleh petani kecil karena prosedur pembeliannya rumit. Bahkan disinyalir banyak beredar bibit bersertifikat tetapi palsu, meskipun dibeli dengan prosedur resmi sekalipun karena adanya permainan 'orang dalam' (berdasar wawancara dengan petani). (c) Benih dan bibit bersertifikat harganya mahal. Sebagian petani dengan sengaja membeli benih yang murah meskipun mereka tahu bahwa bibit tersebut bukan bibit yang baik. Tuntutan untuk menggunakan bibit bersertifikat pada umumnya sudah dimengerti oleh petani, namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan keterbatasan modal. Petani membeli bibit sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan gayung bersambut dengan pasar bibit yang menyediakan bibit dengan harga bervariasi. Pada umumnya, petani membeli benih atau bibit sawit di toko, atau orang-orang yang mereka kenal, baik pegawai perusahaan ataupun sesama petani. Tidak mudah



mengenali bibit dan benih yang baik sebelum sawit berbuah menjadi kendala tersendiri.

Hambatan kelembagaan petani tampak dari kondisi KUD. Banyak petani yang tidak percaya kepada KUD yang dianggap lebih memenuhi kepentingan perusahaan. KUD belum mampu menjadi wadah petani untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani, mengartikulasikan kepentingan, dan membuat langkah-langkah solutif demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, lembaga KUD masih perlu diberdayakan.

Gambaran di atas menegaskan bahwa petani memiliki banyak pilihan tindakan dalam mengelola kebun sawit, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman/ pengetahuan dan kondisi ekonominya. Persoalan di atas menyangkut dua hal pokok, yakni: (a) petani masih mengabaikan nilai produktivitas serta kualitas produk. Persoalan ini dapat terjadi karena desakan ekonomi maupun hambatan struktural, terutama tata niaga bibit dan pupuk. Yang menarik, petani tidak mementingkan tentang kualitas rendemen minyak, karena rendemen dianggap sebagai urusan/kepentingan perusahaan. Kepentingan petani hanyalah dapat menjual buah sawit dengan bobot buah yang berat, padahal bobot buah tidak selalu memiliki kualitas rendemen tinggi. (b) Minat pada kerjasama antar petani dalam suatu lembaga koperasi juga belum terbentuk, sehingga petani tidak mampu memberdayakan diri mengatasi persoalan yang dihadapi, terutama persoalan struktural. Koperasi belum memberikan manfaat yang dirasakan oleh anggota.

3. Rekomendasi Pemberdayaan: Strategi Kebudayaan.

Persoalan-persoalan pada praktik produksi/ pengelolaan perkebunan oleh petani dan praktik kemitraan merupakan hambatan bagi kemenangan dalam kompetisi menghadapi MEA, sehingga perlu diatasi/ direkayasa melalui strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan dalam hal ini berupa seperangkat rancangan yang tersusun untuk meningkatkan cara pikir, cara merasa, dan cara bertindak subyek (petani kecil dan perusahaan) sesuai dengan visi yang ingin dicapai, yakni menjadi subyek yang tangguh dan berdaya saing. Nilai budaya



dalam hal ini dilihat sebagai aturan yang secara kreatif akan mengembangkan cara berpikir dan bertindak (Supeli, 2015).

Berdasar kajian di atas, hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan petani sawit adalah menerapkan praktik kemitraan yang didasarkan pada nilai/ aturan/ mentalitas anti-kebodohan dan pembodohan, dan anti-kecurangan dan pencurangan²⁷ terhadap petani. Anti pembodohan, merupakan pandangan yang menilai buruk setiap bentuk pembodohan, baik berupa tindakan atau kebijakan yang menyebabkan munculnya kebodohan dalam masyarakat petani. Dalam tataran praktis, pandangan anti-pembodohan diwujudkan dengan tindakan, seperti tidak melakukan kebohongan publik atau pemberian informasi yang tidak akurat kepada petani dan menghargai pengetahuan dan cara pandang petani kecil mengenai pengelolaan perkebunan. Di sisi lain, petani disadarkan akan pentingnya menghargai pengetahuan dan inovasi baru, dan ditingkatkan kesadaran kritis akan akan berbagai bentuk/ tindakan yang akan menyebabkan mereka tidak berkembang/ maju.

Anti-pencurangan merupakan pandangan yang menilai buruk setiap bentuk kecurangan atau ketidakjujuran, sebaliknya menghargai setiap bentuk kejujuran dan tindakan menegakkan kejujuran. Dalam konteks kajian ini, pandangan anti pencurangan dan kecurangan diwujudkan dalam praktik kemitraan, dimana memperlakukan petani sungguh-sungguh sebagai mitra sejajar (bukan sebagai buruh), dan perbaikan tataniaga bibit dan pupuk yang masih diwarnai kecurangan yang merugikan petani. Dari sisi sebaliknya, petani harus jujur dalam menjual buah sawit dengan menghindari manipulasi buah sawit yang berakibat pada rendahnya kualitas rendemen minyak.

Kedua nilai/ aturan tersebut harus dilaksanakan dan dipraktikkan dalam setiap kegiatan kemitraan sehingga membentuk perilaku nyata menjadi subyek yang tangguh/ berdaya saing. Strategi pemberdayaan disusun berdasar kedua nilai tersebut di atas.

²⁷ Kedua pasangan unsur nilai ini diadopsi dengan penyederhanaan, dari lima pasangan unsur mentalitas dalam kerangka acuan strategi kebudayaan yang ditawarkan oleh Ahimsa-Putra, (2015).



Tabel 2. Kerangka Pemberdayaan Pola Kemitraan Perkebunan

Aspek	Nilai-nilai	Proses pemberdayaan
Produksi/ pengelolaan kebun	Penghargaan pada efisiensi, produktivitas, kualitas kegiatan	Membiasakan praktik produksi yang taat aturan dan sadar-peduli pada pencapaian kualitas dan hasil. Meningkatkan wawasan petani tentang tantangan dan kebijakan baru di tingkat makro.
	Penghargaan pada nilai saling menghargai	Menempatkan petani sebagai subyek yang sejajar (baik kedudukan dan 'kecerdasan') dalam setiap tahap kegiatan kemitraan pengelolaan perkebunan
Kelembagaan	Penghargaan pada nilai keterbukaan, kerjasama- saling menguatkan.	Meningkatkan kemampuan berorganisasi Meningkatkan kemampuan menjalin jaringan kerja Meningkatkan peran kontrol pada pengelolaan kemitraan

Kerangka pemberdayaan harus diperlakukan secara lentur namun kuat. Artinya dimungkinkan penyesuaian-penyesuaian/ siasat khusus di lapangan karena pertimbangan tertentu, misalnya perlu dilakukan pembedaan siasat antara petani kaya dan petani miskin.

PENUTUP

Program kemitraan perkebunan, terutama pada tahap pembangunan kebun, cenderung memperdaya petani dengan tindakan-tindakan pencurangan dan pembodohan demi hasrat keuntungan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Petani dijadikan sebagai obyek/ sasaran, bukan ditempatkan sebagai mitra sejajar karena dianggap tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan. Dengan demikian, strategi pemberdayaan dilakukan dengan cara mempraktikkan tindakan-tindakan anti-pencurangan dan anti-pembodohan dalam kemitraan, yang melibatkan pihak perusahaan, petani, maupun lembaga koperasi. Perberdayaan ini akan menguatkan kepercayaan antar pihak untuk bersinergi mengatasi tantangan baru, khususnya MEA.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S. (2015). Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia. Dalam Semiarto Aji Purwanto (Ed). *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan*. (Hal.137-158). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
- Colchester, M., Jiwan, N., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A.Y., Surambo, A., Pane, H. (2006). Tanah yang dijanjikan: Minyak sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia- Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat. FPP dan SW.
- Colchester, M. dan Sophie Chao (2011). Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Suatu Tinjauan. Dalam Colchester, M. dan Sophie Chao (Ed.) *Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kcenderungan dan Implikasi bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat*. (Hal.17-42). FPP dan SW.
- Indonesian Commercial Newletter. (2011). Profil Industri: Industri Palm Oil Indonesia. Dalam Indonesian Commercial Newsletter. Monthly Report. Juli 2011. <http://datacon.co.id/Sawit-2011ProfilIndustri.html>.
- Kementreian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). Materplan Perencanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Jakarta: Kementerian koordinator Bidang Perekonomian.
- Supeli, Karlina (2015). Revolusi Mental sebagai Paradigma Strategi Kebudayaan. Dalam Semiarto Aji Purwanto (Ed). *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan*. (Hal.1-10). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
- Yonariza dan Mahdi. (2013). Potensi Dampak Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA 2015 terhadap Sektor Pertanian Indonesia. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/PROS2013_13_09



ANALISIS EFEKTIVITAS TEKNIK INTERVENSI PENGEMBANGAN PEREMPUAN PELAKU USAHA EKONOMI PRODUKTIF DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Suminah dan Sapja Anantanyu

Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fak. Pertanian UNS

sum_anan@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam bidang usaha ekonomi produktif, kontribusi perempuan sangat bermakna bagi perkembangan perekonomian nasional. Di sisi lain daya saing produk pelaku usaha ekonomi produktif masih rendah, belum lagi tuntutan produk untuk menghadapi pasar bebas. Pemerintah dalam menghadapi pasar bebas era masyarakat ekonomi Asean (MEA) menerapkan strategi ofensif pada industri. Untuk itu sangat diperlukan adanya intervensi yang tepat dan efektif bagi pengembangan pelaku usaha ekonomu produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas teknik intervensi pengembangan perempuan dalam usaha ekonomi produktif. Penelitian dilakukan di Solo, dengan menggunakan jenis penelitian RCT (Randomized Control Trial) dengan pendekatan studi eksperimental dengan metode Pretest and Posttest with Control Group Design. Sampel diambil sebanyak 50 orang secara random, dan dibagi menjadi 2 kelompok: pelatihan dan magang, dengan intervensi masing-masing 3 hari. Pengukuran jenis dan omzet produksi dilakukan sebelum dan sesudah treatment. Analisis data menggunakan Paired t test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain intervensi dengan cara magang memiliki efektivitas yang tinggi, terbukti adanya perbedaan hasil sebelum dan sesudah intervensi secara signifikan, dimana t hitung sebesar 11,347 lebih besar dari t tabel 2,660. Ada peningkatan omzet produksi setelah diintervensi (37%) $p < 0,05$, diukur selang 2 minggu dari pelaksanaan intervensi. Dalam melakukan pemberdayaan perempuan pelaku usaha ekonomi produktif dapat menggunakan desain intervensi dengan cara magang karena memiliki dampak efektif meningkatkan omset produksi.

Kata kunci: teknik intervensi, pengembangan, usaha ekonomi produktif, perempuan

ABSTRACT

In the field of productive economic businesses, women's contribution is very significant for the national economic development. On the other hand, the product competitiveness is still low, not to mention the demands of products to face the free market. The government in the face of the free market ASEAN Economic Community (AEC) era implementing an offensive strategy in the industry. It is necessary to have appropriate and effective interventions for the development of productive economic businesses. This study aimed to analyze the effectiveness of intervention techniques development of women in productive economic businesses. The study was conducted in Solo, using this type of RCT (Randomized Control Trial) research by experimental method approach trough pretest



and posttest control group design. Samples taken as many as 50 people at random and divided into two groups: training group and apprenticeship group, with the intervention of each of the 3 days. Measurement types and production turnover made before and after treatment. Data analysis using paired t test. The results showed that the design of intervention by way of internships are highly effective, proved to be the difference in the results before and after the intervention significantly, which amounted to 11.347 t is greater than t table 2,660. There was an increase in turnover of production after the intervention (37%) $p < 0.05$, measured interval of 2 weeks of implementation of the intervention. In developing economically of productive women businesses can use design interventions by way of apprenticeship because it has an effective impact production increase turnover.

Keywords: intervention techniques, development, productive economic business, women

PENDAHULUAN

Dalam bidang usaha ekonomi produktif, kontribusi perempuan sangat bermakna bagi perkembangan perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi produktif perempuan perlu digerakkan agar secara mandiri mereka dapat meningkatkan pendapatan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraannya. Di sisi lain, daya saing produk pelaku usaha ekonomi produktif masih rendah, belum lagi tuntutan produk untuk menghadapi pasar bebas. Pemerintah dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menerapkan strategi ofensif pada industri, karena sejak Januari 2015, Indonesia telah memasuki era ekonomi global khususnya di kawasan Asia Tenggara, yaitu Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang salah satunya adalah terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal, elemen pokok aliran bebas barang, jasa, intervensi, tenaga kerja trampil, dan aliran bebas modal (Lestari, 2014).

Pemberdayaan atau pengembangan perempuan pelaku usaha ekonomi produktif selama ini dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan pembinaan, pelatihan, pembimbingan, serta pendampingan dalam usaha ekonomi produktif. Kegiatan yang sering dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain, seringnya adalah menggunakan cara pelatihan, sedangkan magang hampir tidak pernah dilakukan, sifatnya insidental.

Pengembangan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting, karena alasan ketahanan ekonomi rumah tangga yang kemudian membangun



ketahanan ekonomi masyarakat, serta tuntutan dunia global, sehingga dalam pengembangannya diperlukan pendekatan yang efektif. Dalam rangka pemberdayaan perempuan di bidang usaha ekonomi produktif dan mencari pendekatan yang efektif, dapat dilakukan berdasarkan hasil disertasi Suminah tahun 2015. Dalam model tersebut menunjukkan bahwa perempuan RTM miskin yang berada di Surakarta memiliki *self efficacy* yang tinggi 87%, dan disisi lain variabel *social support*, baik *support* dari petugas pemberdayaan perempuan, dari instansi terkait lainnya, secara langsung memiliki pengaruh signifikan yang **negatif** terhadap kemandirian perempuan rumah tangga miskin dalam usaha ekonomi produktif. *Self efficacy* yang tinggi tersebut perlu diarahkan agar supaya kemandirian pelaku usaha ekonomi produktif dapat terwujud, salah satunya dengan menggunakan tehnik intervensi yang tepat.

Usaha ekonomi produktif adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi, dimana meliputi banyak produsen-produsen bekerja dari rumah-rumah mereka, secara khusus sebagai kerja paruh waktu.

Dari hasil studi Suminah (2015) juga menunjukkan bahwa usaha ekonomi produktif sebagai usaha mikro dapat dibagi dalam 3 kategori yaitu: usaha tingkat pemula yang jumlahnya 80%, usaha tingkat berkembang yang jumlahnya 18%, usaha tingkat maju yang jumlahnya 2%. Tiap kategori seharusnya mempunyai kebutuhan dukungan yang berbeda dan bentuk-bentuk intervensi yang berbeda. Berbagai pihak yang memberikan dukungan/*support* kepada perempuan pelaku usaha ekonomi produktif dalam menjalankan usaha ekonomi produktif sering tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sehingga *support* yang diberikan belum dapat meningkatkan kemandirian perempuan pelaku usaha ekonomi produktif dalam menjalankan usahanya.

McArthur (2007) menyampaikan bahwa dukungan sosial merupakan berbagai jenis dukungan, bantuan ataupun informasi yang diterima seseorang dari orang lain, dan secara umum dikategorikan dalam tiga jenis dukungan, yaitu emosional, instrumental dan informasi. Dukungan sosial (*social support*) memaknai dukungan sosial secara luas sebagai sumberdaya yang disediakan



oleh orang lain. (Cohen dan Syme, 1985). Dari hasil disertasi Suminah (2015) teori tersebut tidak terbukti, bahkan hasilnya negatif. Kondisi ini disebabkan diantaranya karena *learning process* yang kurang relevan dan bentuk intervensi yang kurang tepat.

Mengingat bahwa usaha ekonomi produktif ini menyangkut hasrat hidup penduduk mayoritas, maka pengembangan pelaku usaha ekonomi produktif menjadi sangat penting. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teknik intervensi yang bagaimana yang efektif dalam mengintervensi perempuan pelaku usaha ekonomi produktif maka sangat penting dilakukan kajian efektivitas terhadap teknik pelatihan dan magang.

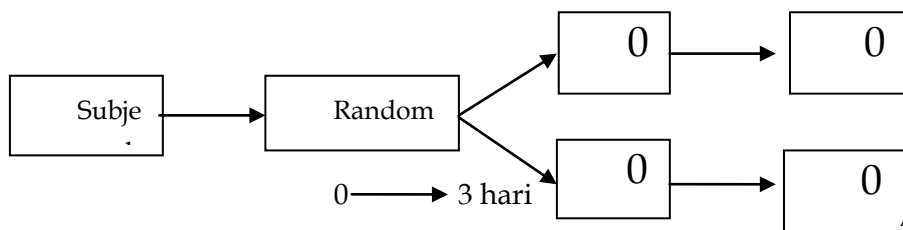
Teknik adalah cara-cara yang digunakan untuk mempertemukan sasaran penyuluhan dengan materi penyuluhan (Boyle, 1981). Menurut Gomes (2003), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja. Warga belajar sebagai pemagang akan membiasakan diri mengikuti proses pekerjaan yang diikuti oleh permagang. (Cut Zurnali, 2004). Tujuan dalam studi ini adalah untuk menganalisis efektivitas teknik intervensi pengembangan perempuan pelaku usaha ekonomi produktif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan di Solo, dengan menggunakan jenis penelitian RCT (*Randomized Control Trial*) dengan pendekatan studi eksperimental dengan metode *Pretest and Posttest with Control Group Design*. Sampel diambil sebanyak 50 orang secara random, dan dibagi menjadi 2 kelompok.

Penelitian menggunakan 2 kelompok sampel, yaitu kelompok dengan tehnik intervensi pelatihan dan kelompok dengan tehnik intervensi magang, dengan intervensi masing-masing 3 hari.



Gambar 1. Bagan Rancangan Penelitian

Keterangan:

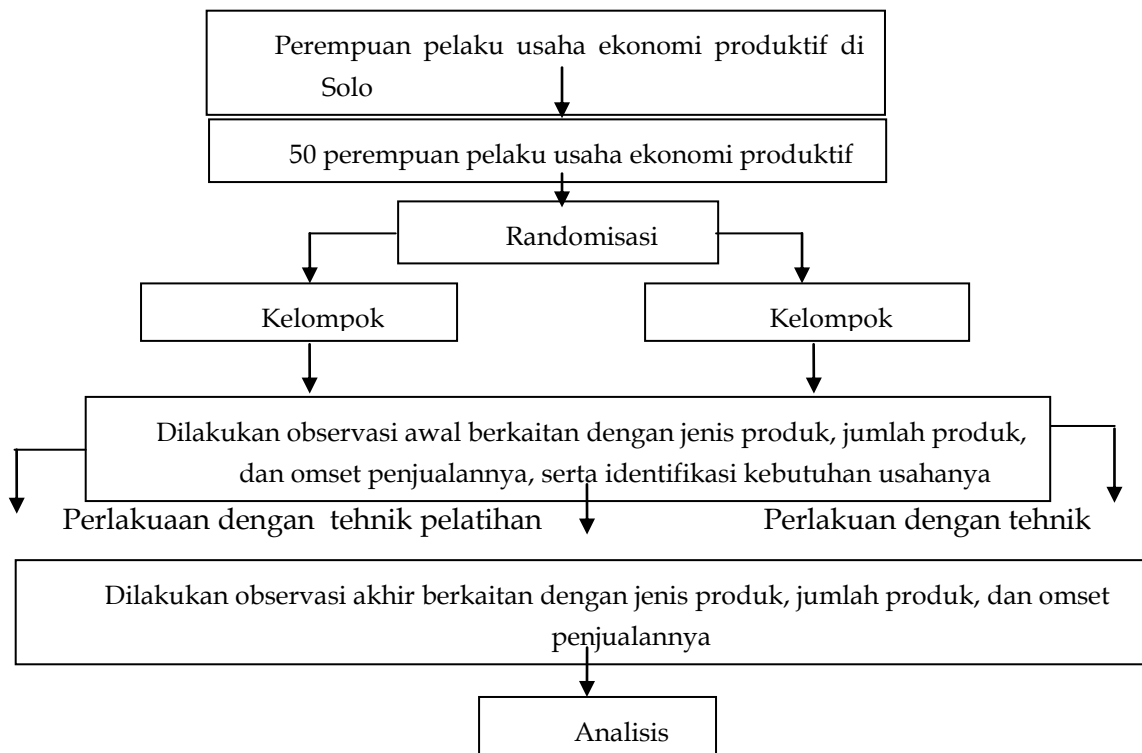
- 01 : Observasi awal kelompok perlakuan dengan tehnik pelatihan
- 02 : Observasi akhir kelompok perlakuan dengan tehnik pelatihan
- 03 : Observasi awal kelompok perlakuan dengan tehnik magang
- 04 : Observasi akhir kelompok perlakuan dengan tehnik magang

Subjek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua perempuan pelaku usaha ekonomi produksi yang berada di Solo. Subjek penelitian ditetapkan dengan kriteria inklusi sebagai berikut: perempuan yang usaha ekonomi produktifnya dilakukan di Solo, usahanya dalam bidang pangan, usia 18 – 65 tahun, belum pernah ikut program pemberdayaan dari pihak manapun, omzet penjualan produknya per hari maksimal Rp 150.000,-.



Kerangka Alur Penelitian



Subjek penelitian diambil secara random dengan cara membuat lotre 50 undian berdasarkan daftar nama subjek, untuk menentukan siapa saja yang ada dalam kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2. Seluruh subjek penelitian diobservasi dan diwawancarai mengenai usahanya. Perlakuan dilakukan selama 3 hari, yang dilanjutkan dengan pemberian fasilitasi dengan batas tertentu. Setelah 14 hari pasca perlakuan dilakukan observasi dan wawancara lagi berkaitan dengan usahanya. Nilai mean yang didapat dari kedua kelompok perlakuan dianalisis menggunakan *paired t test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai solusi atas permasalahan yang sudah dijelaskan di atas dapat di peroleh data tentang karakteristik perempuan pelaku usaha ekonomi produktif.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Tabel 1. Analisis Karakteristik Perempuan Pelaku Usaha Ekonomi Produktif

Karakteristik	Kelompok Perlakuan (N=50)		p
	Teknik intervensi pelatihan (n=25) (%)	Teknik intervensi magang (n=25) (%)	
Usia (43-64)	25 (100)	25 (100)	0,609
Pendidikan:			
SD	11 (44)	9 (36)	0,416
SMP	10 (40)	8 (32)	
SMA	4 (16)	7 (28)	
Pembinaan dari pemerintah: tidak pernah pernah	25 (100)	25 (100)	0.507
Kepemilikan status hukum:			
belum memiliki	25 (100)	25 (100)	0,501
sudah memiliki	0 (0,00)	0 (0,00)	
Masa berlangsungnya usaha:			
1-3 tahun	2 (8)	3 (12)	0,770
3-6 tahun	4 (16)	6 (24)	
6 tahun <	19 (76)	16 (64)	
Jenis ijin usaha:			
tidak ada	0 (0,00)	0(0,00)	0,912
ada ijin	25 (100)	25 (100)	
Lama Kerja/Hari (Jam):			
1-3 jam	0 (0,00)	1 (4)	0,564
3-6 jam	5 (20)	9 (36)	
6jam <	20 (80)	15 (60)	
Jenis Pelatihan yang diminati:			
Produksi	19 (76)	14 (56)	0,219
Kemasan	4 (16)	7 (28)	
Pemasaran	1 (4)	4 (16)	
Kendala aspek pemasaran:			
Tidak ada kendala	14 (57)	15 (61)	0,677
Ada kendal	11 (43)	10 (39)	
Kendala aspek bahan baku:			
Tidak ada	23 (93)	24 (96)	0,876
Ada	2 (3)	1 (4)	

Sumber : Analisis Data Primer, 2016

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi usaha perempuan pelaku usaha ekonomi produktif untuk kelompok perlakuan dengan teknik



pelatihan maupun kelompok perlakuan dengan tehnik magang tidak ada bedanya atau dapat dikatakan homogeny. Hal ini dapat dilihat dari nilai $\alpha_{(0,05)} < p$, yang berarti tidak ada perbedaan antara kondisi usaha kelompok perlakuan 1 dengan yang lainnya.

Tabel 2. Pengukuran Variabel Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif

Variabel	Kelompok Perlakuan	Pengukuran (Mean $\pm$ SD)		P value
		Sebelum	Sesudah	
Jumlah Tenaga Kerja	Pelatihan	24,20 $\pm$ 1,868	25,80 $\pm$ 1,924	0,966
	Magang	23,60 $\pm$ 4,868	24,98 $\pm$ 5,225	0,706
Teknologi Produksi	Pelatihan	27,10 $\pm$ 4,108	28,23 $\pm$ 4,765	0,176
	Magang	28,60 $\pm$ 8,152	34,60 $\pm$ 9,001	0,003
Jenis Produk	Pelatihan	19,10 $\pm$ 3,868	20,90 $\pm$ 1,924	0,636
	Magang	23,60 $\pm$ 4,868	23,98 $\pm$ 5,225	0,046
Jumlah omzet penjualan/hari	Pelatihan	26,00 $\pm$ 2,129	29,15 $\pm$ 3,001	0,122
	Magang	27,00 $\pm$ 7,112	39,80 $\pm$ 3,098	0,037
Daerah Pemasaran	Pelatihan	25,30 $\pm$ 1,934	27,30 $\pm$ 2,734	0,446
	Magang	23,75 $\pm$ 4,868	28,98 $\pm$ 5,980	0,074

Sumber: Analisis Data Primer 2016

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah tenaga kerja pada kelompok pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan ($p=0,966$), untuk kelompok magang juga tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah magang ($p=0,706$), tetapi nilai p semakin kecil. Tehnologi produksi dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pelatihan ($p=0,176$), untuk kelompok magang terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah magang dalam penggunaan tehnologi produksi. Jenis produk yang diproduksi untuk kelompok pelatihan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pelatihan ($p=0,636$), sedangkan magang ada perbedaan ($p=0,046$). Demikian juga dengan omzet penjualan pada kelompok pelatihan tidak ada perbedaan ($p=0,122$), dan kelompok magang ada perbedaan ($p = 0,037$). Daerah pemasaran untuk kelompok pelatihan juga tidak ada perbedaan ($p = 0,446$), demikian juga dengan kelompok magang juga tidak ada perbedaan dengan niali ($p = 0,074$), tetapi ada penurunan nilai p -nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain intervensi dengan cara magang memiliki efektivitas yang tinggi, terbukti adanya perbedaan hasil sebelum dan sesudah intervensi secara signifikan, dimana $t_{hitung} = 11,347$ lebih



besar dari $t_{\text{tabel}} = 2,660$. Ada peningkatan omzet penjualan setelah diintervensi (37%) $p < 0,05$, diukur selang 2 minggu dari pelaksanaan intervensi.

PENUTUP

Kesimpulan

Tidak terdapat perbedaan jumlah tenaga kerja, teknologi produksi, jenis produksi, omzet penjualan dan daerah pemasaran untuk kelompok perlakuan dengan teknik intervensi pelatihan. Sedangkan untuk kelompok perlakuan dengan teknik magang yang memiliki $p < \alpha 0,05$ adalah teknologi produksi, jenis produksi, dan omzet penjualan, yang berarti ada perbedaan sebelum dan sesudah magang, dan untuk jumlah tenaga kerja dan daerah pemasaran tidak ada perbedaan. Berdasarkan hasil uji t terbukti adanya perbedaan hasil sebelum dan sesudah intervensi secara signifikan, dimana $t_{\text{hitung}} = 11,347$ lebih besar dari $t_{\text{tabel}} = 2,660$. Ada peningkatan omzet penjualan setelah diintervensi (37%) $p < 0,05$.

Rekomendasi

Dalam melakukan pemberdayaan atau pengembangan perempuan pelaku usaha ekonomi produktif dapat menggunakan teknik intervensi dengan magang karena memiliki dampak efektif meningkatkan penggunaan teknologi produksi, jenis produksi, dan omzet penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyle, P.G. 1981. *Planning Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Cohen, S. dan Syme, S.L. (Eds). 1985. *Social Support and Health*. Orlando: Academic Press, Inc.
- Cut Zurnali. 2004. Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Perilaku Produktif Karyawan pada Divisi Long Distance PT Telkom Indonesia, Tbk, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM-SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, 2001, *Managing Human Resources*, International Edition, Prentice Hall, Inc., New Jersey
- Lestari, Murti. 2014. UMKM Menghadapi MEA. Kedaulatan Rakyat Online <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3579/umkm-menghadapi-mea.kr>, diakses pada tanggal 8 September 2016.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- McArthur, C.T., 2007, Sosial Support & Social Conflict.melalui <[http://hsr.e-contentmanagement.com/archives/v1/18/issue/3/article/3080/social-capital-and health](http://hsr.e-contentmanagement.com/archives/v1/18/issue/3/article/3080/social-capital-and-health)> (diakses pada tanggal 5 Mei 2012)
- Sastroasmoro, S. 2011. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis. Edisi Keempat, Jakarta. Sagung Seto.
- Suminah. 2015. Pengaruh Self Efficacy Terhadap Kemandirian Perempuan RTM Dalam Usaha Ekonomi Produktif. Desertasi. Prodi PKP Sekolah Pascasarjana. UGM Yogyakarta.



PARTISIPASI RUMAH TANGGA DALAM PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI

M. Zulkarnain. Y, Subejo, Slamet Hartono

Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

Universitas Gadjah Mada

idjul.ar@gmail.com

ABSTRAK

Persaingan pada era pasar bebas akan menuntut masyarakat untuk berswasembada pangan sehingga tidak hanya menjadi penonton dan menjadi masyarakat konsumtif yang pemenuhan kebutuhan pokok sangat tergantung dari dunia luar. Untuk itu perlu memperkuat ketahanan pangan keluarga yang dapat dimulai dengan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kawasan rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. KRPL diinisiasi oleh Badan Ketahanan Pangan, dimana keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada partisipasi dari setiap rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi rumah tangga dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Penelitian dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2016 di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah sampel sebanyak 30 rumah tangga. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan in depth interview dengan menggunakan kuisioner terstruktur. Analisa data menggunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tenaga yang dicurahkan rumah tangga termasuk kategori tinggi. Terdapat peran yang saling mendukung antara suami-istri dalam mewujudkan rumah pangan lestari. Ketahanan pangan rumah tangga di era MEA dapat dapat dimulai dengan memberdayakan rumah tangga dalam memanfaatkan lahan pekarangan sesuai dengan sumberdaya lokal yang dimiliki oleh rumah tangga.

Kata kunci: partisipasi, rumah tangga, rumah pangan lestari

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian yang lebih di masa pemberlakuan ASEAN Economic Community (MEA) mengingat pangan akan menentukan kualitas sumberdaya manusia, dimana kualitas sumberdaya manusia akan sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya gizi yang diperoleh dari keragaman pangan seperti yang diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 mengenai pangan.



Selain itu, persaingan pada era pasar bebas akan menuntut masyarakat untuk berswasembada pangan sehingga tidak hanya menjadi penonton dan menjadi masyarakat konsumtif yang pemenuhan kebutuhan pokok sangat tergantung dari dunia luar. Untuk itu perlu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga yang dapat dimulai dengan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), merupakan program dari kegiatan P2KP yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan penghasil karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga melalui berbagai macam aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan (BKP, 2015). Pentingnya pengembangan program KRPL memiliki landasan ideologi yang kuat yaitu: ideology ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan (Arifin, 2012).

Salah satu Desa yang ditetapkan sebagai desa penerima manfaat kegiatan P2KP di Provinsi Bengkulu adalah Desa Tanah Tinggi yang terletak di Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan P2KP yang dilakukan di Desa Tanah Tinggi adalah optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari dengan kegiatan pembuatan demplot/kebun contoh sayuran dan buah, kebun bibit, dan pemeliharaan ikan yang dilakukan secara berkelompok. Sedangkan untuk tiap rumah dilakukan kegiatan usaha pengembangan tanaman sayuran dan buah naga, serta usaha ternak bebek entok.

Pembangunan KRPL dapat berlangsung secara optimal jika tiap rumah tangga ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi berarti tindakan, peran serta dalam aktivitas suatu kelompok, atau keikutsertaan, dalam hal ini mengacu pada keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan tertentu (Mardikanto, 2009). Partisipasi yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah kegiatan pembangunan. Kurniawan dkk. (2015) menyebutkan pentingnya partisipasi ini karena: *pertama* merupakan metode untuk mendapatkan informasi mengenai



kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat terhadap program, *kedua* masyarakat akan memiliki dan mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya, *ketiga* partisipasi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat partisipasi rumah tangga dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dimana bentuk partisipasi yang diamati meliputi partisipasi ide, partisipasi tenaga, dan partisipasi dana.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2016 di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Responden dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang dalam implementasi program mewakili setiap rumah tangga penerima manfaat program dan menjadi anggota kelompok P2KP. Sampel di tentukan secara sensus sebanyak 30 orang, dengan informasi pendukung dari suami sebagai KK dan tokoh masyarakat lainnya.

Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan menggunakan kuisisioner terstruktur. Analisa data menggunakan analisis deskriptif.

Tingkat partisipasi rumah tangga merupakan keterlibatan/keikutsertaan rumah tangga dalam program rumah pangan lestari, yang meliputi partisipasi ide, partisipasi tenaga, dan partisipasi dana. Diukur dengan menggunakan skor yaitu: skor 1 diberikan pada jawaban tidak pernah, skor 2 diberikan pada jawaban kadang-kadang, skor 3 diberikan pada jawaban sering, dan skor 4 diberikan untuk jawaban sangat sering. Kemudian dihitung persentase skor tingkat partisipasi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor tingkat partisipasi} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100 \%$$

Selanjutnya dilakukan pengkategorian tingkat partisipasi sebagai berikut :



Tabel 1. Kategori Interpretasi skor

Skor tingkat partisipasi (%)	Kategori
76-100	Sangat Tinggi
51 - 75	Tinggi
26 - 50	Rendah
0 - 25	Sangat Rendah

Sumber: Yusi dan Idris (2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Rumah Tangga

Rata-rata umur ibu rumah tangga adalah 34 tahun dan suami sebagai KK 43 tahun, umur tersebut digolongkan berada pada usia produktif untuk melakukan aktifitas produksi dan aktivitas sosial, dengan rata-rata jenjang pendidikan yang di tempuh oleh suami adalah pada tingkat SMP dan istri pada tingkat SD. Umur dan pendidikan dalam rumah tangga akan mempengaruhi pola pengambilan keputusan, dimana dengan pendidikan yang lebih baik memungkinkan suami dan istri mempunyai pemahaman dan perilaku yang baik dalam pegelolaan rumah tangga, termasuk dengan pilihan-pilihan dalam kegiatan produksi usahatani dan juga pemenuhan konsumsi pangan.

Seluruh rumah tangga mempunyai mata pencaharian pokok dengan berkebun karet, dan sebanyak 25% rumah tangga juga berusahatani sawah, dengan rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp 3.125.000,- per bulannya Sedangkan ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh usahatani dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 625.000,- per bulan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak empat orang dimana jumlah anggota rumah tangga akan menentukan pilihan dan juga menentukan banyak sedikitnya jumlah pangan yang akan dikonsumsi. Selain itu, keberadaan anggota rumah tangga akan berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja di rumah untuk membantu dalam kegiatan usaha pemanfaatan lahan pekarangan.

Partisipasi Rumah Tangga

Partisipasi rumah tangga dalam kegiatan KRPL menunjukkan tingkat keikutsertaan dan keaktifan dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan, baik partisipasi memberikan ide, tenaga, atau dana. Distribusi tingkat partisipasi disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Distribusi tingkat partisipasi rumah tangga dalam program rumah pangan lestari

No	Jenis Partisipasi	Persentase skor tingkat partisipasi	Tingkat Partisipasi
1	Ide	49,2 %	Rendah
2	Tenaga	81,4 %	Sangat Tinggi
3	Dana	24,6 %	Sangat Rendah

Sumber: data primer diolah, 2016

Partisipasi tenaga merupakan bentuk partisipasi yang dicurahkan sangat tinggi karena bentuk partisipasi ini yang langsung berkaitan dengan bagaimana rumah tangga melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan sesuai dengan yang diarahkan program dan membutuhkan tenaga fisik. Dalam pelaksanaannya, peran suami dan juga dukungan anggota rumah tangga sangatlah besar dalam membantu ibu rumah tangga untuk mewujudkan pekarangan yang produktif. Kerjasama yang baik mereka wujudkan dalam beberapa aktivitas seperti, pengolahan lahan dan menyiapkan media tanam, membuat rak-rak untuk menempatkan media tanam, melakukan penanaman dan pemeliharaan untuk tanaman sayuran dan buah. Untuk kegiatan peternakan, partisipasi dapat dilihat dari pembuatan kandang bebek entok, dan pemeliharaannya.

Selain itu, partisipasi tenaga dari para ibu rumah tangga dan suami dapat dilihat juga pada kegiatan yang dilakukan dalam kelompok, yaitu: pembuatan kebun contoh, dengan membuat rumah naungan, menyiapkan media pembibitan dan media tanam, membuat kolam pemeliharaan ikan, meskipun untuk melakukan pemeliharaan kebun contoh sepenuhnya dilakukan oleh para ibu..

Partisipasi dana merupakan kemampuan petani untuk menyumbangkan harta benda untuk kegiatan Rumah Pangan Lestari . Partisipasi dana tergolong sangat rendah karena kebutuhan rumah tangga dalam kegiatan Rumah Pangan Lestari sebagian besar sudah disediakan oleh pemerintah melalui kelompok seperti, bibit/benih, polybag, dan tiang penyangga buah naga. Dana yang mereka keluarkan secara pribadi hanya untuk membeli bahan untuk membuat rak tanam di lahan pekarangan.

Peran penyuluh lapangan sebagai fasilitator dalam kegiatan P2KP sangat penting. Mereka tidak menempatkan masyarakat sebagai sasaran dari kegiatan



tetapi menempatkan mereka sebagai penerima manfaat. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diungkap oleh Mardikanto (2009), karena sebagai penerima manfaat maka penyuluh menempatkan masyarakat pada posisi yang perlu dilayani atau difasilitasi sebagai rekanan. Sebagai penerima manfaat, masyarakat memiliki posisi tawar untuk menerima atau menolak inovasi yang disampaikan, sehingga masyarakat sendirilah yang menentukan komoditi yang akan di tanam. Selain itu, proses belajar yang berlangsung merupakan proses belajar bersama yang partisipatif. Proses belajar bersama di tengah masyarakat inilah membuat mereka yang tidak tercatat aktif sebagai anggota kelompok tetap dapat mendapatkan informasi-informasi penting, karena mereka yang aktif dalam kelompok beserta ketua kelompok langsung menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan dalam interaksi mereka sehari-hari.

Tinggi nya tingkat partisipasi rumah tangga dibenarkan oleh perangkat desa dan informan lainnya. Menurut mereka, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan cukup tinggi, karena mereka banyak mendapat manfaat dari aktivitas tersebut. Hal ini mendukung apa yang diuraikan oleh Ife dan Tesoriero (2008) bahwa orang akan terdorong berpartisipasi karena:

1. *Orang berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting.* Masyarakat bersedia berpartisipasi karena menganggap masalah ketersediaan pangan merupakan bagian penting dalam hidup mereka. Penyuluh dan ketua kelompok beserta anggota aktif mampu menyadarkan dan mengajak mereka untuk lebih peduli dalam memanfaatkan lahan pekarangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
2. *Orang harus merasa pangan bahwa aksi mereka akan membuat perubahan.* Masyarakat tahu, keterlibatan dalam kegiatan akan membuat perubahan-perubahan, paling tidak pada diri mereka sendiri untuk dapat hidup lebih baik. Jika mereka mampu memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan yang produktif dengan memanfaatkan sumberdaya lokal



juga akan berdampak pada lingkungan dimana mereka berada.

3. *Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai.* Penyuluh dan ketua kelompok sebagai agen lokal, sangat tahu bagaimana mereka harus memfasilitasi dan melayani masyarakat. Pada umumnya masyarakat mempunyai perasaan enggan untuk peduli dengan lahan pekarangan untuk kegiatan usahatani/usaha produktif. Tetapi, dengan adanya kelompok, mereka merasa menjadi orang yang didengarkan, karena sering berinteraksi dengan penyuluh dan rekan lainnya. Ada tempat berkumpul bagi mereka untuk melakukan curhat, bercerita mengenai keinginan-keinginan mereka mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada.
4. *Orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya.* Untuk mendukung partisipasi dari masyarakat, kegiatan P2KP dengan program RPL memfasilitasi bagian yang memang tidak dapat masyarakat lakukan sendiri. Misalnya modal untuk menyiapkan media, membeli bibit, dan lainnya, semua difasilitasi oleh pihak yang berwenang. Pemberian bantuan yang dikelola oleh kelompok sedemikian rupa sehingga menjadi dana bergulir diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan akan berkelanjutan.
5. *Struktur dan proses tidak boleh mengucilkan.* Dengan keterlibatannya dalam kegiatan KRPL, masyarakat pun merasa diperhatikan dan dianggap sebagai bagian masyarakat yang juga harus berdaya. Oleh karena itu mereka sangat mendukung program karena memang manfaatnya dapat mereka rasakan.

PENUTUP

Bentuk partisipasi yang dominan dalam program Rumah Pangan Lestari adalah partisipasi tenaga, karena kegiatan yang dilakukan dalam program rumah pangan lestari adalah kegiatan yang membutuhkan tenaga kasar/fisik. Manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi ibu rumah tangga sebagai anggota kelompok adalah silaturahmi, peningkatan pengetahuan dan



ketrampilan, serta perolehan informasi yang mendukung kemampuan diversifikasi produk dan konsumsi pangan rumah tangga. Terdapat peran yang saling mendukung antara suami, istri dan anggota keluarga lain dalam program rumah pangan lestari, oleh karena itu sudah semestinya sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan lahan pekarangan juga melibatkan pihak suami sehingga pemberdayaan dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan keluarga dapat berjalan lebih baik. Penyuluh/Fasilitator memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk menguatkan ketahanan pangan rumah tangga. Program KRPL ke depan semestinya disusun melalui pentahapan yang direncanakan dengan matang selayaknya program pemberdayaan yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., 2012, Pengembangan Kelembagaan Pangan. Prosiding Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2012. Dewan Ketahanan Pangan.
- Ife, J dan Tesoriero. 2008. Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, M.A, Soemarmo, Purnomo, M. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak Kecamatan Tambelang, Jombang. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. 6 (2) 2015.
- Mardikanto, Totok. 2009, Sistem Penyuluhan Pertanian, Surakarta: LPP-UNS dan UNS Press.
- Yusi, S dan Idris, U, 2009, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif, Jakarta: Citra Books Indonesia



IDENTIFIKASI POTENSI ASET RUMAH TANGGA MISKIN BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PENDEKATAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK

Dini Yuniarti, Lestari Sukarniati, Arif Rahman Hakim

Sustainable Development Research Group, Universitas Ahmad Dahlan

Yogyakarta

dini.yuniarti@uad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset rumah tangga miskin yang berpotensi untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan pendekatan Sustainable Livelihood Framework. Pemberdayaan dilakukan untuk menghadapi kerentanan sebagai dampak implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Aset-aset tersebut meliputi modal manusia, modal finansial, modal alam, modal fisik, dan modal sosial. Lokasi penelitian di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo. Metoda penelitian adalah kuantitatif menggunakan data primer dengan jenis data cross section. Pengumpulan data primer menggunakan metoda survei dengan personally administered questionnaires. Alat analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu ukuran sentral. Hasil studi menunjukkan aset rumahtangga miskin berpotensi untuk pemberdayaan menghadapi implementasi MEA yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan melalui pengembangan UMKM berbasis aset rumah tangga yaitu modal manusia berupa keterampilan, modal finansial berupa akses, modal fisik berupa alat transportasi, modal alam berupa kepemilikan tanah pertanian, kolam, dan tanah pekarangan, serta modal sosial yaitu keterlibatan dalam organisasi sosial, kelompok tani dan kegiatan keagamaan. Untuk itu perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat penghidupan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat agar mencapai outcome dari strategi penghidupan yaitu meningkatnya yaitu mengurangi kerentanan kerentanan akibat implementasi MEA. meningkatnya pendapatan, dan kesejahteraan.

Kata kunci: rumahtangga miskin, sustainable livelihood framework, pemberdayaan

POOR HOUSEHOLD ASET POTENTIAL IDENTIFICATION FOR EMPOWERMENT: SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK

ABSTRACT

The aim of the study to identification poor household asset can be used to village empowerment using Sustainable Livelihood Framework in facing vulnerability cause AEC implementation. These assets involve human capital, financial capital, natural capital, physical capital, and social capital. The study located in Kalibawang, Kulonprogo. We used a quantitative method with cross section data. Survey method uses to collect primary data with personally administered questionnaires. There are 125 poor households as a respondent which located in four villages. We used descriptive statistic as the



analytical tool. The result of study signpost that household has assets that potentially to be a source of livelihood strategies in facing AEC through enhancing entrepreneurship Household has human capital, financial capital, physical capital, natural capital, and social capital to empower society through build small medium enterprise. It is need government and society intervention such as regulation, program, and fund to transform these assets to be livelihood strategies through empowerment to achieve livelihood strategies outcome, namely more income, increased well-being, reduced vulnerability, and improve food security.

Kata kunci: poor household, sustainable livelihood framework, empowerment

PENDAHULUAN

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa implikasi yang luas bagi negara anggotanya, dimana terdapat peluang dan tantangan. Setiap negara dituntut untuk memiliki daya saing agar dapat memanfaatkan peluang tersebut. Untuk itu perlu menyiapkan masyarakat untuk memiliki daya saing, apalagi jika melihat data dari *Global Competitiveness Index* 2015-2016 yang menunjukkan Indonesia masih kalah bersaing dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Keadaan ini menunjukkan bahwa jika tidak disiapkan dengan baik, maka implementasi MEA berpotensi menghasilkan kerentanan (*vulnerability*) bagi masyarakat. Menurut DFID (1999), *vulnerability* sendiri menjelaskan lingkungan eksternal dimana seseorang berada, dimana bisa bersumber dari *trends, shocks* dan musim yang tidak bisa dikontrol. Implementasi MEA merupakan contoh kerentanan yang bersumber dari adanya perubahan *trend* perekonomian nasional dan internasional.

Salah satu bagian masyarakat yang rentan menghadapi dampak negatif implementasi MEA adalah masyarakat miskin, yang tidak cukup memiliki daya saing untuk bisa berkompetisi. Berdasarkan laporan BPS mengenai kemiskinan di Indonesia menunjukkan pada bulan Maret 2013 tercatat sekitar 28,07 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dengan komposisi kemiskinan perkotaan 10,33 juta jiwa dengan garis kemiskinan Rp 189.041,91 dan kemiskinan pedesaan 17,74 juta jiwa dengan garis kemiskinan Rp 253.273,31. Artinya penduduk yang rentan didominasi penduduk di desa. Oleh karena itu untuk meminimalkan kerentanan (*vulnerability*), masyarakat desa perlu dipersiapkan melalui pemberdayaan.



Pemberdayaan sendiri menurut Kartasasmita (1997) merupakan proses menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Konsep ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berkaitan dengan kerentanan, menurut Hapsari *et al* (n.d) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan serta dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menghadapi kerentanan adalah *Sustainable Livelihood Framework* (SLF), dimana pendekatan tersebut memberikan suatu kerangka bagi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) baik dalam konteks pembangunan maupun kemanusiaan. Pemikiran tentang *livelihood* berawal dari karya Robert Chamber di pertengahan tahun 1980-an. Menurut Chambers dan Conway (1992) penghidupan meliputi kemampuan, kepemilikan aset (termasuk sumberdaya fisik dan sumberdaya sosial) dan aktivitas yang diperlukan sebagai sarana untuk hidup. Penghidupan akan berkelanjutan jika dapat menghadapi tekanan dan memperbaiki diri dari adanya tekanan dan guncangan serta mampu meningkatkan kemampuan dan aset untuk masa sekarang dan yang akan datang tanpa tergantung pada sumber



daya alam semata. Pendekatan SLF disusun oleh *Institute for Development Studies* di Universitas Sussex dan Oxfam, *The British Departement for International Development* atau DFID. Kerangka kerja ini bertujuan untuk menunjukkan faktor utama, signifikansi dan sumber dari interaksi tersebut. SLF terdiri dari lima komponen utama (DFID, 1999) yaitu *vulnerability context*, *livelihood asset* (meliputi modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal keuangan), *transforming structure and processes*, *livelihood strategies*, dan *livelihood outcomes*. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, mensikapi perubahan yang terjadi dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan.

Beberapa studi berkaitan dengan SLF pernah dilakukan antara lain oleh Martopo *et al* (2013) dan Wigati *et al* (2013). Studi Martopo (2013) mengkaji strategi penghidupan berkelanjutan yang didasarkan pada aspek aset-aset penghidupan yang tersedia di Kawasan Dieng. Hasilnya menunjukkan status kondisi aset penghidupan di daerah tersebut yang tidak berkelanjutan. Adapun studi Wigati *et al* (2013) menggunakan pendekatan *Sustainable livelihood framework* untuk mengetahui potensi, kerentanan dan proses dukungan kebijakan di Desa Luworo untuk mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan ijon melalui kegiatan berbasis keagamaan yang dikombinasi dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis budaya mendapatkan hasil yang sangat positif.

Untuk mendukung keberhasilan pemberdayaan tersebut perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal serta penguatan kapasitas aparat pemerintah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat. Untuk itu perlu melakukan identifikasi aset-aset rumah tangga sangat miskin untuk menyiapkan program-program pemberdayaan desa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengidentifikasi aset-aset rumah tangga sangat miskin dan pemanfaatannya; 2) Untuk mengidentifikasi potensi aset rumah tangga miskin untuk pemberdayaan desa untuk menghadapi implementasi MEA.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis data *cross section*. Data primer diperoleh melalui survei dengan menggunakan *personally administered questionnaire*. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyaknya populasi berjumlah 211 rumah tangga (Pendamping Program Keluarga Harapan Dinas Sosial DIY tahun 2015). Penentuan jumlah sampel menggunakan metoda Isaac dan Michael dengan populasi 211 dan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel adalah 131. Setelah melalui proses pengujian kelengkapan data dan pengujian data outlier sebanyak 125 rumah tangga. Penelitian ini menggunakan desain sampling probabilitas dengan metoda *area random sampling* karena responden tersebar di empat desa, yaitu Desa Banjarharjo, Banjaroyo, Banjarum dan Banjarasri. Variabel yang diamati adalah aset-aset rumah tangga sangat miskin berupa modal manusia, modal finansial, modal fisik, modal alam dan modal sosial. Alat analisis yang digunakan menggunakan statistik deskriptif pengukuran ukuran pusat dan proporsi yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Identifikasi Aset Rumah Tangga Sangat Miskin dan Pemanfaatannya

Hasil identifikasi menunjukkan rumah tangga sangat miskin memiliki lima aset dalam SLF yaitu, modal manusia, finansial, fisik, alam dan sosial. Modal manusia yang diukur oleh pendidikan dan keterampilan, menunjukkan pendidikan terakhir yang dicapai baik oleh kepala keluarga maupun istri masih didominasi oleh pendidikan SD, sehingga dapat dikatakan pendidikan masih rendah. Rendahnya pendidikan akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk memperoleh pekerjaan, sehingga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja lain. Hal ini sejalan dengan temuan pekerjaan didominasi oleh sektor informal seperti petani, serabutan, pedagang, tukang dan lainnya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh pendidikan anak yang lebih baik dan cukup banyak yang memiliki



pendidikan terakhir perguruan tinggi, sehingga memiliki potensi untuk lebih mampu bersaing. Selain pendidikan, rumah tangga juga memiliki keterampilan seperti membuat anyaman, membuat gula merah, menjahit, membuat sapu dan membuat makanan tradisional. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki tersebut telah dimanfaatkan oleh rumahtangga sehingga dapat menambah penghasilan rumahtangga. Optimalisasi keterampilan bisa menjadi salah satu unsur pemberdayaan.

Modal finansial diukur dengan kepemilikan tabungan dan pinjaman menunjukkan bahwa rumah tangga telah mempunyai akses untuk menyimpan tabungan dan memperoleh pinjaman. Pinjaman berasal dari lembaga atau organisasi sosial yang diikuti RTSM seperti bersumber dari Dasawisma (24,56%), PKK (20,18 %), koperasi (5,26%), kerabat (15,79) dan lainnya (34,21 %) yaitu dari Bank, PHK, arisan, LKM serta tetangga.

Modal fisik dalam penelitian ini ditunjukkan oleh kepemilikan kendaraan baik sepeda maupun sepeda motor. Sebesar 54,40% responden menyatakan memiliki sepeda motor dan 38,40% memiliki sepeda. Kedua aset fisik tersebut membantu dan mempermudah mobilitas RTSM karena digunakan sebagai alat transportasi baik untuk bekerja, dan beraktifitas sehari-hari seperti untuk ke pasar dan sekolah. Kepemilikan modal fisik tersebut berpotensi untuk

Modal sosial diukur oleh keanggotaan dalam organisasi sosial (Dasawisma dan PKK) dan kelompok tani. Dari ketiga lembaga sosial yang diikuti tersebut, mayoritas RTSM banyak mengikuti kelompok keagamaan yaitu sebanyak 85,60%, kemudian Dasawisma (68,00%), PKK (36,80%) dan kelompok tani (43,20%). Manfaat yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah memperoleh pinjaman.

Modal alam diukur oleh kepemilikan lahan pertanian, kolam, pekarangan dan rumah oleh rumahtangga. Sebanyak 36,80% memiliki lahan pertanian. Untuk aset alam lainnya seperti rumah, mayoritas responden telah memiliki rumah (77,6%), sebanyak 48,80% memiliki tanah pekarangan, dan memiliki kolam ikan 8,0% responden. Dari semua modal alam tersebut belum semuanya dimanfaatkan, masih banyak yang berupa lahan yang tidak dimanfaatkan.



Identifikasi Potensi Aset Rumah Tangga Miskin Untuk Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menghadapi Implementasi MEA.

Berdasarkan identifikasi aset rumah tangga sangat miskin di atas, maka aset-aset tersebut berpotensi untuk pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi implementasi MEA. Pemberdayaan tersebut melalui penguatan kewirausahaan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), yang menjadi prioritas MEA untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata.

Modal manusia berupa keterampilan baik membuat anyaman, membuat gula dan makanan tradisional lainnya bisa menjadi potensi yang berharga untuk dikembangkan. Selanjutnya modal alam berupa lahan pertanian, pekarangan dan kolam ikan dapat mendukung proses produksi. Adanya modal sosial berupa keterlibatan dalam PKK, Dasawisma, keagamaan dan kelompok tani dapat menjadi wadah masyarakat untuk membentuk usaha kelompok. Selain itu keterlibatan tersebut akan mempermudah akses terhadap pinjaman untuk berusaha, selain akses keuangan dari lembaga keuangan lainnya. Adanya akses ke lembaga keuangan baik formal maupun informal memberikan potensi pengembangan bagi usaha. Untuk distribusi hasil, maka kepemilikan kendaraan bermotor dan akses ke pasar akan membantu proses distribusi. Dengan berkembangnya UKM di desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat setempat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif adalah risiko terjadinya pengangguran karena adanya kompetisi dengan tenaga kerja asing dari negara anggota ASEAN lainnya.

Pemberdayaan masyarakat melalui UKM sebagai strategi penghidupan berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan *outcome* yaitu mengurangi kerentanan menghadapi implementasi MEA selain meningkatkan pendapatan, perbaikan kesejahteraan.

PENUTUP

Identifikasi aset menunjukkan, bahwa aset-aset tersebut memiliki potensi untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk UMKM. Untuk itu perlu



meningkatkan kemampuan daya saing dan dinamisme UMKM perlu transformasi dan proses aset tersebut dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Transformasi tersebut perlu didukung oleh pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R., and G. Conway. (1992). Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century. *IDS Discussion Paper* 296. Institute for Development Studies, Brighton, UK
- Departement for International Development (DFID). 1999. Sustainable livelihoods Guidance Sheets Framework Introduction Vulnerability Transforming. *Context*, 26. <http://doi.org/10.1002/smj>
- Dyah Hapsari Enh, E. H. (nd). Strategi pemberdayaan Usaha Rumahan Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan produktivitas Keluarga. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Sarasehan DPD Golkar Tk I. Surabaya, Jawa Timur
- Martopo, Anton (2013). Strategi Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Di Kawasandieng (Kasus Di Desa Buntu Kecamatan KejajarKabupaten Wonosobo). *Jurnal EKOSAINS*, Vol. V, No. 2, Juli, 47-56.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Wigati, Sri, Achmad Room Fitrianto (2013). Pendekatan Sustainable Livelihood Framework Dalam Rangka Membongkar Dominasi Tengkulak Melalui Kegiatan Keagamaan. *Jurnal Dakwah*, Vol. Xiv, No. 2 , 283-310.
- World Economic Forum. (2015). *Global Competitiveness Index 2015-2016*.



MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM INDUSTRI RUMAHTANGGA DI KABUPATEN KARANGASEM BALI

Ni Wayan Sri Astiti, Dwi Putra Darmawan, Dewa Gede Raka Sarjana

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

Jalan PB Sudirman, Denpasar, Bali. Tlp. (0361) 223544, wayansriastiti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) mendapatkan informasi tentang strategi pengembangan IRT dengan prioritas berupa penguatan kompetensi SDM. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan dari pengkajian dan penerapan model ini adalah 1) Menumbuhkan kembangkan kinerja lembaga usaha terpilih (Kube Industri Kerajinan Batok Kelapa), 2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis manajemen bisnis pelaku usaha, 3) Menumbuhkan kembangkan kondusifitas usaha agribisnis secara terpadu dalam system informasi manajemen pemasaran berbasis Web. Lokasi penelitian adalah Kube “Eka Lestari Mandiri” Desa Abang Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Metode analisis yang dipergunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis kebutuhan (participatory need assessment/PNA). Jumlah sampel adalah 25 orang yang ditetapkan secara sensus. Wujud kegiatan penguatan kompetensi SDM perempuan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penguatan manajemen usaha bersama industri rumahtangga kreatif spesifik lokal (bahan baku lokal dan pengguna hasil lokal). Setelah kegiatan pendampingan, pelatihan dan evaluasi maka hasil monitoring menunjukkan bahwa secara kualitatif terbangun kondusifitas bisnis meningkat (positif), aktivitas kegiatan meningkat dan secara kuantitatif dapat ditunjukkan bahwa 1) curahan jam kerja karyawan berkisar 3-7 jam dengan rata-rata 5 jam per hari dari 15-17 hari kerja per bulan; 2) Pendapatan harian karyawan meningkat dari rata-rata Rp 50.000 menjadi Rp 85.000 per hari (range Rp 51.000 – Rp 89.000); 3) Omset penjualan dari lembaga usaha berkisar Rp 15.000.000 – Rp 18.000.000 per bulan dengan rata-rata Rp 16.000.000,00 pada masa 2 bulan setelah kegiatan pendampingan berlangsung.

Kata kunci : Model Pemberdayaan, perempuan, industri kerajinan rumahtangga, batok kelapa.

WOMEN EMPOWERMENT MODEL ON HOUSEHOLD INDUSTRY IN KARANGASEM REGENCY

ABSTRACT

Women empowerment activity by using Analytic Network Process (ANP) method, has gotten information about IRT development strategy, with priority in the form of strengthening Human Resource (HR) competence. Based on that background, the objectives of this research are: 1). Growing the performance of chosen business institution (Kube Industri Kerajinan Batok Kelapa); 2). Increasing skill and ability of entrepreneur's



business management technical; 3). Growing conduciveness of integrated agribusiness in Web based marketing management information system. Research location is Kube "Eka Lestari Mandiri" Abang village, Abang district, Karangasem regency. This research using qualitative and quantitative descriptive method by participatory need assessment (PNA) approach. Sample total are 25 persons which assigned by census. The form of strengthening women HR competence activity is done through trainings and strengthening business management together with local specified creative IRT (local raw material and local result's user. After accompaniment, training, and evaluation activity, so the monitoring result shown that by qualitative, business conduciveness has been increasing (positive), activity has been increasing, and by quantitative shown that: 1). The work hours intensity of workers are from 3 to 7 hours with average 5 hours per day based on 15 to 17 working days per month; 2). The income of workers are increasing from Rp 50,000 to Rp 85,000 per day (by range Rp 51,000 – Rp 89,000); 3). Selling turnover from business institution about Rp 15,000,000 – Rp 18,000,000 per month, by average Rp 16,000,000 on 2 months after accompaniment activity was held.

Keywords: Women empowerment model, Household handicraft industry, coconut shell

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi rumah tangga (*household economic*) dan peran gender (*role of gender*) dalam perekonomian bukanlah wacana baru lagi saat ini. Peristiwa krisis moneter tahun 1997/1998 saat mana buruh dan karyawan banyak di PHK akibat kondisi perekonomian dunia seakan mencapai titik nadir. Sebagai bukti, Indonesia masih mampu bertahan karena ada katup-katup pengaman berupa usaha mikro dan kecil, sebagai pencipta lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dari semua pihak karena selain dapat meningkatkan ekonomi di akar rumput, lambat laun berpengaruh positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Secara relative memberi makna positif sekaligus berperan dalam pengangguran dan pengentasan kemiskinan.. Pada gilirannya penguatan ekonomi domestic tersebut dapat berperan positif dalam membangun interkon eksitas dari pusat ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antar daerah, yang selama ini dipandang sebagai penyebab utama tumbuhnya amasalah sosial di Indonesia.

Provinsi Bali meski dikenal sebagai daerah pariwisata, namun masih terjadi peningkatan penduduk miskin dari 159.000 jiwa (2012) naik menjadi 196.000 jiwa tahun 2014 (BPS Bali 2015). Salah satu kabupatennya itu Karangasem masih banyak dijumpai penduduk miskin yakni mencapai 36.100 jiwa, dengan



garis kemiskinan perkapita Rp. 205.650,00. Data statistik Bali pula menunjukkan bahwa di wilayah tersebut memiliki penduduk usia kerja di atas 15 tahun tanpa izasah formal sebesar 22,4%. Hasil temuan penelitian tahun 2014 sebelumnya 95 % tipologi usaha rumah tangga tergolong usaha pemula, dengan modal terbatas serta penggunaan tenaga kerja keluarga 1-3 Orang. (Astuti, dkk 2014). Pendapat subyektif pelaku usaha mengatakan bahwa peranan dan kontribusi usaha (UMK) dapat menunjang pendapatan rumahtangga sebanyak 31 %.

Berdasarkan latar belakang tersebut kegiatan pemberdayaan perempuan ini yang diimplementasikan melalui pemantauan, pendampingan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Kube “Eka Lestari Mandiri” di Dusun Waliang Desa Abang Kabupaten Karangasem cukup mendesak serta dipandang positif dalam konteks pengembangan bisnis di pedesaan.

Tujuan umum dari kegiatan pengkajian ini adalah untuk mencari model pemberdayaan perempuan dalam kegiatan usaha industri kerajinan rumahtangga berbasis analisis kebutuhan (*need assesment*) dan tujuan khusus adalah melakukan pengawalan, pendampingan dan monitoring pengembangan kinerja usaha bersama (KUBE) sebagai lembaga ekonomi di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Kecamatan Abang Kabupaten, Kabupaten Karangasem, sebagai wilayah yang masih tergolong miskin di provinsi Bali. Kemudian dipilih KUBE “Eka Lestari Mandiri” Pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2015.

Kegiatan kaji terap ini merupakan “descstudi” yang meliputi tinjauan kritis atas laporan-laporan relevan yang dipublikasi serta hasil observasi lapang menjadi rujukan analisis secara diskriptif kualitatif terhadap profil industri rumahtangga yang dikembangkan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. *Expert meeting* diselenggarakan untuk memilih aspek penting dan memiliki urgensi dalam kaitannya untuk pengembangan IRT di perdesaan. Informan kunci yang diambil untuk melakukan *expert meeting* adalah Kepala Dinas UMK, Dinasperindag, ketua kelompok IRT, pedagang pengumpul, pengamat IRT, dan



pakar akademik asal perguruan tinggi. Hasil *expert meeting* digunakan sebagai masukan untuk model *Analytic Network Process* (ANP) (dengan *software Super Decisions* sebagai pendukungnya) untuk merencanakan hubungan ketergantungan dan umpan-balik antara tujuan, aspek, masalah, dan alternatif strategi berdasarkan hasil integrasi pengembangan usaha untuk memilih program yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengembangan IRT

Strategi perencanaan pemberdayaan perempuan melalui IRT dengan menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) (Saaty, 2003). Hasil analisis tercermin pada Gambar 1 yang memperlihatkan kerangka umum model ANP IRT di perdesaan. Jejaring ini memiliki empat buah klaster, yaitu tujuan, aspek, permasalahan dan strategi. Klaster “aspek” memiliki dua elemen, klaster “masalah” memiliki lima elemen, dan klaster “strategi” memiliki lima elemen (Tabel 1).

Tabel 1. Sintesis Prioritas Pengembangan IRT di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Menggunakan ANP, 2015

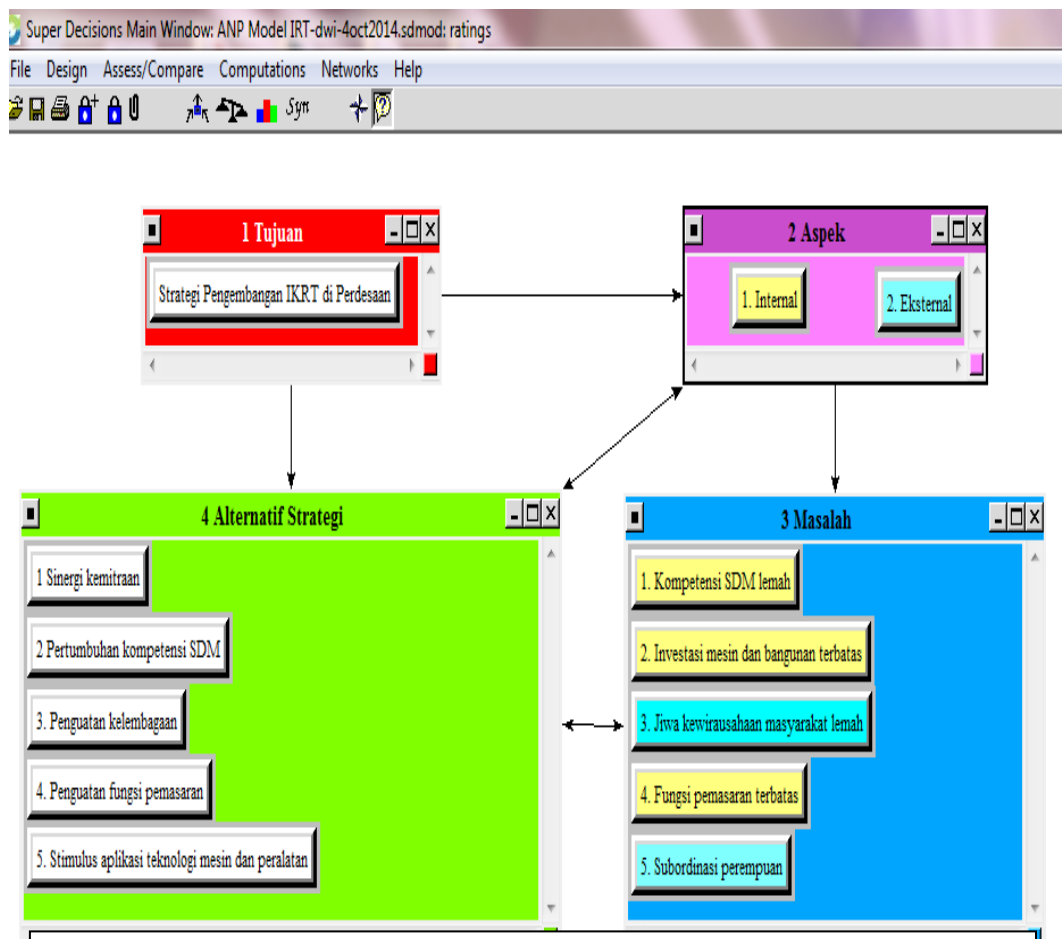
	Prioritas
ASPEK	
1. Internal	0.56
2. Eksternal	0.44
MASALAH	
1. Kompetensi SDM lemah	0.30
2. Investasi mesin dan bangunan terbatas	0.12
3. Jiwa kewirausahaan masyarakat lemah	0.26
4. Fungsi pemasaran terbatas	0.13
5. Subordinasi perempuan	0.19
STRATEGI	
1. Sinergi kemitraan	0.11
2. Pertumbuhan kompetensi SDM	0.39
3. Penguatan kelembagaan	0.15
4. Penguatan fungsi pemasaran	0.15
5. Stimulus aplikasi teknologi mesin dan peralatan	0.20

Berdasarkan data Tabel 1, nampak aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mencari alternatif strategi pengembangan usaha IRT adalah aspek internal



dengan rata-rata bobot sebesar 0,64. Dari aspek internal tersebut, masalah utama yang dianggap paling penting adalah kompetensi SDM lemah dengan rata-rata bobot 0,30, sedangkan masalah eksternal yang paling mendapat perhatian adalah jiwa kewirausahaan masyarakat lemah dengan rata-rata bobot 0,26.

Alternatif strategi yang dirumuskan untuk IRT ada lima, yakni sinergi kemitraan, pertumbuhan kompetensi SDM, penguatan kelembagaan, penguatan fungsi pemasaran, dan stimulus aplikasi teknologi mesin dan peralatan. Strategi yang menjadi prioritas utama dalam mengembangkan usaha IRT di perdesaan adalah pertumbuhan kompetensi SDM dengan bobot sebesar 0,39.



Gambar 1.
**Model Pengembangan Peran Strategis Perempuan Melalui Industri
Rumah Tangga Spesifik Lokal dengan ANP**

Implementasi Strategi Model Pemberdayaan



Untuk implementasi model pemberdayaan tersebut dilakukan dengan (a) peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan untuk mewujudkan kelembagaan usaha IRT yang kuat dan profesional yang responsif gender, (b) Bimbingan teknis dan manajemen pemasaran berbasis web. Dan (3) pengawasan dan pendampingan kemitraan bisnis antara pengurus UMK dengan UMK sejenis yang lebih maju di luar wilayah Provinsi Bali dalam upaya ekspansi bisnis dan meningkatkan pangsa pasar.

Pelaksanaan Pelatihan Anggota dan Pengurus Kube IRT

Untuk kegiatan pelatihan dengan mempergunakan modul dengan materi yang dibutuhkan oleh Kube Lestari. Adapun materi pelatihan yang diberikan pada Kube Lestari meliputi: (1) orientasi pelatihan, (2) Pelatihan Dasar Bagi Pengurus Kube (Peningkatan Prestasi Pribadi, Etika Bisnis, Budaya Perusahaan), (3) Penguatan kapasitas Kube (Tim kerja yang tangguh, Analisis SWOT), (4) Peningkatan Kerampilan bagi pengurus Kube (Perencanaan Produksi, Manajemen teknologi dan inovasi produk, Komunikasi SDM, Lembaga Keuangan Mikro (LKM)), (5) Pelatihan manajemen bagi Pengurus Kube (Manajemen Keuangan, Manajemen Operasi, Manajemen Konflik, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi), (6) Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Kube (Kelembagaan pendukung IRT, Organisasi), (7) Pelatihan Pengurus Kube (Strategi membangun sinergi), (8) Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Kube (Kelembagaan pendukung IRT, Organisasi), (9) Mengelola Dampak Pendamping (Rencana Tindak Lanjut (dari matriks sinergi)

Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis yang dilakukan melalui (1) Manajemen Produksi (2) Manajemen Pemasaran, dan (3) Pelatihan dan Penguatan Sistem Informasi Pemasaran. Dalam konteks pengembangan usaha IRT batok kelapa, telah dilaksanakan pelatihan dan penguatan sistem informasi pemasaran berbasis web (dengan alamat web: <http://ekamandirilestari.wordpress.com> dan email: ekamandirilestari@yahoo.com) dalam penatalaksanaan dan administrasi produksi IRT.



Penguatan dan Pembentukan Kelembagaan Sosio-Bisnis

Kelembagaan sosio-bisnis, disebut juga Bisnis Kolektif Komunitas (Community Collective Business, CCB) dalam bentuk koperasi yang dikembangkan dari Kelompok Usaha Bersama (Kube) IRT merupakan kunci penguatan kelembagaan bisnis kerajinan berbasis batok kelapa. Strategi penguatan kelembagaan CCB melalui: (a) strategi mengikat (bonding strategy), (b) strategi menjembatani (bridging strategy), dan (c) strategi menggaling jejaring (networking strategy). Gambar 5.1 berikut menjelaskan ketiga strategi yang dimaksud.



Gambar 5.1. Strategi Penguatan Lembaga Sosio-bisnis

Benchmarking dan Kemitraan Usaha

Salah Upaya penguatan kompetensi pelaku usaha dilakukan melalui kegiatan Benchmarking dengan mengajak perwakilan pelaku usaha (karyawan) melakukan peninjauan kebeberapa pusat-pusat pasar kerajinan industry rumah tangga di Pasar Sukawati Gianyar dan Pasar Oleh-oleh Bali di seputar Kota Denpasar. Hasil peninjauan menunjukkan secara kualitatif berdampak pada wawasan karyawan pelaku bisnis meningkat dalam berbagai aspek seperti: jenis/model produk, kualitas, dan keragaman harga produk.

Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Pendampingan

Setelah adanya pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk yang diisenggarakan pada Bulan Mei 2015, serta pelaksanaan bimbingan teknis atau pendampingan yang dilaksanakan hingga Bulan Oktober 2015, ternyata melalui



pengamatan dan obserpasi ditemukan adanya peningkatan curahan jam kerja para perajiim hingga mencapai100%. Secara terperinci hasil monitoring dan evaluasi disajikan pada Tabel 52.

Tabel 5.4 Monitoring dan Evaluasi pelatihan dan Pendampingan “Kube Eka Lestari” tahun 2015

No.	Keterangan	Range	Rataan
1.	Curahan Jam kerja/hari/orang	3-7	
2.	Perkiraan pendapatan/hari/orang (Rp.)	51.000-89.000	85.000
3.	Omset penjualan/bulan (Rp. jt)	15 jt – 18 jt	16 jt

Diolah dari data Primer, 2015

Pada Tabel 5.4 nampak bahwa rata-rata curahan jam kerja perajin per hari adalah 5 jam, sedangkan sebelum dilakukan pelatihan rata-rata curahan jam perajin hanya 2,5 jam per hari (Tabel 5.2) sehingga terjadi peningkatan hingga mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan akan terjadi peningkatan pendapatan per hari perorang menjadi Rp. 85.000/orang/hari yang sebelumnya hanya Rp. 42.500,- perorang/hari (Tabel 5.2).

Fenomena ini menunjukkan telah terjadi peningkatan pesanan atau order barang di Kube Eka Lestari, hal ini dapat dilihat dari omset penjualan per bulan hingga mencapai Rp 18.000.000,- dengan rata-rata per bulannya Rp.16.000.000,- (Table 5.4). Sebelum pelatihan dan pendampingan dilakukan omset penjualan berkisar antara Rp.10.000.000,- s/d Rp. 12.000.000,- dengan demikian hingga saat ini telah terjadi peningkatan omset penjualan hingga mencapai 35%. Peningkatan omset ini terjadi didukung oleh beberapa hal yaitu : (a) adanya peningkatan keragaman produk. Awalnya produk yang dihasilkan hanya untuk peralatan yang diperlukan untuk kegiatan ritual, namun saat ini telah diproduksi produk yang bermanfaat untuk perlengkapan kebutuhan sehari-hari, misalnya telah diproduksi alat-alat kebutuhan rumah tangga seperti, tempat buah, tempat kue, pot bunga dan ada juga tempat tissue. (a) adanya percepatan dalam proses produksi karena curahan jam kerja yang meningkat hingga mencapai 100%. (c) adanya peningkatan layanan dalam penjualan maupun peningkatan dalam aksesibilitas informasi terutama dalam akses informasi pasar.



PENUTUP

Simpulan

Setelah kegiatan pendampingan, pelatihan dan evaluasi maka hasil monitoring menunjukkan bahwa secara kualitatif terbangun kondusifitas bisnis meningkat (positif), aktivitas kegiatan meningkat dan secara kuantitatif dapat ditunjukkan bahwa 1) curahan jam kerja karyawan berkisar 3-7 jam dengan rata-rata 5 jam per hari dari 15-17 hari kerja per bulan; 2) Pendapatan harian karyawan meningkat dari rata-rata Rp 50.000 menjadi Rp 85.000 per hari (range Rp 51.000 - Rp 89.000); 3) Omzet penjualan dari lembaga usaha berkisar Rp 15.000.000 - Rp 18.000.000 per bulan) dengan rata-rata Rp 16.000.000,00 pada masa 2 bulan setelah kegiatan pendampingan berlangsung.

Saran

- a. Sosialisasi model pemberdayaan perempuan dan kegiatan pelatihan dan bimtek manajemen produksi dan pemasaran.
- b. Regulasi pemerintah membentuk pengelola distribusi produk IRT dan investasi untuk mendorong produk yang berorientasi ekspor.
- c. Peningkatan kapasitas manajerial SDM untuk ekspansi usaha IRT melalui lembaga sosio-bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, Sri, Ni Wayan 2013. Ketimpangan Gender dalam Pengelolaan Desa Abang, Kecamatan Marga, Tabanan Bali. Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Udayana.
- Astiti, Sri, Ni Wayan, Dwi Putra Darmawan, Dewa Raka Sarjana. 2014. Model Pemberdayaan Perempuan Dalam menjaga Ketahanan Pangan Rumhtangga Melalui Industri Rumahtangga Sepesipik Lokal Di Kecamatan Aabang, Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian Universitas Udayana.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Bali. 2012. Bali Dalam Angka tahun 2012. BPS Propinsi Bali.
- Budisusrusa, IK. Antara, Sri Astiti. 2009. Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Provinsi Bali. Hasil Penelitian: Hibah Penelitian Strategis Nasional th 2009. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.



- Darmawan, D.P. 2011. Ketahanan Pangan Rumahtangga dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan. Denpasar: Udayana University Press.
- Darmawan, D.P. 2014. "Strategi pembangunan ketahanan pangan dan daya tahan ekonomi masyarakat miskin di perdesaan Bali". Makalah dipresentasikan pada Seminar "Strategi Implementasi Program Bali Mandara Jilid II: Harapan dan Kendala di Era Otonomi Daerah", diselenggarakan atas kerjasama Universitas Udayana dan Pemprov Bali, di Gedung Wiswasaba, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, 25 September 2014.
- Diniari F. Soe'oed. 2000. Perempuan dan Pekerjaan. Penyunting Sita Van Bemmelen, Atashendartini H. Lugina Setyawati. Dalam Benih Bertumbuh. Kumpulan Karangan untuk T.Omas Ihroni. Panitia Peringatan Ulang Tahun Ibu Ihroni ke 70 tahun. Bekerjasama dengan kedutaan besar Belanda.
- Saaty, R.W. 2003. Decision Making In Complex Environments. The Analytic Hierarchy Process (AHP) for Decision Making and The Analytic Network Process (ANP) for Decision Making with Dependence and Feedback. Pittsburgh: The Creative Decisions Foundation.
- Vitalaya, Aida, S.Hubeis. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press Windia, I Wayan. 2003. Pemberdayaan Kelembagaan dan Kegiatan Ekonomi Untuk Keberlanjutan Sistem Irigasi Subak di Bali. Ed. Atmanto, Sudar D. 2004. Kebijakan Setengah Hati dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Kemandirian Petani. Jakarta. PSDAL-LP3ES.
- World Bank. 1994. Indonesia: Sustaining Development, Washington DC.



RESTORASI PARADIGMA KUD : “PENDEKATAN TEORI ORGANISASI DALAM MEREbut PELUANG MEA”

Ahmad Tarmizi Yusa, Hendry Andry dan Andri Kurniawan

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Islam Riau

Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia

Email: andriau@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Kelumpuhan organisasi KUD dalam waktu relatif lama selama orde reformasi perlu menjadi perhatian. Pada masa Orde Baru, organisasi ini telah menunjukkan eksistensinya sebagai lokomotif ekonomi desa dalam membantu swasembada beras. Kegiatan pengembangan ekonomi desa merupakan potensi besar, yang dapat dijadikan sebagai solusi didalam mempertahankan perekonomian lokal, khususnya dalam rangka menghadapi MEA. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif terhadap beberapa KUD di Riau, dan analisis perbandingan dengan KUD lain. Didapati kebanyakan KUD tidak aktif disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga diperkirakan apabila tidak dipulihkan “restorasi” akan stagnan dalam waktu yang relatif lama. Melalui pendekatan teori organisasi sebagai rekomendasi yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Untuk memulihkan organisasi dianjurkan agar mencangkok beberapa teori organisasi “*hybrid organizations theory*” diantaranya melakukan *reinventing* dan “*reengineering*” organisasi, disertai dengan menampilkan organisasi yang kuat “*robust organization*” dan melakukan proses pembelajaran organisasi’ *Learning organization*. Cara kedua adalah dengan cara melakukan proses kebijakan dan aksi nyata pemerintah sebagai mentor dan koordinator dengan sinergitas harmonisasi lintas sektoral iaitu dari berbagai kekuatan birokrasi dari atas “*top down*”, kemudian ditindaklanjuti oleh birokrasi di tingkat bawah “*bottom up*”. KUD akan tampil sebagai potensi besar, siap bersinergi dan berkompetisi dalam arus global, khususnya dalam merebut peluang MEA.

Kata Kunci; organisasi KUD, restorasi, reengineering.

PENDAHULUAN

Dengan jumlah desa 64.439 tersebar di Indonesia, dimana hampir 70 persen warganegara bermukim di desa, potensi KUD sebagai lokomotif ekonomi adalah kekuatan yang besar memfasilitasi berbagai peluang ekonomi di desa. KUD pernah berperan sebagai agen modernisasi pertanian. Koperasi dan KUD mempunyai sejarah panjang sejak kolonial Belanda, tahun 50-an sebagai Koperasi Pertanian, Koperasi Kopra, Koperasi Karet dan lain-lain. Swasembada pangan tercipta bersama KUD. Konsep KUD yang sebelumnya melalui Badan Usaha Unit Desa (BUUD) merupakan wadah kegiatan koperasi pertanian dan



koperasi desa. KUD sudah memiliki pengalaman membantu pemerintah dalam menyediakan komoditas pangan, tatkala pemerintah mengalami krisis beras yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada Negara agraris ini. Inpres Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) dinyatakan “Pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral”.

Posisi KUD menghadang Negara Asean dari segala penjuru dapat dijadikan potensi ekonomi yang besar. Pada era reformasi ini, KUD kebanyakannya tidak aktif dan lumpuh, secara umum di Riau, 3000 koperasi termasuk KUD hanya 20 persen yang aktif selebihnya tutup. Anggota legislatif Riau Samsurizal menyarankan agar dinas koperasi ikut terlibat aktif membina KUD. (detakriau news 3 Agustus. 2015). Berdasarkan data BPS Riau, KUD di Riau hanya tinggal 404 unit saja lagi dari jumlah desa di Riau sebanyak 1. 846 buah. Secara umum koperasi yang aktif hanya tinggal 3.099 unit sedangkan 2.173 tidak aktif. Terjadi penurunan drastis anggota koperasi dari 629. 567 anggota tahun 2012 menjadi 541. 731 tahun 2015 (BPS Prov Riau : 2015) . Secara umum organisasi koperasi dan KUD cenderung tidak berkembang dan tidak menjanjikan. Pemerintah baru memverifikasi KUD di 15 provinsi, dan kebijakannya yang tidak aktif “dibubarkan”. Dari 10.677 hanya 7.088 yang aktif (Bisnis.com. 23 Juli 2013). KUD “mati suri”, dulunya begitu tren dan digandrungi pada era Orde Baru, namun kini pada zaman yang makin maju, KUD terabaikan bahkan mati suri. (Indonesiarayakini, 19 Februari 2016).

Semenjak lima tahun terakhir banyak yang mati. Pada sejumlah daerah sentra beras menunjukkan peran KUD relatif tidak ada lagi, tidak mengetahui keberadaan KUD (Kepala Subdivisi Regional Perum Bulog Kabupaten Indramayu Attar Rizal). Di Cirebon, Bulog hanya bekerjasama dengan Gabungan Kelompok Tani (Gabkoptan) demikian Ka Bulog Cirebon. KUD yang aktif hanya satu, dulu bisa mencapai 70 persen pengadaan. Tidak ada satu pun KUD dengan bekerjasama dengan Bulog Lampung demikian kepala divisi Regional Lampung Usep Karyana (Kompas, 02 Mei 2015). Pengurus KUD Sugih Tani di kecamatan



Ciawi kabupaten Bogor, tidak merasakan pembinaan pemerintah, kini anggota KUD tinggal 165 orang dari 2.551. Dulunya sumber masukan dari jasa pembayaran listrik PLN, karena teknologi pulsa token, kebanyakan pelanggan tidak lagi berurusan dengan KUD. (Indonesiarayakini, 19 Februari 2016). Kondisi KUD yang demikian hampir tidak mempunyai harapan untuk maju dan semestinya disikapi dengan aksi nyata direstorasi “dipulihkan”. Karena KUD bukan saja menjalankan aktivitas ekonomi, juga melambangkan spirit sosial budaya yang melekat dengan ekologi administrasi desa. Pada era Inpres Nomor 04/1987 pengembangan KUD, maju pesat sehingga memiliki peralatan modern waktu itu seperti *hand tractor* dan lainnya. Program yang mencontohkan kepada sistem *Farmer Association* di Taiwan tersebut hancur berantakan. (Syafri Manaf, Ketua PusKUD Riau, Pengawas Tingkat Nasional InKUD, Riaupos.co. 20 Juli 2013). Dalam konteks manajemen seperti ini, kesannya tidak stabil dan terabaikan. Dari kacamata manajemen sukses, Meyer (2013:6) menyatakan : “*organizations which are unstable and neglect the lesson of the past, have no future.*” Organisasi yang tidak stabil dan terabaikan menandakan tidak bermasa depan.

METODOLGI PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan (1) Untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah yang menimbulkan lemah KUD dan (2) Untuk memberikan rekomendasi dari pendekatan teori organisasi sebagai alternatif solusi dalam pemulihan dan pengembangan KUD agar berperan aktif dalam percaturan MEA. Sedangkan analisis penelitian dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistik dan interpretatif pada penelitian kualitatif sumber-sumber jamak dan pendekatan naratif yang tersedia bagi penelitian dalam (Herdiansyah, 2010 :7) (Sugiyono, 2013:12) penelitian kualitatif dimana *salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Moleong, 2005:4).* Memandang dan menganalisis objek bersifat umum (Sugiyono, 2013; 19) riset penomena (Craswell, 2009). Teknik pengumpulan data



dilakukan teknik observasional, dokumenter, dan wawancara baik langsung dan tidak langsung dengan bantuan alat komunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Victor A. Thompson dalam Thoha (2008 :65) menyatakan bahwa: "Suatu organisasi yang sangat memperhatikan pengintegrasian dari orang ke orang dan bukan perseorangan dan yang dirasionalkan sejumlah besar spesialis yang bekerjasama untuk mencapai beberapa sasaran spesifik". Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. (Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 4) Weber dalam Gudono, (2015 : 32) "birokrasi sebagai bentuk organisasi yang menekankan presisi (kesaksamaan) , kecepatan, kejelasan, regulitas, keandalan dan efesiensi. Oleh Kettl dinyayakan karekteristik administrasi Negara kontemporer bahwa : " *public administrators must also manage complex networks, ... in terms of negotiation and coordination skills, provide channels for citizens to participate, and supply bottom-up accountability to the public* (Kettl , 2002: 169-70). "has "toward theories of cooperation, networking, governance, and institution building and maintenance" Fredrickson (1999 : 702)

Beberapa tipologi organisasi pemerintah modern *rely more on interpersonal and inter-organizational processes, use information technology and performance management effectively, provide transparency, build human capital* (Koppell, 2010,546). Menurut Bourgon (2007) Pemerintahan yang governance (1) *building collaborative relationships with citizens and groups of citizens* (2) *Seeking opportunities to involve citizens in government activities*" Secara global tampilan pemerintah *government must to do to adapt and respond to rapidly change international economic, social, political and technological trend*". (Rondinelli, 2011:116)Kemandirian desa KUD dapat membangun Indonesia dari pinggiran "Nawacita"

Permasalahan KUD dan pembahasan ; Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan KUD tidak aktif, lumpuh diantara penyebabnya antara lain (1) Minimnya pengetahuan organisasi dan kemampuan manajemen dalam



mengelola organisasi. Perlu dilakukan pembelajaran organisasi kepada pengurus KUD. Organisasi belajar merupakan kesempatan untuk mempelajari ketrampilan baru atau menerapkan arena baru sebagai motivator penting di dalam lingkungan yang bergolak, karena hal ini diorientasikan untuk menjamin masa depan. Kanter (1997:172), (2) Tidak adanya sumber usaha yang pasti mesti dilakukan. Masyarakat desa di Riau lautan, bergantung pada usaha karet, kini harga karet jatuh drastik. Padahal berada ditepi selat Melaka. Kebijakan lintas batas era baru justru dikalahkan oleh budaya semokel, karena regulasi yang kaku, kurangnya pengarahan “*directing*” dan penggerakan “*actuating*” (Tarmizi Yusa, 2014) (3) Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah. (4) rendahnya nilai-nilai kejujuran, tanggungjawab, integritas pengurus.) *as the quality of being honest and having moral principle*. Ketidakkejujuran membuat anggota jera. “*you do not have people to make people to like tou. In fact you do not care they like your or not*. (Vong, 2010 : 153-154) (5) Minimnya wawasan kewirausahaan, jaringan serta tidak memiliki visi. (6) Mekurangan Modal usaha dan mentalitas sudsidi yang membudaya. (7) tidak jelasnya status KUD, kondisi tidak bermasa depan tidak dibina dan sehingga tidak berkembang dan mati. (8) terakhir kurangnya perhatian dan pembinaan untuk pengembangan KUD dari pemerintah, cendrung mengidentifikasi dan mematikan yang tidak aktif ketimbangan memulihkan dan mengembangkan. Kemudian dari hasil penelitian dari delapan KUD, enam tidak aktif, lumpuh sama sekali. Dua diantaranya yang aktif berada di Riau daratan, itupun satu yang aktif,karena suntikan dana usaha ekonomi desa (UED) menjalankan usaha simpan pinjam. Justru itu pemda Bengkalis berwacana akan mengelola dana tersebut melalui KUD, namun sampai hari ini belum terealisasi. Satu lagi aktif karena secara kebetulan di desa Koto Baru kabupaten Kuantan Sengingi bermitra dengan perusahaan perkebunan. Kepala desa kini sebelumnya sebagai tokoh pemuda, tokoh reformis pendobrak kelumpuhan manajemen KUD kemudian memulihkan KUD “Tani Sepakat” berkembang. Akhirnya beliau dipercayai masyarakat dipilih menjadi kepala desa. Namun kondisi KUD lainnya lumpuh tidak aktif sama sekali “ mati suri”.



Pendekatan Teori Organisasi; Rekomendasi teoritis terhadap kelompok KUD dengan melakukan pemulihan “restorasi, dengan mencangkok beberapa teori organisasi *hybrid organizations theory*, diantaranya melalui *reinventing* dan rekayasa ulang “*reengineering*” merehabilitasi hal-hal perlu pada organisasi KUD. Bennis dan Mische (1999) (Hendry R. Meyer. 2013: 48-49) memberikan rekomendasi dengan melakukan rekayasa ulangan alasannya : “Organisasi tidak dapat berhasil dimasa yang akan datang kecuali bila mereka saat ini merekayasa ulang dirinya”. Melakukan rekayasa ulang organisasi seperti (1) Visi yang berani. (2) Ancangan yang sistematis, berjangkauan luas, berimplikasi luas. (3) memiliki maksud dan mandat yang jelas, (4) Metode yang spesifik, tidak kaku pada aturan organisasi berkembang, (5) Kepemimpinan yang efektif kredibel, trampil, karakter tanpa cela. Juga dilakukan *reinventing* untuk mengubah strategi pencapaian dalam membangun kembali usaha-usaha produktif dan marketable. Dalam konteks ini *reinventing* “in their masterpiece *Reinventing Government: community-owned; thus, it should empower its citizens and community to solve their own problems. Government must be competitive to achieve greater efficiency*” Osborne dan Gabler (1992), Champy (2007:11) dan Bennis (1999). *Reinventing* dan *reengineering* agar outcome optimal.

Setelah organisasi direkayasa ulang “*reengineering*”, kemudian perlu mengupayakan tampilan organisasi yang kuat “*robust organization*”. (1) *Processing or characteristic by great strength or endurance, rugged, healthy* (2) *requiring strength* (3) *violent rude*. Artinya organisasi yang kuat memiliki karakter kuat atau berdaya tahan banting, bekerja keras, dan sehat sehingga menampilkan organisasi yang siap ditempa dengan keras. (Stimson, 1996 :3) Organisasi yang kuat itu bersifat padu/kompak, kokoh, mampu beradaptasi, digerakkan oleh kekuatan penuh (*full*) melakukan perubahan yang bersifat kondisional sebenarnya “*spot*” hanya melakukan perubahan atau memperbaiki aspek penting saja dan tidak perlu merombak secara total melibatkan semua struktur. Selanjutnya dalam memperdalam pengetahuan organisasi dan manajemen perlu diterapkan proses pembelajaran organisasi melalui tahap-tahap *Personal Mastery*; Organisasi pembelajaran memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi yang



tinggi, kedua, (2) *System Thinking*; Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis (3) *Team Learning*; berbagi wawasan, belajar bersama-sama dan sama-sama belajar untuk menambah modal intelektualnya (4) *Mental model*; memungkinkan manusia bekerja lebih cepat dalam organisasi yang terus berubah, mental model tidak menghambat adaptasi yang dibutuhkan. (5) *Shared Vision*; Untuk menggerakkan organisasi pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus pada pencapaian tujuan bersama (Peter Senge, 2004).

Terdapat dua cara memulihkan Koperasi. Pertama melalui proses kebijakan dari atas, dengan memperkuat koodinasi lintas sektoral dengan mengedepankan peran Kementerian/Dinas/UPT koperasi sebagai leading sektor menyelaraskan sebagai "koordinator" lakukan aktifitas dengan "tuntas" bekerja berdasarkan akuntabilitas publik. Dapat di aplikasikan Klinik Kewirasusahaan" sebagai bengkel menggableng KUD yang lumpuh baik dalam bentuk seminar, simposium, workshop, pembinaan on the spot, maupun melakukan penilaian berkala secara terukur. Setelah itu dibuat stimulant yang sifatnya kompetitif.

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) wilayah ASEAN, pasar tunggal kawasan terpadu luas sekitar 4,47 juta km, lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara berkolaborasi dan berkompetisi menyikapi peluang MEA. Para anggota dapat merebut peluang, memacu daya saing ekonomi kawasan Asean dengan indikasikan melalui terjadinya arus bebas (*free flow*) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Hingga saat ini, terdapat 7 jenis produk yang menjadi prioritas mereka. (1) Produk karet (2) Obat tradisional (3) Kosmetik (4) Pariwisata (5) Sayur dan buah segar (6) Udang dan budidaya perikanan (7) Ternak. Hampir semua item diatas bagian dari potensi desa yang dapat dijadikan komoditas bagi desa-desa merebut peluang MEA. Potensi-potensi desa desa Indonesia yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara merupakan potensi besar mengepung pasar Asean. Oleh karenanya jangan pernah ragu dengan potensi besar desa yang "spesifik, unik, *familiar, care, awareness*" asalkan selalu memiliki mindset "*improve, progress dan continue*" melalui restorasi dengan reinventing dan reengineering maka model masa depan



KUD digambarkan (1) Potensi organisasi; lama, tidak konfiden, tidak bervisi, rigid dan ke depan konfiden, visioner, kompetitif (2) Orientasi aktivitas; lama, bergantung dan tidak berkembang ke depan, independen, berkembang (3) Kesehatan Organisasi; lama, tidak sehat, lemah, tidak aktif, lumpuh paradigma baru sehat, kuat dan otonom (4) Jaringan Organisasi; Sempit, amat terbatas menjadi luas, tidak terbatas (5) Budaya kerja; dari *missmanagement* menjadi *Manegeable* (6) Pola kerja; sebagai Pengumpul, penyalur terbatas dan ke depan sebagai produsen yang marketable, mampu bersaing dalam pasar MEA. Keberadaan KUD yang menyebar diseluruh pelosok tanah air ditambah pula modal manusia desa yang solider merupakan peluang besar untuk berkembang. Keberadaan KUD yang menyebar diseluruh pelosok merebut peluang MEA, Kotler (et.al) : *“Lupakan dunia, Berpikir ASEAN, bertindak lokal.....para pemenangnya dalam globalisasi tidak hanya Negara-negara maju dan kaya* (Kotler, et.al 2011) ke depan nasib organisasi KUD sebagaimana dikatakan Senge *“semakin banyak institusi besar dan jaringan kerja yang menghubungkan para pemikir dan yang lain, membentuk dunia kita, baik dan buruk. Adalah bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan kita bergantung pada kecerdasan kolektif mereka.* (Peter Senge dalam Subir Chowshury et. al. 2005).

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan KUD dalam keadaan tidak aktif, lumpuh, perlu dipulihkan “direstorasi”. Diantaranya secara garis besar terdapat tiga faktor penyebab, (1) *missmanagement* dan lemahnya jaringan usaha. (2) persoalan sikap tidak berintegritas dan budaya kerja gampang menyerah, tidak ulet dan (3) akhir-akhir ini terjadi kealfaan pemerintah membina dan mengembangkan KUD. Rekomendasi dari persoalan tersebut dianjurkan untuk mengadopsi teori-teori pengembangan organisasi dalam kontek *reinventing* dan *reengineering* agar KUD kuat “robust” dapat berkompetisi merebut peluang MEA, akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Tarmizi, Ahmad. (2014). *Riau Dalam Percaturan Masyarakat Ekonomi Asean "MEA" Belajar dari Pengalaman Kebijakan Masa Lalu* (hal 18-19). Pekanbaru : Jurnal Siasat Volume 7 April 2014.
- Warren, Bennis dan Michael Mische. (terj) Irma Andriani. (1999). *Organisasi Abad 21, Reinventing Dan Reengineering*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- James, Champy A . (terj) Achmad Kemal (1997). *Bersiap Menghadapi Perubahan Organisasi* (ed) Frances Hesselbein. (et,al) *The Organization of the Future "Organisasi masa depan"*. Jakarta" Gramedia.
- Gudono. (2015). *Teori Organisasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta. (BPFE) UGM.
- Koppell. (2010). *Administration Without Border . Special Issue on the Future of Public Administration in 2020*. Vol 70, (page.546-555). *Public Administration Review*.
- Henry. Meyer R. (2013). *Why Some People Succeed in Management*. Petaling Jaya,Malaysia: Golden Books Centre Sdn Bhd.
- Lexy, Moleong J .(2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Senge M. Peter . (2004) *Living learning A Conversation with LIA* . Volume 24 Number 3 July-August
- Stimson A. William. (1996). *The Robust Organization. Transforming Your Company Adaptive Design*. Chicago. Irwin Professional Publishing.
- Vong Elvin (2010). *Leadership and Motivation, The Key to Achieving What Your Want to Live*. Subang Jaya Malaysia. Pelanduk Publications.
- Negara Republik Indoensa . *Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian*
- Negara Republik Indoensa. *Inpres RI No.4 Tahun 1984*. Tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD
- Harian/Media massa; Riaupos.co. 20 Juli 2013 - Bisnis.com 23 juli 2013; Harian indonesiarayakini.com. 23 Juli 2013; Kompas. 19 Agustus 2014;, 02 Mei 2015; Indonesiarayakini. 19 Februari 2016



PENINGKATAN KETERAMPILAN WANITA PESISIR DALAM MENGHADAPI MEA DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

Istiko Agus Wicaksono, S.P., M.Sc., Isna Windani, S.P., M.Sc., dan Arta Kusumaningrum, S.P., M.Sc.
Universitas Muhammadiyah Purworejo
arta.kusumaningrum@gmail.com

ABSTRAK

Dewasa ini isu MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menjadi perhatian besar bagi negara ASEAN khususnya negara kita. MEA merupakan perdagangan bebas tingkat ASEAN yang menjadi *warning* untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut. Kreatifitas dan keterampilan sangat diperlukan untuk mempertahankan produk agar tetap eksis di pasaran. Hal tersebut juga menjadi perhatian bagi wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui keterampilan wanita pesisir dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi dan (2) Mengetahui cara wanita pesisir dalam meningkatkan pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi. Metode yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif, diskriptif analisis. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball* bagi wanita pesisir yang melakukan olahan produk dari ikan di Kecamatan Purwodadi. Hasil penelitian ini: 1) Keterampilan yang dimiliki wanita pesisir dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi yaitu membuat aneka hidangan siap saji, membuat peyek teri, bandeng presto, dan ikan kering. 2) Cara wanita pesisir dalam meningkatkan keterampilan pengolahan produk ikan yaitu dengan cara melibatkan pemerintah lokal, perguruan tinggi lokal, pengusaha, dan pedagang.

Kata kunci: MEA, Wanita Pesisir, Produk, Hasil Laut

ENHANCEMENT OF SKILL COASTAL WOMEN TO FACE MEA IN DISTRICT PURWODADI MEA, DISTRICT PURWOREJO

ABSTRACT

The issue of AEC (Asean Economic Community) or MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) is great concern for ASEAN countries, especially Indonesia. MEA is an ASEAN free trade that be a warning to prepare a strategy of free trade. Creativity and skill is necessary to maintain a product to keep exist in the market. It is also a concern for coastal women in the Purwodadi District. Coastal women in the Purwodadi Distrcit has mainstay products such as consumption of a variety of seafoo . The objectives are: (1) Determining the skills of coastal women for Processing fish Product in Purwodadi District and (2) Determining women coastal to increase of skills processing fish product skills in District Purwodadi. The analysis method was conducted by descriptive analysis. Mechanical Sampling technique using snowball for women coastal who has Processed Products From fish in District Purwodadi. The result showed that: (1) The skills of coastal



women for processing fish product in District Purwodadi is various food from fish, peyek teri (local name), presto, and dry fish. (2) For improving skills of coastal women in Purwodadi District by involving Local Government, Local University, Entrepreneur, and Merchants.

Key words: MEA, Women in Coastal Areas, Product, Seafood

PENDAHULUAN

Secara teoritis, kegiatan pembangunan nasional suatu bangsa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang lazim disebut dengan *global governance*. Masyarakat jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi (Usman, 2012).

Seperti dewasa ini, masyarakat Asean sedang menghadapi perdagangan bebas MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sudah mulai kita rasakan. Produk-produk dari negara tetangga sudah membanjiri mall, supermarket, bahkan di pasar tradisional sekalipun. Hal ini yang menjadi keprihatinan sekaligus tugas untuk kita semua dalam menghadapi perdagangan global khususnya MEA di lingkup ASEAN.

Untuk menghadapi perdagangan global khususnya MEA, wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi mempersiapkan diri beserta kelompok untuk meningkatkan keterampilan dalam hal pengolahan produk ikan. Peningkatan keterampilan bagi wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi dalam rangka mempertahankan eksistensi produk olahan mereka. Hal ini sebagai “senjata” bagi wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam laut dengan baik. Kekayaan alam laut ini yang sebaiknya menjadi fokus bagi wanita pesisir dalam menghasilkan olahan yang diminati di pasaran baik pasaran lokal, nasional bahkan lintas negara. Pentingnya menjalin kerjasama antara wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan *stakeholder*, LSM, peneliti, Universitas lokal, dan pemerintah untuk memperluas skala usaha dan pemasaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui keterampilan wanita pesisir dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi dan (2)



Mengetahui cara wanita pesisir dalam meningkatkan pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi.

METODE PENELITIAN

Metode dasar untuk penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Deskriptif ini bertujuan menginterpretasikan data yang didapatkan di lapangan. Cara pengambilan sampel dilakukan secara snow ball. Teknik ini bermanfaat untuk menemukan, mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan (Nurdiani, 2014). *Snow ball* pada penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa yang dicari berdasarkan tujuan penelitian yaitu wanita pesisir yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan produk ikan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan *indepth interview* kepada informan kunci yang mengetahui secara mendalam mengenai pengolahan ikan khususnya di Kecamatan Purwodadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterampilan Wanita Pesisir dalam Pengolahan Produk Ikan di Kecamatan Purwodadi

Kecamatan Purwodadi merupakan daerah yang memiliki potensi baik darat maupun laut. Hal ini yang menyebabkan Kecamatan Purwodadi perlu mendapatkan perhatian lebih agar dapat dikembangkan lagi potensi-potensi yang belum tergali secara maksimal. Dalam penelitian ini, fokus penelitian di Kecamatan Purwodadi difokuskan pada kekayaan lautnya. Dimana, sumber daya manusia diharapkan mampu memanfaatkan potensi alam untuk kesejahteraan masyarakat baik lokal, nasional, bahkan internasional.

Fokus kedua dalam penelitian ini adalah wanita pesisir. Peran serta wanita di pesisir Kabupaten Purworejo nampaknya perlu digali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo. Bagaimana tidak laki-laki yang berperan sebagai nelayan sejatinya tidak hanya cukup apabila mengandalkan dari hasil nelayan saja. Selain itu juga



mengikutsertakan wanita dalam peran serta di sektor ekonomi membuat wanita pesisir menjadi wanita yang mandiri. Pada Tabel 1 menunjukkan variasi keterampilan yang dimiliki wanita pesisir di Kabupaten Purwodadi.

Tabel 1. Variasi Keterampilan Wanita Pesisir dalam Pengolahan Ikan di Kecamatan Purwodadi

Nama	Usia	Pendidikan	Keterampilan
Rundiyah	45	SLTP	Membuat aneka hidangan dari ikan dan bandeng presto
Warjiyah	45	SD	Peyek ikan teri
Ngatinah	53	SD	Membuat aneka hidangan dari ikan
Siti Lestari	27	SLTP	Membuat aneka hidangan dari ikan
Kasmini	45	SLTP	Membuat aneka hidangan dari ikan
Subekti Mulyani	52	SD	Membuat ikan kering
Lilis	37	SLTA	Membuat aneka hidangan dari ikan
Suci	33	D3	Membuat aneka hidangan dari ikan
Sulastri	30	SD	Membuat aneka hidangan dari ikan
Rini Hastuti	48	SLTP	Membuat aneka hidangan dari ikan

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Mendasarkan Tabel 1 menunjukkan keterampilan wanita pesisir dalam pengolahan ikan di Kecamatan Purwodadi paling banyak membuat aneka hidangan dari ikan. Hidangan ikan ini disajikan apabila konsumen atau wisatawan datang ke lokasi. Hal ini dikarenakan hidangan ini bersifat langsung konsumsi, tidak tahan dalam waktu yang lama. Sedangkan, keterampilan wanita pesisir yang lain adalah membuat bandeng presto, peyek ikan teri, dan ikan. Namun masih sedikit wanita pesisir yang memiliki keterampilan tersebut. Berdasarkan Tabel 1 di atas diperlukan peningkatan keterampilan khususnya dalam membuat variasi olahan ikan yang bersifat kering agar memiliki daya tahan yang lama.

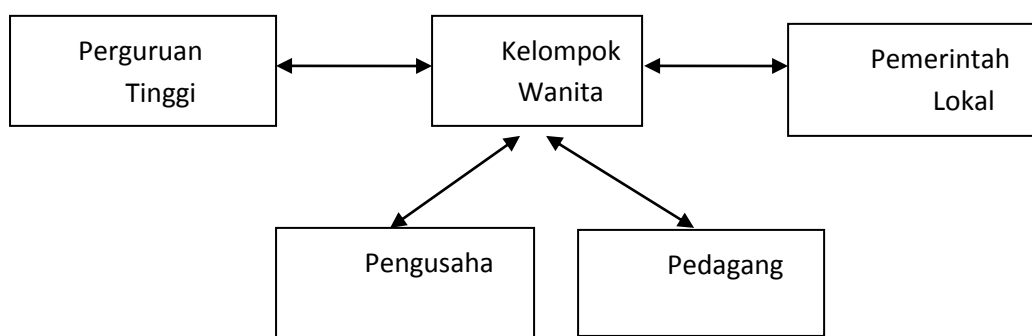
Cara wanita pesisir dalam meningkatkan pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi.

Cara yang dilakukan wanita pesisir untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi yaitu dengan cara melibatkan pemerintah lokal, perguruan tinggi, pengusaha dan pedagang untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan produk ikan. Hal ini dapat



dikatakan sebagai pengembangan komunitas atau *community development*. *Community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional (Soetomo, 2010).

Dalam meningkatkan keterampilan wanita pesisir dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi melibatkan pemerintah lokal, perguruan tinggi, pengusaha, dan pedagang dapat dijelaskan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Kerjasama Wanita Pesisir untuk Meningkatkan Keterampilan dalam Pengolahan Produk Ikan di Kecamatan Purwodadi

Dalam melibatkan pemerintah lokal, perguruan tinggi, pengusaha, dan pedagang dalam peningkatan keterampilan dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi memiliki fungsi dan manfaat masing-masing.

- Kelompok wanita pesisir merupakan kelompok sasaran yang akan ditingkatkan keterampilannya dalam hal pengolahan produk ikan.
- Pemerintah lokal berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengakomodir kebijakan, ataupun program pemberdayaan yang berfungsi untuk meningkatkan keterampilan wanita pesisir dalam hal pengelolaan produk ikan.
- Perguruan tinggi atau pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi



dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan (UU RI No 12 Tahun 2012).

- d) Pengusaha memberikan manfaat dalam menanamkan modal atau investasi kepada wanita pesisir untuk meningkatkan variasi produk dalam pengolahan ikan.
- e) Pedagang memberikan fungsi dalam memberikan informasi minat dan kesukaan konsumen dalam suatu produk serta menyediakan jaringan pasar untuk memperluas skala penjualan produk ikan dari wanita pesisir di Kecamatan Purwodadi.

PENUTUP

Keterampilan yang dimiliki wanita pesisir dalam pengolahan produk ikan di Kecamatan Purwodadi adalah membuat aneka hidangan siap saji, membuat peyek teri, bandeng presto, dan ikan kering. Sedangkan cara wanita pesisir guna meningkatkan keterampilannya dengan melibatkan pemerintah lokal, perguruan tinggi lokal, pengusaha, dan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdiani, Nina. (2014). Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan. ComTech Vol. 5 No.2 Desember 2014.
- Soetomo. (2010). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Sunyoto. (2012). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. [Www.Risbang.ristekdikti.go.id](http://www.risbang.ristekdikti.go.id). Diakses pada tanggal 19 September 2016.



POSISI SOSIAL DAN ARAH TRANSFORMASI MASYARAKAT MARITIM (Studi Kasus pada Komunitas Masyarakat Maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan)¹

Eymal B. Demmallino, M. Saleh S. Ali, Abd. Qadir Gassing, Munsil Lampe,
La Nalepo dan Sri Rezki Eskawaty Rosmala

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi sosial komunitas masyarakat maritim dalam konteks perilaku ekonomi kemaritiman dan berupaya menentukan arah bagi transformasi sosio kulturalnya dalam upaya membangun peradaban kemaritiman di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode *verstehen* (kualitatif interpretative) terhadap posisi sosial masyarakat maritim dan kemungkinan pilihan atas arah dalam proses transformasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi sosial komunitas masyarakat maritim berada pada posisi yang ditandai dengan perilaku ekonomi bermentalitas **kelemah adab~karsaan**, dimana di satu pihak pemilik modal cenderung berperilaku lemah adab (mengeksploitasi pekerjanya) sebagai konsekuensi dari pengaruh kapitalisme dan di pihak lain para pekerja cenderung berperilaku lemah karsa (tidak produktif, ketergantungan yang berlebihan~pasrah, dan bergaya hidup konsumtif) sebagai konsekuensi dari pengaruh sufisme klasik. Diperparah lagi dengan hadirnya modernisasi (teknologi percepatan~karbitan) yang tidak relevan dengan potensi kemaritiman dan ketidakberpihakan penentu kebijakan yang berakibat lebih jauh pada patologi sosial (saling merenggut), kerusakan lingkungan, dan penghancuran budaya lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengarahkan transformasi sosio kultural komunitas masyarakat maritim pada upaya menumbuhkan~kembangkan perilaku ekonomi yang bermentalitas **kekuat adab~karsaan** sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban kemaritiman. Dalam upaya ini keberpihakan pemerintah dan pilihan teknologi yang tepat dalam mewujudkannya juga mutlak diperlukan.

Kata Kunci : Mentalitas, Perilaku Ekonomi, Pilihan Teknologi, Keberpihakan, Posisi dan Transformasi Sosio Kultural.

¹ Tulisan ini merupakan seri keempat dari kelima atau keenam seri yang direncanakan, yang keseluruhannya disarikan dan dikembangkan dari hasil kajian disertasi penulis utama yang berjudul **Transformasi Sosio Kultural : Menggagas Pembaharuan Masyarakat Maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan** yang kemudian diperkuat dengan kajian selanjutnya bersama anggota tim penulis dengan judul: **Siratal Mustaqim : Menggagas Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Maritim di Sulawesi Selatan. Disajikan pada Seminar Nasional Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sub Tema "Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era MEA" di Program Studi PKP Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 8 Oktober 2016.**

² Penulis Pertama dan Kedua adalah Tenaga Akademik pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS Makassar, Penulis Ketiga adalah Tenaga Akademik pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Penulis Keempat adalah Tenaga Akademik pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNHAS Makassar, Penulis Kelima adalah Tenaga Akademik pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari, dan Penulis Keenam adalah Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung. Kontak Person : demmallino1964@yahoo.com.



SOCIAL POSITION AND DIRECTION OF MARITIME SOCIETY TRANSFORMATION

*(Case Study on Community Maritime Affairs
Bugis Makassar South Sulawesi)*

ABSTRACT

*The study aimed to analyze the social position of the maritime community in the context of maritime economic behavior and attempt to determine the direction for socio-cultural transformation in an effort to build a maritime civilization in State Bugis Makassar South Sulawesi. This study uses Verstehen (qualitative interpretative) to the maritime community's social position and the possibility of choice over the direction of its transformation process. The results showed that the social position the maritime community in the position marked with the mentality of economic behavior *kelemah adab* ~ *karsaan*, where on the one hand weak capital owners tend to behave in manners (exploit workers) as a consequence of the influence of capitalism and on the other, workers tend to behave weak intention (not productive, excessive dependence ~ resigned, and consumptive life style) as a consequence of the influence of classical Sufism. Worsened by the presence of modernization (acceleration technology ~ carbide) that are not relevant to the potential maritime and impartiality of policy makers resulting in further social pathology (each claimed), environmental destruction, and the destruction of the local culture. This study merekomendir necessity of directing the transformation of socio-cultural community of the maritime community in efforts to grow ~ develop economic behavior that mentality *kekuat adab* ~ *karsaan* as a major foundation in building a maritime civilization. In this effort the government alignments and selection of appropriate technologies to realize it is absolutely necessary.*

Keywords: *Mentality, Economic Behavior, Technology Options, alignments, position and Socio Cultural Transformation.*

PENDAHULUAN

Pertimbangan Objektif

(Temuan Seri Tulisan Sebelumnya)

Artikel pertama (yang berjudul : Kapitalisme dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Maritim) dan artikel kedua (yang berjudul : Sufisme dan Perilaku Ekonomi Masyarakat Maritim) dari seri tulisan penulis terdahulu menemukan bahwa masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan berada di bawah pengaruh Kapitalisme Barat~Sekuler khususnya pada kalangan pemilik modal (*borjuis*) dan pengaruh sufisme klasik khususnya bagi kebanyakan pekerja (*proletar*). Dengan demikian dalam struktur sosial ekonomi komunitas masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan hingga dewasa ini masih tetap diwarnai oleh apa yang disebut dualisme ekonomi : sebuah



sistem ekonomi yang statis yang sama sekali tidak dapat diharapkan dalam membangun peradaban kemaritiman (Boeke, 1905 dalam Soewardi, 1995 : 5).

Temuan lainnya dikemukakan pada artikel ketiga (yang berjudul : Kebijakan dan Keterbelakangan Masyarakat Maritim). Tulisan pada artikel ini menegaskan bahwa keterbelakangan masyarakat maritim dewasa ini adalah juga disebabkan oleh luputnya perhatian pemerintah sejak era republik (kemerdekaan) khususnya di era pemerintahan Soeharto (orde baru) atau apa yang lebih populer disebut berpalingnya kebijakan pemerintah dari laut ke darat. Meski disadari bahwa sebenarnya ada upaya kemaritiman yang dilakukan di era pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan **revolusi biru**, tetapi upaya – upaya itu secara substansial lebih mencerminkan alih teknologi, seperti : percepatan pertumbuhan udang dan bandeng yang dilakukan melalui Program INTAM (Intensifikasi Tambak) pada Komunitas Pallawa dan percepatan pelayaran yang dilakukan melalui Program Motorisasi pada Komunitas Pakkaja dan Pasompe, dan keduanya berakhir dengan patalogi sosial (saling merenggut), perusakan lingkungan, dan penghancuran lokalitas budaya (navigasi tradisional) sebagai satu-satunya asset yang paling berharga dan dibangun secara nasional.

Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

(Dimana dan Seyogyanya Harus Kemana)

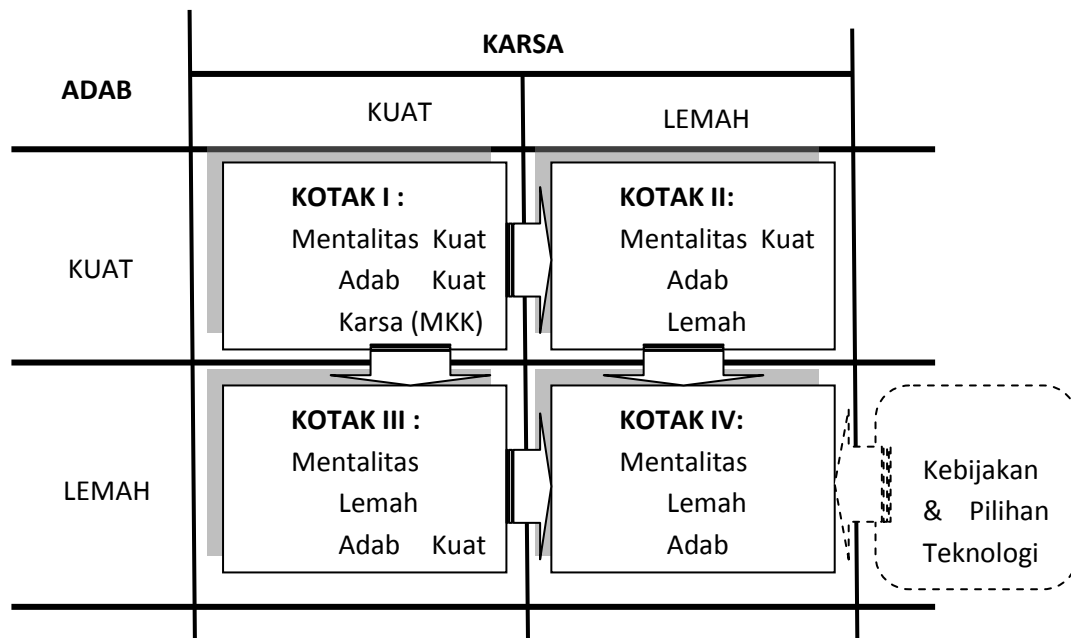
Berdasarkan temuan yang dikemukakan pada ketiga artikel tersebut di atas, penelitian ini mempertanyakan : pada posisi sosial mana masyarakat maritim berada (eksistensi) dalam kerangka Teori Adab~Karsa (Soewardi, 1995) dan seyogyanya kemana harus melangkah (kemana arah transformasinya) dalam mewujudkan peradaban kemaritiman di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan, khususnya dalam kerangka Teori Modernisasi Pembangunan (Ramos dalam Beling dan Totten, 1985). Sebuah versi modernisasi baru yang bertolak belakang dengan versi modernisasi yang selama ini kita pahami atau apa yang sering dipahami dengan istilah Eropanisasi. Tujuan penelitiannya adalah untuk menemukan posisi dan arah transformasi yang tepat dalam membangun peradaban kemaritiman.



Landasan Teoritis

(Teori Adab~Karsa dan Modernisasi Pembangunan)

Penelitian ini menggunakan Teori Transformasi yang digagas oleh Herman Soewardi (1995 : 1: Lihat Gambar 1), sebuah teori sosial yang tidak hanya bermaksud untuk menjelaskan posisi aktual masyarakat dalam konteks perubahannya tetapi juga sekaligus bermaksud untuk melangkah lebih maju dengan menunjukkan arah dari sebuah perubahan sosial yang dikehendaki. Teori seperti ini lebih tepatnya disebut Teori Sosial Profetik (Kuntowoyo, 1991: 288). Soewardi menyebut teori transformasi ini dengan nama Teori Adab~Karsa, sebuah teori peradaban yang diangkat dari perkembangan peradaban dunia, khususnya peradaban Islam yang pernah berjaya selama kurang lebih enam abad lamanya (abad VII ~ XIII M), sebuah peradaban yang dirintis oleh Rasulullah Muhammad SAW (pada abad VI M) dalam membangun “Kapitalisme Peradaban” yang belum adaandingannya di dunia manapun.



Gambar 1. Teori Adab~Karsa (Herman Soewardi, 1995) dan Teori Modernisasi (Ramos, dalam Beling & Totten, 1985)

Ditempatkan dalam Kerangka Teori Modernisasi Pembangunan (Ramos dalam Beling dan Totten, 1985) khususnya yang bertalian dengan Kebijakan (Keberpihakan) dan Pilihan Teknologi, Teori Adab~Karsa tersebut di atas nampaknya kurang memperhatikan atau mengabaikan aspek kebijakan



(keberpihakan) dan pilihan teknologi sebagai sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya ikut berpengaruh terhadap keterbelakangan masyarakat maritim. Dalam penelitian ini kedua teori itu disandingkan dalam upaya menerangi aspek-aspek struktural dan cultural yang menjadikan masyarakat maritim mengalami keterbelakangan (Lihat Gambar 1).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pemahaman (Verstehen, Weber dalam Ritzer dan Goodman, 2004 dan Kaelan, 2005) atau apa yang disebut “intensionalitas objek” (Berger, 1967) terhadap apa yang ditemukan dalam pengkajian terhadap kapitalisme, sufisme, dan kebijakan terhadap keterbelakangan masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan ~ sebagaimana yang telah dipaparkan pada Artikel Pertama, Kedua, dan Ketiga yang secara singkat dan substansial telah dikemukakan di muka pada bagian pertimbangan objektif. Penelitian ini diakhiri dengan pemikiran reflektif, yakni pengintuisian atas esensi objek yang dikaji atau tepatnya terhadap posisi dan arah transformasi sosio~kultural masyarakat maritim (Husserl, dalam Zubaedi, 2007 : 121-134). Termasuk di dalamnya refleksi teoretis dan implikasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Sosial Masyarakat Maritim

(Eksistensi Komunitas Maritim di Negeri Bugis Makassar)

Ditempatkan dalam kerangka Teori Adab~Karsa, maka dualisme ekonomi yang kini masih melanda komunitas masyarakat maritim menunjukkan bahwa posisi sosial masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar berada pada Kotak IV, sebuah kotak yang menunjukkan bahwa masyarakat maritim berada dalam dua pengaruh besar, yakni pengaruh Kapitalisme Barat~Sekuler dan pengaruh Sufisme Klasik (Islamisasi Nusantara) yang masuk ke Indonesia pada abad pertengahan (abad XIII M). Pengaruh kapitalisme ditunjukkan dengan perilaku eksploitatif dari kalangan pemilik modal baik terhadap pekerja, lingkungan, maupun terhadap budaya kemaritiman~sebagaimana yang telah



dibahas pada artikel pertama, sedang pengaruh sufisme klasik ditunjukkan pada rendahnya produktivitas, ketergantungan yang berlebihan dan gaya hidup konsumtif khususnya pada kalangan pekerja. Mengacu pada teori adab~karsa maka perilaku eksploitatif itu dipandang sebagai buah (konsekuensi) dari mentalitas kelemah~adaban atau mentalitas kuda lepas kandang (Soewardi, 1995) atau mentalitas menerabas (Koentjaraningrat, 1983), sedang rendahnya produktivitas, ketergantungan yang berlebihan, dan gaya hidup yang konsumtif dipandang sebagai buah dari mentalitas kelemah~karsaan. Dengan demikian perilaku ekonomi yang menggorogoti struktur sosial ekonomi masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan adalah dipandang sebagai konsekuensi dari mentalitas kelemah adab~karsaan, sebuah mentalitas yang tidak dapat diharapkan dalam membangun peradaban kemaritiman di masa datang.

Seiring dengan perkembangan modernisasi kemaritiman (khususnya pada pilihan teknologi) yang tidak mengakar pada budaya kemaritiman setempat dan ketidak berpihakan pemerintah selama periode orde baru, menuntut para pemilik modal untuk semakin meningkatkan investasinya sendiri, yang kemudian di satu sisi memperluas skala usaha atau tampak ada kemajuan tetapi disisi lain justru semakin memberi ruang yang semakin lebar bagi tumbuh suburnya perilaku eksploitatif, tidak hanya dari kalangan pemilik modal kepada para pekerjanya, malahan justru sebaliknya juga telah terjadi; sebuah patologi sosial yang ditunjukkan dengan perilaku saling merenggut. Ketika pemilik modal memperketat system bagi hasilnya dengan tujuan untuk mempercepat proses pengembalian investasi, sebaliknya kalangan pekerja melakukan penjualan hasil atau BBM di laut tanpa sepengetahuan pemilik modal, dengan alasan hasil usaha saat itu tidak cukup untuk dibagi. Perilaku saling merenggut seperti ini dalam istilah lokal disebut "Silukkakki". Dalam pandangan **Ramos** (dalam Beling dan Totten, 1985), modernisasi kemaritiman yang berwujud seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai modernisasi, terlebih pilihan teknologi yang digunakan tidak membawa peningkatan kesejahteraan bagi kalangan pekerja. Dengan kata lain program revolusi biru



yang awalnya digagas oleh pemerintah dapat dikatakan mengalami kegagalan total. Penyebabnya adalah di satu sisi karena ketidakberpihakan atau ketidakseriusan pemerintah pada pengembangan kemartiman dan di sisi lain karena pilihan teknologi yang digunakan tidak terkoneksi (Makagiansar, 1997) atau tidak bertubuh (Don Ihde dalam Lim, 2008) dengan potensi dan budaya kemaritiman setempat, atau tidak ramah lingkungan dan atau tidak berwajah kemanusiaan (Schumacher, 1979).

Arah Transformasi Masyarakat Maritim

(Seyogyanya Kemana Harus Melangkah)

Dengan menemukan dan memahami posisi sosial masyarakat maritim pada Kotak IV (dalam Kerangka Teori Adab~Karsa) atau apa yang disebut mentalitas kelemah~adab~karsaan, sebuah patologi sosial yang menggorogoti struktur sosial ekonomi masyarakat maritim dan terabaikannya mereka selama periode pemerintahan orde baru, maka sekarang pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana menyembuhkan penyakit mentalitas tersebut. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut pada artikel ini terlebih dahulu harus memilih atau menentukan arah bagi penyembuhan penyakit mentalitas masyarakat yang dimaksud. Upaya-upaya penyembuhan penyakit mentalitas tersebut, secara khusus akan dibahas pada artikel berikutnya.

Dengan tetap mengacu pada Teori Adab~Karsa, maka sekurang-kurangnya ada tiga arah bagi penyembuhan atau tepatnya arah transformasi sosio kultural masyarakat maritim yang dapat dipilih. Pilihan pertama adalah ke Kotak Peradaban Ke III : Kotak Barat Sekuler dengan alasan bahwa umumnya ponggawa besar dan sejumlah ponggawa kecil Komunitas Masyarakat Maritim telah memiliki mentalitas kekuat~karsaan dengan resiko akan tetap mengalami efek samping (memperparah penyakit mentalitas kelemah~adaban). Pilihan kedua adalah ke Kotak Peradaban Ke II : Kotak Muslim Indonesia Zaman Kolonialisme (abad pertengahan) dengan alasan bahwa kebanyakan Komunitas Masyarakat Maritim (khususnya pada Komunitas Pasompe) juga telah memiliki mentalitas kekuat~adaban (dalam arti Teologi Kehendak Mutlak Tuhan), tetapi dengan resiko akan mengalami efek samping (memperparah penyakit mentalitas



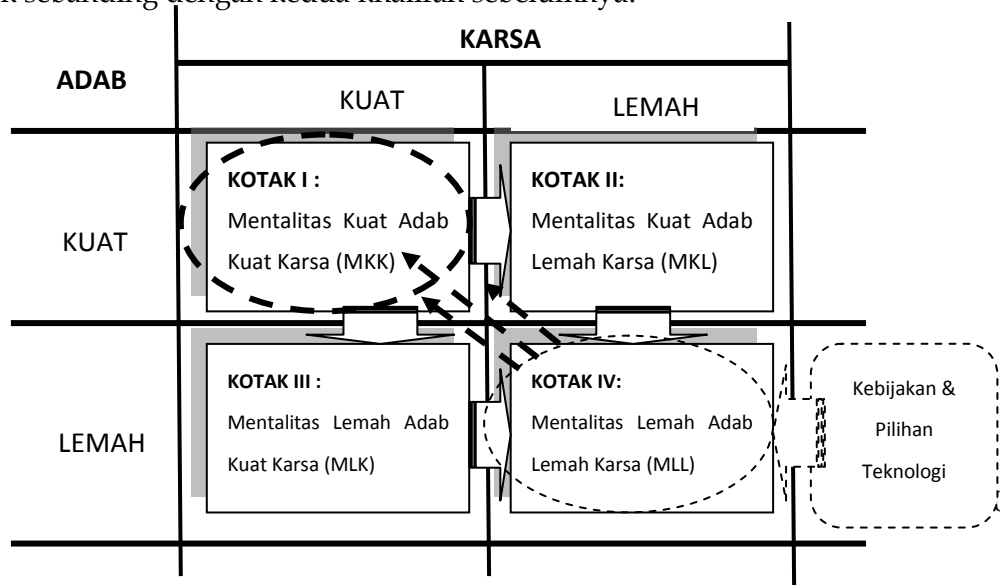
SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

kelemah~karsaan khususnya pada Komunitas Pallawa dan Pakkaja). Pilihan ketiga adalah ke Kotak Perabadan I : Kotak Muslim Zaman Klasik, sebuah kotak peradaban yang dipandang paling sempurna, yakni Kotak Mentalitas Kekuat~Adab~Karsaan (Lihat Gambar 2).

Kotak Peradaban I : Kotak Muslim Zaman Klasik adalah sebuah kotak peradaban yang dalam pandangan Kuntowijoyo (2008) mewarisi Peradaban Yunani~Romawi di Barat dan Peradaban Persia, India, dan China di Timur. Ketika kedua peradaban itu tenggelam dan mengalami kemunduran, Islam tumbuh dan berkembang mengambil peran sebagai pewaris utamanya dan berlangsung selama kurang lebih 6 ~ 8 abad lamanya. Peradaban Islam ini mulai dirintis dan dipraktikkan dengan sukses oleh Rasulullah SAW di Madinah (Ibu Kota Kekuasaan Islam Pertama). Robert N. Bellah (dalam Laode Kamaluddin, 2008) dengan tegas menyatakan : di tangan Muhammad SAW, masyarakat Madinah yang tadinya primitive “disulap” menjadi masyarakat yang sangat modern. Dari sini kemudian dilanjutkan oleh para sahabat (Khalifah Rasulillah) melalui perluasan dan pengembangan kekuasaan dengan membangun Kufah (Ibu Kota Kekuasaan Islam Kedua). Generasi berikutnya dilanjutkan dengan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus (Ibu Kota Kekuasaan Islam Ketiga) pada abad VI ~ VII M dan Islam mencapai puncak kejayaannya di tangan para Khalifah Bani Abbasiyah yang berpusat di Bagdad (Ibu Kota Kekuasaan Islam Keempat) pada abad VII ~ XIII M, serta tiga kerajaan Islam kemudian yang secara politik masih tetap bertahan hingga abad XVIII (Turki, Persia, dan India), meski kebesarannya tidak sebanding dengan kedua khalifah sebelumnya.





Gambar 2. Posisi dan Arah Transformasi Sosial Kultural Masyarakat Maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan

Dengan demikian pilihan yang paling tepat sebagai arah transformasi sosio cultural dalam menyembuhkan penyakit mentalitas masyarakat maritim di Negeri Bugis Makassar Sulawesi Selatan adalah pada Kotak Peradaban I : kotak masyarakat yang bermentalitas kuat adab~karsaan atau kebalikan dari kotak masyarakat bermentalitas lemah adab~karsaan sebagaimana yang terdapat atau ditemukan pada Kotak Peradaban IV. Sekarang pertanyaannya : Bagaimana mendorong mentalitas masyarakat maritim dari Kotak Peradaban IV ke Kotak Peradaban I dan gagasan seperti apa yang diperlukan. Jawabannya sekali lagi secara khusus akan dibahas pada Artikel berikutnya.

PENUTUP

Refleksi Teoretis dan Implikasi Kebijakan

Secara teoretis, temuan ini memperkuat dan memperjelas “dualisme ekonomi” yang ditemukan Boeke dalam kajian disertasinya di Pulau Jawa (dalam Soewardi, 1995). Sebuah struktur sosial ekonomi yang tidak saling menopang dan kemudian semakin diperparah dengan hadirnya modernisasi dalam bentuk pilihan teknologi yang tidak relevan dan ketidak berpihakan dari pihak penentu kebijakan. Kondisi ini dalam perkembangannya semakin memberi ruang bagi tumbuh suburnya mentalitas lemah adab~karsaan yang kemudian menempatkan komunitas masyarakat maritim pada Posisi Kotak IV dalam Teori Adab~Karsa (Soewardi, 1995); sebuah posisi sosial yang sangat tidak dapat diharapkan dalam membangun peradaban kemaritiman.

Selanjutnya, dalam upaya mentransformasi struktur sosial ekonomi komunitas masyarakat maritim yang kini masih berada pada Kotak IV sebagai upaya membebaskan diri dari pengaruh kapitalisme dan sufisme klasik, penelitian ini merekomendir untuk mengarahkan transformasinya pada Kotak I : Kotak Masyarakat Bermentalitas Kuat Adab Karsa ~ sebagaimana telah berhasil diterapkan oleh para khalifah dalam membangun peradaban Islam; sebuah peradaban terbilang sukses dan terlama dalam sejarah peradaban dunia. Dalam



upaya mendorong transformasi sosio cultural dari Kotak IV ke Kotak I tersebut, keberpihakan pemerintah mutlah diperlukan, baik itu dari segi kebijakan, program, maupun pilihan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Demmallino, Eymal B. 1988. (2011). Transformasi Sosio-Kultural : Menggagas Pengembangan Masyarakat Maritim di Negeri Bugis~Makassar Sulawesi Selatan (Disertasi Doktor Program Pascasarjana Konsentrasi Sosial Ekonomi Pertanian UNHAS : 2006 ~ 2011).
- Demmallino, Eymal B. at al. (2016). Policy and Backwardness of Maritime Society Case Study on Community Maritime Affairs Bugis Makassar South Sulawesi. Canada : Journal Of Sustainable Development, Vol 9, No 4 (2016 : 144 - 150). Canadian Center of Science and Education.
- Demmallino, Eymal B. at al. (2016). Sufism and Behavior of Maritime Economic Community (Case Study on Pakkaja Community in South Sulawesi). Canada : Journal Of Sustainable Development, Vol 9, No 3 (2016 : 136 0 146). Canadian Center of Science and Education.
- Demmallino, Eymal B. at al. (2016). The Capitalism and Economic Behavior of the Maritime Community A Case Study of the Pasompe' Community in the Bugis Makassar Land of South Sulawesi. Canada : Journal Of Sustainable Development, Vol 9, No 1 (2016 : 44 - 54). Canadian Center of Science and Education.
- Demmallino, Eymal B. dkk. (2016). Siratal Mustaqim : Menggagas Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Maritim di Sulawesi Selatan. Makassar : Kerjasama LPPM UNHAS dengan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Hamid, Abu. (2005). Pasompe : Pengembaraan Orang Bugis. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Kaelan. (2005). Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat : Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Inter-disipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni. Yogyakarta : Paradigma.
- Kamaluddin, Laode. (2008). Rahasia Bisnis Rasulullah : 12 Rahasia Besar Kepemimpinan Rasulullah dalam Membangun Megabisnis yang Selalu Untung Sepanjang Sejarah. Semarang : Wisata Ruhani Pesantren Basmala.
- Koentjaraningrat. (1983). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam : Interpretasi untuk Aksi. Bandung : Mizan.
- Lim, Francis. (2008). Filsafat Teknologi Don Ihde tentang Dunia, Manusia, dan Alat. Yogyakarta : Kanisius.
- Makagiansar, Makaminan. (1997). Meneropongi Perguruan Tinggi Indonesia dalam Dunia yang Saling Ketergantungan dan Senantiasa Penuh Perubahan. Makassar : Orasi Ilmiah Disampaikan pada Dies Natalis ke 41 UNHAS pada Tanggal 10 September 1997.



- Miles, M.B., dan A.M. Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Indonesia University Press.
- Myrdal, Gunnar. 1981 Objektivitas Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES.
- Ramos, Alberto Guerrero. (1980). "Menuju Suatu Model Kemungkinan" dalam W.A. Belling dan G.O. Totten, Modernisasi : Masalah Model Pembangunan. Jakarta : YIIS.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, (2004). Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana.
- Schumacher, E.F. (1979). Kecil Itu Indah : Ilmu Ekonomi Yang Mementingkan Rakyat Kecil. Jakarta : LP3ES.
- Syam, Firdaus. (2009). Membangun Peradaban Indonesia : Renungan B.J. Habibie. Jakarta : Gema Insani.
- Weber, Max. (2006). Sosiologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- 2006. Studi Komprehensif Sosiologi Kebudayaan. Yogyakarta : IRCiSod.
- Zubaedi. 2007. Filsafat Barat : Dari Logika Baru Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Kuhn. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.



PENYULUHAN DAN LITERASI TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) PADA PETANI

Muksin

Program Studi Agribisnis, Politeknik Negeri Jember
Jl. Mastrip 164 Jember, Telp. 0331-333532, fax. 0331-333531
Email: muksin.alyasini@gmail.com

ABSTRAK

Era digital yang berlangsung saat ini, adalah keniscayaan yang tak dapat dicegah lajunya. Perkembangan dan dampaknya mempengaruhi pada semua bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pertanian. Digitalisasi yang ditandai dengan percepatan arus informasi melalui internet, berkontribusi pada produktivitas dan babak baru kompetisi pelaku usahatani global. Namun kondisi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal pada bidang pertanian dan pengembangan usahatani. Baik kelembagaan penyuluhan sebagai agen yang memfasilitasi pelaku usahatani maupun petani sebagai SDM pertanian, dinilai belum maksimal dalam memanfaatkan TIK untuk menopang usahanya. Keragaan pemanfaatan TIK sebagai sumberdaya informasi perlu dikaji lebih lanjut. Atas pertimbangan kondisi tersebut, kajian ini bermaksud: (a) menganalisis literasi petani pada TIK sebagai sumberdaya informasi, (b) menganalisis kapasitas penyuluhan dalam pemanfaatan TIK (c) menganalisis implikasi kesenjangan pemanfaatan TIK sebagai sumberdaya informasi dalam memfasilitasi pengembangan usahatani. Metode kajian berbasis hasil penelitian penulis dan review literatur yang relevan. Hasil analisis menemukan bahwa: (i) Literasi petani pada TIK rendah, (ii), kapasitas pemanfaatan TIK dalam penyuluhan belum memadai dan terkait dengan dukungan kelembagaan (iii) Perlunya komitmen & strategi yang tepat untuk penguatan kelembagaan dalam memanfaatkan TIK sebagai sumberdaya informasi.

Kata Kunci: Penyuluhan, Literasi, TIK, Petani

PENDAHULUAN

Pada saat ini penggunaan komputer & mikro elektronik sebagai teknologi inti, telah menjadi bagian dalam kehidupan. Perkembangan TIK yang demikian pesat secara faktual telah memberikan dampak signifikan dalam kegiatan pertanian. Info pertanian dalam bentuk produk, pengembangan kapasitas SDM, dan kemampuan teknis dalam mengembangkan usahatani secara *on farm* dapat dengan lebih mudah didapatkan pada saat ini. Salah satu indikasi yang dapat diungkapkan adanya perkembangan TIK pada bidang pertanian adalah banyaknya penelitian yang menyoroti keragaan maupun kontribusi TIK pada pertanian (Karenulla, 2012).



Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sebuah media juga sekaligus metode dan alat dalam mengembangkan pertanian. Selain itu TIK dalam berbagai varian pemanfaatan dan aplikasi, telah menghantarkan kemudahan informasi sebagai sumberdaya yang penting. Sumberdaya informasi menjadi salahsatu kontributor dalam memberikan dampak positif pada pelaku usahatani (Karemulla, 2012). TIK telah memberikan dampak secara global pada keseluruhan sektor perekonomian. Bahkan dapat diprediksi bahwa perkembangan perekonomian dapat seiring dengan kondisi dan dinamika investasi pada kegiatan TIK. Terdapat indikasi bahwa ada hubungan positif antara rate pertumbuhan GDP nyata per kapita dengan indek penggunaan TIK (Farhadi M, Ismail R, Fooladi M, 2012). Terdapat korelasi yang positif antara kesertaan petani dalam program berbasis internet dengan pendapatannya (Handono, 2016). TIK yang memadai dapat secara signifikan memberikan fasilitasi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, dan pengembangan penemuan atau inovasi oleh peneliti yang dapat dimanfaatkan oleh para petani melalui penyuluhan (Oyewole, Saheed Ige, and Oyetunde, 2013).

Perkembangan penduduk dunia yang tumbuh cepat, perlu disertai dengan peningkatan produktivitas pertanian. Kondisi tersebut juga mensyaratkan perlunya peningkatan kemampuan para penyuluh pertanian dan kelembagaan pertanian untuk memfasilitasi para petani menguatkan diri dan mengembangkan usahatannya sesuai tantangan & dinamika lingkungan yang dihadapi. Pemanfaatan TIK dapat mempermudah dan meningkatkan proses pembelajaran petani dan para pelaku pertanian secara luas, cara-cara dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan potensi aktual dalam mengakses pasar untuk hasil produksi pertanian yang diusahakan (Tata and McNamara, 2016; Simanjuntak, Charina, dan Adriani 2016).

Pemanfaatan TIK dapat menjadi suatu variabel pembeda dalam konteks persaingan antar para pelaku pertanian di berbagai negara. Artinya daya saing petani di berbagai negara dapat ditentukan oleh variabel pemanfaatan TIK.

Pemanfaatan TIK oleh petani lokal dan kelembagaan pertanian menjadi suatu keharusan yang diprediksi dapat memberdayakan. Sebagaimana



dinyatakan oleh banyak penelitian bahwa pemanfaatan internet khususnya pemanfaatan media sosial di Indonesia terus tumbuh secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menelusuri pemanfaatan TIK pada petani lokal di jember. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis literasi petani pada TIK sebagai sumberdaya informasi, (2) menganalisis kapasitas penyuluhan dalam pemanfaatan TIK (3) menganalisis implikasi kesenjangan pemanfaatan TIK sebagai sumberdaya informasi dalam memfasilitasi pengembangan usahatani.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan pemanfaatan TIK oleh petani dan bagaimana TIK dimanfaatkan dalam penyuluhan. Penulisan kajian ini didasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya penelusuran pustakan dilaksanakan untuk menganalisis dan memperjelas fenomena pemanfaatan TIK. Studi pustaka dilaksanakan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan memaknai keragaan pemanfaatan TIK oleh petani dan kegiatan penyuluhan.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mencermati hasil penelitian peneliti khususnya dari wawancara semi terstruktur khususnya pada petani tanaman pangan berjumlah 38 orang petani di dua kecamatan di jember penghasil tanaman pangan. Pengumpulan data dan informasi yang relevan juga dilakukan dari hasil penelitian terdahulu, serta data sekunder dalam bentuk buku referensi ilmiah *offline* maupun *online*. Berdasarkan review tersebut peneliti melakukan sintesa untuk memberikan uraian penjelasan dan pemaknaan mengenai pemanfaatan TIK dalam kegiatan pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Petani pada TIK

Literasi petani pada TIK, memiliki keragaman terkait juga dengan latar belakang atau profil dari petani. Secara umum sebagaimana banyak temuan sebelumnya, petani tanaman pangan umumnya adalah kelompok umur rata-rata



umur petani diatas 50 tahun. Berdasarkan proporsinya sekitar hampir 40% petani berusia lebih dari 50 tahun. Hanya sekitar 18% petani yang berusia dibawah 40 tahun yang menggeluti pertanian tanaman pangan, khususnya petani tanaman padi, jagung dan kedelai. Demikian halnya bila dilihat pendidikan sekitar 55 % petani masih berpendidikan SD sampai SMP, sedangkan 32% berpendidikan SMA, dan selebihnya berpendidikan lebih dari SMA.

Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari petani umumnya melaksanakan pekerjaan sebagai pelaku usahatani (pembudidaya) sebagai usaha utama yakni sekitar 76%. Sedangkan sisanya adalah kelompok petani yang memiliki pekerjaan lainnya. Petani yang juga berwirausaha lainnya (berdagang ataupun jasa) sekitar 19 persen, sedangkan petani yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga sekitar 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani menggantungkan usahatani sebagai usaha pokok menghidupi keluarganya.

Namun kondisi tersebut tidak menggembirakan bila dilihat dari luas lahan diusahakan. Penguasaan lahan kurang dari atau sama dengan 1 ha mendominasi para petani kita yaitu 76%, terbagi menjadi 40% adalah petani dengan lahan kurang dari 0,5ha sedangkan 36% adalah petani dengan lahan 0,6-1 ha. Penguasaan lahan lebih dari 1 ha sekitar 24%, yang terbagi menjadi petani yang menguasai lahan lebih dari 1 - 2 ha adalah 11%, dan petani dengan lahan lebih dari 2 ha adalah 13%.

Selanjutnya bila dilihat dari pemahaman petani tentang bagaimana era perdagangan bebas, petani sebagian besar yaitu 55% tidak memahami apa yang dimaksud era perdagangan bebas, sedangkan sisanya 45% menganggap memahami apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas. Namun pengetahuan mayoritas atau sekitar 92% terhadap makna perdagangan bebas umumnya dipahami sebagai pemahaman perdagangan yang bebas menjual antar produsen dan konsumen (dalam negeri), sedangkan 8% yang memahami bahwa perdagangan bebas adalah kondisi yang mendatangkan persaingan antar pelaku antar negara. Kelompok yang merasa memahami makna perdagangan bebas umumnya merasa khawatir kondisi tersebut akan mempengaruhi kelangsungan usahanya.



Pemahaman para petani terkait dengan lingkungan khususnya aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan bebas, dapat ditelusuri dari sumber informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari keseluruhan petani yang disurvei menunjukkan hanya 13,1% yang memanfaatkan TIK untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Dari jumlah tersebut proporsi pemanfaatan internet dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Proporsi Pemanfaatan Internet bagi pada Petani

Sumber informasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Internet	1	2,6
Penyuluh dan Internet	1	2,6
Teman dan Internet	1	2,6
Saudara dan internet	2	5,3
Total	5	13,1

Sumber: Data Primer, Diolah 2016

Sementara mayoritas sumber informasi adalah berturut-turut teman, penyuluh, saudara, media cetak, dan sebagian kecil yang memanfaatkan teman-saudara-media cetak dalam mendapatkan informasi. Kondisi tersebut membuktikan bahwa teman dalam kelompok tani dan para penyuluh masih menjadi rujukan utama bagi para petani dalam melaksanakan usahatani. Sumber informasi dalam bentuk media cetak sebagai sarana moderen masih belum banyak dimanfaatkan.

Mayoritas petani tidak memanfaatkan TIK untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sekitar 87% menyatakan bahwa TIK tidak dimanfaatkan untuk informasi usahatani. Umumnya alasan yang dikemukakan oleh sekitar 65% petani adalah tidak tahu apa yang dimaksud internet dan TIK pada umumnya, sedangkan sisanya menilai bahwa fasilitas TIK walaupun bermanfaat tetapi sulit untuk ditemukan di desa disamping keadaan kurang terampil dalam memanfaatkan TIK. Secara keseluruhan kondisi ini menggambarkan bahwa literasi para petani pada TIK adalah rendah. Kondisi dimaksud dapat difasilitasi sebagaimana temuan oleh Fangohoi *et al* (2016) bahwa komunikasi berbasis TIK dapat dipermudah dengan komunikasi dua tahap yang melibatkan orang yang memiliki sumberdaya dan mengetahui banyak hal atas kredibilitas



informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat lokal. Hal lainnya adalah bahwa kemudahan mengakses TIK, juga tidak serta merta mempermudah peningkatan keterampilan karena TIK berbeda secara karakteristik dengan pembelajaran masyarakat pedesaan misalnya melalui pembelajaran tatap muka dengan *feedback langsung*

Kapasitas Penyuluhan Dalam Pemanfaatan TIK

Sebagai salah satu yang dinilai masih dibutuhkan petani dalam memperbaiki usahanya, penyuluhan dianggap sebagai kegiatan yang perlu mendapatkan prioritas pemerintah untuk diperbaiki mutunya. Secara umum petani menganggap bahwa upaya-upaya perbaikan yang dilaksanakan secara mandiri senantiasa dilakukan oleh petani. Sebagian besar petani menilai bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh petani umumnya pada aspek pengelolaan teknis usaha pertanian meliputi input sarana produksi dan perbaikan budidaya. Petani juga menilai bahwa upaya perbaikan yang dilakukan secara mandiri dalam kelompok tani secara berturut-turut adalah kemampuan menjadi pembelajar dan kesertaan secara aktif dalam penyuluhan, serta upaya meningkatkan penciptaan inovasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Konsekuensi dari kondisi upaya perbaikan secara mandiri oleh petani, secara simultan diharapkan juga adanya komitmen yang sungguh-sungguh terhadap beberapa peran pemerintah yang mestinya dilakukan. Harapan petani secara berturut-turut adalah: (a) peran dalam menstabilkan harga input sarana produksi, (b) menstabilkan atau meningkatkan hasil produksi pertanian, (c) meningkatkan mutu dan profesionalisme penyuluhan, (d) meningkatkan peran dan mutu petani dalam pembangunan pertanian pada umumnya, (e) meningkatkan fasilitasi terhadap kerjasama/kemitraan bagi usaha pertanian, (f) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk pertanian, dan (g) menghilangkan kegiatan premanisme yang masih ada dalam pengelolaan usaha pertanian, semisal sinyalemen adanya mafia pupuk. Pada proses pemanfaatan TIK, perlu diperhatikan bahwa pemberdayaan terhadap petani dan masyarakat desa perlu menyiapkan SDM penyuluh dengan kemampuan fasilitasi melalui TIK serta melibatkan kelembagaan yang signifikan perannya dalam masyarakat



misalnya lembaga swadaya masyarakat. Kemampuan para penyuluh akan memudahkan proses transfer melalui TIK (Wani, MH, 2014)

Peran penyuluhan yang diharapkan oleh petani sebagaimana dicantumkan diatas memberikan isyarat bahwa peran penyuluhan dapat ditingkatkan lagi perannya dalam membangun pertanian. Penyuluhan diharapkan untuk mampu memfasilitasi keberdayaan petani melalui sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan. Penyuluhan diharapkan mampu beradaptasi dengan kondisi yang berkembang khususnya dalam menghadapi kondisi perubahan yang sangat cepat, serta karakteristik khalayak sasaran yang beragam.

Bila mencermati karakteristik para petani pengguna internet yang kecil tersebut dapat disebutkan para petani umumnya berumur di bawah 40 tahun, kelompok berpendidikan level sarjana, memiliki pekerjaan berwirausaha selain bertani, dan kelompok petani dengan penguasaan lahan lebih dari 2 ha. Karakteristik tersebut menggambarkan bahwa para petani pengguna internet adalah kelompok kosmopolit, dengan pendidikan tinggi, dan penguasaan lahan lebih dari 2 ha. Artinya pengguna internet adalah kelompok petani kaya yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang baik teradap TIK sebagai sumber informasi untuk meningkatkan kegiatan usahatani.

Berdasarkan kajian ini, petani menilai bahwa informasi pertanian yang terkait dengan TIK atau TIK sebagai media atau cara untuk mendapatkan informasi belum diperoleh dari para penyuluh. Internet atau TIK secara umum adalah terminologi asing yang belum “familiar” diketahui oleh petani. Lingkungan yang mestinya memfasilitasi keterdedahan dengan TIK, misalnya anggota keluarga (anak dari petani) yang sudah terlebih dahulu memanfaatkan TIK, tidak menjamin bahwa petani yang bersangkutan akan terdedah dengan TIK (Muksin, 2015).

Kapasitas penyuluhan dalam memfasilitasi petani berinteraksi dengan sumber informasi melalui TIK masih dinilai rendah. Beberapa indikator yang disampaikan adalah media internet belum banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran dalam penyuluhan, beberapa sumber informasi yang telah digagas oleh kelembagaan pertanian masih belum dimanfaatkan secara maksimal, dan



secara umum kapasitas kelembagaan penyuluhan belum secara optimal memanfaatkan TIK sebagai sumberdaya informasi. Beberapa kebijakan yang berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan TIK oleh pemerintah, belum banyak terimplmentasikan karena terkendala pendanaan dalam menjalankan kegiatan fasilitasi TIK tersebut. Komitmen dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah daerah belum terfasilitasi secara memadai misalnya pada anggaran yang mencukupi untuk operasionalisasi TIK.

Terkait dengan hal ini implementasi di lapangan menunjukkan realisasi pemanfaatan TIK oleh penyuluhan khususnya dinas pertanian berada pada level kondisi dimana upaya dalam memfasilitasi pembuatan situs yang lebih interaktif dan bagaimana situs tersebut secara dinamis dan sederhana mudah untuk dimanfaatkan masyarakat. Perlu dipahami bahwa alat atau media baru membutuhkan adaptasi bagi masyarakat petani maupun peternak untuk memanfaatkannya. Kredibilitas sumber (penyuluh) yang kurang memadai dan informasi yang belum “familiar” menjadi salahsatu kendala dalam pemanfaatan TIK. (Ndeti Ndati, Okumu P, dan Mogambi, 2014).

Implikasi dan Upaya memanfaatkan TIK untuk pengembangan usahatani

Secara keseluruhan bahwa terdapat enam faktor penentu Keberhasilan Implementasi TIK, dalam memfasilitasi pemberdayaan petani melalui penyuluhan. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kelembagaan penyuluhan sendiri, perangkat atau sarana yang tersedia, dan SDM yang mengoperasikan TIK sebagai media atau alat dalam memfasilitasi penyuluhan. Sebagaimana kajian Muksin (2011) beberapa faktor meliputi faktor Organisasi, Kebijakan, Manajemen, SDM, *Hardware*, berhubungan secara nyata dengan Kinerja Implementasi TI untuk Pelayanan Publik termasuk penyuluhan pada dinas pertanian.

Untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan berbasis TIK pada kelembagaan penyuluhan perlu dipersiapkan ketersediaan SDM yang handal yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan penyuluhan berbasis TIK. Kebutuhan terhadap SDM yang memiliki kemampuan TIK menjadi



mutlak bagi transfer belajar antar penyuluh termasuk fasilitasi penyuluh dengan petani, serta informasi dari luar untuk bahan belajar bersama.

Selain faktor SDM, faktor kebijakan menjadi kebutuhan untuk pertimbangan implementasi TIK. Kinerja pelayanan penyuluhan dan informasi pertanian pada kajian menunjukkan masih lemahnya dukungan pengambil kebijakan dalam memfasilitasi TIK. Selain itu perlu adanya kebijakan yang kondusif bagaimana proses dan tata kelola TIK, khususnya manajemen belanja/investasi TIK dan bagaimana data dalam bentuk informasi pertanian dapat *dideliveri* kepada petani secara relevan. Sebagaimana dinyatakan oleh GeSong, Yang dan Liu (2014) bahwa pemanfaatan TIK dalam memfasilitasi para petani memerlukan manajemen yang spesifik dengan mempertimbangkan ruang lingkup rumah tangga dan karakteristik petani. Perlu pelibatan yang serius oleh kelembagaan pemerintah dalam mengurus pertanian dan kelembagaan lain yang konsen dalam menyokong implementasi pemanfaatan TIK oleh petani.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi petani terhadap TIK masih rendah. Kelompok petani pemanfaat TIK memiliki karakteristik kosmopolit dan memiliki status sosial ekonomi tinggi yang ditandai dengan pemilikan luas lahan yang cukup besar. Kondisi tersebut terkait dengan kapasitas kelembagaan penyuluhan yang dinilai masih belum optimal dalam memfasilitasi pemanfaatan TIK. Perlu komitmen dan upaya dalam bentuk program aksi yang memperkuat SDM pengelola TIK serta kebijakan yang memadai dalam implementasi TIK bagi pemberdayaan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballantyne P, Maru Ajit, and Porcari EM. (2010). Information and Communication Technologies—Opportunities to Mobilize Agricultural Science for Development. *Crop Science*, Vol. 50, March–April 2010
- Farhadi M, Ismail R, dan Fooladi Masood. (2012). Information and Communication Technology Use and Economic Growth. *Journal Information and Communication Technology Use and Economic Growth*. PLoS ONE 7(11): e48903



- Fangohoi L, Sugiyanto, Sukeski K, dan Cahyono Edi D. (2016). Sistem Penyuluhan Pertanian Berbasis Cyber Extension untuk Tanaman Kakao di Papua Barat. *Proseding KonasPKP 2016*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Handono Setiyo Y. (2016). Dampak Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (FEATI) di Indonesia. *Proseding KonasPKP 2016*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kareemulla, K. (2012). Role of ICT in Dissemination of Knowledge in Agriculture Sector -Its Scope and Efficacy. *Indian Journal of Agricultural Economics*; Jan-Mar 2012; 67, 1; Agricultural & Environmental Science Database pg. 113
- Muksin. (2011). Optimalisasi Pemanfaatan TIK untuk Pelayanan Publik. Laporan Penelitian. Jakarta: Bappenas.
- (2015). Dialog Pembangunan Pedesaan RRI: Pengembangan Pertanian Pedesaan: Memperkuat Para Petani dengan Kebutuhan Sumberdaya yang Relevan. Jember: RRI Jember.
- Ndeti Ndati, Patel Okumu P, and Mogambi H. (2014). Internet And The Promotion Of Aquaculture In Kenya. *European Scientific Journal* December 2014 edition vol.10, No.35 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
- Oyewole OJ, Saheed Ige A, and Oyetunde OS. (2013). Contributions of ICTs towards Agricultural Development Among Agricultural Researchers in Ibadan North West Local Government, Oyo State, Nigeria. *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*. journal homepage: <http://aessweb.com/journal-detail.php?id=5005>
- Simanjuntak JD, Charina A, dan Adriani Rani. (2016). Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Agribisnis Hortikultura dalam menghadapi Pasar Bebas. *Proseding KonasPKP 2016*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Tata JS, and McNamara Paul.(2016). Social Factors That Influence Use of ICT in Agricultural Extension in Southern Africa. www.mdpi.com/journal/agriculture
- Wani MH. (2014). Agricultural Research and Extension in India: Achievement and Failure and Directions for Future. *Jurnal of Agricultural Economic* Vol 69. No 1 Januari Maret 2014



PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN PT PERTAMINA TERMINAL BAHAN BAKAR MINYAK REWULU DALAM PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA ARGOMULYO KABUPATEN BANTUL

Christine Sri Widiputranti, Ir. M.P.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Email: christinewidiputranti@gmail.com

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu kebijakan dan program diharapkan memberikan dampak pada masyarakat sekitar, secara ekonomi, sosial dan politik. Permasalahannya adalah bagaimana program CSR Pertamina dalam pemberdayaan petani di Desa Argomulyo dan Apakah program CSR berdampak kepada keberdayaan petani? Tujuan penelitian untuk mengetahui: program CSR dalam pemberdayaan petani, dampak program CSR dalam pemberdayaan petani serta tanggapan petani terhadap program CSR. Jenis penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif didukung kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penentuan sampel dengan *simple random sampling*. Jumlah Sampel 22 petani. Analisis data statistik deskriptif dan statistik inferens korelasi Spearman. Program CSR meliputi: kemandirian pangan melalui bercocok tanam SRI organik serta peningkatan pengetahuan dan optimalisasi lahan melalui Sekolah Lapang. Dampak program CSR dalam pemberdayaan petani: semakin aktif petugas CSR maka keberdayaan petani meningkat, semakin aktif petugas CSR maka tanggapan petani semakin baik dan semakin baik tanggapan petani terhadap CSR maka keberdayaan petani semakin meningkat. Petani menyatakan program CSR dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta tidak menambah beban tenaga kerja

Kata kunci: program CSR, pemberdayaan, dampak program, petani

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis perusahaan, yang diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program diharapkan memberikan dampak pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi CSR hanya dapat diakses dan ditentukan oleh elite-elite komunitas. Selain itu, program yang dilaksanakan kebanyakan hanya ditujukan untuk kawasan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa CSR telah menjadi arena pertarungan kepentingan dan kekuasaan bagi pemangku kepentingan (actor) yang berada dalam tiga ruang social, yakni negara (*state*), perusahaan, dan masyarakat sipil (Siwi, 2012 dan Asrianti, 2010).



Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana program CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam pemberdayaan petani? (2) Apakah program CSR berdampak pada keberdayaan petani? Tujuan penelitian: (1) Mengetahui program CSR dalam pemberdayaan petani di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. (2) Mengetahui dampak program CSR dalam pemberdayaan petani. (3) Mengetahui tanggapan petani terhadap program CSR dan masukan yang diberikan kepada perusahaan tentang kendala yang dihadapi kelompok binaan dalam pelaksanaan program CSR.

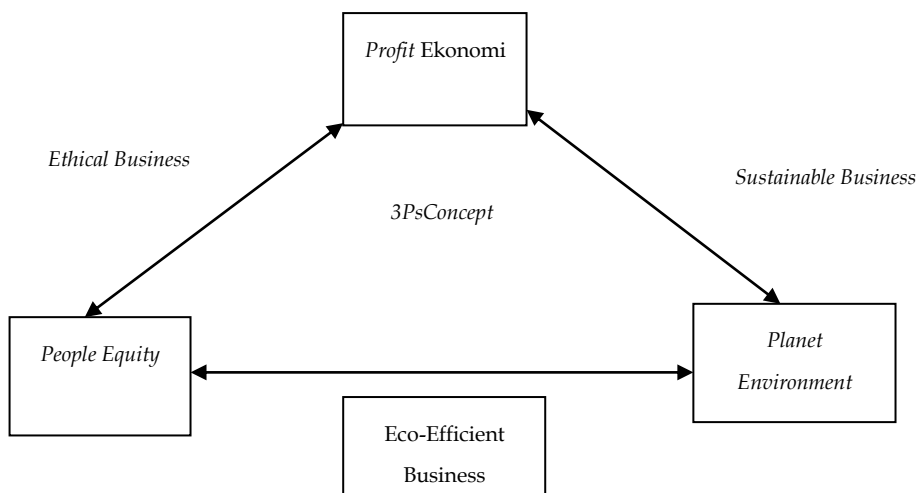
Pengertian CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa CSR adalah komitmen perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dari sudut perusahaan, CSR merupakan proses internalisasi faktor-faktor eksternal (*the internalization of externalities*) yang merujuk kepada *Triple Bottom Line* (3P), yakni *People*, *Planet*, dan *Profit*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan Kesejahteraan masyarakat (*people*). (Nasdian, 2014)

Menurut Wrihatnolo (2007:2) Pemberdayaan adalah sebuah proses “menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai 3 tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Selanjutnya Wrihatnolo (2007: 115) dalam pengertian konvensional konsep pemberdayaan sebagai terjemahan dari istilah *empowerment* yang mengandung dua pengertian yaitu, (1) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dari kedua pengertian ini secara eksplisit bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang. Senada dengan pendapat Widiputranti (2006:29-30), Pemberdayaan adalah proses mengupayakan agar



manusia menjadi berdaya, berkemampuan, mempunyai akal untuk mengatasi problema yang dihadapi. Menurut Widiputranti (2007: 27), pemberdayana petani adalah upaya agar petani menjadi berdaya yakni mempunyai kemampuan, akal, untuk mengatasi persoalan usaha yang dihadapi.

CSR berorientasi pada *planet* (konservasi), *people* (komunitas), dan *profit* (keuntungan perusahaan) yang dilaksanakan oleh perusahaan. Orientasi pada planet difokuskan untuk menciptakan lingkungan ekologis yang berkelanjutan (*environmental sustainability*). Memberdayakan komunitas dan meningkatkan partisipasi multipihak (*stakeholders participation*) menjadikan orientasi CSR kepada masyarakat (*people*). Kedua orientasi tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan, lazimnya suatu *private sector* (Gambar 1)



Gambar 1 The triple bottom line (John Elkington dalam Nasdian, 2014 : 229)

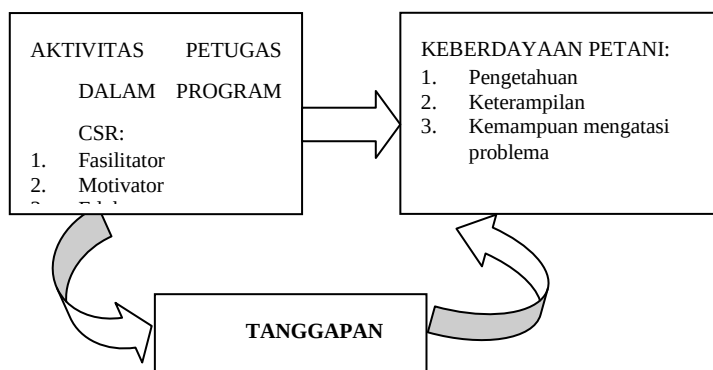
Sinergitas dari ketiga orientasi tersebut dimanifestasikan sebagai upaya perusahaan untuk menginternalisasikan faktor-faktor luar ke dalam kebijakan perusahaan (*the internalization of externalities*) dalam kerangka CSR. CSR merupakan suatu proses pembelajaran yang partisipatif yang diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat (Elkington. dalam Nasdian 2014), dengan demikian konsep Elkington ini mirip dengan konsep penyuluhan yang diajukan Rogers. Rogers (1995) dan beberapa ahli penyuluhan, menjelaskan bahwa penyuluhan adalah proses pembelajaran/ *non formal*



education untuk merubah perilaku masyarakat agar menjadi lebih baik melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.

Dalam program pemberdayaan oleh CSR ini, Pertamina melalui aktivitas petugasnya memberikan bantuan sarana prasarana pertanian (fasilitator), mendorong berusaha tani (motivator), dan mendidik cara usaha tani yang baik (edukator). Dampak dari pemberdayaan ini dapat berupa meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, maupun kemampuan mengatasi problem yang dihadapi. Teori Tindakan Berencana (*Planned Behaviour*) dari Azjen & Fishbein (dalam Hariadi. 2011) menjelaskan bahwa adanya stimulus akan memberikan respon atau tanggapan, dalam program CSR ini stimulus berupa adanya fasilitasi dan berbagai kegiatan dari petugas CSR. Dengan demikian, stimulus dari petugas CSR yang berperan sebagai fasilitator, edukator, dan motivator ini akan memberikan dampak pada peserta yakni adanya tanggapan.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini



Gambar 2. Kerangka Berpikir Program CSR dalam Pemberdayaan Petani.

Berdasarkan pustaka serta uraian kerangka berpikir, maka diajukan hipotesis penelitian yang perlu diuji kebenarannya, yakni; diduga: (1).Semakin aktif petugas CSR (memfasilitasi, memotivasi, dan mengedukasi) kepada petani maka keberdayaan petani semakin meningkat. (2). Semakin aktif petugas CSR (memfasilitasi, memotivasi, dan mengedukasi) kepada petani maka tanggapan petani semakin baik. (3)..Semakin baik tanggapan petani peserta terhadap program CSR maka keberdayaan petani semakin meningkat



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif yang didukung kualitatif. Subyek Penelitian terdiri dari Kelompok Tani Binaan CSR, pengelola CSR, tokoh masyarakat dan perangkat Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul DIY.

Teknik Pengumpulan Data: (1) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi petani dan usaha tani di sekitar TBBM Rewulu. (2). Wawancara dengan Ketua Kelompok Binaan CSR TBBM Rewulu, pihak pengelola program CSR, tokoh masyarakat, perangkat desa di sekitar perusahaan tentang program CSR dan permasalahan yang dihadapi. (3). Kuesioner diberikan kepada petani anggota kelompok binaan CSR yang meliputi: aktivitas petugas CSR dalam memfasilitasi, memotivasi dan mengedukasi, keberdayaan petani, tanggapan petani dan partisipasi petani, manfaat yang dirasakan dan masalah yang dihadapi serta analisis usaha tani. (4). Dokumentasi untuk memperoleh data-data sekunder baik monografi desa, dokumen pengelolaan CSR, dan foto-foto yang diperlukan.

Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 22 petani dari populasi 47 orang. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan statistik inferens dalam bentuk korelasi tata jenjang (korelasi Spearman). Hipotesis 1, 2 dan 3 diuji dengan menggunakan statistik non parametrik uji Korelasi tata jenjang atau Korelasi Spearman dengan taraf signifikansi 95% atau tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan responden di Desa Argomulyo, khususnya petani anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur di Pedukuhan Plawonan dan Kelompok Tani Watu di Pedukuhan Watu. bahwa 22,73 % responden berumur kurang dari 50 tahun, 77,27% responden berusia lebih dari 50 tahun. Responden menurut status dalam keluarga, 86,36% kepala keluarga, 13,64% bukan kepala keluarga,



22,73% di antaranya wanita. Terdapat 9,09% atau sebanyak 2 wanita merupakan kepala keluarga karena berstatus janda.

Berdasarkan hasil pengamatan, status dalam kelompok ini berkaitan dengan jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Jabatan dalam kelompok tani diduduki oleh responden berjenis kelamin laki-laki sedangkan 100% responden yang berjenis kelamin wanita berstatus sebagai anggota. Selain itu, responden yang bertugas sebagai pengurus kelompok tani pada umumnya yang memiliki pekerjaan umum bukan petani misalnya pekerja serabutan dan kontraktor sebagai ketua, seorang *security* sebagai bendahara, dan salah satu perangkat desa sebagai pembina kelompok tani. Hanya seorang buruh tani dan seorang petani yang juga tergabung ke dalam pengurus kelompok tani. Kedua responden tersebut ternyata telah bergabung dalam kelompok tani selama minimal 4 tahun sehingga dianggap memiliki banyak pengalaman.

1. Program CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam Pemberdayaan Petani di Desa Argomulyo

Program CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam Pemberdayaan Petani di Desa Argomulyo memberi bantuan dalam bentuk barang seperti traktor tangan, pompa air, benih/bibit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boiman (mantan Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur) di Plawonan, kelompok ini dari CSR Pertamina TBBM Rewulu pada tahun 2012 memperoleh bantuan 2 unit traktor. Kemudian pada tahun 2014 kelompok tani ini mendapat bantuan pompa air/*jet pump*, karena Pedukuhan Plawonan merupakan daerah kering/tadah hujan. Dalam rangka pemberdayaan, traktor ini dipinjamkan/disewakan dengan ketentuan penyewa membayar sewa Rp 100.000 per 1000 m² atau Rp100,00/ m². Perolehan uang sewa ini 50 % masuk kas kelompok tani dan 50 % untuk yang mengelola/menjalankan traktor. Traktor yang dijalankan hanya satu unit karena keterbatasan tenaga operator traktor. Model pengelolaan pompa air berbeda dengan traktor. Pompa air disewakan Rp 7500,00 jam (dulu sebelum harga BBM naik). Sejak harga BBM naik sampai



sekarang biaya sewa Rp 10.000,00/jam. Penerimaan uang sewa *jet pump* ini 70% untuk kas kelompok tani dan 30% untuk pengelola /operator.

Sejak Kelompok Tani “Ngudi Makmur” mendapat bantuan pompa air petani dapat melakukan kegiatan tanam 2-3 kali per tahun. Dulu petani hanya dapat melakukan kegiatan tanam 1- 2 kali per tahun. Dengan demikian menurut petani pada umumnya program CSR Pertamina ini berdampak pada peningkatan produksi dan pendapatan.

Kelompok Tani “Ngudi Makmur” selain mendapat bantuan pompa air dan traktor, juga mendapat bantuan berupa bibit bawang merah dan cabe. CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam pemberdayaan petani bekerja sama dengan Joglo Tani yang dipimpin Bapak Theo Suprpto. Joglo Tani ini memberi pelatihan, menyediakan bibit bawang merah, cabe dan benih padi, pupuk. Joglo Tani bersama petugas dari CSR Pertamina TBBM Rewulu juga melakukan pendampingan kepada petani.

Kelompok Tani “Watu” memperoleh bantuan traktor dan benih padi Ciherang. Masing masing petani anggota kelompok tani mendapat benih padi 30kg/ha. Jika petani menggarap sawah 1000 m² maka petani menerima 3 kg. Pada tahun 2013 Program CSR Pertamina melakukan pendampingan kepada Kelompok Tani “Watu”. Dalam hal ini CSR Pertamina TBBM Rewulu bekerja sama dengan “Joglo Tani”.

2. Dampak Program CSR Terhadap Pemberdayaan Petani

Program CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam pemberdayaan petani dapat dianalisis dari aktivitas petugas CSR sebagai fasilitator, motivator dan edukator. Dampak dari aktivitas petugas CSR tersebut adalah meningkatnya keberdayaan petani berupa meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengatasi problema. Program CSR Pertamina TBBM Rewulu dalam pemberdayaan petani dapat ditunjukkan dari hasil analisis hubungan antara aktivitas petugas CSR (sebagai fasilitator, motivator dan edukator) dengan keberdayaan petani, hubungan antara aktivitas petugas CSR (sebagai fasilitator, motivator dan edukator) dengan tanggapan petani dan hubungan antara



tanggapan petani dengan tingkat keberdayaan . Hasil perhitungan Korelasi Spearman tentang hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Korelasi Spearman Antar Variabel

Hubungan antar variabel	Koefisien Korelasi (r)	Tingkat kesalahan	Toleransi kesalahan (α)
Aktivitas petugas CSR dengan tingkat keberdayaan petani	0,462	3,0 %	5 %
Aktivitas petugas CSR dengan tanggapan petani	0,545	0,9 %	1 %
Tanggapan petani dengan tingkat keberdayaan petani	0,475	2,6 %	5 %

Sumber: Analisis data primer, 2016

Tabel 1. menunjukkan bahwa : (a). Ada hubungan positif yang signifikan (dengan tingkat kesalahan 3%) antara aktivitas petugas CSR dengan tingkat keberdayaan petani. Artinya semakin aktif petugas CSR sebagai fasilitator, motivator dan edukator maka semakin meningkat tingkat keberdayaan petani. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 97 %, hipotesis 1: semakin aktif petugas CSR (memfasilitasi, memotivasi dan mengedukasi) maka keberdayaan petani semakin meningkat dapat diterima. (b). Ada hubungan positif yang signifikan (dengan tingkat kesalahan 1%) antara aktivitas petugas CSR dengan tanggapan petani. Artinya semakin aktif petugas CSR sebagai fasilitator, motivator dan edukator maka tanggapan petani semakin baik. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 99,1 %, hipotesis 2: semakin aktif petugas CSR (memfasilitasi, memotivasi dan mengedukasi) maka tanggapan petani semakin baik dapat diterima. (c). Ada hubungan positif yang signifikan (dengan tingkat kesalahan 2,6%) antara tanggapan petani dengan tingkat keberdayaan petani. Artinya semakin baik tanggapan petani maka keberdayaan petani semakin meningkat. Dengan demikian pada tingkat kepercayaan 97,4 %, hipotesis 3: semakin baik Tanggapan petani terhadap petugas CSR maka keberdayaan petani semakin meningkat dapat diterima.



PENUTUP

1. Sebagian besar petani menyatakan program CSR Pertamina dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Sebaiknya kerja sama tetap dilanjutkan dan program ini berkelanjutan.
2. Seyogyanya petugas CSR Pertamina selalu aktif agar tanggapan petani semakin baik dan petani menjadi lebih berdaya.
3. Petani hendaknya memberi tanggapan yang baik terhadap petugas CSR Pertamina, agar petani menjadi lebih berdaya.
4. Berdasarkan masukan dari petani, seyogyanya CSR Pertamina melanjutkan kerja sama, menambah fasilitas sesuai kebutuhan kelompok tani, memberi pelatihan lanjutan dan tetap melakukan pendampingan. Petani semakin berdaya maka semakin mampu menghadapi MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.
- Anonim. 2016. *Buku Monografi Desa Semester I Tahun 2016*. Desa Argomulyo Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
- Asrianti, Utut Septi. 2010. *"Analisis Pola Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat."* Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Swadaya PT Holcim Indonesia Tbk di Desa Kembang Kuning Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Skripsi Departemen Sains komunikasi dan Pengembangan masyarakat IPB. Bogor.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Hariadi, Sunarru Samsi. 2011. *Dinamika Kelompok*. Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Nasdian, Tonny, Fredian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rogers, Everett M. 1995. *Diffusion of Innovations*. New York. The Free Press.
- Siwi, Mahmudi. 2012. *"Dinamika Politik Pemberdayaan dalam Corporate Social Responsibility (CSR)"*. Studi Kasus Program CSR PT. Holcim Indonesia Pabrik Narogong Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Bogor: Tesis Magister Sains Sosiologi Pedesaan IPB.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Tim Penyusun *Community Development Officer* TBBM Rewulu. 2014. *Perencanaan Strategis Program Community Development PT Pertamina (Persero) TBBM Rewulu tahun 2014- 2018*
- Widiputranti, Christine Sri, 2006. Pemberdayaan Petani Miskin di Pedesaan: Analisis Pengalaman Program SLT dan IDT, dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, volume 2 nomor 1 Juli 2006. ISSN 1858-1226. STTP Magelang.
- Widiputranti, Christine Sri, 2007. Pemberdayaan Petani Agar Mampu Mengembang- kan Agribisnis , dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, volume 3 nomor 1 Juli 2007. ISSN 1858-1226. STTP Magelang.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Riant. Nugroho Dwidjowiyoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*.



STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

Kadhung Prayoga

Program Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah
Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
kadhungprayoga@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang berbasis kearifan lokal adalah upaya untuk menyelesaikan masalah masyarakat pesisir dan membuat mereka mandiri dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Penulisan paper ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal apa saja dan strategi pemberdayaan seperti apa yang cocok digunakan untuk masyarakat pesisir Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah data-data sekunder seperti buku, jurnal, majalah, dan internet. Hasil menunjukkan bahwa secara umum terdapat 6 kearifan lokal yang ada pada masyarakat pesisir Jawa Timur, yaitu: (1) petik laut, (2) *nyabis*, (3) *pengambek*, (4) *rumpon*, (5) sistem kontrak kerja, dan (6) *andun*. Sedangkan strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memasukkan kepentingannya ketika kegiatan adat berlangsung, seperti: (1) penyuluhan budidaya rumput laut, pelepasan ikan, penanaman terumbu karang, (2) menjadikan upacara adat sebagai komoditas pariwisata, (3) resolusi konflik dengan mengundang nelayan dari daerah lain saat upacara adat, (4) membuat rumpon secara berkelompok, dan (5) membentuk forum musyawarah masyarakat adat yang mengatur hukum adat, pemasaran hasil tangkapan, dan penguatan modal.

Kata kunci: strategi pemberdayaan, kearifan lokal, masyarakat pesisir, Jawa Timur

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luas laut sekitar 5,8 juta persegi dengan pulau terbanyak yaitu 17.508 pulau dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sekitar 81.000 km, namun keadaan potensi alam laut yang melimpah ini ternyata tidak sejalan dengan kesejahteraan kehidupan nelayan (Rawis, 2004). Masih banyak dijumpai kehidupan masyarakat pesisirnya yang tergolong miskin dan kurang berdaya baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Dengan banyaknya masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk menyelesaikannya lewat program pemberdayaan. Namun, banyak dari program pemberdayaan tidak berjalan



sesuai rencana. Penyebab kegagalan program rata-rata karena program yang bersifat *top down* dan kurang mendengarkan aspirasi masyarakat pesisir. Program ini juga masih bersifat universal dan tidak memperhatikan aspek lokalitas wilayah. Jadi, konsep pembangunan masyarakat pesisir tidak hanya menuntut pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga berdasar pada lokalitas kehidupan masyarakat. Kearifan lokal bisa menjadi strategi yang efektif karena lewat proses yang sangat panjang dan diturunkan secara lisan oleh masyarakat secara turun menurun.

Kearifan lokal sendiri secara harfiah menurut Ridwan (2007), merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu sistem sosial suatu masyarakat. Di beberapa wilayah di tanah air seperti Jawa Timur dengan wilayah yang mayoritas adalah wilayah pesisir juga memiliki kearifan lokal. Jadi, perlu dikaji apa saja kearifan lokal yang ada di masyarakat pesisir Jawa Timur dan apa implikasinya pada penerapan strategi pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Paper ini ditulis dengan menggunakan studi literature atau kajian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa buku, jurnal, makalah, dan informasi dari internet yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Jawa Timur diketahui ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir guna berbagai kepentingan. Setidaknya ada 6 tradisi lokal yaitu petik laut, *nyabis*, *rumpon*, *pengambek*, sistem kontrak kerja, dan *andun*.

Petik laut merupakan sebuah tradisi yang rutin digelar setiap tahun. Tradisi ini bertujuan untuk meminta berkah kepada Tuhan agar tangkapan mereka melimpah dan mendapat perlindungan ketika melaut. Di beberapa daerah tradisi ini dilakukan dalam waktu tertentu dan terjadwal. Contohnya adalah di Banyuwangi yang melakukan petik laut di hari rabu terakhir di bulan



Sapar. Yudono (2012) menjelaskan penentuan waktu ini karena masyarakat Banyuwangi memiliki keyakinan bahwa pada hari tersebut adalah hari turunnya wabah penyakit dan bencana. Namun, Juniarta (2013), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penentuan waktu petik laut di Probolinggo tidak jelas karena menunggu kesepakatan antara tokoh masyarakat dengan masyarakat pesisir.

Secara umum petik laut di Jawa Timur dimulai dengan upacara selamatan yang dipimpin oleh tetua adat. Kemudian dilanjutkan dengan melarung sesaji ke laut lepas. Semua sesajen ditaruh dalam replika kapal atau wadah tertentu. Misal saja di Madura, sesajen ditaruh di pohon pisang yang dibentuk menyerupai perahu. Dalam pelaksanaan petik laut pada beberapa daerah juga akan ditemui keberadaan *sakera* yang menggunakan baju merah hitam dan membawa clurit. Mereka akan berjalan paling depan guna mengawal sesaji dan mengatur warga. Petik laut diakhiri dengan pertunjukkan kesenian lokal di malam harinya.

Nyabis adalah suatu tradisi dimana masyarakat meminta doa dari seorang pemuka agama dan dukun. Hal ini dilakukan dengan harapan semua kegiatan yang mereka lakukan mulai dari berangkat melaut hingga menjual hasil tangkapan ke pasar bisa berjalan lancar. Dalam penelitian Juniarta (2013), kegiatan nyabis biasa dipilih pada hari jumat karena pada hari itu kyai libur mengajar di pondok dan nelayan juga berhenti melaut. Tradisi *nyabis* lebih banyak dilakukan di daerah seperti Madura dan Banyuwangi.

Dalam studi yang dilakukan Fausi (2003), tradisi *nyabis* banyak dilakukan oleh nelayan tangkap dan pemilik perahu, baik secara individu maupun kolektif. Secara kelompok, nyabis lebih banyak dilakukan oleh istri dari nelayan setidaknya dua kali dalam sebulan. Pemilik lebih sering melakukan *nyabis* karena bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, sedangkan anak buah kapal melakukan nyabis hanya untuk keperluan pribadinya.

Dalam tradisi nelayan di Jawa Timur terdapat pula sebuah hubungan saling membantu atau sistem *patron-client* (tuan-pengikut), contohnya adalah *pengambek*. *Pengambek* merupakan warga yang memiliki dukungan secara



finansial untuk memberikan pinjaman kepada nelayan lain. Disini *pengambek* memiliki wewenang untuk menetapkan harga ikan dari orang yang meminjam uang kepadanya. Menurut penelitian Erawati (2014), tradisi ini sebenarnya memberatkan nelayan, namun karena tidak ada opsi lain, maka cara ini adalah satu-satunya yang bisa dilakukan nelayan untuk menutupi kekurangan modalnya.

Rumpon merupakan cara tradisional yang digunakan oleh nelayan di Jawa Timur untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dalam penelitian Juniarta (2013), warga Probolinggo menggunakan *rumpon* atau *onjem* dengan mengacu pada kondisi alam, seperti pohon dan gunung. Mekanisme penggunaan *rumpon* yang unik juga ditemukan oleh Arifin (2016), di Kabupaten Malang status juragan kapal bisa dilihat dari hubungan kerja sama untuk membuat *rumpon*. Jika juragan memiliki enam kapal, artinya jumlah kapal yang akan memanfaatkan *rumpon* adalah jumlah kapal milik juragan dikalikan dengan jumlah juragan yang bekerja sama dalam membuat satu *rumpon*. *Rumpon* digunakan nelayan secara bergantian dan memberikan sanksi kepada yang melanggar. Nelayan yang mencuri ikan di *rumpon* lain akan dikenai sanksi 10% dari hasil tangkapan.

Kearifan lokal lainnya adalah sistem kontrak kerja yang unik. Misal saja ketika seorang anak buah kapal memiliki hutang kepada pemilik kapal, maka anak buah kapal tersebut tidak boleh pindah juragan sebelum hutangnya lunas. Dalam merekrut anak buah kapal juga dilakukan secara tidak formal dan lebih berdasarkan ikatan kekeluargaan. Temuan Rochmawati (2016), menjelaskan ada dua sistem bagi hasil yang berkembang, yaitu sistem bagi tiga (*telon*) dan sistem bagi dua (*maron*). Menurutnya pemilihan sistem bagi hasil daripada gaji pada komunitas nelayan disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) untuk menentukan imbalan kerja sesuai usaha, (2) sikap spekulatif, dan (3) hasil tangkapan tidak menentu.

Terakhir adalah *andun*, kegiatan yang dilakukan oleh nelayan untuk menangkap ikan di daerah lain karena adanya kendala cuaca buruk di daerah asal dan sedikitnya ikan yang bisa ditangkap. Proses *andun* dilakukan dengan



membawa kapal dan anak buah kapal yang bersedia dibawah komando sang kapten kapal. Rochmawati (2016), menjelaskan bahwa *andun* dilakukan oleh nelayan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Proses *andun* ini sendiri juga hanya terjadi selama dua hari, mengingat besarnya pula biaya yang harus dikeluarkan.

Dari keenam kearifan lokal yang ada kemudian pemerintah bisa membuat sebuah program pemberdayaan yang memperhatikan masyarakat pesisir sebagai subjek pembangunan. Namun, kearifan lokal tidak bisa dengan mudah digunakan sebagai strategi untuk proses pemberdayaan masyarakat karena menurut Christy (1992), setidaknya ada 6 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Kondisi sumberdaya alam harus memiliki karakteristik yang jelas.
2. Batas-batas wilayah yang dimiliki harus jelas dan sudah ditentukan sebelumnya.
3. Teknologi penangkapan. Harus ditentukan jenis alat dan jenis tangkapan yang akan diatur dalam kearifan lokal.
4. Budaya, budaya setempat harus sesuai dengan permodelan pemberdayaan kearifan lokal sehingga tidak akan terjadi benturan.
5. Distribusi kekayaan. Harus melindungi model kelembagaan yang sudah ada.
6. Otoritas pemerintah dan lembaga terkait.

Kearifan lokal menjadi salah satu jalan keluar dalam program pemberdayaan karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia. Namun juga mengatur hubungan manusia dengan alam dan apa yang harus mereka lakukan agar kehidupan yang mereka jalani bisa seimbang tanpa ada tumpang tindih. Pertimbangan lainnya adalah program pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah harus bisa diterima sebagai bagian keseharian dari masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan aspek sosial budaya yang hidup lebih dahulu sebelum program itu ada. Maka, kearifan lokal bisa menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan sebuah program pemberdayaan.



Community Based Management (CBM) bisa menjadi model pemberdayaan yang mengakomodasi kearifan lokal masyarakat. CBM menurut Nikijuluw (2001) adalah suatu pendekatan yang menggunakan pengetahuan dan kesadaran lokal masyarakat sebagai senjata utamanya. Jadi, masyarakat bisa berperan secara aktif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Meskipun begitu, tetap dibutuhkan kontrol pemerintah dan kreatifitas penyuluh untuk memasukkan materi essensial dari suatu program dan menyelesaikan masalah masyarakat lewat berbagai manifestasi kearifan lokal yang ada, ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Strategi pemberdayaan yang bisa diterapkan pada masyarakat pesisir

No	Masalah nelayan	Strategi Pemberdayaan
1.	Ketergantungan nelayan dengan <i>pengambek</i> .	Dibentuk koperasi yang dikelola oleh nelayan, dengan menerapkan hukuman berupa sanksi sosial dan bagi hasil.
2.	Salah paham antar nelayan ketika proses <i>andun</i> .	Pada saat petik laut, masyarakat bisa mengundang nelayan, tokoh adat dari desa lain agar kebersamaan bisa terbentuk.
3.	Antar nelayan terkait penggunaan <i>rumpon</i> .	Membuat rumpon tradisional secara berkelompok dengan sistem penggunaan rumpon berdasarkan kearifan lokal yang ada.
4.	Pemasaran hasil tangkapan.	Membuat kelompok yang terdiri dari istri nelayan untuk mengolah ikan menjadi makanan tradisional yang bisa menjadi ciri khas daerah tersebut.
5.	Kekhawatiran para nelayan dengan penggunaan pukot, bom, dan sebagainya.	Membentuk sistem jaga antar nelayan yang terjadwal dan pembentukan forum musyawarah masyarakat adat yang akan mengurus sanksi dan larangan adat ketika ada nelayan yang melanggar peraturan.
6.	Jumlah ikan yang semakin sedikit.	Pemerintah memasukkan agenda pelepasan bibit ikan pada acara-acara seperti petik laut.
7.	Konservasi wilayah perairan.	Lewat petik laut pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman terumbu dan melakukan kegiatan penyuluhan terkait penangkapan ikan hanya pada ikan



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Masalah nelayan	Strategi Pemberdayaan
8.	Rendahnya pendapatan.	yang dewasa, jenis tertentu dan membiarkan ikan yang masih kecil serta tidak menangkap ikan pada musim kawin. Upacara petik laut dijadikan sebagai komoditas pariwisata dengan pengelolaan yang terpadu antara penyuluh dengan masyarakat. Pengembangan daerah ekowisata juga bisa dilakukan dengan penambahan aktivitas seperti membudidayakan rumput laut atau bertani garam.

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti, (2016)

PENUTUP

Di Jawa Timur secara umum terdapat beberapa kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat pesisir, seperti petik laut, *nyabis*, *pengambek*, *rumpon*, sistem kontrak kerja, dan *andun*. Lewat kearifan lokal ini maka strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *community based management*. Strategi ini memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lewat peran serta dari pemerintah. Pemerintah bisa memanfaatkan kearifan lokal seperti petik laut untuk memasukkan agenda pelepasan ikan, penyuluhan, penanaman terumbu karang, mengundang nelayan dari daerah lain saat upacara adat, membuat rumpon secara berkelompok, membentuk sistem ronda, koperasi, dan paguyuban ibu-ibu nelayan.

Agar strategi tersebut bisa berjalan dengan baik maka perlu dilakukan musyawarah antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah sebelum merumuskan sebuah program pemberdayaan. Disini, pemerintah harus mengidentifikasi kearifan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah program pemberdayaan bisa sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima oleh masyarakat. Ketika program berlangsung juga perlu adanya penguatan kelompok atau lembaga adat maupun pemerintahan desa agar pengelolaan sumber daya wilayah pesisir yang mereka miliki bisa berjalan dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2016. Rumpon Tradisional, Alat Pengumpul Tuna di Sendang Biru. <http://www.wwf.or.id/?48082/getting-to-know-the-tuna-fishing-equipment-in-sendang-biru>. Diakses 01 September 2016.
- Christy, Jr, Francis T. 1982. Territorial use rights in marine fisheries: definitions and conditions. Fishery Development Planning Service. FAO Fishery Policy and Planning Division.
- Erawati, Crystal. 2014. Tradisi Kecamatan Puger. <https://limasfisipunej.wordpress.com/2016/03/09/tulisan-realis-vii-tradisi-kecamatan-puger/>. Diakses 01 September 2016.
- Fauzi, Noer. 2003. Radikalisasi Perlawanan Petani Era Orba. IKHRIS. Jakarta.
- Juniarta, Hagi Primadaksa. 2013. Kajian Profil Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Pulau Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Jurnal ECSOFiM Vol. 1 No. 1.
- Nikijuluw, Victor P.H. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu. Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor.
- Rawis, J. 2004. Menjahit Laut yang Robek. Yayasan Malesung. Jakarta.
- Ridwan, N. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. <http://ibda.files.wordpress.com/2008/04/2-landasan-keilmuan-kearifan-lokal.pdf>. Diakses 01 September 2016.
- Rochmawati, Rina. 2016. Geliat Nelayan Pantai Besuki (Studi Perubahan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Pesisir Besuki Situbondo Tahun 1974-1998). <http://www.jurnalpendidikan.net/2016/02/geliat-nelayan-pantai-besuki-studi.html>. Diakses 01 September 2016.
- Yudono, Jodhi. 2012. Nelayan Banyuwangi Gelar Petik Laut. <http://lipsus.kompas.com/fokenara/read/2012/01/18/2209524/Nelayan.Banyuwangi.Gelar.Petik.laut>. Diakses 01 September 2016.



PERSPEKTIF PETANI PADA GAYA BERTANI RAMAH LINGKUNGAN (Studi Kasus di Gapoktan WP, Kabupaten Bandung Barat)

Adi Nugraha, Yayat Sukayat, Rani Andriani

Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran

Email: Adi.nugraha@unpad.ac.id

ABSTRAK

Pertanian konvensional telah mendekati titik jenuh dalam menyokong keberlangsungan pertanian di masa depan. Modernisasi pertanian telah menunjukkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi petani. Paradigma baru menyarankan agar petani beralih ke gaya bertani organik. Permasalahannya, seperti sebagian besar program lainnya, proses diseminasi dilakukan secara *top-down*, yang seringkali mengabaikan perspektif petani. Akibatnya, terjadi resistensi di tingkat petani atau terjadi 'kecurangan' dalam rantai pasok sayuran organik, yang merugikan konsumen. Studi ini dilakukan untuk menangkap perspektif petani terhadap paradigma pertanian organik, khususnya pada komoditas sayuran daun Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Studi ini merupakan studi kasus yang menerapkan metode kualitatif. *Actor Oriented Approach* diterapkan dalam analisa data. Data primer didapatkan dari proses etnografi meliputi observasi lapangan, observasi partisipan dan wawancara mendalam kepada pelaku kunci baik di tingkat pemerintahan, tokoh tani, dan supplier/pihak swasta. Hasil analisis menunjukkan bahwa petani memiliki kemampuan dalam menganalisa program eksternal sebelum mereka memutuskan untuk mengubah gaya bertani mereka ke gaya bertani organik secara sadar, atau hanya sebatas persyaratan agar program berjalan dengan baik. Perspektif petani merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu program/kebijakan. Oleh karena itu, formulasi dan diseminasi suatu program disarankan agar mengikutsertakan pemikiran dan perspektif petani sebagai pelaku utama di bidang pertanian.

Kata Kunci: Pertanian Organik, Diseminasi, Perilaku Bertani, Perspektif Petani, *Actor Oriented Approach*

SUSTAINABLE STYLE OF FARMING: A FARMER'S PERSPECTIVE (A Case Study in Western Bandung Regency)

ABSTRACT

Conventional farming is reaching its saturation point in supporting future agriculture. Agricultural modernization has shown its negative side, especially towards environment and socio-economic condition of the farming society. Recent paradigm offers organic farming as an alternative. However, this alternative way of farming usually came from external sources, which like many other programs, are disseminated in a top-down way, putting farmers' perspectives in periphery. The consequences would be the emergence of resistances in the farmers' level, or even frauds in organic supply chain, which threatens the consumers. This study aims to dive into farmers' perspective on the proliferating organic programs, especially for vegetables in Western Bandung Regency, West Java, Indonesia. The study is a case study which applies Actor Oriented Approach to analyse



the data. Data was acquired through an ethnography study including field observation, participant observation and in-depth interview with key actors from government, supplier and farmers. The results show that farmers used their own agency in processing external programs before they decide to choose their farming style. Farmers' perspective is an ever important aspect for programs/policies. Thus, in its formulation and dissemination, farmers' perspectives should be taken into account.

Keywords: Organic Agriculture, Dissemination, Farming Styles, Farmers' Perspectives, Actor Oriented Approach

PENDAHULUAN

Revolusi Hijau berjalan dengan diseminasi secara meluas dan telah berhasil meningkatkan produksi pangan Indonesia. Selain mengenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian (benih, agro-input, alat mesin), program diseminasi revolusi hijau juga membawa serta pengetahuan bercocok tanam 'baru', yang seiring dengan berjalannya waktu, mengikis pengetahuan dan tatacara bertani 'tradisional', dan berubah menjadi dasar tatacara bertani di Indonesia hingga saat ini. Proses diseminasi kebijakan-kebijakan terkait dengan Revolusi Hijau berjalan secara *top-down*, dengan tingkat toleransi yang sangat rendah di beberapa wilayah di Indonesia. Selama periode diseminasi Revolusi Hijau, Indonesia mengalami peningkatan luas lahan, tenaga kerja, dan input pertanian (Nugraha, 2015). Luas lahan mengalami peningkatan dengan rata-rata laju 1,4 % per tahun selama 1961-2006, khususnya di daerah Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi (van der Eng, 1994). Penggunaan pupuk dan bibit unggul meningkat dengan laju rata-rata 11% selama periode 1961-1980, serta subsidi pemerintah untuk agro-input diterapkan (Mundlak, Larson, & Butzer, 2004).

Kesuksesan diseminasi program Bimbingan Massal tidak hanya membawa dampak positif terhadap pertanian Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif, khususnya pada aspek lingkungan dan sosial pertanian. Di satu sisi, program Bimbingan Massal telah mampu meningkatkan produksi pangan di Indonesia melalui berbagai intervensi kebijakan serta diseminasi teknologi dan pengetahuan, meningkatkan kondisi ekonomi kelompok masyarakat tertentu. Di sisi lain, teknologi dan pengetahuan yang dibawa serta oleh program tersebut telah mulai menunjukkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat.



Pertanian konvensional telah mendekati titik jenuh dalam menyokong keberlangsungan pertanian di masa depan. Modernisasi pertanian telah menunjukkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi petani. Paradigma baru menyarankan agar petani beralih ke gaya bertani organik. Peralihan paradigma ini didukung oleh pemerintah baik di tingkat global (*Sustainable Development Goals*) maupun tingkat nasional (program pertanian berkelanjutan Kementerian Pertanian). Di tingkat nasional, pemerintah mulai mencanangkan program pertanian organik pada tahun 2001 melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian dengan slogan visi “*Go Organic 2010*”. Program tersebut bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir terbesar komoditas pertanian. Walaupun demikian, program ini dinilai gagal oleh berbagai peneliti dikarenakan kurangnya keseriusan dan dukungan pemerintah dalam pencapaian visi tersebut (ADB, 2006; Jahroh, 2010). Permasalahannya, seperti sebagian besar program lainnya, proses diseminasi dilakukan secara *top-down*, yang seringkali mengabaikan perspektif petani. Akibatnya, terjadi resistensi di tingkat petani atau terjadi ‘kecurangan’ dalam rantai pasok sayuran organik, yang merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan etnografi yang memudahkan proses identifikasi pengetahuan/pemikiran yang tertanam dalam kegiatan dan budaya masyarakat lokal. Teori *Actor Oriented Approach* (Long, 2001) juga digunakan untuk mendapatkan proses pengambilan keputusan dari perspektif pelaku. *Actor Oriented Approach* (AOA) mengembangkan teori agensi (Giddens, 1976) berdasarkan kapasitas aktor dalam memroses dan berperilaku dengan lingkungan serta pengalaman/pengetahuan aktor lain dengan cara yang beragam, menyesuaikan dengan prioritas, tujuan, dan keadaan/kondisi aktor tersebut (Long, 2001). “AOA bertujuan untuk memahami petani, dari mulai perilaku bertani hingga keterkaitan antar pelaku ‘dalam konteks yang mereka alami/jalani’” (Rhoades, 1984 p. 40-41). Dalam konteks ini, “metode *actor*



oriented, seperti yang dijelaskan Long, sangat berguna dalam mendapatkan informasi spesifik terkait dengan aktifitas pertanian” (Hebinck & Ploeg, 1997 p.204).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah produksi sayuran unggul di Provinsi Jawa Barat. Selain karena didukung oleh keuntungan agroklimat dataran tinggi yang diperkaya oleh tanah vulkanis subur, kawasan Bandung Barat juga didukung oleh budaya dan tradisi petani yang terbiasa bercocok tanam komoditas sayuran.

Gapoktan WP merupakan salah satu Gapoktan yang berlokasi di Kab. Bandung Barat, dengan luas lahan total sekitar 64 Ha yang ditanami berbagai komoditas sayuran. Gapoktan ini termasuk yang paling aktif secara kelembagaan, sehingga Gapoktan ini memiliki akses terhadap informasi, pasar, teknologi, dan program pemerintah lebih dari Gapoktan lain. Hal ini tidak hanya membuat Gapoktan selalu menjadi sasaran program-program pengembangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun pihak swasta (perusahaan agro-input, supplier pasar modern, eksportir, dll). Sebagai hasilnya, aplikasi teknologi dan cakupan pasar Gapoktan ini lebih luas dan beragam dibandingkan dengan Gapoktan lainnya.

Saat ini Gapoktan tidak hanya memasarkan produk taninya ke pasar tradisional, tetapi juga ke supplier supermarket PT. AF dan bahkan sudah mengisi pasar ekspor ke Singapura melalui PT. AS. Dengan munculnya paradigma keberlanjutan di seluruh elemen masyarakat (produsen, distributor, konsumen) maka segmentasi pasar produk sehat terbentuk di tingkat konsumen. Tingginya permintaan akan sayuran organik membuat PT. AS menjalin kerjasama dengan beberapa gapoktan mitra. Hanya saja, diseminasi SOP dan GAP dilakukan dengan cara yang kurang partisipatif, tanpa memperhitungkan pemikiran dan kondisi petani berdasarkan lokalitas mereka.

Perusahaan memiliki sertifikat organik, karena PT. AF dan beberapa mitra memiliki kebun organik. Meskipun demikian, produktifitas kebun organik



mereka tidak mampu memenuhi tingkat permintaan. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kecurangan di tingkat petani, yang juga 'didukung' oleh pihak perusahaan demi menutupi tingkat permintaan yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelusuran, didapatkan beberapa faktor yang dari sudut pandang petani, menjadi hambatan untuk melakukan pertanian organik. Faktor tersebut adalah:

a. Produktivitas rendah.

Dibandingkan dengan pertanian konvensional yang tinggi akan agro-input sebagai perangsang tumbuh, maka produktivitas produk organik jauh lebih rendah. Hal ini menjadi wajar dikarenakan karakteristik pertanian organik yang mengandalkan bahan-bahan alami sebagai nutrisi seadanya.

b. Nilai ekonomis rendah.

Meski harga jual produk organik lebih tinggi dibandingkan dengan produk non-organik, tetapi secara ekonomis lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kegagalan yang disebabkan baik oleh serangan hama, maupun kurangnya nutrisi yang memengaruhi karakteristik fisik produk sehingga tidak bisa memenuhi spesifikasi yang diminta.

c. Tenaga dan waktu kerja intensif.

Pemeliharaan produk organik memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak demi menjaga produktivitas dan kualitas produk. Mulai dari persiapan lahan dan pemupukan yang membutuhkan waktu lebih lama dari pertanian konvensional (contoh: pembersihan gulma cara organik, dicabut dengan menggunakan banyak tenaga kerja, sedangkan konvensional cukup disemprotkan herbisida), hingga ke pemanenan yang dipilih. Selain itu, pada pertanian konvensional, petani memiliki lebih banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk aktifitas mencari pendapatan sampingan.

d. Tingkat kegagalan tinggi.

Pestisida alami pada kasus ini tidak seefektif pestisida kimia dalam menangani serangan hama. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kegagalan panen (20-40%) di kebun. Selain itu, pasokan nutrisi yang terbatas juga membatasi pertumbuhan dan karakteristik fisik tanaman, sehingga tidak semua produk



dapat diterima oleh pasar. Artinya, sekitar 30 – 50% hasil produksi tidak dapat dijual.

e. Prosedur yang rumit.

Pertanian organik memerlukan perhatian yang lebih intensif daripada pertanian konvensional. Perhatian terhadap aktivitas detail harus dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan, atau mengikuti kondisi di lapangan. Artinya, petani harus fokus dalam melakukan pemeliharaan di kebun organik.

Faktor-faktor tersebut menjadi penghambat bagi petani untuk beralih ke pertanian organik. Oleh karena itu, sangat wajar bila saat ini PT. AF memiliki petani mitra yang jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan pada saat program dimulai. Sementara tingkat permintaan supermarket akan sayuran organik memiliki kecenderungan meningkat. Kecurangan pun tidak dapat dihindarkan, peneliti beberapa kali menyaksikan bagaimana PT. AF memenuhi permintaan pasar organiknya dengan membeli dari petani non-organik. Sayuran non-organik dicuci bersih, dan dilukai agar terlihat seperti terserang oleh hama, setelah itu produk dimasukkan ke dalam kemasan yang bertuliskan produk organik bersertifikasi, dan disalurkan ke supermarket.

Kecurangan seperti ini tentu saja sangat merugikan pelanggan yang telah menyerahkan kepercayaan kepada produk dengan label AF dan bersedia untuk membayar lebih mahal dari sayuran lainnya. Harapannya, praktik-praktik semacam ini harus lebih diawasi dan dihilangkan, dan secara perlahan, karakter petani harus dibentuk demi mencapai tujuan dari suatu program.

PENUTUP

Proses diseminasi merupakan proses yang paling penting dalam difusi suatu inovasi atau teknologi dalam rangka merubah perilaku petani. Meskipun demikian, dalam kasus ini proses diseminasi masih belum optimal. Program-program eksternal diperkenalkan dengan cara yang sama, berdasarkan jangka waktu berjalannya suatu program, tanpa ada proses yang berkelanjutan yang mempertimbangkan pola pikir dan pola hidup petani.



Akibatnya, pengawasan tidak berjalan dengan optimal sehingga menciptakan ruang untuk terjadinya suatu perilaku kecurangan. Dalam kasus ini, kecurangan terjadi di pihak distributor/supplier, di mana pasokan sayuran organik mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga mereka menginisiasi para petani mitra untuk melakukan kecurangan dengan menggunakan input kimia dalam kegiatan produksi mereka. Sertifikasi organik pun tidak berpengaruh, karena kebun yang disertifikasi merupakan kebun organik sedangkan pasokan barang tidak semua berasal dari kebun tersebut, tetapi sebagian berasal dari kebun petani mitra.

Pembangunan pertanian sebaiknya dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, tidak terbatas oleh jangka waktu program. Dengan demikian, proses diseminasi dan difusi dapat terawasi dan terus ditingkatkan hingga titik di mana petani secara sadar merubah perilakunya sesuai dengan target yang diharapkan.

Selama menjalani proses penelitian, peneliti merasakan bahwa tekanan yang dihadapi oleh petani organik lebih besar daripada petani konvensional. Faktor-faktor yang disebutkan di atas hanya merupakan gambaran kasar. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan demi tercapainya sistem diseminasi yang optimal dan berprinsip pada aspek keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, A. (1989). Indonesian agricultural development in comparative perspective. *World Development*, 17(8), 1235–1254. doi:10.1016/0305-750X(89)90235-0
- Eng, P. Van Der. (1994). Development of seed-fertilizer technology in Indonesian rice agriculture. *Agricultural History*, 68(1), 20–53.
- Giddens, A. (1976). *New rules of sociological method: a positive critique of interpretative sociologies*.
- Hebinck, P., & Ploeg, J. Van der. (1997). Dynamics of agricultural production. An analysis of micro-macro linkages.
- Long, N. (2001). *Development sociology: actor perspectives. Development*.
- Mundlak, Y., Larson, D., & Butzer, R. (2004). Agricultural dynamics in Thailand, Indonesia and the Philippines. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 48(1), 95–126.
- Nugraha, A. (2015). An ethnography study of farming style in Gianyar , Bali , Indonesia.



MEWUJUDKAN INDUSTRIALISASI PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN PETANI BERBASIS KOMODITI JAGUNG UNTUK MENGHADAPI ERA MEA BAGI PETANI DI NTT

*Leta Rafael Levis; **Keppi Sukesu, **Sugiyanto dan **Yayuk Yuliati

*Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana-Kupang

**Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya-
Malang

email: Tania_levis@yahoo.com

ABSTRAK

Sebanyak 90% masyarakat di NTT menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kekuatan petani untuk menghadapi era MEA terletak pada kualitas petani mengolah sumber daya pertanian menjadi bahan industri. Salah satu komoditi unggulan di NTT adalah jagung. Produksi jagung di NTT menempati urutan ke-enam di Indonesia. Luas tanam jagung di NTT sebanyak 269,435 hektar dengan luas panen 244,583 hektar dengan produksi 647,072 ton. Tulisan ini bertujuan mengetahui potensi pemberdayaan berbasis jagung untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan dan peluang penerapan metode pemberdayaan melalui pelatihan partisipatif dialogis untuk mewujudkan perilaku petani yang dibutuhkan untuk mengolah produk jagung menjadi produk industri pedesaan. Metode survey dipakai dan analisis data secara deskriptif dengan SPSS. Dari 247 petani di Timor yang disurvei, tidak seorang pun pernah mengikuti pelatihan partisipatif dialogis tentang pengolahan jagung menjadi produk industri rumah tangga seperti emping, keripik, ferkedel, kue tar, marning serta pupuk dan braket. Perilaku petani terhadap aspek 'off farm' tergolong rendah dengan skor rerata 2 (kategori rendah) serta skor pengetahuan 2,05 (komprehensif), skor sikap 1,9 (respon) dan skor keterampilan 2,05 (meniru) dan hasil ini sesuai dengan kondisi yang rerata 'late majority'. Implikasinya, untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan maka penerapan metode pemberdayaan melalui sistem pelatihan partisipatif dialogis diperlukan karena mengutamakan proses pembelajaran petani yang dialogis yang memberikan kesempatan bagi petani untuk berbicara dan melakukan yang menurut teori belajar mampu merubah perilaku seseorang mencapai 90%.

Kata kunci: Industrialisasi pedesaan, pemberdayaan, jagung, pelatihan partisipatif, perilaku petani.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, pembangunan pertanian tidak bisa dilepas-pisahkan dengan pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh bangsa lain. Era perdagangan bebas, seperti berlakunya MEA, serta pengaruh perubahan iklim global saat ini telah mempengaruhi kebijakan pembangunan



pertanian di suatu Negara. Jika dilihat dalam konteks global maka hambatan terbesar dan ancaman paling berbahaya bagi pembangunan pertanian dan umat manusia adalah terjadinya 1) krisis energi, 2) krisis pangan, 3) krisis sumber daya pertanian.

Oleh karena itu, kecenderungan paradigma pembangunan yang ditekankan saat ini adalah pada upaya peningkatan produktifitas, melestarikan sumber daya alam khususnya pertanian serta menggalakkan pengembangan komoditas lokal, tetapi kealpaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya petani sehingga petani beradaptasi menghadapi, mengatasi berbagai krisis serta kelambanan pengembangan industrialisasi pertanian pedesaan.

Menurut laporan Departemen Pertanian Amerika tahun 2013, Indonesia menduduki urutan ke-12 jumlah produksi jagung di dunia dengan jumlah produksi 11,200,00 juta ton (USDA, 2013). Di Indonesia, produksi jagung menyebar hampir ke seluruh wilayah nusantara. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan ke-enam produksi jagung sebanyak 612,127 ribu ton (BPS 2014).

Secara kuantitatif luas tanaman jagung di NTT tahun 2014 adalah 269,435 hektar dengan luas panen 244,583 hektar dengan produksi jagung di NTT 647,072 ton. Walaupun tanaman jagung sudah lama dibudidaya serta menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian masyarakat NTT, banyak petani masih menggunakan cara tradisional dalam budidaya jagung, di lain pihak pembinaan petani dalam agribisnis jagung ('on farm' dan 'off farm') masih sangat lemah. Hal ini menyebabkan produksi jagung di daerah ini masih rendah. Misalnya, data perkembangan produktifitas jagung rata-rata selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 masih rendah yakni rata-rata hanya 2.32 ton/ha dengan rincian adalah tahun 2010 sebesar 2,2 ton /hektar, tahun 2011 sebesar 2,1 ton/hektar, 2012 sebesar 2,3 ton/hektar, 2013 sebesar 2,5 ton/hektar dan tahun 2014 sebesar 2,52 ton/hektar ((Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, 2015). Angka ini masih jauh dari harapan sebab untuk jenis jagung komposit Lamuru yang banyak ditanami petani NTT produktifitas potensial mencapai 7,6 ton/ha dan Bisma mencapai 7,5 ton/ha – 13 ton/ha (BPTP NTT, 2013).



Selain itu, pengolahan jagung menjadi barang industri rumah tangga seperti emping jagung, marning, dodol jagung, ferkedel jagung, manisan jagung serta makanan ternak, pupuk dan briket belum dilaksanakan. Untuk mewujudkan berbagai produk industri tersebut di atas maka dibutuhkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan dengan penerapan metode yang mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam sehingga dapat mewujudkan industrialisasi pedesaan sehingga dapat meningkatkan ekonomi pedesaan sebagai modal bagi para petani untuk menghadapi era MEA.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah ini adalah bagaimanakah perilaku petani dalam aspek pengolahan ('off farm'), potensi industrialisasi pedesaan berbasis jagung dan bagaimana metode pemberdayaan petani berbasis komoditi jagung untuk mewujudkan industrialisasi pedesaan dalam bentuk olahan jagung untuk menghadapi era MEA?. Sedangkan tujuannya adalah menganalisis perilaku petani, potensi industrialisasi pedesaan dan peluang penerapan metode pelatihan partisipatif dialogis dalam pemberdayaan masyarakat petani berbasis komoditi jagung industrialisasi pedesaan dalam bentuk olahan jagung untuk menghadapi era MEA.

METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap aspek perilaku petani yang terkait dengan pengetahuan, sikap dan keterampilannya terhadap proses pengolahan jagung menjadi berbagai hasil produk olahan amat diperlukan. Perilaku petani dalam agribisnis jagung pada level 'off farm' adalah suatu realitas sosial yang dapat diamati, dilihat dan diukur sehingga dapat menggunakan paradigma penelitian positivisme (Agus Comte disitasi Aldonuary. 2012), yang diikuti pendekatan kuantitatif. Sampling lokasi dengan 'multi stage purposive sampling' sedangkan sampling responden dengan 'cluster random sampling'. Jumlah responden sebanyak sebanyak 247 orang yang didapat berdasarkan rumus Slovin



$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$
 Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan

menggunakan pertanyaan terstruktur dan bersifat 'open ended questionned (Leedy 1997 dan Malhotra, et al., 1996). Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan skala Likert dan alat statistik SPSS 20. Untuk kategori pengetahuan, sikap dan keterampilan digunakan pendekatan prosentase pencapaian skor maksimum yang diturunkan dari rumus interval (i) oleh Levis (2013) sebagai berikut: ≥ 20 - 36 (sangat rendah), >36 - 52 (rendah), >52 - 68 (sedang), >68 - 84 (tinggi), dan >84 - 100 (sangat tinggi). Nilai i didapat dari rumus interval (i): $R-r/n$.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Responden

Karakteristik dalam tulisan ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden bermata pencaharian sebagai petani dan 122 orang memiliki pekerjaan sampingan. Dari 247 responden, sebanyak 159 orang (64,4%) laki-laki dan 88 orang (36,6%) perempuan. Kemudian, rerata umur untuk 247 responden adalah 45,01 tahun dengan kisaran antara 20 tahun sampai 72 tahun. Sekalipun range umur responden di luar batasan umur produktif sesuai kriteria BPS, kenyataan di lapangan bahwa petani yang berumur 60 tahun ke atas bahkan sampai 70 tahun, masih produktif. Jumlah responden per kategori pendidikan adalah masing-masing tidak pernah sekolah sebanyak 15 orang (6,1%), sekolah dasar sebanyak 143 orang (57,9%), sekolah menengah pertama sebanyak 37 orang (15%), sekolah menengah atas sebanyak 50 orang (20,20%), dan perguruan tinggi sebanyak dua orang (0,8%). Jumlah tanggungan keluarga petani rerata sebanyak 4,57 orang dengan kisaran antara 2 orang sampai 11 orang.

Kegiatan Usahatani

Para petani menanam jagung berbagai jenis seperti jagung lokal, komposit dan hibrida. Jenis jagung lokal adalah jagung putih dan jagung kuning (90 orang), jenis komposit seperti jagung lamuru dan arjuna (87 orang), hibrida



seperti BC12, BC16, BC 222 (70 orang). Luas tanaman jagung yang dimiliki oleh petani rerata adalah 80,16 are (atau rerata = 0,8 hektar) dengan kisaran terkecil dua are sampai 600 are. Jagung dihasilkan per tahun rata-rata 231,35 kuintal atau 2,3 ton per sekali panen dengan kisaran produksi antara 5 kuintal sampai 1.520 kuintal.

Perilaku Petani terhadap Agribisnis Jagung Pada Level 'Off Farm'

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perilaku petani dalam agribisnis jagung pada level 'off farm' menggunakan 5 item pertanyaan, yakni; 1) perilaku petani dalam mengangkut dan menyimpan jagung; 2) perilaku petani dalam mengolah jagung terutama untuk menjadi marning, dodol, ferkedel, kue jagung, emping dan lain-lain dan mengolah secara tradisional; 3) perilaku petani dalam mengolah limbah batang dan daun jagung untuk makanan ternak, pupuk, braket; 4) perilaku petani dalam pemasaran jagung, dan 5) perilaku petani dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi terdapat $5 \times 3 \times 5 = 75$ peluang jawaban. Kalau skor skala Likert terendah 1 dan tertinggi 5 maka peluang seorang responden untuk memperoleh skor adalah terendah 75 dan tertinggi 375. Untuk memperoleh pencapaian prosentase skor maksimum digunakan cara seperti pada perilaku petani pada level 'on farm'.

Hasilnya adalah perilaku petani di Timor Barat dalam agribisnis jagung pada level 'off farm' tergolong tidak baik atau tidak mendukung program agribisnis jagung. Kategori rendah ini disebabkan oleh skor rerata yang diperoleh petani sebesar 2 atau sebesar 40% dan berada kisaran dalam range $> 36 - 52$ artinya kategori rendah. Distribusi responden berdasarkan perilaku terhadap agribisnis jagung pada level 'off farm' berdasarkan pencapaian skor maksimum berada dalam range $\geq 36 - 52$ yakni sebanyak 129 orang (52,23%), sangat buruk 94 orang (38,05%) dalam range $>20 - 36$ dan sedang 24 orang (0,92%) dalam range $>52-68$, sebaliknya tidak ada petani di Timor Barat berkategori perilaku mendukung agribisnis jagung level 'off farm'.

Jika dilihat masing-masing domain perilaku yakni pengetahuan, sikap dan keterampilan maka diperoleh skor rerata yang paling rendah adalah domain sikap yakni sebesar 1,9 atau 38% (respon). Namun demikian, skor tersebut tidak



berbeda jauh dengan skor rerata untuk domain pengetahuan dan keterampilan yang sama-sama memperoleh skor sebesar 2,05 atau 41% (komprehensif dan meniru). Angka 38% dan 41% sama-sama berada dalam kategori rendah yakni < 36 – 52. Kondisi ini menyebabkan tingkat adaptasi petani terhadap perubahan rendah (Sri, 2016 dan Yuliati, 2011).

Skor pengetahuan rerata sebesar 2,05 atau 41% kategori rendah. Jika dilihat per unsur 'off farm' maka pengetahuan paling rendah pada aspek memberikan kepuasan kepada konsumen dengan skor rerata 1,02 dan diikuti oleh pengetahuan dalam hal pengolahan sebesar 1,9. Hal ini berarti masalah pengolahan dan pemasaran (aspek kualitas pelayanan kepada konsumen) belum dilaksanakan oleh para petani. Petani seperti ini, tidak mungkin mampu menghadapi era MEA. Jika dibandingkan dengan teori Bloom, petani hanya mampu menjelaskan secara komprehensif tetapi mereka belum mampu mengaplikasikannya, belum mampu menganalisa, belum mampu membuat sintesa serta belum mampu melakukan evaluasi terhadap kelima komponen aktivitas pada level 'off farm'.

Skor sikap rerata sebesar 1,9 atau 38% atau berada dalam kategori rendah. Sebanyak 148 orang (59,92%) berada dalam kategori ini, kemudian 85 (34,41%) dalam kategori tidak suka dan 14 (5,67%) dalam kategori sedang. Hal ini dapat dimaklumi karena semua petani mengaku tidak pernah dilatih untuk mengolah jagung menjadi produk olahan seperti marning jagung, dodol jagung, ferkedel jagung, kue jagung, emping jagung dan lain-lain. Selain itu, para petani juga belum pernah mendapat pelatihan tentang pengolahan limbah jagung menjadi pupuk maupun braket. Selanjutnya, para petani juga tidak suka kepada pemerintah karena membiarkan harga jagung petani bersaing dengan pasar bebas atau dengan kata lain, pemerintah tidak membantu petani menentukan harga jagung yang menguntungkan petani. Petani menginginkan harga jagung sekitar Rp. 4000-4500 per kg saat panen tetapi karena mekanisme pasar pemerintah hanya mampu menawarkan Rp. 2.250 per kg. Alasan pemerintah, harga jagung di pasaran khususnya harga jagung dari Jawa Timur hanya 2,250 per kg. Menurut Bloom sikap seperti hanya menerima dan telah memberikan



respon serta menyesuaikan diri dengan program pemerintah khususnya agribisnis jagung tetapi belum mampu menilai, mengorganisir serta aktivitas 'off farm' belum menjadi bagian dari pola hidup masyarakat setempat khususnya dalam hal penanganan pasca panen dan pengolahan.

Skor keterampilan rerata sebesar 2,05 atau konversi dalam prosentase pencapaian skor maksimum sebesar 41% artinya petani berketerampilan rendah dalam aktivitas 'off farm'. Hal ini dibenarkan oleh pengakuan petani dimana seluruh petani (100%) mengaku belum pernah mendapat pelatihan tentang pengolahan jagung menjadi marning, ferkedel, kue jagung, dan lain-lain. Petani juga belum pernah mendapat pelatihan tentang pengolahan limbah jagung menjadi pakan ternak, briket dan pupuk. Menurut Bloom, petani seperti masih pada tahap meniru. Artinya, para petani di Timor Barat belum mampu membiasakan diri, beradaptasi dan menciptakan keterampilan sendiri dalam hal pengolahan jagung maupun pengolahan limbahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan kondisi riil masyarakat khususnya petani di Timor Barat yang lebih mengikuti cara-cara yang dilaksanakan oleh orang lain yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. *Misalnya, jika tetangga membuka kios maka anggota masyarakat yang lain pun mulai ikut-ikutan membuka kios.* Para petani di lokasi penelitian rerata memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pihak luar khususnya teman serta tidak memiliki inovasi dalam berusaha sebab dari kecepatan adopsi inovasi, rerata masyarakat petani berada pada kategori 'late majority'.

Mewujudkan Industrialisasi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Petani dengan Metode PPD Berbasis Agribisnis Jagung untuk Menghadapi Era MEA

Industrialisasi akan mewujudkan perubahan dalam masyarakat, khususnya para petani. Perubahan akan terwujud jika didahului oleh perubahan perilaku petani dalam mengelola usahatani. Perubahan yang diarahkan melalui perubahan perilaku petani tidak akan merusak nilai-nilai hidup manusia sehingga perubahan membawa kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam pengembangan industrialisasi pedesaan harus menghindari 1) eksploitasi tenaga



buruh oleh pemilik modal, 2) rasa keterasingan masyarakat lokal terhadap dunia sekitarnya, dan 3) kerusakan lingkungan.

Pemerintah NTT menyadari pentingnya pembangunan pertanian disertai aspek pengolahan produk pertanian (Distabun NTT, 2016). Hasil penelitian Levis (2016) menunjukkan bahwa 100% petani mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan pengolahan jagung menjadi berbagai produk industri rumah tangga pedesaan. Kemudian, hasil penelitian Bank Dunia dan Undana (2009) menunjukkan bahwa 92% petani di NTT tidak melakukan pengolahan jagung. Hal ini berarti dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintah NTT tidak memperhatikan aspek pengolahan. Padahal menurut hasil penelitian Stanis, dkk. (2016) menemukan bahwa pengolahan memiliki keunggulan komparatif untuk pengembangan industri kuliner termasuk industri kuliner berbahan dasar jagung, misalnya di Kota Kupang.

Data tersebut di atas mengandung tantangan bagi pemerintah dalam pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis hahan dasar pertanian (jagung). Sebaliknya, menjadi peluang bagi pemerintah untuk menerapkan metode pemberdayaan dengan PPD dan membuka peluang bagi petani untuk mengikuti PPD tentang proses pengolahan jagung sebagai salah satu embrio terwujudnya industrialisasi pedesaan baik kuliner maupun produk industri lainnya.

Dalam pelaksanaan pelatihan partisipatif harus memperhatikan beberapa tahapan (Hickerson, F.J. dan John Middleton, 1995, Levis, 2015, Soetrisno, 1988, dan Aportadera et al., (1991) seperti; 1) proses penyadaran peserta (perceive purpose); 2) tahap-tahap training; 3) memperhatikan keberbedaan peserta (metode kelompok & individu); 4) prakteknya sesuai tujuan (materi dan demonstrasi); 5) ada pengetahuan yang dihasilkan (materi dan demonstrasi); 6) saat Teaching Learning Process (TLP) harus ada 'role playing', demonstrasi, dan 'field visits' (SLP).

Dari aspek penggunaan metode dan media, PPD ini memungkinkan petani untuk mengalami langsung proses pembelajaran dengan berbagai kombinasi media yang menurut catatan para ahli mampu meningkatkan pencapaian perubahan perilaku sebesar 90% sebab mendengar saja hanya



mencapai 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, melihat, mendengar, berbicara mencapai 70% dan berbicara dan melakukan mencapai 90% (Arif, S. (2008 dalam Levis, 2015). Selanjutnya, Yekinni dan Akinbile (2014) dan Zwane dan Kekana (2014) menyebut komunikasi dialogis baik langsung maupun tidak langsung amat diperlukan untuk meningkatkan dalam efektifitas proses pembelajaran petani.

PENUTUP

Petani di NTT belum tahu dan mampu menghadapi persaingan bebas era MEA karena perilakunya terhadap aspek 'off farm' tergolong rendah dengan skor rerata 2 serta skor pengetahuan 2,05 (komprehensif), skor sikap 1,9 (respon) dan skor keterampilan 2,05 (meniru) dan hasil ini sesuai dengan kondisi ril petani yang rerata 'late majority'. Kemudian, NTT memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan industrialisasi pedesaan berbasis komoditi pertanian khususnya jagung karena merupakan produksi terbesar ke-enam di Indonesia. Industrialisasi pedesaan akan terwujud manakala pemerintah serius mengembangkan potensi petani untuk proses pengolahan jagung menjadi berbagai bentuk olahan baik industri kuliner maupun pakan ternak, pemupukan dan briket. Implikasinya, sebagaimana diktehai bahwa perilaku petani menentukan keberhasilan pembangunan pertanian sehingga seharusnya menjadi fokus utama pemberdayaan. Proses pembelajaran pengolahan produk pertanian khususnya jagung bagi petani akan mampu merubah perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan)petani secara signifikan jika pemerintah melakukan pemberdayaan petani dengan menggunakan metode PPD karena mampu merubah perilaku petani dengan prosentase sebesar 90%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldonuary. (2012). Paradigma Penelitian Kuantitatif, aldonuary26blog: fisip-UNS.ac.id/29 Februari 2012.
- Aportadare, A. D., Florencio, A.A., Donato,S.F., Ernesto A.F., Cynthia, R.G., Mario, G.L., Agapito, M.L., Heidi, M.M., Themistocles, D.P., Florosito, Q.P., Dulce, Q.S., Sixto, Q.S., Manuel, M.T. (1991). *Training*, A How to Book for



- Trainers and Teachers, National Book Store. Inc. Publisher, Metro Manila, Philipines.
- Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Kupang. (2010). Potensi Produksi Jagung di NTT, Litbang Pertanian, Kupang.
- BPS. (2014). Badan Pusat Statistik Indoensdia. Jakarta.
- Burton, Robj. F. (2004). Reconceptualising the 'Behavioural approach' in Agricultural studies: A socio-psychological perspective, *Journal of Rural Studies* 20 (2004) 359-371, Elsevier, www.elsevier.com/locate/jrurstud
- Dinas Pertanian dan Perkebunnnan Provinsi NTT. (2015). Produksi Jagung di NTT, Kupang.
- Dinas Pertanian dan Perkebunnnan Provinsi NTT. (2016). Kebijakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di NTT, Kupang.
- Hickerson, F.J. dan John Midleton. (1995). Helping People Learn: A Module for Training, A Profesional Development Module, East West Communication Institute, Honolulu, Hawai.
- USDA. (2013). Produksi Jagung di Dunia, United States Development of Agriculture, Wasington DC. USA
- Ketti, K. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Adaptasi Petani di Desa Nusa dan Pukdale, Timor Barat, NTT. Skripsi Jurusan Agribisnis Faperta Undana. Kupang.
- Leedy, P. (1997). Practical Research, Planning and Design, Sixth Edition, Prentice-Hall.
- Levis, L.R. (2013). Metode Penelitian Perilaku Petani, Penerbit Seminari Tinggi, Ledalero, Maumere, Flores.
- Levis, L.R. (2015). Penuntun Praktis Bagi Penyuluh/Pendamping: Pelatihan Partisipatif Bagi Petani di NTT; Contoh Pelatihan Agribisnis Jagung, Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Malhotra, , N.K., John Hall, Mike Shaw, and Mike Crisp. (1996). Marketing Research, An Applied Orientation, Prentice-Hall, Australia Pty.Ltd.
- Soetrisno, Kh. (1988). Lebih Lanjut Tentang Latihan Yang Partisipatif, YIS, Solo.
- Stanis, M. dan Marsius. (2016). Evaluasi Dana PEM di Kota Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang.
- Yuliati, Y. (2011). Perubahan ekologis dan strategi adaptasi masyarakat di wilayah pegunungan Tengger, suatu kajian gender dan lingkungan, Universitas Beawijaya Press. Malang.
- Yekinni, O.T., dan Akinbile, L.A. (2014). Comparison of use of information and communication technologies between agricultural researchers and extension personnal in Nigeria, Agricultural Extension and Rural Development Department, University of Ibadan, Nigeria, *International Journal of Agricultural Extension*, Vol. 18(1): June, 2014, ISSN 1119-944X, <http://dx.doi.org/10.4314/jae.v18i1.2>,
- Zwane, E. dan Ephinia Kekana. (2014). The role of extension in agricultural cooperative development in Limpopo, Limpopo Depertment of Agriculture, South Africa, *International Journal of Agricultural Extension*, 02(02);, 147-152. ISSN 1119-944X, <http://dx.doi.org/10.4314/jae.v18i1.2>.



RANGKUMAN DISKUSI

Sesi I

Pembicara

1. Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian) . Judul: Strategi Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Mendukung Daya Saing Pertanian Era MEA)
2. Ir. Woro Indah Widiastuty, MT (...) Judul: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia di Era MEA)
3. Ir. Sujarwanto Dwiarmoko, M.Si (...) . Judul : (Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Persaingan Global di Era MEA

Moderator : Prof. Dr. Ir. Sunarru Samsi Hariadi, M.Si

Dalam acara seminar yang dipandu Prof. Sunarru, setiap pembicara diberi waktu 25 menit dan diakhiri sesi diskusi.

No	Narasumber	Durasi Waktu	Rangkuman Materi
1	Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev	09.40–10.23	- Aspek Regulasi menjadi penting dalam era MEA. - Bidang pertanian tidak diminati dibuktikan dengan minat generasi muda di bidang pertanian sangat sedikit karena itu penyuluhan di bidang pertanian harus digerakkan. - Di kecamatan ada BPP yang menjadi sentral untuk menggerakkan perluasan di bidang pertanian kepada masyarakat di sekitarnya. - Lambatnya eksekusi di tingkat atas membuat penyuluh kesulitan melaksanakan di lapangan. - Saat ini penyuluh diharapkan memiliki jiwa <i>entrepreneurship</i> agar bisa berjalan lebih baik dari sekarang. - Dana desa saat ini yang dikucurkan oleh pemerintah sangat besar. Dana tiap desa tersebut, 70%nya adalah sektor pertanian, maka para penyuluh bisa memanfaatkan hal ini untuk bersinergi dengan dana desa tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian. - Jargon yang ada di kalangan para penyuluh “Laku Susi” : Latihan dan Kunjungan serta



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Narasumber	Durasi Waktu	Rangkuman Materi
			Supervisi. Permasalahannya sering terjadi kekosongan setelah itu sehingga menjadi problem baru bagi masyarakat dan dunia penyuluhan. - Pendekatan yang dilakukan harus selalu berbasis kelompok bukan individu. - Perkembangan saat ini, 1620an alumni dan mahasiswa diberikan stimulan awal untuk bergerak dan bisa melakukan apa saja yang mereka senangi di bidang pertanian dengan dimentori pengusaha-pengusaha sukses. Dana yang dikucurkan sekitar 12 M. - Pembinaan Saka Taruna Bumi yang lebih diperhatikan. Saat ini para penyuluh sudah tidak diberi target untuk menumbuhkan tunas muda para pelaku agribisnis padahal seharusnya para penyuluh berani diberi target agar lebih maju dan mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. - Terbentuknya 16 Lembaga sertifikasi masih dirasa kurang untuk mendorong timbulnya para pelaku di bidang pertanian yang professional. - Pembahasan undang undang mengenai kelembagaan daerah masih pro dan kontra walaupun ada UU yang sudah jadi untuk hal ini. - Petani Indonesia dalam hal ini Ketua kelompok tani sebagian besar masih merasa “memiliki” kelompok tani, seharusnya kelompok tani milik semua anggota tani. Maka dengan segala problematikanya maka penyuluh harus memiliki daya juang lebih dengan memanfaatkan support dari pemerintah.
2	Ir. Woro Indah Widiastuty, MT	10.24-10.51	- Era MEA kita mengalami : Bebas barang, bebas investasi, bebas jasa dan bebas tenaga trampil. - Untuk dapat memanfaatkan hal itu maka kita harus menyiapkan SDM agar dapat bersaing dan tidak hanya sekedar menjadi penonton. - UMKM merupakan nadi perekonomian di daerah kurag lebih ada 5 juta unit yang tersebar di Indonesia. Saat ini ada 2888 unit koperasi di



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Narasumber	Durasi Waktu	Rangkuman Materi
			Indonesia. - UMKM dan SDM ini merupakan potensi untuk berkiprah secara global. - UMKM ini harus didorong berbasis digital. - Menurut Jokowi UMKM bisa menjadi basis baru dalam mendukung perekonomian Indonesia. Harapannya adalah GDP Indonesia bisa melebihi GDP Amerika karena mereka terkoneksi satu sama lain. - Gadget belum dipakai secara cerdas, kreatif dan produktif. - Peran teknologi Informasi memberikan perubahan besar didalam berbagai bidang. - Dunia usaha juga terimbas sangat besar oleh perkembangan IT karena itu diperlukan SDM yang handal untuk bisa mengoperasikan hal ini. Jika proses adopsi teknologinya tidak bagus maka tidak bisa dimaksimalkan di masyarakat. - Hal yang dilakukan Kominfo ada 3 poin : 1. Aware : masyarakat peduli akan ICT 2. Available : ketersediaan untuk masyarakat 3. Affordability : mampu dibeli oleh masyarakat - <i>Fiber optic</i> akan disediakan kominfo nantinya di tiap daerah dan akan diberikan bandwidth internet yang cukup besar. - 1000 saka, UMKM dibidang teknologi sedang dicanangkan oleh pemerintah - Relawan TIK sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk UMKM agar siap menghadapi MEA. Tidak bisa dilaksanakan secara sendiri karena kita harus menyiapkan kekuatan <i>digital</i> .
3	Ir. Sujarwanto Dwiarmoko,	10.52-11.24	- Indonesia menempati 1/5 khatulistiwa. Sementara Orbit edar yang paling efektif ada di Khatulistiwa.



M.Si			- Indonesia menjadi poros maritim penting. Dari barat negara-negara akan selalu melewati Indonesia, maka Indonesia akan diperebutkan. - Kita sedang mengalami era <i>proxy war</i>. - Defisit kita salah satunya di barang modal yaitu mesin-mesin industri, bahan baku dan bahan pendorong. - Pengembangan OVOP, dasar INGUB no 518/23456/Tahun 2011. Jadi ada <i>Local Resources Base</i>, One village one product tapi harus berbasis <i>local resources</i>. Harus berbasis dari bahan baku yang kita miliki. - Agar bisa menang dlm MEA : 1.Packaging dan segmentasi pemasaran 2.Investasi
4	Diskusi	11.24-12.35	Pertanyaan Bu Peni yang ditujukan Pak dadi dan Bu woro : 1. Bagaimana PT bisa berkontribusi dalam lembaga sertifikasi itu? 2. Apakah ada rencana mengurangi tenaga kerja asing (seperti Monash University yang sudah diijinkan masuk ke Indonesia) 3. Pelaksanaan dalam realitanya (ditujukan ke Pak sujarwanto)

Jawaban

Ada persyaratannya dan siapa saja bisa mendaftar karena ada uji kompetensi. Setiap tahun ada 5-6 LSP yang diijinkan beroperasi. Masing-masing LSP harus dikontrol karena kadang ada yang muncul tiba-tiba.

Kominfo mempunyai pelatihan utk LSP.

Tenaga asing sudah tidak bisa dihalangi untuk masuk Indonesia hanya saja yang bisa dilakukan adalah membendung derasny tenaga asing. Caranya adalah kita memenuhi dan memperbanyak standarisasi sehingga kita bisa jadi tuan rumah di Negara sendiri.

Regulasi kita memang masih menjadi PR bagi pengembangan negara.



MEA ini sebenarnya ingin membuat ASEAN menjadi macan dunia. MEA dirancang tidak untuk bersaing tetapi berkompromi.

Pertanyaan Pak Sapja (UNS) :

1. Seberapa jauh apresiasi birokrasi terhadap kegiatan penyuluhan?
2. Bagaimana implementasinya cara bekerja secara professional untuk mengubah pengguna gadget yang konsumtif menjadi produktif?

Jawaban

Birokrasi tidak diberikan ruang untuk memberikan apresiasi karena sudah dilakukan proses secara berulang-ulang dan belum berhasil. Di tingkat kecamatan tidak ada resistensi, karena penyuluh tetap jalan di tingkat kecamatan.

Kementrian dalam negeri selalu bilang efisiensi jika mengeluarkan aturan baru.

Pertanyaan Mbak Awi :

1. Bagaimana memasukkan penyuluhan di bidang kesehatan agar optimal karena sekarang maunya instan.
2. Bagaimana memanfaatkan unsur kemanusiaan dengan kemajuan teknologi?

Jawaban

Harus ada inisiasi terhadap regulasi yang digaungkan terus menerus sehingga bisa terdengar seperti penyuluhan dibidang pertanian juga selalu dilakukan secara terus menerus.

Pengembangan ICT yang bisa dilihat dari peluncuran jogja istimewa : smart city, smart village.

Pertanyaan Mas Adi (Perikanan):

1. Apakah ada strategi tambahan dalam penyuluhan setelah MEA?



2. Sertifikasi di bidang pertanian mengacu pada negara mana?
3. Menciptakan devender, mengkonsumsi produk yang tidak terjual

Jawaban Narasumber :

Akan menggunakan MRA. Mengumpulkan kalangan akademisi, pengusaha, praktisi.

Kemungkinan besar kedepannya 5000 lebih penyuluh dari sektor Perikanan malah tidak bisa terbayar.

Pendampingan terhadap Relawan ICT untuk para penyuluh untuk menggunakan aplikasinya.

Pemerintah daerah pun belum bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena itu kominfo mengalami kesulitan untuk mendidik orang-orang yang selalu berganti dan kominfo tidak mempunyai orang didaerah.

Relawan-relawan TIK akan direkrut berdampingan dengan tenaga pandu berdasarkan kebutuhan kampung sehingga broadband ekonomi akan tercipta karena digital. Jadi memanfaatkan masyarakat dengan teknologi.

Penyuluhan pertanian sendiri, penyuluhan perikanan sendiri, penyuluh kehutanan dan masih banyak penyuluhan di bidang lain, sehingga seharusnya pemerintah lebih memperhatikan birokrasinya, membuat regulasi yang mendukung.

Pertanyaan :

Jika pertanian di desa, kenapa kebijakannya harus dipegang mendagri?

Jawaban

UU 23 ini memuat peraturan pemda. Sehingga akhirnya pertanian masuk didalamnya.

Sekarang terkenal kata-kata miskin struktur kaya fungsi. Karena setelah otonomi ada beberapa *political will* yang mengikat keseluruhan daerah.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

5	Penutup (Closing Statement dari moderator)	12.35- 12.39	Perlu ada sinergi antar institusi, karena pertanian, perikanan, kelautan jadi satu walaupun dibawah kementerian yang berbeda. Dengan adanya IT harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan. Sinergi sektoral perlu lebih diperhatikan agar di era MEA kita bisa mandiri

Catatan tambahan

1. Materi dalam bentuk powerpoin dari pembicara terlampir. Kecuali Ibu woro presentasi disampaikan narasi.
2. Setelah acara seminar selesai dilanjutkan dengan acara foto bersama narasumber dengan pengelola prodi PKP.



DISKUSI KELOMPOK

Sub-Tema 1 : Penyuluhan dan Pengembangan SDM Mendukung Kemandirian dan Daya Saing di Era MEA

1. Notulen Seminar Paralel Ruang 406

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Anne Charina	Penguatan kelembagaan kelompok tani mangga gedong gincu dalam menghadapi MEA	Tanya: Mangga gedong gincu apakah sama dengan mangga apel? Jawab: Berbeda, cuaca, iklim sesuai dengan Jawa Barat, penampilan menarik, tapi merah tidak merata.
2	Nazariah	Pembinaan kelompok wanita tani (kwt) mendukung ketahanan pangan keluarga di Provinsi Aceh	Tanya: Teknik pemasaran sayur bagaimana? Bagi hasil? Jawab: Asal tersedia, harus ada agen penyalur. Ada bagi hasil untuk pembelajaran bersama dan usaha bersama.
3	Siti Sehat Tan	Analisis dampak pendampingan kawasan pengembangan padi di kecamatan tabir kabupaten merangin Provinsi Jambi	Tanya: Bagaimana tindak lanjut dari penerapan GPTT? Jawab: tidak sustainable, beberapa melakukan lalu meninggalkan. Beberapa memberlakukan sanksi bagi yang tidak menerapkan.

2. Notulen Seminar Paralel Ruang 407

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Adil Fadillah	Pentingnya merek bagi produk pertanian sebagai upaya meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia	Tanya: Seberapa besar proses biologi ditampilkan di label agar meyakinkan konsumen? Jawab: untuk menjaga konsistensi produk, bentuk, besarnya dan kandungan harus konsisten.
2	Rani Andriani	Peran penyuluh dalam meningkatkan daya saing kelompok tani mangga gedong gincu di Kabupaten Cirebon	Tanya: 1. Bagaimana model/konsep untuk bersaing (mangga gedong gincu)? 2. Peran penyuluh itu muncul dari penilaian petani atau bagaimana? Jawab: 1. Kualitas diperbaiki 2. Persepsi petani terhadap penyuluh



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

3. Notulen Seminar Paralel Ruang 409

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Septi wulandari	Tingkat perilaku petani kedelai melalui pendekatan ptt di Kampung Sanggaria Distrik Arso I Kabupaten Keerom	Tanya: penerapan pasti padi-kedelai-padi di Sumatera seperti apa? Jawab: karakteristik lahan dilihat dulu, pemasangan pathok, memperhatikan kedalaman air, pola curah hujan, pembuatan peta untuk pola tanam, dan rekomendasi pembuatan.
2	Setyo Rahyunanto	Kajian pelaksanaan slptt padi sawah di kelompok tani sari bumi Desa, Bumiharjo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri	Tanya: di Jawa tengah mengapa adopsi rendah padahal produksi tinggi? Jawab: dilihat dulu alasan kenapa jejer legowo diterapkan dan melihat analisis usahatani.

4. Notulen Seminar Paralel Ruang 410

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Hasan Sazali	Eksistensi penyuluh agama dalam membangun harmonisasi keberagaman (studi kasus penyuluh agama Kota Bogor)	Tanya: Apakah fenomena GKI Yasmin, Konflik Sunni-Syiah, apa yang mendasari konflik agama? Jawab: Banyak persoalan, namun fokus riset hanya penyuluh agama. Banyak PNS Penyuluh agama berlatar belakang tidak cocok. Walikota Bogor mengikuti suara mayoritas, bukan aspek regulasi
2	Agung Nugroho	Peran penyuluh sebaya dalam membentuk perilaku preventif kesehatan reproduksi remaja di Kabupaten Banyumas	Tanya: 1. Konsep Penyuluh Sebaya sangat menarik, apa yang sebaya? Secara umur, pengetahuan, atau apa? Apa kriteria penyuluh sebaya? Jawab: Sebaya : 13-24 Tahun Remaja Awal : SMP-SMA Remaja Akhir: Mahasiswa Media dan Internet berperan dalam memfilter informasi Penyuluh dipilih karena aktif dalam organisasi, bisa dari karang taruna atau karena OSIS



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
			2. Bagaimana teknis penunjukan penyuluh sebaya? Apakah kesamaan gender berpengaruh? Jawab: Kesamaan Gender harus diperhatikan dalam konseling interpersonal
3	Dina Lesmana	Studi tingkat pengetahuan menu gizi seimbang pada rumah tangga petani sayur	Tanya: Petani menanam sayur, namun tidak makan sayur. Makanan alternatif di lokasi penelitian apa? Jawab: Faktor budaya berpengaruh. Dominasi karbohidrat dalam menu makanan masyarakat lokal. Mayoritas suku Jawa, sehingga dominasi beras dalam konsumsi harian masyarakat
4	Rahima Kaliky	Profil sistem penyuluhan pertanian di Kabupaten Sleman	Tanya: 1. Apakah masih ada kendala di Sleman? Jawab: Pendekatan multivalensi penyuluhan menjadi kendala karena latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh 2. Kebijakan penyuluhan bermacam-macam dari Pusat hingga Daerah, tidak sesuai dengan UU Penyuluhan No.16 Tahun 2006 dan UU. No. 23. Bagaimana efektifitas kelembagaan penyuluhan menurut UU 16 Jawab: Ada yang taat UU dengan Bakorluh dan Bapeluh, namun ada yang tidak taat UU karena penyuluh masih berada di bawah Dinas Pertanian



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
5	Sri Peni Wastutiningsih	Penyuluhan pertanian di Indonesia: ritus dan habitus	Tanya: 1. Rekomendasi konkrit agar Penyuluhan menjadi Habitus? 2. Bukankan karena regulasi yang menyebabkan penyuluhan menjadi ritus? Jawab: Butuh regulasi yang jelas, namun kenyataannya regulasi tidak pernah jelas di Indonesia. Butuh regulasi yang holistik, egosektoral perlu dikurangi. Penyuluhan akan jadi Habitus kalau penyuluh rutin melakukan pendampingan

Sub-Tema 2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia di Era MEA

1. Notulen Seminar Paralel Ruang Sidang A

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Arifudin	Strategi komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan lahan gambut	Tanya: Solusi pemerintah? Jawab: membentuk badan restorasi gambut daerah, agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lahan gambut.
2	Subhan Kadir	Membuat penyuluhan menjadi menyenangkan	Tanya: bagaimana kalau penyuluh tidak memiliki sense of humor? Jawab: sense of humor tidak bisa dipaksakan tapi bisa dibangun/ dipelajari dengan membaca buku humor, atau tanpa itu bisa meningkatka di kelebihan lain seperti empati penyuluh.
3	Cut alma nuraflah	Efektivitas komunikasi kelompok dalam meningkatkan partisipasi pada program pemberdayaan masyarakat	Tanya: program ini berjalan bertahap dan berkelanjutan, bagaimana untuk menuju itu? Jawab: dibutuhkan pemberdayaan yang mandiri tanpa bergantung pada dana bergulir, dan itu tugas kita bersama.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

2. Notulen Seminar Paralel Ruang Sidang C

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Gontom C. Kifli	Proyeksi dan strategi pemberdayaan radio republik indonesia dalam pembangunan pertanian dalam konstelasi MEA	Tanya: teknis siaran seperti apa? Skema kerjasama seperti apa? Jawab: Diisi oleh BPTP, interaktif live atau rekaman. Skema kerjasama dengan MoU.
2	Paksi Mei penggalih	Perbandingan kontribusi surat kabar lokal dengan nasional dalam pemberitaan pertanian di DIY	Tanya: Pemberitaan pertanian seperti apa? Jawab: Pertanian secara luas, baik pertanian, perikanan, dkk
3	Ida Wiendardjati	Model komunikasi terapeutik sebagai bentuk pelayanan prima di puskesmas Depok 1 Sleman DIY	Tanya: Pelayanan BPJS masih sering ada konflik pada saat pendaftara di CS. Jawab: Sudah ada SOP BPJS yang tercantum di poster-poster di puskesmas.

Sub-Tema 3 : Pembangunan Masyarakat Perdesaan dalam Menghadapi Persaingan Global di Era MEA

1. Notulen Seminar Paralel Ruang 306

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Toti Rahayu	Peran sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat desa di era global	Tanya: Bagaimana caranya? Jawab: Perlu dibuat regulasi mengenai hal tersebut.

2. Notulen Seminar Paralel Ruang 307

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
1	Ita Kusuma Mahendrawati	Membangun keberdayaan pemulung berbasis aset di era pasar bebas (MEA)	Tanya: 1. Apa yang dimaksud dengan Certification Strategies? Jawab: dikaitkan dengan moratorium, sehingga



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama Pemakalah	Judul	Diskusi
			SDM, SDA, dan seni budasay bosa didokumentasikan dan bisa dijadikan aset untuk go-global. 2. Konsep apa yang digunakan untuk memberdayakan pemulung? Jawab: Aset fisik, SDM, finansial, dan modal sosial.
2	Titik Sumarti, Rokhani, Sriwulan Ferindian	Strategi pemberdayaan petani muda kopi wirausaha di Kabupaten Simalungun	Tanya: Adakah strategi untuk memberdayakan petani muda kopi? Jawab: Ada, yaitu berupa pendampingan, penyediaan peralatan, dan memberikan pemahaman terkait teknologi hilir.
3	Ahmad tarmizi yusa	Restorasi paradigma kud ditinjau dari aspek koordinasi lintas sektor dalam upaya memberdayakan masyarakat desa terhadap pemanfaatan peluang MEA melalui kebijakan usaha mikro	Tanya: saat ini koperasi berbentuk KSP (Perbankan). Bagaimana konsep reformasi yang dimaksud? Jawab: pelaksanaan manajemen KUD terhenti karena missed management. Kepala desa sebagai pengurus tidak memiliki waktu untuk mengelola KUD. Selain itu, tidak ada UU yang membahas mengenai koperasi desa sehingga perlu dibuat kebijakan mengenai koperasi sesuai geografis wilayahnya.
4	Agus ganjar runtikno	Revitalisasi peran keluarga dalam penanaman nilai nasionalisme di era masyarakat ekonomi asean (MEA)	Tanya: mengapa konsep keluarga semakin hilang? Jawab: Riset yang dilakukan adaah analisis isi jurnal terkait keluarga dan nasionalisme hanya sedikit yang mengkaji. Fungsi keluarga bergeser karena dampak dari kebijakan.



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

DAFTAR PESERTA

No	Nama	Instansi
1	Acep Hariri	Sekolah Pascasarjana UGM
2	Ade Intan Christian, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
3	Adil Fadillah	Sekolah Tinggi Ilmu Kesatuan
4	Agoeng Noegroho	Jurusan Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman
5	Agung Fajar I, ST.	Jurusan Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman
6	Agung Praptadi	BPDASHL BRANTAS
7	Agus Ganjar Runtiko	Sekolah Pascasarjana UGM
8	Ahmad Tarmizi Yusa	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
9	Akhmad Rouf, SP., MP.	Balai Penelitian Getas, Pusat Penelitian Karet
10	Amestina Matualage	Sekolah Pascasarjana UGM
11	Andi Warnaen, SST., M.I.Kom	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
12	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
13	Andrian Wira Syah Putra, S.ST., M.Sc.	Sekolah Pascasarjana UGM
14	Angga Sulistiono, SE., MM.	
15	Ani Dwi Wimatsari, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
16	Anne Charina, SP., MT.	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
17	Arifudin	Sekolah Pascasarjana UGM
18	Arta Kusumaningrum, SP., M.Sc.	Sekolah Pascasarjana UGM
19	Asikin CH	PERHIPTANI DIY
20	Ayu Adriyani, S.Sos.	Sekolah Pascasarjana UGM
21	Bambang Hertamto, SE., MM.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
22	Bekti Nur Utami, SP., M.Sc.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
23	Ben Ibratama	Sekolah Pascasarjana UGM
24	Budi Setyono, MP.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
25	Chanifah, SE.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
26	Clara Shinta Paskasari, SIP.	Sekolah Pascasarjana UGM
27	Cut Alma Nurafiah, MA.	FISIP Universitas Dharmawangsa Medan
28	Cut Rabiatal Adawiyah, SP.	Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
29	Dani Listyo Harto, SE.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
30	Dedy Kusnadi, SP., M.Si.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
31	Detia Tri Yunandar, SP. M.Si.	Sekolah Pascasarjana UGM
32	Dewi Wulansari	Sekretariat Kabinet RI
33	Dhanurseto Hadiprashada, S.IP., M.Si.	Sekolah Pascasarjana UGM
34	Diah Ajeng Purwani, S.Sos, M.Si	Sekolah Pascasarjana UGM
35	Diah Fitria Widhiningsih, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
36	Diah Perwitasari, S. Ant., M.Sc.	Provincial Coordinator-John Hopkins University Center for Communication Programs
37	Dina Lesmana, SP., MP.	Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
38	Dini Yuniarti	
39	Dr. agr. Ir. Sri Peni Wastutiningsih	Sekolah Pascasarjana UGM
40	Dr. Dafri, MA.	FISIPOL UGM
41	Dr. Gontom C. Kifli	BPTP Kalimantan Barat
42	Dr. Ir. Ajat Jatnika, M.Sc.	BBPP Lembang
43	Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si.	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana
44	Dr. Ir. Roso Witjaksono, MS.	Fakultas Pertanian UGM
45	Dr. Ir. Sri Subekti, M.Si.	Fakultas Pertanian Universitas Jember
46	Dr. Ir. Teguh Hari Santosa, MP.	Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember
47	Dr. Ir. Zainal Arifin, MS.	
48	Dr. Krisdyatmoko, M.Si.	FISIPOL UGM
49	Dr. M. Najib Husain, S.Sos., MS.	FISIP universitas halu oleo
50	Dr. Muh Fajar Pramono, M.Si.	ISID/ Unida Gontor
51	Dr. Muksin, SP., M.Si.	Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Jember
52	Dr. Najahan Musyafak, MA.	UIN Walisongo Semarang
53	Dr. Rahima Kaliky	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
54	Dr. Sapja Anantanyu, SP., M.Si.	Fakultas Petanian UNS
55	Dr. Suminah, M.Si.	Fakultas Petanian UNS
56	Dr. Suyoto, HS., M.Si., MMA.	Assek II
57	Dr. Tanti Kustiari, S.Sos., M.Si.	Pascasarjana Agribisnis Politeknik Negeri Jember
58	Dr. Toto Kuwato	Sekolah Pascasarjana UGM



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
59	Dra. Syakdiah, M.Si.	Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta
60	drh. Eko Kardiyo	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
61	drh. Harjuli Hatmono, M.Si.	Set Bakorluh Jateng
62	Drs. Akimi, MM.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang
63	Drs. Muhadi	Inspektorat Kabupaten Purworejo
64	Drs. Subagiyo, M.Si.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
65	Dwiningtyas Padmaningrum, M.Si	Sekolah Pascasarjana UGM
66	Dyah Panuntun Utami	Univestitas Muhammadiyah Purworejo
67	Eka Nur Jannah	Sekolah Pascasarjana UGM
68	Elih Juhdi Muslihat, SE., MM.	STPP Bogor
69	Elyvia Inayah, S.I.Kom	Sekolah Pascasarjana UGM
70	Endah Nurwahyuni, SP.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
71	Endang Sulastri, S.Pt., MA., Ph.D.	Fakultas Peternakan UGM
72	Eng. Quinilano Afonso Belo, M.Sc	Timor Leste
73	Eymal B. Demmallino	Jurusan Sosial Ekonomi Universitas Hassanudin
74	Fredik Lambertus Kollo, S.Pd.	Pascasarjana PPKN UNY
75	Gigin Anisolikhah, SP., M.Sc.	Sekolah Pascasarjana UGM
76	Hajaris Setyowati, SIP.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
77	Hasan Sazali	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
78	Hasto Prasetyo, S.Sos.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
79	Hedhi Sugrito Kuncoro	Magister Kebijakan Publik UGM
80	Hery Setiyawan	Universitas Diponegoro
81	Hikmah Nur Annisa, M. Sc.	Alumni Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan UGM
82	Ida Wiendardjati	Sekolah Pascasarjana UGM
83	Ir. Ari Widyastuti	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
84	Ir. Christine Sri Widiputranti, MP.	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta
85	Ir. Endah Ratnaningsih, MP.	Akademi Pertanian Yogyakarta
86	Ir. F. Trisakti Haryadi, M.Si., Ph.D	Fakultas Peternakan UGM
87	Ir. Leta Rafael Levis, M.Rur., Mnt.	Universitas Nusa Cendana Kupang



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
88	Ir. Murwati, MS.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
89	Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.DEV	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia
90	Ir. Siti Sehat Tan, M.Si.	Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
91	Ir. Supriyanto, M.Sc.	Fakultas Pertanian UGM
92	Ir. Supriyati, MP.	Akademi Pertanian Yogyakarta
93	Ir. Waluyo, M.Si.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
94	Ir. Woro Indah Widiastuty, MT.	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
95	Ir. Yuni Mundiari, MMA.	Dinas Pertanian Kabupaten Sleman
96	Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, MSi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
97	Isna Windani	Universitas Muhammadiyah Purworejo
98	Istiko Agus Wicaksono	Universitas Muhammadiyah Purworejo
99	Ita Kusuma Mahendrawati	Sekolah Pascasarjana UGM
100	Jumrana	Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari
101	Junardi	Sekolah Pascasarjana UGM
102	Kadhung Prayoga, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
103	Komalawati	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
104	Kurnia Tanjungsari	Sekolah Pascasarjana UGM
105	Kurnianita Triwidyastuti, S.Pi., MA.	Balai pengkajian teknologi pertanian yogyakarta
106	La Mani, SIP., M.Sc.	Sekolah Pascasarjana UGM
107	Latarus Fangohoi, SP., MP.	Universitas Brawijaya
108	Lewi	Set Bakorluh Jateng
109	Lukman Effendy	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
110	M. Zulkarnain Yuliarso	Sekolah Pascasarjana UGM
111	Mahirawan Setiadhi, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
112	Martha Umi Yuaningsih	Sekolah Pascasarjana UGM
113	Mesalia Kriska	Sekolah Pascasarjana UGM
114	Miftah Faridl Widhagdha, S.I.Kom.	Sekolah Pascasarjana UGM
115	Migie Handayani	Universitas Diponegoro
116	Muhammad Arief Budiman, SE., ME.	Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
117	Muhammad Fajri, STP.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
118	Muhammad Zulfi Ifani	Sekolah Pascasarjana UGM
119	Mukson	Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang
120	Mukti Ahmad Nurcahya, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
121	Mumuh Mulyana	Program Studi Manajemen Pemasaran STIE Kesatuan Bogor
122	Najmu Tsaqib Akhda	Sekolah Pascasarjana UGM
123	Natal Eko Purwanto	Inspektorat Kabupaten Purworejo
124	Nazariah, SP., M.Si	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh
125	Ni Wayan Sri Astiti	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana
126	Nuning Suswarini, SE.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
127	Nur Fitriana, SP., MP.	Sekolah Pascasarjana UGM
128	Nurasih Shamadiyah, M.Sc.	Fakultas pertanian universitas malikussaleh
129	Nurlaili, S.Pt., M.Sc.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
130	Nurul Anindyawati, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
131	Nurul Chamidah, M.I.Kom.	Sekolah Pascasarjana UGM
132	Oktiva Anggraini, SIP., M.Si.	Sekolah Pascasarjana UGM
133	Opik Mahendra, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
134	Paksi Mei Penggalih, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
135	Praptono Guno Adi	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang
136	Prima Dewi Dianing Putri, S.Sos.	Dinas Sosial Temanggung
137	Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, M.Sc.	Fakultas Pertanian UGM
138	Prof. Dr. Sunarru Samsi Hariadi, MS.	Sekolah Pascasarjana UGM
139	Prof. Ir. Suryo Purwono, MA.Sc., Ph.D.	Wakil Direktur Bidang Akademik, Pengembangan dan Kerja Sama Sekolah Pascasarjana UGM
140	Putu Arimbawa, SP., M.Si.	Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo
141	R. Ahmad Romadhoni, SP., S.Pt., M.Sc., Ph.D.	
142	Rani Andriani Budi Kusumo	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
143	Ratih Ineke Wati, SP., M.Agr., Ph.D.	Fakultas Pertanian UGM



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
144	Ratih Setyowati, S.P	Sekolah Pascasarjana UGM
145	Ratminah	Inspektorat Kabupaten Purworejo
146	Ratna Widiyati	Sekolah Pascasarjana UGM
147	Ratu Matahari, S.K.M., MA., M.Kes.	Universitas Ahmad Dahlan
148	Rennta Chrisdiana, M.Sc.	BPRS DIY
149	Renny Herawaty	Sekretariat Kabinet RI
150	Ria Widyaningrum	Sekolah Pascasarjana UGM
151	Rika Jayanti Malik, S.ST.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
152	Rina Astarika, SP., MP.	Sekolah Pascasarjana UGM
153	Rinto Nur Utomo, SH.	Magister kenotariatan UNS
154	Rita Zahara	Inspektorat Kabupaten Purworejo
155	Rokhani, SP., M.Si.	Fakultas Pertanian Universitas Jember
156	S. Bekti Istiyanto	Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed Purwokerto
157	S. Djuni Prihatin	FISIPOL UGM
158	Samuel H. Kallawaly, S.Sos.	Sekolah Pascasarjana UGM
159	Septi Wulandari, SP.	BPTP Papua
160	Setyo Budiyo, SP.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah
161	Setyo Rahyunanto, SP., MP.	Sekolah Pascasarjana UGM
162	Sherly Sisca Piay	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
163	Shinta Anggraeny, SP., M.Si.	Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi
164	Siwi Gayatri	Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang
165	Slameto	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
166	Sri Budhi Lestari	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta
167	Sri Kuning Retno Dewandini, SP., M.Sc.	Universitas Janabadra Yogyakarta
168	Sri Marwanti	Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
169	Sriroso Satmoko	Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang
170	Subejo, SP., M.Sc., Ph.D.	Sekolah Pascasarjana UGM
171	Subhan Kadir	Sekolah Pascasarjana UGM
172	Sukapti	FISIP Universitas Mulawarman
173	Sumaryanto	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang



SEMINAR NASIONAL

LUSTRUM KE-2

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

No	Nama	Instansi
174	Sutikno, SH., M.Acc.	Inspektorat Kabupaten Purworejo
175	Sutiyono, S.Pd.	Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
176	Sylvatra Puspita Sari, SP.	Sekolah Pascasarjana UGM
177	Tatag Handaka	Sekolah Pascasarjana UGM
178	Titi Antin, S.Sos., M.Si.	Sekolah Pascasarjana UGM
179	Titis Puspita Dewi, S.Sos	Sekolah Pascasarjana UGM
180	Titus Teguh Basuki	Sekolah Pascasarjana UGM
181	Toti Rahayu, S. Ikom. M.Sc.	Sekolah Pascasarjana UGM
182	Umi Mu'af W., S.Sos, M.Sc	Sekolah Pascasarjana UGM
183	Wahyu Windari, S.Pt., M.Sc.	Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
184	Wahyudi Hariyanto	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
185	Warda Halil	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
186	Wike Oktasari, SP., M.Sc	Sekolah Pascasarjana UGM
187	Winahyuning Cahyani, S.Sos	Sekolah Pascasarjana UGM
188	Yolanda Holle	Universitas Negeri Papua, Manokwari Papua Barat
189	Yudhi Harsatriadi Sandyatma, S.Sos., M.Sc.	Kementerian Pertanian
190	Yuli Dwi Praptanto	Inspektorat Kabupaten Purworejo
191	Zeni Mashlihati, S.E	Inspektorat Kabupaten Purworejo